# RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2024

## PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
## TAHUN ANGGARAN 2023



BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang:

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 263 ayat (4) dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang digunakan sebagai instrumen evaluasi pedoman dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Tahun 2024;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 5 Seri E);

11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Darah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Provinsi yang ditetapkan dengan Perda.
14. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijak bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

## BAB II
## RUANG LINGKUP, TUJUAN DAN FUNGSI

### Pasal 2

Ruang lingkup penyusunan RKPD Tahun 2024 meliputi:

a. kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
b. sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
c. arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota; dan
d. rencana kerja dan pendanaan daerah.

### Bagian Kedua
### Tujuan

### Pasal 3

RKPD Tahun 2024 disusun dalam rangka menciptakan integrasi, sinkronisasi, sinergitas pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

(1) RKPD Tahun 2024 berfungsi sebagai:
   a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2024;
   b. pedoman penyelarasan prioritas pembangunan Provinsi dengan Kabupaten/Kota; dan
   c. pedoman penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Provinsi.

(2) Dalam rangka perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf a, Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2024 untuk menyempurnakan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

BAB III

TAHAPAN PENYUSUNAN

Pasal 5

Penyusunan RKPD Tahun 2024 dilakukan melalui tahapan:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan;
d. pelaksanaan Musrenbang;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

Pasal 6

Kepala Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berkenaan dengan kesesuaiannya dengan RKPD, Renstra Perangkat Daerah serta tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 7

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen RKPD Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

# BAB IV
## PENGENDALIAN DAN EVALUASI

### Pasal 8

(1) Gubernur melalui Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2024.

(2) Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi:

a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dilakukan untuk menjamin dan memastikan bahwa RKPD telah disusun sesuai dengan tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan telah berpedoman pada RPJMD Provinsi serta mengacu pada RKP 2024;

b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dilakukan untuk menjamin prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan rancangan KUA dan PPAS sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD Tahun 2024; dan

c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah dilakukan untuk menilai daya serap anggaran dan capaian target kinerja program/kegiatan mencakup masukan, keluaran dan hasil yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Tahun 2024.

(3) Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijkan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf a, dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan RKPD Tahun 2024.

(4) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf b, dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2024.

(5) Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf c, dilaksanakan secara periodik setiap triwulan pada tahun 2024.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 26 Juni 2023

Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

SUGANDA PANDAPOTAN PASARIBU

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 26 Juni 2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

SUNARDI

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 NOMOR 8 SERI E

# DAFTAR ISI

**Halaman**


PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024 .....
DAFTAR ISI ..... i
DAFTAR TABEL ..... v
DAFTAR GAMBAR ..... xii
DAFTAR GRAFIK ..... xiv

**BAB I PENDAHULUAN** ..... I.1
1.1. Latar Belakang ..... I.1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan ..... I.5
1.3. Hubungan Antar Dokumen ..... I.7
1.4. Maksud dan Tujuan ..... I.8
1.5. Sistematika Dokumen RKPD ..... I.8

**BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH** ..... II.1
2.1. Kondisi Umum Daerah ..... II.1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi ..... II.1
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ..... II.41
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi ..... II.41
2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial ..... II.53
2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga ..... II.63
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum ..... II.68
2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib ..... II.68
2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar ..... II.87
2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan ..... II.121
2.1.3.4. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Umum ..... II.136
2.1.3.5. Fokus Layanan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan ..... II.137
2.1.3.6. Fokus Layanan Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan ..... II.139
2.1.3.7. Fokus Layanan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan ..... II.144
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah ..... II.146
2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ..... II.146
2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur ..... II.148
2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi ..... II.151
2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia ..... II.155
2.1.5. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ..... II.156

**Halaman**


2.1.6. Standar Pelayanan Minimal (SPM) ..... II.244
2.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD 2022 ..... II.271
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah ..... II.585
2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah ..... II.585
2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah ..... II.587
2.3.3. Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Tahun 2022 ..... II.607
2.4. Isu Strategis ..... II.614
2.5. Capaian Inovasi Daerah ..... II.625
2.5.1. Inovasi terkait Program Unggulan Pembangunan Daerah ..... II.627
2.5.2. Inovasi Tata Kelola Pemerintah Daerah ..... II.628
2.5.3. Inovasi Pelayanan Publik ..... II.629
2.5.4. Inovasi Daerah lainnya sesuai Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Daerah ..... II.629
2.6. Capaian Sustainable Development Goals (SDGs) ..... II.630

**BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH ..... III.1**
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ..... III.1
3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi ..... III.1
3.1.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ..... III.1
3.1.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi ..... III.4
3.1.1.3. PDRB Perkapita ..... III.6
3.1.1.4. Struktur Perekonomian Daerah ..... III.7
3.1.1.5. Ketimpangan Distribusi Pendapatan ..... III.8
3.1.1.6. Tingkat Inflasi ..... III.9
3.1.1.7. Tingkat Investasi ..... III.9
3.1.1.8. Ekspor dan Impor ..... III.10
3.1.2. Indikator Pembangunan Bidang Kesejahteraan ..... III.11
3.1.2.1. Pengangguran ..... III.11
3.1.2.2. Kemiskinan ..... III.12
3.1.2.3. Ketimpangan Regional ..... III.13
3.1.2.4. Ketimpangan Distribusi Pendapatan ..... III.14
3.1.3. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023 dan 2024 ..... III.14
3.1.3.1. Tantangan Perekonomian Global dan Nasional 2023 dan 2024 ..... III.14
3.1.3.2. Tantangan Perekonomian Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 dan 2024 ..... III.17
3.1.3.3. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024 ..... III.18
3.1.4. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ..... III.19
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ..... III.20
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan ..... III.22

**Halaman**


3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ..... III.25
3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ..... III.25
3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah ..... III.27
3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ..... III.32

**BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH** ..... IV.1
4.1. Tema, Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Daerah ..... IV.1
4.1.1. Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024 ..... IV.1
4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah ..... IV.17
4.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Kerja Pembangunan Daerah ..... IV.21
4.2. Prioritas Pembangunan Daerah dan Sasaran pembangunan ..... IV.26
4.2.1. Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2024 ..... IV.26
4.2.2. Penyelarasan Permasalahan Pembangunan, Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2024 ..... IV.70
4.2.3. Prioritas Pembangunan Nasional, Program Prioritas, Arah Kebijakan Nasional dan Program Pembangunan Daerah ..... IV.71
4.2.4. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) ..... IV.74
4.2.5. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan SDGs ..... IV.92
4.2.6. Strategi Dan Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan Pembangunan Lintas Bidang Melalui Pendekatan Holistik-Tematik, Integratif Dan Spasial ..... IV.119

**BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA** ..... V.1
5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan ..... V.1
5.1.1. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Pangkalpinang ..... V.5
5.1.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bangka ..... V.9
5.1.3. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bangka Barat ..... V.14
5.1.4. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bangka Tengah ..... V.24
5.1.5. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bangka Selatan ..... V.33
5.1.6. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Belitung ..... V.42
5.1.7. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Belitung Timur ..... V.56
5.2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ..... V.66
5.2.1. Indikasi Program Utama Lima Tahunan RTRW Kepulauan Bangka Belitung ..... V.67

**BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH** ..... VI.1
6.1. Pagu Indikatif Perangkat Daerah ..... VI.3
6.2. Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD ..... VI.5

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH** ..... VII.1
7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) ..... VII.1
7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) ..... VII.2

**Halaman**

**BAB VIII PENUTUP** ..... VIII.1

# DAFTAR TABEL

**Halaman**


| | | | |
|---|---|---|---|
| Tabel | II.1 | Luas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 | II.3 |
| Tabel | II.2 | Luas Lahan menurut Penggunaan Lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 | II.5 |
| Tabel | II.3 | Sistem Pelabuhan Laut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | II.9 |
| Tabel | II.4 | Rekapitulasi Proyeksi Kebutuhan Daya Listrik 2010 – 2030– KVA | II.11 |
| Tabel | II.5 | Rasio Desa Berlistrik PLN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | II.12 |
| Tabel | II.6 | Potensi Energi Baru dan Terbarukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | II.13 |
| Tabel | II.7 | Rekapitulasi Proyeksi Kebutuhan Sambungan Telepon 2010 – 2030 | II.14 |
| Tabel | II.8 | Jenis dan Luas Penggunaan Lahan di Prov. Kep. Bangka Belitung 2015-2018 (Ha) | II.21 |
| Tabel | II.9 | Potensi Mineral Logam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 (ton) | II.27 |
| Tabel | II.10 | Potensi Mineral Bukan Logam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 (ton) | II.27 |
| Tabel | II.11 | Kawasan Peruntukan Industri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | II.28 |
| Tabel | II.12 | Wilayah yang Berpotensi Rawan Bencana dan Jenis Bencana Yang Terjadi Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | II.33 |
| Tabel | II.13 | Data Bencana Alam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 | II.34 |
| Tabel | II.14 | Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2021 | II.35 |
| Tabel | II.15 | Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021 | II.36 |
| Tabel | II.16 | Jumlah Penduduk Kepulauan Bangka Belitung Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2021 | II.36 |
| Tabel | II.17 | PDRB Tahun 2018 –2022 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Milyar Rupiah) | II.38 |
| Tabel | II.18 | Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 – 2022 | II.39 |
| Tabel | II.19 | Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2018–2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Miliar Rupiah) | II.40 |
| Tabel | II.20 | Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 – 2022 | II.42 |
| Tabel | II.21 | Perkembangan PDRB/PDB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kabupaten/Kota/Provinsi/Nasional (miliar/triliun rupiah) Tahun 2018 – 2022 | II.43 |

**Halaman**


Tabel II.22 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota/Provinsi/Nasional (Miliar/Triliun Rupiah) Tahun 2018–2022 ..... II.43
Tabel II.23 Andil/Sumbangan Kelompok Pengeluaran Terhadap Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2019 ..... II.45
Tabel II.24 Andil/Sumbangan Kelompok Pengeluaran Terhadap Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2021 ..... II.46
Tabel II.25 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Bangka Belitung II.50
Tabel II.26 Perkembangan Kemiskinan Tahun 2017-2021 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ..... II.50
Tabel II.27 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota dan Desa Tahun 2017-2021 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ..... II.51
Tabel II.28 Data Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017-2021 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ..... II.52
Tabel II.29 Perkembangan Tingkat Pengangguran dan TPAK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2021 ..... II.52
Tabel II.30 Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2023 ..... II.55
Tabel II.31 Rata-Rata Lama Sekolah Sekolah Penduduk Usia ≥ 25 tahun Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional 2018-2023 ..... II.56
Tabel II.32 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia ≥15 tahun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2018 - 2022 ..... II.57
Tabel II.33 Usia Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019-2023 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ..... II.58
Tabel II.34 Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017 s.d. 2021 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ..... II.59
Tabel II.35 Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup Tahun 2017-2021 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ..... II.59
Tabel II.36 Perkembangan Persentase Balita Stunting Tahun 2017 s.d. 2021 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ..... II.61
Tabel II.37 Perkembangan Ketenagakerjaan Tahun 2018-2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ..... II.62
Tabel II.38 Data Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2017 s.d. 2021 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ..... II.62
Tabel II.39 Perkembangan Seni dan Budaya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2021 ..... II.63
Tabel II.40 Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Atletik dan Sepak Bola Tahun 2016 s.d. 2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ..... II.64
Tabel II.41 Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Bola Voli dan Bulu Tangkis Tahun 2016 s.d. 2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ..... II.65
Tabel II.42 Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Bola Basket Tahun 2016 s.d. 2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ..... II.66

**Halaman**


Tabel II.43 Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Pencak Silat Tahun 2016 s.d. 2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ..... II.66
Tabel II.44 Perkembangan Sarana dan Prasarana Olahraga Tahun 2016 s.d. 2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung..... II.67
Tabel II.45 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2018- 2022 ..... II.68
Tabel II.46 Angka Partisipasi Kasar Jenjang SMA/SMK/MA/Paket C Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2018-2022 ..... II.69
Tabel II.47 APM SM/SMK/MA/Paket C Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2018-2022 ..... II.70
Tabel II.48 Jumlah Siswa Putus Sekolah Jenjang SMA/SMK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung..... II.73
Tabel II.49 Indeks Pembangunan Kebudayaan tingkat Provinsi menurut Dimensi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2020 ..... II.111
Tabel II.50 Dimensi Ekonomi Budaya Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018-2021..... II.112
Tabel II.51 Dimensi Pendidikan Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018-2021..... II.112
Tabel II.52 Dimensi Ketahanan Sosial Budaya Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018-2021..... II.113
Tabel II.53 Dimensi Warisan Budaya Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018-2021 ..... II.114
Tabel II.54 Dimensi Ekspresi Budaya Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018-2021..... II.115
Tabel II.55 Dimensi Budaya Literasi dan Dimensi Gender Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018-2021 ..... II.116
Tabel II.56 Jumlah UMKM Yang Diberdayakan ..... II.120
Tabel II.57 Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2021 ..... II.134
Tabel II.58 Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2018 s.d 2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung..... II.147
Tabel II.59 Persentase Konsumsi RT Non-Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022..... II.147
Tabel II.60 Indikator Pengeluaran Non Pangan Perkapita Tahun 2022 menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 ..... II.148
Tabel II.61 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2021 ..... II.148
Tabel II.62 Jumlah Penumpang Angkutan (Jiwa/Orang)..... II.149
Tabel II.63 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ..... II.149
Tabel II.64 Rasio luas Wilayah Produktif Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung..... II.150
Tabel II.65 Infrastruktur dan Fasilitas Penunjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung..... II.151

**Halaman**


Tabel II.66 Jumlah Peraturan Daerah yang mendukung Iklim Investasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ..... II.153
Tabel II.67 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2016 s.d 2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ..... II.155
Tabel II.68 MATRIKS 1 - SASARAN CAPAIAN INDIKATOR : Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan ..... II.159
Tabel II.69 MATRIKS 1 - SASARAN CAPAIAN INDIKATOR : Tujuan 1 Tanpa Kelaparan II.163
Tabel II.70 Jumlah kasus HIV dan AIDS 2016-2019 ..... II.169
Tabel II.71 Jumlah Tenaga Kesehatan di Prov. Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2020 ..... II.182
Tabel II.72 MATRIKS 1 - SASARAN CAPAIAN INDIKATOR : Tujuan 1 Kehidupan Sehat dan Sejahtera ..... II.183
Tabel II.73 MATRIKS 1 - SASARAN CAPAIAN INDIKATOR : Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas ..... II.193
Tabel II.74 MATRIKS 1 - SASARAN CAPAIAN INDIKATOR : Tujuan 5 Keseteraan Gender ..... II.201
Tabel II.75 MATRIKS 1 - SASARAN CAPAIAN INDIKATOR : Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak ..... II.204
Tabel II.76 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Fasilitas Tempat Buang Air Besar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 ..... II.206
Tabel II.77 Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 ..... II.207
Tabel II.78 MATRIKS I SASARAN CAPAIAN INDIKATOR : Tujuan 6 Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua ..... II.210
Tabel II.79 MATRIKS I SASARAN CAPAIAN INDIKATOR : : Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau ..... II.215
Tabel II.80 MATRIKS I SASARAN CAPAIAN INDIKATOR : Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi ..... II.219
Tabel II.81 MATRIKS I SASARAN CAPAIAN INDIKATOR : Tujuan 9 Kota dan Pemukiman Yang Berkelanjutan ..... II.223
Tabel II.82 MATRIKS I SASARAN CAPAIAN INDIKATOR : Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan ..... II.229
Tabel II.83 MATRIKS I SASARAN CAPAIAN INDIKATOR : Tujuan 11 Kota dan Pemukiman Yang Berkelanjutan ..... II.221
Tabel II.84 MATRIKS I SASARAN CAPAIAN INDIKATOR : Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab ..... II.233
Tabel II.85 MATRIKS I SASARAN CAPAIAN INDIKATOR : Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim ..... II.234
Tabel II.86 MATRIKS I SASARAN CAPAIAN INDIKATOR : Tujuan 14 Ekosistem Lautan II.235
Tabel II.87 MATRIKS I SASARAN CAPAIAN INDIKATOR : Tujuan 15 Ekosistem Darat . II.237
Tabel II.88 MATRIKS I SASARAN CAPAIAN INDIKATOR : Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang tangguh ..... II.242

**Halaman**


Tabel II.89 MATRIKS I SASARAN CAPAIAN INDIKATOR : Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan ..... II.244
Tabel II.90 Target Pencapaian SPM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 ..... II.245
Tabel II.91 Realisasi Pencapaian SPM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 ..... II.246
Tabel II.92 Alokasi Anggaran Penerapan SPM Urusan Pendidikan Tahun 2022 ..... II.248
Tabel II.93 Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Pendidikan Tahun 2022 ..... II.250
Tabel II.94 Target Pencapaian SPM Urusan Kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2022 ..... II.251
Tabel II.95 Realisasi Target Pencapaian SPM Urusan Kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2022 ..... II.253
Tabel II.96 Alokasi Anggaran Penerapan SPM Urusan Kesehatan Tahun 2022 ..... II.254
Tabel II.97 Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Kesehatan Tahun 2022 ..... II.254
Tabel II.98 Target Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2022 ..... II.255
Tabel II.99 Realisasi Target Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2022 ..... II.256
Tabel II.100 Alokasi Anggaran Penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2022 II.257
Tabel II.101 Alokasi Anggaran Penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2022 II.258
Tabel II.102 Target Pencapaian SPM Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2022 ..... II.258
Tabel II.103 Realisasi Target Pencapaian SPM Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2022 ..... II.259
Tabel II.104 Alokasi Anggaran Penerapan SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022 ..... II.260
Tabel II.105 Target Pencapaian SPM Urusan Sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2022 ..... II.261
Tabel II.106 Realisasi Target Pencapaian SPM Urusan Sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2022 ..... II.265
Tabel II.107 Alokasi Anggaran Penerapan SPM Urusan Sosial Tahun 2022 ..... II.269
Tabel II.108 Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sd TW IV Tahun 2022 ..... II.271
Tabel II.109 Evaluasi Hasil RKPD Sampai Dengan Triwulan IV tahun 2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ..... II.274
Tabel II.110 Inovasi Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 ..... II.625
Tabel III.1 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2023 (Milyar rupiah) ..... III.2
Tabel III.2 PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2023 (Milyar Rupiah) ..... III.4

**Halaman**


Tabel III.3 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 – 2024 ..... III.5
Tabel III.4 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (milyar) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 – 2023 ..... III.6
Tabel III.5 Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020–2024 (dalam persen) ..... III.8
Tabel III.6 Perkembangan Realisasi Investasi Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018–2024 ..... III.10
Tabel III.7 Perkembangan Ekspor Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020- 2024 (dalam juta US$) ..... III.10
Tabel III.8 Perkembangan Impor Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020- 2024 (dalam juta US$) ..... III.11
Tabel III.9 Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (persen) dan Jumlah Pengangguran (jiwa) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019–2024 ..... III.12
Tabel III.10 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 s.d. Tahun 2024 ..... III.24
Tabel III.11 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 s.d. Tahun 2024 ..... III.30
Tabel III.12 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2021 s.d. Tahun 2024 ..... III.33
Tabel IV.1 Ketersediaan dukungan program daerah untuk mendukung program prioritas Nasional (PN) RPJMN sesuai kewenangan daerah ..... IV.4
Tabel IV.2 Tujuan, Indikator Kerja Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran Perubahan RPD 2023–2026 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ..... IV.18
Tabel IV.3 Target Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 ..... IV.19
Tabel IV.4 Target Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2024 ..... IV.20
Tabel IV.5 Target Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2024 ..... IV.20
Tabel IV.6 Hubungan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 ..... IV.22
Tabel IV.7 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah RKPD 2024 dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPD ..... IV.30
Tabel IV.8 Sasaran dan Program Prioritas Yang Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah /RKPD 2024 ..... IV.36
Tabel IV.9 Keselarasan Antara permasalahan, isu strategis dan Prioritas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 ..... IV.70
Tabel IV.10 Tabel Keterkaitan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan PN RPJMN ..... IV.71
Tabel IV.11 Keselarasan Prioritas Nasional Dalam RKP 2024 Dengan Prioritas Pembangunan Daerah Dalam RKPD 2024 ..... IV.73
Tabel IV.12 Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) ..... IV.74
Tabel IV.13 Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan SDGs ..... IV.92

**Halaman**


Tabel IV.14 Strategi Dan Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan Pembangunan Lintas Bidang Melalui Pendekatan Holistik-Tematik, Integratif Dan Spasial ..... IV.119
Tabel IV.15 Hasil kesepakatan Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan (Rakortekbang) Tahun 2023 ..... IV.153
Tabel V.1 Perkembangan indikator Makro Pembangunan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ..... V.2
Tabel V.2 Sasaran Pokok Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 ..... V.3
Tabel V.3 Sasaran Arah Kebijakan dan Program Prioritas di Kota Pangkalpinang Tahun 2024 ..... V.5
Tabel V.4 Sasaran. Arah Kebijakan dan Program Prioritas di Kabupaten Bangka Tahun 2024 ..... V.9
Tabel V.5 Sasaran, Arah Kebijakan dan Program Prioritas di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 ..... V.15
Tabel V.6 Sasaran Arah Kebijakan dan Program Prioritas di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 ..... V.24
Tabel V.7 Sasaran. Arah Kebijakan dan Program Prioritas di Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 ..... V.33
Tabel V.8 Sasaran, Arah Kebijakan dan Program Prioritas di Kabupaten Belitung Tahun 2024 ..... V.43
Tabel V.9 Sasaran. Arah Kebijakan dan Program Prioritas di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 ..... V.57
Tabel V.10 Indikator Program Utama Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 2014-2034 Tahapan 2021-2034 ..... V.69
Tabel V.11 Indikasi Program Pengembangan Pariwisata Daerah ..... V.95
Tabel VI.1 Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Provinsi Bangka Belitung Tahun 2024 ..... VI. 2
Tabel VI.2 Rekapitulasi Pagu Indikatif Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 ..... VI. 3
Tabel VI.3 Pokok Pikiran DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 .... VI. 5
Tabel VII.1 Indikator Kinerja Utama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 ..... VII. 1
Tabel VII.2 Pelaporan IKK 2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ..... VII. 3
Tabel VII.3 Indikator Kinerja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 ..... VII. 29
Tabel VII.4 Sasaran Pokok Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 ..... VII. 41

# DAFTAR GAMBAR

**Halaman**


| | | |
|---|---|---|
| Gambar I.1 | Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi | I.4 |
| Gambar I.2 | Hubungan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, Daerah, dan Perangkat Daerah | I.8 |
| Gambar II.1 | Gambar Lokasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | II.1 |
| Gambar II.2 | Peta Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) | II.2 |
| Gambar II.3 | Peta Administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | II.2 |
| Gambar II.4 | Peta Penutupan Lahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 | II.6 |
| Gambar II.5 | Traffic Flow pada Ruas Jalan Nasional dan Provinsi pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | II.8 |
| Gambar II.6 | Pengembangan Jalur Pelayaran Laut | II.9 |
| Gambar II.7 | Kondisi Kelistrikan Bangka Belitung | II.10 |
| Gambar II.8 | Rencana Pembangunan Transmisi Bangka Belitung 2017-2026 (RUPTL) | II.11 |
| Gambar II.9 | Energi Baru dan Terbarukan | II.12 |
| Gambar II.10 | Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | II.15 |
| Gambar II.11 | Sebaran Hutan Produksi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | II.19 |
| Gambar II.12 | Arahan Indikatif Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi dalam RKTP Tahun 2014-2034 | II.20 |
| Gambar II.13 | Rencana Alokasi Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040 | II.24 |
| Gambar II.14 | Peta Kawasan Tambang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | II.26 |
| Gambar II.15 | Potensi Pengembangan Pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | II.29 |
| Gambar II.16 | Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | II.30 |
| Gambar II.17 | Peta Kawasan Strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | II.31 |
| Gambar II.18 | Peta Rawan Bencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | II.33 |
| Gambar II.19 | Isu Strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 | II.614 |
| Gambar IV.1 | 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 | IV.2 |
| Gambar IV.2 | Posisi Dokumen RKPD Tahun 2024 Terhadap RPJPD dan Tahun 2016-2023 | IV.3 |
| Gambar IV.3 | Posisi Dokumen RKPD Tahun 2024 Terhadap RPD 2023-2026 | IV.3 |
| Gambar IV.4 | Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 | IV.28 |
| Gambar IV.5 | Prioritas Pembangunan Pendukung Daerah Tahun 2024 | IV.28 |
| Gambar V.1 | Perkembangan indikator Makro Pembangunan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | V.1 |
| Gambar V.2 | Sasaran Pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2024 | V.5 |
| Gambar V.3 | Sasaran Pembangunan Kabupaten Bangka Tahun 2024 | V.9 |
| Gambar V.4 | Sasaran Pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 | V.15 |

**Halaman**


| | | |
|---|---|---|
| Gambar V.5 | Sasaran Pembangunan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024..... | V.24 |
| Gambar V.6 | Sasaran Pembangunan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024..... | V.33 |
| Gambar V.7 | Sasaran Pembangunan Kabupaten Belitung Tahun 2024 ..... | V.43 |
| Gambar V.8 | Sasaran Pembangunan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024..... | V.56 |

# DAFTAR GRAFIK

**Halaman**


| | | | |
|---|---|---|---|
| Grafik | II.1 | Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 | II.35 |
| Grafik | II.2 | Piramida Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Semester II Tahun 2021 | II.37 |
| Grafik | II.3 | Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022 | II.39 |
| Grafik | II.4 | PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ribu rupiah) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022 | II.44 |
| Grafik | II.5 | Tingkat Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022 | II.45 |
| Grafik | II.6 | Perbandingan Inflasi Pangkalpinang, Tanjung Pandan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Nasional 2018 – 2022 | II.47 |
| Grafik | II.7 | Indeks Gini Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022 | II.48 |
| Grafik | II.8 | Indeks Williamson Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022 | II.48 |
| Grafik | II.9 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2018-2023 | II.49 |
| Grafik | II.10 | Angka Melek Huruf Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional (2017-2022) | II.54 |
| Grafik | II.11 | Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional (2017-2022) | II.55 |
| Grafik | II.12 | Persentase Stunting Tahun 2021 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | II.60 |
| Grafik | II.13 | SMA/SMK/SLB Terakreditasi Provisi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 | II.71 |
| Grafik | II.14 | Jumlah Guru Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2022 | II.72 |
| Grafik | II.15 | Pendidikan Terakhir dan Status Kepegawaian Guru | II.73 |
| Grafik | II.16 | Jumlah SDM Kesehatan Yang Ditingkatkan Kompetensinya | II.74 |
| Grafik | II.17 | Akreditasi Rumah Sakit | II.75 |
| Grafik | II.18 | Proporsi Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap | II.76 |
| Grafik | II.19 | Rasio Irigasi | II.77 |
| Grafik | II.20 | Persentase Penyediaan Air Baku dan Peningkatan Luas Kawasan Yang Terlindungi Dari Daya Rusak Air | II.78 |
| Grafik | II.21 | Persentase Rumah Layak Huni (%) | II.79 |
| Grafik | II.22 | Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap Air Minum Layak | II.80 |
| Grafik | II.23 | Akses Sanitasi Layak (%) | II.80 |
| Grafik | II.24 | Pananganan Sampah Perkotaan (%) | II.81 |
| Grafik | II.25 | Indeks Risiko Bencana | II.82 |
| Grafik | II.26 | Indeks Ketahanan Daerah | II.83 |

**Halaman**


| | | | |
|---|---|---|---|
| Grafik | II.27 | Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Yang Ditindaklanjuti | II.84 |
| Grafik | II.28 | Persentase Fakir Miskin Yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial | II.85 |
| Grafik | II.29 | Jumlah PMKS/PSKS Yang Terberdayakan | II.86 |
| Grafik | II.30 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | II.87 |
| Grafik | II.31 | Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) | II.88 |
| Grafik | II.32 | Indeks Perlindungan Anak (IPA) | II.89 |
| Grafik | II.33 | Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan | II.90 |
| Grafik | II.34 | Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan | II.90 |
| Grafik | II.35 | Capaian Skor PPH Ketersediaan dan PPH Konsumsi | II.91 |
| Grafik | II.36 | Persentase Penduduk Rawan Pangan | II.92 |
| Grafik | II.37 | Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah | II.93 |
| Grafik | II.38 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | II.94 |
| Grafik | II.39 | Persentase Aduan Masyarakat Yang Diverifikasi | II.95 |
| Grafik | II.40 | Persentase Peningkatan Ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | II.96 |
| Grafik | II.41 | Izin Lingkungan Yang Dikeluarkan Provinsi | II.97 |
| Grafik | II.42 | Indeks Pembangunan Keluarga | II.98 |
| Grafik | II.43 | *Total Fertility Rate* | II.99 |
| Grafik | II.44 | Kampung Keluarga Berencana (KB) Berkualitas | II.100 |
| Grafik | II.45 | Persentase Cakupan Administrasi Kependudukan | II.100 |
| Grafik | II.46 | Persentase Lembaga Permberdayaan Masyarakat Yang Aktif | II.101 |
| Grafik | II.47 | Persentase Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan (%) | II.102 |
| Grafik | II.48 | Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | II.103 |
| Grafik | II.49 | Nilai Investasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022 | II.104 |
| Grafik | II.50 | Jumlah Data Perizinan | II.104 |
| Grafik | II.51 | Indeks Pembangunan Pemuda | II.105 |
| Grafik | II.52 | Indeks Pembangunan Olahraga | II.106 |
| Grafik | II.53 | Layanan Infrastruktur Teknologi dan Kapasitas Layanan Publik Pemerintah Berbasis E-Government | II.107 |
| Grafik | II.54 | Persentase Data dan Informasi Statistik Yang Digunakan Untuk Perencanaan dan Pengambilan Kebijakan | II.108 |
| Grafik | II.55 | Portal Satu Data Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel Satu Data) | II.109 |
| Grafik | II.56 | Indeks Kematangan Keamanan Informasi | II.109 |
| Grafik | II.57 | Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan dan Dikelola | II.110 |
| Grafik | II.58 | Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2018-2021 | II.111 |
| Grafik | II.59 | Persentase Perpustakaan Yang Dibina | II.117 |
| Grafik | II.60 | Koleksi Buku Perpustakaan | II.118 |
| Grafik | II.61 | Penyelenggaraan Kearsipan Sesuai Standar Baku | II.119 |

**Halaman**


| | | | |
|---|---|---|---|
| Grafik | II.62 | Persentase Koperasi Aktif | II.119 |
| Grafik | II.63 | Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan dalam PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | II.121 |
| Grafik | II.64 | Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap | II.122 |
| Grafik | II.65 | Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya | II.122 |
| Grafik | II.66 | Pertumbuhan Produksi Perikanan | II.123 |
| Grafik | II.67 | Jenis kegiatan yang telah diterbitkan persetujuannya | II.123 |
| Grafik | II.68 | Jenis kegiatan berdasarkan perizinannya | II.124 |
| Grafik | II.69 | Pertumbuhan Ketaatan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Perundang-undangan | II.124 |
| Grafik | II.70 | Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan | II.125 |
| Grafik | II.71 | Rasio Sarana dan Prasarana Pertanian | II.126 |
| Grafik | II.72 | Produksi Komoditi Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura | II.126 |
| Grafik | II.73 | Produksi Lada dan Karet | II.128 |
| Grafik | II.74 | Produksi Sapi dan Ayam | II.129 |
| Grafik | II.75 | Persentase Luas Kawasan Perhutanan Sosial | II.130 |
| Grafik | II.76 | Persentase Daerah Aliran Sungai Yang Dikelola | II.131 |
| Grafik | II.77 | Rasio Elektrifikasi (%) | II.132 |
| Grafik | II.78 | Neraca Perdagangan Luar Negeri Tahun 2017 s.d. 2021 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (juta U$) | II.133 |
| Grafik | II.79 | Pertumbuhan, Kontribusi Sektoral dan Tenaga kerja Sektor Industri Pengolahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2021 | II.134 |
| Grafik | II.80 | Jumlah Satuan Kawasan Transmigrasi | II.136 |
| Grafik | II.81 | Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | II.136 |
| Grafik | II.82 | Nilai SAKIP | II.137 |
| Grafik | II.83 | Persentase Tingkat Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan | II.139 |
| Grafik | II.84 | Persentase konsistensi program pembangunan di RKPD dengan RPJMD dan Renstra dengan RPJMD | II.140 |
| Grafik | II.85 | Indeks Inovasi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2021 | II.141 |
| Grafik | II.85 | Indeks Profesionalitas ASN | II.142 |
| Grafik | II.86 | Opini BPK | II.142 |
| Grafik | II.87 | Persentase Peningkatan Pertumbuhan PAD | II.143 |
| Grafik | II.88 | Persentase Jumlah Pelayanan Penghubung Yang Terlaksana | II.144 |
| Grafik | II.89 | Indeks Reformasi Birokrasi | II.145 |
| Grafik | II.90 | Persentase Meningkatnya Fungsi Lembaga DPRD | II.145 |
| Grafik | II.91 | Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita (ribu rupiah) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022 | II.146 |
| Grafik | II.92 | Angka Kriminalitas | II.151 |
| Grafik | II.93 | Jumlah Demo | II.152 |
| Grafik | II.94 | Pajak Daerah | II.154 |
| Grafik | II.95 | Rasio Ketergantungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | II.156 |
| Grafik | II.96 | Jumlah kasus TB Tahun 2016-2019 | II.170 |

**Halaman**


| | | | |
|---|---|---|---|
| Grafik | II.97 | Persentase Kab/Kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok menurut Provinsi Tahun 2020 “Data termutakhir” | II.176 |
| Grafik | II.98 | Persentase Kab/Kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok menurut Provinsi Tahun 2020 “Data termutakhir” | II.176 |
| Grafik | II.99 | Persentase Kab/Kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok menurut Provinsi Tahun 2020 “Data termutakhir” | II.178 |
| Grafik | II.100 | Persentase Universal Health Coverage (UHC) menurut Provinsi Tahun 2020 “Data termutakhir” | II.180 |
| Grafik | II.101 | Capaian Universal Healt Coverage (UHC) Kabupaten Kota tahun 2020 | II.181 |
| Grafik | II.102 | Rasio Elektrifikasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | II.214 |
| Grafik | II.103 | Rasio Penggunaan Gas Rumah Tangga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | II.214 |
| Grafik | II.104 | Laju PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | II.216 |
| Grafik | II.105 | PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | II.216 |
| Grafik | II.106 | Persentase Tenaga Kerja Formal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | II.217 |
| Grafik | II.107 | Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | II.217 |
| Grafik | II.108 | Upah Rata-Rata Per Jam Pekerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | II.218 |
| Grafik | II.109 | Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | II.218 |
| Grafik | II.110 | Indeks Lembaga Demokrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | II.241 |
| Grafik | II.111 | Indeks Kebebasa Sipil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | II.241 |
| Grafik | II.112 | Indeks Hak-Hak Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | II.242 |
| Grafik | III.1 | Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2024 | III.5 |
| Grafik | III.2 | Struktur Perekonomian Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 | III.7 |
| Grafik | III.3 | Laju Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2024 | III.9 |
| Grafik | III.4 | Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 – 2023 | III.12 |
| Grafik | III.5 | Indeks Williamson Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2024 | III.13 |
| Grafik | III.6 | Gini Ratio Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2024 | III.14 |

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari tahapan yang bersifat jangka panjang, menengah, dan tahunan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Penyusunan RKPD sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 3 ayat (2), bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara terpadu sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang wajib disusun oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga memiliki kewajiban dalam menyusun RKPD dimaksud.

Dalam menyusun RKPD Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menerapkan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*), dan bawah-atas (*bottom-up*). Pendekatan politik bermakna bahwa pemilihan kepala daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan. Hal ini dikarenakan rakyat pemilih dalam menentukan pilihannya didasari oleh program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon kepala daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan oleh kepala daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah yang disepakati bersama DPRD. Perencanaan melalui pendekatan teknokratik dilaksanakan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang dilaksanakan oleh lembaga atau perangkat daerah yang secara fungsi memiliki tugas untuk itu.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholder*) terhadap pembangunan, di mana pelibatan para pihak tersebut dimaksudkan untuk menjaring aspirasi dan menumbuh kembangkan rasa memiliki. Pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan/desa.

Disamping pendekatan-pendekatan tersebut di atas, RKPD 2024 disusun dengan prinsip *money follow program* menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial dengan penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.

Penguatan implementasi *money follow program* dilakukan melalui penajaman kesinambungan prioritas pembangunan, pengendalian pelaksanaan program dengan penerapan standarisasi kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program, dan penajaman integrasi sumber pendanaan. Penguatan pendekatan tematik-holistik, integratif dan spasial dilakukan dengan memperhatikan pengendalian perencanaan dan penguatan perencanaan. Penguatan perencanaan berbasis kewilayahan mempertimbangkan karakteristik masing-masing wilayah, dan penguatan integrasi sumber pendanaan pembangunan. Dengan penerapan seluruh pendekatan perencanaan tersebut di dalam penyusunannya, diharapkan dokumen RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 dapat menjadi dokumen perencanaan yang memenuhi prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan dan kesinambungan kemajuan dan kesatuan nasional.

Selain hal-hal diatas, sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diantaranya sebagai berikut:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah;
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh perangkat daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
3. RKPD merupakan acuan kepala daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan;

Memperhatikan posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka diharapkan dapat dihasilkan suatu dokumen perencanaan yang berkualitas dengan memedomani peraturan perundangan yang berlaku, terutama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan penetapan RKPD agar dapat memberikan acuan yang efektif bagi pembangunan.

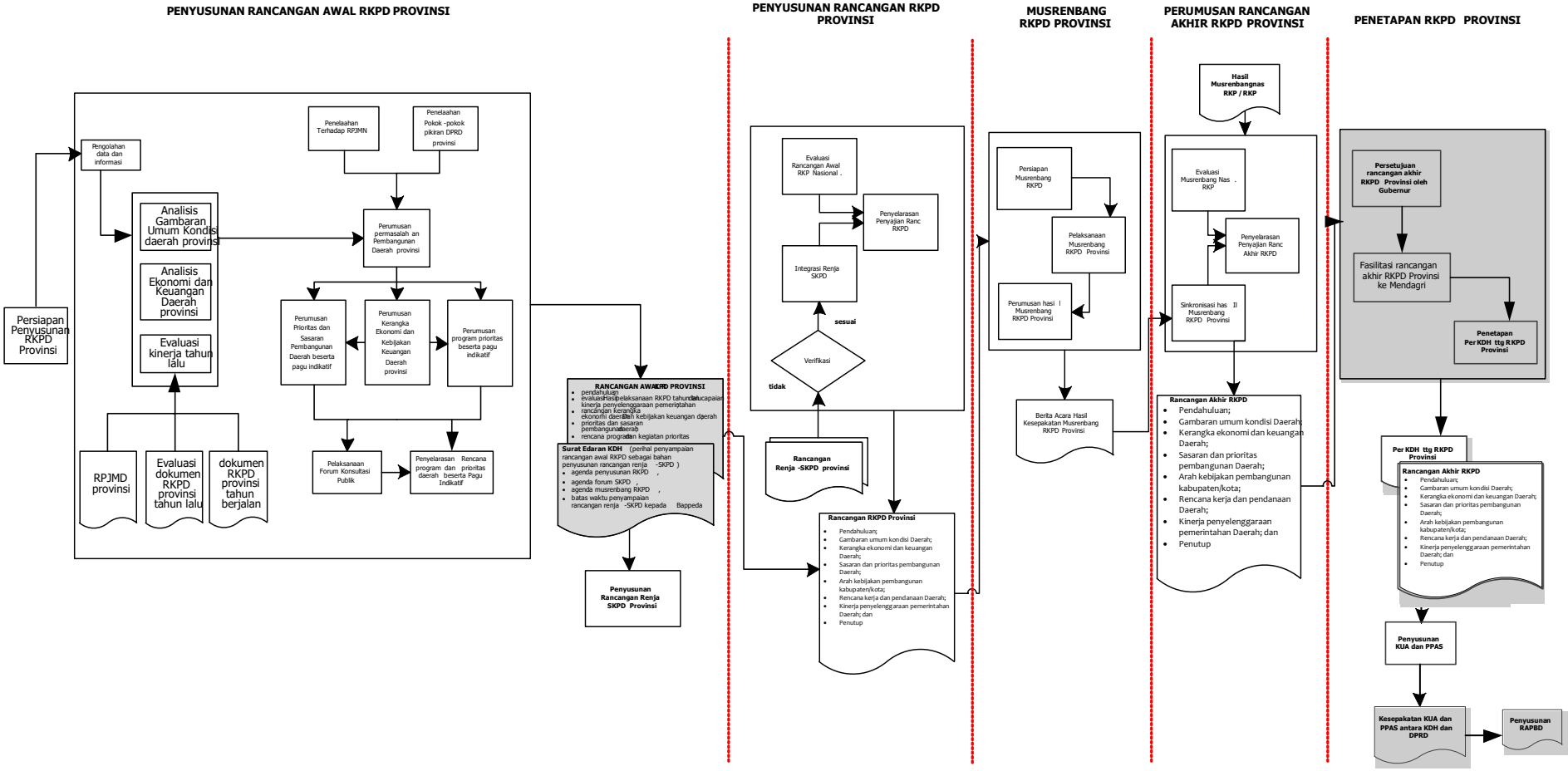
Beberapa hal yang harus menjadi perhatian dalam penyusunan dokumen RKPD, antara lain sebagai berikut:

1. RKPD tahun rencana disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya;

2. program prioritas dalam RKPD harus sesuai dengan prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJPD, RKP dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat serta dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPD 2023-2026;
3. program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum musrenbang.
4. program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*) untuk program dan indikator kinerja keluaran (*output*) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur;
5. program dan kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 memiliki makna yang strategis karena merupakan penjabaran tahap keempat dari RPJPD 2005-2025 dan juga merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPD 2023-2026. RKPD yang telah ditetapkan digunakan sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**Gambar I.1** Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi



## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6333);
13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor );
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5589 Tahun 2021 entang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 entang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 – 2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 52);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
27. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
28. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 Seri E).

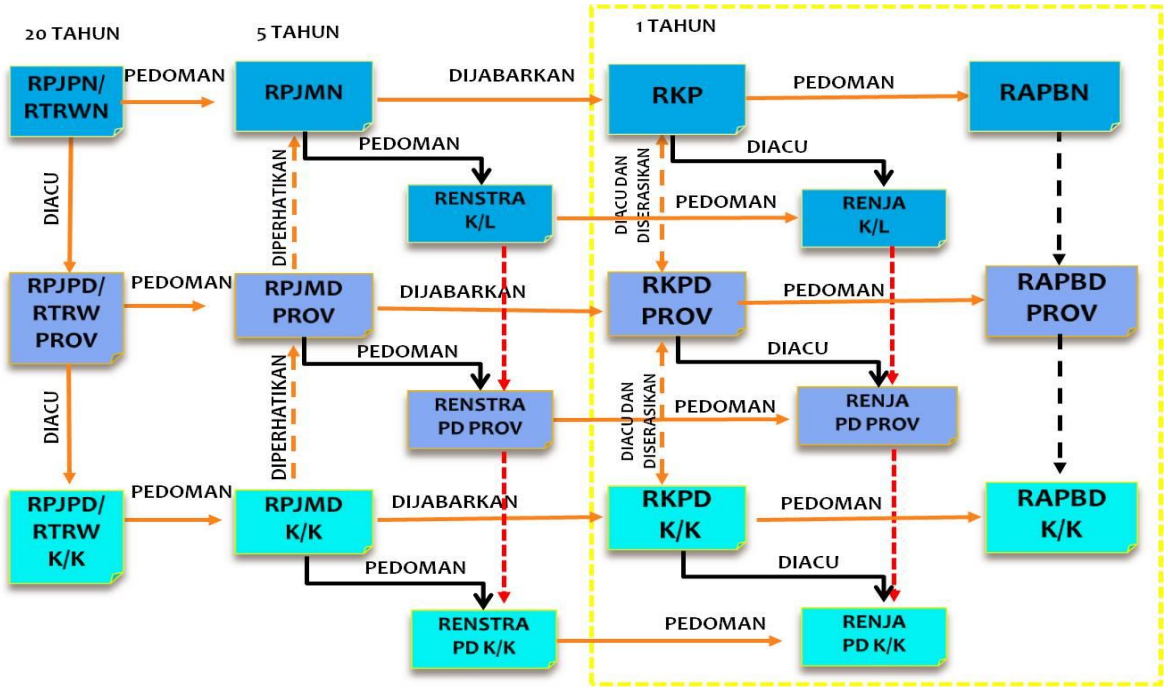
## 1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dalam menyusun dokumen RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperhatikan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 merupakan bagian dari penerapan sistem perencanaan pembangunan nasional, dan bagian dari penerapan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu. RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan kebijakan tingkat nasional, yang mengacu pada RKP Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2020-2024 serta Renstra masing-masing kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian di tingkat pusat. Dalam konteks daerah, dokumen RKPD Tahun 2024 juga disusun dengan berpedoman pada perubahan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 dan RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.

Dokumen-dokumen perencanaan sebagaimana tersebut di atas yang bersifat spasial perlu disinkronisasikan dengan dokumen-dokumen perencanaan spasial, yaitu dokumen RTRW Nasional, RTR Pulau/ Kepulauan, dan RTR Kawasan Strategis Nasional pada level pemerintah pusat dan dokumen RTRW daerah, RDTR serta RTR Kawasan Strategis Daerah. Dokumen RTRW daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJP daerah dan RPJM daerah. Dengan demikian, korelasi antara RKPD dengan dokumen perencanaan spasial (RTRW daerah) terletak pada hubungannya dengan dokumen antara RPJP daerah dan RPJM daerah, yang sama-sama diacu oleh RKPD.

Berdasarkan kondisi di atas, maka keterkaitan antar dokumen perencanaan, spasial dan penganggaran adalah sebagaimana pada Gambar I.2 berikut:

**Gambar I.2**
Hubungan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional, Daerah, dan Perangkat Daerah




*Sumber: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (diolah)*

## 1.4 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun dengan maksud untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki guna peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan.

Adapun tujuannya adalah sebagai acuan bagi seluruh instansi/kantor wilayah/ lembaga teknis daerah/dinas daerah/sekretariat daerah dan sekretariat DPRD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Tahun Anggaran 2024.

## 1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Berisi gambaran umum penyusunan RKPD yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RKPD dengan dokumen rencana

pembangunan daerah, sistematika dokumen RKPD, serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

**BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Berisi penjelasan gambaran umum kondisi daerah dari berbagai aspek, hasil evaluasi RKPD tahun lalu dan tahun berjalan, realisasi RPJMD serta permasalahan pembangunan daerah.

**BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu (tahun 2022) dan perkiraan tahun berjalan (tahun 2023), yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

**BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2024 berdasarkan hasil analisis terhadap evaluasi hasil RKPD tahun lalu (tahun 2022) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi masalah ditingkat daerah dan nasional, dan rancangan kerangka ekonomi daerah beserta pendanaan.

**BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA**

Mengemukakan arahan kebijakan pembangunan kabupaten/kota yang ditetapkan oleh provinsi, yang nantinya akan menjadi pedoman bagi daerah kabupaten/kota dalam menyusun RKPD.

**BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Memuat secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang ditetapkan dalam RPD. Rencana program dan kegitan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Memuat indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dijadikan Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

**BAB VIII PENUTUP**

Berisi penegasan bahwa dalam melaksanakan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 diperlukan sinergitas yang mantap di jajaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, DPRD, pihak swasta, *stakeholder* dan seluruh lapisan masyarakat.

# BAB II
# GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

## 2.1 Kondisi Umum Daerah

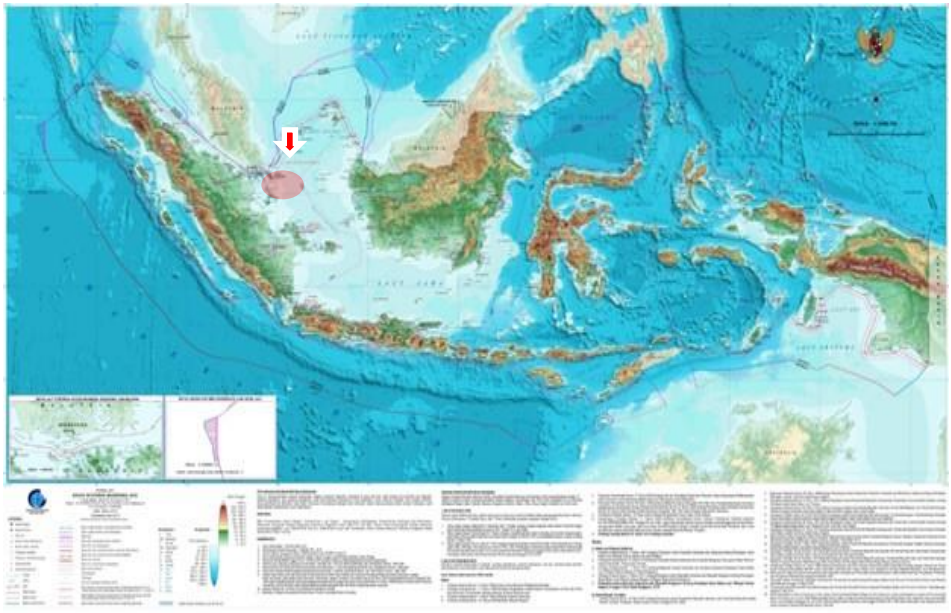
### 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

### A. Kondisi Geografi Daerah

### 1. Kondisi Astronomis dan Geografi

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara astronomis terletak pada 104°50’ sampai 109°30’ Bujur Timur dan 0°50’ sampai 4°10’ Lintang Selatan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar II.1 berikut ini,

**Gambar II.1**
Gambar Lokasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

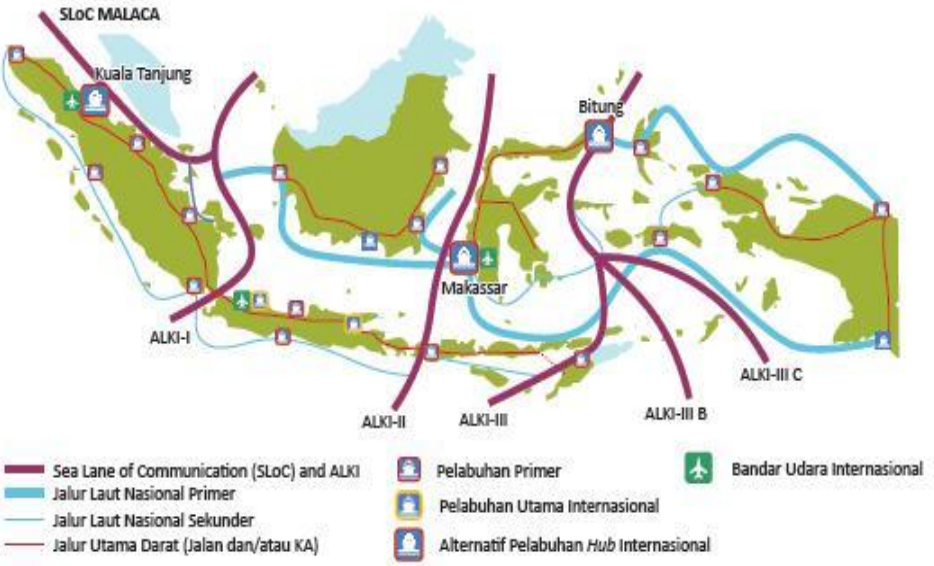


*Sumber: Badan Informasi Geospasial (BIG), 2018 “Data termutakhir”*

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada pada wilayah Indonesia sebelah Barat, dengan posisi geografis yang sangat strategis. Berada pada pertemuan arus Selat Malaka dan Laut Cina Selatan, sehingga menjadi wilayah yang kaya akan sumber daya kelautan dan perikanan. Disamping itu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dekat dan berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I, seperti tergambar pada peta Alur Laut Kepulauan Indonesia pada Gambar II.2. Jalur pada ALKI I yang difungsikan untuk pelayaran dari Laut Cina Selatan melintasi Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda ke Samudera Hindia, dan sebaliknya; dan untuk pelayaran dari Selat Singapura melalui Laut Natuna dan sebaliknya (Alur Laut Cabang I A), berada pada posisi silang antara Pulau. Sumatera dan Pulau Kalimantan, Pulau Jawa dengan Semanjung Malaysia dan Singapura. Kondisi ini sangat

menguntungkan bagi berkembangnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk saat ini dan dimasa yang akan datang.

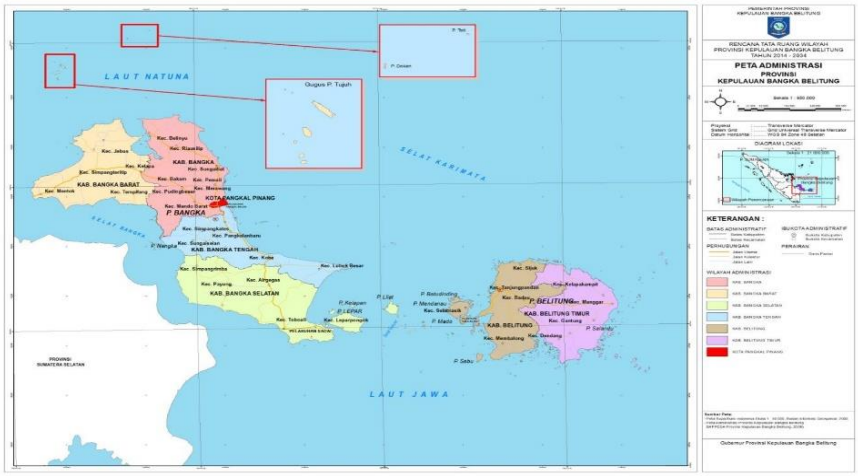
**Gambar II.2**
Peta Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)




*Sumber: Badan Informasi Geospasial (BIG), 2018 "Data termutakhir"*

Walaupun demikian, pada wilayah ALKI I terdapat beberapa potensi ancaman, terutama apabila terdapat konflik klaim wilayah di Laut Cina Selatan. Digunakannya wilayah ALKI I untuk kegiatan manuver angkatan perang negara yang terlibat konflik di Cina Selatan. Padatnya lalu lintas pelayaran di Selat Malaka, juga mempunyai potensi kerawanan dalam keamanan kawasan.

**Gambar II.3**
Peta Administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung




*Sumber: RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034*

Sebagaimana terlihat pada Gambar II.3 posisi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikelilingi oleh laut dan merupakan daerah kepulauan. Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebelah Barat berbatasan dengan Selat Bangka, sebelah Timur dengan Selat Karimata, sebelah Utara dengan Laut Natuna, sedangkan sebelah Selatan berbatasan dengan

Laut Jawa.

## 2. Luas dan Daerah Administratif

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, yang pada saat awalnya terdiri dari 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung, serta 1 (satu) kota yaitu Kota Pangkalpinang. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan pemekaran, dengan membentuk 4 (empat) kabupaten baru yaitu Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Belitung Timur, sehingga saat ini jumlah kabupaten dan kota menjadi 7 (tujuh), terdiri dari 6 (enam) kabupaten dan 1 (satu) kota. Kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki luas wilayah administrasi yang paling besar adalah Kabupaten Bangka Selatan dengan luas wilayah 3.607,08 $km^2$ dan kabupaten/kota yang paling kecil luas wilayah administrasi adalah Kota Pangkalpinang sebesar 89.40 $km^2$.

Luas wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 81.725,06 $km^2$. Terdiri atas daratan seluas 16.424,06 $km^2$ atau 20,10 persen dari total wilayah, dan wilayah laut seluas 65.301,00 $km^2$ atau 79,90 persen dari total wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang secara terperinci dapat dilihat pada data Tabel II.1.

**Tabel II.1**
Luas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

| No | Nama Kabupaten/Kota | Nama Ibu Kota | Luas Wilayah ($Km^2$) | Jumlah Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah Desa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* |
| 1 | Bangka | Sungailiat | 2.950,68 | 8 | 19 | 62 |
| 2 | Bangka Barat | Muntok | 2.820,61 | 6 | 6 | 60 |
| 3 | Bangka Tengah | Koba | 2.155,77 | 6 | 7 | 56 |
| 4 | Bangka Selatan | Toboali | 3.607,08 | 8 | 3 | 50 |
| 5 | Belitung | Tanjung Pandan | 2.293,61 | 5 | 7 | 42 |
| 6 | Belitung Timur | Manggar | 2.506,91 | 7 | 0 | 39 |
| 7 | Pangkalpinang | Pangkalpinang | 89,40 | 7 | 42 | 0 |
| | Provinsi Kep. Bangka Belitung | | 81.725,06 | 47 | 84 | 309 |
| | Luas Daratan | | 16.424,06 | | | |
| | Luas Laut | | 65.301,00 | | | |

*Sumber: Bangka Belitung Dalam Angka, 2022 (diolah)*

Total seluruh desa yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebanyak 309 Desa. Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Selatan memiliki jumlah wilayah administrasi kecamatan yang paling banyak dengan jumlah masing-masing 8 kecamatan, dan Kabupaten Belitung merupakan kabupaten yang paling sedikit memiliki wilayah administrasi kecamatan yakni sebanyak 5 kecamatan. Sedangkan wilayah administrasi kelurahan yang paling banyak adalah Kota Pangkalpinang dengan jumlah 42 kelurahan dan kabupaten yang paling sedikit memiliki wilayah administrasi kelurahan adalah Kabupaten Belitung Timur

yang tidak memiliki wilayah kelurahan. Desa yang paling banyak adalah Kabupaten Bangka dengan jumlah 62 desa dan kabupaten yang paling sedikit memiliki wilayah administrasi desa adalah Kabupaten Belitung Timur yakni sebanyak 39 desa.

### 3. Keadaan Topografi, Geologi dan Hidrologi

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai topografi yang umumnya relatif datar yang terdiri dari dataran rendah hingga berbukit dan hanya sebagian kecil yang bergunung. Ketinggian dataran rendah rata-rata sekitar 50 meter di atas permukaan laut. Titik tertinggi terdapat pada puncak Gunung Maras di Kabupaten Bangka dengan ketinggian 699 meter dan puncak Gunung Tajam di Kabupaten Belitung dengan ketinggian 445 meter di atas permukaan laut. Komposisi lahan datar di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai luas sekitar 46,19 persen, bergelombang 41,08 persen, dan sisanya 12,37 persen merupakan wilayah berbukit dan bergunung serta berawa-rawa. Wilayah berawa-rawa umumnya terdapat di Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka Tengah, dan sebagian kecil di Kabupaten Bangka Selatan.

Pulau Bangka dan Belitung termasuk bagian tengah dari "*Tin Mayor South East Asian Tin Belt*" dengan tipe *granit main range* yang mempunyai ciri-ciri megakristal (terutama *K-Feldspar*) dan terjadi mineralisasi timah beserta mineral ikutannya. Granit ini umumnya terdiri atas granit biotit dan granit muskovit yang semuanya merupakan tipe sedimen tipe S yang diperkirakan umurnya Trias (Sumber: Arsip PT. Koba Tin: *Survey* dan *Geology Department*, 2007). Oleh karena itu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki cadangan timah terbesar di Indonesia yang berpotensi sebagai modal dasar pembangunan. Terdapat pula mineral-mineral ikutan timah seperti *Zircon* ($ZrSiO_4$), *Monazite* ((Ce, La, Dy)$PO_4$ (ThSi)$O_2$), *Hematite* ($Fe_2O_3$), Pyrite ($FeS_2$), *Ilmenite* ($FeTiO_3$), dan *Xenotime* ($YPO_4$). Sedangkan secara geologis mineralisasi timah di Indonesia terikat pada sabuk granit (*granitebelt*) Asia Tenggara yang memanjang dari Yunan (China) melalui Myanmar, Thailand, Semenanjung Melaka sampai pada Kepulauan Indonesia terutama di Pulau Bangka, Pulau Belitung, Pulau Singkep dan Pulau Karimun. Selain produk timah dan mineral ikutannya, ada pula produk tambang lainnya seperti pasir kuarsa ($SiO_2$), material Kaolin, dan *bilitonite* (dikenal dengan nama "Satam"). Satam banyak digunakan untuk ornamen/hiasan cincin, bros, dan perhiasan lainnya. Sedangkan Kaolin merupakan bahan baku untuk pembuatan kertas, keramik, deterjen, lem, kosmetik dan bahan untuk industri kimia. Pasir kuarsa dibandingkan dengan pasir biasa adalah lebih putih dan butirannya lebih kecil. Material ini digunakan untuk pembuatan kaca.

Hasil kajian hidrologi menyatakan bahwa daerah Kepulauan Bangka Belitung dihubungkan oleh perairan laut dan pulau-pulau kecil. Secara keseluruhan daratan dan perairan Bangka Belitung merupakan satu kesatuan dari bagian dataran Sunda, sehingga perairannya merupakan bagian Dangkalan Sunda (Sunda *Shelf*) dengan kedalaman laut tidak lebih dari 30 meter. Kepulauan Bangka Belitung mempunyai dua jenis perairan yaitu perairan terbuka dan perairan semi tertutup. Perairan terbuka yang terdapat di sekitar pulau Bangka terletak di sebelah Utara, Timur dan Selatan Pulau Bangka. Sedangkan perairan semi tertutup terdapat di Selat Bangka dan Teluk Kelabat di Utara Pulau Bangka. Sementara itu perairan di Pulau Belitung umumnya bersifat perairan terbuka. Disamping sebagai daerah perairan laut, daerah Kepulauan Bangka Belitung juga mempunyai banyak sungai seperti Sungai Baturusa, Sungai Kepoh, Sungai Buluh, Sungai Kotawaringin, Sungai Kampa, Sungai

Layang, Sungai Manise dan Sungai Kurau di Pulau Bangka. Sedangkan di Pulau Belitung terdapat Sungai Cerucuk, Sungai Buding, dan Sungai Lenggang.

**4. Klimatologi**

Kepulauan Bangka Belitung memiliki Iklim Tropis yang dipengaruhi angin musim yang mengalami bulan basah dan kering. Dari data BPS yang dirilis dari BMKG pada tahun 2019-2021, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki suhu rata-rata tahunan antara 26,7-28,2 ˚C dan curah hujan antara 2.355,3-3.012,9 mm dengan jumlah hari hujan 134-234 hari. Curah hujan maksimum tertinggi tahun 2021 sebesar 3.012,9 mm. Sementara kelembabannya relatif tinggi mencapai 50 derajat di tahun 2021. Di bulan Desember dan Januari, biasanya musim penghujan terjadi di Kepulauan Bangka Belitung, disertai angin kencang dan ombak laut cenderung meninggi.

Berdasarkan data Bangka Belitung Dalam Angka 2022, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki suhu rata-rata tahunan sebesar 28,2˚C dengan suhu maksimum 34,4˚C dan suhu minimum 21,6˚C. Curah hujan tergolong tinggi mencapai sebesar 3.012,9 mm dengan jumlah hari hujan 234 hari. Sedangkan Pulau Belitung, berdasarkan data Stasium Meteorologi H.AS Hanandjoedin tercatat memiliki suhu rata-rata sebesar 27˚C dengan suhu maksimum 35,8˚C dan suhu minimum 20,6˚C. Pulau Belitung memiliki total curah hujan lebih tinggi yakni 2.650 mm dengan jumlah hari hujan lebih sedikit yakni 143 hari.

**5. Kondisi Lahan**

*Penggunaan* lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didominasi oleh pertanian lahan kering dan pertanian lahan kering campur semak (35,97%), Belukar dan Belukar *Rawa* (22,7%), Perkebunan (15,15%), Hutan (11,8%), pertambangan (9,28%) dan permukiman (2,32%). Lebih lanjut dapat diperhatikan tabel di bawah ini.

**Tabel II.2**
Luas Lahan menurut Penggunaan Lahan
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

| No | Penggunaan Lahan | Luas (Ha) | Persen |
|---|---|---|---|
| 1 | Bandara/Pelabuhan | 253.51 | 0.02% |
| 2 | Belukar | 306,131.80 | 18.31% |
| 3 | Belukar Rawa | 73,471.99 | 4.39% |
| 4 | Hutan Lahan Kering Primer | 486.43 | 0.03% |
| 5 | Hutan Lahan Kering Sekunder | 83,887.91 | 5.02% |
| 6 | Hutan Mangrove Primer | 22,789.09 | 1.36% |
| 7 | Hutan Mangrove Sekunder | 40,665.51 | 2.43% |
| 8 | Hutan Rawa Primer | 0.15 | 0.00% |
| 9 | Hutan Rawa Primer | 277.27 | 0.02% |
| 10 | Hutan Rawa Sekunder | 49,148.81 | 2.94% |
| 11 | Lahan Terbuka | 8,381.27 | 0.50% |
| 12 | Perkebunan | 253,359.81 | 15.15% |
| 13 | Permukiman | 38,845.94 | 2.32% |
| 14 | Pertambangan | 155,168.33 | 9.28% |
| 15 | Pertanian Lahan Kering | 56,855.22 | 3.40% |

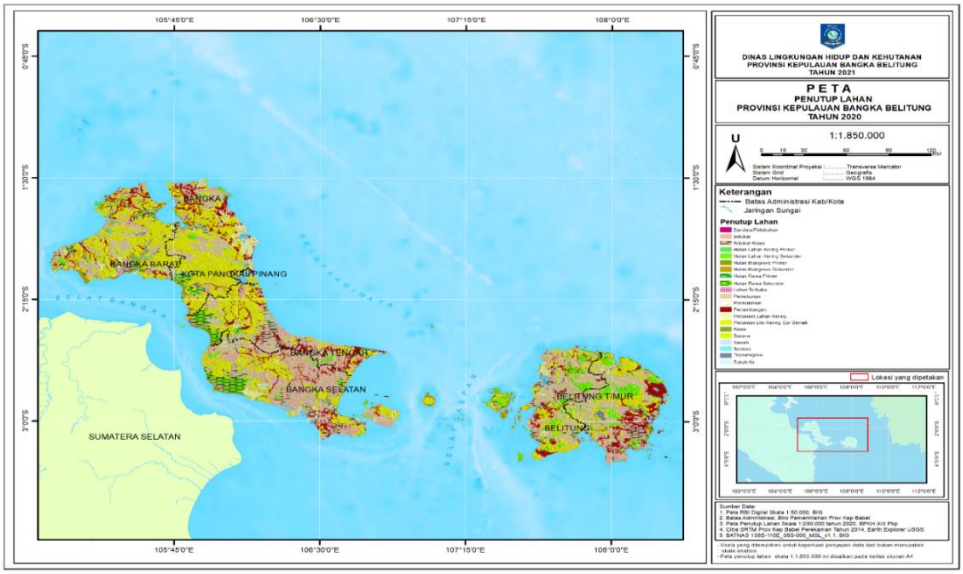
| No | Penggunaan Lahan | Luas (Ha) | Persen |
|---|---|---|---|
| 16 | Pertanian Lahan Kering Campur Semak | 544,496.27 | 32.57% |
| 17 | Rawa | 10,673.09 | 0.64% |
| 18 | Savana | 7,423.64 | 0.44% |
| 19 | Sawah | 4,705.22 | 0.28% |
| 20 | Tambak | 522.24 | 0.03% |
| 21 | Transmigrasi | 2,416.80 | 0.14% |
| 22 | Tubuh Air | 11,945.68 | 0.71% |
| | **Total** | **1,671,905.99** | **100.00%** |

*Sumber: DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021 "Data termutakhir"*

Dari seluruh luas lahan 32,67% atau dengan luas 544.496,27 Ha telah digunakan untuk pertanian lahan kering campur semak dan 18,31% belukar atau seluas 306.131,80 Ha. Sedangkan sisanya merupakan hutan lahan kering, rawa, savana, dan lain sebagainya.

Untuk tutupan lahan, berdasarkan data BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, luas penutupan lahan hutan tahun 2020 seluas 344,2 (ribu Ha) x 10,0. Sedangkan Non Hutan seluas 3.091,2 (ribu Ha) x 90,0. Berikut adalah peta penutupan lahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana gambar di bawah ini,

**Gambar II.4**
Peta Penutupan Lahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020




*Sumber : DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021 "Data termutakhir"*

## B. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan potensi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi bahwa wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan perkebunan, perikanan, kehutanan, pertanian, pertambangan, industri, pariwisata dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034, pengembangannya disesuaikan dengan arahan yang digariskan pada RTRWN dan RTR Pulau Sumatera.

Perencanaan dan pengembangan dilakukan berdasarkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan kawasan strategis. Perencanaan dan pengembangan rencana struktur ruang, meliputi sistem perkotaan, sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air dan sistem prasarana lingkungan.

**1. Rencana Sistem Perkotaan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034, rencana sistem perkotaan secara hirarkis dan dalam bentuk pusat kegiatan, sesuai dengan kebijakan nasional, potensi, dan rencana pengembangan wilayah provinsi sistem perkotaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKNp), yaitu: Kota Pangkalpinang;
2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), meliputi: Muntok, Tanjung Pandan, Manggar;
3. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), meliputi:Toboali dan Koba;
4. Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL), meliputi: Kelapa, Parittiga, Belinyu, Sungailiat, Sungai Selan, Sijuk, Membalong, Badau, Kelapa Kampit, Gantung, Puding Besar, Pangkalan Baru, Payung, dan Selat Nasik.

Namun berdasarkan revisi RTRW Nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017, ada perubahan status sistem perkotaan dimana Kota Pangkalpinang yang tadinya merupakan Pusat Kegiatan Nasional Promosi (PKNp) naik kelas menjadi Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

**2. Rencana Sistem Jaringan Transportasi**

Sesuai dengan karakteristik geografis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan wilayah kepulauan, maka sistem transportasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung direncanakan sebagai sistem transportasi terpadu antar moda yang meliputi sistem transportasi darat, sistem transportasi laut dan sistem transportasi udara, dengan uraian sebagai berikut:

a. Sistem Transportasi Darat

Sistem transportasi darat yang ada di Provinsi ini terdiri dari jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan serta jaringan transportasi perkotaan. Peningkatan dan pengembangan jaringan jalan yang berkenaan dengan peningkatan status jalan diatur sesuai peraturan perundang-undangan. Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, terdiri atas: jaringan jalan dan jembatan, jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.

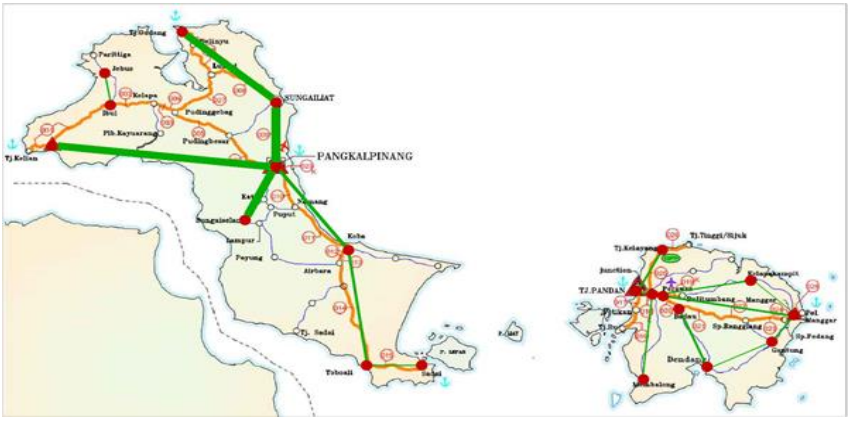
Pengembangan jaringan yang menjadi kewenangan pusat diatur dengan Surat Keputusan Menteri terkait, pengembangan jaringan jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi diatur dengan Surat Keputusan Gubernur. Berdasarkan Peraturan Menteri PU Nomor 13 Tahun 2011 disebutkan kriteria kondisi jalan mantap meliputi kondisi jalan baik dan sedang, kriteria kondisi jalan tidak mantap meliputi kondisi rusak ringan dan rusak berat. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki jalan yang

terbentang 600,42 km dengan status sebagai jalan nasional dan 850,99 km dengan status jalan provinsi.

Selain jalan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi kepulauan dan memiliki banyak sungai sehingga memerlukan pembangunan jembatan yang kokoh dalam menghubungkan suatu daerah dengan daerah lain. Terdapat panjang jembatan sebesar 3.508,75 meter yang merupakan kewenangan provinsi dan 2.879,48 meter kewenangan Nasional, dimana konstruksi jembatan tersebut di dominasi beton bertulang dan rangka baja karena lebih kokoh dan tahan lama.

**Gambar. II.5**

*Traffic Flow* pada Ruas Jalan Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung




*Sumber : Materi Teknis RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034*

b. Sistem Transportasi Laut

Sistem transportasi laut terdiri dari pelabuhan dan alur pelayaran. Pengembangan sistem transportasi laut ditujukan untuk mendukung sistem produksi, sistem pergerakan penumpang dan barang dengan sistem kegiatan perekonomian antar kawasan maupun internasional.

**Gambar. II.6**

Pengembangan Jalur Pelayaran Laut




*Sumber : Materi Teknis RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034*

Pengembangan sistem transportasi laut dilakukan melalui pengembangan dan/atau pembangunan pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul dan pelabuhan pengumpan, serta dilakukan juga melalui pengembangan alur pelayaran. Sesuai dengan RTRWN dan kewenangan Pemerintah Provinsi, sistem pelabuhan laut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

**Tabel II.3**
Sistem Pelabuhan Laut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| No. | Klasifikasi & Nama Pelabuhan | Kabupaten/Kota |
|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* |
| **A** | **Pelabuhan Utama** | |
| 1 | Pelabuhan Tanjung Batu | Belitung |
| **B** | **Pelabuhan Pengumpul** | |
| 1 | Pelabuhan Belinyu | Bangka |
| 2 | Pelabuhan Sadai | Bangka Selatan |
| 3 | Pelabuhan Muntok | Bangka Barat |
| 4 | Pelabuhan Pangkal Balam | Pangkalpinang |
| 5 | Pelabuhan Tanjung Pandan | Belitung |
| 6 | Pelabuhan Manggar | Belitung Timur |
| **C** | **Pelabuhan Pengumpan** | |
| 1 | Pelabuhan Sungailiat | Bangka |
| 2 | Pelabuhan Sungai Selan | Bangka Tengah |
| 3 | Pelabuhan Toboali | Bangka Selatan |
| 4 | Pelabuhan Tanjung Berikat | Bangka Tengah |
| 5 | Pelabuhan Tanjung Kalian | Bangka Barat |
| 6 | Pelabuhan Tanjung Tedung | Bangka Tengah |
| 7 | Pelabuhan Teluk Asam | Belitung Timur |
| 8 | Pelabuhan Dendang | Belitung Timur |
| **D** | **Pelabuhan Khusus (Wisata)** | |
| 1 | Pelabuhan Tanjung Pandan | Belitung |
| 2 | Pelabuhan Tanjung Kelayang | Belitung |

*Sumber: Materi Teknis RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034*

Adapun angkutan penyeberangan meliputi simpul dan jalur sebagai berikut:

1. Pelabuhan penyeberangan Tanjung Kalian (Kabupaten Bangka Barat)-Tanjung Api-api (Provinsi Sumatera Selatan);
2. Pelabuhan penyeberangan Tanjung Ru (Kabupaten Bangka Barat)-Pelabuhan Belinyu (Kabupaten Bangka);
3. Pelabuhan penyeberangan Pangkal Balam (Kota Pangkalpinang)-Tanjung Pandan (Kabupaten Belitung); dan
4. Pelabuhan penyeberangan Sadai (Kabupaten Bangka Selatan)-Tanjung Pandan (Kabupaten Belitung) dan Tanjung Api-api (Provinsi Sumatera Selatan).

c. Sistem Transportasi Udara

Sistem transportasi udara terdiri dari tatanan bandar udara dan ruang lalu lintas udara. Tatanan bandar udara terdiri dari: a) bandar udara pengumpul *(hub)*; dan b) bandar udara pengumpan *(spoke).* Bandar udara pengumpul merupakan bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi.

Pengembangan sistem transportasi udara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdiri atas Bandar Udara Depati Amir Pangkalan Baru di Pangkalpinang dan Bandar Udara H.AS. Hanandjoeddin di Tanjung Pandan. Dalam pembangunan dan pengembangan bandar udara harus memperhatikan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

## 3. Rencana Jaringan Energi

Rasio elektrifikasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebesar 100 persen. Dengan kondisi semua rumah tangga dan desa sudah dialiri listrik PLN. Jumlah pelanggan listrik PLN di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 berjumlah 472.186 pelanggan, dengan daya terpasang sebesar 352.917 KW dan jumlah produksi listrik sebesar 1.218.892.656 KWh (Babel Dalam Angka, 2020).

**Gambar. II.7**
Kondisi Kelistrikan Bangka Belitung



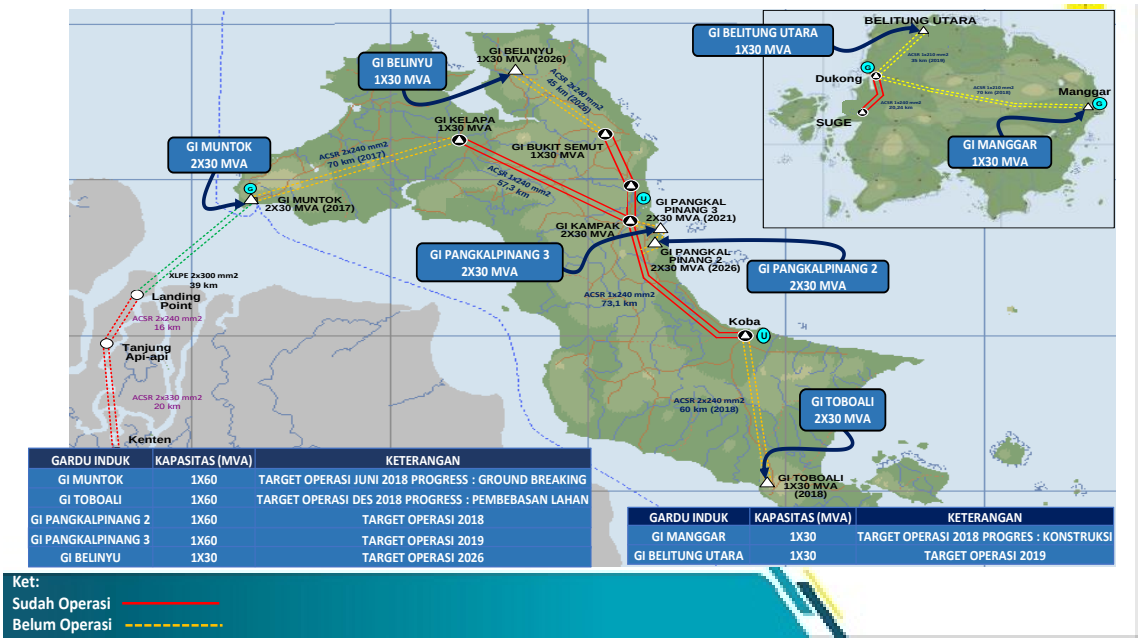

*Sumber : Materi Teknis RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034*

Pengembangan jaringan energi ditujukan bagi pengembangan jaringan prasarana energi listrik yang meliputi prasarana pembangkit dan jaringan listrik. Pengembangan prasarana pembangkit energi listrik dilakukan dengan memanfaatkan potensi sumber daya primer, terutama sumber energi terbarukan yang banyak tersedia di kabupaten/kota diantaranya tenaga air, tenaga surya, tenaga angin, biogas, biomassa, gelombang laut dan sumber energi alternatif lainnya. Pengembangan jaringan energi listrik dilakukan melalui

pembangunan pembangkit listrik, gardu induk dan jaringan listrik. Rencana Pembangunan Transmisi Bangka Belitung 2017-2026 (RUPTL) dengan kapasitas 1 x 60 MVA di GI Muntok, GI Toboali, GI Pangkalpinang 2, GI Pangkalpinang 3, dan 1 x 30 MVA berada di GI Belinyu, sebagaimana gambar di bawah ini,

**Gambar. II.8**

Rencana Pembangunan Transmisi Bangka Belitung 2017-2026 (RUPTL)




*Sumber : Materi Teknis RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034*

Seiring dengan bertambahnya penduduk dan pembangunan wilayah, kebutuhan akan energi listrik tentunya akan semakin meningkat, proyeksi kebutuhan energi istrik dapat dilihat pada Tabel II.4 di bawah ini,

**Tabel II.4**

Rekapitulasi Proyeksi Kebutuhan Daya Listrik 2010 – 2030– KVA

| WILAYAH | | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* |
| **A. PULAU BANGKA** | | | | | | |
| 1 | Bangka | 138.036 | 147.013 | 160.571 | 175.380 | 190.182 |
| 2 | Bangka Barat | 73.556 | 78.340 | 85.564 | 93.456 | 101.344 |
| 3 | Bangka Tengah | 89.821 | 95.662 | 104.484 | 114.120 | 123.752 |
| 4 | Bangka Selatan | 86.245 | 91.854 | 100.325 | 109.578 | 118.826 |
| 5 | Pangkalpinang | 89.501 | 94.440 | 102.543 | 111.341 | 120.738 |
| **JUMLAH** | | **477.159** | **507.309** | **553.487** | **603.875** | **654.842** |
| **B. PULAU BELITUNG** | | | | | | |
| 6 | Belitung | 83.842 | 87.455 | 92.464 | 97.759 | 104.266 |
| 7 | Belitung Timur | 62.441 | 65.133 | 68.863 | 72.807 | 77.653 |
| **JUMLAH** | | **146.283** | **152.588** | **161.327** | **170.566** | **181.919** |

| WILAYAH | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* |
| **JUMLAH TOTAL** | **623.442** | **659.897** | **714.814** | **774.441** | **836.761** |

*Sumber: Materi Teknis RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034*

Proyeksi kebutuhan Kebutuhan Daya Listrik 2010 sebesar 2030 KVA pada tahun 2010 sebanyak 623.442 KK. Dimana kebutuhan daya listrik di Pulau Bangka sebanyak 477.159 KK sedangkan di Pulau Belitung sebanyak 146.283 KK. Pada tahun 2030 kebutuhan daya listrik semakin meningkat dimana kebutuhan daya listrik di Pulau Bangka sebanyak 454.842 KK sedangkan di Pulau Belitung sebanyak 836.761 KK. Artinya dari tahun 2010 kebutuhan daya listrik 2010 sebesar 2030 KVA semakin meningkat sampai dengan tahun 2030 mendatang.

**Gambar. II.9**

Energi Baru dan Terbarukan




*Sumber : Materi Teknis RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034*

Dengan keterbatasan alternatif pembangkit listrik maka arahan pengembangan energi listrik di Provinsi Bangka Belitung adalah pembangkit listrik berbahan bakar non minyak, salah satunya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan menggunakan bahan bakar batubara. Sedangkan untuk daerah terpencil arahan penyediaan prasarana listrik adalah dengan membangun jaringan terisolasi. Arahan pengaturan penempatan pembangkit dan jaringan transmisi bertegangan tinggi dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan masyarakat dan lingkungan.

**Tabel II.5**

Rasio Desa Berlistrik PLN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| No. | Kabupaten/Kota | *Jumlah Desa | Desa Berlistrik PLN | Rasio Desa Berlistrik PLN (%) |
|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(%)* |
| 1 | Bangka | 71 | 71 | 100 |
| 2 | Bangka Barat | 64 | 64 | 100 |
| 3 | Bangka Tengah | 63 | 63 | 100 |
| 4 | Pangkalpinang | 42 | 42 | 100 |

| No. | Kabupaten/Kota | *Jumlah Desa | Desa Berlistrik PLN | Rasio Desa Berlistrik PLN (%) |
|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(%)* |
| 5 | Bangka Selatan | 53 | 53 | 100 |
| 6 | Belitung Timur | 39 | 39 | 100 |
| 7 | Belitung | 49 | 49 | 100 |
| **Bangka Belitung** | | **381** | **381** | **100** |

*Sumber : Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021 "Data termutakhir"*

Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki peran penting dalam pembangunan daerah dalam rangka mendukung perekonomian daerah. Keberhasilan pembangunan di bidang Pertambangan dan Energi sangat ditentukan oleh sistem, nilai dan budaya masyarakat yang secara bersama terhimpun pada berbagai sistem kebijakan dalam pelaksanaan program-program pertambangan dan energi yang ada, termasuk potensi swasta harus dapat berperan aktif sebagai mitra pembangunan di bidang pertambangan dan energi, terwujudnya pembangunan di bidang pertambangan dan energi juga dipengaruhi berbagai faktor yang tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor pertambangan dan energi melainkan juga menjadi tanggung jawab berbagai sektor terkait.

**Tabel II.6**
Potensi Energi Baru dan Terbarukan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| NO | JENIS ENERGI BARU DAN TERBARUKAN (EBT) | POTENSI |
|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* |
| 1 | Energi Surya | 220 MW |
| 2 | Bio Massa | 72,45 MW |
| 3 | Energi Angin | 1,67 MW |
| 4 | Energi Air | - |
| 5 | Energi Biogas POME | 9,4 MW |
| 6 | Energi Biodiesel | 5 MW |

*Sumber: Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021 "Data termutakhir"*

Untuk kekurangan energi listrik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pihak PT. PLN (Persero) telah melakukan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2x30 Megawatt di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dan 2 x 16,5 MW di Suge Kabupaten Belitung sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006. Saat ini kedua PLTU tersebut sudah beroperasi. Sementara itu, hingga tahun 2021 dari 6 (enam) potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang tidak ada hanya jenis energi. Sedangkan untuk jenis energi surya potensinya sampai dengan tahun 2050 sebesar 220 MW.

### 4. Rencana Jaringan Telekomunikasi

Kebutuhan akan telepon terdiri atas kebutuhan domestik dan non domestik. Kebutuhan domestik terdiri atas untuk rumah kecil, rumah sedang dan rumah besar dengan standar masing-masing sebagai berikut:

1. 4 (empat) rumah kecil memiliki 1 (satu) satuan sambungan (sst);

2. 2 (dua) rumah sedang memiliki 1 (satu) satuan sambungan (sst); dan
3. Setiap rumah besar memiliki 1 (satu) satuan sambungan (sst).

Sedangkan standar kebutuhan non-domestik adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan umum dan komersil: 15 persen dari domestik;
2. Wartel: 250 jiwa per wartel; dan
3. Telepon umum: 800 jiwa per unit.

Kedepannya seiring dengan pertambahan penduduk dan pembangunan wilayah, kebutuhan akan sambungan telepon tentunya akan semakin meningkat, proyeksi kebutuhan sambungan telepon per kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini,

**Tabel II.7**
Rekapitulasi Proyeksi Kebutuhan Sambungan Telepon 2010 – 2030

| WILAYAH | | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* |
| **A. PULAU BANGKA** | | | | | | |
| 1 | Bangka | 32.582 | 36.207 | 39.546 | 43.193 | 45.552 |
| 2 | Bangka Barat | 17.363 | 19.294 | 21.073 | 23.017 | 24.258 |
| 3 | Bangka Tengah | 21.202 | 23.560 | 25.733 | 28.106 | 30.379 |
| 4 | Bangka Selatan | 20.358 | 22.622 | 24.708 | 26.987 | 29.170 |
| 5 | Pangkalpinang | 21.179 | 23.259 | 25.255 | 27.421 | 29.502 |
| | **JUMLAH** | **112.683** | **124.942** | **136.315** | **148.724** | **158.861** |
| **B. PULAU BELITUNG** | | | | | | |
| 6 | Belitung | 19.173 | 19.963 | 21.106 | 22.315 | 23.491 |
| 7 | Belitung Timur | 14.278 | 14.867 | 15.719 | 16.619 | 17.495 |
| | **JUMLAH** | **33.451** | **34.830** | **36.825** | **38.934** | **40.986** |
| | **JUMLAH TOTAL** | **146.134** | **159.772** | **173.140** | **187.658** | **199.847** |

*Sumber: Materi Teknis RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034*

Pengembangan jaringan telekomunikasi meliputi sistem terestrial dan sistem satelit sebagai penghubung lokal dan interlokal, pengembangan jaringan ini dilakukan hingga ke pelosok wilayah yang belum terjangkau sarana prasarana telekomunikasi. Tersedianya fasilitas telepon sangat diperlukan bagi kelancaran komunikasi dan arus informasi. Sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan kegiatan ekonomi, maka permintaan terhadap sambungan telepon akan semakin meningkat pada masa yang akan datang.

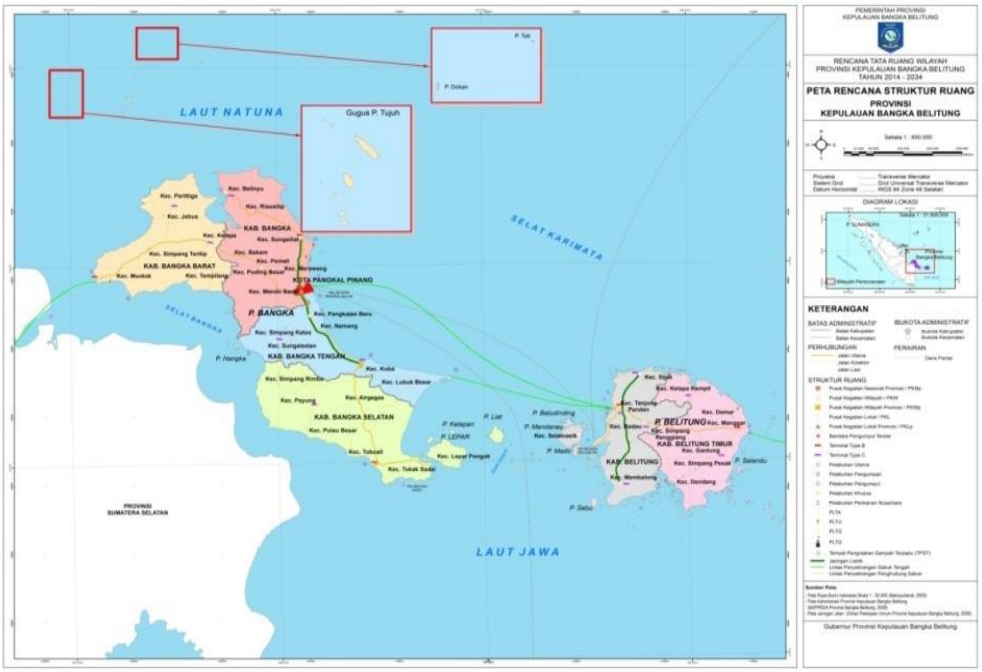
Kebutuhan sambungan telepon se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2010 adalah sebanyak 146.134 sambungan telepon. Jika diasumsikan peningkatan sambungan telepon terus meningkat setiap tahunnya maka kebutuhan sambungan telepon di

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan tahun 2030 adalah sebanyak 199.847 sambungan telelpon. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk tiap tahunnya.

### 5. Sistem Prasarana Lingkungan

Sistem prasarana lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, meliputi: Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA Regional); tempat pengolahan dan/atau pengelolaan limbah domestik; sistem drainase; Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM); dan sarana prasarana lingkungan yang sifatnya menunjang kebutuhan dasar masyarakat. SPAM dikembangkan di setiap pusat kegiatan wilayah dan lokal (PKNp, PKW, PKWp, dan PKL).

**Gambar II.10**
Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung




*Sumber: RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034*

### 6. Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Rencana sistem pengembangan sumber daya air di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, meliputi: sistem jaringan sungai, sistem jaringan irigasi, sistem jaringan air baku, sistem pengendalian banjir dan sistem pengamanan pantai, dengan rincian sebagai berikut:

a. Sistem jaringan sungai berupa Wilayah Strategis (WS) Nasional yaitu WS Bangka dan Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota yaitu WS Belitung;

b. Sistem jaringan irigasi terdiri atas daerah irigasi kewenangan pemerintah dan daerah irigasi kewenangan pemerintah provinsi;

c. Sistem jaringan air baku terdiri dari: sumber air baku, sistem pengelolaan air baku, dan peruntukan air baku;

d. Sistem pengendalian banjir berupa: pengamanan kawasan tangkapan air hujan, pemeliharaan dan pelestarian kawasan konservasi, pengamanan sempadan sungai,

pembuatan cek dam penghambat laju daya rusak air, dan pembangunan kanal pengatur distribusi air sungai serta normalisasi sungai;

e. Sistem pengamanan pantai dilakukan dengan cara: naturalisasi pantai dengan penghijauan, pengamanan gundukan pasir, pemecah ombak, turap dan pengamanan sempadan pantai.

**7. Rencana Pola Ruang**

Rencana pola ruang adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah Provinsi yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Dalam rencana pola ruang wilayah provinsi ini juga akan dijabarkan peruntukan ruang untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis provinsi.

**a. Kawasan Lindung**

Kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak lebih dari satu wilayah kabupaten/kota, kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya yang terletak di wilayah kota/kabupaten lain, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi. Kawasan budidaya provinsi adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Rencana pengembangan kawasan lindung, meliputi:

1) Hutan lindung

Sesuai dengan arahan dalam RTRWN dan kondisi ekosistem di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, rencana minimal luas kawasan lindung yang harus dipulihkan kembali dan/atau dipertahankan di provinsi ini mencapai 492.700 ha, dimana 32 persen diantaranya (atau 156.730 ha) merupakan kawasan hutan lindung. Hutan lindung yang dimaksud terdapat di Kabupaten Bangka Barat (28.589 ha), Kabupaten Bangka (15.736 ha), Kabupaten Bangka Tengah (32.226 ha), Kabupaten Bangka Selatan (28.234 ha), Kabupaten Belitung (37.583 ha) dan Kabupaten Belitung Timur (45.874 ha).

2) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya

Merupakan kawasan gambut dan atau kawasan resapan air hujan. Kawasan bergambut ditetapkan dengan kriteria: kawasan tanah bergambut dengan ketebalan 3 (tiga) meter atau lebih. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang termasuk dalam kategori ini hanyalah kawasan bergambut di Bangka Barat, tepatnya di Kecamatan Muntok, Sungai Teritip, Kelapa dan Jebus.

3) Kawasan perlindungan setempat

a) Sempadan Pantai. Sebagaimana diketahui bahwa Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 2 (dua) pulau besar yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Disamping itu terdapat pulau-pulau lain yang lebih kecil yaitu Pulau Nangka, Pulau Penyu, Pulau Burung, Pulau Lepar, Pulau Pongok, Pulau Gelasa, Pulau Panjang, Pulau Tujuh, Pulau Lima, Pulau Lengkuas, Pulau Selindung, Pulau Pelanduk, Pulau Seliu, Pulau Nadu, Pulau Mendanau, Pulau Batu Dinding, Pulau Sumedang dan pulau-pulau kecil

lainnya. Kriteria untuk sempadan pantai adalah wilayah pantai dengan jarak 100 (seratus) meter atau lebih dari titik pasang tertinggi; atau daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.

b) Sempadan Sungai. Adapun sungai-sungai besar yang terdapat di Kepulauan Bangka Belitung diantaranya adalah Sungai Baturusa, Sungai Buluh, Sungai Kotawaringin, Sungai Kampa, Sungai Layang, Sungai Manise dan Sungai Kurau. Ketentuan terkait sempadan sungai adalah daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar 5 (lima) meter atau lebih dari kaki tanggul sebelah luar; daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar 100 (seratus) meter atau lebih dari titik pasang tertinggi; dan daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar 50 (lima puluh) meter atau lebih dari titik pasang tertinggi.

c) Sempadan Kolong. Berupa kolam-kolam bekas galian timah yang tergenang air hujan atau sungai yang dalam hal ini dapat diperlakukan sebagai danau/waduk. Kawasan sempadan kolong ditetapkan dengan kriteria: wilayah daratan dengan jarak antara 50 (lima puluh) meter sampai 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi; atau daratan sepanjang tepian kolong yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik kolong.

4) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, situs dan kawasan cagar budaya

a) Kawasan Cagar Alam. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat cagar alam yaitu Cagar Alam Gunung Lalang-Belitung, Gunung Menumbing, Gunung Maras, Gunung Mangkol, Gunung Permisan, dan Jering Menduyung, kawasan Gunung Tajam Belitung.

b) Taman Wisata Alam Laut. Taman Wisata Alam Laut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa Taman Alam Laut Perairan Belitung, Perairan Belitung Timur, dan Perairan Bangka Selatan.

c) Kawasan Suaka Alam Laut dan perairan lainnya adalah Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) di Kabupaten Bangka Tengah yang meliputi Pulau Panjang, Pulau Ketawai, Pulau Bebuar, Pulau Gusung Asam dan Pulau Semujur.

Kepulauan Bangka Belitung memiliki kawasan cagar budaya berskala internasional yang berada di bawah naungan UNESCO yaitu kawasan Kota Tua Muntok dan Bukit Menumbing. Di kawasan pusat kota terdapat Mercusuar Tanjung Kalian dan Benteng Kuta Seribu yang dibangun tahun 1812-1817, Masjid Jamik dan Kelenteng Kung Fuk Nio serta Komplek Perumahan Mayor Chung A Thiam yang berusia ratusan tahun (dibangun 1830-an). Bukit Menumbing yang mempunyai ketinggian hampir 500 meter dpa dan dikelilingi hutan lindung terdapat bangunan tua yang dikenal dengan Giri Sasana Menumbing yang dibangun Belanda pada tahun 1932. Bangunan-bangunan yang dimaksud bukan saja berusia ratusan tahun namun juga mempunyai nilai sejarah, arsitektur dan budaya yang tinggi, sehingga pemerintah daerah bersama UNESCO telah menetapkan kawasan tersebut sebagai kawasan cagar budaya.

5) Kawasan rawan bencana

Berdasarkan data yang tersedia pada laporan RTRW kabupaten/kota di Provinsi Bangka Belitung dapat diketahui kawasan rawan bencana, yaitu:

a) Kawasan rawan banjir terdapat di Kecamatan Muntok, Parittiga, Kelapa, Jebus (Kabupaten Bangka Barat), Lubuk Besar, Koba, Namang dan Sungai Selan (Kabupaten Bangka Tengah), Toboali dan Pulau Besar (Kabupaten Bangka Selatan), Kota Pangkalpinang, Sungai Manggar Kecamatan Manggar, Sungai Mayang Kecamatan Kelapa Kampit, Jembatan Gantung (Kabupaten Belitung Timur), Tanjung Pandan (Kabupaten Belitung), Sungai Liat, Puding Besar, Mendo Barat (Kabupaten Bangka);

b) Kawasan rawan abrasi/erosi tersebar di Kecamatan Parit Tiga, Kecamatan Tempilang (Kabupaten Bangka Barat); Kecamatan Koba, Kecamatan Lubuk Besar, Kecamatan Pangkalan Baru (Kabupaten Bangka Tengah); Kecamatan Membalong, Kecamatan Badau, Kecamatan Tanjung Pandan, Kecamatan Selat Nasik dan Kecamatan Sijuk (Kabupaten Belitung); Kecamatan Manggar, Kecamatan Gantung, Kecamatan Simpang Pesak, Kecamatan Dendang dan Kecamatan Damar (Kabupaten Belitung Timur); Pantai Pasir Padi (Kota Pangkalpinang); Kecamatan Lepar Pongok, Kecamatan Tukak Sadai, Kecamatan Simpang Rimba Permis, Kecamatan Toboali (Kabupaten Bangka Selatan); Kecamatan Sungai Liat, Kecamatan Belinyu (Kabupaten Bangka); dan

c) Kawasan rawan bencana longsor terdapat di Kecamatan Simpang Teritip (Kabupaten Bangka Barat).

**b. Kawasan Budidaya**

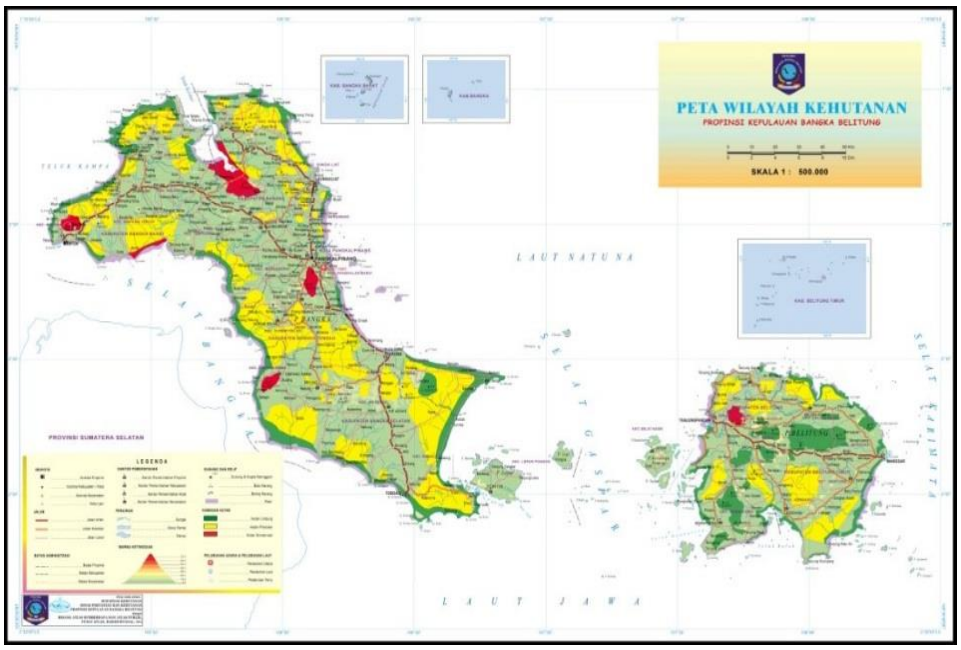
Dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034, yang dimaksud kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari:

1) Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.798/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ±19.131 Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas ±10.878 Hektar dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ±3.210 Hektar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan lampiran peta keputusan tersebut, kawasan hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seluas 659.014,58 Hektar, berdasarkan fungsinya terdiri dari Hutan Konservasi 35.473,00 Ha, Hutan Lindung 189.965,00 Ha, Hutan Produksi 432.882,82 Ha, dan Hutan Produksi Konversi 692,58 Ha.

**Gambar II.11**
Sebaran Hutan Produksi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung




*Sumber: DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018 "Data termutakhir"*

Rincian luas Hutan Produksi (HP dan HPK) di kabupaten/kota sebagai berikut: Kabupaten Bangka (HP 67.083,52ha; HPK 11,32 ha), Kota Pangkalpinang (HP 0,00 ha; HPK 0,00 ha) Kabupaten Bangka Selatan (HP 106.451,10 ha; HPK 0,00 ha), Kabupaten Bangka Tengah (HP 85.497,75 ha; HPK 0,00 ha), Kabupaten Bangka Barat (HP 78.368,92 ha; HPK 177,67 ha), Kabupaten Belitung (HP 43.595,77 ha; HPK 507,59 ha) dan Kabupaten Belitung Timur (HP 55.650,83 ha; HPK 0,00 ha). Dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Tahun 2014-2034, Kawasan Hutan Produksi diarahkan untuk kegiatan sebagai berikut:

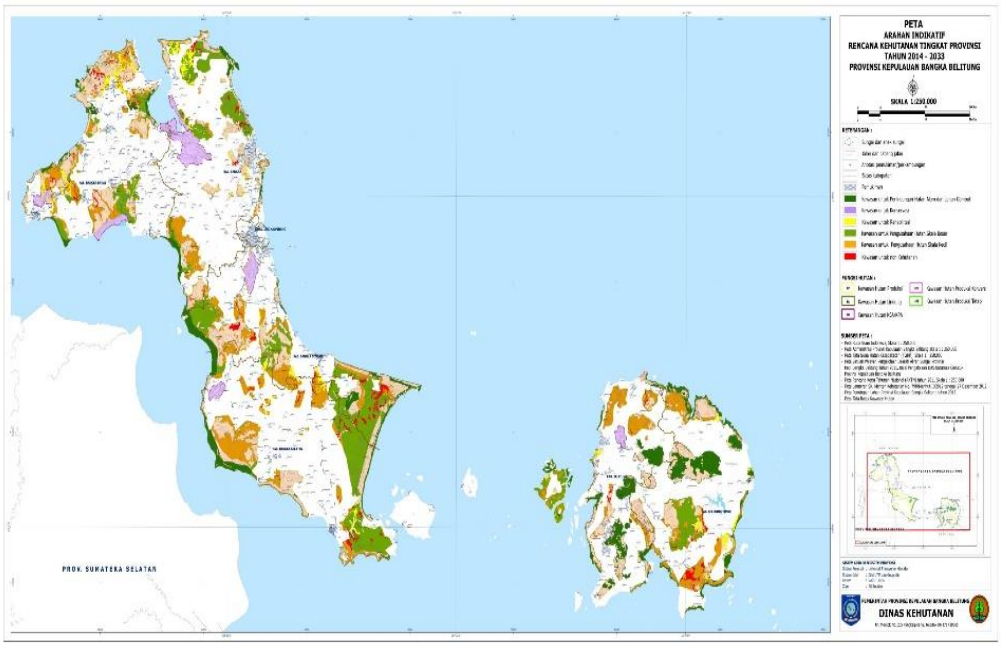
a) Kawasan untuk Rehabilitasi, kriteria Kawasan hutan dalam wilayah DAS kritis dan areal pertambangan.

b) Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Kecil, kriteria Kawasan Hutan yang dibebani izin pemanfaatan berbasis masyarakat serta Hutan Produksi, Hutan Tanaman, Semak belukar dan Lahan Garapan yang tidak berizin, dengan luas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c) Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar, kriteria Kawasan Hutan yang dibebani izin pemanfaatan serta Hutan Produksi dengan penutupan Hutan Sekunder, Hutan Tanaman, Semak Belukar dan Lahan Garapan yang tidak berizin.

d) Kawasan untuk non Kehutanan, kriteria Hutan Produksi dengan penutupan hutan selain Hutan Primer, tidak bergambut lebih dari 2 meter, dengan menggunakan mekanisme izin pinjam pakai.

**Gambar II.12**
Arahan Indikatif Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi
dalam RKTP Tahun 2014-2034




*Sumber : RKTP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2034*

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1940/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2017 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sampai dengan Tahun 2016, Kawasan Hutan seluas 657.378,26 ha, terdiri dari 35.750,84 ha Hutan Konservasi, 184.276,95 ha Hutan Lindung, 436.647,89 ha Hutan Produksi dan 692,58 ha Hutan Produksi Konversi.

Potensi Hasil Hutan Kepulauan Bangka Belitung, terdiri dari Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Hasil Hutan Kayu (HHK) terdiri dari jenis: meranti, ramin, membalong, mendaru, kerangas, kapuk, jelutung, pulai, mahang, manggeris, gelam, bakau, rotan, sengon, dan beberapa jenis dari kelompok rimba campuran lainnya. Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) terdiri dari: gaharu, madu alam, jamur, rotan, getah karet, tanaman bahan obat (pasak bumi), tanaman penghasil buah, tanaman penghasil minyak atsiri. Selain hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu, kawasan hutan memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai wisata alam dan jasa lingkungan untuk mendukung pariwisata. Bahkan telah ditetapkan 2 (dua) kawasan hutan yang dikelola melalui skema izin pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Juru Seberang dan HKm Bukit Peramun di Kabupaten Belitung sebagai *Geopark* Nasional.

2) Kawasan Peruntukan Pertanian

Lahan pertanian memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis bagi masyarakat Bangka Belitung karena terdapat sejumlah besar penduduk Bangka Belitung yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Berdasarkan data luasan areal baik RTRW maupun penggunaan lahan dapat ditelaah bahwa potensi pembangunan

pertanian masih sangat memungkinkan untuk dikembangkan baik sebagai kawasan pertanian sub sektor tertentu maupun pertanian terpadu. Secara terperinci penggunaan lahan/*land use* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tabel berikut,

**Tabel II.8**
Jenis dan Luas Penggunaan Lahan di Prov. Kep. Bangka Belitung 2015-2018 (Ha)

| Jenis Penggunaan Lahan | Tahun | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* |
| **Lahan Pertanian** | **1,124,286** | **1,186,652** | **1,174,938** | **1,173,412** |
| 1. Lahan Sawah | 15,719 | 22,771 | 25,058 | 25,093 |
| *a. Irigasi* | 3,090 | 4,602 | 4,234 | 4,966 |
| *b. Tadah Hujan* | 12,136 | 16,397 | 17,878 | 17,181 |
| *c. Rawa Pasang Surut* | 18 | 270 | 390 | 390 |
| *d. Rawa Lebak* | 475 | 1,502 | 2,556 | 2,556 |
| 2. Lahan Bukan Sawah | 1,108,567 | 1,163,881 | 1,149,880 | 1,148,319 |
| *a. Tegalan* | 113,105 | 117,376 | 99,038 | 97,930 |
| *b. Ladang* | 30,348 | 28,147 | 27,435 | 30,416 |
| *c. Perkebunan* | 441,152 | 367,848 | 391,064 | 394,408 |
| *d. Hutan Rakyat* | 47,753 | 42,637 | 43,315 | 43,661 |
| *e. Padang Pengembalaan* | 1,815 | 2,263 | 3,232 | 3,232 |
| *f. Tanah kosong/(sementara tidak diusahakan)* | 76,588 | 67,415 | 55,987 | 59,174 |
| *g. Lain-Lain (Tambak, Kolam, Empang, Hutan Negara, dll)* | 397,806 | 538,195 | 529,810 | 519,497 |
| **Lahan Bukan Pertanian** | **517,741** | **455,762** | **489,080** | **490,607** |
| a. Jalan, Permukiman, Perkantoran, Sungai, dll | 517,741 | 455,762 | 489,080 | 490,607 |
| **JUMLAH** | **1,642,027** | **1,642,414** | **1,664,019** | **1,664,018** |

*Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2016-2019 "Data termutakhir"*

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki kawasan pertanian dengan rincian kawasan Pertanian Lahan Kering (56.855.22 Ha), Pertanian Lahan Kering Campur Semak seluas (544.496,27 Ha), perkebunan seluas (253.359,81 Ha) dan sawah (4.705,22 Ha).

Kawasan Peruntukan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) seluas 903.450 Ha (Sembilan ratus tiga ribu empat ratus lima puluh hektar), terdiri atas:

a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan dengan luas kurang lebih 355.453 Ha (tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh tiga hektar);

b. kawasan peruntukan pertanian hortikultura dengan luas kurang lebih 221.512 Ha (dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus dua belas hektar);

c. kawasan peruntukan perkebunan dengan luas kurang lebih 316.383 Ha (tiga ratus enam belas ribu tiga ratus delapan puluh tiga hektar); dan

kawasan peruntukan peternakan dengan luas kurang lebih 10.102 Ha (sepuluh ribu seratus dua hektar).

Pasal 31 ayat (2) Pengembangan kawasan peruntukan tanaman pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 36.330 Ha (tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh hektar);
b. Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 72.433 Ha (tujuh puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tiga hektar);
c. Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 11.044 Ha (sebelas ribu empat puluh empat hektar);
d. Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 171.350 Ha (seratus tujuh puluh satu tiga ratus lima puluh hektar);
e. Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 25.763 Ha (dua puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tiga hektar); dan
f. Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 38.473 Ha (tiga puluh delapan empat ratus tujuh puluh tiga hektar).

Pengembangan kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

a. Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 53.116 Ha (lima puluh tiga ribu seratus enam belas hektar);
b. Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 33.245 Ha (tiga puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima hektar);
c. Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 23.171 Ha (dua puluh tiga ribu seratus tujuh puluh satu hektar);
d. Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 52.958 Ha (lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh delapan hektar);
e. Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 40.252 Ha (empat puluh ribu dua ratus lima puluh dua hektar); dan
f. Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 18.000 Ha (delapan belas ribu hektar).

Pengembangan kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

a. Perkebunan Besar meliputi:
    1. Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 30.808 Ha (tiga puluh ribu delapan ratus delapan hektar);
    2. Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 16.590 Ha (enam belas ribu lima ratus sembilan puluh hektar);
    3. Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 4.908 Ha (empat ribu sembilan ratus delapan hektar);

4. Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 4.329 Ha (empat ribu tiga ratus dua puluh sembilan hektar);
5. Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 35.047 Ha (tiga puluh lima ribu empat puluh tujuh hektar); dan
6. Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 33.188 Ha (tiga puluh tiga ribu seratus delapan puluh delapan hektar).

b. Perkebunan Rakyat meliputi:

1. Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 40.120 Ha (empat puluh ribu seratus dua puluh) hektar);
2. Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 45.660 Ha (empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh hektar);
3. Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 34.687 Ha (tiga puluh empat ribu enam ratus delapan puluh tujuh hektar);
4. Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 30.326 Ha (tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh enam hektar);
5. Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 22.264 Ha (dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat hektar); dan
6. Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 18.456 Ha (delapan belas ribu empat ratus lima puluh enam hektar).

Pengembangan kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

a. Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 791 Ha (tujuh ratus sembilan puluh satu hektar);
b. Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 318 Ha (tiga ratus delapan belas hektar);
c. Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 7.720 Ha (tujuh ribu tujuh ratus dua puluh hektar);
d. Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 566 Ha (lima ratus enam puluh enam hektar);
e. Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 467 Ha (empat ratus enam puluh tujuh hektar);
f. Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 160 Ha (seratus enam puluh hektar); dan
g. Kota Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 80 Ha (delapan puluh hektar).

Saat ini, fungsi strategis lahan pertanian secara sosial, ekonomi dan religius bagi masyarakat agraris, terus berkurang dengan cepat karena kebutuhan terhadap lahan-lahan baru serta luas lahan yang terbatas serta laju pertumbuhan penduduk yang memerlukan lahan, alih fungsi lahan tidak dapat dihindari. Alih fungsi lahan bila tidak diantisipasi akan mengancam ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan petani dan masyarakat.

3) Kawasan peruntukan perikanan

Kawasan peruntukan perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk Tahun 2022 disesuaikan dengan penataan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040.

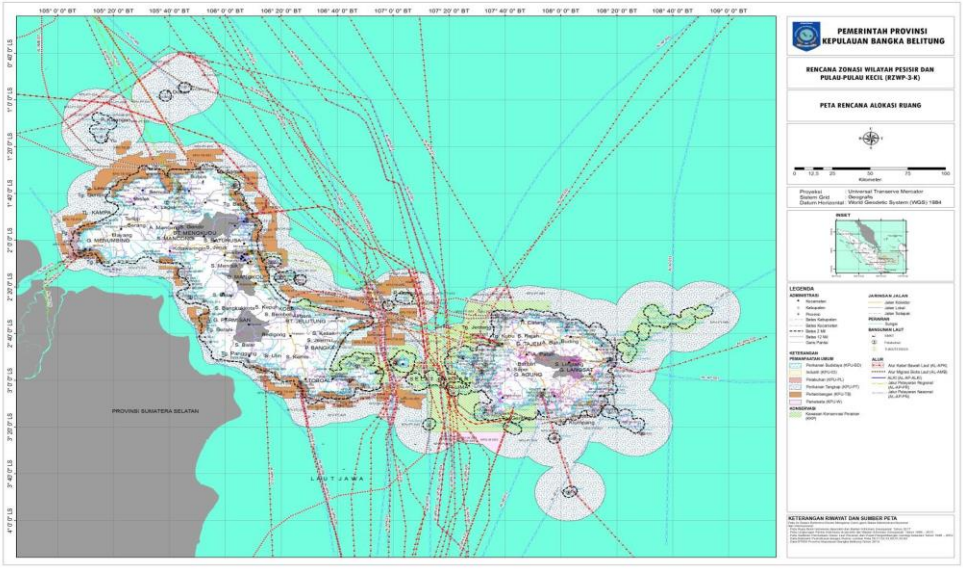
Pengembangan kawasan peruntukan perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan kebijakan RZWP3K adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perairan laut wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; menciptakan kepastian hukum dalam pemanfaatan sumber daya di perairan laut wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya perairan laut wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara efektif, tertib dan berkelanjutan.

Dalam melaksanakan kebijakan RZWP3K tersebut, dilakukan beberapa strategi dalam pemanfaatan perairan laut wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yaitu: mendorong pengembangan usaha; memberikan kemudahan dalam berusaha; mempercepat proses perizinan berusaha; melakukan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan ruang; serta monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang perairan laut wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Mengacu pada Rencana Alokasi Ruang pada RZWP3K, maka kawasan peruntukan perikanan termasuk ke dalam kawasan pemanfaatan umum (KPU), dimana alokasi ruang lainnya merupakan Kawasan Konservasi (KK), dan Alur Laut (AL) sebagaimana pada gambar dibawah ini,

**Gambar II.13**

Rencana Alokasi Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040




*Sumber : Perda RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040*

Peruntukan kawasan perikanan berdasarkan rencana alokasi ruang dibagi menjadi:

1) Zona Perikanan Budi daya (KPU-BD), yang terdiri dari: sub zona budi daya laut (KPU-BD-BL); dan sub zona budi daya air payau (KPU-BD-BP). Selanjutnya sub zona

ini memiliki arah pengembangan mulai dari perairan Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, dan Belitung Timur.

2) Zona Perikanan Tangkap (KPU-PT) memiliki sub zona yang terdiri dari sub zona pelagis (KPU-PT-P) yang memiliki arah pengembangan pada perairan Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, Belitung Timur, dan Pangkalpinang; dan sub zona demersal (KPU-PT-D) yang memiliki arah pengembangan pada perairan Kabupaten Bangka Selatan dan Belitung.

Dalam pengembangannya, kawasan peruntukan perikanan telah didukung dengan penyediaan pelabuhan ikan yang terdiri dari Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), PPN Sungailiat, PPN Tanjung Pandan, Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI), PPP Muara Sungai Baturusa, PPI Kurau, PPI Manggar, PPI Sungai Selan, PPI Sadai, PPI Selat Nasik, dan PPI Gantung.

Selain kawasan peruntukan perikanan, rencana alokasi ruang pada RZWP3K juga diperuntukkan untuk Kawasan Konservasi Perairan (KKP). KKP memiliki arah pengembangan pada wilayah perairan Kabupaten Bangka yaitu Perairan Tuing; Kabupaten Bangka Selatan yaitu Perairan Kecamatan Tukak Sadai, Lepar Pongok, dan Kepulauan Pongok; Kabupaten Bangka Tengah yaitu Perairan Pulau Ketawai, Perairan Pulau Gusung Ketugar, Perairan Pulau Bebuar, Perairan Pulau Ketugar, Perairan Kecamatan Perlang; Kabupaten Belitung yaitu Perairan Membalong dan Sekitarnya, Perairan Timur Selat Nasik, Selat Gaspar, Pulau Keluang; dan Kabupaten Belitung Timur yaitu Perairan Gugusan Pulau-Pulau Momparang dan Perairan Sekitarnya.

Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021, Kawasan Konservasi Perairan (KKP) yang telah dikelola baru mencapai 627.612,9 ha meliputi wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai berikut:

1. Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Belitung (391.820,2 Ha); Penetapan Menteri (Kepmen KP No 94 tahun 2020 tanggal 22 September 2020) tentang Kawasan Konservasi Perairan Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung);
2. Kawasan Konservasi Perairan Gugusan Pulau-Pulau Momparang dan Perairan Sekitarnya Kabupaten Belitung Timur (124.320,7 Ha); Penetapan Menteri (Kepmen KP Nomor 52 tahun 2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Kawasan Konservasi Perairan Gugusan Pulau-Pulau Perairan Sekitarnya Kab. Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung);
3. Kawasan Konservasi Perairan Tuing Kabupaten Bangka (7.372,5 Ha); Pencadangan sebagai KKLD melalui SK Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/739/DKP/2018 tanggal 27 September 2018 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Tuing Kabupaten Bangka dengan luas 9.809,56 ha dan telah disetujui oleh masyarakat dan nelayan dalam 2 kali konsultasi publik, akan tetapi dengan disahkannya Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi terjadi perubahan nomenklatur penamaan zona dan ketika dilakukan penyusunan RZWP3K, Pemerintah Kabupaten Bangka melalui Surat Bupati Bangka Nomor 050.13/2117/BAPPEDA-II/2018 tanggal 11 Desember 2018 meminta kepada

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk pengurangan luasan pencadangan kawasan konservasi perairan seluas 2.449,6 Ha menjadi 7.360 Ha untuk kepentingan Kawasan Industri terpadu khususnya zona pelabuhan. Sehingga dilakukan perhitungan ulang kawasan konservasi dari luas awal 9.809,56 Ha menjadi 7.372,5 Ha tanpa mengurangi zona inti;

4. Kawasan Pulau Panjang, Pulau Ketawai, Pulau Bebuar, Pulau Gusung Asam dan Pulau Semujur Kabupaten Bangka Tengah (11.357,7 Ha); Pencadangan oleh Bupati Bangka Tengah (tahun 2017), tahap konsultasi publik;
5. Kawasan Konservasi Perairan Pulau Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan (92.511,9 Ha); Pencadangan oleh Bupati Bangka Selatan (tahun 2012), tahap konsultasi publik.

4) Kawasan peruntukan pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan adalah kawasan darat seluas ± 400.000 Ha di dalam WP yang menyebar di seluruh kabupaten/kota. Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan dilakukan dengan memfasilitasi kegiatan ekplorasi peningkatan status WIUP eksplorasi menjadi WIUP operasi produksi sesuai hasil kajian, memfasilitasi dan mengawasi kegiatan operasi produksi, identifikasi dan penetapan wilayah pertambangan rakyat, dan memfasilitasi dan mengawasi kegiatan reklamasi dan pasca tambang. Penetapan kawasan peruntukan pertambangan kawasan darat seluas 357.746 Ha diwilayah WP yang menyebar di seluruh kabupaten/kota.

**Gambar. II.14**
Peta Kawasan Tambang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung




*Sumber : Bangka Belitung Dalam Angka, BPS 2021"Data termutakhir"*

Sektor pertambangan selama ini menjadi penopang utama perekonomian di Kepulauan Bangka Belitung. Meskipun produksi pertambangan itu sendiri semakin berkurang saat ini, namun potensi yang dimiliki masih cukup besar. Potensi pertambangan dari mineral logam sebagaimana tabel dibawah ini:

**Tabel II.9**
Potensi Mineral Logam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 (ton)

| No | Jenis Bahan Galian | Tipe | Potensi Sumber Daya dan Cadangan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Timah | Bauksit | Monasit | Xenotim | Titan Plaser |
| 1 | Logam | Sumber daya | 2.180.081,17 | 368.900 | 181.735,56 | 20.734,22 | 515.188,8 |
| | | Cadangan | 1.971.101,13 | | | 0,058 | 562 |
| 2 | Bijih | Sumber daya | 6.008.646.449,35 | 3.100.000 | 6.384.384.512 | 6.466.257.914 | 6.869.184 |
| | | Cadangan | 6.126.513.015,52 | | | 0,089 | |
| | | | Besi Primer | Seng | Timbal | Perak | |
| 1 | Logam | Sumber daya | 18.524.963,28 | 1.679.138 | 1.027.076 | 1.301,76 | |
| | | Cadangan | 10 | | | | |
| 2 | Bijih | Sumber Daya | 35.974.623 | 25.610.000 | 25.610.000 | 25.610.000 | |
| | | Cadangan | 50.161,00 | | | | |

*Sumber: Sumber: Badan Geologi Kementerian ESDM, 2023*

Terdapat 9 potensi mineral logam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu timah, bauksit, monasit, xenotim, titan plaser, besi primer, seng, timbal, dan perak. Potensi mineral logam timah terdapat di seluruh kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sedangkan potensi 8 mineral logam lainnya tersebar di 6 kabupaten. Dari 9 (sembilan) potensi sumber daya alam, diketahui potensi sumber daya paling banyak adalah bijih monasit sebesar 6.384.384.512 ton, disusul biji timah sebesar 6.008.646.449,35 ton. Sedangkan untuk logam perak merupakan potensi sumber daya logam yang paling sedikit yaitu sebesar 1.301,76 ton.

Potensi mineral bukan logam terdiri dari kaolin, pasir kuarsa, dan granit. Untuk data potensi bahan galian non logam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik potensi sumber daya maupun cadangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel II.10**
Potensi Mineral Bukan Logam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 (ton)

| No | Jenis Bahan Galian | Tipe | Potensi Sumber Daya dan Cadangan |
|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* |
| 1 | Kaolin | Sumber Daya | 376.687.532 |
| | | Cadangan | 5.990.630 |
| 2 | Pasir kuarsa | Sumber Daya | 690.424.868 |
| | | Cadangan | 18.389.856 |
| 3 | Granit | Sumber Daya | 585.642.513 |
| | | Cadangan | 20.480.630 |

*Sumber: Badan Geologi Kementerian ESDM, 2023*

Sumber daya pasir kuarsa menempati posisi tertinggi yaitu sebesar 690.424.868 ton, disusul granit sebesar 585.642.513 ton, dan kaolin sebesar 376.687.532 ton.

5) Kawasan peruntukan industri

Kawasan pembangunan industri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 7 (tujuh) kawasan dengan total luas kawasan sekitar 15.158 Ha yang tersebar di 7 kota/kabupaten. Ketujuh peruntukan kawasan tersebut adalah : (1) Ketapang Kota Pangkalpinang (2) Tanjung Ular dan Tanjung Kelian di Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, (3) Sungailiat di Kabupaten Bangka, (4) Sadai di Kabupaten Bangka Selatan, (5) Suge di Kabupaten Belitung, (6) Air Kelik di Kabupaten Belitung Timur, dan (7) Tanjung Berikat di Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah.

**Tabel II.11**
Kawasan Peruntukan Industri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| No | Nama Kawasan Industri | Dasar Hukum Pembentukan Kawasan | Luas Kawasan (Ha) | Bidang Kewenangan |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1 | Kawasan Peruntukan Industri Pangkalpinang (Ketapang) | Perda Kota Pangkalpinang No.1 Th 2012 ttg RTRW Kota Pangkalpinang 2011-2030 | ± 440 | Kota Pangkalpinang |
| 2 | Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Bangka Barat (Tanjung Ular dan sekitar Tanjung Kalian) | Perda Kab. Bangka Barat No.1 Tahun 2014 ttg RTRW Kab. Bangka Barat 2014-2034 | ± 1.414 | Kabupaten Bangka Barat |
| 3 | Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Bangka (Jelitik, Sungailiat) | Perda Kab. Bangka No. 15 Tahun 2014 ttg RDTR Sungailiat 2014-2034 | ± 253 | Kabupaten Bangka |
| 4 | Kawasan peruntukan industri Kabupaten Bangka Selatan (Sadai) | Perda Kab. Bangka Selatan No.6 Tahun 2014 ttg RTRW Kab. Bangka Selatan 2014-2034 | ± 3.086 | Kabupaten Bangka Selatan |
| 5 | Kawasan peruntukan industri Kabupaten Belitung (Suge) | Perda Kab. Belitung No.3 Tahun 2014 ttg RTRW Kab. Belitung 2014-2034 | ± 1.414 | Kabupaten Belitung |
| 6 | Kawasan industri Kabupaten Belitung Timur (Air Kelik) | Perda Kab. Belitung Timur No.13 Tahun 2014 ttg RTRW Kab. Beltim 2014-2034 | ± 1.532 | Kabupaten Beltim |
| 7 | Kawasan peruntukan industri Kabupaten Bangka Tengah (Tanjung Berikat-Lubuk Besar) | Perda Kab. Bangka Tengah No.48 Tahun 2011 ttg RTRW Kab. Bangka Tengah 2011-2031 | ± 7.019 | Kabupaten Bangka Tengah |
| | **Total Luas Kawasan** | | **± 15.158** | |

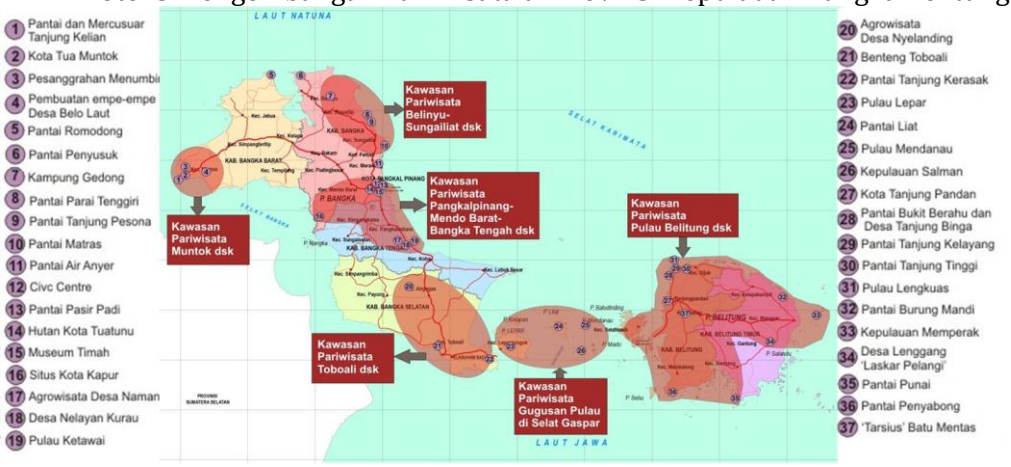
*Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022*

6) Kawasan peruntukan pariwisata

Dalam penataan ruang, kawasan pariwisata merupakan bagian dari kawasan budidaya. Kriteria yang digunakan untuk menetapkan kawasan peruntukan pariwisata adalah

memiliki daya tarik wisata; dan/atau mendukung upaya pelestarian budaya, keindahan alam, dan lingkungan. Sebagai sektor yang ramah lingkungan, pariwisata juga diharapkan dapat menjadi penopang kehidupan masyarakat yang saat ini masih mengandalkan pada sektor pertambangan. Potensi Pengembangan Pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana gambar di bawah ini,

**Gambar II.15**
Potensi Pengembangan Pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung




*Sumber: RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034*

Daya Tarik Wisata (DTW) tersebar disemua kabupaten/kota di Provinsi Bangka Belitung, dimana Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung memiliki 81 DTW, Kabupaten Belitung Timur 120 DTW, Kabupaten Bangka Barat 47 DTW, Kabupaten Bangka Tengah 42 DTW, Kabupaten Bangka Selatan 66 DTW, dan Pangkal pinang 25 DTW.

Dalam RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga telah mengatur kawasan peruntukan pariwisata di wilayah provinsi yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan wisata, terdiri dari:

a) Wisata alam, meliputi:
   a. Seluruh wilayah pesisir Pulau Bangka, Pulau Belitung dan pulau-pulau kecil;
   b. Kawasan pariwisata bahari yang berupa kawasan pantai dan lautnya yang dimanfaatkan untuk pariwisata alam yang ada di kabupaten/kota, serta kawasan Pariwisata pulau-pulau kecil yang ada di Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung, dan Kabupaten Belitung Timur;
   c. Kawasan pariwisata alam berupa kawasan wisata hutan;
   d. Kawasan wisata alam berupa pemandian sumber air panas alam yang dimanfaatkan untuk pariwisata di Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, dan Kabupaten Bangka Selatan;
   e. Taman wisata laut;
   f. Kawasan Strategis Pariwisata Tanjung Kelayang; dan
   g. Kawasan pariwisata alam unggulan lainnya di kabupaten/kota.

b) Wisata budaya, meliputi:

a. Kawasan Kota Tua Mentok di Kabupaten Bangka Barat;

b. Kawasan Situs Kota Kapur di Kabupaten Bangka;

c. Kawasan yang di dalamnya terdapat cagar budaya dan atau yang memiliki ciri-ciri cagar budaya di kabupaten/kota;

d. Kawasan wisata budaya yang memiliki daya tarik wisata budaya *tangible* maupun *intangible* yang ada di kabupaten/kota;

c) Wisata buatan, meliputi:

Kawasan wisata yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya, yang meliputi kawasan agro wisata, fasilitas rekreasi dan taman bertema dan *resort* serta fasilitas olahraga yang ada di kabupaten/kota.

7) Kawasan peruntukan permukiman

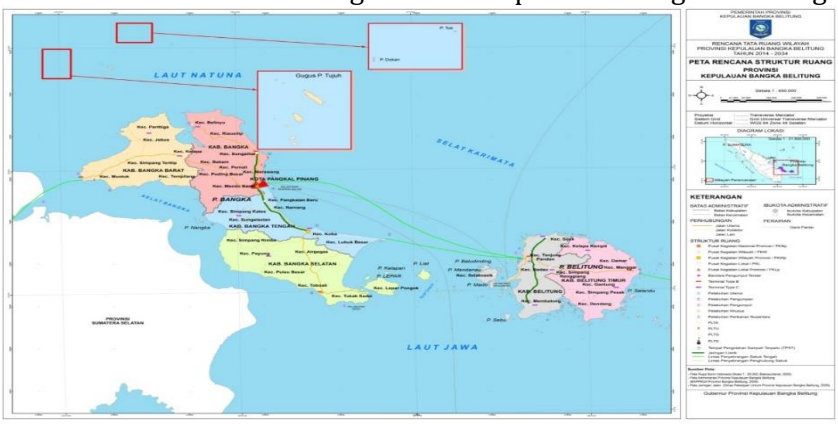
Kawasan peruntukan permukiman di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki luas kurang lebih 25.012,7 Ha. Dibedakan menjadi kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan. Kawasan permukiman perkotaan dikembangkan pada pusat-pusat kegiatan/pelayanan seperti kawasan perkotaan Muntok, Sungailiat, Pangkalpinang, Koba, Toboali, Tanjung Pandan, dan Manggar. Sedangkan kawasan permukiman perdesaan dikembangkan pada wilayah belakang (*hinterland* dari pusat-pusat permukiman yang disebut di atas).

8) Kawasan peruntukan lainnya

Kawasan peruntukan lainnya untuk wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa kawasan latihan militer di Kecamatan Belinyu, Sungailiat dan Kelapa Kampit. Pada kawasan ini selain terdapat instalasi militer juga merupakan kawasan latihan tempur yang mempunyai radius tempur udara (*air weapon range*/AWR), Kawasan peluncuran Rudal dan Kawasan Militer Angkatan Laut (LANAL). Kawasan ini menjadi sangat penting karena menjadi salah satu basis militer TNI dalam rangka menjaga keutuhan NKRI pada kawasan perbatasan, terutama perbatasan dengan Negara Singapura, Malaysia, Thailand dan China.

**Gambar II.16**

Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung




*Sumber : RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034*

9) Kawasan Strategis Provinsi

Dalam aspek keruangan, kawasan strategis merupakan kawasan yang didalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang di wilayah sekitarnya; Kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau Peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kawasan strategis provinsi merupakan bagian wilayah provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

Sebagai wilayah kepulauan, aspek maritim dan keberadaan geopark darat dan laut merupakan sebuah keunggulan sekaligus keunikan Bangka Belitung yang dapat mendukung pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Bangka Belitung. Pada tahun 2021 telah dilakukan penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Permukiman (RPIP) KSPN Babel, salah satunya pengembangan Klaster Kota Muntok (Klaster Eropa), Kabupaten Bangka Barat. Pengembangan Klaster Eropa Muntok diharapkan dapat meningkat kesejahteraan masyarakat dan berpengaruh sangat penting dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya.

**Gambar II.17**
Peta Kawasan Strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung




*Sumber: RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034*

Penetapan kawasan strategis Provinsi terdiri atas:

1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, meliputi:

   a) Kawasan industri dan pelabuhan Teluk Kelabat di Belinyu Kabupaten Bangka;

   b) Kawasan pelabuhan dan industri terpadu Tanjung Berikat di Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;

   c) Kawasan industri dan pelabuhan terpadu (KIPT) Mentok di Kawasan Tanjung Ular Kabupaten Bangka Barat;

   d) Kawasan Bandar Udara Depati Amir Pangkalanbaru dan Bandar Udara HAS Hanandjoeddin Tanjung Pandan;

e) Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Batu Betumpang di Kabupaten Bangka Selatan;

f) Kawasan minapolitan Tukak Sadai dan Lepar Pongok di Kabupaten Bangka Selatan;

g) Kawasan pelabuhan dan industri Sadai di Kabupaten Bangka Selatan;

h) Kawasan industri terpadu Suge dan pelabuhan Tanjung Batu di Kecamatan Badau dan Membalong Kabupaten Belitung;

i) Kawasan minapolitan Selat Nasik di Kabupaten Belitung;

j) Kawasan industri perikanan Tanjung Binga di Kabupaten Belitung;

k) Kawasan terpadu mandiri (Kecamatan Gantung) Kabupaten Belitung Timur;

l) Kawasan pelabuhan ASDP Manggar – Ketapang, Kabupaten Belitung Timur;

m) Kawasan Industri Terpadu Air Kelik (KIAK), Kabupaten Belitung Timur;

n) Kawasan pariwisata Tanjung Kelayang – Tanjung Tinggi, Kabupaten Belitung; dan

o) Kawasan lintas timur Pulau Bangka.

2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, meliputi: kawasan Universitas Bangka Belitung (UBB) dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) di Kabupaten Bangka, kawasan Kota Tua Mentok di Kabupaten Bangka Barat dan Museum Nasional Maritim di Kabupaten Belitung.

3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi: Cagar Alam Gunung Lalang di Kabupaten Belitung, Gunung Menumbing di Kabupaten Bangka Barat, Hutan Konservasi Gunung Maras di Kabupaten Bangka, Gunung Mangkol di Kabupaten Bangka Tengah, Gunung Permisan di Kabupaten Bangka Selatan, Jering Menduyung di Kabupaten Bangka Barat, Kawasan Situs Kota Kapur di Kabupaten Bangka, Kawasan Kepulauan Buku Limau di Kabupaten Belitung Timur, Taman Kehati di Kabupaten Belitung dan Karantina Hewan di Pulau Nadu di Kabupaten Belitung.

## C. Wilayah Rawan Bencana

Sejarah kebencanaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disebabkan oleh bencana alam dan bencana sosial. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bencana alam lebih disebabkan oleh kondisi geografis seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, angin puting beliung, ancaman gelombang ekstrim dan abrasi laut yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis, dan korban jiwa.

**Gambar II.18**
Peta Rawan Bencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung




*Sumber: BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021"Data termutakhir"*

Potensi rawan bencana alam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seperti banjir, puting beliung, tanah longsor, Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Potensi bencana tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini,

**Tabel II.12**
Wilayah yang Berpotensi Rawan Bencana dan Jenis Bencana
Yang Terjadi Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| NO | Lokasi Bencana | Jenis Bencana |
|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* |
| 1 | Bangka | Banjir, Puting Beliung, Karhutla |
| 2 | Bangka Tengah | Puting Beliung, Tanah Longsor, Karhutla |
| 3 | Bangka Selatan | Puting Beliung Dan Karhutla |
| 4 | Bangka Barat | Banjir, Puting Beliung, Karhutla |
| 5 | Belitung | Banjir, Puting Beliung, Karhutla |
| 6 | Belitung Timur | Banjir, Puting Beliung, Karhutla |
| 7 | Pangkalpinang | Banjir, Puting Beliung, Karhutla |

*Sumber: BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021*

Kawasan rawan bencana alam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, meliputi:

1. Kawasan rawan banjir terdapat di Kecamatan Gerunggang (Kota Pangkalpinang); Kecamatan Puding, Riau Silip, Mendo Barat (Kabupaten Bangka); Kecamatan Tanjung Pandan (Kabupaten Belitung); Kecamatan Parit Tiga (Kabupaten Bangka Barat); dan Kecamatan Gantung (Kebupaten Belitung Timur);
2. Kawasan rawan puting beliung terdapat di Kecamatan Taman Sari, Rangkui, Gabek, Gerunggang (Kota Pangkalpinang); Kecamatan Bakam (Kabupaten Bangka); Kecamatan Sijuk (Kabupaten Belitung); Kecamatan Pangkalan Baru dan Simpang Katis (Kabupaten

Bangka Tengah); Kecamatan Mentok, Jebus, Simpang Teritip, dan Parit Tiga (Kabupaten Bangka Barat); Kecamatan Manggar (Kabupaten Belitung Timur); dan Kecamatan Toboali (Kabupaten Bangka Selatan); dan

3. Kawasan rawan Karhutlah tersebar di Kecamatan Pangkal Balam, Bukit Intan, Gerunggang, Girimaya, Gabek (Kota Pangkalpinang); Kecamatan Sungailiat, Pemali, Puding Besar, Belinyu, Mendo Barat, Merawang, Bakam (Kabupaten Bangka); Kecamatan Tanjung Pandan, Sijuk, Badau, Membalong (Kabupaten Belitung); Kecamatan Pangkalan Baru, Simpang Katis, Koba, Namang, Lubuk Besar (Kabupaten Bangka Tengah); Kecamatan Mentok, Jebus, Kelapa, Parittiga, Tempilang, Simpang Teritip (Kabupaten Bangka Barat); Kecamatan Manggar, Simpang Renggiang, Damar, Gantung (Kabupaten Belitung Timur); Kecamatan Pulau Besar, Toboali dan Tukak Sadai (Kabupaten Bangka Selatan); dan
4. Kawasan rawan bencana longsor terdapat di Kecamatan Lubuk besar (Kabupaten Bangka Tengah).

Pada tahun 2020 kebencanaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat 4 (empat) potensi bencana dengan kejadian sebanyak 29 kejadian yaitu 5 banjir, 12 angin puting beliung, 3 tanah longsor dan 9 kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dengan korban meninggal dunia dan hilang akibat tanah longsor sebanyak 9 jiwa dan korban terdampak dan mengungsi akibat banjir sebanyak 95 jiwa, angin puting beliung sebanyak 77 jiwa sedangkan rumah terendam akibat banjir sebanyak 95 unit rumah, rusak berat akibat angin puting beliung 3 unit rumah, 23 unit rumah rusak sedang dan 51 unit rumah rusak ringan akibat angin puting beliung sedangkan untuk fasilitas publik seperti fasilitas kesehatan, peribadatan dan pendidikan tidak ada mengalami kerusakan. data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini,

**Tabel II.13**
Data Bencana Alam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

| Jenis Bencana | Jumlah Kejadian | Korban (Jiwa) | | | Rumah (unit) | | | | Fasilitas Publik(unit) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Meninggal Dunia & Hilang | Luka-luka | Terdampak & mengungsi | Rusak Berat | Rusak Sedang | Rusak Ringan | Terendam | Fasilitas Kesehatan | Fasilitas Peribadatan | Fasilitas Pendidikan |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* |
| Banjir | 5 | - | - | 4 | - | - | - | 95 | - | - | - |
| Angin Puting Beliung | 12 | - | - | 77 | 3 | 23 | 51 | - | - | - | - |
| Tanah Longsor | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kebakaran Hutan & lahan | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Jumlah** | **29** | **8** | **3** | **172** | **3** | **23** | **51** | **95** | **-** | **-** | **-** |

*Sumber: BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021"Data termutakhir"*

## D. Demografi

Kondisi Demografi Kepulauan Bangka Belitung secara umum tercermin melalui jumlah

penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, dan sebaran penduduk sebagaimana tabel di bawah ini,

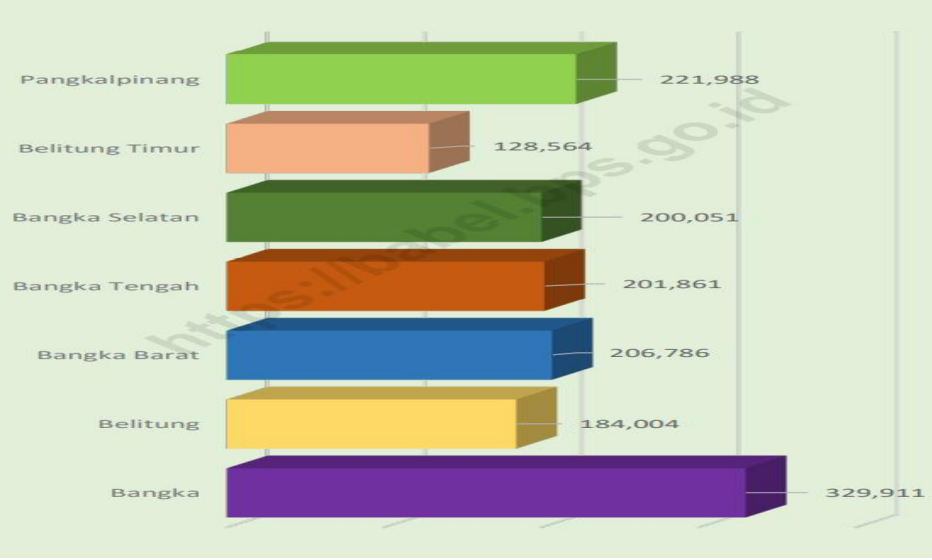
**Tabel II.14**
Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2021

| INDIKATOR | SATUAN | TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* |
| 1. Jumlah Penduduk | jiwa | 1.430.8 | 1.432.1 | 1.451.09 | 1.455.70 | 1.473.10 |
| 2. Laju Pertumbuhan Penduduk | persen | 2,07 | 2,02 | 1,98 | 1,93 | 1,60 |
| 3. Kepadatan Penduduk | Jiwa/km$^2$ | 87 | 89 | 91 | 92 | 93 |
| 4. Rasio Jenis Kelamin | persen | 108,30 | 108,37 | 108,44 | 108,49 | 108,54 |

*Sumber: BPS 2021 dan Bangka Belitung Dalam Angka, 2022*

Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat pada tahun 2020 sebanyak 1.455,70 jiwa. Angka ini mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebanyak 1.473.10 jiwa yang terdiri dari 759.10 penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 714 penduduk berjenis kelamin perempuan, dengan rasio jenis kelamin 108,54. Rasio jenis kelamin ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan.

**Grafik II.1**
Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2021




*Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2022*

Jumlah penduduk dan tingkat kepadatan kabupaten/kota tergambar pada tabel dibawah ini. Tabel tersebut menunjukkan bahwa, penduduk terbanyak pada tahun 2021 berada di Kabupaten Bangka yaitu sebesar 329,911 ribu jiwa dan yang paling sedikit di

Kabupaten Belitung Timur, sebanyak 128,564 ribu jiwa. Berdasarkan tingkat kepadatan penduduk, angka tertinggi berada di Kota Pangkalpinang yakni sebanyak 1.791 orang/km$^2$, dan terendah di Kabupaten Belitung Timur yakni sebanyak 52 orang/km$^2$.

**Tabel II.15**
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021

| Kabupaten/Kota | Luas Wilayah | | Penduduk (ribu) | | Kepadatan Penduduk (org/km$^2$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Km$^2$ | % luas Kepulauan Bangka Belitung | Jumlah | % terhadap penduduk Kepulauan Bangka Belitung | |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* |
| Kabupaten Bangka | 2.950,68 | 17,97 | 329,911 | 22,39 | 112 |
| Kabupaten Belitung | 2.293,61 | 13,97% | 184,004 | 12,49 | 80 |
| Kota Pangkalpinang | 89,40 | 0,72% | 221,988 | 15,07 | 2.483 |
| Kabupaten Bangka Barat | 2.820,61 | 17,17% | 201,786 | 14,04 | 73 |
| Kabupaten Bangka Tengah | 2.155,77 | 12,95% | 201,861 | 13,70 | 94 |
| Kabupaten Bangka Selatan | 3.607,08 | 21,96% | 200,051 | 13,58 | 56 |
| Kabupaten Belitung Timur | 2.506,91 | 15,26% | 128,564 | 8,73 | 51 |
| **Luas Daratan** | **16.424,23** | **20,10%** | | | |
| **Luas Perairan** | **65.301,00** | **79,90%** | | | |
| **Bangka Belitung** | **81.725,06** | **-** | **1.473,1** | **100** | **90** |

*Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2022*

Kepadatan penduduk juga menunjukkan peningkatan, dari 89 jiwa per km$^2$ pada tahun 2020 menjadi 90 jiwa per km$^2$. Pada tahun 2021 penduduk usia 0-14 tahun berjumlah 390.553, usia 15-64 tahun berjumlah 1.005.214 dan usia 65+ tahun berjumlah 64.106. Pada tahun 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memasuki era bonus demografi, dimana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari jumlah penduduk usia tidak bekerja. Agar bonus demografi dapat menjadi keuntungan bagi daerah, maka dibutuhkan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan, pengendalian penduduk, hingga kebijakan ekonomi.

**Tabel II.16**
Jumlah Penduduk Kepulauan Bangka Belitung
Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2021

| NO | KELOMPOK UMUR (TAHUN) | JENIS KELAMIN | | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| | | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* |
| 1 | 0-4 | 62,283 | 59,298 | 121,581 |
| 2 | 5-9 | 59,485 | 56,990 | 116,475 |
| 3 | 10-14 | 63,922 | 60,297 | 124,219 |
| 4 | 15-19 | 65,397 | 61,491 | 126,888 |
| 5 | 20-24 | 64,465 | 61,362 | 125,827 |
| 6 | 25-29 | 63,526 | 60,443 | 123,969 |

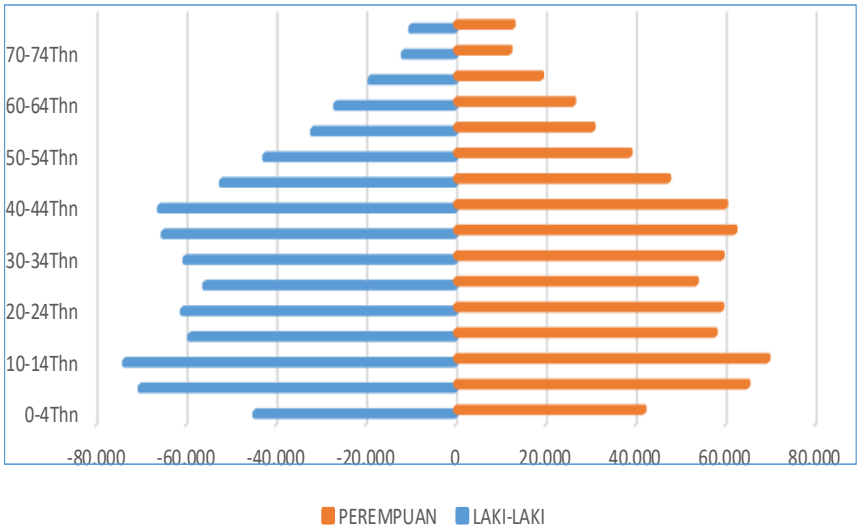
| NO | KELOMPOK UMUR (TAHUN) | JENIS KELAMIN | | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| | | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* |
| 7 | 30-34 | 64,651 | 60,976 | 125,627 |
| 8 | 35-39 | 62,367 | 58,069 | 120,436 |
| 9 | 40-44 | 68,623 | 58,715 | 112,338 |
| 10 | 45-49 | 52,003 | 47,314 | 99,317 |
| 11 | 50-54 | 42,766 | 39,194 | 81,960 |
| 12 | 55-59 | 34,277 | 31,778 | 66,055 |
| 13 | 60-64 | 26,180 | 24,761 | 50,941 |
| 14 | 65-69 | 18,570 | 18,173 | 36,743 |
| 15 | 70-74 | 10,983 | 11,299 | 22,282 |
| 16 | 75+ | 8,054 | 10,453 | 18,507 |
| **JUMLAH** | | **757,552** | **715,613** | **1,473,165** |

*Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2022*

Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didominasi oleh penduduk usia produktif, terutama penduduk pada usia 30-45 tahun dan usia 10-14 tahun. Komposisi ini juga menunjukkan bahwa penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sedang mengarah pada struktur penduduk tua dan usia anak-anak.

Terlihat pula bahwa penduduk usia 0-4 tahun sudah mulai bertambah dan penduduk usia 5 tahun keatas lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk usia 1-4 tahuh, diduga karena penurunan tingkat kelahiran, penurunan tingkat kematian bayi ataupun tingginya jumlah pendatang, sebagaimana grafik dibawah ini:

**Grafik II.2**
Piramida Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Semester II Tahun 2021




*Sumber: Profil Kependudukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021"Data termutakhir"*

Piramida penduduk ini dapat digunakan untuk membuat perencanaan pembangunan dengan memperhatikan umur dan jenis kelamin secara cepat dan juga berguna untuk evaluasi data kependudukan yang dikumpulkan. Dengan melihat gambar piramida penduduk, kita mengetahui struktur umur penduduk dan implikasinya terhadap tuntutan penyediaan layanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kebutuhan dasar penduduk (baik balita, remaja, dewasa, laki-laki, perempuan dan lansia) sekaligus melihat potensi tenaga kerja serta membayangkan kebutuhan tambahan kesempatan kerja yang diciptakan.

### 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

#### 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat dilihat dari beberapa indikator pembangunan, yaitu pertumbuhan PDRB, laju inflasi provinsi, PDRB per kapita, indeks gini, pemerataan pendapatan versi Bank Dunia, Indeks Ketimpangan Williamson (indeks ketimpangan regional), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan persentase penduduk diatas garis kemiskinan.

1. Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu. Gambaran perkembangan perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama kurun waktu Tahun 2018-2022 dilihat berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku (ADHB) dan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010. Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2019, perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2020, adanya pandemi Covid-19 memberikan dampak besar bagi perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menyebabkan penurunan nilai PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Selanjutnya tahun 2021 hingga tahun 2022, perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus mengalami peningkatan.

**Tabel II.17**

PDRB Tahun 2018 –2022 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Milyar Rupiah)

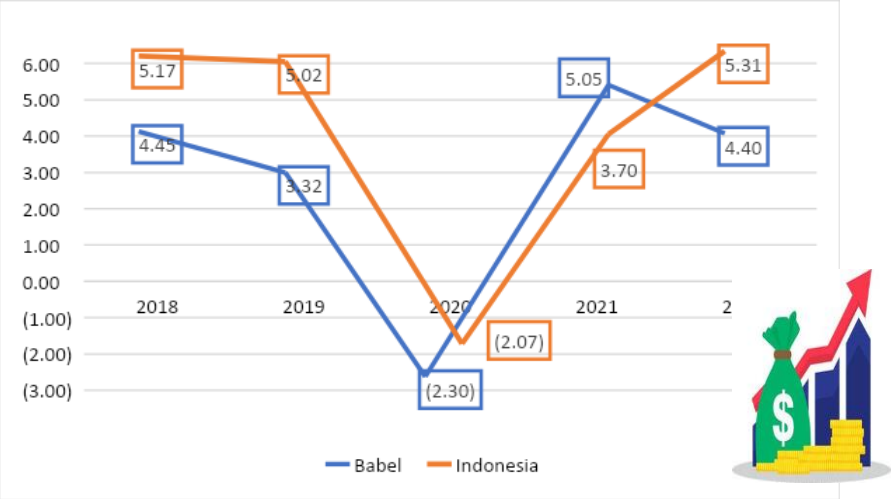
| No. | PDRB | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* |
| 1. | Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) | 73.113,3 | 75.795 | 75.520 | 85.961 | 95.285 |
| 2. | Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) | 52.208 | 53.941,9 | 52.699,2 | 55.370 | 57.803 |

*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023*

Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp95,285 triliun dan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 mencapai Rp57,803 triliun. Capaian ini meningkat dari tahun 2019 sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 mengalami pertumbuhan

sebesar 4,40 persen, melambat dibandingkan dengan tahun 2021 yang tumbuh sebesar 5,05. Setelah sempat terkontraksi pada tahun 2020 sebesar 2,30 persen sebagai dampak adanya pandemi Covid-19, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami fluktuasi, meningkat pada tahun 2021, satu tahun pasca Covid-19 dan kembali menurun pada tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung dari tahun 2018 sampai dengan 2022 sebagaimana diperlihatkan pada Grafik II.3 di bawah ini.

**Grafik II. 3**
Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022




*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023*

Pertumbuhan perekonomian Bangka Belitung pada tahun 2022 dari sisi produksi, lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 20,96 persen, diikuti oleh lapangan usaha jasa perusahaan yang tumbuh sebesar 10,99 persen serta lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor yang tumbuh sebesar 10,63 persen. Pertumbuhan yang tinggi pada lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan disebabkan semakin menurunnya kasus positif Covid-19 dan semakin longgarnya persyaratan bepergian mendorong semakin tingginya mobilitas penduduk yang berdampak pada peningkatan kinerja lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan. Peningkatan mobilitas penduduk ini juga ikut mendorong kinerja beberapa lapangan usaha pendukung pariwisata seperti Aktivitas Biro/Agen Perjalanan, Hotel, Restoran serta Jasa Hiburan dan Rekreasi

**Tabel II.18**
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha
(miliar rupiah) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 – 2022

| NO | LAPANGAN USAHA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| A. | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 5,43 | 2,85 | 8,15 | 0,96 | 1,02 |
| B. | Pertambangan dan Penggalian | -0,95 | 0,93 | -9 | 6,87 | 0,37 |

| NO | LAPANGAN USAHA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| C. | Industri Pengolahan | 3,97 | 1,2 | -5,62 | 5,46 | 5,15 |
| D. | Pengadaan Listrik dan Gas | 7,43 | 6,57 | 5,26 | 10,42 | -3,39 |
| E. | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | -5,39 | 3,4 | 5,59 | 4,93 | 4,05 |
| F. | Konstruksi | 5,74 | 7,07 | -2,38 | 4,31 | -1,06 |
| G. | Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 2,64 | 1,81 | -4,44 | 5,8 | 10,63 |
| H. | Transportasi dan Pergudangan | 6,79 | 2,23 | -16,47 | 8,94 | 20,96 |
| I. | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 6,2 | 9,25 | -2,95 | 10,56 | 10,35 |
| J. | Informasi dan Komunikasi | 10,68 | 13,33 | 14,89 | 8,76 | 9,86 |
| K. | Jasa Keuangan dan Asuransi | 6,78 | 4,97 | -6,72 | 5,57 | 5,57 |
| L. | Real Estat | 8,29 | 1,44 | 4,64 | 6,73 | 5,12 |
| M,N. | Jasa Perusahaan | 6,66 | 1,23 | -13,76 | 5,75 | 10,99 |
| O. | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 9,2 | 8,05 | -3,11 | 5,38 | -0,88 |
| P. | Jasa Pendidikan | 8,95 | 7,08 | -0,81 | 2,42 | 3,13 |
| Q. | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 4,55 | 10,18 | 1,09 | 14,16 | 2,16 |
| R,S,T,U. | Jasa Lainnya | 7,37 | 10,55 | -6,94 | 3,73 | 7,88 |
| **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)** | | **4,47** | **3,32** | **-2,29** | **5,05** | **4,40** |

*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023*

Struktur PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 didominasi oleh lima lapangan usaha utama yakni: Industri Pengolahan sebesar Rp20.809,81 milyar (21,84%); Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar Rp18.287,20 milyar (19,19%); Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp14.979,19 milyar (15,72%); Konstruksi sebesar Rp8.661,29 milyar (9,09%) serta Pertambangan dan Penggalian sebesar Rp8.196,80 milyar (8,60%)

**Tabel II.19**

Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2018–2022
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Miliar Rupiah)

| Lapangan Usaha | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* |
| A | Pertanian, | 13.159,31 | 13.159,90 | 15.443,74 | 16.887,33 | 18.287,20 |

| Lapangan Usaha | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* |
| | Kehutanan, dan Perikanan | | | | | |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 7.757,04 | 7.208,69 | 6.469,39 | 8.212,56 | 8.196,80 |
| C | Industri Pengolahan | 15.062,51 | 14.847,51 | 14.166,07 | 17.932,38 | 20.809,81 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 86,78 | 94,74 | 101,06 | 111,06 | 109,05 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 14,85 | 15,36 | 16,60 | 17,68 | 18,65 |
| F | Konstruksi | 7.104,89 | 7.860,85 | 7.709,80 | 8.314,32 | 8.661,29 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 11.470,82 | 11.972,41 | 11.607,67 | 12.684,56 | 14.979,19 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 3.103,80 | 3.376,50 | 2.730,71 | 3.093,02 | 4.195,58 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 1.896,61 | 2.203,60 | 2.295,29 | 2.579,05 | 2.933,52 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 1.254,40 | 1.426,17 | 1.630,65 | 1.787,42 | 1.988,10 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 1.415,13 | 1.509,59 | 1.407,83 | 1.560,35 | 1.792,59 |
| L | Real Estate | 2.517,39 | 2.627,43 | 2.792,92 | 3.011,65 | 3.260,68 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 217,19 | 232,19 | 212,41 | 230,56 | 268,48 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 4.418,82 | 4.797,17 | 4.837,64 | 5.099,56 | 5.069,82 |
| P | Jasa Pendidikan | 2.127,68 | 2.320,62 | 2.386,62 | 2.520,50 | 2.656,35 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 905,74 | 1.022,95 | 1.049,07 | 1.222,13 | 1.280,43 |
| R,S,T,U | Jasa lainnya | 600,31 | 689,28 | 662,79 | 697,16 | 777,88 |
| | **PDRB** | **73.113,28** | **75.794,96** | **75.519,77** | **85.961,29** | **95.285,43** |

*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023*

Selanjutnya, dilihat dari nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 nilai PDRB lapangan usaha industri pengolahan pada tahun 2018 sebesar Rp11.787,74 milyar dan pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp12.485,31 miliar. Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada periode yang sama sebesar Rp9.589,72 miliar dan meningkat menjadi Rp10.878,41 miliar. Nilai PDRB sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor Rp7.444,85 miliar dan meningkat menjadi sebesar Rp8.477,75 miliar.

**Tabel II.20**

Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2018 – 2022

| Lapangan Usaha | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* |
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 9.589,72 | 9.862,83 | 10.666,36 | 10.768,72 | 10.878,41 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 6.571,47 | 6.632,67 | 6.036,00 | 6.450,68 | 6.474,56 |
| C | Industri Pengolahan | 11.787,74 | 11.928,98 | 11.259,12 | 11.873,92 | 12.485,31 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 49,27 | 52,51 | 55,27 | 61,03 | 58,96 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 8,90 | 9,20 | 9,72 | 10,20 | 10,61 |
| F | Konstruksi | 4.492,35 | 4.809,79 | 4.695,26 | 4.897,58 | 4.845,59 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 7.444,85 | 7.579,73 | 7.243,41 | 7.663,26 | 8.477,75 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 2.020,72 | 2.065,71 | 1.725,40 | 1.879,61 | 2.273,52 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 1.207,04 | 1.318,71 | 1.279,78 | 1.414,90 | 1.561,28 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 1.109,94 | 1.257,86 | 1.445,18 | 1.571,71 | 1.726,63 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 941,03 | 987,80 | 921,44 | 972,78 | 1.027,00 |
| L | Real Estate | 1.702,44 | 1.726,90 | 1.807,00 | 1.928,67 | 2.027,40 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 135,95 | 137,62 | 118,68 | 125,50 | 139,30 |
| O | Administrasi Pemerintah-an, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 2.843,63 | 3.072,68 | 2.977,14 | 3.137,40 | 3.109,83 |
| P | Jasa Pendidikan | 1.289,16 | 1.380,49 | 1.369,37 | 1.402,51 | 1.446,43 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 632,76 | 697,14 | 704,77 | 804,54 | 821,94 |
| R,S,T,U | Jasa lainnya | 381,08 | 421,28 | 392,02 | 406,65 | 438,70 |
| | **PDRB** | **52.208,04** | **53.941,9** | **52.705,94** | **55.369,65** | **57.803,20** |

*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023*

Secara teoritis nilai PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan akumulasi dari nilai PDRB kabupaten dan kota yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan PDRB ADHB sebagaimana diperlihatkan pada Tabel II.21, sepanjang periode tahun 2018–2022 kecuali tahun 2020 disebabkan pandemi Covid-19, nilai PDRB kabupaten/kota dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus meningkat. Dari besaran

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut, selama kurun waktu lima tahun terakhir, daerah yang memberikan kontribusi terbesar adalah Kabupaten Bangka, Kota Pangkalpinang , dan Kabupaten Bangka Barat.

**Tabel II.21**
Perkembangan PDRB/PDB Atas Dasar Harga Berlaku
menurut Kabupaten/Kota/Provinsi/Nasional (miliar rupiah)
Tahun 2018 – 2022

| Kab/Kota/ Prov/ Nasional | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* |
| Bangka | 13.310,57 | 13.765,43 | 13.932,94 | 16.166.01 | 17.958.78 |
| Belitung | 9.314,62 | 9.856,80 | 9.826,82 | 11.011.04 | 12.322.37 |
| Bangka Barat | 13.817,30 | 14.157,20 | 13.414,98 | 15.431.57 | 16.759.68 |
| Bangka Tengah | 8.213,32 | 8.566,90 | 8.447,02 | 9.372.1 | 10.542.13 |
| Bangka Selatan | 8.457,25 | 8.664,39 | 8.679,07 | 9.776.17 | 10.692.54 |
| Belitung Timur | 7.405,86 | 7.713,77 | 7.833,74 | 8.882.48 | 9.785.77 |
| Pangkalpinang | 12.955,30 | 13.648,93 | 13.454,65 | 15.375.99 | 17.277.54 |
| **Bangka Belitung** | **73.113.28** | **75.794.96** | **75.519.77** | **85.961.29** | **95.285.43** |
| **Nasional** | **14.838.756.0** | **15.832.657.2** | **15.443.353.2** | **16.976.690.8** | **19.588.445.6** |

*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023*

Berdasarkan PDRB ADHK Tahun 2010 sebagaimana diperlihatkan pada Tabel II.22, juga menunjukkan bahwa sepanjang periode tahun 2018–2022 kecuali tahun 2020 disebabkan pandemi Covid-19, nilai PDRB kabupaten/kota dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus meningkat. Nilai PDRB ADHK pada tahun 2021 meningkat dibandingkan dengan nilai PDRB pada tahun 2019, sebelum terjadinya Covid-19. Dari besaran PDRB Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut, selama kurun waktu lima tahun terakhir, daerah yang memberikan kontribusi terbesar adalah Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, dan Kota Pangkalpinang.

**Tabel II.22**
Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut
Kabupaten/Kota/Provinsi/Nasional (Miliar Rupiah) Tahun 2018–2022

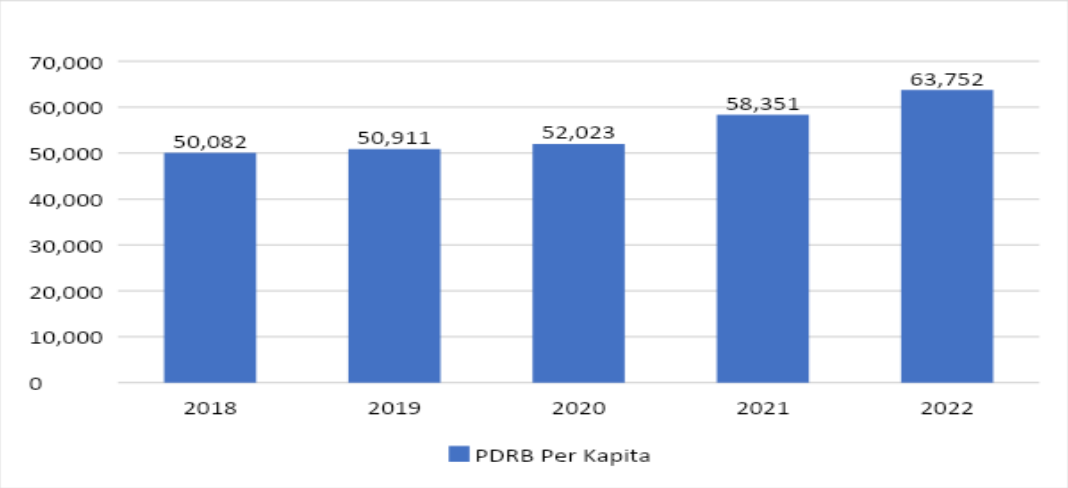
| Kab/Kota/ Prov/ Nasional | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* |
| Bangka | 9.778,03 | 10.058,79 | 9.988.8 | 10.733.86 | 11.256.22 |
| Belitung | 6.290,86 | 6.500,42 | 6.352.86 | 6.710.01 | 7.093.36 |
| Bangka Barat | 10.177,2 | 10.895.22 | 10.312.21 | 10.333 | 10.540.42 |
| Bangka Tengah | 5.812,7 | 5.883.1 | 5.715.6 | 5.987.14 | 6.352.64 |
| Bangka Selatan | 6.024,21 | 6.176.84 | 6.057.88 | 6.276.8 | 6.469.33 |
| Belitung Timur | 5.326,12 | 5.499.98 | 5.465.46 | 5.714.79 | 5.931.76 |

| Kab/Kota/ Prov/ Nasional | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* |
| Pangkalpinang | 8.782,79 | 9.069.28 | 8.797.13 | 9.611.44 | 10.208.34 |
| **Bangka Belitung** | **52.208,04** | **53.941.9** | **52.705.94** | **55.369.65** | **57.803.2** |
| **Nasional (triliun)** | **10.425.851,9** | **10.949.155.4** | **10.722.999.3** | **11.120.077.9** | **11.710.397.8** |

*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023*

Nilai PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2018– 2022 terus mengalami peningkatan, walaupun tahun 2020 menurun yang disebabkan adanya pandemi Covid-19, namun meningkat signifikan pada tahun 2021 selanjutnya terus meningkat pada tahun 2022. Pada tahun 2018, nilai PDRB per kapita tercatat sebesar Rp50.082 ribu, hingga tahun 2021 meningkat signifikan menjadi Rp63.752 ribu. Gambaran mengenai perkembangan PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018–2022, sebagaimana disajikan pada Grafik II.4

**Grafik II. 4**
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ribu rupiah)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022

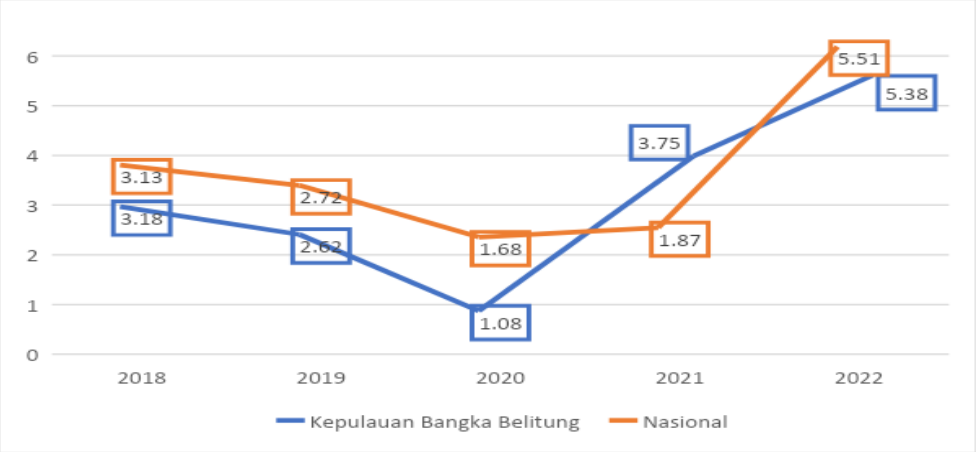



*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023*

1. Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Sepanjang tahun 2018–2020 tingkat inflasi tahunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami penurunan. Selanjutnya tingkat inflasi tahunan semakin meningkat hingga tahun 2022 menjadi 5,38.

**Grafik II.5**
Tingkat Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022




*Sumber: BPS, 2023*

Selama tahun 2017-2021, beberapa komoditas yang memberikan sumbangan/andil inflasi dominan diantaranya adalah kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar; kesehatan; pendidikan, rekreasi, dan olahraga; dan makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau.

**Tabel II.23**
Andil/Sumbangan Kelompok Pengeluaran Terhadap Inflasi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2019

| Kelompok Pengeluaran | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* |
| Umum | 3,13 | 3,18 | 2,62 |
| 1. Bahan Makanan | 1,66 | 0,87 | 1,12 |
| 2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau | 2,90 | 0,67 | 0,59 |
| 3. Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar | 5,63 | 0,62 | 0,19 |
| 4. Sandang | 2,06 | 0,13 | 0,16 |
| 5. Kesehatan | 3,61 | 0,11 | 0,07 |
| 6. Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga | 3,36 | 0,25 | 0,25 |
| 7. Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan | 2,09 | 0,53 | 0,24 |

*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021"Data termutakhir"*

Pada tahun 2022 inflasi tahunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 5,38 persen, meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 3,75 persen. Dilihat dari besarnya andil/sumbangan inflasi selama tahun 2022, dari 11 kelompok komoditas, 10 kelompok memberikan andil/sumbangan inflasi dan 1 kelompok memberikan andil/sumbangan deflasi yaitu kelompok pengeluaran Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan.

**Tabel II.24**
Andil/Sumbangan Kelompok Pengeluaran Terhadap Inflasi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2022

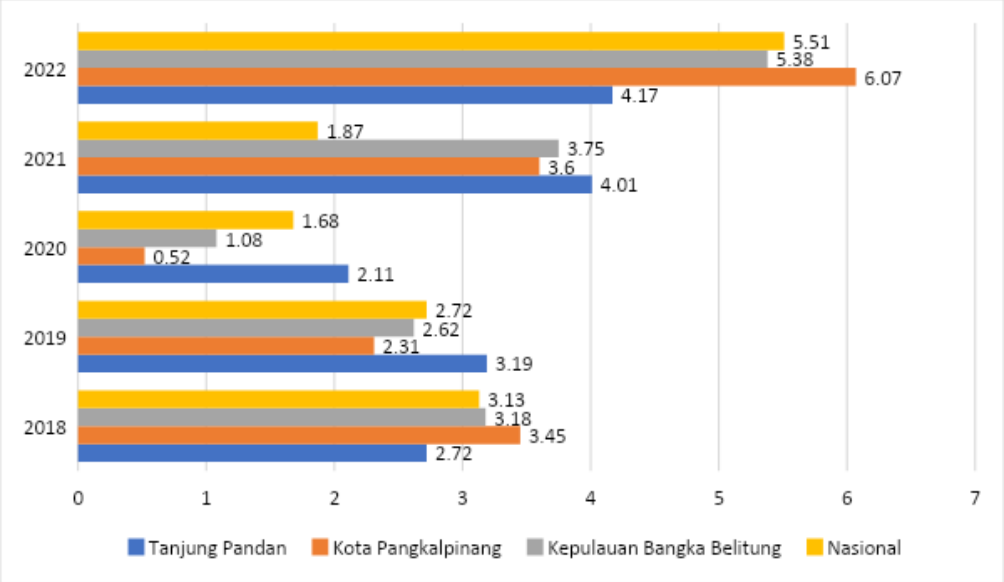
| Kelompok Pengeluaran | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Umum | 1.08 | 3.75 | 5.38 |
| 1. Makanan, Minuman, dan Tembakau | 4.31 | 7.59 | 2.6 |
| 2. Pakaian dan Alas Kaki | 0.52 | 0.8 | 1.34 |
| 3. Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga | 0.1 | 1.71 | 5.49 |
| 4. Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga | 2.06 | 1.49 | 2.45 |
| 5. Kesehatan | 0.37 | 1.61 | 0.67 |
| 6. Transportasi | -6.51 | 2.24 | 18.17 |
| 7. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan | -1.89 | -0.33 | -0.19 |
| 8. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya | 0.46 | -1.17 | 3.5 |
| 9. Pendidikan | 5.03 | 2.4 | 1.06 |
| 10. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran | 2.43 | 3.44 | 7.19 |
| 11. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya | 4.6 | 2.9 | 6.72 |

*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023*

Kelompok yang memberikan andil/sumbangan inflasi pada tahun 2022 yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,9091 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,0682 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,9006 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,1490 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,0165 persen; kelompok transportasi sebesar 2,3891 persen; kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya sebesar 0,0520 persen; kelompok Pendidikan sebesar 0,0274 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,5206 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,3499 persen. Sementara itu, kelompok yang memberikan andil/sumbangan terhadap deflasi yaitu kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar - 0,0101.

Perbandingan inflasi Kota Pangkalpinang, Tanjungpandan dan Nasional dapat dilihat sebagaimana grafik di bawah ini

**Grafik II.6**
Perbandingan Inflasi Pangkalpinang, Tanjung Pandan,
Kepulauan Bangka Belitung, dan Nasional 2018 – 2022



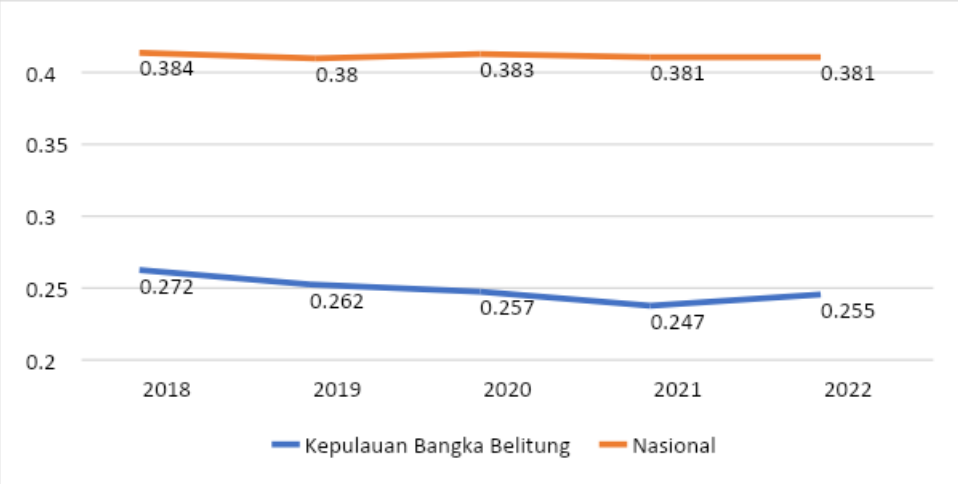

*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022*

Kondisi inflasi Pangkalpinang dan Tanjungpandan selama kurun waktu 2018-2022 mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat sejak tahun 2020. Inflasi di Tanjungpandan pada tahun 2018 2,72 dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 4,17, kondisi ini merupakan tingkat inflasi tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun sejak tahun 2018. Demikian juga dengan Kota Pangkalpinang, pada tahun 2018 mengalami inflasi sebesar 3,45 terus menurun sampai tahun 2020 menjadi 0,52 namun pada tahun 2022 tingkat inflasi menjadi 6,07, tertinggi dalam kurun waktu sejak tahun 2018 dan lebih tinggi dari pada nasional.

2. Indeks Gini

Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

**Grafik II.7**
Indeks Gini Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2018-2022



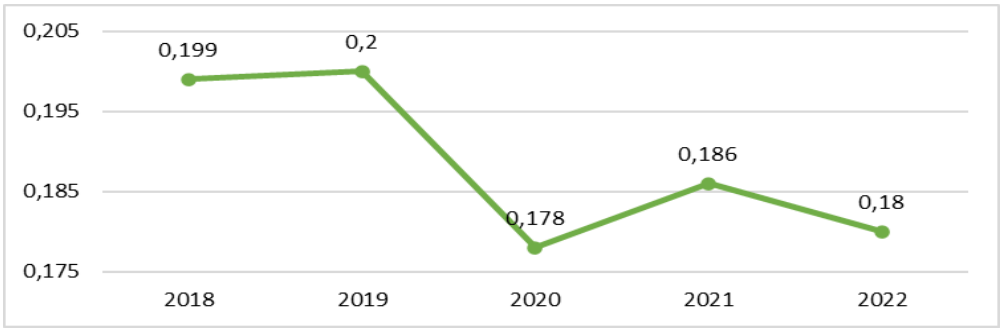

*Sumber: BPS, 2023*

Selama periode tahun 2018-2021, nilai Indeks Gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus menurun, dari 0,272 pada tahun 2018 menjadi 0,247 pada tahun 2021. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Bangka Belitung. Adanya pandemi Covid-19, tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pengeluaran. Namun pada tahun 2022, Indeks Gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkat menjadi 0,255. Secara nasional, selama empat tahun yaitu tahun 2019 hingga tahun 2022, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki nilai Indeks Gini terendah di Indonesia.

3. Indeks Ketimpangan Williamson

Indeks Williamson merupakan satu instrumen dalam pengukuran pembangunan wilayah di suatu daerah dengan membandingkannya dengan wilayah yang lebih tinggi. Dengan kata lain, Indeks Williamson secara garis besar mengukur seberapa kesenjangan yang ada pada suatu pembangunan pada suatu wilayah.

**Grafik II.8**
Indeks Williamson Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2018-2022



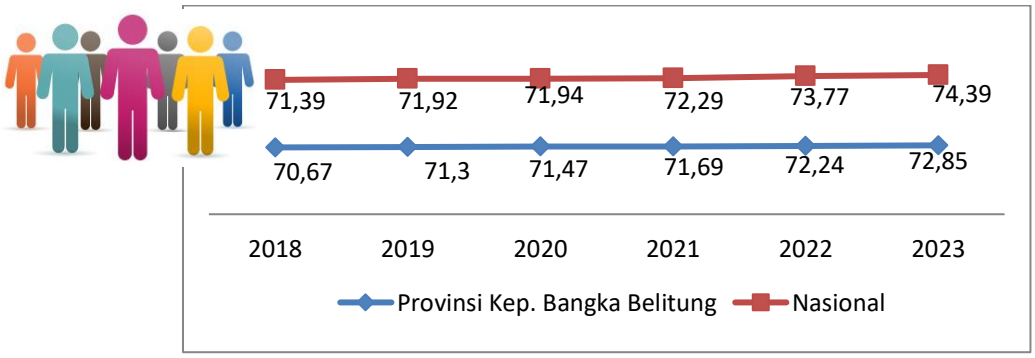

*Sumber: Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023*

Selama kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022 Indeks Ketimpangan Williamson Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami fluktuasi. Nilai indeks terendah sebesar 0,178 diperoleh pada tahun 2020, meningkat menjadi 0,186 pada tahun 2021 dan kembali menurun menjadi 0,18 pada tahun 2022. Nilai Indeks Williamson pada tahun 2022 masih lebih rendah dibandingkan dengan nilai pada tahun 2028. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan wilayah antar kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung semakin rendah yang menggambarkan pembangunan antar wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif baik, atau dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mendekati merata.

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar , yakni dimensi kesehatan, pengetahuan, dan standar hidup layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator rata-rata lama sekolah dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Adapun untuk mengukur dimensi standar hidup layak digunakan indikator rata-rata besarnya pengeluaran per kapita atau PNB per kapita.Pembangunan manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 6 (enam) tahun terakhir terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM), yaitu 70,67 di tahun 2018 menjadi 72,85 di tahun 2023, atau meningkat sebesar 2,18 poin, menempatkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kriteria tinggi. Peningkatan IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Grafik II.9**
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung dan Nasional
Tahun 2018-2023




*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023*

Berdasarkan grafik di atas, selama periode 2018-2023, capaian IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih berada di bawah capaian nasional. Di tahun 2023, capaian IPM nasional sebesar 74,39, sementara itu, capaian IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebesar 72,85 atau memiliki selisih 1,54 poin. Namun, selama periode enam tahun terakhir, capaian IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus mengalami peningkatan, dimana di tahun 2018 sebesar 70,67 naik menjadi 72,85 di tahun 2023. Capaian di tahun 2023 ini mengalami peningkatan sebesar 0,61 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya

(72,24). Peningkatan ini menunjukkan upaya serius Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam meningkatkan pembangunan manusia, meskipun pada tingkat nasional pembangunan manusia Bangka Belitung masih berada dibawah rata-rata nasional.

**Tabel II.25**
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Bangka Belitung

| Wilayah/Capaian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangka | 71,8 | 72,39 | 72,4 | 72,46 | 72,95 | 73,66 |
| Belitung | 71,7 | 72,46 | 72,51 | 72,57 | 73,38 | 74,02 |
| Bangka Barat | 68,68 | 69,05 | 69,08 | 69,6 | 70,12 | 70,45 |
| Bangka Tengah | 69,52 | 70,33 | 70,45 | 70,89 | 71,4 | 71,71 |
| Bangka Selatan | 65,98 | 66,54 | 66,9 | 67,06 | 67,95 | 68,51 |
| Belitung Timur | 70,22 | 70,84 | 70,92 | 71,42 | 72,29 | 72,86 |
| Kota Pangkalpinang | 77,43 | 77,97 | 78,22 | 78,57 | 79,24 | 79,93 |
| **Provinsi Kep. Bangka Belitung** | **70,67** | **71,3** | **71,47** | **71,69** | **72,24** | **72,85** |
| **Nasional** | **71,39** | **71,92** | **71,94** | **72,29** | **73,77** | **74,39** |

*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023*

Berdasarkan tabel di atas, IPM tertinggi tercatat di Kota Pangkalpinang dengan capaian tahun 2021 sebesar 78,57. Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Belitung Timur merupakan daerah dengan IPM berkategori "tinggi". Kabupaten Bangka Tengah yang semula mempunyai IPM berkategori sedang mulai tahun 2019 berpindah status ke kategori "tinggi". Masih terdapat dua kabupaten dengan kategori IPM "sedang" yaitu Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Bangka Barat.

5. Angka Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, menggunakan konsep kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan (makanan & bukan makanan). Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Perkembangan kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2018-2022 sebagaimana tabel di bawah ini,

**Tabel II.26**
Perkembangan Kemiskinan Tahun 2018-2022
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| No | Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* |
| 1. | Persentase Penduduk Miskin (%) | 5,25 | 4,62 | 4,53 | 4,90 | 4,61 |
| 2. | Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang) | 76,26 | 68,38 | 68,39 | 72,71 | 69,69 |
| 3. | Garis Kemiskinan (Rp) | 631.467 | 677,716 | 721,455 | 752,203 | 853,226 |
| 4. | Indeks kedalaman Kemiskinan (P1) | 0,69 | 0,51 | 0,60 | 0,60 | 0,48 |

*Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023*

Persentase penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu 2018-2022 cenderung fluktuatif. Persentase penduduk miskin pada September 2022 sebesar 4,61 persen, meningkat 0,16 persen poin terhadap Maret 2022 dan menurun 0,06 persen poin terhadap September 2021. Jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 69,69 ribu orang, meningkat 2,9 ribu orang terhadap Maret 2022 dan menurun 0,01 ribu orang terhadap September 2021.Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2022 sebesar 3,09 persen, naik menjadi 3,48 persen pada September 2022. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2022 sebesar 6,26 persen, turun menjadi 6,13 persen pada September 2022. Dibanding Maret 2022, jumlah penduduk miskin September 2022 perkotaan naik sebanyak 3,7 ribu orang (dari 26,48 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 30,21 ribu orang pada September 2022). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan turun sebanyak 0,8 ribu orang (dari 40,30 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 39,48 ribu orang pada September 2022). Garis Kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp 853.226,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 622.068,-/kapita/bulan dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp 231.158,-/kapita/bulan. Pada September 2022, secara rata-rata rumah tangga miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki 5,20 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp 4.436.775,-/rumah tangga miskin/bulan Perkembangan kemiskinan baik di kota maupun di desa dapat dilihat pada tabel di bawah ini,

**Tabel II.27**
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota dan Desa Tahun 2018-2022
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| No. | Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* |
| 1. | Tingkat Kemiskinan Kota (%) | 2,78 | 2,85 | 3,06 | 3,22 | 3,48 |
| 2. | Tingkat Kemiskinan Desa (%) | 7,16 | 6,79 | 6,33 | 6,57 | 6,13 |

*Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023*

Berdasarkan tabel di atas, sepanjang periode tahun 2018 – 2022 tingkat kemiskinan kota dan desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung fluktuatif. Pada September 2021 tingkat kemiskinan kota sebesar 3,22 persen dan naik pada September 2022 sebesar 3,48 persen. Adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat pandemi Covid-19 secara langsung atau pun tidak langsung telah berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia termasuk Bangka Belitung.

Penurunan jumlah pekerja pada beberapa sektor merupakan salah satu penyebab meningkatnya kemiskinan khususnya di perkotaan. Sedangkan tingkat kemiskinan desa juga mengalami kenaikan dari 6,33 persen pada data Maret 2020 menjadi 6,63 persen di tahun 2021. Tingginya tingkat kemiskinan di desa sangat dipengaruhi oleh terbatasnya lapangan pekerjaan di desa serta kurang maksimalnya pengelolaan lahan desa serta pengalihan lahan pertanian ke sektor pertambangan. Sementara itu, untuk melihat perkembangan data Kemiskinan menurut kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022 sebagaimana tabel di bawah ini,

**Tabel II.28**
Data Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018-2022
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| Kabupaten/Kota | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* |
| Kabupaten Bangka | 5,47 | 4,92 | 4,51 | 4,81 | 4,26 |
| Kabupaten Belitung | 7,56 | 6,29 | 6,27 | 7,15 | 6,45 |
| Kabupaten Bangka Barat | 3,05 | 2,67 | 2,70 | 2,75 | 2,46 |
| Kabupaten Bangka Tengah | 5,81 | 5,02 | 4,85 | 5,13 | 4,86 |
| Kabupaten Bangka Selatan | 3,70 | 3,36 | 3,52 | 3,69 | 3,22 |
| Kabupaten Belitung Timur | 7,06 | 6,60 | 6,52 | 7,20 | 6,49 |
| Kota Pangkalpinang | 4,95 | 4,25 | 4,36 | 4,76 | 4,55 |
| **Provinsi Kep. Bangka Belitung** | **5,25** | **4,62** | **4,53** | **4,90** | **4.61** |

*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui pada tahun 2022 persentase penduduk miskin yang paling tinggi terdapat di Kabupaten Belitung Timur sebesar 6.49 persen dengan kedalaman kemiskinan sebesar 1,15 persen tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian persentase penduduk miskin terendah terdapat di Kabupaten Bangka Barat sebesar 2,46 persen dengan garis kemiskinan Kabupaten Bangka Barat sebesar 0,25.

6. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) biasa dipakai untuk mengukur persentase jumlah orang yang menganggur dalam angkatan kerja namun tidak termasuk didalamnya penduduk usia kerja tetapi bukan angkatan kerja seperti siswa yang sedang sekolah/kuliah, sedang mengurus rumah tangga, dan sedang melakukan kegiatan lainnya selain bekerja. Nilai TPT inilah yang sering kali disebut-sebut berkaitan dengan tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam mengatasu masalah pengangguran. Semakin rendah TPT maka jumlah penganggur dalam angkatan kerja semakin sedikit, yang berarti daya serap lapangan pekerjaan terhadap pencari kerja semakin baik.

Sedangkan Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja. Sebaliknya, angka TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya kesempatan kerja yang tersedia.

**Tabel II.29**
Perkembangan Tingkat Pengangguran dan TPAK
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2021

| No | Uraian | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* |
| 1. | Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | 70.35 | 67.26 | 67.10 | 66.89 | 65.88 |
| 2. | Tingkat Pengangguran Terbuka | 4.46 | 3.61 | 3.35 | 5.25 | 5.03 |

*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022*

Pada Agustus tahun 2021, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,03 persen, turun 0,22 persen poin dibanding Agustus 2020 (5,25) dan turun sebesar 0,01 poin persen dibandingkan Februari 2021 (5,04). TPT Bangka Belitung berada di urutan kedua terendah wilayah sumatera dan berada dibawah TPT Indonesia (6,49%). TPT tertinggi berada di Kota Pangkalpinang sebesar 6,81 persen dan TPT terendah di Kabupaten Belitung sebesar 3,51 persen. TPT terendah sebesar 3,01% pada penduduk berpendidikan SD ke bawah, sementara TPT tertinggi sebesar 9,06% pada jenjang pendidikan SMK. Tingginya TPT pada jenjang SMK ini kemungkinan disebabkan kurang berkualitasnya lulusan yang dihasilkan dari lembaga pendidikan yang ada sehingga pasar tenaga kerja tidak dapat menyerap para pencari kerja (tidak sesuai standar) atau tidak berimbangnya lulusan dari berbagai macam jurusan sehingga sulit untuk bersaing padahal lapangan pekerjaan yang dibutuhkan pasar untuk jurusan tersebut juga terbatas.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2020 sebesar 66,89 persen dan menurun di tahun 2021 menjadi 65,88 persen. Dibandingkan periode Agustus 2020, TPAK laki-laki Agustus 2021 menurun 0,39 persen poin dan TPAK perempuan juga mengalami penurunan 1,61 persen poin. Angka TPAK yang rendah menunjukan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja.

### 2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

#### 1. Bidang Pendidikan

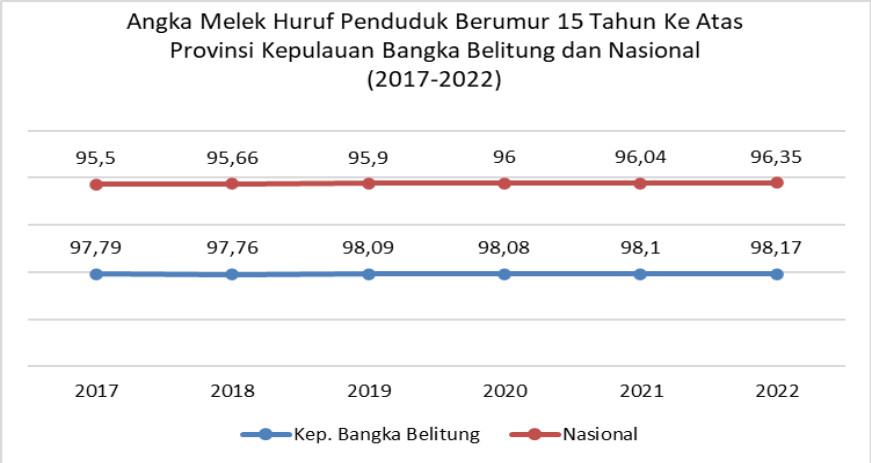
##### a. Angka Melek Huruf

Angka Melek huruf dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan bahasa dan menggunakannya untuk mengerti sebuah bacaan, mendengarkan perkataan, mengungkapkannya dalam bentuk tulisan, dan berbicara. Organisasi PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan (UNESCO) mendefinisikan melek aksara sebagai "kemampuan untuk mengidentifikasi, mengerti, menerjemahkan, membuat, mengkomunikasikan dan mengolah isi dari rangkaian teks yang terdapat pada bahan-bahan cetak dan tulisan yang berkaitan dengan berbagai situasi.

1) Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas

Angka melek huruf (AMH) penduduk umur ≥15 tahun dihitung dengan perbandingan jumlah penduduk berumur ≥15 tahun yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf latin dan atau huruf lainnya, terhadap jumlah penduduk umur ≥15 tahun. AMH merefleksikan *out come* pendidikan dasar sejak 10 tahun terakhir sebagai ukuran kefektifan sistem pendidikan dasar. Indikator ini kerap dilihat sebagai proksi untuk mengukur kemajuan pembangunan sosial dan ekonomi.

**Grafik II.10**

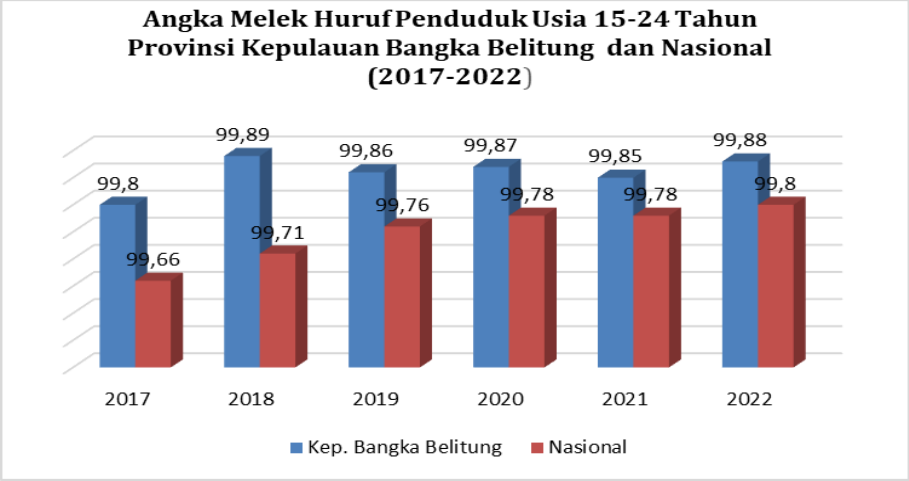



Dalam kurun waktu enam tahun terakhir, angka melek huruf penduduk umur ≥15 tahun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkat sebesar 0,31 poin, dimana pada tahun 2017 capaian angka ini sebesar 97,79 naik menjadi 98,17 pada tahun 2022. Pada tahun 2020 terjadi kontraksi yang tidak terlalu signifikan sebesar 0,01 poin, namun pada tahun 2021, angka ini meningkat menjadi 98,10 atau mengalami kenaikan sebesar 0,02 poin. Pada tahun 2022, angka terus meningkat menjadi 98,17 dan ini merupakan capaian tertinggi selama enam tahun terakhir. Sementara itu, dalam skala nasional, selama periode 2018-2022, angka melek huruf penduduk ≥ 15 tahun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus menerus berada di atas rata-rata angka melek huruf di tingkat nasional. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pemerataan akses pelayanan dan mutu/kualitas pendidikan yang diselenggarakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung semakin baik.

**2) Angka Melek Huruf Penduduk Umur 15-24 Tahun**

Angka melek huruf penduduk umur 15-24 tahun menggambarkan proporsi penduduk kelompok umur 15-24 yang dapat membaca dan menulis huruf Latin atau huruf lainnya. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selama periode 2017 – 2022, angka melek huruf untuk penduduk usia 15-24 tahun bersifat fluktuaktif, namun angka ini selalu berada di atas capaian nasional. Dalam periode waktu enam tahun terakhir, capaian ini mencapai angka tertinggi pada tahun 2018, yaitu sebesar 99,89. Meskipun angka ini menurun pada tahun 2019 sebesar 0,03 poin, angka ini kembali meningkat sebesar 0,01 poin atau mencapai 99,87 pada tahun 2020. Kemudian angka ini menurun sebesar 0,02 poin menjadi 99,85 di tahun 2021 dan menjadi 99,88 di tahun 2022.

**Grafik II.11**




b) Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan salah satu output yang digunakan untuk memotret pemerataan pendidikan dan mengukur kesempatan pendidikan seorang penduduk dari usia tujuh tahun dalam menyelesaikan pendidikan/sekolah di masa mendatang. Berdasarkan perhitungan terbaru yang dikeluarkan oleh The United Nations Development Programme (UNDP), jumlah tahun pendidikan yang diharapkan seorang penduduk dapatkan adalah selama 18 tahun. Lamanya waktu 18 tahun ini mencerminkan bahwa seorang penduduk diharapkan dapat mengenyam pendidikan sampai dengan tingkat universitas dan mendapatkan gelar master. Jika setiap penduduk di suatu negara mendapatkan pendidikan sampai dengan gelar master, maka indeks (angka) Harapan Lama Sekolah negara tersebut akan menjadi 1,0

**Tabel II.30**
Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2018-2023

| Wilayah/Capaian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* |
| Bangka | 12,68 | 12,76 | 12,77 | 12,78 | 12,80 | 13,11 |
| Belitung | 11,83 | 11,84 | 11,85 | 11,86 | 11,89 | 11,90 |
| Bangka Barat | 11,51 | 11,52 | 11,53 | 11,70 | 11,72 | 11,73 |
| Bangka Tengah | 11,75 | 11,76 | 11,81 | 12,10 | 12,11 | 12,12 |
| Bangka Selatan | 11,35 | 11,36 | 11,37 | 11,38 | 11,43 | 11,59 |
| Belitung Timur | 11,49 | 11,51 | 11,52 | 11,63 | 11,65 | 11,66 |
| Kota Pangkalpinang | 12,83 | 12,99 | 13,15 | 13,16 | 13,17 | 13,19 |
| **Provinsi Kep. Bangka Belitung** | **11,87** | **11,94** | **12,05** | **12,17** | **12,18** | **12,31** |
| **Nasional** | **8,17** | **8,34** | **8,48** | **8,54** | **8,69** | **13,15** |

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Selama periode 2018-2023, meskipun angka HLS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada di bawah capaian angka HLS nasional, angka HLS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus meningkat, yakni dari 11,87 di tahun 2018 menjadi 12,31 di tahun 2023. Selama periode 2018-2022, capaian angka HLS ini selalu berada di atas nasional, dimana di tahun 2022, selisih poin antara nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 3,49. Namun, di tahun 2023, capaian angka HLS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada di bawah

nasional, dimana capaian nasional sebesar 13,15 atau memiliki selisih 0,84 poin dengan capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sebesar 12,31.

Dari tujuh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di tahun 2023, Kota Pangkalpinang memiliki angka HLS tertinggi, sebesar 13,19 dan capaian ini di atas capaian angka HLS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan nasional. Selama enam tahun terakhir, angka HLS Pangkalpinang selalu berada di atas capaian nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Angka HLS tertinggi kedua dan ketiga dicapai oleh Kabupaten Bangka sebesar 13,11 dan Kabupaten Bangka Tengah sebesar 12,12. Angka HLS terendah berada di Bangka Selatan sebesar 11,59 dan Kabupaten Belitung Timur sebesar 11,66.

## C) Angka Rata-rata Lama Sekolah

### Angka Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia ≥ 25 tahun

Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLH) dapat memberikan gambaran terkait penyelenggaraan pendidikan dan indeks pembangunan manusia di suatu daerah. Angka Rata-rata Lama sekolah menjelaskan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia di atas usia 25 tahun untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Durasi rata-rata waktu 15 tahun menjadi proyeksi maksimum indikator angka (indeks) rata-rata lama sekolah untuk tahun 2025. Dengan demikian, ketika sebuah negara memiliki setiap warganya dengan capaian pendidikan 15 tahun pada usia 25 tahun, ini berarti bahwa negara tersebut memiliki indeks rata-rata lama sekolah sebesar 1,0.

Selama periode 2018–2023, angka RLS penduduk usia ≥25 tahun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus meningkat. Di tahun 2023, capaian angka RLS naik menjadi 8,25 atau naik sebesar 0,14 poin dibanding dengan tahun sebelumnya, sebesar 8,11. Meskipun mengalami peningkatan, capaian di tahun 2023 ini masih berada di bawah capaian nasional yang sebesar 8,77 atau memiliki selisih poin sebesar 0,52. Capaian angka RLS ini menunjukkan bahwa pada sampai dengan tahun 2023, tingkat pendidikan masyarakat berusia 25 tahun ke atas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya mencapai kelas delapan (VIII).

**Tabel II.31**
Rata-Rata Lama Sekolah Sekolah Penduduk Usia ≥ 25 Tahun Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional 2018 –2023

| Wilayah/Capaian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* |
| Bangka | 8,20 | 8,23 | 8,24 | 8,25 | 8,27 | 8,32 |
| Belitung | 8,15 | 8,41 | 8,46 | 8,47 | 8,74 | 8,98 |
| Bangka Barat | 7,18 | 7,21 | 7,22 | 7,44 | 7,46 | 7,47 |
| Bangka Tengah | 6,80 | 7,13 | 7,19 | 7,20 | 7,22 | 7,23 |
| Bangka Selatan | 6,36 | 6,42 | 6,67 | 6,71 | 6,89 | 6,91 |
| Belitung Timur | 8,14 | 8,15 | 8,22 | 8,47 | 8,67 | 8,90 |
| Kota Pangkalpinang | 9,78 | 9,80 | 9,92 | 10,13 | 10,27 | 10,50 |
| **Provinsi Kep. Bangka Belitung** | **7,84** | **7,98** | **8,06** | **8,08** | **8,11** | **8,25** |
| **Nasional** | **8,17** | **8,34** | **8,48** | **8,54** | **8,69** | **8,77** |

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan tabel di atas, dari tujuh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di tahun 2023, angka RLS tertinggi dicapai oleh Kota Pangkalpinang, yaitu sebesar 10,50. Angka ini berada di atas capaian tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan nasional, dimana capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan nasional masing-masing sebesar

8,25 dan 8,77. Angka RLS tertinggi kedua berada di Kabupaten Belitung, sebesar 8,98 dan capaian tertinggi ketiga berada di Kabupaten Belitung Timur dengan capaian sebesar 8,90. Sementara itu, capaian terendah berada di Kabupaten Bangka Selatan sebesar 6,91. Meskipun capaian IPM Kabupaten Bangka Selatan berada di posisi terendah selama enam tahun terakhir, capaian angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Bangka Selatan terus mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2018 sebesar 6,36 menjadi 6,91 di tahun 2023.

1) Angka Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia ≥15 tahun

Selama periode 2018–2022, rata-rata pertumbuhan RLS penduduk usia ≥15 tahun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,35 persen dan capaian ini masih berada di bawah capaian nasional sebesar 1,23 persen. Pertumbuhan RLS tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terjadi pada tahun 2020, sebesar 1,68 persen dengan capaian angka 8,49. Namun, capaian angka RLS tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 8,57 meskipun pertumbuhannya hanya sebesar 0,39 persen.

**Tabel II.32**
Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia ≥15 tahun
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional
Tahun 2018 - 2022

| Angka Rata-Rata Lama Sekolah Usia ≥15 Tahun | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kepulauan Bangka Belitung** | **8,24** | **8,35** | **8,49** | **8,54** | **8,57** |
| *Selisih Poin* | *0,11* | *0,11* | *0,14* | *0,05* | *0,03* |
| *Pertumbuhan (%)* | *1,35* | *1,33* | *1,68* | *0,59* | *0,35* |
| **Nasional** | **8,8** | **8,75** | **8,9** | **8,97** | **9,08** |
| *Selisih Poin* | *0,08* | *0,17* | *0,15* | *0,07* | *0,11* |
| *Pertumbuhan (%)* | *0,94* | *1,98* | *1,71* | *0,79* | *1,23* |

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023 (Data diolah BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)*

Kenaikan angka RLS bagi penduduk usia ≥15 tahun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didukung oleh semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, peningkatan dan perluasan akses dan mutu pendidikan menengah, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dan peningkatan mutu dan kualitas pengelolaan pendidikan. Hal ini juga selanjutnya didukung semakin besarnya perhatian Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan dukungan alokasi anggaran pendidikan dengan besaran lebih dari 20% dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk urusan pendidikan. Selain itu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga memberikan bantuan keuangan dan insentif kepada para guru dan tenaga kependidikan honorer yang bertugas pada lembaga pendidikan formal (SMP, MI, PAUD/RA) dan pendidikan nonformal, seperti PKBM dan Taman Pendidikan Al Quran yang tersebar di tujuh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan bantuan sarana prasarana pendidikan bagi lembaga-lembaga pendidikan swasta di tujuh kabupaten/kota, seperti pembangunan ruang kelas, toilet, alat bantu belajar, perlengkapan TIK, akses jalan raya di luar wilayah sekolah dan fasilitas-fasilitas lainnya yang diperlukan di dalam mendukung kegiatan belajar mengajar di lembaga-lembaga pendidikan swasta.

## 2. Bidang Kesehatan

a. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas (kematian) menurut umur. Angka ini adalah angka pendekatan yang menunjukkan kemampuan untuk bertahan hidup lebih lama. Angka umur harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah, semakin tinggi angka harapan suatu wilayah maupun negara, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di dalamnya.

**Tabel II.33**
Usia Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019-2023
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| Kabupaten/Kota | Usia Harapan Hidup (UHH) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* |
| Kabupaten Bangka | 70,99 | 71,06 | 71,14 | 71,37 | 71,60 |
| Kabupaten Belitung | 70,94 | 71,05 | 71,1 | 71,31 | 71,54 |
| Kabupaten Bangka Barat | 69,99 | 70,06 | 70,08 | 70,25 | 70,43 |
| Kabupaten Bangka Tengah | 71,16 | 71,36 | 71,52 | 71,82 | 72,11 |
| Kabupaten Bangka Selatan | 67,9 | 68,16 | 68,35 | 68,68 | 68,98 |
| Kabupaten Belitung Timur | 71,9 | 72,03 | 72,1 | 72,33 | 72,59 |
| Pangkalpinang | 73,17 | 73,30 | 73,41 | 73,68 | 73,96 |
| **Provinsi** | **70,5** | **70,64** | **70,73** | **70,98** | **71,23** |

*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023*

berdasarkan tabel di atas Usia Harapan Hidup (UHH) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 sebesar 71,23 tahun dan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 70,98 tahun. Selama rentang waktu 2019-2023, UHH tertinggi berada di Kota Pangkalpinang yaitu 73,96 tahun dan UHH terendah berada di Kabupaten Bangka Selatan yaitu 68,98 tahun. Dilihat dari perkembangannya, UHH di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun peningkatan UHH di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih menjadi prioritas karena angka tersebut masih dibawah UHH nasional tahun 2023 sebesar 73,93 tahun. Pada tahun 2024, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menargetkan sebesar 71,10 tahun dan mengalami peningkatan dibandingkan target 2023 sebesar 71,00 tahun.

b. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Ibu (*Maternal Mortality Rate*) adalah **Jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu** atau banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

**Tabel II.34**
Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2017 s.d. 2021 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| Kabupaten/Kota | Angka Kematian Ibu/100.000 kelahiran hidup | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* |
| Kabupaten Bangka | 67,76 | 141,49 | 108,41 | 80,97 | 309,60 |
| Kabupaten Belitung | 207,76 | 196,85 | 136,71 | 93,84 | 128,78 |
| Kabupaten Bangka Barat | 104,33 | 185,23 | 136,91 | 56,71 | 208,71 |
| Kabupaten Bangka Tengah | 0,00 | 172,46 | 168,35 | 114,88 | 179,21 |
| Kabupaten Bangka Selatan | 60,31 | 216,65 | 122,55 | 61,09 | 504,88 |
| Kabupaten Belitung Timur | 49,70 | 189,75 | 452,03 | 189,84 | 197,34 |
| Kota Pangkalpinang | 95,72 | 116,20 | 22,93 | 141,24 | 216,34 |
| **Provinsi Kep. Bangka Belitung** | **82,49** | **167,24** | **137,33** | **99,96** | **253,49** |

*Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022*

Pada tahun 2021, AKI paling tinggi di Kabupaten Bangka Selatan dengan jumlah sebesar 504,88 orang/100.000 kelahiran hidup dan jumlah kematian ibu sebesar 15 orang. Sedangkan yang paling rendah di Kabupaten Belitung dengan AKI sebesar 128,78 orang/100.000 kelahiran hidup dan jumlah kematian ibu sebesar 4 orang. Secara keseluruhan AKI di tingkat provinsi tahun 2021 sebanyak 253,49 dengan jumlah kematian ibu sebesar 62 orang dan mengalami kenaikan dari tahun 2020 yaitu 99,96 dengan jumlah kematian ibu sebesar 26 orang.

c. Angka Kematian Bayi dan Balita per 1.000 kelahiran hidup

Angka Kematian Bayi dan Balita merupakan indikator yang termasuk dalam prioritas nasional dalam bidang kesehatan yang tercantum dalam dokumen RPJMN 2020-2024. Perhitungan rumusan angka kematian bayi dan balita melalui pembagian antara jumlah kematian bayi dan balita selama satu tahun dan jumlah lahir hidup selama 1 tahun yang sama dikali dengan konstanta sebesar 1.000 kelahiran penduduk. Berikut perkembangan angka kematian bayi dan balita di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurut kabupaten/kota.

**Tabel II.35**
Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup
Tahun 2017-2021 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| No | Kabupaten/ Kota | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Bayi | Balita | Bayi | Balita | Bayi | Balita | Bayi | Balita | Bayi | Balita |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* |
| 1 | Bangka | 6,27 | 7,12 | 3,77 | 4,56 | 5,24 | 6,04 | 4,86 | 5,34 | 6,92 | 6,92 |
| 2 | Belitung | 10,04 | 12,12 | 12,14 | 13,45 | 17,77 | 20,85 | 14,39 | 15,95 | 14,17 | 15,78 |
| 3 | Bangka Tengah | 6,52 | 8,35 | 4,76 | 6,62 | 6,3 | 6,57 | 6,32 | 7,75 | 8,94 | 9,84 |
| 4 | Bangka Barat | 5,11 | 6,01 | 6,04 | 7,76 | 3,09 | 3,37 | 7,37 | 8,51 | 5,38 | 5,68 |
| 5 | Bangka Selatan | 6,03 | 6,63 | 7,43 | 7,74 | 9,19 | 9,8 | 8,86 | 9,47 | 5,05 | 6,06 |
| 6 | Belitung Timur | 8,95 | 10,44 | 13,28 | 14,71 | 11,55 | 13,56 | 11,39 | 14,24 | 12,33 | 13,32 |
| 7 | Pangkalpinang | 3,11 | 3,59 | 3,25 | 3,72 | 3,21 | 3,21 | 2,12 | 2,59 | 2,64 | 2,88 |
| **Bangka Belitung** | | **6,25** | **7,35** | **6,31** | **7,37** | **7,17** | **7,97** | **7,15** | **8,19** | **7,40** | **8,01** |

*Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022*

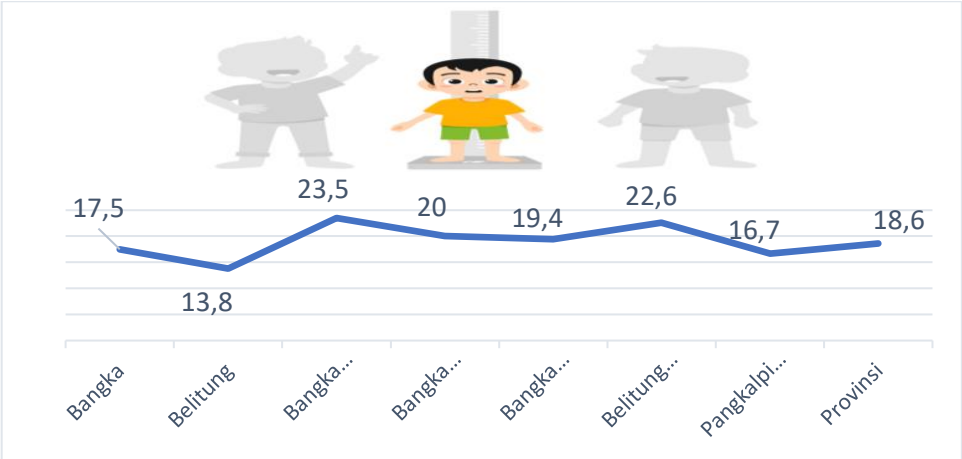
Berdasarkan tabel di atas, angka kematian bayi dan balita pada tahun 2017–2021 di kabupaten/kota menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2017 angka kematian bayi dan balita mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 mengalami kenaikan. Dari 5 (lima) tahun terakhir terlihat kematian bayi dan balita tertinggi terdapat di Kabupaten Belitung dengan angka kematian bayi pada tahun 2021 sebesar 14,17 dan angka kematian balita 15,78. Pada tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung angka kematian bayi tahun 2021 sebesar 7,40 dan mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2020 dengan 7,15/1000 kelahiran hidup. Untuk angka kematian balita tahun 2021 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 8,01 dan mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2020 dengan 8,19/1000 kelahiran hidup. Faktor terbesar penyebab kematian pada anak dan bayi ini adalah DBD, kelainan bawaan, jantung, *hidrocepalus*, dehidrasi berat, pneumonia dan sepsis.

d. Prevalensi *Stunting dan wasting*

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia dibawah lima tahun (balita) akibat kekurangan asupan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Stunting ditentukan oleh indeks antropometri yang menggunakan data panjang badan berdasarkan umur (PB/U) untuk anak usia dibawah 2 tahun dan menggunakan data tinggi badan berdasarkan umur (TB/U) untuk anak usia 2 tahun ke atas. Dalam laporan Riskesdas, kondisi stunting merupakan gabungan antara anak dengan status gizi "pendek" dan "sangat pendek".

Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 yang di *lounching* oleh Kementerian Kesehatan, prevalensi *stunting* di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 18,6 persen dan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 sebesar 19,93 persen. Angka ini masih dibawah angka nasional dari 27,7 persen (2019) menjadi 24,4 persen (2021). Berikut prevalensi *stunting* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan penghitungan SSGI per kabupaten/kota tahun 2021,

**Grafik II.12**
Persentase *Stunting* Tahun 2021
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung




*Sumber: SSGI,2021"Data termutakhir"*

Berdasarkan grafik di atas dapat dijelaskan prevalensi *stunting* tertinggi pada tahun 2021 terdapat di Kabupaten Bangka Barat sebesar 23,5 persen dan Kabupaten Belitung 22,6

persen. Sedangkan prevalensi stunting yang terendah adalah Kota Pangkalpinang sebesar 16,7 persen. Salah satu penyebab tingginya angka stunting adalah tingginya pernikahan dini. Pada tahun 2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati posisi tertinggi se-Indonesia dengan 18,76 persen dan berada jauh di atas angka nasional yang mencapai 10,34 persen. Berdasarkan data pada Sistem Informasi Adminstrasi Kependudukan (SIAK), Kabupaten Bangka Barat menempati posisi tertinggi kasus pernikahan dini yaitu sebanyak 312 anak.

Selain SSGI, terdapat aplikasi Elektronik Pencatatan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGM) Kementerian Dalam Negeri yang melakukan metodologi pencatatan di Posyandu dan pengukuran, dimana datanya berbasic *real time* dan *by name by address*. Berikut perkembangan prevalensi stunting berdasarkan e-PPGM tahun 2017-2021 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut,

**Tabel II.36**
Perkembangan Persentase Balita *Stunting* Tahun 2017 s.d. 2021
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| Kabupaten/Kota | Persentase Stunting Menurut Kabupaten/Kota | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* |
| Kabupaten Bangka | 27,66 | 12,21 | 4,61 | 1,96 | 1,68 |
| Kabupaten Belitung | 27,66 | 13,82 | 10,76 | 6,99 | 7,73 |
| Kabupaten Bangka Barat | 25 | 18,37 | 16,96 | 12,38 | 10,58 |
| Kabupaten Bangka Tengah | 25,64 | 6,91 | 5,85 | 5,11 | 3,61 |
| Kabupaten Bangka Selatan | 30,03 | 16,2 | 9,47 | 3,74 | 3,87 |
| Kabupaten Belitung Timur | 29,3 | 2,59 | 8,02 | 5,34 | 3,84 |
| Kota Pangkalpinang | 26,69 | 7,99 | 1,29 | 0,92 | 0,69 |
| **Provinsi Kep. Bangka Belitung** | **27,3** | **12,05** | **8,61** | **4,60** | **4,07** |

*Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022*

Hasil e-PPGM tahun 2021 menunjukkan bahwa prevalensi stunting tertinggi di Kabupaten Bangka Barat dengan nilai sebesar 10,58 persen dan mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2020 dengan nilai sebesar 12,38 persen. Lalu, Kota Pangkalpinang mempunyai prevalensi stunting yang terendah dengan nilai sebesar 0,69 dan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020 dengan nilai 0,92. Secara keseluruhan, tahun 2021 prevalensi *stunting* di Bangka Belitung mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 yaitu dari 4,60 menjadi 4,07.

### 3. Bidang Tenaga Kerja

a. Rasio Penduduk Yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan tenaga kerja. Selama lima tahun terakhir (2018-2022) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, rasio penduduk yang bekerja tahun 2018-2020 dengan rasio 0,96. Namun pada tahun 2021 rasio penduduk yang bekerja menurun menjadi 0,94. Pada Februari 2021, sebanyak 70.473 penduduk usia kerja (6,33 persen) terdampak Covid-19 dimana 4.158 penduduk menjadi

Pengangguran, 2.620 penduduk menjadi Bukan Angkatan Kerja, 8.778 penduduk Sementara Tidak Bekerja, dan 54.917 penduduk Bekerja dengan Pengurangan Jam Kerja (*Shorter Hours*).

Namun pada tahun 2022 rasio penduduk yang bekerja meningkat menjadi 0,95. Penduduk berumur 15 tahun ke atas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 1.124.190. Dari jumlah tersebut, 65,88 persen merupakan angkatan kerja dan sisanya bukan angkatan kerja. Lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja terbanyak yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

**Tabel II.37**
Perkembangan Ketenagakerjaan Tahun 2018-2022
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| No | Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* |
| 1. | Penduduk Usia Kerja | 1.061.017 | 1.085.869 | 1.111.148 | 1.113.166 | 1.124.190 |
| 2. | Angkatan Kerja | 756.940 | 737.207 | 759.294 | 756.874 | 788.768 |
| 3. | Penduduk Yang Bekerja | 729.593 | 712.230 | 733.858 | 718.693 | 755.814 |
| 4. | Rasio Penduduk Yang Bekerja | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,94 | 0,95 |

*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022 (data bulan Februari/tahun)*

Struktur penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama selama periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan pola perubahan pada masing- masing sektornya. Di sektor primer terjadi pergeseran, di mana untuk lapangan pekerjaan di bidang pertanian tahun 2020 memberikan kontribusi terbesar penyerapan tenaga kerja sebesar 32,50%, mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi sebesar 26,71%. Sedangkan untuk lapangan pekerjaan pertambangan dan penggalian memberikan mengalami penurunan terbesar pertama pada tahun 2020 sebesar 10,19%, namun di tahun 2021 meningkat menjadi sebesar 15,63% seiring dengan meningkatnya harga timah.

Hal ini menunjukan bahwa penyerapan tenaga kerja untuk sektor di bidang pertambangan meningkat dikarenakan harga biji timah dipasaran meningkat tajam. Sedangkan sektor pertanian menurun, masyarakat lebih cenderung mengalihkan lahan pertanian ke lahan pertambangan. Di sektor tersier kontribusi penyerapan tenaga kerja terbesar ada pada lapangan pekerjaan perdagangan sebesar 18,92% merupakan penyerapan tenaga kerja kedua terbesar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021. Sektor sekunder mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja dari tahun 2021, di mana kontribusi terbesar ada pada lapangan pekerjaan industri pengolahan sebesar 7,61%.

**Tabel II.38**
Data Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama
Tahun 2017 s.d. 2021 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

b.

| Lapangan Pekerjaan Utama | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* |
| Sektor Primer : | | | | | |
| 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 32,56 | 30,99 | 29,09 | 32,50 | 26,71 |
| 2. Pertambangan dan Penggalian | 13,59 | 13,65 | 14,14 | 10,19 | 15,63 |
| Sektor Sekunder: | | | | | |

| Lapangan Pekerjaan Utama | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* |
| 3. Industri Pengolahan | 6,56 | 7,05 | 7,6 | 8,19 | 7,61 |
| 4. Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang | 0,46 | 0,53 | 0,54 | 0,32 | 0,25 |
| 5. Bangunan/Konstruksi | 5,28 | 5,08 | 5,26 | 4,64 | 4,53 |
| Sektor Tersier: | | | | | |
| 6. Perdagangan | 17,48 | 18,81 | 17,37 | 18,61 | 18,92 |
| 7. Transportasi dan Pergudangan | 2,04 | 1,74 | 2,24 | 2,73 | 2,49 |
| 8.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 3,54 | 3,9 | 4,62 | 4,89 | 4,89 |
| 9. Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate | 1,7 | 1,65 | 1,61 | 0,32 | 0,53 |
| 10. Jasa Perusahaan | 0,75 | 0,97 | 1,1 | 0,84 | 0,84 |
| 11.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 6,37 | 6,33 | 6,11 | 5,64 | 5,59 |
| 12. Jasa Pendidikan | 3,75 | 3,96 | 4,48 | 4,26 | 4,96 |
| 13. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 1,91 | 1,54 | 1,89 | 1,70 | 1,84 |
| 14. Jasa Lainnya | 4,01 | 3,82 | 3,95 | 4,02 | 3,72 |
| **Jumlah** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |

*Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional -Sakernas, Agustus 2021"Data termutakhir"*

### 2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

#### 1. Fokus Seni Budaya

a. Jumlah Grup dan Gedung Kesenian

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu provinsi kepulauan yang menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan daerah. Dalam pengembangan kepariwisataan, selain mengandalkan wisata bahari sebagai daya tarik wisata, yang tak kalah menarik adalah keragaman seni dan budaya yang dimiliki dan dikemas sebagai bagian dari atraksi budaya dalam mendukung pariwisata.

**Tabel II.39**
Perkembangan Seni dan Budaya
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017–2021

| Per 10.000 Penduduk | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Selisih | Pertumbuhan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Grup Kesenian | 92,65 | 93,85 | 95,91 | 77,95 | 78,56 | 0,61 | 0,8 |
| Jumlah Gedung kesenian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Sumber: Disparbudpora Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022. (Data diolah oleh BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)*

Selama periode 2017–2021, perkembangan jumlah grup kesenian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami fluktuasi, dengan erkembangan tertinggi sebesar 95,91 pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 dan 2021, jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2017–2019. Sementara itu, jumlah gedung kesenian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama periode lima tahun terakhir masih belum tersedia. Penyebab masih lambannya perkembangan dari jumlah grup kesenian dan masih belum tersedianya fasilitas gedung kesenian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikarenakan ketersediaan sumber daya manusia yang mumpuni pada urusan kebudayaan masih sangat minim. Belum optimalnya koordinasi dan kolaborasi antar lintas sektor urusan dan organisasi daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga menjadi salah satu faktor kendala atas perkembangan jumlah grup seni dan gedung kesenian, serta perkembangan warisan budaya tak benda lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## 2. Fokus Olahraga

1) Jumlah Klub Olahraga

Data yang diperoleh dari Perangkat Daerah yang menangani pemuda dan olahraga, serta Organisasi Cabang Olahraga KONI Kabupaten dan Kota Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, jumlah perkumpulan olahraga pada tahun 2020 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk 6 (enam) cabang olahraga, atletik, Sepak Bola, Bola Voli, Bola Basket, Bulu Tangkis, dan Pencak Silat, sebanyak 1.361 perkumpulan, terdapat 183 perkumpulan di Kabupaten Bangka, 246 perkumpulan di Kabupaten Belitung, 256 perkumpulan Kabupaten Bangka Barat, 137 perkumpulan di Kabupaten Bangka Tengah, 255 perkumpulan di Kabupaten Bangka Selatan, 194 perkumpulan di Kabupaten Belitung Timur, dan 132 perkumpulan di Kota Pangkalpinang. Perkumpulan olahraga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung paling banyak terdapat pada cabang Sepak Bola (654 perkumpulan), kemudian Bola Voli (452 perkumpulan), Bulu Tangkis (118 perkumpulan), Pencak Silat (95 perkumpulan), Bola Basket (63 perkumpulan), dan Atletik (21 perkumpulan).

Tabel di dibawah ini menunjukkan jumlah perkumpulan cabang olahraga Atletik pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2020, Kota Pangkalpinang memiliki jumlah perkumpulan cabang olahraga Atletik terbanyak se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 5 jumlah perkumpulan cabang olahraga Atletik dan Kabupaten Bangka Tengah dan Belitung Timur memiliki jumlah perkumpulan paling sedikit dengan jumlah 2 perkumpulan. Jumlah perkumpulan cabang olahraga Atletik Tahun 2020 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 21 jumlah perkumpulan cabang olahraga Atletik.

**Tabel II.40**
Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Atletik dan Sepak Bola
Tahun 2016 s.d. 2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| No | Kabupaten/ Kota | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Atl | Spb | Atl | Spb | Atl | Spb | Atl | Spb | Atl | Spb |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* |
| 1. | Bangka | 2 | 40 | 2 | 64 | 3 | 64 | 3 | 64 | 3 | 64 |
| 2. | Belitung | 2 | 110 | 2 | 120 | 3 | 123 | 3 | 123 | 3 | 123 |

| No | Kabupaten/ Kota | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Atl | Spb | Atl | Spb | Atl | Spb | Atl | Spb | Atl | Spb |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* |
| 3. | Bangka Barat | 2 | 120 | 2 | 120 | 3 | 120 | 3 | 125 | 3 | 130 |
| 4. | Bangka Tengah | 2 | 56 | 2 | 56 | 2 | 56 | 2 | 56 | 2 | 58 |
| 5. | Bangka Selatan | 2 | 135 | 2 | 135 | 3 | 135 | 3 | 139 | 3 | 142 |
| 6. | Belitung Timur | 2 | 75 | 2 | 75 | 2 | 75 | 2 | 80 | 2 | 90 |
| 7. | Pangkal Pinang | 3 | 32 | 3 | 40 | 5 | 40 | 5 | 45 | 5 | 47 |
| **Bangka Belitung** | | **15** | **568** | **15** | **610** | **21** | **613** | **21** | **632** | **21** | **654** |

*Sumber: Disparbudpora Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021 "Data termutakhir"*

Sedangkan jumlah perkumpulan cabang olahraga Sepak Bola pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 meningkat. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2020, Kabupaten Bangka Selatan memiliki jumlah perkumpulan cabang olahraga Sepak Bola terbanyak se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 142 jumlah perkumpulan cabang olahraga Sepak Bola dan Kota Pangkalpinang memiliki jumlah perkumpulan cabang olahraga paling sedikit yaitu sebanyak 47 perkumpulan. Jumlah perkumpulan cabang olahraga Sepak Bola Tahun 2020 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 654 jumlah perkumpulan cabang olahraga Sepak Bola dan mengalami kenaikan yang cukup besar dari tahun 2016 yang hanya ada 15 perkumpulan.

Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah perkumpulan cabang olahraga Bola Voli pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, bahwa pada tahun 2020, Kabupaten Belitung memiliki jumlah perkumpulan cabang olahraga Bola Voli terbanyak se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 83 jumlah perkumpulan cabang olahraga Bola Voli. Sedangkan Kota Pangkalpinang memiliki jumlah terkecil yaitu 36 perkumpulan cabang olahraga Bola Voli. Jumlah perkumpulan cabang olahraga Bola Voli di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 sebanyak 451 perkumpulan dan tahun 2020 sebanyak 452 jumlah perkumpulan cabang olahraga Bola Voli (bertambah 1 perkumpulan di Kota Pangkalpinang).

**Tabel II.41**

Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Bola Voli dan Bulu Tangkis
Tahun 2016 s.d. 2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| No | Kabupaten/ Kota | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Volly | BB | Volly | BB | Volly | BB | Volly | BB | Volly | BB |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* |
| 1. | Bangka | 25 | 27 | 38 | 28 | 47 | 30 | 47 | 30 | 47 | 30 |
| 2. | Belitung | 70 | 4 | 76 | 7 | 83 | 7 | 83 | 7 | 83 | 7 |
| 3. | Bangka Barat | 64 | 4 | 75 | 4 | 80 | 4 | 80 | 4 | 80 | 4 |
| 4. | Bangka Tengah | 52 | 7 | 48 | 7 | 43 | 7 | 43 | 7 | 43 | 7 |
| 5. | Bangka Selatan | 76 | 3 | 78 | 3 | 82 | 3 | 82 | 3 | 82 | 3 |
| 6. | Belitung Timur | 65 | 5 | 78 | 5 | 81 | 5 | 81 | 5 | 81 | 5 |
| 7. | Pangkal Pinang | 47 | 10 | 40 | 9 | 35 | 7 | 36 | 7 | 36 | 7 |
| **Bangka Belitung** | | **399** | **60** | **433** | **63** | **451** | **63** | **452** | **63** | **452** | **63** |

*Sumber: Disparbudpora Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021 "Data termutakhir"*

Sedangkan jumlah perkumpulan cabang olahraga Bola Basket pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sedikit meningkat dan cenderung stagnan. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2020, Kabupaten Bangka memiliki jumlah perkumpulan cabang olahraga Bola Basket terbanyak se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 30 jumlah perkumpulan cabang olahraga Bola Basket. Sedangkan Kabupaten Bangka Selatan memiliki jumlah perkumpulan cabang olahraga Bola Basket paling sedikit yaitu sebanyak 3 perkumpulan. Jumlah perkumpulan cabang olahraga Bola Basket Tahun 2020 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 63 jumlah perkumpulan cabang olahraga Bola Basket. Peningkatan jumlah perkumpulan olahraga Bola Basket ini hanya di tahun 2017 dan tidak mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2020.

**Tabel II.42**
Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Bola Basket Tahun 2016 s.d. 2020
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| No | Kabupaten/Kota | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Kab. Bangka | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 2. | Kab. Belitung | 14 | 18 | 20 | 20 | 20 |
| 3. | Kab. Bangka Barat | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 |
| 4. | Kab. Bangka Tengah | 8 | 16 | 18 | 18 | 18 |
| 5. | Kab. Bangka Selatan | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 |
| 6. | Kab. Belitung Timur | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 7. | Kota Pangkal Pinang | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| | **Bangka Belitung** | **85** | **108** | **118** | **118** | **118** |

*Sumber: Disparbudpora Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021"Data termutakhir"*

Tabel di atas menunjukkan jumlah perkumpulan cabang olahraga Bulu Tangkis pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2020, Kabupaten Bangka Barat memiliki jumlah perkumpulan cabang olahraga Bulu Tangkis terbanyak se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 21 jumlah perkumpulan cabang olahraga Bulu Tangkis. Jumlah perkumpulan cabang olahraga Bulu Tangkis tahun 2020 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 118 jumlah perkumpulan cabang olahraga Bulu Tangkis.

**Tabel II.43**
Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Pencak Silat
Tahun 2016 s.d. 2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| No | Kabupaten/Kota | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* |
| 1. | Kab. Bangka | 19 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 2. | Kab. Belitung | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3. | Kab. Bangka Barat | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 4. | Kab. Bangka Tengah | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |

| No | Kabupaten/Kota | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* |
| 5. | Kab. Bangka Selatan | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6. | Kab. Belitung Timur | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7. | Kota Pangkal Pinang | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** | | **89** | **93** | **95** | **95** | **95** |

*Sumber: Disparbudpora Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021"Data termutakhir"*

Tabel di atas menunjukkan jumlah perkumpulan cabang olahraga Pencak Silat pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2020, Kabupaten Bangka memiliki jumlah perkumpulan cabang olahraga Pencak Silat terbanyak se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 23 jumlah perkumpulan cabang olahraga Pencak Silat. Sedangkan Kabupaten Belitung Timur memiliki jumlah perkumpulan cabang olahraga Pencak Silat paling sedikit yaitu sebanyak 6 perkumpulan. Jumlah perkumpulan cabang olahraga Pencak Silat tahun 2020 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 95 jumlah perkumpulan cabang olahraga Pencak Silat dan tidak mengalami peningkatan dari tahun 2018.

**2) Jumlah Gedung Olahraga**

Olahraga merupakan bagian penting dalam mengembangkan sumber daya manusia sebagai bagian dari pelaku pembangunan, sehingga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2018 menempatkan bidang kepemudaan dan olahraga menjadi salah satu prioritas yang selanjutnya pada tahapan implementasi telah diwujudkan melalui dukungan program dan penganggaran. Salah satu wujud nyata dari upaya pengembangan bidang keolahragaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah telah disediakannya lahan seluas ± 50 ha untuk pembangunan *Sport Center,* saat ini di kawasan tersebut telah tersedia Gedung Olahraga (GOR) Sahabuddin namun perlu dikembangkan lagi sehingga seluruh *venue* cabang olahraga dapat dibangun di kawasan tersebut.

**Tabel II.44**
Perkembangan Sarana dan Prasarana Olahraga
Tahun 2016 s.d. 2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* |
| 1. | Jumlah Gedung Olahraga | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 |
| 2. | Jumlah Lapangan Olahraga | 1.730 | 1.731 | 1.732 | 1.733 | 1.733 |

*Sumber: Disparbudpora Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021"Data termutakhir"*

Dari data perkembangan sarana dan prasarana olahraga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu banyak. Dimana pada tahun 2016, jumlah gedung olahraga sebanyak 10 buah dan lapangan olahraga sebanyak 1.730 buah. Jumlah gedung olahraga ini mengalami peningkatan di tahun 2018 menjadi 14 buah dan tidak ada penambahan gedung baru sampai dengan tahun 2020.

Lapangan olahraga juga mengalami penambahan meskipun tidak banyak dari 1.730 (2016) menjadi 1.733 (2020).

### 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

#### 2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

**1. Urusan pendidikan**

a. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dan sebagai indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. APS adalah gambaran penduduk yang bersekolah menurut kelompok umur. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018–2022 dapat dilihat sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini,

**Tabel II.45**
Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2018- 2022

| Angka Partisipasi Sekolah (APS) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung & Nasional** | | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| Kep. Bangka Belitung | **Usia 7–12 tahun** | 99,85 | 99,76 | 99,7 | 99,47 | 99,41 |
| ***Pertumbuhan %*** | | *0,21* | *-0,09* | *-0,06* | *-0,23* | *-0,06* |
| Nasional | | 99,22 | 99,24 | 99,2 | 99,19 | 99,10 |
| ***Pertumbuhan %*** | | *0,08* | *0,02* | *0,02* | *-0,07* | *-0,09* |
| Kep. Bangka Belitung | **Usia 13–15 tahun** | 92,7 | 92,87 | 93,3 | 93,17 | 93,00 |
| ***Pertumbuhan %*** | | *0,31* | *0,18* | *0,51* | *-0,18* | *-0,18* |
| Nasional | | 95,36 | 95,51 | 95,7 | 95,99 | 95,92 |
| ***Pertumbuhan %*** | | *0,29* | *0,16* | *0,24* | *0,26* | *-0,07* |
| Kep. Bangka Belitung | **Usia 16–18 tahun** | 67,11 | 67,79 | 67,75 | 68,15 | 68,42 |
| ***Pertumbuhan %*** | | *0,18* | *1,01* | *-0,06* | *0,59* | *0,40* |
| Nasional | | 71,99 | 72,36 | 72,72 | 73,09 | 73,15 |
| ***Pertumbuhan %*** | | *0,80* | *0,51* | *0,50* | *0,51* | *0,08* |
| **Kep. Bangka Belitung** | **Usia 19–24 tahun** | 15,99 | 17,01 | 17,47 | 18,02 | 17,68 |
| ***Pertumbuhan %*** | | *6,67* | *6,38* | *2,70* | *3,15* | *-1,89* |
| **Nasional** | | 24,4 | 25,21 | 25,56 | 26,01 | 25,99 |
| ***Pertumbuhan %*** | | *6,67* | *6,38* | *2,70* | *3,15* | *-1,89* |

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023 (Data diolah oleh BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung).*

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2018–2022), Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada kelompok-kelompok umur di Provinsi Kepulauan Bangka bersifat fluktuatif. APS

penduduk usia 7–12 tahun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersifat fluktuatif dimana capaian APS tertinggi terjadi di tahun 2018, sebesar 99,85 dan angka ini melebihi capaian APS nasional. Namun, di tahun-tahun berikutnya, angka ini terus menurun. Di tahun 2022, angka ini turun menjadi 99,41 dari99,47 pada tahun 2021. APS penduduk usia 13–15 tahun atau pada jenjang SMP/MTS, tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,17 persen dari angka 93,17 di tahun 2021 menjadi 93,00. Selanjutnya, pada kelompok penduduk usia 16-18 tahun, capaian APS meningkat, yakni sebesar 68,15 di tahun 2021 menjadi 68,42 atau naik sebesar 0,27 di tahun 2022. Sementara itu, APS penduduk usia 19-24 tahun mengalami penurunan, yakni dari 18,02 di tahun 2021 menjadi 17,68 atau turun sebesar 0,34 di tahun 2022.

Selanjutnya, laju pertumbuhan tertinggi kedua terjadi pada tahun 2017, yakni sebesar 0,96 persen dan capaian ini juga berada di atas pertumbuhan nasional sebesar 0,83 persen. Laju pertumbuhan APS tertinggi ketiga terjadi pada tahun 2021, yaitu sebesar 0,59 persen dibandingkan dengan capaian nasional sebesar 0,50 persen meskipun perbedaan tersebut tidak terlalu signifikan. Sementara itu, pada tahun 2020, pertumbuhan APS penduduk usia 16-18 tahun telah terjadi kontraksi sebesar 0,06 persen.

b. Angka Partisipasi Kasar Jenjang SMA/SMK/MA/Paket C

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu atau dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Sejak tahun 2007, APK jenjang SMA/SMK/MA mencakup APK pendidikan non formal, dalam hal ini adalah Paket C.

**Tabel II.46**
Angka Partisipasi Kasar Jenjang SMA/SMK/MA/Paket C
Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2018-2022

| APK SMA/MA/SMK/Paket C | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Rata-Rata Pertumbuhan (2018-2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kep. Bangka Belitung** | **82,21** | **87,11** | **87,15** | **86,49** | **86,5** | 0,89 |
| Selisih Poin | -0,67 | 4,9 | 0,04 | -0,66 | 0,01 | |
| *Pertumbuhan %* | -0,81 | 5,96 | 0,05 | -0,76 | 0,01 | |
| **Nasional** | **80,68** | **83,98** | **84,53** | **85,23** | **85,49** | 0,65 |
| Selisih Poin | -2,16 | 3,3 | 0,55 | 0,7 | 0,26 | |
| *Pertumbuhan %* | -2,61 | 4,09 | 0,65 | 0,83 | 0,31 | |

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023 (Data diolah BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)*

Selama periode 2018-2022, APK SM/SMK/MA/Paket C di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersifat fluktuatif, namun capaian ini selalu berada di atas capaian rata-rata APK SMA/SMK/MA/Paket C tingkat nasional. Selama lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan APK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada jenjang Sekolah Menengah/SMK/MA dan Paket C sebesar 0,89 persen, sedangkan rata-rata pertumbuhan APK nasional pada jenjang yang sama sebesar 0,65 persen. Capaian APK tertinggi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

terjadi pada tahun 2020, yaitu sebesar 87,15 atau tumbuh sebesar 0,04 persen dibandingkan dengan capaian tahun 2019 yang sebesar 87,11. Di tahun 2021, pertumbuhan ini terkontraksi sebesar 0,76 persen sehingga angka ini turun dari 87,15 di tahun 2020 menjadi 86,49. Di tahun 2022, cpaian APK ini mengalami peningkatan sebesar 0,01 atau tumbuh sebesar 0,01 persen, yaitu dari 86,49 di tahun 2021 meningkat menjadi 86,50 di tahun 2022. Ditinjau dari laju pertumbuhan, persentase pertumbuhan APK tertinggi terjadi di tahun 2019, yakni sebesar 5,63 persen dengan capaian angka sebesar 87,11.

c. Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SM/SMA/SMK dan Paket C

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam presentase. Indikator kesempatan memperoleh pendidikan antara perempuan dan laki-laki diukur dari rasio APM yang menunjukkan kesetaraan dan keadilan gender di bidang pendidikan.

Selama periode 2018-2022, APM SM/SMK/MA dan Paket C di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada di bawah rata-rata capaian APM SM/SMK/MA dan Paket C nasional meskipun dari tahun 2018-2022, APM jenjang SM/SMK/MA dan Paket C di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada umumnya terus meningkat, meskipundi tahun 2021 sempat mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,05 menjadi 58,79 dibandingkan dengan capaian di tahun 2020 sebesar 58,82. Di tahun 2022, pertumbuhan APM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali mengalami peningkatan sebesar 1,46 atau menjadi 59,65 dimana sebelumnya, capaian ini di tahun 2021 sebesar 58,79.

**Tabel II.47**
APM SM/SMK/MA/Paket C
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2018-2022

| APM SMA/MA/SMK/Paket C | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Rata-Rata Pertumbuhan 2018-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bangka Belitung** | **57,86** | **58,41** | **58,82** | **58,79** | **59,65** | **0,67** |
| Selisih | 0,17 | 0,55 | 0,41 | -0,03 | 0,86 | |
| ***Pertumbuhan (%)*** | ***0,29*** | ***0,95*** | ***0,70*** | ***-0,05*** | ***1,46*** | |
| **Nasional** | **60,67** | **60,84** | **61,25** | **61,65** | **61,97** | **0,52** |
| Selisih Poin | 0,3 | 0,17 | 0,41 | 0,4 | 0,32 | |
| ***Pertumbuhan (%)*** | ***0,50*** | ***0,28*** | ***0,67*** | ***0,65*** | ***0,52*** | |

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023 (Data diolah BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)*

Secara umum, selama periode 2018-2022, APM SM/SMK/MA/Paket C di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami pertumbuhan sebesar 0,67 persen, sementara itu rata-rata pertumbuhan tingkat nasional sebesar 0,52 persen. Pertumbuhan tertinggi APM SM/SMK//MA/ Paket C Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terjadi pada tahun 2019, yaitu sebesar 58,41 atau tumbuh sebesar 0,95 dimana capaian angka ini sebesar persen atau mencapai angka 57,86 di tahun 2018.

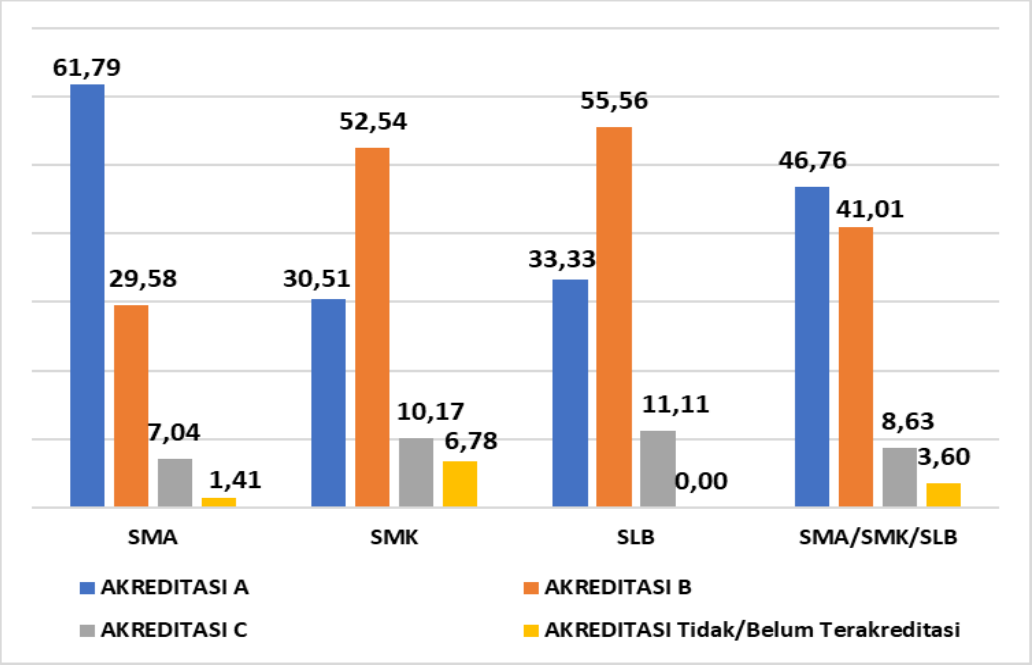
Kenaikan APM jenjang SM/SMK/MA/Paket C di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipengaruhi antara lain oleh perluasan akses layanan pendidikan yang semakin baik, seperti ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang semakin meningkat, ketersediaan tenaga guru dan tenaga kependidikan, ketersediaan informasi pendidikan yang mencukupi, pemberian beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu, serta koordinasi antara lembaga pemerintahan yang semakin baik. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat bahwa pendidikan berperan penting dalam peningkatan kualitas dan kesejahteraan hidup, serta faktor kondisi ekonomi masyarakat yang semakin baik, turut menjadi pendorong kenaikan APM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

c. Akreditasi Sekolah dan Mutu Pendidikan

Pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) dapat diukur melalui hasil akreditasi yang dinilai berdasarkan standar. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan menjadi sarana untuk melakukan upaya yang terus menerus dalam meningkatkan kekuatan yang dimiliki sekolah serta memperbaiki kelemahan yang dimiliki.

Ditinjau dari capaian Standar Nasional Pendidikan (SNP), beberapa faktor penunjang peningkatan persentase akreditasi sekolah adalah dikarenakan adanya peningkatan sarana prasarana pendidikan, dan jumlah serta kualitas guru dan tenaga kependidikan. Perkembangan SMA/SMK/SLB terakreditasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 sebagaimana grafik di bawah ini,

**Grafik II.13**
SMA/SMK/SLB Terakreditasi Provisi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2022




*Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022 (Data diolah)*

Pada tahun 2022, dari 139 SMA/SMK dan SLB di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, jumlah sekolah yang memiliki akreditasi A sebanyak 65 sekolah atau 46,76 persen.

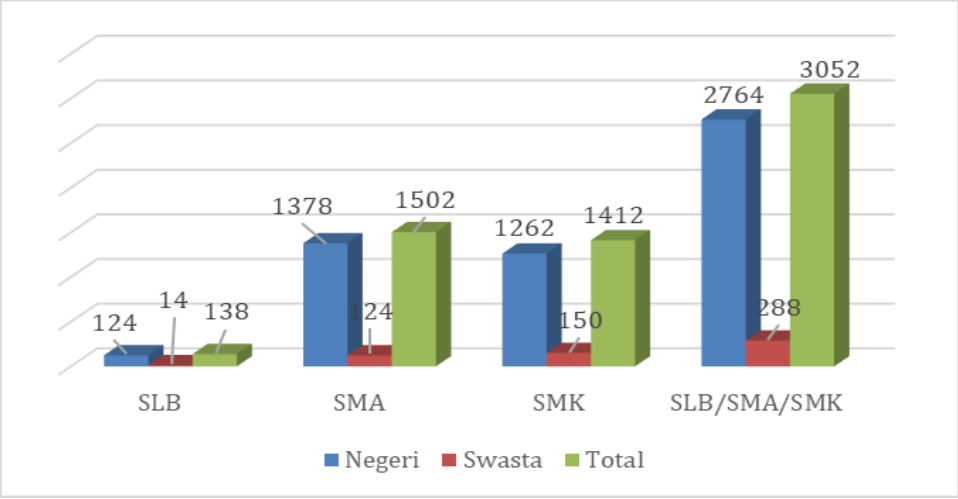
Sementara itu, jumlah sekolah yang terakreditasi B sebanyak 57 sekolah atau 41,01 persen, dan jumlah sekolah yang terakreditasi C sebanyak 12 sekolah atau 8,63 persen. Sejauh ini masih terdapat lima sekolah atau sebesar 3,59 persen SMA/SMK yang belum terakreditasi. Untuk jenis SMK, dari 59 SMK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, jumlah SMK yang terakreditasi A sebanyak 18 SMK atau 30,51 persen, SMK terakreditasi B sebanyak 31 SMK atau sebesar 52,54 persen, SMK terakreditasi C sebanyak 6 SMK atau 10,17 persen dan masih terdapat empat (4) SMK yang belum terakreditasi. Pada jenjang SLB, dari sembilan (9) SLB yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdapat tiga (3) SLB atau 46,76 persen memiliki akreditasi A, lima (5) SLB atau 41,01 persen memiliki akreditasi B, dan masih ada satu (1) SLB memiliki akreditasi C.

d. Jumlah dan Kualifikasi Guru SMA/MA/SMK

Ketersediaan jumlah yang cukup dan kualifikasi pendidikan tenaga guru dan kependidikan sangat berperan di dalam menunjang peningkatan kualitas pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan permintaan pasaran (**market demand**) dalam era Revolusi Industri 4.0 dan **Society** 5.0. Ketersediaan tenaga guru dan kependidikan yang cukup dan mumpuni juga akan mempengaruhi dalam pembentukan Pelajar Pancasila yang berkarakter kuat dan berdaya saing tinggi sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, di dalam perencanaan pembangunan pendidikan yang berkualitas tinggi dan merata, ketersediaan tenaga guru dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan rasio siswa, serta tingkat pendidikan yang didapatkan oleh guru dan tenaga kependidikan minimal S1/D.4 menjadi perhatian yang serius dari pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**Grafik II.14**

Jumlah Guru Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2022

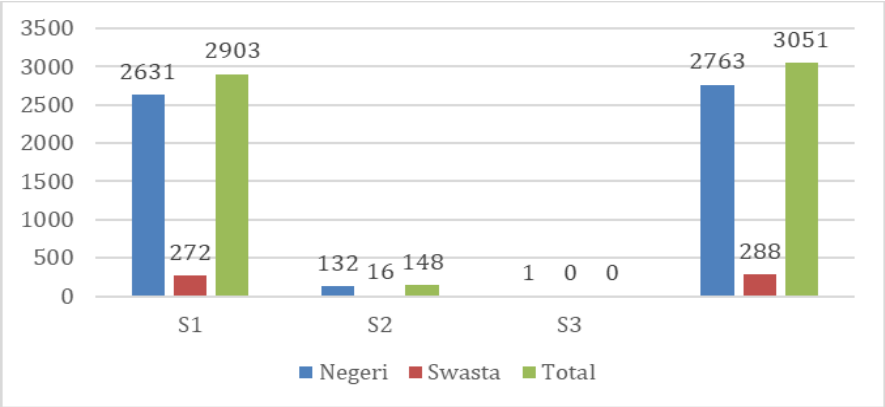



*Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022.*

Pada tahun 2022, jumlah ketersediaan guru yang tersedia di SMA/SMK dan SLB swasta dan negeri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berjumlah 3.488 orang, dengan rincian 172 orang guru mengajar di SLB, 1.658 orang guru mengajar di SMA dan 1.658 orang guru yang mengajar di SMK, baik di sekolah negeri maupun swasta. Jumlah guru yang mengajar di jenjang SLB/SMA/SMK pada tahun 2022 ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2021, dimana pada tahun 2021, terdapat 3.513 orang guru yang mengajar di jenjang

SLB/SMA/SMK, yang terdiri dari 161 orang guru mengajar di SLB, sebanyak 1.694 orang guru mengajar di SMA, dan 1.658 orang guru mengajar di SMK, baik di sekolah negeri maupun swasta. Terjadinya penurunan jumlah ketersediaan guru yang mengajar di SLB/SMA/SMK ini dikarenakan adanya guru yang pensiun, meninggal dunia dan mutasi ke provinsi lain. Diperkirakan jumlah ketersediaan guru, khususnya guru PNS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan semakin berkurang dikarenakan banyak guru PNS yang berusia mendekati masa pensiun.

**Grafik II.15**
Pendidikan Terakhir dan Status Kepegawaian Guru




*Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022 (Data diolah BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022*

Berdasarkan latar belakang pendidikan, terdapat 2.903 orang guru dengan pendidikan S1 dan 148 orang guru yang lulusan S2, dan satu (1) dengan pendidikan S3, baik yang tersebar di SLB, SMA dan SMK negeri dan swasta. Selanjutnya, berdasarkan status kepegawaian, terdapat 1.696 guru berstatus CPNS dan/atau PNS, dan 1.356 orang guru berstatus non-PNS. Dalam upaya percepatan peningkatan kualitas pendidikan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan bantuan beasiswa pendidikan kepada para guru sampai pada jenjang S2 dan S3.

e. Jumlah Siswa Putus Sekolah

**Tabel II.48**
Jumlah Siswa Putus Sekolah Jenjang SMA/SMK
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| Jumlah Siswa Putus Sekolah | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMK | 392 | 685 | 104 | 20 | 370 | 1571 |
| SMA | 186 | 302 | 31 | 28 | 94 | 641 |
| **Jumlah** | **578** | **987** | **135** | **48** | **464** | **2212** |

*Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022*

Pada periode 2017-2021, jumlah keseluruhan siswa putus sekolah sebanyak 2.212 orang. Jumlah siswa yang putus sekolah, sebanyak 1.571 orang, pada jenjang SMK selama lima tahun terakhir jauh lebih tinggi dibandingkan pada jenjang SMA. Jumlah siswa SMK putus sekolah tertinggi terjadi di tahun 2017 dan 2018, yakni sebanyak 527 dan 632 orang. Sementara itu, pada sekolah menengah jenis SMA, jumlah siswa yang mengalami putus sekolah tertinggi terjadi pada tahun 2017 dan 2018, yakni sebanyak 186 dan 302 orang.

Dalam rangka menuntaskan pendidikan 12 tahun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan bantuan keuangan kepada siswa-siswa SMA/SMK/SLB yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu sebagai upaya pencegahan anak-anak putus sekolah. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga memberikan bantuan keuangan berupa insentif kepada para tutor Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ada di tujuh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Lembaga-lembaga PKBM juga mendapat bantuan keuangan untuk biaya operasional kegiatan belajar-mengajar di lembaga – lembaga mereka sehingga penduduk usia 21 tahun ke atas yang bersekolah di paket A/B/C bisa mendapatkan pendidikan secara gratis. Dalam upaya untuk semakin mensukseskan program penuntasan belajar 12 tahun ini, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui dinas pendidikan di kabupaten/kota, serta melibatkan lintas sektor agar para siswa yang tergabung di dalam PKBM mendapatkan keterampilan-keterampilan dalam kecakapan hidup (*life skills)* dalam rangka mewujudkan kehidupan perekonomian masyarakat yang berkelanjutan (*society's skills for sustainabe economic development*)

## 2. Urusan Kesehatan

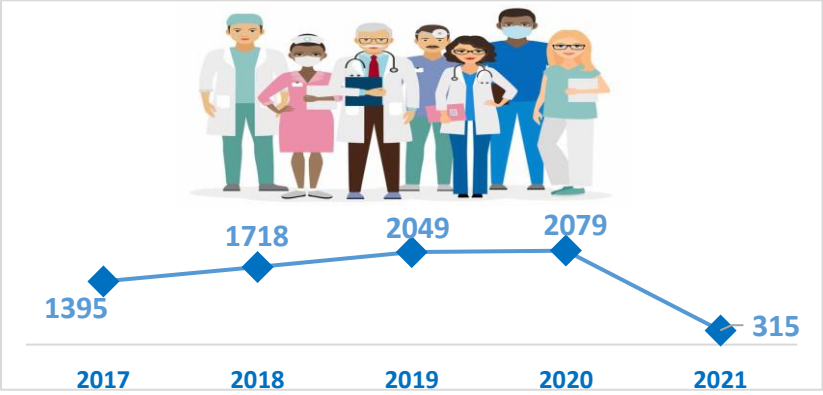
a. Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang Ditingkatkan Kompetensinya

Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan sebagai salah satu sub sistem dari sistem kesehatan memberikan fokus penting pada pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan. Dimana salah satu indikator sasaran meningkatnya kualitas kesehatan adalah jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya.

Pada tahun 2015 -2017 pendataan SDM Kesehatan masih dilakukan secara manual sehingga jumlah SDM Kesehatan cenderung fluktuatif. Namun pada tahun 2018 Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Dukcapil untuk mendata SDM Kesehatan by NIK dan menggunakan aplikasi SISDMK yang diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan. Berikut disajikan SDM Kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tabel di bawah ini,

**Grafik II.16**

Jumlah SDM Kesehatan Yang Ditingkatkan Kompetensinya




*Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022*

Pada tahun 2019, SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya berjumlah 2.049 dan mengalami peningkatan sejumlah 30 orang menjadi 2.079 orang pada tahun 2020.

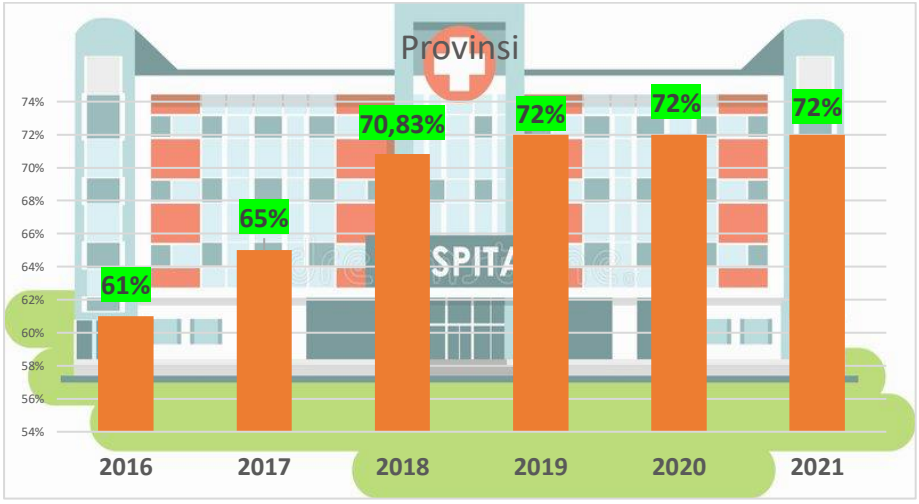
Kemudian, pada tahun 2021, jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensi berjumlah 315 orang dan peningkatan kompetensi ini dilakukan melalui tugas belajar serta pelatihan.

b. Akreditasi Rumah Sakit

Sejak tahun 2015-2019 perkembangan Rumah Sakit (RS) cukup pesat. Pada tahun 2015 jumlah rumah sakit sebanyak 18 RS sedangkan 2019 mencapai 28 RS, yang terdiri dari rumah sakit pemerintah sebanyak 11 (sebelas) RS, rumah sakit swasta sebanyak 13 (tiga belas) RS dan rumah sakit khusus sebanyak 4 (empat) RS, dengan klasifikasi kelas B sebanyak 2 RS (pemerintah dan khusus), klasifikasi C berjumlah 15 RS (7 pemerintah, 5 swasta, dan 1 khusus), klasifikasi D sebanyak 6 RS (2 pemerintah dan 4 swasta) dan klasifikasi kelas D Pratama 1 RS.

**Grafik II.17**

Akreditasi Rumah Sakit




*Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022*

Berdasarkan grafik di atas, dari tahun 2019-2021 capaian akreditasi Rumah Sakit stagnan. Rumah Sakit terakreditasi Paripurna yaitu RS Jiwa, RS Depati Bahrin, RS Bhakti Timah. Yang terakreditasi Madya yaitu RS Jiwa, RS Dr. (HC) Ir. Soekarno, RS Depati Bahrin, RS Bhakti Timah, dan RS Dr. H. Marsidi Judono. Sedangkan yang terakreditasi Utama yaitu RS Siloam, RS Bhakti Wara, RS Alma. Yang terakreditasi madya, yaitu RS Depati Hamzah, Kabupaten Bangka Tengah, RS Medika Stania. Sedangkan yang terakreditasi Perdana yaitu Sejiran Setason, RS Belitung Timur, RS Bangka Selatan, RS Eko Maulana Ali, RS Arsani, RSBT Mentok, dan RSIA Muhaya.

### 3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

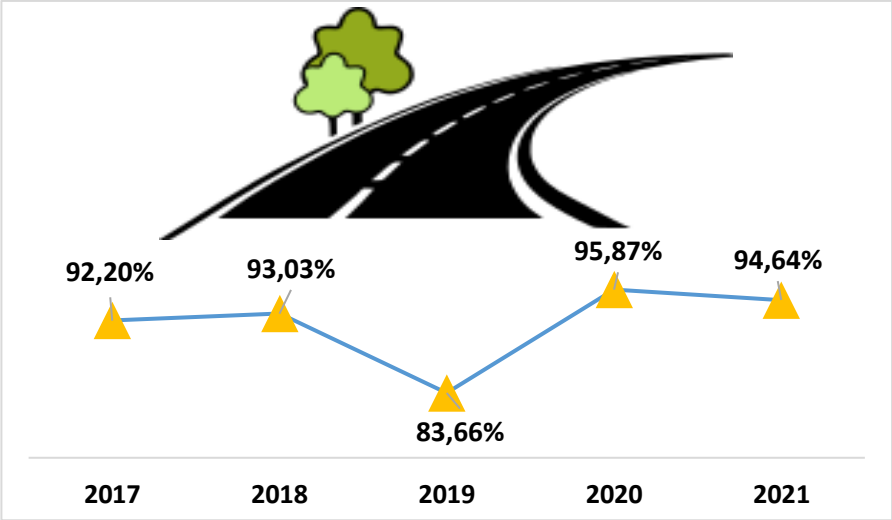
1. Proporsi Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap

Panjang jalan provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/79/PU/I/2018 Tahun 2018 Tentang Penetapan Status Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Kolektor Primer menurut Perannya sebagai Jalan Provinsi adalah 850,99 km. Kriteria jalan kondisi mantap dalah jalan yang memiliki kerataan permukaan jalan memadai untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman. Berdasarkan Peraturan

Menteri PU Nomor 13 Tahun 2011 disebutkan kriteria kondisi jalan mantap meliputi kondisi jalan baik dan sedang.

Berdasarkan hasil survey kondisi jalan pada tahun 2020, proporsi jalan provinsi dalam kondisi mantap sebesar 94,64% (806.39 Km) yang terdiri dari jalan dengan kondisi baik 81,67% (695.00 Km) dan kondisi sedang 12,97% (110.39 Km). Hal ini terbukti dengan sudah banyak jalan aspal dari perkotaan hingga pelosok pedesaan di Kepulauan Bangka Belitung. Namun demikian, masih terdapat jalan provinsi yang memiliki kondisi rusak ringan/jalan kondisi tidak mantap sebesar 5,36% (45.60 Km) yang butuh direhabilitasi (perbaikan dan/atau perkuatan).

**Grafik II.18**
Proporsi Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap




*Sumber : Dinas PUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022*

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap Provinsi Bangka Belitung mengalami fluktuasi dari tahun 2017-2021. Dimana pada tahun 2017 sebesar 92,20% dan terus meningkat hingga 93,03% (2018), menurun tajam hampir 10% hingga 83,66% (2019), kemudian meningkat menjadi sebesar 95,87% (2020), dan menurun sedikit menjadi pada tahun 2021 menjadi 94,64%. Fluktuasi ini dikarenakan *refocusing* anggaran akibat pandemi Covid-19 yang juga berdampak berkurangnya penganggaran pada Program Penanganan Jalan. Meskipun demikian, tingkat kemantapan jalan masih berada di atas 90% yang menunjukkan bahwa jalan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kondisi relatif baik.

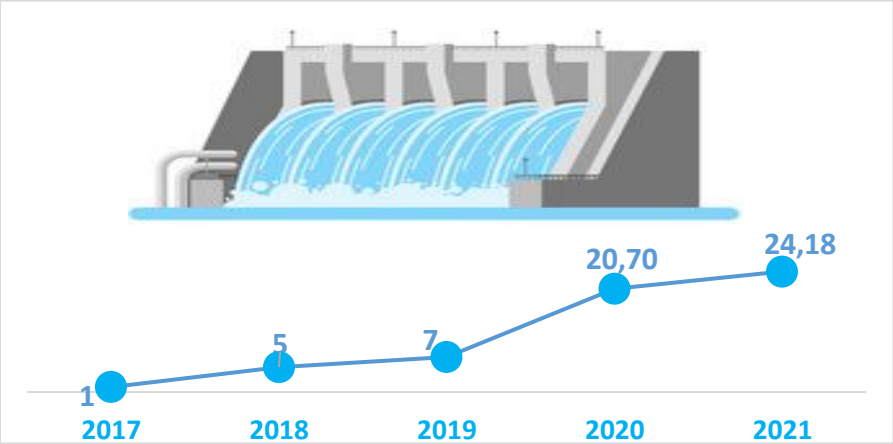
2. Rasio Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Jaringan Irigasi merupakan satu kesatuan infrastruktur pendukung utama sektor pertanian khususnya untuk pertanian lahan basah. Terdapat 7 (tujuh) Daerah Irigasi kewenangan provinsi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yakni D.I Kimak, D.I Buleng, D.I Jeriji, D.I.R Serdang Pergam, D.I Jeruk, D.I Gadung Bikang Kepoh, dan D.I Jelutung II - Sukajaya. Pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder

yang merupakan kewenangan provinsi pada daerah irigasi yang luasnya 1000-3000 ha dan daerah irigasi lintas kabupaten/kota.

Pada tahun 2017 rasio irigasi hanya sebesar 1% yang tertangani atau hanya seluas 28.49 Ha. Namun pada tahun 2017-2019 terjadi peningkatan hingga mencapai 7% (199.43 Ha) dengan luas potensial jaringan irigasi yang ditangani Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1.527 Ha. Pada Tahun 2021, terdapat peningkatan hingga mencapai 24,18%. Hal ini dikarenakan terdapat penambahan luas potensial jaringan irigasi sebesar 7.974 ha dan luas fungsional sebesar 2.909 ha.

**Grafik II.19**
Rasio Irigasi




*Sumber : Dinas PUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022*

Tahun 2021, total panjang jaringan irigasi mencapai 172.436,41 meter setelah dilakukan pengambil alihan status daerah irigasi yang mulanya kewenangan kabupaten. Jaringan irigasi dengan kondisi baik mencapai 58.805,41 meter (34,10%), kondisi sedang 27.080,21 meter (15,7%), dan kondisi rusak sepanjang 86,550,79 meter (50,2%). Banyaknya jaringan irigasi dalam kondisi rusak menunjukkan masih diperlukan perbaikan/rehabilitasi jaringan irigasi untuk mendukung sektor pertanian lahan basah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

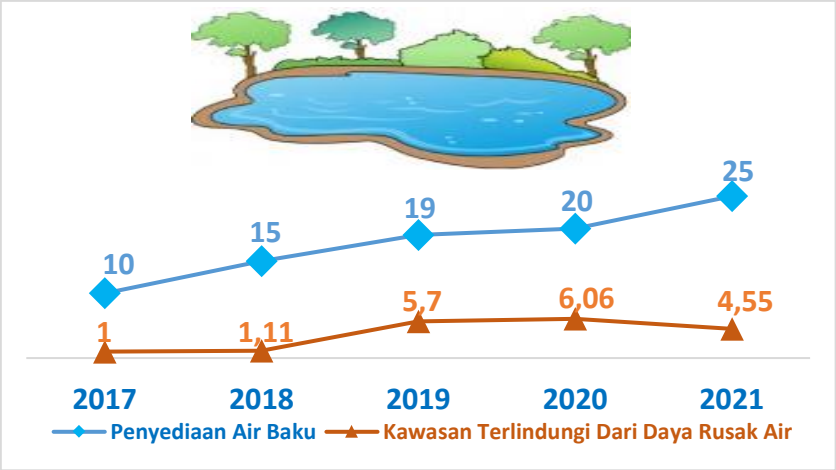
3. Persentase Penyediaan Air Baku Peningkatan Luas Kawasan Yang Terlindungi Dari Daya Rusak Air

Air baku merupakan air yang didistribusikan dalam penyediaan air bersih/ konsumsi yang harus memenuhi baku mutu tertentu sebagai bahan baku untuk air bersih/ konsumsi. Air baku dapat diperoleh dari beberapa sumber air seperti sumber air permukaan, cekungan air tanah dan air hujan. Ketersediaan infrastruktur sumber daya air sangat penting dan perlu dijaga dari daya rusak air. Pengendalian daya rusak air merupakan upaya pencegahan melalui perencanaan pengendalian daya rusak air yang disusun secara terpadu dan menyeluruh dalam pola pengelolaan sumber daya air. Salah satu daya rusak air adalah banjir. Luas kawasan banjir di Pulau Bangka mencapai 48.310.16 ha (Pulau Bangka 46.128.98 ha dan Pulau Belitung 2.181.18 ha).

Luas kawasan banjir di Wilayah Sungai kewenangan provinsi mencapai 33.461.41 ha yang terdiri dari daerah banjir 19.584,03 Ha dan rawan banjir 13.877.37 Ha dengan

kedalaman rata-rata daerah banjir 0.5-4 meter. Luas kawasan banjir kewenangan provinsi yang tertangani selama tahun 2021 seluas 1.522,82 Ha (4,55%) dari total kawasan banjir kewenangan provinsi sebesar 33.461,41 Ha dengan panjang infrastruktur banjir yang dibangun sepanjang 5900 meter. Hal ini menunjukkan masih diperlukannya pembangunan infrastruktur untuk penanganan banjir agar air baku dapat terlindungi dari daya rusak air.

**Grafik II.20**
Persentase Penyediaan Air Baku dan Peningkatan Luas Kawasan
Yang Terlindungi Dari Daya Rusak Air




*Sumber : Dinas* PUPRPRKP *Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022*

Penyediaan air baku di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkat dari tahun 2017-2021. Dimana pada tahun 2017 hanya 10 persen sedangkan tahun 2018 mencapai 15 persen. Penyediaan air baku di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan memanfaatkan kolong bekas penambangan timah. Di Pulau Bangka terdapat 635 kolong dan di Pulau Belitung terdapat 66 kolong. Meskipun tidak semua kolong dimanfaatkan sebagai air baku mengingat kolong bekas penambangan timah dalam kedalaman tertentu memiliki tingkat keasaman yang cukup tinggi.

### 4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perumahan dan permukiman yang layak merupakan salah satu kebutuhan dasar seperti halnya pendidikan dan kesehatan yang pemenuhannya dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28(h). Komitmen terhadap pemenuhan kebutuhan dasar tersebut juga sejalan dengan Agenda Global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 *(Sustainable Development Goals)* atau yang dikenal dengan SDGs, terutama Goals 6.1.1 (akses air minum); Goals 6.2.1 (akses sanitasi); dan Goals 11.1.1 (akses rumah layak huni).

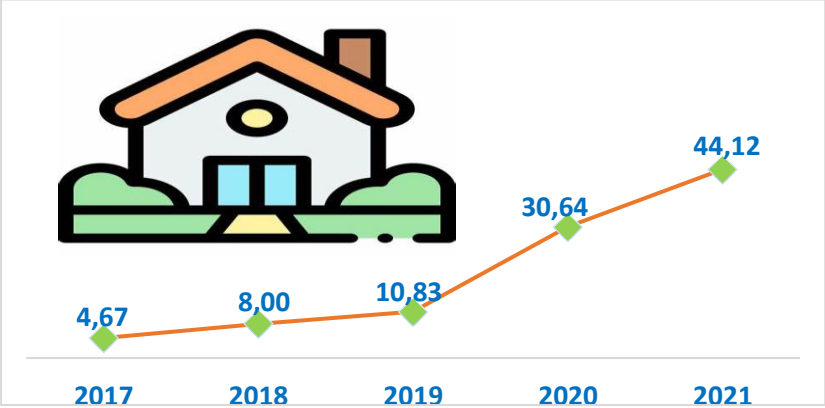
Sesuai dengan perkembangan global, Indonesia harus mengubah indikator yang digunakan dalam **Millenium Development Goals** (MDGs) agar sesuai dengan misi SDGs termasuk dalam bidang perumahan. SDGs dirancang secara partisipatif, dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan.

a. Persentase Rumah Layak Huni

Terdapat 4 (empat) komponen dalam perhitungan Rumah Layak Huni yakni ketahanan bangunan, luas tempat tinggal, akses sanitasi layak dan akses air minum layak. Walaupun SDGs dan MDGs menggunakan komponen yang sama untuk rumah layak huni, tetapi ada dua perbedaan dalam melakukan perhitungan. Pertama, dibandingkan MDGs, parameter dalam tiap komponen di SDGs didefinisikan secara rinci. Kedua, adanya pembobotan dalam MDGs yang mendefiniskan satu komponen lebih penting dari komponan lainnya. Sementara SDGs memandang bahwa semua komponen adalah hal dasar yang mutlak dan wajib dipenuhi 100% kelayakannya. Hingga tahun 2019, capaian rumah layak huni masih menggunakan metode perhitungan MDGs, dan mulai tahun 2020 telah menggunakan metode baru yakni metode perhitungan SDGs.

**Grafik II.21**

Persentase Rumah Layak Huni (%)




*Sumber : Dinas* PUPRPRKP *Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022*

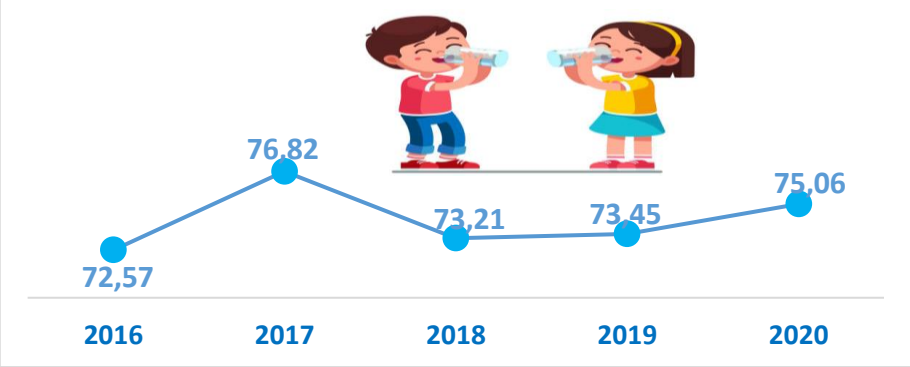
Capaian rumah layak huni di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terlihat cukup fluktuatif pada rentang 26-28% tetapi cenderung mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari capaian Tahun 2020 yang menggunakan metode SDGs dengan parameter yang lebih detail menunjukkan peningkatan capaian sebesar 10,83% dari tahun 2019 menjadi 30.64% (2020). Walaupun meningkat, angka ini menunjukkan hanya kurang dari 1/3 masyarakat yang memiliki akses terhadap rumah layak huni yang berarti kemampuan mayoritas masyarakat masih rendah untuk menempati atau memiliki rumah layak huni sehingga masih diperlukan intervensi pemerintah untuk meningkatkan nilai capaian ini kedepannya.

b. Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak

Air merupakan kebutuhan hidup yang sangat penting bagi manusia, terutama untuk kebutuhan minum dan memasak. Untuk keperluan air minum dibutuhkan air rata-rata sebanyak 5 liter/hari, sedangkan secara keseluruhan kebutuhan air suatu rumah tangga diperkirakan sebesar 60 liter/hari. Air Minum Layak adalah air ledeng eceran/meteran, air hujan, dan pompa/sumur terlindung/mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan kotoran/tinja >= 10 m.

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015 sebesar 77,.50 persen dan menurun ditahun 2016 menjadi sebesar 72.57 persen. Kemudian meningkat kembali menjadi sebesar 76.82 persen (2017), 73.21 persen (2018), 73,45 persen (2019).

**Grafik II.22**
Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap Air Minum Layak (%)



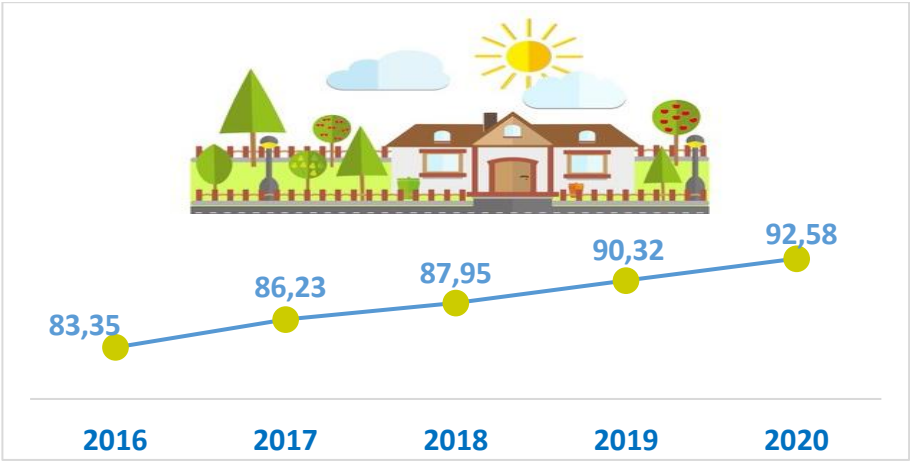

*Sumber : Dinas* PUPRPRKP *Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021 (Pokja) "Data termutakhir"*

Dalam SDGs, terdapat beberapa komponen yang menjadi penilaian akses air minum layak, antara lain sumber air minum utama, jarak ke penampungan kotoran/limbah, dan waktu tempuh pulang pergi mengambil air (termasuk waktu antri). Pada Tahun 2020, capaian terhadap indikator ini sebesar 75,06 persen (2020). Kabupaten/kota yang memiliki nilai persentase rumah tangga dengan akses air minum layak tertinggi adalah Kota Pangkalpinang sebesar 93,86% dan yang terendah adalah Kabupaten Bangka sebesar 63,22%.

c. Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak

Akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik atau sistem pengolahan air limbah (SPAL/sistem terpusat).

**Grafik II.23**
Akses Sanitasi Layak (%)




*Sumber : Dinas PUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021 (Pokja) "Data termutakhir"*

Capaian akses sanitasi layak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016-2020 terus mengalami tren positif dimana pada tahun 2016, rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak sebesar 83,35% dan terus meningkat sampai dengan tahun 2020 sebesar 92,58%. Artinya masih ada 7,42 persen rumah tangga yang belum memiliki akses

sanitasi layak, yang diantaranya masih Buang Air Besar Sembarangan (BABS) yang pada tahun 2019 masih sebesar 6,23%. Angka BABS ini menurun hampir setengahnya dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 12,62%. Peningkatan akses terhadap sanitasi layak tahun 2019-2020 mencapai 2,26 persen, artinya dengan asumsi laju yang sama, masih diperlukan 3-4 tahun untuk menuntaskan 7,42 persen tersisa yang belum memiliki akses layak.

d. Penanganan Sampah Perkotaan

Membangun kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan merupakan target 11 dalam SDGs, di mana target tersebut juga mencakup penanganan sampah kota yang tercantum dalam target 11.6. Capaian penanganan sampah perkotaan merupakan jumlah rumah tangga di perkotaan yang sampahnya diangkut petugas dan atau dibuang ke TPS. Diukur pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Khusus di kawasan perkotaan, sampah menjadi ancaman tersendiri bagi kehidupan kawasan perkotaan yang berkelanjutan. Laporan *World Bank* menyebut jumlah sampah padat yang diproduksi di kawasan perkotaan dewasa ini di seluruh dunia rata-rata mencapai 2,01 miliar ton per tahun. Dengan asumsi bahwa di masa depan antara 68 hingga 75 persen penduduk dunia akan tinggal kawasan perkotaan, maka jumlah produksi sampah di kawasan perkotaan kemungkinan besar bakal terus melonjak. Tanpa ada upaya sungguh-sungguh dalam pengendalian konsumsi dan tata kelola sampah, maka kota-kota di dunia dapat saja "tenggelam" dalam lautan sampah.

Sampai dengan tahun 2021, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional baik di Pulau Bangka maupun di Pulau Belitung. Penangan sampah masih skala perkotaan. Penangangan sampah perkotaan sebagaimana grafik di bawah ini,

**Grafik II.24**

Pananganan Sampah Perkotaan (%)




*Sumber : Dinas PUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021 (Pokja) "Data termutakhir"*

Berdasarkan data diatas penanganan sampah perkotaan tahun 2016-2019 menunjukkan tren peningkatan. Dimana pada tahun 2016 penanganan sampah perkotaan baru mencapai 21,15 persen, namun ditahun 2017 meningkat menjadi 34,62 persen. Pada

tahun 2018, penanganan sampah perkotaan sebesar 57,92%, meningkat manjadi 65,10% (2019), dan menurun menjadi 58,64% (2020). Hal ini berarti masih lebih dari 2/5 sampah perkotaan yang belum tertangani dengan baik, sehingga masih diperlukan penanganan sampah perkotaan yang lebih untuk mendukung perwujudan lingkungan perkotaan yang bersih dan sehat.

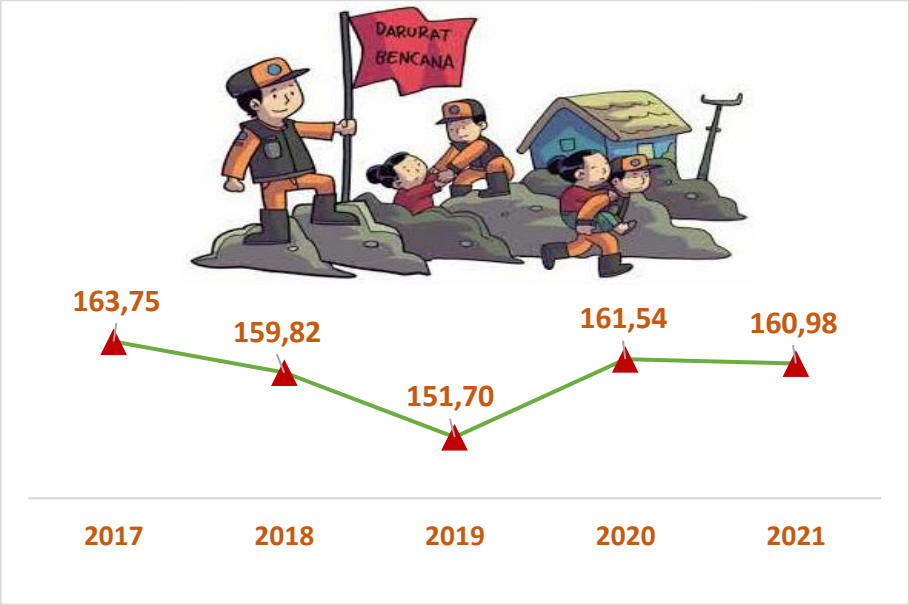
## 5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

a. Indeks Risiko Bencana (IRBI)

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerugian harta benda, kerusakan infrastruktur, kerusakan lingkungan, dan dampak psikologis. Risiko bencana merupakan penilaian kemungkinan dari dampak yang diperkirakan apabila bahaya itu menjadi bencana.

Parameter atau komponen yang digunakan dalam Indeks Risiko Bencana, diantaranya bahaya (*hazard*) dihitung berdasarkan rata-rata dari tingkat bahaya berupa data frekuensi dan magnitude dari bahaya alam seperti banjir, longsor, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain. Kemudian kerentanan (*vulnerability*) diamati berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Selanjutnya kapasitas kemampuan dilakukan dengan menggunakan metode penilaian kapasitas berdasarkan parameter kapasitas regulasi, kelembagaan, sistem peringatan, pendidikan pelatihan keterampilan, mitigasi dan sistem kesiapsiagaan.

**Grafik II.25**
Indeks Risiko Bencana




*Sumber : BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022*

Berdasarkan data di atas, Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode tahun 2017-2021 cukup fluktuatif. Meskipun pada tahun 2021

menurun dibandingkan dengan tahun 2020 dari 161,54 menjadi 160,98, namun IRBI Bangka Belitung masih dalam kategori "tinggi". Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka Selatan masih menunjukan Indeks Risiko Bencana yang masuk dalam kategori "tinggi" yaitu masing sama nilainya sebesar 180,40. Kabupaten Bangka dan Belitung Timur juga masuk dalam kategori "tinggi" dengan skor 168,40. Begitupun dengan Kabupaten Belitung yang masuk dalam kategori "tinggi" dengan skor 164,44 dan Bangka Tengah dengan skor 144,40. Sedangkan Kota Pangkalpinang dengan kategori "sedang" dengan skor 120,40. Sepanjang tahun 2021 bencana hidrometerologi masih mendominasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Risiko tertinggi berada di Bangka Tengah (214,8) dan Bangka Selatan (214), sedangkan terendah pada Kabupaten Bangka Barat (95,2).

b. Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

IKD adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan daerah tersebut kondisinya tetap dengan 3 hal, yaitu : indeks kapasitas, kerentanan, dan ancaman yang merupakan komponen penyusun IRBI. IKD dibagi dalam kedalam 3 (tiga) indeks, yaitu rendah (0 – 0,33), sedang (0,34 – 0,66) dan tinggi (0,67 – 1,00).

Penghitungan Indeks Ketahanan Daerah menggunakan aplikasi pusat dengan penilaian kapasitas daerah yang terdiri dari 7 prioritas dan 71 indikator diantaranya untuk mengetahui jenis bencana dominan dan jiwa terpapar, penyusunan peta risiko bencana dan tren risiko bencana. Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana grafik di bawah ini,

**Grafik II.26**
Indeks Ketahanan Daerah




*Sumber : BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022*

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2017-2020 sebesar 0,30 atau dalam kategori "rendah". Meskipun setiap tahun terdapat komponen yang berubah namun capaiannya sampai dengan tahun 2020 hanya mencapai 0,30 (rendah).

Namun pada tahun 2021 capaian IKD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 0,34 (sedang), artinya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cukup tangguh dalam menghadapi bencana. Tingkat kerentanan dari Potensi kerugian materil dan lingkungan yang ditimbulkan masih dalam kategori sedang dan cukup tangguh dalam menghadapi resiko bencana.

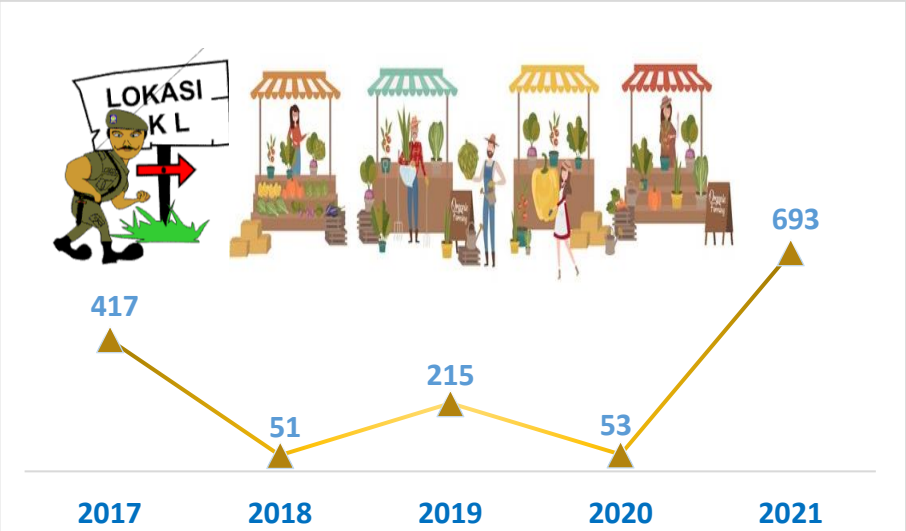
c. Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Yang Ditindaklanjuti

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kedudukan dan fungsi yang cukup penting sebagai salah satu perangkat dan aparatur pemerintah daerah sebagaimana ketentuan Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah "Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Satpol PP merupakan instansi yang special, karena merupakan ujung tombak penegakan Peraturan perundang-undangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Satpol PP memang dituntut untuk memiliki fisik yang bugar, disiplin, dan skill/kemampuan lebih tinggi, karena mereka menjadi contoh dan panutan bagi pegawai instansi lainnya.

Pada Tahun 2020 Jumlah anggota Satuan polisi Pamong praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 232 orang mengalami pengurangan sebanyak 5 orang sehingga pada tahun 2021 jumlah anggota Satuan polisi Pamong praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 227 dengan rasio jumlah Polisi Pamong Praja per-10.000 Penduduk mencapai 1,56 (2021).

**Grafik II.27**
Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah Yang Ditindaklanjuti




*Sumber : Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022*

Pada tahun 2021 ditemukan 693 pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan 693 pelanggaran ditindaklanjuti. Pada tahun 2019-2021 pelanggaran Perda dan Perkada menunjukan tren penurunan dari 975 pelanggaran mengalami penurunan sebanyak 282 pelanggaraan. Semua

pelanggaran Perda dan Perkada ditindaklanjuti atau dengan capaian 100 persen. Pelanggaran terhadap ketentuan Perda dan Perkada tersebut dikenakan tindakan preventif non-yustisial atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sampai proses pengadilan.

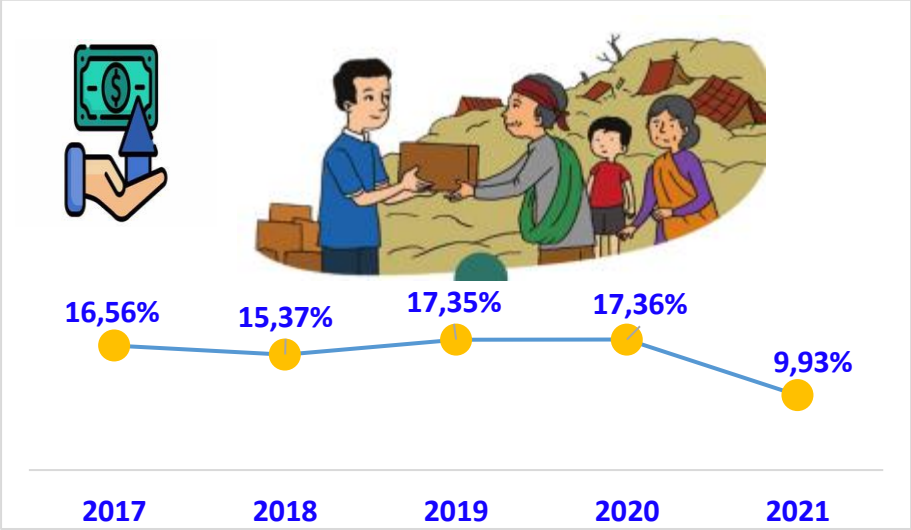
### 6. Urusan Sosial

a. Persentase Fakir Miskin Yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan interaksi sosial. **Penanganan fakir miskin** adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Dalam penanganan fakir miskin pemerintah harus menaati azas-azas kemanusiaan, keadilan sosial, nondiskriminasi, kesejahteraan, kesetiakawanan, dan pemberdayaan.

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 yang hanya berjumlah 259.361 Anggota Rumah Tangga/ART (Kepmensos Nomor 146/HUK/2020 per 26 Oktober 2021). Namun seiring dengan pandemi Covid-19 jumlah penduduk miskin di Bangka Belitung tahun 2021 meningkat tajam menjadi sebanyak 441.311 jiwa (Kepmensos Nomor 88/HUK/2021 per 31 Agustus 2021).

**Grafik II.28**
Persentase Fakir Miskin Yang Mendapatkan
Perlindungan dan Jaminan Sosial




*Sumber : Dinsos PMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022*

Berdasarkan data di atas dari tahun 2017-2021 fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial sudah menurun. Pada tahun 2020, fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial sebesar 17,36 persen namun pada tahun 2021 menjadi 9,93 persen. Pada tahun 2021, pekerja rentan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 27.945 orang, dengan jumlah keluarga miskin Program Keluarga Harapan

(PKH) sebanyak 493 Keluarga, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 391 orang dan sebanyak 27.061 orang pekerja sektor informal/mandiri.

Sebagai dampak pandemi Covid-19, meskipun dukungan tetap diberikan namun meningkatnya jumlah penduduk miskin di Bangka Belitung pada tahun 2021 menyebabkan capaian fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial menurun dari 17,36 persen atau menjadi sebesar 9,93 persen.

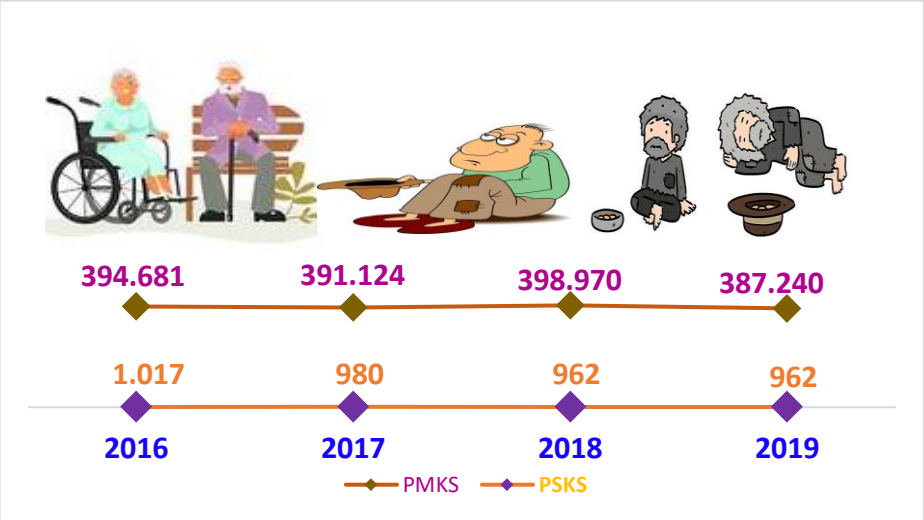
b. Jumlah PMKS/PSKS Yang Terberdayakan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Dewasa ini masalah PMKS seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, ketertinggalan/ keterpencilan, serta korban bencana dan akibat tindak kekerasan perlu ditangani secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung meningkat, hal tersebut dimana pada tahun 2017 jumlah PMKS sebesar 394.681 orang, sedangkan tahun 2018 meningkat menjadi 391.124 orang, dan tahun 2018 menjadi sebesar 398.970 orang.

**Grafik II.29**

Jumlah PMKS/PSKS Yang Terberdayakan




*Sumber:* Dinas Sosial PMD *Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021"Data termutakhir"*

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) setiap tahun selalu naik. Naiknya jumlah PMKS dikarenakan naiknya beberapa komponen PMKS seperti anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, dan lain sebagainya. Namun hal ini berbanding terbalik dengan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mengalami penurunan yaitu dari tahun 2017 berjumlah 1.017 orang menjadi 962 orang (2019). Hal ini dikarenakan berkurangnya beberapa komponen potensi dan sumber kesejahteraan sosial, seperti pekerja sosial profesional, pekerja sosial kemasyarakatan, dan lembaga kesejahteraan sosial.

### 2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

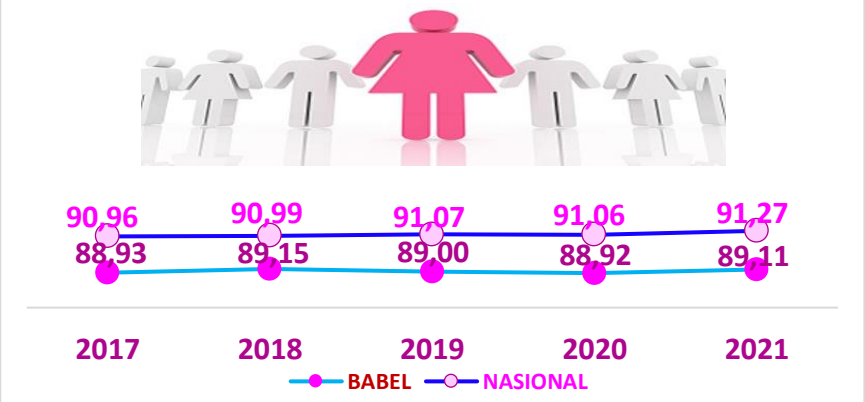
**1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu ukuran tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender. Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah IPG diformulasikan sebagai rasio antara IPM Perempuan dan IPM Laki-laki. Semakin dekat angka IPG ke 100, maka semakin kecil kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Saat ini capaian angka IPG berfluktuatif dalam lima tahun terakhir dimana pada tahun 2017 sebesar 88,93 persen meningkat menjadi 89,15 pada tahun 2018 dan menurun pada tahun 2019 menjadi 89 persen menurun lagi tahun 2020 menjadi 88,92 persen dan 2021 menjadi 89,11.

Jika dibandingkan secara nasional, capaian Indeks Pembangunan Gender di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih di bawah rata-rata nasional, dimana rata-rata nasional sebesar 91,07 persen pada tahun 2021. Gambaran terhadap perkembangan pembangunan gender di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditampilkan sebagaimana grafik dibawah ini:

**Grafik II.30**
Indeks Pembangunan Gender (IPG)



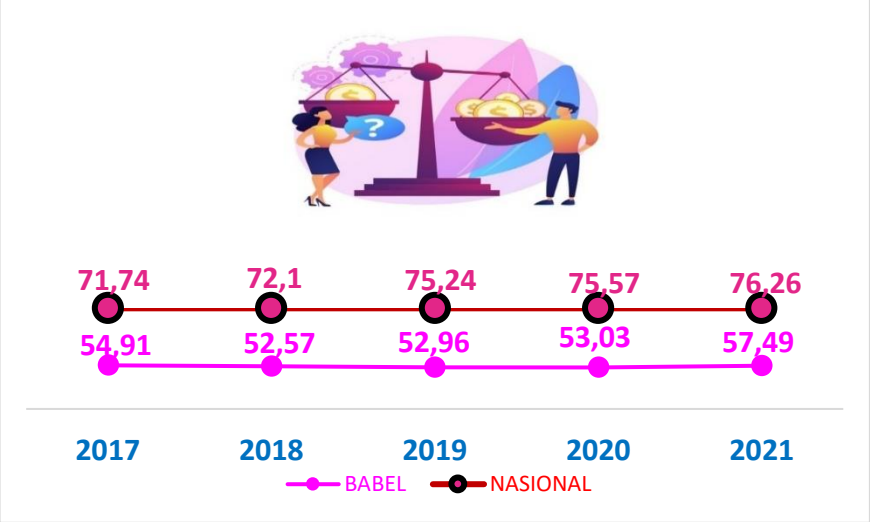

*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022*

Dengan nilai IPG yang berada di bawah 100, dapat disimpulkan bahwa secara global pembangunan laki-laki masih lebih tinggi dibandingkan pembangunan perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi perempuan di Bangka Belitung masih di bawah rata-rata nasional, yang tercermin salah satunya dari jumlah keterwakilan perempuan di dalam keanggotaan di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dimana keterwakilan perempuan dalam keanggotaan DPRD sampai dengan tahun 2021 masih dibawah 30 persen.

b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (*Gender Empowerment Index*) yang selanjutnya disingkat IDG adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan yang dilihat dari proporsi laki-laki dan perempuan dalam parlemen. Dari capaian lima tahun terakhir, IDG di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung meningkat terutama pada 3 (tiga) tahun terakhir, walaupun masih di bawah capaian Nasional.

**Grafik II.31**
Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)



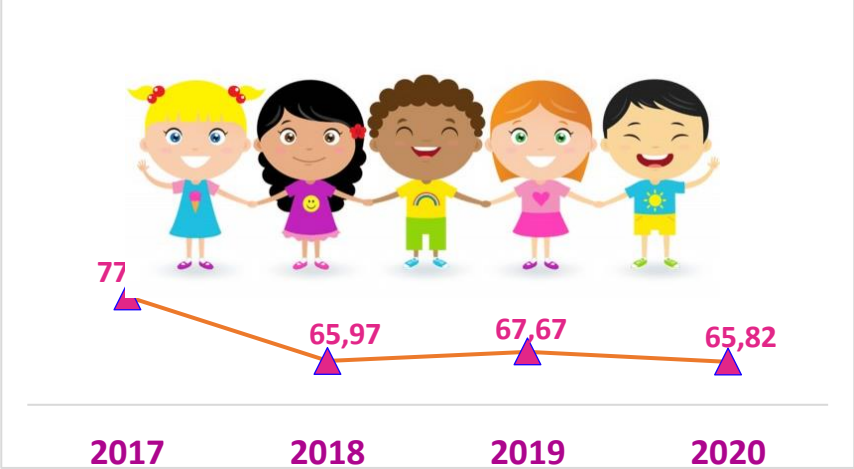

*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022*

Indeks Pemberdayaan Gender Bangka Belitung tahun 2017 hanya sebesar 54,91. Kemudian di tahun 2018-2020 mengalami penurunan hingga menjadi sebesar 53,03. Namun pada tahun 2021 Indeks Pemberdayaan Gender Bangka Belitung meningkat hingga mencapai 57,49. Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender Bangka Belitung dikarenakan meningkatnya indeks capaian Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Indeks Pemberdayaan Gender tertinggi pada tahun 2021 adalah di Kabupaten Bangka sebesar 62,34 dan diikuti oleh Kabupaten Bangka Barat sebesar 61,77, sedangkan terendah di Kabupaten Bangka Selatan sebesar 48,65. Artinya semakin tingginya IDG menunjukkan semakin meningkatnya keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, dan sumbangan pendapatan perempuan di semua kabupaten/kota.

c. Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Indeks perlindungan Anak (IPA) merupakan indikator pembangunan perlindungan anak di Indonesia. Indikator itu menggambarkan capaian pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak sesuai amanat Konvensi Hak Anak (KHA). Indeks ini diharapkan bisa menjadi ukuran untuk memastikan program dan kebijakan sudah efektif dan efisien dalam menjawab berbagai permasalahan, khususnya, terkait perlindungan anak dan melahirkan sistem perlindungan anak yang terintegrasi di lintas sektor.

**Grafik II.32**
Indeks Perlindungan Anak (IPA)




*Sumber: DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021 (data Kementerian PPA) "Data termutakhir"*

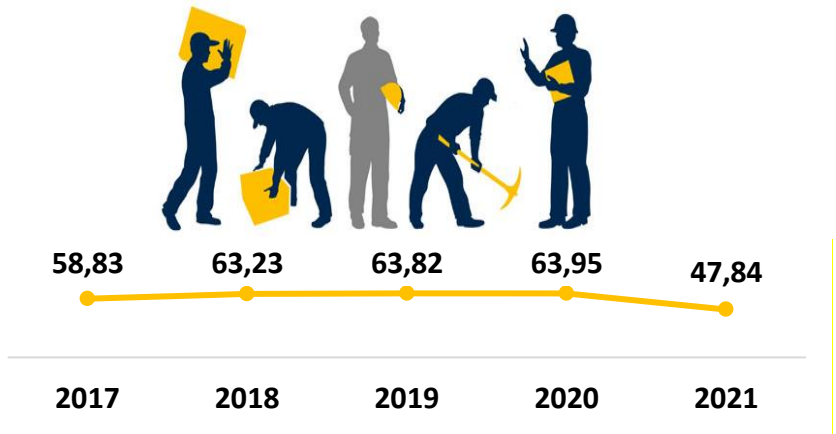
Salah satu ukuran yang mampu menggambarkan upaya perlindungan anak yang telah dilaksanakan oleh pemerintah terlihat melalui Indeks Perlindungan Anak (IPA). Namun pada tahun 2017 masih menggunakan Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA), dimana IKKA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cukup baik mencapai 77,70 diatas capaian nasional sebesar 67,90. Mulai tahun 2018 secara lebih luas, dalam mengukur capaian pembangunan perlindungan anak, salah satunya dihitung melalui IPA. Capaian IPA Indonesia pada tahun 2018 sebesar 62,72, dan Provinsi Bangka Belitung diatas rata-rata nasional sebesar 65,97. Meskipun capaian IPA Bangka Belitung tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami penurunan namun masih berada di atas capaian nasional. Salah satu klaster yang mengalami capaian cukup rendah yaitu klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan anak di Indonesia masih membutuhkan perhatian serius dan kerja keras dari seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat guna mencapai hasil yang optimal.

**2. Urusan Tenaga Kerja**

a. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan

Kementerian Ketenagakerjaan menggunakan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) untuk mengukur keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan nasional maupun di setiap daerah provinsi. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan secara komposit yang mencakup 9 (sembilan) indikator utama pembangunan ketenagakerjaan yang sangat mendasar, yaitu: 1). perencanaan tenaga kerja; 2). penduduk dan tenaga kerja; 3). kesempatan kerja; 4). pelatihan kerja dan kompetensi kerja; 5). produktivitas tenaga kerja; 6). hubungan industrial; 7). kondisi lingkungan kerja; 8). pengupahan dan kesejahteraan pekerja; dan 9). jaminan sosial tenaga kerja.

**Grafik II.32**
Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan



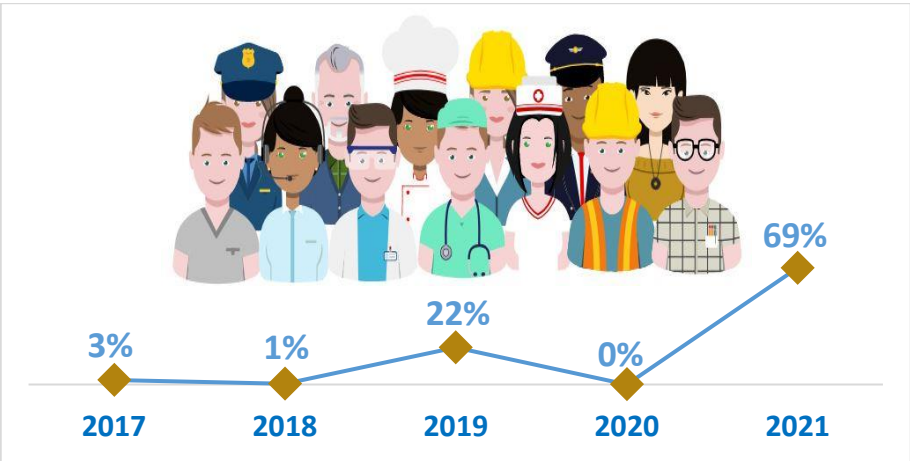

*Sumber: Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022*

Capaian Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017 sebesar 58,83 dan meningkat sampai dengan tahun 2020 sebesar 63,82 dan mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 47,84. Ini berarti IPK Bangka Belitung masih kurang dari (<) 65,99 dengan kategori "menengah ke bawah". Sejak tahun 2017 pengukuran IPK sudah menggunakan perspektif baru, sehingga hasil pencapaian "menengah kebawah" diartikan bahwa Provinsi Bangka Belitung masih jauh dari target dan standar *Sustainable Development Goals* (SDGs).

b. Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan

Masalah penempatan tenaga kerja saat ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Berdasarkan peraturan Menteri tersebut, penempatan tenaga kerja adalah proses pelayanan kepada pencari kerja untuk mempoleh pekerjaan dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan. Artinya para tenaga kerja memiliki hak dan kesempatan untuk memiluh dan mendapatkan pekerjaan serta penghasilan yang layak.

**Grafik II.34**
Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan




*Sumber: Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022*

Berdasarkan data diatas persentase tenaga kerja yang ditempatkan berfluktuatif. Pada tahun 2017 tenaga kerja yang ditempatkan sebesar 3 persen. Artinya dari 15.593 orang pencari kerja yang terdaftar hanya 424 orang yang ditempatkan. Kemudian pada tahun 2018 dari 8.926 tenaga kerja yang terdaftar namun hanya beberapa orang saja yang melapor secara manual. Begitupun dengan tahun 2020 dari 12.042 tenaga kerja yang terdaftar tidak ada satupun tenaga kerja yang melapor. Namun pada tahun 2021 seiring dengan bangkitnya sektor industri, ada penyerapan tenaga kerja yang ditempatkan sebanyak 812 orang di tahun 2021 dari 1.176 orang tenaga kerja yang terdaftar.

**3. Urusan Pangan**

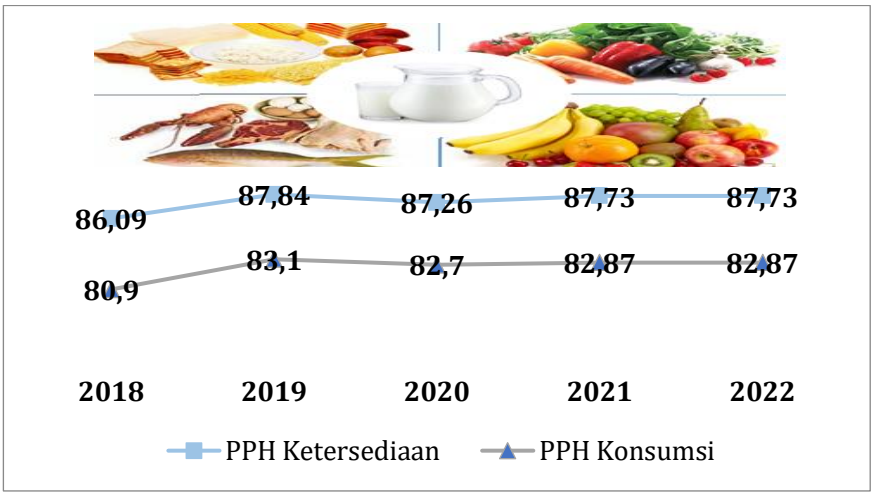
a. Capaian Skor PPH Ketersediaan dan PPH Konsumsi

Pola Pangan Harapan (PPH) atau *Desirable Dietary Pattern* (DDP) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencerminkan ketersediaan pangan maupun mutu keanekaragaman ketersediaan pangan. Skor PPH maksimal adalah 100.

Skor PPH Ketersediaan Bangka Belitung pada tahun 2018 sebesar 86,09 kemudian terus meningkat hingga tahun 2021 sebesar 87,73 Begitupun dengan skor PHH Konsumsi juga mengalami peningkatan dimana pada tahun 2018 sebesar 81,90 dan 2021 mencapai 82,27. Skor PPH Ketersediaan dan skor PHH Konsumsi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan tahun 2021 relatif mengalami peningkatan. Sementara data tahun 202 baru akan diperoleh dipenghujung tahun 2023. Capaian Skor PPH Ketersediaan dan PPH Konsumsi sebagaimana grafik di bawah ini,

**Grafik II.35**

Capaian Skor PPH Ketersediaan dan PPH Konsumsi




*Sumber : Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022*

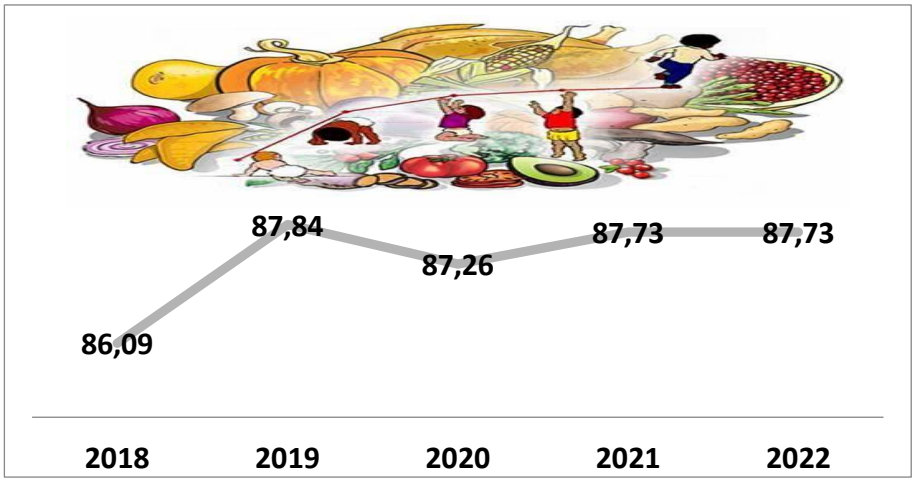
Semakin meningkatnya skor ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin memahami dan mempunyai kesadaran akan pentingnya kualitas konsumsi pangan untuk hidup sehat. Namun demikian perlu untuk lebih mengoptimalkan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan melalui upaya meningkatkan pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA), maka perlu didorong melalui sosialisasi, promosi dan kegiatan yang dapat memberi wawasan dan pengetahuan untuk percepatan pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH).

b. Persentase Penduduk Rawan Pangan

Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Kerawanan pangan dapat terjadi secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu karena alasan ekonomi/kemiskinan (kronis), dan dapat pula terjadi akibat keadaan darurat seperti bencana alam maupun bencana sosial (transien).

**Grafik II.36**

Persentase Penduduk Rawan Pangan




*Sumber : Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022*

*Prevalence of Undernourishment* (PoU) Bangka Belitung terus mengalami penurunan, dimana pada tahun 2018 sebesar 10,13 persen kemudian pada tahun 2019 menjadi 7,9 persen dan kembali menurun di tahun 2020 dan 2021 menjadi sebesar 7,50 persen dan 6,90 persen. Sedangkan pada tahun 2022 angka *Prevalence of Undernourishment* (PoU) menjadi 6,73 persen. Hal ini menunjukkan masih adanya prevalensi penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan atau penduduk rawan pangan atau dengan kata lain penduduk yang konsumsi pangannya belum mencukupi standar kecukupan gizi. Dengan PoU sebesar 6,73 persen maka dengan jumlah penduduk Bangka Belitung yang dihitung sebanyak 1.481.512 jiwa terdapat 99.706 jiwa penduduk yang rawan pangan.

**4. Urusan Pertanahan**

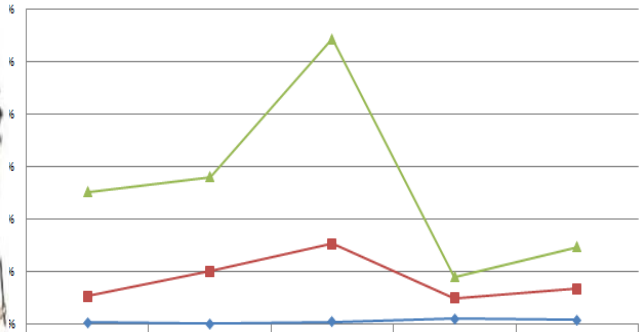
a. Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah

Dengan ditetapkannya urusan pertanahan kedalam tata ruang menjadi satu kesatuan, maka ada peluang untuk dapat memperbaiki fragmentasi pelaksanaan penataan ruang yang terjadi selama ini khususnya dalam menyelesaikan kasus pertanahan. Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan disebutkan, sengketa tanah ialah: "Sengketa Tanah yang selanjutnya disebut Sengketa adalah perselisihan pertanahan antara perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas."

**Grafik II.37**

Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah



| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Kasus Terdaftar | 20 | 18 | 39 | 4 | 8 |
| Jumlah Kasus Terselesaikan | 5 | 10 | 15 | 4 | 6 |
| % Penyelesaian Kasus Tanah | 25% | 5.50% | 38% | 100% | 75% |

*Sumber: BPN dan Dinas PUPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020 "Data termutakhir"*

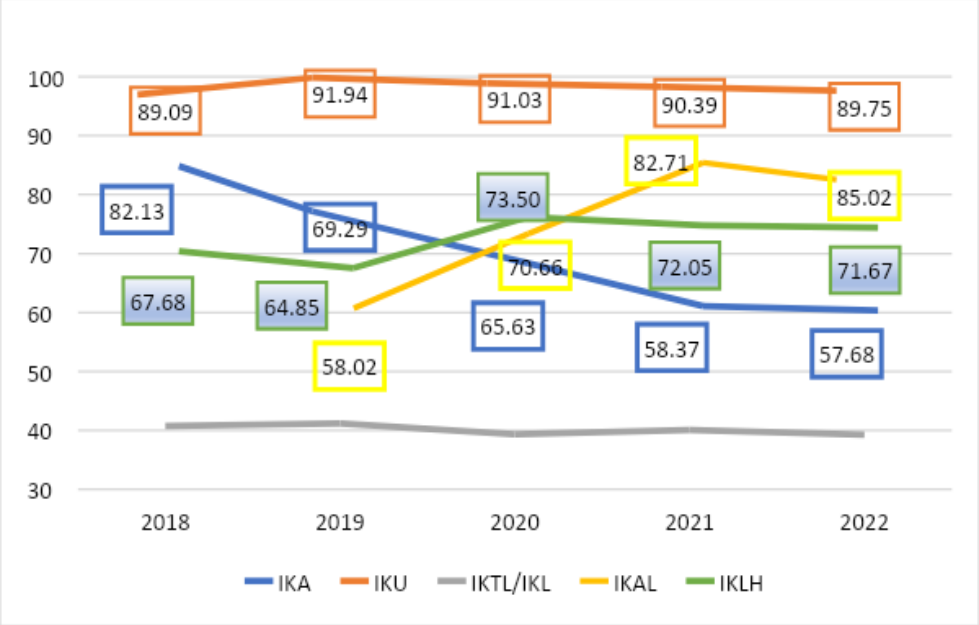
Kasus sengketa tanah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2014-2018, pada tahun 2016 yaitu 39 kasus terdaftar dan hanya 15 kasus yang terselesaikan atau sebesar 38 persen. Pada tahun 2017 tercatat jumlah kasus terdaftar sebanyak 4 kasus yaitu 2 kasus di Kabupaten Bangka dan 2 Kasus di Kota Pangkalpinang dan semua kasus terselesaikan atau sebesar 100 persen. Sedangkan tahun 2018 ada 8 kasus yang terdaftar yaitu 1 kasus di Kabupaten Bangka, 3 Kasus di Kabupaten Bangka Tengah, 1 Kasus di Kabupaten Bangka Selatan, dan 3 Kasus di Kota Pangkalpinang. Penyelesaian kasus pada tahun 2018 hanya sebesar 75 persen. Kasus ini di dominasi oleh kasus sengketa tanah desa dan kasus tumpang tindih kepemilikan lahan serta pemalsuan sertifikat

## 5. Urusan Lingkungan Hidup

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan komponen penyusun berupa Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)/ Indeks Kualitas Lahan (IKL).

**Grafik II.38**
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup




*Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023*

Berdasarkan data di atas, selama kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2022, IKLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung fluktuatif. Nilai IKLH dari tahun 2017 hingga tahun 2019 terus menurun dari 67,85 menjadi 64,85 namun pada tahun 2020 meningkat menjadi 73,50. Tahun 2021 nilai IKLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menurun menjadi 72,05. Indikator Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara yang menurun memberikan andil terhadap penurunan IKLH di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Capaian Nilai IKLH Tahun 2022 adalah 71,76 turun sebesar 0,29 dari capaian IKLH Tahun 2021 sebesar 72,05. Capaian nilai IKLH Tahun 2022 lebih tinggi dari target semula 75,99 (capaian 94,31%), diperoleh dari unsur penilaian Indeks Kualitas Air (IKA) 57,68 (Sedang), Indeks Kualitas Udara (IKU) 89,75 (Baik), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) 39,28 (Rendah). Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) 39,28 (Rendah), hal tersebut dipengaruhi dengan kondisi lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dimana luas tutupan hutan terjadi penurunan setiap tahunnya akibat penggunaan diluar kegiatan kehutanan, dan luasan tutupan vegetasi non hutan juga mengalami penurunan karena banyaknya alih fungsi untuk kegiatan lainnya.

Masih dibutuhkan upaya yang optimal dari seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan IKLH di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Indeks kualitas air dihitung untuk 11 sungai dan menggunakan avg NSF memasukkan unsur pencemar untuk 10 parameter+debit, sedangkan udara hanya dihitung 3 titik lokasi: industri, perumahan dan transportasi.

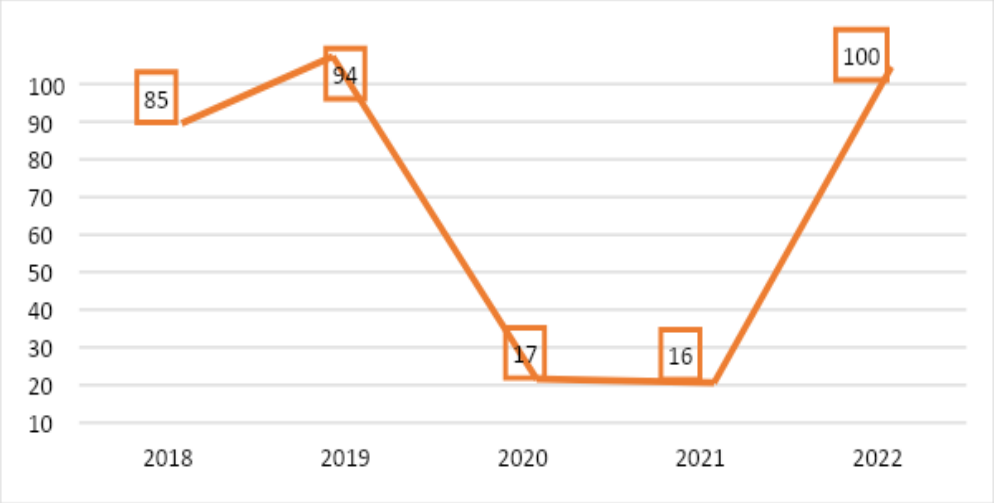
Strategi dasar yang komprehensif dengan peran multisektor sangat diperlukan untuk meningkatkan komponen-komponen IKLH, terutama IKA, IKL. Aksi-aksi atau kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang terintegrasi dengan pembangunan dapat dilakukan berdasarkan strategi ini.

b. Persentase Aduan Masyarakat Yang Diverifikasi

Pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengaduan kepada instansi penanggung jawab, mengenai dugaan terjadinya pelanggaran, potensi dan/atau dampak di bidang lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan. Pengaduan dapat disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaduan secara langsung dilakukan dengan mendatangi dan menyampaikan pengaduan kepada petugas di Sekretariat Pengaduan. Pengaduan secara tidak langsung dapat disampaikan melalui media pengaduan berupa telepon, surat, surat elektronik, faksimile, pesan singkat, website, media sosial, aplikasi pengaduan dan media lain sesuai dengan perkembangan teknologi.

**Grafik II.39**

Persentase Aduan Masyarakat Yang Diverifikasi




*Sumber: DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023*

Pengaduan Masyarakat ini bersumber baik dari hasil pengawasan, pengaduan langsung ke Dinas Lingkungan Hidup ataupun yang berasal dari Media massa baik yang izin lingkungannya dikeluarkan oleh Provinsi maupun oleh kabupaten/kota.

Pada tahun 2017 semua pengaduan/kasus yang masuk 100% diverifikasi. Sedangkan pada tahun 2018 pengaduan yang masuk sebanyak 20 kasus (85%), dan yang diverifikasi sebanyak 17 kasus. Pada tahun 2019, pengaduan yang masuk sebanyak 18 kasus dan yang diverifikasi sebanyak 17 kasus atau sebesar 94 persen karena terdapat satu pengaduan yang sudah ditindaklanjuti oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Namun pada tahun 2020 dan 2021 hanya 17 dan 16 persen yang ditindaklanjuti. Pada tahun 2022 terdapat 19 pengaduan dan telah diverifikasi sebanyak 19 aduan, atau capaian 100%..

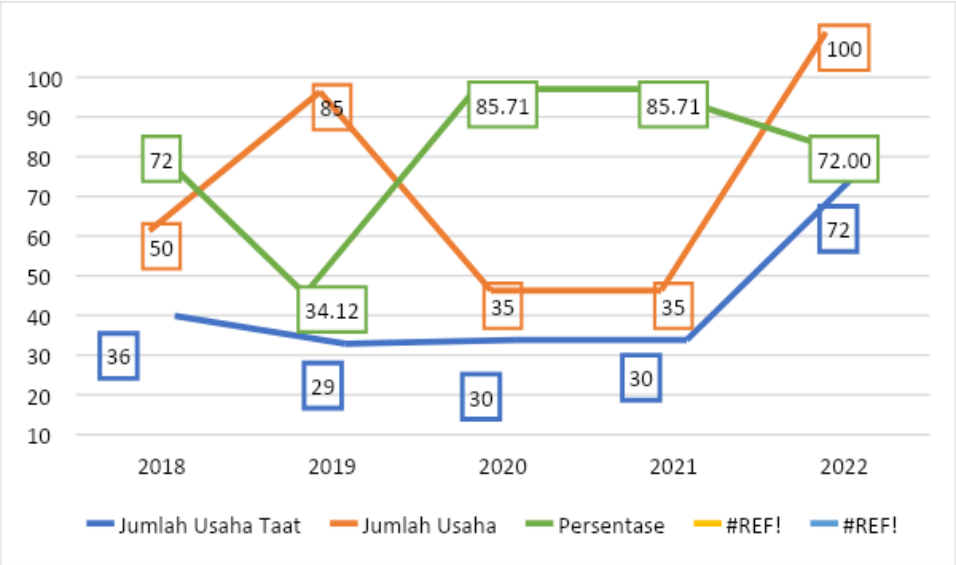
c. Persentase Peningkatan Ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Salah satu instrumen penegak hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu pengawasan terhadap ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, ketaatan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (izin pembuangan air limbah, izin pengelolaan limbah, limbah bahan berbahaya dan beracun (penyimpanan, pengumpulan, pengolahan, penimbunan, pengangkutan) serta

ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dokumen lingkungan, air, udara, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3). Persentase Peningkatan Ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Sebagaimana grafik di bawah ini :

**Grafik II.40**

Persentase Peningkatan Ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)



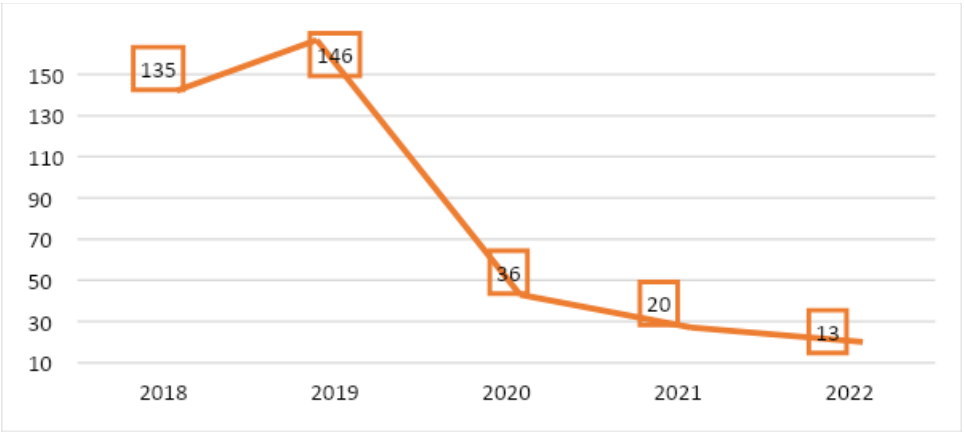

*Sumber: DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023*

Ketaatan usaha/kegiatan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pada kurun waktu tahun 2017-2022 mengalami fluktuasi, namun dari kondisi tahun 2017 sebesar 60% meningkat menjadi 86% pada tahun 2020. Pada tahun 2021 jumlah usaha/kegiatan yang menggunakan izin lingkungan juga menurun dari sebanyak 50 usaha/kegiatan pada tahun 2017 menjadi 35 usaha/kegiatan di tahun 2021. Pada tahun 2022 jumlah kegiatan/usaha yang diawasai sebanyak 100 kegiatan/usaha dengan capaian ketaatan sebesar 71%. Masih terdapat perizinan berusaha yang belum masuk dalam cakupan pengawasan dan perlu ditingkatkan pada tahun-tahun kedepan.

d. Jumlah Rekomendasi Izin Lingkungan Yang Diterbitkan

Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

**Grafik II.41**
Izin Lingkungan Yang Dikeluarkan Provinsi






*Sumber: DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023*

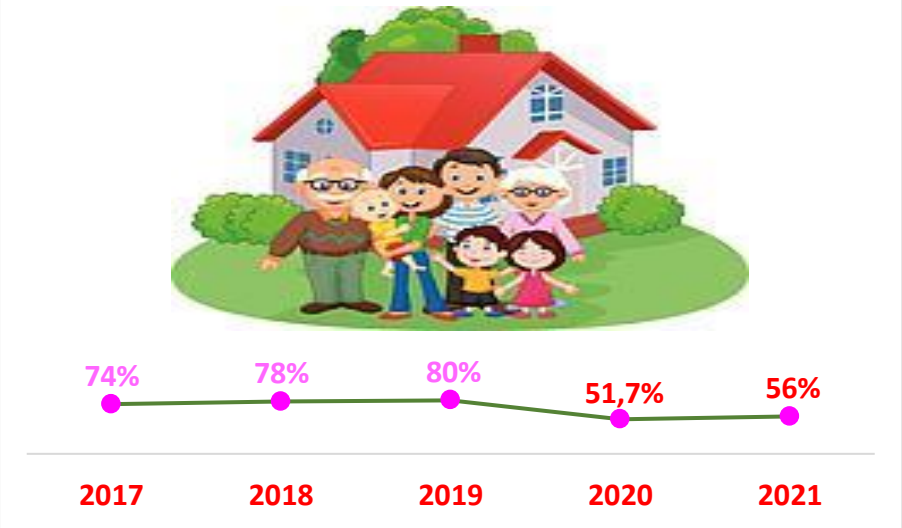
Berdasarkan data di atas izin lingkungan yang dikeluarkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 meningkat dari 126 usaha/kegiatan (2017) menjadi sebanyak 146 usaha/kegiatan. Namun kondisi ini menurun menjadi 36 usaha/kegiatan di tahun 2020 dan 20 usaha/kegiatan di tahun 2021. Menurunnya izin lingkungan ini dikarenakan pada saat akhir tahun 2020 hampir semua pengajuan perizinan di pending sampai dengan juni 2021. Hal ini menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang baru diterima pada Juni 2021. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5, 21, dan 22 tahun 2021, ada beberapa perubahan kewenangan yang berubah, dari semula kewenangan Bupati menjadi kewenangan Gubernur atau Provinsi dan sebaliknya. Pada tahun 2022 jumlah Rekomendasi Izin Lingkungan Yang Diterbitkan sebanyak 13 perusahaan. Sedangkan jumlah total izin yang telah diterbitkan dan masih berlaku sampai tahun 2022 sebanyak 213 perusahaan.

## 6. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)

Kebijakan tentang keluarga di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 yang mengamanatkan kepada pemerintah untuk membangun ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Pembangunan keluarga merupakan salah satu dari tiga pilar utama Badan kependudukan dan Keluarga Berencana Nasiona (BKKBN) – selain dua pilar lainnya yaitu kependudukan dan keluarga berencana. Untuk mengetahui keberhasilan pencapaian pembangunan keluarga, BKKBN menginisiasi Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) yang terdiri atas 3 dimensi, yaitu kemandirian keluarga, ketentraman keluarga dan kebahagian keluarga, dengan total 17 variabel (Mardiya, 2020). IPK merupakan sebuah indeks yang memiliki rentang dari 0 hingga 100, dengan ketentuan bahwa IPK kurang dari 40 dinilai sebagai keluarga rentan, sedangkan nilai IPK dalam rentang 40 hingga 70 dinilai sebagai keluarga berkembang, sedangkan nilai IPK lebih dari 70 dinilai sebagai keluarga berkualitas.

**Grafik II.42**
Indeks Pembangunan Keluarga



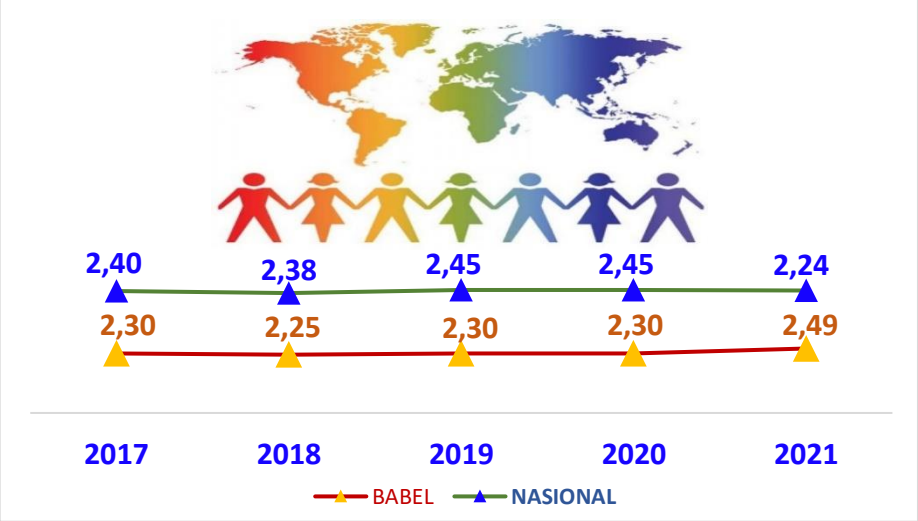

*Sumber: DP3ACSKB, 2022 (diolah)*

Pada tahun 2017 capaian ketahanan keluarga masih menggunakan indeks ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Capaian Provinsi Bangka Belitung tahun 2017-2019 cukup tinggi dalam pembangunan ketahanan keluarga dan masuk dalam 5 besar tertinggi se-Indonesia. Pada tahun 2020 konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga bergeser menjadi Indeks Pembangunan Keluarga (IPK). Capaian Indeks Pembangunan Keluarga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cukup baik yaitu sebesar 51,7 persen (2020) dan 56 persen (2021). Pada tahun 2021 IPK Bangka Belitung berada diatas nasional (53,96), artinya upaya untuk mewujudkan ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga semakin berkembang dalam upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas.

b. *Total Fertility Rate* (TFR) – Kependudukan

*Total Fertility Rate* (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya. TFR digunakan sebagai indikator untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. TFR sebesar 2,35 berarti bahwa wanita (usia 15-49 tahun) secara rata-rata mempunyai 2-3 anak selama masa usia suburnya.

**Grafik II.43**
*Total Fertility Rate*




*Sumber: DP3ACSKB, 2022 (diolah dari berbagai sumber BKKBN Pusat dan Provinsi)*

Berdasarkan data hasil pendataan keluarga yang dilakukan oleh BKKBN bahwa TFR nasional tahun 2021 sebesar 2,24, berhasil turun dibandingkan dengan TFR tahun 2019 dan 2020 pada angka 2,45 dan diharapkan capaian 2,1 di tahun 2024 akan dapat tercapai. TFR Bangka Belitung pada tahun 2019-2021 mengalami kenaikan dari 2,30 menjadi 2,49. Salah satu faktor penyebab meningkatnya TFR di tahun 2021 dikarenakan pemakaian alat kontrasepsi yang menurun. Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur usia 15-49 tahun yang pernah kawin (40% bawah) pada tahun 2018 sebesar 71,83 persen dan menurun di tahun 2019 menjadi sebesar 70,18 persen dan ini berdampak juga di tahun 2020 dan 2021. Selama masa pandemi Covid-19 tahun 2020-2021, muncul kekhawatiran masyarakat untuk mengakses pelayanan KB di klinik bidan atau dokter. Banyak dokter dan bidan yang menutup kliniknya karena tak memiliki perlengkapan memadai untuk mencegah penularan Covid-19. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk ber-KB secara mandiri selama masa pandemi pun masih rendah, akibatnya kehamilan yang tidak direncanakan pun meningkat.

c. Jumlah Kampung Keluarga Berencana (KB) Berkualitas

Kampung KB sebagai wahana pemberdayaan masyarakat adalah sebuah program untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program pembangunan sektor terkait lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Sejak tahun 2016 penerapan tiga pilar utama BKKBN melalui konsep pemberdayaan masyarakat di terapkan melalui pelaksanaan Kampung KB. Tujuan umum dari pelaksanaan Kampung KB adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, secara khusus Kampung KB diharapkan bisa menjadi wadah kerjasama antar seluruh *stakeholder* untuk menyelenggarakan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), serta pembangunan sektor lainnya sehingga terjadi peningkatan masyarakat terhadap pembangunan berwawasan kependudukan.

**Grafik II.44**

Kampung Keluarga Berencana (KB) Berkualitas




*Sumber: DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022*

Jumlah kampung KB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2017-2021 cenderung meningkat. Pada tahun 2017 jumlah Kampung KB sebanyak 47 Kampung KB yang terbentuk. Pada tahun 2018-2021 jumlah kampung KB sebanyak 118 Kampung KB Berkualitas. Semakin banyaknya Kampung KB Berkualitas yang terbentuk, diharapkan semakin tinggi kesadaran masyarakat Bangka Belitung tentang pembangunan berwawasan kependudukan dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

**7. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

a. Persentase Cakupan Administrasi Kependudukan

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan. Dalam administrasi kependudukan dokumen pendaftaran penduduk berupa Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Identitas Anak (KIA). Sedangkan akta pencatatan sipil (Akta Lahir, Akta Kematian, Akta Perkawinan).

**Grafik II.45**

Persentase Cakupan Administrasi Kependudukan




*Sumber: DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022*

Masyarakat yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk dan akta pencatatan sipil dari tahun 2016-2020 meningkat setiap tahunnya. Masyarakat yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk tercatat pada tahun 2018 sebesar 60,41 persen menjadi 74,41 persen (2019). Hal ini seiring dengan meningkatnya jumlah KK yang diterbitkan sebanyak 373.274 (2018) menjadi 396.352 (2019) atau terjadi peningkatan dari 85,54% menjadi 89% dari jumlah KK. Begitupun dengan KTP-Elektronik yang diterbitkan dari 922.235 (2018) menjadi 962.937 (2019) atau meningkat dari 95,69% menjadi 98,34% dari jumlah KTP. Untuk jumlah KIA yang diterbitkan tahun 2019 sebanyak 151.553 dan jumlah anak usia 0-17 tahun berjumlah 422.141. Begitupun dengan masyarakat yang memiliki akta pencatatan sipil pada tahun 2018 sebesar 63,32 persen meningkat menjadi 71,10 persen (2020), artinya kesadaran masyarakat dalam mengurusi administrasi kependudukan semakin baik.

**8. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

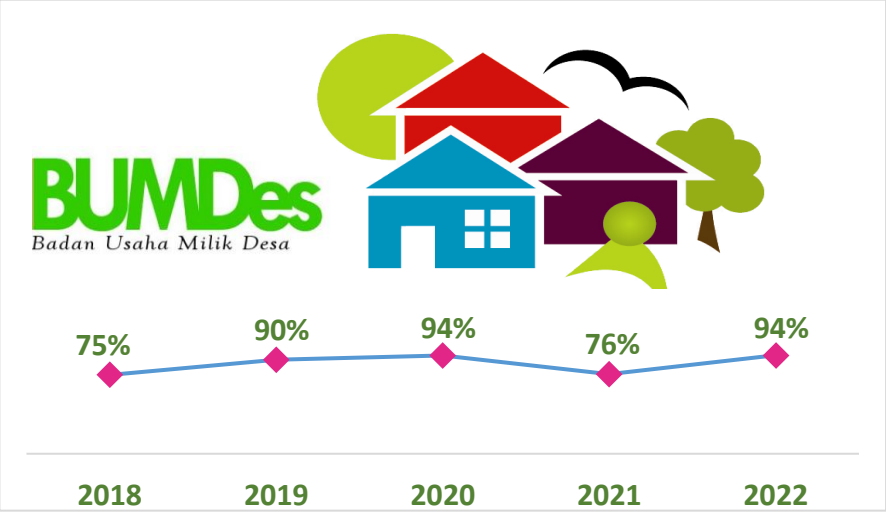
a. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Yang Aktif

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan. Terdapat beberapa data sektoral yang menjadi kewenangan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diantaranya terkait dengan jumlah BUMDes yang aktif.

Selama periode 2018-2022, LPM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung meningkat, di mana LPM dihitung dari jumlah BUMDes yang aktif tahun 2017 sebesar 75 persen atau sebanyak 232 dari 309 desa. Terdapat perbedaan status BUMDes tahun 2017 dengan tahun 2018 dikarenakan adanya pembaharuan status yang berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2017 tanggal 29 September 2017 tentang petunjuk teknis operasional dan tata cara pemberian bantuan keuangan khusus kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui program peningkatan dan pendampingan kelembagaan BUMDes di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**Grafik II.46**

Persentase Lembaga Permberdayaan Masyarakat Yang Aktif




*Sumber: Dinas Sosial PMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022*

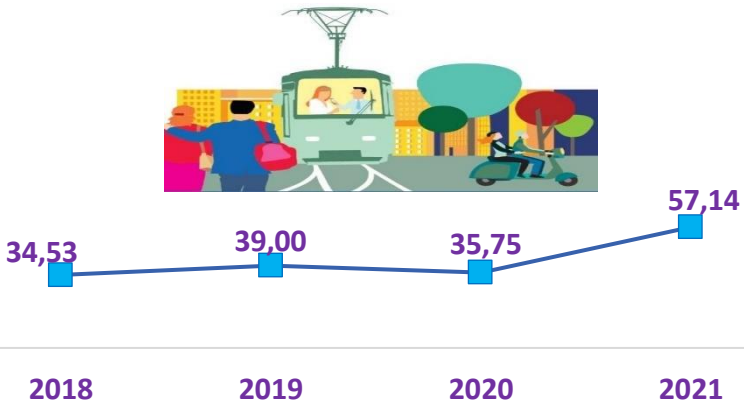
Keterkaitan antara status BUMDes di tahun 2017 dengan tahun 2018 untuk lebih mengetahui BUMDes mana yang benar-benar aktif dan perlu didorong lebih aktif untuk dapat membantu BUMDes tersebut dalam segi keuangan, harapan yang akan didapatkan dengan keaktifan BUMDes adanya bantuan keuangan baik dari pusat, provinsi, kabupaten maupun dana CSR. Capaian Bumdes aktif ini sampai dengan tahun 2021 sebesar 94 persen atau sebanyak 209 LPM yang sudah masuk dalam aplikasi Bumdes Kementerian Desa.

**9. Urusan Perhubungan**

a. Persentase Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Pemerintah Provinsi pada Urusan Perhubungan meliputi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan/Perhubungan Darat (pengelolaan terminal penumpang tipe B, penyediaan perlengkapan jalan dan manajemen rekayasa lalu lintas di jaringan jalan provinsi, penyediaan angkutan umum (orang dan/atau barang) antar kota dalam satu provinsi); Pelayaran/Perhubungan Laut (Pengelolaan Pelabuhan Pengumpan Regional) terdiri dari Kepelabuhanan dan Angkutan Pelayaran.

**Grafik II.47**
Persentase Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan (%)




*Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Bangka Belitung, 2022*

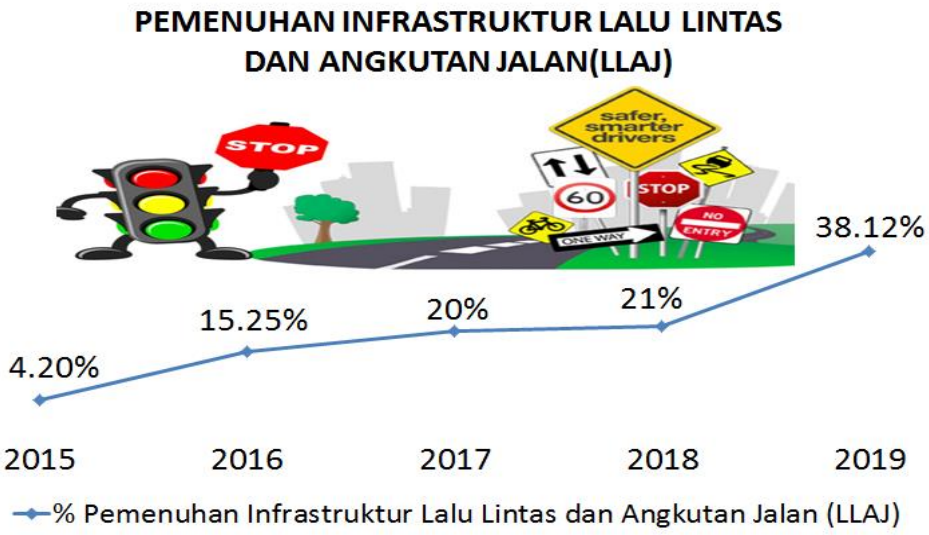
Infrastruktur perhubungan dapat dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kepelabuhanan, dan Angkutan Pelayaran. Dari ketiga komponen tersebut, capaian Infrastruktur perhubungan terealisasi pada tahun 2018 sebesar 34.53 persen, Tahun 2019 sebesar 39.00%, Tahun 2020 menurun menjadi 35.75% dan Tahun 2021 meningkat hingga 57.14%. Dari grafik tersebut menunjukkan tren positif penyediaan infrastruktur perhubungan yang terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini diharapkan dapat terus ditingkatkan.

b. Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Perlengkapan jalan berperan penting untuk mendukung ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Perlengkapan jalan raya inilah yang berfungsi untuk meningkatkan keselamatan jalan dan menyediakan pergerakan yang teratur terhadap pengguna jalan. Fasilitas perlengkapan jalan memberi informasi kepada pengguna jalan tentang peraturan dan petunjuk yang diperlukan untuk mencapai arus lalu lintas yang selamat, seragam dan beroperasi dengan efisien. Jumlah fasilitas perlengkapan jalan di ruas jalan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

yang terpasang berupa rambu-rambu lalu lintas sebanyak 2.327 Unit, yaitu Marka Jalan 103.911 M, Pagar Pengaman Jalan 3.858 M, *Warning Light* 21 Unit, *Traffic Light* 6 Lokasi, *Delineator* 3.805 Buah, 7 Paku Jalan 3.503 Buah, Pita Penggaduh 426 Buah, Penerangan Jalan Umum 208 M.

**Grafik II.48**




*Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Bangka Belitung, 2021"Data termutakhir"*

Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) di Bangka Belitung sejak tahun 2015-2019 meningkat. Pada tahun 2015 infrastruktur lalu lintas dan angkutan jalan baru terpenuhi sebesar 4,20 persen dan meningkat pada tahun 2019 sebesar 38,12 persen. Pada tahun 2019 pemenuhan infrastruktur lalu lintas terealisasi sebesar 15,25% persen dengan rincian *guard rail* sepanjang 920m, paku jalan 100 buah, APILL 4 unit, *Warning Light* 10 unit, marka jalan 2640m, rambu-rambu lalu lintas 200 unit, dan lampu penerangan jalan umum 310 unit.

## 10. Urusan Penanaman Modal

### a. Nilai Investasi

Investasi berperan penting dalam upaya pemulihan ekonomi pasca pandemic covid-19. Dengan banyaknya bisnis yang tumbuh akan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan yang tercipta secara jelas akan mendukung pertumbuhan daya beli masyarakat, sehingga akan terjadi perputaran ekonomi yang akan berdampak pada mendorong pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa faktor yang dapat menjadi bahan pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya, antara lain : Pertama faktor sumber daya alam, Kedua faktor sumber daya manusia, Ketiga faktor stabilitas politik dan perekonomian, guna menjamin kepastian dalam berusaha, Keempat faktor kebijakan pemerintah, Kelima faktor kemudahan dalam peizinan. Oleh karena itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berlomba-lomba mengedepankan kebijakan yang ramah terhadap dunia usaha yang atraktif untuk menarik investasi. Berikut ini Perkembangan Minat Investasi dan nilai realisasi investasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung :

**Grafik. II.49**



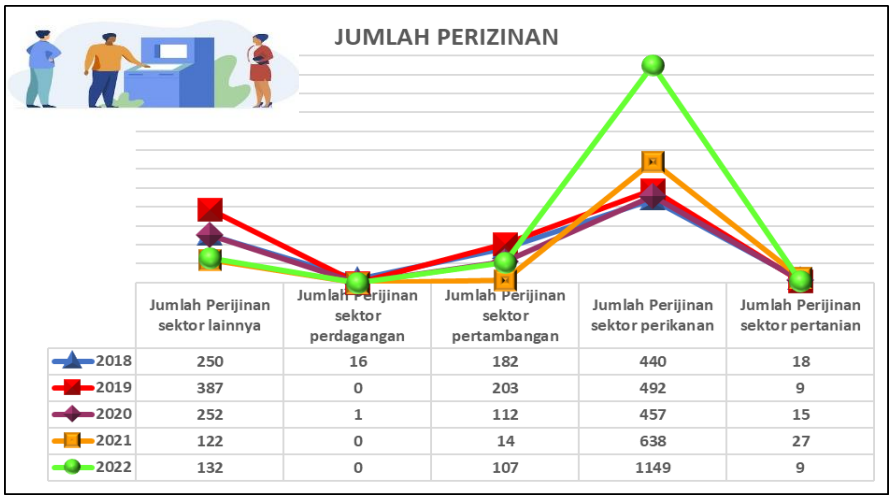

*Sumber: DMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022*

Capaian investasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2018-2022 secara garis besar meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah investor., meskipun terjadi penurunan Nilai investasi di tahun 2020 namun tidak mempengaruhi peningkatan jumlah investor. Nilai investasi di tahun 2022 meningkat sebesar 88,68 persen dari tahun sebelumnya menjadi 8,17 Triliun. Sedangkan jumlah investor mengalami penurunan dari 2.658 di tahun 2021 menjadi 1.839 di tahun 2022.

**b. Jumlah Perizinan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Pemerintah meluncurkan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission*/OSS) untuk mempermudah pengurusan perizinan investasi. Ini merupakan upaya pemerintah dalam menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat dan murah, serta memberi kepastian.

**Grafik II.50**
Jumlah Data Perizinan




*Sumber: DMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022*

Data perizinan dari tahun 2018-2022 cukup berfluktuatif. Perizinan didominasi oleh sektor perikanan, sektor pertambangan, dan sektor lainnya. Pada tahun 2022 capaian

perizinan sektor perikanan meningkat sebesar 80 persen menjadi 1.149 dari tahun sebelumnya. Seiring dengan meningkatnya potensi investasi budidaya udang vanname di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Perizinan sektor pertambangan mencapai 107 di tahun 2022. Sedangkan perizinan sektor lainnya didominasi oleh perizinan transportasi, pariwisata, kesehatan dan lain sebagainya. Jumlah perizinan sektor lainnya mencapai 132 di tahun 2022. Sejak tahun 2018, Semua perizinan telah terlayani menggunakan sistem perizinan tunggal oleh sistem *Online Single Submission* (OSS). Dalam sistem OSS ini syarat pokok ada tiga yaitu izin lokasi, izin IMB, dan izin lingkungan yang wajib bagi pelaku usaha. Dengan OSS perizinan lebih mudah dan tanpa dipungut biaya.

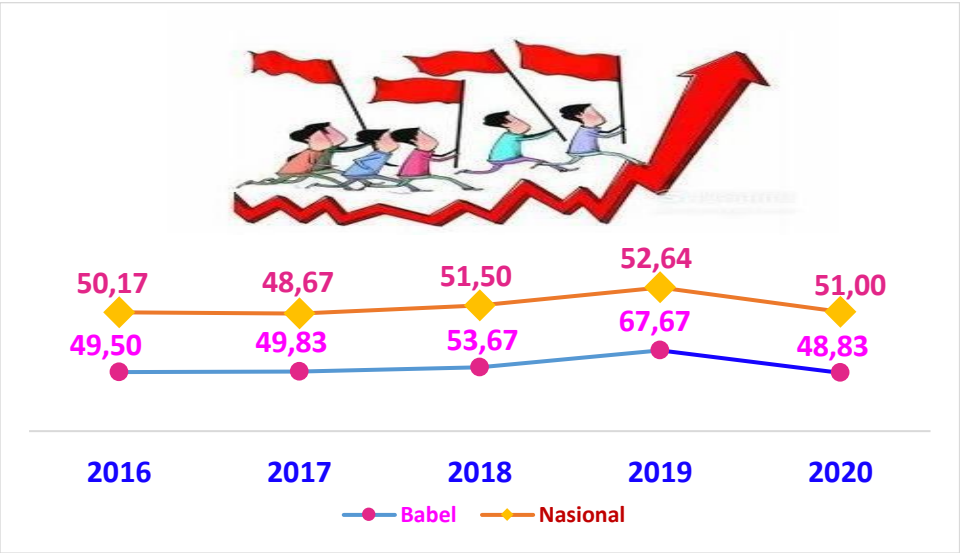
## 11. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

a. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 mengategorikan pemuda sebagai warga negara berusia 16 hingga 30 tahun. Hal ini berarti bahwa sebanyak 63,82 juta orang atau hampir seperempat dari jumlah penduduk Indonesia pada 2018 merupakan pemuda (BPS, 2018). Investasi pada peningkatan kualitas pemuda merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Rumusan Indikator Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan formula pencapaian pembangunan kepemudaan berdasarkan rata-rata sederhana dari indeks setiap dimensi yang telah ditentukan dengan bobot tertentu pula untuk setiap indeksnya. Dimensi tersebut meliputi domain pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan, Ketenagakerjaan dan Kesempatan, Partisipasi dan Kepemimpinan, dan Gender dan Diskriminasi.

**Grafik II.51**
Indeks Pembangunan Pemuda




*Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019 "Data termutakhir"*

Hasil Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat kemajuan dalam dalam beberapa tahun dengan kenaikan 18,17 poin dari indeks 49,50 di tahun 2016 menjadi 67,67 di tahun 2019 dan rata-rata berada di atas capaian nasional. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan baik nasional maupun provinsi.

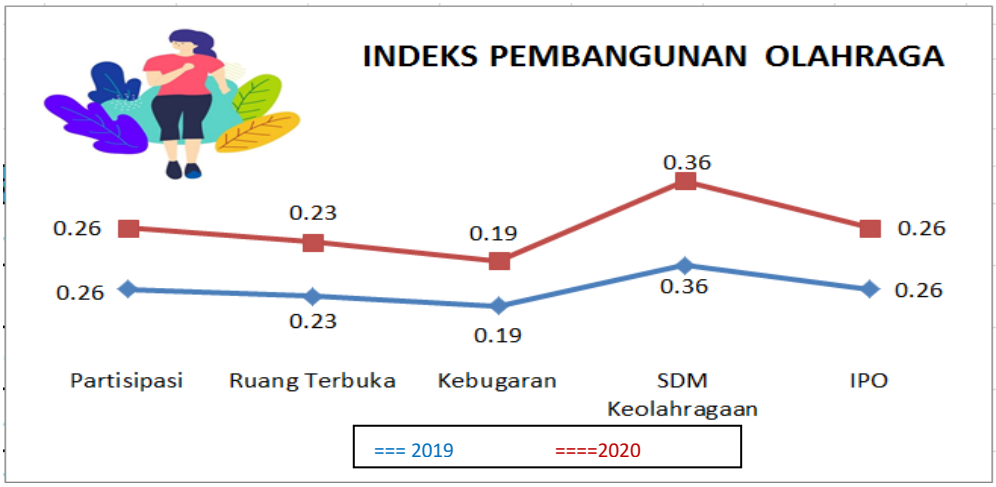
Penurunan nilai tersebut disebabkan oleh adanya pandemi covid-19 yang berdampak salah satunya pada domain kesempatan dan lapangan kerja. Penurunan Indeks Pembangunan Pemuda ini salah satunya ada pada bidang kesempatan dan lapangan kerja. Karena dari 29,12 juta penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19, sebesar 27 persennya adalah pemuda.

b. Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)

Olahraga memiliki peran yang semakin penting dan strategis dalam kehidupan era global yang penuh perubahan, persaingan, dan kompleksitas. Indeks Pembangunan Olahraga diukur meliputi dimensi Partisipasi, Ruang Terbuka, Kebugaran dan SDM Keolahragaan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**Grafik II.52**

Indeks Pembangunan Olahraga




*Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021"Data termutakhir"*

Hasil Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2020 menunjukkan bahwa (1) Indeks partisipasi 0,26, (2) Indeks ruang terbuka 0,23, (3) Indeks kebugaran 0,19 (4) Indeks SDM Keolahragaan 0,36 dan Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu 0,26. Kesimpulannya adalah Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih berada pada kategori kurang karena Indeks total IPO yang meliputi Partisipasi, Ruang Terbuka, Kebugaran dan SDM Keolahragaan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,26 berada direntang 0,24-0,49. Artinya bahwa pembangunan olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih perlu diperhatikan dan dibenahi oleh pemerintah dan semua lapisan masyarakat agar pembangunan olahraga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bisa lebih baik.

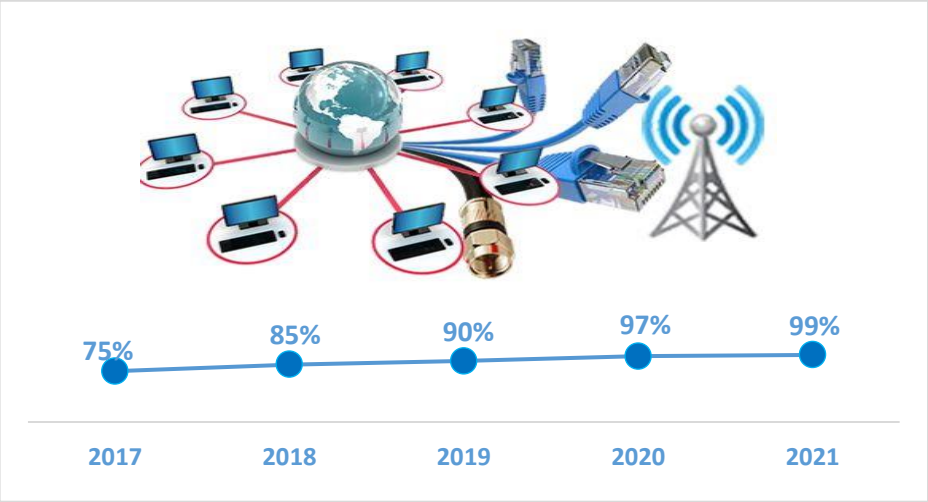
## 12. Urusan Komunikasi dan Informasi

a. Persentase Jumlah Layanan Infrastruktur Teknologi dan Kapasitas Layanan Publik Pemerintah Berbasis *e-Government*.

Data Center yang di miliki Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Layanan yang telah tersedia yaitu *Hosting* dan *Collocation Server* dan telah dimanfaatkan oleh PD yang

berada dalam Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Layanan ini untuk mengakomodir penyediaan akses internet server web dan aplikasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari beberapa PD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan total Bandwith sebesar 500 Mbps. Data center yang ada saat ini digunakan untuk media penyimpanan *server*, manajemen dan pengelolaan, hingga penyebaran data dan informasi. Penyediaan Jaringan internet sebagai *supporting* Akses Layanan Aplikasi di antaranya Aplikasi SiRUP, e-Monep, TEPRA, Portal Tim CSirt-Babelprov, Website seluruh perangkat daerah, email resmi Pemerintah Provinsi Kepualaun Bangka Belitung, dan layanan Interaksi tatap muka berbasis video interaktif, serta Layanan *Hotspot* kepada Publik yang diprioritaskan pada tempat-tempat wisata yang berada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**Grafik II.53**
Layanan Infrastruktur Teknologi dan Kapasitas Layanan
Publik Pemerintah Berbasis E-Government




*Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022*

Layanan Infrastruktur teknologi Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017 sebesar 75 persen. Sedangkan pada tahun 2018 sebesar 85 persen dan 2019 sebesar 90%. Layanan ini terus meningkat di tahun 2020 sebesar 97 persen dan 2021 sebesar 99 persen. Meningkatnya layanan Infrastruktur teknologi Pemerintah Daerah ini seiring dengan meningkatnya capaian domain layanan publik berbasis elektronik pada indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari 2,83 (2019) menjadi 3,00 artinya semakin baiknya layanan publik berbasis elektronik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## 13. Urusan Statistik

a. Persentase Data dan Informasi Statistik Yang Digunakan Untuk Perencanaan dan Pengambilan Kebijakan

Pada urusan statistik, terutama statistik sektoral yang dikelola oleh pemerintah daerah, ketersediaan data serta *up-dating* data dan informasi yang akurat menjadi hal yang penting untuk diperkuat, terutama kaitannya sebagai dasar perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, selain itu data tersebut dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah yang transparan dan terintegrasi secara nasional. Data dan informasi dimaksud

mencakup kondisi geografis daerah, demografi, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing.

**Grafik II.54**
Persentase Data dan Informasi Statistik Yang Digunakan
Untuk Perencanaan dan Pengambilan Kebijakan




*Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022*

Pemanfaatan data dan informasi statistik yang digunakan untuk perencanaan dan pengambilan kebijakan pada tahun 2017 hanya 35 persen. Namun sampai tahun 2021 pemanfaatan data sudah mencapai 100 persen. Data sektoral sudah menjadi pusat data dengan menyajikan data dasar dan informasi terbaru di berbagai bidang dan sektor pembangunan Provinsi Bangka Belitung sehingga proses perencanaan dan pengendalian pembangunan menjadi semakin baik. Data dan informasi ini meliputi data di sektor ekonomi, sumber daya manusia, sarana prasarana masyarakat dan peran serta masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan secara terus menerus mengingat data dasar pembangunan merupakan data bergerak yang dapat berubah sewaktu waktu. Perubahan ini disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya seperti perpindahan penduduk, investasi yang terjadi, kebijakan pemerintah dan sebagainya yang semuanya terintegrasi dalam Portal Satu Data Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel Satu Data).

**Grafik II.55**

Portal Satu Data Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel Satu Data)




Adapun portal satu data Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada "sdi.babelprov.go.id"

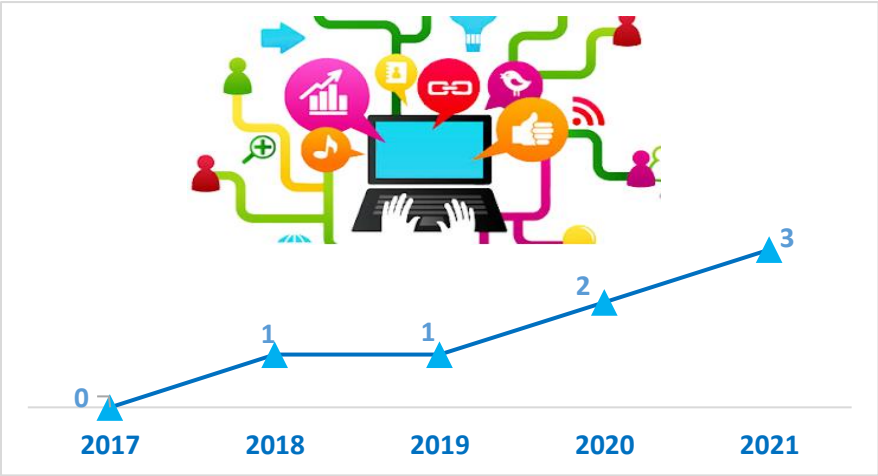
## 14. Urusan Persandian

a. Indeks Kematangan Keamanan Informasi

Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKKI) merupakan agregate nilai pelaksanaan kontrol pengamanan informasi terhadap fungsi tata kelola keamanan informasi, pengelolaan risiko keamanan informasi, kerangka kerja keamanan informasi, pengelolaan aset informasi, teknologi dan keamanan informasi. Secara umum Indeks Kematangan Keamanan Informasi memiliki 5 (lima) level I-V. Level V merupakan level kematangan paling tinggi sebagai level paling ideal.

**Grafik II.56**

Indeks Kematangan Keamanan Informasi




*Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022*

Pencapaian keamanan informasi dalam mendukung SPBE ini meningkat cukup baik dari 2017 sampai dengan 2021. Pada tahun 2017 meskipun capaian masih nol namun pada tahun 2018 dan 2019 indeks kematangan sebesar 1 dan pada tahun 2020 dengan nilai indeks 2. Sedangkan pada tahun 2021 berdasarkan penilaian *Cyber Security Maturity* (CSM) indeks kematangan 2,58 tingkat kematangan keamanan informasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mencapai Level kematangan tingkat 3 yang menunjukkan bahwa pengelolaan keamanan cyber sudah terorganisir dengan jelas bersifat formal dilakukan secara berulang dan konsisten namun penerapan perubahan belum dilakukan secara berkelanjutan.

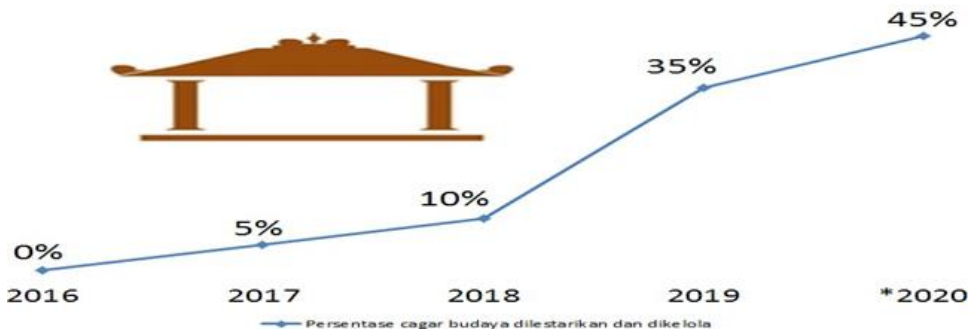
## 15. Urusan Kebudayaan

### a. Persentase Cagar Budaya Dilestarikan dan Dikelola

Aspek kebudayaan antara lain meliputi pelayanan berkaitan dengan kesenian dan kepurbakalaan, melindungi keberadaan bangunan cagar budaya, pelestarian seni budaya tradisional, dan memberdayakan kebudayaan tradisional melalui regulasi kegiatan secara berkala. Provinsi Bangka Belitung kaya dengan potensi cagar budaya yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Terdata pada tahun 2019 sebanyak 309 potensi objek cagar budaya, diantaranya telah ditetapkan sebagai cagar budaya sebanyak 33 objek dengan rincian dua objek merupakan cagar budaya peringkat Nasional, dan 31 objek merupakan cagar budaya peringkat Kabupaten.

**Grafik II.57**

Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan dan Dikelola




*Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020 "Data termutakhir"*

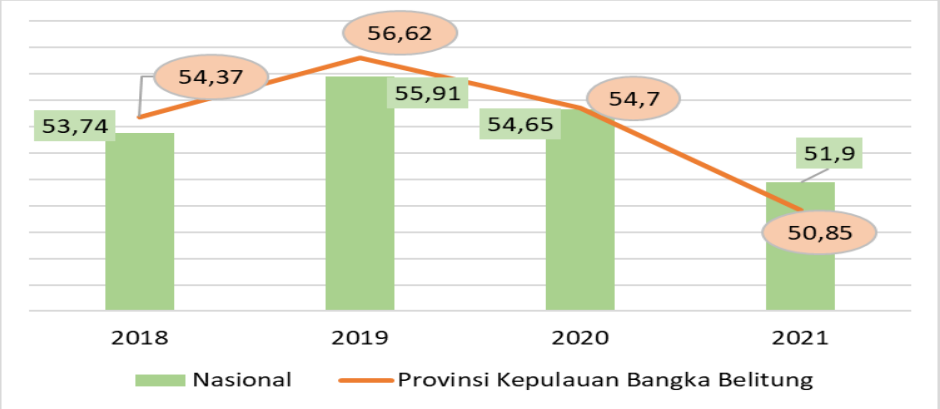
Berdasarkan data diatas cagar budaya Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2017 hanya sebesar 5 persen yang dikelola dan dilestarikan. Namun pada tahun 2018 meningkat sebesar 10 persen dan di tahun 2019 sebesar 35 persen. Keseriusan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mengelola cagar budaya dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Cagar Budaya sehingga diharapkan pada tahun 2020 terdapat peningkatan dalam pengelolaan cagar budaya menjadi sebesar 45 persen.

### b. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)

Kebudayaan memiliki peranan yang penting dalam keberhasilan pembangunan dari suatu negara. Nilai karakter yang positif dan kuat menjadi nilai budaya dan sikap mental yang sangat diperlukan dalam pembangunan berkelanjutan dikarenakan nilai budaya dan sikap

mental yang kuat dan positif mendorong produktivitas dan kemajuan sebuah bangsa. Dilatarbelakangi hal tersebut, Indonesia kemudian mengukur capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) yang disusun berdasarkan *framework Culture Development Indicators* atau CDIs yang dikembangkan oleh UNESCO.

**Grafik II.58**
Indeks Pembangunan Kebudayaan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2018-2021




*Sumber: Ditjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2022.*

Dari tahun 2018 sampai dengan 2021, IPK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersifat fluktuatif, dimana pada tahun 2018 mencapai 54,37, pada tahun 2019 kembali meningkat menjadi 56,62, dan kemudian kembali turun menjadi 54,70 di tahun 2020 dan terus turun menjadi 50,85 di tahun 2021. Perkembangan capaian IPK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama periode 2018-2020 selalu berada di atas capaian nasional. Namun, di tahun 2021, IPK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami penurunan dengan capaian di bawah nasional sebagaimana disajikan di dalam grafi di atas.

### c. Indeks Pembangunan Manusia Berdasarkan Dimensi

**Tabel II.49**
Indeks Pembangunan Kebudayaan tingkat Provinsi menurut Dimensi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2020

| NO. | DIMENSI | INDIKATOR | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Ekonomi Budaya | 25.53 | 32.86 | 23.49 | 18,06 |
| D2 | Pendidikan | 70.21 | 72.75 | 70.68 | 64,91 |
| D3 | Ketahanan Sosial Budaya | 72.02 | 72.95 | 73.37 | 69,48 |
| D4 | Warisan Budaya | 51.34 | 52.60 | 49.06 | 50,14 |
| D5 | Ekspresi Budaya | 24.83 | 26.13 | 25.07 | 14,68 |
| D6 | Budaya Literasi | 54.99 | 59.76 | 61.87 | 55,75 |
| D7 | Gender | 51.15 | 49.18 | 51.67 | 51,75 |
| **IPK Provinsi** | | **54.37** | **56.62** | **54.70** | **50,85** |

*Sumber: Ditjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2022.*

Berdasarkan tabel di atas, selama periode 2018-2021, dari tujuh dimensi yang diukur dalam IPK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dimensi Ketahanan Sosial Budaya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selalu mencapai angka tertinggi. Capaian ini terus meningkat dari sebesar 72,02 (2018) menjadi 72,95 (2019) dan 73,37 (2020). Namun, di tahun 2021, capaian ini mengalami penurunan menjadi 69,48 atau turun sebesar 3,89 dibandingkan dengan IPK tahun 2020. Selanjutnya, Dimensi Pendidikan berada pada posisi kedua tertinggi di tahun 2021 dengan capaian sebesar 64,91. Dimensi Budaya Literasi menempati urutan tertinggi ketiga pada tahun 2021 ini sebesar 55,75, mengalami penurunan dibanding dengan capaian 2020 yang sebesar 61,87. Sementara itu, Dimensi Ekonomi Budaya memiliki capaian terendah dibanding dengan dimensi – dimensi lainnya.

a **Dimensi Ekonomi Budaya**

**Tabel II.50**
Dimensi Ekonomi Budaya
Indeks Pembangunan Kebudayaan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018-2021

| NO. | DIMENSI | INDIKATOR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Ekonomi Budaya | Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun ke atas) | 0,26 | 0,33 | 0,23 | 0,18 |

*Sumber: Ditjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2022*

Pada tabel yang disajikan di atas, Dimensi Ekonomi Budaya diukur berdasarkan persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun ke atas). Dimensi Ekonomi Budaya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki indeks capaian yang bersifat fluktuatif, yakni sebesar 0,26 pada tahun 2018, lalu naik menjadi 0,33 pada tahun 2019. Namun, capaian ini turun menjadi 0,23 di tahun 2020 dan selanjutnya turun menjadi 0,18 di tahun 2021.

**2) Dimensi Pendidikan**

**Tabel II.51**
Dimensi Pendidikan Indeks Pembangunan Kebudayaan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018-2021

| NO. | DIMENSI | INDIKATOR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 | Pendidikan | Rata-rata Lama Sekolah (MYS) 25 tahun ke atas | 7,84 | 7,98 | 8,06 | 8,08 |
| D2 | Pendidikan | Harapan Lama Sekolah (HLS) | 11,87 | 11,94 | 12,05 | 12,17 |
| D2 | Pendidikan | Angka Kesiapan Sekolah (AKS) | 85,44 | 85,8 | 85,14 | 84,45 |

| NO. | DIMENSI | INDIKATOR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 | Pendidikan | Persentase Satuan Pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau seni budaya | 22,85 | 30,12 | 26,64 | 20,73 |
| D2 | Pendidikan | Persentase penduduk penyandang disabilitas usia 7-18 tahun yang bersekolah | 80,78 | 75,31 | 70,84 | 08,12 |
| D2 | Pendidikan | Partisipasi pendidikan penduduk usia 7-18 tahun dengan kategori 40% termisikin | 86,06 | 88,93 | 88,20 | 89,35 |

*Sumber: Ditjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2022.*

Pada Dimensi Pendidikan yang disajikan ditabel di bawah ini, dapat dilihat angka rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas terus mengalami peningkatan, yaitu dari 7,84 di tahun 2018 menjadi 7,98 di tahun 2019, kemudian naik menjadi 8,06 di tahun 2020 dan menjadi 8,08 di tahun 2021. Selanjutnya, pada indikator persentase penduduk penyandang disabilitas usia 7-18 tahun yang bersekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami penurunan yang signifikan, yakni dari 80,78, persen di tahun 2018 menjadi 75,31 persen di tahun 2019, kemudian menjadi 70,84 persen di tahun 2020, dan menjadi 48,12 di tahun 2021. Persentase partisipasi pendidikan penduduk usia 7-18 tahun dengan kategori 40% termiskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 bersifat fluktuatif, yakni sebesar 86,06 persen di tahun 2018, kemudian naik menjadi 88,93 persen di tahun 2019, dan turun kembali menjadi 88,20 persen di tahun 2020. Capaian terendah dari enam indikator Dimensi Pendidikan berada pada indikator persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau seni budaya, dimana di tahun 2021 adalah sebesar 20,73.

### 3) Dimensi Ketahanan Sosial Budaya

**Tabel II.52**

Dimensi Ketahanan Sosial Budaya Indeks Pembangunan Kebudayaan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018-2021

| NO. | DIMENSI | INDIKATOR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D3 | Ketahanan Sosial Budaya | Persentase masyarakat yang setuju jika ada sekelompok orang dari agama lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal. | 77,78 | 80,01 | 81,67 | 64,00 |
| D3 | Ketahanan Sosial Budaya | Persentase masyarakat yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal. | 84,22 | 87,23 | 88,60 | 74,86 |
| D3 | Ketahanan Sosial Budaya | Persentase masyarakat yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga Anda bersahabat dengan orang lain yang beda agama. | 89,63 | 91,20 | 92,41 | 86,55 |

| NO. | DIMENSI | INDIKATOR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D3 | Ketahanan Sosial Budaya | Persentase masyarakat yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga Anda bersahabat dengan orang lain yang berbeda suku. | 92,09 | 92,06 | 91,14 | 89,08 |
| D3 | Ketahanan Sosial Budaya | Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam tiga bulan terakhir | 79,42 | 80,54 | 81,04 | 66,44 |
| D3 | Ketahanan Sosial Budaya | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti gotong royong | 26,15 | 25,71 | 25,35 | 11,83 |
| D3 | Ketahanan Sosial Budaya | Persentase rumah tangga yang merasa khawatir dengan keamanan saat berjalan kaki sendirian di malam hari dalam setahun terakhir | 27,62 | 27,65 | 27,69 | 11,00 |
| D3 | Ketahanan Sosial Budaya | Persentase masyarakat yang merasa aman di lingkungan tempat tinggal | 82,10 | 82,16 | 82,14 | 85,04 |

*Sumber: Ditjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2022.*

Pada Dimensi Ketahanan Sosial Budaya, enam dari delapan indikator penyusun dimensi ini terus meningkat dari tahun 2018-2021. Di tahun 2021, tujuh dari indikator ini mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dari tujuh indikator ini, penurunan pada persentase masyarakat yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga Anda bersahabat dengan orang lain yang berbeda suku tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan indikator-indikator lainnya, yakni dari 91,14 di tahun 2020 menjadi 89,04 di tahun 2021. Sementara itu, persentase masyarakat yang merasa aman di lingkungan tempat tinggal mengalami kenaikan dari 82,14 di tahun 2020 menjadi 85,04 di tahun 2021.

### 4) Dimensi Warisan Budaya

**Tabel II.53**
Dimensi Warisan Budaya Indeks Pembangunan Kebudayaan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018-2021

| NO. | DIMENSI | INDIKATOR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D4 | Warisan Budaya | Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi | 5,13 | 5,10 | 5,02 | 6,46 |
| D4 | Warisan Budaya | Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi | 19,15 | 17,22 | 16,67 | 22,73 |
| D4 | Warisan Budaya | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari | 96,47 | 95,89 | 93,18 | 94,60 |
| D4 | Warisan Budaya | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni | 50,25 | 53,73 | 50,50 | 63,01 |
| D4 | Warisan Budaya | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah/wardun | 12,40 | 14,54 | 12,19 | 6,28 |

| NO. | DIMENSI | INDIKATOR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D4 | Warisan Budaya | Persentase masyarakat yang menggunakan produk tradisional | 47,37 | 47,32 | 42,76 | 60,75 |

*Sumber: Ditjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2022.*

Pada Dimensi Warisan Budaya di atas, lima dari enam indikator tersebut mengalami peningkatan di tahun 2021. Peningkatan yang signifikan terjadi pada persentase masyarakat yang menggunakan produk tradisional, dari 42,76 di tahun 2020 menjadi 60,75 di tahun 2021. Peningkatan yang signifikan selanjutnya terjadi pada persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni, yakni dari 50,50 persen di tahun 2020 naik menjadi 63,01 persen di tahun 2021. Sementara itu, capaian pada benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah ditetapkan terhadap total registrasi yang terus menurun dari 2018-2020 mengalami peningkatan menjadi 6,46 persen di tahun 2021 meskipun peningkatan ini tidak terlalu signifikan. Sementara itu, persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah/wardun menurun dari 12,19 di tahun 2020 menjadi 6,28 persen di tahun 2021.

### 5) Dimensi Ekspresi Budaya

**Tabel II.54**
Dimensi Ekspresi Budaya Indeks Pembangunan Kebudayaan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018-2021

| NO. | DIMENSI | INDIKATOR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D5 | Ekspresi Budaya | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang memberikan saran atau pendapat dalam kegiatan rapat selama satu tahun terakhir | 5,95 | 6,29 | 6,65 | 4,85 |
| D5 | Ekspresi Budaya | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif mengikuti kegiatan organisasi | 4,77 | 4,55 | 4,20 | 2,85 |
| D5 | Ekspresi Budaya | Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni | 1,19 | 1,22 | 0,93 | 0,76 |
| D5 | Ekspresi Budaya | Persentase rumah tangga yang menghadiri atau menyelenggarakan upacara adat | 17,38 | 19,50 | 19,71 | 7,86 |

*Sumber: Ditjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2022*.

Berdasarkan tabel di atas, capaian empat indikator pada Dimensi Ekspresi Budaya mengalami penurunan di tahun 2021 dibandingkan dengan capaian di tahun 2020. Penurunan yang signifikan terjadi pada rumah tangga yang menghadiri atau menyelenggarakan upacara adat, yakni dari 19,71 persen di tahun 2020 menjadi 7,86 persen di tahun 2021, dan pada penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif mengikuti kegiatan organisasi, dari 4,20 di tahun 2020 menjadi 2,85 di tahun 2021.

**Tabel II.55**
Dimensi Budaya Literasi dan Dimensi Gender Indeks Pembangunan Kebudayaan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018-2021

| NO. | DIMENSI | INDIKATOR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D6 | Budaya Literasi | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik dalam satu minggu terakhir | 46,58 | 46,14 | 46,03 | 49,64 |
| D6 | Budaya Literasi | Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir | 40,82 | 49,49 | 54,67 | 61,97 |
| D6 | Budaya Literasi | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan Masyarakat | 12,60 | 13,79 | 13,89 | 5,85 |
| **D7** | **GENDER** | Rasio Tingkat partisipasi angkatan kerja usia 15 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki | 59,89 | 56,51 | 57,65 | 56,00 |
| **D7** | **GENDER** | Rasio penduduk 25 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SM/Sederajat | 86,42 | 83,59 | 92,70 | 89,49 |
| **D7** | **GENDER** | Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki | 7,14 | 7,44 | 4,65 | 9,76 |

*Sumber: Ditjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2022.*

Sebagaimana dapat dilihat di tabel di atas, pada Dimensi Budaya Literasi, persentase penduduk usia 10 tahun ke atas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik dalam satu minggu terakhir yang terus turun di tahun 2018-2020 mengalami peningkatan menjadi 49,64 persen di tahun 2021. Selanjutnya, persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir juga naik, dari 54,67 di tahun 2020 menjadi 61,97 di tahun 2021. Sementara itu, persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat mengalami penurunan yang signifikan, yakni dari 13,89 persen di tahun 2020 menjadi 5,85 persen di tahun 2021.

Masih di tabel yang sama di atas, pada Dimensi Gender, rasio tingkat partisipasi angkatan kerja usia 15 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki dan rasio penduduk 25 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SM/sederajat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami penurunan di tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020. Namun, rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami kenaikan yang signifikan, yakni dari 4,65 di tahun 2020 menjadi 9,76 di tahun 2021.

## 16. Urusan Perpustakaan

a. Persentase Perpustakaan Yang Dibina

Perpustakaan merupakan sarana dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional. Sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan nasional, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa. Pentingnya keberadaan lembaga perpustakaan sebagai media belajar bagi masyarakat sehingga akan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia karena memiliki wawasan yang luas dan pemikiran yang maju untuk mendukung pembangunan daerah.

**Grafik II.59**
Persentase Perpustakaan Yang Dibina




*Sumber : Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022*

Berdasarkan pada tabel di atas menjelaskan bahwa dari tahun 2017-2019 cukup fluktuatif. Persentase perpustakaan yang dibina meningkat dari 2.69 persen (2017) menjadi 9,50 persen (2019) namun pada tahun 2020 menurun menjadi 4.30 persen kemudian meningkat kembali pada tahun 2021 menjadi 6,67 persen dari 1.548 perpustakaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tujuan dilakukan pembinaan perpustakaan adalah memperkuat peran perpustakaan provinsi dalam peningkatan kemampuan literasi dan pengembangan perpustakaan ditingkat kabupaten/kota dan desa. Dengan adanya pembinaan perpustakaan maka kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) perpustakaan, pengelolaan perpustakaan serta sarana dan prasarana perpustakaan yang memadai, dapat meningkat dengan baik sehingga perlu dukungan dari semua pihak.

b. Jumlah Koleksi Buku di Perpustakaan

Salah satu bentuk pelayanan perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasi pemustakanya tercermin dalam koleksi bahan pustaka lengkap yang sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan kebutuhan pemustaka. Jika kebutuhan informasi tinggi, maka tingkat ketersediaan koleksi pun harus tinggi dan selaras dengan kebutuhan informasi tersebut. Kelengkapan koleksi itulah yang menjadi daya tarik pemustaka untuk kemudian kembali berkunjung dan memanfaatkan informasi yang tersedia secara terus menerus.

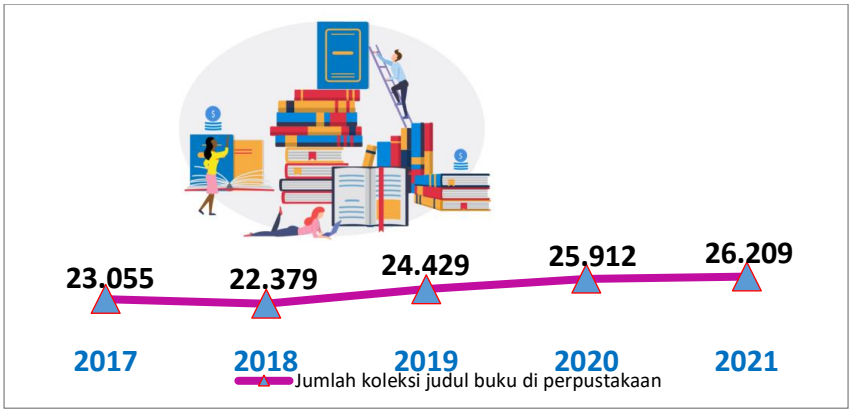
Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki layanan referensi sebagai layanan yang membantu pemustaka menemukan informasi yang diinginkan dengan cara memberikan bimbingan langsung kepada pemustaka akan koleksi yang dibutuhkan.

Jenis koleksi yang terdapat pada layanan referensi seperti, kamus, ensiklopedi, bibliografi, buku tahunan (almanac), indeks dan abstrak. Koleksi pada layanan referensi hanya dapat di baca di tempat yang tidak dapat dipinjam. Data dibagi berdasarkan klasifikasi subjek *Dewey Decimal Classification* (DDC). Klasifikasi subjek

DDC adalah suatu panduan atau standar dalam mengelompokkan koleksi terutama buku di perpustakaan.

**Grafik II.60**

Koleksi Buku Perpustakaan




*Sumber : Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022*

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah pada tahun 2017 berjumlah 23.055, dan pada tahun 2018 terjadi penyusutan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah sehingga berjumlah 22.379. Pada tahun 2019 koleksi buku kembali meningkat berjumlah 24.429, tahun 2020 juga meningkat dengan jumlah 25.912 dan tahun 2021 kembali meningkat berjumlah 26.209. Koleksi buku selalu meningkat namun minat baca masyarakat makin menurun. Hal itu dibuktikan dengan menurunnya jumlah kunjungan ke perpustakaan, apalagi di masa pandemi Covid-19. Pada tahun 2020-2021 jumlah pengunjung ke Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya berjumlah 10-15 orang saja, padahal koleksi buku cukup banyak dan dilengkapi dengan ruang baca dan internet untuk menunjang perpustakaan dan minat baca masyarakat.

## 17. Urusan Kearsipan

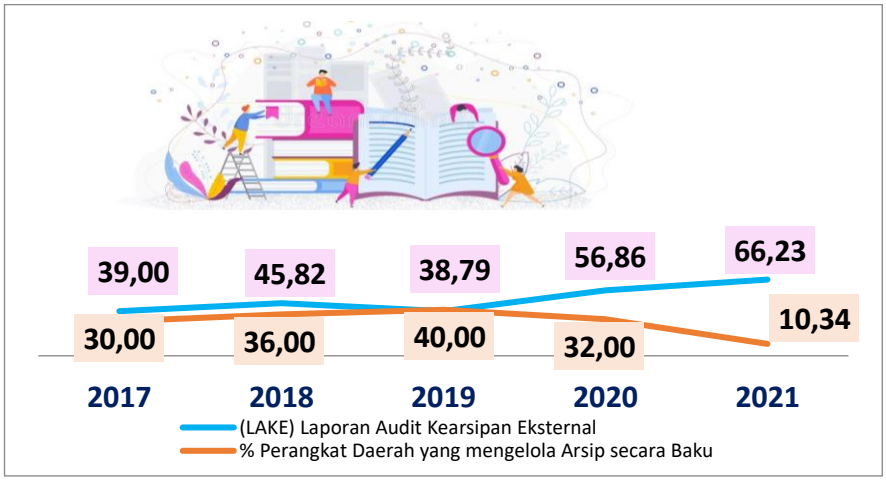
a Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Kearsipan Sesuai Dengan Standard Baku Kearsipan

Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE) adalah laporan yang disusun berdasarkan laporan hasil audit penyelenggaraan kearsipan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan daerah. Untuk meningkatkan nilai LAKE banyak aspek/sub aspek yang menjadi penilaian di antaranya:

1. Ketaatan Peraturan Perundang-Undangan (tata naskah dinas; klasiifikasi arsip; sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis; jadwal retensi arsip; pedoman pengolahan arsip inaktif; pedoman penyusutan arsip);
2. Pedoman pengelolaan arsip vital ( Program Kearsipan, Pengolahan Arsip Inaktif dengan Retensi sekurang-kurangnya 10 tahun, Penyusutan Arsip, Pengelolaan Arsip Statis, SDM Kearsipan, Kelembagaan, Prasarana dan Sarana Kearsipan).

Capaian Penyelenggaraan Kearsipan Sesuai Standar Baku dapat dilihat sebagaimana grafik di bawah ini,

**Grafik II.61**
Penyelenggaraan Kearsipan Sesuai Standar Baku




*Sumber : Badan Perpustakaan dan Arsip ProvinsiKepulauan Bangka Belitung, 2022*

Tabel di atas dapat menjelaskan nilai LAKE (Laporan Audit Kearsipan Eksternal) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017 dengan angka 39,00, Tahun 2018 nilai LAKE meningkat sebesar 45,82, pada tahun 2019 nilai LAKE turun menjadi 38,39 dan terus meningkat menjadi sebesar 56,86 (2020). Sampai dengan tahun 2021 nilai LAKE Bangka Belitung sebesar 66,23 (berpredikat "baik").

## 18. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a Persentase Koperasi Aktif

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar asas kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Koperasi Aktif adalah Koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun terakhir dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota.

**Grafik II.62**
Persentase Koperasi Aktif




*Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022*

Persentase koperasi aktif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 sebesar 72,86%, selanjutnya (2018-2020) terjadi penurunan persentase koperasi aktif, yaitu sebesar 69,42%, 62,35% dan 62,28% dengan total jumlah koperasi sebanyak 981 Koperasi, 1.049 koperasi dan 1.087 koperasi. Sedangkan pada satu tahun terakhir, yaitu di tahun 2021 terjadi peningkatan kembali persentase koperasi aktif sebesar 63,44% dengan total jumlah koperasi sebesar 1.116 koperasi, ini menunjukan bahwa terjadi peningkatan eksistensi serta produktifitas koperasi pada satu tahun terakhir.

b Jumlah UMKM Yang Diberdayakan

Di samping perannya bagi perekonomian daerah, UMKM juga terbukti merupakan pelaku usaha yang cukup mandiri, kukuh, fleksibel yang sudah cukup teruji terutama di saat krisis berlangsung, selain juga menjadi jantung ekonomi rakyat dan pelopor tumbuhnya ekonomi kerakyatan. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung jumlah UMKM meningkat setiap tahunnya, sebagaimana dibawah ini:

**Tabel II.56**

Jumlah UMKM Yang Diberdayakan




| | Usaha Mikro | Usaha Kecil | Usaha Menengah | Jumlah UMKM |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 114.648 | 35.387 | 835 | 150.870 |
| 2018 | 114.573 | 35.514 | 861 | 150.948 |
| 2019 | 124.601 | 35.724 | 861 | 161.186 |
| 2020 | 146.662 | 36.228 | 841 | 183.731 |
| 2021 | 177.198 | 2.900 | 86 | 180.184 |

*Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022*

Dari tabel di atas, jumlah UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017 terjadi penurunan sebesar 150.870 UMKM. Selanjutnya terjadi peningkatan kembali jumlah UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada kurun waktu 2018-2020, yakni masing-masing sebesar 150.948 (2018), 161.186 (2019) dan 183.731 (2020). Sedangkan pada tahun terakhir, yaitu tahun 2021 terjadi penurunan kembali jumlah UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebesar 180.184 UMKM, pada tahun tersebut juga terjadi penurunan jumlah usaha kecil dan menengah, beralih menjadi usaha mikro disebabkan karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021, yang menjelaskan bahwa kriteria modal usaha mikro harus memiliki modal usaha sampai dan paling banyak satu milyar rupiah dan kriteria penjualan usaha mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dan paling banyak dua milyar rupiah.

### 2.1.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

**1. Urusan Kelautan dan Perikanan**

a. Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan

Sebagai wilayah kepulauan dengan luas laut kurang lebih 65,301.00 km2 atau 79.90% dari total wilayah provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan garis pantai sepanjang 1.295.83 km, sektor perikanan merupakan salah satu basis ekonomi pembangunan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Keberhasilan capaian pembangunan sektor perikanan dapat dilihat melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) karena pertumbuhan PDRB menggambarkan besarnya pertumbuhan perekonomian daerah.

**Grafik II.63**
Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan dalam PDRB
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung




*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021"Data termutakhir"*

Laju pertumbuhan PDRB dari sub sektor perikanan dari tahun 2017 sampai 2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 terjadi kontraksi sebesar -3,24 persen namun pada tahun 2018 terjadi kenaikan pertumbuhan mencapai 8,10 persen, kemudian pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan sehingga laju pertumbuhan sebesar 5,75 persen. Selanjutnya pada tahun 2020 pertumbuhan mencapai 9,52 persen merupakan pertumbuhan tertinggi selama periode 2017-2021 yang kemudian pada tahun 2021, kembali menurun menjadi 5,04 persen.

c. Laju Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap

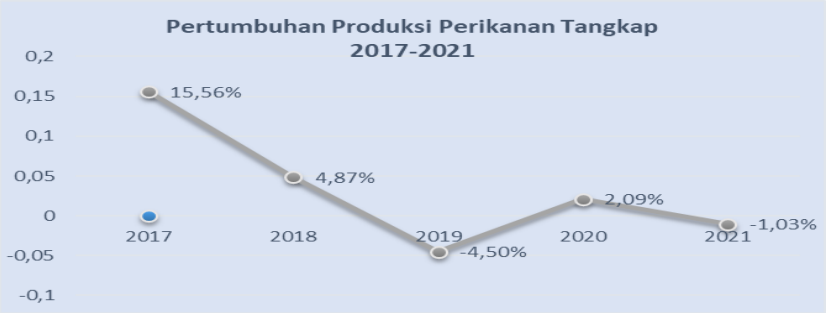
Perkembangan produksi perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2021 bersifat fluktuatif. Produksi perikanan tangkap Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami penurunan tahun 2020 sebesar 222.789 ton menjadi 223.680,33 ton pada tahun 2019 dan 228.980,33 ton pada tahun 2018 kemudian pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 225.292 ton.

Dalam sektor perikanan tangkap selama periode 2017-2021, laju pertumbuhan tertinggi pertama terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 15,56 persen. Pertumbuhan tertinggi kedua terjadi pada tahun 2018 sebesar 4,87 persen. Sementara itu, pertumbuhan terendah

terjadi di tahun 2019 dengan capaian sebesar minus 4,5 persen. Kemudian terjadi peningkatan pada tahun 2020 sebesar 2,09 persen dan kembali menurun menjadi 1,03 persen di tahun 2021

**Grafik II.64**

Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap




*Sumber data: satudata KKP 2017-2021 "Data termutakhir"*

d. Laju Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya

Produksi perikanan budidaya, pada tahun 2018 tercatat sebesar 9.340,93 ton turun menjadi 7.150,66 ton pada tahun 2019 dan naik pada tahun 2020 menjadi 8.164,26 dan pada tahun 2021 sebesar 9.512,118 ton. Ditahun 2020 perikanan budidaya mengalami perkembangan yang cukupp pesat terkait maraknya budidaya vaname di Pulau Bangka, tetapi belum semua data produksi diinput dalam aplikasi satudata.kkp.go.id..

Selama periode 2017-2021 Laju pertumbuhan produksi perikanan budidaya mengalami fluktuatif. Pertumbuhan tertinggi produksi perikanan budidaya terjadi di tahun 2018, dengan capaian 182,6 persen. Pada Tahun 2017 dan 2019 terjadi kontraksi laju pertumbuhan sebesar -28,44 persen dan - 23,45 persen. Kemudian pada tahun 2020 terjadi peningkatan pertumbuhan sebesar 14,17 persen dan di tahun 2021 meningkat menjadi 12,00 persen.

**Grafik II.65**

Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya




*Sumber data: Satudata KKP 2017-2021 "Data termutakhir"*

e. Laju Pertumbuhan Produksi Pengolahan Hasil Perikanan

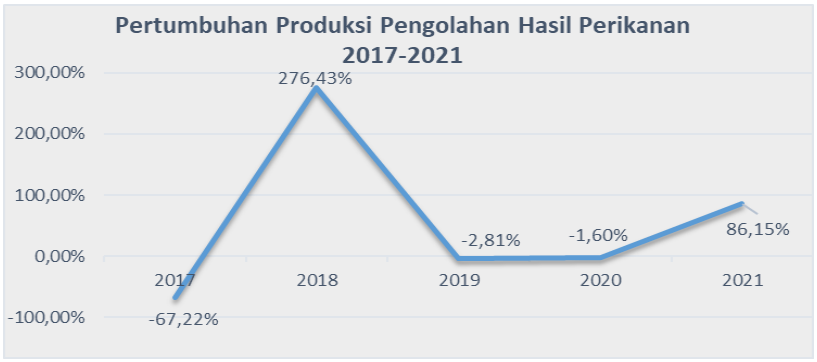
Produksi pengolahan hasil perikanan merupakan kegiatan yang mentransformasikan bahan-bahan hasil perikanan sebagai input menjadi produk yang memiliki nilai tambah atau nilai ekonomi lebih tinggi sebagai output. Sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran tersebar di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota baik yang berupa Unit Pengolah Ikan (UPI),

*coldstorage*, pabrik es dan rumah kemasan yang secara umum dikelola langsung oleh masyarak atataupun koperasi.

Selama periode 2016-2021 pertumbuhan produksi usaha pengolahan hasil perikanan cukup mengalami fluktuatif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 mencapai 276,4 3 persen. Pada tahun 2017 terjadi penurunan sebesar minus 67,22 persen dan tahun 2016 sebesar 0 persen. Kemudian pada tahun 2019 menurun mencapai minus 0,07 persen, pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi 26,77 persen dan di tahun 2021 kembali turun menjadi 11, 88 persen.

**Grafik II.66**

Pertumbuhan Produksi Perikanan




*Sumber data: Satudata KKP 2017-2021"Data termutakhir"*

d. Pertumbuhan Jasa Kelautan dan Perikanan

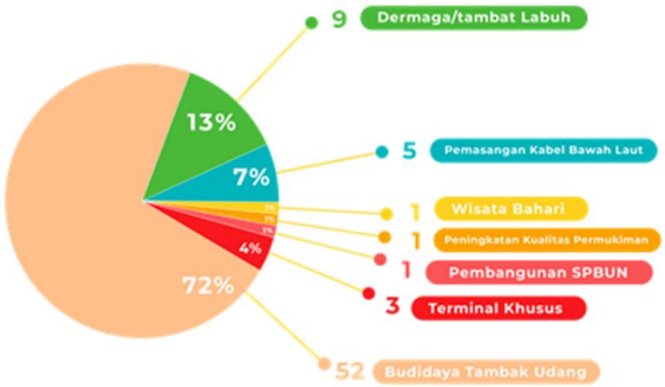
Setelah penerbitan RZWP3K, Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2020 disusul dengan terbitnya Peraturan Gubernur No. 37 Tahun 2020 serta berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020, sampai bulan Juni 2022 telah terbit sebanyak 72 Persetujuan Pemanfaatan Ruang Laut dengan rincian sebagai berikut:

- 24 Izin Lokasi Perairan
- 4 Penetapan Lokasi
- 6 Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut
- 38 Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

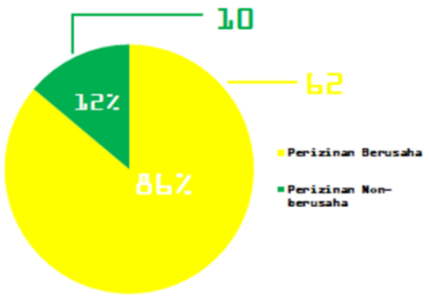
Jenis kegiatan yang telah diterbitkan persetujuannya sampai dengan Desember 2022

**Grafik II.67**

Jenis kegiatan yang telah diterbitkan persetujuannya



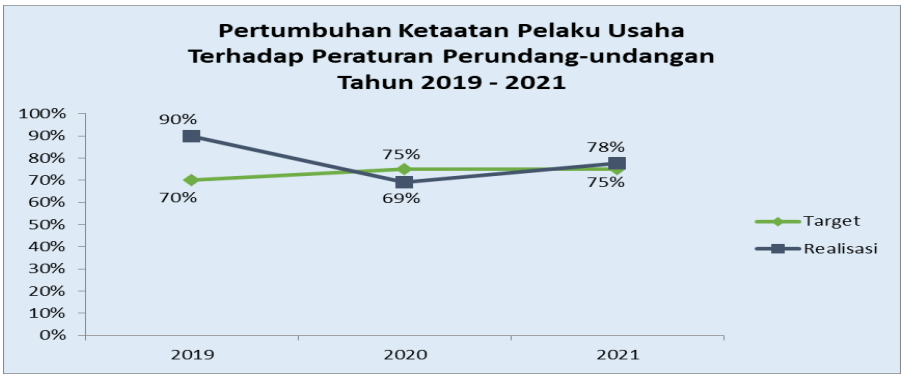
**Grafik II.68**
Jenis kegiatan berdasarkan perizinannya




e. Pertumbuhan Ketaatan Pelaku usaha terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan merupakan program yang memiliki output berupa persentase pelaku usaha yang taat terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan grafik pertumbuhan ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan pada periode 2019 – 2021 dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 terjadi penurunan ketaatan pelaku usaha sebanyak 21% (tidak mencapai target) dari tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2020 merupakan tahun awal dimana usaha tambak udang mulai meningkat eksistensinya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebagian besar dari pelaku usaha tambak udang belum memiliki dokumen perizinan sesuai yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga, pada tahun 2020 dilakukan pembinaan bertahap kepada pelaku usaha budidaya tambak udang yang ada pada 7 (tujuh) Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain pelaku usaha budidaya perikanan, juga dilakukan pengawasan terhadap pelaku usaha perikanan tangkap (nelayan), pelaku usaha pengolahan hasil perikanan dan distribusi hasil perikanan serta pelaku usaha pemanfaatan ruang laut. Akan tetapi, nilai laju pertumbuhan ketatan terhadap beberapa pelaku usaha tersebut tidak begitu fluktuatif.

**Gambar II.69**
Pertumbuhan Ketaatan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Perundang-undangan




*Sumber data: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2019 – 2021"Data termutakhir"*

## 2. Urusan Pariwisata

### a. Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan

Pengaruh jumlah kunjungan wisatawan sangat berarti untuk pengembangan industri pariwisata dan pendapatan asli daerah. Dukungan alokasi anggaran dari pemerintah menjadikan sektor pariwisata mengembangkan tempat wisata, agar banyak dikunjungi oleh wisatawan. Banyaknya wisatawan yang berkunjung menjadikan sektor pariwisata berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah. Akibatnya jumlah kunjungan wisatawan memberikan kontribusi positif dalam pendapatan asli daerah.

**Grafik II.70**

Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan




*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023*

Laju pertumbuhan kunjungan wisatawan dari tahun 2018-2020 cukup berfluktuatif. Pada tahun 2022 laju pertumbuhan sebesar 45,93 persen meningkat sebesar 6,15 point dari laju pertumbuhan kunjungan wisatawan di tahun sebelumnya. Jumlah kunjungan wisatawan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih didominasi wisatawan domestik daripada wisatawan asing. Berdasarkan wilayah yang ada, Pulau Belitung masih menjadi destinasi kunjungan wisatawan paling favorit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini didukung dengan infrastruktur akomodasi penginapan yang melimpah di daerah tersebut.

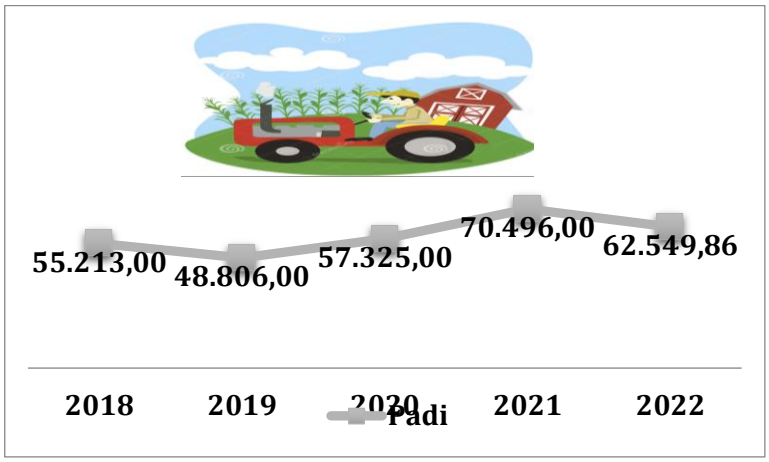
## 3. Urusan Pertanian

### a. Rasio Sarana dan Prasarana Pertanian

Sarana dan prasarana pertanian berdampak pada peningkatan produksi pertanian. Dukungan prasarana dan sarana pertanian bertujuan untuk meningkatkan indeks pertanaman (IP), meningkatkan produktivitas dan produksi melalui upaya memperluas lahan pertanian pada kawasan tanaman pangan untuk mengimbangi alih fungsi lahan.

**Grafik II.71**

Rasio Sarana dan Prasarana Pertanian




*Sumber : SDI.babelprov, 2022*

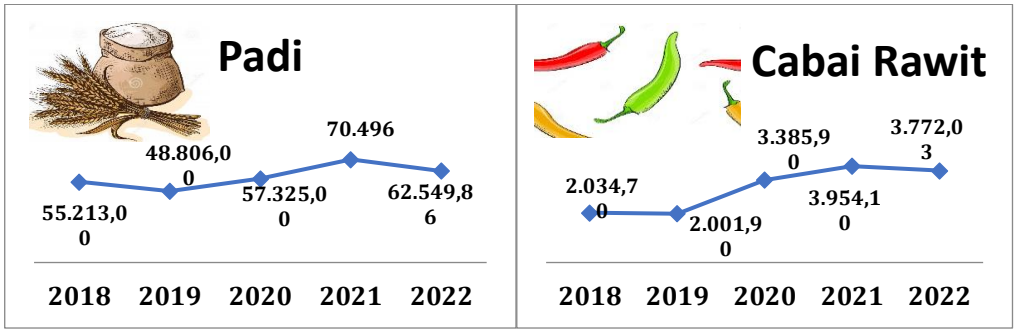
Berdasarkan tabel di atas, rasio ketersediaan sarana dan prasarana dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 rasio ketersediaan sarana dan prasarana sebesar 12 persen dan terus meningkat menjadi 15 persen di tahun 2022. Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana pertanian dipengaruhi oleh besarnya bantuan yang diberikan oleh pemerintah seperti bantuan Saprodi berupa benih unggul dan pupuk kepada setiap Kelompok Tani (Poktan) dan Gapoktan CPCL serta penambahan luas panen. Angka Tetap Produksi padi Tahun 2018 mencapai 45.736 Ton, Tahun 2019 sebesar 48.812 Ton dan tahun 2021 produksi padi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 70.496.

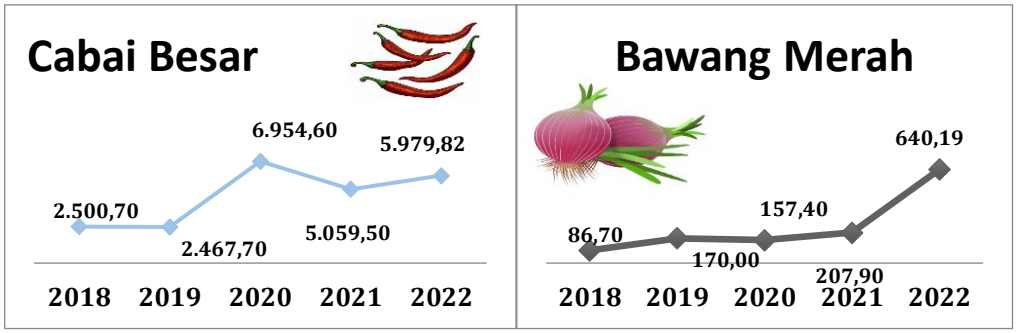
b. Produksi Komoditi Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura

Tanaman pangan merupakan jumlah produksi padi, sedangkan hortikultura merupakan produksi bawang merah, cabai besar dan cabai rawit. Ketersediaan benih sumber padi, benih pertanian mampu memproduksi sebesar 2 ton pada tahun 2018, 4 ton pada tahun 2019 dan 6 ton pada tahun 2020. Pada tahun 2018 jumlah benih tanaman perkebunan yang bersertifikat dan berlabel sebanyak 1.050.000 polibag, tahun 2019 sebanyak 1.310.000 polibag dan tahun 2020 sebanyak 1.570.000 polibag. Jumlah benih tanaman pangan yang bersertifikat dan berlabel pada tahun 2018 sebesar 125 ton, tahun 2019 sebanyak 150 ton dan tahun 2020 sebanyak 175 ton.

**Grafik II.72**

Produksi Komoditi Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura






*Sumber : Bangka Belitung Dalam Angka 2023: BPS*

Sedangkan Nilai Tukar Petani (NTP) subsektor Tanaman Pangan mencapai 93.09 (2019) dan meningkat sebesar 100.21 (2021) dan kembali turun menjadi 91,12 pada tahun 2022. sedangkan NTP subsektor Hortikultura menurun dari 102,88 (2019) menjadi 99,45 (2021) dan Kembali meningkat padatahun 2022 menjadi 115,41.

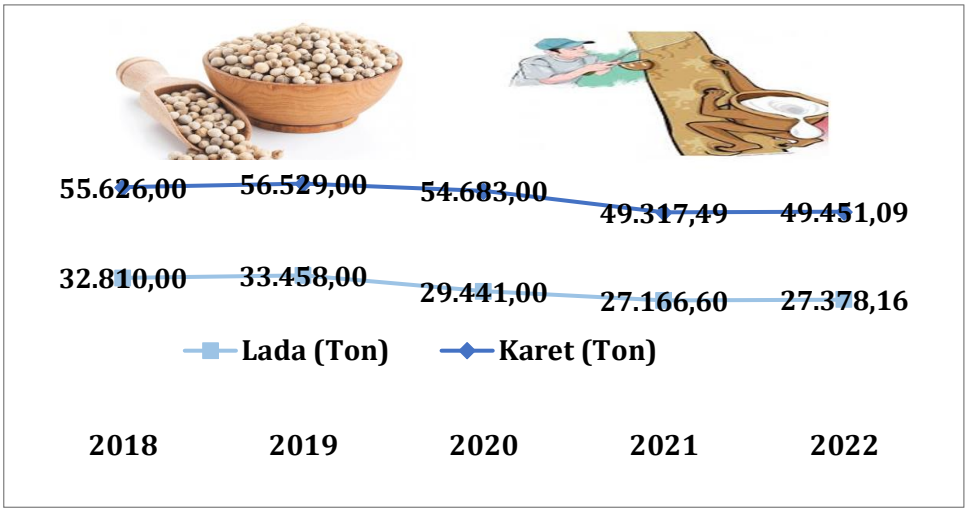
Pada tanaman pangan berdasarkan angka tetap, produksi padi Bangka Belitung tahun 2019 mencapai 48,806 ton, tahun 2020 sebesar 57.325 dan pada tahun 2021 sebesar 70.496 ton. Adapun untuk produksi tahun 2022 berdasarkan angka sementara sebesar 62.549,86 ton. Sedangkan pada tanaman hortikultura produksi cabai besar dan cabai rawit berfluktuatif, namun dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan trend peningkatan produksi. Penurunan produksi terjadi karena adanya bencana banjir dan serangan hama penyakit.

Adapun Angka produksi cabai besar pada tahun 2020 sebesar 6.954,60 ton kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi sebesar 5.059,50 ton dan menurut angka sementara pada tahun 2022 mengalami peningkatan kembali menjadi sebesar 5.979,82 ton. Begitupun dengan produksi cabai rawit sebesar 3.385,90 ton (2020) meningkat menjadi sebesar 3.954,10 ton (2021) serta 3.772,03 ton (2022 angka sementara) . Angka produksi pada bawang merah tahun 2020 sebesar 157,40 ton dan tahun 2021 produksi bawang merah sebesar 207,90 ton sementara tahun 2022 sebesar 640,19 ton. Bawang merah merupakan kegiatan bantuan pemerintah berupa benih dan pupuk, masyarakat sama sekali tidak mengeluarkan biaya, sehingga tinggi atau rendahnya produksi sangat tergantung dengan banyaknya bantuan dari pemerintah.

c. Produksi Lada dan Karet

Pada sektor perkebunan, ketersediaan bibit lada pada tahun 2018 di balai benih pertanian sebesar 25.000 polibag, tahun 2019 sebesar 50.000 polibag dan tahun 2020 sebesar 75.000 polibag. ketersediaan bibit karet di balai benih pertanian pada tahun 2018 sebesar 40.000 polibag, tahun 2019 sebesar 40.000 polibag dan tahun 2020 sebesar 40.000 polibag. Adapun Nilai Tukar Petani (NTP) subsektor Perkebunan cendrung mengalami peningkatan dimana pada tahun 2019 sebesar 69,58 dan pada tahun 2021 menjadi sebesar 104.24 serta tahun 2022 kembali meningkat menjadi 130,31

**Grafik II.73**
Produksi Lada dan Karet




*Sumber : Bangka Belitung Dalam Angka 2023: BPS*

Produksi lada dan karet Bangka Belitung cukup fluktuatif dimana pada tahun 2018 produksi lada sebesar 32.810 ton dan mengalami kenaikan menjadi sebesar 33.458 ton pada tahun 2019. Namun di tahun 2020 dan tahun 2021 terus mengalami penurunan dari 29.441 ton menjadi sebesar 27.166,60 ton. Sementara tahun 2022 menurut data sementara akan terjadi kenaikan menjadi 27.378,16 ton. Tidak tercapainya target pada komoditas lada disebabkan karena banyak tanaman baru ditanam atau masa panen pertama sehingga produktivitas belum maksimal walaupun pada dasarnya produksi naik namun produktivitas memang sedikit turun. Harga lada yang cenderung turun mengakibatkan ketertarikan masyarakat untuk berkebun lada juga menurun jauh.

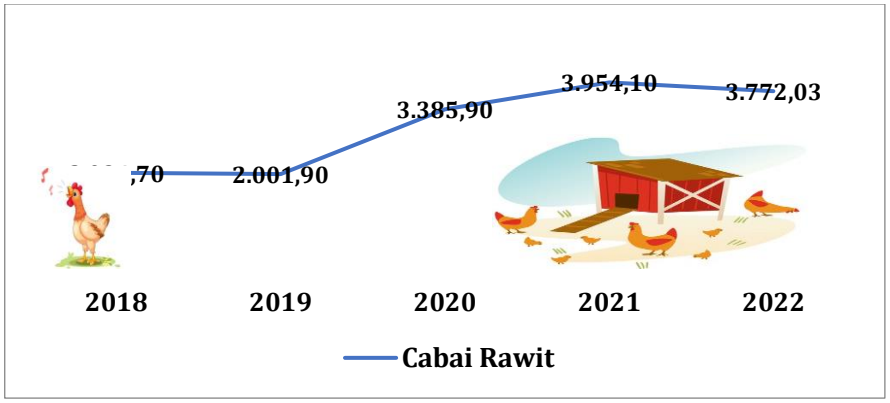
Begitupun dengan produksi karet tahun 2018 total produksi mencapai 55.626 ton, mengalami peningkatan menjadi 56.529 ton pada tahun 2019 . Sementara tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 54.683 ton dan kembali turun menjadi 49.317,49 ton pada tahun 2021. Tidak tercapainya target pada komoditas karet disamping adanya serangan penyakit "gugur daun" yang mempengaruhi produksi juga disebabkan harga jual yang diterima petani tidak kunjung membaik.

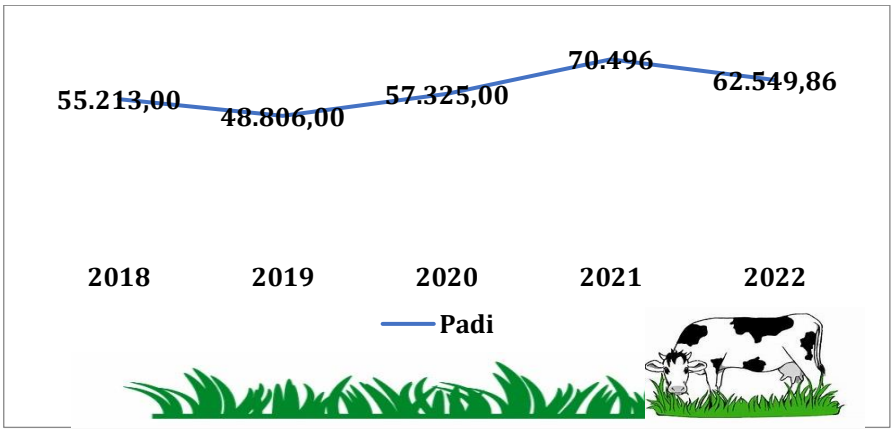
d. Produksi Sapi dan Ayam

Pada tahun 2018 ketersediaan bibit ayam sebanyak 5.000 ekor, tahun 2019 sebanyak 6.000 ekor dan tahun 2020 sebanyak 8.000 ekor. untuk ketersediaan anakan sapi tahun 2018 tersedia anakan sapi sebanyak 15 ekor, tahun 2019 sebanyak 20 ekor dan tahun 2020 sebanyak 25 ekor.

Berdasarkan data diatas angka populasi sapi meningkat periode 2018-2022, dimana pada tahun 2018 berjumlah 13.760 ekor dan tahun 2022 mencapai 20.086 ekor sapi (angka sementara). Meningkatnya capaian populasi ternak sapi dikarenakan ada peningkatan kelahiran dan banyak pemasukan sapi dari luar provinsi, sehingga populasi terus meningkat. Ditambah dengan kegiatan Sapi Indukan Wajib Bunting (Siwab), petani yang berhasil membuat sapinya bunting dan melahirkan dibayar, serta jika mengalami kematian dibayar ganti rugi oleh dinas.

**Grafik II.74**
Produksi Sapi dan Ayam




*Sumber: Bangka Belitung Dalam Angka 2023: BPS*

Sementara itu jumlah populasi ayam meningkat dari tahun ke tahun. Angka tetap populasi ayam tahun 2018 mencapai 10.849.566 ekor, tahun 2019 sebesar 12.832.090 ekor dan tahun 2020 populasi ayam sebesar 12.627.310 ekor. Sedangkan pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan menjadi 17.096.819 ekor. Sedangkan pada tahun 2022 diperkiraan populasi ayam akan menurun menjadi 15.689.860 ekor. Populasi ayam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat dipengaruhi dari data pemasukan ayam ke provinsi. Oleh karena itu, faktor harga ayam menjadi faktor penentu banyak tidaknya permintaan konsumen untuk kebutuhan ayam setiap tahunnya yang pada akhirnya berpengaruh terhadap populasi ayam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**.**

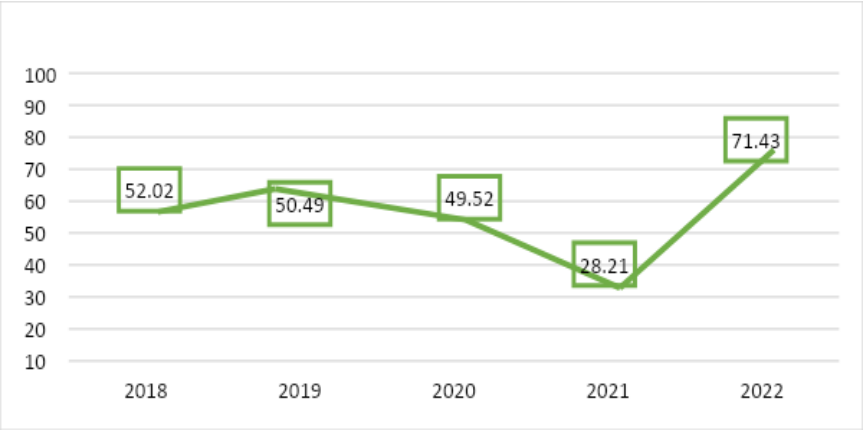
## 4. Urusan Kehutanan

a. Persentase Luas Kawasan Perhutanan Sosial

Perhutanan Sosial adalah *sistem pengelolaan Hutan lestari* yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai *pelaku utama* untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Perhutanan Sosial dengan memberikan legalitas dan akses masyarakat sekitar hutan guna pemanfaatan kawasan hutan.

Pemanfaatan hutan dilaksanakan melalui skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan sistem kemitraan yang pelaksanaanya diatur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Pengaturan terhadap perizinan yang telah terbit sebelumnya tetap berlaku sampai dengan hak pengelolaan atau izin berakhir dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

**Grafik II.75**
Persentase Luas Kawasan Perhutanan Sosial




*Sumber : DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023*

Luas kawasan perhutanan sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 143.503.32 Ha. Pada tahun 2018-2019 persentase luas kawasan perhutanan sosial menurun dari 52,02 % menjadi 50,49%. Realisasi Perhutanan Sosial (PS) yang aksesnya diberikan kepada masyarakat sudah mencapai luas 38.051 Ha dengan jumlah 102 KK dengan total unit 348 Surat Keputusan (SK) Izin/Hak yang telah diserahkan ke masyarakat.

Tahun 2020 terdapat 11 usulan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial dengan luas mencapai 2.638,23 hektar. Sebanyak 2 usulan mendapatkan akses legal (atau 18,18% dari total usulan) dengan luas 836,00 Hektar. sedangkan 9 usulan (81,82% dari total usulan) dengan luas 1.787,23 hektar masih dalam proses verifikasi.

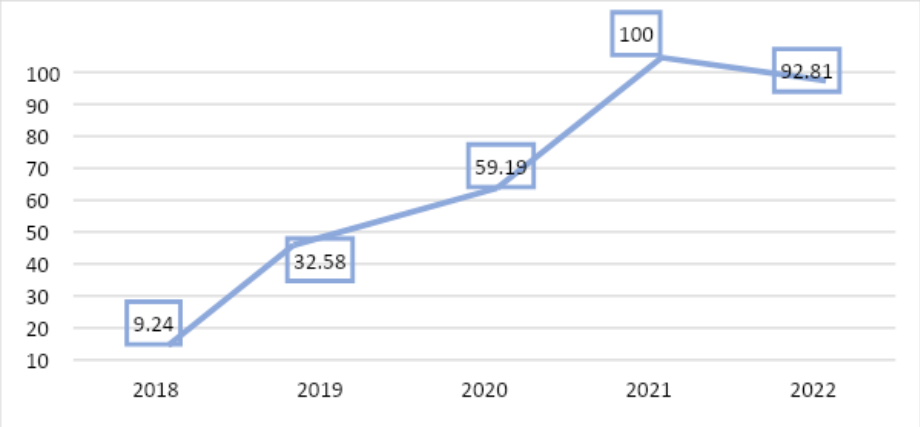
Tahun 2021 terdapat 39 usulan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial dengan luas mencapai 6.803,05 hektar. Sebanyak 11 usulan mendapatkan akses legal (atau 28,21% dari total usulan) dengan luas 3.594 Hektar. sedangkan 28 usulan (71,79% dari total usulan) dengan luas 3.209,09 hektar masih dalam proses verifikasi serta penyelesaiannya menyesuaikan dengan ketentuan perundangan terbaru.

Pada tahun 2022 akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial sebanyak 15 izin dari 21 usulan, atau tercapai 71,43%. Jumlah kelompok perhutanan soaial hingga tahun 2022 mencapai 193 kelompok, dengan luas mencapai 48.267,18 hektar, tersebar di 8 lokasi UPTD KPH se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

b. Persentase Daerah Aliran Sungai Yang Dikelola

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, dengan batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Dalam Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pengelolaan DAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdapat 433 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdiri dari 357 DAS bernama dan 76 DAS belum bernama. Kelembagaan Forum Koordinasi Pengelolaan DAS (Forum DAS) Kabupaten/Kota baru terbentuk 3 Forum DAS dari 7 kabupaten dan kota.

**Grafik II.76**
Persentase Daerah Aliran Sungai Yang Dikelola




*Sumber : DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023*

Capaian pengelolaan daerah aliran sungai pada tahun 2018 sebesar 9,24 persen atau seluas 202,70 Ha. Sedangkan tahun 2019 pengelolaan daerah aliran sungai meningkat menjadi sebesar 32,58 persen atau mencapai 715,11 Ha. Data pada tahun 2020 capaian sebesar 59,19 persen atau dengan luas 1.299,11 Ha. Pada tahun 2021 capaian pengelolaan DAS sebesar 100% dari target pengelolaan DAS seluas 27.000 hektar atau (atau 1,64% dari total luas DAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seluas 1.642.412 hektar).. Pada tahun 2022 capaian pengelolaan DAS sebesar 92,81% dari target pengelolaan DAS seluas 26.935 hektar (atau 1,64% dari total luas DAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seluas 1.642.412 hektar).

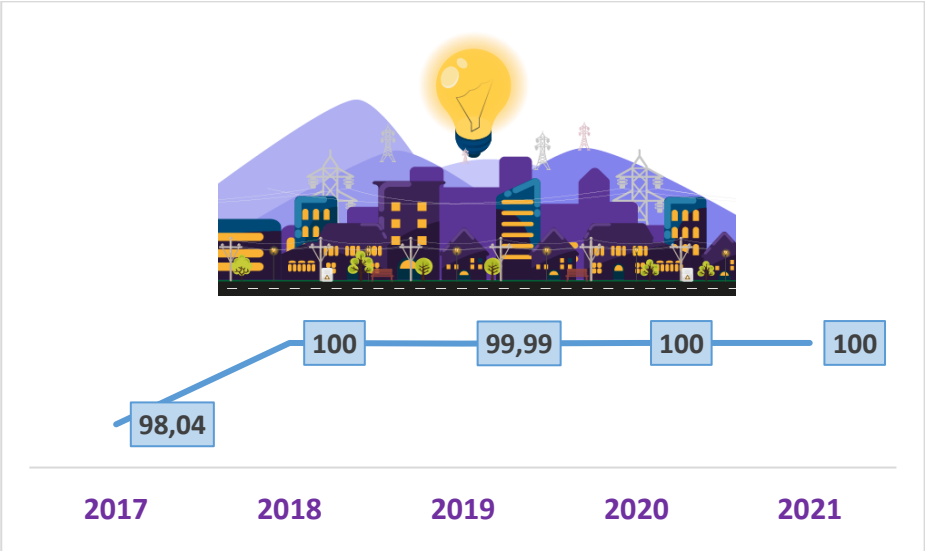
## 5. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

a. Rasio Elektrifikasi

Ketersediaan energi listrik menjadi pendongkrak perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat, karena dengan adanya fasilitas listrik untuk penerangan, pemanfaatan waktu belajar anak di rumah bisa lebih lama dan aktivitas ekonomi di rumah tangga yang mengusahakan aktivitas ekonomi di rumah dapat lebih berlangsung sampai malam hari. Pengukuran ketersediaan pasokan listrik salah satunya dapat diketahui melalui nilai Rasio Elektrifikasi (RE). Rasio Elektrifikasi merupakan perbandingan antara jumlah

rumah tangga yang sudah terlistrik dengan total rumah tangga, baik itu yang berlistrik dari sumber PLN ataupun yang berlistrik dari non PLN dengan jumlah rumah tangga total. Listrik PLN ini adalah rumah tangga yang menggunakan sumber listrik dari PLN sebagai penerangan untuk masyarakat. Listrik non PLN adalah sumber listrik yang berasal dari instansi atau pihak lain yang dikelola oleh badan usaha, koperasi, CSR, Pemda, ataupun swadaya masyarakat sebagai sumber penerangan.

**Grafik II.77**
Rasio Elektrifikasi (%)




*Sumber: Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022*

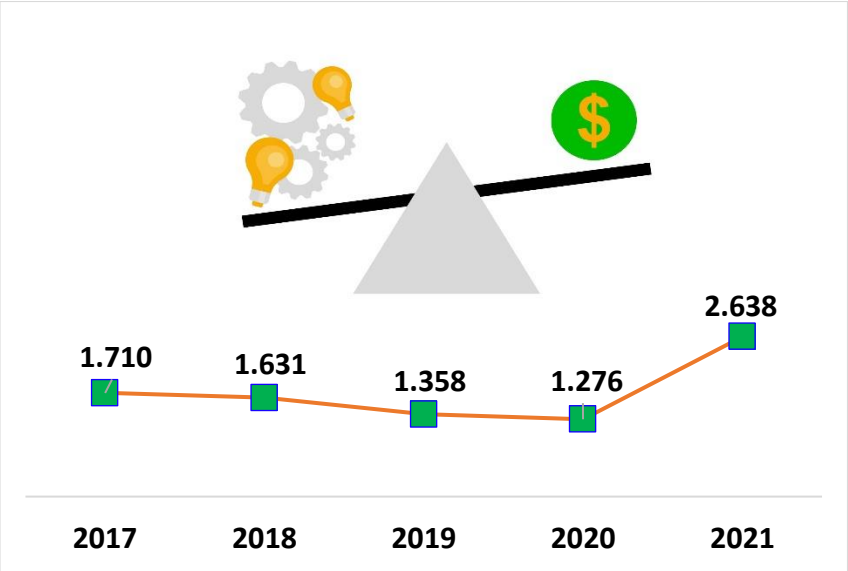
Dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2021, rasio elektrifikasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus meningkat. Walaupun pada tahun 2019 sempat menurun sebesar 0,01%. Menurunnya rasio elektrifikasi ini dikarenakan adanya pelanggan yang baru mendaftar. Tahun 2020 dan 2021 rasio elektrifikasi sudah mencapai 100%. Tingginya rasio elektrifikasi artinya seluruh masyarakat di berbagai daerah bisa menikmati pasokan listrik untuk kehidupan sehari-hari dan kebutuhan usaha.

## 6. Urusan Perdagangan

a. Neraca Perdagangan Luar Negeri

Perdagangan merupakan salah satu sektor yang diharapkan oleh Kepulauan Bangka Belitung dalam menjaga stabilitas perekonomian secara makro. Neraca perdagangan luar negeri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu enam tahun terakhir (2017-2021) bergerak flutuatif dan cenderung mengalami peningkatan, semula pada tahun 2017 sebesar 1.710 Juta US$ menjadi 2.638 Juta US$. Dalam kurun waktu tersebut, ekspor lebih besar daripada pada impor di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, nilai ekspor pada tahun 2017 sebesar 1.291 Juta US$ bergerak flutuatif dan cenderung mengalami peningkatan sampai dengan 2.672 Juta US$ di tahun 2021, sedangkan nilai impor semula sebesar 132 Juta US$ (2017) bergerak fluktuatif dan cendrung mengalami penurunan sampai dengan 34 Juta US$ di tahun 2021.

**Grafik II.78**
Neraca Perdagangan Luar Negeri Tahun 2017 s.d. 2021
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (juta U$)




*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022*

Komoditas ekspor Kepulauan Bangka Belitung dikirim melalui pelabuhan laut dan bandar udara. Untuk daerah Bangka di ekspor melalui pelabuhan laut Muntok, dan Pangkalbalam, serta Bandara Depati Amir. Sementara untuk wilayah Pulau Belitung di ekspor melalui pelabuhan laut Tanjung Pandan dan Manggar. Jika dilihat dari sisi ekspor dalam kurun waktu 2017-2021, kontribusi terbesar masih di dominasi oleh ekspor timah dengan rata-rata kontribusi sebesar 80,95 persen, sedangkan ekspor non timah sebesar 19,05 persen. Selanjutnya jika dilihat dari sisi impor, dalam kurun waktu 2017-2021, kontribusi terbesar berada pada impor non migas dengan rata- rata kontribusi sebesar 57,57 persen dan impor migas berkontribusi sebesar 42,43 persen.

## 7. Urusan Perindustrian

a. Persentase Laju Pertumbuhan Industri

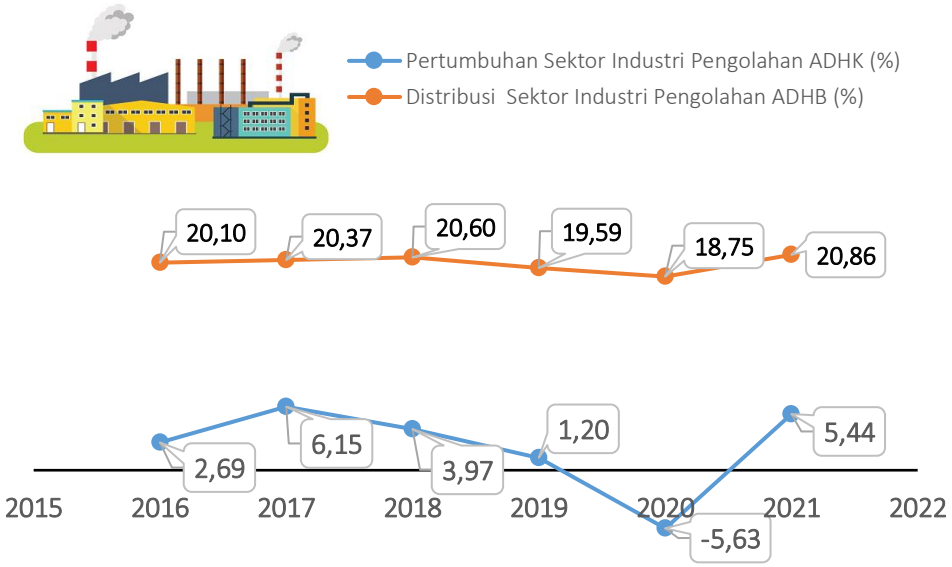
Rencana pembangunan industri nasional ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 yang dilaksanakan melalui Kebijakan Industri Nasional dengan penetapan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015-2019, yang keduanya menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembangunan industri provinsi dan rencana pembangunan industri kabupaten/kota. Rencana pembangunan industri provinsi atau rencana pembangunan industri kabupaten/kota berdasarkan delegasi Undang-Undang tersebut diatur dengan Peraturan Daerah (Perda) masing-masing. Jadi untuk menjadi sebuah acuan daerah masing-masing baik provinsi maupun kabupaten/kota harus menetapkan peraturan daerah pada wilayahnya.

Sektor perdagangan besar dan eceran merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi terbesar pada perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selain sektor pertanian, kelautan dan perikanan serta sektor pertambangan dan penggalian. Jika dilihat

dari data empiric selama periode enam tahun terakhir (2016-2021) terkait pertumbuhan dan distribusi sektoral menunjukan pergerakan yang fluktuatif dan cendrung menunjukan tren yang mengalami peningkatan. Pertumbuhan dan distribusi sektor industri pengolahan semula pada tahun 2016 sebesar 2,69 persen dan 20,10 persen. Terus bergerak fluktuatif dan cendrung mengalami pertumbuhan yang melambat sampai dengan tahun 2019 sebesar 1,20 persen (untuk pertumbuhan) dan 19,59 persen (untuk distribusi sektoral).

**Grafik II.79**

Pertumbuhan, Kontribusi Sektoral dan Tenaga kerja Sektor Industri Pengolahan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2021




*Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022*

Sedangkan pada tahun 2020 pertumbuhan sektor industri pengolahan terkontraksi sampai dengan -5,63 persen dengan distribusi sektoral terhadap PDRB ADHB sebesar 18,75 persen. Hal ini disebabkan karena dampak dari pamdemi Covid-19 yang melanda internasional, nasional dan regional termasuk pada wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya pada tahun 2021 pertumbuhan sektor industri pengolahan kembali tumbuh positif sampai dengan 5,44 persen dengan distribusi sektor industri terhadap PDRB ADHK sebesar 20,86 persen. Hal ini sejalan dengan mulai meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha seiring dengan mulai terbiasanya masyarakat dengan implementasi protokol Covid-19 sebagai bagian dari tatanan kehidupan baru.

**Tabel.57**

Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2021

| INDIKATOR | TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Laju Pertumbuhan Industri Kecil (%) | 0,05 | 0,19 | 0,13 | 0,09 | 8,90 | 6,64 |
| Industri kecil (Unit Usaha) | 12.737,00 | 15.108,00 | 17.024,00 | 18.607,00 | 20.263,00 | 21.609,00 |

| INDIKATOR | TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Laju Pertumbuhan industri menengah (%) | -0,05 | 0,05 | -0,11 | 0,01 | 40,00 | -9,29 |
| Industri menengah (Unit Usaha) | 106,00 | 111,00 | 99,00 | 100,00 | 140,00 | 127,00 |

*Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022*

Selanjutnya jika dilihat dari jumlah dan laju pertumbuhan industri kecil dan menengah, laju pertumbuhan industri kecil selama tahun 2020 dan 2021 cenderung meningkat. Laju pertumbuhan Industri kecil ditahun 2020 sebesar 8,90%, selanjutnya pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan yang melambat sebesar 6,64%. Seperti di ketahui bahwa pada tahun 2020 dan 2021 terjadi pandemi Covid-19 yang memaksa pelaku industri kecil harus *struggle* untuk bertahan di masa pandemi. Pelaku industri kecil yang *existing* tetap berusaha bertahan dan penambahan pelaku industri kecil terjadi karena *shifting-nya* pekerja formal yang kemudian dirumahkan lalu membuka usaha sendiri dirumah ditambah dengan pelaku usaha baru yang mendapat fasilitasi pelatihan dan kemudahan biaya dari pemerintah melalui program-program pemulihan ekonomi nasional serta ditopang dengan maraknya insentif dari pemerintah untuk pelaku industri kecil melalui kebijakan restrukturisasi pinjaman serta dukungan pembiayaan lainnya bagi para pelaku IKM Bangka Belitung pada masa pandemi.

Sementara itu pada industri menengah selama rentang waktu 2020 sampai dengan 2021, laju pertumbuhan industri menengah tercatat cenderung berfluktuasi. Tahun 2020 tercatat pertumbuhan sebesar 40% atau naik sebanyak 40 unit usaha industri menengah sehingga menjadi 140 unit usaha, sedangkan di tahun 2021 terjadi penurunan unit usaha industri menengah sebesar -9,29% atau menjadi 127 unit usaha, penurunan tersebut diakibatkan karena tekanan pandemi covid-19 yang memaksa industri menengah Bangka Belitung untuk *shut down*.

## 8. Urusan Transmigrasi

a. Jumlah Satuan Kawasan Transmigrasi

Pembangunan Transmigrasi pada hakikatnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan di daerah tertinggal dan pemerataan penduduk. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan transmigrasi, Provinsi Bangka Belitung mengembangkan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di kawasan-kawasan transmigrasi salah satunya kawasan Batu Betumpang. Kawasan terpadu mandiri Batu Betumpang yang juga merupakan salah satu Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dengan luas 41.100,3 ha.

Kawasan Kota Terpadu Mandiri harus memperhatikan ketentuan/kriteria yakni kawasan tersebut tidak berada di kawasan hutan. Berdasarkan SK Penunjukkan Kawasan Hutan di Kabupaten Bangka Selatan (SK Menhut No. 357/Menhut-II Tahun 2004) dapat dilihat bahwa di dalam kawasan tidak memiliki status kawasan hutan. Berdasarkan SK tersebut pada kawasan ini berada dalam Area Penggunaan Lain (APL). Perkembangan kawasan transmigrasi sebagaimana dibawah ini:

**Grafik II.80**

Jumlah Satuan Kawasan Transmigrasi




*Sumber: Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021"Data termutakhir"*

Kawasan transmigrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baru terdapat 2 kawasan atau sebesar 0,20%. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Luas kawasan Batu Betumpang yaitu 180.278.28 ha dengan jumlah KK sebanyak 8.323 KK. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2018 menetapkan kawasan Jebus sebagai kawasan transmigrasi seluas 74.015.27 dengan jumlah KK sebanyak 3.600 KK.

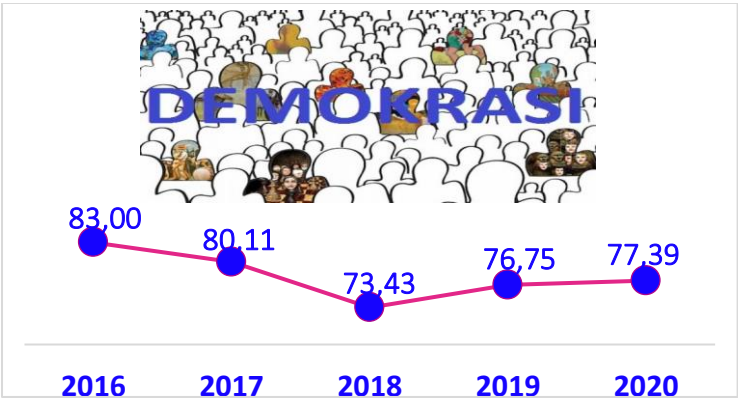
### 2.1.3.4 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Umum

a. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspekdemokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni "baik" (indeks >80), "sedang" (indeks 60 – 80), dan "buruk" (indeks < 60).

**Grafik II.81**

Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung




*Sumber: Kesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021"Data termutakhir"*

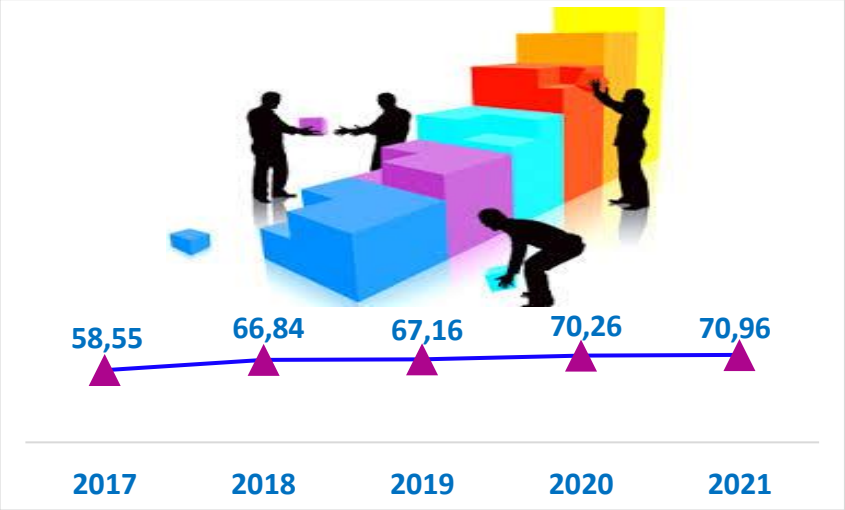
Berdasarkan data di atas Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 5 (lima) tahun terakhir cukup fluktuatif dengan tendensi menurun. Pada tahun 2016-2017 capaian IDI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 83,00 dan 80,11 (kategori baik) dan pada tahun 2018 menurun menjadi sebesar 73,43 dan naik kembali menjadi sebesar 76,75 (2019) dam 77,39 (2020). Perubahan angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dari 2016-2020 dipengaruhi oleh tiga aspek demokrasi, yakni (1) Kebebasan Sipil yang turun 8,53 poin (dari 87,65 menjadi 79,12), (2) Hak-Hak Politik yang turun 14,89 poin (dari 81,09 menjadi 66,20), dan (3) Lembaga-lembaga Demokrasi yang naik 12,77 poin (dari 80,20 menjadi 92,97). Meskipun Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019-2020 mengalami kenaikan namun masih masuk dalam kategori "sedang". Artinya kualitas kinerja demokrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada pada tingkat sedang. Hal ini menandakan belum matangnya perilaku dan sikap masyarakat serta perilaku politik dalam demokrasi.

### 2.1.3.5 Fokus Layanan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

a. Nilai SAKIP

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana system ini merupakan integrasi dari system perencanaan, system penganggaran dan system pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan untuk mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan Reformasi Birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcome dan upaya untuk mendpatkan hasil yang lebih baik. Penilaian SAKIP pemerintah daerah dibagi menjadi 7 kategori. yakni paling rendah D dengan rentang nilai 0-30. kemudian kategori C untuk nilai 30-50, CC untuk nilai 50-60, B untuk nilai 60-70, BB untuk nilai 70-80, dan A untuk nilai 80-90. adapun kategori tertinggi yaitu AA dengan hasil penilaian 90-100.

**Grafik. II.81**
Nilai SAKIP




*Sumber : Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022*

Nilai Sakip Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016-2020 menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Pada tahun 2016 nilai SAKIP Bangka Belitung sebesar 58,55 atau CC. Namun pada tahun 2020 nilai Sakip Bangka Belitung mencapai 70,96 atau dengan kategori BB sedangkan untuk di tahun 2021 datanya belum di rilis dan diperkirakan dibulan Maret atau April tahun berikutnya. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya. Peningkatan Nilai selama lima tahun terakhir menunjukkan serta membuktikan bahwa kinerja Instansi Pemerintah dalam menuangkan program dan arah keuangannya sudah akurat dan program-program yang direncanakan punya manfaat bagi masyarakat.

b. Persentase Tingkat Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan

Definisi dari materialitas dalam kaitannya dengan akuntansi dan pelaporan audit adalah suatu salah saji dalam laporan keuangan dapat dianggap material jika pengetahuan atas salah saji tersebut dapat mempengaruhi keputusan pemakai laporan keuangan. Dalam menerapkan definisi ini, digunakan tiga tingkatan materialitas dalam mempertimbangkan jenis laporan yang dibuat:

a. Jumlahnya tidak material

Jika terdapat salah saji dalam laporan keuangan, tetapi cenderung tidak mempengaruhi keputusan pemakai laporan, salah saji tersebut dianggap tidak material. Dalam hal ini pendapat tidak wajar dapat diberikan.

b. Jumlahnya material tetapi tidak mengganggu laporan keuangan secara keseluruhan

Tingkat materialitas kedua terjadi jika salah saji di dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan pemakai, tetap bpi keseluruhan laporan keuangan tersebut tersaji dengan benar, sehingga tetap berguna. Jika auditor menyimpulkan bahwa salah saji tersebut cukup materialtetapi tidak mengganggu laporan keuangan secara keseluruhan, pendapat yang tepat adalah pendapat wajar dengan pengecualian (menggunakan “kecuali untuk”).

c. Jumlah sangat material atau pengaruhnya sangat meluas sehingga kewajaran lapora keuangan secara keseluruhan diragukan

Tingkat materialitas dikatakan tertinggi terjadi apabila para pengguna informasi laporan keuangan dapat membuat keputusan yang salah jika mereka mengandalkan laporan keuangan secara keseluruhan. Semakin meluas pengaruh salah saji, kemungkinan untuk menerbitkan pendapat tidak wajar akan lebih besar daripada pendapat wajar dengan pengecualian.

**Grafik II.83**

Persentase Tingkat Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan




*Sumber : Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022*

Berdasarkan data diatas tingkat materialitas temuan hasil pemeriksaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung semakin menurun. Selama lima tahun terakhir tingkat materialitas temuan hasil pemeriksaan mengalami penurunan yang cukup baik dimana pada tahun 2017 persentase tingkat materialitas temuan hasil pemeriksaan mencapai 0,88 % dan ditahun 2021 di angka 0,02 %. Capaian kinerja pada indikator ini sangat tinggi yaitu dibawah satu persen (<1%). Artinya laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan secara wajar dalam semua material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

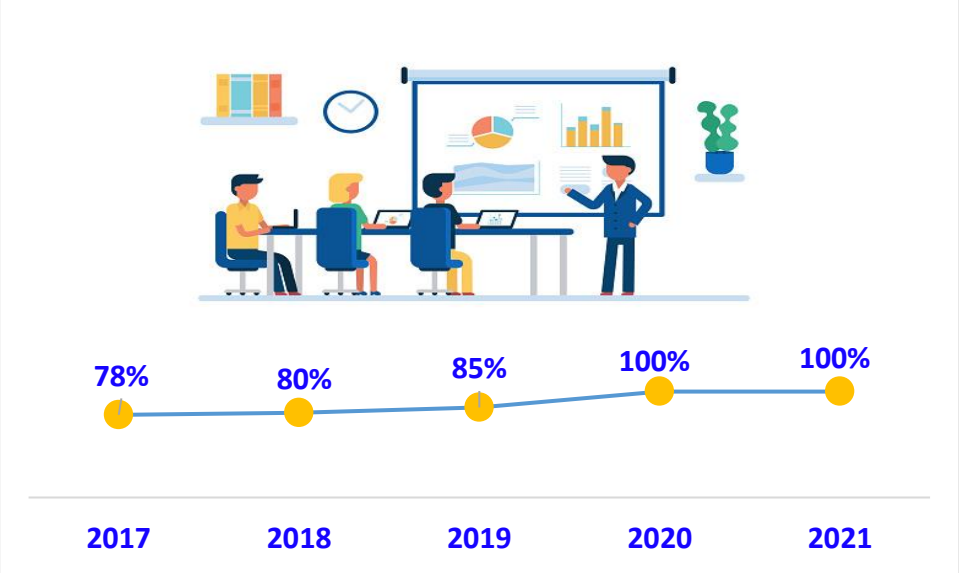
### 2.1.3.6 Fokus Layanan Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan

**1. Unsur Perencanaan**

a Persentase konsistensi program pembangunan di RKPD dengan RPJMD dan Renstra dengan RPJMD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah mengamanatkan disusunnya dokumen perencanaan yang terintegrasi mulai dari Pemerintah Pusat hingga ke daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk jangka waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. Kesesuaian antara dokumen RPJMD dengan RKPD dan Renstra sangat penting. Hal ini diharapkan akan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam pelayanan publik sehingga akan berdampak pada tujuan pembangunan daerah.

**Grafik II.84**
Persentase konsistensi program pembangunan di RKPD
dengan RPJMD dan Renstra dengan RPJMD




*Sumber : Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022*

Tingkat konsistensi program pembangunan di RKPD dengan RPJMD dan Renstra dengan RPJMD dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada tahun 2017 tingkat konsistensi hanya mencapai 78 persen, kemudian meningkat di tahun 2018 sebesar 80%. Pada tahun 2019 dan 2020 tingkat konsistensi program pembangunan di RKPD dengan RPJMD dan Renstra dengan RPJMD mencapai 100 persen sehingga semua program dalam Renstra dan RKPD konsisten dengan program yang tertuang dalam RPJMD.

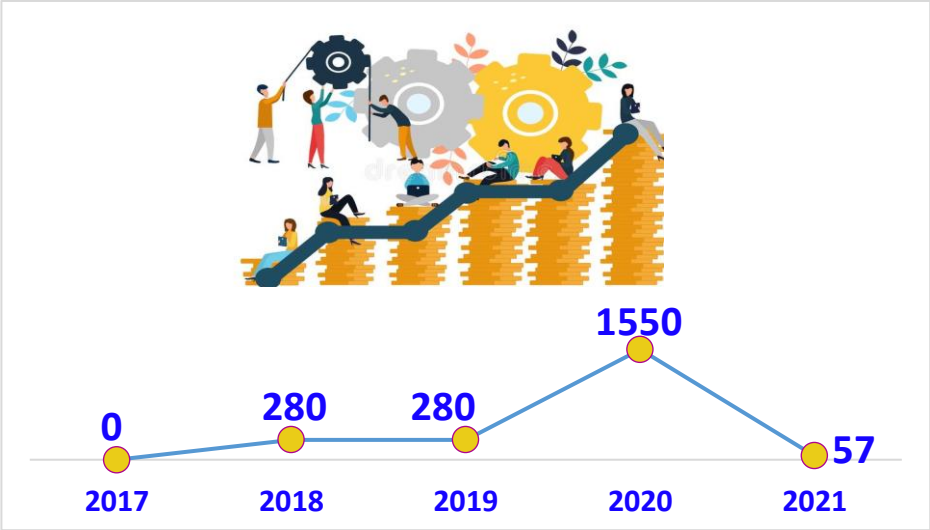
## 2. Unsur Penelitian dan Pengembangan

### a Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah adalah **himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah**. Bentuk kebaharuan didasarkan urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah pada setiap tingkatanya. Dari hasil indeks inovasi daerah, didapatkan peringkat dari inovasi daerah pada sebuah pemerintahan daerah. Pemeringkatan inovasi daerah dapat memberikan informasi mengenai pemetaan inovasi daerah, dan dijadikan acuan dasar dalam pemberian penghargaan dan pembinaan bagi pemerintah daerah yang dinilai berhasil menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui indeks inovasi akan dipetakan daerah-daerah mana saja yang inovatif. Kemudian daerah inovatif tersebut akan diberikan penghargaan nantinya melalui *Innovative Government Award (IGA).*

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2020 baru mengikuti *Innovative Government Award* (IGA) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan memasukan 13 (tiga belas) inovasi yang telah dikembangkan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**Grafik II.85**
Indeks Inovasi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2021




*Sumber : Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022*

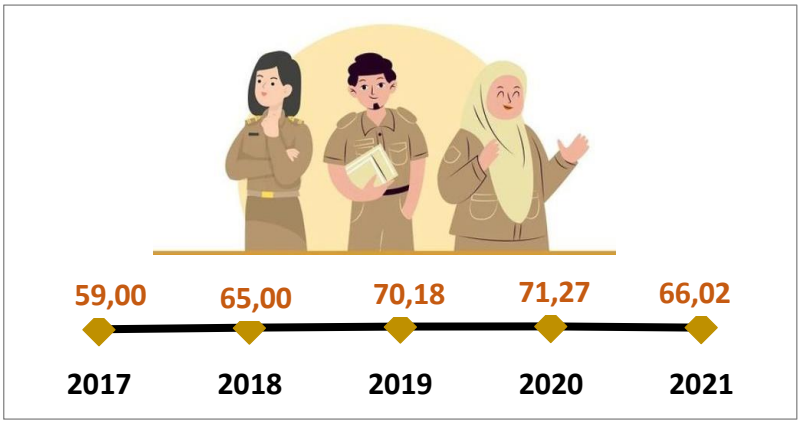
Pada Tahun 2020 Indeks Inovasi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, baik dalam jumlah skor dan kategori inovasi. Indeks Inovasi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari 280 (2019) menjadi 1.550 (2020). Hal tersebut sangat dipengaruhi jumlah inovasi yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-4672 Tahun 2020 Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2020, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Masuk dalam kategori "*Provinsi Sangat Inovatif*". Namun pada tahun 2021 *Innovative Government Award* mengkolaborasikan Indeks Satuan Pemda (16 indikator) dan Indeks Satuan Inovasi (20 indikator) dengan skor tertinggi 60-100 (sangat Inovatif). Skor IGA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 sebesar 57 dengan kategori "Inovatif".

### 3. Unsur Kepegawaian, Pendidikan dan Penelitian

a. Nilai Indeks Profesionalitas ASN

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Beberapa indikator dalam mengukur profesional ASN antara lain kompetensi, kompensasi, disiplin dan kinerja pegawai. Adapun premis indikator dari profesional ASN adalah (individu) pegawai akan semakin profesional apabila kompetensinya semakin tinggi, kinerjanya semakin baik dan pegawainya semakin bersih. Umumnya problem profesionalisme ASN dapat dilihat dari kurangnya integritas, rendahnya kompetensi, lambatnya kinerja, dan banyaknya pelanggaran disiplin. Oleh karena itu, peningkatan profesionalitas ASN sebagai motor penyelenggara negara perlu didorong pada aspek kerja, integritas, dan kompetensi agar mampu memberikan pelayanan publik secara optimal.

**Grafik. II.86**
Indeks Profesionalitas ASN




*Sumber : BKPSDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022*

Nilai Indeks Profesionalitas ASN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun ke tahun menunjukan peningkatan, dimana pada tahun 2017 hanya sebesar 59. Namun pada tahun 2019 sudah mencapai sebesar 70,18, serta meningkat kembali pada tahun 2020 yang mencapai 71,27. Namun pada tahun 2021 Nilai Indeks Profesionalitas ASN menurun menjadi sebesar 66,02. Artinya semakin menurunnya pegawai ASN yang sesuai kompetensi baik dari segi penempatan pegawai, serta pendidikan dan pelatihan yang sudah sesuai dengan jabatan. Selain dari pada itu kompensasi belum mengarah ke kinerja, tingkat disiplin yang menurun, serta kinerja yang juga semakin menurun.

**4. Unsur Keuangan**

a. Opini BPK

Opini BPK merupakan pernyataan atau pendapat profesional BPK yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah: Opini Wajar Tanpa Pengecualian/WTP (*Unqualified Opinion*), Opini wajar dengan pengecualian/WDP (*Qualified Opinion*), Opini tidak wajar (*Adversed Opinion*), dan pernyataan menolak memberikan opini (*Disclaimer of Opinion*).

**Grafik II.87**
Opini BPK




*Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022*

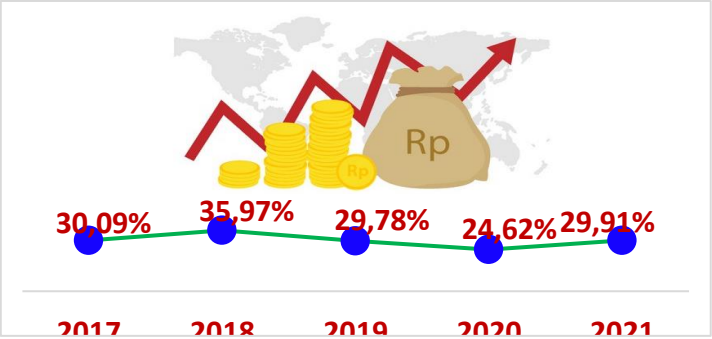
Capaian opini BPK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2016 yaitu Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Namun pada tahun 2017-2021 capaian opini BPK atas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), artinya Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyajikan laporan keuangannya secara wajar, semua informasi keuangan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan atau dapat disimpulkan tata kelola keuangan Pemerintah secara umum telah cukup baik.

b. Persentase Kontribusi PAD Terhadap APBD

Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dalam upaya peningkatan potensi dari sumber-sumber PAD meskipun perfoma terus ditingkatkan kemajuan pertumbuhan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir bergerak fluktuatif. Hal ini terlihat pada Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2017 hingga 2021 dimana angka kontribusi menunjukkan kinerja yang naik turun dengan rata- rata capaian 31,57

**Grafik II.87**

Persentase Peningkatan Pertumbuhan PAD




*Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022*

Dalam kurun 2017-2021 kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD performa tertinggi terjadi pada tahun 2018 yang mencapai angka 35,97 %, sementara capaian terendah pada tahun 2020 yaitu sebesar 24,62%. Pada tahun 2020 ini pertumbuhan PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat mengalami penurunan drastis sebesar -17,33% atau dari hasil audited PAD tercatat sebesar 683.43 milyar. Performa kinerja terus ditingkatkan, dan hasilnya terlihat dari pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2021 naik sebesar 24,55% tercatat sebesar 851.23 milyar.

## 5. Unsur Penghubung

a. Persentase Jumlah Pelayanan Penghubung Yang Terlaksana

Pelayanan Penghubung adalah melayani penyiapan hal-hal yang diperlukan dalam membantu untuk mempermudah komunikasi serta administrasi antara daerah dan pusat, baik penyelenggaraan kegiatan hubungan antar lembaga, pembinaan masyarakat daerah di Jakarta, promosi dan pengelolaan Anjungan Daerah di TMII, serta pelayanan kepada pejabat daerah dan pengelolaan Mess Pemerintah Provinsi di Jakarta.

**Grafik II.88**
Persentase Jumlah Pelayanan Penghubung Yang Terlaksana




*Sumber : Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022*

Capaian kinerja pelayanan penghubung yang terlaksana meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 sebesar 85%, 2018 sebesar 90 persen, serta 2019 sebesar 95 persen. Pada tahun 2020 dan 2021 pelayanan penghubung sudah paripurna mencapai 100 persen. Salah satu komponen yang paling penting dalam ketatalaksanaan pemerintah adalah pelayanan yang salah satunya meliputi pelayanan dan fasilitasi penghubung pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Kegiatan pelayanan dilakukan dalam satu kesatuan. Pelayanan Instansi pemerintah adalah pemerintah daerah/pejabat, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, sekretariat lembaga negara, lembaga setingkat menteri dan lembaga lain, lembaga nonstruktural, serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

### 2.1.3.7 Fokus Layanan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

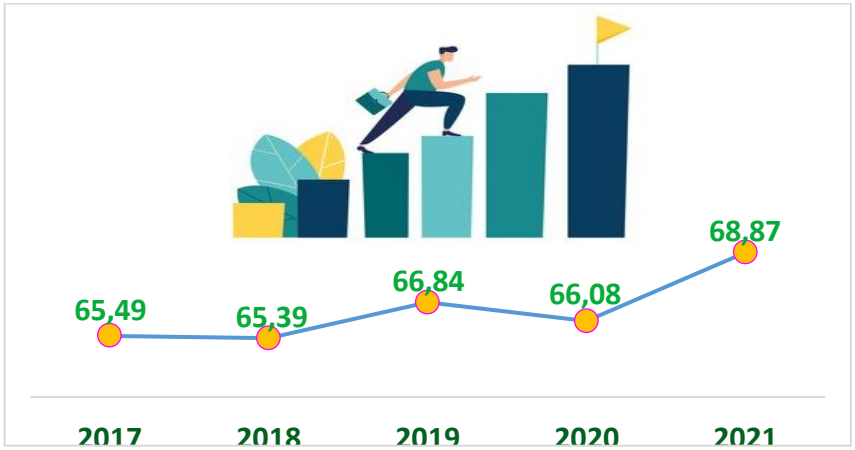
**1. Urusan Kesekretariatan Daerah**

a. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi (Rb) secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai upaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat melalui peningkatan profesionalisme pegawai dan komitmen untuk mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*). Ada 8 area perubahan reformasi birokrasi, yaitu: Mental Aparatur, Organisasi, Tata Laksana, Peraturan Perundang-Undangan, Sumber Daya Manusia Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas dan Pelayanan publik.

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi (Rb) Provinsi Bangka Belitung dari tahun 2017-2021 cukup fluktuatif namun cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 Indeks Rb hanya sebesar 65,49. namun pada tahun 2021 mencapai 68,87. Nilai komponen pengungkit dari 8 area perubahan sebesar 35,24 meningkat 4,1 poin dibandingkan dengan tahun 2020 (31,14), sedangkan komponen hasil (kapasitas dan akuntabilitas kinerja, pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kualitas pelayanan publik) sebesar 33,63 dan menurun 1,31 poin dibandingkan dengan 2020 (34,94), sehingga Indeks Rb tahun 2021 mencapai 68,87 dengan predikat "B" (Baik).

**Grafik II.89**
Indeks Reformasi Birokrasi




*Sumber : Biro Organisasi SETDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022*

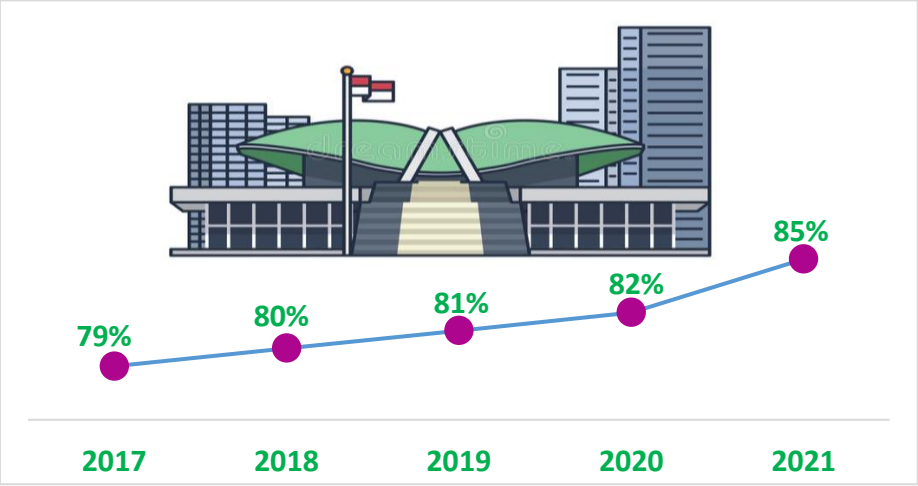
Selama periode 2017-2021 capaian Indeks Reformasi Birokrasi (Rb) Provinsi Bangka Belitung selalu berpredikat "B". Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan yang berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada area pemenuhan dan reform.

**1. Urusan Kesekretariatan DPRD**

a. Persentase Meningkatnya Fungsi Lembaga DPRD

Lembaga DPRD biasa disebut sebagai lembaga legislatif. Fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang, membentuk Peraturan Daerah bersama-sama kepala daerah, membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diajukan oleh Kepala Daerah serta melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD.

**Grafik II.90**
Persentase Meningkatnya Fungsi Lembaga DPRD




*Sumber Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022*

Persentase meningkatnya fungsi Lembaga DPRD dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada periode tahun 2017-2021 peningkatan fungsi Lembaga DPRD meningkat cukup baik. Pada tahun 2017 fungsi lembaga DPRD hanya sebesar 79 persen, namun di tahun 2021 sudah mencapai 85 persen. Artinya semakin meningkatnya inisiasi terhadap rancangan peraturan daerah dan semakin meningkatnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

### 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

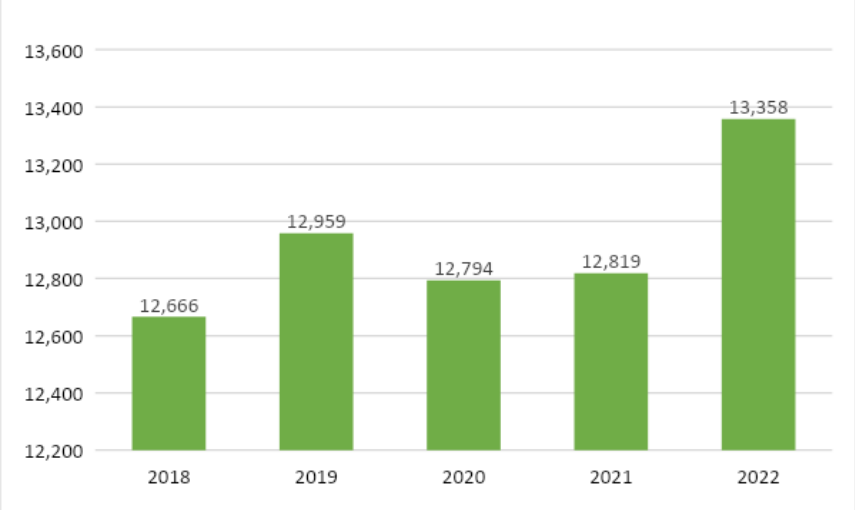
#### 2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

**1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita**

Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita menggambarkan jumlah pengeluaran rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengeluaran konsumsi perkapita juga dapat mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kemampuan ekonomi rumah tangga melalui cara penggunaan pendapatan yang dibelanjakan/pengeluaran untuk kebutuhannya, maka rata-rata pengeluaran per kapita pengeluaran konsumsi rumah tangga cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2019, nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus meningkat, dari Rp12.666 ribu pada tahun 2018 menjadi Rp12.959 ribu pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 seiring terjadinya pandemi Covid-19, nilai ini menurun menjadi Rp12.794 ribu, selanjutnya perlahan kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi Rp12.819 ribu.

**Grafik II.91**
Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita (ribu rupiah)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022




*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022*

Pada tahun 2022, pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai Rp13.358 ribu per tahun. Capaian ini meningkat 4,20 persen dibandingkan tahun sebelumnya, seiring dengan pemulihan ekonomi di Indonesia yang terus berlanjut. Pengeluaran riil per kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada

tahun 2021 dan 2022 terus meningkat setelah pada tahun 2020 mengalami penurunan..

**2. Nilai Tukar Petani**

Nilai tukar petani memberikan gambaran tentang kemampuan petani dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran kebutuhannya. Nilai tukar petani juga dapat mengindikasikan tingkat kesejahteraan petani. Berdasarkan data dapat diketahui bahwa kecenderungan nilai tukar petani di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan dengan Rasionilasi tukar petani ditampilkan pada tabel di bawah ini,

**Tabel II.58**
Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2018 s.d 2022
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| No | Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* |
| 1 | Indeks Yang Diterima Petani (It) | 106,13 | 107,15 | 114,89 | 117,43 | 118,38 |
| 2 | Indeks Yang Dibayar Petani (lb) | 125,73 | 129,08 | 110,53 | 112,23 | 114,32 |
| 3 | Rasio | 0,84 | 0,83 | 1,04 | 1,05 | 1,03 |

*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023*

Tabel di atas menunjukkan bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018-2022 bersifat fluktuatif. Terlihat Nilai Tukar Petani (NTP) terjadi penurunan pada tahun 2019 kemudian mengalami peningkatan di tahun 2020 dan 2021 serta kembali mengalami penurunan di tahun 2022. Adanya penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan petani**.**

**3. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita (Persentase Konsumsi RT untuk Non Pangan)**

Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita (persentase konsumsi RT untuk non pangan) menjelaskan berapa besar konsumsi rumah tangga non pangan perkeluarga per tahun. Sebagaimana diperlihatkan pada dibawah ini dapat dijelaskan bahwa konsumsi rumah tangga non pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung megalami kondisi yang berfluktuatif. Dapat dilihat dari tahun 2018 sampai tahun 2020 terjadi kenaikan kemudian terjadi penurunan pada tahun 2021 dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2022. Selain itu, jika dilihat dari rasio perbandingan antara total pengeluaran dan total pengeluaran konsumsi RT Non-Pangan sepanjang kurun waktu 2018-2022 juga mengalami kecenderungan berfluktuatif.

**Tabel II.59**
Persentase Konsumsi RT Non-Pangan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022

| No | Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* |
| 1 | Total Pengeluaran Konsumsi RT Non-Pangan | 639.949 | 709.094 | 758.333 | 748.970 | 772.658 |
| 2 | Total pengeluaran | 1.360.994 | 1.419.495 | 1.509.974 | 1.532.174 | 1.654.281 |
| 3 | Rasio | 0,470 | 0,500 | 0,502 | 0,489 | 0,47 |

*Sumber: Bangka Belitung Dalam Angka 2023: BPS*

Selanjutnya sebagaimana diperlihatkan pada tabel dibawah ini menunjukkan bahwa besaran total pengeluaran nonpangan pada setiap kabupaten/kota di lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 menunjukkan kondisi dengan angka relatif sangat bervariasi. Nilai total tersebut menggambarkan pola pikir atau kebiasaan penduduk setempat terkait perilaku pengeluarannya.

**Tabel II.60**
Indikator Pengeluaran Non Pangan Perkapita Tahun 2022 menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022

| No | Kabupaten/Kota | Total Pengeluaran Konsumsi RT Non-Pangan | Total pengeluaran | Rasio |
|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* |
| 1 | Kabupaten Bangka | 668.623 | 1 533 563 | 0,441 |
| 2 | Kabupaten Bangka Barat | 690.058 | 1 473 489 | 0,468 |
| 3 | Kabupaten Bangka Selatan | 645.837 | 1 509 690 | 0,428 |
| 4 | Kabupaten Bangka Tengah | 639.221 | 1 513 912 | 0,422 |
| 5 | Kabupaten Belitung | 870.831 | 1 775 224 | 0,491 |
| 6 | Kabupaten Belitung Timur | 924.753 | 1 922 920 | 0,481 |
| 7 | Kota Pangkalpinang | 1.088.529 | 2 027 789 | 0,537 |
| | **Provinsi** | **772.685** | **1 654 281** | **0,467** |

*Sumber: Bangka Belitung Dalam Angka 2023: BPS*

### 4. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Pertumbuhan investasi merupakan hal yang sangat penting dalam upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja yang sekaligus akan mengurangi pengangguran. Adapun gambaran serapan tenaga kerja yang bekerja di perusahaan PMA/PMDN, jumlah PMA/PMDN, dan daya serap kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang tahun 2017-2021 kecenderungan bersifat fluktuatif. Pada tahun 2020 merupakan jumlah tenaga kerja yang paling banyak bekerja sebanyak 10.559 dan jumlah PMA/PMDN sebanyak 1.320. Sementara itu, berbeda dengan potret tahun 2021 jumlah PMA/PMDN mengalami penurunan yang signifikan, tenaga kerja yang diserap hanya sebanyak 4.604 dengan rasio sebesar 1,73 yang mana kita ketahui bersama karena dampak Covid-19. sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

**Tabel II.61**
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2021

| No | Uraian | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* |
| 1 | Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN | 3.543 | 4.512 | 5.499 | 10.559 | 4.604 |
| 2 | Jumlah seluruh PMA/ PMDN | 235 | 411 | 633 | 1.320 | 2.658 |
| 3 | Rasio daya serap tenaga kerja | 15,07 | 10,97 | 8,68 | 8,68 | 1,73 |

*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022*

### 2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Ketersediaan fasilitas wilayah atau infrastruktur yang menunjang daya saing daerah

dalam hubungannya dengan ketersediaannya (*availability*) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor antara lain dapat diketahui dari beberapa indikator antara lain jumlah orang yang terangkut angkutan umum baik laut maupun udara, Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, penataan wilayah, fasilitas bank dan non bank, Hotel berbintang/non bintang, terminal, bandara, dan pelabuhan.

## 1. Jumlah Penumpang Angkutan

Moda Transportasi adalah jenis atau bentuk angkutan yang digunakan untuk memindahkan orang dan atau barang dari satu tempat ketempat lain baik darat, laut dan udara. Penggunaan moda tersebut dapat dilihat dari jumlah penumpang terangkut dalam angkutan sebagaimana tabel di bawah ini,

**Tabel II.62**
Jumlah Penumpang Angkutan (Jiwa/Orang)

| Uraian | Jumlah Penumpang (Orang) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. Angkutan Udara | | | | | |
| a. Embarkasi | 1.098 .425 | 1.542.342 | 1.157.262 | 476.085 | 457.462 |
| b. Debarkasi | 1. 101. 019 | 1.593.384 | 1.204.682 | 494.060 | 458.236 |
| 2. Angkutan Laut | | | | | |
| a. Embarkasi | 118.266 | 161.529 | 219.068 | 70.154 | 187.867 |
| b. Debarkasi | 108.150 | 168.189 | 203.274 | 60.807 | 237.041 |

*Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022*

Berdasarkan data di atas baik keberangkatan maupun kedatangan angkutan udara cukup berfluktuatif dan mengalami penurunan di tahun 2020 dan 2021. Hal ini menandakan adanya penurunan jumlah permintaan jasa penerbangan yang diukur dari pertumbuhan penumpang udara melalui indikasi jumlah penumpang yang terus mengalami penurunan. Begitupun dengan angkutan laut baik embarkasi maupun debarkasi mengalami penurunan ditahun 2020 dan 2021. Namun pemerintah tetap optimis pada tahun 2022 seiring dengan menurunnya Covid-19 baik debarkasi maupun embarkasi akan mengalami kenaikan.

## 2. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan (km) terhadap jumlah kendaraan (unit). Nilai ini berarti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah kendaraan. Kendaraan yang diperhitungkan di sini terdiri dari mobil penumpang, bus, truk, dan sepeda motor.

**Tabel II.63**
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* |
| 1 | Panjang Jalan Provinsi (km) | 899,33 | 899,33 | 850,99 | 850,99 | 850,99 |

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 2 | Jumlah Kendaraan | 875.527 | 934.354 | 998.080 | 1.039.803 | 1.048.188 |
| 3 | Rasio* | 0,00103 | 0,00096 | 0,00085 | 0,00082 | 0,00081 |

*Sumber : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2021"Data termutakhir"*
**) dihitung*

Berdasarkan data diatas dari tahun 2016-2020 rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan mengalami penurunan. Pada tahun 2019 rasio panjang jalan per jumlah kendaraan sebesar 0,00082 dan menurun di tahun 2020 menjadi 0,00081. Hal ini disebabkan meningkatnya jumlah kendaraan pada tahun 2020 sebanyak 8.385 unit dari 1.039.803 unit pada tahun 2019 menjadi 1.048.188 unit pada Tahun 2020.

### 3. Penataan Wilayah

Penataan Wilayah dilihat dari Luas wilayah produktif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggambarkan ketersediaan lahan yang produktif untuk dikelola dan dikembangkan dalam rangka peningkatan produktivitas ekonomi dan kesejahteraan. Persentase seluas wilayah produktif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada tabel berikut,

**Tabel II.64**
Rasio luas Wilayah Produktif Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| No | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah Produktif | Luas Seluruh Wilayah Budidaya | Rasio |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Kabupaten Bangka | 233.977 ha | 295.068 ha | 0,79 |
| 2 | Kabupaten Bangka Barat | 218.878 ha | 282.061 ha | 0,78 |
| 3 | Kabupaten Bangka Selatan | 231.828 ha | 360.707 ha | 0,64 |
| 4 | Kabupaten Bangka Tengah | 164.227 ha | 212.677 ha | 0,77 |
| 5 | Kabupaten Belitung | 195.776 ha | 229.369 ha | 0,85 |
| 6 | Kabupaten Belitung Timur | 139.850 ha | 250.691 ha | 0,56 |
| 7 | Kota Pangkalpinang | 2.203 ha | 11.840 ha | 0,19 |
| **Jumlah** | | **1.186.652 ha** | **1.542.414 ha** | **0,73** |

*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021"Data termutakhir"*

Berdasarkan data diatas Rasio luas Wilayah Produktif Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017 tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Kabupaten Belitung dengan rasio sebesar 0,85. Tingginya nilai rasio menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah produktif dikelola dan dikembangkan dalam upaya mendukung aktivitas ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.

### 4. Infrastruktur dan Fasilitas Penunjang

Pengembangan infrastruktur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan pembangunan. Pengembangan infrastruktur dapat dilihat dari jumlah pelabuhan laut, udara, terminal, jumlah perbankan, jumlah hotel berbintang/non bintang dalam mendukung aktivitas ekonomi yang berdaya saing.

**Tabel II.65**
Infrastruktur dan Fasilitas Penunjang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| No | Infrastruktur | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* |
| 1. | Jumlah Pelabuhan Udara | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2. | Jumlah Pelabuhan Laut | 10 | 12 | 13 | 17 | 17 |
| 3. | Jumlah Terminal | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 4. | Jumlah Perbankan | 197 | 202 | 257 | 281 | 290 |
| 5. | Jumlah Hotel Berbintang/ Non Bintang | 91 | 105 | 170 | 220 | 257 |

*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021 "Data termutakhir"*

Berdasarkan data di atas jumlah pelabuhan udara masih terdapat 2 (dua) bandara yaitu Bandara Depati Amir di Pangkalpinang dan Bandara Hanandjoedin di Belitung. Sedangkan jumlah pelabuhan laut berjumlah 17 pelabuhan dan terdapat 13 terminal. Jumlah Perbankan mengalami kenaikan dari 281 (2018) menjadi 290 (2020). Begitupun dengan jumlah hotel berbintang/non bintang dari 220 (2018) menjadi 257 (2019). Semakin meningkatnya ketersediaan infrastruktur dan fasilitas penunjangnya maka akan meningkatkan aktivitas ekonomi yang berdaya saing.

### 2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

#### 1. Angka Kriminalitas

Kriminalitas adalah segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku serta norma-norma sosial dan agama. Angka kriminalitas merupakan suatu angka yang menunjukkan kejadian kriminalitas yang terjadi pada suatu waktu dan daerah tertentu. Tindakan kriminal umumnya berkaitan dengan yang bertentangan dengan norma hukum, norma sosial dan norma agama yang berlaku di masyarakat. Ada banyak faktor penyebab yang bisa melatarbelakangi seseorang melakukan tindakan kriminal, diantaranya yaitu: pertentangan dan persaingan kebudayaan, perbedaan ideologi politik, kepadatan dan komposisi penduduk, perbedaan distribusi kebudayaan, perbedaan kekayaan dan pendapatan, mentalitas yang labil, serta faktor dasar seperti faktor biologis, psikologis dan emosional.

**Grafik II.92**
Angka Kriminalitas



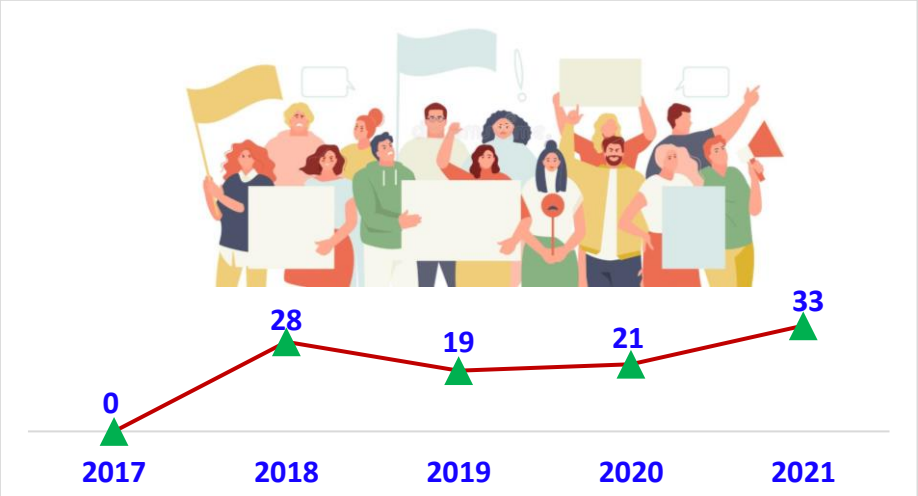

*Sumber: Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022*

Angka Kriminalitas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu 2017-2020 menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2019 dari 9,81 persen menurun menjadi 9,06 persen pada 2020. Namun pada tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 0,85 persen dihitung berdasarkan Jumlah penduduk tahun 2020.

**2. Jumlah Demo**

Demonstrasi merupakan salah satu cara kelompok tertentu menyuarakan idenya dan tidak heran aksi ini kerap menimbulkan kerugian meskipun tujuannya bisa dibilang cukup baik, "agar suara di dengar". Faktor penyebab demonstrasi kegiatan aksi unjuk rasa tidak terjadi begitu saja, ada banyak faktor yang melatarbelakanginya. Mengacu pada pengertian demonstrasi, adapun beberapa faktor penyebab terjadinya demonstrasi adalah ketidakadilan sosial, ketidaksesuaian pendapat, dan aspirasi masyarakat yang belum terpenuhi.

**Grafik II.93**
Jumlah Demo




*Sumber: Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022*

Jumlah demonstrasi yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif sedikit daripada provinsi lain. Demonstrasi di Bangka Belitung di dominasi oleh isu lingkungan dan pertambangan. Jumlah demonstrasi dari tahun 2017-2018 mengalami Peningkatan yang cukup signifikan dari 0 kasus menjadi 28 kasus. Dan pada tahun 2018 sampai dengan 2020 jumlah demo cukup stabil dan mengalami peningkatan kembali di tahun 2021 sebesar 33 Kasus. Hal ini menggambarkan bahwa kecenderungan stabilitas keamanan bermasyarakat di Bangka Belitung relatif lebih rendah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

**3. Jumlah Perda yang mendukung Iklim Usaha**

Perda merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui Perda dapat diindikasikan adanya insentif maupun disinsentif suatu kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim investasi dibatasi yaitu Perda terkait dengan perizinan, Perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta Perda terkait dengan ketenagakerjaan.

**Tabel II.66**
Jumlah Peraturan Daerah yang mendukung Iklim Investasi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| No | Nomor | Peraturan Daerah |
|---|---|---|
| 1 | 18 Tahun 2008 | Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Bumi Bangka Belitung Sejahtera |
| 2 | 11 Tahun 2008 | Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitungpada PT. Bank Perkreditan |
| 3 | 12 Tahun 2008 | Penambahan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitungpada Bank Sumsel |
| 4 | 1 Tahun 2010 | Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT. Bank Sumsel Bangka Belitung |
| 5 | 3 Tahun 2010 | Pembentukan BUMD PT. Penjamin Kredit Daerah Provinsi Kepulauan<br>Bangka Belitung |
| 6 | 7 Tahun 2011 | Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT. Bank Pembangunan Sumsel Bangka Belitung |
| 7 | 7 Tahun 2013 | Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitungpada BUMD Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Kepulauan<br>Bangka Belitung |
| 8 | 3 Tahun 2014 | Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT. Bank Pembangunan Daerah |
| 9 | 15 Tahun 2016 | Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal PemerintahProvinsi Kepulauan Bangk Belitung pada Perseroan Terbatas Bank<br>Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. |
| 10 | 5 Tahun 2017 | Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi |
| 11 | 7 Tahun 2017 | Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) |
| 12 | 2 Tahun 2019 | Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka<br>Belitung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. |

*Sumber: Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023*

Sebagaimana diperlihatkan pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa sepanjang kurun waktu 2008-2019 jumlah Perda yang disahkan untuk mendukung iklim investasi sebanyak 12 Perda, mulai dari Perda pembentukan BUMD sampai dengan Perda penyertaan modal pada Bank Pembangunan Daerah serta pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi.

### 4. Kemudahan Perizinan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu dalam satu pintu dengan prinsip kepastian waktu, biaya, cepat, mudah, efisien dan transparan guna mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung nomor 57 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, jenis perizinan dan non perizinan yang dideligasikan terdiri dari 12 sektor dan 87 layanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan melalui perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single

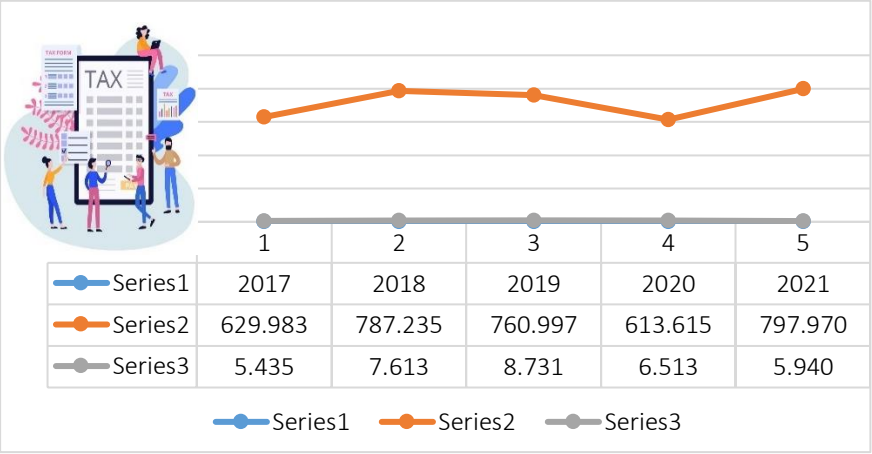
Submission (OSS). OSS digunakan dalam pengurusan izin berusaha oleh pelaku usaha baik yang berbentuk badan usaha maupun perorangan, usaha mikro, kecil, menengah maupun besar; Usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri. Usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, maupun terdapat komposisi modal asing.

Selain itu berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung nomor 47 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan kemudahan berinvestasi. Pemerintah daerah memberikan insentif atau kemudahan berinvestasi dengan tujuan menarik dan merangsang penanam modal untuk melakukan penanaman modal di daerah, meningkatkan iklim investasi yang lebih baik, meningkatkan akses dan kemampuan ekonomi, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Ini merupakan kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dalam berinvestasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### 5. Pengenaan Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Selama kurun waktu 2014-2018 pajak kendaraan bermotor merupakan sumber pendapatan asli daerah yang paling dominan diikuti oleh pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan beabalik nama kendaraan bermotor. Sedangkan pajak rokok dan pajak air permukaan kontribusinya masih relatif rendah dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, setiap pungutan yang membebani masyarakat baik berupa pajak atau retribusi harus diatur dalam peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah).

**Grafik II.94**
Pajak Daerah




| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Series1 | 5.435 | 7.613 | 8.731 | 6.513 | 5.940 |
| Series2 | 629.983 | 787.235 | 760.997 | 613.615 | 797.970 |
| Series3 | | | | | |

*Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022*

Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di atas menunjukan penurunan realisasi penerimaan pajak daerah, dimana pada tahun 2019 jumlah Pajak Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp760.997 (dalam juta) menurun signifikan di tahun 2020 menjadi sebesar Rp613.615 (dalam juta) atau mengalami penurunan pertumbuhan PAD sebesar (-)17.33% meskipun demikian terjadi kenaikan penerimaan pajak daerah pada tahun 2021 sebesar Rp797.970 (dalam juta) berarti adanya kenaikan pertumbuhan PAD sebesar 24.55%, sedangkan untuk Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di tahun 2019 jumlah yang diperoleh sebesar Rp8.731 (dalam juta) menurun signifikan di tahun 2020 sebesar menjadi Rp6.513 (dalam juta) dan mengalami penurunan Retribusi Daerah lagi di tahun 2021 sebesar Rp5.940 (dalam juta).

### 2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

#### 1. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Kualitas tenaga kerja di suatu daerah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu daerah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Perhitungan kualitas tenaga kerja adalah perbandingan antara banyaknya lulusan perguruan tinggi yang dimiliki daerah yang bersangkutan atau lulusan S1/S2/S3 dengan jumlah penduduk usia kerja.

**Tabel II.67**
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2016 s.d 2020
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* |
| 1. | Jumlah lulusan S1/S2/S3 | 60.655 | 50.603 | 54.999 | 83.328 | 74.394 |
| 2. | Jumlah penduduk | 1.401.827 | 1.430.865 | 1.459.873 | 1.488.792 | 1.517.590 |
| 3. | Rasio lulusan S1/S2/S3 | 434.70 | 358.12 | 384.07 | 574.27 | 511.06 |

*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021 "Data termutakhir"*

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Kualitas tenaga kerja/rasio lulusan S1/S2/S3 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk 5 (lima) tahun terakhir cenderung berfluktuasi dimana tahun 2016 sebesar 434,70 per 10.000 penduduk. Namun mengalami penurunan kembali secara bertahap ditahun 2017 menjadi 358,12 per 10.000 penduduk. Penurunan ini menunjukkan bahwa daya serap tenaga kerja dengan latar pendidikan sarjana/perguruan tinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurun, walaupun sempat pada tahun 2018 dan 2019 rasio ini meningkat sebesar 384,07 dan 574,27 per 10.000 penduduk dan kembali menurun menjadi 511,06 per 10.000 penduduk pada tahun 2020. Oleh karena itu diperlukan strategi dan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing dengan kompetensi dan latar pendidikan yang sesuai dengan keinginan pengguna tenaga kerja agar dapat terserap dalam perusahaan-perusahaan, dan secara otomatis dapat meningkatkan rasio kelulusan S1/S2/S3.

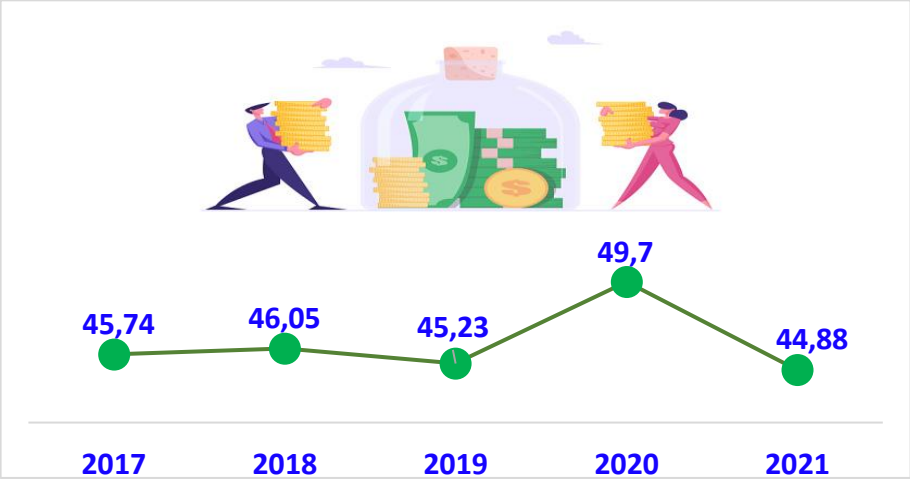
#### 2. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan dihitung dengan perbandingan jumlah penduduk usia < 15 tahun dan > 64 tahun terhadap jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh

setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk usia produktif adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun, sedangkan yang dikategorikan sebagai penduduk usia non produktif adalah penduduk berusia dibawah 15 tahun (karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya) dan penduduk berusia diatas 65 tahun karena umumnya sudah melewati masa pensiun.

**Grafik II.95**

Rasio Ketergantungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung




*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022*

Pada tahun 2016, angka *dependency ratio* untuk Bangka Belitung sebesar 45,74 yang artinya bahwa dari 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 43-44 orang penduduk usia non produktif. Dari tahun ke tahun, angka *dependency ratio* cukup fluktuatif, namun mengalami kenaikan pada tahun 2020 yaitu menjadi sebesar 44,88 yang berarti bahwa semakin tingginya beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

### 2.1.5. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan indikator dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di pusat maupun daerah. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan pemetaan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berikut pemetaan pencapaian indikator TPB 2014-2018 dengan RPJMD.

#### 1. TUJUAN 1 - TANPA KEMISKINAN



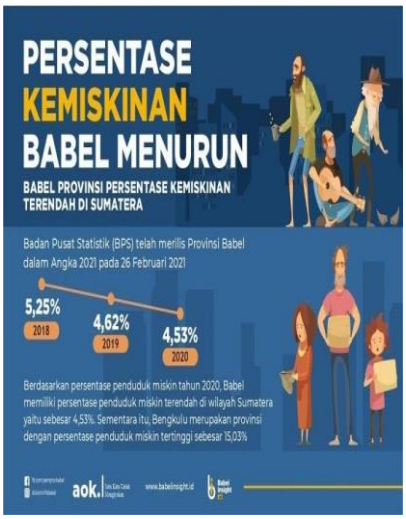
Salah satu tujuan yang masih menjadi masalah hampir seluruh negara di dunia yaitu mengentaskan kemiskinan, dan merupakan tujuan SDGs urutan pertama. Kemiskinan masih dan akan selalu dipandang sebagai masalah yang serius bagi negara-negara di dunia, khususnya negara berkembang. Penghapusan kemiskinan sebagai tujuan utama diarahkan untuk menjamin keberlanjutan capaian MDGs. Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pada pemahaman suara masyarakat miskin dan adanya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara

bertahap, yaitu hak sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Namun untuk kepentingan program, Indonesia melalui Badan Pusat Statitstik (BPS) mendefinisikan kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dalam mengentaskan kemiskinan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan pendekatan kebijakan, yaitu (1) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, dan (2) meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring pencapaian RAD SDGs Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022, sasaran capaian indikator Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan, yaitu :

**A. Target Global 1.2**

Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur pada tahun berjalan dapat tercapai. Terhitung sampai dengan tahun 2020 angka ini terus mengalami penurunan, yaitu dari 5,3% pada tahun 2017 menjadi sebesar 4,53% pada tahun 2020 dan sudah melampaui target sebesar 5,10%. Angka ini jauh di bawah capaian nasional sebesar 9,22 % dan Bangka Belitung memiliki prosentase penduduk miskin terendah di wilayah Sumatera.

**B. Target Global 1.3**




Pemerintah Provsinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin. Target sasaran capaian indikator ini secara umum dalam tahun berjalan dapat tercapai, yaitu untuk proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan sebanyak 120.394 jiwa dari target sebesar 907.997 jiwa dan Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan sebanyak 21.947 jiwa dari target 43.000 jiwa. Sementara itu untuk Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan, meskipun target tahun berjalan tidak tercapai namun tren capaian naik dari tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 1.158.663 jiwa tahun 2020 dari target sebanyak 1,275,000 jiwa. Sedangkan capaian tahun 2019 sebanyak 1.110.000 jiwa.

**C. Target Global 1.4**

Target sasaran Capaian indikator ini yaitu menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro. Hampir seluruh indikator dalam tahun berjalan tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Sasaran capaian indikator tersebut adalah Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin sebesar 70% dari target 60,85%. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat mencapai 100,11% dari target 96,72%. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat mencapai 101,05%

dari target 70,96%. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/sederajat mencapai 92,59% dari target 53,87%. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan sebesar 75,06% dari target 65,12%. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan sebesar 92,58% dari target 77,10%. Persentase rumah tangga kumuh perkotaan sebesar 3,13% dari target 3,07%. Sementara itu persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran sebesar 93,93% dari target 85,25%. Sedangkan untuk indikator Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan dengan capaian sebesar 86,30 dan Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN yang capaiannya sebesar 99,86%, meskipun dalam tahun berjalan tidak mencapai target yang telah telah ditetapkan, tetapi tren capaiannya naik dari tahun sebelum.

GAMBAR 4.4 RASIO ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PEREMPUAN/LAKI-LAKI DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DAN INDONESIA (PERSEN), 2019-2020




## D. Target Global 1.5

Target sasaran capaian indikator ini yaitu, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana. Dari 2 (dua) indikator yang ditetapkan untuk mencapai target sasaran ini, bahwa kedua-duanya mencapai target dalam tahun berjalan, yaitu Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang dapat diminimalisir, yaitu sebanyak 240 orang korban dari target sebanyak 22.170 orang. Sedangkan Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah mencapai target sebanyak 1 lokasi.

Secara keseluruhan untuk tujuan I tanpa kemiskinan capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah sangat baik, namun perlu kerja keras dalam mencapai sasaran indikator pada tahun 2030, karena terdapat beberapa permasalahan seperti masih rendahnya pemahaman pengelola program terkait dengan dukungan data dalam proses perencanaan, masih kurangnya kapasitas tenaga pendamping kegiatan, khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan program (seperti : TKSK, TRC, Pendamping PKH, Penyuluh Pertanian, Kader Kesehatan, TPD, Penyuluh KB, Kader BKB BKR dan BKL). Terkait kelembagaan, peran dan kinerja lembaga pengelolaan dan pengawasan program belum optimal (seperti : KOMDA Lanjut Usia Kabupaten/Kota, Dewan Ketahanan Pangan, BKM, Kelompok Tani). Disamping itu, anggaran yang dialokasikan tidak berdasarkan skala prioritas untuk pencapaian target indikator SDGs. Sedangkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi program masih terkendala dengan beberapa regulasi yang belum disusun (seperti : Penyusunan Regulasi Air Permukaan, Penyusunan Indikator Kemiskinan Daearah). Sedangkan terkait sarana prasarana khususnya di

bidang pendidikan dan penanggulangan bencana, masih belum terpenuhi dengan baik. Kendala dan permasalahan lain yang masih dihadapi yaitu koordinasi dengan pemerintah pusat dan DPRD maupun media massa belum maksimal, sehingga jangkauan program belum begitu massif.

Adapun rencana tindak lanjut dalam mengatasi masalah tersebut dapat didukung dari beberapa aspek sebagai berikut :

1. Sumber daya manusia, yaitu :
   a. Meningkatkan Koordinasi dan memperkuat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah
   b. Kegiatan Pelatihan peningkatan kapasitas para pendamping lebih diutamakan untuk menjamin keberlangsungan program.
2. Kelembagaan, yaitu meningkatan Capacity Building yang ditekankan pada dimensi pengembangan SDM, penguatan organisasi dan reformasi kelembagaan di tujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan responsif dari kinerja kelembagaan.
3. Keuangan, yaitu menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk pembiayaan bantuan modal usaha.
4. Regulasi, yaitu membuat Perda Air Permukaan dan Perda Indikator Kemiskinan Daearah.
5. Operasional, yaitu Memenuhi sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.
6. Politik, yaitu meningkatkan rapat-rapat koordinasi serta melakukan MOU dengan Media Massa.

**Tabel II.68**

MATRIKS 1 - SASARAN CAPAIAN INDIKATOR : Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

| Kode Indikator | Target/Indikator SDG'S | Sumber Data | Satuan | Kondisi Awal (2017) | Target 2020 | Capaian 2020 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tujuan SDGs : Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan** | | | | | | | |
| **Target Global 1.2 : Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional** | | | | | | | |
| 1.2.1. | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. | Susenas BPS | % | 5,3 | 5,1 | 4,53 | |
| **Target Global 1.3 : Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan** | | | | | | | |
| 1.3.1.(a) | Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan. | Dinkes Provinsi | jiwa | 907,997 | 1.275.000 | 1.158.663 | |

| Kode Indikator | Target/Indikator SDG'S | Sumber Data | Satuan | Kondisi Awal (2017) | Target 2020 | Capaian 2020 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.1.(b) | Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan | Disnaker Provinsi, BPJS | Jiwa | - | 2.110 | 120,394 | |
| 1.3.1.(d) | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan | Dinsos Provinsi | Orang | 42.942 | 43.000 | 21.947 | |
| **Target Global 1.4 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro** | | | | | | | |
| 1.4.1.(a) | Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan | Susenas BPS | % | 87,78 | 88,30 | 86,3 | |
| 1.4.1.(b) | Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap | Susenas BPS | % | 58,33 | 60,85 | 55,57 | |
| 1.4.1.(c) | Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin | Susenas BPS | % | 60,17 | 64,05 | 70 | |
| 1.4.1.(d) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan | Susenas BPS | % | 61,42 | 65,12 | 75,06 | |
| 1.4.1.(e) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan | Susenas BPS | % | 75,39 | 77,10 | 92,58 | |
| 1.4.1.(f) | Persentase rumah tangga kumuh | Susenas | % | 3,41 | 3,07 | 3,13 | |

| Kode Indikator | Target/Indikator SDG'S | Sumber Data | Satuan | Kondisi Awal (2017) | Target 2020 | Capaian 2020 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | perkotaan | BPS | | | | | |
| 1.4.1.(g) | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat | Susenas BPS | % | 96,07 | 96,72 | 100,11 | |
| 1.4.1.(h) | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat. | Susenas BPS | % | 70,3 | 70,96 | 101,05 | |
| 1.4.1.(i) | Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/sederajat | Susenas BPS | % | 53,47 | 53,87 | 92,59 | |
| 1.4.1.(j) | Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran | Susenas BPS | % | 82,18 | 85,25 | 93,93 | |
| 1.4.1.(k) | Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN | Susenas BPS | % | 98,87 | 100 | 99,86 | |
| **Target Global 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana** | | | | | | | |
| 1.5.1* | Jumlah korban meninggal, hilang, dan | BPBD Provinsi | Orang | Korban total= | Korban total= | Korban total= 240, | |
| | terkena dampak bencana per 100.000 orang. | | | 22.230, Meninggal = 29 | 22.170, Meninggal = 23 | Meninggal = 63 | |
| 1.5.1.(a) | Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah | BPBD Provinsi | Lokasi | 5 | 1 | 1 | |

## 2. TUJUAN 2 - TANPA KELAPARAN



Tujuan 2 adalah menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Kelaparan didefinisikan sebagai kondisi hasil dari kurangnya konsumsi pangan kronik. Dalam jangka panjang, kelaparan kronis berakibat buruk pada derajat kesehatan masyarakat dan menyebabkan tingginya pengeluaran masyarakat untuk kesehatan. Untuk mencapai tujuan tanpa kelaparan pada tahun 2030, ditetapkan target yang diukur

melalui indikator. Target tersebut adalah menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang (Target Global 2.1). Secara umum target tersebut dalam tahun berjalan dapat tercapai, ditandai dengan Prevalensi ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) dengan capaian 7,57% dari target 13%, Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita dengan capaian 3,88% dari target 15,78%, Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari dengan capaian 6,22% dari target 6,17%.

Terkait target **Global 2.2** dengan indikator menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, bahwa untuk 3 (tiga) sub indikator penyusun dalam tahun berjalan dapat tercapai, yaitu, Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita terjadi penurunan sebesar 4,29% dari target 17,10%, Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta terjadi penurunan sebesar 4,26% dari target 9,0%, Prevalensi anemia pada ibu hamil jua terjadi penurunan yaitu sebesar 7,89% dari target 11,5%. Sementara itu untuk 1 (satu) sub indikator lainnya, yaitu Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif, meskipun tidak mencapai target dalam tahun berjalan tetapi capaiannya meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 55,47% dari target 59,45% dan pada tahun 2019 sebesar 39,64%. Sedangkan untuk sub indikator Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, capaian kinerjanya tidak dapat dilaporkan karena tidak ada data dukungnya. Terkait indikator menggandakan produktivitas pertanian dengan sub indikator Nilai Tambah Pertanian (Target global 2.3), dalam tahun berjalan tercapai yang ditandai dengan peningkatan sebesar Rp. 67.966,03 per tenaga kerja dari target Rp. 61.85,12 per tenaga kerja. Berkenaan dengan indikator mengelola keragaman genetik, dan meningkatkan kapasitas produktif pertanian (Target Global2.5), capaian kinerjanya dalam tahun berjalan tercapai untuk 2 (dua) sub indikator, yaitu Produksi Unggas sebanyak 21.380,86 ekor dari target 14.758,475 ekor, dan Produksi Perikanan tangkap 223.680 ton per tahun dari target 219.300 ton per tahun. Sedangkan untuk 2 (dua) sub indikator lainnya tidak mencapai target, yaitu Produksi Ternak Besar dan Kecil sebanyak 15.310 ekor dari target 51.124 ekor.

GAMBAR 2.3 PREVALENSI STUNTING (PENDEK DAN SANGAT PENDEK) PADA ANAK DI BAWAH LIMA TAHUN/BALITA DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DAN INDONESIA, 2017-2018




Sumber: Pemantauan Status Gizi, Profil Kesehatan Indonesia, KEMENKES

Sama halnya dengan tujuan pertama, Tujuan 2 Tanpa Kelaparan juga mengalami masalah dan kendala dalam pencapaiannya, yaitu :

1. Masih kurangnya kapasitas tenaga lapangan unit dan Pokmas, khususnya yang berhubungan langsung dengan transformasi program kepada masyarakat (seperti : Penyuluh Pertanian, Kader Kesehatan, TPD, Penyuluh KB, Kader BKB BKR dan BKL).
2. Peran dan kinerja lembaga pengelolaan dan pengawasan program belum optimal (seperti : Dewan Ketahanan Pangan, BKM, Kelompok Tani, SLPHT).

3. Sebagai konsekuensi dampak covid-19 yang menyebabkan terjadinya refocusing anggaran, sehingga terjadinya pengurangan atau ditiadakannya bebarapa kegiatan yang berkaitan dengan dukungan pecapaian indikator SDGs.
4. Beberapa Regulasi di bidang ketahanan pangan tidak dapat disusun.
5. Beberapa Evan Daerah dalam meningkatkan ketahanan pangan tidak dapat dilaksanakan
6. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan DPRD belum maksimal serta masih kurangnyanya kerjasama dengan media massa, sehingga jangkauan program belum begitu massif.

Sekaitan permasalahan dimaksud, dalam rangka mewujudkan pencapaian target yang maksimal tahun 2030, tentunya diperlukan rencana tindak lanjut untuk mengatasi masalah dan kendala yang dihadapi, baik dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia maupun penguatan organisasi dan reformasi kelembagaan serta perlunya dukungan kerjasama dengan pihak swasta untuk pembiayaan bantuan modal usaha. Disamping itu, diperlukan regulasi dalam bentuk Rencana Induk Pengembangan Perekonomian dan Teknologi Pangan serta serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan DPRD.

**Tabel II.69**

MATRIKS 1 - SASARAN CAPAIAN INDIKATOR : Tujuan 1 Tanpa Kelaparan

| Kode Indikator | Target/Indikator SDG'S | Sumber Data | Satuan | Kondisi Awal (2017) | Target 2020 | Capaian 2020 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tujuan SDGs : Tujuan 2 Tanpa Kelaparan** | | | | | | | |
| **Target Global 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun** | | | | | | | |
| 2.1.1* | Prevalensi ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment). | BPS | % | 13 | 13 | 7,57 | |
| 2.1.1.(a) | Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita | BPS | % | 16,7 | 15,78 | 3,88 | |
| 2.1.2.(a) | Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari | BPS | % | 6,6 | 6,17 | 6,22 | |
| **Target Global 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula** | | | | | | | |
| 2.2.1* | Prevalensi stunting (pendek dan sangat | BPS | % | 18 | 17,10 | 4,29 | |

| Kode Indikator | Target/Indikator SDG'S | Sumber Data | Satuan | Kondisi Awal (2017) | Target 2020 | Capaian 2020 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita | | | | | | |
| 2.2.1.(a) | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta | BPS | % | 9,3 | 9,0 | 4,26 | |
| 2.2.2* | Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe | BPS | % | 7,98 | 7,54 | - | - |
| 2.2.2.(a) | Prevalensi anemia pada ibu hamil | BPS | % | N.A | 11,5 | 7,89 | |
| 2.2.2.(b) | Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI | BPS | % | 42,2 | 59,45 | 55,47 | |
| | eksklusif | | | | | | |
| **Target Global 2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.** | | | | | | | |
| 2.3.1* | Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di 16eneti pertanian (rupiah per tenaga kerja). | BPS | Rupiah per Tenaga Kerja | N.A | 61.85,12 | 67,966. 03 | |
| **Target Global 2.5 Pada tahun 2020, mengelola keragaman 16enetic benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya 16enetic dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional.** | | | | | | | |
| 2.5.3 | Produksi Ternak Besar dan Kecil | BPS | ekor | 49.657 | 51.124 | 15.310 | |
| 2.5.4 | Produksi Unggas | BPS | ekor | 14.362.174 | 14.758.475 | 21.381 | |
| 2.5.5 | Produksi Perikanan tangkap | BPS | Ton/th | 208 019,70 | 219.300 | 223,680 | |
| 2.5.5 | Produksi Perikanan Budidaya | BPS | Ton/th | 3.844 | 11.200 | 7,150 | |

## 3. TUJUAN 3 - KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA

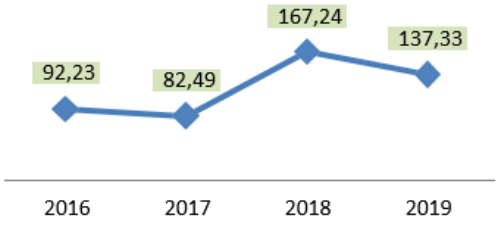



Tujuan ketiga, Kehidupan Sehat dan Sejahtera, memiliki 7 target dan 36 Indikator. Dari ketujuh target dan 36 (tiga puluh enam) indicator tersebut, sebanyak 12 indikator yang mencapai target SDG's, 5 (lima Indikator) tidak atau sulit untuk tercapai dan 4 (empat) indicator yang akan tercapai sedangkan sebanyak 15 (lima belas) indicator tidak dapat dilaporkan karena ketidaktersediannya data pada tahun 2019 dan 2020.

## A. Target Global 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.

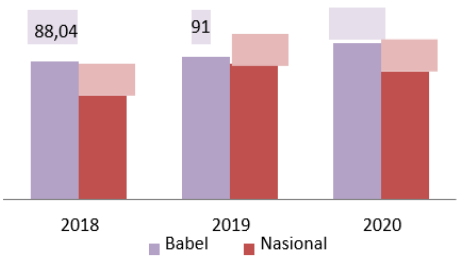
### a) Mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI).

Upaya pemerintah mengurangi AKI adalah memastikan setiap persalinan dilakukan di fasilitas kesehatan dan ditangani tenaga kesehatan. Menurut Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI), persalinan di fasilitas kesehatan meningkat setiap tahunnya. Persentasenya adalah 88,04 % (2018), 91 % (2019) dan 99,67 % (2020). Data Susenas menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan capaia n Nasional dimana tahun 2018 sebesar 82,74 %, tahun 2019 menjadi 85,94 % dan tahun 2020 meningkat menjadi 95,16 %. Sedangkan Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berfluktuatif dalam 5 (lima) tahun terakhir, dimana pada tahun 2016 sebesar 92,23, tahun 2017 menurun menjadi 82,49 dan meningkat menjadi 137,33 per 100.000 kelahiran pada tahun 2019. Secara nasional AKI telah menurun dari 346 kematian (SP 2010) menjadi 305 kematian per 100.000 kelahiran hidup (SUPAS 2015). Artinya terjadi penurunan sebesar 2,4% setiap tahun (*Annual ReductionRate*/ARR). Untuk capaian SDG's dengan indicator

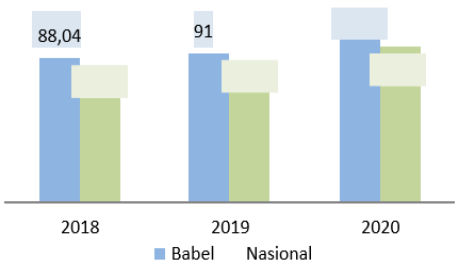



Gambar 2.1 Angka Kematian Ibu (AKI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2019

Angka Kematian Ibu (AKI) sulit tercapai dan perlu kerja keras Pemerintah daerah dalam menurunkan angka kematian Ibu (AKI) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan tahun 2030.




Gambar 2.2. Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih



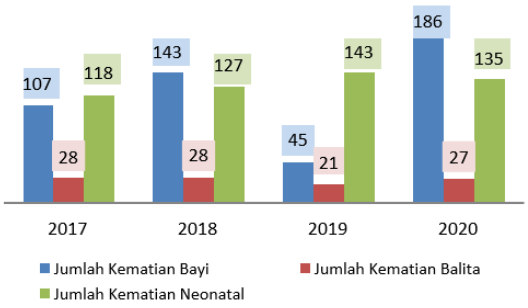

Gambar 2.3. Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih

Sedangkan untuk Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkat dalam 3 (tiga) tahun terakhir dimana pada tahun 2018 sebesar 97,06 meningkat menjadi 98,08 pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 menjadi 99,67 persen.

**b) Mengakhiri Kematian Bayi dan Balita.**

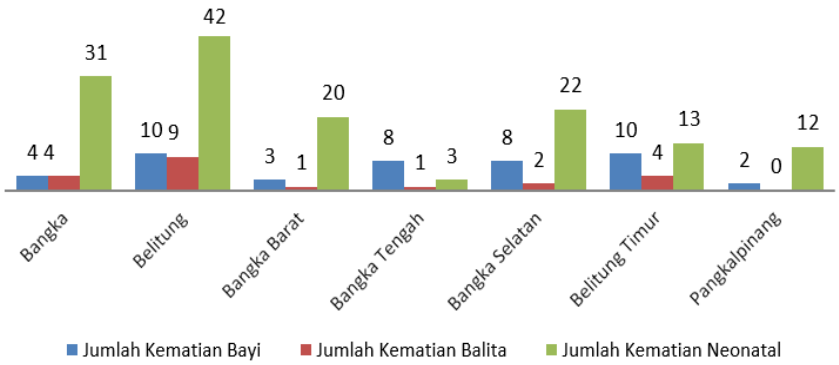


Kematian bayi dan Balita merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat dan menjadi ukuran capaian pembangunan di Indonesia. Jumlah kematian bayi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung berfluktuasi dalam lima tahun terakhir, tahun 2017 sebesar 107 kasus, menurun menjadi 45 kasus pada tahun 2019 dan meningkat kembali menjadi 186 kasus pada tahun 2020. Sedangkan jumlah kematian balita relatif stabil, yang mana pada tahun 2017 sebanyak 28 kasus menurun pada tahun 2019 menjadi 21
kasus dan meningkat kembali menjadi 27 kasus pada tahun 2020. Sedangkan untuk kematian neonatal cenderung berfluktuatif, pada tahun 2017 jumlah kematian neonatal atau neonatus sebanyak 118 kasus meningkat pada tahun 2019 menjadi 143 kasus kematian, namun kembali turun menjadi 135 kasus pada tahun 2020. Secara keseluruhan untuk capaian SDG dengan indicator angka kematian bayi (AKB) dan Angka Kematian Neonatal/Neonatus sulit tercapai dan perlu kerja keras dari segenap perangkat daerah. Sedangkan untuk Angka Kematian Balita (AKABA) akan tercapai pada tahun 2030. Hal ini terlihat dari tren capaian 5 (lima) tahun terakhir. Untuk menyelesaikan persoalan masih tingginya Angka Kematian Bayi (ABI) dan Angka Kematian Neonatus ke depan antara lain : peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, serta kegawatdaruratan maternal, Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED), Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK); pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan bagi ibu hamil; peningkatan surveilans gizi; peningkatan kompetensi petugas gizi dan KIA; 5) pengetahuan ibu tentang pola asuh bayi dan anak;dan 6) peningkatan pencapaian imunisasi dasar lengkap.




Gambar 2.4.Jumlah Kematian Bayi, Balita dan Nenatus tahun 2017-2020
Sumber : Profil Kesehatan Kemenkes, Profil Kesehatan Provinsi Kep. Babel 2020

Sedangkan untuk capaian Kabupaten/Kota, jumlah Kematian Bayi (AKB) tertinggi di Kabupaten Belitung dan Belitung Timur sebesar 10 anak pada tahun 2019 dan diikuti oleh Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Selatan sebanyak 8 anak, sedangkan terendah di Kota Pangkalpinang sebanyak 2 anak.




Gambar 2.5. Jumlah Kematian Bayi, Balita, dan Neonatus untuk Kabupaten/Kota 2019
Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Kep. Bangka Belitung tahun 2019

## B. Target Global 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya

### a) Mengakhiri Epidemi Penyakit Menular

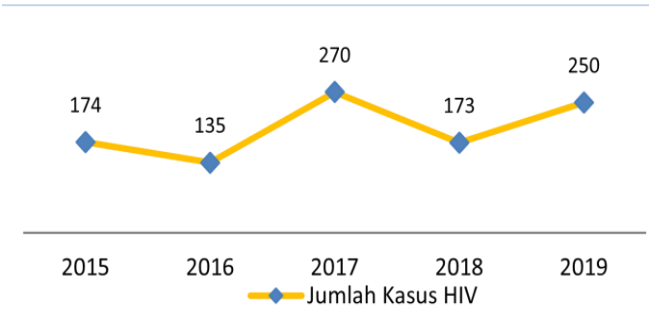
Pengendalian penyakit terdiri dari 2 (dua) Jenis yaitu pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular. Pengendalian penyakit sebagai upaya penurunan insidens, prevalens, morbiditas atau mortalitas dari suatu penyakit mempunyai peranan penting untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat.Indikator yang digunakan dalam menilai derajat kesehatan suatu masyarakat adalah angka kesakitan dan kematian penyakit.Penyakit menular meliputi penyakit menular langsung, penyakit yang dapat dikendalikan dengan imunisasi dan penyakit yang ditularkan melalui binatang.Penyakit tidak menular meliputi upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit tidak menular tertentu.

**1) HIV dan AIDS**

Human Immunodeficiency Virus (HIV) adalah virus yang menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Infeksi tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan kekebalan sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain. Sedangkan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) adalah sekumpulan gejala yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi oleh HIV.Orang yang terinfeksi HIV memerlukan pengobatan Antiretroviral (ARV) untuk menekan jumlah virus HIV di dalam tubuh. Virus yang tertekan (tersupresi) tidak berpotensi menular kepada orang lain, dan orang dengan HIV akan memiliki kualitas hidup yang baik. Penemuan kasus pada stadium awal dan segera mendapatkan pengobatan ARV, membuat seseorang tidak jatuh pada HIV stadium lanjut (AIDS).Pada HIV stadium lanjut (AIDS) terjadi potensi masuknya infeksi-infeksi lainnya yang dikenal dengan infeksi oportunistik. Program pengendalian HIV di Indonesia bertujuan untuk: 1) Menurunkan hingga meniadakan infeksi baru; 2) Menurunkan hingga meniadakan kematian terkait AIDS; dan 3) Menurunkan stigma dan diskriminasi.




Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan ke-9 sebagaiprovinsi dengan penderita HIV-AIDS terbanyak. Kasus HIV/AIDS menunjukkan kecenderungan meningkat dalam lima tahun terakhir, namun prevalensi masih dapat ditahan di bawah 0,5%. Jumlah ODHA (orang dengan HIV dan AIDS) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung berfluktuasi dari 135 orang tahun 2016 menjadi 270 orang pada 2017, namun menurun pada tahun 2018 menjadi 173 orang dan meningkat kembali pada tahun 2019 menjadi 250 orang. Sedangkan untuk Kabupaten Kota, kasus HIV dan AIDS pada tahun 2019 terbanyak di Kota Pangkalpinang sebanyak 106 orang atau kasus dan terendah di Kabupaten Belitung Timur sebanyak 6 orang atau kasus. Hal ini disebabkan karena Kota Pangkalpinang merupakan pintu masuk provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga banyaknya kunjungan




Gambar 2.6. Jumlah Kasus HIV di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2019
*"Data termutakhir"*

wisatawan yang masuk melalui Kota Pangkalpinang. Sedangkan untuk target capaian SDG untuk kasus dan prevalensi HIV sampai dengan tahun 2019 sulit tercapai.

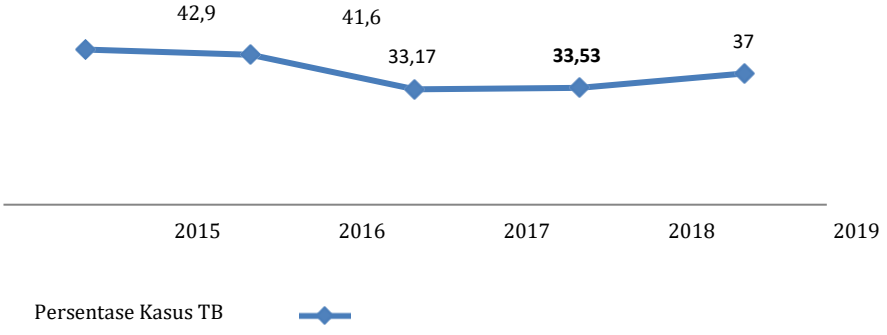
**Tabel II.70**
Jumlah kasus HIV dan AIDS 2016-2019

| No | Kabupaten/Kota | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(4)* | *(5)* | *(7)* | *(8)* |
| 1 | Bangka | 33 | 70 | 58 | 58 |
| 2 | Belitung | 22 | 31 | 23 | 32 |
| 3 | Bangka Tengah | 5 | 13 | 12 | 13 |
| 4 | Bangka Barat | 15 | 34 | 21 | 26 |
| 5 | Bangka Selatan | 6 | 8 | 7 | 9 |
| 6 | Belitung Timur | 1 | 3 | 7 | 6 |
| 7 | Kota Pangkalpinang | 63 | 111 | 45 | 106 |
| | **Kepulauan Bangka Belitung** | **111** | **270** | **173** | **250** |

*Sumber : BBDA Provinsi Kep. Bangka Belitung "Data termutakhir"*

**2) Tuberkulosis (TB)**

Tuberkulosis (TBC) saat ini masih merupakan masalah kesehatan masyarakat baik di Indonesia maupun internasional sehingga menjadi salah satu tujuan pembangunan kesehatan berkelanjutan (SDGs).Tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis dan merupakan salah satu dari 10 penyebab utama kematian di seluruh dunia.Indonesia berada pada peringkat ke-2 dengan penderita TB tertinggi di Dunia setelah India.Secara global, diperkirakan 10 juta orang menderita TB pada tahun 2019.Meskipun terjadi penurunan kasus baru TB, tetapi tidak cukup cepat untuk mencapai target Strategi END TB tahun 2020, yaitu pengurangan kasus TB sebesar 20% antara tahun 2015 – 2020.Pada tahun 2015 – 2019 penurunan kumulatif kasus TB hanya sebesar 9% (WHO, Global Tuberculosis Report, 2020). Begitu juga dengan kematian akibat TB, jumlah kematian pada tahun 2019 sebesar 1,4 juta. Secara global kematian akibat TB per tahun menurun secara global, tetapi tidak mencapai target Strategi END TB tahun 2020 sebesar 35% antara tahun 2015 – 2020. Jumlah kematian kumulatif antara tahun 2015 – 2019 sebesar 14%, yaitu kurang dari setengah dari target yang ditentukan (WHO, Global Tuberculosis Report, 2020).

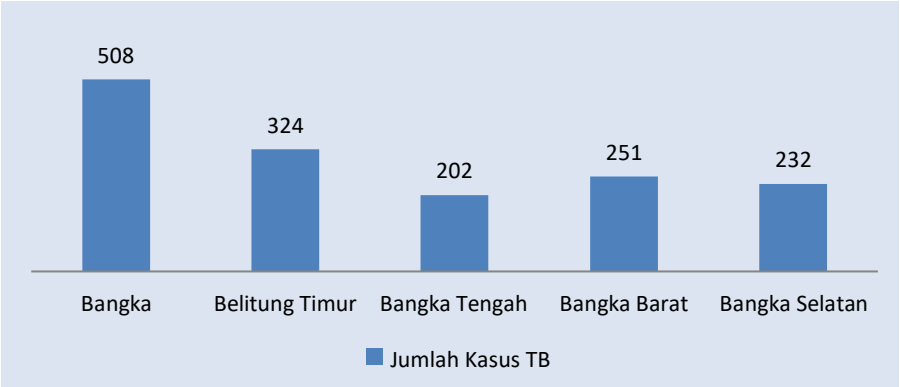


Gambar 2.6. Persentase kasus TB di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2019 *"Data termutakhir"*

Persentase kasus TB di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2019 cenderung berfluktuatif dimana pada tahun 2015 kasus Tb sebesar 42,9 % turun menjadi 33,17 % pada tahun 2017 namun meningkat lagi menjadi 37 % pada tahun 2019. Sedangkan untuk Kabupaten Kota kasus TB terbanyak di Kabupaten Bangka sebanyak 508 kasus dan diikuti Kota pangkalpinang sebanyak 480 kasus dan terendah sebanyak 173 kasus di Kabupaten Belitung Timur. Untuk capaian SDG's dengan indicator kasus Tuberkulosis pada tahun 2019 sulit tercapai dan perlu kerja keras Pemerintah daerah dalam menurunkan jumlah penderita kasus TB di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**Grafik II.96**

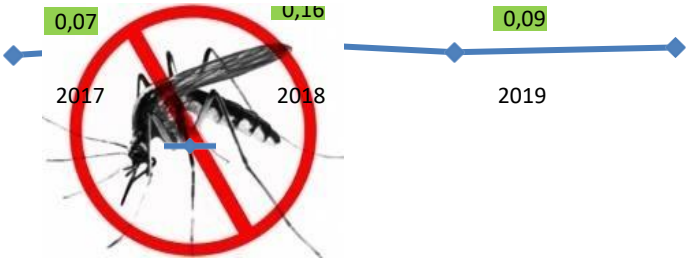
Jumlah kasus TB Tahun 2016-2019




### 3) Penyakit Malaria

Penyakit Malaria merupakan salah satu penyakit menular yang ditularkanoleh nyamuk *Anopheles* sampai saat ini semakin dapat dikendalikan.Strategiutama dalam mengendalikan penyakit malaria yaitu menemukan dan treatment segera terhadap setiap penduduk yang terindikasi atau menderita malaria, mengendalikan penyebaran/ perkembangan nyamuk *Anopheles* melalui KIE pada keluarga dan masyarakat agar melindungi diri dari gigitan nyamuk dan penatalaksanaa n lingkungan yang baik. Indikator utama keberhasilan pengendalian malaria disuatu daerah antara lain ditentukan oleh jumlah kasus malaria per-1000 penduduk atau *Annual Parasit Rate* (API) <1000 serta % jumlah sediaan darah yang positif atau *Slide Positivity Rate* (SPR). Indikator lainnya dapat dilihat dari derajat kesehatan ibu anak, hilangnya waktu belajar anak dan waktu kerja produktif masyarakat bahkan perkembangan pariwisata di suatu daerah. Perkembangan Kejadian malaria di tahun 2020 sebesar 0.12, ini menunjukkan bahwa sebanyak 12 orang provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terkena malaria, angka ini meningkat dibandingkan tahun 2019 yang hanya 0.09 atau sebanyak 9 orang, namun lebih rendah dibandingkan tahun 2018 sebesar 0.16 kejadian.

Kejadian Malaria per 1000 orang




Gambar 2.6. Angka Kejadian Malaria per 1.000 Orang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung *"Data termutakhir"*

Sedangkan untuk sertifikat eliminasi malaria di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2020 sebanyak 6 sertifikat eliminasi malaria yaitu Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur serta Kabupaten Bangka Tengah. Keberhasilan dalam pengendalian malaria tersebut merupakan suatu prestasi dan prestise serta investasi dalamrangka menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat dan bangsa.Oleh karena itu, upaya pengendalian penyakit malaria yang efektif di setiap wilayah dan tingkat pelayanan kesehatan dan di setiap tingkat administrasi pemerintahan harus dipelihara kesinambungannya dan harus menjadi bagian tak terpisahkan dalam upaya mewujudkan keberhasilan pembangunan program dan sector lainnya.

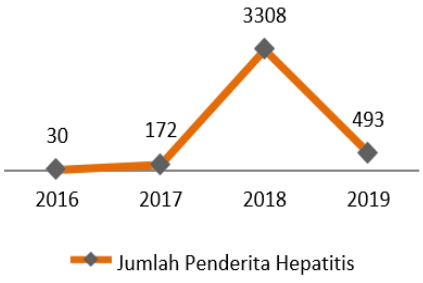
**4) Penyakit Hepatitis**

Hepatitis merupakan peradangan hati yang dapat berkembang menjadi fibrosis, sirosis atau kanker hati. Hepatitis disebabkan oleh berbagai faktor, seperti infeksi virus, zat beracun, dan penyakit autoimun. Penyebab paling umum Hepatitis adalah infeksi Virus Hepatitis A, B, C, D dan E. Untuk Hepatitis A dan

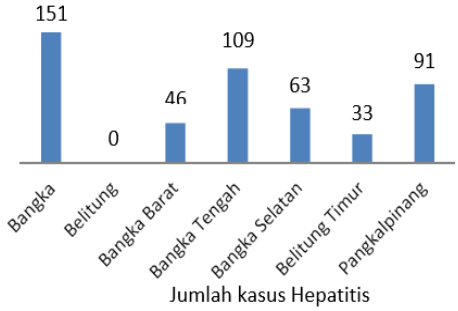


Hepatitis E, besaran masalah tidak diketahui dengan pasti. Namun mengingat kondisi sanitasi lingkungan, higiene dan sanitasi pangan, serta perilaku hidup bersih dan sehat yang belum optimal, maka masyarakat Indonesia merupakan kelompok berisiko untuk tertular Hepatitis A dan Hepatitis E. Laporan yang diterima oleh Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa setiap tahun selalu terjadi KLB Hepatitis A, sedangkan untuk Hepatitis E jarang dilaporkan di Indonesia. Hasil RISKESDAS tahun 2018 memperlihatkan prevalensi hepatitis berdasarkan riwayat diagnosis dokter sebesar 0,39% dengan disparitas antar provinsi sebesar 0,18% (Kep. Bangka Belitung) dan 0,66% (Papua). Berdasarkan kelompok umur, hepatitis menyebar hampir merata pada seluruh kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan tempat tinggal.

Perkembangan kasus Hepatitis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam lima tahun terkhir cenderung berfluktuasi dimana pada tahun 2017 sebanyak 172 kasus, tapi pada tahun 2018 meningkat cukup tinggi menjadi 3.308 kasus dan menurun kembali di tahun 2019 menjadi 493 kasus. Sedangkan untuk Kabupaten Kota, kasus hepatitis tertinggi di Kabupaten Bangka sebesar 151 kasus dan diikuti oleh Kabupaten Bangka tengah sebesar 109 kasus, sedangkan terendah di Kabupaten Belitung Timur sebanyak 33 kasus. Untuk capaian SDG's dengan indikator jumlah kasus hepatitis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan capaian tahun 2019 sebanyak 493 kasus, termasuk tinggi dan perlu kerja keras dari pemerintah daerah untuk menurunkan jumlah kasus hepatitis sampai tahun 2030 nanti.




Gambar 2.6. Jumlah Kasus Hepatitis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung




Gambar 2.6. Jumlah kasus Hepatitis per Kabupaten kota Tahun 2019

**5) Penyakit Filariasis**

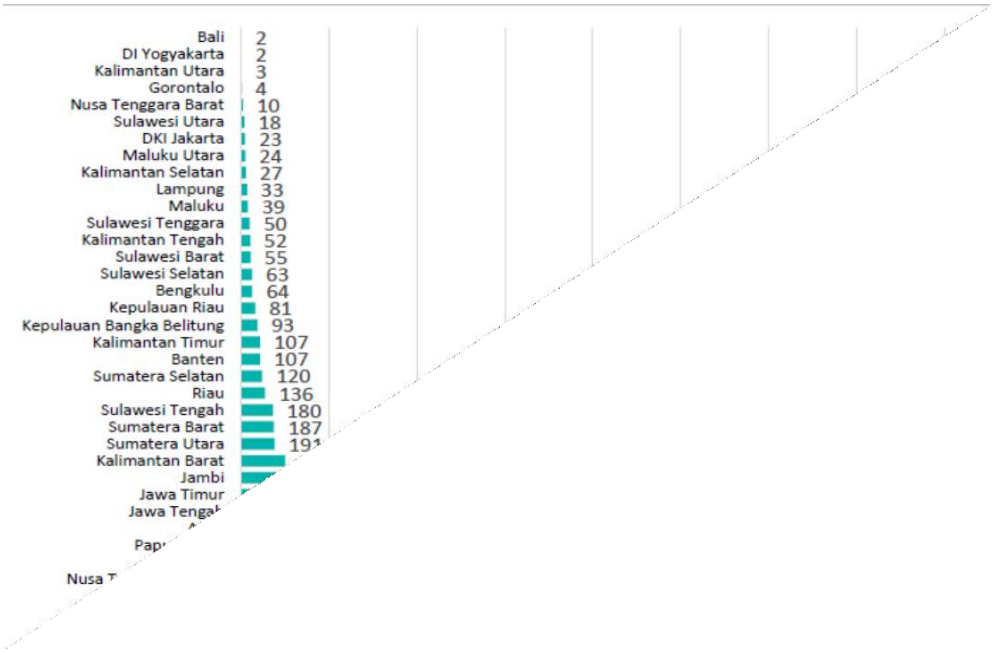
Filariasis adalah penyakit menular menahun yang disebabkan oleh cacing filaria dan ditularkan melalui nyamuk. Di Indonesia, cacing filaria terdiri dari tiga spesies yaitu *Wuchereria bancrofti*, *Brugia malayi* dan *Brugia timori*. Penyakit ini menginfeksi jaringan limfe (getah bening). Filariasis menular melalui gigitan nyamuk yang mengandung cacing filaria dalam tubuhnya. Dalam tubuh manusia, cacing tersebut tumbuh menjadi cacing dewasa dan menetap di jaringan limfe sehingga menyebabkan pembengkakan di kaki, tungkai, payudara, lengan dan organ genital. WHO menetapkan kesepakatan global sebagai upaya untuk mengeliminasi filariasis pada tahun 2020 (*The Global Goal of Elimination of Lymphatic Filariasis as a Public Health problem by The Year 2020*). Saat ini di dunia terdapat 1,3 miliar penduduk yang berisiko tertular penyakit filariasis atau yang dikenal juga dengan penyakit kaki gajah yang berada pada lebih dari 83 negara dan 60% kasus berada di Asia Tenggara.




Di Indonesia, pada tahun 2020 terdapat 9.906 kasus filariasis yang tersebar di 34 Provinsi. Angka ini terlihat menurun dari data tahun sebelumnya karena dilaporkan beberapa kasus meninggal dunia dan adanya perubahan diagnosis sesudah dilakukan validasi data/konfirmasi kasus klinis kronis yang dilaporkan

tahun sebelumnya. Grafik berikut menggambarkan kondisi kasus filariasis di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir.

Provinsi dengan kasus tertinggi terdapat di wilayah timur Indonesia yaitu Provinsi Papua sebanyak 3.615 kasus, Nusa Tenggara Timur sebanyak 1.534 kasus, sedangkan kasus kronis Filiriasis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 sebesar 93 kasus. Untuk capaian SDG's dengan indikator kasus kronis Filiriasis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus kerja keras karena target yang ditentukan sampai dengan tahun 2030 adalah sebesar < 1%.




*Gambar 2.6. Jumlah Kasus kronis Filariasis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022*

### 6) Penyakit Kusta

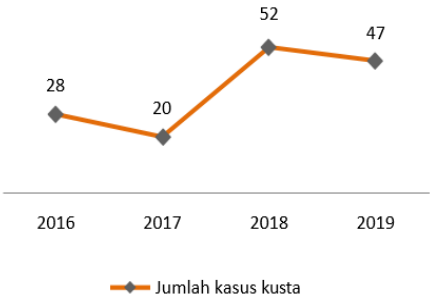
Penyakit kusta adalah penyakit menular, menahun yang disebabkan oleh kuman kusta (*mycobacterium leprae*) yang hingga saat ini masih dapat ditemukan di Indonesia. Penyakit ini merupakan penyakit yang dapat menyebabkan kecacatanapabila tidak ditemukan secara dini dan tidak ditangani secara tepat. Kecacatan yang ditimbulkan tentunya dapat merugikan penderita dan keluarganya, bahkan masyarakat dan negara. pembangunan kesehatan, dalam hal ini program nasional pengendalian kusta terus melakukan berbagai upaya untuk kesinambungan kegiatan pengendalian kusta dalam menurunkan beban penyakit kusta di Indonesia. Penyakit kusta pada umumnya terdapat di negara – negara



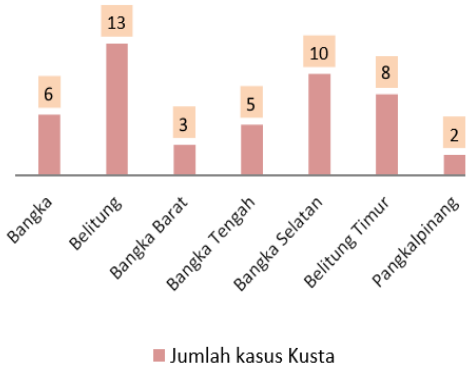
yang sedang berkembang sebagai akibat keterbatasan kemampuan negara tersebut dalam memberikan pelayanan yang memadai dalam bidang kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial ekonomi pada masyarakat.

Tahun 2018 jumlah pasien kusta di Indonesia yang terdaftar adalah 18.529 kasus sedangkan angka kasus kusta baru dilaporkan 17.017 kasus dengan angka prevalensi 0,699 per 10.000 penduduk, dan menjadikan Indonesia berada di peringkat ke-3 di Dunia setelah India dan Brazil. Persentase kasus baru tanpa cacat 85,19 %, proporsi kasus baru anak sebesar 10,94%. Penderita cacat dan anak di Indonesia menunjukkan masih berlangsungnya penularan dan masih tingginya angka keterlambatan dalam penemuan kasus baru. Indonesia sudah mencapai eliminasi kusta pada tahun 2000, namun demikian berdasarkan data yang dilaporkan jumlah penderita baru sampai saat ini tidak menunjukkan adanya penurunan yang bermakna.

Provinsi yang dinyatakan telah mencapai eliminasi jika angka prevalensi <1 per 10.000 penduduk. Berikut perubahan peta eliminasi tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2020 sebanyak dua puluh delapan provinsi telah mencapai eliminasi kusta, bertambah dua provinsi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu Sulawesi Selatan dan Gorontalo. Sedangkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah mendapatkan sertifikat eliminasi kusta yang telah diberikan oleh kementrian kesehatan, dan 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah mencapaieliminasi kusta pada tahun 2019. Untuk capaian SDG's dengan indicator jumlah kasus kusta akan tercapai sampai dengan tahun 2030, hal ini terlihat dari kasus yang terjadi dalam 5 (lima) tahun terakhir yang sudah melebihi target nasional sebesar < 5 % kasus per 10.000 penduduk.




Jumlah Kasus Hepatitis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2019




Jumlah kasus Kusta per Kabupaten kota Tahun 2019

## C. Target Global 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.

### a) Mengakhiri Kematian Akibat Penyakit Tidak Menular (PTM)

Penyakit tidak menular (PTM) merupakan penyakit yang tidak disebabkan oleh infeksi mikroorganisme seperti protozoa, bakteri, jamur, maupun virus. Penyakit jenis ini bertanggungjawab terhadap sedikitnya 70% kematian di dunia. Meskipun tidak dapat ditularkan dari orang ke orang maupun dari binatang ke orang, lemahnya pengendalian faktor risiko dapat berpengaruh terhadap peningkatan kasus setiap tahun. Hal ini sejalan dengan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007, 2013, dan 2018 yang menunjukkan kecenderungan peningkatan prevalensi PTM seperti diabetes, hipertensi, stroke, dan penyakit sendi/rematik/encok.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat, meningkatnya urbanisasi, terjadinya perubahan iklim dan transisi pekerjaaan serta kemajuan teknologi menyebabkan terjadinya pola hidup sedentary di masyarakat dan berdampak pada timbulnya beban ganda akibat PTM dan penyakit infeksi emerging. Gambaran beban ganda semakin terlihat nyata saat masa pandemi Covid-19 ini dan menurut WHO meningkatnya penyakit tidak menular terutama didorong oleh empat factor risiko utama yaitu pola makan yang tidak sehat, kurang aktivitas fisik, penggunaan tembakau, dan penggunaan alkohol yang berbahaya. Penyakit tidak menular menimbulkan konsekuensi kesehatan yang berdampak bagi individu, keluarga dan komunitas, dan mengancam sistem kesehatan. Besarnya biaya sosial ekonomi yang disebabkan oleh PTM membuat pencegahan dan pengendalian penyakit ini menjadi hal yang penting pada saat ini.

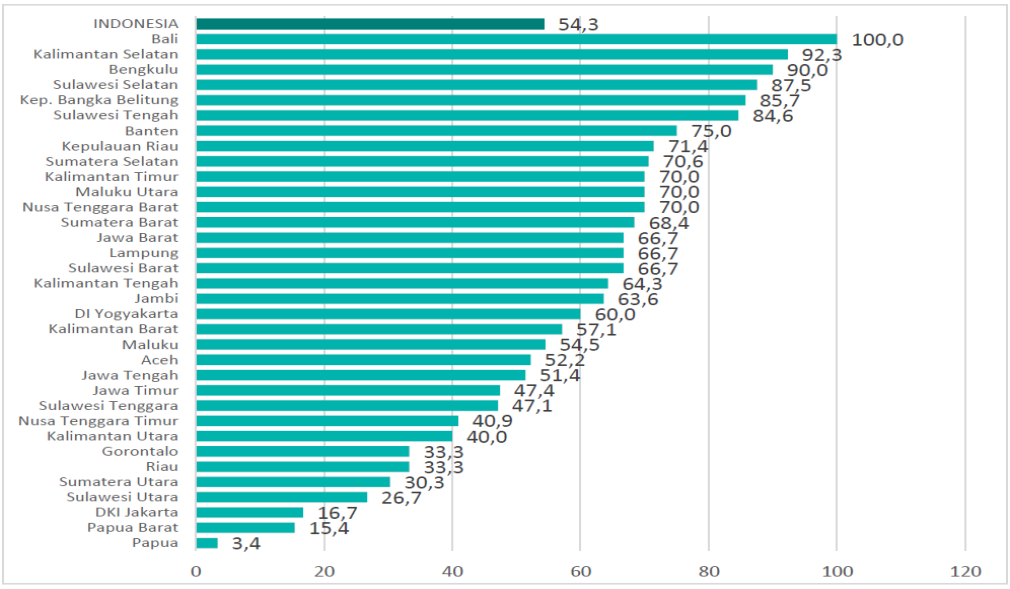
**a. Pengendalian konsumsi hasil tembakau**




Salah satu upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok yaitu melalui pengembangan kawasan tanpa rokok dengan mendorong terbentuknya peraturan dan kebijakan daerah serta implementasinya. Dengan indikator ini diharapkan dapat mendorong terciptanya manusia Indonesia yang sehat, berkualitas, dan produktif. Pada tahun 2020 terdapat sebanyak 285 dari 324 kabupaten/kota yang ditargetkan dapat menerapkan kawasan tanpa rokok (KTR). Dengan demikian target tahun 2020 tidak tercapai. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan belum semua pemerintah daerah kabupaten/kota memprioritaskan penerapan KTR dan masih rendahnya dukungan dari pemerintah daerah dalam membuat regulasi KTR. Namun pencapaian indikator kinerja secara kuantitas dan kualitas dalam implementasi kawasan tanpa rokok tetap didorong dengan melakukan pengawasan secara berkesinambungan dan dibentuknya satuan tugas dalam implementasi kawasan tanpa rokok di daerah.

Sebanyak 54,3% provinsi di Indonesia telah menerapkan KTR, bahkan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali telah menerapkan peraturan tersebut. Kalimantan Selatan dan Bengkulu juga hampir seluruh kabupaten/kotanya menerapkan KTR dengan masing-masing capaian 92,3% dan 90%. Namun terjadi kesenjangan antar provinsi, capaian terendah yaitu Papua hanya sebanyak 3,4%

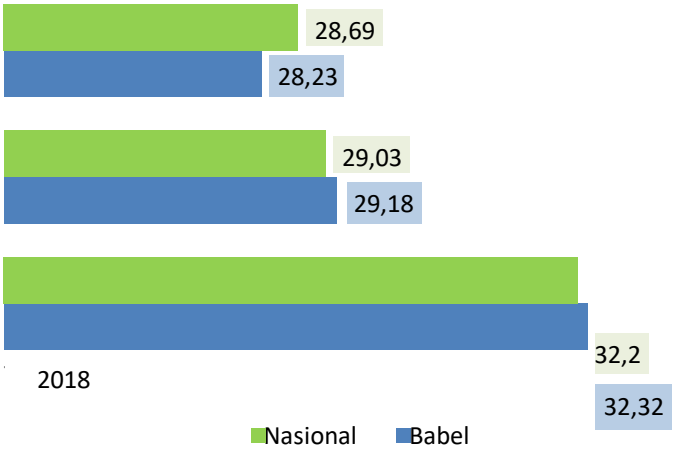
kabupaten/kota yang menerapkan KTR. Sedangkan Untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 85.7% Kabupaten/Kota yang menerapkan KTR pada tahun 2020.




Sumber: Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2021

**Grafik II.97** Persentase Kab/Kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok menurut Provinsi Tahun 2020 "Data termutakhir"

Sedangkan jumlah penduduk provinsi kepulauan bangka Belitung yang merokok dalam 5 (lima) tahun terakhir cenderung menurun, yang mana pada tahun 2018 sebesar 32,32 persen menurun menjadi 29,18 persen pada tahun 2019 dan menurun kembali pada tahun 2020 menjadi 28,23 dan lebih rendah dari capaian Nasional sebesar 28,69 persen. Tren penurunan ini menunjukkan perbaikan yang positif dalam hal kesadaran masyarakat akan buruknya kebiasan merokok terutama bagi kalangan remaja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk capaian SDG's dengan indicator persentase merokok pada penduduk umur > 15 tahun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2020 sebesar 28,23 persen masih sangat tinggi dan perlu kerja keras untuk mencapai target sampai dengan tahun 2030.

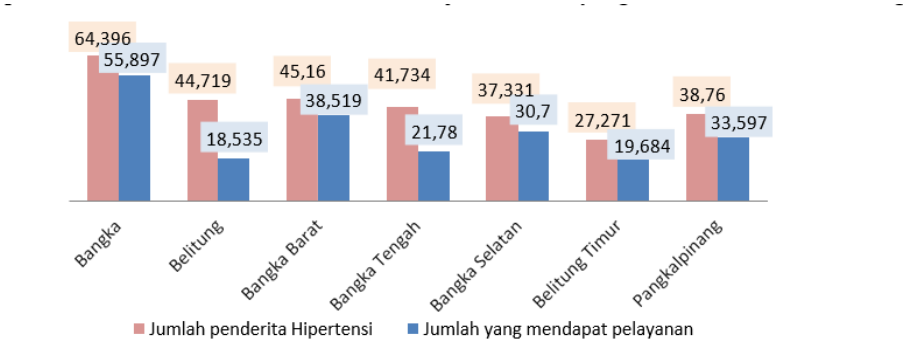



**Grafik II.98** Persentase Kab/Kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok menurut Provinsi Tahun 2020 "Data termutakhir"

**b. Hipertensi**

Hipertensi adalah istilah medis dari penyakit tekanan darah tinggi. Kondisi ini dapat mengakibatkan berbagai komplikasi kesehatan yang membahayakan nyawa sekaligus meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung, stroke, bahkan kematian. Tekanan darah bisa diartikan sebagai kekuatan yang diberikan oleh sirkulasi darah terhadap dinding arteri tubuh, yaitu pembuluh darah utama yang berada dalam tubuh. Besarnya tekanan ini bergantung pada resistensi pembuluh darah dan seberapa keras jantung bekerja. Semakin banyak darah yang dipompa oleh jantung dan semakin sempit pembuluh darah arteri, maka tekanan darah akan semakin tinggi.

Hipertensi dapat diketahui dengan rutin melakukan pemeriksaan tekanan darah. Setidaknya, orang dewasa dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan darah, termasuk tekanan darah setiap lima tahun sekali. Seseorang bisa dikatakan mengalami hipertensi bila pembacaan tekanan darah sistolik pada pengukuran selama dua hari berturut-turut menunjukkan hasil yang lebih besar dari 140 mmHg, dan/atau pembacaan tekanan darah diastolik menunjukkan hasil yang lebih besar dari 90 mmHg.



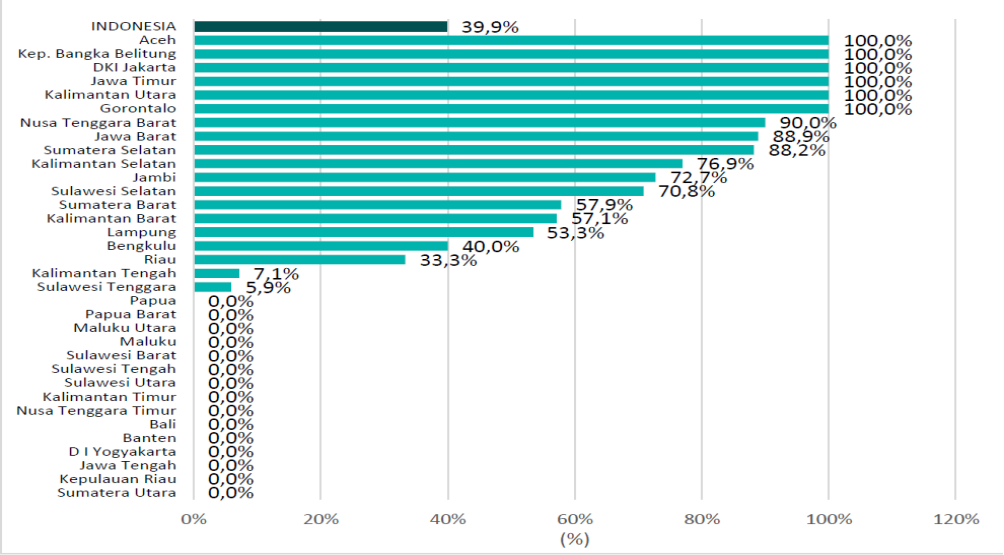

Gambar 2.6. Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok menurut Provinsi Tahun 2020

Pada tahun 2019, dari jumlah estimasi penderita hipertensi berusia>15Tahun sebanyak 299.371 orang, yang mendapatkan pelayanan kesehatan sebanyak 218.712 orang atau sekitar 73,1%. Tertinggi di Kabupaten Bangka (86,8%). Beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pengendalian hipertensi antaralain:

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam deteksi factor resiko hipertensi
2. Gaya hidup yang tidak sehat:
   a. Konsumsi garam yang berlebih
   b. Merokok
   c. Kurang aktivitas fisik

**c. Upaya Kesehatan Jiwa**

Deteksi merupakan langkah awal yang penting untuk membawa orang yang sakit mendapatkan pertolongan medis. Semakin cepat suatu penyakit terdeteksi, dalam hal ini gangguan/penyakit jiwa, akan semakin cepat proses diagnosis dan semakin cepat pula pengobatan dapat dilakukan sehingga diharapkan akan memotong perjalanan penyakit dan mencegah hendaya (abnormalitas fungsi seseorang yang dikaitkan dengan perilaku) dan disabilitas. Deteksi dini masalah kesehatan jiwa dan penyalahguna NAPZA di lakukan terhadap seluruh kelompok usia dengan menggunakan instrumen SDQ (untuk anak usia 4-18 tahun) dan/atau SRQ 20 (usia diatas 18 tahun), serta ASSIST yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan/atau guru terlatih. Dari 330 kabupaten/kota yang ditargetkan pada tahun 2020 terdapat 205 yang memiliki 25% puskesmas melaksanakan deteksi dini kesehatan jiwa dan penyalahgunaan napza.




Sumber : Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2021

**Grafik II.99** Persentase Kab/Kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok menurut Provinsi Tahun 2020 "Data termutakhir"

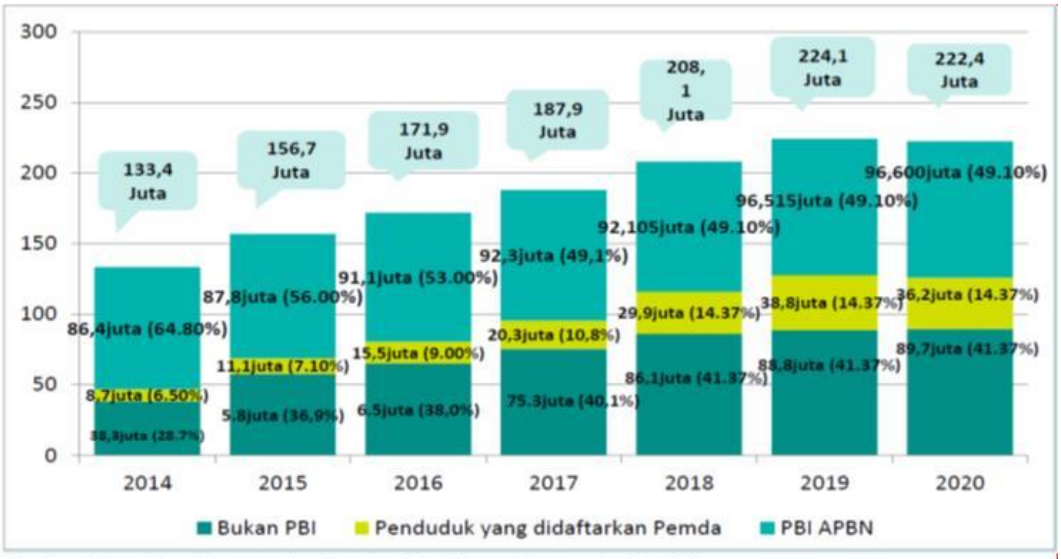
Menurut provinsi, terdapat 6 provinsi yang seluruh kabupaten/kotanya memiliki 25% puskesmas melaksanakan deteksi dini kesehatan jiwa dan penyalahgunaan napza yaitu Aceh, Kep. Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Utara, dan Gorontalo. Namun masih terdapat 15 dari 34 provinsi yang seluruh kabupaten/kotanya belum memiliki 25% puskesmas melaksanakan deteksi dini kesehatan jiwa dan penyalahgunaan napza.

Untuk capaian SDG's dengan indicator puskesmas melaksanakan deteksi dini kesehatan jiwa dan penyalahgunaan napza di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah tercapai 100% tahun 2020.

## D. Target Global 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua

**a) Mencapai Cakupan Kesehatan Universal.**

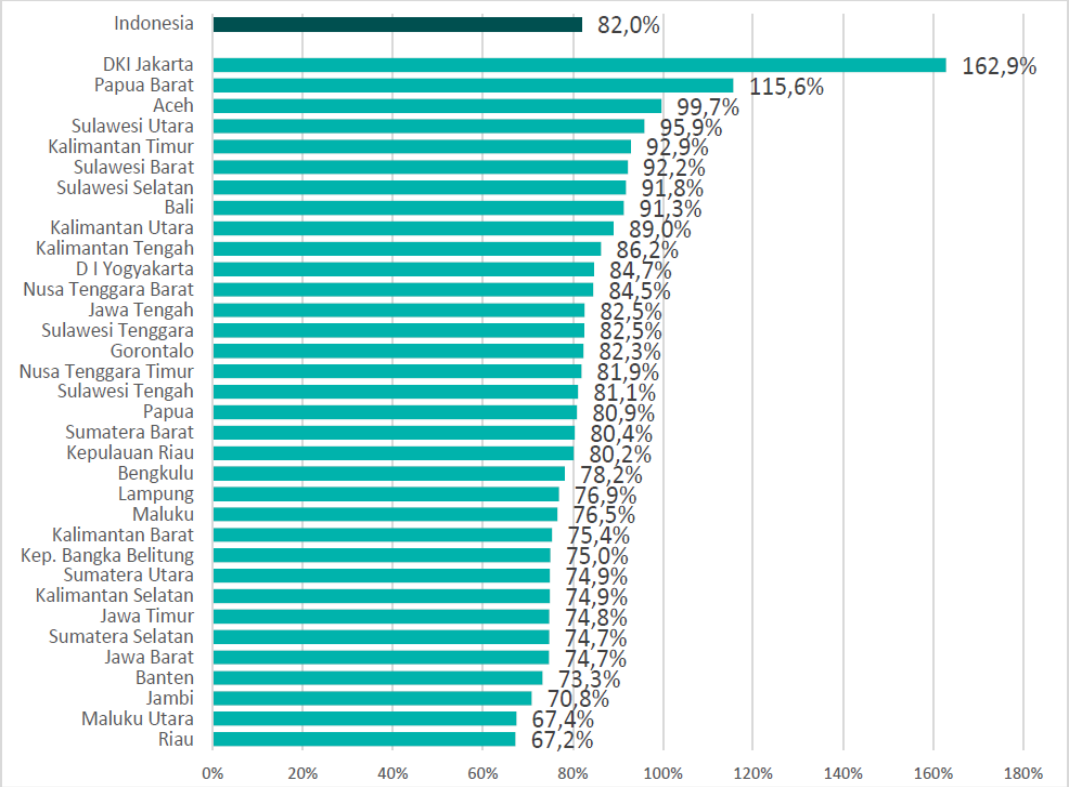
Sesuai dengan amanat yang tercakup dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009, bahwa alokasi belanja di bidang Kesehatan merupakan sesuatu yang mutlak dipenuhi (*mandatory spending*). Pasal 171 dalam undang undang tersebut menyatakan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran Kesehatan sebesar minimal 5% dari APBN diluar gaji, sementara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mengalokasikan anggaran Kesehatan sebesar minimal 10% dari APBD diluar gaji. Penggunaan anggaran di bidang Kesehatan diharapkan seoptimal mungkin dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan pembangunan bidang Kesehatan.



Sumber: Pusat Pembiayaan dan JaminanKesehatan, Kemenkes RI, 2021

Persentase Kab/Kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok menurut Provinsi Tahun 2020 *"Data termutakhir"*

Dasar hukum yang paling utama adanya Jaminan Kesehatan adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 H dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 34 yaitu: (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara; (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan; dan (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Atas dasar itulah, maka diterbitkan Undang-Undang No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang salah satu programnya adalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).




**Grafik II.100** Persentase Universal Health Coverage (UHC) menurut Provinsi Tahun 2020 "Data termutakhir"

Pada Tahun 2020, proporsi kepesertaan terbanyak berasal dari segmen PBI (APBN) sebesar 49,10%. Akan tetapi, pertumbuhan peserta paling signifikan dari tahun ke tahun terjadi pada segmen non-PBI. Sampai dengan akhir tahun 2020, jumlah cakupan kepesertaan JKN/KIS mencapai 222,4 juta jiwa, dimana terjadi penurunan jumlah kepesertaan dibandingkan dengan jumlah kepesertaan tahun 2019. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian kontribusi iuran pada segmen Penduduk yang didaftarkan oleh Pemda sehingga adanya keterbatasan kapasitas fiscal daerah dalam membayarkan iuran. Pada tahun 2020 juga diketahui bersama dengan adanya pandemi *Coronavirus disease* 2019 (Covid-19) yang berdampak juga pada kemampuan membayar iuran oleh peserta segmen PBPU/BP.

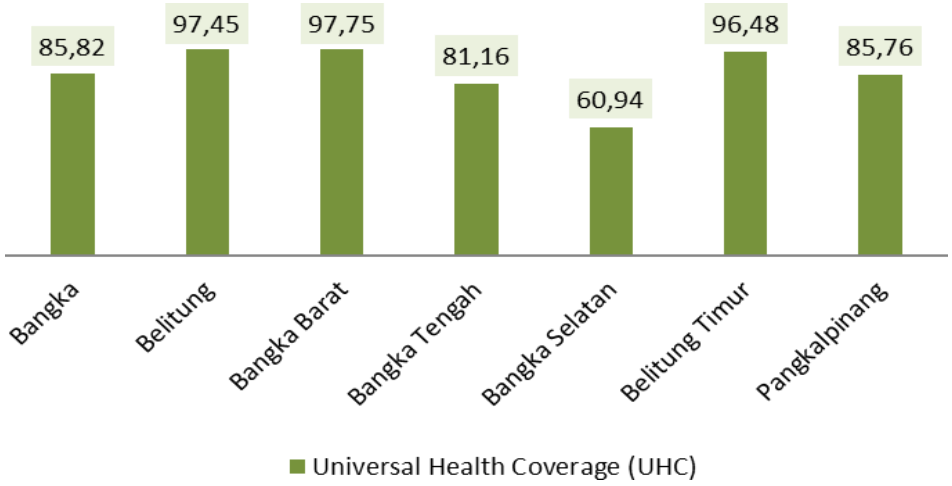



Pada tahun 2020 sebanyak 82,0% penduduk Indonesia telah menjadi peserta jaminan Kesehatan nasional (JKN) dimana terdapat 4 (empat) provinsi yang telah mencapai kepesertaan semesta/*Universal Health Coverage* (*UHC*), yaitu Provinsi DKI Jakarta, Papua Barat, Aceh, dan Sulawesi Utara. Cakupan kepesertaan JKN terbanyak yaitu pada penduduk Provinsi DKI Jakarta (162,9%), sedangkan cakupan kepesertaan JKN terendah yaitu pada penduduk Provinsi Riau (67,2%). Jumlah kepesertaan yang melebihi 100% dikarenakan pencatatan dalam cakupan kepesertaan didasarkan pada kinerja Kantor Cabang, tidak semua berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau alamat peserta.

Sedangkan untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, baru 2 (dua) Kabupaten yang mencapai UHC yaitu Kabupaten Belitung sebesar 97,16 % dan Kabupaten Belitung Timur sebesar 95,25 %. Sedangkan Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Bangka Barat yang masih rendah yaitu 50,22 % dan 61,61 %. Strategi ke depan untuk pencapaian Universal Health Coverage (UHC) perlu diarahkan pada upaya pemerataan pelayanan kesehatan antar wilayah. Upaya yang perlu dilakukan adalah: 1) menjangkau kepesertaan JKN dari pekerja informal dan pekerja penerima upah; 2) mendorong Pemda untuk dapat mendorong integrasi jamkesda ke dalam JKN;




memperluas kerja sama BPJS Kesehatan dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) swasta/mandiri; dan 4) mengurangi ketimpangan jumlah fasilitas dan tenaga kesehatan. Tantangan utama yang dihadapi dalam rangka perluasan cakupan kepesertaan adalah rendahnya peserta yang termasuk dalam kategori mandiri dan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.




**Grafik II.101** Capaian Universal Healt Coverage (UHC) Kabupaten Kota tahun 2020
*Sumber : BPJS Provinsi Kep. Bangka Belitung "Data termutakhir"*

**b) Peningkatkan Pemerataan Distribusi Tenaga Kesehatan, Obat dan Vaksin.**




Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang dimaksud dengan Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Pasal 11 ; Tenaga Kesehatan dikelompokkan menjadi beberapa rumpun dan sub rumpun, yaitu (1). Medis, (2). Tenaga Psikologi Klinis, (3). Tenaga Keperawatan, (4). Tenaga Kebidanan, (5).

Tenaga Kefarmasian, (6). Tenaga Kesehatan Masyarakat,(7). Tenaga Kesehatan Lingkungan, (8). Tenaga Gizi, (9). Tenaga Keterapian Fisik, (10). Tenaga Keteknisian Medis, (11). Tenaga Teknik Biomedika, (12). Tenaga Kesehatan Tradisional, dan (13). Tenaga Kesehatan Lain.

Pada tahun 2019 total SDMK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 11.800 orang yang terdiri dari 7.184 orang Tenaga Kesehatan (60,88%),861 orang Asisten Tenaga Kesehatan (7,30%), dan 3.755 orang Tenaga Penunjang Kesehatan (31,82%). Tenaga kesehatan dengan jumlah terbanyakpada tahun 2019 yaitu Keperawatan sebanyak 3.114 orang atau 43,35% dari total Tenaga Kesehatan, sedangkan Tenaga Kesehatan dengan jumlah paling sedikit yaitu Tenaga Psikologi Klinis sebanyak 9 orang atau 0,13% dari total Tenaga Kesehatan.

Tenaga kesehatan (Tenaga Kesehatan dan Asisten Tenaga Kesehatan) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 berjumlah 8.045 orang terdiri dari tenaga medis (dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis), tenaga perawat (perawat, perawat gigi), tenaga bidan (DI bidan, DIII bidan, DIV/S1 bidan dan S2 bidan), tenaga farmasi (apoteker, sarjana farmasi, diploma farmasi, SMF/SAA), tenaga ahli gizi (DIV/S1 gizi, DIII gizi, DI gizi), tenaga sanitarian (Sarjana Sanitasi, DIII Sanitasi, DI Sanitasi), tenaga kesehatan masyarakat (Sarjana Kesehatan Masyarakat (S2/S1), DIII Kesehatan Masyarakat), tenaga keteknisian medis (analis laboratorium (DIV analis kesehatan, DIII analis kesehatan, SMAK), radiologi, penata rontgen, teknisi elektro medik, radiographer, perekam medik, perawat anesthesi, teknisi gigi, refraksi optisen, transfusi darah) dan tenaga keterapian fisik (fisioterapis, terapi wicara, terapi okupasi)

**Tabel II.71**

Jumlah Tenaga Kesehatan di Prov. Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2020

| Wilayah | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | U | G | Sp | U | G | Sp | U | G | Sp | U | G | Sp | U | G | Sp |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| Prov. Kep. Babel | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 25 | 7 | 23 | 24 | 1 | 9 | 27 | 7 | 24 |
| Bangka | 61 | 9 | 16 | 61 | 9 | 16 | 82 | 17 | 47 | 68 | 25 | 40 | 107 | 21 | 27 |
| Belitung | 40 | 10 | 6 | 40 | 10 | 6 | 45 | 14 | 18 | 67 | 14 | 39 | 39 | 11 | 25 |
| Bangka Tengah | 44 | 7 | 5 | 44 | 7 | 5 | 47 | 11 | 6 | 39 | 9 | 7 | 46 | 10 | 20 |
| Bangka Barat | 36 | 7 | 3 | 36 | 7 | 3 | 42 | 5 | 7 | 48 | 9 | 7 | 65 | 10 | 8 |
| Bangka Selatan | 23 | 7 | 3 | 23 | 7 | 3 | 32 | 7 | 6 | 28 | 5 | 11 | 36 | 6 | 9 |
| Belitung Timur | 32 | 10 | 4 | 32 | 10 | 4 | 41 | 9 | 10 | 37 | 8 | 11 | 53 | 8 | 9 |
| Pangkalpinang | 56 | 19 | 42 | 56 | 19 | 42 | 69 | 25 | 44 | 75 | 24 | 46 | 80 | 22 | 28 |
| **Jumlah** | **292** | **69** | **83** | **292** | **69** | **83** | **383** | **95** | **161** | **386** | **95** | **179** | **453** | **95** | **150** |

Keterangan : *"Data termutakhir"*

U : Dokter Umum; G : Dokter Gigi;
sp : Dokter Spesialis Sumber :
BBDA Provinsi Kep. Bangka
Belitung

**Tabel II.72**

MATRIKS 1 - SASARAN CAPAIAN INDIKATOR : Tujuan 1 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

| Kode Indikator | Target/Indikator SDG'S | Sumber Data | Satuan | Kondisi Awal (2017) | Target 2020 | Capaian 2020 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tujuan SDGs : Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera** | | | | | | | |
| **Target Global 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.** | | | | | | | |
| 3.1.1* | Angka kematian Ibu | Dinkes Prov. | /100.000 | 82.46 | 72,50 | 137.33 | ▼ |
| 3.1.2* | Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih | BPS | Persen | 98.76 | 99.10 | 99.67 | ● |
| 3.1.2,(a)* | Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan | BPS | Persen | 90.26 | 91.75 | 99.67 | ● |
| **Target Global 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000** | | | | | | | |
| 3.2.1* | Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup | Dinkes Provinsi | Persen | 7.35 | 7,20 | 7.97 | ▶ |
| 3.2.2,* | Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup | Dinkes Provinsi | Persen | 24/26.021 | 21/KH | 5.5/KH | ● |
| 3.2.2.(a) | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup | Dinkes Provinsi | Persen | 6.25 | 7.16 | 7.17 | ● |
| 3.2.2.(b) | Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi. | BPS, DINKES | Persen | 100 | 100 | 57.1 | ▼ |
| **Target Global 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.** | | | | | | | |
| 3.3.1.(a) | Prevalensi HIV pada populasi dewasa | DINKES | % | 0.03 | < 0.5% | | |
| 3.3.2.(a) | Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk | DINKES | /100.000 | 99.96 | 91.45 | 105 | ▼ |
| 3.3.3* | Kejadian Malaria per 1.000 orang | DINKES | /1.000 | 0.07 | 0.1 | 0.12 | ▶ |
| 3.3.3.(a) | Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria | DINKES | Kab/Kot a | 5 | 6 | 6 | ▶ |
| 3.3.4.(a) | Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B. | DINKES | Persen | 28.57 | 100 | 100 | ● |
| 3.3.5. | Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta) | DINKES | Orang | 119 | 119 | 93 | ● |
| | Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Kusta) | DINKES | Orang | 49 | 49 | 55 | ▶ |
| 3.3.5.(a) | Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta | DINKES | Kab./Kot a | 7 | 7 | 7 | ● |
| 3.3.5.(b) | Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis | DINKES | Kab./Kot a | 7 | 5 | 6 | ● |

| Kode Indikator | Target/Indikator SDG'S | Sumber Data | Satuan | Kondisi Awal (2017) | Target 2020 | Capaian 2020 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (berhasil lolos dalam survei | | | | | | |
| | penilaian transmisi tahap I). | | | | | | |
| **Target Global 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.** | | | | | | | |
| 3.4.1.(a) | Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun | BPS, DINKES | Persen | | 30,25 | 28,23 | |
| 3.4.1.(b) | Prevalensi tekanan darah tinggi | BPS, DINKES | Persen | 29.9 | 29,1 | 29,9 | |
| 3.4.1.(c) | Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun | BPS, DINKES | Persen | 3.5 | 3.5 | | |
| 3.4.2.(a) | Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa | BPS, DINKES | Kab./Kot a | 6 | 7 | 7 | |
| **Target Global 3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.** | | | | | | | |
| 3.5.1(a) | Jumlah penyalahgunaan narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis | BNN | Orang | 435 | | | |
| 3.5.1(b) | Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi | BNN | Orang | 72 | 84 | | |
| 3.5.1(c) | Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan | BNN | Orang | 10 | 10 | | |
| 3.5.1(d) | Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu | BNN | Lembag a | 3 | 3 | | |
| 3.5.1(e) | Prevalensi penyalahgunaan narkoba | BNN | Persen | 1,49 | 1,37 | | |
| **Target Global 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.** | | | | | | | |
| 3.7.1(a) | Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin | BPS | % | 71.1 | | | |
| 3.7.1(b) | Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern | BPS | % | 11.9 | 68,5 | | |
| 3.7.2. | Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR). | BPS | % | 50 | 34 | | |
| 3.7.2(a) | Total Fertility Rate (TFR). | BPS | | 2.3 | 2,25 | | |
| **Target Global 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang** | | | | | | | |
| 3.8.1.(a) | Unmet need pelayanan kesehatan | BPS | | 3.57 | 6.28 | 4.31 | |

| Kode Indikator | Target/Indikator SDG'S | Sumber Data | Satuan | Kondisi Awal (2017) | Target 2020 | Capaian 2020 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.8.2. | Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk | BPS | Jiwa/1000 | 687 | 950 | | |
| 3.8.2(a) | Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). | BPS | % | 68.7 | 95 | 75 | ▼ |
| **Target Global 3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat** | | | | | | | |
| 3.a.1* | Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun | BPS | % | 29.67 | 29.18 | 28.23 | ● |
| **Target Global 3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua** | | | | | | | |
| 3.b.1.(a) | Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas | DINKES | % | 85% | 96% | 100% | ● |
| **Target Global 3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.** | | | | | | | |
| 3.c.1* | Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan | DINKES | | Dokter Umum 26; Dokter Gigi 6; Perawat 186; Bidan 81; Farmasi 21; Kesehatan Masyarakat 12; Kesehatan Lingkungan 8; Gizi 10 | Dokter Umum 26; Dokter Gigi 6; Perawat 186; Bidan 81; Farmasi 21; Kesehatan Masyarakat 12; Kesehatan Lingkungan 8; Gizi 13 | Dokter Umum 26; Dokter Gigi 6; Perawat 186; Bidan 81; Farmasi 21; Kesehatan Masyarakat 12; Kesehatan Lingkungan 8; Gizi 14 | ● |

## 4. TUJUAN 4 - PENDIDIKAN BERKUALITAS

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut.




Pendidikan adalah penentu utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mempengaruhi pendapatan dari suatu negara. Mengabaikan dimensi ekonomi dalam dunia pendidikan akan membahayakan kesejahteraan generasi di masa mendatang, dengan menimbulkan angka kemiskinan, pengucilan sosial dari interaksi sosial dan mempengaruhi dan memperburuk stabilitas dan keberlanjutan system jaminan sosial. Jika 75% lebih banyak anak berusia 15 tahun dalam empat puluh enam dari negara termiskin di dunia mencapai tolok ukur OECD terendah untuk matematika, maka pertumbuhan ekonomi dapat meningkat sebesar 2,1% dari baseline dan 104 juta orang dapat terangkat keluar dari kemiskinan ekstrim (UNESCO 2012). Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan

harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.

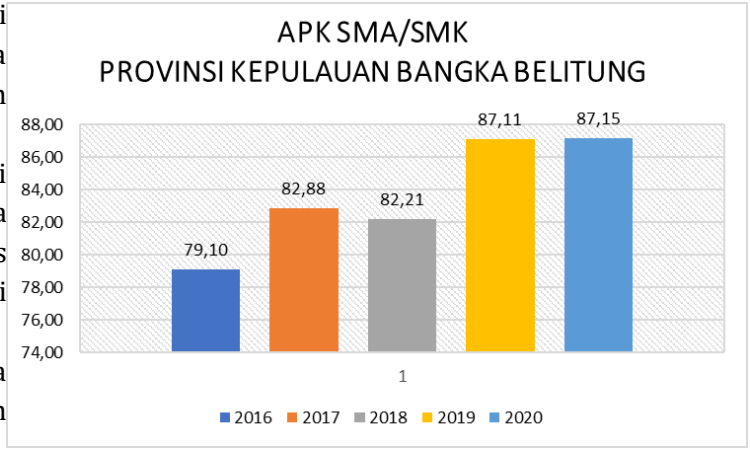
Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dikenal beberapa indikator untuk mengetahuinya, antara lain Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Melek Aksara, proporsi remaja dan dewasa yang menguasai keterampilan TIK, proporsi tenaga pendidikan bersertifikat kompetensi, dan lain sebagainya.

## A. Target Global 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif

### a) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Angka Partisipasi Kasar digunakan untuk menunjukkan berapa besar umumnya tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan, serta menunjukkan berapa besar kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu. APK merupakan indikator pelengkap dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM), sehingga dapat menunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang, namun usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya. APK diukur dengan perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama.

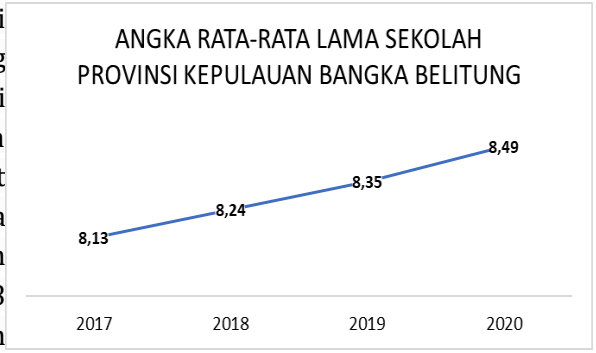
Pada tahun 2020, APK SMA/SMK dan sederajat di Provinsi mencapai 87,15. Peningkatan APK di tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya terjadi dikarenakan adanya peningkatan akses layanan pendidikan bagi masyarakat. Peningkatan AKM juga terjadi dikarenakan adanya koordinasi, perencanaan, pengawasan evaluasi dan monitoring dalam kebijakan dan manajemen



pendidikan. Peningkatan kualitas GTK yang berbasis kompetensi, profesionalisme dan komitmen/integritas yang semakin baik turut juga mendukung peningkatan ketercapaian APK SMA/SMK dan pendidikan sederajat. Perhatian Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam perencanaan, pengawasan dan evaluasi sangat mendukung satuan pendidikan untuk menjalankan tugas dan layanan pendidikan yang merata dan inklusif bagi masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**b)** Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SM diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Rata-rata lama sekolah menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah. Semakin tinggi angka lamanya bersekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk, sehingga indikator ini sangat penting karena dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia.



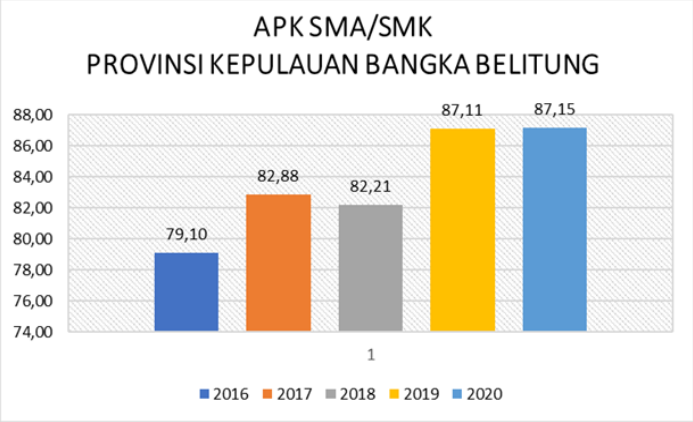

Rata-rata Lama sekolah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkat dari tahun 2017, yakni sebesar 8,13 menjadi 8,49 di tahun 2020. Ini berarti bahwa masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelesaikan pendidikan formal mereka selama kurang lebih 8 tahun, yakni berada di kelas tujuh (VII). Hal ini menjadi tantangan bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah. Berbagai upaya yang melibatkan koordinasi dengan semua pihak dan dinas pemerintah lainnya di dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pendidikan yang tidak hanya menjadi tugas dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu ditingkatkan. Perluasan akses layanan pendidikan bagi masyarakat perlu mendapatkan perhatian agar semua lapisan masyarakat bisa mengenyam dan menyelesaikan pendidikan mereka, minimal pendidikan 12 tahun mereka, yakni sampai dengan jenjang SMA/SMK.

**B. Target Global 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.**

**a) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat**

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Angka Partisipasi Kasar

digunakan untuk menunjukkan berapa besar umumnya tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan, serta menunjukkan berapa besar kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu. APK merupakan indikator pelengkap dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM), sehingga dapat menunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang, namun usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya. APK diukur dengan perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama.



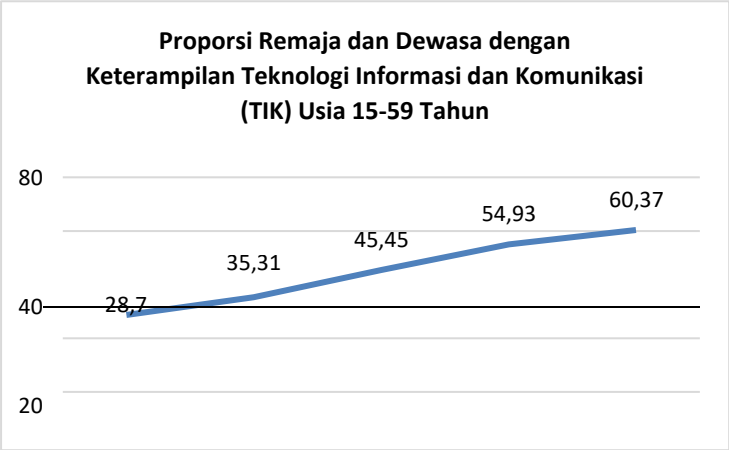

Pada tahun 2020, APK SMA/SMK dan sederajat di Provinsi mencapai 87,15. Peningkatan APK di tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya terjadi dikarenakan adanya peningkatan akses layanan pendidikan bagi masyarakat. Peningkatan AKM juga terjadi dikarenakan adanya koordinasi, perencanaan, pengawasan evaluasi dan monitoring dalam kebijakan dan manajemen pendidikan. Peningkatan kualitas GTK yang berbasis kompetensi, profesionalisme dan komitmen/integritas yang semakin baik turut juga mendukung peningkatan ketercapaian APK SMA/SMK dan pendidikan sederajat. Perhatian Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam perencanaan, pengawasan dan evaluasi sangat mendukung satuan pendidikan untuk menjalankan tugas dan layanan pendidikan yang merata dan inklusif bagi masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**C. Target Global 4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.**

**a) Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)**

Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) adalah proporsi remaja (umur 15-24 tahun) dan dewasa (umur 15-59 tahun) yang telah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan komputer tertentu dalam suatu periode waktu tertentu (tiga bulan terakhir). Sebuah komputer mengacu pada komputer desktop, laptop atau tablet (atau genggam serupa komputer). Ini tidak termasuk peralatan dengan beberapa kemampuan komputasi seperti Smart-TV, dan perangkat telepon sebagai fungsi utama mereka, seperti smartphone.

Informasi tentang proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat digunakan untuk menginformasikan kebijakan yang ditargetkan untuk meningkatkan keterampilan TIK, dan dengan demikian berkontribusi pada terwujudnya masyarakat dengan informasi yang inklusif. Indikator ini akan membantu membuat kaitan antara penggunaan TIK dan dampak, serta membantu mengukur dan melacak tingkat kemahiran pengguna TIK. Tingkat keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang rendah menjadi salah satu hambatan utama yang membuat orang tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan TIK.

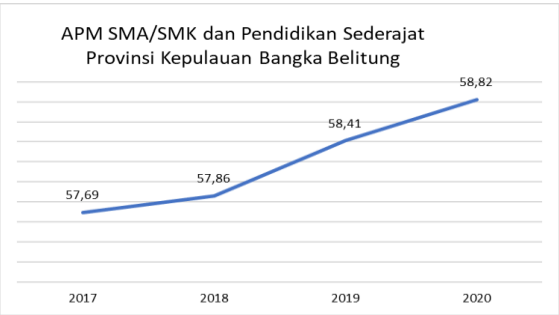



Pada tahun 2020, proporsi remaja dan dewasa usia 15-59 tahun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menguasai TIK mencapai 60,37. Pada tahun 2016 dan 2017, persentase proporsi ini baru mencapai 28,7 dan 35,31. Dan pada tahun 2018 dan 2019, capaian proporsi ini mencapai 45,45 dan 54,93. Peningkatan dari proporsi remaja usia 15-59 tahun denga keterampilan TIK ini dipengaruhi oleh peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan juga peningkatan kesadaran dari remaja dan dewasa kegunaan keterampilan TIK di dalam mengakses pengetahuan dan informasi, dan juga mendukung pekerjaan mereka di dunia kerja dan usaha.

## D. Target Global 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan

### a) Rasio angka partisipasi Murni (APM) perempuan/ laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/ MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.

Angka partisipasi murni (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam presentase. Indikator kesempatan memperoleh pendidikan antara perempuan dan laki-laki diukur dari rasio APM yang menunjukkan



kesetaraan dan keadilan gender di bidang pendidikan. Pendidikan adalah salah satu aspek penting dari pembangunan manusia. Menghilangkan ketimpangan gender di semua jenjang pendidikan akan meningkatkan status dan kemampuan perempuan dan laki-laki. Jumlah penduduk perempuan adalah separuh dari seluruh jumlah penduduk, kesetaraan pendidikan perempuan akan memberikan peran aktif perempuan dalam pembangunan dan merupakan determinan yang penting dalam pembangunan ekonomi.

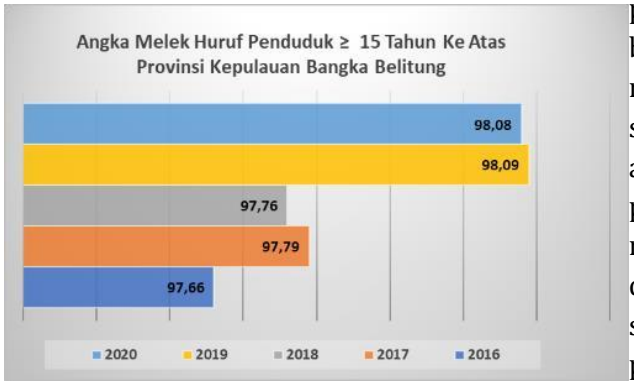
Pada tahun 2020, APM SMA/SMK dan pendidikan sederajat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 58,82. Selama 4 tahun, angka ini meningkat secara terus menerus, meskipun peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan 2020 sebesar 1,13 poin. Kenaikan APM ini dipengaruhi oleh perluasan akses layanan pendidikan yang semakin baik, seperti ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang semakin meningkat, ketersediaan tenaga guru dan kependidikan dan informasi pendidikan yang mencukupi, beasiswa bagi siswa dari keluarga tidak mampu, dan koordinasi antara lembaga pemerintahan yang semakin baik. Selanjutnya, tingkat kesadaran masyarakat akan peranan pendidikan di dalam peningkatan kualitas dan kesejahteraan hidup juga meningkat, serta faktor kondisi ekonomi masyarakat yang makin baik menjadi pendorong kenaikan APM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## E. Target Global 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.

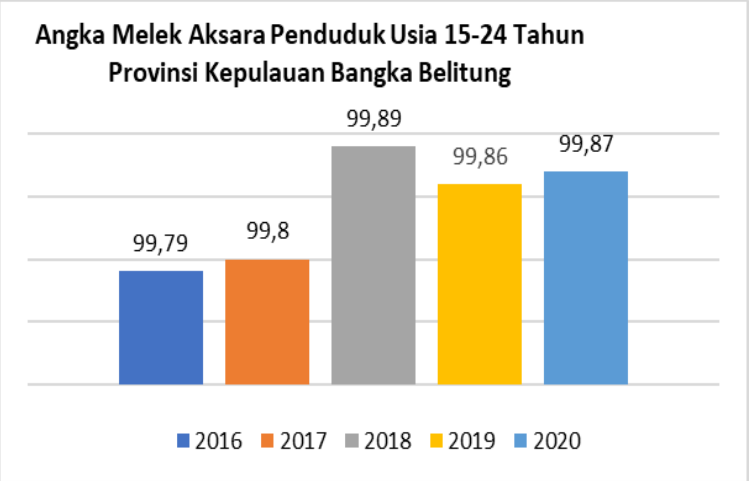
### a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.

Melek aksara juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan bahasa dan menggunakannya untuk mengerti sebuah bacaan, mendengarkan perkataan, mengungkapkannya dalam bentuk tulisan, dan berbicara. Organisasi PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan danKebudayaan (UNESCO) mendefinisikan melek aksara sebagai "kemampuan untuk mengidentifikasi, mengerti, menerjemahkan, membuat, mengkomunikasikan dan mengolah isi dari rangkaian teks yang terdapat pada bahan-bahan cetak dan tulisan yang berkaitan dengan berbagai situasi.

Persentase angka melek aksara/huruf (AMH) penduduk umur ≥15 tahun adalah perbandingan jumlah penduduk berumur ≥15 tahun yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf latin dan atau huruf lainnya, terhadap jumlah penduduk umur ≥15 tahun. AMH merefleksikan out come pendidikan dasar sejak 10 tahun terakhir sebagai ukuran efektifnya sistem pendidikan dasar. Indikator ini kerap dilihat sebagai proksi untuk mengukur kemajuan pembangunan sosial dan ekonomi.

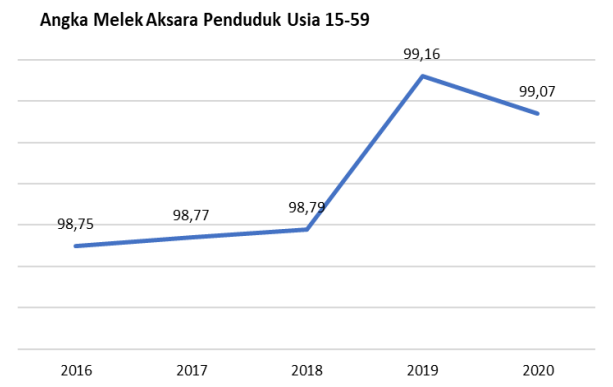


Pada tahun 2020, angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun ke atas mencapai 98,08. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,01 poin dibanding dengan tahun 2019 yang mencapai 98,09. Namun dibandingkan dengan tahun 2017 atau dalam kurun waktu empat tahun, angka ini naik sebesar 0,29 poin. Dan angka melek aksara untuk penduduk umur ≥15 tahun ke atas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus meningkatkan menunjukkan bahwa akses dan mutu dan kualitas pendidikan semakin meningkat dan semakin banyaknya penduduk umur ≥15 tahun ke atas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki kecakapan baca tulis yang baik.




**b) Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun**

Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun adalah proporsi penduduk kelompok umur 15-24 dan umur 15-59 tahun yang dapat membaca dan menulis huruf Latin atau huruf lainnya. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, angka melek aksara untuk penduduk usia 15-24 tahun mencapai 99,87 persen.




Sementara itu, angka melek aksara penduduk usia 15-24 tahun di tahun 2020, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 99,87. Angka ini hanya meningkat sebesar 0,01 poin dibanding dengan tahun 2019. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 angka ini terus meningkat dan peningkatan yang signifikan terjadi di tahun 2019, dimana capaian angka ini naik menjadi 99,16.

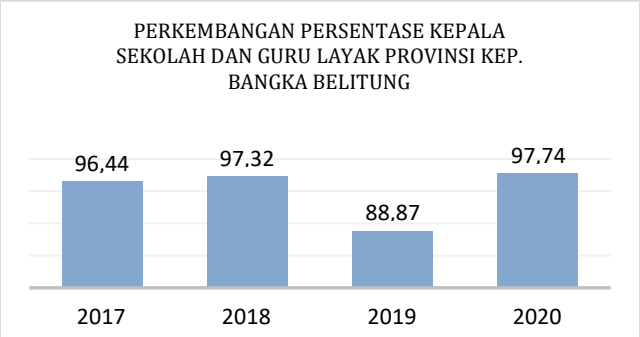
## F. Target Global 4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil

### a) Persentase guru SMA yang bersertifikat pendidik

Persentase guru SMA yang memenuhi kualifikasi sebagai guru yang memiliki sertifikat pendidik sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 tentang tata cara memperoleh sertifikat

pendidik bagi guru dalam jabatan. Sertifikat pendidik yang diberikan kepada guru yang sudah memenuhi standar profesional atau kelayakan sebagai pendidikan dan sesuai dengan kompetensi yang diajarkan di sekolah. Sertifikasi pendidikan yang diberikan kepada guru menjadi salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan mutu tenaga pendidik (guru) di dalam mekanisme teknis dan diatur oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Guru yang memperoleh sertifikat pendidik dinilai profesional dalam membuat praktek dan sistem pendidikan yang berkualitas dalam mengajar.

Pada tahun 2020, jumlah guru SMA yang bersertifikat pendidik mencapai 80%. Guru yang sudah menerima sertifikat pendidik menunjukkan bahwa para guru tersebut sudah layak menjadi agen pembelajaran sehingga proses dan mutu pendidikan meningkat.




Berdasarkan data dari Kemendikbud, perkembangan persentase kepala sekolah dan guru layak provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan pada tahun 2020, yakni mencapai 97,74 %. Persentase ini meningkat dibandingkan dengan capaian pada tahun 2019, yakni sebesar 88,87 %, dan di tahun 2017 dan 2018, yaitu masing-masing dengan capaian sebesar 96,44 % dan 97,32 %. Peningkatan ini tentunya dipengaruhi oleh semakin banyak dan meningkatnya jumlah guru yang mengikuti kegiatan-kegiatan profesionalisme yang mendukung penegmbangan sertifikat keahlian masing-masing guru. Selanjutnya, hal ini juga terjadi dikarenakan adanya program beasiswa S1, S2 dan juga beasiswa bagi para guru yang akan mengikuti kegiatan pengembangan sertifikasi kompetensi mereka yang didanai oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka mendukung mutu dan kualitas para guru.

**Tabel II.73**

MATRIKS 1 - SASARAN CAPAIAN INDIKATOR : Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas

| Kode Indikator | Target/Indikator SDG'S | Sumber Data | Satuan | Kondisi Awal (2017) | Target 2020 | Capaian 2020 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tujuan SDGs : Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas** | | | | | | | |
| **Target Global 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif** | | | | | | | |
| 4.1.1.(f) | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat | BPS | % | 82,88 | 82,82 | 87,15 | |
| 4.1.1.(g) | Rata-rata lama sekolah penduduk umur≥15 tahun | BPS | Tahun | 8,13 | 8,34 | 8,49 | |
| **Target Global 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang** | | | | | | | |

| Kode Indikator | Target/Indikator SDG'S | Sumber Data | Satuan | Kondisi Awal (2017) | Target 2020 | Capaian 2020 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **terjangkau dan berkualitas.** | | | | | | | |
| 4.3.1.(a) | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat | BPS | % | 82,88 | 82,82 | 87,15 | |
| **Target Global 4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan** | | | | | | | |
| 4.4.1. | Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) | BPS | Persen | 64,4 | 65,8 | 60,37 | |
| **Target Global 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan** | | | | | | | |
| 4.5.1* | Rasio angka partisipasi Murni (APM) perempuan/ laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/ MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi. | BPS | % | 57,69 | 58,15 | 58,82 | |
| **Target Global 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.** | | | | | | | |
| 4.6.1(a) | Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun. | BPS | % | 97,79 | 97,85 | 98,08 | |
| 4.6.1(b) | Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun | BPS | % | 98,77 | 100 | 99,07 | |
| **Target Global 4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil** | | | | | | | |
| 4.c.1* | Persentase guru SMA yang bersertifikat pendidik | DIKNAS | Persen | 42,22 | 45,35 | 80 | |

## 5. TUJUAN 5 - KESETARAAN GENDER

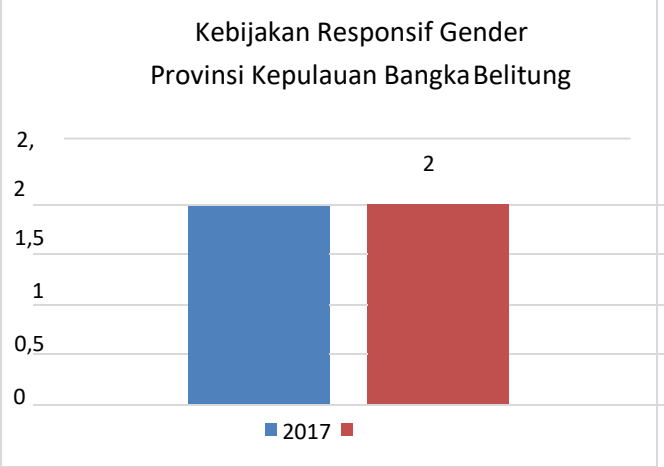



Tujuan kelima, Kesetaraan Gender, memiliki 6 target. Dari enam target tersebut, sebagian besar indikator yang terdapat di dalamnya berhasil mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2019. Ada juga indikator yang berhasil melebihi target. Tidak seperti tujuan-tujuan sebelumnya, seluruh capaian dalam tujuan kelima ini bisa dilaporkan secara lengkap.

### A. Target Global 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun

**a) Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.**

Indikator ini mengukur upaya pemerintah untuk menetapkan peraturan perundangundangan yang responsif gender, yang disusun berdasarkan asesmen yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan menggunakan kuesioner standard yang dikembangkan oleh PBB. Sumber data dari peraturan dan rencana aksi dinilai dari kebijakan yang ada. Survei standard terdiri pertanyaan-pertanyaan yang mencakup 4 bidang yaitu: 1. Kebijakan yang menyangkut kehidupan pada umumnya; 2. Kebijakan tentang kekerasan terhadap perempuan; 3. Lapangan kerja dan ekonomi; dan 4. Perkawinan dan keluarga.




Pada masing-masing bidang terdiri dari(i) kebijakan yang mendorong atau memajukan kesetaraan gender; dan (ii) penegakan hukum dan pemantauan hasil pelaksanaannya. Nilai dari masing-masing bidang menjadi ukuran pada indikator ini. Pada tahun 2020, jumlah kebijakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang responsif gender dalam mendukung pemberdayaan perempuan di Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 2 (dua) kebijakan. dan capaian ini sama dengan capaian tahun 2017, yakni mencapai 2 (dua) kebijakan responsive gender.

**B. Target Global 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya**

**a) Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Kekerasan terhadap perempuan bisa juga diartikan sebagai setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.

Pada tahun 2016, di Provinsi Kepulauan Bangka Beitung tercatat ada 123 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selanjutnya, di tahun 2017 menurun ke angka 90 kasus. Jumlah pelaporan kasus ini kembali terjadi penurunan yakni, 80 kasus kemudian menjadi 60 kasus di tahun 2018 dan 2019. Namun di tahun 2020, jumlah kasus meningkat menjadi 81 kasus. Dan semua korban kekerasan terhadap perempuan dn anak ini ditangani dengan baik oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Beitung.



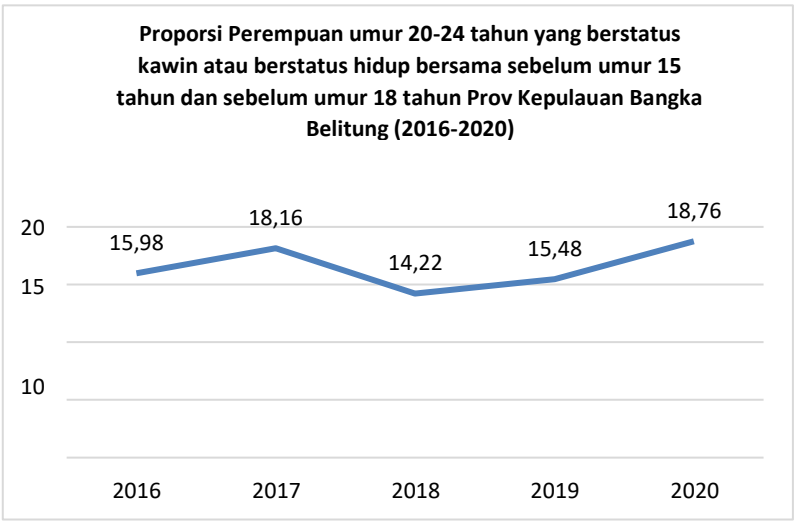

Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif sebesar 100 %. Hal ini tercapai dikarenakan adanya sosialisasi dan advokasi tentang gender di masyarakat, penataan fungsi kelembagaan perempuan Yang terarah dan berkesinambungan dan penegakan terhadap pelanggaran regulasi di daerah semakin meningkat. Tercapai dipengaruhi oleh sosialisasi dan advokasi tentang gender di masyarakat, penataan fungsi kelembagaan perempuan yang terarah dan berkesinambungan dan penegakan terhadap pelanggaran regulasi daerah semakin meningkat. SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, meliputi layanan: a. Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak; b. Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan; c. Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan; d. Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan e. Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

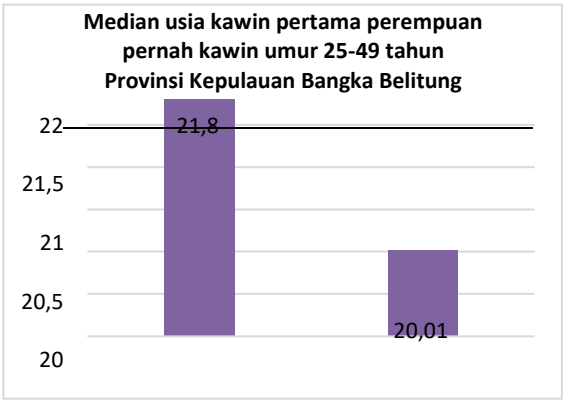
## C. Target Global 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan

### a) Proporsi Perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.

Pada tahun 2018, 1 dari 9 anak perempuan menikah di Indonesia. Perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun di tahun 2018 diperkirakan mencapai sekitar 1.220.900 dan angka ini menempatkan Indonesia pada 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati peringkat kesatu sebagai provinsi dengan pernikahan dengan usia anak pada tahun 2020.

Meskipun terjadi peningkatan dalam sosialisasi dan advokasi tentang gender di masyarakat Kepulauan Bangka Belitung serta terwujudnya kondisi lingkungan sosial yang lebih kondusif bagi kaum perempuan untuk dapat mengembangkan segenap potensi dan kemampuan diri mereka dikarenakan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjamin kesamaan hak bagi setiap gender untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi melalui strategi gerakan penyadaran akan adanya kesamaan hak antara gender bahwa kaum perempuan memilki kemampuan dapat bersaing, secara sehat dengan kaum laki-laki, pada tahun 2020, persentase perempuan umur 20 hingga 24 tahun yang berstatus kawin atau hidup bersama pasangan sebelum umur 15 tahun dan sebelum 18 tahun mengalami peningkatan. Angka persentase ini terus meningkat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2016, persentase ini sebesar 15,98 persen, dan pada tahun 2020, meningkat menjadi 18,76 %. Artinya, terdapat sekitar 19 dari setiap 100 orang perempuan berumur 20 hingga 24 tahun yang melangsungkan perkawinan sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.




**b) Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun**

Median usia kawin pertama untuk perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia di mana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan. Median lebih banyak digunakan daripada nilai rata-rata sebagai salah satu pengukuran nilai tengah, karena tidak seperti nilai rata-rata, angka median dapat diperkirakan untuk semua kohor di mana setidaknya setengah dari perempuan atau pria berstatus kawin pada saat survei. Usia perkawinan pertama digunakan sebagai indikator awal seseorang berisiko hamil. Usia kawin pertama juga merupakan indikator sosial dan demografi yang penting.

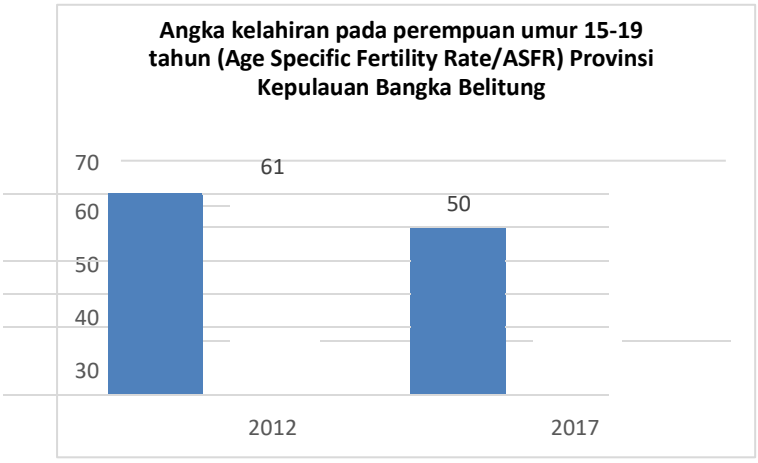
Di Indonesia, perkawinan memiliki hubungan yang kuat dengan fertilitas, karena biasanya kebanyakan perempuan melahirkan setelah ada dalam ikatan perkawinan. Dengan demikian, mengetahui tren usia kawin pertama adalah sangat penting dalam mempelajari perubahan pola fertilitas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pada tahun 2017, median usia kawin pertama perempuan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang pernah kawin umur 25-49 tahun adalah sebesar 21,8 %, sedangkan pada tahun 2020, target yang ingin dicapai adalah sebesar 21,8%, namun capaian yang dicapai baru sebesar 20,01. Capaian ini mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun 2017, yakni dengan selisih poin sebesar 1,7%.

**c) Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)**

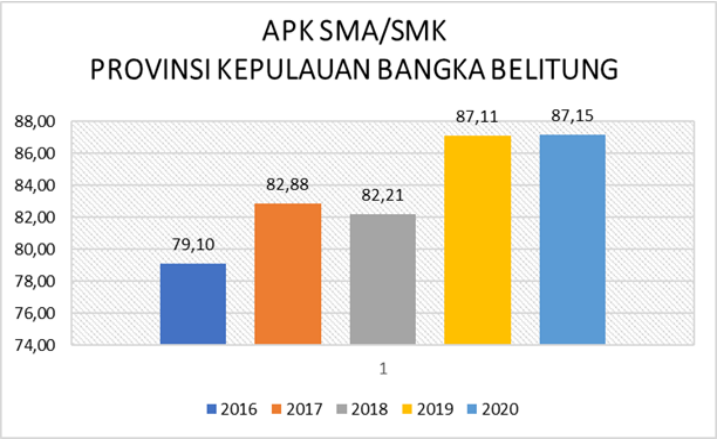
Angka Kelahiran menurut Kelompok Umur (Age Specific Fertility Rate/ASFR) dihitung berdasarkan banyaknya kelahiran selama setahun per 1000, 100.000, atau 1.000.000 wanita padkelompok umur tertentu. Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (ASFR) (per 1.000perempuan umur 15-19 tahun) menurut provinsi merujuk pada banyaknya kelahiran pada perempuan kelompok umur 15-19 tahun pada suatu periode per 1.000 perempuan pada kelompok umur yang sama pada pertengahan periode.

Pada tahun 2017, ASFR 15-19 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 50, yang berarti berarti bahwa dalam satu juta wanita usia 15-19 tahun secara rata-rata mempunyai 50 anak selama masa usia suburnya. Pada tahun 2020, target ASFR di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ingin dicapai adalah sebesar 50,6, yang berarti bahwa dalam satu juta wanita usia 15-19 tahun secara rata-rata mempunyai 50 atau 51 anak selama masa usia suburnya. Penyebab menurunnya ASFR 15-19 tahun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikarenakan semakin meningkatnya jumlah Wanita usia 15-19 tahun yang bersekolah, baik di jenjang SMA/SMK/MA dan juga di perguruan tinggi. Selain itu, meningkatnya kesadaran para Wanita usia 15-19 tahun yang didukung oleh peran dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di dalam mengoptimalkan peran perempuan 15-19 tahun melalui dunia pendidikan dan kesehatan, seperti sosialisasi kesehatan reproduksi dan penundaan usia perkawinan untuk mencegah meningkatnya angka dan resiko stunting juga mempengaruhi turunnya ASFR usia 15-19 tahun.




**d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat**

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Angka Partisipasi Kasar digunakan untuk menunjukkan berapa besar umumnya tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan, menunjukkan berapa besar kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu. APK




merupakan indikator pelengkap dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM), sehingga dapat menunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang, namun usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya.

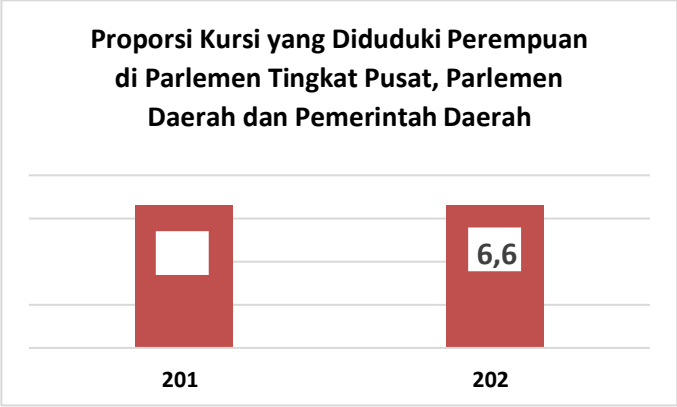
APK diukur dengan perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama.

Pada tahun 2020, APK SMA/SMK dan sederajat di Provinsi mencapai 87,15. Peningkatan APK di tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya terjadi dikarenakan adanya peningkatan akses layanan pendidikan bagi masyarakat. Peningkatan AKM juga terjadi dikarenakan adanya koordinasi, perencanaan, pengawasan evaluasi dan monitoring dalam kebijakan dan manajemen pendidikan. Peningkatan kualitas GTK yang berbasis kompetensi, profesionalisme dan komitmen/integritas yang semakin baik turut juga mendukung peningkatan ketercapaian APK SMA/SMK dan pendidikan sederajat. Perhatian Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam perencanaan, pengawasan dan evaluasi sangat mendukung satuan pendidikan untuk menjalankan tugas dan layanan pendidikan yang merata dan inklusif bagi masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## D. Target Global 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat

### a) Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.

Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat adalah persentase keterwakilan perempuan di Lembaga legislatif tingkat pusat, mencakup anggota DPR RI dan DPD RI. Proporsi ini juga mencakup kursi yang diduduki perempuan di pemerintah daerah, yakni persentase keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tingkat daerah

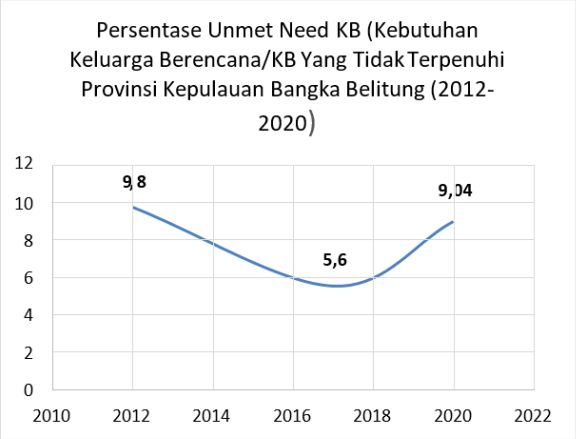


(anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota) dan perempuan pada jabatan pemerintah daerah yang dipilih melalui pemilihan umum (Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota).

Pada tahun 2017, capaian proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen sebesar 6,6 persen. Dan di tahun 2020, target persentase proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen pada adalah sebesar 2,23 dan capaian pada tahun 2020 mencapai sebesar 6,6 %. Target ini tercapai dikarenakan dipengaruhi oleh peningkatan sosialisasi dan advokasi tentang gender di masyarakat, kondisi lingkungan sosial yang lebih kondusif bagi kaum perempuan untuk dapat mengembangkan segenap potensi dan kemampuan diri mereka serta menjamin kesamaan hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi melalui strategi gerakan penyadaran akan adanya kesamaan hak antara gender bahwa kaum perempuan memilki kemampuan dapat bersaing, secara sehat dengan kaum laki-laki.

## E. Target Global 5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.

### a) Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).

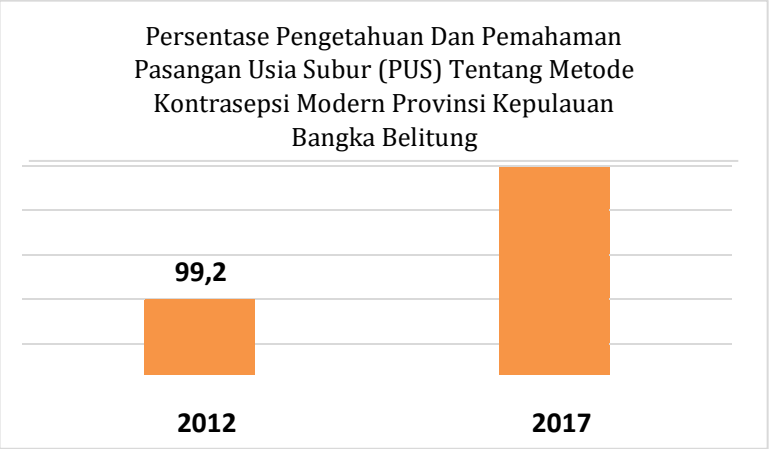



Persentase Unmet Need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB Yang Tidak Terpenuhi) merupakan proporsi pasangan usia subur (PUS) dalam status kawin yang tidak menggunakan alat kontrasepsi meskipun mereka menyatakan ingin menunda atau menjarangkan anak. Data ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana program KB telah memenuhi kebutuhan masyarakat. Semakin rendah angka unmeet need, menjelaskan bahwa pelayanan KB telah memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pada tahun 2012, persentase kebutihan keluarga berencana (KB) mencapai 9,8 persen. Di tahun 2017, persentase ini menurun menjadi 5,6 persen. Dan pada tahun 2020, persentase ini meningkat kembali menjadi 9,04 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020, semakin banyak Pasangan Usia Subur yang sudah kawin tidak menggunakan alat kontrasepsi.

### b) Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.

Pasangan Usia Subur adalah pasangan suami istri yang saat ini hidup bersama, baik bertempat tinggal resmi ataupun tidak, dimana usia istri antara 20 tahun sampai 45 tahun. Akseptor merujuk pada pasangan usia subur (PUS), yakni salah seorang dari PUS tersebut, menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi untuk tujuan pencegahan kehamilan. Secara umum, sasaran program KB dibagi menjadi 2, yaitu sasaran langsung dan sasaran tidak langsung. Sasaran langsung program KB adalah pasangan Usia Subur (PUS), dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan cara penggunaan kontrasepsi secara berkelanjutan. Adapun sasaran tidak langsung program KB ditujukan pada pelaksana dan pengelola KB sehingga penurunan tingkat kelahiran melalui pendekatan kebijaksanaan kependudukan terpadu dalam rangka mencapai keluarga yang berkualitas dan sejahtera dapat terwujud. Dengan melaksanakan program KB, yakni pengaturan kelahiran anak, diharapkan pasangan usia subur (PUS) dapat membentuk keluarga kecil bahagia dan sejahtera sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga

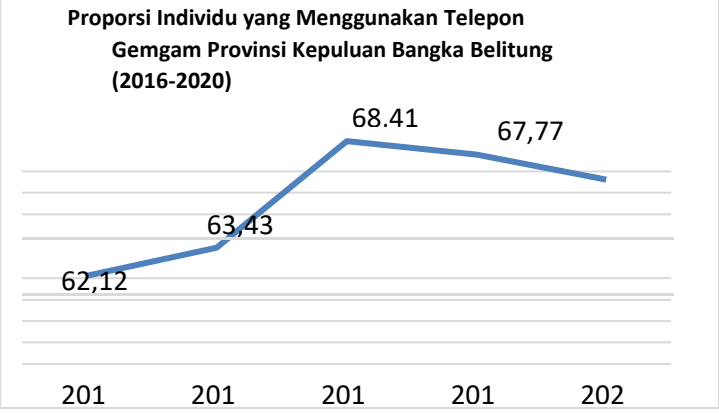



Pada tahun 2012, persentase pengetahuan dan pemahaman pasangan usia subur (PUS) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang metode kontrasepsi modern mencapai 99,2 persen. Persentase ini selanjutnya meningkat menjadi 99,8 persen. Di tahun 2020, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki target sasaran dengan persentase di tahun 2017, yakni 99,8 persen. Dan diperkirakan capaian angka ini akan juga meningkat di tahun 2020.

## F. Target Global 5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan

### a) Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.

Proporsi individu yang memiliki telepon genggam diperoleh dengan cara membagi jumlah individu yang menguasai/memiliki telepon genggam dengan jumlah penduduk pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). Data ini dapat digunakan untuk mengetahui atau menggambarkan tingkat



akses masyarakat terhadap komunikasi dan informasi melalui jaringan bergerak (mobile) Fixed Wireless Access dan seluler.

Pada tahun 2020, proporsi penduduk yang memiliki telepon gemgam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 66,61 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2017, jumlah orang yang menggunakan telepon gemgam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkat di tahun 2020. Namun, persentase ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2019, yakni mencapai 68,41 dan 67,77 persen. Dalam kurun waktu lima tahun, persentase kenaikan jumlah individu yang menggunakan telepon gemgam meningkat secara signifikan terjadi di tahun 2018, dimana kenaikan dari tahun 2017 ke tahun 2018 naik sebesar 4,98 persen. Kenaikan jumlah pengguna teleopn gemgam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikarenakan semakin meningkatknya kesadaran masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan fungsi telepon gemgam di dalam interaksi komunikasi, dan tuntutan dalam dunia kerja. Selanjutnya, peningkatan jumlah individu di dalam penggunaan teleopn gemgam juga dipengaruhi oleh kesadaran akan pentingnya pendidikan, dimana telepon gemgam menjadi salah satu alat bagi para guru dan orang tua untuk berkomunikasi dan bertukar informasi. Selanjutnya, kenaikan ini juga dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat, termasuk para pekerja dan pelajar, akan pentingnya telepon gemgam di dalam mengakses informasi dan pengetahuan, serta peningkatan perekonomian masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke arah yang lebih baik.

**Tabel II.74**

MATRIKS 1 - SASARAN CAPAIAN INDIKATOR : Tujuan 5 Keseteraan Gender

| Kode Indikator | Target/Indikator SDG'S | Sumber Data | Satuan | Kondisi Awal (2017) | Target 2020 | Capaian 2020 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tujuan SDGs : Tujuan 5 Kesetaraan Gender** | | | | | | | |
| **Target Global 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun** | | | | | | | |
| 5.1.1* | Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan. | | | 2 | 2 | 2 | |
| **Target Global 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya** | | | | | | | |
| 5.2.2.(a) | Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif | BPS | % | 100 | 100 | 100 | |
| **Target Global 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan** | | | | | | | |
| 5.3.1* | Proporsi Perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun. | BPS | % | 2,22 | 2,22 | 18,76 | |
| | Median usia kawin | | | | | | |

| Kode Indikator | Target/Indikator SDG'S | Sumber Data | Satuan | Kondisi Awal (2017) | Target 2020 | Capaian 2020 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.3.1.(a) | pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun | BPS | | 21,8 | 21,8 | 20.1 | |
| 5.3.1.(b) | Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility )Rate/ASFR | BPS | % | 50 | 50,6 | NA | |
| 5.3.1.(c) | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat | BPS | % | 82,88 | 82,82 | 87,15 | |
| **Target Global 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat** | | | | | | | |
| 5.5.1* | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah. | BPS | | 6,6 | 2.23 | 6,6 | |
| **Target Global 5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population andDevelopment and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.** | | | | | | | |
| 5.6.1(a) | Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi). | BPS | % | 10.40 | 9.65 | 9,04 | |
| 5.6.1(b) | Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern. | BPS | % | 99,8 | 99,8 | NA | |
| **Target Global 5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan** | | | | | | | |
| 5.b.1* | Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam. | BPS | % | 63,43 | 64,75 | 66,61 | |

## 6. TUJUAN 6 - AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK




Tujuan keenam, menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Secara nasional, tujuan tersebut memiliki 8 (delapan) target dengan 16 (enam belas) indikator, sedangkan untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menitikberatkan pada 6 (enam) target dengan 13 (tiga belas) indikator. Target yang menjadi fokus Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di antaranya adalah: (1)

Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua; (2) Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan; (3) Pada tahun 2030,

meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global; (4) Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air; (5) Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas sesuai kepantasan; dan (6) Pada tahun 2030, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.

**A. Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.**

Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman diukur dengan persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak (*improved basic drinking water source*), lokasi sumber berada di dalam atau di halaman rumah, tersedia setiap diperlukan, dan kualitas sumber air memenuhi syarat kualitas air minum. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Pencatatan indikator dilakukan melalui pendekatan 5 (lima) tingkatan (*ladder*) akses, yaitu:

1. Akses tidak tersedia, adalah apabila rumah tangga menggunakan sumber air permukaan (sungai, danau, waduk, kolam, irigasi) secara langsung tanpa pengolahan.
2. Akses tidak layak, adalah apabila rumah tangga menggunakan sumber air yang berasal dari sumur tidak terlindung dan/atau mata air tidak terlindung.
3. Akses layak terbatas, adalah apabila rumah tangga menggunakan sumber air layak dengan waktu pengambilan air lebih dari 30 menit.
4. Akses layak dasar, adalah apabila rumah tangga menggunakan sumber air layak dengan waktu pengambilan 30 menit atau kurang.
5. Akses aman, adalah apabila rumah tangga menggunakan sumber air layak, lokasi sumber berada di dalam atau di halaman rumah, tersedia setiap dibutuhkan, dan kualitas sumber air memenuhi syarat kualitas air minum.

Berikut adalah data untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik untuk rentang waktu Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020.

**Tabel II.75**

MATRIKS 1 - SASARAN CAPAIAN INDIKATOR : Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

*"Data termutakhir"*

| Indikator | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| **Akses Air Minum Layak (Persentase) --> METODE BARU** | | | | | | |
| Bangka | 73.64 | 74.48 | 78.17 | 64.93 | 65.83 | 63.22 |
| Belitung | 72.65 | 57.81 | 67.82 | 63.38 | 61.29 | 76.03 |
| Bangka Barat | 67.69 | 69.12 | 81.66 | 79.23 | 80.20 | 83.02 |
| Bangka Tengah | 83.12 | 78.95 | 75.76 | 77.76 | 81.43 | 80.20 |
| Bangka Selatan | 82.97 | 63.19 | 70.03 | 73.27 | 73.24 | 68.82 |
| Belitung Timur | 70.52 | 64.89 | 65.83 | 57.16 | 53.58 | 63.41 |
| Pangkalpinang | 92.22 | 94.74 | 92.81 | 94.74 | 95.58 | 93.86 |
| **BABEL** | **77.50** | **72.57** | **76.82** | **73.21** | **73.45** | **75.06** |
| **Akses Air Minum Aman (Persentase) --> METODE BARU** | | | | | | |
| Bangka | - | - | - | 20.49 | 17.62 | 18.52 |
| Belitung | - | - | - | 13.18 | 13.72 | 12.90 |
| Bangka Barat | - | - | - | 27.92 | 34.43 | 29.60 |
| Bangka Tengah | - | - | - | 26.78 | 26.71 | 23.21 |
| Bangka Selatan | - | - | - | 14.62 | 18.69 | 19.32 |
| Belitung Timur | - | - | - | 5.81 | 5.28 | 5.65 |
| Pangkalpinang | - | - | - | 19.99 | 27.46 | 20.82 |
| **BABEL** | - | - | - | **19.18** | **21.06** | **19.21** |
| **Sumber Air Minum (Persentase) --> Sumber Air Minum Terlindungi** | | | | | | |
| Bangka | 76.40 | 75.33 | 81.71 | 79.85 | 84.80 | 83.03 |
| Belitung | 85.16 | 85.49 | 82.92 | 83.70 | 87.58 | 91.12 |
| Bangka Barat | 72.30 | 73.61 | 77.59 | 76.07 | 75.25 | 76.89 |
| Bangka Tengah | 79.20 | 79.81 | 79.21 | 79.53 | 86.35 | 83.24 |
| Bangka Selatan | 75.52 | 69.28 | 71.98 | 74.54 | 77.39 | 74.95 |
| Belitung Timur | 85.41 | 80.14 | 83.63 | 82.25 | 86.74 | 87.88 |
| Pangkalpinang | 91.59 | 93.20 | 89.86 | 93.04 | 90.86 | 87.19 |
| **BABEL** | **80.22** | **79.17** | **80.98** | **81.17** | **84.09** | **83.19** |
| **Lokasi Air Minum (Persentase) --> DI RUMAH/KAWASAN DALAM PAGAR RUMAH** | | | | | | |
| Bangka | - | - | 50.32 | 30.41 | 26.39 | 29.52 |
| Belitung | - | - | 82.65 | 20.00 | 20.32 | 18.05 |
| Bangka Barat | - | - | 50.46 | 36.57 | 39.70 | 38.04 |
| Bangka Tengah | - | - | 51.84 | 31.15 | 29.72 | 27.46 |
| Bangka Selatan | - | - | 37.35 | 22.87 | 22.59 | 23.41 |
| Belitung Timur | - | - | 37.84 | 11.08 | 11.75 | 10.93 |
| Pangkalpinang | - | - | 67.18 | 20.84 | 30.45 | 22.42 |
| **BABEL** | - | - | **52.35** | **25.84** | **26.59** | **25.40** |
| **Kecukupan Air Minum (Persentase) --> TIDAK MENGALAMI KEKURANGAN AIR 24 JAM TERAKHIR** | | | | | | |
| Bangka | - | - | - | 96.49 | 96.85 | 95.41 |
| Belitung | - | - | - | 98.88 | 99.14 | 95.76 |
| Bangka Barat | - | - | - | 97.34 | 96.93 | 95.14 |
| Bangka Tengah | - | - | - | 99.65 | 98.12 | 99.04 |
| Bangka Selatan | - | - | - | 96.80 | 97.54 | 94.88 |
| Belitung Timur | - | - | - | 99.94 | 98.23 | 97.01 |
| Pangkalpinang | - | - | - | 100.00 | 96.70 | 98.96 |
| **BABEL** | - | - | - | **98.19** | **97.53** | **96.46** |
| **Akses Sanitasi Layak (Persentase) --> METODE BARU** | | | | | | |
| Bangka | 87.62 | 84.38 | 91.12 | 93.88 | 93.61 | 95.18 |
| Belitung | 80.96 | 80.88 | 84.53 | 86.81 | 87.59 | 91.16 |

| Indikator | | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | Bangka Barat | 79.60 | 79.54 | 81.90 | 83.80 | 89.12 | 93.64 |
| | Bangka Tengah | 85.17 | 85.63 | 86.93 | 90.69 | 94.61 | 94.45 |
| | Bangka Selatan | 72.49 | 75.63 | 74.03 | 81.12 | 82.02 | 85.27 |
| | Belitung Timur | 66.29 | 79.49 | 82.07 | 76.21 | 83.63 | 87.35 |
| | Pangkalpinang | 94.18 | 95.57 | 97.61 | 95.46 | 97.06 | 97.26 |
| | **BABEL** | **82.23** | **83.35** | **86.23** | **87.95** | **90.32** | **92.58** |
| **Akses Sanitasi Aman (Persentase) --> METODE BARU** | | | | | | | |
| | Bangka | - | - | 5.54 | 4.32 | 5.93 | 7.27 |
| | Belitung | - | - | 12.54 | 9.70 | 13.91 | 16.51 |
| | Bangka Barat | - | - | 2.49 | 2.27 | 3.99 | 4.37 |
| | Bangka Tengah | - | - | 1.55 | 3.05 | 0.94 | 3.14 |
| | Bangka Selatan | - | - | 0.08 | 0.98 | 0.43 | 1.68 |
| | Belitung Timur | - | - | 5.49 | 5.92 | 9.24 | 6.75 |
| | Pangkalpinang | - | - | 8.82 | 9.75 | 10.84 | 7.32 |
| | **BABEL** | - | - | **5.24** | **5.04** | **6.34** | **6.74** |

**B. Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.**

Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk sarana cuci tangan dengan air dan sabun, diukur melalui 5 (lima) indikator, namun untuk Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menitikberatkan kepada 4 (empat) indikator yang di antaranya: Indikator 6.2.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air; Indikator 6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak; Indikator 6.2.1.(c) Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka; dan Indikator 6.2.1.(e) Persentase rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.

Akses Aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T).

Akses Layak Sendiri adalah: (i) apabila rumah tangga (di perkotaan atau di perdesaan) menggunakan fasilitas sendiri, di mana bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik; (ii) untuk di perdesaan, apabila rumah tangga menggunakan fasilitas sendiri, di mana bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa dan bangunan bawahnya lubang tanah.

Akses Layak Bersama adalah: (i) apabila rumah tangga (di perkotaan atau di perdesaan) menggunakan fasilitas bersama dengan rumah tangga lain tertentu, di mana bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik atau IPALD; (ii) khusus di perdesaan, apabila rumah tangga menggunakan fasilitas bersama rumah tangga lain tertentu, di mana bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa dan bangunan bawahnya lubang tanah.

Akses Belum Layak adalah (i) apabila rumah tangga di perkotaan menggunakan fasilitas sanitasi sendiri atau bersama dengan rumah tangga tertentu, dengan jenis kloset leher angsa dan bangunan bawah lubang tanah; (ii) apabila rumah tangga (di perkotaan atau di perdesaan) menggunakan fasilitas sendiri atau bersama, di mana bangunan atas menggunakan plengsengan dengan dan tanpa tutup, dan cubluk/cemplung, dengan bangunan bawahnya tangki septik/ IPALD/ lubang tanah; serta (iii) apabila rumah tangga (di perkotaan atau perdesaan) menggunakan fasilitas sanitasi di fasilitas umum (toilet pasar, terminal, masjid, dll).

BABS tertutup adalah rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi dengan pembuangan akhir tinja berupa kolam/sawah/sungai/danau/laut dan/atau pantai/tanah lapang/kebun dan lainnya. Sedangkan Buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka adalah apabila rumah tangga tidak memiliki fasilitas sanitasi atau memiliki fasilitas sanitasi tetapi tidak menggunakannya. Pilar pertama yang terdapat pada lima Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) atau yang dikenal juga dengan *Open Defecation Free* (ODF). Kondisi Stop BABS adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.

Mencuci tangan dengan air saja tidak cukup. Menurut penelitian, perilaku mencuci tangan pakai sabun merupakan intervensi kesehatan yang paling murah dan efektif dilakukan dibandingkan dengan cara lainnya untuk mengurangi risiko penularan penyakit. Data yang diukur menggunakan variabel kombinasi antara perilaku cuci tangan dan ketersediaan sarana prasarana cuci tangan dengan sabun dan air. Hal ini dimaksudkan agar variabel yang diukur dapat secara tepat menggambarkan kondisi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan disertai dengan perilaku mencuci tangan dengan sabun dan air, sehingga lebih tepat sasaran. Lumpur tinja adalah campuran padatan dan fluida yang diambil dari sub-sistem pengolahan setempat (tangki septik). Instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) adalah instalasi tempat mengolah lumpur tinja rumah tangga agar aman untuk dibuang ke perairan.

Berikut adalah data untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik untuk Tahun 2019.

**Tabel II.76**

Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Fasilitas Tempat Buang Air Besar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 *"Data termutakhir"*

| | Apakah memiliki fasilitas tempat buang air besar? | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ada, digunakan hanya ART sendiri (%) | Ada, digunakan bersama rumah tangga tertentu (%) | Ada, di MCK komunal (%) | Ada, di MCK Umum/ siapapun menggunakan (%) | Ada, ART tidak menggunakan (%) | Tidak ada fasilitas (%) |
| 1901. BANGKA | 91.75 | 2.87 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | 3.75 |
| 1902. BELITUNG | 87.13 | 1.38 | 0.29 | 1.21 | 0.26 | 9.73 |
| 1903. BANGKA BARAT | 86.42 | 4.16 | 1.00 | 0.74 | 0.00 | 7.68 |

| | Apakah memiliki fasilitas tempat buang air besar? | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ada, digunakan hanya ART sendiri (%) | Ada, digunakan bersama rumah tangga tertentu (%) | Ada, di MCK komunal (%) | Ada, di MCK Umum/ siapapun menggunakan (%) | Ada, ART tidak mengguna kan (%) | Tidak ada fasilitas (%) |
| 1904. BANGKA TENGAH | 92.25 | 3.79 | 0.00 | 2.39 | 0.00 | 1.5 |
| 1905. BANGKA SELATAN | 80.04 | 5.68 | 0.69 | 0.35 | 0.00 | 13.25 |
| 1906. BELITUNG TIMUR | 81.02 | 3.36 | 0.00 | 5.17 | 0.47 | 9.98 |
| 1971. PANGKAL PINANG | 98.38 | 0.88 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.18 |
| **TOTAL** | **88.84** | **3.11** | **0.27** | **1.55** | **0.08** | **6.15** |

**Tabel II.77**
Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 *"Data termutakhir"*

| | Dimanakah tempat pembuangan akhir tinja? | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tangki septik (%) | IPAL (%) | Kolam/sawah/sungai/ danau/laut (%) | Lubang tanah (%) | Pantai/ tanah lapang/ kebun (%) | Lainnya (%) |
| 1901. BANGKA | 87,95 | 1,57 | 0,77 | 9,70 | 0,01 | 0,00 |
| 1902. BELITUNG | 98,30 | 0,14 | 0,69 | 0,68 | 0,18 | 0,01 |
| 1903. BANGKA BARAT | 95,90 | 0,53 | 1,42 | 2,15 | 0,00 | 0,00 |
| 1904. BANGKA TENGAH | 98,36 | 0,00 | 0,34 | 1,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1905. BANGKA SELATAN | 90,26 | 0,00 | 0,37 | 8,94 | 0,43 | 0,00 |
| 1906. BELITUNG TIMUR | 99,11 | 0,00 | 0,85 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| 1971. PANGKAL PINANG | 97,79 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,86 |
| **PROVINSI** | **94,57** | **0,45** | **0,84** | **3,93** | **0,08** | **0,13** |

## C. Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung fokus pada Indikator 6.3.2.(b) yaitu kualitas air sungai sebagai sumber air baku, yang merupakan pendekatan dalam mengetahui kualitas air ambien yang baik pada badan air.

Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalaian Pencemaran Air. Air

permukaan (air sungai, danau, dan waduk/bendungan) dan air tanah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia seperti: sumber air minum, perumahan, irigasi, peternakan, perikanan pembangkit listrik, transportasi, dan sebagai tempat rekreasi.

Ada 7 (tujuh) parameter yang digunakan dalam menghitung indeks kualitas air (IKA), yang dianggap mewakili kondisi riil kualitas air permukaan yaitu: TSS (*total suspended solid* atau **zat padat tersuspensi); DO (*dissolved oxygen* atau oksigen terlarut); BOD (*biochemical oxygen demand* atau kebutuhan oksigen biokimiawi); COD (*chemical oxygen demand* atau kebutuhan** oksigen kimiawi) T-P (*total phosfat*); *fecal coli* dan total coli. Kualitas air tanah dilihat dari meningkatnya (atau menurunnya) 7 (tujuh) parameter indeks kualitas air (IKA) pada air tanah pada daerah terpilih yang diukur.

**D. Target 6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.**

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menitikberatkan pada Indikator 6.4.1.(a) yaitu pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah, dimulai dengan upaya rencana pembuatan DED dan pembangunan fasilitas pemakaian air tanah, serta melakukan survey geolistrik untuk pendugaan lapisan akuifer bawah permukaan yang terdapat dalam Program Peningkatan Pengelolaan Geologi dan Air Tanah.

**E. Target 6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas sesuai kepantasan.**

Derajat indikator pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu atau *Integrated Water Resources Management* (IMWR) dihitung dalam persen (%) dari 0 (pelaksanaan belum dimulai) sampai 100 (dilaksanakan penuh).

Ada empat dimensi yang melandasi pelaksanaan IWRM di Indonesia, yaitu (i) lingkungan pendukung, (ii) kelembagaan dan peran serta, (iii) pendanaan dan (iv) instrument pengelolaan. Data Indikator 6.5.1 dikumpulkan melalui kuesioner dan tanggapan, dan dikonsolidasikan melalui konsultasi antara pemangku kepentingan yang relevan, seperti Kementerian dan Lembaga yangterkait dalam manajemen sumber daya air serta pemangku kepentingan seperti LSM, akademisi dan bisnis.

Kebijakan, peraturan perundangan-undangan dan perencanaan merupakan faktor lingkungan yang mendukung pelaksanaan IWRM. Peran serta kelembagaan politis, sosial, ekonomi dan administrasi/birokrasi memiliki peran yang cukup besar dan dapat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan IWRM, termasuk juga dalam mendorong instrumen pengelolaan. Berbagai sumber pendanaan perlu dimobilisasi dan disediakan dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya air (diluar pendanaan untuk air minum dan sanitasi).

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung fokus pada beberapa indikator di antaranya Indikator 6.5.1.(e) yaitu luas pengembangan hutan serta peningkatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS. Indikator tersebut didukung melalui Program Peningkatan Tata Kelola Hutan dengan kegiatan berupa peningkatan

usaha hasil hutan kayu, pengembangan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan kawasan hutan, dan expo pengembangan dan promosi hasil hutan. Sementara indikator lainnya yaitu; Indikator 6.5.1.(h) jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan; Indikator 6.5.1.(i) jumlah DAS prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah.

## F. Target 6.6 Pada tahun 2030, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air.

Ekosistem perairan adalah lahan vegetasi, sungai, danau, waduk dan air tanah, serta mata air yang ada di pegunungan dan hutan, yang memainkan peran khusus dalam menyimpan air tawar dan menjaga kualitas air.

Perubahan tingkat kualitas dan kuantitas sumber daya air pada ekosistem perairan dari waktu ke waktu diindikasikan terhadap perubahan beberapa sub-indikator berikut: (1) ekosistem yang mempengaruhi ketersediaan sumber daya air; (2) kualitas air danau dan waduk/bendungan; (3) kuantitas air sungai; (4) kualitas badan air (permukaan dan tanah); dan (5) kuantitas akuifer air tanah. Indikator ini digunakan untuk memantau perubahan ekosistem terkait ketersediaan sumber daya air dari waktu ke waktu.

Dalam mendukung Target 6.6 ini, Pemerintah Provinsi Kepuluan Bangka Belitung menitikberatkan pada Indikator 6.6.1.(d) Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitas, dan Indikator 6.6.1.(e) Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya, yang di dalam penerapan peran serta dukungan melalui Program Peningkatan Pengelolaan DAS dan Pemberdayaan Masyarakat, Program Peningkatan Pelayanan Teknis Tata Kelola Dinas Kehutanan, serta Program Peningkatan Pengendalian Dan Penaatan Lingkungan Hidup. Kegiatan-kegiatan dalam program tersebut di antaranya: Pembinaan dan pegelolaan daerah aliran sungai; Pemenuhan kewajiban rehabilitasi DAS bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH); Penyusunan rencana pengelolaan kawasan hutan; Identifikasi kualitas air sungai di Provinsi Kepulauan Bangka Beitung; Penyusunan dokumen rencana aksi daerah dalam peningkatan kualitas sungai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Pemantauan dan pelaporan tindak lanjut rekomendasi pelaksanaan rencana aksi peningkatan kualitas sungai berbasis kinerja Tim Pokja; Perhitungan daya tampung beban pencemaran sungai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; serta Pengendalian Beban Pencemaran Air. Dari kegiatan-kegiatan tersebut juga mendukung indikator target sebelumnya yaitu Indikator 6.5.1.(h) jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan, dan Indikator 6.5.1.(i) jumlah DAS prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah.

**Tabel II.78**

MATRIKS I SASARAN CAPAIAN INDIKATOR : Tujuan 6 Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua *"Data termutakhir"*

| Kode Indikator | Target/Indikator SDG'S | Sumber Data | Satuan | Kondisi Awal (2017) | Target | Capaian | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2020 | 2020 | |
| **Tujuan SDGs : Tujuan 6 Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua** | | | | | | | |
| **Target Global 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua** | | | | | | | |
| 6.1.1.(a) | Jaringan distribusi air minum yang terpasang | Dalev Renja Perangkat Daerah | SR | | 400 SR | 2019 = 150 SR; 2020 = 0 (*refocusing)* | ▼ |
| | Jaringan distribusi air minum yang terpasang di Kawasan kumuh | Dalev Renja Perangkat Daerah | Lokasi | | 2 Lokasi | 0 (*refocusing*) | ▼ |
| 6.1.1.(b) | Jumlah dokumen yang tersusun di kawasan KTM batu betumpang | Dalev Renja Perangkat Daerah | Dok | | 1 Dok | 0 (*refocusing*) | ▼ |
| | Jumlah kapasitas tampungan air baku di kawasan KTM batu betumpang | Dalev Renja Perangkat Daerah | $m^3$ | | 10.000 $m^3$ | 0 (*refocusing*) | ▼ |
| | Jumlah kapasitas tampungan air baku di KSP Sadai | Dalev Renja Perangkat Daerah | $m^3$ | | 10.000 $m^3$ | 0 (*refocusing*) | ▼ |
| | Jumlah dokumen yang tersusun di kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga | Dalev Renja Perangkat Daerah | Dok | | 1 Dok | 0 (*refocusing*) | ▼ |
| | Jumlah kapasitas tampungan air baku di kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga | Dalev Renja Perangkat Daerah | $m^3$ | | 10.000 $m^3$ | 0 (*refocusing*) | ▼ |
| | Jumlah kapasitas tampungan air baku di kawasan konektifitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera | Dalev Renja Perangkat Daerah | $m^3$ | | 10.000 m3 | 0 (*refocusing*) | ▼ |
| | Jumlah kapasitas tampungan air baku di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil | Dalev Renja Perangkat Daerah | $m^3$ | | 10.000 $m^3$ | 0 (*refocusing*) | ▼ |
| | Jumlah kapasitas tampungan air baku di kawasan strategis industri terpadu air kelik | Dalev Renja Perangkat Daerah | $m^3$ | | 10.000 $m^3$ | 0 (*refocusing*) | ▼ |
| | Jumlah kapasitas tampungan air baku | Dalev Renja Perangkat Daerah | $m^3$ | | 16.700 $m^3$ | 0 (*refocusing*) | ▼ |

| Kode Indikator | Target/Indikator SDG'S | Sumber Data | Satuan | Kondisi Awal (2017) | Target | Capaian | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2020 | 2020 | |
| **Target Global 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.** | | | | | | | |
| 6.2.1.(a) | Jumlah laporan kegiatan rakor GMDM | Dalev Renja Perangkat Daerah | dok | | 7 dokumen | 1 dokumen | |
| | Jumlah masyarakat yang berpartisivasi pada germas | Dalev Renja Perangkat Daerah | orang | | 1200 orang | 208 orang | |
| | Jumlah informasi promosi kesehatan melalui Media KIE | Dalev Renja Perangkat Daerah | paket | | 10 paket informasi | 0 (*refocusing*) | |
| | jumlah kasus hypotiroid kongenital yang terdeteksi pada bayi baru lahir | Dalev Renja Perangkat Daerah | kasus | | 2000 kasus hypotiroid kongenital | 0 (*refocusing*) | |
| 6.2.1.(b) | jumlah sarana air limbah yang terbangun di Kawasan Strategis Provinsi | Dalev Renja Perangkat Daerah | unit | | 11 unit | 0 (*refocusing*) | |
| | Jumlah sarana air limbah yang terbangun di Kawasan kumuh | Dalev Renja Perangkat Daerah | unit | | 2 unit | 0 (*refocusing*) | |
| 6.2.1.(c) dan 6.2.1.(e) | Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan STBM | Dalev Renja Perangkat Daerah | % | | 94% | 89,19% | |
| | Persentase desa/kelurahan yang ODF | Dalev Renja Perangkat Daerah | % | | 37% | 0 (*refocusing*) | |
| **Target Global 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.** | | | | | | | |
| 6.3.2.(b) | Panjang saluran / sungai | Dalev Renja Perangkat Daerah | m | | 43.000 m | 0 (*refocusing*) | |
| | Panjang talud yang direhab | Dalev Renja Perangkat Daerah | m | | 2.200 m | 6.500 m | |
| | Jumlah dokumen Inspeksi kondisi saluran/sungai | Dalev Renja Perangkat Daerah | dok | | 1 Dok | 0 (*refocusing*) | |
| | Jumlah dokumen Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai yang tersusun | Dalev Renja Perangkat Daerah | dok | | 1 Dok | 0 (*refocusing*) | |
| | Luas DAS kritis yang terehabilitasi | Dalev Renja Perangkat Daerah | Ha | | 200 Ha | 0,19% | |
| | Jumlah IPPKH yang melaksanakan rehabilitasi DAS | Dalev Renja Perangkat Daerah | Unit | | 6 | 0 (*refocusing*) | |

| Kode Indikator | Target/Indikator SDG'S | Sumber Data | Satuan | Kondisi Awal (2017) | Target | Capaian | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2020 | 2020 | |
| | Luas tegakan benih yang teridentifikasi dan terseleksi | Dalev Renja Perangkat Daerah | Ha | | 20 Ha | 0 (*refocusing*) | |
| | Luas rehabilitasi hutan dan lahan | Dalev Renja Perangkat Daerah | Ha | | 80 Ha | 0,71% | |
| | Jumlah titik pantau Kualitas Air Sungai yang teridentifikasi | Dalev Renja Perangkat Daerah | Titik pantau | | 81 Titik Pantau | 0 (*refocusing*) | |
| | Dokumen Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai yang terhitung | Dalev Renja Perangkat Daerah | Dok | | 1 Dokumen | 0 (*refocusing*) | |
| | Persentase rekomendasi Peningkatan Kualitas Sungai yang ditindak lanjuti | Dalev Renja Perangkat Daerah | % | | 50% | 0 (*refocusing*) | |
| | Rekomendasi pengendalian Beban pencemaran air | Dalev Renja Perangkat Daerah | Rekomendasi | | 1 Rekomendasi | 0,92% | |
| **Target Global 6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.** | | | | | | | |
| 6.4.1.(a) | Jumlah survey cadangan air tanah pada Cekungan Air Tanah yang potensial | Dalev Renja Perangkat Daerah | Kali | | 4 | 0 | |
| | Jumlah DED pembangunan fasilitas air tanah | Dalev Renja Perangkat Daerah | DED | | 1 | 0 | |
| **Target Global 6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas sesuai kepantasan.** | | | | | | | |
| 6.5.1.(e) | Jumlah izin usaha hasil hutan kayu (Izin) | | izin | | 12 | 0 (*refocusing*) | |
| | Jumlah hasil hutan bukan kayu yang dikembangkan | | jenis | | 2 | 0 (*refocusing*) | |
| | Jumlah izin pemanfaatan kawasan | | izin | | 14 | 0 (*refocusing*) | |
| | Jumlah expo/promosi hasil hutan yang diikuti | | kali | | 1 | 0 (*refocusing*) | |
| **Target Global 6.6 Pada tahun 2030, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.** | | | | | | | |
| 6.5.1.(h), 6.5.1.(i), 6.6.1.(d), dan 6.6.1.(e) | Luas DAS kritis yang terehabilitasi | | Ha | | 200 Ha | 0 (*refocusing*) | |

| Kode Indikator | Target/Indikator SDG'S | Sumber Data | Satuan | Kondisi Awal (2017) | Target | Capaian | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2020 | 2020 | |
| | Jumlah IPPKH yang melaksanakan rehabilitasi DAS | | Unit | | 6 | 0 (*refocusing*) | ▼ |
| | Jumlah dokumen pengelolaan kawasan hutan | | dok | | 6 | 0 (*refocusing*) | ▼ |
| | Jumlah titik pantau Kualitas Air Sungai yang teridentifikasii | | Titik | | 81 Titik | 0 (*refocusing*) | ▼ |
| | Dokumen Rencana Aksi Daerah dalam Peningkatan Kualitas Sungai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | dok | | 2 dok | 0 (*refocusing*) | ▼ |
| | Persentase rekomendasi Peningkatan Kualitas Sungai yang ditindak lanjuti | | % | | 0,5 | 0 (*refocusing*) | ▼ |
| | Dokumen Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai yang terhitung | | Dok | | 1 Dokumen | 0 (*refocusing*) | ▼ |
| | Rekomendasi pengendalian Beban pencemaran air | | Rekomendasi | | 1 Rekomendasi | 0 (*refocusing*) | ▼ |

## 7. TUJUAN 7 - ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU



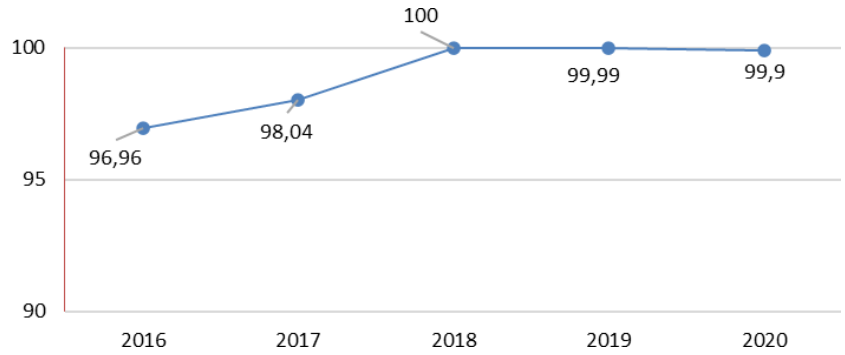

Sektor energi dan sumber daya mineral merupakan sektor strategis dan menjadi andalan dalam mendukung pembangunan dan perekonomian daerah. Seluruh kegiatan perekonomian maupun kegiatan-kegiatan yang lain memerlukan energi untuk dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, menjamin akses energi yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan untuk semua sangat penting dalam mendukung pembangunan, baik pada pilar pembangunan ekonomi maupun pilar pembangunan lainnya.

### A. Indikator 7.1.1* Rasio Elektrifikasi

Indikator ini digunakan untuk mengetahui jumlah rumah tangga yang sudah mendapatkan akses listrik. Pengukuran ketersediaan pasokan listrik salah satunya dapat diketahui melalui nilai Rasio Elektrifikasi (RE). Rasio Elektrifikasi merupakan perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga. Ketersediaan energi listrik menjadi pendongkrak perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat, karena dengan adanya fasilitas listrik untuk penerangan, pemanfaatan waktu belajar anak di rumah bisa lebih lama dan aktifitas

ekonomi di rumah tangga yang mengusahakan aktifitas ekonomi di rumah dapat lebih berlangsung sampai malam hari.

**Grafik II.102**
Rasio Elektrifikasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



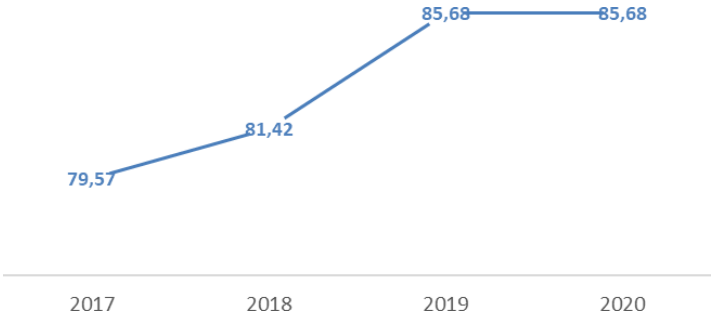

*Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung "Data termutakhir"*

Pada tahun 2019 rasio elektrifikasi sebesar 99,99 persen namun pada 2020 rasio elektrifikasi Bangka Belitung sebesar 99,9 persen. Tingginya rasio elektrifikasi menunjukkan bahwa seluruh masyarakat di wilayah Bangka Belitung bisa menikmati pasokan listrik untuk kehidupan sehari-hari dan kebutuhan usaha.

## B. Indikator 7.1.2.(b) Rasio Penggunaan Gas Rumah Tangga

Rasio penggunaan gas rumah tangga merupakan indikator yang digunakan untuk melihat proporsi rumah tangga yang telah memanfaatkan gas sebagai bahan bakar untuk memasak dibanding total rumah tangga secara keseluruhan.

**Grafik II.103**
Rasio Penggunaan Gas Rumah Tangga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung




*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung "Data termutakhir"*

Rasio penggunaan gas rumah tangga baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2019, rasio penggunaan gas rumah tangga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkat sebesar 4,26 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dan dalam periode dua tahun meningkat sebesar 6,11 persen.

**Tabel II.79**

MATRIKS I SASARAN CAPAIAN INDIKATOR : : Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau

*"Data termutakhir"*

| Kode Indikator | Target/Indikator SDG'S | Sumber Data | Satuan | Kondisi Awal (2017) | Target 2020 | Capaian 2020 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tujuan SDGs : Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau** | | | | | | | |
| **Target 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.** | | | | | | | |
| 7.1.1* | Rasio elektrifikasi. | ESDM/PLN | % | 97,62 | 100 | 99,9 | |
| 7.1.1.(a) | Konsumsi listrik per kapita. | ESDM | | 631,79 | 735,55 | 735,55 | |
| 7.1.2.(b) | Rasio penggunaan gas rumah tangga | ESDM | % | 79,57 | 79,65 | 85,68 | |

## 8. TUJUAN 8 - PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI




Pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif menjadi salah satu target dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Tujuan 8 meliputi target-target seperti mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita, menciptakan tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, meningkatkan kebijakan pembangunan dan mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja yang semakin layak, mendorong formalisasi dan pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan (NEET), mengurangi pekerja anak, mempromosikan pariwisata berkelanjutan, dan memperkuat lembaga keuangan.

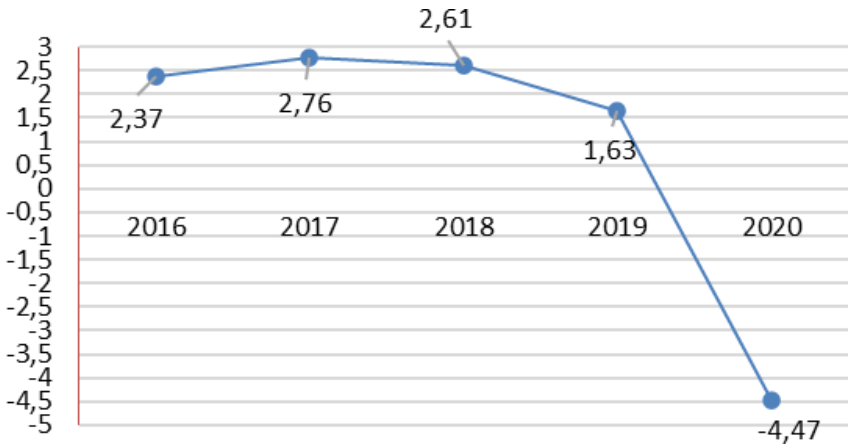
Adanya pandemi COVID-19 berimplikasi kepada menurunnya pencapaian pada sebagian besar indikator yang termasuk ke dalam tujuan ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga kebijakan yang mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional yang bersifat inklusif, merata dan berkelanjutan pada masa pemulihan pasca pandemi COVID-19 menjadi sangat krusial.

### C. Indikator 8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita

Laju pertumbuhan PDB atau PDRB per kapita mengukur perubahan standar kehidupan rata-rata penduduk. PDB atau PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi PDB atau PDRB atas harga dasar konstan dengan jumlah penduduk. Pada tahun 2017-2020, laju pertumbuhan PDRB per kapita di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus mengalami perlambatan.

**Grafik II.104**

Laju PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung




*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung "Data termutakhir"*

Pertumbuhan PDRB per kapita tahun 2020 sebesar -4,47 persen, menurun 6,1 poin dari tahun 2019. Perlambatan ini dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19 yang mempengaruhi perekonomian di berbagai sektor.

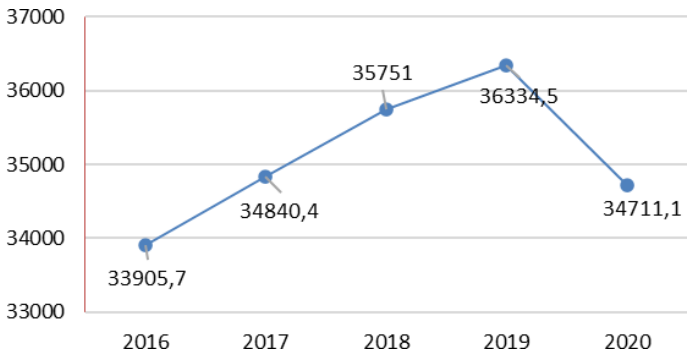
## D. Indikator 8.1.1.(a) PDB per kapita (ribu rupiah)

Semenjak tahun 2016 hingga 2019, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara konsisten mengalami pertumbuhan dari Rp33.905,70 ribu di tahun 2016 menjadi Rp36.334,50 ribu di tahun 2019, selanjutnya mengalami perlambatan pada tahun 2020 menjadi Rp34.711,10 ribu.

Adanya Pandemi COVID-19 turut memperparah pencapaian pertumbuhan PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**Grafik II.105**

PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung




*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung "Data termutakhir"*

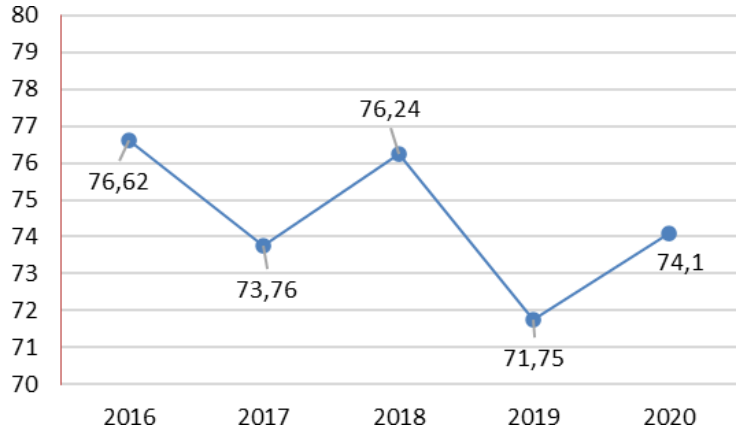
## E. Indikator 8.3.1.(a) Persentase tenaga kerja formal

Tenaga kerja formal merupakan penduduk yang bekerja dengan status pekerjaan utama sebagai berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar dan buruh/karyawan/pegawai.

Presentase tenaga kerja formal dapat diperoleh dengan membagi jumlah penduduk yang bekerja di sektor formal dengan penduduk yang bekerja dikalikan dengan 100 persen.

**Grafik II.106**

Persentase Tenaga Kerja Formal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung




*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung "Data termutakhir"*

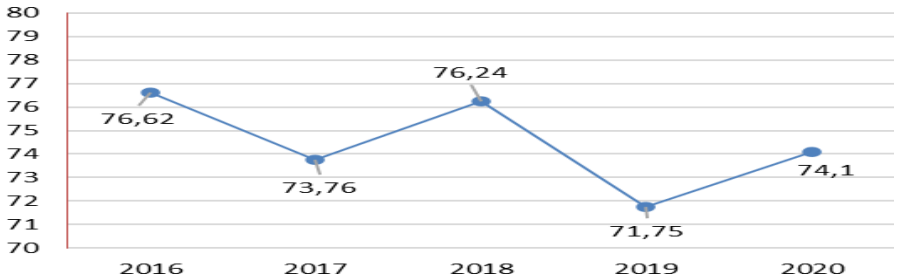
Pada tahun 2021, penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bekerja di kegiatan formal sebanyak 344,22 ribu orang atau 49,07 persen. Kondisi ini meningkat jika dibandingkan tahun 2020 sebesar 47,07 persen.

## F. Indikator 8.3.1.(b) Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor/lapangan pekerjaan yang banyak menyerap tenaga kerja, khususnya di daerah perdesaan. Sebagian besar pekerja dari sektor pertanian merupakan pekerja informal. Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung fluktuatif.

**Grafik II.107**

Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung




*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung "Data termutakhir"*

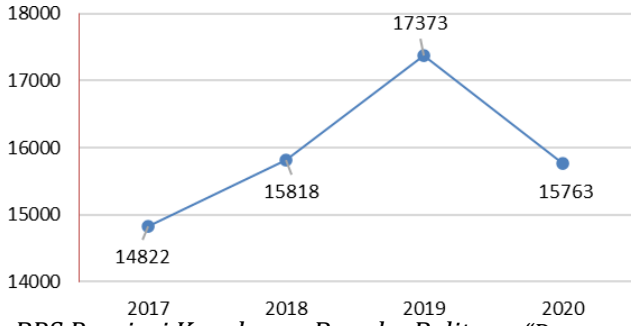
Bila dibandingkan dengan total tenaga kerja, pekerja informal sektor pertanian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2020 sebesar 74,1 persen persen atau mengalami kenaikan dari tahun 2019 yaitu sebesar 71,75 persen.

## G. Indikator 8.5.1* Upah rata-rata per jam pekerja

Upah dapat menggambarkan kualitas pekerjaan dan kondisi kehidupan seseorang. Upah rata-rata per jam kerja merupakan imbalan atau penghasilan rata-rata yang diperoleh per jam baik berupa uang maupun barang.

**Grafik II.108**

Upah Rata-Rata Per Jam Pekerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung




*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung "Data termutakhir"*

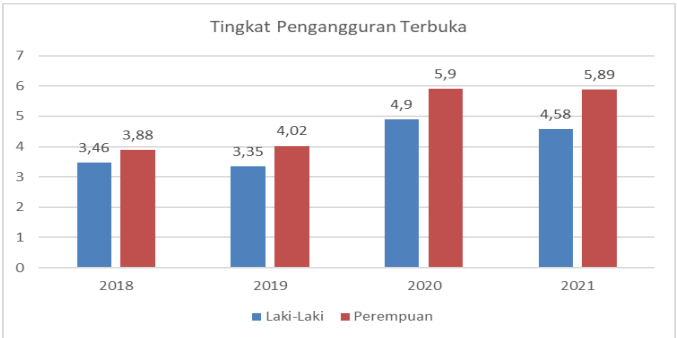
Sejak tahun 2017 hingga tahun 2019, upah rata-rata per jam kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2020 upah rata-rata per jam kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya sebesar Rp15.763,00 lebih kecil dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp17.373,00. Kondisi upah rata-rata per jam kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yaitu Rp17.969,00

## H. Indikator 8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan jenis kelamin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2020. Tahun 2021, TPT laki-laki hanya sebesar 4,58 persen menurun 0,32 persen dari tahun 2020 yaitu 4,9 persen, dan TPT perempuan mencapai 5,89 persen menurun 0,01 persen dari tahun 2020 yaitu 5,9 persen.

**Grafik II.109**

Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung




*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung "Data termutakhir"*

Hal ini mungkin terjadi karena preferensi pemberi kerja yang lebih menginginkan pekerja laki-laki dibanding pekerja perempuan karena dianggap lebih mampu melakukan pekerjaan yang berat sekalipun.

**Tabel II.80**

MATRIKS I SASARAN CAPAIAN INDIKATOR : Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

| Kode Indikator | Target/Indikator SDG'S | Sumber Data | Satuan | Kondisi Awal (2017) | Target 2020 | Capaian 2020 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tujuan SDGs : Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi** | | | | | | | |
| **Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembangasuk pelatihan kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, program teknik, program rekayasa dan ilmiah, di negara maju dan negara berkembang lainnya** | | | | | | | |
| 8.1.1* | Laju pertumbuhan PDB per kapita | BPS | % | 4,11 | 4,5 | -0,22 | ▼ |
| 8.1.1.(a) | PDB per kapita (ribu rupiah) | BPS | Rp | 46.457 | 55.401 | 49,77 | ▶ |
| **Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan** | | | | | | | |
| 8.3.1* | Proporsi lapangan kerja informal sektor nonpertanian, berdasarkan jenis kelamin | BPS | % | 36,13 | 36,01 | 42,74 | ▶ |
| 8.3.1.(a) | Persentase tenaga kerja formal | BPS | % | 51,62 | 51,75 | 47,07 | ● |
| 8.3.1.(b) | Persentase tenaga kerja Informal sektor pertanian | BPS | % | 73,76 | 73,62 | 74,1 | ▶ |
| **Target 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.** | | | | | | | |
| 8.5.1* | Upah rata-rata per jam pekerja | BPS | persen | 14,777 | 16.865,15 | 15.763,00 | ▶ |
| 8.5.2* | Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur | BPS | | 3,78 | 5,5 | 5,25 | ▶ |
| 8.5.2.(a) | Persentase setengah pengangguran | BPS | | 5,9 | 5,6 | 9,11 | ▼ |
| **Target 8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan** | | | | | | | |
| 8.6.1* | Persentase usia muda (15-24) yang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan | BPS | Persen | 21,15 | 22,53 | 27,34 | ● |
| **Target 8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya** | | | | | | | |
| 8.8.1.(a) | Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3 | DISNAKER | Persentase | 7,13 | 2,73 | 7,13 | ● |
| **Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan** | | | | | | | |

| Kode Indikator | Target/Indikator SDG'S | Sumber Data | Satuan | Kondisi Awal (2017) | Target 2020 | Capaian 2020 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.** | | | | | | | |
| 8.9.1.(a) | Jumlah wisatawan mancanegara | BPS/Dinas Pariwisata | Orang | 7.183 | 7.615 | 2,476 | ▼ |
| 8.9.1.(b) | Jumlah kunjungan wisatawan nusantara. | BPS/Dinas Pariwisata | Orang | 362.992 | 405.175 | 223,951 | ▼ |

*"Data termutakhir"*

## 9. TUJUAN 9 - INDUSTRI, INOVASI, DAN INFRASTRUKTUR




Tujuan kesembilan, membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Secara nasional, tujuan tersebut memiliki 8 (delapan) target dengan 23 (dua puluh tiga) indikator, sedangkan untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menitikberatkan pada 4 (empat) target dengan 13 (tiga belas) indikator.

Target yang menjadi fokus Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di antaranya adalah: (1) Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.; (2) Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang; (3) Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing; (4) Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara negara kurang berkembang pada tahun 2020.

### A. Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.

Kondisi mantap jalan nasional merupakan proporsi dari panjang jalan nasional yang memenuhi kategori kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan nasional. Kategori kondisi baik dan sedang yaitu kondisi jalan yang memiliki kerataan permukaan yang memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman, dengan di mana angka *Roughness Indeks* (IRI), di bawah 4 untuk kondisi baik dan di bawah 8 untuk kondisi sedang. Pengukuran kondisi jalan ini menggunakan alat *roughometer* dengan satuan Internasional *Roughness* Indeks (IRI) yang menyatakan akumulasi naik turunnya muka jalan sepanjang 1 kilometer jalan (m/km).

Ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri PU Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan.

Cara perhitungan kondisi mantap jalan nasional diperoleh dari panjang jalan nasional yang memenuhi kategori kondisi baik dan sedang dibagi dengan total panjang jalan nasional dan dikalikan 100 persen. Tujuan perhitungan ini adalah untuk mengetahui proporsi kondisi jalan nasional yang memenuhi kategori kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan nasional.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mendukung Target 9.1 ini menitikberatkan pada 4 (empat) indikator yang di antaranya: Indikator 9.1.1.(a) Kondisi mantap jalan nasional; Indikator 9.1.2.(a) Jumlah bandara; Indikator 9.1.2.(b) Jumlah dermaga penyeberangan; Indikator 9.1.2.(c) Jumlah pelabuhan strategis. Dalam pelaksanaanya, perangkat daerah yang menjadi *leading sector* adalah Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman (DPUPRPRKP) bersama dengan Dinas Perhubungan melakui beberapa program yaitu: (1) Program Kebinamargaan berupa kegiatan perencanaan pembangunan jalan, pembangunan jalan, perencanaan pembangunan jembatan, pembangunan jembatan, rehabilitasi pemeliharaan operasional Jembatan Baturusa II, inspeksi kondisi jalan, inspeksi kondisi jembatan, pemeliharaan rutin jalan, pemeliharaan berkala jalan, dan pemeliharaan rutin jembatan; (2) Program Pengembangan dan Pembangunan Perhubungan Laut berupa kegiatan pengawasan atas rekomendasi pelabuhan khusus/terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri, SID dan DED pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran, penyusunan study kelayakan pembangunan pelabuhan/dermaga di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil, penyusunan DED dan SID pembangunan pelabuhan/dermaga di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil, pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran, pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran, studi kelayakan pengganti Pelabuhan Pangkal Balam, studi kelayakan dermaga/pelabuhan Pulau Gresik Kabupaten Belitung, dan pembangunan pelabuhan/dermaga pulau -pulau destinasi wisata; (3) Program Peningkatan Pengendalian, Oprasional dan Kebandarudaraan berupa kegiatan DED dan pembangunan gedung VIP di Bandara Hananjoedin Belitung, pengadaan dan pemasangan gardu dan jaringan listrik ke gedung VIP Bandara Depati Amir, pengadaan pagar panel /BRC gedung VIP Bandara Depati Amir, pemasangan saluran air PDAM gedung VIP Bandara Depati Amir, pekerjaan pembangunan jalan akses gedung VIP Bandara Depati Amir, serta pengadaan dan pemasangan X-Ray dan perlengkapannya.

**Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.**

Industri manufaktur secara luas didefinisikan sebagai “transformasi bahan fisik atau kimia menjadi produk baru”, terlepas dari proses (dengan mesin atau dengan tangan), lokasi (pabrik atau rumah), atau metode penjualan (grosir atau ceran).

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB merefleksikan total pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi dalam kegiatan proses produksi di suatu negara selama satu periode (setahun). Perhitungan indikator ini menggunakan PDB atas dasar harga konstan dengan cara perhitungan laju pertumbuhan PDB industri manufaktur dapat diperoleh dengan mengurangi nilai tambah industri manufaktur pada tahun ke - t terhadap nilai tambah industri manufaktur pada tahun ke t-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai tambah industri manufaktur pada tahun ke t-1, dikalikan dengan 100 persen. Dalam hal tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi *leading sector* untuk memenuhi target tersebut dengan fokus pada: Indikator 9.2.1. Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita; Indikator 9.2.1.(a) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur; Indikator 9.3.1* Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri; serta Indikator 9.2.2* Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur. Indikator-indikator tersebut disasar melalui Program Pengembangan Sumber Daya, Fasilitasi dan Akses Industri, serta Program Pengembangan Wilayah dan Pengawasan Industri.

**B.** Target 9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.

Indikator yang disasar oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Indikator 9.4.1* Rasio Emisi $CO_2$/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur, serta Indikator 9.4.1(a) Persentase Perubahan Emisi $CO_2$/Emisi Gas RumahKaca.

Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Tingkat emisi gas rumah kaca (tonCO2e/tahun) adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area dalam jangka waktu tertentu. Penghitungan tingkat emisi sektor industri mencakup emisi dari sektor IPPU (*Industrial Processing and Product Use*).

Cara menghitung Rasio Emisi $CO_2$/emisi gas rumah kaca dengan nilai tambah sektor industri diperoleh dengan cara membagi tingkat emisi $CO_i$ dengan nilai tambah sektor industri. Nilai tambah sektor industri manufaktur merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (pengurangan output dengan input antara) yang dihasilkan pada sektor industri manufaktur. Nilai tambah sektoral bisa diukur dengan PDB sektor tersebut pada periode tertentu.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Lingkungan Hidup yang menjadi *leading sector* dalam menyasar target tersebut berupaya melalui beberapa program yaitu:
(1) Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup melalui kegiatan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH), penyusunan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; (2) Program Peningkatan Pengendalian dan Penataan Lingkungan Hidup melalui kegiatan evaluasi kinerja

penilaian AMDAL dan pemeriksaan UKL-UPL serta penerbitan izin lingkungan yang dilakukan kabupaten/kota; serta (3) Program Peningkatan Pengolahan Sampah, Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup melalui kegiatan persiapan rencana pra pembangunan tempat pembuangan akhir sampah terpadu regional, studi manajemen dan produksi persampahan, dan operasional TPA regional.

**C. Target 9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara negara kurang berkembang pada tahun 2020.**

Akses bergerak pitalebar (*mobile broadband*) adalah akses yang berkecepatan 1 Mbps untuk akses bergerak (*mobile*). Jaringan 4G adalah jaringan seluler yang memenuhi standar generasi keempat untuk transmisi nirkabel data seluler.

Cara menghitung proporsi penduduk terlayani *mobile broadband* diperoleh dengan cara membagi jumlah total luas pemukiman yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (*mobile broadband*) dibagi dengan jumlah total luas pemukiman Indonesia dikalikan dengan 100 persen. Hal ini bertujuan untuk melihat keterjangkauan jumlah penduduk yang mendapatkan akses atau terlayani fasilitas mobile broadband serta sebagai sarana untuk mendorong pengembangan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Dinas Komunikasi dan Informatika serta Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan bangka Belitung menjadi *leading sector* dalam menyasar target tersebut yang fokus dalam beberapa indikator di antaranya Indikator 9.c.1* Proporsi penduduk yang terlayani *mobile broadband*, Indikator 9.c.1.(a) Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam, serta Indikator 9.c.1.(b) Proporsi individu yang menggunakan internet, melalui Program Peningkatan Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian, serta Program Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi.

**Tabel II.81**

MATRIKS I SASARAN CAPAIAN INDIKATOR : Tujuan 9 Kota dan Pemukiman Yang Berkelanjutan

| Kode Indikator | Target/Indikator SDG'S | Sumber Data | Satuan | Kondisi Awal (2017) | Target 2020 | Capaian 2020 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tujuan SDGs : Tujuan 9 Kota dan Pemukiman Yang Berkelanjutan** | | | | | | | |
| **Target Target 9.1: Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.** | | | | | | | |
| Indikator 9.1.1.(a) Kondisi mantap jalan | Tersedianya dokumen perencanaan jalan (dokumen) | Dalev Renja Perangkat Daerah | dok | | 4 dok | 1 dok | |
| | Panjang Jalan yang terbangun (km) | Dalev Renja Perangkat Daerah | km | | 11,36 | 15 | |

| Kode Indikator | Target/Indikator SDG'S | Sumber Data | Satuan | Kondisi Awal (2017) | Target 2020 | Capaian 2020 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nasional; Indikator 9.1.2.(a) Jumlah bandara; Indikator 9.1.2.(b) Jumlah dermaga penyeberangan; Indikator 9.1.2.(c) Jumlah pelabuhan strategis. | Jumlah dokumen perencanaan jembatan (Dokumen) | Dalev Renja Perangkat Daerah | dok | | 3 dok | 0 (*refocusing*) | |
| | Jumlah jembatan yang ditingkatkan / dibangun dalam kondisi baik (unit/km) (unit) | Dalev Renja Perangkat Daerah | km | | 2 | 0 (*refocusing*) | |
| | Terpeliharanya jembatan Baturusa II (Unit) | Dalev Renja Perangkat Daerah | unit | | 1 | 1 | |
| | Jumlah dokumen pelaksanaan inspeksi kondisi jalan (dokumen) | Dalev Renja Perangkat Daerah | dok | | 1 Dok | 1 | |
| | Jumlah dokumen pelaksanaan inspeksi kondisi jembatan (dokumen) | Dalev Renja Perangkat Daerah | dok | | 1 Dok | 1 | |
| | Panjang jalan yang terpelihara (km) (Km) | Dalev Renja Perangkat Daerah | Km | | 1690 | 0,77 | |
| | Panjang jalan yang terpelihara dalam kondisi mantap (Km) | Dalev Renja Perangkat Daerah | Km | | 1135 | 9,90 | |
| | Panjang Jembatan yang terpelihara (meter) | Dalev Renja Perangkat Daerah | Meter | | 432 | 2612,81 | |
| | Jumlah Pelabuhan Khusus / Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) diawasi. | Dalev Renja Perangkat Daerah | Terminal | | 40 Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri | 40% | |
| | Jumlah Dokumen SID dan DED Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok | Dalev Renja Perangkat Daerah | Dok | | 0 | 0 (*refocusing*) | - |

| Kode Indikator | Target/Indikator SDG'S | Sumber Data | Satuan | Kondisi Awal (2017) | Target 2020 | Capaian 2020 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Dokumen Study Kelayakan Pembangunan Pelabuhan/Dermaga di Kawasan Konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta Pulau-Pulau Kecil | Dalev Renja Perangkat Daerah | Dok | | 0 | 0 (*refocusing*) | - |
| | Jumlah Dokumen SID dan DED Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok | Dalev Renja Perangkat Daerah | Dok | | 0 | 0 (*refocusing*) | - |
| | Jumlah unit Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di KSP Tanjung Kalian | Dalev Renja Perangkat Daerah | Unit | | 4 Unit | 0 (*refocusing*) | ▼ |
| | Jumlah unit Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di KSP Teluk klabat | Dalev Renja Perangkat Daerah | Unit | | 3 Unit | 0 (*refocusing*) | ▼ |
| | Jumlah unit Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di KSP Sadai | Dalev Renja Perangkat Daerah | Unit | | 4 Unit | 0 (*refocusing*) | ▼ |
| | Jumlah unit pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) | Dalev Renja Perangkat Daerah | Unit | | 4 Unit | 1 | ▶ |
| | Jumlah Dokumen studi kelayakan pengganti pelabuhan pangkal balam | Dalev Renja Perangkat Daerah | Dok | | 0 | 0 (*refocusing*) | - |
| | Jumlah Dokumen studi kelayakan pelabuhan pulau gresik abupaten belitung | Dalev Renja Perangkat Daerah | Dok | | 0 | 0 (*refocusing*) | - |

| Kode Indikator | Target/Indikator SDG'S | Sumber Data | Satuan | Kondisi Awal (2017) | Target 2020 | Capaian 2020 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Pelabuhan/Dermaga yang terbangun | Dalev Renja Perangkat Daerah | Pelabuhan | | 2 | 0 (*refocusing*) | ▼ |
| | Jumlah Dokumen DED gedung VIP di Bandara hananjoedin Belitung | Dalev Renja Perangkat Daerah | Dok | | 1 Dok | 0 (*refocusing*) | ▼ |
| | Jumlah unit Pembangunan gedung VIP di bandara hanandjoedin Belitung | Dalev Renja Perangkat Daerah | unit | | 1 unit | 0 (*refocusing*) | ▼ |
| | Jumlah unit gardu dan jaringan listrik di gedung VIP di Bandara Depati Amir | Dalev Renja Perangkat Daerah | unit | | 0 | 0 (*refocusing*) | - |
| | Jumlah unit Pagar Panel / BRC di gedung VIP di Bandara Depati Amir | Dalev Renja Perangkat Daerah | unit | | 0 | 0 (*refocusing*) | - |
| | Panjang Saluran Air PDAM Gedung VIP BAndara Depati Amir | Dalev Renja Perangkat Daerah | M | | 0 | 0 (*refocusing*) | - |
| | Jumlah unit Gedung VIP di Bandara Depati Amir | Dalev Renja Perangkat Daerah | unit | | 0 | 0 (*refocusing*) | - |
| | Panjang jalan aksesmenuju Gedung VIP di Bandara Depati Amir | Dalev Renja Perangkat Daerah | M | | 0 | 0 (*refocusing*) | - |
| | Jumlah unit peralatan X-Ray dan perlengkapannya di Gedung VIP di Bandara Depati Amir | Dalev Renja Perangkat Daerah | unit | | 0 | 0 (*refocusing*) | - |
| | Jumlah unit peralatan dan perlengkapan di gedung VIP di Bandara Depati Amir | Dalev Renja Perangkat Daerah | unit | | 0 | 0 (*refocusing*) | - |
| | Panjang Jalan yang terbangun (km) | Dalev Renja Perangkat Daerah | km | | 145 | 4,80 | ▶ |

| Kode Indikator | Target/Indikator SDG'S | Sumber Data | Satuan | Kondisi Awal (2017) | Target 2020 | Capaian 2020 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Panjang Jalan yang terbangun (km) | Dalev Renja Perangkat Daerah | km | | 150 | 11,20 | |
| **Target 9.2: Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.** | | | | | | | |
| Indikator 9.2.1. Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita; Indikator 9.2.1.(a) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur; Indikator 9.3.1* Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri; Indikator 9.2.2* Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur. | jumlah SDM Pertambangan yang terlatih | Dalev Renja Perangkat Daerah | Org | | 15 | 0 (*refocusing*) | |
| | jumlah SDM Sumber Daya Mineral yang terlatih | Dalev Renja Perangkat Daerah | Org | | 0 | 0 (*refocusing*) | |
| | jumlah SDM sektor Kelautan yang terlatih | Dalev Renja Perangkat Daerah | Org | | 20 | 0 (*refocusing*) | |
| | jumlah SDM Pariwisata yang terlatih | Dalev Renja Perangkat Daerah | Org | | 15 | 0 (*refocusing*) | |
| | Jumlah Dokumen SDA industri Pertambangan Timah | Dalev Renja Perangkat Daerah | Dokumen | | 0 | 0 (*refocusing*) | - |
| | Jumlah peserta yang memahami standar produk industri (peserta) | Dalev Renja Perangkat Daerah | Org | | 85 | 10 | |
| | Jumlah industri besar dan SIKIM yang terintegrasi (unit) | Dalev Renja Perangkat Daerah | Unit | | 1 | 0 (*refocusing*) | |
| | Jumlah industri yang diawasi (industri) | Dalev Renja Perangkat Daerah | Industri | | 50 | 20 | |
| **Target 9.4: Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.** | | | | | | | |
| Indikator 9.4.1* Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur; | Jumlah Dokumen Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) | Dalev Renja Perangkat Daerah | dok | | 1 dok | 0 (*refocusing*) | |
| | Jumlah Dokumen Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup | Dalev Renja Perangkat Daerah | dok | | 1 dok | 0 (*refocusing*) | |

| Kode Indikator | Target/Indikator SDG'S | Sumber Data | Satuan | Kondisi Awal (2017) | Target 2020 | Capaian 2020 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikator 9.4.1(a) Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca. | Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi | Dalev Renja Perangkat Daerah | Rekomendasi | | 7 | 0 (*refocusing*) | |
| | Jumlah Laporan Rencana Pra Pembangunan Kawasan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Terpadu Regional | Dalev Renja Perangkat Daerah | Laporan | | 0 | 0 (*refocusing*) | - |
| | Jumlah Dokumen Studi Manajemen dan Produksi Persampahan | Dalev Renja Perangkat Daerah | Dok | | 0 | 0 (*refocusing*) | - |
| | Volume Sampah yang dikelola | Dalev Renja Perangkat Daerah | Ton | | 54000 Ton | 1% | |
| | Volume Sampah yang dikelola | Dalev Renja Perangkat Daerah | Ton | | 54000 Ton | 1% | |
| **Target 9.c: Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negaranegara kurang berkembang pada tahun 2020.** | | | | | | | |
| | Persentase layanan interaktif pemerintah dan masyarakat | Dalev Renja Perangkat Daerah | % | | 40% | 0 (*refocusing*) | |
| Indikator 9.c.1* Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband; Indikator 9.c.1.(a) Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam; 9.c.1.(b) Proporsi individu yang menggunakn internet. | Kapasitas jaringan komunikasi data | Dalev Renja Perangkat Daerah | | | 6 interkoneksi, 1 server, 2 lisensi aplikasi pendukung, pemeliharaan jaringan OPD | 6 interkoneksi, 1 server, 10 peralatan pendukung, pemeliharaan jaringan OPD | |
| | Kapasitas layanan publik dan pemerintah berbasis e-government | Dalev Renja Perangkat Daerah | % | | 60% | 100% | |
| | Kapasitas layanan infrastruktur dan teknologi | Dalev Renja Perangkat Daerah | | | 3 paket internet, 2 paket licensi, 1 paket rak1 paket data center1 paket command center, 1 paket hotspot | 1 paket data center jangka waktu 12 bulan | |

*"Data termutakhir"*

## 10. TUJUAN 10 - BERKURANGNYA KESENJANGAN




Tujuan kesepuluh, Berkurangnya Kesenjangan, memiliki 4 target. Berdasarkan data yang masuk, hampir semua indikator mempunyai tren negatif. Ada dua indikator yang perlu mendapatkan perhatian khusus yaitu :

1. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional menurut jenis kelamin dan kelompok umur;
2. Aspek Kebebasan Sipil dalam Indeks Demokrasi Indonesia.

Berdasarkan target 2020, Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur adalah 5,10 dan Aspek Kebebasan Sipil dalam Indeks Demokrasi Indonesia adalah 81,75. Sedangkan menurut data rilis BPS, target capaian indikator Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur tahun 2020 adalah 0,262 dan Aspek Kebebasan Sipil dalam Indeks Demokrasi Indonesia adalah 79,12.

Sementara itu ada satu indikator yang tidak terdapat data capaiannya, yaitu Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.

**Tabel II.82**

MATRIKS I SASARAN CAPAIAN INDIKATOR : Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan

| Kode Indikator | Target/Indikator SDG'S | Sumber Data | Satuan | Kondisi Awal (2017) | Target 2020 | Capaian 2020 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tujuan SDGs : Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan** | | | | | | | |
| **Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional** | | | | | | | |
| 10.1.1* | Koefisien Gini. | BPS | | 0,281 | 0,259 | 0,262 | ● |
| 10.1.1.(a) | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur | BPS | | 5,20 | 5,10 | 4,53 | ▼ |
| **Target 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.** | | | | | | | |
| 10.3.1.(a) | Aspek Kebebasan Sipil dalam Indeks Demokrasi Indonesia | BPS | | 83,07 | 81,75 | 79,12 | ▼ |

| Kode Indikator | Target/Indikator SDG'S | Sumber Data | Satuan | Kondisi Awal (2017) | Target 2020 | Capaian 2020 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar** | | | | | | | |
| 10.4.1.(b) | Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. | BPS, BPJS | Jiwa | | 2.110 | | Tidak diketahui status (data tidak tersedia) |

*"Data termutakhir"*

## 11. TUJUAN 11 - KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN




Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni dan terjangkau didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Sejalan dengan SDG Goal 11 *Monitoring Framework*, terdapat 5 kriteria yang digunakan untuk permukiman kumuh yaitu ketahanan bangunan (*durabel housing*), kecukupan luas tempat tinggal (*sufficient living space*), akses air minum (*access to improved water*), akses sanitasi layak (*access to adequate sanitation*) dan keamanan bermukim (*security of tenure*).

Mengacu pada definisi nasional dan global, hunian layak memiliki 4 (empat) kriteria yang diwajibkan terpenuhi kelayakannya dan 2 (dua) kriteria yang akan terus dikawal adalah sebagai berikut:

1. Ketahanan bangunan (*durabel housing*) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat
   a. Bahan bangunan atap rumah terluas adalah genteng, kayu/sirap, dan seng.
   b. Bahan bangunan dinding rumah terluas adalah tembok/GRC board, plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan, dan batang kayu.
   c. Bahan bangunan lantai rumah terluas adalah marmer/granit, keramik, parket/vinil/karpet, ubin/tegel/teraso, kayu/papan, dan semen/bata merah.
2. Kecukupan luas tempat tinggal (*sufficient living space*) yaitu luas lantai perkapita ≥ 7,2 m2.
3. Memiliki akses air minum (*access to improved water*) yaitu sumber air yang berasal dari leding meteran (keran individual), leding eceran, keran umum (komunal), hidran umum, penampungan air hujan (PAH), sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung. Sementara itu, bagi rumah tangga yang menggunakan air kemasan dan/atau air isi ulang sebagai sumber air minum dikategorikan sebagai rumah tangga yang memiliki akses layak jika sumber air

untuk masak dan MCK-nya menggunakan sumber air minum terlindung.

4. Memiliki akses sanitasi layak (*access to adequate sanitation*) yaitu fasilitas sanitasi yang memenuhi kelayakan bangunan atas dan bawah, antara lain: memiliki fasilitas sanitasi yang klosetnya menggunakan leher angsa, dan tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (*septic tank*) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu. Khusus untuk rumah tangga di perdesaan, tempat pembuangan akhir tinja berupa lubang tanah dikategorikan layak.

Sedangkan dua komponen yang akan terus dikawal adalah: (1) keamanan bermukim dengan proksi berupa bukti kepemilikan tanah bangunan tempat tinggal. Rumah tangga dikategorikan memiliki keamanan bermukim jika jenis bukti kepemilikan rumah/bangunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama ART, SHM bukan atas nama ART, Sertifikat selain SHM (SHGB, SHSRS). Adapun Surat bukti lainnya (Girik, Letter C, dll), masih dikategorikan bukti kepemilikan yang kurang aman; (2) Hunian didefinisikan terjangkau apabila pengeluaran hunian, baik berupa sewa dan cicilan rumah, tidak melebihi dari 30%. Saat ini perhitungan keterjangkauan akan dilakukan terbatas bagi rumah tangga dengan kategori sewa. Sementara, untuk rumah tangga yang menghuni milik sendiri maka diasumsikan terjangkau.

Berdasarkan penjelasan kriteria tersebut dapat disimpulkan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau adalah persentase rumah tangga yang tinggal pada rumah yang memenuhi empat kriteria diatas dengan harga yang terjangkau baik untuk dimiliki maupun sewa oleh seluruh lapisan masyarakat dibandingkan dengan jumlah rumah tangga secara keseluruhan.

**Tabel II.83**

MATRIKS I SASARAN CAPAIAN INDIKATOR : Tujuan 11 Kota dan Pemukiman Yang Berkelanjutan

| Kode Indikator | Target/Indikator SDG'S | Sumber Data | Satuan | Kondisi Awal (2017) | Target 2020 | Capaian 2020 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tujuan SDGs : Tujuan 11 Kota dan Pemukiman Yang Berkelanjutan** | | | | | | | |
| **Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh** | | | | | | | |
| 11.1.1.(a) | Jumlah rumah tidak layak huni. | BPS, PUPR | Unit | - | 23.250 | | |
| **Target 11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua** | | | | | | | |
| 11.2.1.(a). | Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan. | DISHUB | % | - | 2,12 | | |

| Kode Indikator | Target/Indikator SDG'S | Sumber Data | Satuan | Kondisi Awal (2017) | Target 2020 | Capaian 2020 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Target 11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara** | | | | | | | |
| 11.3.2.(a). | Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan. | PERKIM | Institusi | - | 42 | | |
| 11.3.2.(b). | Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur. | PERKIM | lembaga | - | 1 | | |
| **Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.** | | | | | | | |
| 11.4.1.(a). | Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil. | PERKIM, DISBUDPAR | kota | 2 | 2 | | |
| **Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.** | | | | | | | |
| 11.5.1.(a). | Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). | BPBD | Nilai | 162 | 140 | | |
| 11.5.1.(b). | Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk. | BPBD | 0 | 29 | 29 | | |
| 11.5.1.(c). | Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan. | BPBD | titik | 0 | 0 | 1 | |
| **Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota** | | | | | | | |
| 11.6.1.(a). | Persentase sampah perkotaan yang tertangani. | DLH | % | 83 | 86 | 66,26 | ▼ |

*"Data termutakhir"*

## 12. TUJUAN 12 - KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNGWAJAWAB




Konsep indikator global untuk target ini adalah melakukan kuantifikasi dan pemantauan atas perkembangan siklus kebijakan yang dibuat oleh negara-negara dalam menyusun instrumen kebijakan yang mengikat dan tidak mengikat, untuk mendukung perubahan menuju ke produksi dan konsumsi berkelanjutan.

Indonesia, di bawah koordinasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama dengan berbagai pihak, telah menyusun dan mengembangkan dokumen Kerangka Kerja 10 tahun Program Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan

(10YFP SCP). Adapun program SCP yang disusun secara tematik, yaitu : (1) ecolabel dan pengadaan publik hijau (ecolabel and green public procurement, (2) industry hijau (green industry), (3) bangunan ramah lingkungan (green building) dan konstruksi berkelanjutan (sustainable construction), (4) pariwisata ramah lingkungan (sustainable tourism dan sustainable tourism awards /ISTA), (5) pengelolaan limbah dan sampah (waste management), (6). energi baru terbarukan, efisiensi energi, (7). pelabuhan berkelanjutan (sustainable port / green port), (8). komunikasi dan informasi berwawasan lingkungan (green ICT), (9). inovasi dan teknologi hijau (green technology), (10). keuangan berwawasan lingkungan (sustainability finance), (11). pertanian dan ISPO, (12). Perikanan berkelanjutan (sustainable fisheries), dan (13). kehutanan dengan jasa lingkungan, SVLK, SILIN, HHK, HHBK, hutan tanaman energi.

Kolaborasi tematik tersebut adalah dokumen rencana aksi berbagai pihak dalam mendukung keberhasilan prinsip keberkelanjutan pada sektor/tema tertentu, yang meliputi perilaku ramah lingkungan, minimum waste, pemanfaatan sesuai daya dukung fisik dan memperhatikan keseimbangan ekologis. Selain adanya dokumen program, telah disusun pula dasar hukum berupa keputusan kementerian terkait. Selain program-program di atas, telah banyak kementerian / Lembaga menyusun kegiatannya dan juga menjadi salah satu indikator di target pembangunan berkelanjutan lainnya. Oleh karena itu, indikator ini pun akan sangat terkait dengan indikator di tujuan pembangunan berkelanjutan lainnya, dan perlu dikumpulkan sehingga dapat dikoordinasikan dan disinergikan di dalam kerangka kerja program SCP setiap sepuluh (10) tahun.

**Tabel II.84**

MATRIKS I SASARAN CAPAIAN INDIKATOR : Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

| Kode Indikator | Target/Indikator SDG'S | Sumber Data | Satuan | Kondisi Awal (2017) | Target 2020 | Capaian 2020 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tujuan SDGs : Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab** | | | | | | | |
| **Target 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan** | | | | | | | |
| 12.4.1.(a) | Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU | DLH | Perusahaan | 37 | 48 | 49 | |
| 12.4.2.(a) | Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri). | DLH | Ton | 2.852,4 | 7.000 | | |
| **Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.** | | | | | | | |
| 12.5.1.(a) | Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang | DLH | Ton | 5.254 | 8.375 | 13.532,34 | |

| Kode Indikator | Target/Indikator SDG'S | Sumber Data | Satuan | Kondisi Awal (2017) | Target 2020 | Capaian 2020 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Target 12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka** | | | | | | | |
| 12.6.1.(a) | Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001. | DLH | Perusahaan | 5.254 | 8.375 | - | |

*"Data termutakhir"*

## 13. TUJUAN 13 - PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM

### A. Indikator 13.2.1.(a) Dokumen pelaporan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)




Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfir, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca adalah pelaksanaan rencana kerja dari berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi Gas Rumah Kaca sesuai dengan target pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Penyelenggaraan inventarisasi Gas Rumah Kaca, serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 dilaporkan dalam dokumen Pelaksanaan Kegiatan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2022 dan Dokumen Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2021.

**Tabel II.85**

MATRIKS I SASARAN CAPAIAN INDIKATOR : Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim

| Kode Indikator | Target/Indikator SDG'S | Sumber Data | Satuan | Kondisi Awal (2017) | Target 2020 | Capaian 2020 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tujuan SDGs : Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim** | | | | | | | |
| **Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara** | | | | | | | |
| 13.2.1.(a) | Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). | BAPPEDA | Dok | 2 | 2 | 2 | |

*"Data termutakhir"*

## 14. TUJUAN 14 - EKOSISTEM LAUTAN




Berdasarkan matriks capaian indikator untuk tujuan ekosistem laut melalui status diketahui ada yang perlu mendapat perhatian dan data tidak tersedia. Sementara itu, indikator lainnya telah tercapai bahkan melebihi target seperti persentase kepatuhan pelaku usaha. Kondisi ini dapat dijadikan momentum untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui sub sektor perikanan sebagai transformasi ekonomi.

Diketahui bahwa ekonomi Bangka Belitung selama ini sebagian besar kotribusinya berasal dari sektor pertambangan. Khusus untuk indikator jumlah luas kawasan konservasi perairan perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut segera terutama oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan stakeholder lainnya. Dalam rangka memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut untuk pembangunan yang berkelanjutan Target tahun 2020 sebesar 832.458 Ha dan realisasi sebesar 516.371 Ha. Artinya masih dibutuhkan sebesar 316.087 Ha agar dapat memenuhi target tahun 2020

**Tabel II.86**

MATRIKS I SASARAN CAPAIAN INDIKATOR : Tujuan 14 Ekosistem Lautan

| Kode Indikator | Target/Indikator SDG'S | Sumber Data | Satuan | Kondisi Awal (2017) | Target 2020 | Capaian 2020 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tujuan SDGs : Tujuan 14 Ekosistem Lautan** | | | | | | | |
| **Target 14.2 Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.** | | | | | | | |
| 14.2.1 (a) | Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional | DKP | Perda | - | 1 | 1 | |
| 14.2.1 (b) | Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan | DKP | WPP | - | 1 | 1 | |
| **Target 14.4 Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya.** | | | | | | | |
| 14.4.1* | Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman | DKP | ekor | 767.126 | 767.126 | - | Tidak diketahui status (data tidak tersedia) |
| **Target 14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir** | | | | | | | |

| Kode Indikator | Target/Indikator SDG'S | Sumber Data | Satuan | Kondisi Awal (2017) | Target 2020 | Capaian 2020 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia** | | | | | | | |
| 14.5.1* | Jumlah luas kawasan konservasi perairan | DKP | Ha | 800.571 | 832.458 | 516.371 | ▼ |
| **Target 14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.** | | | | | | | |
| 14.6.1.(a) | Persentase kepatuhan pelaku usaha. | DKP | UMKM | 37 | 60 | 68,96% | ● |

*"Data termutakhir"*

## 15. TUJUAN 15 - EKOSISTEM DARAT




Manusia dan hewan bergantung pada bentuk kehidupan lain di daratan untuk makanan, udara bersih, air bersih, dan untuk melawan perubahan iklim. Tanaman menyumbang 80% makanan manusia, sedangkan hutan yang menghuni 30% permukaan bumi, membantu menjaga udara dan air tetap bersih serta iklim bumi seimbang. Hutan pula merupakan rumah dari jutaan spesies hewan. Tujuan 15 TPB adalah melindungi, merestorasi dan
meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehinglangan keanekaragaman hayati. Dalam rangka mencapai tujuan nasional ekosistem daratan pada tahun 2030, maka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung metapkan 3 target yang diukur melalui 4 indikator. Berdasarkan matriks 1 pada tabel 1 diketahui bahwa:

- Target 15.2 tahun 2020 meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global sebesar 3.332 Ha. Dengan indikator luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya sebesar 0 Ha. Artinya belum mencapai target (perlu mendapat perhatian). Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khusus menangani HP dan HL. Sedangkan rehabilitasi khusus diluar Kawasan hutan.
- Untuk target proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan tahun 2020 sebesar 6.945 Ha dengan capaian sebesar 4205, 25 dengan status tercapai. Berbagai jenis tanaman, tanaman hutan kayu dan bukan kayu, ditanam oleh berbagai sektor/instansi salah satu usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Dearah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**Tabel II.87**

MATRIKS I SASARAN CAPAIAN INDIKATOR : Tujuan 15 Ekosistem Darat

| Kode Indikator | Target/Indikator SDG'S | Sumber Data | Satuan | Kondisi Awal (2017) | Target 2020 | Capaian 2020 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tujuan SDGs : Tujuan 15 Ekosistem Darat** | | | | | | | |
| **Target 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.** | | | | | | | |
| 15.1.1.(a) | Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan | DISHUT, DLH | % | 13,8 | 11,24 | 12,01 | ● |
| **Target 15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.** | | | | | | | |
| 15.2.1.(a) | Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya | BKSDA | Ha | 3.092 | 3.332 | 0 | ▼ |
| 15.2.1.(d) | Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan | DISHUT | Unit | 8 | 8 | 8 | ● |
| **Target 15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi** | | | | | | | |
| 15.3.1.(a). | Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan | DISHUT, DLH | Ha | 1.574 | 6.945 | 4205,25 | ● |

*"Data termutakhir"*

## 16. TUJUAN 16 - PERDAMAIAN, KEADILAN, DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH




Tujuan keenam belas - Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh, merupakan upaya untuk menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai, mewujudkan penegakan keadilan dengan menyediakan akses keadilan untuk semua serta membangun institusi yang tangguh. Terkait dengan Tujuan 16 nasional ditetapkan 12 target dengan 34 indikator sedangkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung fokus dengan 4 target sasaran yaitu (1) Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun, (2) Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat dan (3) Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan, (4) Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran, untuk indikator SDG's yang digunakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 10 indikator.

### A. Target Global 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.

1) Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.

Posisi kedua kebutuhan pada hierarki *Maslow* merupakan kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan rasa aman ini meliputi kebutuhan keamanan dan perlindungan dari bahaya fisik dan emosi. Kebutuhan rasa aman dipenuhi untuk mendukung pemenuhan kebutuhan lain agar bisa terus berjalan dengan baik. Dalam Universal *Declaration of Human Rights* mencantumkan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk hidup dan hak akan kemerdekaan dan keamanan badan.




*"Data termutakhir"*

Dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) salah satu indikator dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta perencanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh adalah Proporsi rumah tangga yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya merupakan target 16.1.4*.

Setiap 3 (tiga) tahun Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Ketahanan Sosial melakukan pengukuran rasa aman. Pada tahun 2020 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, persentase rumah tangga yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya sebesar 65,91 persen. Sehingga bisa dikatakan, lebih dari separuh masyarakat merasa tidak khawatir ketika berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. Persentase ini meningkat dari 47,8 persen di tahun 2017 menjadi 65,91 persen di tahun 2020. Dengan peningkatan tersebut, untuk pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban tetap perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarkat secara menyeluruh.

**B. Target Global 16.4 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.**

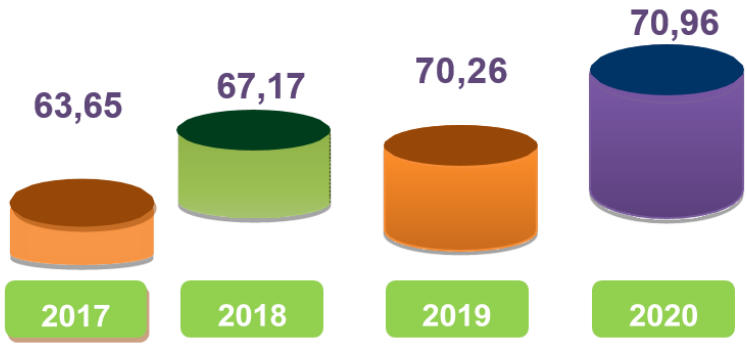
1) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Salah satu indikator yang menjadi target di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat

adalah Opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Opini WTP ini menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah 4 (empat) tahun berturut-turut mendapatkan opini BPK WTP.

2) Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu indikator yang menjadi target SDG's Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). Dalam 4 (empat) tahun terakhir SAKIP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tren meningkat.




*"Data termutakhir"*

*3)* Penggunaan *E-procurement*

Proses pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik (*e-Procurement*) yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Penggunaan *e-Procurement* ini menjadi salah satu target indikator SDG's Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk persentase penggunaan *e-procurement* terhadap belanja pengadaan barang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 100 % setiap tahunnya.



**C. Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.**

1) Keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

   Tingkat keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi salah satu target indikator SDG's Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Indikator ini digunakan untuk mengetahui perkembangan partisipasi politik perempuan dalam menetapkan kebijakan publik. Untuk capaian tahun 2020 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebesar 4,44 % dari target tahun 2020 sebesar 2,23 %.

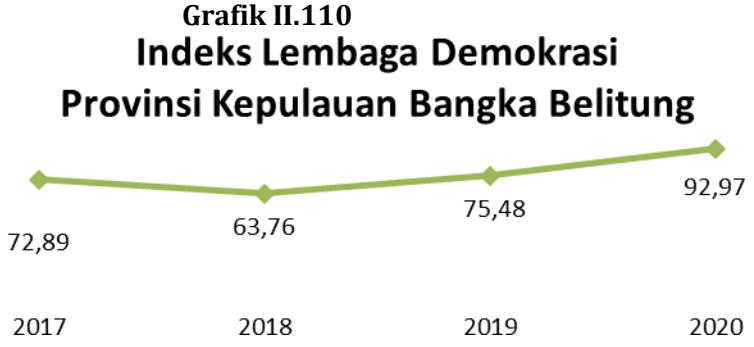
2) Keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).

   Proporsi perempuan di posisi kepemimpinan di lembaga pemerintahan pada tingkat eksekutif (eselon I dan II) terhadap keseluruhan pengambil keputusan di lembaga eksekutif setara eselon I dan II menjadi salah satu target indikator SDG's Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di lembaga eksekutif. Capaian realisasi target indikator tersebut tahun 2017 sebesar 6,5% dan pada tahun 2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan target sebesar 10,8 % dengan tingkat capaian target sebesar 8,69 %. Kondisi ini menunjukkan tren capaian naik dari tahun sebelumnya walaupun belum mencapai target tahun berjalan.

3) Indeks Lembaga Demokrasi

   Tidak semua warga negara memiliki kebebasan dan kesetaraan akses dalam berpartisipasi dan memastikan dirinya terwakili dalam pemerintahan. Peran lembaga negara sebagai pemegang otoritas kekuasaan diperlukan untuk menjamin agar kebebasan warga tidak dicederai dan kesetaraan akses warga terjamin baik ketika mereka melakukan partisipasi politik maupun saat menjalani kehidupan keseharian. Untuk itu, diperlukannya indeks kapasitas lembaga demokrasi yang merupakan aspek ketiga yang membentuk indeks demokrasi indonesia (IDI). Indeks ini mengukur kapasitas lembaga negara untuk menjamin keberlangsungan proses demokrasi. Capaian indikator indeks kapasitas lembaga demokrasi pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam 4 (empat) tahun terakhir mengalami tren peningkatan dari tahun 2019 sebesar 75,48 ditahun 2020 sebesar 92,97.

**Grafik II.110**

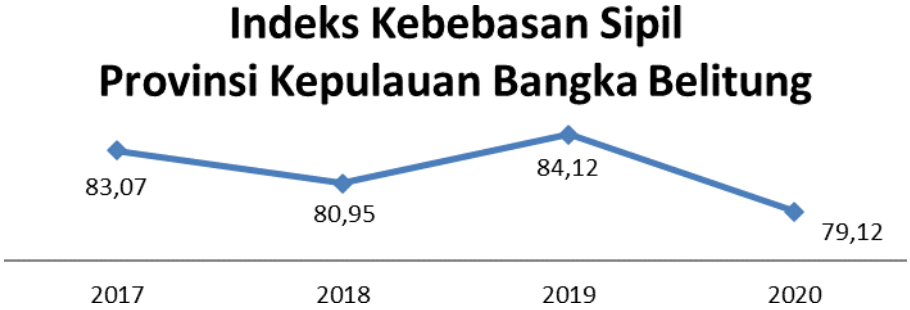



*"Data termutakhir"*

4) Indeks Kebebasan Sipil

Indeks aspek kebebasan merupakan aspek pertama yang membentuk indeks demokrasi indonesia (IDI). Indeks ini mengukur kebebasan setiap individu sebagai warga negara yang dijamin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap warga negara harus dijamin kebebasannya untuk dapat beraktivitas dan mengekspresikan sikap dan gagasannya serta berdaulat untuk terbebas dari ancaman kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. Indeks aspek kebebasan menjadi salah satu target indikator SDG's Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam 4 (empat) tahun terakhir mengalami tren fluktuatif, untuk tahun 2019 sebesar 84,12 sedangkan ditahun 2020 sebesar 79,12. Kondisi ini menunjukkan tren capaian turun dari tahun sebelumnya dan target tahun berjalan tidak tercapai.

**Grafik II.111**

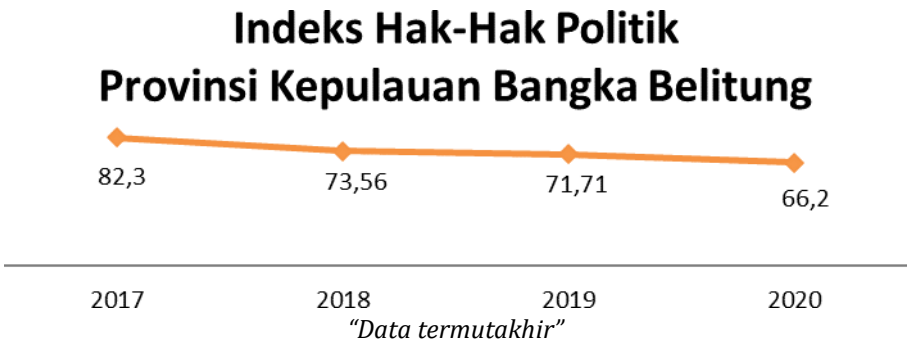



*"Data termutakhir"*

5) Indeks Hak-hak Politik

Kebebasan dalam hak sosial dan politik menjadi sebuah jaminan yang sangat diperlukan untuk dapat mencapai sebuah negara yang menjunjung tinggi demokrasi sehingga aspirasi yang ada dapat tersalurkan dengan baik. Untuk itu, diperlukannya indeks hak-hak politik yang merupakan aspek kedua yang membentuk indeks demokrasi indonesia (IDI). Capaian indikator indeks hak-hak politik pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam 4 (empat) tahun terakhir mengalami tren menurun dari tahun 2019 sebesar 71,71 ditahun 2020 sebesar 66,2. Kondisi ini menunjukkan tren capaian turun dari tahun sebelumnya dan target tahun berjalan tidak tercapai.

**Grafik II.112**




*"Data termutakhir"*

**D. Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.**

1) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.

Akta kelahiran merupakan surat tanda bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tiap daerah, bukan surat keterangan lahir dari rumah sakit/dokter/bidan/ kelurahan. Akta Kelahiran merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara bagi individu yang baru lahir. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Persentase anak yang memiliki akta kelahiran menjadi salah satu target indikator SDG's Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk capaian tahun 2020 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Persentase anak yang memiliki akta kelahiran menjadi salah satu target indikator SDG's Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 96,07 % melampaui target tahun 2020 sebesar 87,5 %.

**Tabel II.88**

MATRIKS I SASARAN CAPAIAN INDIKATOR : Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang tangguh

| Kode Indikator | Target/Indikator SDG'S | Sumber Data | Satuan | Kondisi Awal (2017) | Target 2020 | Capaian 2020 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tujuan SDGs : Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang tangguh** | | | | | | | |
| **Target 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.** | | | | | | | |
| 16.1.4* | Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya | BPS, POLDA | Persen | 47,8 | 47,8 | 65,91 | |
| **Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.** | | | | | | | |
| 16.6.1.(a) | Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah | BPK | Opini | WTP | WTP | WTP | |

| Kode Indikator | Target/Indikator SDG'S | Sumber Data | Satuan | Kondisi Awal (2017) | Target 2020 | Capaian 2020 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Provinsi/Kabupaten/Kota) | | | | | | |
| 16.6.1.(b) | Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). | KEMENPANRB | % | 76,2 | 73 | 70,96 | ▶ |
| 16.6.1.(c) | Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan barang. | Biro Layanan Pengadaan | % | 100 | 100 | 100 | ● |
| **Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan** | | | | | | | |
| 16.7.1.(a) | Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). | BPS, SETWAN | % | 6,6 | 2.23 | 4,44 | |
| 16.7.1.(b) | Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II). | BPS, BIRO PEMERINTAHAN | % | 6,5 | 10,8 | 8,69 | ▶ |
| 16.7.2.(a) | Indeks Lembaga Demokrasi | BPS | % | 72,89 | 75,7 | 92,97 | ● |
| 16.7.2.(b) | Indeks Kebebasan Sipil | BPS | % | 82,3 | 81,75 | 79,12 | ▼ |
| 16.7.2.(c) | Indeks Hak-hak Politik | BPS | % | 83,07 | 75 | 66,2 | ▼ |
| **Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran** | | | | | | | |
| 16.9.1.(b) | Persentase anak yang memiliki akta kelahiran. | BPS | % | 82,18 | 87,5 | 96,07 | ● |

*"Data termutakhir"*

## 17. TUJUAN 17 - KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN




Tujuan ketujuh belas, Kemitraan untuk Mencapai Tujuan, memiliki satu target yang meningkatkan ekonomi pada saat pandemic covid 19 secara meningkat, yaitu Proporsi individu yang menggunakan internet dengan capaian mencapai 45,85, berdasarkan data rilis BPS. Sedangkan untuk dua indikator lainnya menurun dan membutuhkan perhatian khusus guna mencapai tujuan ketujuh belas kemitraan

untuk mencapai tujuan.

**Tabel II.89**
MATRIKS I SASARAN CAPAIAN INDIKATOR : Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

| Kode Indikator | Target/Indikator SDG'S | Sumber Data | Satuan | Kondisi Awal (2017) | Target 2020 | Capaian 2020 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tujuan SDGs : Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan** | | | | | | | |
| **Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.** | | | | | | | |
| 17.1.1* | Total Pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya | BPS | % | 3,37 | 3,52 | -4,15 | ▼ |
| 17.1.1.(a) | Prosentase penerimaan pajak terhadap PDB | BPS, BAKUDA | | 0,09 | 32,96 | 28,51 | ▼ |
| **Target 17.8 Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi** | | | | | | | |
| 17.8.1* | Proporsi individu yang menggunakan internet. | | persen | 28,86 | 31,45 | 45,85 | ● |

*"Data termutakhir"*

### 2.1.6. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar pelayanan minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penyelenggaraan pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah dan diposisikan untuk menjawab hal-hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat. Karena kesejahteraan rakyat merupakan tujuan bernegara yang dijamin oleh konstitusi.

Sebagaimana telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal ditambah pula dengan peraturan terkait masing-masing kementerian, maka pemerintah daerah melalui perangkat daerah harus menerapkan SPM secara efektif.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai dengan indikator-indikator yang ditetapkan oleh pemerintah.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan

Kawasan permukiman, Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan Sosial. Adapun capaian SPM pada tahun 2022 dapat dilihat pada uraian berikut :

**A. Urusan Pendidikan**

SPM urusan pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1. Jenis Pelayanan Dasar

   Adapun jenis pelayanan dasar untuk urusan pendidikan antara lain:

   a. Pendidikan menengah dengan indikator pencapaian yaitu jumlah warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah;
   b. Pendidikan khusus dengan indikator pencapaian jumlah warga negara usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus.

2. Target Pencapaian SPM

   Target Pencapaian SPM untuk urusan pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 ditampilkan pada tabel berikut ini:

**Tabel II.90**

Target Pencapaian SPM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022

| No. | Jenis Pelayanan Dasar | | Indikator Pencapaian | Target (Jumlah Yang Harus Dilayani) | Persentase Target |
|---|---|---|---|---|---|
| **I.** | **Pendidikan Menengah** | | **Jumlah Warga Negara Usia 16 - 18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah** | 55.073 | 100 |
| | 1. | buku teks pelajaran | | 55.073 | 100 |
| | 2. | perlengkapan belajar | | 55.073 | 100 |
| | 3. | jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan | | 1.810 | 100 |
| | 4. | satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c | | 128 | 100 |
| | 5. | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik | | 2.000 | 100 |
| | 6. | Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV | | 3.641 | 100 |
| | 7. | Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV | | 128 | 100 |
| | 8. | Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat | | 1.035 | 100 |
| **III.** | **Pendidikan Khusus** | | **Jumlah Warga Negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam** | 1.265 | 100 |

| No. | Jenis Pelayanan Dasar | | Indikator Pencapaian | Target (Jumlah Yang Harus Dilayani) | Persentase Target |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus** | | |
| | 1. | materi ajar sesuai dengan ragam disabilitas | | 1.265 | 100 |
| | 2. | perlengkapan belajar | | 1.265 | 100 |
| | 3. | satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c | | 9 | 100 |
| | 4. | jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan | | 309 | 100 |
| | 5. | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik | | 1.265 | 100 |
| | 6. | Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV | | 281 | 100 |
| | 7. | Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV | | 9 | 100 |
| | 8. | Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat | | 24 | 100 |

3. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM urusan pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel II.91**

Realisasi Pencapaian SPM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022

| No. | Indikator Kinerja/Jenis Layanan | Indikator Pencapaian/Output | | | Total Pencapaian (Persentase) % |
|---|---|---|---|---|---|
| **I.** | **URUSAN PENDIDIKAN** | | | | |
| | **KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM** | **TUNTAS PARIPURNA** | | | **99,64** |
| **1.** | **Pendidikan Menengah** | **Jumlah Warga Negara Usia 16 - 18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah** | | | **99,74** |
| | **PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)** | **Jumlah Total yang Harus Dilayani** | **Jumlah Total yang Terlayani** | **Jumlah Total yang Belum Terlayani** | **80** |
| | **Jumlah yang Harus Dilayani** | **55.073** | **55.073** | **0** | **100** |
| | **PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)** | | | | **19,74** |

| No. | Indikator Kinerja/Jenis Layanan | | Indikator Pencapaian/Output | | | Total Pencapaian (Persentase) % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Mutu Barang/Jasa/SDM** | | **Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Dibutuhkan** | **Jumlah Mutu Barabg/Jasa yang Tersedia** | **Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia** | **98,68** |
| | 1. | buku teks pelajaran | 55.073 | 55.073 | 0 | 100 |
| | 2. | perlengkapan belajar | 55.073 | 55.073 | 0 | 100 |
| | 3. | jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan | 1.810 | 1.810 | 0 | 100 |
| | 4. | satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c | 128 | 128 | 0 | 100 |
| | 5. | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik | 2.000 | 2.000 | 0 | 100 |
| | 6. | Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV | 3.641 | 3.540 | 101 | 97,23 |
| | 7. | Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV | 128 | 118 | 10 | 100 |
| | 8. | Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat | 1.035 | 1.035 | 0 | 100 |
| **2.** | **Pendidikan Khusus** | | **Jumlah Warga Negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus** | | | **99,54** |
| | **PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR 80 %** | | **Jumlah Total yang Harus Dilayani** | **Jumlah Total yang Terlayani** | **Jumlah Total yang Belum Terlayani** | **80** |
| | **Jumlah yang Harus Dilayani** | | **1.265** | **1.265** | **0** | **100** |
| | **PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)** | | | | | **19,54** |
| | **Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM** | | **Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Dibutuhkan** | **Jumlah Mutu Barabg/Jasa yang Tersedia** | **Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia** | **97,68** |
| | 1. | materi ajar sesuai dengan ragam disabilitas | 1.265 | 1.265 | 0 | 100 |
| | 2. | perlengkapan belajar | 1.265 | 1.265 | 0 | 100 |
| | 3. | satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c | 9 | 9 | 0 | 100 |
| | 4. | jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan | 309 | 309 | 0 | 100 |
| | 5. | penyediaan Biaya Personil Peserta Didik | 1.265 | 1.265 | 0 | 100 |
| | 6. | kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV | 281 | 260 | 21 | 92,53 |
| | 7. | kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV | 9 | 8 | 1 | 88,89 |
| | 8. | kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat | 24 | 24 | 0 | 100 |

Berdasarkan tabel di atas, indeks pencapaian SPM urusan pendidikan sebesar **99,64 %** dengan kategori **tuntas paripurna**. Untuk indikator pendidikan menengah realisasi capaian SPM berdasarkan bobot persentase pencapaian penerima layanan dan persentase pencapaian mutu layanan dasar sebesar 99,74 %. Sedangkan indikator pendidikan khusus, realisasi capaian SPM berdasarkan bobot persentase pencapaian penerima layanan dan persentase pencapaian mutu layanan dasar sebesar 99,54 %.

4. Alokasi Anggaran

Berikut adalah jumlah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menerapkan SPM urusan Pendidikan pada Tahun Anggaran 2022:

**Tabel II.92**

Alokasi Anggaran Penerapan SPM Urusan Pendidikan Tahun 2022

| No. | Program / Kegiatan /Sub Kegiatan | Satuan | Anggaran | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Program SPM Pendidikan Menengah** | | **66,347,567,223** | **63,098,883,832** | **95,10** |
| | 1. Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM (SMK/SMK/Pake C/MA/MAK) | | 10,244,739,005 | 9,941,696,400 | 97,04 |
| | a. Pendataan warga negara usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang tidak bersekolah | Peserta Didik | 88,000,000 | 88,000,000 | 100 |
| | b. Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus | Peserta Didik | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 100 |
| | c. Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung | Peserta Didik | 8,156,739,005 | 7,853,696,400 | 96,28 |
| | 2. Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SMA/SMK/Paket C) | | 39,280,852,352 | 39,280,852,352 | 100 |
| | a. Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan | Pendidik dan tenaga kependidikan | 44,667,982 | 44,667,982 | 100 |
| | b. Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Guru | 39,236,184,370 | 39,236,184,370 | 100 |
| | 3. Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SMA/SMK/Paket C/MA/MAK) | | 450,000,000 | 450,000,000 | 100 |
| | a. Fasilitasi pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru | Kegiatan | 450,000,000 | 450,000,000 | 100 |
| | 4. Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan (SMA/SMK/Paket C/MA/MAK) | | 14,978,693,720 | 12,372,512,700 | 82,60 |
| | a. Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat | | 14,978,693,720 | 12,372,512,700 | 82,60 |
| | 5. Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SMA/SMK/Paket C) | | 989,000,000 | 989,000,000 | 100 |
| | a. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan | Kegiatan | 75,000,000 | 75,000,000 | 100 |
| | b. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan | Pendidik dan tenaga kependidikan | 914,000,000 | 914,000,000 | 100 |
| | 6. Tingkat penyerapan lulusan (SMK) | | 149,978,771 | 0 | 0 |
| | a. Pemetaan lembaga sertifikasi dan dunia kerja yang memiliki sistem sertifikasi untuk mendorong sertifikasi kompetensi bagi Peserta Didik | Lembaga sertifikasi | 149,978,771 | 0 | 0 |
| | 7. Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan (SMK) | | 254,303,375 | 64,822,380 | 25,49 |

| No. | Program / Kegiatan /Sub Kegiatan | | | Satuan | Anggaran | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | a. | Fasilitasi kemitraan antara dunia kerja dan SMK untuk penyesuaian pembelajaran di SMK terhadap kebutuhan dunia kerja. | Kegiatan | 254,303,375 | 64,822,380 | 25,49 |
| **2.** | **Program SPM Pendidikan Khusus** | | | | 7,205,649,898 | 6,202,556,281 | 86,08 |
| | 8. | Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Pendidikan Khusus | | | 4,254,268,000 | 4,175,935,000 | 98,16 |
| | | a. | Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung | Peserta didik | 4,254,268,000 | 4,175,935,000 | 98,16 |
| | 9. | Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik Pendidikan Khusus | | | 1,299,461,170 | 867,744,174 | 66,78 |
| | | a. | Pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru | Kegiatan | 1,299,461,170 | 867,744,174 | 66,78 |
| | 10. | Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan | | | 1,509,437,623 | 1,049,446,707 | 69.53 |
| | | a. | Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat | | 1,509,437,623 | 1,049,446,707 | 69.,3 |
| | 11. | Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan | | | 92,483,105 | 59,430,400 | 64,26 |
| | | a. | Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan | Pendidik dan tenaga kependidikan | 92,483,105 | 59,430,400 | 64,26 |
| | 12. | Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan khusus | | | 50,000,000 | 50,000,000 | 100 |
| | | a. | Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan | Pendidik dan tenaga kependidikan | 50,000,000 | 50,000,000 | 100 |

## B. Urusan Kesehatan

SPM urusan kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1. Jenis Pelayanan Dasar

   Adapun jenis pelayanan dasar untuk urusan kesehatan antara lain:

   a. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi dengan indikator pencapaian jumlah warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan

   b. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi dengan indikator jumlah warga negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan

2. Target Pencapaian SPM

   Target pencapaian SPM urusan kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2022 ditampilkan dalam tabel berikut:

**Tabel II.93**

Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Pendidikan Tahun 2022

| No. | Jenis Pelayanan Dasar | | Indikator Pencapaian | Target (Jumlah Yang Harus Dilayani) | Persentase Target (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| **I.** | **Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi** | | **Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan** | **236** | **100** |
| | 1. | Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai | | 236 | 100 |
| | 2. | Makanan Tambahan/ Pendamping untuk Kelompok Rentan (MP ASI, MP Ibu Hamil, Pemberian Makanan untuk Bayi dan Anak (PMBA) dll) | | 1.942 | 100 |
| | 3. | Kelengkapan Pendukung Kesehatan Perorangan (Hyegiene Kit dan Family Kit) | | 27 | 100 |
| | 4. | Dokter | | 3 | 100 |
| | 5. | Perawat | | 18 | 100 |
| | 6. | Bidan | | 3 | 100 |
| | 7. | Tenaga kesehatan masyarakat terlatih yang memiliki kemampuan di bidang surveilans, gizi, epidemologi, kesehatan lingkungan, kesehatan reproduksi dan lain lain | | 550 | 100 |
| | 8. | Tenaga kesehatan terlatih yang memiliki kemampuan dalam penanganan kesehatan jiwa | | 4 | 100 |
| | 9. | Apoteker dan/atau Asisten Apoteker | | 4 | 100 |
| | 10. | Tenaga Penyuluh/promosi | | 5 | 100 |
| **II.** | **Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi** | | **Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar** | **1.621** | **100** |
| | 1. | Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan Jenis Penyakit | | 0 | 100 |
| | 2. | Profilaksis/ Vitamin/ Obat/ Vaksin | | 1621 | 100 |
| | 3. | Wadah pengiriman specimen (Specimen Carrier) | | 21 | 100 |
| | 4. | Tempat sampai biologis | | 0 | 100 |
| | 5. | Formulir: Form Penyelidikan Epidemologi Form/Lembar KIE Alat Tulis yang Diperlukan | | 79 | 100 |
| | 6. | Alat dan Bahan Pengambilan Spesimen (Tabung, Pot, Media | | 24 | 100 |

| No. | Jenis Pelayanan Dasar | | Indikator Pencapaian | Target (Jumlah Yang Harus Dilayani) | Persentase Target (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Amies, dll) untuk Specimen yang berasal dari manusia & Lingkungan sesuai jenis Penyakit | | | |
| | 7. | Alat Pemeriksaan Fisik (Stestoskop, Termometer Badan, Tensimeter,Senter, Test Diagnosis Cepat, dll) | | 9 | 100 |
| | 8. | Dokter | | 4 | 100 |
| | 9. | Tenaga Kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang epidemologi | | 11 | 100 |
| | 10. | Tenaga Kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang kesehatan lingkungan | | 4 | 100 |
| | 11. | Tenaga Kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang etemologi | | 4 | 100 |
| | 12. | Tenaga Laboratorium | | 6 | 100 |
| | 13. | Tenaga penyuluh/promosi Kesehatan | | 5 | 100 |
| | 14. | Petugas yang terlibat dalam pelaksanaan penyelidikan epidemiologi disesuaikan dengan jenis KLB yang terjadi | | 11 | 100 |

3. Realisasi

Realisasi target pencapaian SPM urusan kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 ditampilkabn pada tabel berikut:

**Tabel II.94**

Target Pencapaian SPM Urusan Kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2022

| No. | Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM | | Indikator Pencapaian/Output | | | Total Pencapaian (Persentase) % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **II.** | **Urusan Kesehatan** | | | | | |
| | **KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM** | | | | | **98,02** |
| **1.** | **Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi** | | **Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan Kesehatan** | | | **100** |
| | **PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)** | | **Jumlah Total yang Harus Dilayani** | **Jumlah Total yang Terlayani** | **Jumlah Total yang Belum Terlayani** | **80** |
| | **Jumlah yang Harus Dilayani** | | **236** | **236** | **0** | **100** |
| | **Jumlah Muti Barang/Jasa/SDM** | | **Jumlah yang Harus Dilayani** | **Jumlah Total Terlayani** | **Jumlah yang Belum Terlayani** | 100 |
| | 1. | Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai | 236 | 236 | 0 | 100 |
| | 2. | Makanan Tambahan/ Pendamping untuk Kelompok Rentan (MP ASI, MP Ibu Hamil, | 1.942 | 1.942 | 0 | 100 |

| No. | Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM | | Indikator Pencapaian/Output | | | Total Pencapaian (Persentase) % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pemberian Makanan untuk Bayi dan Anak (PMBA) dll) | | | | |
| | 3. | Kelengkapan Pendukung Kesehatan Perorangan (Hyegiene Kit dan Family Kit) | 27 | 27 | 0 | 100 |
| | 4. | Dokter | 3 | 3 | 0 | 100 |
| | 5. | Perawat | 18 | 18 | 0 | 100 |
| | 6. | Bidan | 3 | 3 | 0 | 100 |
| | 7. | Tenaga kesehatan masyarakat terlatih yang memiliki kemampuan di bidang surveilans, gizi, epidemiologi, kesehatan lingkungan,kesehatan reproduksi dan lain-lain | 550 | 550 | 0 | 100 |
| | 8. | Tenaga kesehatan terlatih yang memiliki kemampuan dalam penanganan kesehatan jiwa | 4 | 4 | 0 | 100 |
| | 9. | Apoteker dan/atau Asisten Apoteker | 4 | 4 | 0 | 100 |
| | 10. | Tenaga Penyuluh/ Pormosi Kesehatan | 5 | 5 | 0 | 100 |
| **2.** | **Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi** | | **Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar** | | | **96,04** |
| | **PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80 %)** | | **Jumlah Total yang Harus Dilayani** | **Jumlah Total yang Terlayani** | **Jumlah Total yang Belum Terlayani** | **80** |
| | **Jumlah yang Harus Dilayani** | | **1.621** | **1.621** | **0** | **100** |
| | **PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR** | | | | | **16,04** |
| | **Jumlah Muti Barang/Jasa/SDM** | | **Jumlah yang Harus Dilayani** | **Jumlah Total Terlayani** | **Jumlah yang Belum Terlayani** | **80,18** |
| | 1. | Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan Jenis Penyakit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. | Profilaksis/ Vitamin/ Obat/ Vaksin | 1.621 | 1.580 | 41 | 97,47 |
| | 3. | Wadah pengiriman specimen (Specimen Carrier) | 21 | 21 | 0 | 100 |
| | 4. | Tempat Sampah Biologis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5. | Formulir penyelidikan epidemiologi, Form/Lembar KIE, Alat Tulis yang diperlukan | 79 | 79 | 0 | 100 |
| | 6. | Alat dan bahan pengambilan specimen (Tabung, Pot, Media Amies dll) untuk specimen yang berasal dari manusia | 24 | 24 | 0 | 100 |
| | 7. | Alat Pemeriksaan Fisik (Stestoskop, Termometer Badan, Tensimeter,Senter, Test Diagnosis Cepat, dll) | 9 | 9 | 0 | 100 |
| | 8. | Dokter | 4 | 4 | 0 | 100 |
| | 9. | Tenaga Kesehatan Masyarakat yang Mempunyai Kemampuan di Bidang Epidemiologi | 11 | 11 | 0 | 100 |
| | 10. | Tenaga Kesehatan Masyarakat yang Mempunyai Kemampuan di Bidang Kesehatan Lingkungan | 4 | 4 | 0 | 100 |
| | 11. | Tenaga Kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang entomologi | 4 | 1 | 3 | 25 |
| | 12. | Tenaga Laboratorium | 6 | 6 | 0 | 100 |
| | 13. | Tenaga penyuluh/promosi Kesehatan | 5 | 5 | 0 | 100 |
| | 14. | Petugas yang teribat dalam pelaksanaan penyelidikan epidemiologi disesuaikan dengan jenis KLB yang terjadi | 11 | 11 | 0 | 100 |

Berdasarkan tabel di atas, indeks pencapaian SPM urusan kesehatan sebesar **98,02 %** dengan kategori **tuntas utama**. Untuk indikator pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau

berpotensi bencana provinsi realisasi capaian SPM berdasarkan bobot persentase pencapaian penerima layanan dan persentase pencapaian mutu layanan dasar sebesar 100 %. Sedangkan indikator pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi, realisasi capaian SPM berdasarkan bobot persentase pencapaian penerima layanan dan persentase pencapaian mutu layanan dasar sebesar 96,44 %.

4. Alokasi Anggaran

Berikut adalah jumlah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menerapkan SPM urusan kesehatan pada Tahun Anggaran 2022.

**Tabel II.95**

Realisasi Target Pencapaian SPM Urusan Kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2022

| No. | Program / Kegiatan /Sub Kegiatan | | | Satuan | Anggaran | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat** | | | | **796,128,455** | **522,576,937** | **65,64** |
| | 1. | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | 796,128,455 | 522,576,937 | 97,04 |
| | | a. | Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana | Orang | 680,686,091 | 467,344,237 | 68.66 |
| | | b. | Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Orang | 115,442,364 | 55,232,700 | 47,84 |
| **2.** | **Program lainnya** | | | | **67,949,905** | **27,447,459** | **40.39** |
| | 2. | Koordinasi dan Sinkronisasi penerapan SPM bidang Kesehatan lintas Kabupaten/Kota | | | 67,949,905 | 27,447,459 | 40.39 |
| **TOTAL** | | | | | **864.078.360** | **550.024.396** | **63,65** |

## C. Urusan Pekerjaan Umum

SPM urusan pekerjaan umum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan Perumahan Rakyat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Adapun jenis pelayanan dasar dan indikator untuk urusan pekerjaan umum antara lain:

a. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota dengan indikator pencapaian jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota;

b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota dengan indikator pencapaian jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.

2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian SPM urusan pekerjaan umum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 ditampilkan pada tabel berikut ini:

**Tabel II.96**

Alokasi Anggaran Penerapan SPM Urusan Kesehatan Tahun 2022

| No. | Jenis Pelayanan Dasar | | Indikator Pencapaian | Target (Jumlah Yang Harus Dilayani) | Persentase Target |
|---|---|---|---|---|---|
| **I.** | **Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota** | | **Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota** | **1** | **100** |
| | 1. | Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang per hari | | 0 | 100 |
| | 2. | Kualitas air (keruh, berwarna, berasa, berbusa, berbau) | | 0 | 100 |
| II. | **Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota** | | **Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaen/Kota** | 0 | 100 |
| | 1. | Kualitas akses pengolehan air limbah domestick | | 0 | 100 |
| | 2. | Kualitas pelayanan air limbah domestic | | 0 | 100 |

3. Realisasi

Realisasi target pencapaian SPM urusan pekerjaan umum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel II.97**

Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Kesehatan Tahun 2022

| No. | Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM | | Indikator Pencapaian/Output | | | Total Pencapaian (Persentase) % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **III.** | **Urusan Pekerjaan Umum** | | | | | |
| | **KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM** | | **BELUM TUNTAS** | | | **40** |
| **I.** | **Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Regional Lintas Kabupaten/Kota** | | **Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota** | | | **80** |
| | **PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)** | | **Jumlah Total yang Harus Dilayani** | **Jumlah Total yang Terlayani** | **Jumlah Total yang Belum Terlayani** | **80** |
| | Jumlah yang Harus Terlayani | | 1 | 1 | 0 | 100 |
| | **PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)** | | | | | 0 |
| | Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM | | Jumlah yang Harus Dilayani | Jumlah Total yang Terlayani | Jumlah Total yang Belum Terlayani | 0 |
| | 1. | Kuantitas (Kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No. | Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM | | Indikator Pencapaian/Output | | | Total Pencapaian (Persentase) % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2. | Kualitas air (keruh, berwarna, berasa, berbusa, berbau) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | **Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota** | | **Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaen/Kota** | | | 0 |
| | **PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMAAN LAYANAN DASAR (80 %)** | | **Jumlah Total yang Harus Dilayani** | **Jumlah Total yang Terlayani** | **Jumlah Total yang Belum Terlayani** | 0 |
| | Jumlah yang Harus Terlayani | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)** | | | | | 0 |
| | Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM | | Jumlah yang Harus Dilayani | Jumlah Total yang Terlayani | Jumlah Total yang Belum Terlayani | 0 |
| | 1. | Kualitas akses pengolahan air limbah domestik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. | Kualitas pelayanan air limbah domestik | 0 | 0 | 0 | 0 |

Berdasarkan tabel di atas, indeks pencapaian SPM urusan pekerjaan umum sebesar **40 %** dengan kategori **belum tuntas**. Untuk indikator penyediaan kebutuhan pokok air minum regional lintas kabupaten/kota realisasi capaian SPM berdasarkan bobot persentase pencapaian penerima layanan dan persentase pencapaian mutu layanan dasar sebesar 80 %. Sedangkan indikator penyediaan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota realisasi capaian SPM berdasarkan bobot persentase pencapaian penerima layanan dan persentase pencapaian mutu layanan dasar sebesar 0 %.

4. Alokasi Anggaran

Berikut adalah jumlah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menerapkan SPM urusan pekerjaan umum Tahun Anggaran 2022.

**Tabel II.98**

Target Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2022

| No. | Program / Kegiatan /Sub Kegiatan | | | Satuan | Anggaran | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum** | | | | 800,000,000 | 771,223,782 | 96,40 |
| | 1. | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | | | 800,000,000 | 771,223,782 | 96,40 |
| | | a. | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | Dokumen | 800,000,000 | 771,223,782 | 96,40 |
| **2.** | **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah** | | | | **598,720,000** | **0** | **0** |
| | 2. | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional | | | 598,720,000 | 0 | 0 |
| | | a. | Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan pembinaan penyediaan prasarana Cubluk | | 598,720,000 | 0 | 0 |
| **TOTAL** | | | | | **1,398,720,000** | **771,223,782** | **55,14** |

## D. Urusan Perumahan Rakyat

SPM urusan perumahan rakyat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan Perumahan Rakyat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1. Jenis Pelayanan Dasar

   Adapun jenis pelayanan dasar dan indikator untuk urusan perumahan rakyat antara lain:

   a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana provinsi dengan indikator pencapaian jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni;

   b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi dengan indikator pencapaian jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

2. Target Pencapaian SPM

   Target pencapaian SPM urusan perumahan rakyat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 ditampilkan pada tabel berikut ini:

**Tabel II.99**

Realisasi Target Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2022

| No. | Jenis Pelayanan Dasar | | Indikator Pencapaian | Target (Jumlah Yang Harus Dilayani) | Persentase Target |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | **Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi** | | **Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni** | **n/a** | **100** |
| | 1. | Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana | | n/a | 100 |
| | 2. | Rehabilitasi rumah bagi korban bencana | | n/a | 100 |
| | 3. | Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana | | n/a | 100 |
| | 4. | Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana | | n/a | 100 |
| II. | **Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi** | | **Jumlah Rumah yang Layak Huni Bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi** | **0** | **100** |
| | 1. | Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/Atau Bangunan | | 0 | 100 |
| | 2. | Subsidi uang sewa | | 0 | 100 |
| | 3. | Penyediaan Rumah Layak Huni | | 0 | 100 |

3. Realisasi

Realisasi target pencapaian SPM urusan perumahan rakyat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel II.100**

Alokasi Anggaran Penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2022

| No. | Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM | Indikator Pencapaian/Output | | | Total Pencapaian (Persentase) % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM** | | | | **50** |
| **IV.** | **Urusan Perumahan Rakyat** | | | | |
| I. | **Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi** | **Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni** | | | **100** |
| | **PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMAAN LAYANAN DASAR 980 %)** | **Jumlah Total yang Harus Dilayani** | **Jumlah Total yang Terlayani** | **Jumlah Total yang Belum Terlayani** | |
| | **Jumlah yang Harus Dilayani** | **n/a** | **n/a** | **n/a** | **100** |
| | **PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20 %)** | | | | **20** |
| | **Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM** | **Jumlah yang Harus Dilayani** | **Jumlah yang Terlayani** | **Jumlah yang Belum Terlayani** | **100** |
| | 1. Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana | **n/a** | **n/a** | **n/a** | 100 |
| | 2. Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana | **n/a** | **n/a** | **n/a** | 100 |
| | 3. Pembangunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana | **n/a** | **n/a** | **n/a** | 100 |
| | 4. Pembangunan Baru Di Lokasi Baru / Relokasi Bagi Korban Bencana | **n/a** | **n/a** | **n/a** | 100 |
| II. | **Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi** | **Jumlah Rumah yang Layak Huni Bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi** | | | **0** |
| | **PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMAAN LAYANAN DASAR (80 %)** | **Jumlah Total yang Harus Dilayani** | **Jumlah Total yang Terlayani** | **Jumlah Total yang Belum Terlayani** | **0** |
| | **Jumlah yang Harus Dilayani** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20 %)** | | | | **0** |
| | **Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM** | Jumlah yang Harus Dilayani | Jumlah yang Terlayani | Jumlah yang Belum Terlayani | **0** |
| | 1. Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/Atau Bangunan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. Subsidi uang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. Penyediaan Rumah Layak Huni | 0 | 0 | 0 | 0 |

Berdasarkan tabel di atas, indeks pencapaian SPM urusan perumahan rakyat sebesar **50 %** dengan kategori **tuntas muda**. Untuk indikator penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana provinsi realisasi capaian SPM berdasarkan bobot persentase pencapaian penerima layanan dan persentase pencapaian mutu layanan dasar capaiannya sebesar 100 %. Sedangkan indikator fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi realisasi capaian SPM berdasarkan bobot persentase pencapaian penerima layanan dan persentase pencapaian mutu layanan

dasar capaiannya sebesar 0 %. Hal ini karena tahun 2022, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak memiliki program yang menyebabkan terjadinya relokasi masyarakat.

4. Alokasi Anggaran

Berikut adalah jumlah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menerapkan SPM perumahan rakyat Tahun Anggaran 2022.

**Tabel II.101**

Alokasi Anggaran Penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2022

| No. | Program / Kegiatan /Sub Kegiatan | Satuan | Anggaran | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Program Pengembangan Perumahan** | | 441,089,873 | 376,048,250 | 85.25 |
| | 1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | | 441,089,873 | 376,048,250 | 85.25 |
| | a. Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Provinsi | Dokumen | 441,089,873 | 376,048,250 | 85.25 |
| **TOTAL** | | | 441,089,873 | 376,048,250 | 85.25 |

## E. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

SPM urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Adapun jenis pelayanan dasar dan indikator untuk urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah pelayanan ketentraman dan ketertiban umum provinsi dengan indikator pencapaian jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di provinsi.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel II.102**

Target Pencapaian SPM Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2022

| No. | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Target (Jumlah Yang Harus Dilayani) | Persentase Target |
|---|---|---|---|---|
| **I.** | **Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi** | **Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu** | **39** | **100** |
| | 1. warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil | | 10 | 100 |

| No. | Jenis Pelayanan Dasar | | Indikator Pencapaian | Target (Jumlah Yang Harus Dilayani) | Persentase Target |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2. | warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan | | 5 | 100 |
| | 3. | Standar operasional prosedur Satpol PP | | 21 | 100 |
| | 4. | Standar Sarana Prasarana Satpol PP | | 200 | 100 |
| | 5. | Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat | | 24 | 100 |
| | 6. | Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada | | 5 | 100 |

3. Realisasi

Realisasi target pencapaian SPM urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel II.103**

Realisasi Target Pencapaian SPM Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2022

| No. | Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM | | Indikator Pencapaian/Output | | | Total Pencapaian (Persentase) % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **V.** | **Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat** | | | | | |
| | **KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM** | | **TUNTAS MADYA** | | | **89,87 %** |
| **1.** | **Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi** | | **Capaian Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi** | | | **89,87** |
| | **PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN (80%)** | | **Jumlah Total yang Harus Dilayani** | **Jumlah Total yang Terlayani** | **Jumlah Total yang Belum Terlayani** | **80** |
| | **Jumlah yang harus dilayani** | | **39** | **39** | **0** | **100** |
| | **PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)** | | | | | **9,87** |
| | Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM | | Jumlah yang Harus Dilayani | Jumlah yang Terlayani | Jumlah yang Belum Terlayani | 49,33 |
| | 1. | warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil | 10 | 0 | 10 | 0 |
| | 2. | warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan | 5 | 0 | 5 | 0 |
| | 3. | Standar Sarana Prasarana Satpol PP | 200 | 192 | 8 | 96 |
| | 4. | Standar operasional prosedur Satpol PP | 21 | 21 | 0 | 100 |
| | 5. | Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat | 24 | 24 | 0 | 100 |
| | 6. | Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada | 5 | 0 | 5 | 0 |

Berdasarkan tabel di atas, indeks pencapaian SPM urusan ketentraman dan ketertiban umum sebesar **89,87 %** dengan kategori **tuntas madya**. Capaian indikator pelayanan ketentraman dan ketertiban umum provinsi berdasarkan bobot persentase pencapaian penerima layanan dan persentase pencapaian mutu layanan dasar capaiannya sebesar 89,87 %.

4. Alokasi Anggaran

Berikut adalah jumlah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menerapkan SPM ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

**Tabel II.104**
Alokasi Anggaran Penerapan SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022

| No. | Program / Kegiatan /Sub Kegiatan | | | Satuan | Anggaran | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum)** | | | | 9,538,920,556 | 6,826,135,069 | 71.56 |
| | 1. | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | | 9,290,315,971 | 6,647,372,969 | 71.55 |
| | | a. | Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, Pembinaan dan penyuluhan, Pelaksanaan patroli, Pengamanan dan Pengawalan | Kasus | 8,671,340,522 | 6,502,480,907 | 74.99 |
| | | b. | Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penerbitan dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa | Kasus | 49,999,868 | 49,098,462 | 98.20 |
| | | c. | Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia | Orang | 88,369,788 | 82,935,600 | 93.85 |
| | | d. | Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum | Unit | 465,699,750 | 9,168,000 | 1.97 |
| | | e. | Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Laporan | 14,906,043 | 3,690,000 | 24.76 |
| | 2. | Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur | | | 248,604,585 | 178,762,100 | 71.91 |
| | | a. | Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | Laporan | 140,346,647 | 110,551,000 | 78.77 |
| | | b | Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | Laporan | 108,257,938 | 68,211,100 | 63.01 |
| 2. | **Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Damkar)** | | | | **1,057,185,098** | **1,043,926,576** | **98.75** |
| | | a. | Pembinaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan Provinsi dan | Laporan | 1,057,185,098 | 1,043,926,576 | 98.75 |

| No. | Program / Kegiatan /Sub Kegiatan | Satuan | Anggaran | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|---|
| | Kabupaten/Kota | | | | |
| **TOTAL** | | | **10,596,105,654** | **7,870,061,645** | **74.27** |

## F. Urusan Sosial

SPM urusan sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1. Jenis Pelayanan Dasar

   Adapun jenis pelayanan dasar dan indikator untuk urusan sosial antara lain:

   a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti sosial dengan indikator capaian jumlah warga negara penyandang disabilitas telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti;

   b. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti sosial dengan indikator pencapaian jumlah warga wegara anak telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;

   c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam Panti Sosial dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti;

   d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti;

   e. Perlindungan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

2. Target Pencapaian SPM

   Target pencapaian SPM urusan sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2022 ditampilkan pada table berikut ini :

**Tabel II.105**

Alokasi Anggaran Penerapan SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022

| No. | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Target (Jumlah Yang Harus Dilayani) | Persentase Target (%) |
|---|---|---|---|---|
| **I.** | **Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti** | **Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti yang** | 30 | 100 |

| No. | Jenis Pelayanan Dasar | | Indikator Pencapaian | Target (Jumlah Yang Harus Dilayani) | Persentase Target (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya** | | |
| | 1. | Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Disabilitas | | 0 | 100 |
| | 2. | Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Disabilitas dan Merujuk Ke Panti Masyarakat | | 0 | 100 |
| | 3. | Penyediaan Sandang | | 30 | 100 |
| | 4. | Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Memiliki Panti Disabilitas | | 0 | 100 |
| | 5. | Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Disabilitas | | 0 | 100 |
| | 6. | Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Disabilitas dan Merujuk Ke Panti Masyarakat | | 0 | 100 |
| | 7. | Penyediaan Alat bantu | | 0 | 100 |
| | 8. | Penyediaan Perbekalan Kesehatan didalam Panti | | 20 | 100 |
| | 9. | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual | | 50 | 100 |
| | 10. | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari | | 0 | 100 |
| | 11. | Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Penduduk | | 0 | 100 |
| | 12. | Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga | | 17 | 100 |
| | 13. | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | 15 | 100 |
| | 14. | Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Memiliki Panti Disabilitas | | 20 | 100 |
| | 15. | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | 9 | 100 |
| **II.** | **Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti** | | **Jumlah Anak Terlantar di Dalam Panti yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya** | 130 | 100 |
| | 1. | Pengasuhan | | 150 | 100 |
| | 2. | Penyediaan Permakanan bagi Daerah yang Memiliki Panti Anak | | 0 | 100 |
| | 3. | Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Anak | | 0 | 100 |

| No. | Jenis Pelayanan Dasar | | Indikator Pencapaian | Target (Jumlah Yang Harus Dilayani) | Persentase Target (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4. | Penyediaan Sandang | | 30 | 100 |
| | 5. | Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Memiliki Panti Anak | | 0 | 100 |
| | 6. | Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Anak | | 0 | 100 |
| | 7. | Penyediaan Perbekalan Kesehatan didalam Panti | | 30 | 100 |
| | 8. | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual | | 120 | 100 |
| | 9. | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari | | 30 | 100 |
| | 10. | Fasilitas Pembuatan Akte Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak | | 0 | 100 |
| | 11. | Akses ke Layanan Pendidikan | | 0 | 100 |
| | 12. | Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga | | 30 | 100 |
| | 13. | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | 0 | 100 |
| **III.** | **Rehabilitas Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti Sosial** | | **Jumlah Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti Sosial** | **21** | **100** |
| | 1. | Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Lanjut Usia | | 0 | 100 |
| | 2. | Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Lanjut Usia dan Merujuk Ke Panti Masyarakat | | 0 | 100 |
| | 3. | Penyediaan Sandang | | 21 | 100 |
| | 4. | Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Memiliki Panti Lanjut Usia | | 0 | 100 |
| | 5. | Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Lanjut Usia | | 0 | 100 |
| | 6. | Penyediaan Alat bantu | | 5 | 100 |
| | 7. | Penyediaan Perbekalan Kesehatan didalam Panti Sosial | | 10 | 100 |
| | 8. | Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Lanjut Usia dan Merujuk Ke Panti Masyarakat | | 0 | 100 |
| | 9. | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual | | 63 | 100 |
| | 10. | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari | | 0 | 100 |
| | 11. | Fasilitas Pembuatan Nomor Induk | | 0 | 100 |

| No. | Jenis Pelayanan Dasar | | Indikator Pencapaian | Target (Jumlah Yang Harus Dilayani) | Persentase Target (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Penduduk | | | |
| | 12. | Akses ke Layanan Kesehatan Dasar | | 0 | 100 |
| | 13. | Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga | | 15 | 100 |
| | 14. | Akses layanan pengasihan kepada keluarga pengganti | | 0 | 100 |
| | 15. | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | 0 | 100 |
| | 16. | Pemulasaraan | | 10 | 100 |
| | 17. | Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang belum memiliki Panti Anak dan merujuk ke Panti Masyarakat | | 0 | 100 |
| | 18. | Penyediaan permakanan bagi daerah yang belum memiliki Panti Anak dan merujuk ke Panti Masyarakat | | 0 | 100 |
| | 19. | Penyediaan permakanan bagi daerah yang memiliki Panti Lanjut Usia | | 0 | 100 |
| **IV.** | **Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti** | | **Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya** | **8** | **100** |
| | 1. | Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis | | 0 | 100 |
| | 2. | Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis Merujuk Ke Panti Masyarakat | | 0 | 100 |
| | 3. | Penyediaan Sandang | | 0 | 100 |
| | 4. | Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis | | 0 | 100 |
| | 5. | Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis | | 0 | 100 |
| | 6. | Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis dan Merujuk Ke Panti Masyarakat | | 0 | 100 |

| No. | Jenis Pelayanan Dasar | | Indikator Pencapaian | Target (Jumlah Yang Harus Dilayani) | Persentase Target (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 7. | Penyediaan Perbekalan Kesehatan didalam Panti | | 0 | 100 |
| | 8. | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial | | 0 | 100 |
| | 9. | Pemberian Bimbingan Keterampilan Hidup Sehari-hari | | 0 | 100 |
| | 10. | Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar | | 0 | 100 |
| | 11. | Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak | | 0 | 100 |
| | 12. | Akses ke Layanan Pendidikan | | 0 | 100 |
| | 13. | Pemulangan ke Daerah Asal | | 4 | 100 |
| **V.** | **Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah Provinsi** | | **Jumlah korban bencana alam dan sosial provinsi yang terpenuhi kebutuhan dasarnya** | 67 | 100 |
| | 1. | Penyediaan Permakanan | | 66 | 100 |
| | 2. | Penyediaan sandang | | 0 | 100 |
| | 3. | Peyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | | 20 | 100 |
| | 4. | Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan | | 10 | 100 |
| | 5. | Pelayanan Dukungan Psikososial | | 625 | 100 |

3. Realisasi

Realisasi target pencapaian SPM urusan sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel II.106**

Realisasi Target Pencapaian SPM Urusan Sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2022

| No. | Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM | Indikator Pencapaian/Output | | | Total Pencapaian (Persentase) % |
|---|---|---|---|---|---|
| **VI.** | **Urusan Sosial** | | | | |
| | **KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM** | **TUNTAS MADYA** | | | **84,31** |
| **1.** | **Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti** | **Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya** | | | **89,33** |
| | **PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMAAN LAYANAN DASAR (80%)** | **Jumlah Total yang Harus Dilayani** | **Jumlah Total yang Terlayani** | **Jumlah Total yang Belum Terlayani** | **80** |
| | **Jumlah yang Harus Dilayani** | **30** | **30** | **0** | **100** |
| | **PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)** | | | | **9,33** |
| | **Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM** | **Jumlah yang** | **Jumlah yang** | **Jumlah yang** | **46,67** |

| No. | Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM | | Indikator Pencapaian/Output | | | Total Pencapaian (Persentase) % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Harus Dilayani** | **Terlayani** | **Belum Terlayani** | |
| | 1. | Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Disabilitas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. | Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Disabilitas dan Merujuk Ke Panti Masyarakat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. | Penyediaan Sandang | 30 | 30 | 0 | 100 |
| | 4. | Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Memiliki Panti Disabilitas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5. | Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Disabilitas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6. | Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Disabilitas dan Merujuk Ke Panti Masyarakat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7. | Penyediaan Alat bantu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8. | Penyediaan Perbekalan Kesehatan didalam Panti | 20 | 20 | 0 | 100 |
| | 9. | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual | 50 | 50 | 0 | 100 |
| | 10. | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11. | Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Penduduk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12. | Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga | 17 | 17 | 0 | 100 |
| | 13. | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | 15 | 15 | 0 | 100 |
| | 14. | Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Memiliki Panti Disabilitas | 20 | 20 | 0 | 100 |
| | 15. | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | 9 | 9 | 0 | 100 |
| **2.** | **Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti** | | **Jumlah Anak Terlantar di Dalam Panti yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya** | | | **75,90** |
| | **PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMAAN LAYANAN DASAR (80 %)** | | **Jumlah Total yang Harus Dilayani** | **Jumlah Total yang Terlayani** | **Jumlah Total yang Belum Terlayani** | **70,15** |
| | **Jumlah yang Harus Dilayani** | | **130** | **114** | **16** | **87,69** |
| | **PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20 %)** | | | | | **5,74** |
| | **Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM** | | **Jumlah yang Harus Dilayani** | **Jumlah yang Terlayani** | **Jumlah yang Belum Terlayani** | **28,72** |
| | 1. | Pengasuhan | 150 | 150 | 0 | 100 |
| | 2. | Penyediaan Permakanan bagi Daerah yang Memiliki Panti Anak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. | Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Anak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4. | Penyediaan Sandang | 30 | 14 | 16 | 46,67 |
| | 5. | Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Memiliki Panti Anak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6. | Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Anak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7. | Penyediaan Perbekalan Kesehatan didalam Panti | 30 | 14 | 16 | 46,67 |
| | 8. | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual | 120 | 104 | 16 | 86,67 |
| | 9. | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari | 30 | 14 | 16 | 46,67 |
| | 10. | Fasilitas Pembuatan Akte Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11. | Akses ke Layanan Pendidikan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12. | Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga | 30 | 14 | 16 | 46,67 |
| | 13. | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | **Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti** | | **Jumlah Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti Sosial** | | | **85,37** |
| | **PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMAAN LAYANAN DASAR (80 %)** | | **Jumlah Total yang Harus** | **Jumlah Total yang** | **Jumlah Total yang Belum** | **80** |

| No. | Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM | | Indikator Pencapaian/Output | | | Total Pencapaian (Persentase) % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Dilayani** | **Terlayani** | **Terlayani** | |
| | **Jumlah yang Harus Dilayani** | | **21** | **21** | **0** | **100** |
| | **PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20 %)** | | | | | **5,37** |
| | **Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM** | | **Jumlah yang Harus Dilayani** | **Jumlah yang Terlayani** | **Jumlah yang Belum Terlayani** | **26,84** |
| | 1. | Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Lanjut Usia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. | Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Lanjut Usia dan Merujuk Ke Panti Masyarakat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. | Penyediaan Sandang | 21 | 21 | 0 | 100 |
| | 4. | Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Memiliki Panti Lanjut Usia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5. | Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Lanjut Usia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6. | Penyediaan Alat bantu | 5 | 5 | 0 | 100 |
| | 7. | Penyediaan Perbekalan Kesehatan didalam Panti Sosial | 10 | 10 | 0 | 100 |
| | 8. | Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Lanjut Usia dan Merujuk Ke Panti Masyarakat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9. | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual | 63 | 63 | 0 | 100 |
| | 10. | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11. | Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Penduduk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12. | Akses ke Layanan Kesehatan Dasar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13. | Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga | 15 | 15 | 0 | 100 |
| | 14. | Akses layanan pengasihan kepada keluarga pengganti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15. | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16. | Pemulasaraan | 10 | 1 | 9 | 10 |
| | 17. | Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang belum memiliki Panti Anak dan merujuk ke Panti Masyarakat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18. | Penyediaan permakanan bagi daerah yang belum memiliki Panti Anak dan merujuk ke Panti Masyarakat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19. | Penyediaan permakanan bagi daerah yang memiliki Panti Lanjut Usia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4.** | **Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti** | | **Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya** | | | **81,54** |
| | **PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMAAN LAYANAN DASAR (80 %)** | | **Jumlah Total yang Harus Dilayani** | **Jumlah Total yang Terlayani** | **Jumlah Total yang Belum Terlayani** | **80** |
| | **Jumlah yang Harus Dilayani** | | **8** | **8** | **0** | **100** |
| | **PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20 %)** | | | | | **1,54** |
| | **Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM** | | **Jumlah yang Harus Dilayani** | **Jumlah yang Terlayani** | **Jumlah yang Belum Terlayani** | **0** |
| | 1. | Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. | Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis Merujuk Ke Panti Masyarakat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. | Penyediaan Sandang | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No. | Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM | | Indikator Pencapaian/Output | | | Total Pencapaian (Persentase) % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4. | Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5. | Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6. | Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis dan Merujuk Ke Panti Masyarakat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7. | Penyediaan Perbekalan Kesehatan didalam Panti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8. | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9. | Pemberian Bimbingan Keterampilan Hidup Sehari-hari | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10. | Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11. | Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12. | Akses ke Layanan Pendidikan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13. | Pemulangan ke Daerah Asal | 4 | 4 | 0 | 100 |
| **5.** | **Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah Provinsi** | | **Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya** | | | **89,40** |
| | **PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)** | | **Jumlah Total yang Harus Dilayani** | **Jumlah Total yang Terlayani** | **Jumlah Total yang Belum Terlayani** | **80** |
| | **Jumlah yang Harus Dilayani** | | **67** | **67** | **0** | **100** |
| | **PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20 %)** | | | | | **9,40** |
| | **Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM** | | **Jumlah yang Harus Dilayani** | **Jumlah yang Terlayani** | **Jumlah yang Belum Terlayani** | **47** |
| | 1. | Penyediaan Permakanan | 66 | 66 | 0 | 100 |
| | 2. | Penyediaan Sandang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. | Peyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | 20 | 5 | 15 | 25 |
| | 4. | Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan | 10 | 1 | 9 | 10 |
| | 5. | Pelayanan Dukungan Psikososial | 625 | 625 | 0 | 100 |

Berdasarkan tabel di atas, indeks pencapaian SPM urusan sosial sebesar **84,31 %** dengan kategori **tuntas madya**. Capaian SPM untuk indikator rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar di dalam panti berdasarkan bobot persentase pencapaian penerima layanan dan persentase pencapaian mutu layanan dasar sebesar 89,33 %. Capaian SPM untuk indikator rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti berdasarkan bobot persentase pencapaian penerima layanan dan persentase pencapaian mutu layanan dasar sebesar 75,90 %. Capaian SPM untuk indikator rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti berdasarkan bobot persentase pencapaian penerima layanan dan persentase pencapaian mutu layanan dasar sebesar 85,37 %. Capaian SPM untuk indikator rehabilitasi sosial tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti berdasarkan bobot persentase pencapaian penerima layanan dan persentase pencapaian mutu layanan dasar sebesar 81,54 %. Capaian SPM untuk indikator perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi berdasarkan bobot persentase pencapaian penerima layanan dan persentase pencapaian mutu layanan dasar sebesar 89,40 %.

4. Alokasi Anggaran

Berikut adalah jumlah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menerapkan SPM urusan sosial Tahun Anggaran 2022.

**Tabel II.107**

Alokasi Anggaran Penerapan SPM Urusan Sosial Tahun 2022

| No. | Program / Kegiatan /Sub Kegiatan | | | Satuan | Anggaran | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Program Rehabilitasi Sosial** | | | | 1,489,423,725 | 1,249,814,706 | 83.91 |
| | 1. | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti | | | 905,091,639 | 755,835,581 | 83.51 |
| | | a. | Penyediaan permakanan | Orang | 232,449,414 | 192,024,000 | 82.61 |
| | | b. | Penyediaan sandang | Orang | 58,260,244 | 57,495,471 | 98.69 |
| | | c. | Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti | Orang | 29,995,060 | 28,681,600 | 95.62 |
| | | d. | Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial | Orang | 132,775,640 | 114,051,050 | 85.90 |
| | | e. | Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar | Orang | 349,750,000 | 310,300,000 | 88.72 |
| | | f. | Pemberian pelayanan penelusuran peluarga | Orang | 28,275,000 | 15,600,700 | 55.17 |
| | | g. | Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga | Orang | 50,582,000 | 25,232,500 | 49.88 |
| | | h. | Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan bidang rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar | Dokumen | 23,004,281 | 12,450,260 | 54.12 |
| | 2. | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | | | 289,953,235 | 251,425,423 | 86.71 |
| | | a. | Pengasuhan | Orang | 84,233,115 | 81,702,958 | 97.00 |
| | | b. | Penyediaan Sandang | Orang | 8,573,025 | 8,573,025 | 100 |
| | | c. | Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti | Orang | 4,106,095 | 3,201,840 | 77.98 |
| | | d. | Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial | Orang | 145,586,000 | 111,799,600 | 76.79 |
| | | e. | Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari | Orang | 14,400,000 | 14,400,000 | 100 |
| | | f. | Pemberian pelayanan penelusuran keluarga | Orang | 4,510,000 | 4,510,000 | 100 |
| | | g. | Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti | Orang | 28,545,000 | 27,238,000 | 95.42 |
| | 3. | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | | | 249,874,317 | 206,222,062 | 82.53 |
| | | a. | Penyediaan sandang | Orang | 28,132,336 | 26,606,636 | 94.58 |
| | | b. | Penyediaan alat bantu | Orang | 8,384,000 | 6,220,800 | 74.20 |
| | | c. | Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti sosial | Orang | 30,242,869 | 26,452,506 | 87.47 |
| | | d. | Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial | Orang | 108,937,912 | 85,516,120 | 78.50 |
| | | e. | Pemberian pelayanan penelusuran keluarga | Orang | 19,260,000 | 16,960,000 | 88.06 |
| | | f. | Pemulasaraan | Orang | 4,000,000 | 1,000,000 | 25.00 |

| No. | Program / Kegiatan /Sub Kegiatan | | | Satuan | Anggaran | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | g. | Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis terlantar di dalam panti | Dokumen | 50,917,200 | 43,466,000 | 85.37 |
| | 4. | Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti | | | 44,504,534 | 36,331,640 | 81.64 |
| | | a. | Pemulangan ke daerah asal | Orang | 14,532,000 | 8,975,470 | 61.76 |
| | | b. | Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis terlantar di dalam panti | Dokumen | 29,972,534 | 27,356,170 | 91.27 |
| 2. | Program Penanganan Bencana | | | | 960,120,715 | 819,950,728 | 85.40 |
| | 5. | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi | | | 960,120,715 | 819,950,728 | 85.40 |
| | | a. | Penyediaan Permakanan | | 716,703,776 | 640,216,000 | 89.33 |
| | | b. | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | | 48,674,600 | 19,483,000 | 40.03 |
| | | c. | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | | 38,311,323 | 25,361,928 | 66.20 |
| | | d. | Pelayanan Dukungan Psikososial | | 156,431,016 | 134,889,800 | 86.23 |
| **TOTAL** | | | | | **2,449,544,440** | **2,069,765,434** | **84.50** |

## 2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD 2022

Evaluasi pelaksanaan RKPD 2022 dilakukan dalam rangka untuk mengidentifikasi/menginventarisasi sejauh mana program kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan baik dari segi kinerja maupun anggaran untuk pelaksanaan Pembangunan ditahun selanjutnya. Adapun jumlah anggaran Belanja Langsung pada RKPD Tahun 2022 sebesar Rp. 2.425.487.337.800 total rata-rata realisasi kinerja seluruh program sebesar 57.58. Adapun jumlah realisasi anggaran sebesar Rp. 1.298.621.966.442 dengan total rata-rata capaian anggaran sebesar 75,00. Berikut digambarkan hasil evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah.

**Tabel II.108**
Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sd TW IV Tahun 2022

| NO | PERANGKAT DAERAH | ANGGARAN BELANJA (%) | REALISASI (Rp) | RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN | | PREDIKAT KINERJA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANGGARAN % | KINERJA% | ANGGARAN | KINERJA |
| 1. | Dinas Pendidikan | 656.819.716.646 | 290.268.190.258 | 57,60 | 75,00 | R | T |
| 2. | Dinas Kesehatan | 70.149.705.602 | 44.496.832.989 | 60,01 | 58,65 | S | R |
| 3. | RSUD | 216.535.916.352 | 69.458.085.370 | 0 | 0 | S | R |
| 4. | RSJD | 56.455.745.550 | 29.846.185.176 | 52,19 | 75,74 | R | T |
| 5. | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman | 239.793.886.779 | 85.662.323.751 | 0 | 0 | S | R |
| 6. | Satuan Polisi Pamong Praja | 23.024.199.028 | 13.462.432.352 | 28,40 | 43,21 | S | R |
| 7. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 11.939.153.874 | 8.114.376.522 | 55,74 | 51,90 | R | R |
| 8. | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 30.874.011.336 | 20.157.656.077 | 65,30 | 0,00 | S | SR |
| 9. | Dinas Tenaga Kerja | 17.944.521.120 | 13.722.358.716 | 41,00 | 52,00 | SR | R |
| 10. | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Keluarga Berencana | 10.085.773.606 | 6.554.407.636 | 40,24 | 75,00 | SR | T |
| 11. | Dinas Pertanian dan Ketahahan Pangan | 36.196.795.585 | 27.587.949.183 | 44,83 | 27,09 | SR | SR |
| 12. | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 44.321.482.012 | 30.796.941.855 | 77,70 | 73,41 | T | S |
| 13. | Dinas Perhubungan | 20.041.014.991 | 12.321.572.017 | 82,30 | 68,31 | T | S |
| 14. | Dinas Komunikasi dan Informatika | 17.737.530.532 | 13.885.101.218 | 64,89 | 77,34 | R | T |
| 15. | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | 14.711.072.921 | 10.091.020.939 | 70,16 | 10,66 | S | SR |
| 16. | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu | 10.994.312.153 | 7.576.478.265 | 11,87 | 11,73 | SR | SR |

| NO | PERANGKAT DAERAH | ANGGARAN BELANJA (%) | REALISASI (Rp) | RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN | | PREDIKAT KINERJA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANGGARAN % | KINERJA% | ANGGARAN | KINERJA |
| | Pintu | | | | | | |
| 17. | Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | 30.965.094.555 | 23.698.345.990 | 75,12 | 58,24 | T | S |
| 18. | Dinas Kearispan dan Perpustakaan | 28.584.073.984 | 13.135.534.926 | 20,56 | 45,16 | SR | R |
| 19. | Dinas Kelautan dan Perikanan | 34.743.592.211 | 22.953.260.979 | 30,41 | 31,94 | SR | SR |
| 20. | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 20.076.333.007 | 14.839.613.956 | 57,68 | 57,68 | R | R |
| 21. | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 21.268.982.581 | 14.363.622.822 | 44,51 | 86,96 | SR | T |
| 22. | Sekretariat Daerah | 144.916.792.542 | 98.955.186.929 | 48,82 | 68,64 | SR | R |
| 23. | Inspektorat Daerah | 16.055.694.663 | 13.118.352.892 | 84,38 | 75,56 | T | T |
| 24. | Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah | 15.178.187.571 | 10.559.321.353 | 69,57 | 71,46 | S | S |
| 25. | Badan Keuangan Daerah | 463.944.841.628 | 310.975.940.075 | 60,57 | 0 | R | SR |
| 26. | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 24.265.670.993 | 16.103.856.160 | 66,32 | 159,00 | S | ST |
| 27. | Sekretariat DPRD | 123.390.700.515 | 60.524.750.584 | 117,8 | 80,05 | ST | T |
| 28. | Badan Penguhubung Provinsi | 10.398.362.371 | 5.522.238.440 | 41,55 | 54,97 | SR | R |
| 29. | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 12.874.149.092 | 9.900.029.012 | 85,40 | 85,40 | T | T |
| **TOTAL** | | **2.425.487.337.800** | **1.298.621.966.442** | **57.58** | **75,00** | **R** | **T** |

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja RKPD antara lain adalah:

1. realokasi anggaran/pergeseran pagu anggaran belanja pada APBD 2022 mengakibatkan tidak tercapainya kinerja output, walaupun pada tahap awal anggaran telah direalisasikan terutama pada belanja untuk penunjang awal kegiatan;
2. pelaksanaan kegiatan yang *output* fisik dan dokumen laporan baru dapat dicapai pada akhir tahun disebabkan karena pelaksanaannya saat ini masih dalam proses termasuk lelang sehingga belum dapat dihitung kinerjanya;
3. belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di beberapa Perangkat Daerah, sehingga kinerjanya masih rendah.

Kondisi capaian kinerja RKPD 2024 sampai dengan Triwulan IV untuk seluruh program dan kegiatan, sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel II.109**

Evaluasi Hasil RKPD Sampai Dengan Triwulan IV tahun 2022

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | URUSAN KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi | 1. Nilai SAKIP perangkat daerah ; 2. Survei kepuasan pelayanan internal | 1.77,52. 83% | 52.029.862.714,20 | | | 1.77,32. 81% | 24.776.125.102,00 | 1. 02. 0 | 41,23 | 1. 02. 0 | 10.216.165.875,00 | 1. 02. 0 | 0,20 | Dinas Kesehatan | |
| | | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, Penganggaran dan evaluasi | 11 dokumen | 582.854.097,00 | | | 11 dokumen | 277.549.570,00 | 1 | 1,80 | 7 | 4.982.594,00 | 1 | 0,01 | | |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah | 7 dokumen | 375.735.929,10 | | | 7 dokumen | 178.921.871,00 | 1 | 2,23 | 6 | 3.982.594,00 | 1 | 0,01 | | |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah | 4 dokumen | 207.118.167,90 | | | 4 dokumen | 98.627.699,00 | 1 | 1,01 | 4 | 1.000.000,00 | 1 | 0,00 | | |
| | | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah laporan keuangan PD tepat waktu | 12 laporan | 43.951.934.546,10 | | | 12 laporan | 20.929.492.641,00 | 1 | 43,29 | 6 | 9.061.244.227,00 | 1 | 0,21 | | |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan | 139 orang | 43.745.517.066,30 | | | 139 orang | 20.831.198.603,00 | 1 | 43,50 | 138 | 9.061.244.227,00 | 1 | 0,21 | | |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran | 14 laporan | 52.499.323,80 | | | 14 laporan | 24.999.678,00 | 0 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semeseteran SKPD | Jumlah dokumen penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | 1 dokumen | 153.918.156,00 | | | 1 dokumen | 73.294.360,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah kegiatan administrasi kepegawaian PD | 12 laporan | 129.211.002,90 | | | 12 laporan | 61.529.049,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 6 orang | 129.204.702,90 | | | 6 orang | 61.526.049,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah kegiatan administrasi umum PD | 12 laporan | 673.180.082,40 | | | 12 laporan | 320.561.944,00 | 1 | 0,00 | 6 | 66.247.676,00 | 1 | 0,10 | | |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia | 10 jenis | 25.195.065,00 | | | 10 jenis | 11.997.650,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia | 60 jenis | 279.069.594,30 | | | 60 jenis | 132.890.283,00 | 1 | 14,71 | 30 | 19.544.100,00 | 1 | 0,07 | | |
| | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan | 5 jenis | 102.384.893,10 | | | 5 jenis | 48.754.711,00 | 0 | 22,73 | 1 | 11.083.300,00 | 0 | 0,11 | | |
| | | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah jenis penyediaan bahan/material | 2 jenis | 23.261.280,00 | | | 2 jenis | 11.076.800,00 | 0 | 6,91 | 0 | 765.000,00 | 0 | 0,03 | | |
| | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah makan minum Kunjungan Tamu yang difasilitasi | 420 kotak | 35.272.650,00 | | | 420 kotak | 16.796.500,00 | 1 | 26,79 | 300 | 4.500.000,00 | 1 | 0,13 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah dokumen rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 142 laporan | 207.996.600,00 | | | 142 laporan | 99.046.000,00 | 0 | 30,65 | 14 | 30.355.276,00 | 0 | 0,15 | | |
| | | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah jenis barang milik daerah yang diadakan | 2 jenis | 709.207.997,40 | | | 2 jenis | 337.718.094,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | | Pengadaan Mebel | Jumlah pengadaan meubelair | 58 unit | 232.218.835,80 | | | 58 unit | 110.580.398,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah pengadaan peralatan kantor | 24 unit | 476.989.161,60 | | | 24 unit | 227.137.696,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 jenis | 4.937.776.200,00 | | | 4 jenis | 2.351.322.000,00 | 1 | 44,64 | 2 | 1.049.535.493,00 | 1 | 0,21 | | |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1. Jumlah Penyediaan materai | 200 lembar | 13.906.200,00 | | | 200 lembar | 6.622.000,00 | 0 | 18,38 | 0 | 1.217.000,00 | 0 | 0,09 | | |
| | | | 2. Jumlah Penyediaan paket pengiriman Surat Menyurat | 250 buah | | | | 250 buah | | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 bulan | 1.044.540.000,00 | | | 12 bulan | 497.400.000,00 | 1 | 44,01 | 6 | 218.918.493,00 | 1 | 0,21 | | |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 45 orang | 3.879.330.000,00 | | | 45 orang | 1.847.300.000,00 | 1 | 44,90 | 45 | 829.400.000,00 | 1 | 0,21 | | |
| | | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah jenis Barang Milik Daerah yang dipelihara | 4 jenis | 1.045.698.788,40 | | | 4 jenis | 497.951.804,00 | 1 | 6,86 | 2 | 34.155.885,00 | 1 | 0,03 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara | 6 unit | 470.494.290,00 | | | 6 unit | 224.044.900,00 | 0 | 9,11 | 2 | 20.410.885,00 | 0 | 0,04 | | |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan yang dipelihara | 168 unit | 165.266.564,40 | | | 168 unit | 78.698.364,00 | 0 | 2,53 | 20 | 1.995.000,00 | 0 | 0,01 | | |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah bangunan kantor yang dipelihara/direhabilitasi | 3 unit | 272.956.555,20 | | | 3 unit | 129.979.312,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara/direhabilitasi | 6 unit | 136.981.378,80 | | | 6 unit | 65.229.228,00 | 0 | 18,01 | 0 | 11.750.000,00 | 0 | 0,09 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 1. Persentase peningkatan pemeriksaan laboratorium kesehatan ; 2.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi minimal madya 3. Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit 4. Persentase peningkatan kesehatan masyarakat | 1. 85% ; 2. 85% 3. 93,6% ; 4. 85,86% | 274.646.318.221,80 | | | 1. 81% ; 2. 82% 3. 92,95% ; 4. 84,86% | 65.137.376.529,00 | 1. 37,69% ; 2. 104,80% 3. 37% ; 4. 34,13% | 25,45 | 1. 30,53% ; 2. 85,94% 3. 34,40% ; 4. 28,96% | 16.578.387.042,00 | 1. 35,92% ; 2. 101,11% 3. 36,75% ; 4. 33,73% | 6,04 | | |
| | | Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 1. Persentase penyediaan sarana dan prasarana laboratorium kesehatan | 1 | 20.314.265.430,90 | | | 1 | 9.673.459.729,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah gedung kantor yang dipelihara | 1 unit | 3.942.986.802,30 | | | 1 unit | 1.877.612.763,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Pengadaan Sarana di fasilitas pelayanan kesehatan | Jumlah pengadaan sarana di fasilitas layanan kesehatan | 4 unit | 1.576.492.734,60 | | | 4 unit | 750.710.826,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | Jumlah pengadaan alat kesehatan | 4 paket | 2.890.038.914,70 | | | 4 paket | 1.376.209.007,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan | Jumlah Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan | 1 paket | 102.900.000,00 | | | 1 paket | 49.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | | Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) | jumlah Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) | 5 paket | 11.801.846.979,30 | | | 5 paket | 5.619.927.133,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | | | 2. Persentase Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan di Puskesmas | 1 | 3.973.760.225,40 | | | 1 | 1.892.266.774,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 136 | 0,00 | | |
| | | Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) | Jumlah penduduk yang dilayani pelayanan kesehatan bergerak | 10.300 orang | 95.694.194,40 | | | 10.300 orang | 45.568.664,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | | Pengadaan Alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan | Jumlah pengadaan Alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan | 90 unit | 3.878.066.031,00 | | | 90 unit | 1.846.698.110,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | 3. Persentase Kabupaten/Kota yang menyediakan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah Provinsi | 1 | 155.385.707,40 | | | 1 | 73.993.194,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | | Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 1. Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan telemedecine | 8 fasyankes | 155.385.707,40 | | | 8 fasyankes | 73.993.194,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | | | 2. Peserta pertemuan evaluasi pelaksanaan telemedecine | 21 orang | | | | 21 orang | | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| | | | 4. Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin essensial | 1 | 903.630.113,40 | | | 1 | 430.300.054,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 88 | 0,00 | | |
| | | Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya | Jumlah fasilitas kesehatan yang dipelihara | 1 unit | 105.000.000,00 | | | 1 unit | 50.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | 1. Jumlah paket obat yang didistribusikan ke kab/kota bersumber APBD | 20 paket | 425.058.681,60 | | | 20 paket | 202.408.896,00 | 40 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | 2. Jumlah paket obat ynag didistribusikan ke kab/kota bersumber APBN (daK) | 50 paket | | | | 50 paket | | 34 | | 17 | 0,00 | 0 | | | |
| | | Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah paket pengadaan obat essensial | 2 paket | 373.571.431,80 | | | 2 paket | 177.891.158,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | | Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 1. Persentase Pemeriksaan Laboratorium Mendukung Pengendalian Penyakit | 1 | 534.668.400,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | 534.668.400,00 | | | 1 | 254.604.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 193 | 0,00 | | |
| | | | 1. Jumlah parameter layanan laboratorium yang terakreditasi | 13 parameter | | | | | 254.604.000,00 | | 0,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 2. Jumlah pelayanan pemeriksaan laboratorium | 2600 sampel | | | | 13 parameter | | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| | | | 2. Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan sistem rujukan terintegrasi berbasis kompetensi | 1 | 200.757.721,50 | | | 2600 sampel | | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| | | Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik | | | 200.757.721,50 | | | 1 | 95.598.915,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | 1. Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan pengelolaan rujukdan rujuk balik melalui sisrute yang berbasis kompetensi | 6 Rumah sakit | | | | | 95.598.915,00 | | 0,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 2. Jumlah petugas yang ditingkatkan pengetahuan tentang rujukan dan rujuk balik | 43 orang | | | | 6 Rumah sakit | | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| | | | 3. Persentase Kepesertaan JKN | 1 | 79.640.991.603,60 | | | 43 orang | | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| | | Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat | Jumlah masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan baik mandiri maupun yang dibiayai pemerintah | 1.130.000 jiwa | 79.640.991.603,60 | | | 1 | 37.924.281.716,00 | 102 | 37,64 | 1 | 14.276.467.200,00 | 97 | 0,18 | | |
| | | | 4. Persentase Puskesmas yang Melakukan Pelayanan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 1 | 4.044.478.504,50 | | | 1.130.000 jiwa | 37.924.281.716,00 | 0 | 37,64 | 0 | 14.276.467.200,00 | 0 | 0,18 | | |
| | | | | | 534.668.400,00 | | | 1 | 1.925.942.145,00 | 125 | 1,68 | 1 | 32.400.000,00 | 118 | 0,01 | | |
| | | | | | 534.668.400,00 | | | | | #DIV/0! | 0,00 | 0 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | | |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | 4.044.478.504,50 | | | | | #DIV/0! | 0,00 | 0 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | 1. Jumlah bahan habis pakai penyakit menular dan menyakit tidak menular | 2 jenis | | | | | 1.925.942.145,00 | | 1,68 | 0 | 32.400.000,00 | | 0,01 | | |
| | | | 2. Jumlah kabupaten/kota dan puskesmas yang dibina penyakit menuloar dan tidak menular | 64 puskesmas | | | | 2 jenis | | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| | | | 3. Jumlah peserta deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular | 80 orang | | | | 64 puskesmas | | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| | | | 4. Jumlah peserta pertemuan lintas sektor malaria | 100 orang | | | | 80 orang | | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| | | | 5. Jumlah peserta workshop | 225 orang | | | | 100 orang | | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| | | | 6. Jumlah tenaga kesehatan | 1 orang | | | | 225 orang | | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| | | | 5. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza | 1 | 584.091.288,90 | | | 1 orang | | 1 | | 1 | 0,00 | 1 | | | |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | 310.971.299,10 | | | 1 | 278.138.709,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | 1. Jumlah peserta pertemuan pemantapan program kesehatan jiwa | 32 orang | | | | | 148.081.571,00 | | 0,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 2. Jumlah siswa yang dilakukan skrining kesehatan jiwa (mobile keswa) dengan 30 orang per kabupaten/kota | 210 orang | | | | 32 orang | | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA | | | 273.119.989,80 | | | 210 orang | | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| | | | 1. Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan upaya pencegahan dan pengendalian masalah NAPZA | 10 fasiltas yankes | | | | | 130.057.138,00 | | 0,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 2. Jumlah masyarakat yang mendapatkan edukasi bahaya narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) | 100 orang | | | | 10 fasiltas yankes | | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | 6. Persentase pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana | 1 | 4.471.656.470,40 | | | 100 orang | | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana | Jumlah pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana | 6 kali | 225.511.085,10 | | | 1 | 2.129.360.224,00 | 125 | 0,03 | 1 | 672.975,00 | 118 | 0,00 | | |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Jumlah kejadian luar biasa (KLB) yang dapat ditanggulangi | 15 kejadian | 2.637.244.110,90 | | | 6 kali | 107.386.231,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | | Pengelolaan Pelayanan kesehatan haji | Jumlah jemaah haji yang mendapatkan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan haji | 500 orang | 413.813.110,20 | | | 15 kejadian | 1.255.830.529,00 | 0 | 0,05 | 0 | 672.975,00 | 0 | 0,00 | | |
| | | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | 276.681.570,90 | | | 500 orang | 197.053.862,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | | | 1. Jumlah puskesmas yang melaksanakan sistem kewaspadaan dini dan respon diatas 80 persen | 64 puskesmas | | | | | 131.753.129,00 | | 0,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | 2. Jumlah puskesmas yang melaksanakan surveilans kesehatan | 64 puskesmas | | | | 64 puskesmas | | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| | | Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota | Jumlah investigasi kasus KIPI yang dilakukan | 7 kali | 41.472.221,70 | | | 64 puskesmas | | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| | | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional | Jumlah pengiriman spesimen penyakit potensial kejadian luar biasa (KLB) ke laboratorium rujukan/nasional untuk konfirmasi laboratorium | 20 spesimen | 28.663.897,50 | | | 7 kali | 19.748.677,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | | Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan | Jumlah peserta pemberdayaan masyarakat daerah bencana dan atau berpotensi bencana | 245 orang | 779.686.987,80 | | | 20 spesimen | 13.649.475,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | | Penilaian/Appraisal Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Pasca Bencana | Jumlah penilaian terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang terdampak krisis kesehatan | 5 kali | 68.583.486,30 | | | 245 orang | 371.279.518,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | 5 kali | 32.658.803,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | | | 7. Persentase pelayanan kesehatan keluarga | 1 | 9.348.190.929,00 | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak | | | 6.376.206.599,70 | | | 1 | 4.451.519.490,00 | 282 | 0,00 | 2 | 0,00 | 233 | 0,00 | | |
| | | | 1.Jumlah ibu hamil yang mengikuti Pengembangan Kelas ibu dalam Penerapan Penggunaan Buku KIA yang telah memutuskan bersalin di fasyankes | 3764 orang | | | | | 3.036.288.857,00 | | 0,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 2. Jumlah fasilitas kesehatan yang dikuatkan dalam Penyeliaan Fasilitatif kesehatan ibu dan bayi baru lahir | 7 puskesmas | | | | 3764 orang | | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| | | | 3.Jumlah petugas kesehatan yang terorientasi dalam MTBS | 40 orang | | | | 7 puskesmas | | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| | | | 4. Jumlah Kasus Kematian Ibu dan Bayi yg teridentifikasi penyebab kematian | 224 kasus | | | | 40 orang | | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| | | | 5. Jumlah peserta 8 pertemuan DAK | 2645 orang | | | | 224 kasus | | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif | Jumlah usia reproduksi yang mendapatkan penguatan kesehatan reproduksi masa sebelum hamil | 240 orang | 68.895.621,90 | | | 2645 orang | | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut | Jumlah Kader dan petugas kesehatan yang tersosialisasi dalam Pemberdayaan Lansia dalam Meningkatkan Status Kesehatan Lansia | 70 orang | 92.519.569,80 | | | 240 orang | 32.807.439,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | 2.810.569.137,60 | | | 70 orang | 44.056.938,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | | | 1. Jumlah balita gizi kurang yang mendapat makanan tambahan | 13.748 balita | | | | | 1.338.366.256,00 | | 0,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 2. Jumlah balita terkonformasi masalah gizi yang mendapatkan makanan tambahan lokal | 525 balita | | | | 13.748 balita | | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| | | | 3. Jumlah ibu hamil KEK yang mendapatkan makanan tambahan | 6.529 ibu hamil | | | | 525 balita | | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| | | | 4. Jumlah peserta 3 pertemuan DAK | 2658 orang | | | | 6.529 ibu hamil | | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | 5. Jumlah Peserta yang mengikuti Pencanangan bulan Penimbangan | 400 orang | | | | 2658 orang | | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| | | | 6. Jumlah puskesmas yang mendapatkan pendampingan pelaksanaan surveilans gizi melalui e-PPBGM | 64 puskesmas | | | | 400 orang | | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| | | | 8. Persentase Kab/Kota yang menjalankan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga | 1 | 674.533.043,10 | | | 64 puskesmas | | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | 243.571.043,10 | | | 1 | 321.206.211,00 | 141 | 0,00 | 1 | 0,00 | 116 | 0,00 | | |
| | | | 1. Jumlah siswa dan ASN yang dilakukan pengukuran kebugaran | 690 siswa | | | | | 115.986.211,00 | | 0,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 2. Jumlah peserta pertemuan lintas sektor dan koordinasi lintas program dan lintas sektor | 50 orang | | | | 690 siswa | | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| | | | 3. Jumlah perusahaan yang dilakukan penilaian gerakan pekerja perempuan sehat produktif (GP2SP) | 4 perusahaan | | | | 50 orang | | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | 430.962.000,00 | | | 4 perusahaan | | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| | | | 1. Jumah sampel makanan, sampel limbah dan sampel air yang diperiksa | 510 sampel | | | | | 205.220.000,00 | | 0,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 2. Jumlah peserta seminar kesehatan lingkungan | 300 orang | | | | 510 sampel | | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| | | | 9. Persentase kampanye germas dalam pembudayaan Germas di masyarakat | 1 | 32.983.095,60 | | | 300 orang | | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| | | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah peserta PETA SIDORA untuk SIANIL | 31 orang | 32.983.095,60 | | | 1 | 15.706.236,00 | 56 | 0,00 | 0 | 0,00 | 48 | 0,00 | | |
| | | | 10. Persentase layanan kesehatan di Puskesmas | 1 | 9.925.258.259,70 | | | 31 orang | 15.706.236,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | Jumlah kelompok asuhan mandiri taman obat keluarga (ASMAN TOGA) yang dibentuk dan dibina | 7 kelompok | 77.864.650,50 | | | 1 | 4.726.313.457,00 | 139 | 46,81 | 1 | 2.212.500.000,00 | 131 | 0,22 | | |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus | Jumlah puskesmas, unit transfusi darah rumah sakit (UTDRS) dan kab/kota yang melakukan kerjasama program pelayanan darah | 64 puskesmas | 113.400.075,60 | | | 7 kelompok | 37.078.405,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan | Jumlah puskesmas yang melakukan upaya perubahan indeks keluarga sehat (IKS) pada program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga (PIS-PK), puskesmas ramah anak | 64 puskesmas | 4.414.392.490,20 | | | 64 puskesmas | 54.000.036,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | | Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas | Jumlah puskesmas yang teregistrasi secara nasional | 64 puskesmas | 58.058.437,50 | | | 64 puskesmas | 2.102.091.662,00 | 0 | 77,40 | 0 | 1.627.000.000,00 | 0 | 0,37 | | |
| | | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | | | 5.183.893.850,10 | | | 64 puskesmas | 27.646.875,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | | | 1. Jumlah pasien yang dilayani di klinik kesehatan dan SPGDT | 1200 orang | | | | | 2.468.520.881,00 | | 23,72 | 0 | 585.500.000,00 | | 0,11 | | |
| | | | 2. Jumlah tenaga kesehatan pengelola klinik | 16 orang | | | | 1200 orang | | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| | | | 3. Jumlah tenaga kesehatan pengelola SPGDT | 12 orang | | | | 16 orang | | 100 | | 16 | 0,00 | 1 | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Pendampingan fasilitas pelayanan kesehatan | Jumlah peserta penguatan Dinas Kesehatan kab/kota sebagai Tim PPMI (pengawasan pemantauan mutu internal) | 24 orang | 77.648.755,80 | | | 12 orang | | 100 | | 12 | 0,00 | 1 | | | |
| | | | 11. Jumlah kesepakatan koordinasi dan sinkronisasi penerapan SPM Kab/kota | 7 dokumen | 239.892.275,70 | | | 24 orang | 36.975.598,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | | Koordinasi dan sinkronisasi penerapan SPM bidang kesehatan lintas kabupaten/kota | Jumlah dokumen kegiatan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan standar pelayanan minimal (SPM) kabupaten/kota | 1 dokumen | 239.892.275,70 | | | | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | | Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan SIK | 1 | 449.551.336,50 | | | 7 dokumen | 114.234.417,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | Jumlah laporan data dan informasi yang dihasilkan | 3 dokumen | 262.155.408,90 | | | 1 dokumen | 114.234.417,00 | 175 | 0,00 | 1 | 0,00 | 141 | 0,00 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Jumlah kabupaten/kota yang fasilitas pelayanan kesehatannya melaksanakan sistem informasi kesehatan (SIK) yang disyaratkan | 3 kabupaten/kota | 187.395.927,60 | | | 1 | 214.072.065,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | | Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | 1. Jumlah penerbitan rekomendasi perijinan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah provinsi | 10 dokumen | 619.500.852,60 | | | 3 dokumen | 124.835.909,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah rumah sakit yang dilakukan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut perizinan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan | 12 rumah sakit | 52.499.792,10 | | | 3 kabupaten/kota | 89.236.156,00 | 60 | 11,80 | 6 | 34.800.000,00 | 60 | 0,06 | | |
| | | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit | | | 567.001.060,50 | | | 10 dokumen | 295.000.406,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | | | 1. Jumlah peserta pertemuan penguatan peran BPRS dalam pengawasan RS | 44 orang | | | | 12 rumah sakit | 24.999.901,00 | | 12,89 | 0 | 34.800.000,00 | | 0,06 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | 2. Jumlah rumah sakit yang mengimplementasikan tata kelola rumah sakit sesuai standar akreditasi | 19 rumah sakit | | | | | 270.000.505,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| | | | 2. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Meningkat Status Mutunya | 0 | 674.895.452,70 | | | 44 orang | | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| | | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | Jumlah puskesmas yang melakukan simulasi survei akreditasi | 7 puskesmas | 674.895.452,70 | | | 19 rumah sakit | | 0 | 6,70 | 0 | 21.546.867,00 | 0 | 0,03 | | |
| | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Persentase tenaga Kesehatan yang mendapatkan peningkatan kompetensi | 1 | 2.589.964.368,60 | | | 0 | 321.378.787,00 | 0 | 6,70 | 0 | 21.546.867,00 | 0 | 0,03 | | |
| | | Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi | Persentase tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar | 1 | 298.946.144,70 | | | 7 puskesmas | 321.378.787,00 | 95 | 0,00 | 1 | 0,00 | 93 | 0,00 | | |
| | | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah SDMK di fasyankes baik di Puskesmas maupun Rumah Sakit yang terpenuhi SDMKnya | 22 fasyankes | 193.947.467,70 | | | 22 fasyankes | 92.355.937,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang mengikuti bimtek kebutuhan sumber daya manusia kesehatan | 30 orang | 104.998.677,00 | | | 30 orang | 49.999.370,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | | Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya | 350 orang | 2.291.018.223,90 | | | 258 0rang | 1.090.961.059,00 | 3 | 82,93 | 8 | 904.742.800,00 | 2 | 0,39 | | |
| | | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | 2.291.018.223,90 | | | | 1.090.961.059,00 | | 82,93 | 0 | 904.742.800,00 | | 0,39 | | |
| | | | 1. Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan tugas belajar | 8 orang | | | | 8 orang | | 100 | | 8 | 0,00 | 1 | | | |
| | | | 2. Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya melalui uji kompetensi | 250 orang | | | | 250 orang | | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan | Persentase sarana sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat | 1 | 548.807.647,50 | | | 1 | 261.336.975,00 | 86 | 0,00 | 1 | 0,00 | 83 | 0,00 | | |
| | | Kegiatan Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dan penyalur alat kesehatan yang dapat diawasi serta memenuhi syarat dan memiliki izin edar | 1 | 271.965.117,90 | | | 1 | 129.507.199,00 | 109 | 0,00 | 1 | 0,00 | 103 | 0,00 | | |
| | | Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan pengajuan PBF dan cabang PAK | Jumlah pedagang besar farmasi (PBF) cabang dan cabang penyalur alat kesehatan (PAK) yang dilakukan pengendalian dan pengawasan | 14 sarana | 155.257.617,90 | | | 14 sarana | 73.932.199,00 | 36 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | | Penyediaan dan pengelolaan data perizinan pengakuan PBF cabang dan cabang PAK berbasis elektronik | Jumalh perizinan pedagang besar farmasi (PBF) cabang dan cabang oenyalur alat kesehatan (PAK) berbasis elektronik | 14 sarana | 116.707.500,00 | | | 14 sarana | 55.575.000,00 | 86 | 0,00 | 12 | 0,00 | 1 | 0,00 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Kegiatan Penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) | Persentase usaha kecil obat tradisional yang dapat diawasi serta memenuhi syarat dan memiliki izin edar | 1 | 276.842.529,60 | | | | | | | | | | | | |
| | | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional | Jumalh usaha kecil menengah (UKM) yang dilakukan sosialisasi tentang usaha kecil obat tradisional (UKOT) | 100 UKM di 2 kab/kota | 225.392.918,10 | | | 1 | 131.829.776,00 | 0 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | | Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin UKOT Berbasis Elektronik | Jumlah data di kab/kota yang bergerak dibidang obat tradisional | 3 data | 51.449.611,50 | | | 100 UKM di 2 kab/kota | 107.329.961,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) | 1 | 2.283.034.114,20 | | | 1 | 1.087.159.102,00 | 17 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16 | 0,00 | | |
| | | Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah kebijakan baru yang mendukung gerakan masyarakat hidup sehat di Kabupaten/Kota | 7 kebijakan | 190.403.455,20 | | | 5 kebijakan | 90.668.312,00 | 40 | 0,00 | 2 | 0,00 | 29 | 0,00 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah peserta kampanye gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS) sehat bersama bunda germas | 300 orang | 190.403.455,20 | | | 300 orang | 90.668.312,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | | Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah pelaksanaan KIE PHBS di masyarakat | 10 tema | 1.699.622.479,80 | | | 6 tema | 809.344.038,00 | 350 | 0,00 | 21 | 0,00 | 210 | 0,00 | | |
| | | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | 1.699.622.479,80 | | | | 809.344.038,00 | | 0,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 1. Jumlah informasi kesehatan melalui media KIE | 4 media infokes | | | | 4 media infokes | | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| | | | 2. Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam penggerakan masyarakat di tatanan | 1000 orang | | | | 1000 orang | | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| | | | 3. Jumlah pelaksanaan edukasi adaptasi kebiasaaan baru | 3 tatanan | | | | 3 tatanan | | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| | | | 4. Jumlah peserta audiensi penguatan gerakan masyarakat pada LP/LS | 35 orang | | | | 35 orang | | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | 5. Jumlah pesertakoordinasi forum germas dalam penguatan inovasi germas | 40 orang | | | | 40 orang | | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| | | | 6. Pendampingan pembudayaan germas kab/kota | 40 orang | | | | 40 orang | | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| | | Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi | Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pembinaan posyandu aktif | 1 | 393.008.179,20 | | | 1 | 187.146.752,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | | Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM | | | 393.008.179,20 | | | | 187.146.752,00 | | 0,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 1. Jumlah partisipasi intensifikasi penemuan kasus tuberkulosis dengan LP/LS dalam percepatan eliminasi TB | 25 orang | | | | 25 orang | | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| | | | 2. Jumlah peserta asistensi pengintegrasian posyandu | 25 orang | | | | 25 orang | | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| | | | 3. Jumlah peserta peningkatan kapasitas kader posyandu | 25 orang | | | | 25 orang | | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | 4. Jumlah peserta rakor pengelola promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat | 25 orang | | | | 25 orang | | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | Rumah Sakit Jiwa Daerah | |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dok perencanaan Renstra/Renja PD | 8 | 589.960.120 | | | 6 | 59.847.550 | 0 | 0,00 | 6,00 | 59.847.550 | 75 | 10,14 | | |
| | | | Jumlah RKA/DPA yang tersusun | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dok evaluasi PD<br>Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (LAKIP,LKPJ,LPPD) | 20 | 2.110.000.000 | | | 15 | 74.569.375 | 0 | 0,00 | 15,00 | 74.569.375 | 300 | 3,53 | | |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang terima gaji dan tunjangan | 460 | 115.546.908.670 | | | 230 | 34.340.425.143 | 19,04 | 43,78 | 44 | 15.035.278.978 | 9,52 | 13,01 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan Bulanan/ Semesteran | 28 | 50.000.000 | | | 14 | 19.108.901 | 18,69 | 2,62 | 3 | 500.000 | 9,34 | 1,00 | | |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen instalasi listrik yang tersedia | 40 Jenis | 160.000.000 | | | 20 | 68.431.040 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | 0 | 0,00 | | |
| | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia | 60 Unit | 180.000.000 | | | 30 | 89.910.650 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | 0 | 0,00 | | |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Bahan Logistik kantor yang tersedia | 1200 Unit | 160.000.000 | | | 600 | 79.780.000 | 3,72 | 22,34 | 22 | 17.820.000 | 2 | 11,14 | | |
| | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah barang cetak | 3000 Eksamplar | 460.000.000 | | | 1.500 | 229.829.074 | 0,01 | 20,83 | 21 | 47.865.122 | 1 | 10,41 | | |
| | | | Jumlah penggandaan | 458000 Eksamplar | | | | 229.000 | | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia | 5.140 | 60.000.000 | | | 2.570 | 24.000.000 | 0,58 | 14,93 | 15 | 3.582.000 | 0 | 5,97 | | |
| | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Makanan dan minuman rapat yang tersedia | 5200 Fax | 110.000.000 | | | 2.600 | 15.000.000 | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | 0,00 | | |
| | | | Jumlah Makanan dan minuman tamu yang tersedia | 400 fax | | | | 200 | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah makanan dan minuman rapat | 5332 Fax | 820.000.000 | | | 2.666 | 410.903.000 | 0 | 8,99 | 8,99 | 36.924.541 | 0 | 4,50 | | |
| | | | Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang tersedia | 352 Kali | | | | 176 | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang tersedia | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pengadaan Meubelair | Jumlah Meubelair yang diadakan | 44 Jenis | 130.000.000 | | | 44 | 56.134.725 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Peralatan gedung kantor yang diadakan | 14 jenis | 150.000.000 | | | 14 | 285.555.194 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah materai yang dibeli | 3492 Lembar | 21.076.000,00 | | | 1.746 | 9.976.500 | 2 | 29,96 | 30 | 2.989.000,00 | 1 | 14,18 | | |
| | | | Jumlah surat yang dikirim | 125 Surat | | | | 48 | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, internet,tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan | 24 Bulan | 1.200.000.000,00 | | | 12 | 591.600.000 | 303 | 36,36 | 36 | 215.096.123,00 | 151 | 17,92 | | |
| | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah jasa peralatan dan perlenggkapan kantor | 24 Bulan | 60.000.000,00 | | | 12 | 29.080.000 | 39 | 4,67 | 5 | 1.357.000,00 | 19 | 2,26 | | |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah pengelola jasa kebersihan kantor | 2 Tahun | 5.740.600.000,00 | | | 1 | 2.645.300.000 | 102 | 39,25 | 39 | 1.038.363.776,00 | 1.963 | 18,09 | | |
| | | | Jumlah tenaga kontrak | 78 Orang | | | | 39 | | | | | | | | | |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | 36 Bulan | 460.000.000 | | | 18 | 194.580.000 | 64,6 | 11,6 | 12 | 22.626.055,00 | 32 | 4,92 | | |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki | 24 Unit | 180.000.000 | | | 12 | 80.500.000 | 173,0 | 20,8 | 21 | 16.715.403,00 | 87 | 9,29 | | |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung yang dipelihara | 2 Gedung | 300.000.000 | | | 1 | 149.855.000 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor yang dipelihara | 2 Unit | 360.000.000 | | | 1 | 104.390.000 | 182,4 | 7,3 | 7 | 7.617.000,00 | 365 | 2,12 | | |
| | | | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara | 6 Jenis | | | | 3 | | | | | | | | | |
| | | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | CRR ( cost recovery rate) parsial | 40 persen | 20.000.000.000 | | | 20 | 10.000.000.000 | 140 | 27,96 | 28 | 2.796.434.550,00 | 70 | 13,98 | | |
| | | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Uapaya Kesehatan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pengembangan Rumah Sakit | Jumlah gedung rawat inap yang dibangun | 1 gedung | 5.000.000.000 | | | 1 | 4.684.333.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | | | Jumlah gedung rawat jalan yang dibangun | 1 gedung | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | Jumlah bangunan rumah sakit yang direhabilitasi | 16 bangunan | 300.000.000 | | | 8 | 138.294.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | Jumlah alat kesehatan yang dibeli | 12 jenis | 2.500.000.000 | | | 6 | 1.025.260.690 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | Jumlah alat kesehatan yang terkalibrasi | 20 unit | 200.000.000 | | | 10 | 100.000.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) | Jumlah sprei, handuk dan pakaian habis pakai yang dibeli | 10 jenis | 300.000.000 | | | 5 | 144.858.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan | Jumlah alat kesehatan / Peralatan Laboratorium yang dibeli dan terpelihara | 20 jenis | 160.000.000 | | | 10 | 80.000.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | | Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara | 28 jenis | 150.000.000 | | | 12 | 84.367.500 | 817 | 98,02 | 98 | 82.698.000,00 | 350 | 55,13 | | |
| | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Limbah Rumah Sakit yang dikelola selama satu tahun | 2 tahun | 260.000.000 | 0 | 0,00 | 1 | 131.945.000,00 | 94,74 | 0,95 | 1 | 1.250.000 | 47 | 0,48 | | |
| | | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah sekolah mendapat penyuluhan | 120 sekolah | 300.000.000 | 0 | 0,00 | 60 | 142.105.000,00 | 0,21 | 0,21 | 0 | 300.000 | 0 | 0,10 | | |
| | | | jumlah terapi supportif pada keluarga pasien | 80 kali | | 0 | 0,00 | 40 | | | | | | | | | |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | Jumlah kunjungan ke keluarga pasien (home visite) | 40 kali | 1.250.000.000 | 0 | 0,00 | 20 | 293.698.020,00 | 3,72 | 2,23 | 27 | 249.836.974 | 68 | 19,99 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | Jumlah kunjungan ke keluarga pasien sebelum pasien pulang (discarge planning) | 40 kali | | 3 | 149.542.657,00 | 20 | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah pasien dengan bebas pasung | 30 pasien | | 22 | 93.744.317,00 | 15 | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah rehabilitan dan pendamping yang ikut serta | 80 orang | | 0 | 0,00 | 40 | | | | | | | | | |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA | Jumlah Pasien yang mendapat Pelayanan Rehabilitasi mental sosial dan NAPZA | 9600 orang | 400.000.000 | 0 | 0,00 | 4.800 | 186.978.448,00 | 0,01 | 0,48 | 0 | 900.000 | 0 | 0,23 | | |
| | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah dokumen clinical pathway | 2 dokumen | | 0 | 0,00 | 1 | | | | | | | | | |
| | | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | Jumlah dokumen panduan asuhan keperawatan | 2 dokumen | 824.000.000 | 0 | 0,00 | 1 | 396.358.000,00 | 72,41 | 1,45 | 1 | 5.740.000,00 | 72 | 0,70 | | |
| | | | Jumlah dokumen panduan praktik klinis | 2 dokumen | | 0 | 0,00 | 1 | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen SOP | 6 dokumen | | 0 | 0,00 | 3 | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen standar pelayanan minimum | 2 dokumen | | 0 | 0,00 | 1 | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | Jumlah dokumen Survei Kepuasan Masyarakat | 2 dokumen | | 0 | 0,00 | 1 | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah sertifikat akreditasi yang diperoleh | 1 sertifikat | | 0 | 0,00 | 1 | | | | | | | | | |
| | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah tenaga kesehatan yang dibutuhkan sesuai standar rumah sakit kelas A | 320 orang | 16.000.000.000 | 0 | 0,00 | 160 | 7.987.700.000 | 24 | 38,96 | 39 | 3.111.800.000,00 | 12 | 19,45 | | |
| | | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan yang dilaksanakan | 200 kali | 1.050.000.000 | 0 | 0,00 | 100 | 510.141.994 | 1,72 | 4,65 | 5 | 23.725.000,00 | 2 | 2,26 | | |
| | | | Jumlah perawat yang di assesment | 340 orang | | 0 | 0,00 | 170 | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah perawat yang mendapat pelatihan assesor keperawatan | 50 orang | | 0 | 0,00 | 25 | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | Jumlah perawat yang mendapat pelatihan BTCLS | 72 orang | | 0 | 0,00 | 36 | | | | | | | | | |
| | | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah laporan audit keperawatan | 2 laporan | 40.000.000 | 0 | 0,00 | 1 | 19.994.901 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi | Nilai SAKIP PD (Rumah Sakit Umum Propinsi) | | | | | | | | | | | | | RSUP | |
| | | Kegiatan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD | Jumlah Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi | 6 Dokumen | 41.246.607,00 | 3 dokumen | 15,135,000 | 6 dokumen | 41.246.607,00 | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | 0,00 | | |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan PD | Jumlah Dokumen Perencanaan Renstra/Renja PD | 3 Dokumen | 21.689.785,00 | 3 dokumen | 15,135,000 | 3 Dokumen | 21.689.785,00 | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | 0,00 | | |
| | | Evaluasi Kinerja PD | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja PD (LKPJ,LAKIP,LPPD) | 3 Dokumen | 19.556.822,00 | - | - | 3 Dokumen | 19.556.822,00 | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | 0,00 | | |
| | | Kegiatan Administrasi Keuangan PD | Jumlah Laporan Keuangan PD tepat waktu | 1 Laporan | 41.185.851.386,00 | 3 Laporan | 33,707,076,017 | 1 Laporan | 41.185.851.386,00 | 100 | 20,06% | 1 Laporan | 19.912.979.688,00 | 100 | 20,06% | | |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan | 351 orang | 41.185.851.386,00 | 3 Laporan | 33,707,076,017 | 351 orang | 41.185.851.386,00 | 100 | 20,06% | 1 Laporan | 19.912.979.688,00 | 100 | 20,06% | | |
| | | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah jenis jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah | 5 jasa | 5.769.950.000,00 | 0 | - | 5 jasa | 5.769.950.000,00 | 100 | 47,77% | 5 jasa | 2.756.384.715,00 | 100 | 47,77% | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik | Jumlah bulanan tagihan rekening listrik,air,telepon/fax,tv kabel,virtual meeting yang dibayarkan | 12 bulan | 2.075.350.000,00 | 0 | - | 12 bulan | 2.075.350.000,00 | 100 | 51,14% | 12 bulan | 1.061.334.715,00 | 100 | 51,14% | | |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1. Jumlah Pramubakti 2. Jumlah Tenaga Keamanan/satpam kantor 3. Jumlah tenaga sopir | 57 orang,26 orang,15 orang | 3.694.600.000,00 | 0 | - | 57 orang, 26 orang,15 orang | 3.694.600.000,00 | 100 | 45,87% | 57 orang,26 orang,15 orang | 1.695.050.000,00 | 100 | 45,87% | | |
| | | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Kegiatan Penyelengaaran sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi | Jumlah Sistem Informasi Keperawatan Terintegrasi | 1 Aplikasi Keperawatan | 49.500.000 | 0 | 0,00 | 1 Aplikasi Keperawatan | 49.500.000,00 | | | | | | | | |
| | | pengadaan Alat/Perangkat sistem Informasi Kesehatan dan jaringan Internet | Jumlah Aplikasi Asuhan Keperawatan Terintegrasi | 1 Aplikasi | 49.500.000 | 0 | 0,00 | 1 Aplikasi | 49.500.000,00 | | | | | | | | |
| | | Kegiatan Penerbitan Izin RS Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat daerah Provinsi | Jumlah Pelayanan Kesehatan RS | 4 Dokumen | 470.262.967 | 0 | 0,00 | 4 Dokumen | 470.262.967,00 | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Peningkatan mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | Jumlah dokumen SOP Keperawatan, Jumlah Dokumen Standar Asuhan Keperawatan, Jumlah Dokumen Evaluasi Standar Pelayanan Teknis Keperawatan, Jumlah Dokumen perencanaan perbaikan strategis(PPS) | 4 dokumen | 470.262.967 | 4 dokumen | 9,900,000 | 4 dokumen | 470.262.967 | | | | | | | | |
| | | Kegiatan Penyediaan fasilitas pelayanan,sarana,prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan,UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Pelayanan Sarpras dan Alkes untuk RS | Persentase pemenuhan kesehatan RS Terakreditasi Paripurna | 125.196.870.464 | 0 | 0 | | 125.196.870.464 | | | | | | | | |
| | | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah bangunan fasilitas kesehatan | 2 Gedung | 32.644.709.300 | 0 | 0 | 2 Gedung | 32.644.709.300 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | | Pengembangan RS | Jumlah kemitraan pelayanan RS | 2 kemitraan | 1.113.529.444 | 2 kemitraan | 3, 478,308 | 2 kemitraan | 1.113.529.444 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | | BOK Provinsi (Dak Non Fisik) | Jumlah dokumen SOP dalam perawatan pasien | 19/KH | - | 36/KH | 2.132.080.662 | 19/KH | - | 0,25 | 47,49% | 4 Dokumen | 4.725.000,00 | 1 Dokumen | 47,49% | | |
| | | Pengadaan makanan tambahan ibu hamil (DAK Fisik) | Jumlah sumber daya keperawatan yang terlatih | | - | | 468.033.042 | | - | 0,25 | 47,49% | 4 dokumen | 4.725.000,00 | 1 Dokumen | 47,49% | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Pengadaan Alat/Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan (DAK), Jumlah Alat Kesehatan (APBD) | 1 jenis | 80.607.363.150 | 1 paket | 65.555.924.110 | 1 jenis | 80.607.363.150 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | | pengadaan sarana di fasilitas Layanan Kesehatan | Jumlah sarana | 2 jenis | 2.200.000.000 | 0 | 0 | 2 jenis | 2.200.000.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | | Sub Kegiatan pengadaan Prasarana di fasilitas Layanan Kesehatan | Jumlah Prasarana Keperawatan | 1 jenis | 48.614.500 | | 0,00 | 1 jenis | 48.614.500 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | | pengadaan Prasarana di fasilitas Layanan Kesehatan | Jumlah Prasarana Keperawatan | 2 jenis | 48.614.501 | | 1,00 | 2 jenis | 48.614.501 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | | Penagadaan Barang Penunjnag Operasional RS | Jumlah Obat dan Perbekalan Kesehatan | 3 jenis | 6.974.187.690 | 3 paket | 9,903,754,658 | 3 jenis | 6.974.187.690 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | | Pemeliharaan Alat Kesehatan/Penunjang Medik | Persentase pemeliharaan alat kesehatan/penunjang medik | 1 | 694.988.000 | 0 | 0,00 | 1 | 694.988.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | | Pemeliharaan sarana Fasilitas Layanan Kesehatan | persentase pemeliharaan sarana RS | 1 | 300.900.000 | 0 | 0,00 | 1 | 300.900.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | | Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan | persentase pemeliharaan Prasarana RS | 1 | 453.582.380 | 80 | 6,144,431,746 | 1 | 453.582.380 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya dan Manusia Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Kegiatan Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi | Jumlah SDM Kesehatan RS | 213 orang | 14.342.980.010,00 | 85 | 11,695,989,000 | 213 orang | 14.342.980.010 | 100 | 39,81% | 213 orang | 5.709.470.380 | 100 | 39,81% | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Pemenuhan Kebutuhan SDM Kesehatan | Jumlah SDM Kesehatan UKM dan UKP Provinsi | 213 orang | 14.342.980.010,00 | 85 | 11,695,989,000 | 213 orang | 14.342.980.010 | 100 | 39,81% | 213 orang | 5.709.470.380 | 100 | 39,81% | | |
| | | Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi teknis sdm Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Mutu dan Kompetisi SDM Keperawatan | 3 dokumen | 29.264.944,00 | 80 | 1,350,600,000 | 3 dokumen | 29.264.944 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | | Pembinaan dan Pengawasan SDM Kesehatan | Jumlah Dokumen Pembinaan Etika Keperawatan, Jumlah dokumen Pelaksanaan Audit Keperawatan, Jumlah Dokumen Penilaiaan Perawat dan Bidan Teladan | 3 dokumen | 29.264.944,00 | 0 | 0,00 | 3 dokumen | 29.264.944 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | | URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Nilai Sakip PD | 79,00 | 65.664.856.476 | | | 78 | 32.631.937.870 | 0,00% | 0,00% | | - | 0,00% | 0,00% | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
| | | | Survey Kepuasan Layanan | 100,00 | | | | 100 | | | | | | 0,00% | #DIV/0! | | |
| | | Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi | 36,00 | 401.480.881 | | | 17 | 605.940.312 | 41,18% | 8,21% | 7 | 49.722.617 | 19,44% | 12,38% | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dok perencanaan (dokumen) | 20,00 | 1.537.500.000 | | | 9 | 420.755.980 | 22,22% | 7,08% | 2 | 29.804.617 | 10,00% | 1,94% | | |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dok Evalusi kinerja (dokumen) | 14,00 | 401.480.881 | | | 7 | 185.184.332 | 71,43% | 10,76% | 5 | 19.918.000 | 35,71% | 4,96% | | |
| | | Kegiatan Admintrasi Keuangan | Jumlah Laporan Keuangan PD tepat waktu | 28,00 | 49.777.715.047 | | | 14 | 24.281.812.218 | 42,86% | 34,34% | 6 | 8.337.646.651 | 21,43% | 16,75% | | |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | jumlah ASN yang terima gaji dan tunjangan (orang) | 340,00 | 49.731.631.625 | | | 170 | 24.259.332.500 | 50,00% | 34,35% | 85 | 8.333.377.651 | 25,00% | 16,76% | | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan dan Semesteran | Jumlah laporan keuangan bulanan Semesteran (laporan) | 28,00 | 46.083.422 | | | 14 | 22.479.718 | 42,86% | 18,99% | 6 | 4.269.000 | 21,43% | 9,26% | | |
| | | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 200,00 | 314.183.000 | | | 100 | 138.080.000 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | jumlah pegawai yang ikut pendidikan danpelatihan formal | 100,00 | 184.500.000 | | | 50 | 82.455.000 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | jumlah peserta bimbingan teknis peraturan perundang-undangan | 100,00 | 129.683.000 | | | 50 | 55.625.000 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah kegiatan administrasi umum PD (kegiatan) | 12,00 | 1.397.162.307 | | | 6 | 575.490.589 | 100,00% | 16,80% | 6 | 96.690.867 | 50,00% | 6,92% | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik (jenis) | 20,00 | 174.235.416 | | | 10 | 84.992.886 | 30,00% | 4,62% | 3 | 3.928.097 | 15,00% | 2,25% | | |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | jumlah bahan logistik kantor (unit) | 1346,00 | 47.867.500 | | | 673 | 23.350.000 | 0,00% | 23,93% | - | 5.587.000 | 0,00% | 11,67% | | |
| | | Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah penggandaan (lembar) | 137142,00 | 118.899.391 | | | 68571 | 57.999.703 | 27,52% | 27,52% | 18.871 | 15.961.900 | 13,76% | 13,42% | | |
| | | Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Eksemplar) | 10000,00 | 51.250.000 | | | 5000 | 25.000.000 | 26,00% | 38,82% | 1.300 | 9.705.000 | 13,00% | 18,94% | | |
| | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah makan dan minum rapat (pax) | 3000,00 | 126.075.000 | | | 1500 | 61.500.000 | 20,00% | 23,35% | 300 | 14.359.500 | 10,00% | 11,39% | | |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah konsultasi dan koordinasi luar daerah (kali) | | 878.835.000 | | | 0 | 322.648.000 | 0,00% | 14,61% | - | 47.149.370 | | 5,36% | | |
| | | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah jenis Barang Milik Daerah yang diadakan | 30,00 | 7.681.633.653 | | | 15 | 3.747.138.367 | 0,00% | 9,38% | - | 351.436.800 | 0,00% | 4,58% | | |
| | | Pengadaan Mebel | jumlah mebeleur (unit) | 20,00 | 70.838.066 | | | 10 | 34.555.154 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya (unit) | 20,00 | 1.407.506.622 | | | 0 | 686.588.596 | 0,00% | 2,40% | 1 | 16.500.000 | 5,00% | 1,17% | | |
| | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | jumlah (unit) | 4,00 | 5.017.077.617 | | | 2 | 2.447.354.935 | 0,00% | 13,69% | - | 334.936.800 | 0,00% | 6,68% | | |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | jumlah (unit) | 2,00 | 1.186.211.348 | | | 0 | 578.639.682 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 16,00 | 4.083.910.015 | | | 8 | 2.303.587.812 | 0,00% | 38,85% | - | 894.847.027 | 0,00% | 21,91% | | |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Materai (lembar) | 9600,00 | 275.905.015 | | | 4800 | 134.587.812 | 14,58% | 31,64% | 700 | 42.590.000 | 7,29% | 15,44% | | |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel,virtual meeting yang dibayarkan (bulan)) | 24,00 | 188.805.000 | | | 12 | 359.400.000 | 50,00% | 18,46% | 6 | 66.357.027 | 25,00% | 35,15% | | |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah tenaga kebersihan/pramubakti (orang) | 12,00 | 3.619.200.000 | | | 6 | 1.809.600.000 | 50,00% | 43,43% | 3 | 785.900.000 | 25,00% | 21,71% | | |
| | | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah jenis BMD yang dipelihara | 18,00 | 2.008.771.573 | | | 9 | 979.888.572 | 0,00% | 33,18% | - | 325.078.163 | 0,00% | 16,18% | | |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Dinas Operasional atau Lapangan | jumlah kendaraan operasional yang dipelihara (unit) | 20,00 | 774.674.500 | | | 10 | 377.890.000 | 0,00% | 13,59% | - | 51.350.163 | 0,00% | 6,63% | | |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | jumlah peralatan kerja yang diperbaiki (jenis) | 10,00 | 256.249.861 | | | 5 | 124.999.932 | 0,00% | 17,69% | - | 22.109.000 | 0,00% | 8,63% | | |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit) | 2,00 | 922.498.565 | | | 1 | 449.999.300 | 0,00% | 55,25% | - | 248.619.000 | 0,00% | 26,95% | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah perlengkapan gedung kantor yangdipelihara (paket) | 2,00 | 55.348.647 | | | 1 | 26.999.340 | 0,00% | 11,11% | - | 3.000.000 | 0,00% | 5,42% | | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | SURVEY KEPUASAN PELAYANAN UPTD | 100,00 | 1.590.913.570 | | | 100 | 776.055.400 | 0,00% | 29,56% | - | 229.379.281 | 0,00% | 14,42% | | |
| | | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD) | Jumlah kegiatan administrasi umum PD | 12,00 | 152.372.238 | | | 6 | 74.327.921 | 0,00% | 14,41% | - | 10.712.257 | 0,00% | 7,03% | | |
| | | Jumlah komponen instalasi listrik | Jumlah komponen instalasi listrik (jenis) | 8,00 | 7.681.217 | | | 4 | 3.746.935 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | jumlah bahan logistik kantor yang tersedia (unit) | 512,00 | 6.375.500 | | | 206 | 3.110.000 | 19,42% | 19,94% | 40 | 620.000 | 7,81% | 9,72% | | |
| | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah penggandaan (lembar) | 6000,00 | 6.252.471 | | | 3000 | 3.049.986 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eksamplar) | 800,00 | 4.100.000 | | | 400 | 2.000.000 | 0,00% | 40,00% | - | 800.000 | 0,00% | 19,51% | | |
| | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah makan dan minum rapat yang tersedia (pax) | 1000,00 | 35.875.000 | | | 500 | 17.500.000 | 30,00% | 19,77% | 150 | 3.459.750 | 15,00% | 9,64% | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah (kali) | | 92.088.050 | | | 0 | 44.921.000 | 0,00% | 12,98% | - | 5.832.507 | | 6,33% | | |
| | | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD) | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 20,00 | 1.032.830.016 | | | 10 | 503.819.520 | 0,00% | 41,46% | - | 208.882.394 | 0,00% | 20,22% | | |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | jumlah materai(lembar) | 594,00 | 71.175.016 | | | 297 | 34.719.520 | 25,59% | 2,19% | 76 | 760.000 | 12,79% | 1,07% | | |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel,virtual meeting yang dibayarkan (Bulan) | 24,00 | 188.805.000 | | | 12 | 92.100.000 | 50,00% | 40,20% | 6 | 37.022.394 | 25,00% | 19,61% | | |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah tenaga keamanan/satpam, kebersihan dan supir kantor yangdipekerjakan (ORANG) | 20,00 | 772.850.000 | | | 10 | 377.000.000 | 0,00% | 45,38% | - | 171.100.000 | 0,00% | 22,14% | | |
| | | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD) | Jumlah jenis BMD yang dipelihara | 10,00 | 405.711.316 | | | 5 | 197.907.959 | 0,00% | 4,94% | - | 9.784.630 | 0,00% | 2,41% | | |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan KendaraanDinas Operasional atau Lapangan | jumlah bahan bakar (liter) | 7760,00 | 251.965.500 | | | 3880 | 122.910.000 | 0,00% | 3,69% | - | 4.540.000 | 0,00% | 1,80% | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | jumlah peralatan kerja yang diperbaiki (jenis/unit) | 42,00 | 51.245.816 | | | 21 | 24.997.959 | 50,00% | 20,98% | 11 | 5.244.630 | 25,00% | 10,23% | | |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit) | 2,00 | 102.500.000 | | | 1 | 50.000.000 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Persentase peningkatan luas kawasan yangterlindungi dari daya rusak air (%) | 10,00 | 104.609.972.750 | | | 5,00 | 50.620.805.746 | 0,00% | 16,24% | 0 | 8.221.255.195 | 0,00% | 7,86% | | |
| | | | Persentase Penyediaan Air Baku | 2,40 | | | | 1,60 | | | | | | 0,00% | #DIV/0! | | |
| | | | Rasio Irigasi (%) | 1,00 | | | | 0,50 | | | | | | 0,00% | #DIV/0! | | |
| | | Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Persentase peningkatan luas kawasan yangterlindungi dari daya rusak air (%) | 10,00 | 55.524.475.500 | | | 5,00 | 26.742.894.420 | 0,00% | 12,18% | 0 | 3.256.638.350 | 0,00% | 5,87% | | |
| | | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Lainnya | Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen LingkunganHidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, danBangunan Penampung Air Lainnya (dokumen) | 8 | 937.321.500 | | | 4,00 | 513.898.674 | 0,00% | 0,00% | 0 | - | 0,00% | 0,00% | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai | Penyusunan Rencana Teknis dan DokumenLingkungan Hidup untuk Konstruksi PengendaliBanjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan danPengaman PantaiPenyusunan Rencana Teknis danDokumen Lingkungan Hidup untuk KonstruksiPengendali Banjir, Lahar, Drainase UtamaPerkotaan dan Pengaman Pantai (dokumen) | 8 | 1.588.196.500 | | | 5,00 | 862.506.934 | 0,00% | 0,00% | 0 | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Pola dan Rencana PengelolaanSDA WS Kewenangan Provinsi (dokumen) | 2 | 1.695.473.000 | | | 1,00 | 791.285.362 | 0,00% | 0,00% | 0 | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya | bangunan penampung air yang terbangun (M') | 700 | 7.853.749.875 | | | 350,00 | 3.799.265.788 | 0,00% | 0,00% | 0 | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Pembangunan Tanggul Sungai | Panjang tanggul sungai yang terbangun (m) | 2740 | 7.673.134.625 | | | 1370,00 | 3.639.385.434 | 0,00% | 0,00% | 0 | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Pembangunan Polder/Kolam Retensi | Luas bangunan polder/kolam retensi (Ha) | 6 | 25.626.394.000 | | | 3,00 | 12.414.899.736 | 2,00% | 19,46% | 0,06 | 2.415.856.400 | 1,00% | 9,43% | | |
| | | Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai | panjang pengaman pantai yang dibangun (Ha) | 350 | 1.874.274.000 | | | 175,00 | 903.609.527 | 0,00% | 0,00% | 0 | - | 0,00% | 0,00% | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Normalisasi/Restorasi Sungai | Panjang Sungai/Kali yang dilakukan pemeliharaan (km) | 280 | 7.978.682.000 | | | 140,00 | 3.693.563.856 | 0,00% | 22,76% | 0 | 840.781.950 | 0,00% | 10,54% | | |
| | | Pembinaan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi | lembaga yang dibina dan diberdayakan (lembaga) | 2 | 297.250.000 | | | 1,00 | 124.479.109 | 0,00% | 0,00% | 0 | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Rasio Irigasi | 1 | 49.085.497.250 | | | 0,50 | 23.877.911.326 | 0,00% | 20,79% | 0 | 4.964.616.845 | 0,00% | 10,11% | | |
| | | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen LingkunganHidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa (dokumen) | 8 | 5.137.991.875 | | | 4,00 | 2.455.011.669 | 0,00% | 0,24% | 0 | 5.800.000 | 0,00% | 0,11% | | |
| | | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | jaringan irigasi yang ditingkatkan (Ha) | 672 | 20.261.874.050 | | | 336,00 | 9.804.233.884 | 0,09% | 17,99% | 0,3 | 1.763.866.792 | 0,04% | 8,71% | | |
| | | Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa | jaringan irigasi rawa yang ditingkatkan (Ha) | 600 | 21.588.824.700 | | | 300,00 | 10.610.738.941 | 0,00% | 28,47% | 0 | 3.021.055.712 | 0,00% | 13,99% | | |
| | | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang jaringan irigasi permukaan yang di OP kan (Ha) | 800 | 937.311.250 | | | 400,00 | 474.562.366 | 0,00% | 28,06% | 0 | 133.141.591 | 0,00% | 14,20% | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa | Panjang jaringan irigasi rawa yang di OP kan (Ha) | 400 | 512.730.625 | | | 200,00 | 233.990.209 | 0,00% | 7,84% | 0 | 18.354.000 | 0,00% | 3,58% | | |
| | | Operasional Unit Pengelola Irigasi | Jumlah kelembagaan pengelola irigasi yang aktif (lembaga) | 2 | 646.764.750 | | | 1,00 | 299.374.257 | 0,00% | 7,48% | 0 | 22.398.750 | 0,00% | 3,46% | | |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisimantap (%) | 92 | 830.438.400.994 | | | 91,5 | 333.104.614.112 | 0,00% | 12,58% | 0 | 41.912.750.294 | 0,00% | 5,05% | | |
| | | Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi | Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap | 92 | 830.438.400.994 | | | 91,5 | 333.104.614.112 | 0,00% | 12,58% | 0 | 41.912.750.294 | 0,00% | 5,05% | | |
| | | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pembangunan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Panjang Jalan yang terencana (km) | 251 | 1.100.506.625 | | | 251 | 1.857.075.958 | 0,00% | 0,00% | 0 | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | kondisi jalan dan jembatan yang disurvey (km) | 850,99 | 2.625.818.350 | | | 854,498 | 1.191.922.220 | 0,00% | 0,00% | 0 | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan PHNJD yang terbangun (km) | 20 | 193.725.000.000 | | | 10 | 78.841.964.373 | 0,00% | 24,10% | 0 | 18.997.069.291 | 0,00% | 9,81% | | |
| | | Pelebaran Jalan Menuju Standar | Panjang Jalan yang dilebarkan (km) | 56 | 416.690.087.924 | | | 28 | 134.060.616.939 | 0,00% | 2,37% | 0 | 3.177.304.600 | 0,00% | 0,76% | | |
| | | Rehabilitasi Jalan | Panjang jalan yang direhabilitasi (km) | 10,94 | 98.400.000.000 | | | 5,47 | 38.824.738.022 | 0,00% | 2,56% | 0 | 992.914.266 | 0,00% | 1,01% | | |
| | | Pemeliharaan Berkala Jalan | Panjang jalan yang terpelihara berkala (km) | 29,76 | 41.910.795.320 | | | 14,88 | 42.156.095.948 | 0,00% | 22,88% | 0 | 9.647.411.458 | 0,00% | 23,02% | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Pemeliharaan Rutin Jalan | Panjang fungsional jalan yang terpelihara (km) | 752,65 | 52.272.930.525 | | | 752,65 | 24.834.080.546 | 50,00% | 32,20% | 376,325 | 7.996.247.927 | 50,00% | 15,30% | | |
| | | Penggantian Jembatan | Panjang jembatan yang diganti (km) | 56 | 16.749.033.000 | | | 28 | 8.062.075.348 | 0,00% | 0,00% | 0 | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Pemeliharaan Rutin Jembatan | Panjang jembatan yang terpelihara (km) | 3508,75 | 6.964.229.250 | | | 3508,75 | 3.276.044.758 | 50,00% | 33,63% | 1754,375 | 1.101.802.752 | 50,00% | 15,82% | | |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Rasio ketersediaan penyelenggaraan jasa konstruksi | 100 | 819.969.250 | | | 96,09 | 352.384.921 | 0,00% | 13,00% | 0 | 45.793.500 | 0,00% | 5,58% | | |
| | | Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi | Jumlah penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi | 2,0 | 592.726.750 | | | 1 | 265.284.935 | 0,00% | 14,09% | 0 | 37.389.000 | 0,00% | 6,31% | | |
| | | Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi | Jumlah tenaga ahli yang dilatih dan disertifikasi (ORANG) | 60 | 592.726.750 | | | 30 | 265.284.935 | 0,00% | 14,09% | 0 | 37.389.000 | 0,00% | 6,31% | | |
| | | Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi | Jumlah Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi | 2 | 227.242.500 | | | 1 | 87.099.986 | 0,00% | 9,65% | 0 | 8.404.500 | 0,00% | 3,70% | | |
| | | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi | Jumlah Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) CakupanDaerah Provinsi (layanan) | 4 | 227.242.500 | | | 2 | 87.099.986 | 0,00% | 9,65% | 0 | 8.404.500 | 0,00% | 3,70% | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Persentase kesesuaian pengembangan infrastruktur wilayah dengan rencana tata ruang (%) | 100 | 3.239.000.000 | | | 83 | 1.377.049.484 | 0,00% | 8,76% | 0 | 120.684.783 | 0,00% | 3,73% | | |
| | | Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang provinsi | Jumlah perencanaan tata ruang yang ditetapkan | 4 | 1.947.500.000 | | | 2 | 686.052.389 | 0,00% | 7,14% | 0 | 48.960.783 | 0,00% | 2,51% | | |
| | | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi | Jumlah rencana tata ruang wilayah yangditetapkan (RTRW) | 2 | 1.742.500.000 | | | 1 | 586.053.833 | 0,00% | 7,30% | 0 | 42.794.536 | 0,00% | 2,46% | | |
| | | Pelaksanaan PersetujuanSubstansi, Evaluasi danPenetapan RRTR Provinsi | Jumlah rencana rinci tata ruang yang ditetapkan (RRTR) | 2 | 102.500.000 | | | 1 | 49.998.845 | 0,00% | 12,33% | 0 | 6.166.247 | 0,00% | 6,02% | | |
| | | Sosialisasi Kebijakan danPeraturan Perundang-UndanganBidang Penataan Ruang | Jumlah Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan (Sosialisasi) | 2 | 102.500.000 | | | 1 | 49.999.711 | 0,00% | 0,00% | 0 | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi | Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi | 30 | 1.291.500.000 | | | 15 | 690.997.095 | 0,00% | 10,38% | 0 | 71.724.000 | 0,00% | 5,55% | | |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang | Jumlah pelanggaran pemanfaatan ruang dalamRTRW Provinsi (Pelanggaran) | 20 | 563.750.000 | | | 15 | 235.999.817 | 33,33% | 12,22% | 5 | 28.830.000 | 25,00% | 5,11% | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Koordinasi PelaksanaanPenataan Ruang | Jumlah rekomendasi kesesuaian rencana tata ruang (Rekomendasi) | 32 | 727.750.000 | | | 16 | 454.997.278 | 6,25% | 9,43% | 1 | 42.894.000 | 3,13% | 5,89% | | |
| | | URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Nilai SAKIP PD | | | | | 80 | 8.919.755.980 | 15,64 | 10,18 | | | 0,00 | 0,00 | Diinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |
| | | | Survey Kepuasan Pelayanan Internal | | | | | 70 | | | | | | | | | |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen) | | | | | 8 | 214.874.534 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dok) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 114.874.846 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja PD (LKPJ, LAKIP, LPPD, SPM)(Dok) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 99.999.688 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Survey Kepuasan Pelayanan Keuangan | | | | | 100 % | 7.012.268.293 | 25,00 | 18,90 | 25 | 2.632.813.611 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN Yang Menerima Gaji dan Tunjangan (Orang) | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 6.965.705.293 | 50,00 | 37,80 | 50 | 2.632.813.611 | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun (Laporan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 46.563.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Survey Kepuasan Pelayanan Internal | | | | | 100 | 99.043.311 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Mesin/Kartu Absensi (Unit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.303.311 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah ASN yang Ikut Pendidikan dan Pelatihan Formal (Orang) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 59.865.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah ASN yang ikut Bimtek Peraturan Perundang-undangan (Orang) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29.875.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Survey Kepuasaan Pelayanan Umum | | | | | 70 | 513.258.265 | 23,47 | 8,61 | 10 | 22.018.127 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Jenis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 31.345.194 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia (Jenis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 41.798.484 | 32,00 | 4,50 | 8 | 1.882.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Peralatan Rumah Tangga (Jenis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4.964.329 | 33,33 | 20,06 | 5 | 996.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Barangyang dicetak/digandakan (Eksemplar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 8.499.120 | 26,00 | 9,72 | 13 | 826.500 | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Jenis Bahan ATK Yang di beli (Jenis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 44.983.138 | 37,50 | 19,33 | 30 | 8.695.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Makan dan Minum Tamu (Pax)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15.000.000 | 26,67 | 4,20 | 8 | 630.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kali) | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 366.668.000 | 8,82 | 2,45 | 6 | 8.988.627 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan (Jenis) | | | | | 25 | 33.014.843 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Jenis Sarana/Prasarana Gedung Kantor yang diadakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 33.014.843 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Jasa Penunjang Urusan yang Tersedia (Jasa) | | | | | 8 | 806.595.000 | 42,00 | 29,71 | 67 | 351.156.071 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Jasa Surat Menyurat (Jasa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.995.000 | 42,00 | 11,04 | 67 | 1.544.500 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik (Jasa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 114.000.000 | 42,00 | 31,94 | 67 | 36.411.571 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor (Jasa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 678.600.000 | 42,00 | 46,15 | 67 | 313.200.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Yang Terpelihara (Unit) | | | | | 15 | 240.701.734 | 19,00 | 14,08 | 23,333333 | 29.625.900 | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Operasional atau Lapangan yang dipelihara (Unit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88.439.250 | 42,00 | 27,14 | 42 | 24.005.900 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara (Unit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 115.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara (Jenis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 37.262.484 | 15,00 | 15,08 | 3 | 5.620.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Program Pengembangan Perumahan | Persentase Rumah Akibat Bencana Yang Tertangani | | | | | 100 % | 420.630.998 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| | | Pendataan, Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | Jumlah Dokumen Pendataan Yang Tersusun (Dokumen) | | | | | 1 | 420.630.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi | Jumlah Laporan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi yang Tersusun (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 420.630.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) | Persentase Permukiman yang Terfasilitasi PSU | | | | | 50 % | 2.662.339.933 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman | Jumlah Permukiman yang Terfasilitasi PSU | | | | | 154 | 2.662.339.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman Untuk Menunjang Fungsi Permukiman | Panjang Jalan Lingkungan Yang di Bangun (Meter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 2.662.339.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak | | | | | 74,64 % | 1.285.284.498 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| | | Pengeloaan dan Pengembangan Sitem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Akses Air Minum (KK) | | | | | 144 | 1.285.284.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM | Tersedianya Dokumen Studi Kelayakan dan Rencana Teknis Terinci SPAM Lintas Kab/Kota (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 564.834.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan | Panjang Pipa Distribusi Air Minum (Meter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 720.450.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Persentase Rumah Tangga Yang Memeiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak | | | | | 92,50 % | 576.194.675 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional | Jumlah Tangga yang Terlayani Sistem Air Limbah Domestik (KK) | | | | | 140 | 576.194.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Seahat (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk | Jumlah Rumah Tangga Yang Terbangun Tangki Septik Manual (KK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 576.194.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Program Penataan Bangunan Gedung | Persentase Bangunan Gedung yang Tertata | | | | | 50 % | 14.615.697.266 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| | | Penetapan dan Penyelenggaraan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | Jumlah Bangunan Gedung yang terselenggara dan tertata (unit) | | | | | 2 | 14.615.697.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | Jumlah Bangunan Gedung Yang Terselenggara dan Tertata (Unit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.615.697.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Program Pentaan Bangunan dan Lingkungannya | Persentase Luas Kawasan Yang Tertata | | | | | 30 % | 1.489.803.252 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| | | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Luas Kawasan Strategis Provinsi yang Tertata (Lokasi) | | | | | 1 | 1.489.803.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Penataan Bangunan dan Lingkungan | Jumlah Kawasan Yang tertata (Lokasi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.489.803.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Jumlah RTH yang Terbangun dan Tertata (Lokasi) | | | | | 2 | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | URUSAN KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 80 | 33.367.076.213 | 79,17 | 191.918.500 | 79 | 105.569.174 | 100,43 | 2,39 | 79,17 | 194.445.400 | 98,96 | 0,58 | Satuan Polisi Pamong Praja | |
| | | | Survei kepuasan pelayanan internal | 95 | 27.181.970.000 | 90 | - | 90 | 14.431.721.945 | 100,00 | 41,91 | 90 | 6.048.511.042 | 94,74 | 22,25 | | |
| | | | | | 60.549.046.213 | | 191.918.500 | | 14.537.291.119 | | 41,62 | | 6.242.956.442 | | 10,31 | | |
| | | Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi | 31 | 33.367.076.213 | 19 | 191.918.500 | 7 | 105.569.174 | 57,14 | 2,39 | 23 | 194.445.400 | 74,19 | 0,58 | | |
| | | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Jumlah dokumen perencanaan Renstra/Renja PD | 11 | 384.124.508 | 7 | 79.473.800 | 2 | 49.669.274 | 50,00 | 3,11 | 8 | 81.017.200 | 72,73 | 21,09 | | |
| | | Evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD (Dalev, LKPJ, LAKIP, LPPD dan Data Sektoral) | 26 | 259.799.300 | 17 | 112.444.700 | 5 | 55.899.900 | 60,00 | 1,76 | 20 | 113.428.200 | 76,92 | 43,66 | | |
| | | Administrasi keuangan perangkat daerah | Survei kepuasan pelayanan keuangan | 92 | 24.013.124.000 | 0 | - | 80 | 13.061.421.206 | 200,00 | 43,37 | 160 | 5.664.893.446 | 173,91 | 23,59 | | |
| | | Penyediaan gaji dan tunjangan | Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan | 156 | 23.957.124.000 | 0 | - | 78 | 13.052.273.480 | 200,00 | 43,37 | 160 | 5.664.893.446 | 173,91 | 23,59 | | |
| | | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi | Jumlah dokumen verifikasi keuangan SKPD | 120 | 12.000.000 | 0 | - | 60 | 5.997.926 | 98,72 | 43,40 | 77 | 5.664.893.446 | 49,36 | 23,65 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan PD | 8 | 44.000.000 | 0 | - | 4 | 3.149.800 | 50,00 | 0,00 | 30 | - | 25,00 | 0,00 | | |
| | | Administrasi umum perangkat daerah | Survei kepuasan pelayanan umum | 90 | 1.293.496.000 | 0 | - | 90 | 498.667.089 | 100,00 | 25,24 | 90 | 125.884.250 | 100,00 | 9,73 | | |
| | | Penyediaan komponen unstalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia (jenis) | 20 | 20.000.000 | 0 | - | 10 | 9.999.986 | 60,00 | 20,03 | 6 | 2.002.600 | 30,00 | 10,01 | | |
| | | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia (unit) | 2896 | 38.880.000 | 0 | - | 1448 | 19.434.000 | 51,10 | 25,81 | 740 | 5.015.000 | 25,55 | 12,90 | | |
| | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetak dan dokumen (eksemplar) | 20 | 10.000.000 | 0 | - | 10 | 4.999.725 | 10,00 | 24,48 | 1 | 1.224.050 | 5,00 | 12,24 | | |
| | | | Jumlah cetak spanduk (meter) | 24 | 1.056.000 | 0 | - | 12 | 526.423 | 25,00 | 17,10 | 3 | 90.000 | 12,50 | 8,52 | | |
| | | | Jumlah cetak umbul-umbul (buah) | 60 | 2.640.000 | 0 | - | 30 | 1.316.057 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Jumlah penggandaan (lembar) | 72000 | 21.600.000 | 0 | - | 36000 | 10.805.550 | 42,82 | 33,29 | 15414 | 3.596.900 | 21,41 | 16,65 | | |
| | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia (eksemplar) | 7920 | 33.120.000 | 0 | - | 3960 | 16.560.000 | 60,45 | 30,21 | 2394 | 5.002.500 | 30,23 | 15,10 | | |
| | | Penyediaan bahan/material | Jumlah alat tulis kantor (jenis) | 40 | 210.400.000 | 0 | - | 20 | 90.395.160 | 360,00 | 48,17 | 72 | 43.543.600 | 180,00 | 20,70 | | |
| | | | Jumlah materai | 1200 | | 0 | | 600 | | 16,67 | 16,67 | 100 | | 8,33 | 20,83 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | (buah) | | 4.800.000 | | - | | 6.000.000 | | | | 1.000.000 | | | | |
| | | | Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih (jenis) | 20 | 18.000.000 | 0 | - | 10 | 9.003.188 | 220,00 | 46,32 | 22 | 4.170.600 | 110,00 | 23,17 | | |
| | | | | | 233.200.000 | | - | | 105.398.348 | | | | 48.714.200 | | | | |
| | | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah makan dan minuman tamu yang tersedia (pax) | 960 | 54.000.000 | 0 | - | 480 | 24.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilaksanakan (kali) | 400 | 420.000.000 | 0 | - | 100 | 152.551.000 | 47,00 | 33,28 | 47 | 50.774.000 | 11,75 | 12,09 | | |
| | | | Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan (kali) | 60 | 400.000.000 | 0 | - | 30 | 128.941.000 | 3,33 | 1,23 | 1 | 1.590.000 | 1,67 | 0,40 | | |
| | | | Jumlah makan dan minuman rapat (pax) | 960 | 59.000.000 | 0 | - | 480 | 24.135.000 | 51,04 | 32,63 | 245 | 7.875.000 | 25,52 | 13,35 | | |
| | | | | | 879.000.000 | | - | | 305.627.000 | | | | 60.239.000 | | | | |
| | | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah urusan penunjang pemda yang disediakan (jenis) | 14 | 1.219.350.000 | 0 | - | 7 | 502.898.650 | 128,57 | 42,65 | 9 | 214.499.160 | 64,29 | 17,59 | | |
| | | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah pengirim barang (barang) | 14 | 1.219.350.000 | 0 | - | 7 | 502.898.650 | 128,57 | 42,65 | 9 | 214.499.160 | 64,29 | 17,59 | | |
| | | | Jumlah pengirim surat (surat) | 24 | 7.950.000 | 0 | - | 12 | 3.699.500 | 0,00 | 3,49 | 0 | 129.000 | 0,00 | 1,62 | | |
| | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah tagihan telpon, listrik, kawat/fax/internet (bulan) | 180 | | 0 | | 56 | | 5,36 | | 3 | | 1,67 | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Jumlah tenaga kebersihan yang dipekerjakan (orang) | 62 | 198.600.000 | 0 | - | 36 | 46.799.150 | 33,33 | 11,90 | 12 | 5.570.160 | 19,35 | 2,80 | | |
| | | | Jumlah tenaga sopir yang dipekerjakan (orang) | 6 | 226.200.000 | 0 | - | 3 | 113.100.000 | 200,00 | 46,15 | 6 | 52.200.000 | 100,00 | 23,08 | | |
| | | | | 18 | 786.600.000 | 0 | - | 9 | 339.300.000 | 200,00 | 46,15 | 18 | 156.600.000 | 100,00 | 19,91 | | |
| | | | | | 1.012.800.000 | | - | | 452.400.000 | | | | 208.800.000 | | | | |
| | | Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah barang milik daerah yang dipelihara (unit) | 127 | 656.000.000 | 0 | - | 57 | 368.735.000 | 19,30 | 11,73 | 11 | 43.234.186 | 8,66 | 6,59 | | |
| | | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara (unit) | 42 | 520.000.000 | 0 | - | 21 | 317.735.100 | 28,57 | 12,65 | 6 | 40.184.186 | 14,29 | 7,73 | | |
| | | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah pemeliharaan AC (unit) | 20 | 12.440.000 | 0 | - | 9 | 5.490.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Jumlah pemeliharaan barang inventaris (pegawai) | 148 | 11.840.000 | 0 | - | 74 | 5.920.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Jumlah pemeliharaan komputer dan laptop (unit) | 30 | 20.850.000 | 0 | - | 13 | 8.340.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Jumlah pemeliharaan printer (unit) | 23 | 15.870.000 | 0 | - | 9 | 6.249.900 | 55,56 | 48,80 | 5 | 3.050.000 | 21,74 | 19,22 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit) | 1 | 75.000.000 | 0 | - | 1 | 25.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum | Jumlah persentase pelanggaran tibumtranmas yang ditindak | 100 | 16.509.123.500 | 100 | 5.029.087.936 | 100 | 6.989.802.197 | 100,00 | 40,70 | 100 | 7.874.184.983 | 100 | 48 | | |
| | | | Persentase penegakan pelanggar perda | 100 | 904.910.300 | 100 | 92.938.500 | 100 | 156.935.950 | 100,00 | 0,89 | 100 | 94.338.500 | 100 | 10 | | |
| | | | Persentase satlinmas yang terlatih dalam penyelenggaraan kantrantibmas dan membantu penanganan bencana dan kebakaran | 44,78 | 890.965.220 | 44,78 | 392.284.777 | 44,78 | 186.456.510 | 100,00 | 0,00 | 44,78 | 392.284.777 | 100 | 44 | | |
| | | | Persentase personil satpol pp yang berkompeten | 83,75 | 493.000.000 | 83,75 | - | 83,75 | 256.947.749 | 100 | 0 | 83,75 | - | 100 | - | | |
| | | Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi | Jumlah penyelenggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat | 3096 | 17893088720 | 19 | 5421372713 | 1548 | 7433206456 | 21,51162791 | 38,27550148 | 352 | 8266469760 | 11,369509 04 | 46,19923306 | | |
| | | Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan | Jumlah deteksi dini pelanggaran tibumtranmas (kali) | 48 | 5.618.216.500 | 18 | 5.029.087.936 | 12 | 6.792.467.197 | 75,00 | 41,25 | 27 | 7.831.078.136 | 56,3 | 139,4 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | pengawalan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah patroli (kali) | 5400 | | 3240 | | 1080 | | 8,33 | | 3330 | | 61,7 | | | |
| | | | Jumlah pengamanan aset/piket (kali) | 720 | | 0 | | 360 | | 50,28 | | 181 | | 25,1 | | | |
| | | | Jumlah pengawalan (kali) | 60 | | 0 | | 30 | | 176,67 | | 53 | | 88,3 | | | |
| | | | Jumlah peserta gelar pasukan (orang) | 1800 | | 600 | | 600 | | 0,00 | | 600 | | 33,3 | | | |
| | | Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan | Jumlah penertiban planggaran ketentraman dan ketertiban umum (kali) | 40 | 10.868.012.000 | 0 | 0 | 20 | 177.910.000 | 25,00 | 14,67 | 5 | 26.106.847 | 12,50 | 0,24 | | |
| | | | Jumlah pengamanan demo (kali) | 48 | | 0 | | 24 | | 8,33 | | 2 | | 4,17 | | | |
| | | Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka kententraman dan ketertiban umum | Jumlah peserta satlinmas dalam penyelenggaraan kantrantibmas (orang) | 270 | 890.965.220 | 170 | 392.284.777 | 50 | 186.456.510 | 0 | 0 | 170 | 392.284.777 | 62,96 | 44,03 | | |
| | | Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuasa HAM | Jumlah latihan fisik (kali) | 44 | 493.000.000 | 0 | 0 | 22 | 256.947.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | Jumlah pelatihan instruktur upacara (kali) | 88 | | 0 | | 44 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | Jumlah pembinaan pejabat fungsional satpol pp (kali) | 8 | | 0 | | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | Jumlah peserta pelatihan pelaksanaan tugas pol pp (orang) | 100 | | 0 | | 50 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | Jumlah peserta pembinaan mental dan spritual (orang) | 400 | | 0 | | 200 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | Jumlah peserta yang ditingkatkan kompetensinya (orang) | 20 | | 0 | | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | Jumlah rakor pembinaan jabatan fungsional satpol pp (kali) | 4 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum | Jumlah HT (unit) | 4 | 12.000.000 | 0 | 0 | 4 | 7.425.000 | 100,00 | 94,28 | 4 | 7.000.000 | 100,00 | 58,33 | | |
| | | | Jumlah spy cam (unit) | 2 | 10.895.000 | 0 | 0 | 2 | 12.000.000 | 100,00 | 83,33 | 2 | 10.000.000 | 100,00 | 91,79 | | |
| | | Penegakan peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur | Jumlah aktivitas penegakan perda dan perkada | 104 | 904910300 | 0 | 92.938.500 | 52 | 156.935.950 | 57,69 | 0,89 | 30 | 94.338.500 | 28,85 | 10,43 | | |
| | | Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan gubernur | Jumlah penindakan pelanggar perda secara non yustisial (masyarakat/badan hukum) 9orang/badan hukum) | 104 | 904.910.300 | 0 | 92.938.500 | 52 | 156.935.950 | 2100,00 | 1,80 | 252 | 1.400.000 | 1050,00 | 0,54 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | Jumlah razia ASN (kali) | 24 | 260.000.000 | 0 | - | 12 | 77.845.950 | 80,00 | | 16 | | 40,00 | | | |
| | | Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan gubernur | Jumlah penyelidikan pelanggar perda/perkada (kasus) | 40 | 644.910.300 | 0 | 92.938.500 | 20 | 79.090.000 | 40,00 | 0,00 | 29 | 92.938.500 | 58,00 | | | |
| | | | Jumlah penyidikan pelanggar perda/perkada (kasus) | 50 | | 25 | | 10 | | 33,33 | | 2 | | 16,67 | 14,41 | | |
| | | Program pencegahan, penanganan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran | Cakupan relawan pemadam kebakaran di kab/kota | 0,39 | 77.000.000 | 0 | - | 0,26 | 550.127.883 | 0,00 | 38,17 | 0 | 210.000.000 | 0,00 | 272,73 | | |
| | | Penyelenggaraan pemetaan rawan bencana kebakaran | Jumlah dokumen peta daerah rawan kebakaran | 1 | 77.000.000 | 0 | 0 | 0 | 550.127.883 | 0,00 | 38,17 | 0 | 210.000.000 | 0,00 | 272,73 | | |
| | | Pembinaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan provinsi dan kabupaten/kota | Jumlah relawan pemadam kebakaran yang mampu menanggulangani kebakaran | 200 | 77.000.000 | 0 | 0 | 100 | 550.127.883 | 0,00 | 38,17 | 0 | 210.000.000 | 0,00 | 272,73 | | |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Predikat (Nilai ) SAKIP Perangkat Daerah | | 163.403.044 | 0 | 0 | | 138.341.112 | | | | | | | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| | | | Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan (%) | 0,8 | 9.159.050.561 | 0 | 0 | | 8.897.847.795 | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensi terhadap perencanaan jangka Menengah Perangkat Daerah diatas | 12 Dokumen | 163.403.044 | 0 | 0 | 12 Dokumen | 138.341.112 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.435.000 | 0 | 0 | | |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Renstra / Renja PD | 8 Dokumen | 114.130.675 | | | 8 dokumen | 93.319.811 | 0,00 | 0,00 | 0 | 5.616.066.544 | 0 | 0 | | |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja PD (LKPJ,LAKIP,LPPD ) Dan Dok evaluasi PD | 4 Dokumen | 49.272.369 | 0 | 0 | 4 Dokumen | 45.021.301 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.435.000 | 0 | 0 | | |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan (%) | | 6.057.357.224 | | | | 5.919.980.642 | | 0,0 | | 4.567.884.942 | | | | |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN . | Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan | 45 orang | 5.996.015.074 | | | 43 Orang | 5.864.420.804 | | 77,8 | | 4.561.504.942 | | | | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan dan Bulanan / Semesteran | 7 Laporan | 61.342.150 | | | 7 Laporan | 55.559.838 | 14,3 | 11,5 | 1 | 6.380.000 | 14,29 | 0,77 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana dan prasarana perkantoran selama 12 bulan (%) | | 824.052.850 | 0 | 0 | | 756.049.858 | 0 | 0 | 1 | 148.359.358 | 0,00 | 18,00 | | |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Tersedia | 15 Jenis | 10.250.000 | 0 | 0 | 15 Jenis | 9.999.656 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Jenis ATK Yang Tersedia , Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Tersedia , Jumlah Perlengkapan Kantor Yang Tersedia | 70 Jenis, 5 Unit, 6 Jenis | 358.391.250 | 0 | 0 | 70 Jenis, 5 Unit, 6 Jenis | 349.648.511 | 6,17 | 6,12 | 5 | 21.389.723 | 6,17 | 5,97 | | |
| | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Peralatan Rumah Tangga - Perabot Kantor Yang Tersedia | 10 Jenis | 29.725.000 | 0 | 0 | 10 Jenis | 28.995.546 | 40,00 | 23,54 | 4 | 6.826.589 | 40,00 | 22,97 | | |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Tersedia | 10 Unit | 27.572.500 | 0 | 0 | 10 Unit | 26.891.320 | | 8,90 | 1 | 2.392.000 | 10,00 | 8,68 | | |
| | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Barang Cetak | 20 Eksemplar | 24.087.500 | | | 20 Eksemplar | 23.499.825 | 0,00 | 17,76 | 5 | 4.173.605 | 25,00 | 17,33 | | |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia | 2000 Eksemplar | 7.380.000 | | | 2000 Eksemplar | 7.200.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Makan dan Minum Rapat yang tersedia | 1 Tahun | 63.293.750 | 0 | 0 | 1 Tahun | 61.720.000 | | 4,79 | 0 | 2.958.000 | | 4,67 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | Jumlah Makan dan Minum Tamu yang tersedia | 2500 Kotak | | | | 2500 Kotak | | 4,00 | | 100 | - | 0,00 | | | |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD | Jumlah Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah Yang Di laksanakan | 32 kali | 303.352.850 | | | 32 kali | 248.095.000 | 50,00 | 44,59 | 16 | 110.619.441 | 50,00 | 36,47 | | |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 845.317.500 | 0 | 0 | | 824.694.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 463.485.640 | 0,00 | 54,83 | | |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Materai dan Jumlah Surat / Barang yang di kirim, Jumlah Pramubakti yang di perkerjakan | 2700 lembar, 7 orang | 250.817.500 | | 0 | 2700 lembar, 7 orang | 244.694.000 | | 60,05 | 0 | 146.940.000 | | 58,58 | | |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik | Tagihan Rekening Listrik, Air, Telepon/Fax, TV Kabel, Virtual Meeting yang di Bayarkan | 12 Bulan | 130.790.000 | | | 12 Bulan | 127.600.000 | 16,67 | 29,89 | 2 | 38.145.640 | 16,67 | 29,17 | | |
| | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tenaga Keamanan / Satpam Kantor | 7 Orang | 270.497.500 | | | 7 Orang | 263.900.000 | | 61,54 | 0 | 162.400.000 | | 60,04 | | |
| | | Penyediaan Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Tenaga Kebersihan Yang di perkerjakan | 5 orang | 193.212.500 | | | 5 orang | 188.500.000 | | 61,54 | 0 | 116.000.000 | | 60,04 | | |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 1.432.322.987 | | | | 1.397.123.295 | | 0 | 0 | 436.336.604 | 0,00 | 30,46 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kegiatan perorangan, dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara, jumlah pajak perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang di bayar | 3 unit, 3 unit | 49.784.250 | | | 3 unit, 3 unit | 48.564.150 | 33,33 | 40,34 | 2 | 19.590.000 | 33,33 | 39,35 | | |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan operasional atau lapangan yang di pelihara,jumlah pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan yang di bayar, jumlah tenaga sopir | 21 unit, 17 unit, 7 orang | 880.627.500 | | | 21 unit, 17 unit, 7 orang | 859.144.400 | 48,57 | 42,58 | 17 | 365.810.780 | 48,57 | 41,54 | | |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang di pelihara | 75 unit | 164.049.713 | | | 75 unit | 159.943.745 | 44,44 | 2,60 | 2,7 | 4.165.000 | 44,44 | 2,54 | | |
| | | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor yang di pelihara | 2 gedung | 337.861.525 | | | 2 gedung | 329.471.000 | 0 | 14,20 | 0 | 46.770.824 | 0,00 | 13,84 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Program Penanggulangan Bencana | Persentase Daerah rawan Bencana Yang Diintervensi Dalam Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana , Persentase Daerah Yang diintervensi Dalam Kedaruratan Penanggulangan Bencana , Persentase Daerah Bencana Yang Di Rehabilitasi Dan Rekonstruksi | 80%, 100%, 80% | 8055127042 | 0 | 0 | 78%, 100%, 80% | 10008108299 | | | | | | | | |
| | | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi | Jumlah Media Pelayanan Informasi Publikasi Rawan Bencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | 385143750 | 0 | 0 | 0 | 364527518 | | | | | | | | |
| | | Penyusunan Kajian Resiko Bencana | Jumlah Dokumen Penyusunan Kajian Kebencanaan di Daerah Rawan Bencana di 7 Kabupaten / Kota | 1 dokumen | 291612500 | | | 1 dokumen | 282188466 | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE ) Rawan Bencana Provinsi (Per jenis Bencana) | Jumlah Media Edukasi Yang Tersedia , Jumlah peserta Sosialisasi , Komunikasi , Informasi , dan Edukasi (KIE ) Rawan Bencana Provinsi (Per jenis Bencana ) Daerah Rawan Bencana di 7 Kabupaten /Kota | 3 Jenis, 100 orang | 93531250 | | | 3 Jenis, 100 orang | 82339052 | | | | | | | | |
| | | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah Kab / Kota Yang Mendapat Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 7 Kab/Kota | 6.626.156.262 | | | 7 Kab/Kota | 8.694.219.908 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.249.915.200 | | | | |
| | | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana | Jumlah Laporan Tersusunnya Rencana Penanggulangan Bencana | 1 laporan | 387.421.705 | | | 1 laporan | 366.087.710 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | | | | |
| | | Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana | Jumlah Peserta Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana | 100 orang | 197.338.125 | | | 100 orang | 178.433.727 | 35,00 | 26,60 | 35 | 47.460.000 | 35,00 | 26,60 | | |
| | | Pengendalian Operasi Dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 1 | 1.902.072.000 | | | 1 | 1.847.925.362 | 100,00 | 52,08 | 1 | 962.415.200 | 100,00 | 52,08 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Penyediaan Peralatan Perlindungan Dan Kesiapsiagaan Bencana | Jumlah Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana, Jumah Unit Pengembangan Sistem Peringatan Dini ( Early Wearning System ) | 4 item peraltan, 1 unit | 292.637.500 | | | 4 item peraltan, 1 unit | 274.497.120 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | | | | |
| | | Pengelolaan Risiko Bencana | Jumlah Kabupaten / Kota yang Terkelola Resiko Bencana | 7 Kab/Kota | 97.375.000 | | | 7 Kab/Kota | 73.869.215 | 14,29 | 2,22 | 1 | 1.640.000 | 0,00 | 2,22 | | |
| | | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | Jumlah Orang Dalam Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | 45 orang | 149.137.500 | 0 | 0 | 45 orang | 138.711.958 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Penanganan Pasca Bencana Provinsi | Jumlah Kabupaten / Kota yang Mendapat Penanganan Pasca Bencana | 7 Kab/Kota | 3.196.170.683 | 0 | 0 | 7 Kab/Kota | 3.092.880.403 | 14,29 | 0,14 | 1 | 4.250.000 | 0,00 | 0,14 | | |
| | | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat ( TRC ) Bencana | Jumlah Peserta Pengembangan Kapasitas Tim reaksi Cepat (TRC ) Bencana | 100 orang | 404.003.750 | | | 100 orang | 2.721.814.413 | 0,00 | 8,60 | 0 | 234.150.000 | | 8,60 | | |
| | | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Jumlah Kab / Kota Yang Mendapat Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi | 7 Kab/Kota | 1.043.821.030 | 0 | 0 | 7 Kab/Kota | 949.360.873 | 0,00 | 0,00 | 0 | 18.140.000 | 0,00 | 1,91 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana | Jumlah TRC dalam Pengerahan Pencarian , Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana | 37 orang | 463.119.805 | 0 | 0 | 37 orang | 393.555.180 | 0,00 | 3,26 | 0 | 17.340.000 | 0,00 | 4,41 | | |
| | | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Jumlah jenis Penyediaan Logistik dan Penyelamatan dan Evakuasi Bencana | 6 jenis | 580.701.225 | 0 | 0 | 6 jenis | 555.805.693 | 0,00 | 0,14 | 0 | 800.000 | 0,00 | 0,14 | | |
| | | URUSAN SOSIAL | | | | | | | | | | | | | | Dinas Sosial | |
| | | URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program penunjang urusan pemerintah daerah | persentase tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan sekretariat | 100 | 179.135.910 | 100 | 16.560.379 | 100 | 18.306.301 | 48,14 | 48,14 | 148,1 | 25.372.370 | 14,16 | 14,16 | Dinas Tenaga kKrja | |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 100 | 175.000 | 100 | 103.487 | | 135.134 | 2,80 | 2,80 | 102,8 | 107.271 | 61,30 | 61,30 | | |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan PD | 100 | 125.000 | 100 | 58.588 | 5 Dokumen | 90.621 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 58.588 | 46,87 | 46,87 | | |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi kinerja kinerja perangkat daerah | 100 | 50.000 | 100 | 44.899 | 3 Dokumen | 44.513 | 8,50 | 8,50 | 108,5 | 48.683 | 97,37 | 97,37 | | |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 100 | 75.000.000 | 100 | 13.540.702 | | 14.408.988 | 50,14 | 50,14 | 153,18 | 20.764.666 | 27,69 | 27,69 | | |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya gaji ASN | 100 | 75.000.000 | 100 | 13.540.702 | 103 Orang | 14.408.988 | 50,14 | 50,14 | 153,18 | 20.764.666 | 27,69 | 27,69 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 100 | 3.324.965 | 100 | 270.137 | | 458.872 | 18,94 | 18,94 | 124,63 | 357.054 | 10,74 | 10,74 | | |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan | 100 | 474.995 | 100 | 6.645 | 1 Paket | 22.593 | 33,10 | 33,10 | 133,78 | 14.124 | 2,97 | 2,97 | | |
| | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | 100 | 474.995 | 100 | 75.000 | 1 Tahun | 127.231 | 38,65 | 38,65 | 140,55 | 124.177 | 26,14 | 26,14 | | |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bahan logistik kantor | 100 | 474.995 | 100 | 6.000 | 1 Tahun | 20.087 | 41,97 | 41,97 | 155,07 | 14.430 | 3,04 | 3,04 | | |
| | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah brang cetakan dan pengandaan | 100 | 474.995 | 100 | 28.975 | 1 Paket | 36.729 | 36,63 | 36,63 | 138,41 | 42.430 | 8,93 | 8,93 | | |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan | 100 | 474.995 | 100 | 12.420 | 1 Paket | 13.200 | 39,20 | 39,20 | 138,78 | 17.595 | 3,70 | 3,70 | | |
| | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah fasilitasi kunjungan tamu | 100 | 474.995 | 100 | 1.000 | 1 Paket | 16.000 | 20,00 | 20,00 | 120 | 4.200 | 0,88 | 0,88 | | |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 100 | 474.995 | 100 | 140.097 | 1 Paket | 223.032 | 0,00 | 0,00 | 100 | 140.097 | 29,49 | 29,49 | | |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 100 | 10.570.000 | 100 | 2.546.455 | | 3.138.197 | 45,71 | 45,71 | 153,72 | 3.981.022 | 37,66 | 37,66 | | |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat/barang yang dikirm | 100 | 10.000 | 100 | 2.408 | 1 Tahun | 7.397 | 20,36 | 20,36 | 136,5 | 3.914 | 39,14 | 39,14 | | |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik | 100 | 560.000 | 100 | 134.147 | 1 Tahun | 718.000 | 44,49 | 44,49 | 147,35 | 453.608 | 81,00 | 81,00 | | |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | 100 | 10.000.000 | 100 | 2.409.900 | 1 Tahun | 2.412.800 | 46,15 | 46,15 | 155,77 | 3.523.500 | 35,24 | 35,24 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 100 | 497.990 | 100 | 99.598 | | 165.110 | 38,01 | 38,01 | 153,28 | 162.355 | 32,60 | 32,60 | | |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | jumlah kendaraan operasional yang dipelihara | 100 | 55.000 | 100 | 11.000 | 4 Unit Roda empat, 3 Unit Roda Dua | 4.000 | 58,40 | 58,40 | 125 | 13.336 | 24,25 | 24,25 | | |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara | 100 | 442.990 | 100 | 88.598 | 1 Tahun | 161.110 | 37,50 | 37,50 | 153,98 | 149.019 | 33,64 | 33,64 | | |
| | | Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja | Persentase perusahaan yang menjalankan norma K3 dan nora kerja | 100 | 7.949.120 | 100 | 1.788.696 | 100 | 1.124.400 | 0 | 0 | 100,21 | 1.791.090 | 22,53 | 22,53 | | |
| | | Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | | 100 | 3.774.560 | 100 | 1.788.696 | | 993.470 | 0 | 0 | 100,24 | 1.791.090 | 47,45 | 47,45 | | |
| | | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | Jumlah Pedidikan dan pelatihan bagi pencari kerjaberdasarkan klaster Kompetensi | 100 | 3.750.000 | 100 | 1.764.136 | 20 Paket | 871.596 | - | - | 100,00 | 1.764.136 | 47,04 | 47,04 | | |
| | | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | Jumlah Kerjasama dengan sektor swasta | 32 | 24.560 | 100 | 24.560 | 5 Kerja Sama | 121.874 | 2 | 2 | 101,96 | 26.954 | 109,75 | 109,75 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi | | 40 | 200.000 | 0 | - | | 130.930 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja | Tenaga Kerja yang Kompeten dan Produktif | 40 | 200.000 | 0 | - | 15 Perusahaan | 130.930 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Program penempatan tenaga kerja | Persentase tenaga kerja yang ditempatkan | 100 | 100.000 | 100 | 56.833 | 100 | 213.245 | 0 | 0 | 100 | 56833 | 56,833 | 56,833 | | |
| | | Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | 0 | - | | 119.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | | Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja | Angka Pencaker secara online | 0 | - | 0 | - | 30 Orang | 74.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja | Kompetensi Pencari Kerja | 0 | - | 0 | - | 70 Orang | 44.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | | | | 0 | - | | 32.631 | | | | | | | | |
| | | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | Angka Pencaker secara online | 0 | - | 0 | - | 2000 Orang | 32.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | | Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | 25 | 100.000 | 100 | 56.833 | | 61.248 | | | | | | | | |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) | RPTKA Perusahaan | 25 | 100.000 | 100 | 56.833 | 25 Perusahaan | 61.248 | 0 | 0 | 100 | 56833 | 56,833 | 56,833 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program hubungan industrial | Persentase perusahaan yang diperiksa dan diuji kesehatan lingkungan kerja | 100 | 745.000 | 100 | 425.569 | 100 | 805.720 | 7,84 | 7,84 | 100,01 | 488.753 | 65,60 | 65,60 | | |
| | | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota | | 30 | 200.000 | 100 | 1.580 | | 90.448 | 31,17 | 31,17 | 131,17 | 29.771 | 14,89 | 14,89 | | |
| | | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Jumlah Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 30 | 200.000 | 100 | 1.580 | 12 Perusahaan | 90.448 | 31,17 | 31,17 | 131,17 | 29.771 | 14,89 | 14,89 | | |
| | | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi | | 5 | 270.000 | 100 | 210.051 | | 188.607 | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi | Jumlah Jumlah rekomendasi terkait permasalahanketenagakerjaan di Provinsi Kepualauan BangkaBelitung | 5 | 270.000 | 100 | 210.051 | 8 Laporan | 188.607 | 12,80 | 12,80 | 112,80 | 234.194 | 86,74 | 86,74 | | |
| | | Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) | | 8 | 275.000 | 100 | 213.938 | | 526.665 | 2,06 | 2,06 | 102,06 | 224.788 | 81,74 | 81,74 | | |
| | | Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) | Penetapan Upah Minimum Provinsi | 8 | 275.000 | 100 | 213.938 | 1 Rekomendasi | 526.665 | 2,06 | 2,06 | 102,06 | 224.788 | 81,74 | 81,74 | | |
| | | Program pengawasan ketenagakerjaan | Persentase pencari kerja yang tersertifikasi | 100 | 150.000 | 100 | 578.885 | 100 | 414.155 | 0 | 0 | 100 | 578.885 | 385,92 | 385,92 | | |
| | | Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan | | 282 | 711.470 | 100 | 578.885 | | 414.155 | 0 | 0 | 100 | 578.885 | 81,36 | 81,36 | | |
| | | Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan | Persentase kepatuhan norma kerja di perusahaan | 250 | 444.000 | 100 | 558.838 | 0,19 | 137.464 | 0 | 0 | 100 | 558.838 | 125,86 | 125,86 | | |
| | | Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan | Persentase penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan yang inkrah di pengadilan | 2 | 117.470 | 100 | 4.162 | 0,8 | 186.459 | 0 | 0 | 100 | 4.162 | 3,54 | 3,54 | | |
| | | Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan | Perentase pelayanan keselamatan dan kesehatan | 30 | 150.000 | 100 | 15.885 | 0,85 | 90.232 | 0 | 0 | 100 | 15.885 | 10,59 | 10,59 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | kerja di UMKM | | | | | | | | | | | | | | |
| | | URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi | 1. Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah<br>2. Tingkat Kepuasan Aparatur Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan | 3 | 8.979.712 | 0 | 0 | 3 | 8.552.107 | 100,00 | 45,38 | 3 | 3.881.220 | 100,00 | 43,22 | DP3ACSKB | |
| | | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dok perencanaan dan evaluasi | 12 Dokumen | 99.487 | 0 | 0 | 12 Dokumen | 94.750 | 66,67 | 0,59 | 8 | 563 | 66,67 | 0,57 | | |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1. Jumlah dok perencanaan Renstra/Renja PD;<br>2. Jumlah dokumen kesepakatan Koordinasi dansinkronisasi perencanaan PD;<br>3. Jumlah RKA/DPA yang tersusun | 1. 2;<br>2. 1 ;<br>3. 2 | 54.148 | 0 | 0 | 1. 2 Dokumen;<br>2. 1 Dokumen;<br>3. 2 Dokumen | 51.570 | 60,00 | 0,00 | 1. 1;<br>2. 0;<br>3. 2 | - | 60,00 | 0,00 | | |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1. Jumlah dok evaluasi PD (DALEV);<br>2. Jumlah dok Evalusi kinerja PD (LKPJ, LAKIP, LPPDdan ATA) | 1. 4;<br>2. 3 | 45.339 | 0 | 0 | 1. 4 Dokumen;<br>2. 3 Dokumen | 43.180 | 71,43 | 1,30 | 1. 2;<br>2. 3 | 563 | 71,43 | 1,24 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Survey kepuasan pelayanan keuangan | 100\ | 7.763.847 | 0 | 0 | 13 Bulan | 7.394.140 | 53,85 | 46,77 | 7 | 3.458.016 | 53,85 | 44,54 | | |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1. Jumlah ASN yang terima gaji dan tunjangan;<br>2. Jumlah Pembayaran Honorarium | 13 | 7.763.847 | 0 | 0 | 13 Bulan | 7.394.140 | 53,85 | 46,77 | 7 | 3.458.016 | 53,85 | 44,54 | | |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | survey kepuasan pelayanan umum | 100 | 33.345 | 100 | 0 | 1 | 31.757 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan perundang-undangan | 3 | 33.345 | 0 | 0 | 3 orang | 31.757 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | survey kepuasan pelayanan umum | 100 | 270.713 | 0 | 0 | 1 | 257.822 | 50,00 | 24,87 | 50 | 64.118 | 50,00 | 23,68 | | |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia | 10 | 5.248 | 0 | 0 | 10 Jenis | 4.998 | 50,00 | 42,86 | 5 | 2.142 | 50,00 | 40,82 | | |
| | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Peralatan rumah tangga yang tersedia | 1 | 3.144 | 0 | 0 | 1 Paket | 2.994 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 1. Jumlah barang cetak;<br>2. Jumlah penggandaan | 1. 100r;<br>2. 30000 | 19.950 | 0 | 0 | 1. 100 Eksemplar;<br>2. 30000 Lembar | 19.000 | 50,00 | 48,41 | 50 | 9.198 | 50,00 | 46,10 | | |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan | 7 | 11.340 | 0 | 0 | 7 Eksemplar | 10.800 | 42,86 | 23,33 | 21,42857143 | 2.520 | 21,43 | 22,22 | | |
| | | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah jenis ATK yang dibeli | 79 | 82.115 | 0 | 0 | 79 Jenis | 78.205 | 37,97 | 41,78 | 18,98734177 | 32.671 | 24,03 | 39,79 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Fasiitasi Kunjungan Tamu | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 | 10.500 | 0 | 0 | 1 Tahun | 10.000 | 0,00 | 20,00 | 0 | 2.000 | 0,00 | 19,05 | | |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1. Jumlah koordinasi dan konsultasi kedalam daerah;<br>2. Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah;<br>3. Jumlah Makan-minum Rapat;<br>4. Jumlah Makan-minum Tamu | 1. 48;<br>2. 48;<br>3. 200;<br>4. 200 | 138.416 | 0 | 0 | 1. 48 Kali;<br>2. 48 Kali;<br>3. 200 Pax;<br>4. 200 Pax | 131.825 | 0,00 | 11,82 | 0 | 15.587 | 0,00 | 11,26 | | |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | survey kepuasan pelayanan umum | 100 | 25.830 | 0 | 0 | 100 | 24.600 | 50,00 | 80,08 | 25 | 19.700 | 25,00 | 76,27 | | |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1. Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yangdiadakan;<br>2. Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan | 1. 1<br>2. 1 | 25.830 | 0 | 0 | 1. 1 Jenis;<br>2. 1 Jenis | 24.600 | 100,00 | 80,08 | 50 | 19.700 | 0,00 | 76,27 | | |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | survey kepuasan pelayanan umum | 100 | 687.474 | 0 | 0 | 1 | 654.738 | 50,00 | 49,18 | 25 | 322.003 | 50,00 | 46,84 | | |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Surat/Barang yang dikirim | 180 | 2.097 | 0 | 0 | 180 Unit | 1.998 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel,virtual meeting yang dibayarkan | 24 | 163.800 | 0 | 0 | 12 Bulan | 156.000 | 50,00 | 35,67 | 25 | 55.653 | 50,00 | 33,98 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1 | 6.972 | 0 | 0 | 1 Kegiatan | 6.640 | 0,00 | 36,90 | 0 | 2.450 | 0,00 | 35,14 | | |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 24 | 514.605 | 0 | 0 | 12 Bulan | 490.100 | 50,00 | 53,85 | 25 | 263.900 | 50,00 | 51,28 | | |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | survey kepuasan pelayanan umum | 100 | 99.016 | 0 | 0 | 1 | 94.301 | 50,00 | 17,84 | 25 | 16.822 | 50,00 | 16,99 | | |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaandan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan | 24 | 10.500 | 0 | 0 | 12 Bulan | 10.000 | 50,00 | 6,95 | 25 | 695 | 50,00 | 6,62 | | |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan | 24 | 46.587 | 0 | 0 | 12 Bulan | 44.368 | 50,00 | 28,70 | 25 | 12.735 | 50,00 | 27,34 | | |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor danBangunan Lainnya | 24 | 20.992 | 0 | 0 | 12 Bulan | 19.992 | 50,00 | 0,00 | 25 | - | 50,00 | 0,00 | | |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 24 | 20.938 | 0 | 0 | 12 Bulan | 19.941 | 50,00 | 17,01 | 25 | 3.392 | 50,00 | 16,20 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | Persentase Perangkat Daerah yang responsif Gender | 84,37 | 293.407 | 0 | 0 | 0,8437 | 279.435 | 92,60 | 0,00 | 78,13 | 0 | 92,60 | 0,00 | | |
| | | Kegiatan Pelembagaan Pengarus Utamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi | Jumlah kabupaten kota yang dibina | 7 | 149.618 | 0 | 0 | 7 Kab/Kota | 142.493 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi | Jumlah peserta penguatan kapasitas pelaksanaanPUG dan PPRG | 150 | 34.943 | 0 | 0 | 75 Orang | 33.279 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi | Jumlah peserta Advokasi dan KIE PUG dan PKHP | 480 | 61.430 | 0 | 0 | 240 Orang | 58.505 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasauk PPRG Kewenangan Provinsi | Jumlah OPD peserta pengembangan materi danPelaksanaan KIE Kesetaraan dan Keadilan Genderbagi institusi Media Massa | 32 | 53.245 | 0 | 0 | 32 OPD | 50.709 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi | Jumlah kab/kota yang dibina | 7 | 77.516 | 0 | 0 | 7 Kab/Kota | 73.824 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi | 1. Jumlah peserta Pelatihan dan pembentukanfasilitator pendidikan politik untuk perempuan;<br>2. Jumlah peserta Pembinaan Industri Rumahan | 1. 150;<br>2. 180 | 77.516 | 0 | 0 | 1. 75 Orang;<br>2. 90 Orang | 73.824 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi | Jumlah kab/kota yang dibina | 7 | 66.273 | 0 | 0 | 7 Kab/Kota | 63.117 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi | Jumlah peserta | 90 | 66.273 | 0 | 0 | 45 Orang | 63.117 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Program Perlindungan Perempuan | Persentase peningkatan SDM Perlindungan Perempuan | 0,039 | 321.059 | 0 | 0 | 0.039% | 305.770 | #VALUE! | 1,21 | 0,039 | 3.690 | 100,00 | 1,15 | | |
| | | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak lingkup daerah Provinsi dan Lintas kabupaten/kota | jumlah laporan upaya pencegahan perlindungan perempuan dan para pihak yang terlibat dalam upaya perlindungan perempuan | 1 | 136.668 | 0 | 0 | 1 laporan | 130.160 | 0 | 2,83 | 0 | 3.690 | 0,00 | 2,70 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan Provinsi | 1. Jumlah kebijkan;<br>2. jumlah peserta sosialisasi pencegahan pelecehansseksual bagi perempuan | 1. 1;<br>2. 100 | 136.668 | 0 | 0 | 1. 1 Kebijakan;<br>2. 100 Orang | 130.160 | 0 | 2,83 | 0 | 3.690 | 0,00 | 2,70 | | |
| | | Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Perempuan Korban Kekerasan yang ditangani | 100 | 41.349 | 0 | 0 | 1 | 39.380 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen layanan pengaduuan masyarakatyang ditangani | 1 | 41.349 | 0 | 0 | 1 Dokumen | 39.380 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi | Persentase Layanan Perempuan Korban Kekerasan yang ditangani | 100 | 143.042 | 0 | 0 | 1 | 136.231 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi | Jumlah dokumen layanan pengaduan masyarakatyang ditangani | 2 | 143.042 | 0 | 0 | 1 Kegiatan | 136.231 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak | | 84,37 | 73.425 | 0 | 0 | 0,8437 | 69.928 | 92,60 | 0,00 | 78,13 | 0 | 92,60 | 0,00 | | |
| | | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam kelembagaan Data ditingkat Provinsi | Jumlah profil dan data gender dan anak yang tersedia | 1 | 73.425 | 0 | 0 | 1 dokumen | 69.928 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi | Jumlah dokumen profil dan data gender dan anakyang tersedia | 1 | 73.425 | 0 | 0 | 1 Profil | 69.928 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Program Peningkatan Kualitas Tenaga kerja | Persentase IR yang di bina | 0,71 | 452.929 | 0 | 0 | 0,0071 | 431.361 | 95,77 | 0,29 | 0,68 | 1230 | 95,77 | 0,27 | | |
| | | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi | Jumlah Kab/Kota yang di bina | 7 | 339.411 | 0 | 0 | 7 Kab/Kota | 323.248 | 0,00 | 0,38 | 0 | 1230 | 0,00 | 0,36 | | |
| | | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota | Jumlah peserta sekolah perempuan | 400 | 78.436 | 0 | 0 | 200 Orang | 74.701 | 0,00 | 1,10 | 0 | 820 | 0,00 | 1,05 | | |
| | | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi | Jumlah peserta kegiatan Peningkatan Nilai-nilaiKejuangan Perempuan Indonesia | 700 | 260.975 | 0 | 0 | 500 Orang | 248.548 | 0,00 | 0,16 | 0 | 410 | 0,00 | 0,16 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi | Jumlah Kab/Kota yang di bina | 7 | 113.518 | 0 | 0 | 7 Kab/Kota | 108.112 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi | Jumlah peserta pembinaan organisasi perempuan | 80 | 73.972 | 0 | 0 | 40 Orang | 70.449 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi | Jumlah Penguatan dan Pengembangan LembagaPenyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluargadalam Mewujudkan KG dan Hak Anak KewenanganProvinsi | 80 | 39.546 | 0 | 0 | 40 Orang | 37.663 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Program Pemenuhan Hak Anak | Persentase peningkatan SDM dalam Pemenuhan Partisipasi ANAK | 0,183 | 758.148 | 0 | 0 | 0,00183 | 722.046 | 100,00 | 1,96 | 0,183 | 14.154 | 100,00 | 1,87 | | |
| | | Kegiatan Pelembagaan PHA pada lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi | Jumlah kab/kota yang dibina | 7 | 119.164 | 0 | 0 | 7 kab/kota | 113.490 | 0,00 | 12,47 | 0 | 14.154 | 0,00 | 11,88 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi | Jumlah peserta advokasi dan Komunikasi InformasiEdukasi dan media publikasi | 320 | 119.164 | 0 | 0 | 160 Orang | 113.490 | 0,00 | 12,47 | 0 | 14.154 | 0,00 | 11,88 | | |
| | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi | Jumlah kab/kota yang dibina | 7 | 638.984 | 0 | 0 | 7 kab/kota | 608.556 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi | Jumlah Peserta FA tingkat provinsi dan tingkatnasional dan peserta HAN | 1800 | 638.984 | 0 | 0 | 977 Orang | 608.556 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Program Perlindungan Khusus Anak | Persentase SDM Perlindungan Anak | 0,002 | 560.528 | 0 | 0 | 0,002 | 533.836 | 100 | 0 | 0,2 | 0 | 100 | 0 | | |
| | | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan | 1 | 176.898 | 0 | 0 | 1 laporan | 168.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan pelaksanaan kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap anak kewenangan Provinsi | jumlah peserta TOT bagi aktivis PATBM kab/kota | 150 | 176.898 | 0 | 0 | 100 Orang | 168.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi | Persentase Layanan Anak yang memerlkan Perlindungan Khusus | 100 | 240.588 | 0 | 0 | 1 | 229.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi | Jumlah dokumen layanan anak yang memerlukanperlindungan khusus kewenangan provinsi | 1 | 114.192 | 0 | 0 | 1 Dokumen | 108.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi | Jumlah Kelembagaan KPAD yang difasilitasi | 1 | 126.396 | 0 | 0 | 1 Lembaga | 120.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Anak yang memerlkan Perlindungan Khusus | 100 | 143.042 | 0 | 0 | 1 | 136.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi | Jumlah dokumen peningkatan SDM PenyediaLayanan Anak yang memerlukan perlindungankhusus kewenangan provinsi | 1 | 143.042 | 0 | 0 | 1 Dokumen | 136.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | URUSAN PANGAN | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan | Persentase meningkatnya ketersediaan pangan utama (beras) | 18 | 571.950.000 | | | 15 | 240.700.000 | | | | | | | Dinas Pertanian dan Pangan | |
| | | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan daerah Provinsi | Jumlah Ketersediaan Pangan Utama | 1 | 571.950.000 | | | 1 | 213.431.068 | | | | | | | | |
| | | URUSAN PERTANAHAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum | Persentase Pendataan awal Pengadaan Lahan (%) | 100 | 61.500.000 | | | 55,56 | 16.985.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
| | | Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi | Luas Lokasi Pengadaan tanah | 10 | 61.500.000 | | | 5 | 16.985.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Pemberitahuan, Pendataan AwalLokasi, Konsultasi PublikRencana Pembangunan danPenetapan Lokasi PengadaanTanah untuk KepentinganUmum | Survey Pengumpulan data awal untuk PengadaanLahan kewenangan Provinsi (dokumen) | 2 | 61.500.000 | | | 1 | 16.985.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Program PenyelesaianSengketa Tanah Garapan | Persentase Berkurang Sengketa Tanah Garapanuntuk kepentingan umum | 28,58 | 61.500.000 | | | 14,29 | 37.670.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang terselesaikan | 4 | 61.500.000 | | | 2 | 37.670.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Inventarisasi Sengketa, Konflik,dan Perkara Pertanahan dalam 1(satu) Daerah Provinsi | Jumlah Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Sengketa) | 4 | 41.000.000 | | | 2 | 7.685.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Mediasi Penyelesaian SengketaTanah Garapan dalam 1 (satu)Daerah Provinsi | Jumlah penyelesaian sengketa tanah kewenangan provinsi (Sengketa) | 4 | 61.500.000 | | | 2 | 29.984.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan | Persentase Berkurang Penyelesaian ganti Kerugiandan Santunan Tanah | 28,58 | | | | 14,29 | | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | | |
| | | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | 2 | 348.500.000 | | | 0,01 | 156.594.416 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Koordinasi dan SinkronisasiPenyelesaian Masalah GantiKerugian dan Santunan Tanahuntuk Pembangunan olehPemerintah Daerah Provinsi | Jumlah titik lokasi Penyelesaian Masalah GantiKerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunanoleh Pemerintah Daerah Provinsi (lokasi) | 2 | 102.500.000 | | | 1 | 49.999.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Penyelesaian Santunan Tanahuntuk Pembangunan olehPemerintah Daerah Provinsi | Jumlah luas tanah yang diberikan santunan untukpembangunan oleh pemerintah daerah provinsi (hektar) | 2 | 246.000.000 | | | 0,5 | 106.594.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee | Persentase Terlaksananya Inventarisasi tanah (%) | 100 | 102.500.000 | | | 50 | 33.247.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Luas redistribusi tanah yang di inventarisir (Hektar) | 50 | 102.500.000 | | | 50 | 33.247.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Inventarisasi Subjek dan ObjekRedistribusi Tanah | Luas redistribusi tanah yang di inventarisir (Hektar) | 1 | 102.500.000 | | | 0,5 | 33.247.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Program Pentagunaan Tanah | Persentase Penggunaan tanah yang terencana (%) | 100 | 574.000.000 | | | 100 | 255.533.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Perencanaan Penggunaan Tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah Provinsi | Mereview Masterplan Komplek Perkantoran Terpadu Air Itam | 2 | 574.000.000 | | | 1 | 255.533.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Koordinasi dan SinkronisasiPerencanaan Penggunaan Tanah | Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasiperencanaan dan penggunaan tanah (dokumen) | 2 | 574.000.000 | | | 1 | 255.533.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | URUSAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Pendaftaran Penduduk | Persentase masyarakat yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk (KK, KTP, KIA) | 78,33% | 554.337 | 0 | 0 | 78,33% | 527.940 | 0,00 | 4,11 | 0 | 21.704 | 0,00 | 3,92 | DP3ACSKB | |
| | | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Jumlah kabupaten/kota yang mencapai target dokumen pendaftaran penduduk (KTP, KK, KIA) | 2 | 204.349 | 0 | 0 | 2 Kab/Kota | 194.618 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi | Jumlah peserta Kegiatan Penataan Tata KelolaPelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi | 240 | 78.352 | 0 | 0 | 120 Orang | 74.620 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan | Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan | 1 | 125.997 | 0 | 0 | 1 Kegiatan | 119.997 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | Jumlah kabupaten/kota yang mencapai target dokumen pendaftaran penduduk (KTP, KK, KIA) | 2 | 120.067 | 0 | 0 | 2 Kab/Kota | 114.350 | 0,00 | 4,68 | 0 | 5.355 | 0,00 | 4,46 | | |
| | | Fasilitasi terkait Pendaftaran Penduduk | Fasilitasi terkait Pendaftaran Penduduk | 1 | 120.067 | 0 | 0 | 1 Kegiatan | 114.350 | 0,00 | 4,68 | 0 | 5.355 | 0,00 | 4,46 | | |
| | | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | Jumlah kabupaten/kota yang mencapai target dokumen pendaftaran penduduk (KTP, KK, KIA) | 2 | 229.921 | 0 | 0 | 2 Kab/Kota | 218.972 | 0,00 | 7,47 | 0 | 16.349 | 0,00 | 7,11 | | |
| | | Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk | Pembinaan dan Pengawasan terkait PendaftaranPenduduk | 1 | 106.584 | 0 | 0 | 1 kegiatan | 101.509 | 100,00 | 16,11 | 1 | 16.349 | 100,00 | 15,34 | | |
| | | Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk | Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk | 1 | 123.336 | 0 | 0 | 1 kegiatan | 117.463 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Program Pencatatan Sipil | Persentase masyarakat yang memiliki akta pencatatan sipil (Akta Lahir, Akta Mati, Akta Perkawinan) | 98,33% | 881.702 | 0 | 0 | 98,33% | 839.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Pelayanan Pencatatan Sipil | Jumlah kabupaten/kota yang mencapai target akta pencatatan sipil (akta lahit, akta kematian, akta perkawinan | 7 | 94.500 | 0 | 0 | 7 Kab/Kota | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Laporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil | Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan,Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian danPenyusunan Laporan Adminduk terkait PencatatanSipil | 1 | 94.500 | 0 | 0 | 1 Kegiatan | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi | Jumlah kabupaten/kota yang mencapai target akta pencatatan sipil (akta lahit, akta kematian, akta perkawinan | 7 | 578.984 | 0 | 0 | 7 Kab/Kota | 551.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil | 1. Jumlah penerima bantuan ADM (Kab. BangkaTengah dan Kab. Bangka Selatan);<br>2. Jumlah peserta Kegiatan Penataan Tata KelolaPelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi | 1. 2;<br>2. 60 | 473.984 | 0 | 0 | 1. 2 Kab/Kota;<br>2. 60 Orang | 451.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil | Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil | 1 | 105.000 | 0 | 0 | 1 Kegiatan | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | Jumlah kabupaten/kota yang mencapai target akta pencatatan sipil (akta lahit, akta kematian, akta perkawinan | 7 | 208.218 | 0 | 0 | 7 Kab/Kota | 198.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil | Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil | 1 | 85.648 | 0 | 0 | 1 Kegiatan | 81.570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil | Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil | 1 | 122.570 | 0 | 0 | 1 Kegiatan | 116.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Persentase perangkat daerah dan lembaga lain yang mengadakan pejanjian kerjasama | 37,84 | 468.092 | 25 | 0 | 0,3784 | 445.802 | 66,1 | 0,0 | 25 | - | 66,07 | 0,00 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah kab/kota yang dibina | 2 | 122.773 | 0 | 0 | 2 Kab/Kota | 116.927 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Laporan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan,Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian danPenyusunan Laporan Adminduk terkait PengelolaanInformasi Administrasi Kependudukan | 1 | 88.146 | 0 | 0 | 1 Kegiatan | 83.949 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota | Jumlah peserta Kegiatan Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan | 110 | 34.627 | 0 | 0 | 56 Orang | 32.978 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi | Jumlah kab/kota yang difasilitasi penyelenggaraan adminduk | 7 | 137.586 | 0 | 0 | 7 kab/kota | 131.034 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | 1. Jumlah media publikasi;<br>2. Jumlah peserta | 1. 3;<br>2. 50 | 46.614 | 0 | 0 | 1. 3 Media;<br>2. 50 Orang | 44.394 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | 1 | 90.972 | 0 | 0 | 1 Kegiatan | 86.640 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi | Jumlah kab/kota yang difasilitasi penyelenggaraan adminduk | 7 | 207.734 | 0 | 0 | 7 kab/kota | 197.842 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan | Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan InformasiAdministrasi Kependudukan dan PendayagunaanData Kependudukan | 1 | 207.734 | 0 | 0 | 1 Kegiatan | 197.842 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Program Pengelolaan Profil Kependudukan | Persentase penyediaan penyajian database kependudukan tingkat provinsi yang akurat | 1 | 66.392 | 0 | 0 | 1 | 63.230 | 0,0 | 28,7 | 0 | 18.122 | 0,00 | 27,30 | | |
| | | Penyediaan Profil Kependudukan | Jumlah jenis profil | 2 | 66.392 | 0 | 0 | 2 Profil | 63.230 | 0,0 | 28,7 | 0 | 18.122 | 0,00 | 27,30 | | |
| | | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain | Jumlah Buku profil | 100 | 66.392 | 0 | 0 | 100 Buku | 63.230 | 0,0 | 28,7 | 0 | 18.122 | 0,00 | 27,30 | | |
| | | URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Program Pengendalian Penduduk | persentase kab/kota yang memiliki Dokumen pengendalian penduduk | 71,42 | 45.829 | 0 | 0 | 0,7142 | 43.646 | 80,01 | 20,17 | 57,14 | 8.802 | 80,01 | 19,21 | DP3ACSKB | |
| | | Kegiata Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi | jumlah laporan pengendalian penduduk | 1 | 45.829 | 0 | 0 | 1 dokumen | 43.646 | 0,00 | 20,17 | 0 | 8.802 | 0,00 | 19,21 | | |
| | | Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga | Penyusunan Profil Kependudukan, KeluargaBerencana dan Pembangunan Keluarga | 1 | 45.829 | 0 | 0 | 1 Buku | 43.646 | 0,00 | 20,17 | 0 | 8.802 | 0,00 | 19,21 | | |
| | | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | Persentase kab/kota yang di bina | 71,42 | 283.646 | 0 | 0 | 0,7142 | 270.139 | 100,00 | 0,54 | 71,42 | 1.455 | 100,00 | 0,51 | | |
| | | Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana sesuai kearifan budaya lokal | jumlah kab/kota yang melaksanakan pengelolaan dan pengembangan advokasi dan KIE sesuai kearifan budaya lokal | 7 | 232.459 | 0 | 0 | 7 kab/kota | 221.390 | 0,00 | 0,66 | 0 | 1.455 | 0,00 | 0,63 | | |
| | | Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi dan Promosi KIE Program KKBPK | Jumlah kategori perlombaan Hari Keluarga | 1 | 52.478 | 0 | 0 | 1 Kategori | 49.979 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Advokasi dan KIE Program KKBPK melalui mitra kerja | Jumlah peserta advokasi program KKBPK | 60 | 179.981 | 0 | 0 | 30 Orang | 171.410 | 0,00 | 0,85 | 0 | 1.455 | 0,00 | 0,81 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | jml kab/kota yang melaksanakan upaya pemberdayaan dan peningkatan kesertaan ber-KB | 7 | 51.187 | 0 | 0 | 7 kab/kota | 48.749 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Pengembangan dan Penguatan Jejaring kemitraan dalam program KKBPK | Jumlah peserta kegiatan penguatan jejaringkemitraan dalam program KKBPK | 60 | 51.187 | 0 | 0 | 30 Orang | 48.749 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | Persentase Kampung KB | 79,28 | 424.014 | 0 | 0 | 0,7928 | 403.823 | 94,10 | 0,00 | 74,6 | - | 94,10 | 0,00 | | |
| | | Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembanguan Keluarga melalui Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga | jumlah kab/kota yang melaksanakan pengelolaan program pembangunan keluarga | 7 | 202.701 | 0 | 0 | 7 kab/kota | 193.049 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana | Jumlah konselor terlatih | 70 | 87.202 | 0 | 0 | 35 Orang | 83.050 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK R) | Jumlah peserta kegiatan PIK Remaja | 40 | 115.499 | 0 | 0 | 20 Orang | 109.999 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Provinsi dalam Pembanguanan Keluarga melalui pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | jumlah kab/kota yang melaksanakan pembinaan ormas dalam upaya ketahanan dan keserjahteraan keluarga | 7 | 221.313 | 0 | 0 | 7 kab/kota | 210.774 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB | Jumlah kampung KB yang terbentuk / kampung KB yang di bina | 49 | 221.313 | 0 | 0 | 34 kampung KB/kampung KB cikar | 210.774 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | URUSAN PERHUBUNGAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | A | 28.281.839.352 | BB | 0 | B | | | | | | | | Dinas Perhubungan | |
| | | | Meningkatnya Kepuasaan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan | 100 | | 100 | | 100 | | | | | | | | | |
| | | | Meningkatnya Kepuasaan Masyarkat terhadap pelayanan di sektor transportasi | 100 | | 100 | | 70 | | | | | | | | | |
| | | Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 10 | 416.200.730 | | | 10 | 416.200.730 | 0,00% | 0,00% | 0 | - | 0,00% | 0,00% | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah | 7 | 315.411.452 | | | 7 | 315.411.452 | 0,00% | 0,00% | 0 | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 | 100.789.278 | | | 3 | 100.789.278 | 0,00% | 0,00% | 0 | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | 12 | 8.841.904.997 | | | 12 | 8.841.904.997 | 50,00% | 42,66% | 6 | 3.772.376.234 | 50,00% | 42,66% | | |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan | 12 | 8.839.805.047 | | | 12 | 8.839.805.047 | 50,00% | 42,67% | 6 | 3.772.376.234 | 50,00% | 42,67% | | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan bulanan semesteran | 14 | 2.099.950 | | | 14 | 2.099.950 | 0,00% | 0,00% | 0 | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | tersedianya kegiatan administrasi kepegawaian | 3 | 257.726.500 | | | 3 | 257.726.500 | 0,00% | 0,00% | 0 | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas | 87 | 198.632.500 | | | 87 | 198.632.500 | 0,00% | 0,00% | 0 | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan | 4 | 29.547.000 | | | 4 | 29.547.000 | 0,00% | 0,00% | 0 | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan | 4 | 29.547.000 | | | 4 | 29.547.000 | 0,00% | 0,00% | 0 | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya kegiatan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah | 8 | 965.546.783 | | | 8 | 965.546.783 | 50,00% | 31,77% | 4 | 306.712.920 | 50,00% | 31,77% | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Jenis Komponen instalasi listrik | 9 | 44.994.312 | | | 9 | 44.994.312 | 22,22% | 15,10% | 2 | 6.795.000 | 22,22% | 15,10% | | |
| | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah jenis Perlengkapan kantor | 2 | 49.393.757 | | | 2 | 49.393.757 | 0,00% | 0,00% | 0 | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah jenis Bahan logistik kantor | 17 | 246.421.077 | | | 12 | 246.421.077 | 50,00% | 18,83% | 6 | 46.395.181 | 35,29% | 18,83% | | |
| | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah barang cetak dan penggandaan' | 12 | 34.199.771 | | | 12 | 34.199.771 | 0,00% | 0,00% | 0 | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Penyediaan Bahan/Material | jumlah jenis atk yang dibeli | 35 | 90.993.866 | | | 12 | 90.993.866 | 50,00% | 42,01% | 6 | 38.223.000 | 17,14% | 42,01% | | |
| | | Fasilitas Kunjungan Tamu | jumlah makan dan minum tamu | 1000 | 49.980.000 | | | 1000 | 49.980.000 | 3,00% | 30,38% | 30 | 15.184.000 | 3,00% | 30,38% | | |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Perjalanan dinas biasa | 12 | 449.564.000 | | | 12 | 449.564.000 | 50,00% | 44,51% | 6 | 200.115.739 | 50,00% | 44,51% | | |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah | 2 | 1.559.016.680 | | | 2 | 1.559.016.680 | 0,00% | 1,89% | 0 | 29.518.273 | 0,00% | 1,89% | | |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Meubelair Gedung VIP Bandara Depati Amir | 1 | 1.409.016.680 | | | 1 | 1.409.016.680 | 0,00% | 2,09% | 0 | 29.518.273 | 0,00% | 2,09% | | |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah meter persegi partisi yang dibangun | 1 | 150.000.000 | | | 1 | 150.000.000 | 0,00% | 0,00% | 0 | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah | 4 | 1.485.800.000 | | | 4 | 1.485.800.000 | 25,00% | 48,55% | 1 | 721.405.439 | 25,00% | 48,55% | | |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | jumlah materai | 750 | 7.500.000 | | | 750 | 7.500.000 | 0,00% | 0,00% | 0 | - | 0,00% | 0,00% | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik | Tagihan rekening listrik, air ,telepom,virtual meeting | 12 | 812.400.000 | | | 12 | 812.400.000 | 50,00% | 40,35% | 6 | 327.805.439 | 50,00% | 40,35% | | |
| | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | jasa peralatan dan perlengkapan kantor | 1 | 25.000.000 | | | 1 | 25.000.000 | 0,00% | 0,00% | 0 | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah tenaga pelayanan jasa kantor yang bekerja | 12 | 640.900.000 | | | 12 | 640.900.000 | 25,00% | 61,41% | 3 | 393.600.000 | 25,00% | 61,41% | | |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik daerah | 4 | 614.723.986 | | | 4 | 614.723.986 | 50,00% | 47,25% | 2 | 290.456.100 | 50,00% | 47,25% | | |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara | 17 | 379.530.000 | | | 12 | 379.530.000 | 50,00% | 37,87% | 6 | 143.715.000 | 35,29% | 37,87% | | |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan kerja yang diperbaiki | 57 | 129.620.000 | | | 57 | 129.620.000 | 0,00% | 36,06% | 0 | 46.741.100 | 0,00% | 36,06% | | |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor yang dipelihara | 2 | 105.573.986 | | | 2 | 105.573.986 | 50,00% | 94,72% | 1 | 100.000.000 | 50,00% | 94,72% | | |
| | | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan darat | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi | Tersedianya Jenis Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan | 20 | 3.982.356.000 | | | 20 | 3.982.356.000 | 25,00% | 10,92% | 5 | 435.043.001 | 25,00% | 10,92% | | |
| | | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi | Jumlah jenis pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan | 5 | 2.525.106.000 | | | 5 | 2.525.106.000 | 0,00% | 2,15% | 0 | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan | Jumlah Jenis perlengkapan jalan yang dipelihara | 5 | 1.457.250.000 | | | 5 | 1.457.250.000 | 40,00% | 26,13% | 2 | - | 40,00% | 0,00% | | |
| | | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B | Tersedianya Jenis Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan | 1 | 1.251.522.000 | | | 12 | 1.251.522.000 | 50,00% | 22,33% | 6 | 279.432.300 | 600,00% | 22,33% | | |
| | | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B | Jumlah jenis pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan | 12 | 1.251.522.000 | | | 12 | 1.251.522.000 | 50,00% | 22,33% | 6 | - | 50,00% | 0,00% | | |
| | | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi | Tersedianya Laporan Pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas untuk jalan provinsi | 1 | 108.977.541 | | | 1 | 108.977.541 | 0,00% | 21,73% | 0 | 23.680.000 | 0,00% | 21,73% | | |
| | | Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi | jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pelajar pelopor keselamatan lalu lintas | 15 | 108.977.541 | | | 15 | 108.977.541 | 0,00% | 21,73% | 0 | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk jalan provinsi | Jumlah Rekomendasi Penyelenggaraan Penilaian Analis Dampak Lalu Lintas (Dokumen) | 3 | 36.545.241 | | | 3 | 36.545.241 | 0,00% | 0,00% | 0 | - | 0,00% | 0,00% | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin | Jumlah dokumen penyelenggaraan penilaian analisis dampak lalu lintas | 3 | 36.545.241 | | | 3 | 36.545.241 | 0,00% | 0,00% | 0 | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | terlaksananya audit dan inpeksi terhadap kendaraan | 1150 | 447.169.794 | | | 1150 | 447.169.794 | 43,48% | 25,15% | 500 | 112.461.600 | 43,48% | 25,15% | | |
| | | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | terlaksananya audit dan inpeksi terhadap kendaraan | 1 | 447.169.794 | | | 100 | 447.169.794 | 30,00% | 25,15% | 30 | 112.461.600 | 3000,00% | 25,15% | | |
| | | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang da/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Tersedianya subsidi rute trayek | 4 | 907.854.300 | | | 4 | 907.854.300 | 0,00% | 0,00% | 0 | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Pengendalian dan Pengawasan Ketersedian Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | jumlah rute/trayek yang mendapatkan subsidi aglomerasi | 2 | 907.854.300 | | | 2 | 907.854.300 | 0,00% | 0,00% | 0 | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Program Pengelolaan pelayaran | Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan Laut | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional | Tersedianya Dokumen Penetapan rencana induk dan daerah lingkungan kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) pelabuhan pengumpan regional | 1 | 280.308.847 | | | 1 | 280.308.847 | 0,00% | 0,00% | 0 | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional | Jumlah Dokumen Penyusunan rencana induk dan daerah | 1 | 280.308.847 | | | 1 | 280.308.847 | 0,00% | 0,00% | 0 | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional | Tersedianya Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional | 2 | 204.205.721 | | | 2 | 204.205.721 | 0,00% | 0,40% | 0 | 820.000 | 0,00% | 0,40% | | |
| | | Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional | Jumlah SBNP yang dipelihara | 2 | 204.205.721 | | | 2 | 204.205.721 | 0,00% | 0,40% | 0 | 820.000 | 0,00% | 0,40% | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi | Tersedianya Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi | 6 | 9.255.238.700 | | | 6 | 9.255.238.700 | 16,67% | 2,18% | 1 | 201.366.300 | 16,67% | 2,18% | | |
| | | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Konsultansi perencanaan pembangunan pelabuhan | 1 | 594.743.397 | | | 1 | 594.743.397 | 0,00% | 0,69% | 0 | 4.100.000 | 0,00% | 0,69% | | |
| | | Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi | Jumlah pembangunan pelabuhan penyeberangan | 6 | 8.660.495.303 | | | 6 | 8.660.495.303 | 66,67% | 2,28% | 4 | 197.266.300 | 66,67% | 2,28% | | |
| | | Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional | Terwujudnya badan usaha pelabuhan yang memiliki izin usaha dipelabuhan pengumpan regional | 6 | 67.645.866 | | | 6 | 67.645.866 | 33,33% | 14,55% | 2 | 9.840.000 | 33,33% | 14,55% | | |
| | | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah perusahaan angkutan laut pelayaran rakyat kewenangan provinsi dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik | 60 | 67.645.866 | | | 60 | 67.645.866 | 3,33% | 14,55% | 2 | 9.840.000 | 3,33% | 14,55% | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi | | | | | | | 12.266.811.872 | | | | | | | Dinas Komunikasi dan Informatika | |
| | | | Nilai Sakip PD | | | | | 95 | | | | | | | | | |
| | | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah | | | | | 12 | 108.299.739 | 33,33% | 5,27% | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen perencanaan | | | | | 5 | 63.483.573 | 40,00% | 8,99% | | | | | | |
| | | n Evaluasi kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Evalusi kinerja PD | | | | | 7 | 44.816.166 | 28,57% | 0,00% | | | | | | |
| | | | Survey kepuasan pelayanan internal | | | | | 55 | | | | | | | | | |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah ASN yang terima gaji dan tunjungan | | | | | 55 | 7.931.138.108 | 46,42% | 46,42% | | | | | | |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan | | | | | 55 | 7.642.413.470 | 47,65% | 47,65% | | | | | | |
| | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Laporan | | | | | 2 | 257.800.000 | 0,00% | 4,42% | | | | | | |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah pengelola administrasi keuangan yang bekerja | | | | | 1 | 28.546.250 | 100,00% | 100,00% | | | | | | |
| | | n Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan akhir tahun | | | | | 1 | 2.378.388 | 0,00% | 0,00% | | | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran | | | | | 12 | | 50,00% | 0,00% | | | | | | |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Meningkatnya Disiplin serta kompetensi SDM Aparatur | | | | | 1 | - | 0,00% | 0,00% | | | | | | |
| | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah uploader mesin absensi yang diadakan | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | | | | | |
| | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah pegawai ASN yang ikut pendidikan dan pelatihan formal | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | | | | | |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Umum | | | | | 1 | 322.912.016 | 0,00% | 33,31% | | | | | | |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia | | | | | 25 | 9.932.728 | 32,00% | 22,60% | | | | | | |
| | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | | | | | 5 | 39.998.534 | 40,00% | 21,13% | | | | | | |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia | | | | | 8 | 43.599.427 | 25,00% | 16,32% | | | | | | |
| | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah barang cetak | | | | | 250 | 20.487.427 | 14,40% | 7,71% | | | | | | |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia | | | | | 1200 | 40.160.000 | 52,00% | 34,84% | | | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah makan dan minum ramu yang tersedia | | | | | 1000 | 10.015.000 | 12,80% | 39,65% | | | | | | |
| | | n Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah makan dan minum rapat yang tersedia | | | | | 428 | 24.500.900 | 14,02% | 11,02% | | | | | | |
| | | | Jumlah koordinasi dan konsultasi Luat dan dalam daerah yang dilaksanakan | | | | | 60 | 134.218.000 | 31,67% | 50,30% | | | | | | |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Meningkatnya jumlah kualitas Penunjang pelayanan dalam pemenuhan standar pelayanan minimal | | | | | 23 unit | 45.187.509 | 0,00% | 0,00% | | | | | | |
| | | Pengadaan Mebel | Jumlah mebelair yang diadakan | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | | | | | |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Laptop, printer, sound system | | | | | - | 45.187.509 | 0,00% | 0,00% | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintah Daerah | | | | | 55 | 3.613.758.000 | 37,19% | 37,19% | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Materai | | | | | 1600 | 10.858.000 | 5,75% | 10,44% | | | | | | |
| | | | Jumlah Surat/Barang yang dikirim | | | | | 50 | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah tenaga pramubakti yang dipekerjakan | | | | | 27 | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan | | | | | 12 | 2.208.000.000 | 41,67% | 32,18% | | | | | | |
| | | n Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah pegawai tidak tetap yang terlayani | | | | | 37 | 1.394.900.000 | 45,32% | 45,32% | | | | | | |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik | | | | | 1 | 245.516.500 | 43,33% | 6,92% | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Pemeliharaan kendaraan dinas | | | | | 3 | 100.516.500 | 33,33% | 9,79% | | | | | | |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya | jenis peralatan dan mesin yang dipelihara | | | | | 5 | 30.000.000 | 20,00% | 23,79% | | | | | | |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara | | | | | 10 | 63.000.000 | | | | | | | | |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah BBM Genset, Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara | | | | | 5000 | 52.000.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | Persentase kesesuaian informasi publik terhadap kebijakan/program daerah yang dapat diakses masyarakat | | | | | 0,95 | 10.312.150.312 | 35,00% | 16,72% | | | | | | |
| | | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi | Persentase Penyampaian Informasi Program/kegiatan melalui semua media komunikasi | | | | | 0,6 | 10.312.150.312 | 35,00% | 16,72% | | | | | | |
| | | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | Jumlah konten yang dimutakhirkan dan dikembangkan. | | | | | 236 | 5.446.348.829 | 52,54% | 24,47% | | | | | | |
| | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | |
| | | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Jumlah saluran komunikasi non Pemda yang difasilitasi | | | | | 9 | 896.677.070 | 4,00% | 4,00% | | | | | | |
| | | | Jumlah saluran komunikasi pemda yang dikelola | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | | Pelayanan Informasi Publik | Jumlah informasi dan Publikasi PD yang dikelola | | | | | 34 | 1.460.193.028 | 92,01% | 92,01% | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Informasi non | | | | | 2 | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | struktural yang dikelola | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | Jumlah Informasi/data publik Pemda yang diupdate | | | | | 12766 | 2.508.931.385 | 42,78% | 13,73% | | | | | | |
| | | | Jumlah Mitra yang terfasilitasi serta Jumlah data/informasi publik pemda yang update | | | | | 35 | | | | | | | | | |
| | | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | Persentase Jumlah layanan Infrastruktur teknologi dan kapasitas layanan publik pemerintah berbasis e-Government | | | | | 0,9 | 1.975.269.000 | 43,51% | 23,97% | | | | | | |
| | | Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi | Persentase jumlah layanan publik pemerintah berbasis e-Government yang terlayani | | | | | 0,6 | 421.988.000 | 26,84% | 16,11% | | | | | | |
| | | Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi | Jumlah Pendaftaran Nama Domain yang terlayani | | | | | 10 | 76.778.000 | 20,00% | 6,90% | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Jumlah Interkoneksi jaringan internet OPD | | | | | 32 | 345.210.000 | 37,50% | 18,15% | | | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi | persentase Jumlah layanan Infrastruktur teknologi berbasis E-Government | | | | | 0,2 | 1.553.281.000 | 33,33% | 26,11% | | | | | | |
| | | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | Jumlah layanan Infrastruktur dan Teknologi | | | | | 3 | 1.421.731.000 | 33,33% | 26,84% | | | | | | |
| | | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik | | | | | 2 | 81.550.000 | 0,00% | 29,43% | | | | | | |
| | | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Jumlah layanan penyediaan data dan Teknologi informasi yang berkualitas | | | | | 21 | 50.000.000 | 0,00% | 0,00% | | | | | | |
| | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | |
| | | URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | URUSAN PENANAMAN MODAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 62.862.113 | | | | 62.862.113 | | | | | | | | |
| | | Penhyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen (Renstra PD dan Renja PD) | 14 Dokumen | 50.794.871 | - | - | 7 Dokumen | 50.794.871 | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja PD | 14 Dokumen | 12.067.242 | - | - | 7 Dokumen | 12.067.242 | | | | | | | | |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 630.681.524 | | | | 630.681.524 | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Tersedia | 60 Jenis | 17.999.720 | - | - | 30 Jenis | 17.999.720 | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia | 100 Unit | 20.000.000 | - | - | 50 Unit | 20.000.000 | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Bahaln Logistik Kantor | Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Tersedia | 2086 Unit | 12.180.000 | - | - | 1043 Unit | 12.180.000 | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan | 20.000 Eksemplar | 53.996.584 | - | - | 10.000 Eksemplar | 53.996.584 | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Tersedia | 8000 Eksemplar | 35.000.000 | - | - | 4000 Eksemplar | 35.000.000 | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Jenis ATK yang dibeli | 160 Jenis | 90.748.220 | - | - | 80 Jenis | 90.748.220 | | | | | | | | |
| | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Makan Minum Rapat dan Makan Minum Tamu yang Tersedia | 5608 Pax | 51.000.000 | - | - | 2804 Pax | 51.000.000 | | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Luar Daerah yang Dilaksanakan | 280 Kali | 349.757.000 | - | - | 140 Kali | 349.757.000 | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 888.424.126 | | | | 888.424.126 | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Materai dan Jumlah Surat/Barang yang Dikirim | 1990 Lembar/ Surat | 13.950.000 | - | - | 995 Lembar/ Surat | 13.950.000 | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Bulan Tagihan Rekening Listrik, Air,Telepon/Fax,TV Kabel, Virtual Meeting yang dibayarkan | 24 Bulan | 162.200.000 | - | - | 12 Bulan | 162.200.000 | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Jenis Bahan dan Peralatan Kebersihan Kantor Yang Tersedia dan Jumlah Tenaga Kebersihan yang Dipekerjakan | 200 Jenis/36 Orang | 712.274.126 | - | - | 100 Jenis/18 Orang | 712.274.126 | | | | | | | | |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 114.436.406 | | | | 114.436.406 | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Operasional Yang Dipelihara | 8 Unit | 66.330.000 | - | - | 4 Unit | 66.330.000 | | | | | | | | |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan Kerja Yang Diperbaiki | 30 Unit/Jenis | 34.907.906 | - | - | 15 Unit/Jenis | 34.907.906 | | | | | | | | |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Bangunan/Gedung Yang Terpelihara | 2 Unit | 9.999.440 | - | - | 1 Unit | 9.999.440 | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah BBM Genset dan Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara | 800 Liter | 3.199.060 | - | - | 400 Liter | 3.199.060 | | | | | | | | |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | UPTD PPT Wilayah Belitung | |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 117.084.859 | | | | 117.084.859 | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Tersedia | 40 Jenis | 8.999.421 | - | - | 20 Jenis | 8.999.421 | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Bahaln Logistik Kantor | Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Tersedia | 260 Unit | 2.300.000 | - | - | 130 Unit | 2.300.000 | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan | 20000 Eksemplar | 17.999.792 | - | - | 10000 Eksemplar | 17.999.792 | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Tersedia | 2080 Eksemplar | 3.000.000 | - | - | 1040 Eksemplar | 3.000.000 | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Jenis ATK yang dibeli | 160 Jenis | 11.996.646 | - | - | 80 Jenis | 11.996.646 | | | | | | | | |
| | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Makan Minum Rapat dan Makan Minum Tamu yang Tersedia | 800 Pax | 8.000.000 | - | - | 400 Pax | 8.000.000 | | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Luar Daerah yang Dilaksanakan | 120 Kali | 64.789.000 | - | - | 60 Kali | 64.789.000 | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 310.792.703 | | | | 310.792.703 | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Materai dan Jumlah Surat/Barang yang Dikirim | 550Lembar/ Surat | 7.192.000 | - | - | 275 Lembar/ Surat | 7.192.000 | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Bulan Tagihan Rekening Listrik, Air,Telepon/Fax,TV Kabel, Virtual Meeting yang dibayarkan | 24 Bulan | 25.200.000 | - | - | 12 Bulan | 25.200.000 | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Jenis Bahan dan Peralatan Kebersihan Kantor Yang Tersedia dan Jumlah Tenaga Kebersihan yang Dipekerjakan | 50 Jenis/14 Orang | 278.400.703 | - | - | 25 Jenis/7 Orang | 278.400.703 | | | | | | | | |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 58.338.000 | | | | 58.338.000 | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Operasional Yang Dipelihara | 6 Unit | 39.050.000 | - | - | 3 Unit | 39.050.000 | | | | | | | | |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan Kerja Yang Diperbaiki | 20 Unit/Jenis | 9.360.000 | - | - | 10 Unit/Jenis | 9.360.000 | | | | | | | | |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Bangunan/Gedung Yang Terpelihara | 2 Unit | 9.928.000 | - | - | 1 Unit | 9.928.000 | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi | | | 187.785.930 | | | | 187.785.930 | | | | | | | | |
| | | Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Jumlah UKM yang Memenuhi Syarat Kemitraan | 16 UKM | 187.785.930 | - | - | 8 UKM | 187.785.930 | | | | | | | | |
| | | Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi | | | 190.405.649 | | | | 190.405.649 | | | | | | | | |
| | | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Evaluasi RUPM | 2 Dokumen | 40.407.724 | - | - | 1 Dokumen | 40.407.724 | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi | Jumlah Peta Potensi Investasi | 2 Peta | 149.997.925 | - | - | 1 Peta | 149.997.925 | | | | | | | | |
| | | Program Promosi Penanaman Modal | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | | | 346.234.792 | | | | 346.234.792 | | | | | | | | |
| | | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi | Jumlah Laporan Strategi Promosi Penanaman Modal | 2 Laporan | 14.015.809 | - | - | 1 Laporan | 14.015.809 | | | | | | | | |
| | | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi | Jumlah Promosi Penanaman Modal yang Terlaksana | 6 Pameran Promosi | 332.218.983 | - | - | 3 Pameran Promosi | 332.218.983 | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Program Pelayanan Penanaman Modal | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | 36.549.268 | | | | 36.549.268 | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Layanan konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | Jumlah Peserta Rapat Koordinasi dan Jumlah Rapat Koordinasi Forum PTSP se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 100 Peserta/ 2 Rakor Forum | 36.549.268 | - | - | 50 Peserta/ 1 Rakor Forum | 36.549.268 | | | | | | | | |
| | | Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | | | 326.910.712 | | | | 326.910.712 | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Aplikasi Pendukung Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 1 Aplikasi | 36.649.728 | - | - | 1 Aplikasi | 36.649.728 | | | | | | | | |
| | | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal | Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi OSS | 2400 Izin | 282.010.990 | - | - | 1200 Izin | 282.010.990 | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | Jumlah Laporan Pengaduan yang ditindaklanjuti dan Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) | 24 Pengaduan/4 Laporan SKM | 8.249.994 | - | - | 12 Pengaduan/2 Laporan SKM | 8.249.994 | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | | | 733.732.087 | | | | 733.732.087 | | | | | | | | |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah Perusahaan Yang Dipantau | 150 Perusahaan | 179.481.493 | - | - | 75 Perusahaan | 179.481.493 | | | | | | | | |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah Peserta Yang Mengikuti Workshop | 1014 Aparatur/Perusahaan | 343.181.851 | - | - | 507 Aparatur/Perusahaan | 343.181.851 | | | | | | | | |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah Kasus/Permasalahan Perusahaan Yang Terselesaikan | 4 Kasus/Permasalahan | 211.068.743 | - | - | 2 Kasus/Permasalahan | 211.068.743 | | | | | | | | |
| | | Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi | | | 57.615.747 | | | | 57.615.747 | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Secara Elektronik | 2 Dokumen | 57.615.747 | - | - | 1 Dokumen | 57.615.747 | | | | | | | | |
| | | URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Nilai Sakip PD | 76 | 19.028.424.952 | | 0 | 75 | 8.795.726.055 | | 461,11102373 | | 4.002.980.551 | | 519,20 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | |
| | | Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 | 105.000.000 | | 0 | 12 | 214.912.211 | 151,43 | 80,52 | 9 | 108.897.100 | 151,43 | 161,81 | | |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | 5 | 80.000.000 | | | 5 | 151.122.423 | 80,00 | 65,88 | 4 | 99.555.000 | 80,00 | 124,44 | | |
| | | Evaluasi kinerja Perangkat Daerah | | 7 | 25.000.000 | | | 7 | 63.789.788 | 71,43 | 14,65 | 5 | 9.342.100 | 71,43 | 37,37 | | |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Survey Kepuasan Pelayanan Keuangan | 76 | 15.071.290.904 | | 0 | 75 | 6.044.746.801 | 100,00 | 47,62 | 8 | 2.875.027.381 | 200,00 | 19,08 | | |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | 111 | 15.071.290.904 | | | 12 | 6.037.022.001 | 50,00 | 47,62 | 6 | 2.875.027.381 | 0,00 | 19,08 | | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | 1 | - | | | 1 | 2.744.800 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | 1 | - | | | 4 | 4.980.000 | 50,00 | 0,00 | 2 | - | 200,00 | 0,00 | | |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Survey Kepuasan Pelayanan Kepegawaian | 76 | 35.000.000 | | 0 | 75 | 64.621.250 | 25,00 | 46,88 | 5 | 30.291.300 | 27,78 | 86,55 | | |
| | | Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | 18 | 35.000.000 | | | 20 | 64.621.250 | 25 | 46,87513782 | 5 | 30.291.300 | 27,78 | 86,55 | | |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Survey Kepuasan Pelayanan Umum | 76 | 438.248.131 | | 0 | 75 | 292.911.343 | 256,42 | 138,63 | 886,8 | 61.788.283 | 0,00 | 150,49 | | |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | | 35 | 8.007.219 | | | 35 | 9.995.765 | 28,57 | 19,81 | 10 | 1.980.000 | 0,00 | 24,73 | | |
| | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | 5 | 2.850.319 | | | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | 9 | 9.127.200 | | | 9 | 3.731.200 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan | | 121 | 47.950.521 | | | 121 | 23.800.474 | 57,85 | 21,29 | 70 | 5.066.003 | 0,00 | 10,57 | | |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | 2000 | 8.500.000 | | | 2000 | 10.000.000 | 40,00 | 41,44 | 800 | 4.144.000 | 0,00 | 48,75 | | |
| | | Penyediaan Bahan / Material | | 1 | 43.711.872 | | | 1 | 75.928.904 | 50,00 | 30,61 | 0,5 | 23.238.100 | 0,00 | 53,16 | | |
| | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | 1 | 80.790.000 | | | 1 | 27.935.000 | 30,00 | 7,68 | 0,3 | 2.145.000 | 0,00 | 2,66 | | |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | 12 | 237.311.000 | | | 12 | 141.520.000 | 50,00 | 17,82 | 6 | 25.215.180 | 0,00 | 10,63 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Survey Kepuasan Pelayanan Umum | 76 | - | | 0 | 75 | - | 0,00 | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | 5 | - | | | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0,00 | | |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Survey Kepuasan Pelayanan Umum | 76 | 3.190.426.876 | | 0 | 75 | 2.096.140.700 | 119,61 | 103,32 | 103 | 907.674.487 | 0,00 | 75,69 | | |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | 175 | 8.050.676 | | | 175 | 8.164.500 | 31,43 | 28,50 | 55 | 2.327.000 | 0,00 | 28,90 | | |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik | | 12 | 426.000.000 | | | 12 | 236.400.000 | 50,00 | 29,72 | 6 | 70.260.487 | 0,00 | 16,49 | | |
| | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | 20 | - | | | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | 110 | 2.756.376.200 | | | 110 | 1.851.576.200 | 38,18 | 45,10 | 42 | 835.087.000 | 0,00 | 30,30 | | |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Survey Kepuasan Pelayanan Umum | 76 | 188.459.041 | | 0 | 75 | 82.393.750 | 76,39 | 44,13 | 10 | 19.302.000 | 0,00 | 25,58 | | |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | 9 | 160.109.041 | | | 9 | 54.043.750 | 55,56 | 28,00 | 5 | 15.132.000 | 0,00 | 9,45 | | |
| | | Pemeliharaan Mebel | | 1 | 2.500.000 | | | 1 | 2.500.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | 24 | 25.850.000 | | | 24 | 25.850.000 | 20,83 | 16,13 | 5 | 4.170.000 | 0,00 | 16,13 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | 2 | - | | | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | 2 | - | | | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Persentase Pemuda Yang Berprestasi | 0,15 | 1.800.000.000 | | 0 | 0,15 | 2.292.004.594 | 134,10 | 117,64 | 67 | 437.755.805 | 0,00 | 205,62 | | |
| | | | Persentase Sarana dan Prasarana Pemuda yang Termanfaatkan | 100 | | | | 100 | | | | | | | | | |
| | | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi | Jumlah Pemuda yang berprestasi | 153 | 1.240.000.000 | | 0 | 153 | 1.781.408.675 | 71,24 | 36,88 | 45 | 348.433.700 | 0,00 | 56,75 | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pemuda yang tersedia | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi | | 7 | 20.000.000 | | | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi | | 5 | 30.000.000 | | | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi | | 136 | 340.000.000 | | | 51 | 591.301.572 | 49,02 | 15,10 | 25 | 89.302.700 | 0,00 | 26,27 | | |
| | | Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera | | 90 | 850.000.000 | | | 90 | 1.190.107.103 | 22,22 | 21,77 | 20 | 259.131.000 | 0,00 | 30,49 | | |
| | | Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi | | 0 | - | | | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Pemuda Yang Mengikuti Pelatihan Kewirausahaan | 35 | 560.000.000 | | 0 | 35 | 510.595.919 | 62,86 | 80,76 | 22 | 89.322.105 | 0,00 | 148,87 | | |
| | | | Jumlah Organisasi Pemuda Yang Aktif | 35 | | | | 35 | | | | | | | | | |
| | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha | | 35 | 60.000.000 | | | 35 | 110.595.919 | 62,86 | 80,76 | 22 | 89.322.105 | 0,00 | 148,87 | | |
| | | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi | | 35 | 500.000.000 | | | 35 | 400.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan | Indeks Daya Saing Olahraga | 15,71 | 6.625.000.000 | | 0 | 15,71 | 17.276.546.327 | 32,88 | 40,80 | 9 | 97.567.492 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | Jumlah Atlet Pelajar Yang Dibina | 550 | - | | 0 | 550 | 3.194.752.000 | 32,88 | 40,80 | 9 | 97.567.492 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha | | 10 | - | | | 10 | 50.000.000 | 30,00 | 38,31 | 3 | 19.153.390 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi | | 208 | - | | | 208 | 3.144.752.000 | 2,88 | 2,49 | 6 | 78.414.102 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga | Jumlah Atlet Pelajar Yang Dibina | 550 | 1.325.000.000 | | 0 | 550 | 1.001.794.327 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga multi Event dan Single event Tingkat Provinsi | | 10 | 500.000.000 | | | 10 | 601.794.327 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan multi Event dan Single event | | 208 | 825.000.000 | | | 208 | 400.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi | Jumlah Atlet Pelajar Yang Dibina | 125 | 300.000.000 | | 0 | 125 | 580.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Sub Kegiatan Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) | | 159 | 300.000.000 | | | 159 | 580.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | Jumlah Organisasi Keolahragaan Yang Dibina | 1 | 5.000.000.000 | | 0 | 1 | 12.500.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Pengembangan Organisasi Keolahragaan | | 1 | 5.000.000.000 | | | 1 | 12.500.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | Persentase Organisasi Pramuka yang Memiliki Kapasitas | 2,01 | 1.500.000.000 | | 0 | 2,01 | 1.150.670.205 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | 4370 | 1.500.000.000 | | 0 | 4370 | 1.150.670.205 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi | | 1 | 1.500.000.000 | | | 1 | 749.038.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi | | 8 | - | | | 8 | 401.632.205 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | URUSAN STATISTIK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Persentase Data dan informasi statistik yang digunakan untuk perencanaan dan pengambilan kebijakan | | | | | 0,75 | 242.785.394 | 38,33% | 6,93% | | | | | Dinas Komunikasi dan Informatika | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Persentase kebutuhan Data Statistik Sektoral Daerah Provinsi dan Diskominfo Kabupaten/Kota | | | | | 0,7 | 242.785.394 | 38,33% | 15,08% | | | | | | |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Jumlah kebutuhan data Statistik Sektoral Daerah (OPD); serta jumlah kompilasi statistik sektoral | | | | | 300 | 164.949.481 | 33,33% | 4,27% | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | | Membangun Metadata Statistik Sektoral | Jumlah laporan Metadata Statistik Sektoral Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung; | | | | | 20 | 77.835.913 | 10,00% | 21,61% | | | | | | |
| | | URUSAN PERSANDIAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKKI) | | | | | 3 | 541.289.801 | 33,33% | 0,00% | | | | | Dinas Komunikasi dan Informatika | |
| | | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | Persentase Penerapan Proteksi Keamanan Informasi Pemerintah | | | | | 0,7 | 483.015.000 | 33,33% | 0,00% | | | | | | |
| | | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi | Sertifikat ISO 27001 dan PERGUB | | | | | 3 | 300.000.000 | 33,33% | 0,00% | | | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Persentase penilaian mandiri penerapan sistem manajemen pengaman informasi | | | | | 10 | 116.004.000 | 0,00% | 0,00% | | | | | | |
| | | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | Tersedianya layanan keamanan informasi untuk Pemda | | | | | 4 | 67.011.000 | 0,00% | 0,00% | | | | | | |
| | | | Tersedianya SDM keamanan informasi | | | | | 3 | | | | | | | | | |
| | | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi | Presentase Keterhubungan Perangkat Daerah dalam Jaringan Komunikasi Sandi | | | | | 0,85 | 58.274.801 | 0,00% | 0,00% | | | | | | |
| | | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi | Persentase Keterhubungan Perangkat Daerah dalam Jaringan Komunikasi Sandi | | | | | 34 | 58.274.801 | 0,00% | 0,00% | | | | | | |
| | | URUSAN KEBUDAYAAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Pengembangan Kebudayaan | Persentase Kebudayaan Yang Dikelola | 55 | 164.000.000 | | 0 | 55 | 132.826.000 | | | | | | | Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata | |
| | | Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Lembaga Adat Yang Dibina | 1 | 164.000.000 | | 0 | 1 | 132.826.000 | | | | | | | | |
| | | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat | | 1 | 164.000.000 | | | | 132.826.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Program Pengembangan Kesenian Tradisional | Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan | 55 | 198.351.650 | | 0 | 55 | 526.554.302 | | | | | | | | |
| | | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kesenian Tradisional Yang Dibina | 5 | 198.351.650 | | 0 | 5 | 526.554.302 | | | | | | | | |
| | | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumberdaya Manusia Kesenian Tradisional | | 50 | 98.351.650 | | | 50 | 338.969.304 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | | 70 | 100.000.000 | | | 70 | 187.584.998 | 0,29 | 30,96 | 20 | 58.070.000 | 28,57 | 58,07 | | |
| | | Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya | Persentase Cagar Budaya Dilestarikan dan Dikelola | 50 | 5.125.000.000 | | 0 | 50 | 222.836.701 | | | | | | | | |
| | | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi | Jumlah Cagar Budaya yang Ditetapkan Sebagai Peringkat Provinsi | 5 | 125.000.000 | | 0 | 5 | 222.836.701 | | | | | | | | |
| | | Pendaftara Objek Diduga Cagar Budaya | | 5 | 25.000.000 | | | 5 | 53.807.925 | 0,2 | 2,43 | 1 | 1.305.000 | 20 | 5,22 | | |
| | | Penetapan Cagar Budaya | | 5 | 100.000.000 | | | 5 | 169.028.776 | 0,2 | 9,39 | 1 | 15.868.992 | 20 | 15,87 | | |
| | | Pengelolaan Cagar Budaya Tingkat Provinsi | Jumlah Cagar Budaya yang Ditetapkan Sebagai Peringkat Provinsi | 1 | 5.000.000.000 | | 0 | 1 | - | | | | | | | | |
| | | Perlindungan Cagar Budaya | | 1 | 5.000.000.000 | | | | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Program Pengelolaan Permuseuman | Persentase Museum Provinsi Yang Dikelola | 100 | 65.000.000 | | 0 | 100 | 183.751.710 | | | | | | | | |
| | | Pengelolaan Museum Provinsi | Jumlah Museum Provinsi Yang Dikelola | 1 | 65.000.000 | | 0 | 1 | 183.751.710 | | | | | | | | |
| | | Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu | | 20 | 65.000.000 | | | 20 | 183.751.710 | 0,1 | 0,71 | 2 | 1.305.000 | 10 | 2,01 | | |
| | | URUSAN PERPUSTAKAAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Nilai Sakip PD | 78 | 200.000.000 | | | 0,77 | 34.247.474 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | |
| | | | Persentase survey kepuasan pelayanan internal | 75 | 3.580.935.500 | | | 0,7 | 2.159.063.928 | 5998,77 | 41,99 | 41,99 | 906.620.546 | 55,99 | 25,32 | | |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dok perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 9 | 200.000.000 | | | 9 | 34.247.474 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Renstra PD dan Renja PD | 2 | 170.000.000 | | | 2 | 17.377.803 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi kinerja PD | 7 | 30.000.000 | | | 7 | 16.869.671 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah kegiatan administrasi kepegawaian PD | 2 | 255.000.000 | | | 1 | 35.000.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah pegawai ASN yang ikut pendidikan dan pelatihan formal | 30 | 55.000.000 | | | 3 | 35.000.000 | 0 | 0 | 0 | - | | 0,00 | | |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah kegiatan administrasi umum PD | 7 | 1.368.835.500 | | | 7 | 581.828.965 | 42,86 | 15,60 | 3 | 90.769.366 | 42,86 | 6,63 | | |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia | 12 | 173.853.500 | | | 25 | 36.263.369 | 20,00 | 19,95 | 5 | 7.234.689 | 41,67 | 4,16 | | |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah logistiik kantor yang tersedia | 5 | 35.000.000 | | | 5 | 24.995.000 | 40,00 | 6,10 | 2 | 1.524.500 | 40,00 | 4,36 | | |
| | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah barang cetak | 50 | 30.000.000 | | | 50 | 97.914.534 | 50,00 | 19,00 | 25 | 18.603.900 | 0,00 | 62,01 | | |
| | | | Jumlah Penggandaan | 85715 | 40.000.000 | | | 85715 | | 25,00 | | | | | | | |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia | 850 | 40.000.000 | | | 850 | 4.400.000 | 50,00 | 29,82 | 425 | 1.312.000 | 0,00 | 3,28 | | |
| | | Penyediaan bahan/Material | Jumlah bahan pembersih yang dibeli | | 80.000.000 | | | 50 | 175.673.062 | 50,00 | 22,36 | 25 | 39.282.607 | 0,00 | 49,10 | | |
| | | | Jumlah BBM | | | | | 6 | | 50,00 | | | | | | | |
| | | | Jumlah jenis ATK yang dibeli | 50 | 80.000.000 | | | 50 | | 50,00 | | | | | | | |
| | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah makan dan minum tamu yang tersedia | 1000 | 35.000.000 | | | 945 | 296.695.000 | 49,95 | 1,77 | 472 | 5.250.000 | 0,00 | 15,00 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilaksanakan | 33 | 500.000.000 | | | 38 | 209.508.000 | 39,47 | 8,38 | 15 | 17.561.670 | 0,00 | 3,51 | | |
| | | | Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam keluar yang dilaksanakan | 40 | 350.000.000 | | | 23 | | 17,39 | | | | | | | |
| | | | Jumlah makan da minum rapat tersedia | 800 | 50.000.000 | | | 1300 | | 50,00 | | | | | | | |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah jenis barang milik daerah yang diadakan | 5 | 100.000.000 | | | 3 | 33.248.042 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan | 5 | 100.000.000 | | | 3 | 33.248.042 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 3 | 1.307.100.000 | | | 3 | 1.317.175.000 | 166,67 | 60,78 | 5 | 800.627.366 | 166,67 | 61,25 | | |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Surat/Barang yang dikirim | 50 | 13.000.000 | | | 50 | 11.875.000 | 50,00 | 20,87 | 25 | 2.477.800 | 0,00 | 19,06 | | |
| | | | Jumlah Material | 165 | 15.000.000 | | | 650 | | 50,00 | | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber daya Air dan Listrik | Tagihan rekening listrik, air, telepon/fake, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan | 12 | 35.000.000 | | | 12 | 61.200.000 | 66,67 | 53,19 | 8 | 32.549.566 | 66,67 | 93,00 | | |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah tenaga pramubakti yang diperkerjakan | 18 | 678.600.000 | | | 33 | 1.244.100.000 | 100,00 | 61,54 | 33 | 765.600.000 | 100,00 | 112,82 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | Jumlah tenaga kebersihan yang di perkerjakan | 4 | 150.800.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah tenaga keamanan/satpam kantor yang diperkerjakan | 6 | 226.200.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah tenaga supir yang diperkerjakan | 5 O | 188.500.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah jenis BMD yang dipelihara | 4 | 550.000.000 | | | 4 | 191.811.921 | 50,00 | 7,94 | 2 | 15223814 | 16,66666667 | 2,767966182 | | |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara | 5 | 220.000.000 | | | 5 | 66.913.133 | 20,00 | 13,76 | 1 | 9208814 | 8,333333333 | 4,185824545 | | |
| | | | Jumlah pajak kendaraan dinas | | | | | 6 | | 0,00 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | Jumlah suku cadang kendaraan bermotor | | | | | 5 | | 0,00 | | 0 | | 0 | | | |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Mebel | Jumlah mebeler yang dipelihara | 5 | 30.000.000 | | | 2 | 5.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara | 15 | 100.000.000 | | | 50 | 36.122.788 | 10,00 | 16,65 | 5 | 6015000 | 41,66666667 | 6,015 | | |
| | | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor yang dipelihara | 1 | 200.000.000 | | | 1 | 83.776.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Program Pembinaan Perpustakaan | persentase perpustakaan yang dibina | 0,6 | - | | | 1030 | 960.186.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | persentase perpustakaan yang dikembangkan | 0,35 | - | | | 400 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | pengelolaan perpustakaan tingkat daerah provinsi | Persentase peningkatan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah provinsi | 0,6 | 425.000.000 | | | 0,6 | 584.999.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Pengembangan perpustakaan di tingkat daerah provinsi | Jumlah pengadaan perabot layanan perpustakaan provinsi (DAK) | | 75.000.000 | | | 1 | 552.982.654 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Jumlah pengadaan TIK layanan perpustakaan provinsi (DAK) | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah perpustakaan yang memenuhi standart nasional | 7 | | | | 7 | | | | | | | | | |
| | | Peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah provinsi | jumlah pustakawan dan pengelola perpustakaan yang berprestasi | 8 | 200.000.000 | | | 8 | 32.016.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah provinsi | Jumlah pengunjung perpustakaan | 10000 | 606.375.000 | | | 10000 | 375.186.952 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan tingkat menengah dan pendidikan khusus serta masyarakat | Jumlah peserta lomba | 240 | 275.000.000 | | | 120 | 103.380.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan daerah provinsi (4 kabupaten di prov.kep babel) | Jumlah pengunjung perpustakaan keliling | 14250 | 141.375.000 | | | 7125 | 227.924.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Jumlah DED | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | | Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial | Jumlah peserta pelatihan pengembangan literasi berbasis inklusi sosial | 50 | 150.000.000 | | | 50 | 43.880.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno | Jumlah koleksi nasional dan naskah kuno (DKPUS) | 9 | 1.361.000.000 | | | 9 | 178.779.327 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | | |
| | | Penerbitan katalog induk daerah dan bibliografi daerah | Jumlah katalog induk daerah dan bibliografi daerah | 2 | 164.000.000 | | | 2 | 122.438.665 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | |
| | | Penerbitan katalog induk daerah | Jumlah dokumen katalog induk daerah yang dicetak | 1 | 82.000.000 | | | 1 | 64.472.755 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | |
| | | Penerbitan bibliografi induk daerah | Jumlah dokumen bibliografi induk daerah yang dicetak | 4 | 82.000.000 | | | 1 | 57.965.910 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | |
| | | Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah provinsi | Jumlah dokumen koleksi budaya etnis nusantara | 7 | 325.000.000 | | | 7 | 56.340.662 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | |
| | | Pengolahan dan penyiangan koleksi budaya etnis nusantara | Jumlah dokumen koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola | 7 | 75.000.000 | | | 7 | 56.340.662 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | |
| | | URUSAN KEARSIPAN | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno | Jumlah koleksi nasional dan naskah kuno (DKPUS) | 9 | 1.361.000.000 | | | 9 | 178.779.327 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | |
| | | Kegiatan : Penerbitan katalog induk daerah dan bibliografi daerah | Jumlah katalog induk daerah dan bibliografi daerah | 2 | 164.000.000 | | | 2 | 122.438.665 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | |
| | | Penerbitan katalog induk daerah | Jumlah dokumen katalog induk daerah yang dicetak | 1 | 82.000.000 | | | 1 | 64.472.755 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | |
| | | Penerbitan bibliografi induk daerah | Jumlah dokumen bibliografi induk daerah yang dicetak | 4 | 82.000.000 | | | 1 | 57.965.910 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | |
| | | Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah provinsi | Jumlah dokumen koleksi budaya etnis nusantara | 7 | 325.000.000 | | | 7 | 56.340.662 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | |
| | | Pengolahan dan penyiangan koleksi budaya etnis nusantara | Jumlah dokumen koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola | 7 | 75.000.000 | | | 7 | 56.340.662 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Nilai SAKIP | | | | | 82 | | | | | | | | Dinas Kelautan dan Perikanan | |
| | | | Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | | | | | | | | | | | | | Dinas Kelautan dan Perikanan | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | Survey Kepuasan Pelayanan | | | | | | | | | | | | | Dinas Kelautan dan Perikanan | |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah | Jumlah dok perencanaan dan evaluasi (Dok/Tahun) | | | | | 10 | 404.052.649,00 | | | | | 50,00% | 3,77% | Dinas Kelautan dan Perikanan | |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan (orang) | | | | | 93 | 13.971.840.314,00 | | | | | 50,00% | 47,72% | Dinas Kelautan dan Perikanan | |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah kegiatan Administrasi Kepegawaian (kegiatan) | | | | | 2 | 88.779.965,00 | | | | | 0,00% | 6,20% | Dinas Kelautan dan Perikanan | |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Kegiatan Administrasi Umum PD (kegiatan) | | | | | 8 | 683.461.410 | | | | | 0,00% | 15,95% | Dinas Kelautan dan Perikanan | |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang diadakan (unit) | | | | | 10 | 39.999.078 | | | | | 0,00% | 0,00% | Dinas Kelautan dan Perikanan | |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah | | | | | 3 | 963.295.492 | | | | | 25,00% | 44,24% | Dinas Kelautan dan Perikanan | |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis MBD yang dipelihara (Unit) | | | | | 41 | 652.296.044 | | | | | 0,00% | 3,26% | Dinas Kelautan dan Perikanan | |
| | | | Survey Kepuasan Pelayanan Internal UPTD Balai Pemuliaan | | | | | | | | | | | | | UPTD Balai Pemuliaan Ikan | |
| | | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Kegiatan Administrasi Umum PD (kegiatan) | | | | | 8 | 275.733.525,00 | | | | | 0,00% | 15,80% | UPTD Balai Pemuliaan Ikan | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang diadakan (unit) | | | | | 3 | 83.348.444,00 | | | | | 0,00% | 0,00% | UPTD Balai Pemuliaan Ikan | |
| | | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah | | | | | 3 | 311.284.560,00 | | | | | 50,00% | 9,03% | UPTD Balai Pemuliaan Ikan | |
| | | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis MBD yang dipelihara (Unit) | | | | | 4 | 201.617.950,00 | | | | | 0,00% | 17,70% | UPTD Balai Pemuliaan Ikan | |
| | | | Survey Kepuasan Pelayanan Internal UPTD LPPMHP | | | | | | | | | | | | | UPTD LPPMHP | |
| | | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah kegiatarr administrasi umum PD (Kegiatan) | | | | | 9 | 206.111.135,00 | | | | | 44,44% | 55,60% | UPTD LPPMHP | |
| | | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis Jasa Penunjanq Urusan Pemerintahan Daerah (Jenis) | | | | | 3 | 305.190.000,00 | | | | | 50,00% | 0,00% | UPTD LPPMHP | |
| | | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah jenis BMD yang dipelihara (Unit) | | | | | 53 | 61.498.972,00 | | | | | 0,00% | 11,76% | UPTD LPPMHP | |
| | | Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil | Luasan ruang laut pesisir dan pulau pulau kecil yang termanfaatkan (Ha) | | | | | 1.050.000 | | | | | | | | Dinas Kelautan dan Perikanan | |
| | | Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | Jumlah Alokasi Pengelolaan Ruang Laut (Lokasi) | | | | | 7 | 551.616.000,00 | | | | | 36,90% | 2,10% | Dinas Kelautan dan Perikanan | |
| | | Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil diLuar Minyak dan Gas | Jumlah Rekomendasi dan SOP yang diterbitkan | | | | | 10 | 217.775.000,00 | | | | | 0,00% | 13,98% | Dinas Kelautan dan Perikanan | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Bumi | (rekomendasi) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Jumlah Kelompok masyarakat pesisir yang diberdayakan dan dilakukan pembinaan (kelompok) | | | | | 13 | 568.936.000,00 | | | | | 0,00% | 0,29% | Dinas Kelautan dan Perikanan | |
| | | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap (%) | | | | | 1,87 | | | | | | | | Dinas Kelautan dan Perikanan | |
| | | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil | Jumlah Sarana dan Prasana Usaha Perikanan Tangkap (Unit) | | | | | 1254 | 15.469.253.507,00 | | | | | 0,00% | 0,06% | Dinas Kelautan dan Perikanan | |
| | | Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT | Jumlah Rekomendasi teknis perizinan usaha perikanan tangkap (rekomendasi) | | | | | 350 | 125.406.944,00 | | | | | 0,00% | 0,00% | Dinas Kelautan dan Perikanan | |
| | | Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi | 1. Jumlah lokasi pembangunan pelabuhan perikanan (pelabuhan perikanan) 2. Jumlah pelabuhan perikanan provinsi yang meningkat pengelolaannya (pelabuhan perikanan) | | | | | 7 | 43.394.533.493,00 | | | | | 0,51% | 2,09% | Dinas Kelautan dan Perikanan | |
| | | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya (%) | | | | | 4,2 | | | | | | | | Dinas Kelautan dan Perikanan | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah rekomendasi izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan (rekomendasi) | | | | | 5 | 76.148.825,00 | | | | | 0,00% | 0,00% | Dinas Kelautan dan Perikanan | |
| | | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut | Jumlah Produksi budidaya perikanan laut (Ton) | | | | | 13120 | 1.167.894.619,00 | | | | | 43,41% | 18,51% | Dinas Kelautan dan Perikanan | |
| | | Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Di Laut (Paket) | Jumlah Sarana Prasarana Balai Benih yang di adakan | | | | | 11 | 4.976.537.108,00 | | | | | 9,09% | 15,05% | UPTD Balai Pemuliaan Ikan | |
| | | Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Di Laut | .lumlah Pembudidaya yang drbarrtu vaksinasi Perikanan serta Jumlah verifikasi kesehatan dan lingkungan budidaya yang telah memenuhi INDOGAP (Pelaku Usaha) | | | | | 100 | 105.195.000,00 | | | | | 0,00% | 0,00% | UPTD LPMMHP | |
| | | Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan | Persentase Pelaku Usaha yang Taat Aturan (%) | | | | | 75 | | | | | | | | Dinas Kelautan dan Perikanan | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil | 1. Jumlah Pelaku usaha kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil yang diawasi 2. Jumlah Pelaku usaha kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil yang dibina (Pelaku Usaha) | | | | | 129 | 3.995.354.802,00 | | | | | 19,38% | 7,25% | Dinas Kelautan dan Perikanan | |
| | | Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Pelaku usaha kelautan dan perikanan di wilayah sungai, danau,waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kab/kota dalam 1 daerah provinsi (pelaku usaha) | | | | | 50 | 34.315.716,00 | | | | | 0,00% | 0,00% | Dinas Kelautan dan Perikanan | |
| | | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Pertumbuhan Produksi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan | | | | | 3,3 | | | | | | | | Dinas Kelautan dan Perikanan | |
| | | Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Daerah Provinsi (rekomendasi) | | | | | 25 | 580.651.626,00 | | | | | 0,00% | 0,00% | Dinas Kelautan dan Perikanan | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar | Jumlah UPI yang dibina dalam rangka memenuhi standar sertifikasi mutu dan keamanan pangan hasil produk kelautan dan perikanan (UPI) | | | | | 125 | 180.988.095,00 | | | | | 0,00% | 0,00% | Dinas Kelautan dan Perikanan | |
| | | Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar | Jumlah UPI yang dibina dalam rangka memenuhi standar sertifikasi mutu dan keamanan pangan hasil produk kelautan dan perikanan (UPI) | | | | | 125 | 88.354.827,00 | | | | | 0,00% | 0,00% | UPTD LPMMHP | |
| | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH | | | 18.889.423.786,00 | | 0,00 | 3.168 | 10.870.926.312,40 | 4,14 | 741,19 | 289,50 | 5.145.318.735,00 | 369,81 | 2.044,72 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Nilai Sakip PD | 76 | 18.889.423.786,00 | | 0,00 | 3.168 | 10.870.926.312,40 | 4,14 | 741,19 | 289,50 | 5.145.318.735,00 | 369,81 | 2.044,72 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | |
| | | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 | 105.000.000,00 | | 0,00 | 12 | 95.320.867,00 | 0,20 | 29,64 | 1,00 | 19.449.795,00 | 20,00 | 24,31 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | |
| | | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | 5 | 80.000.000,00 | | | 5 | 65.624.539,00 | 0,20 | 29,64 | 1,00 | 19.449.795,00 | 20,00 | 24,31 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | |
| | | Sub Kegiatan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah | | 7 | 25.000.000,00 | | | 7 | 29.696.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | |
| | | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Survey Kepuasan Pelayanan Keuangan | 76 | 15.071.290.904,00 | | 0,00 | 75 | 9.118.328.253,40 | 0,50 | 49,14 | 6,00 | 4.480.318.091,00 | 5,41 | 29,73 | Dinas Kebudayaan dan | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Pariwisata | |
| | | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | 111 | 15.071.290.904,00 | | | 12 | 9.118.328.253,40 | 0,50 | 49,14 | 6,00 | 4.480.318.091,00 | 5,41 | 29,73 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | |
| | | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | 1 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | |
| | | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | 14 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | |
| | | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Survey Kepuasan Pelayanan Kepegawaian | 76 | 35.000.000,00 | | 0,00 | 75 | 36.793.323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | |
| | | Sub Kegiatan Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | 20 | 35.000.000,00 | | | 15 | 36.793.323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | |
| | | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Survey Kepuasan Pelayanan Umum | 76 | 299.246.965,00 | | 0,00 | 75 | 428.128.431,00 | 2,06 | 424,37 | 239,50 | 208.996.071,00 | 206,21 | 410,02 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | |
| | | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | | 35 | 9.995.765,00 | | | 35 | 10.723.353,00 | 0,29 | 100,00 | 10,00 | 10.723.353,00 | 28,57 | 107,28 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | |
| | | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | 5 | 0,00 | | | 5 | 6.886.735,00 | 0,40 | 58,31 | 2,00 | 4.015.436,00 | 40,00 | 0,00 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | 9 | 3.731.200,00 | | | 9 | 5.602.877,00 | 0,11 | 3,30 | 1,00 | 185.000,00 | 11,11 | 4,96 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | |
| | | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan | | 121 | 26.000.000,00 | | | 121 | 42.200.503,00 | 0,17 | 29,85 | 20,00 | 12.595.848,00 | 16,53 | 48,45 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | |
| | | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | 2.000 | 30.000.000,00 | | | 2.000 | 5.564.589,00 | 0,10 | 53,91 | 200,00 | 3.000.000,00 | 10,00 | 10,00 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | |
| | | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan / Material | | 1 | 60.000.000,00 | | | 1 | 35.235.554,00 | 0,40 | 96,48 | 0,40 | 33.994.477,00 | 40,00 | 56,66 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | |
| | | Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | 1 | 28.000.000,00 | | | 1 | 83.317.820,00 | 0,10 | 33,76 | 0,10 | 28.130.000,00 | 10,00 | 100,46 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | |
| | | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | 12 | 141.520.000,00 | | | 12 | 238.597.000,00 | 0,50 | 48,77 | 6,00 | 116.351.957,00 | 50,00 | 82,22 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | |
| | | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Survey Kepuasan Pelayanan Umum | 76 | 0,00 | | 0,00 | 75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | |
| | | Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | 5 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | |
| | | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Survey Kepuasan Pelayanan Umum | 76 | 3.190.426.876,00 | | 0,00 | 75 | 819.899.544,00 | 1,16 | 174,33 | 41,00 | 353.467.800,00 | 115,97 | 1.536,25 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | |
| | | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | 175 | 8.050.676,00 | | | 175 | 296.899.920,00 | 0,11 | 41,02 | 20,00 | 121.800.000,00 | 11,43 | 1.512,92 | Dinas Kebudayaan dan | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Pariwisata | |
| | | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik | | 12 | 426.000.000,00 | | | 12 | 203.400.000,00 | 0,50 | 43,24 | 6,00 | 87.950.229,00 | 50,00 | 20,65 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | |
| | | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | 20 | 0,00 | | | 20 | 150.800.000,00 | 0,50 | 46,15 | 10,00 | 69.600.000,00 | 50,00 | 0,00 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | |
| | | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | 110 | 2.756.376.200,00 | | | 110 | 168.799.624,00 | 0,05 | 43,91 | 5,00 | 74.117.571,00 | 4,55 | 2,69 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | |
| | | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Survey Kepuasan Pelayanan Umum | 76 | 188.459.041,00 | | 0,00 | 75 | 372.455.894,00 | 0,22 | 63,71 | 2,00 | 83.086.978,00 | 22,22 | 44,41 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | |
| | | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | 9 | 160.109.041,00 | | | 9 | 219.260.000,00 | 0,22 | 32,43 | 2,00 | 71.106.978,00 | 22,22 | 44,41 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | |
| | | Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel | | 1 | 2.500.000,00 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | |
| | | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | 24 | 25.850.000,00 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | 2 | 0,00 | | | 2 | 114.899.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | |
| | | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | 2 | 0,00 | | | 2 | 38.296.017,00 | 0,00 | 31,28 | 0,00 | 11.980.000,00 | 0,00 | 0,00 | UPT BALAI PENGEMBANGAN PARIWISATA PULAU BELITUNG | |
| | | Kegiatan Padministrasi Umum Perangkat Daerah | Survey Kepuasan Pelayanan Umum UPTD | 76 | 204.119.680,00 | | 0,00 | 75 | 115.024.006,00 | | | | | | | UPT Balai Pengembangan Pariwisata Pulau Belitung | |
| | | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | | 25 | 5.000.000,00 | | | 20 | 4.996.065,00 | 0,50 | 44,26 | 10,00 | 2.211.331,00 | 40,00 | 44,23 | UPT Balai Pengembangan Pariwisata Pulau Belitung | |
| | | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | 5 | 15.000.000,00 | | | 5 | 14.999.501,00 | 0,20 | 18,73 | 1,00 | 2.808.740,00 | 20,00 | 18,72 | UPT Balai Pengembangan Pariwisata Pulau Belitung | |
| | | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | 30 | 15.000.000,00 | | | 30 | 14.999.050,00 | 0,17 | 41,25 | 5,00 | 6.186.400,00 | 16,67 | 41,24 | UPT Balai Pengembangan Pariwisata Pulau Belitung | |
| | | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan | | 50 | 9.300.000,00 | | | 50 | 9.284.889,00 | 0,24 | 36,42 | 12,00 | 3.381.697,00 | 24,00 | 36,36 | UPT Balai Pengembangan Pariwisata | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Pulau Belitung | |
| | | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | 50 | 3.600.000,00 | | | 50 | 3.600.000,00 | 0,12 | 16,67 | 6,00 | 600.000,00 | 12,00 | 16,67 | UPT Balai Pengembangan Pariwisata Pulau Belitung | |
| | | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan / Material | | 1 | 20.000.000,00 | | | 1 | 19.999.862,00 | 0,20 | 43,41 | 0,20 | 8.681.122,00 | 20,00 | 43,41 | UPT Balai Pengembangan Pariwisata Pulau Belitung | |
| | | Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | 1 | 71.219.680,00 | | | 1 | 21.077.118,00 | 0,40 | 25,68 | 0,40 | 5.412.000,00 | 40,00 | 7,60 | UPT Balai Pengembangan Pariwisata Pulau Belitung | |
| | | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | 12 | 65.000.000,00 | | | 12 | 26.067.521,00 | 0,50 | 19,86 | 6,00 | 5.176.200,00 | 50,00 | 7,96 | UPT Balai Pengembangan Pariwisata Pulau Belitung | |
| | | Kegiatan Padministrasi Umum Perangkat Daerah | Survey Kepuasan Pelayanan Umum UPTD | 76 | 0,00 | | 0,00 | 75 | 205.996.287,00 | | | | | | | UPT Balai Pengembangan Pariwisata Pulau Belitung | |
| | | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | 175 | 0,00 | | | 75 | 205.300.000,00 | 0,11 | 43,66 | 8,00 | 89.640.000,00 | 4,57 | 0,00 | UPT Balai Pengembangan Pariwisata Pulau Belitung | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | 110 | 0,00 | | | 50 | 696.287,00 | 0,30 | 4.101,88 | 15,00 | 28.560.860,00 | 13,64 | 0,00 | UPT Balai Pengembangan Pariwisata Pulau Belitung | |
| | | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Persentase Pangsa Pasar Wisatawan Daerah | 9,70 | 700.000.000,00 | | 0,00 | 9,70 | 1.867.849.400,00 | | | | | | | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | |
| | | Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi | Jumlah Daya Tarik Wisata Provinsi Yang Terkelola | 1 | 250.000.000,00 | | 0,00 | 1 | 335.714.654,00 | | | | | | | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | |
| | | Sub Kegiatan Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi | | 1 | 250.000.000,00 | | | 1 | 335.714.654,00 | 0,10 | 0,24 | 0,10 | 820.000,00 | 10,00 | 0,33 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | |
| | | Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | Jumlah Kawasan Strategis Provinsi yang di Kelola | 1 | 350.000.000,00 | | 0,00 | 1 | 354.791.862,00 | | | | | | | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | |
| | | Sub Kegiatan Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | | 1 | 350.000.000,00 | | | 1 | 354.791.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | |
| | | Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi | Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikelola | 1 | 100.000.000,00 | | 0,00 | 1 | 1.177.342.884,00 | | | | | | | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | |
| | | Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi | | 1 | 0,00 | | | 1 | 399.850.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi | | 30 | 100.000.000,00 | | | 30 | 777.491.916,00 | 0,17 | 0,51 | 5,00 | 3.974.000,00 | 16,67 | 3,97 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | |
| | | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | Persentase Pangsa Pasar Wisatawan Daerah | 9,70 | 1.376.983.655,00 | | 0,00 | 9,70 | 1.113.819.938,00 | | | | | | | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | |
| | | Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | Jumlah Media Promosi Pariwisata | 16 | 1.376.983.655,00 | | 0,00 | 16 | 1.113.819.938,00 | | | | | | | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | |
| | | Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melaui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | | 1 | 100.000.000,00 | | | 1 | 375.740.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | |
| | | Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri | | 4 | 200.000.000,00 | | | 4 | 178.490.923,00 | 0,25 | 3,92 | 1,00 | 7.000.000,00 | 25,00 | 3,50 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | |
| | | Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi Baik Dalam dan Luar Negeri | | 3 | 1.076.983.655,00 | | | 3 | 559.588.402,00 | 0,33 | 15,34 | 1,00 | 85.864.391,00 | 33,33 | 7,97 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif terlatih dan tersertifikasi | 6,75 | 540.422.494,00 | | 0,00 | 6,75 | 612.670.421,00 | | | | | | | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan | Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif terlatih dan tersertifikasi | 80 | 540.422.494,00 | | 0,00 | 80 | 612.670.421,00 | | | | | | | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | |
| | | Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | | 50 | 0,00 | | | 50 | 183.672.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | |
| | | Sub Kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi Berbasi Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan | | 40 | 310.000.000,00 | | | 40 | 305.773.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | |
| | | Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | | 40 | 230.422.494,00 | | | 40 | 123.224.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | |
| | | URUSAN PERTANIAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH (DINAS) | Nilai Sakip PD | 80,39 | Rp80.601.884.619,15 | | | 79,89 | Rp31.667.017.009,00 | 1,00 | Rp0,4394 | 79,68 | Rp13.914.531.737,00 | 0,99 | Rp0,17 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Renstra Perubahan |
| | | | Survey Kepuasan Internal | 80 | | | | 80 | | 0,57 | | 45,61 | Rp0,00 | 0,57 | Rp0,00 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Renstra Perubahan |
| | | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi | 14 | Rp1.274.950.000,00 | | | 14 | Rp568.249.451,00 | 0,50 | Rp0,02 | 7,00 | Rp9.181.085,00 | 0,50 | Rp0,01 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Renstra Perubahan |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Survey kepuasan pelayanan keuangan | 90 | Rp60.695.338.636,50 | | | 90 | Rp23.242.965.238,00 | 0,56 | Rp0,61 | 50,00 | Rp14.086.932.153,00 | 0,56 | Rp0,23 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Renstra Perubahan |
| | | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Survey kepuasan pelayanan kepegawaian | 80 | Rp594.862.000,00 | | | 80 | Rp237.077.316,00 | 0,11 | Rp0,06 | 8,70 | Rp14.500.000,00 | 0,11 | Rp0,02 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Renstra Perubahan |
| | | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Survey kepuasan pelayanan umum | 80 | Rp3.364.155.732,65 | | | 80 | Rp1.340.298.403,00 | 0,12 | Rp0,10 | 9,78 | Rp136.576.175,00 | 0,12 | Rp0,04 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Renstra Perubahan |
| | | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Survey kepuasan pelayanan umum | 80 | Rp1.407.390.000,00 | | | 80 | Rp408.263.352,00 | 0,00 | Rp0,00 | 0,00 | Rp0,00 | 0,00 | Rp0,00 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Renstra Perubahan |
| | | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Survey kepuasan penyediaan jasa penunjang | 80 | Rp13.265.188.250,00 | | | 80 | Rp5.870.163.249,00 | 0,63 | Rp0,45 | 50,00 | Rp2.664.173.005,00 | 0,63 | Rp0,20 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Renstra Perubahan |
| | | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Survey Kepuasan Pelayanan Umum | 80 | Rp3.196.636.985,00 | | | 80 | Rp1.087.176.911,00 | 0,09 | Rp0,05 | 7,17 | Rp53.757.000,00 | 0,09 | Rp0,02 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Renstra Perubahan |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD BPSMB) | | 80 | Rp0,00 | | | 1 | Rp222.591.920,00 | 13,90 | Rp0,10 | 13,90 | Rp21.462.593,00 | 31,28 | #DIV/0! | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Renstra Perubahan |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Survey kepuasan pelayanan umum | 80 | | | | 80 | Rp60.159.920,00 | 0,00 | Rp0,00 | 0,32 | Rp0,00 | 0,00 | #DIV/0! | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Renstra Perubahan |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Survey kepuasan penyediaan jasa penunjang | 80 | | | | 80 | Rp61.500.000,00 | 0,63 | Rp0,35 | 50,00 | Rp21.462.593,00 | 0,63 | #DIV/0! | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Renstra Perubahan |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Survey Kepuasan Pelayanan Umum | 80 | | | | 80 | Rp100.932.000,00 | 0,00 | Rp0,00 | 0,00 | Rp0,00 | 0,00 | #DIV/0! | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Renstra Perubahan |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD BALAI BENIH) | | 80 | Rp0,00 | | | 1 | Rp449.868.502,00 | 10,33 | Rp0,03 | 10,33 | Rp15.705.887,00 | 0,13 | #DIV/0! | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Renstra Perubahan |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Survey kepuasan pelayanan umum | 80 | | | | 80 | Rp60.996.331,00 | 0,01 | Rp0,00 | 1,15 | Rp0,00 | 0,01 | #DIV/0! | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Renstra Perubahan |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Survey kepuasan penyediaan jasa penunjang | 80 | | | | 80 | Rp91.500.000,00 | 0,63 | Rp0,17 | 50,00 | Rp15.705.887,00 | 0,63 | #DIV/0! | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Renstra Perubahan |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Survey Kepuasan Pelayanan Umum | 80 | | | | 80 | Rp297.372.171,00 | 0,00 | Rp0,00 | 0,00 | Rp0,00 | 0,00 | #DIV/0! | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Renstra Perubahan |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD BALAI PROTEKSI) | | 80 | Rp233.725.183,00 | | | 1 | Rp233.725.183,00 | 19,74 | Rp0,15 | 19,74 | Rp35.122.845,00 | 0,25 | Rp0,15 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Renstra Perubahan |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Survey kepuasan pelayanan umum | 80 | Rp58.162.602,00 | | | 80 | Rp58.162.602,00 | 0,01 | Rp0,00 | 0,66 | Rp0,00 | 0,01 | Rp0,00 | Dinas Pertanian dan Ketahanan | Renstra Perubahan |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Pangan | |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Survey kepuasan penyediaan jasa penunjang | 80 | Rp91.500.000,00 | | | 80 | Rp91.500.000,00 | 0,63 | Rp0,38 | 50,00 | Rp35.122.845,00 | 0,63 | Rp0,38 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Renstra Perubahan |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Survey Kepuasan Pelayanan Umum | 80 | Rp84.062.581,00 | | | 80 | Rp84.062.581,00 | 0,00 | Rp0,00 | 0,00 | Rp0,00 | 0,00 | Rp0,00 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Renstra Perubahan |
| | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Persentase terawasinya peredaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung peningkatan produksi | 100 | Rp322.500.000,00 | | | 100 | Rp10.455.145.626,00 | | | | | | | | |
| | | | Persentase peningkatan luas tanam Tanaman Pangan & Hortikultura : | 83,32 | Rp2.203.750.000,00 | | | 69,58 | | 0,00 | Rp0,05 | 0,00 | Rp12.965.030,00 | 0,00 | Rp0,04 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Renstra Perubahan |
| | | | - Luas tanam Tanaman Pangan | 69,58 | | | | 69,58 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | Rp0,00 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Renstra Perubahan |
| | | | - Luas tanam Hortikultura | 14,21 | | | | 14,21 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | Rp0,00 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Renstra Perubahan |
| | | | Persentase peningkatan luas tanam perkebunan | 11,96 | Rp2.300.500.000,00 | | | 10,17 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | Rp0,00 | Dinas Pertanian dan Ketahanan | Renstra Perubahan |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Pangan | |
| | | | Persentase benih/bibit pertanian berlabel dan bersertifikat | 5 | Rp688.000.000,00 | | | 5 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | Rp0,00 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Renstra Perubahan |
| | | | Persentase varietas pertanian yang ditetapkan | 5 | Rp430.000.000,00 | | | 5 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | Rp0,00 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Renstra Perubahan |
| | | | Persentase Ketersediaan benih/bibit pertanian tingkat lapang (daerah) | 50 | Rp1.380.837.500,00 | | | 50 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | Rp0,00 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Renstra Perubahan |
| | | | Persentase Pertambahan Angka Kelahiran Ternak | 43,41 | Rp3.010.000.000,00 | | | 35,63 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | Rp0,00 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Renstra Perubahan |
| | | Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian | Dokumen pengawasan dan peredaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung peningkatan produksi | 1 | Rp322.500.000,00 | | | 1 | Rp135.654.866,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | Rp0,00 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Renstra Perubahan |
| | | Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman | | 100% | Rp2.415.000.000,00 | | | 100 | Rp7.826.170.706,00 | 0,00 | Rp0,05 | 0,00 | Rp6.974.700,00 | 0,00 | Rp0,02 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Renstra Perubahan |
| | | | Jumlah sertifikasi benih/bibit pertanian yang dikeluarkan | 3.075.000 | Rp320.000.000,00 | | | 3.075.000 | Rp688.000.000,00 | 0,00 | Rp0,00 | 0,00 | Rp0,00 | 0,00 | Rp0,00 | Dinas Pertanian dan Ketahanan | Renstra Perubahan |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Pangan | |
| | | | Jumlah laporan pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit pertanian | 7 | | | | 7 | | 0,00 | Rp0,00 | 0,00 | Rp0,00 | 0,00 | Rp0,00 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Renstra Perubahan |
| | | | Jumlah Luasan Benih/Bibit Tan Pangan & Hortikultura yang tersedia | 120 | Rp1.025.000.000,00 | | | 120 | Rp2.203.750.000,00 | 0,00 | Rp0,00 | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Renstra Perubahan |
| | | | - Luasan Benih/Bibit Tan Pangan | 120 | | | | 120 | | 0,00 | Rp0,00 | 0,00 | Rp0,00 | 0,00 | Rp0,00 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Renstra Perubahan |
| | | | - Luasan Benih/Bibit Hortikultura | 65 | | | | 65 | | 0,00 | Rp0,00 | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Renstra Perubahan |
| | | | Jumlah Luasan Bibit Perkebunan yang tersedia (Lada, Sawit, Karet, Kopi) | 185 | Rp1.070.000.000,00 | | | 185 | Rp2.300.500.000,00 | 0,00 | Rp0,00 | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Renstra Perubahan |
| | | Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi | Jumlah Kultivar/ varietas yang dinilai | 4 | Rp430.000.000,00 | | | 4 | Rp176.702.174,00 | 0,00 | Rp0,00 | 0,00 | Rp0,00 | 0,00 | Rp0,00 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Renstra Perubahan |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | Kualitas Mutu pakan ternak | 100 | Rp1.380.837.500,00 | | | 100 | Rp642.250.000,00 | 0,00 | Rp0,00 | 0,00 | Rp0,00 | 0,00 | Rp0,00 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Renstra Perubahan |
| | | Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain | Jumlah bantuan bibit ternak | 160 | Rp3.010.000.000,00 | | | 80 | Rp1.569.033.354,00 | 0,00 | Rp0,00 | 0,00 | Rp0,00 | 0,00 | Rp0,00 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Renstra Perubahan |
| | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Rasio Ketersediaan Prasarana Pertanian | | Rp6.020.000.000,00 | | | | Rp4.464.709.088,00 | 0,00 | Rp0,00 | 0,00 | Rp5.990.330,00 | 0,00 | Rp0,00 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Renstra Perubahan |
| | | | - Pra Panen | 15 | Rp4.300.000.000,00 | | | 15 | | | | | Rp159.420.000,00 | | | | |
| | | | - Pasca Panen | 5 | Rp1.720.000.000,00 | | | 5 | | 0,24 | Rp0,00 | 3,67 | Rp0,00 | 0,24 | Rp0,00 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Renstra Perubahan |
| | | Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian | Rasio Ketersediaan Prasarana Pertanian: | | Rp6.020.000.000,00 | | | | Rp4.464.709.088,00 | 0,00 | Rp0,00 | 0,00 | Rp0,00 | 0,00 | Rp0,00 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Renstra Perubahan |
| | | | - Pra Panen | 15 | Rp4.300.000.000,00 | | | 15 | | | | | | | | | Renstra Perubahan |
| | | | - Pasca Panen | 5 | Rp1.720.000.000,00 | | | 5 | | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | Rp0,00 | 0,00 | Rp0,00 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Renstra Perubahan |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular | 150 | Rp1.290.000.000,00 | | | 75 | Rp600.000.000,00 | 0,00 | Rp0,00 | 0,00 | Rp0,00 | 0,00 | Rp0,00 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Renstra Perubahan |
| | | Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Terkendalinya keamanan 7 Kab/Kota di wilayah Babel terhadap penyakit-penyakit zoonosis (Rabies dan AI) | 14 | Rp834.200.000,00 | | | 7 | Rp388.000.000,00 | 0,00 | Rp0,00 | 0,00 | Rp0,00 | 0,00 | Rp0,00 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Renstra Perubahan |
| | | Kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan | Tersertifikasinya unit usaha produk peternakan di Bangka Belitung (ber NKV/Nomor Kontrol Veteriner) | 2 | Rp455.800.000,00 | | | 1 | Rp212.000.000,00 | 0,00 | Rp0,00 | 0,00 | Rp0,00 | 0,00 | Rp0,00 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Renstra Perubahan |
| | | | | | | | | | | 5,00 | Rp0,01 | 5,00 | Rp2.111.121,00 | 2,50 | Rp0,00 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Renstra Perubahan |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Dokumen Laporan Pengendalian dan Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim (DPI) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi | Dokumen Pengendalian dan Penamggulangan Bencana Pertanian Provinsi | 3.500 2.010 | Rp510.625.000,00 | | | 3.500 2.010 | Rp92.906.655,00 | | | | | | | | |
| | | PROGRAM PENYULUHAN | Persentase peningkatan kelas | 80 | Rp2.246.250.000,00 | | | 0 | Rp975.000.000,00 | 0,00 | Rp0,03 | 0,00 | Rp2.325.300,00 | 0,00 | Rp0,00 | Dinas Pertanian | Renstra |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | PERTANIAN | kelompok tani | | | | | | | | | | | | | dan Ketahanan Pangan | Perubahan |
| | | Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian | Jumlah kelembagaan penyuluh pertanian yang dibina | 64 | Rp2.096.250.000,00 | | | 32 | Rp880.944.116,00 | 0,00 | Rp0,02 | 5,00 | Rp16.363.839,00 | 0,06 | Rp0,01 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Renstra Perubahan |
| | | URUSAN KEHUTANAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH | | | 9.955.809.597 | | 2.550.520.600 | | - | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Jumlah aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan | 100 | 6.786.415.098 | 100 | 1.941.370.000 | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Jumlah aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatan sarana dan prasarana perkantoran selama 12 bulan | 100 | 2.302.043.805 | 100 | 535.438.200 | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | Kegiatan Peningkatan Disiplin Aparatur | Jumlah aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya | 0 | 291.285.440 | 0 | - | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Jumlah aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya | 100 | 366.867.828 | 100 | - | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan | Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% | 6 dokumen | 106.743.976 | 6 dokumen | 28.625.000 | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Daerah diatas 85% | 4 dokumen | 78.791.400 | 4 dokumen | 45.087.400 | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | Kegiatan Penyusunan dan Operasionalisasi Sistem Database Kehutanan Berbasis IT | Tersedianya dan beroperasinya sistem informasi pembangunan Kehutanan berbasis Teknologi Informasi selama 12 bulan | 100 | 23.662.050 | 0 | - | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | | Indikator Tujuan: Persentase PDRB Sub Sektor Kehutanan | | | | | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | | Indikator Sasaran : Jumlah nilai hasil hutan kayu dan bukan kayu | | | | | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | Tujuan : Meningkatnya nilai produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu | | | | | | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | Sasaran: Meningkatnya nilai produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu | | | | | | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA DAN PEMAFAATAN KAWASAN HUTAN | | | 3.509.695.513 | | 195.433.997 | | - | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | Indikator Program: Persentase produksi hasil hutan kayu | | | | | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | Kegiatan Peningkatan Usaha Hasil Hutan Kayu | Jumlah izin usaha hasil hutan kayu | 4752 kubik | 326.299.300 | 4752 kubik | 109.574.000 | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | Kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kawasan Hutan | 3 dokumen | 366.487.197 | 3 dokumen | 56.211.597 | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | | Indikator Program: Persentase nilai hasil hutan bukan kayu | | | | | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | Kegiatan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu | Jumlah hasil hutan bukan kayu yang dikembangkan | 100 | 127.283.800 | 0 | 17.184.700 | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | Kegiatan Expo Pengembangan dan Promosi Hasil Hutan | Jumlah expo/promosi hasil hutan yang diikuti | 100 | 750.341.310 | 0 | - | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | Kegiatan Pemanfaatan Kawasan Hutan | Jumlah izin pemanfaatan kawasan | 10 izin | 233.080.140 | 2 izin | 7.173.700 | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | Kegiatan Pembangunan sumber benih dan konservasi ex situ Gaharu dan Pelawan | Luas sumber benih yang terbangun | 100 | 216.336.500 | 0 | 5.290.000 | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | Kegiatan Penyelesaian usulan perubahan status kawasan hutan / TORA | Luas penyelesaian perubahan status kawasan hutan/TORA | 50,6 | 102.031.300 | 0 | - | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Kegiatan Pembangunan Sarana dan prasarana KPH (DAK) | Terbangunnya kantor resort KPH (11 unit) | 100 | 1.387.835.966 | 0 | - | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | Sasaran : Menurunnya luas kerusakan hutan dan lahan | | | | | | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SDA DAN EKOSISTEM | | | 5.069.603.604 | | 1.862.509.900 | | - | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | | Persentase Kawasan Lindung | | | | | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | Kegiatan Identifikasi, Inventarisasi dan Pemanfaatan Kawasan Ekosistem Essensial | Jumlah kawasan ekosistem essensial yang terbentuk dan terjaga | 100 | 367.816.204 | 0 | - | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | Kegiatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Ekosistem Essensial | Jumlah kawasan ekosistem essensial yang terbentuk dan terjaga | 100 | 64.319.900 | 0 | 64.319.900 | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan | Luas penurunan kawasan hutan yang terbakar | 600 hektar | 577.502.200 | 600 hektar | 260.018.000 | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | | Persentase Penanganan Perkara Pidana Kehutanan | | | | | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | Kegiatan Penertiban Pelanggaran Tindak Pidana Kehutanan | Jumlah perkara yang ditangani | 2 perkara | 392.333.360 | 2 perkara | 189.700.000 | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Kegiatan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengamanan Hutan oleh POLHUT | Luas kawasan hutan yang dilindungi | 100 | 181.486.600 | 0 | - | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | Kegiatan Tenaga Pendukung Polisi Kehutanan | Jumlah Tenaga Pendukung Polisi Kehutanan | 100 | 971.789.630 | 0 | - | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | Kegiatan Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan | Jumlah Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan | 100 | 762.452.050 | 0 | - | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | Kegiatan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengamanan Hutan | Luas kawasan hutan yang dilindungi | 30 orang | 1.348.472.000 | 30 orang | 1.348.472.000 | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH) | luas kawasan hutan yang terlindungi | 100 | 403.431.660 | 0 | - | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | Tujuan : Meningkatkan tutupan lahan | Persentase tutupan lahan | | | | | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | Sasaran Program : Menurunya luas lahan kritis | Persentase luas lahan kritis | | | | | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN DAS DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | | | 5.682.600.820 | | 1.087.430.900 | | - | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | | Persentase DAS kritis yang di rehabilitasi | | | | | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai | Luas DAS kritis yang terehabilitasi | 200 hektar | 243.764.430 | 200 hektar | 37.865.000 | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Kegiatan Pemenuhan Kewajiban Rehabilitasi DAS bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) | Luas rehabilitasi DAS oleh pemegang IPPKH | 0 | 128.836.780 | 0 | - | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan | Luas rehabilitasi hutan dan lahan | 80 hektar | 1.034.352.796 | 80 hektar | 463.216.000 | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | Kegiatan Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan | Luas tegakan benih yang teridentifikasi dan terseleksi | 0 | 170.102.590 | 0 | - | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | | Jumlah dokumen penyelenggaran RHL | | | | | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | | Persentase luas kawasan Perhutanan Sosial | | | | | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | Kegiatan Pengembangan Perhutanan Sosial | Luas perhutanan sosial | 2168 hektar | 796.188.313 | 2168 hektar | 202.588.300 | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang disuluh | 0 | 397.879.802 | 0 | 3.392.600 | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | Kegiatan Penumbuhan dan pengembangan kelompok pecinta alam/pramuka | Jumlah kelompok kelompok pecinta alam/pramuka | 0 | 161.330.867 | 0 | 2.710.000 | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | Kegiatan Pembangunan sumber benih dan konservasi ex situ Gaharu dan Pelawan | Luas sumber benih yang terbangun | 0 | - | 0 | - | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Kegiatan Pembangunan Ruang terbuka hijau kompleks perkantoran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Luas ruang terbuka hijau | 0 | - | 0 | - | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | Kegiatan Sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif (DAK) | Jumlah kelompok | 0 | 497.478.631 | 0 | - | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | Rehabilitasi hutan dan lahan (DBH-DR Kehutanan) | Luas rehabilitasi lahan | 80 hektar | 605.569.750 | 80 hektar | 377.659.000 | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | Kegiatan Rehabilitasi hutan dan lahan di KPHP Bubus Panca (DBH-DR Kehutanan) | Luas rehabilitasi lahan | | 92.703.500 | | | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | Kegiatan Rehabilitasi hutan dan lahan di KPHP Sigambir Kotawaringin (DBH-DR Kehutanan) | Luas rehabilitasi lahan | | - | | | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | Kegiatan Rehabilitasi hutan dan lahan di KPHP Sungai Sembulan (DBH-DR Kehutanan) | Luas rehabilitasi lahan | | 278.976.775 | | | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | Kegiatan Rehabilitasi hutan dan lahan di KPHP Muntai Palas (DBH-DR Kehutanan) | Luas rehabilitasi lahan | | 167.489.379 | | | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | Kegiatan Rehabilitasi hutan dan lahan di KPHP Rambat Menduyung (DBH-DR Kehutanan) | Luas rehabilitasi lahan | | 111.030.000 | | | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | Kegiatan Rehabilitasi hutan dan lahan di KPHP Jebu Bembang Antan (DBH-DR Kehutanan) | Luas rehabilitasi lahan | | 214.391.100 | | | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Kegiatan Rehabilitasi hutan dan lahan di KPHL Belantu Mendanau (DBH-DR Kehutanan) | Luas rehabilitasi lahan | | 397.445.664 | | | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | Kegiatan Rehabilitasi hutan dan lahan di KPHP Gunung Duren (DBH-DR Kehutanan) | Luas rehabilitasi lahan | | 385.060.443 | | | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | Rehabilitasi mangrove di kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat (DAK Kehutanan) | Luas rehabilitasi mangrove 5 Ha | 0 | - | 0 | - | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | Kegiatan Rehabilitasi mangrove di kecamatan Mendo barat Kabupaten Bangka (DAK Kehutanan) | Luas rehabilitasi mangrove 5 Ha | 0 | - | 0 | - | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | Sasaran : Meningkatnya pengelolaan kawasan hutan oleh Kesatuan Pengelonaan Hutan (KPH) | Indikator Sasaran : Persentase pengelolaan hutan oleh KPH | | | | | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | PROGRAM PENINGKATAN PELAYAN TEKNIS TATA KELOLA DISHUT | | | 3.910.758.353 | | 2.325.566.020 | | - | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | | Persentase penyelesaian usulan perubahan status kawasan hutan | | | | | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | Kegiatan Penyelesaian usulan perubahan status kawasan hutan / TORA | Luas penyelesaian perubahan status kawasan hutan/TORA | 0 | - | 0 | - | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | Indikator Program: Persentase Luas Kawasan Hutan yang dikelola KPH | | | | | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | Kegiatan Pelayanan Teknis UPTD KPHP Rambat Menduyung | Luas pengelolaan hutan KPHP Rambat Menduyung | 4000 hektar | 227.710.700 | 4000 hektar | 74.100.000 | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | Kegiatan Pelayanan Teknis UPTD KPHP Jebu Bembang Antan | Luas pengelolaan hutan oleh KPHP Jebu Bembang Antan | 5193 hektar | 243.260.245 | 5193 hektar | 73.125.000 | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | Kegiatan Pelayanan Teknis UPTD KPHP Sigambir Kotawaringin | Luas pengelolaan hutan oleh KPHP Sigambir Kotawaringin | 2120 hektar | 259.144.003 | 2120 hektar | 74.100.000 | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | Kegiatan Pelayanan Teknis UPTD KPHP UPTD KPHP Bubus Panca | Luas pengelolaan hutan oleh KPHP Bubus Panca | 2220 hektar | 214.137.198 | 2220 hektar | 72.965.000 | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | Kegiatan Pelayanan Teknis UPTD KPHP Sungai Sembulan | Luas pengelolaan hutan KPHP Sungai Sembulan | 17400 hektar | 327.331.539 | 17400 hektar | 73.524.700 | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | Kegiatan Pelayanan Teknis UPTD KPHP Muntai Palas | Luas pengelolaan hutan oleh KPHP Muntai Palas | 130 hektar | 252.894.550 | 130 hektar | 74.350.000 | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | Kegiatan Pelayanan Teknis UPTD KPHL Belantu Mendanau | Luas pengelolaan hutan oleh KPHL Belantu Mendanau | 1000 hektar | 333.594.060 | 1000 hektar | 74.500.000 | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | Kegiatan Pelayanan Teknis UPTD KPHP Gunung Duren | Luas pengelolaan hutan oleh KPHP Gunung Duren | 38000 hektar | 315.634.738 | 38000 hektar | 71.850.000 | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD KPHP Rambat Menduyung | Jumlah aparatur yang terlayani selama 12 bulan | 18 orang | 208.110.000 | 18 orang | 208.110.000 | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD KPHP Jebu Bembang Antan | Jumlah aparatur yang terlayani selama 12 bulan | 16 orang | 199.252.000 | 16 orang | 199.252.000 | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD KPHP Bubus Panca | Jumlah aparatur yang terlayani selama 12 bulan | 22 orang | 200.006.520 | 22 orang | 200.006.520 | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD KPHP Sigambir Kotawaringin | Jumlah aparatur yang terlayani selama 12 bulan | 20 orang | 199.170.000 | 20 orang | 199.170.000 | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD KPHP Sungai Sembulan | Jumlah aparatur yang terlayani selama 12 bulan | 26 orang | 226.350.000 | 26 orang | 226.350.000 | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD KPHP Muntai Palas | Jumlah aparatur yang terlayani selama 12 bulan | 22 orang | 220.231.200 | 22 orang | 220.231.200 | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD KPHL Belantu Mendanau | Jumlah aparatur yang terlayani selama 12 bulan | 23 orang | 245.000.000 | 23 orang | 245.000.000 | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD KPHP Gunung Duren | Jumlah aparatur yang terlayani selama 12 bulan | 33 orang | 238.931.600 | 33 orang | 238.931.600 | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | Sub Kegiatan Verifikasi Mutu Produk | | | | | | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Pengujian | | | | | | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Kalibrasi | | | | | | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | | | | | | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | Kegiatan Pelaksanaan Promosi Produk dalam Negeri | | | | | | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | Sub Kegiatan Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi | | | | | | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | Kegiatan Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri | | | | | | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | Sub Kegiatan Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi | | | | | | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | Perindustrian | | | | | | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | | | | | | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi | | | | | | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri | | | | | | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri | | | | | | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | | | | | | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | | | | | | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan provinsi | | | | | | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | | | | | | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) | | | | | | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) | | | | | | | | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | | | 31.385.397.632 | | | | 35.110.137.077 | | ########## | | 7.682.752.615 | | 5.430.382.233 | Dinas Kehutanan | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | 31.352.398.132 | | | | 29.319.346.193 | | ########## | | 7.059.207.298 | | 5.430.382.233 | Dinas Kehutanan | |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Indikator Program : Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 85 | 9.611.068 | | | 83 | 113.962.499 | | 8.491.750 | | 8.491.750 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan PD | | 9.611.068 | | | 10 dokumen | 77.900.239 | | 6.031.750 | | 6.031.750 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evalusi kinerja PD (Dalev Renja, LKPJ, LAKIP, LPPD) | | 10.000.000 | | | 3 dokumen | 36.062.260 | | 7 | | 2.460.000 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Survey kepuasan pelayanan keuangan | | 25.858.055.299 | | | 4 dokumen | 25.874.941.555 | | - | | 6.283.243.724 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan Tunjangan ASN | | 25.848.055.299 | | | 1 dokumen | 25.854.186.555 | | - | | 6.277.503.724 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan | | 10.000.000 | | | 3 dokumen | 20.755.000 | | 28 | | 5.740.000 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Survey kepuasan pelayanan kepegawaian | 100 | 31.342.787.064 | | | 100 | 19.999.958 | | 27.152 | | 5.430.382.233 | | 17 | Dinas Kehutanan | |
| | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat | 241 | 25.549.461.064 | | | 241 | 19.999.958 | | 27.152 | | 5.430.382.233 | | 21 | Dinas Kehutanan | |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Survey kepuasan pelayanan umum | 241 | 25.519.461.064 | | | 241 | 1.036.851.257 | | 546 | | 5.656.478.461 | | 22 | Dinas Kehutanan | |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan | Jumlah komponen instalasi listrik | 1 Laporan | 10.000.000 | | | 1 Laporan | 4.996.189 | | 851.000 | | 851.000 | | - | Dinas Kehutanan | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor | 2 Laporan | 5.000.000 | | | 2 Laporan | 149.956.076 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah jenis penyediaan bahan logistis kantor Dinas Kehutanan | 12 laporan | 5.000.000 | | | 12 laporan | 15.000.000 | | 2.191.500 | | 2.191.500 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 1 laporan | 5.000.000 | | | 1 laporan | 38.724.110 | | 14.009.050 | | 14.009.050 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - Dinhut | Jumlah penggandaan di Dinas Kehutanan | 1 laporan | 5.000.000 | | | 1 laporan | 14.749.716 | | 6.615.500 | | 6.615.500 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Rambat Menduyung | Jumlah penggandaan di UPTD KPHP Rambat Menduyung | 241 | 5.743.326.000 | | | 241 | 2.999.500 | | 1.499.750 | | 1.499.750 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Jebu Bembang Antan | Jumlah penggandaan di UPTD KPHP Jebu Bembang Antan | | 23.100.000 | | | | 2.999.164 | | 326.450 | | 326.450 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Bubus Panca | Jumlah penggandaan di UPTD KPHP Bubus Panca | | 8.400.000 | | | | 2.999.410 | | 602.750 | | 602.750 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Sigambir Kotawaringin | Jumlah penggandaan di UPTD KPHP Sigambir Kotawaringin | 48 surat/ barang | 2.400.000 | | | 48 surat/ barang | 2.999.500 | | 1.862.100 | | 1.862.100 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Sungai Sembulan | Jumlah penggandaan di UPTD KPHP Sungai Sembulan | 12 surat/ barang | 750.000 | | | 12 surat/ barang | 2.978.320 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Muntai Palas | Jumlah penggandaan di UPTD KPHP Muntai | 12 surat/ barang | 750.000 | | | 12 surat/ barang | 2.999.500 | | 999.000 | | 999.000 | | - | Dinas Kehutanan | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | Palas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - UPT KPH Belantu Mendanau | Jumlah penggandaan di UPTD KPHL Belantu Mendanau | 12 surat/ barang | 750.000 | | | 12 surat/ barang | 2.999.500 | | 1.347.500 | | 1.347.500 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Gunung Duren | Jumlah penggandaan di UPTD KPHP Gunung Duren | 12 surat/ barang | 750.000 | | | 12 surat/ barang | 2.999.500 | | 756.000 | | 756.000 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Penyediaan Bahan/Material | 12 surat/ barang | 750.000 | | | 12 surat/ barang | 137.141.882 | | 59.007.805 | | 59.007.805 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - Dinhut | Jumlah Penyediaan Bahan/Material Dinas Kehutanan | 12 surat/ barang | 750.000 | | | 12 surat/ barang | 51.747.829 | | 16.434.000 | | 16.434.000 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Rambat Menduyung | Jumlah Penyediaan Bahan/Material di UPTD KPHP Rambat Menduyung | 12 surat/ barang | 750.000 | | | 12 surat/ barang | 8.249.821 | | 4.014.120 | | 4.014.120 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Jebu Bembang Antan | Jumlah Penyediaan Bahan/Material di UPTD KPHP Jebu Bembang Antan | 12 surat/ barang | 750.000 | | | 12 surat/ barang | 6.749.592 | | 3.268.854 | | 3.268.854 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Bubus Panca | Jumlah Penyediaan Bahan/Material di UPTD KPHP Bubus Panca | | 14.700.000 | | | | 8.998.782 | | 1.764.000 | | 1.764.000 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Sigambir Kotawaringin | Jumlah Penyediaan Bahan/Material di UPTD KPHP Sigambir Kotawaringin | 1500 Lembar | 7.500.000 | | | 1500 Lembar | 10.496.341 | | 3.641.600 | | 3.641.600 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Sungai Sembulan | Jumlah Penyediaan Bahan/Material di UPTD KPHP Sungai Sembulan | 175 Lembar | 900.000 | | | 175 Lembar | 10.498.220 | | 2.697.500 | | 2.697.500 | | - | Dinas Kehutanan | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | - UPT KPH Muntai Palas | Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah di UPTD KPHP Muntai Palas | 175 Lembar | 900.000 | | | 175 Lembar | 8.998.406 | | 4.126.750 | | 4.126.750 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Belantu Mendanau | Jumlah Penyediaan Bahan/Material di UPTD KPHP Belantu Mendanau | 175 Lembar | 900.000 | | | 175 Lembar | 15.653.805 | | 7.839.895 | | 7.839.895 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Gunung Duren | Jumlah Penyediaan Bahan/Material di UPTD KPHP Gunung Duren | 175 Lembar | 900.000 | | | 175 Lembar | 15.749.086 | | 15.221.086 | | 15.221.086 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah | 175 Lembar | 900.000 | | | 175 Lembar | 691.033.000 | | 150.036.873 | | 150.036.873 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - Dinhut | Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah Dinas Kehutanan | 175 Lembar | 900.000 | | | 175 Lembar | 286.468.000 | | 70.306.686 | | 70.306.686 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Rambat Menduyung | Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah di UPTD KPHP Rambat Menduyung | 175 Lembar | 900.000 | | | 175 Lembar | 42.116.000 | | 13.340.000 | | 13.340.000 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Jebu Bembang Antan | Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah di UPTD KPHP Jebu Bembang Antan | 175 Lembar | 900.000 | | | 175 Lembar | 44.592.000 | | 4.460.000 | | 4.460.000 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Bubus Panca | Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah di UPTD KPHP Bubus Panca | | 249.900.000 | | | | 40.686.000 | | 7.941.000 | | 7.941.000 | | - | Dinas Kehutanan | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | - UPT KPH Sigambir Kotawaringin | Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah di UPTD KPHP Sigambir Kotawaringin | | 189.900.000 | | | | 40.155.000 | | 14.890.000 | | 14.890.000 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Sungai Sembulan | Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah di UPTD KPHP Sungai Sembulan | 12 bulan | 100.000.000 | | | 12 bulan | 60.479.000 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Muntai Palas | Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah di UPTD KPHP Muntai Palas | 12 bulan | 9.400.000 | | | 12 bulan | 57.122.000 | | 13.351.000 | | 13.351.000 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Belantu Mendanau | Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah di UPTD KPHP Belantu Mendanau | 12 bulan | 12.000.000 | | | 12 bulan | 59.728.000 | | 14.694.583 | | 14.694.583 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Gunung Duren | Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah di UPTD KPHP Gunung Duren | 12 bulan | 12.000.000 | | | 12 bulan | 59.687.000 | | 11.053.604 | | 11.053.604 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Survey kepuasan pelayanan umum | 12 bulan | 10.000.000 | | | 12 bulan | 1.439.823.434 | | 601.673.123 | | 413.857.298 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah jasa surat menyurat | 12 bulan | 13.000.000 | | | 12 bulan | 23.048.000 | | 1.584.800 | | 1.584.800 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - Dinhut | Jumlah barang yang dikirim Dinas Kehutanan | 12 bulan | 10.000.000 | | | 12 bulan | 9.899.000 | | 120.000 | | 120.000 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Rambat Menduyung | Jumlah barang yang dikirim di UPTD KPHP Rambat Menduyung | 12 bulan | 10.000.000 | | | 12 bulan | 1.650.000 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | - UPT KPH Jebu Bembang Antan | Jumlah barang yang dikirim di UPTD KPHP Jebu Bembang Antan | 12 bulan | 13.500.000 | | | 12 bulan | 1.650.000 | | 183.800 | | 183.800 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Bubus Panca | Jumlah barang yang dikirim di UPTD KPHP Bubus Panca | | 60.000.000 | | | | 1.650.000 | | 449.000 | | 449.000 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Sigambir Kotawaringin | Jumlah barang yang dikirim di UPTD KPHP Sigambir Kota Waringin | 12 bulan | 36.000.000 | | | 12 bulan | 1.650.000 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Sungai Sembulan | Jumlah barang yang dikirim di UPTD KPHP Sungai Sembulan | 12 bulan | 3.000.000 | | | 12 bulan | 1.650.000 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Muntai Palas | Jumlah barang yang dikirim di UPTD KPHP Munai Palas | 12 bulan | 3.000.000 | | | 12 bulan | 1.640.000 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Belantu Mendanau | Jumlah barang yang dikirim di UPTD KPHL Belantu Mendanau | 12 bulan | 3.000.000 | | | 12 bulan | 1.627.000 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Gunung Duren | Jumlah barang yang dikirim di UPTD KPHP Gunung Duren | 12 bulan | 3.000.000 | | | 12 bulan | 1.632.000 | | 832.000 | | 832.000 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 bulan | 3.000.000 | | | 12 bulan | 249.800.000 | | 63.722.828 | | 49.907.003 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - Dinhut | Jumlah tagihan listrik di dinas kehutanan | 12 bulan | 3.000.000 | | | 12 bulan | 136.000.000 | | 30.254.372 | | 16.438.547 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Rambat Menduyung | Jumlah tagihan listrik di UPTD KPHP Rambat Menduyung | 12 bulan | 3.000.000 | | | 12 bulan | 12.400.000 | | 2.669.000 | | 2.669.000 | | - | Dinas Kehutanan | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | - UPT KPH Jebu Bembang Antan | Jumlah tagihan listrik di UPTD KPHP Jebu Bembang Antan | 12 bulan | 3.000.000 | | | 12 bulan | 15.000.000 | | 8.965.000 | | 8.965.000 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Bubus Panca | Jumlah tagihan listrik di UPTD KPHP Bubus Panca | | 77.650.000 | | | | 15.000.000 | | 2.987.500 | | 2.987.500 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Sigambir Kotawaringin | Jumlah tagihan listrik di UPTD KPHP Sigambir Kota Waringin | 9 Unit | 2.250.000 | | | 9 Unit | 13.000.000 | | 5.920.000 | | 5.920.000 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Sungai Sembulan | Jumlah tagihan listrik di UPTD KPHP Sungai Sembulan | 2 Orang | 75.400.000 | | | 2 Orang | 16.000.000 | | 3.476.195 | | 3.476.195 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Muntai Palas | Jumlah tagihan listrik di UPTD KPHP Munai Palas | | 2.453.500.000 | | | | 13.000.000 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Belantu Mendanau | Jumlah tagihan listrik di UPTD KPHL Belantu Mendanau | 11 Orang | 150.000.000 | | | 11 Orang | 12.900.000 | | 5.428.100 | | 5.428.100 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Gunung Duren | Jumlah tagihan listrik di UPTD KPHP Gunung Duren | 4 Orang | 16.500.000 | | | 4 Orang | 16.500.000 | | 4.022.661 | | 4.022.661 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlsh penyediaan jasa pelayanan umum kantor | 4 Orang | 1.143.500.000 | | | 4 Orang | 1.166.975.434 | | 536.365.495 | | 362.365.495 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - Dinhut | Jumlah jenis penyediaan jasa kebersihan | 4 Orang | 1.143.500.000 | | | 4 Orang | 1.142.995.175 | | 527.314.900 | | 353.314.900 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Rambat Menduyung | Jumlah jenis penyediaan jasa kebersihan | 4 Orang | - | | | 4 Orang | 3.000.000 | | 1.481.400 | | 1.481.400 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Jebu Bembang Antan | Jumlah jenis penyediaan jasa kebersihan | 4 Orang | - | | | 4 Orang | 2.999.735 | | 1.122.533 | | 1.122.533 | | - | Dinas Kehutanan | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | - UPT KPH Bubus Panca | Jumlah jenis penyediaan jasa kebersihan | 4 Orang | - | | | 4 Orang | 2.998.056 | | 596.000 | | 596.000 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Sigambir Kotawaringin | Jumlah jenis penyediaan jasa kebersihan | 4 Orang | - | | | 4 Orang | 2.994.742 | | 1.486.400 | | 1.486.400 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Sungai Sembulan | Jumlah jenis penyediaan jasa kebersihan | 4 Orang | - | | | 4 Orang | 2.996.099 | | 1.365.000 | | 1.365.000 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Muntai Palas | Jumlah jenis penyediaan jasa kebersihan | | - | | | | 2.992.365 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Belantu Mendanau | Jumlah jenis penyediaan jasa kebersihan | | - | | | | 3.000.000 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Gunung Duren | Jumlah jenis penyediaan jasa kebersihan | 25 Jenis | - | | | 25 Jenis | 2.999.262 | | 2.999.262 | | 2.999.262 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah alah bahan kebersihan UPTD KPHP Rambat Menduyung | 15 jenis | 3.000.000 | | | 15 jenis | 833.767.490 | | 127.518.298 | | 127.518.298 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan operasional Roda 4 eselon II yang dipelihara di dinas Kehutanan | 1 Unit | 3.000.000 | | | 15 jenis | 39.550.000 | | 3.678.000 | | 3.678.000 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan operasional Roda 4 dan roda 2 operasional yang dipelihara di dinas Kehutanan | 29 unit | 3.000.000 | | | 15 jenis | 654.489.400 | | 121.736.219 | | 121.736.219 | | - | Dinas Kehutanan | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | - Dinhut | Jumlah kendaraan operasional Roda 4 dan 2 yang dipelihara di dinas Kehutanan | 5 Unit | 3.000.000 | | | 15 jenis | 112.140.000 | | 20.964.508 | | 20.964.508 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Rambat Menduyung | Jumlah kendaraan operasional Roda Roda 4 dan 2 yang dipelihara di UPTD KPHP Rambat Menduyung | 1 Unit | 3.000.000 | | | 15 jenis | 62.173.200 | | 14.155.762 | | 14.155.762 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Jebu Bembang Antan | Jumlah kendaraan operasional Roda Roda 4 dan 2 yang dipelihara di UPTD KPHP Jebu Bembang Antan | 1 Unit | 3.000.000 | | | 15 jenis | 58.316.200 | | 7.327.713 | | 7.327.713 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Bubus Panca | Jumlah kendaraan operasional Roda Roda 4 dan 2 yang dipelihara di UPTD KPHP Bubus Panca | 1 Unit | 3.000.000 | | | 15 jenis | 65.120.000 | | 12.332.000 | | 12.332.000 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Sigambir Kotawaringin | Jumlah kendaraan operasional Roda Roda 4 dan 2 yang dipelihara di UPTD KPHP Sigambir Kotawaringin | 1 Unit | 3.000.000 | | | 15 jenis | 58.320.000 | | 13.840.000 | | 13.840.000 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Sungai Sembulan | Jumlah kendaraan operasional Roda Roda 4 dan 2 yang dipelihara di UPTD KPHP Sungai Sembulan | 1 Unit | 452.400.000 | | | 12 Orang | 61.820.000 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | - UPT KPH Muntai Palas | Jumlah kendaraan operasional Roda Roda 4 dan 2 yang dipelihara di UPTD KPHP Muntai Palas | 1 Unit | 15.000.000 | | | 15 Unit | 66.040.000 | | 29.086.000 | | 29.086.000 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Belantu Mendanau | Jumlah kendaraan operasional Roda Roda 4 dan 2 yang dipelihara di UPTD KPHL Belantu Mendanau | 1 Unit | 137.250.000 | | | | 85.260.000 | | 20.037.188 | | 20.037.188 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Gunung Duren | Jumlah kendaraan operasional Roda Roda 4 dan 2 yang dipelihara di UPTD KPHP Gunung Duren | 1 Unit | 51.750.000 | | | 100 jenis | 85.300.000 | | 3.993.048 | | 3.993.048 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | Pemeliharaan Mebel | Jumlah jenis penyediaan kelengkapan alat tulis kantor UPTD KPHP Rambat Menduyung | 2 jenis | 8.250.000 | | | 50 jenis | 5.000.000 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung yang dipelihara | 2 gedung | 6.750.000 | | | 50 jenis | 84.995.000 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara | 20 jenis | 9.000.000 | | | 50 jenis | 49.733.090 | | 2.104.079 | | 2.104.079 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - Dinhut | Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara | 4 jenis | 10.500.000 | | | 50 jenis | 33.970.000 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Rambat Menduyung | Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara | 2 jenis | 10.500.000 | | | 50 jenis | 1.981.377 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Jebu Bembang Antan | Jumlah sarana dan prasarana yang | 2 jenis | 9.000.000 | | | 50 jenis | 1.986.493 | | 967.779 | | 967.779 | | - | Dinas Kehutanan | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | dipelihara | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - UPT KPH Bubus Panca | Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara | 2 jenis | 15.750.000 | | | 50 jenis | 1.935.612 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Sigambir Kotawaringin | Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara | 2 jenis | 15.750.000 | | | 50 jenis | 1.999.880 | | 1.136.300 | | 1.136.300 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Sungai Sembulan | Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara | 2 jenis | 38.746.000 | | | | 1.944.800 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Muntai Palas | Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara | 2 jenis | 6.000.000 | | | 40 Eksp | 1.995.976 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Belantu Mendanau | Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara | 2 jenis | 32.746.000 | | | 112000 lembar | 1.980.000 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Gunung Duren | Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara | 2 jenis | 8.750.000 | | | 32000 lembar | 1.938.952 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | Jumlah penggandaan di UPTD KPHP Rambat Menduyung | 10000 lembar | 2.999.500 | | | 10000 lembar | 4.877.200.616 | | 629.699.682 | | 539.799.682 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi | Jumlah penggandaan di UPTD KPHP Jebu Bembang Antan | 10000 lembar | 2.999.500 | | | 10000 lembar | 118.583.544 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan | Jumlah penggandaan di UPTD KPHP Bubus Panca | 10000 lembar | 2.999.500 | | | 10000 lembar | 71.999.558 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Sigambir Kotawaringin | Jumlah penggandaan di UPTD KPHP Sigambir Kotawaringin | 10000 lembar | 2.999.500 | | | 10000 lembar | 23.999.874 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | - UPT KPH Sungai Sembulan | Jumlah penggandaan di UPTD KPHP Sungai Sembulan | 10000 lembar | 2.999.500 | | | 10000 lembar | 23.999.960 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Gunung Duren | Jumlah penggandaan di UPTD KPHP Muntai Palas | 10000 lembar | 2.999.500 | | | 10000 lembar | 23.999.724 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan | Jumlah penggandaan di UPTD KPHL Belantu Mendanau | 10000 lembar | 2.999.500 | | | 10000 lembar | 46.583.986 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Muntai Palas | Jumlah penggandaan di UPTD KPHP Gunung Duren | 10000 lembar | 2.999.500 | | | 10000 lembar | 23.999.986 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Belantu Mendanau | Jumlah komponen instalasi listrik | 2 jenis | 5.000.000 | | | 2 jenis | 22.584.000 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | | | 728.200.000 | | | | 679.710.968 | | 11.088.722 | | 11.088.722 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | Jumlah peralatan kantor | 41 jenis | 75.000.000 | | | 41 jenis | 679.710.968 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Rambat Menduyung | Jumlah perlengkapan kantor | 50 jenis | 50.000.000 | | | 50 jenis | 59.744.675 | | 5.908.487 | | 5.908.487 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Jebu Bembang Antan | Jumlah tenaga keamanan/ satpam kantor | 16 orang | 603.200.000 | | | 16 orang | 52.699.810 | | 5.180.235 | | 5.180.235 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Bubus Panca | | | 17.500.000 | | | | 61.199.713 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Sigambir Kotawaringin | Jumlah makanan dan minuman tamu | 250 Pax | 5.000.000 | | | 250 Pax | 49.904.543 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | - UPT KPH Sungai Sembulan | Jumlah makanan dan minuman rapat | 500 Pax | 12.500.000 | | | 500 Pax | 157.344.679 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Muntai Palas | | | 1.150.000.000 | | | | 52.808.000 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Belantu Mendanau | Jumlah keluar daerah | | 400.000.000 | | | | 130.689.789 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Gunung Duren | Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah Dinas Kehutanan | 25 Kali | 200.000.000 | | | 25 Kali | 115.319.759 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung | Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah di UPTD KPHP Rambat Menduyung | 5 kali | 25.000.000 | | | 5 kali | 213.983.655 | | 17.400.000 | | 14.500.000 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi | Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah di UPTD KPHP Jebu Bembang Antan | 5 kali | 25.000.000 | | | 5 kali | 56.975.740 | | 17.400.000 | | 14.500.000 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung | Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah di UPTD KPHP Bubus Panca | 5 kali | 25.000.000 | | | 5 kali | 15.748.619 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi | Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah di UPTD KPHP Sigambir Kotawaringin | 5 kali | 25.000.000 | | | 5 kali | 59.259.888 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung | Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah di UPTD KPHP Sungai Sembulan | 5 kali | 25.000.000 | | | 5 kali | 37.724.666 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi | Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah di UPTD KPHP Muntai Palas | 5 kali | 25.000.000 | | | 5 kali | 44.274.742 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah di UPTD KPHP Belantu Mendanau | 5 kali | 25.000.000 | | | 5 kali | 1.914.819.244 | | 27.814.941 | | 27.814.941 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) | Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah di UPTD KPHP Gunung Duren | 5 kali | 25.000.000 | | | 5 kali | 50.000.000 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara | Jumlah dalam daerah | | 750.000.000 | | | | 1.316.515.542 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Jebu Bembang Antan | Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah pada Dinas Kehutanan | 172 Kali | 150.000.000 | | | 172 Kali | 380.240.054 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Sigambir Kotawaringin | Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah di UPTD KPHP Rambat Menduyung | 100 Kali | 75.000.000 | | | 100 Kali | 65.566.973 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | - UPT KPH Muntai Palas | Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah di UPTD KPHP Jebu Bembang Antan | 100 Kali | 75.000.000 | | | 100 Kali | 47.000.000 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Belantu Mendanau | Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah di UPTD KPHP Bubus Panca | 100 Kali | 75.000.000 | | | 100 Kali | 560.942.240 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Gunung Duren | Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah di UPTD KPHP Sigambir Kotawaringin | 100 Kali | 75.000.000 | | | 100 Kali | 262.766.275 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan | Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah di UPTD KPHP Sungai Sembulan | 140 Kali | 75.000.000 | | | 140 Kali | 381.267.673 | | 10.064.941 | | 10.064.941 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Rambat Menduyung | Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah di UPTD KPHP Muntai Palas | 140 Kali | 75.000.000 | | | 140 Kali | 48.124.938 | | 10.064.941 | | 10.064.941 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Jebu Bembang Antan | Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah di UPTD KPHP Belantu Mendanau | 140 Kali | 75.000.000 | | | 140 Kali | 44.404.271 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Bubus Panca | Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah di UPTD KPHP Gunung Duren | 140 Kali | 75.000.000 | | | 140 Kali | 48.125.000 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Sigambir Kotawaringin | Jumlah mebeleur dinas kehutanan | 2 Unit | 25.000.000 | | | 2 Unit | 48.120.151 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | - UPT KPH Sungai Sembulan | Jumlah gedung kantor yang dipelihara | 2 unit | 150.000.000 | | | 1 unit | 48.124.813 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Muntai Palas | Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara | 55 Unit | 617.480.000 | | | 55 Unit | 48.124.000 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Belantu Mendanau | Jumlah mobil operasional yang dipelihara | 13 Unit | 465.500.000 | | | 13 Unit | 48.125.000 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Gunung Duren | Jumlah kendaraan operasional Roda 4 yang dipelihara di dinas (eselon II) | 1 unit | 47.500.000 | | | 1 unit | 48.119.500 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan | Jumlah kendaraan operasional Roda 4 yang dipelihara di dinas (operasional) | 3 unit | 114.000.000 | | | 3 unit | 72.483.613 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan | Jumlah kendaraan operasional Roda 4 yang dipelihara di UPTD KPHP Rambat Menduyung | 1 unit | 38.000.000 | | | 1 unit | 94.552.416 | | 17.750.000 | | 17.750.000 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | Jumlah kendaraan operasional Roda 4 yang dipelihara di UPTD KPHP Jebu Bembang Antan | 1 unit | 38.000.000 | | | 1 unit | 1.721.944.520 | | 571.346.019 | | 484.346.019 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan | Jumlah kendaraan operasional Roda 4 yang dipelihara di UPTD KPHP Bubus Panca | 1 unit | 38.000.000 | | | 1 unit | 1.215.428.931 | | 535.389.000 | | 448.389.000 | | - | Dinas Kehutanan | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan | Jumlah kendaraan operasional Roda 4 yang dipelihara di UPTD KPHP Sigambir Kotawaringin | 1 unit | 38.000.000 | | | 1 unit | 62.496.184 | | 5.010.000 | | 5.010.000 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan | Jumlah kendaraan operasional Roda 4 yang dipelihara di UPTD KPHP Sungai Sembulan | 1 unit | 38.000.000 | | | 1 unit | 60.725.221 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | Jumlah kendaraan operasional Roda 4 yang dipelihara di UPTD KPHP Muntai Palas | 1 unit | 38.000.000 | | | 1 unit | 81.178.876 | | 8.764.000 | | 8.764.000 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | Jumlah kendaraan operasional Roda 4 yang dipelihara di UPTD KPHL Belantu Mendanau | 1 unit | 38.000.000 | | | 1 unit | 302.115.308 | | 22.183.019 | | 22.183.019 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) | Jumlah kendaraan operasional Roda 4 yang dipelihara di UPTD KPHP Gunung Duren | 2 unit | 38.000.000 | | | 2 unit | 80.934.973 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah kendaraan operasional Roda 2 | 23 Unit | 151.980.000 | | | 23 Unit | 80.934.973 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | Jumlah kendaraan operasional Roda 2 yang dipelihara di dinas Kehutanan | 2 unit | 8.940.000 | | | 2 unit | 42.579.614 | | 2.050.000 | | 2.050.000 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | Jumlah kendaraan operasional Roda 2 yang dipelihara di UPTD KPHP Rambat Menduyung | 5 Unit | 17.880.000 | | | 5 Unit | 21.914.937 | | 2.050.000 | | 2.050.000 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah kendaraan operasional Roda 2 yang dipelihara di UPTD KPHP Jebu Bembang Antan | 5 Unit | 17.880.000 | | | 5 Unit | 20.664.677 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | Pelaksanaan Pengelolaan KHDTK untuk Kepentingan Religi | Jumlah kendaraan operasional Roda 2 yang dipelihara di UPTD KPHP Bubus Panca | 5 Unit | 17.880.000 | | | 5 Unit | 37.104.589 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | Penetapan Rencana Pengelolaan Tempat Ibadah dan Wisata Rohani di Kawasan Hutan | Jumlah kendaraan operasional Roda 2 yang dipelihara di UPTD KPHP Sigambir Kotawaringin | 5 Unit | 17.880.000 | | | 5 Unit | 14.794.750 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan KHDTK untuk Tempat Ibadah dan Wisata Rohani | Jumlah kendaraan operasional Roda 2 yang dipelihara di UPTD KPHP Sungai Sembulan | 5 Unit | 17.880.000 | | | 5 Unit | 22.309.839 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Perbenihan Tanaman Hutan | Jumlah kendaraan operasional Roda 2 yang dipelihara di UPTD KPHP Muntai Palas | 5 Unit | 17.880.000 | | | 5 Unit | 67.539.509 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar | Jumlah kendaraan operasional Roda 2 yang dipelihara di UPTD KPHL Belantu Mendanau | 5 Unit | 17.880.000 | | | 5 Unit | 17.828.970 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | Sertifikasi Sumber Benih | Jumlah kendaraan operasional Roda 2 yang dipelihara di UPTD KPHP Gunung Duren | 5 Unit | 17.880.000 | | | 5 Unit | 21.532.014 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara | 25 Unit | 50.000.000 | | | 25 Unit | 28.178.525 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA | Jumlah mebeler yang dipelihara | 1 Unit | 5.000.000 | | | 1 Unit | 201.571.712 | | 31.039.535 | | 31.039.535 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi | Survey kepuasan pelayanan kepegawaian | | 50.000.000 | | | | 56.670.876 | | 31.039.535 | | 31.039.535 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk | Jumlah mesin/kartu absensi | 2 unit | - | | | 2 unit | 56.670.876 | | 25.519.535 | | 25.519.535 | | - | Dinas Kehutanan | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | dalam Lampiran CITES | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam | Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | 10 orang | 50.000.000 | | | 10 orang | 144.900.836 | | 5.520.000 | | 5.520.000 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi | Luas Tutupan Lahan | | | | | | 66.436.044 | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi | Persentase Lahan Kritis yang Direhabilitasi | 24 | | | | 22,5 | 78.464.792 | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | Persentase Kerusakan Kawasan Hutan | 3,0 | | | | 3,5 | 702.098.556 | | | | | | | Dinas Kehutanan | |
| | | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | Persentase Kelompok Perhutanan Sosial | 97 | | | | 95 | 702.098.556 | | | | | | | Dinas Kehutanan | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan | | | - | | | | 119.224.870 | | 20.882.150 | | 20.882.150 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - Dinhut | Persentase Pengelolaan Hutan | 90% | - | | | 90% | 119.224.870 | | 20.882.150 | | 20.882.150 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | | | 100.000.000 | | | | 402.853.344 | | 28.032.000 | | 28.032.000 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Rambat Menduyung | | | 50.000.000 | | | | 35.412.733 | | 3.032.000 | | 3.032.000 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Jebu Bembang Antan | Jumlah rancang bangun tata hutan KPHP Sigambir Kotawaringin | 0 | - | | | 1 dokumen | 35.214.000 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Bubus Panca | Jumlah rancang bangun tata hutan KPHP Sungai Sembulan | 0 | - | | | 1 dokumen | 135.093.800 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Sigambir Kotawaringin | Jumlah rancang bangun tata hutan KPHP Gunung Duren | 0 | - | | | 1 dokumen | 39.385.604 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Sungai Sembulan | Jumlah rancang bangun tata hutan UPTD KPHP Rambat Menduyung | 1 dokumen | 25.000.000 | | | 0 | 35.413.842 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Muntai Palas | Jumlah rancang bangun tata hutan UPTD KPHP Bubus Panca | 1 dokumen | 25.000.000 | | | 0 | 36.698.155 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Belantu Mendanau | | | 50.000.000 | | | | 50.324.000 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Gunung Duren | | 1 | - | | | 1 | 35.311.210 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | | 1 | - | | | 1 | 350.120.684 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Gunung Duren | | | 50.000.000 | | | | 35.311.210 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | Jumlah dokumen pembagian blok/petak pengelolaan hutan KPHP Muntai Palas | 0 | - | | | 1 Dokumen | 180.020.342 | | 3.791.950 | | 3.791.950 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - Dinhut | Jumlah dokumen pembagian blok/petak pengelolaan hutan KPHL Belantu Mendanau | 0 | - | | | 1 Dokumen | 114.460.592 | | 2.991.950 | | 2.991.950 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Rambat Menduyung | | 1 | - | | | 1 | 3.000.000 | | 480.000 | | 480.000 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Jebu Bembang Antan | Jumlah dokumen pembagian blok/petak pengelolaan hutan UPTD KPHP Rambat Menduyung | 1 Dokumen | 25.000.000 | | | 0 | 3.700.000 | | 320.000 | | 320.000 | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Bubus Panca | Jumlah dokumen pembagian blok/petak pengelolaan hutan UPTD KPHP Bubus Panca | 1 Dokumen | 25.000.000 | | | 0 | 4.960.000 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Sigambir Kotawaringin | | | 1.105.200.000 | | | | 4.000.000 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Sungai Sembulan | | | 1.105.200.000 | | | | 10.000.000 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | - UPT KPH Muntai Palas | Jumlah dokumen rencana pengelolaan UPTD KPHP Rambat Menduyung | 1 dokumen | 25.000.000 | | | 1 dokumen | 9.999.750 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Belantu Mendanau | Jumlah tenaga teknis bakti rimbawan | 5 orang | 188.500.000 | | | 5 orang | 19.980.000 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | - UPT KPH Gunung Duren | Jumlah dokumen rencana pengelolaan UPTD KPHP Jebu Bembang Antan | 1 dokumen | 25.000.000 | | | 1 dokumen | 9.920.000 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) | Jumlah tenaga teknis bakti rimbawan | 4 orang | 150.800.000 | | | 4 orang | 324.064.497 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah dokumen rencana pengelolaan UPTD KPHP Bubus Panca | 1 dokumen | 25.000.000 | | | 1 dokumen | 324.064.497 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS | Jumlah tenaga teknis bakti rimbawan | 5 orang | 188.500.000 | | | 5 orang | 39.764.872 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS | Jumlah dokumen rencana pengelolaan UPTD KPHP Sigambir Kotawaringin | 1 dokumen | 25.000.000 | | | 1 dokumen | 40.769.728 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS | Jumlah tenaga teknis bakti rimbawan | 3 orang | 113.100.000 | | | 3 orang | 26.942.059 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS | Jumlah dokumen rencana pengelolaan UPTD KPHP Sungai | 1 dokumen | 25.000.000 | | | 1 dokumen | 114.991.399 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | Sembulan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS | Jumlah tenaga teknis bakti rimbawan | 9 orang | 339.300.000 | | | 9 orang | 66.597.059 | | - | | - | | - | Dinas Kehutanan | |
| | | URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | URUSAN PERDAGANGAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi | 82 | 367.128.300 | | - | 80 | 151.017.179 | 93,5% | 1,1% | 74,81 | 1.640.000 | 91,23% | 0,45% | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | |
| | | | Survey Kepuasan Pelayanan Internal | 80 | 31.730.066.376 | | | 80 | 15.475.928.503 | 79,3% | 51,6% | 63,44 | 7.985.437.671 | 79,30% | 25,17% | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi | 23 | 367.128.300 | | | 11 | 151.017.179 | 54,55% | 1,09% | 6,00 | 1.640.000 | 26,09% | 0,45% | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Survey Kepuasan Pelayanan Keuangan | 80 | 26.680.868.376 | | | 80 | 12.921.800.076 | 83,73% | 54,36% | 66,98 | 7.023.827.834 | 83,73% | 26,33% | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | survey kepuasan pelayanan umum (angka) | 80 | 575.904.000 | | | 80 | 233.225.765 | 74,45% | 28,00% | 59,56 | 65.308.671 | 74,45% | 11,34% | Dinas Perindustrian dan | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Perdagangan | |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | survey kepuasan pelayanan umum (angka) | 80 | 21.000.000 | | | 80 | 24.578.800 | 74,45% | | 59,56 | - | 74,45% | 0,00% | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | survey kepuasan pelayanan umum (angka) | 80 | 4.180.050.000 | | | 80 | 1.991.842.000 | 74,45% | 43,95% | | | 0,00% | 0,00% | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | survey kepuasan pelayanan umum (angka) | 80 | 272.244.000 | | | 80 | 304.481.862 | 74,45% | 6,87% | | | 0,00% | 0,00% | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | |
| | | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | Persentase Ketaatan Perdagangan Bahan Berbahaya tumbuhan Jumlah Volume ekspor (ton) | 100,00 | 156.088.800 | | 0 | 100,00 | 55.731.499 | 0,00 | 0,00% | 0 | - | 0,00% | 0,000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | |
| | | Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar | Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan B2 yang memiliki Perizinan Perdagangan | 6 | 156.088.800 | | | 3 | 55.731.499 | 0,00% | 0,00% | 0 | - | 0,00% | - | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | |
| | | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Persentase Barang terdistribusi | 65,00 | 493.964.100 | | 0 | 60,00 | 229.625.963 | 66,67 | 29,4% | 40 | 67.488.500 | 61,54% | 13,66% | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | |
| | | Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar | Jumlah Komoditas yang dikelola (TON) | 400 | 493.964.100 | | | 200 | 229.625.963 | 5,00% | 29,39% | 10 | 67.488.500 | 2,50% | 13,66% | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Lelang Komoditas | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Persentase ketersedian Bapokting | 85,00 | 754.265.400 | | | 80,00 | 304.085.692 | 56 | 17,63% | 45 | 53.616.600 | 0,00% | 7,11% | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | |
| | | | Persentase Tersalurkannya Pupuk Bersubsidi | 75,00 | 289.707.600 | | | 70,00 | 114.115.463 | | - | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | |
| | | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan pokok dan barang Penting (jenis) | 36 | 241.848.600 | | | 18 | 94.886.814 | 100,00% | 15,62% | 18 | 14.823.000 | 50,00% | 6,13% | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | |
| | | Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | Koevisien Variasi | <11 | 512.416.800 | | | <11 | 209.198.878 | 0,00% | 18,54% | <3.34 | 38.793.600 | 0,00% | 7,57% | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | |
| | | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya | Jumlah Pelaku Usaha yang diawasi | 22 | 289.707.600 | | | 11 | 114.115.463 | 9,09% | | 1 | - | 4,55% | 0,00% | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | Nilai Ekspor Produk Non Migas (USD juta) | 1.900 | 833.293.650 | | 0 | 900 | 485.767.998 | 92,20 | 0,17% | 829,78 | 820.000 | 43,67% | 0,10% | Dinas Perindustrian dan | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Perdagangan | |
| | | Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi | Jumlah Akses Pasar Ekspor | 6 | 833.293.650 | | | 3 | 485.767.998 | 0,00% | 0,17% | 0 | 820.000 | 0,00% | 0,10% | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | |
| | | | Jumlah SDM Perdagangan yang terlatih | 90 | | | | 45 | | 2,22% | | 1 | | 1,11% | | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | |
| | | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Indeks Keberdayaan Konsumen | 42 (Mampu) | 993.197.100 | | 0 | 40 (Mampu) | 434.342.227 | - | 9,36% | 0 | 40.675.000 | 0,00% | 4,10% | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | |
| | | Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Konsumen yang teredukasi | 880 | 421.083.600 | | | 440 | 191.425.049 | 2,50% | 9,95% | 11 | 19.040.000 | 1,25% | 4,52% | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | |
| | | | Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen yang terbentuk | 6 | 201.180.000 | | | 3 | 95.435.561 | 0,00% | 9,57% | 0 | 9.135.000 | 0,00% | 4,54% | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | |
| | | Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Barang Beredar dan Jasa yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan | 100 | 370.933.500 | | | 78 | 147.481.617 | 19,23% | 8,48% | 15 | 12.500.000 | 15,00% | 3,37% | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | Persentase Pemasaran Produk Dalam Negeri | 100,00 | 285.707.100 | | 0 | 40 | 122.948.702 | - | 0,0% | 0 | - | 0,00% | 0,00% | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | |
| | | Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri | Jumlah Permintaan Dagang | 8 | 285.707.100 | | | 4 | 122.948.702 | 0,00% | 0,00% | 0 | - | 0,00% | 0,00% | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | |
| | | Program PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Survey Kepuasan Pelayanan Internal | 80 | 2.281.639.500 | | - | 80 | 995.691.558 | 79,30% | 8,3% | 63,44 | 82.684.754 | 79,30% | 3,62% | UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang | |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Survey Kepuasan Pelayanan Keuangan | 80 | 10.323.600 | | | 80 | 4.915.766 | 83,73% | | 66,98 | - | 83,73% | 0,00% | UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang | |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Survey Kepuasan Pelayanan Kepegawaian | 80 | 321.646.500 | | | 80 | 145.945.246 | 74,45% | 1,44% | 59,56 | 2.100.000 | 74,45% | 0,65% | UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang | |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | survey kepuasan pelayanan umum | 80 | 667.986.900 | | | 80 | 235.746.683 | 74,45% | 14,33% | 59,56 | 33.792.217 | 74,45% | 5,06% | UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang | |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Survey Kepuasan Pelayanan Umum | 80 | 359.730.000 | | | 80 | 170.288.813 | 74,45% | | 59,56 | - | 74,45% | 0,00% | UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | survey kepuasan pelayanan umum | 80 | 318.622.500 | | | 80 | 151.724.563 | 74,45% | 21,43% | 59,56 | 32.513.929 | 74,45% | 10,20% | UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang | |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Survey Kepuasan Pelayanan Umum | 80 | 603.330.000 | | | 80 | 287.070.487 | 74,45% | 4,97% | 59,56 | 14.278.608 | 74,45% | 2,37% | UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang | |
| | | Program STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Persentase Layanan Terstandarisasi | 100,00 | 1.581.794.340 | | 0 | 75,00 | 693.758.880 | 92,00 | 13,88% | 69 | 96.280.001 | 69,00% | 0,061 | UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang | |
| | | Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Produk dan Peralatan yang tersertifikasi | 95 | 1.581.794.340 | | | 90 | 693.758.880 | 76,67% | 13,88% | 69 | 96.280.001 | 72,63% | 6,09% | UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang | |
| | | Program PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | Persentase Pemasaran Produk Dalam Negeri | 100 | 204.109.500 | | - | 40 | 86.516.974 | 0,0% | 17,58% | 0 | 15.206.041 | 0,00% | 7,45% | UPTD Rumah Promosi dan Kemasan | |
| | | Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri | Jumlah Produk yang Siap dipasarkan | 40 | 204.109.500 | | | 20 | 86.516.974 | 55% | 17,58% | 11 | 15.206.041 | 27,50% | 7,45% | UPTD Rumah Promosi dan Kemasan | |
| | | URUSAN PERINDUSTRIAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Persentase pertumbuhan jumlah industri | 5,00 | 4.010.698.650 | | 0 | 2 | 1.763.772.689 | 55,50 | 9,93% | 1 | 175.188.426 | 22,20% | 4,37% | Dinas Perindustrian dan Perdagang | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | an | |
| | | Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi | Persentase pertumbuhan tenaga kerja industri | 4 | 4.010.698.650 | | | 2 | 1.763.772.689 | 54,50% | 9,93% | 1 | 175.188.426 | 27,25% | 4,37% | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | Persentase Industri yang sesuai Izin Usaha Industri | 80,00 | 362.483.100 | | 0 | 30 | 125.580.117 | - | 6,5% | 0 | 8.200.000 | 0,00% | 2,26% | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | |
| | | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi | Jumlah industri yg dipantau | 110 | 362.483.100 | | | 55 | 125.580.117 | 16,36% | 6,53% | 9 | 8.200.000 | 8,18% | 2,26% | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | Persentase data informasi industri di SIINAS | 90,00 | 127.709.400 | | 0 | 70 | 60.790.309 | - | 0,0% | 0 | - | 0,00% | 0,00% | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | |
| | | Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) | Persentase Industri yang menyampaikan informasi industri secara lengkap | 100 | 127.709.400 | | | 60 | 60.790.309 | 0,00% | 0,00% | 0 | - | 0,00% | 0,00% | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | |
| | | Program PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Persentase pertumbuhan jumlah industri | 10,00 | 510.657.000 | | 0 | 5,00 | 243.169.708 | 22,20 | 30,18% | 1,11 | 73.383.243 | 11,10% | 0,144 | UPTD Rumah Promosi dan Kemasan | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi | Persentase pertumbuhan tenaga kerja industri | 4 | 510.657.000 | | | 2 | 243.169.708 | 54,50% | 30,18% | 1,09 | 73.383.243 | 27,25% | 14,37% | UPTD Rumah Promosi dan Kemasan | |
| | | URUSAN TRANSMIGRASI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program pengembangan kawasan transmigrasi | Jumlah warga transmigrasi yang mendapatkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam meningkatkan kualitas hidup di kawasan transmigrasi | 150,00 | 86.520 | - | - | 100,00 | 75.349 | - | - | - | - | - | - | Dinas Tenaga Kerja | |
| | | Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan | | 150,00 | 86.520 | - | - | | 75.349 | - | - | - | - | - | - | Dinas Tenaga Kerja | |
| | | Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman | terlaksananya Peningkatan SDM di kawasantransmigrasi | 150,00 | 86.520 | - | - | 30 Orang | 75.349 | - | - | - | - | - | - | Dinas Tenaga Kerja | |
| | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | URUSAN SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | | | | | | | Sekretariat Daerah | |
| | | Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah | Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang tersusun | 90% | - | - | - | 90% | 4.695.287.210 | 25% | | 10% | - | 2% | 0 | Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah | |
| | | Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan | Persentase Rekomendasi Bagian Administrasi Kewilayahan yang dibuat | 90% | 89.151.717 | - | - | 90% | 650.566.314 | 11% | | 10% | 22.882.918 | 0 | 0 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan | Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Subbagian Pengembangan Wilayah dan Batas Daerah | 5 buah | 40.000.000 | - | - | 7 dokumen | 603.168.483 | | | 1 | 22.882.918 | 0,20% | 0 | | |
| | | Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum | Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Subbagian Pengembangan Wilayah dan Batas Daerah | 5 buah | 15.625.921 | - | - | 7 dokumen | 47.397.831 | | | 1 | 0 | 0,20% | 0 | | |
| | | Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Wilayah | Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Subbagian Administrasi Pertanahan | 7 buah | 33.525.796 | - | - | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | | Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah | Persentase Rekomendasi Bagian Otonomi Daerah yang dibuat | 90% | 342.144.347 | - | - | 90% | 1.369.543.053 | 53% | | 25% | 106.304.728 | 5% | 0 | | |
| | | Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD | Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Subbagian Fasilitasi Kepala Daerah dan Legislatif | 10 buah | 111.568.488 | - | - | 5 dokumen | 496.097.898 | | | 4 | 57.541.361 | 0,80% | 0 | | |
| | | Sub Kegiatan Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan | Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Subbagian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah | 7 buah | 120.194.410 | - | - | 5 dokumen | 424.256.205 | | | 0 | 18.158.675 | 0 | 0 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Sub Kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan | Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Subbagian Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan | 3 buah | 110.381.449 | - | - | 7 dokumen | 449.188.950 | | | 2 | 30.604.692 | 0,40% | 0 | | |
| | | Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah | Persentase Rekomendasi Bagian Kerjasama yang dibuat | 90% | 350.000.000 | - | - | 90% | 2.675.177.843 | 22% | | 20% | 4.687.000 | 4% | 0 | | |
| | | Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah | Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Subbagian Fasilitasi Instansi Vertikal | 5 buah | 150.000.000 | - | - | 5 proposal | 2.675.177.843 | | | 2 | 4.687.000 | 0,40% | 0 | | |
| | | Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta | Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Subbagian Kerjasama Swasta dan Luar Negeri | 5 buah | 100.000.000 | - | - | - | - | | | - | - | - | - | | |
| | | Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama | Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Subbagian Kerjasama Antar Daerah | 5 buah | 100.000.000 | - | - | - | - | | | - | - | - | - | | |
| | | Program Kesejahteraan Rakyat | | 80% | 9.580.000.000 | | | | 42.077.497.640 | | | | | | | Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah | |
| | | Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual | Persentase Rekomendasi Bidang Bina Mental Spiritual yang dibuat | 80% | 9.270.000.000 | | | 80% | 11.525.750.742 | 81% | | 65% | | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Sarana dan Prasarana Spiritual | 5 Berkas | 8.570.000.000 | | | 5 berkas | 9.883.742.789 | | - | 5 | - | 125 | | | |
| | | Sub Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | Jumlah Bahan Usulan Rekomendaasi Kelembagaan Bina Spiritual | 7 Berkas | 700.000.000 | | | 10 berkas | 1.642.007.953 | | 0 | 7 | 31.000.000 | 175 | | | |
| | | Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | Persentase Rekomendasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar yang dibuat | 80% | 195.000.000 | | | 80% | 30.437.622.448 | 81% | | 65% | - | 25 | | | |
| | | Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Bidang Pendidikan | 2 Berkas | 50.000.000 | | | 2 berkas | 556.543.885 | | - | 0,6 | - | 12 | | | |
| | | Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan | Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Bidang Kesehatan | 2 Berkas | 60.000.000 | | | 2 berkas | 460.955.354 | | - | 0,6 | - | 12 | | | |
| | | Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial | Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Bidang Sosial | 2 Berkas | 85.000.000 | | | 2 berkas | 29.420.123.209 | | - | 60% | - | 12 | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar | Persentase Rekomendasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang dibuat | 80% | 115.000.000 | | | 80% | 114.124.450 | 63% | | 0,5 | - | | | | |
| | | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan,Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata | Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata, | 1 Berkas | 50.000.000 | | | 1 berkas | 49.074.563 | | - | 1 | - | 20 | | | |
| | | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tr | Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 1 Berkas | 65.000.000 | | | 1 berkas | 65.049.887 | | - | 1 | - | 20 | | | |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan | Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan | | | | | | | | | - | - | 0 | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | Perhubungan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM | PERSENTASE PRODUK HUKUM DAERAH YANG DISYAHKAN | | | | | | | | | | | | | Biro Hukum Sekretariat Daerah | |
| | | KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN PERUNDANG-UNDANGAN | PERSENTASE PRODUK HUKUM DAERAH YANG DISYAHKAN | 90% | 609.106.999 | 0 | 0 | 90% | 415.645.994 | | | 0 | 193.461.005 | - | 0 | | |
| | | SUB KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM PENGATURAN | 1. Jumlah Bahan Produk Hukum Daerah berupa Peraturan Gubernur 35 Peraturan Gubernur | 35 | 382.486.169 | 0 | 0 | 35 | 292.631.193 | | | 29 | 89.854.976 | 0,82 | 0 | | |
| | | | 2. Jumlah Bahan Produk Hukum Daerah Berupa Raperda | 10 | | 0 | | 10 | | | | 10 | | 1 | | | |
| | | SUB KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM PENETAPAN | Jumlah Bahan Produk Hukuim Daerah berupa Keputusan Gubernur | 500 | 88.478.965 | 0 | 0 | 500 | 52.702.815 | | | 93 | 35.776.150 | 0,19 | 0 | | |
| | | SUB KEGIATAN ,PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAN NASKAH HUKUM LAINNYA | 1. Jumlah Bahan Pendokumentasian Produk Hukum Daerah dan Naskah Hukum Lainnya | 100 | 45.607.661 | 0 | 0 | 100 | 5.329.678 | | | 217 | 40.277.983 | 2,17 | 0 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | 2. Jumlah Bahan Penyusunan Naskah Hukum Lainnya | 100 | | 0 | | 100 | | | | 38 | | 0,38 | | | |
| | | | 3. Jumlah Bahan Produk Hukum Daerah yang dipublikasikan | 100 | | 0 | | 100 | | | | 0 | | 0 | | | |
| | | SUB KEGIATAN FASILITASI DAN EVALUASI PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA | 1. Jumlah Bahan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota/ Wilayah 1 | 7 | 92.534.208 | 0 | 0 | 7 | 64.982.308 | | | 0 | 27.551.900 | - | 0 | | |
| | | | 2. Jumlah Bahan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota/ Wilayah 1 | 7 | | 0 | | 7 | | | | 0 | | - | | | |
| | | | 3. Jumlah Bahan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota/ Wilayah 2 | 7 | | 0 | | 7 | | | | 0 | | - | | | |
| | | | 4. Jumlah Bahan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota/ Wilayah 2 | 7 | | 0 | | 7 | | | | 0 | | - | | | |
| | | | 5. Jumlah Bahan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota/ Wilayah 3 | 7 | | 0 | | 7 | | | | 0 | | - | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | 6. Jumlah Bahan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota/ Wilayah 3 | 7 | | 0 | | 7 | | | | 0 | | - | | | |
| | | FASILITASI KEGIATAN BANTUAN HUKUM | PERSENTASE PRODUK HUKUM DAERAH YANG DISYAHKAN | 90% | 212.293.044 | 0 | 0 | 90% | 175.859.044 | | | 0 | 36.434.000 | - | 0 | | |
| | | SUB KEGIATAN FASILITASI PENYELESAIAN MASALAH HUKUM | 1. Jumlah bahan Penyelesaian Sengketa Hukum untuk Proses Persidangan (Kasus) | 2 | 158.313.029 | 0 | 0 | 2 | 127.857.029 | | | 0 | 30.456.000 | - | 0 | | |
| | | | 2. Jumlah Laporan Pembinaan Penyelesaian Sengketa Hukum Pemda Kabupaten/Kota | 1 | | 0 | | 1 | | | | 0 | | - | | | |
| | | SUB KEGIATAN FASILITASI PENYELESAIAN MASALAH NON LITIGASI DAN HAM | 1. Jumlah Bahan Pelaporan RANHAM | 1 | 53.980.015 | 0 | 0 | 1 | 48.002.815 | | | 0 | 5.977.200 | - | 0 | | |
| | | | 2. Jumlah Bahan Usulan Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin | 45 | | 0 | | 45 | | | | 0 | | - | | | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH | 80% | 95.478.336 | 0 | - | 75% | 154.549.553 | | | | 0 | | 0 | Sekretariat Daerah | |
| | | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Kesesuaian Antara Dokumen Perencanaan dengan Kinerja PD | 90% | 95.478.336 | 0 | - | 90% | 154.549.553 | 49% | | 44% | 0 | 49% | 0 | | |
| | | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen | Jumlah Dokumen Perencanaan | 4 Dokume | 60.311.794 | 0 | - | 4 Dokume | 95.230.785 | | - | 2 | 0 | 50% | 0 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Perencanaan Perangkat Daerah | (DOKREN) | n | | | | n | | | | | | | | | |
| | | Sub Kegiatan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi PD (DALEV) | 5Dokumen | 35.166.542 | 0 | - | 5 Dokumen | 59.318.768 | | - | 4 | 0 | 80% | 0 | | |
| | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Persentase Kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah yang tersusun | 80% | 149.298.058 | 0 | - | 75% | 245.850.775 | | | | 0 | | 0 | Sekretariat Daerah | |
| | | Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian | Persentase Rekomendasi Kebijakan Ekonomi Makro dan Mikro yang dibuat | 80% | 34.401.216 | 0 | - | 80% | 62.692.543 | 56% | | 45% | 0 | 56% | 0 | | |
| | | Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro | Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Ekonomi Makro | 4 berkas | 22.682.826 | 0 | - | 3 Berkas | 41.382.907 | | - | 1 | 0 | 25% | 0 | | |
| | | Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro | Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Ekonomi Mikro | 4 berkas | 11.718.390 | 0 | - | 1 Berkas | 21.309.636 | | - | 0 | 0 | 0% | 0 | | |
| | | Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam | Persentase Rekomendasi Kebijakan SDA yang dibuat | 80% | 84.665.994 | 0 | - | 80% | 127.249.389 | 25% | | 20% | 0 | 25% | 0 | | |
| | | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan | 4 berkas | 11.705.349 | 0 | - | 1 Berkas | 21.249.895 | | - | 0 | 0 | 0% | 0 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Pertambangan dan Lingkungan Hidup | 4 berkas | 44.450.260 | 0 | - | 1 Berkas | 53.499.786 | | - | 0 | 0 | 0% | 0 | | |
| | | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Energi dan Air | 4 berkas | 28.510.385 | 0 | - | 2 Berkas | 52.499.708 | | - | 0 | 0 | 0% | 0 | | |
| | | Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD | Persentase Rekomendasi Kebijakan BUMD dan BLUD yang dibuat | 80% | 30.230.848 | 0 | - | 80% | 55.908.843 | 67% | | 53% | 0 | 67% | 0 | | |
| | | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha | Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi BUMD dan BLUD | 4 berkas | 20.230.848 | 0 | - | 3 Berkas | 55.908.843 | | - | 1 | 0 | 25% | 0 | | |
| | | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah | Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi BUMD dan BLUD | 4 berkas | 10.000.000 | 0 | - | 0 | - | | - | 0 | 0 | 0% | 0 | | |
| | | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | Persentase Kebijakan bidang Administrasi Pembangunan yang tersusun | 80% | 169.095.739 | 0 | - | 80% | 222.749.369 | | | | 0 | | 0 | Sekretariat Daerah | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Persentase Rekomendasi Pengendalian, Pelaporan dan Pelaksanaan Pembangunan yang dibuat | 80% | 108.736.530 | 0 | - | 80% | 144.799.671 | | | 33% | 0 | 42% | 0 | | |
| | | Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah | Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Pembangunan APBD, APBN dan Wilayah | 6 berkas | 108.736.530 | 0 | - | 6 Berkas | 144.799.671 | | - | 2 | 0 | 33% | 0 | | |
| | | Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Persentase Rekomendasi Pengendalian, Pelaporan dan Pelaksanaan Pembangunan yang dibuat | 80% | 60.359.209 | 0 | - | 80% | 77.949.698 | | | 33% | 0 | 42% | 0 | | |
| | | Sub Kegiatan Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah | Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah | 6 berkas | 60.359.209 | 0 | - | 6 Berkas | 77.949.698 | | - | 2 | 0 | 33% | 0 | | |
| | | PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | Nilai Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPB) | 4 | Rp1.307.785.975 | | | Level 4 | Rp1.877.902.472 | 75% | 10% | 3 | Rp190.708.244 | 0,75 | 0,145825271 | Biro PBJ Sekretariat Daerah | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa | 50% | Rp570.000.000 | | | 50% | 813.842.018,00 | 0% | 6% | 0 | 51.439.244 | 0 | 0,090244288 | | |
| | | Sub Kegiatan Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa | jumlah rumusan kebijakan pengelolaan strategi pengadaan | 1 | Rp50.000.000 | | | 1 Rumusan | 96.999.724,00 | | | 0,5 | - | 0,5 | 0 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | barang/jasa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa | Persentase tindaklanjut usulan proses pemilihan penyedia barang/jasa | 100% | Rp500.000.000 | | | 100% | 619.847.410,00 | | | 0,96 | 51.439.244 | 0,96 | 0,102878488 | | |
| | | Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah laporan pemantauan monev pemantauan barang/jasa | 1 | Rp20.000.000 | | | 1 Dokumen | 96.994.884,00 | | | 0,5 | - | 0,5 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Persentase Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | 50% | Rp570.000.000 | | | 50% | 942.747.995,00 | 0% | 15% | 0 | 136.809.000 | 0 | 0,24001579 | | |
| | | Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik | Jumlah pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik | 1 | Rp500.000.000 | | | 1 LAPORAN | 869.570.795,00 | | | 0,5 | 136.809.000 | 0,5 | 0,273618 | | |
| | | Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah sistem PBJ yang dikembangkan | 1 | Rp50.000.000 | | | 1 APLIKASI | 36.175.186,00 | | | 0,5 | - | 0,5 | 0 | | |
| | | Sub Kegiatan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah laporan pengelolaan informasi PBJ | 1 | Rp20.000.000 | | | 1 LAPORAN | 37.002.014,00 | | | 0,5 | - | 0,5 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa | Persentase Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa | 50% | Rp167.785.975 | | | 50% | 121.312.459,00 | 0% | 2% | 0 | 2.460.000 | 0 | 0,014661535 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Laporan Pembinaan SDM Pengadaan Barang/Jasa | 1 | Rp57.785.975 | | | 1 LAPORAN | 34.939.516,00 | | | 0,5 | 1.230.000 | 0,5 | 0,021285442 | | |
| | | Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah lembaga UKPBJ yang dibina | 7 | Rp55.000.000 | | | 7 UKPBJ | 42.623.170,00 | | | 0,5 | 1.230.000 | 0,5 | 0,022363636 | | |
| | | Sub Kegiatan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah laporan tentang pendampingan, konsultasi, dan/atau bimtek Pengadaan Barang/Jasa | 1 | Rp55.000.000 | | | 1 LAPORAN | 43.749.773,00 | | | 0,5 | - | 0,5 | 0 | | |
| | | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI | Persentase kebijakan Manajemen Perubahan,Penataan Dan Penguatan Organisasi, PenataanTatalaksana, Penguatan Akuntabilitas, PeningkatanKualitas Pelayanan Publik yang tersusun | 80% | Rp573.608.500 | | | 80% | Rp659.818.131 | | | 10% | 25.134.202 | 0,13 | 0,04 | BIRO ORGANISASI Sekretariat Daerah | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Persentase Rekomendasi Area Perubahan Penataan Organisasi/ Kelembagaan yang dibuat | 80% | Rp190.000.000 | | | 80% | 218.517.878,00 | | | 0,58 | 21.091.202 | 0,73 | 0,11 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Sub KegiatanFasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi | Jumlah Usulan PD yang menyusun kebijakan evaluasiterhadap Organisasinya | 32 | Rp60.000.000 | | | 32 PD | Rp61.455.956 | | | 0,65 | 6.946.866 | 0,02 | 0,12 | | |
| | | Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota | Jumlah Kabupaten/kota yang menyusun kebijakan Penataan Organisasi berdasarkan hasil evaluasi | 7 | Rp60.000.000 | | | 7 Kab/Kota | Rp75.625.947 | | | 0,6 | - | 0,09 | - | | |
| | | Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan | Jumlah Perangkat Daerah yang tersusun AnalisaJabatan, evaluasi jabatan dan peta jabatannya | 32 | Rp70.000.000 | | | 32 PD | Rp81.435.975 | | | 0,5 | 14.144.336 | 0,02 | 0,2 | | |
| | | Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | Persentase Rekomendasi Area Perubahan Manajemen Perubahan dan PenguatanAkuntabilitas yang dibuat ; Persentase Rekomendasi Area Perubahan PenataanTatalaksana dan Pelayanan Publik yang dibuat | 80% | Rp383.608.500 | | | 80% | 441.300.253,00 | | | 0,77 | - | 0,96 | - | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun kebijakanpelaksanaan tugas Tim dan Dokumen RoadMap/Rencana Kerja Reformasi Birokrasi sesuai standarRB | 32 | Rp65.000.000 | | | 32 PD | 71.139.800,00 | | | 0,5 | - | 0,02 | - | | |
| | | Sub KegiatanMonitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan penyusunan Penetapan Kinerja | 32 | Rp65.000.000 | | | 32 PD | 74.905.886,00 | | | 0,9 | - | 0,03 | - | | |
| | | Sub Kegiatan'Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja | Jumlah PD yang menyusun kebijakan laporan Evaluasi Implementasi perubahan pola pikir dan budaya kerja sesuai standar RB | 32 | Rp60.000.000 | | | 32 PD | 73.385.884,00 | | | 0,9 | - | 0,03 | - | | |
| | | Sub KegiatanPengelolaan Tatalaksana Pemerintahan | Jumlah Perangkat Daerah yang Menyusun KebijakanPeta Proses Bisnis (Probis) dan SOP | 1 | Rp40.608.500 | | | 1 DOKUMEN PROBIS DAN SOP | 36.329.851,00 | | | 0,55 | - | 0,55 | - | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Sub KegiatanFasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik | Jumlah Perangkaat Daerah yang telah menetapkanstandar pelayanan, pelayanan Prima, pengelolaanpengaduan terhadap pelayanan, penilaian kepuasanterhadap pelayanan dan teknologi Informasi untukpelayanan | 10 | Rp153.000.000 | | | 10 PD | 185.538.832,00 | | | 0,5 | 4.043.000 | 0,05 | 0,03 | | |
| | | | Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Survey KepuasanMasyarakat | 10 | | | | 10 PD | | | | | | | | | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA PROVINSI | Survey Kepuasan Pelayanan Internal | 90% | 101.171.100.360 | | | 90% | 97.819.605.221 | | | 34,50% | 33.746.688.597 | | 33,36% | Sekretariat Daerah | |
| | | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Survey Kepuasan atas Pemenuhan Hak Keuangan Pegawai | 95% | 49.817.641.541 | | | 95% | 49.944.268.862 | | | | | | | | |
| | | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan | 297 org | 49.817.641.541 | | | 292 org | 49.944.268.862 | | | 57,14% | 21.182.253.975 | | 42,52% | | |
| | | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada PD | Survey Kepuasan atas Pemenuhan Kewajiban Pelunasan PBB | 95% | 256.250.000 | | | 95% | 250.000.000 | | | | | | | | |
| | | Sub Kegiatan Penata Usahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD | Jumlah Unit Pembayaran PBB Gedung Pemerintah | 44 unit | 256.250.000 | | | 44 unit | 250.000.000 | | | 20,00% | 0 | | 0,00% | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Survey Kepuasan atas Pemenuhan Kebutuhan Kepegawaian | 95% | 975.000.000 | | | 95% | 209.350.000 | | | | | | | | |
| | | Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah pakaian dinas ASN beserta perlengkapannya yang diadakan | 300 stel/ pcs | 225.000.000 | | | 64 stel | 60.000.000 | | | 0,00% | 0 | | 0,00% | | |
| | | Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah pegawai ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | 20 org | 300.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0,00% | 0 | | 0,00% | | |
| | | Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah peserta bimbingan teknis peraturan perundangan-undangan | 30 org | 450.000.000 | | | 10 org | 149.350.000 | | | 0,00% | 0 | | 0,00% | | |
| | | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Survey Kepuasan atas Pelayanan Umum | 80% | 12.287.603.467 | | 11.170.312.900 | 80% | 11.170.312.900 | | | | | | | | |
| | | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah capaian penyediaan alat listrik dan elektronik | 12 bln | 323.135.350 | | | 12 bln | 315.254.000 | | | 32,92% | 103.773.400 | | 32,11% | | |
| | | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | Jumlah capaian penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 12 bln | 76.875.000 | | | 12 bln | 74.996.000 | | | 0,00% | 0 | | 0,00% | | |
| | | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah capaian penyediaan peralatan kebersihan rumah jabatan | 12 bln | 76.875.000 | | | 12 bln | 74.999.580 | | | 0,00% | 0 | | 0,00% | | |
| | | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah capaian penyediaan bahan logistik kantor | 12 bln | 66.695.725 | | | 12 bln | 65.065.000 | | | 46,78% | 30.435.000 | | 45,63% | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan | Jumlah capaian penyediaan barang cetak dan penggandaan | 12 bln | 366.313.455 | | | 12 bln | 357.378.320 | | | 19,16% | 64.210.000 | | 17,53% | | |
| | | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah penyediaan bahan bacaan dilingkungan setda | 12 bln | 174.201.825 | | | 12 bln | 168.000.000 | | | 12,96% | 13.709.000 | | 7,87% | | |
| | | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/ Material | Jumlah capaian penyediaan alat tulis kantor | 12 bln | 410.000.000 | | | 12 bln | 400.000.000 | | | 26,36% | 105.437.225 | | 25,72% | | |
| | | Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah capaian Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 bln | 6.463.387.600 | | | 12 bln | 6.305.741.000 | | | 44,17% | 2.449.377.800 | | 37,90% | | |
| | | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD | Jumlah capaian Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD | 12 bln | 4.330.119.512 | | | 12 bln | 3.408.879.000 | | | 25,91% | 883.215.926 | | 20,40% | | |
| | | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda | Survey Kepuasan atas Pengadaan Barang bagi Pengguna | 95% | 5.418.021.875 | | 5.285.875.000 | 95% | 5.285.875.000 | | | | | | | | |
| | | Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan | Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan | 8 Unit | 4.612.500.000 | | | 6 unit | 4.500.000.000 | | | 20,00% | 0 | | 0,00% | | |
| | | Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | 10 unit | 805.521.875 | | | 2 unit | 785.875.000 | | | 20,00% | 0 | | 0,00% | | |
| | | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda | Survey Kepuasan atas Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang | 80% | 14.817.823.525 | | 13.675.493.681 | 80% | 13.675.493.681 | | | | | | | | |
| | | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Capaian Benda Pos yang dibeli dan Jasa Pengiriman surat/ barang | 12 bulan | 41.512.500 | | | 12 bln | 40.500.000 | | | 21,41% | 8.671.500 | | 20,89% | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air Dan Listrik | Tagihan Rekening Listrik, Air, Telepon/Fax, TV Kabel, Virtual meeting yang dibayarkan | 12 bulan | 4.479.439.625 | | | 12 bln | 4.369.000.000 | | | 27,05% | 1.181.992.563 | | 26,39% | | |
| | | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | Jumlah capaian Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor | 12 bulan | 1.575.937.500 | | | 12 bln | 1.537.493.681 | | | 11,33% | 174.204.089 | | 11,05% | | |
| | | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah tenaga PHL yang dipekerjakan | 210 org | 8.720.933.900 | | | 205 org | 7.728.500.000 | | | 46,04% | 3.558.300.000 | | 40,80% | | |
| | | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda | Survey Kepuasan Atas Pelayanan Pemeliharaan Barang | 95% | 11.039.474.467 | | 11.288.537.475 | 80% | 11.288.537.475 | | | | | | | | |
| | | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara | 18 unit mobil | 1.043.450.000 | | | 97 unit | 1.489.695.500 | | | 13,19% | 196.551.098 | | 18,84% | | |
| | | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara | 55 unit mobil, 24 unit motor roda dua, 4 unit Motor roda tiga | 2.621.170.000 | | | 97 unit | 2.006.859.150 | | | 18,03% | 361.833.183 | | 13,80% | | |
| | | Sub Keg Pemeliharaan Mebel | Jumlah Meubelair yang dipelihara | 5 jenis | 105.575.000 | | | 3 jenis | 103.000.000 | | | 15,00% | 0 | | 0,00% | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang dipelihara | 10 jenis | 675.651.608 | | | 7 jenis | 659.168.600 | | | 2,28% | 15.000.000 | | 2,22% | | |
| | | Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung yang dilakukan pemeliharaan/ Rehabilitasi | 11 jenis | 4.690.143.780 | | | 11 jenis | 5.261.110.314 | | | 18,00% | 946.905.380 | | 20,19% | | |
| | | Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara | 10 Jenis | 1.903.484.079 | | | 8 jenis | 1.768.703.911 | | | 14,59% | 257.987.500 | | 13,55% | | |
| | | Kegiatan Administrasi Keuangan Dan Operasional KDH dan WKDH | Survey Kepuasan atas Pemenuhan Hak KDH dan WKDH | 90% | 1.683.302.372 | | 1.642.246.217 | 90% | 1.642.246.217 | | | | | | | | |
| | | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan KDH dan WKDH | Jumlah KDH dan WKDH yang menerima Gaji dan Tunjangan | 2 org | 251.172.372 | | | 2 org | 245.046.217 | | | 55,44% | 135.856.094 | | 54,09% | | |
| | | Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas Dan Atribut Kelengkapan KDH dan WKDH | Jumlah Penyediaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapan KDH dan WKDH | 28 Psng/ Pcs | 84.255.000 | | | 28 psng/Pcs | 82.200.000 | | | 6,08% | 0 | | 0,00% | | |
| | | Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up KDH dan WKDH | Jumlah yang melaksanakan Medical Check Up | 6 org | 66.625.000 | | | 6 org | 65.000.000 | | | 2,90% | 0 | | 0,00% | | |
| | | Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional KDH dan WKDH | Jumlah capaian Penyediaan Dana Penunjang Operasional KDH dan WKDH | 12 bln | 1.281.250.000 | | | 12 bln | 1.250.000.000 | | | 50,00% | 624.960.000 | | 48,78% | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Kegiatan Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah | Survey Kepuasan atas Pelayanan Kerumahtanggaan | 95% | 2.524.325.614 | | 2.160.740.296 | 95% | 2.160.740.296 | | | | | | | | |
| | | Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga KDH | Jumlah Capaian Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga KDH | 12 bln | 900.984.885 | | | 12 bln | 879.008.000 | | | 37,96% | 333.650.000 | | 37,03% | | |
| | | Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga WKDH | Jumlah Capaian Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga WKDH | 12 bln | 623.340.728 | | | 12 bln | 608.137.296 | | | 39,02% | 237.270.000 | | 1,92% | | |
| | | Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Setda | Jumlah Capaian Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Setda | 12 bln | 1.000.000.000 | | | 12 bln | 673.595.000 | | | 9,26% | 62.400.000 | | 6,24% | | |
| | | Kegiatan Fasilitasi Materi Dan Komunikasi Pimpinan | Survey Kepuasan atas Pelayanan Komunikasi Pimpinan | 95% | 1.228.718.750 | | 1.198.749.925 | 95% | 1.198.749.925 | | | | | | | | |
| | | Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Jumlah Capaian Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 12 bln | 1.228.718.750 | | | 12 bln | 1.198.749.925 | | | 45,25% | 542.422.564 | | 44,15% | | |
| | | Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan | Kepuasan atas Pelayanan Keprotokolan | 95% | 1.122.938.750 | | 994.030.865 | 95% | 994.030.865 | | | | | | | | |
| | | Sub Kegiatan Fasilitasi Dan Koordinasi Pelaksanaan Acara | Jumlah Capaian Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara | 12 bulan | 102.705.000 | | | 12 bln | 100.052.865 | | | 25,00% | 0 | | 0,00% | | |
| | | Sub Kegiatan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan | Jumlah Capaian Pengelolaan Hubungan Keprotokolan | 12 bulan | 1.020.233.750 | | | 12 bln | 893.978.000 | | | 30,90% | 276.272.300 | | 27,08% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | URUSAN SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | | | | | | | SEKRETARIAT DAERAH | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Survey Kepuasan Pelayanan Internal (SETWAN) | 92 | 72.803.378.414 | 92 | 57.497.440.895,00 | 92 | 66.346.218.816 | 41,30% | 58,50% | | | | | | |
| | | | Nilai SAKIP PD (SETWAN) | | | | | 79 | | | | | | | | | |
| | | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah | 25 | 700.000.000 | 12 | 320.141.046,00 | 25 | 547.913.800 | 84,00% | 42,00% | | | | | | |
| | | penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah | 2 | 100.000.000 | 12 | 320.141.046,00 | 2 | 85.914.800 | 100,00% | 87,14% | | | | | | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 | 100.000.000 | | | 1 | 75.999.800 | 0,00% | 92,32% | | | | | | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 | 100.000.000 | | | 1 | 75.999.800 | 0,00% | 0,00% | | | | | | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 | 100.000.000 | | | 1 | 75.999.800 | 0,00% | 0,00% | | | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 | 100.000.000 | | | 1 | 73.999.800 | 0,00% | 0,00% | | | | | | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12 | 100.000.000 | | | 12 | 73.999.800 | 0,00% | 56,01% | | | | | | |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7 | 100.000.000 | | | 7 | 86.000.000 | 0,00% | 50,72% | | | | | | |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Survey Kepuasan Pelayanan Keuangan | 92 | 11.055.026.737 | 81 | 10.093.797.467,00 | 80 | 11.055.026.737 | 100,00% | 66,14% | | | | | | |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan | 80 | 11.055.026.737 | 81 | 10.093.797.467,00 | 80 | 11.055.026.737 | 100,00% | 66,14% | | | | | | |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Survey Kepuasan Pelayanan Kepegawaian | 92 | 656.350.000 | 8 | 71.495.668,00 | 92 | 652.177.600 | 41,30% | 20,40% | | | | | | |
| | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai ASN yang Ikut Pendidikan dan Pelatihan Formal | 20 | 205.400.000 | 8 | 71.495.668,00 | 80 | 205.000.000 | 100,00% | 24,44% | | | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Pegawai ASN yang Ikut Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 20 | 182.750.000 | - | - | 20 | 180.000.000 | 40,00% | 0,60% | | | | | | |
| | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 76 | 268.200.000 | - | - | 20 | 267.177.600 | 0,00% | | | | | | | |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Survey Kepuasan Pelayanan Umum | 92 | 3.238.618.020 | 2 | 2.704.072.833,00 | 92 | 3.051.701.800 | 41,30% | 845,13% | | | | | | |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang tersedia | 1 | 170.418.117 | 1 | 53.339.373,00 | 1 | 170.367.200 | 100,00% | 33,38% | | | | | | |
| | | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | 1 | 191.775.000 | 1 | 238.030.000,00 | 1 | 191.549.100 | 200,00% | 178,74% | | | | | | |
| | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah jenis Peralatan Rumah Tangga yang tersedia | 2 | 66.988.920 | 2 | 34.523.800,00 | 2 | 66.969.200 | 200,00% | 9,19% | | | | | | |
| | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan | Jumlah jenis Barang Cetakan dan Jumlah Penggandaan | 3 | 411.411.480 | 3 | 290.191.350,00 | 3 | 411.215.700 | 33,33% | 28,52% | | | | | | |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang tersedia | 44.148 | 420.000.000 | 23.711 | 184.410.000,00 | 44148 | 420.000.000 | 12,23% | 14,52% | | | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Penyedian Bahan/Material | Jumlah jenis Bahan/Material yang tersedia | 2 | 588.004.503 | 2 | 515.169.200,00 | 2 | 555.606.500 | 100,00% | 30,31% | | | | | | |
| | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Kunjungan Tamu yang Difasilitasi | 100 | 786.000.000 | 451 | 1.002.802.650,00 | 100 | 785.994.100 | 35,00% | 107,28% | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah yang dilaksanakan | 24 | 604.020.000 | 77 | 385.606.460,00 | 24 | 450.000.000 | 66,67% | 11,12% | | | | | | |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan | 8 | 2.725.621.975 | 2 | 521.635.004,00 | 8 | 2.670.075.100 | 0,00% | 0,00% | | | | | | |
| | | Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional diadakan | 3 | 42.406.000 | - | 0 | - | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | | | |
| | | pengadaan peratan dan mesin lainnya | jumlah jenis peratan dan mesin diadakan | 4 | 2.173.215.975 | 4 | 521.635.004,00 | 4 | 2.163.355.100 | 0,00% | 0,00% | | | | | | |
| | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | 1 | 510.000.000 | - | - | 1 | 506.720.000 | | | | | | | | |
| | | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Survey kepuasan pelayanan umum | 92 | 9.700.958.963 | 9 | 9.270.416.481,00 | 9 | 9.501.190.000 | 55,56% | 52,87% | | | | | | |
| | | Penyediaan jasa surat menyurat | jumlah materai jumlah surat/barang yang dikirim | 2 | 100.325.000 | 3 | 53.189.000,00 | 2 | 43.340.000 | 100,00% | 68,76% | | | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | jumlah tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan | 12 | 807.600.000 | 12 | 653.190.901,00 | 12 | 669.525.000 | 41,67% | 89,23% | | | | | | |
| | | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | jumlah jenis jasa pelaratan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 2 | 228.697.963 | 2 | 250.407.480,00 | 2 | 224.000.000 | 50,00% | 32,14% | | | | | | |
| | | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | jumlah jenis jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | 9 | 8.564.336.000 | 9 | 8.313.629.100,00 | 9 | 8.564.325.000 | 55,56% | 50,49% | | | | | | |
| | | Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara | 3 | 3.845.490.000 | 17 | 1.884.365.247,00 | 3 | 7.023.240.500 | 200,00% | 10,41% | | | | | | |
| | | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | jumlah kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara | 17 | 603.990.000 | 17 | 404.289.715,00 | 17 | 602.085.500 | 64,71% | 29,04% | | | | | | |
| | | Pemelliharaan peralatan dan mesin lainnya | jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara | 3 | 922.500.000 | 3 | 437.981.100,00 | 3 | 921.290.000 | 100,00% | 28,62% | | | | | | |
| | | Pemeliharaan /Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | jumlah gedung kantor yang dipelihara | 1 | 2.319.000.000 | 1 | 1.042.094.432,00 | 1 | 5.499.865.000 | 200,00% | 5,32% | | | | | | |
| | | Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD | Survey Kepuasan Pelayanan Keuangan | 92 | 40.881.312.719 | 92 | 32.631.517.149,00 | 92 | 31.844.893.279 | 41,30% | 75,19% | | | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD | jumlah pimpinan dan anggota DPRD yang dilayani | 45 | 40.112.162.719 | 45 | 31.958.550.389,00 | 45 | 31.122.193.279 | 100,00% | 76,94% | | | | | | |
| | | Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD | Jumlah atribut DPRD yang tersedia dan jumlah pakaian dinas DPRD yang tersedia | 270 | 544.150.000 | 270 | 561.700.000,00 | 270 | 497.700.000 | 0,00% | 0,00% | | | | | | |
| | | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | Jumlah pimpinan dan anggota DPRD yang difasilitasi Medical Check Up | 45 | 225.000.000 | 10 | 111.266.760,00 | 45 | 225.000.000 | 2,22% | 0,00% | | | | | | |
| | | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Persentase Meningkatnya Fungsi Lembaga DPRD | 82 | 38.244.092.077 | 82 | 29.238.884.573,00 | 82 | 56.740.883.676 | 0,00% | 36,18% | | | | | | |
| | | Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD | Jumlah Produk Hukum Daerah dan Pendukung Produk Hukum Daerah yang Ditetapkan | 21 | 17.302.337.000 | 97 | 4.170.688.551,00 | 21 | 7.166.420.796 | 0,00% | 4,31% | | | | | | |
| | | Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah | jumlah laporan kegiatan bapemperda jumlah program pembentukan peraturan daerah | 6 | 2.036.449.000 | 9 | 255.891.909,00 | 6 | 514.715.056 | 0,00% | 30,97% | | | | | | |
| | | Pembahasan rancangan perda | jumlah rancangan peraturan daerah yang dibahas | 8 | 14.022.075.000 | 9 | 3.755.971.919,00 | 8 | 5.823.373.740 | 0,00% | 2,07% | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan kajian perundang-undangan | jumlah produk hukum yang dikaji | 3 | 297.935.000 | - | - | 3 | 278.122.000 | 0,00% | 0,00% | | | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau Naskah Akademik | jumlah penyusunan naskah akademik yang difasilitasi | 3 | 945.878.000 | 1 | 158.824.723,00 | 3 | 550.210.000 | 0,00% | 5,23% | | | | | | |
| | | Pembahasan kebijakan anggaran | jumlah kebijakan anggaran yang dibahas | 6 | 2.334.662.990 | 5 | 404.157.584,00 | 6 | 843.285.000 | 16,67% | 20,15% | | | | | | |
| | | Pembahasan KUA dan PPAS | Jumlah KUA dan PPAS yang dibahas | 1 | 398.023.808 | 1 | 76.920.118,00 | 1 | 136.990.000 | 0,00% | 14,57% | | | | | | |
| | | Pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS | jumlah perubahan KUA dan perubahan PPAS yang dibahas | 1 | 398.023.808 | 1 | 39.419.012,00 | 1 | 103.318.000 | 0,00% | 0,00% | | | | | | |
| | | Pembahasan APBD | jumlah APBD yang dibahas | 1 | 398.023.808 | 1 | 81.710.096,00 | 1 | 190.173.000 | 100,00% | 0,00% | | | | | | |
| | | Pembahasan perubahan APBD | jumlah perubahan APBD yang dibahas | 1 | 398.023.808 | 1 | 77.825.233,00 | 1 | 146.579.000 | 0,00% | 0,00% | | | | | | |
| | | Pembahasan laporan semester | jumlah laporan semester yang dibahas | 1 | 344.543.950 | - | 13.621.537,00 | 1 | 100.000.000 | 0,00% | 0,00% | | | | | | |
| | | Pembahasan pertanggungjawaban APBD | jumlah pertanggungjawaban APBD yang dibahas | 1 | 398.023.808 | 1 | 114.661.588,00 | 1 | 166.225.000 | 0,00% | 90,20% | | | | | | |
| | | Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan | jumlah laporan kegiatan yang mendukung pengawasan penyelenggaraan pemerintah | 121 | 36.009.196.429 | 870 | 17.978.828.800,00 | 121 | 33.636.950.200 | 41,32% | 41,24% | | | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | pengawasan urusan pemerintah bidang pemerintahan dan hukum | jumlah laporan pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum | 24 | 18.553.476.429 | 210 | 9.400.303.978,00 | 24 | 19.470.653.200 | 41,67% | 36,29% | | | | | | |
| | | Pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur | jumlah laporan Pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur | 24 | 3.851.809.000 | 101 | 1.160.627.928,00 | 24 | 2.758.350.000 | 41,67% | 25,08% | | | | | | |
| | | Pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat | jumlah laporan Pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat | 24 | 5.432.556.000 | 243 | 2.740.018.231,00 | 24 | 4.507.998.000 | 41,67% | 48,71% | | | | | | |
| | | Pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian | jumlah laporan Pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian | 24 | 5.700.166.000 | 277 | 3.256.517.419,00 | 24 | 4.802.168.000 | 66,67% | 54,26% | | | | | | |
| | | Pengawasan urusan pemerintahan bidang sumber daya alam | jumlah laporan Pengawasan urusan pemerintah bidang sumber daya alam | 12 | 1.583.532.000 | 37 | 1.305.543.368,00 | 12 | 1.698.395.000 | 41,67% | 70,63% | | | | | | |
| | | Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan | jumlah laporan Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan | 1 | 265.925.000 | 1 | 8.310.400,00 | 1 | 171.583.000 | 0,00% | 0,00% | | | | | | |
| | | Pengawasan penggunaan anggaran | jumlah laporan Pengawasan penggunaan anggaran | 12 | 621.732.000 | 1 | 107.507.476,00 | 12 | 227.803.000 | 41,67% | 49,71% | | | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Peningkatan kapasitas DPRD | persentase peningkatan kapasitas, publikasi dan dokumentasi tugas dan fungsi DPRD | 112 | 6.117.915.077 | 685 | 4.900.273.751,00 | 112 | 4.981.157.280 | 91,96% | 52,24% | | | | | | |
| | | Bimbingan Teknis | jumlah keikutsertaan pimpinan dan anggota DPRD pada bimbingan teknis | 112 | 6.117.915.077 | 74 | 939.993.749,00 | 90 | 1.300.000.000 | 57,78% | 69,98% | | | | | | |
| | | Publikasi dan dokumentasi dewan | jumlah kegiatan dewan yang dipublikasikan dan didokumentasikan | 8 | 3.806.357.077 | 887 | 3.209.280.002,00 | 8 | 2.823.157.280 | 62,50% | 45,28% | | | | | | |
| | | Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli | jumlah kelompok pakar dan tim ahli yang tersedia | 7 | 500.500.000 | 5 | 339.500.000,00 | 7 | 442.000.000 | 100,00% | 44,00% | | | | | | |
| | | Penyediaan tenaga ahli fraksi | jumlah tenaga ahli fraksi yang tersedia | 7 | 435.500.000 | 7 | 411.500.000,00 | 7 | 416.000.000 | 100,00% | 52,76% | | | | | | |
| | | Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat | jumlah laporan penghimpunan aspirasi masyarakat yang tersusun | 3 | 9.651.668.742 | 2 | 1.622.516.070,00 | 3 | 4.620.080.100 | 33,33% | 17,23% | | | | | | |
| | | Penyusunan Pokok - Pokok Fikiran DPRD | Jumlah Dokumen Pokok - Pokok Fikiran DPRD yang disusun | 450 | 150.000.000 | - | - | 450 | 150.000.000 | 66,67% | 57,43% | | | | | | |
| | | Pelaksanaan Reses | jumlah reses yang dilaksanakan | 3 | 9.001.668.742 | 2 | 1.622.516.070,00 | 3 | 4.470.080.100 | 33,33% | 15,88% | | | | | | |
| | | Pelaksanaan dan Pengawasan kode Etik DPRD | Jumlah peraturan DPRD tentang kode etik serta peraturan DPRD tentang tata | 2 | 442.269.486 | 7 | 264.893.595,00 | 8 | 271.590.300 | 25,00% | 62,11% | | | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | beracara badan kehormatan yang di tetapkan ; jumlah laporan kinerja bidang pengawasan DPRD yang dipublikasikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyusunan kode etik DPRD | jumlah peraturan DPRD tentang kode etik dan peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan yang ditetapkan | 2 | 322.269.486 | 2 | 162.419.817,00 | 2 | 164.661.400 | 50,00% | 58,65% | | | | | | |
| | | Pengawasan kode etik DPRD | jumlah laporan kinerja bidang pengawsan DPRD yang dipublikasikan | 6 | 120.000.000 | 5 | 102.473.778,00 | 6 | 106.928.900 | 33,33% | 67,44% | | | | | | |
| | | Fasilitasi tugas DPRD | jumlah laporan tugas badan musyarawah dan jumlah tugas pimpinan DPRD yang difasilitasi | 72 | 14.823.840.000 | 295 | 3.982.154.598,00 | 72 | 5.221.400.000 | 41,67% | 49,99% | | | | | | |
| | | Fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyarawah | jumlah laporan tugas badan musyarawah | 6 | 1.034.352.000 | 3 | 167.366.486,00 | 6 | 650.000.000 | 50,00% | 37,03% | | | | | | |
| | | Fasilitasi tugas pimpinan DPRD | jumlah tugas pimpinan DPRD yang difasilitasi | 240 | 13.789.488.000 | 392 | 3.814.788.112,00 | 240 | 4.571.400.000 | 46,67% | 51,83% | | | | | | |
| | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | URUSAN PERENCANAAN | | | | | | | | | | | | | | BAPPEDA | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai SAKIP PD (Bappeda) | 83,27 | 298.976.028 | | | 83,24 | 149.488.014 | 50,00% | 11,61% | 41,62 | 17.360.000 | 49,98% | 5,81% | | |
| | | | Survey kepuasan pelayanan keuangan | 75,00 | 32.199.216.820 | | | 75 | 16.099.608.410 | 50,00% | 43,10% | 37,50 | 6.939.664.703 | 50,00% | 21,55% | | |
| | | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daearah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerj PD | 12,00 | 298.976.028 | | | 6 | Rp 149.488.014 | 50,00% | 11,61% | | | | | | |
| | | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | survey kepuasan pelayanan keuangan | 75,00 | 23.348.625.978 | | | 75 | Rp 11.674.312.989 | 46,67% | 47,39% | | | | | | |
| | | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | survey kepuasan pelayanan umum | 75,00 | 503.150.000 | | | 75 | Rp 251.575.000 | 40,00% | 1,18% | | | | | | |
| | | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | survey kepuasan pelayanan kepegawaian | 75,00 | 2.522.070.286 | | | 75 | Rp 1.261.035.143 | 40,00% | 22,83% | | | | | | |
| | | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan | 20,00 | 862.841.716 | | | 6 | Rp 431.420.858 | 33,33% | 35,00% | | | | | | |
| | | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | 24,00 | 2.532.976.000 | | | 12 | Rp 1.266.488.000 | 58,33% | 44,08% | | | | | | |
| | | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara | 44,00 | 2.429.552.840 | | | 22 | Rp 1.214.776.420 | 11,36% | 33,47% | | | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase konsistensi program pembangunan di RKPD dengan RPJMD dan Renstra dengan RPJMD | 100,00 | 2.812.454.978 | | | 100 | 1.406.227.489 | 50,00% | | | | | | | |
| | | | Persentase rumusan hasil pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti | 70,00 | 2.007.518.088 | | | 70 | 1.003.759.044 | 50,00% | | | | | | | |
| | | Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun | 4,00 | 2.549.334.978 | | | 2 | Rp 1.274.667.489 | 100,00% | 3,12% | | | | | | |
| | | Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | jumlah laporan analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan | 2,00 | 263.120.000 | | | 1 | Rp 131.560.000 | 0,00% | 0,62% | | | | | | |
| | | Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah | Jumlah laporan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah | 42,00 | 2.007.518.088 | | | 21 | Rp 1.003.759.044 | 42,86% | 0,37% | | | | | | |
| | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan | 100,00 | 2.382.303.438 | | | 100 | 1.191.151.719 | | - | | | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | PEMBANGUNAN DAERAH | Pembangunan daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Persentase rumusan hasil pengendalian dan evaluasi pada dokumen perencanaan PD | 90,00 | 721.615.624 | | | 90 | 360.807.812 | 50,00% | 5 | | | | | | |
| | | Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | jumlah laporan hasil fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan | 24,00 | 166.406.470 | | | 2 | Rp 83.203.235,00 | 0,00% | 0,00% | | | | | | |
| | | | | | 201.411.816 | | | 10 | Rp 100.705.908,00 | 0,00% | 0,00% | | | | | | |
| | | | jumlah laporan hasil fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia | 20,00 | 65.824.870 | | | 2 | Rp 32.912.435,00 | 0,00% | 0,00% | | | | | | |
| | | | | | 1.094.927.386 | | | 8 | Rp 547.463.693,00 | 0,00% | 0,00% | | | | | | |
| | | | jumlah Laporan hasil monev penyusunan dokumen perencanaan bidang perencanaan bidang pemerintahan | 8,00 | 128.955.732 | | | 4 | Rp 64.477.866,00 | 50,00% | 10,17% | | | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | jumlah laporan hasil monev penyusunan dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia | 8,00 | 152.692.996 | | | 4 | Rp 76.346.498,00 | 0,00% | 0,00% | | | | | | |
| | | Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA | jumlah laporan hasil fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan bidang perekonomian | 6,00 | 134.221.344 | | | 2 | Rp 67.110.672,00 | 0,00% | 0,00% | | | | | | |
| | | | | | 112.008.150 | | | 1 | Rp 56.004.075,00 | 0,00% | 0,00% | | | | | | |
| | | | jumlah laporan hasil fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan bidang SDA | 8,00 | 70.469.388 | | | 2 | Rp 35.234.694,00 | 0,00% | 0,00% | | | | | | |
| | | | | | 155.782.742 | | | 2 | Rp 77.891.371,00 | 0,00% | 0,00% | | | | | | |
| | | | jumlah Laporan hasil monev penyusunan dokumen perencanaan bidang perencanaan bidang perekonomian | 8,00 | 79.765.320 | | | 4 | Rp 39.882.660,00 | 50,00% | 12,34% | | | | | | |
| | | | jumlah laporan hasil monev penyusunan dokumen perencanaan bidang SDA | 8,00 | 154.945.998 | | | 4 | Rp 77.472.999,00 | 50,00% | 7,41% | | | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | jumlah laporan hasil fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan bidang Infrastruktur | 4,00 | 216.053.842 | | | 2 | Rp 108.026.921,00 | 0,00% | 0,00% | | | | | | |
| | | | jumlah laporan hasil fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan bidang Kewilayahan | 4,00 | 165.197.430 | | | 2 | Rp 82.598.715,00 | 0,00% | 0,00% | | | | | | |
| | | | jumlah Laporan hasil monev penyusunan dokumen perencanaan bidang perencanaan bidang Infrastruktur | 8,00 | 113.611.772 | | | 4 | Rp 56.805.886,00 | 0,00% | 0,00% | | | | | | |
| | | | jumlah laporan hasil monev penyusunan dokumen perencanaan bidang Kewilayahan | 8,00 | 91.643.806 | | | 4 | Rp 45.821.903,00 | 0,00% | 0,00% | | | | | | |
| | | Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah | Predikat SAKIP Bappeda (Predikat) | 92,00 | 37.869.534.100 | 83,27 | 11.412.254.284 | 0 | - | | | 82,00 | 11.412.254.284 | 89,13% | 30,14% | | |
| | | | Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan (Predikat) | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| | | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Jumlah aparatur perangkat daerah yang terlayani (Orang) | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Jumlah aparatur perangkat daerah yang terlayani (Orang) | 100,00 | 3.254.243.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | Peningkatan Disiplin Aparatur | | | 145.000.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Jumlah aparatur perangkat daerah yang terlayani (Orang) | 35,00 | 650.000.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang tersusun (Laporan) | 7,00 | 175.000.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun (Dokumen) | 3,00 | 250.000.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | Peningkatan Kapasitas ASN Perecana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Perencanaan, Evaluasi Dan Informasi Pembangunan Daerah | Persentase data perencanaan pembangunan yang digunakan berdasarkan SIPD dan SIG (Persen) | 100,00 | 26.990.808.050 | 85,00 | 6.413.111.557 | | | | | | | | | | |
| | | | Persentase rumusan hasil pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti (Persen) | 85,00 | | 70,00 | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | Persentase konsistensi program pembangunan di RKPD dengan RPJMD dan Renstra dengan RPJMD) (Persen) | 100,00 | | 85,00 | | | | | | | | | | | |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang tersusun (Dokumen) | 2,00 | 2.500.000.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang terkelola (Aplikasi) | 2,00 | 250.000.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah | Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi yang disusun (Laporan) | 17,00 | 1.550.000.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | Pengembangan Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah | Jumlah sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang terkelola (Aplikasi) | 2,00 | 175.000.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | Pengembangan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah elemen data edatabase pada sistem informasi pembangunan daerah yang terisi dan tervalidasi (Data) | 500,00 | 570.000.000 | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Penyusunan Rumusan Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah | Jumlah laporan/rekomendasi bahan rumusan kebijakan percepatan pembangunan daerah (Laporan/Rekomendasi) | 10,00 | 1.735.690.550 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah | Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan sinkronisasi (Laporan) | 3,00 | 500.000.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | Analisis Isu-isu Stategis dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Analisis Isu-isu Strategis Pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan | Persentase rumusan hasil pengendalian dan evaluasi pada dokumen perencanaan PD mitra kerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang ditindaklanjuti (Persentase) | 100,00 | 8.857.969.500 | 85,00 | 1.839.800.600 | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | Persentase Renstra PD mitra kerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang baik (memiliki rencana kinerja yang baik, tepat, dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat) (Persentase) | 90,00 | | 90,00 | | | | | | | | | | | |
| | | Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I | Jumlah rapat perencanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja pada mitra kerja Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I (Kali) | 4,00 | 492.405.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II | Jumlah rapat perencanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja pada mitra kerja Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II (Kali) | 4,00 | 607.753.000 | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Infratruktur dan Pengembangan Wilayah I | Jumlah rapat perencanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja pada mitra kerja Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I (Kali) | 1,00 | 400.000.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Infratruktur dan Pengembangan Wilayah II | Jumlah rapat perencanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja pada mitra kerja Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II (Kali) | 1,00 | 500.000.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam | Persentase Renstra PD mitra kerja Bidang Perekonomian dan SDA yang baik (memiliki rencana kinerja yang baik, tepat, dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat) (Persentase) | 90,00 | 8.702.707.500 | 90,00 | 1.823.856.000 | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | Persentase rumusan hasil pengendalian dan evaluasi pada dokumen perencanaan PD mitra kerja Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang ditindaklanjuti (Persentase) | 90,00 | | 90,00 | | | | | | | | | | | |
| | | Perencanaan Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I | Jumlah rapat perencanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja pada Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I (Kali) | 4,00 | 364.652.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | Perencanaan Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II | Jumlah rekomendasi hasil koordinasi perencanaan urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan, ESDM, Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan yang dihasilkan (Rekomendasi/Laporan) | 4,00 | 464.652.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I | Terlaksananya rapat pada Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I (Kali) | 1,00 | 475.000.000 | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II | Jumlah koordinasi pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II (Kali) | 1,00 | 425.000.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon Pro. Kep. Bangka Belitung | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyusunan Neraca Perdagangan antar pulau di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Perencanaan Sosial,Budaya dan Pemerintahan | Persentase Renstra PD mitra kerja Bidang sosial budaya dan pemerintahan yang baik (memiliki rencana kinerja yang baik, tepat, dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat) (Persentase) | 90,00 | 8.944.352.250 | 90,00 | 1.960.356.800 | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | Persentase rumusan hasil pengendalian dan evaluasi pada dokumen perencanaan PD mitra Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan ditindaklanjuti (Persentase) | 90,00 | | 75,00 | | | | | | | | | | | |
| | | Perencanaan Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan I | Jumlah rapat pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja pada Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan I (Kali) | 4,00 | 625.000.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | Perencanaan Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan II | Jumlah rapat pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja pada Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan II (Kali) | 4,00 | 425.000.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan I | Jumlah koordinasil pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja pada Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan I (Kali) | 1,00 | 400.000.000 | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan II | Jumlah koordinasil pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja pada Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan II (Rekomendasi/Laporan) | 1,00 | 400.000.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyusunan Study Perencanaan Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan | Jumlah study perencanaan bidang sosial, budaya dan pemerintahan yang dihasilkan (Laporan) | 1,00 | 360.000.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | Anaisis Isu-isu Strategis Pencapaian Indikator SDGs di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | URUSAN KEUANGAN | | | | | | | | | | | | | | BAKUDA | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai Sakip Perangkat Daerah | 82,00 | 117.378.413.138 | 0,00 | - | 82,00 | 64.924.768.593 | 4,88% | 36,67% | 4,00 | 23.809.071.886 | 4,88% | 20,28% | | |
| | | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dok perencanaan dan evaluasi | 26,00 | 281.405.000 | 0,00 | - | 13,00 | 181.405.000 | 61,54% | 0,00% | 8 | - | 30,77% | 0,00% | | |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | jumlah dokumen perencanaan PD | 12,00 | 133.763.000,00 | 0,00 | - | 6,00 | 83.763.000 | 66,67% | 4,07% | 4 | 3.410.000 | 33,33% | 2,55% | | |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen laporan dan Evaluasi PD | 14,00 | 147.642.000,00 | 0,00 | - | 7,00 | 97.642.000 | 57,14% | 5,07% | 4 | 4.950.000 | 28,57% | 3,35% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Survey kepuasan pelayanan keuangan | 83,00 | 103.185.229.512 | 0,00 | - | 83,00 | 55.283.499.809 | 0,00% | 36,10% | - | 19.957.116.752 | 0,00% | 19,34% | | |
| | | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan | 263,00 | 103.028.626.492,00 | 0,00 | - | 266,00 | 55.176.896.789 | 96,24% | 36,17% | 256 | 19.956.296.752 | 97,34% | 19,37% | | |
| | | Pelaksanaan penata usahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | Jumlah dokumen penatausahaan danpengujian/verifikasi SKPD | 2400,00 | 156.603.020,00 | 0,00 | - | 1.200,00 | 106.603.020 | 42,50% | 0,77% | 510 | 820.000 | 21,25% | 0,52% | | |
| | | | | | | | - | | | | | | | | | | |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Survey kepuasan pelayanan kepegawaian | 82,00 | 211.799.000 | | | 82,00 | 161.799.000 | | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai | jumlah laporan monitoring kinerja pegawai | 24,00 | 129.413.000 | 0,00 | - | 12,00 | 79.413.000 | 50,00% | 0,00% | 6 | - | 25,00% | 0,00% | | |
| | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | jumlah pegawai yang mengikuti diklat/bimtek | 10,00 | 82.386.000 | 0,00 | - | 10,00 | 82.386.000 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Survey kepuasan pelayanan umum | 82,00 | 3.804.001.667 | | | 82 | 2.374.301.667 | | 26,19% | - | 621.790.568 | 0,00% | 16,35% | | |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah barang Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 30,00 | 29.945.273,00 | 0,00 | - | 15,00 | 17.945.273 | 40,00% | 0,00% | 6 | - | 20,00% | 0,00% | | |
| | | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah jenis bahan logistik kantor | 14,00 | 50.598.100,00 | 0,00 | - | 7,00 | 32.598.100 | 71,43% | 5,77% | 5 | 1.880.100 | 35,71% | 3,72% | | |
| | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaa | 36,00 | 1.590.237.294,00 | 0,00 | - | 18,00 | 989.737.294 | 38,89% | 22,26% | 7 | 220.355.300 | 19,44% | 13,86% | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah jenis Bahan Bacaan | 30,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | - | 15,00 | 30.000.000 | 33,33% | 30,10% | 5 | 9.030.000 | 16,67% | 15,05% | | |
| | | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah tamu yang difasilitasi | 840,00 | 62.400.000,00 | 0,00 | - | 480,00 | 31.200.000 | 33,33% | 7,46% | 160 | 2.326.000 | 19,05% | 3,73% | | |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi BAKUDA | 68,00 | 499.241.000 | 0,00 | - | 68,00 | 499.241.000 | 17,65% | 15,50% | 12 | 77.378.731 | 17,65% | 15,50% | | |
| | | Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD | Jumlah asistensi penatausahaan arsip BAKUDA | 12,00 | 50.580.000 | 0,00 | - | 12,00 | 50.580.000 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah SPBE yang beropersional dengan baik padaBAKUDA | 8,00 | 1.461.000.000,00 | 0,00 | - | 4,00 | 723.000.000 | 100,00% | 42,99% | 4 | 310.820.437 | 50,00% | 21,27% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah tenaga honorer berkontrak pada BAKUD | 153,00 | 13.186.178.627 | | | 153 | 6.558.904.627 | | 43,69% | - | 2.865.306.076 | 0,00% | 21,73% | | |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | jumlah materai yang dibel | 750,00 | 110.488.000,00 | 0,00 | | 350 | 70.488.000 | 42,86% | 0,00% | 150 | - | 20,00% | 0,00% | | |
| | | | jumlah pengiriman surat/barang | 1000,00 | | | | 556 | | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | jumlah bulan rekening | 48,00 | 512.000.000,00 | 0,00 | - | 24 | 295.000.000 | 50,00% | 30,50% | 12 | 89.989.526 | 25,00% | 17,58% | | |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | jumlah jenis ATK dan bahan pembersi | 120,00 | 12.563.690.627,00 | 0,00 | - | 64 | 6.193.416.627 | 43,75% | 44,81% | 28 | 2.775.316.550 | 23,33% | 22,09% | | |
| | | | jumlah tenaga honorer berkontrak pada BAKUD | 161,00 | | | | 153 | | 105,23% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara | 258,00 | 592.165.290 | | | 176,00 | 364.858.490 | | 100,00% | - | 364.858.490 | 0,00% | 61,61% | | |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara | 1,00 | 80.994.400,00 | 0,00 | - | 1 | 40.497.200 | 100,00% | 2,22% | 1 | 900.000 | 100,00% | 1,11% | | |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihar | 4,00 | 163.619.200,00 | 0,00 | - | 4 | 81.809.600 | 100,00% | 1,69% | 4 | 1.384.000 | 100,00% | 0,85% | | |
| | | Pemeliharaan Peralatan Mebel | Jumlah mebel yang dipelihara | 2,00 | 5.000.000 | 0,00 | - | | 0 | 0,00% | 0,00% | 2 | - | 100,00% | 0,00% | | |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | jumlah BMD peralatan dan mesin yang di pelihara | 250,00 | 184.301.690,00 | 0,00 | - | 170 | 134.301.690 | 15,29% | 14,25% | 26 | 19.142.700 | 10,40% | 10,39% | | |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | jumlah gedung kantor berserta halamannya yangdipelihara | 1,00 | 158.250.000,00 | 0,00 | - | 1 | 108.250.000 | 100,00% | 61,93% | 1 | 67.043.000 | 100,00% | 42,37% | | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Persentase transaparansi dan akuntabiitaspengelolaan keuangan daerah | 100,00 | 817.585.634.349 | 0,00 | - | 100 | 409.293.082.454 | 0,00% | 8,24% | 0,00 | 33.733.059.874 | 0,00% | 4,13% | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Persentase pemenuhan ketaatan pada peraturan dalam penyusunan APBD Provinsi danProsentase ketepatan waktu penetapan APBD dan APBD Perubahan Provinsi | 100,00 | 2.108.615.280 | 0,00 | - | 100 | 1.312.249.280 | 0,00% | 12,97% | - | 170.258.800 | 0,00% | 8,07% | | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | Jumlah dokumen KUA dan PPAS | 4,00 | 163.419.743,00 | 0,00 | - | 2 | 101.711.743 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah dokumen KUPA dan Perubahan PPAS | 4,00 | 163.419.743,00 | 0,00 | - | 2 | 101.711.743 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Jumlah peraturan tersusun | 4,00 | 766.005.248,00 | 0,00 | - | 2 | 476.755.248 | 0,00% | 8,53% | - | 40.658.800 | 0,00% | 5,31% | | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah peraturan tersusun | 4,00 | 780.946.896,00 | 0,00 | - | 2 | 485.946.896 | 0,00% | 26,67% | - | 129.600.000 | 0,00% | 16,60% | | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Jumlah peraturan tersusun | 5,00 | 234.823.650,00 | 0,00 | - | 3 | 146.123.650 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase ketepatan waktu penyampaian rancangan APBD Kabupaten/Kota yangdievaluasi dan Persentase ketepatan waktu penyampaian rancanganpertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi | 100,00 | 558.919.788 | | - | 100 | 347.869.788 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota | Jumlah Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi KAbupaten/Kota | 14,00 | 93.915.933,00 | 0,00 | - | 7 | 58.452.933 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota | Jumlah Keputusan Gubernur tentang Evaluasi APBD KAbupaten/Kota | 14,00 | 99.606.997,00 | 0,00 | - | 7 | 61.994.997 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Perubahan APBD KAbupaten/Kota | 14,00 | 98.857.909,00 | 0,00 | - | 7 | 61.528.909 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 14,00 | 102.067.000,00 | 0,00 | - | 7 | 63.526.000 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota | jumlah asistensi pemecahan permasalahan penyusunan APBD Kab/kota | 14,00 | 164.471.949,00 | 0,00 | - | 7 | 102.366.949 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | prosentase kesesuaian waktu pelayanan terhadap pencairan dana keuangan | 100,00 | 680.787.500 | | - | 100 | 423.719.500 | 0,00% | 2,74% | - | 11.600.000 | 0,00% | 1,70% | | |
| | | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Jumlah dokumen register SP2D, Buku Kas Umum B.IX BUD, Laporan posisi kas harian dan laporan posisi kas bulanan, dokumen SPD | 24,00 | 129.678.250,00 | 0,00 | - | 12 | 80.711.250 | 50,00% | 14,37% | 6 | 11.600.000 | 25,00% | 8,95% | | |
| | | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Jumlah dokumen terverifikasi | 24,00 | 64.782.000,00 | 0,00 | - | 12 | 40.320.000 | 50,00% | 0,00% | 6 | - | 25,00% | 0,00% | | |
| | | Penatausahaan Pembiayaan Daerah | jumlah dokumen penatausahaan pembiayaan | 2,00 | 99.707.400,00 | 0,00 | - | 1 | 62.057.400 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi , Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya | Dokumen kesepakatan Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya | 100,00 | 67.496.950,00 | 0,00 | - | 95 | 42.009.950 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Koordinasi, pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | jumlah dokumen rekonsiliasi dan laporan | 7,00 | 101.551.900,00 | 0,00 | - | 7 | 63.205.900 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait | Jumlah SP2D yang dikeluarkan | 24,00 | 217.571.000,00 | 0,00 | - | 12 | 135.415.000 | 50,00% | 0,00% | 6 | - | 25,00% | 0,00% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | persentase laporan keuangan PD yang sesuai dengan SAP | 100,00 | 740.119.991 | | - | 100 | 460.647.991 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | Jumlah dokumen rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah | 24,00 | 75.756.607,00 | 0,00 | - | 12 | 47.150.607 | 50,00% | 0,00% | 6 | - | 25,00% | 0,00% | | |
| | | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | Jumlah asistensi penyusunan laporan keuangan kepada SKPD | 64,00 | 124.967.788,00 | 0,00 | - | 34 | 77.779.788 | 79,41% | 0,00% | 27 | - | 42,19% | 0,00% | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi | Jumlah Perda pertanggungjawaban APBD | 2,00 | 382.494.596,00 | 0,00 | - | 1 | 238.062.596 | 200,00% | 0,00% | 2 | - | 100,00% | 0,00% | | |
| | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | Jumlah penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah | 10,00 | | 0,00 | - | | | | | 0,00 | | 0,00% | | | |
| | | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | Jumlah peraturan tersusun | 2,00 | 75.988.000,00 | 0,00 | - | 1 | 47.295.000 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah peraturan tentang sisdur | 2,00 | 80.913.000,00 | 0,00 | - | 1 | 50.360.000 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | persentase realisasi dana transfer ke Kabupaten/Kota dan bantuan sosial tak terencana | 100,00 | 813.497.191.790 | | - | 95 | 406.748.595.895 | 0,00% | 23,78% | - | 96.744.510.043 | 0,00% | 11,89% | | |
| | | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | persentase realisasi bantuan keuangan | 95,00% | 78.564.797.746 | 0,00 | - | 95,00% | 39.282.398.873 | 20,40% | 19,38% | 0 | 7.613.700.783 | 20,40% | 9,69% | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | persentase realisasi belanja bantuan sosial yang tidakdirencanakan | 95,00% | 64.131.857.552 | 0,00 | - | 95,00% | 32.065.928.776 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi | persentase realisasi belanja dana bagi hasil pajakdaerah | 95,00% | 670.800.536.492 | 0,00 | - | 95,00% | 335.400.268.246 | 17,39% | 26,57% | 0 | 89.130.809.260 | 17,39% | 13,29% | | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Persentase tindak lanjut temuan BPK terhadap nilaiaset daerah yang dianggap belum diyakinikewajarannya/tidak memadai | 95,75 | 1.556.278.861 | | | 95,5 | 968.790.861 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Pengelolaan Barang Milik Daerah | persentase laporan BMD PD yang sesuai dengan Peraturan | 100,00 | 1.556.278.861 | | | 100 | 968.790.861 | 0,00% | 2,47% | - | 23.947.800 | 0,00% | 1,54% | | |
| | | Penyusunan Standar Harga | Jumlah Keputusan Gubernur tentang penetapan Standar Harga | 2 | 168.391.139,00 | 0,00 | - | 1 | 104.806.139 | 100,00% | 11,83% | 1 | 12.402.800 | 50,00% | 7,37% | | |
| | | Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik daerah | Jumlah Keputusan Sekda tentang RKBMD | 2 | 153.801.758,00 | 0,00 | - | 1 | 95.725.758 | 100,00% | 5,12% | 1 | 4.905.000 | 50,00% | 3,19% | | |
| | | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Tersajinya data BMD yang terupdate pada sistem Informasi Pengelolaan BMD | 64 | 129.837.939,00 | 0,00 | - | 34 | 80.810.939 | 79,41% | 0,00% | 27 | - | 42,19% | 0,00% | | |
| | | Inventarisasi Barang Miilik Daerah | Tersusunnya dokumen inventarisasi BMD | 2 | 224.477.886,00 | 0,00 | - | 1 | 139.713.886 | 100,00% | 0,00% | 1 | - | 50,00% | 0,00% | | |
| | | Pengamanan Barang Milik Daerah | Jumlah laporan Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan | 2 | 208.520.442,00 | 0,00 | - | 1 | 129.782.442 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | Hukum Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penilaian barang Milik daerah | Jumlah Dokumen Penilaian Asset dalam rangka pemindahtanganan, pemanfaatan dan penyusunan neraca daerah | 2 | 253.955.806,00 | 0,00 | - | 1 | 158.060.806 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah | Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 6 | 121.478.759,00 | 0,00 | - | 3 | 75.607.759 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Optamilisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah | 2 | 129.175.799,00 | 0,00 | - | 1 | 80.398.799 | 0,00% | 2,04% | - | 1.640.000 | 0,00% | 1,27% | | |
| | | Rekonsiliasi dalam Rangka Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah dokumen Rekonsiliasi BMD | 60 | 99.027.818,00 | 0,00 | - | 34 | 61.634.818 | 79,41% | 8,11% | 27 | 5.000.000 | 45,00% | 5,05% | | |
| | | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan BMD | 4 | 67.611.515,00 | 0,00 | - | 2 | 42.249.515 | 50,00% | 0,00% | 1 | - | 25,00% | 0,00% | | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Persentase Peningkatan pertumbuhan PAD | 7,57% | 2.194.096.568 | | | 7,55% | 1.365.595.568 | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah | Persentasse PAD terhadap Pendapatan Daerah | 32,96 | 2.194.096.568 | | | 32,74 | 1.365.595.568 | 31,12% | | | | | | | |
| | | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan pajak Daerah | jumlah dokumen kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah | 4 | 175.428.000,00 | 0,00 | - | 2 | 109.186.000 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | jumlah dokumen | 4 | 319.244.640,00 | 0,00 | - | 2 | 198.696.640 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Jumlah dokumen data pajak daerah dan retribusi daerah | 4 | 832.113.000,00 | 0,00 | - | 2 | 517.903.000 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Razia yang dilaksanakan | 168 | 330.607.000,00 | 0,00 | - | 84 | 205.768.000 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak daerah | Jumlah UPT yang dievaluasi | 14 | 147.640.743,00 | 0,00 | - | 7 | 91.890.743 | 100,00% | 0,00% | 7 | - | 50,00% | 0,00% | | |
| | | Pembinaan dan Pengawasan Retribusi Daerah | Jumlah UPT yang dievaluasi | 50 | 389.063.185,00 | 0,00 | - | 25 | 242.151.185 | 28,00% | 0,00% | 7 | - | 14,00% | 0,00% | | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai Sakip Perangkat Daerah | 82,00 | 1.934.874.954 | 0,00 | - | 82 | 1.204.254.954 | 4,88% | 19,56% | 4,00 | 235.528.600 | 4,88% | 12,17% | UPTB PANGKALPINANG BAKUDA | |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Survey kepuasan pelayanan umum | 82,00 | 510.596.666 | | | | 317.789.666 | | 21,42% | - | 68.081.200 | 0,00% | 13,33% | | |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik | 30,00 | 16.056.558,00 | 0,00 | - | 15,00 | 9.993.558 | 53,33% | 32,55% | 8 | 3.253.200 | 26,67% | 20,26% | | |
| | | Penyediaan bahan | jumlah bahan | 14,00 | | 0,00 | | 3,00 | 18.400.000 | 100,00% | 0,00% | | | 21,43% | 0,00% | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | logistik kantor | logistik kantor | | 29.563.000,00 | | - | | | | | 3 | - | | | | |
| | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | jumlah barang cetakan dan penggandaan | 36,00 | 46.593.745,00 | 0,00 | - | 12,00 | 28.999.745 | 41,67% | 0,00% | 5 | - | 13,89% | 0,00% | | |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan | 30,00 | 7.712.000,00 | 0,00 | - | 15,00 | 4.800.000 | 46,67% | 0,00% | 7 | - | 23,33% | 0,00% | | |
| | | Penyediaan Bahan/Material | Tersedianya jumlah bahan/material | 840,00 | 347.337.363,00 | 0,00 | - | 12,00 | 216.177.363,00 | 50,00% | 29,29% | 6 | 63.323.000 | 0,71% | 18,23% | | |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti | 120,00 | 63.334.000,00 | 0,00 | - | 10,00 | 39.419.000 | 40,00% | 3,82% | 4 | 1.505.000 | 3,33% | 2,38% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan | 72,00 | 238.538.442 | | | 51 | 148.465.442 | | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Pengadaan Mebel | tersedianya peratan meubelair kantor | 60,00 | 164.613.949,00 | 0,00 | - | 43,00 | 102.454.949 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | tersedianya peralatan gedung kantor | 12,00 | 73.924.493,00 | 0,00 | - | 8,00 | 46.010.493 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Tersedianya sumber daya elektrik | 24,00 | 451.397.000 | | | 12 | 280.948.000 | | 34,65% | - | 97.344.520 | 0,00% | 21,57% | | |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | jumlah materai | 1000,00 | 6.021.000,00 | 0,00 | - | 625,00 | 3.748.000 | 24,00% | 13,34% | 150 | 500.000 | 15,00% | 8,30% | | |
| | | | Jumlah Surat/Barang yang dikirim | 200,00 | | | | 100,00 | | 42,00% | 0,00% | 42 | - | 21,00% | 0,00% | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, internet, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan pada UPTB Wilayah Kota Pangkalpinang | 24,00 | 445.376.000,00 | 0,00 | - | 12,00 | 277.200.000 | 50,00% | 34,94% | 6 | 96.844.520 | 25,00% | 21,74% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang milik daerah yang dipelihara | 125,00 | 734.342.846 | | | 76 | 457.051.846 | | 15,34% | - | 70.102.880 | 0,00% | 9,55% | | |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah mobil operasional yang dipelihara | 4,00 | 128.882.100,00 | 0,00 | - | 5,00 | 80.216.100 | 80,00% | 20,69% | 4 | 16.593.500 | 100,00% | 12,87% | | |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin lainny | 250,00 | 123.456.946,00 | 0,00 | - | 12,00 | 76.838.946 | 266,67% | 16,06% | 32 | 12.341.000 | 12,80% | 10,00% | | |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara | 1,00 | 482.003.800,00 | 0,00 | - | 1,00 | 299.996.800 | 100,00% | 13,72% | 1 | 41.168.380 | 100,00% | 8,54% | | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Persentase Peningkatan pertumbuhan PAD | 7,57% | 474.350.000 | | | 7,55% | 279.350.000 | | | | | | | | |
| | | Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah | Persentasse PAD terhadap Pendapatan Daerah | 32,96 | 474.350.000 | | | 32.74 | 279.350.000 | | | | | | | | |
| | | Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek | Data kendaraan roda 2 dan roda 4 | 8000 | 41.000.000,00 | 0,00 | - | 4.000,00 | 21.000.000 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Tersedianya pelayanan dan konsultasi pajak daerah | 24 | 433.350.000,00 | 0,00 | - | 12,00 | 258.350.000 | 50,00% | 0,00% | 6 | - | 25,00% | 0,00% | | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai Sakip Perangkat Daerah | 82,00 | 1.420.715.250 | 0,00 | - | 82 | 815.770.250 | 4,88% | 28,58% | 4,00 | 233.157.085 | 4,88% | 16,41% | UPTB BANGKA BAKUDA | |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Survey kepuasan pelayanan umum | 82,00 | 572.113.916 | | | 82 | 296.609.916 | | 27,05% | - | 80.229.975 | 0,00% | 14,02% | | |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik | 15,00 | 11.998.737,00 | 0,00 | - | 5,00 | 5.998.737 | 60,00% | 31,14% | 3 | 1.868.000 | 20,00% | 15,57% | | |
| | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah jenis bahan dan Peralatan kebersihan kantoryang tersedia | 14,00 | 224.803.272,00 | 0,00 | - | 12,00 | 119.999.272,00 | 58,33% | 22,78% | 7 | 27.330.500 | 50,00% | 12,16% | | |
| | | Penyediaan bahan logistik kantor | Tersedianya jumlah logistik kantor | 36,00 | 212.122.080,00 | 0,00 | - | 12,00 | 105.622.080 | 50,00% | 31,23% | 6 | 32.990.875 | 16,67% | 15,55% | | |
| | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | jumlah barang cetak | 24,00 | 40.999.827,00 | 0,00 | - | 12,00 | 17.999.827 | 50,00% | 20,56% | 6 | 3.700.600 | 25,00% | 9,03% | | |
| | | | jumlah penggandaan | 20000000,00 | | 0,00 | - | 12.000,00 | | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan perundang-undanga | 30,00 | 11.200.000,00 | 0,00 | - | 15,00 | 6.000.000 | 33,33% | 69,00% | 5 | 4.140.000 | 16,67% | 36,96% | | |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 24,00 | 70.990.000,00 | 0,00 | - | 12,00 | 40.990.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Tersedianya sumber daya elektrik | 24,00 | 458.741.000 | | | 12 | 246.600.000 | | 47,00% | - | 115.908.510 | 0,00% | 25,27% | | |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah meterai | 750,00 | 8.033.000,00 | 0,00 | - | 750,00 | 5.000.000 | 20,27% | 25,56% | 152 | 1.278.000 | 20,27% | 15,91% | | |
| | | | jumlah surat/ barang yang dikirim | | | | | 88,00 | | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, internet, tvkabel, virtual meeting yang dibayarkan | 24,00 | 449.100.000,00 | 0,00 | - | 12,00 | 240.600.000 | 50,00% | 47,52% | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | tersedianya jasa pelayanan umum kantor | 24,00 | 1.608.000,00 | 0,00 | - | 12,00 | 1.000.000 | 150,00% | 30,00% | 18 | 300.000 | 75,00% | 18,66% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang milik daerah yang dipelihara | 32 | 389.860.334 | | | 20 | 272.560.334 | | 13,58% | - | 37.018.600 | 0,00% | 9,50% | | |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | jumlah mobil operasional yang dipelihara | 7,00 | 99.700.000,00 | 0,00 | - | 7,00 | 67.400.000 | 71,43% | 9,33% | 5 | 6.289.600 | 71,43% | 6,31% | | |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesinlainnya | 24,00 | 181.910.334,00 | 0,00 | - | 12,00 | 96.910.334 | 108,33% | 11,53% | 13 | 11.169.000 | 54,17% | 6,14% | | |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor yang dipelihar | 1,00 | 108.250.000 | 0,00 | - | 1,00 | 108.250.000 | 100,00% | 18,07% | 1 | 19.560.000 | 100,00% | 18,07% | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Persentase Peningkatan pertumbuhan PAD | 7,57% | 396.240.000 | | | 7,55% | 181.340.000 | | | | | | | | |
| | | Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah | Persentasse PAD terhadap Pendapatan Daerah | 32,96 | 396.240.000 | | | 32.74 | 181.340.000 | | | | | | | | |
| | | Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | Data kendaraan roda 2 dan roda 4 | 10000 | 79.800.000,00 | 0,00 | - | 5.000,00 | 39.900.000 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Tersedianya pelayanan dan konsultasi pajak daerah | 100 | 316.440.000,00 | 0,00 | - | 100,00 | 141.440.000 | 50,00% | 25,28% | 50 | 35.750.000 | 50,00% | 11,30% | | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai Sakip Perangkat Daerah | 82,00 | 1.223.122.377 | 0,00 | - | 82 | 866.484.377 | 4,88% | 24,25% | 4,00 | 210.092.270 | 4,88% | 17,18% | UPTB BELITUNG BAKUDA | |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Survey kepuasan pelayanan kepegawaian | 82,00 | 61.622.000 | | | 82 | 61.622.000 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah pegawai | 4,00 | 19.166.000 | 0,00 | - | 4,00 | 19.166.000 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah pegawa | 5,00 | 23.290.000 | 0,00 | - | 5,00 | 23.290.000 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah pegawai | 4,00 | 19.166.000 | | | 4,00 | 19.166.000 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | | | | | | - | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Survey kepuasan pelayanan umum | 82,00 | 438.696.577 | | | 82 | 343.943.577 | | 33,43% | - | 114.976.664 | 0,00% | 26,21% | | |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik | 30 | 19.274.843,00 | 0,00 | - | 15,00 | 11.996.843 | 46,67% | 24,84% | 7 | 2.980.000 | 23,33% | 15,46% | | |
| | | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah jenis ATK yang dibeli | 116 | 287.972.997,00 | 0,00 | - | 58,00 | 155.959.997 | 43,10% | 19,35% | 25 | 30.185.300 | 21,55% | 10,48% | | |
| | | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah jenis BBM, bahan-bahan lainnya dan makananminuman kegiatan kantor yang tersedia | 54 | 82.406.623,00 | 0,00 | - | 27,00 | 51.289.623 | 81,48% | 139,02% | 22 | 71.302.964 | 40,74% | 86,53% | | |
| | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | jumlah barang cetak | 10 | 35.546.114,00 | 0,00 | - | 5,00 | 22.124.114 | 60,00% | 18,75% | 3 | 4.148.400 | 30,00% | 11,67% | | |
| | | | jumlah penggandaa | 36000 | | 0,00 | - | 18.000,00 | | 36,11% | 0,00% | 6.500 | - | 18,06% | 0,00% | | |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan | 6 | 13.496.000,00 | 0,00 | - | 3,00 | 8.400.000 | 100,00% | 36,79% | 3 | 3.090.000 | 50,00% | 22,90% | | |
| | | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah makan dan minum Tamu dan peserta rapat | 600 | 24.318.000,00 | 0,00 | - | 300,00 | 15.136.000 | 54,67% | 21,60% | 164 | 3.270.000 | 27,33% | 13,45% | | |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah pegawai | 24 | 126.988.000,00 | 0,00 | - | 12,00 | 79.037.000 | 50,00% | 6,44% | 6 | 5.092.600 | 25,00% | 4,01% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Tersedianya sumber daya elektrik | 24,00 | 328.035.000 | | | 12 | 207.000.000 | | 38,16% | - | 78.984.606 | 0,00% | 24,08% | | |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Materai | 840 | 35.668.000,00 | 0,00 | | 420,00 | 22.200.000 | 43,81% | 25,21% | 184 | 5.597.004 | 21,90% | 15,69% | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | Jumlah Surat/Barang yang dikirim | 1000 | | 0,00 | - | 500,00 | | 72,00% | 0,00% | 360 | - | 36,00% | 0,00% | | |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, internet, tvkabel, virtual meeting yang dibayarka | 24 | 260.285.000,00 | | | 12,00 | 162.000.000 | 50,00% | 44,84% | 6 | 72.637.602 | 25,00% | 27,91% | | |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan jasa layanan umum kantor | 24 | 32.082.000,00 | 0,00 | - | 12,00 | 22.800.000 | 50,00% | 3,29% | 6 | 750.000 | 25,00% | 2,34% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang milik daerah yang dipelihara | 39 | 394.768.800 | | | 24 | 253.918.800 | | 6,35% | - | 16.131.000 | 0,00% | 4,09% | | |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara | 4,00 | 147.221.000,00 | 0,00 | - | 6,00 | 91.630.000 | 66,67% | 13,94% | 4 | 12.771.000 | 100,00% | 8,67% | | |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | jumlah peralatan mesin kantor yang dipelihara | 10,00 | 17.079.000,00 | 0,00 | - | 5,00 | 10.630.000 | 60,00% | 0,00% | 3 | - | 30,00% | 0,00% | | |
| | | Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor yang dipelihar | 1,00 | 230.468.800,00 | 0,00 | - | 1,00 | 138.458.800 | 100,00% | 2,43% | 1 | 3.360.000 | 100,00% | 1,46% | | |
| | | Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Tanah | Jumlah bulan jasa layanan umum kantor | 24,00 | 13.200.000 | 0,00 | - | 12,00 | 13.200.000 | 50,00% | 0,00% | 6 | - | 25,00% | 0,00% | | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Persentase Peningkatan pertumbuhan PAD | 7,57% | | | | 7,55% | 133.860.000 | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah | Persentasse PAD terhadap Pendapatan Daerah | 32,96 | | | | 32,74 | 133.860.000 | | | | | | | | |
| | | Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | Data kendaraan roda 2 dan roda 4 | 10000 | 64.200.000,00 | 0,00 | - | 5.350,00 | 32.100.000 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Tersedianya pelayanan dan konsultasi pajak daerah | 100 | 221.760.000,00 | 0,00 | - | 100,00 | 101.760.000 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai Sakip Perangkat Daerah | 82,00 | 868.925.703 | 0,00 | - | 82 | 516.521.703 | 4,88% | 21,64% | 4,00 | 111.756.497 | 4,88% | 12,86% | UPTB BANGKA TENGAH BAKUDA | |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Survey kepuasan pelayanan umum | 82,00 | 124.694.286 | | | 82 | 75.083.286 | | 17,80% | - | 13.368.200 | 0,00% | 10,72% | | |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik | 30 | 9.627.840,00 | 0,00 | - | 15,00 | 5.992.840 | 60,00% | 32,84% | 9 | 1.967.800 | 30,00% | 20,44% | | |
| | | Penyediaan bahan logistik kantor | jumlah bahan logistik kantor | 6 | 56.220.055,00 | 0,00 | - | 3,00 | 34.991.055 | 133,33% | 26,52% | 4 | 9.280.400 | 66,67% | 16,51% | | |
| | | | Jumlah jenis bahan dan Peralatan kebersihan kantoryang tersedia | 24 | | 0,00 | - | 12,00 | | 50,00% | | 6 | - | | | | |
| | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | jumlah barang cetak | 20 | 5.581.391,00 | 0,00 | - | 10,00 | 3.474.391 | 70,00% | 31,66% | 7 | 1.100.000 | 35,00% | 19,71% | | |
| | | | jumlah penggandaan | 10000 | | 0,00 | - | 5.000,00 | | 24,00% | 0,00% | 1.200 | - | 12,00% | 0,00% | | |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan | 8 | 9.640.000,00 | 0,00 | - | 4,00 | 6.000.000 | 125,00% | 17,00% | 5 | 1.020.000 | 62,50% | 10,58% | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Kunjungan Tamu | 24 | 5.485.000,00 | 0,00 | - | 12,00 | 2.485.000 | 50,00% | 0,00% | 6 | - | 25,00% | 0,00% | | |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD | 24 | 38.140.000,00 | 0,00 | - | 12,00 | 22.140.000 | 50,00% | 44,53% | 6 | 9.860.000 | 25,00% | 25,85% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Tersedianya sumber daya elektrik | 24,00 | 415.210.417 | | | 12 | 229.638.417 | | 34,27% | 6 | 78.707.459 | 25,00% | 18,96% | | |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Dokumen Surat Menyurat | 24 | 3.293.000,00 | 0,00 | - | 12,00 | 2.050.000 | 50,00% | 19,51% | 6 | 400.000 | 25,00% | 12,15% | | |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, internet, tvkabel, virtual meeting yang dibayarkan | 24 | 235.200.000,00 | 0,00 | - | 12,00 | 117.600.000 | 50,00% | 41,24% | 6 | 48.493.509 | 25,00% | 20,62% | | |
| | | Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor | jumlah jenis ATK yang dibeli | 76 | 176.717.417,00 | 0,00 | - | 38,00 | 109.988.417 | 76,32% | 27,11% | 29 | 29.813.950 | 38,16% | 16,87% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang milik daerah yang dipelihara | 75 | 329.021.000 | | | 45 | 211.800.000 | | 9,29% | - | 19.680.838 | 0,00% | 5,98% | | |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Jasa Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional Atau Lapanga | 24,00 | 134.368.000,00 | 0,00 | - | 12,00 | 83.630.000 | 50,00% | 19,85% | 6 | 16.599.238 | 25,00% | 12,35% | | |
| | | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan | Jumlah gedung kantor yang dipelihara | 1,00 | 151.000.000,00 | 0,00 | - | 1,00 | 101.000.000 | 100,00% | 0,00% | 1 | - | 100,00% | 0,00% | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Belanja pemeliharaan AC | 30,00 | 43.653.000,00 | 0,00 | - | 20,00 | 27.170.000 | 55,00% | 11,34% | 11 | 3.081.600 | 36,67% | 7,06% | | |
| | | | Belanja pemeliharaan komputerPC/Laptop/PrinterBelanja pemeliharaan komputerPC/Laptop/Printer | 20,00 | | | | 12,00 | 0,00 | 25,00% | | | | | | | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Persentase Peningkatan pertumbuhan PAD | 7,57% | 232.330.000 | | | 7,55% | 105.330.000 | | | | | | | | |
| | | Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah | Persentasse PAD terhadap Pendapatan Daerah | 32,96 | 232.330.000 | | | 32.74 | 105.330.000 | | | | | | | | |
| | | Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | Data kendaraan roda 2 dan roda 4 | 10000000 | 54.170.000,00 | 0,00 | - | 5.350,00 | 27.170.000 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Tersedianya pelayanan dan konsultasi pajak daerah | 100 | 178.160.000,00 | 0,00 | - | 100,00 | 78.160.000 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai Sakip Perangkat Daerah | 82,00 | 901.209.328 | 0,00 | - | 82 | 677.454.328 | 4,88% | 7,29% | 4,00 | 42.048.802 | 4,88% | 4,67% | UPTB BANGKA BARAT BAKUDA | |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Survey kepuasan pelayanan keuangan | 83,00 | 7.830.000 | | | 83 | 7.830.000 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah dokumen laporan keuangan SKPD | 12,00 | 3.915.000 | 0,00 | - | 12,00 | 3.915.000 | 50,00% | 0,00% | 6 | - | 50,00% | 0,00% | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD | 12,00 | 3.915.000 | 0,00 | - | 12,00 | 3.915.000 | 50,00% | 0,00% | 6 | - | 50,00% | 0,00% | | |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Survey kepuasan pelayanan kepegawaian | 82,00 | 10.875.000 | | | 82 | 10.875.000 | 7,32% | 30,16% | 6 | 3.280.000 | 7,32% | 30,16% | | |
| | | Koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Informasi Kepegawaian | 12,00 | 10.875.000 | 0,00 | - | 12,00 | 10.875.000 | 50,00% | 30,16% | 6 | 3.280.000 | 50,00% | 30,16% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Survey kepuasan pelayanan umum | 82,00 | 227.762.328 | | | 82 | 161.269.328 | | 5,57% | - | 8.980.000 | 0,00% | 3,94% | | |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah barang Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 24 | 7.062.582,00 | 0,00 | - | 12,00 | 4.395.582 | 50,00% | 33,56% | 6 | 1.475.000 | 25,00% | 20,88% | | |
| | | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan perlengkapan Kanto | 24 | 128.150.928,00 | 0,00 | - | 12,00 | 80.150.928 | 50,00% | 35,14% | 6 | 28.165.500 | 25,00% | 21,98% | | |
| | | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah bahan logistik kantor | 24 | 31.743.000,00 | 0,00 | - | 12,00 | 19.757.000 | 50,00% | | 6 | 2.632.500 | 25,00% | 8,29% | | |
| | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan kantor | 24 | 27.108.303,00 | 0,00 | - | 12,00 | 21.108.303 | 50,00% | 8,08% | 6 | 1.706.250 | 25,00% | 6,29% | | |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 24 | 9.600.000,00 | 0,00 | - | 12,00 | 4.800.000 | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Penyediaan Bahan / material | Jumlah bahan/ material | 24 | 24.097.515,00 | 0,00 | - | 12,00 | 14.997.515 | 50,00% | 31,37% | 6 | 4.705.000 | 25,00% | 19,52% | | |
| | | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah fasilitasi kunjungan tamu ke UPTB WilayahKabupaten Bangka Barat | 24 | 8.000.000,00 | 0,00 | - | 12,00 | 5.000.000 | 50,00% | 35,00% | 6 | 1.750.000 | 25,00% | 21,88% | | |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi UPTB | 24 | 18.235.000,00 | 0,00 | - | 12,00 | 11.060.000 | 50,00% | 34,45% | 6 | 3.810.500 | 25,00% | 20,90% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Tersedianya sumber daya elektrik | 24,00 | 283.500.000 | | | 12 | 142.500.000 | | 35,73% | - | 50.917.194 | 0,00% | 17,96% | | |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | jumlah Surat/Barang yang dikirim, Jumlah materai | 24 | 18.300.000,00 | 0,00 | - | 12,00 | 12.900.000 | 50,00% | 12,10% | 6 | 1.561.500 | 25,00% | 8,53% | | |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan rekening | 24 | 265.200.000,00 | 0,00 | - | 12,00 | 129.600.000 | 50,00% | 38,08% | 6 | 49.355.694 | 25,00% | 18,61% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang milik daerah yang dipelihara | 32 | 371.242.000 | | | 20 | 354.980.000 | | 2,98% | - | 7.598.927 | 0,00% | 2,05% | | |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara | 7,00 | 190.030.000,00 | 0,00 | - | 7,00 | 110.530.000 | 71,43% | 16,12% | 5 | 17.815.786 | 71,43% | 9,38% | | |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan mesin yang dipelihara | 24,00 | 69.232.000,00 | 0,00 | - | 12,00 | 43.090.000 | 50,00% | 11,44% | 6 | 4.928.000 | 25,00% | 7,12% | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | jumlah gedung kantor yang dipelihar | 1,00 | 111.980.000,00 | 0,00 | - | 1,00 | 101.000.000 | 100,00% | 0,00% | 1 | - | 100,00% | 0,00% | | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Persentase Peningkatan pertumbuhan PAD | 7,57% | 235.360.000 | | | 7,55% | 100.360.000 | | | | | | | | |
| | | Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah | Persentasse PAD terhadap Pendapatan Daerah | 32,96 | 235.360.000 | | | 32.74 | 100.360.000 | | | | | | | | |
| | | Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | Jumlah data Objek Pajak Daerah | 3000 | 19.000.000,00 | 0,00 | - | 1.500,00 | 9.000.000 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Jumlah Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | 24 | 216.360.000,00 | 0,00 | - | 12,00 | 91.360.000 | 50,00% | 23,60% | 6 | 21.560.000 | 25,00% | 9,96% | | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai Sakip Perangkat Daerah | 82,00 | 941.733.880 | 0,00 | - | 82 | 566.022.880 | 4,88% | 8,32% | 4,00 | 47.081.455 | 4,88% | 5,00% | UPTB BANGKA SELATAN BAKUDA | |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Survey kepuasan pelayanan umum | 82,00 | 278.931.612 | | | 82 | 179.281.612 | | 12,80% | - | 22.943.640 | 0,00% | 8,23% | | |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah jenis komponen instalasi listrik | 40 | 10.996.252,00 | 0,00 | - | 20,00 | 5.996.252 | 40,00% | 0,00% | 8 | - | 20,00% | 0,00% | | |
| | | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | jumlah jenis ATK yang dibeli | 70 | 161.466.453,00 | 0,00 | - | 35,00 | 81.466.453 | 62,86% | 20,06% | 22 | 16.344.140 | 31,43% | 10,12% | | |
| | | Penyediaan bahan logistik kantor | jumlah bahan logistik kantor | 12 | 61.844.946,00 | 0,00 | - | 6,00 | 31.844.946 | 66,67% | 17,12% | 4 | 5.450.500 | 33,33% | 8,81% | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | jumlah barang cetakan | 30 | 12.990.961,00 | 0,00 | - | 15,00 | 7.990.961 | 73,33% | 4,69% | 11 | 375.000 | 36,67% | 2,89% | | |
| | | | jumlah penggandaa | 20000 | | | | 10000,00 | | 42,00% | 0,00% | 4.200 | - | 21,00% | 0,00% | | |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan | 24 | 4.640.000,00 | 0,00 | - | 12,00 | 2.640.000 | 41,67% | 0,00% | 5 | - | 20,83% | 0,00% | | |
| | | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah tamu yang di fasilitasi | 600 | 26.993.000,00 | 0,00 | - | 300,00 | 14.993.000 | 18,33% | 5,16% | 55 | 774.000 | 9,17% | 2,87% | | |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | jumlah orang mengikuti rapat koordinasi | 24 | 59.350.000,00 | 0,00 | - | 12,00 | 34.350.000 | 41,67% | 0,00% | 5 | - | 20,83% | 0,00% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Tersedianya sumber daya elektrik | 24,00 | 200.039.000 | | | 12 | 113.478.000 | 50,00% | 21,27% | 6 | 24.137.815 | 25,00% | 12,07% | | |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | jumlah surat/barang yang dikirim | 1400 | 10.478.000,00 | 0,00 | | 700,00 | 5.478.000 | 47,14% | 13,14% | 330 | 720.000 | 23,57% | 6,87% | | |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, internet, tvkabel, virtual meeting yang dibayarkan | 24 | 189.561.000,00 | 0,00 | - | 12,00 | 108.000.000 | 50,00% | 21,68% | 6 | 23.417.815 | 25,00% | 12,35% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang milik daerah yang dipelihara | 99 | 462.763.268 | | | 53 | 273.263.268 | | 0,00% | 27 | - | 27,27% | 0,00% | | |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara | 6 | 208.353.000,00 | 0,00 | - | 6,00 | 123.353.000 | 66,67% | 0,00% | 4 | - | 66,67% | 0,00% | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihar | 68 | 83.410.268,00 | 0,00 | - | 34,00 | 43.410.268 | 47,06% | 0,00% | 16 | - | 23,53% | 0,00% | | |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor yang dipelihara | 1 | 171.000.000,00 | 0,00 | - | 1,00 | 101.000.000 | 100,00% | 0,00% | 1 | - | 100,00% | 0,00% | | |
| | | Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Tanah | jumlah bulan pem,eliharaan | 24,00 | 5.500.000 | 0,00 | - | 12,00 | 5.500.000 | 50,00% | 0,00% | | | | | | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Persentase Peningkatan pertumbuhan PAD | 7,57% | 323.480.000 | | | 7,55% | 159.640.000 | | | | | | | | |
| | | Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah | Persentasse PAD terhadap Pendapatan Daerah | 32,96 | 323.480.000 | | | 32.74 | 159.640.000 | | | | | | | | |
| | | Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | Data kendaraan roda 2 dan roda 4 | 2000 | 15.800.000,00 | 0,00 | - | 1000,00 | 5.800.000 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Tersedianya pelayanan dan konsultasi pajak daerah | 100,00 | 307.680.000,00 | 0,00 | - | 100,00 | 153.840.000 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai Sakip Perangkat Daerah | 82,00 | 988.618.291 | 0,00 | - | 82 | 597.652.143 | 4,88% | 7,85% | 4,00 | 46.916.499 | 4,88% | 4,75% | UPTB BELITUNG TIMUR BAKUDA | |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Survey kepuasan pelayanan kepegawaian | 82,00 | 21.036.000 | | | 82 | 21.036.000 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah pelatihan pegawai berdasarkan tugas danfungs | 3,00 | 10.518.000 | 0,00 | - | 3,00 | 10.518.000 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undanga | 3,00 | 10.518.000 | 0,00 | - | 3,00 | 10.518.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Survey kepuasan pelayanan umum | 82,00 | 325.777.291 | | | 82 | 197.497.291 | | 28,00% | - | 55.289.549 | 0,00% | 16,97% | | |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Ketersediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor | 34,00 | 16.022.659,00 | 0,00 | - | 17,00 | 8.022.659 | 47,06% | 37,69% | 8 | 3.024.100 | 23,53% | 18,87% | | |
| | | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Ketersediaan Peralatan dan PerlengkapanKantor | 24,00 | 150.301.291,00 | 0,00 | - | 12,00 | 96.672.291 | 50,00% | 43,25% | 6 | 41.814.935 | 25,00% | 27,82% | | |
| | | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Ketersediaan Bahan Logistik Kanto | 24,00 | 54.460.204,00 | 0,00 | - | 12,00 | 29.460.204 | 41,67% | 23,73% | 5 | 6.990.514 | 20,83% | 12,84% | | |
| | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | jumlah barang cetak | 30,00 | 14.966.137,00 | 0,00 | - | 15,00 | 9.315.137 | 40,00% | 5,37% | 6 | 500.000 | 20,00% | 3,34% | | |
| | | | jumlah penggandaan | 200.000,00 | | | | 100.000,00 | | 6,00% | 0,00% | 6.000 | - | 3,00% | 0,00% | | |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan perundang-undanga | 10,00 | 11.400.000,00 | 0,00 | - | 5,00 | 5.400.000 | 60,00% | 40,00% | 3 | 2.160.000 | 30,00% | 18,95% | | |
| | | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Ketersediaan Fasilitas Tamu | 24,00 | 11.449.000,00 | 0,00 | - | 12,00 | 6.449.000 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD | 16,00 | 67.178.000,00 | 0,00 | - | 8,00 | 42.178.000 | 25,00% | 1,90% | 2 | 800.000 | 12,50% | 1,19% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Tersedianya sumber daya elektrik | 24,00 | 257.525.000 | | | 12 | 127.525.000 | | 20,08% | - | 25.610.259 | 0,00% | 9,94% | | |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | jumlah materai | 1.250,00 | 26.900.000,00 | 0,00 | - | 625,00 | 12.900.000 | 56,00% | 25,84% | 350 | 3.334.000 | 28,00% | 12,39% | | |
| | | | Jumlah Surat/Barang yang dikirim | 600,00 | | | | 300,00 | | 21,67% | 0,00% | 65 | - | 10,83% | 0,00% | | |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, internet, tvkabel, virtual meeting yang dibayarka | 24,00 | 207.200.000,00 | 0,00 | - | 12,00 | 103.200.000 | 50,00% | 44,43% | 6 | 45.856.913 | 25,00% | 195,76% | | |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Ketersediaan Jasa Jasa Pelayanan Umum Kantor | 24,00 | 23.425.000,00 | 0,00 | - | 12,00 | 11.425.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang milik daerah yang dipelihara | 198,00 | 384.280.000 | | | 99,00 | 251.593.852 | | 13,90% | 27 | 34.969.235 | 13,64% | 9,10% | | |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihar | 14,00 | 211.780.000,00 | 0,00 | - | 7,00 | 115.780.000 | 57,14% | 26,50% | 4 | 30.679.235 | 28,57% | 14,49% | | |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara | 158,00 | 14.000.000,00 | 0,00 | - | 79,00 | 6.000.000 | 20,25% | 0,00% | 16 | - | 10,13% | 0,00% | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor yang dipelihara | 2,00 | 158.500.000,00 | 0,00 | - | 1,00 | 101.000.000 | 100,00% | 4,25% | 1 | 4.290.000 | 50,00% | 2,71% | | |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana danPrasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainny | 24,00 | 20.013.852 | 0,00 | - | 12,00 | 20.013.852 | | | | | | | | |
| | | Pemeliharaan /Rehabilitasi Tanah | Tersedianya Pemeliharaan / Rehabilitasi Tana | 800,00 | 8.800.000 | 0,00 | - | 800,00 | 8.800.000 | | | | | | | | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Persentase Peningkatan pertumbuhan PAD | 7,57% | 261.040.000 | | | 7,55% | 130.520.000 | | | | | | | | |
| | | Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah | Persentasse PAD terhadap Pendapatan Daerah | 32,96 | 261.040.000 | | | 32.74 | 130.520.000 | | | | | | | | |
| | | Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | Data kendaraan roda 2 dan roda 4 | 5000 | 30.000.000,00 | 0,00 | - | 2.500,00 | 15.000.000 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Tersedianya pelayanan dan konsultasi pajak daerah | 200 | 231.040.000,00 | 0,00 | - | 100,00 | 115.520.000 | 50,00% | 6,86% | 50 | 7.920.000 | 25,00% | 3,43% | | |
| | | URUSAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | | | | | | | | | | | | BKPSDM | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Survey Kepuasan Pelayanan Internal | 100% | | 92,69% | | 95% | 20.747.267.052 | 25,53% | 28,69% | 116,94% | 5.952.863.410 | 116,94% | #DIV/0! | | |
| | | | Nilai SAKIP PD | 85 | | 80,88 | | 85,00 | 18.291.541 | 0,00% | 0,00% | 80,88 | 0 | 95,15% | #DIV/0! | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi (Dokumen) | 0 | - | 0 | - | 9 | 18.291.541 | 0,00% | 0,00% | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | | Penyususnan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 0 | | 0 | | 2 | 7.454.085 | 0,00% | 0,00% | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja PD (Dalev, LKPJ, Lakip, LPPD, dan ATA) (Dokumen) | 0 | | 0 | | 7 | 10.837.456 | 0,00% | 0,00% | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan PD Tepat Waktu (Laporan) | 0 | - | 0 | - | 3 | 15.600.837.059 | 0,00% | 22,13% | 0 | 3.452.080.271 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang Terima Gaji dan Tunjuangan (Orang) | 0 | | 0 | | 103 | 15.600.837.059 | 198,06% | 73,13% | 204 | 11.408.710.002 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Kegiatan Administrasi Umum PD (Kegiatan) | 0 | - | 0 | - | 6 | 764.387.055 | 0,00% | 24,49% | 0 | 187.216.129 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | | Peneydiaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Tersedia (Komponen) | 0 | | 0 | | 20 | 28.757.840 | 0,00% | 8,48% | 0 | 2.440.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Tersedia (Jenis) | 0 | | 0 | | 6 | 44.150.406 | 166,67% | 31,07% | 10 | 13.719.500 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Barang Cetak (Barang Cetakan) | 0 | | 0 | | 20 | 37.646.283 | 0,00% | 20,15% | 0 | 7.587.500 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Peneydiaan Bahan/Material | Jumlah Jenis ATK yang di Beli (Jenis) | 0 | | 0 | | 5 | 187.963.526 | 120,00% | 50,78% | 6 | 95.446.200 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | | | Jumlah Jenis Bahan dan Peralatan Kebersihan yang Tersedia (Jenis) | 0 | | 0 | | 2 | | 200,00% | | 4 | | #DIV/0! | | | |
| | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Makanan dan Minuman Tamu yang Tersedia (pax) | 0 | | 0 | | 80 | 15.950.000 | 95,00% | 27,92% | 76 | 4.452.500 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah yang Dilaksanakan (Kali) | 0 | | 0 | | 200 | 449.919.000 | 12,00% | 14,13% | 24 | 63.570.429 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | | | Jumlah Koordiansi dan Konsultasi keluar Daerah yang Dilaksanakan (Kali) | 0 | | 0 | | 24 | | 16,67% | | 4 | | #DIV/0! | | | |
| | | | Jumlah Makan dan M inum Rapat Yang Tersedia (Pax) | 0 | | 0 | | 1150 | | #VALUE! | | #VALUE! | | #VALUE! | | | |
| | | Kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Jenis) | 0 | - | 0 | - | 4 | 3.771.400.000 | 0,00% | 60,68% | 0 | 2.288.593.738 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Materai (Lembar) | 0 | | 0 | | 800 | 8.000.000 | #VALUE! | 70,16% | 0 | 5.613.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | | | Jumlah Surat/Barang yang di Kirim (Jenis) | 0 | | 0 | | 2 | 2.000.000 | 0,00% | | 0 | | #DIV/0! | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tagihan Rekening Listrik, air, telepon/fax, virtual meeting yang dibayarkan (Bulan) | 0 | | 0 | | 12 | 707.700.000 | 50,00% | 57,87% | 6 | 409.580.738 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Tenaga Kontrak Yang di Pekerjakan (Orang) | 0 | | 0 | | 81 | 3.053.700.000 | 498,77% | 61,35% | 404 | 1.873.400.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Jenis BMD yang dipelihara (Jenis) | 0 | - | 0 | - | 3 | 610.642.938 | 0,00% | 4,09% | 0 | 24.973.272 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Laporan | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara (Unit) | 0 | | 0 | | 7 | 161.056.704 | #VALUE! | 14,33% | #VALUE! | 23.073.272 | #VALUE! | #DIV/0! | | |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor Yang dipelihara (Unit) | 0 | | 0 | | 3 | 274.876.587 | 0,00% | 0,00% | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Dipelihara (Jenis) | 0 | | 0 | | 2 | 174.709.647 | #VALUE! | 1,09% | #VALUE! | 1.900.000 | #VALUE! | #DIV/0! | | |
| | | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Persentase Pemenuhan Pegawai ASN yang Sesuai dengan Formasi (BKPSDMD) | 0% | | 0,00% | | 80% | 2.125.666.670 | 0,00% | 13,97% | 0,00% | 297.034.440 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | | | Persentase ASN yang Memiliki Kinerja dan Disiplin Minimal Baik | 0% | | 0,00% | | 99,79% | 269.309.088 | 0,00% | 13,97% | 0,00 | 14.359.140 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Jumlah Pegawai yang Terpenuhi Sesuai Formasi (Orang) | 0 | - | 0 | - | 146 | 905.474.805 | 0,00% | 8,44% | 0 | 76.455.300 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis, dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | Jumlah Dokumen Analis Kebutuhan dan Formasi ASN (Dokumen) | 0 | | 0 | | 1 | 43.385.848 | 0,00% | 1,28% | 0 | 557.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | | Koordiansi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | Jumlah CASN/IPDN yang Lulus Seleksi (Orang) | 0 | | 0 | | 146 | 218.004.370 | 0,00% | 0,50% | 0 | 1.091.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | | | Jumlah Pegawai Tenaga Kontrak yang Dilakukan Penataan (Orang) | 0 | | 0 | | 3650 | | 27,40% | | 1000 | | #DIV/0! | | | |
| | | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | Jumlah Kelembagaan Profesi ASN (LKBH) | 0 | | 0 | | 1 | 466.282.593 | 100,00% | 8,10% | 1 | 37.749.800 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | | | Jumlah Pemberian Bantuan Hukum/LKBH KORPRI (Kasus) | 0 | | 0 | | 5 | | 0,00% | | 0 | | #DIV/0! | | | |
| | | | Jumlah Peserta Penyegaran Rohani (Orang) | 0 | | 0 | | 600 | | 0,00% | | 0 | | #DIV/0! | | | |
| | | Pengelolaan Sistme Informasi Kepegawaian | Jumlah Sistem Informasi yang Dikelola (Aplikasi) | 0 | | 0 | | 1 | 86.628.000 | 0,00% | 0,00% | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | | Pengelolaan Data Kepegawaian | Jumlah Pegawai yang Dikelola Datanya (Orang) | 0 | | 0 | | 5469 | 91.173.994 | 22,86% | 40,64% | 1250 | 37.057.500 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN | Jumlah ASN yang dipromosi dan Mutasi (Orang) | 0 | - | 0 | - | 200 | 702.051.574 | 337,00% | 25,67% | 674 | 180.204.140 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | | Pengelolaan Mutasi ASN | Jumlah ASN yang Ditempatkan Sesuai Kompetensi (Orang) | 0 | | 0 | | 200 | 273.112.817 | 337,00% | 18,30% | 674 | 49.982.640 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | Jumlah PNS yang diterbitkan SK Kenaikan Pangkat (SK) | 0 | | 0 | | 1151 | 117.933.164 | 54,74% | 8,78% | 630 | 10.358.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | | | Jumlah PNS yang diterbitkan SK Kenaikan Pangkat (SK) | 0 | | 0 | | 91 | | 0,00% | | 0 | | #DIV/0! | | | |
| | | Pengelolaan Promosi ASN | Jumlah ASN yang Dipetakan Kompetensinya (Orang) | 0 | | 0 | | 200 | 311.005.593 | #VALUE! | 38,54% | #VALUE! | 119.863.500 | #VALUE! | #DIV/0! | | |
| | | Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN | Jumlah Pegawai Tugas Belajar yang Menerima Beasiswa (Orang) | 0 | - | 0 | - | 11 | 518.140.291 | 9,09% | 7,79% | 1 | 40.375.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | Jumlah ASN yang Menerima Beasiswa (Orang) | 0 | | 0 | | 11 | 518.140.291 | 9,09% | 7,79% | 1 | 40.375.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | | Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah ASN Yang Terbina (Orang) | 0 | - | 0 | - | 5469 | 269.309.088 | 0,01% | 5,33% | 0,32 | 14.359.140 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah ASN yang Diukur Nilai Indeks Profesionalitasnya (Orang) | 0 | | 0 | | 5469 | 128.250.972 | 32,00% | 5,43% | 1750 | 6.970.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai | Jumlah Penerbitan Satya Lencana (Satya Lencana) | 0 | | 0 | | 500 | 32.883.925 | 39,00% | 1,87% | 195 | 614.140 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | | Pembinaan Disiplin ASN | Jumlah ASN Yang Dibina Disiplinnya (Orang) | 0 | | 0 | | 200 | 58.533.299 | 501,00% | 8,58% | 1002 | 5.020.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin Yang Ditangani (Kasus) | 0 | | 0 | | 8 | 49.640.892 | 50,00% | 3,54% | 4 | 1.755.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Persentase ASN yang Meningkat Kompetensinya (BKPSDMD) | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 80% | 1.538.598.750 | 0,00% | 22,35% | 0,00% | 343.832.902 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | | Kegiatan Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | Persentase ASN yang Memiliki Sertifikat Kompetensi Manajerial dan fungsional (%) | 0% | - | 0% | - | 80 | 1.113.664.987 | 0,00% | 8,07% | 0 | 89.837.700 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | | Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota | Jumalah ASN yang Tersertifikasi (Orang) | 0% | | 0% | | 40 | 105.783.712 | 0,00% | 0,00% | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | | Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar | Jumlah Dokumen Mutu Pengembangan Kompetensi (Dokumen) | 0% | | 0% | | 8 | 193.276.970 | 0,00% | 0,00% | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabtan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Jumlah CASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Prajabatan (Orang) | 0% | | 0% | | 124 | 795.454.505 | 64,52% | 11,06% | 80 | 87.970.100 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Jumlah Laporan Monev Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dan Jabatan Pimpinan Tinggi (Laporan) | 0% | | 0% | | 1 | 19.149.800 | 0,00% | 9,75% | 0 | 1.867.600 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | | Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis | Persentase ASN yang Memiliki Sertifikat Kompetensi Teknis (%) | 0% | - | 0% | - | 0,1718 | 424.933.763 | 0,00% | 59,77% | 0 | 253.995.202 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | | Penyusunana Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, Sub dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah Dokumen Petunjuk Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis (Dokumen) | 0% | | 0% | | 6 | 27.438.832 | 66,67% | 49,78% | 4 | 13.660.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dlama Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah Dokumen Standar Peangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis (Dokumen) | | | | | | | | | | 228.476.401 | | #DIV/0! | | |
| | | Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dlama Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah Dokumen Standar Peangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis (Dokumen) | 0% | | 0% | | 16 | 17.328.853 | 0,00% | 0,00% | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren,Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis (Orang) | 0% | | 0% | | 320 | 364.565.078 | 90,63% | 62,67% | 290 | 228.476.401 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumun, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah Laporan Monev Pengembangan Kompetensi Teknis (Laporan) | 0% | | 0% | | 1 | 15.601.000 | 0,00% | 0,00% | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH | Nilai Kepuasan Pelayanan Sekretariat BKPSDMD | 100% | 67.529.966.000 | 92,69% | 22.929.168.669 | 95% | 0 | 0,00% | #DIV/0! | 92,69% | 22.929.168.669 | 92,69% | 33,95% | | |
| | | | Nilai LAKIP BKPSDMD | 75 | | 80,88 | | 65,00 | | 0,00% | | 80,88 | | 107,84% | | | |
| | | | Persentase Sarana dan Prasarana yang Layak Fungsi | 93% | | 91,00% | | 91% | | 0,00% | | 91,00% | | 97,85% | | | |
| | | | Nilai Indeks Profesional ASN | 90 | | 71,27 | | 76 | | 0,00% | | 71 | | 79,19% | | | |
| | | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Jumlah Pegawai BKPSDMD yang Terlayani (Orang) | 187 | 27.284.200.000 | 178 | 15.332.092.791 | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 178 | 15.332.092.791 | 95,19% | 56,19% | | |
| | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Jumlah Paket Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor (Paket) | 26 | 30.307.032.000 | 18 | 5.904.846.152 | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 18 | 5.904.846.152 | 69,23% | 19,48% | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Yang Terpelihara (Paket) | 10 | | 24 | | 0 | | #DIV/0! | | 24 | | 240,00% | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | Jumlah Mesin Genset Yang Terpelihara (Unit) | 1 | | 1 | | 0 | | #DIV/0! | | 2 | | 200,00% | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara (Unit) | 46 | | 7 | | 0 | | #DIV/0! | | 14 | | 30,43% | | | |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran Responsif Gender (Dokumen) | 20 | 1.100.448.000 | 20 | 187.266.801 | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 20 | 187.266.801 | 100,00% | 17,02% | | |
| | | | Jumlah Dokumen (Dokumen) | 10 | | 6 | | 0 | | #DIV/0! | | 6 | | 60,00% | | | |
| | | Penguatan Kelembagaan / Organisasi | Jumlah Laporan (Laporan) | 6 | 1.056.000.000 | 3 | 172.695.694 | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 3 | 172.695.694 | 50,00% | 16,35% | | |
| | | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Jumlah Aparatur yang meningkat kapasitasnya (Orang) | 2835 | 5.257.786.000 | 1995 | 951.574.630 | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 1995 | 951.574.630 | 70,37% | 18,10% | | |
| | | Peningkatan Disiplin Aparatur | Jumlah Pegawai BKPSDMD yang meningkat disiplinnya (Orang) | 187 | 1.724.200.000 | 187 | 259.869.250 | | | #DIV/0! | #DIV/0! | 187 | 259.869.250 | 100,00% | 15,07% | | |
| | | Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan (Laporan) | 45 | 800.300.000 | 25 | 120.823.300 | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 25 | 120.823.300 | 55,56% | 15,10% | | |
| | | PROGRAM PENGADAAN PEGAWAI, MUTASI, PROMOSI, DAN KEPANGKATAN | Persentase Pegawai ASN yang Ditempatkan Sesuai Dengan Kompetensi | 98% | 18.136.517.000 | 94,13% | 4.363.193.124 | 83% | 1.309.837.980 | 0,00% | 0,00% | 94,13% | 4.363.193.124 | 96,05% | 24,06% | | |
| | | | Persentase Pemenuhan Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan dan Formasi | 98% | | 70,92% | | 92% | | 0,00% | | 70,92% | | 72,37% | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | Persentase Pegawai ASN Naik Pangkat dan Pensiun Tepat waktu | 98% | | 102,51% | | 93% | | 0,00% | | 102,51% | | 104,60% | | | |
| | | Pengadaan CASN dan Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN/Sekolah Kedinasan Lainnya | Jumlah Peserta Yang Lulus Seleksi Calon Praja IPDN/Sekolah Kedinasan (Orang) | 100 | 3.999.478.000 | 45 | 691.885.465 | 25 | 564.125.000 | 0,00% | 0,00% | 45 | 691.885.465 | 45,00% | 17,30% | | |
| | | | Jumlah ASN Yang Lulus Seleksi Mutasi (Orang) | 200 | | 0 | | | | #DIV/0! | | 0 | | 0,00% | #DIV/0! | | |
| | | | Jumlah Peserta Yang Lulus CASN/ASN (Orang) | 600 | | 109 | | 150 | | 0,00% | | 109 | | 18,17% | #DIV/0! | | |
| | | Penyusunan Dokumen Manajemen Pola Karir | Jumlah Dokumen (Dokumen) | 3 | 300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | | 0 | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Perencanaan ASN | Jumlah Dokumen Perencanaan ASN (Dokumen) | 8 | 730.457.000 | 7 | 121.553.015 | 2 | 79.274.000 | 0,00% | 0,00% | 7 | 121.553.015 | 87,50% | 16,64% | | |
| | | Perencanaan dan Pengadaan ASN | Jumlah Peserta Yang Lulus Seleksi Calon Praja IPDN / Sekolah Kedinasan (Orang) | 125 | 6.768.079.000 | 37 | 571.804.759 | | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 37 | 571.804.759 | 29,60% | 8,45% | | |
| | | | Jumlah Yang Lulus Seleksi CASN/ASN (Orang) | 750 | | 250 | | | | #DIV/0! | | 250 | | 33,33% | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Kepegawaian (Dokumen) | 20 | | 2 | | | | #DIV/0! | | 2 | | 10,00% | | | |
| | | Pengelolaan Administrasi Kepangkatan dan Pensiun | Jumlah ASN yang Diusulkan Naik Pangkat dan Pensiun (Orang) | 4310 | 1.053.482.000 | 3.727 | 166.193.582 | 900 | 25.477.200 | 0,00% | 0,00% | 3.727 | 166.193.582 | 86,47% | 15,78% | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Promosi dan Mutasi ASN | Jumlah ASN yang di Promosi / Mutasi (Orang) | 1360 | 5.285.021.000 | 1.399 | 2.811.756.303 | 280 | 640.961.780 | 0,00% | 0,00% | 1.399 | 2.811.756.303 | 102,87% | 53,20% | | |
| | | | Jumlah ASN Yang Lulus Seleksi Talent Scouting (Orang) | 800 | | - | | 200 | | 0,00% | | 0 | | 0,00% | | | |
| | | | Jumlah ASN Yang Mengikuti Assesment (Orang) | 400 | | 267 | | 65 | | 0,00% | | 267 | | 66,75% | | | |
| | | | Jumlah ASN yang Lulus Seleksi Mutasi (Orang) | 316 | | 47 | | 63 | | 0,00% | #DIV/0! | 47 | | 14,87% | | | |
| | | PROGRAM PENILAIAN KINERJA, DISIPLIN, INFORMASI DAN KESEJAHTERAAN ASN | Persentase ASN Yang SKP nya Dinilai Tepat Waktu | 98% | 63.343.002.770 | 78,68% | 6.784.046.835 | 76% | 415.855.778 | 0,00% | 0,00% | 78,68% | 6.784.046.835 | 80,28% | 10,71% | | |
| | | | Persentase Akurasi Data dan informasi Kepegawaian | 98% | | 93,38% | | 90% | | 0,00% | | 93,38% | | 95,28% | | | |
| | | | Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin Minimal Sedang | 0,09% | | 0,17% | | 0,13% | | 53,85% | | 0,24% | | 268,04% | | | |
| | | | Persentase ASN Yang Menerima Penghargaan | 3,73% | | 4,39% | | 2,21% | | 0,00% | | 4,39% | | 117,70% | | | |
| | | Pembinaan ASN | Jumlah ASN Yang Dibina Rohaninya (Orang) | 2.400 | 3.322.299.920 | 0 | 169.776.520 | | 139.261.320 | #DIV/0! | 0,00% | - | 169.776.520 | 0,00% | 5,11% | | |
| | | | Jumlah ASN Yang Diperiksa Untuk Cuti Sakit/Kejiwaan (Orang) | 12 | | 0 | | 0 | | #DIV/0! | | - | | 0,00% | | | |
| | | | Jumlah ASN Yang Dibina Disiplinnya (Orang) | 14.000 | | 0 | | 0 | | #DIV/0! | | - | | 0,00% | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | Jumlah ASN Yang Terbina (Orang) | 27.631 | | 6499 | | 1500 | | 0,00% | | 6.499 | | 23,52% | | | |
| | | | Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin Yang Ditangani (Kasus) | 28 | | 7 | | 0 | | #DIV/0! | | 7 | | 25,00% | | | |
| | | Pengembangan Profesi ASN | Jumlah ASN yang mengikuti Tilawatil Quran Tingkat Nasional (Orang) | 36 | 24.346.178.550 | 3 | 4.148.768.907 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3 | 4.148.768.907 | 8,33% | 17,04% | | |
| | | | Jumlah ASN Yang Dikembangkan Profesinya (Orang) | 14.466 | | 4077 | | 3.123 | | 0,00% | | 4077 | | 28,18% | | | |
| | | Peningkatan Kesejahteraan ASN | Jumlah ASN Yang Sejahtera (Orang) | 12.952 | 3.344.860.300 | 4.537 | 226.690.000 | | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 4537 | 226.690.000 | 35,03% | 6,78% | | |
| | | | Jumlah ASN Yang Menerima Pembekalan Purnabhakti (Orang) | 350 | | 93 | | 0 | | #DIV/0! | | 93 | | 26,57% | | | |
| | | | Jumlah ASN Yang Berprestasi (Orang) | 25 | | 0 | | 0 | | #DIV/0! | | 0 | | 0,00% | | | |
| | | | Jumlah ASN Yang Menerima KGB (Orang) | 7.500 | | 3.154 | | 0 | | #DIV/0! | | 3154 | | 42,05% | | | |
| | | | Jumlah ASN Yang Menerima Satya Lencana (Orang) | 500 | | 257 | | 0 | | #DIV/0! | | 257 | | 51,40% | | | |
| | | Monitoring dan Evaluasi Kinerja ASN | Jumlah ASN yang di monitoring dan Evaluasi SKP-nya (Orang) | 3.500 | 1.023.840.000 | 5.980 | 284.825.070 | 2.000 | 30.249.480 | 0,00% | 0,00% | 5.980 | 284.825.070 | 170,86% | 27,82% | | |
| | | | Jumlah Dokumen (Dokumen) | 1 | | 1 | | | | #DIV/0! | | 1 | | 100,00% | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | Jumlah Aplikasi Kinerja yang dibangun / dikembangkan (Aplikasi) | 5 | | 1 | | 0 | | #DIV/0! | | 1 | | 20,00% | | | |
| | | | Jumlah Rapergub Tunjangan Kinerja yang dirancang (Rapergub) | 1 | | - | | | | #DIV/0! | | - | | 0,00% | | | |
| | | | Jumlah ASN Yang Memiliki Kinerja (SKP) Baik (Orang) | 3.500 | | 4.968 | | 3.000 | | 0,00% | | 4.968 | | 141,94% | | | |
| | | Pembinaan dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin ASN | Jumlah ASN Yang mengikuti Workshop (Orang) | 304 | 7.595.797.000 | - | 391.656.964 | | - | #DIV/0! | #DIV/0! | - | 391.656.964 | 0,00% | 5,16% | | |
| | | | Jumlah ASN Yang Diperiksa Untuk Cuti Sakit / Kejiwaan (Orang) | 15 | | 1 | | | | #DIV/0! | | 1 | | 6,67% | | | |
| | | | Jumlah ASN yang diverifikasi/divalidasi (Orang) | 3.000 | | 3.000 | | | | #DIV/0! | | 3.000 | | 100,00% | | | |
| | | | Jumlah ASN yang diperiksa Narkoba (Orang) | 6.900 | | - | | | | #DIV/0! | | - | | 0,00% | | | |
| | | | Jumlah ASN Yang Dibina Pernikahan/Perceraian (Orang) | 10 | | - | | | | 0,00% | | - | | 0,00% | | | |
| | | | Jumlah Regulasi Kepegawaian (Dokumen) | 15 | | 4 | | | | #DIV/0! | | 4 | | 26,67% | | | |
| | | | Jumlah ASN Yang Dibina Disiplinnya (Orang) | 5.000 | | 3.309 | | | | #DIV/0! | | 3.309 | | 66,18% | | | |
| | | | Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin Yang Ditangani (Kasus) | 30 | | 10 | | | | #DIV/0! | | 10 | | 33,33% | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Penguatan Sistem Informasi dan Pengelolaan Database / Arsip Kepegawaian | Jumlah Arsip Kepegawaian (Arsip) | 4.500 | 4.596.468.000 | 4.500 | 920.108.384 | | 246.344.978 | #DIV/0! | 0,00% | 4.500 | 920.108.384 | 100,00% | 20,02% | | |
| | | | Jumlah ASN Yang Diperbaiki NIP, Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir (Orang) | 50 | | 5 | | | | #DIV/0! | | 5 | | 10,00% | | | |
| | | | Jumlah Data Kepegawaian Yang Diupdate (Data) | 8.500 | | 8.500 | | | | #DIV/0! | | 8.500 | | 100,00% | | | |
| | | | Jumlah Buku Profil Kepegawaian dan DUK (Buku) | 1.400 | | 450 | | 2 | | 0,00% | | 450 | | 32,14% | | | |
| | | | Jumlah Artikel, Konten, Terjemahan (Artikel/terjemahan /konten) | 1.750 | | 150 | | | | #DIV/0! | | 150 | | 8,57% | | | |
| | | | Jumlah Aplikasi Kepegawaian yang dibangun/dikembangkan (Aplikasi) | 20 | | 5 | | | | #DIV/0! | | 5 | | 25,00% | | | |
| | | | Jumlah Profil Pegawai | 0 | | 5.385 | | 5469 | | 0,00% | | 5.385 | | #DIV/0! | | | |
| | | | Jumlah ID Card (Buah) | 11.000 | | 5.700 | | 1800 | | 0,00% | | 5.700 | | 51,82% | | | |
| | | | Jumlah Karpeg, Karis/Karsu Yang Diterbitkan (Kartu) | 1.000 | | 141 | | 125 | | 0,00% | | 141 | | 14,10% | | | |
| | | Peningkatan Kesejahteraan, Pemberian Penghargaan dan Pengembangan Profesi ASN | Jumlah ASN yang menerima KGB (Orang) | 12.748 | 19.113.559.000 | 1.524 | 642.220.990 | | | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.524 | 642.220.990 | 11,95% | 3,36% | | |
| | | | Jumlah ASN yang menerima KARIS / KARSU / KARPEG (Orang) | 500 | | 20 | | | | #DIV/0! | | 20 | | 4,00% | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | Jumlah Kegiatan Bakti Sosial KORPRI (Kegiatan) | 20 | | - | | | | 0,00% | | - | | 0,00% | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Kepengurusan KORPRI dan Koperasi (Dokumen) | 7 | | - | | | | 0,00% | | - | | 0,00% | | | |
| | | | Jumlah Atlet ASN Yang Mengikuti Kejuaraan KORPRI antar Instansi Pemprov / PORNAS (Orang) | 2.940 | | - | | | | 0,00% | | - | | 0,00% | | | |
| | | | Jumlah ASN Purnabakti (Orang) | 465 | | 64 | | | | #DIV/0! | | 64 | | 13,76% | | | |
| | | | Jumlah ASN yang dibina rohaninya (Orang) | 8.000 | | 580 | | | | #DIV/0! | | 580 | | 7,25% | | | |
| | | | Jumlah ASN penerima Satya Lencana (Orang) | 500 | | 168 | | | | #DIV/0! | | 168 | | 33,60% | | | |
| | | | Jumlah ASN yang mengikuti Tilawatil Quran (Orang) | 33 | | 14 | | | | #DIV/0! | | 14 | | 42,42% | | | |
| | | | Jumlah ASN berprestasi (Orang) | 23 | | 3 | | | | #DIV/0! | | 3 | | 13,04% | | | |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR SIPIL NEGARA | Persentase Pegawai ASN Yang Memenuhi Kompetensi Dasar dan Manajerial | 100% | 71.553.459.500 | 81,79% | 13.999.199.244 | 97% | 2.502.795.051 | 0,00% | 0,00% | 81,79% | 13.999.199.244 | 81,79% | 19,56% | | |
| | | | Persentase Pegawai ASN Yang Meningkat Kompetensi Teknis dan Fungsional | 97% | | 30,05% | | 60% | | 0,00% | | 30,05% | | 30,98% | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | Nilai Akreditasi Diklat | 81 | | 87 | | 81 | | 0,00% | | 87 | | 107,41% | | | |
| | | | Persentase Pegawai ASN Yang Meningkat Pendidikan Formalnya | 52,80% | | 45,14% | | 41,90% | | 0,00% | | 45,14% | | 85,49% | | | |
| | | Ujian Dinas dan Seleksi Diklatpim III dan IV | Jumlah ASN Yang Lulus Ujian Dinas (Orang) | 410 | 1.703.200.000 | 194 | 72.729.400 | | | #DIV/0! | #DIV/0! | 194 | 72.729.400 | 47,32% | 4,27% | | |
| | | | Jumlah ASN Yang Lulus Seleksi Diklatpim III dan IV (Orang) | 400 | | 0 | | | | #DIV/0! | | 0 | | 0,00% | | | |
| | | Pengukuran dan Pemetaan Kompetensi ASN | Jumlah ASN Yang tersertifikasi (Orang) | 1.000 | 1.000.000.000 | 0 | - | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Pengembangan Kompetensi Dasar dan Manajerial | Jumlah ASN Yang Lulus Pendidikan Kepemimpinan Pengawas (Orang) | 320 | 20.272.944.000 | 0 | 3.933.647.258 | 80 | 184.188.000 | 0,00% | 0,00% | 0 | 3.933.647.258 | 0,00% | 19,40% | | |
| | | | Jumlah ASN Yang Lulus Pelatihan Kepemimpinan Administrator (Orang) | 600 | | 200 | | 40 | | 0,00% | | 200 | | 33,33% | | | |
| | | | Jumlah ASN yang Lulus Diklat Kepemimpinan (Orang) | 720 | | 120 | | 80 | | 0,00% | | 120 | | 16,67% | | | |
| | | | Jumlah ASN yang Lulus Diklat Dasar (Orang) | 600 | | 423 | | 0 | | #DIV/0! | | 423 | | 70,50% | | | |
| | | Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional | Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat teknis dan fungsional (Orang) | 4880 | 34.749.996.500 | 2477 | 5.777.793.485 | 480 | 732.184.001 | 0,00% | 0,00% | 2477 | 5.777.793.485 | 50,76% | 16,63% | | |
| | | | Jumlah ASN yang mengikuti Diklat | 120 | | 145 | | | | #DIV/0! | | 158 | | 131,67% | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | dan Bimtek Melalui Jalur Kontribusi (Orang) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah ASN yang mengikuti magang (Orang) | 4 | | 0 | | | | #DIV/0! | | 0 | | 0,00% | | | |
| | | Peningkatan Pendidikan Formal | Jumlah ASN yang Yang Menerima Beasiswa dan Cost Sharing (Orang) | 35 | 14.437.610.000 | 103 | 4.906.772.436 | 26 | 1.393.622.550 | 0,00% | 0,00% | 103 | 4.906.772.436 | 294,29% | 33,99% | | |
| | | | Jumlah ASN yang Yang Menerima Beasiswa (Orang) | 152 | | 0 | | | | #DIV/0! | | 0 | | 0,00% | | | |
| | | Peningkatan Mutu Kediklatan | Nilai akreditasi diklat (Nilai) | 81 | 2.092.909.000 | 87 | 459.025.445 | 81 | 192.800.500 | 0,00% | 0,00% | 87 | 459.025.445 | 107,41% | 21,93% | | |
| | | | Jumlah Dokumen (Dokumen) | 15 | | 8 | | 3 | | 0,00% | | 8 | | 53,33% | | | |
| | | PROGRAM PENILAIAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI ASN | Prosentase ASN Yang Mempunyai Profil Kompetensi Sesuai Dengan Standar Penilaian | 60% | 10.026.468.000 | 30,68% | 520.003.212 | 0,00% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 30,68% | 520.003.212 | 51,14% | 5,19% | | |
| | | Pengukuran dan Penilaian Kompetensi Aparatur | Jumlah ASN yang lulus seleksi Talent Scounting (Orang) | 900 | 10.026.468.000 | 85 | 520.003.212 | | | #DIV/0! | #DIV/0! | 85 | 520.003.212 | 9,44% | 5,19% | | |
| | | | Jumlah ASN Yang Lulus Ujian Dinas Tingkat I dan II (Orang) | 400 | | 0 | | | | 0,00% | | 0 | | 0,00% | | | |
| | | | Jumlah ASN yang Mengikuti Assesment (Orang) | 1200 | | 303 | | | | #DIV/0! | | 303 | | 25,25% | | | |
| | | | Jumlah ASN Yang Dipetakan Rekam Jejaknya (Orang) | 800 | | 0 | | | | 0,00% | | 0 | | 0,00% | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | Jumlah ASN Yang Lulus Seleksi PIM III dan IV (Orang) | 400 | | 0 | | | | 0,00% | | 0 | | 0,00% | | | |
| | | | Jumlah ASN Yang Mengikuti Roadshow Penilaian Kompetensi ASN (Orang) | 14 | | 0 | | | | 0,00% | | 0 | | 0,00% | | | |
| | | | Jumlah ASN Yang Dianalisa Kebutuhan Uji Kompetensinya (Orang) | 34 | | 0 | | | | 0,00% | | 0 | | 0,00% | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Penilaian dan pemetaan Kompetensi ASN (Laporan) | 4 | | 0 | | | | 0,00% | | 0 | | 0,00% | | | |
| | | URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | | | | | | | | | | BAPPEDA | |
| | | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan | 80,00 | 3.272.993.312 | | | 80 | 1.636.496.656 | 50,00% | 1,48% | | | | | | |
| | | Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan | jumlah dokumen data penelirian dan pengembangan bidang penyelenggaraan dan pengkajian peraturan | 6,00 | 225.563.856 | | | 3 | Rp 112.781.928,00 | 8,33% | 3,64% | | | | | | |
| | | Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | jumlah laporan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan | 2,00 | 1.028.717.718 | | | 1 | Rp 514.358.859,00 | 0,00% | 2,23% | | | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | kependudukan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | jumlah laporan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan | 4,00 | 279.087.604 | | | 2 | Rp 139.543.802,00 | 12,50% | 2,94% | | | | | | |
| | | Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi | jumlah laproan pengembangan inovasi dan teknologi | 8,00 | 1.739.624.134 | | | 4 | Rp 869.812.067,00 | 6,25% | 0,52% | | | | | | |
| | | Program Penelitian dan Pengembangan | Persentase hasil penelitian yang digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan (Persentase) | 86,00 | 14.214.471.500 | 80,00 | 2.904.415.385 | | | | | | | | | | |
| | | | Persentase hasil inovasi daerah yang dikembagkan (%) | 80,00 | | 80,00 | | | | | | | | | | | |
| | | Penelitian Prioritas Pembangunan Daerah | Jumlah penelitian prioritas pembangunan daerah (Penelitian) | 6,00 | 729.303.750 | | | | | | | | | | | | |
| | | Penguatan Jaringan Kelitbangan | Jumlah kegiatan pendukung/penunjang kelitbangan (Kegiatan) | 3,00 | 790.079.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | Penguatan Sistem Inovasi Daerah | Jumlah sosialisasi daerah yang dilaksanakan (Kali) | 1,00 | 486.202.500 | | | | | | | | | | | | |
| | | Peningkatan Peran Dewan Riset Daerah Dalam Pembangunan | Jumlah rapat kebijakan pembangunan yang dilaksanakan (Kali) | 28,00 | 1.464.100.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | URUSAN PENGHUBUNG | | | | | | | | | | | | | | BADAN PENGHUBUNG | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | FORM TABEL TIDAK SESUAI DENGAN FORMULIR EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PD |
| | | UNSUR PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INSPEKTORAT DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan | Nilai Sakip Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | INSPEKTORAT DAERAH | |
| | | | Survey Kepuasan Pelayanan Internal | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi (Dokumen) | | | | | 14 | 17.755.928 | 57,14% | 44,74% | | | | | | |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan Keuangan (%) | | | | | 95 | 15.065.078.556 | 52,63% | 50,09% | | | | | | |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan Kepegawaian (%) | | | | | 95 | 161.760.000 | 21,05% | 8,78% | | | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan Umum (%) | | | | | 95 | 621.690.622 | 47,37% | 43,37% | | | | | | |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Barng Milik Daerah Terlaksana (%) | | | | | 100 | 59.676.761 | 50,00% | 37,42% | | | | | | |
| | | Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedia (%) | | | | | 100 | 989.954.364 | 50,00% | 43,61% | | | | | | |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpelihara (%) | | | | | 100 | 353.609.800 | 30,00% | 13,01% | | | | | | |
| | | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Persentase Tingkat Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Persentase Pengawasan Internal Terselenggara | | | | | 100 | 1.125.952.548 | 45,00% | 29,89% | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan Pengaawasan Dengan Tujuan Tertentu | Persentase Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Terselengara | | | | | 100 | 250.612.507 | 35,00% | 22,84% | | | | | | |
| | | Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi | Nilai Hasil Evaluasi Maturitas SPIP Level 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Nilai Hasil Kapabilitas APIP Level 3 | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Perumusan Kebijakan Teknis diBidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan (%) | | | | | 100 | 134.705.924 | 0,00% | 0,00% | | | | | | |
| | | Pendampingan dan Asistensi | Persentase Pendampingan dan Asistensi dilaksanakan (%) | | | | | 100 | 635.350.475 | 0,00% | 0,00% | | | | | | |
| | | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | URUSAN BAKESBANGPOL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi | 80,00 | 279.841.206 | 76,99 | - | 80 | 158.892.754 | 0,00% | 10,16% | 76,99 | 16.150.450 | 96,24% | 5,77% | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | | | Survey Kepuasan Pelayanan Internal | 100,00 | 14.046.214.699 | 100,00 | - | 100 | 7.137.326.056 | 0,00% | 47,87% | 100,00 | 3.416.617.093 | 100,00% | 24,32% | | |
| | | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi | 9 Dokumen | 279.841.206 | 0,00 | - | 9 Dokumen | 158.892.754 | 0,00% | 10,16% | 4,00 | 16.150.450 | 0,00% | 5,77% | | |
| | | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen (Renstra PD dan Renja PD) | 5 Dokumen | 177.570.472 | 0,00 | - | 5 Dokumen | 99.124.573 | 0,00% | 16,29% | 1,00 | 16.150.450 | 0,00% | 9,10% | | |
| | | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi kineja PD | 4 Dokumen | 102.270.734 | 0,00 | - | 4 Dokumen | 59.768.181 | 0,00% | 0,00% | 3,00 | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Kegiatan Administrasi Keuangan | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan | 1 Dokumen | 11.501.465.799 | | - | 1 Dokumen | 5.853.461.021 | 0,00% | 49,95% | 0,00 | 2.923.598.195 | 0,00% | 25,42% | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan | 40 orang | 11.501.465.799 | | - | 40 orang | 5.853.461.021 | 0,00% | 49,95% | 0,00 | 2.923.598.195 | 0,00% | 25,42% | | |
| | | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Administrasi Umum | 1 Dokumen | 574.834.350 | | - | 1 Dokumen | 294.661.785 | 0,00% | 39,16% | 0,00 | 115.400.115 | 0,00% | 20,08% | | |
| | | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik | 20 jenis | 11.442.982 | | - | 20 jenis | 5.721.491 | 0,00% | 21,85% | 0,00 | 1.250.000 | 0,00% | 10,92% | | |
| | | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | jumlah bahan logistik kantor | 5 jenis | 30.380.000 | | - | 5 jenis | 15.190.000 | 0,00% | 31,20% | 0,00 | 4.740.000 | 0,00% | 15,60% | | |
| | | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | jumlah jenis yang barang cetak | 2 Jenis | 33.024.572 | | - | 2 Jenis | 21.012.286 | 0,00% | 27,84% | 0,00 | 5.850.800 | 0,00% | 17,72% | | |
| | | | Jumlah penggandaan | 50412 Lembar | - | | - | 50412 Lembar | | 0,00% | 0,00% | 0,00 | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan | 4320 Exemplar | 71.663.550 | | - | 4320 Exemplar | 43.700.000 | 0,00% | 41,61% | 0,00 | 18.185.000 | 0,00% | 25,38% | | |
| | | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material | jumlah Bahan dan Alat Pembersih | 50 jenis | 155.252.016 | | - | 50 jenis | 77.626.008 | 0,00% | 55,90% | 0,00 | 43.390.440 | 0,00% | 27,95% | | |
| | | | jumlah jenis ATK yang dibeli | 32 Jenis | | | | 32 Jenis | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | 0,00% | | |
| | | | jumlah Materai | 900 lembar | | | | 900 lembar | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah makan dan minum Tamu | 260 pax | 26.000.000 | | - | 260 pax | 13.000.000 | 0,00% | 26,92% | 0,00 | 3.500.000 | 0,00% | 13,46% | | |
| | | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah | 20 kali | 247.071.230 | | - | 20 kali | 118.412.000 | 0,00% | 32,50% | 0,00 | 38.483.875 | 0,00% | 15,58% | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 15 kali | | | | 15 kali | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | 0,00% | | |
| | | | Jumlah makan dan minum rapat | 300 pax | | | | 300 pax | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3 Jenis | 1.645.800.000 | | - | 3 Jenis | 822.900.000 | 0,00% | 38,19% | 0,00 | 314.251.283 | 0,00% | 19,09% | | |
| | | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel,virtual meeting yang dibayarkan | 12 bulan | 288.600.000 | | - | 12 bulan | 144.300.000 | 0,00% | 22,84% | 0,00 | 32.951.283 | 0,00% | 11,42% | | |
| | | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor | 18 Orang | 1.357.200.000 | | - | 18 Orang | 678.600.000 | 0,00% | 41,45% | 0,00 | 281.300.000 | 0,00% | 20,73% | | |
| | | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah jenis Barang Milik Daerah yang dipelihara | 3 Jenis | 324.114.550 | | - | 3 Jenis | 166.303.250 | 0,00% | 38,10% | 0,00 | 63.367.500 | 0,00% | 19,55% | | |
| | | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | jumlah kendaraan operasional yang dipelihara | 2 Unit Mobil | 173.939.950 | | - | 2 Unit Mobil | 86.939.950 | 0,00% | 45,09% | 0,00 | 39.200.000 | 0,00% | 22,54% | | |
| | | | jumlah kendaraan operasional yang dipelihara | 2 Unit Motor | | | | 2 Unit Motor | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah BBM Genset | 650 liter | 110.182.600 | | - | 650 liter | 49.371.300 | 0,00% | 48,95% | 0,00 | 24.167.500 | 0,00% | 21,93% | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantoryang dipelihara | 3 Jenis | | | | 3 Jenis | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | jumlah gedung kantor yang dipelihara | 1 Gedung | 39.992.000 | | - | 1 Gedung | 29.992.000 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan | Jumlah kasus penistaan terhadap simbol-simbolnegara | 0 Kasus | - | | | 0 | 2.214.525.601 | 0,00% | 0,89% | 0,00 | 19.655.190 | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila danKarakter Kebangsaan | jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan ideologidan wawasan kebangsaan | 2 Dokumen | - | | | 2 Dokumen | | 0,00% | 0,89% | 0,00 | 19.655.190 | 0,00% | 0,00% | | |
| | | | jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis danpemantapan pelaksanaan bela negara dan Karakter Kebangsaan | 2 Dokumen | - | | | 2 Dokumen | 2.214.525.601 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, KarakterBangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan | 1 laporan | - | | | 1 laporan | 2.067.461.409 | 0,00% | 0,21% | 0,00 | 4.266.675 | 0,00% | 0,00% | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, KarakterBangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan | jumlah Rekomendasi BelaNegara, Karakter Bangsa,Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika danSejarah Kebangsaan | 2 Rekomendasi | - | | | 2 Rekomendasi | 84.808.172 | 0,00% | 18,15% | 0,00 | 15.388.515 | 0,00% | 0,00% | | |
| | | | jumlah Rekomendasi Ideologi dan WawasanKebangsaan | 2 Rekomendasi | - | | | 2 Rekomendasi | | 0,00% | 0,00% | 0,00 | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan,Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dibidang BelaNegara, Karakter Bangsa, PembauranKebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan SejarahKebangsaan | 4 Laporan | - | | | 4 Laporan | 62.256.020 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | | Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dibidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan | 4 Laporan | - | | | 4 Laporan | | 0,00% | 0,00% | 0,00 | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melaluipendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Persentase Ketidakhadiran Masyarakat dalam Pemilu/Pemilu Kada, PersentaseRekomendasi yang | 15 Persen | - | | | 15 Persen | 3.918.271.857 | 0,00% | 0,30% | 0,00 | 11.857.500 | 0,00% | 0,00% | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | ditinjaklanjuti | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Persentase Rekomendasi yang ditinjaklanjuti | 100 Persen | | | | 100 Persen | | 0,00% | 0,00% | 0,00 | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, EtikaBudaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan PartaiPolitik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan BidangPendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, PemilihanUmum/Pemilihan Umum Perwakilan dan Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik, | 2 Dokumen | - | | | 2 Dokumen | 3.918.271.857 | 0,00% | 0,30% | 0,00 | 11.857.500 | 0,00% | 0,00% | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan PelaksanaanBidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik. | 2 Dokumen | | | | 2 Dokumen | | 0,00% | 0,00% | 0,00 | - | 0,00% | 0,00% | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, PeningkatanDemokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/PemilihanUmum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Laporan pelaksanaan kebijakan FasilitasiKelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan PartaiPolitik. | 1 Laporan | - | | | 1 Laporan | 3.800.674.107 | 0,00% | 0,13% | 0,00 | 4.887.500 | 0,00% | #DIV/0! | | |
| | | Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, PeningkatanDemokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/PemilihanUmum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Rekomendasi Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Perwakilan dan Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik | 2 Rekomendasi | - | | | 2 Rekomendasi | 45.662.650 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | | Jumlah Rekomendasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik. | 2 Rekomendasi | - | | | 2 Rekomendasi | | 0,00% | 0,00% | 0,00 | - | 0,00% | 0,00% | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika BudayaPolitik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik,Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 4 Laporan | - | | | 4 Laporan | 71.935.100 | 0,00% | 9,69% | 0,00 | 6.970.000 | 0,00% | #DIV/0! | | |
| | | | Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik | 4 Laporan | - | | | 4 Laporan | | 0,00% | 0,00% | 0,00 | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Indeks Kinerja Ormas | 180 skor | - | | - | 180 skor | 44.160.628 | 0,00% | 10,73% | 0,00 | 4.740.000 | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan danPengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan BidangPemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | 2 Dokumen | - | | - | 2 Dokumen | 44.160.628 | 0,00% | 10,73% | 0,00 | 4.740.000 | 0,00% | 0,00% | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, danMediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah laporan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 1 Laporan | - | | | 1 Laporan | 11.449.978 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas,Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing diDaerah | Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi Dan PelaporanKebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas,Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi SengketaOrmas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing diDaerah | 4 Laporan | - | 0,00 | - | 4 Laporan | 32.710.650 | 0,00% | 14,49% | 0,00 | 4.740.000 | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | Jumlah angka kriminalitas menurun | 150 Kasus | - | | - | 150 Kasus | 250.319.750 | 0,00% | 1,80% | 0,00 | 4.510.000 | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi,Sosial dan Budaya | Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan BidangKetahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | 2 Dokumen | - | | - | 2 Dokumen | 250.319.750 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | - | 0,00% | 0,00% | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan FasilitasiPencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan diDaerah | Jumlah Rekomendasi di Bidang Ketahanan Ekonomi,Sosial, Budaya dan Fasilitasi PencegahanPenyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan UmatBeragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 2 Rekomendasi | - | | - | 2 Rekomendasi | 180.444.750 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama danPenghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan PelaporanKebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,Budaya dan Fasilitasi Pencegahan PenyalagunaanNarkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama danPenghayat Kepercayaan di Daerah | 4 Laporan | - | | - | 4 Laporan | 69.875.000 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Jumlah konflik sosial menurun | 10 Kasus | 2.450.000.000 | | | 15 Persen | 540.943.449 | 0,00% | 0,23% | 0,00 | 1.230.000 | 0,00% | 0,05% | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional danPenanganan Konflik Sosial | Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen | 2 Dokumen | 2.450.000.000 | | | 2 Dokumen | 540.943.449 | 0,00% | 0,23% | 0,00 | 1.230.000 | 0,00% | 0,05% | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perumusan KebijakanTeknis dan Pelaksanaan Pemantapan Penanganan Konflik Sosial | 2 Dokumen | | | | 2 Dokumen | | 0,00% | 0,00% | 0,00 | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, PemantauanOrang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, FasilitasiKelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Rekomendasi Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan | 1 Rekomendasi | - | | | 1 Rekomendasi | 72.557.238 | 0,00% | 6,78% | 0,00 | 4.920.000 | 0,00% | 0,00% | | |
| | | | Jumlah Rekomendasi Penanganan Konflik di Daerah | 1 Rekomendasi | | | | 1 Rekomendasi | | 0,00% | 0,00% | 0,00 | - | 0,00% | 0,00% | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2023 (%) | | PD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja samaIntelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan PerbatasanAntar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan | 4 Laporan | - | | | 4 Laporan | 113.120.587 | 0,00% | 6,16% | 0,00 | 6.970.000 | 0,00% | 0,00% | | |
| | | | Jumlah Laporan Penanganan Konflik di Daerah | 4 Laporan | | | | 4 Laporan | | 0,00% | 0,00% | 0,00 | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi | Jumlah Laporan Pelaksanaan Forum KoordinasiPimpinan Daerah Provinsi | 1 Laporan | - | | | 1 Laporan | 355.265.624 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | - | 0,00% | 0,00% | | |

*Sumber: Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (diolah), 2022*

## 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Penyelenggaraan pembangunan Provinsi Bangka Belitung terdapat berbagai bidang pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Permasalahan pembangunan daerah merupakan rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan urusan Perangkat Daerah.

### 2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan daerah adalah masalah utama daerah yang harus diprioritaskan yang terkait dengan prioritas dan sasaran pembangunan pada Perubahan RPJMD Tahun 2017-2022. Beberapa permasalahan pembangunan daerah tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Prioritas I : Pembangunan Agropolitan

   Masih rendahnya PDRB Sub Sektor Pertanian;

   Kontribusi PDRB Sub Sektor Pertanian pada tahun 2021 sebesar 10,95% dan meningkat pada tahun 2022 sebesar 11,26%. Hal ini disebabkan pertumbuhan sub tanaman tanaman perkebunan yang tumbuh sebesar 7,65 persen. Meskipun terjadi peningkatan kontribusi PDRB di sub sektor pertanian namun hal ini dirasa belum maksimal.

2. Prioritas II : Pembangunan Bahari

   Masih rendahnya PDRB Sub Sektor Perikanan;

   Kontribusi PDRB Sub Sektor Perikanan tahun 2017 sebesar 5,80% sedangkan tahun 2018 sebesar 6%. Sedangkan laju pertumbuhan produksi sektor perikanan mencapai 8,11%. Produksi perikanan tangkap 2018 mencapai 228.980,328 ton, sedangkan tahun 2019 mencapai 237.796,07 ton. Meskipun mengalami kenaikan namun belum optimal. Sebagai sektor unggulan, bidang kelautan dan perikanan harusnya mampu memberikan kontribusi setidaknya 30% dalam PDRB Provinsi Bangka Belitung secara keseluruhan, namun sektor perikanan hanya memberikan kontribusi sebesar 6 % dari total PDRB Bangka Belitung.

3. Prioritas III : Pembangunan Pariwisata

   Masih rendahnya laju pertumbuhan kunjungan wisatawan;

   Rendahnya laju pertumbuhan kunjungan wisatawan disebabkan oleh jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik yang masih rendah sehingga mempengaruhi salah satu kategori lapangan usaha PDRB yaitu penyediaan akomodasi dan makan minum. Jumlah kunjungan wisatawan tidak signifikan naik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 8.124 wisatawan dan domestik sebanyak 417.818 wisatawan. Sedangkan pada tahun 2019 wisatawan mancanegara sebanyak 9.183 dan domestik 429.190 wisatawan. Hal ini tentu sangat berpengaruh pada laju pertumbuhan kunjungan wisatawan. Laju pertumbuhan kunjungan wisatawan tahun 2018 sebesar 15,30% sedangkan pada tahun 2019 sebesar hanya 2,92%. Kecilnya pertumbuhan ini dikarena *event-event* pariwisata masih sangat terbatas, tempat-tempat wisata belum dikelola dengan baik

serta kurangnya promosi pariwisata dan pengemasan pariwisata yang menarik bagi wisatawan.

4. Prioritas IV : Peningkatan Ekonomi Masyarakat

a) Masih adanya masyarakat yang menganggur;

Tingkat pengangguran Bangka Belitung per Agustus 2017 sebesar 3,78% sedikit lebih rendah dibandingkan per Agustus 2018 sebesar 3,65% dan 2019 sebesar 3,62%. Meskipun tingkat pengangguran menurun namun jumlah pengangguran di Bangka Belitung dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dimana pada tahun 2017 sebanyak 26.399 orang dan naik di tahun 2018 sebanyak 26.552 orang dan 2019 sebanyak 26.871 orang. Peningkatan jumlah pengangguran ini salah satunya disebabkan oleh peningkatan angkatan kerja setiap tahun yang meningkat rata-rata 4% (2018) dan 2% (2019).

b) Masih lambatnya peningkatan kesejahteraan tenaga kerja;

Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) Bangka Belitung tahun 2017 sebesar 58,83 kemudian meningkat sebesar 63,23 (2017) dan 63,82 (2018). Capaian IPK Bangka Belitung masuk dalam kategori menengah ke bawah<65,99. Hal ini menunjukkan banyaknya kesempatan kerja yang masih bersifat informal sehingga menambah jumlah setengah penganggur, belum sigap dan siapnya unit usaha baru dan lama dalam menyiapkan sarana hubungan industrial di perusahaan serta mengikuti dan memenuhi pelaksanaan norma ketenagakerjaan yang berlaku, dan tidak memadainya jumlah tenaga kerja pengawas ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

c) Masih lambatnya penurunan tingkat kemiskinan;

Jumlah penduduk miskin di Bangka Belitung data Maret 2019 sebesar sebanyak 68.380 orang (4,62%) sedangkan pada periode yang sama tahun 2020 sebanyak 68.390 orang (4,53). Naiknya jumlah penduduk miskin disebabkan oleh kenaikan dari garis kemiskinan dimana pada Maret tahun 2019 garis kemiskinan sebesar Rp677.716 sedangkan Maret 2020 sebesar Rp721.455, terjadi kenaikan sebesar 6,45%. Penduduk miskin yang berada pada kerak-kerak kemiskinan cenderung sulit untuk diangkat dari kemiskinan karena hampir tidak mempunyai keahlian dan sulit menjangkau sumber-sumber ekonomi yang ada. Penduduk yang berada pada kerak kemiskinan sulit untuk dilatih dan diberi pekerjaan.

d) Masih rendahnya kesejahteraan masyarakat desa;

Tingkat kesejahteraan masyarakat desa secara rata-rata mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari indeks kedalaman kemiskinan mengalami peningkatan dimana data pada Maret 2019 sebesar 0,735 sedangkan Maret 2020 menjadi sebesar 0,790. Indeks kedalaman kemiskinan ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran masyarakat pedesaan jauh dibawah garis kemiskinan sebesar 0,735. Sedangkan indeks kedalaman kemiskinan perkotaan pada Maret 2019 sebesar 0,335 meningkat menjadi 0,445 pada Maret 2020. Rendahnya kesejahteraan masyarakat desa disebabkan oleh rendahnya pendapatan perkapita masyarakat desa sebesar Rp671.054 kapita/orang dibandingkan dengan pendapatan masyarakat perkotaan sebesar Rp685.433 kapita/orang.

5. Prioritas V : Pembangunan Pendidikan

a) Masih rendahnya akses pendidikan masyarakat;

Rendahnya kesempatan pendidikan masyarakat terlihat dari masih belum optimalnya Angka Harapan Lama Sekolah Masyarakat (Angka Harapan Lama Sekolah Laki-Laki, Angka Harapan Lama Sekolah Perempuan). Pada Tahun 2018 angka harapan lama sekolah baru mencapai 11,87 (Angka Harapan Lama Sekolah Laki-Laki 11.70, Angka Harapan Lama Sekolah Perempuan 12.05) dan pada tahun 2019 menjadi 11,94 (Angka Harapan Lama Sekolah Laki-Laki 11.78, Angka Harapan Lama Sekolah Perempuan12.11). Meskipun angka harapan lama sekolah mengalami kenaikan akan tetapi angka harapan lama sekolah ini belum mencapai angka 12,00. Hal ini berarti bahwa masyarakat di Bangka Belitung belum seratus persen menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.

b) Masih rendahnya kualitas pendidikan masyarakat;

Rendahnya kualitas pendidikan masyarakat disebabkan masih banyak satuan pendidikan yang belum terakreditasi A. Pada tahun 2018 persentase sekolah SMA, SMK, dan SLB Negeri dan Swasta baru mencapai 40,15% dan pada tahun 2019 persentase sekolah SMA, SMK, dan SLB Negeri dan Swasta beranjak naik mencapai 43.38% akan tetapi persentase sekolah yang terakreditasi A masih dibawah 50%.

6. Prioritas VI : Pembangunan Kesehatan

Belum optimalnya peningkatan derajat kesehatan;

Masih lambatnya pencapaian angka kesehatan masyarakat menyebabkan belum optimalnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dimana pada tahun 2018 angka kesehatan masyarakat sebesar 88,35% dan pada tahun 2019 angka kesehatan masyarakat 88,48%, atau hanya mengalami kenaikan sebesar 0, 13%. Hal ini salah satunya disebabkan oleh masih tingginya angka kematian bayi dan Balita per 1000 kelahiran hidup, dimana angka kematian bayi sebesar 4,21 (2017) dan Balita sebesar 5,03 (2018). Sedangkan angka kematian Balita sebesar 5,44 (2017) dan 6,50 (2018).

7. Prioritas VI : Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik

Belum optimalnya penatakelolaan pemerintah;

Penatakelolaan pemerintah dilihat dari belum optimalnya capaian indeks reformasi birokrasi dimana pada tahun 2018 sebesar 65,39 dan tahun 2019 sebesar 66,84, dengan kategori “B”. Terdapat beberapa komponen penilaian yang mengalami penurunan, yaitu penataan sistem manajemen SDM dari 12,19 (2018) menjadi 11,32 (2019), penguatan akuntabilitas dari 3,27 (2018) menjadi 3,56 (2019). Hal ini belum dinilai baik karena masih harus diperbaiki terutama sistem pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang saat ini masih dalam bentuk dokumentasi dan penugasan dan belum diikuti upaya nyata yang dapat mencapai sasaran Reformasi Birokrasi.

### 2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah

Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa

mendatang. Permasalahan Daerah berdasarkan urusan adalah masalah yang terkait langsung atau pun tidak langsung dengan masalah utama Daerah, yaitu sebagai berikut:

## A. Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

### *1. Urusan Bidang Pendidikan*

Permasalahan di Bidang Pendidikan, sebagai berikut:

a. Masih rendahnya pencapaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 16-18 tahun dalam 5 (lima) tahun terakhir dimana pada tahun 2022 sebesar 68,42. Ini menunjukkan bahwa sebanyak 31,58 persen anak usia 16-18 tahun tidak melanjutkan sekolah di tingkat sekolah menengah/SMA/SMK dan Paket C sehingga akan berdampak kepada rendahnya rata-rata lama sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam skala Nasional, APS Bangka Belitung di tahun 2022 masih di bawah capaian nasional, yaitu sebesar 73,15 persen. Secara Regional untuk Pulau Sumatera, selama periode 2018-2022, meskipun capaian APS Bangka Belitung selalu meningkat, angka ini paling rendah se-Sumatera. Sementara itu, capaian tertinggi selama lima tahun terakhir diperoleh Provinsi Kepulauan Riau. Di tahun 2022, APS penduduk usia 16-18 tahun di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 84,54 persen atau memiliki selisih sebesar 16,12 dengan capaian APS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
b. Rendahnya pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang sekolah menengah/SMA/SMK/Paket C. Hal ini terlihat dari capaian APM pada tahun 2022 sebesar 59,65 persen. Ini menunjukkan bahwa hanya sebanyak 59,65 persen anak usia 16-18 tahun di Bangka Belitung yang bersekolah di tingkat pendidikan menengah. Secara Nasional capaian APM Bangka Belitung masih di bawah capaian nasional, yang pada tahun 2022 sebesar 61,97 persen. Pada tingkat regional untuk pulau sumatera, capaian APM Bangka Belitung selama periode 2018-2022 berada pada posisi paling rendah se-Sumatera dan tertinggi berada di Provinsi Kepulauan Riau. Di tahun 2022, capaian Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar 73,54 persen atau memilik selisih sebesar 13,89 dengan capaian APM pada jenjang sekolah menengah/SMA/SMK/Paket C di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
c. Rendahnya kualitas pendidikan masyarakat disebabkan masih banyak satuan pendidikan yang belum terakreditasi A. Pada tahun 2021, dari 139 SMA/SMK dan SLB di ProvinsiKepulauan Bangka Belitung, sekolah dengan akreditasi A berjumlah 65 sekolah atau 46,76 persen, sekolah dengan akreditasi B sebanyak 57 sekolah atau 41,01 persen, sekolah akreditasi C sebanyak 12 sekolah atau 8,63 persen dan terdapat lima sekolah atau sebesar 3,59 persen sekolah yang belum terakreditasi. Ditinjau dari jenjang SMA, SMK dan Pendidikan Khusus, di tahun 2021, sebanyak 44 SMA atau 61,79 persen terakreditasi A, 21 sekolah atau 29,58 persen terakreditasi B, lima SMA atau sebesar 7,04 persen terakreditasi C dan satu SMA atau sebesar 1,41 persen yang belum terakreditasi. Pada jenjang SMK, dari 59 SMK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebanyak 18 SMK atau 30,51 persen terakreditasi A, 31 SMK atau 52,54 persen terakreditasi B, enam SMK atau 10,17 persen terakreditasi C dan empat SMK yang belum terakreditasi. Pada jenjang SLB, dari sembilan SLB di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebanyaktiga SLB atau 46,76 persen memiliki akreditasi A, lima SLB atau 41,01 persen dengan akreditasi B, dan satu SLB dengan akreditasi C.

d. Masih tingginya jumlah siswa yang putus sekolah. Secara keseluruhan, jumlah siswa putus sekolah pada periode 2017-2021 adalah 2.212 orang. Jumlah siswa yang putus sekolah di jenjang SMK jauh lebih tinggi dibandingkan pada jenjang SMA. Tingginya jumlah siswa SMA/SMK yang putus sekolah ini dikarenakan beberapa faktor, antara lain pernikahan usia anak-anak, kemiskinan, rendahnya motivasi belajar para siswa, dampak dari pandemi Covid 19 dimana banyak para siswa mengalami *learning loss* yang mengakibatkan para siswa mengalami kemunduran secara akademis pada masa covid 19 proses pendidikan yang tidak berjalan dengan efektif. Ditambah lagi dengan isu sosiokultural dimana banyaknya para siswa yang bekerja di tambang masyarakat dan/atau mencari bijih timah di tambang, dan perkebunan. Peningkatan angka putus sekolah ini juga disebabkan rendahnya kualitas/mutu pendidikan yang diberikan kepada para siswa sehingga kurangnya kebermaknaan peran sekolah dan pendidikan di dalam kehidupan sehari-hari para siswa, dan belum optimalnya layanan pendidikan dalam membantu para siswa di dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi sehari-hari, faktor kemiskinan dan belum optimalnya lingkungan ekosistem yang mendukung *wellbeing* atau kesejahteraan siswa dalam penuntasan wajib belajar 12 tahun.
e. Belum optimalnya kualitas dan mutu pengembangan kurikulum satuan pendidikan dan proses pembelajaran berbasis literasi ilmiah (saintifik) dan kurikulum Merdeka Belajar dengan pengintegrasian kurikulum nasional dan lokal, pendekatan multikultural, kecakapan abad 21, STEAM/STEM (*Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics*), dan pendidikan warga negara dunia (*Global Citizenship*) dalam rangka mempersiapkan siswa menjadi Pelajar Pancasila yang cakap dan berakhlak mulia.
f. Belum meratanya distribusi dan/atau persebaran guru dan tenaga kependidikan yang berkompetensi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kebanyakan guru dan tenaga kependidikan yang bertempat di kota mendapatkan akses layanan pendidikan yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang berada di lingkungan yang jauh dari kota. Hal ini menyebabkan para guru dan tenaga kependidikan yang berada di kota memiliki lebih banyak kesempatan untuk meningkatkan kompetensi mereka disebabkan lingkungan budaya yang lebih mendukung di dalam pengembangan karir dan kompetensi para guru dan tenaga kependidikan dibandingkan dengan mereka yang berada di daerah-daerah yang jauh dari kota. Selain itu, terjadi kekurangan tenaga guru dan kependidikan di sekolah-sekolah yang jauh dari kota yang kemudian mengakibatkan para guru dan tenaga kependidikan harus melakukan tugas dan kewajiban yang bukan menjadi tugas pokok utama mereka, yang mengakibatkan para guru dan tenaga kependidikan tidak bisa melaksanakan tugas dan kewajiban mereka secara optimal di dalam pemberian layanan pendidikan dan penciptaan ekosistem yang baik dan positif bagi perkembangan *wellbeing* (kesejahteraan) dan kualitas akademik para siswa.

g. Belum optimalnya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan berbasis multikultural, dan monitoring, serta evaluasi terhadap layanan pendidikan yang diselenggarakan disebabkan belum optimalnya kooordinasi dan kolaborasi dengan masyarakat, DUDIKA, swasta serta lembaga/instansi pemerintah daerah terkait lainnya, dan masih rendahnya kualitas sumber daya guru dan tenaga kependidikan serta pihak-pihak yang teribat di dalam penyelenggara pendidikan.
h. Masih rendahnya keselarasan dan relevansi ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran dan pendidikan dengan perkembangan DUDIKA dan IPTEK abad 21.

**2. Urusan Bidang Kesehatan**

Permasalahan di Bidang Kesehatan,sebagai berikut:

a. Masih tingginya angka kematian Ibu (AKI). Jumlah kematian Ibu di Bangka Belitung dalam 5 (lima) tahun terakhir masih sangat tinggi dimana pada tahun 2017 sebanyak 21 kasus meningkat menjadi 44 kasus tahun 2018 dan menurun tahun 2019 menjadi 36 kasus. Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020, yaitu sebanyak 26 kasus, tetapi kemudian tahun 2021 meningkat menjadi 36 kasus. Tingginya jumlah kematian ibu mengindikasikan bahwa kemampuan dan kaulitas pelayanan kesehatan yang belum optimal, kualitas pendidikan dan pengetahuan masyarakat terkait kehidupan sehat yang rendah, kualitas kesehatan lingkungan, social budaya dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang belum maksimal.
b. Masih tingginya angka kematian Bayi (ABI) dan Angka Kematian Balita (AKABA). Jumlah kematian Bayi (0-12 bulan) di Bangka Belitung sangat tinggi dimana pada tahun 2018sebanyak 166 kasus meningkat menjadi 188 kasus pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 menurun menjadi 186 kasus. Untuk jumlah kematian balita (0-5 tahun) menunjukkan tren peningkatan dalam 5 (lima ) tahun terakhir, pada tahun 2018 sebanyak 194 kasus kematian meningkat pada tahun 2019 menjadi 209 kasus dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 213 kasus kematian. Tingginya angka kematian bayi dan belita ini mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan kesehatan yang masih belum optima, kesadaran dan kebiasaan masyarakat yang kurang terhadap pentingnya kesehatan serta kualitas lingkungan kesehatan yang masih rendah.
c. Masih rendahnya persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; yaitu pada tahun 2019 sebesar 57,14%. Angka ini masih dibawah target provinsi tahun 2019 yaitu sebesar 80%. Hal ini disebabkan masih kurangnya dukungan dari *stakeholder* terkait di kabupaten/kota.

**3. Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**

Permasalahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagai berikut:

a. Belum optimalnya tingkat kemantapan jalan; Pada tahun 2018 tingkat kemantapan jalan provinsi ditargetkan sebesar 93,43%, namun hanya tercapai 83,66%. Pada tahun 2019 tercapai 92,23% dari target sebesar 94,21% atau menurun sebesar 9,77%. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu bencana banjir tahun 2017 hingga 2019 yang mempercepat penurunan kualitas jalan dan jembatan, adanya beberapa ruas jalan yang umurnya lebih pendek daripada yang diperkirakan, sehingga terdapat penambahan jumlah jalan yang harus dilakukan pemeliharaan. Selain daripada itu jembatan rusak

pada jalur strategis yang perlu segera ditangani dan membutuhkan dana yang cukup besar, serta terdapat beberapa jalan yang belum memenuhi standar.

b. Kurangnya tenaga ahli konstruksi; Seiring dengan maraknya pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kebutuhan akan tenaga ahli konstruksi yang bersertifikat pun meningkat pesat. Kurangnya tenaga ahli konstruksi yang bersertifikat di provinsi ini menjadi salah satu masalah dalam kegiatan penyediaan infrastruktur pekerjaan umum. Pengambilan tenaga ahli dari luar daerah menyebabkan meningkatnya biaya yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur. Pada tahun 2018 dan 2019, bidang jasa konstruksi telah berhasil menyelenggarakan pelatihan tenaga ahli konstruksi sebanyak lebih dari 150 orang lebih setiap tahunnya, namun tetap saja belum memenuhi kebutuhan tenaga ahli konstruksi bersertifikat yang sangat tinggi;

c. Jaringan irigasi yang masih rendah. Dari luas potensi jaringan irigasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2020 sebesar 7.132 ha dengan panjang jaringan irigasi 133.582.11m, jaringan irigasi dengan kondisi baik mencapai 46.305.41 meter (34,66%), kondisi sedang 27.680.2 meter (20,7%), dan kondisi rusak sepanjang 98.450.8 meter (73,7%), kondisi ini cukup mengkhawatirkan karena akan menurunkan produktivitas pertanian terutama tanaman pangan seperti padi dan berdampak kepada kemadirian pangan di Bangka Belitung. Untuk itu perlu penanganan yang intensif dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam penyediaan jaringan irigasi terutama di daerah-daerah lumbung pangan seperti Kabupaten Bangka Selatan dan Belitung Timur dalam meningkatkan produktifias pertanian.

d. Ketersediaan infrastruktur sumber daya air masih sangat rendah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2019 persentase kawasan yang terlindungi dari daya rusak air baru mencapai 6,06%. Masalah erosi pantai, penanganan banjir, serta kekeringan menjadi fokus utama bidang sumber daya air. Pada musim penghujan, banjir besar yang melanda di beberapa daerah di provinsi ini menyebabkan rusaknya sumber daya air dan abrasi pantai yang perlu segera ditangani. Sedangkan pada musim kemarau, beberapa daerah di provinsi ini mengalami kekeringan.Untuk itu perlu upaya penyediaan air baku seperti konservasi sumber air, pembangunan embung dan prasarananya perlu ditingkatkan. Capaian penyediaan air baku pada tahun 2019 hanya 19%.Padahal saat musim kemarau Disamping itu, sektor irigasi juga memerlukan perhatian untuk menghidupkan sektor pertanian. Rasio jaringan irigasi baru mencapai 7% atau baru 35% yang tertangani, sedangkan kondisi jaringan irigasi yang rusak mencapai 73,7%. maka jaringan irigasi pun perlu dioptimalkan pemanfaatannya.

**4. Urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Permasalahan di Bidang Perumahan Rakyat, sebagai berikut:

a. Masih rendahnya akses terhadap tempat tinggal/hunian layak dan terjangkau yang dilengkapi sarana dan prasarana dan utilitas yang memadai bagi masyarakat. Pada tahun 2019 capaian kinerja rumah layak huni 26,16 %, dan pada tahun 2020meningkat menjadi 3064 % dan menurun menjadi 27,60% pada tahun 2021. Untuk tingkat Nasional capaian Bangka belitung masih dibawah nasional yang mencapai 60,90 % pada tahun 2021, sedangkan secara regional se-sumatera, capaian Bangka Belitung pada tahun 2021 paling rendah se-Sumatera dan tertinggi adalah Provinsi Riau dengan capaian 70,63 persen.

Permasalahan di Bidang Kawasan Permukiman, sebagai berikut:

a. Belum optimalnya ketersedian akses terhadap air minum layak. Melalui kebijakan universal akses dan Sustainable Development Goal's (SDG's) Pemerintah Indonesia mentargetkan akses terhadap air minum layak sebesar 100 % pada tahun 2035 dan sanitasi layak sebanyak 100%, namun dalam lima tahun terakhir capaian persentase rumah tangga dengan ketersediaan air minum layak belum optimal dimana tahun 2018 sebesarr 68,83 % meningkat menjadi 73,75 tahun 2019 dan menurun pada tahun 2021 menjadi 73,40 %. Untuk tingkat Nasional capaian Bangka belitung masih dibawah nasional yang mencapai 90,78 % pada tahun 2021, sedangkan secara regional se-sumatera, capaian Bangka Belitung pada tahun 2021 terendah kedua setelah Provinsi bengkulu dengan capaian sebesar 67,39 persen dan tertinggi se-sumatera adalah Provinsi Sumatera Utara dengan capaian 90,89 persen.
b. Belum optimalnya ketersedian akses terhadap Sanitasi layak. Hal ini terlihat dari indicator persentase rumah tangga dengan akses sanitasi yang layak dalam 5 (lima) tahun terakhir di Bangka Belitung. Pada tahun 2018 capaian terhadap sanitasi layak sebesar 85,64% meningkat pada tahun 2019 menjadi 90,32 % dan tahun 2020 meningkat menjadi 92,58 % namun menurun pada tahun 2021 menjadi 92,24 %.

**5. Urusan Bidang Ketentraman, ketertiban umum, dan Perlindungan Masyarakat**

Permasalahan di Bidang Kebencanaan, sebagai berikut:

a. Belum adanya peta rawan bencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Peta potensi rawan bencana perlu disusun sebagai suatu gambaran yang untuk menjad rujukan dalam penanganan bencana yang akan terjadi. Peta rawan bencana harus disusun sebagai pedoman bagi suatu daerah dalam menentukan kebijakan dan tindakan yang akan dilaksanakan dalam melaksaqnakan kesiapsiagaan bencana maupun dalam pasca penanganan bencana.
b. Rendahnya kapasitas daerah terhadap penanggulangan bencana dikarenakan rendahnya capaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD), dimana capaian IKD dibagi menjadi capaian rendah (0 s.d 0,40), sedang (0,41 s.d. 0,80) dan tinggi (lebih besar atau sama dengan 0,81). Indeks kapasitas bencana Bangka Belitung 0,39 (rendah). Rendahnya IKD yang menggambarkan rendahnya kapasitas daerah terhadap penanggulangan bencana dikarenakan masih kurangnya penguatan kebijakan dan kelembagaan, dengan Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu,Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik, Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana, Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigas Bencana, Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana, Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana.

Permasalahan di Bidang Satuan Pamong Praja, sebagai berikut:

a. Terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diketahui sepanjang tahun 2017 sebanyak 3.584 orang/pelanggar, tahun 2018 sebanyak 2.353 orang/pelanggar dan tahun 2019 sebanyak 975 orang/pelanggar;
b. Meningkatnya tindak kriminal;Kasus tindak kriminal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2016 sebanyak 1.828 kasus dantahun 2017 sebanyak 1.490 kasus. Sedangkan tahun 2018 sebanyak 1.447 kasus dan tahun 2019 sebanyak 1.453 kasus. Meningkatnya jumlah tindak kriminal ini menggambarkan kurang amannya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

c. Belum optimalnya pelatihan bagi Satlinmas; Belum semua anggota Satlinmas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan pelatihan dalam rangka membantu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta membantu penanganan bencana dan kebakaran. Data per 31 Desember 2019 jumlah anggota Satlinmas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 3.997 orang, namun baru 1.030 orang anggota Satlinmas yang telah mendapatkan pelatihan;
d. Tingginya kasus bencana kebakaran; Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk daerah yang yang sering mengalami bencana kebakaran.Sampai dengan tahun 2019 telah terjadi 1.565 kasus kebakaran. Saat ini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum memiliki peta khusus daerah rawan kebakaran. Tidak hanya itu, kecuali anggota Satlinmas, masyarakat/relawan pemadam kebakaran belum diberikan pemahaman metode pemadam kebakaran melalui pendidikan dan pelatihan.

**6. Urusan Bidang Sosial**

Permasalahan di Bidang Sosial, sebagai berikut:

a. Meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dimana pada tahun 2017 sebanyak 394,681 orang menjadi 391,124 orang ditahun 2018 serta 398,670 ditahun 2019. Meningkatnya PMKS di Bangka Belitung disebabkan naiknya beberapa komponen PMKS diantaranya anak terlantar dari 54,357 orang (2018) menjadi 63,168 orang (2019), lanjut usia terlantar sebanyak 38,728 orang (2018) menjadi 42,964 orang (2019), pemulung dari 156 orang (2018) menjadi 225 (orang), Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) dari 240 orang (2018) menjadi 551 orang;
b. Kecenderungan jumlah pekerja migran bermasalah dan yang harus dipulangkan ke tempat asalnya semakin bertambah setiap tahunnyayang mengharuskan pemerintah daerah untuk memperhatikan semua hal yang berkaitan dengan perlindungan sosial mereka. Pada tahun 2019 terdapat 1 (satu) orang WNI asal Pangkalpinang yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dari Timor Leste yang telah dipulangkan melalui KBRI Dili. Upaya perlindungan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah mencakup perlindungan dalam bentuk bantuan, pemulihan psikologis, perawatan kesehatan dan pemulangan ke daerah asal.
c. Menurunnya jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Dimana jumlah PSKS sebanyak 752 lembaga dan 1.017 orang (2017), 689 lembaga dan 980 orang (2018), dan 700 lembaga dan 962 orang (2019). Menurunnya jumlah PSKS disebabkan oleh menurunnya pekerja sosial profesional dari 159 (2018) menjadi 143 (2019), pekerja sosial masyarakat dari 415 orang (2018) menjadi 413 orang (2019), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dari 117 orang (2018) menjadi 109 orang (2019).

**B. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

**1. Urusan Bidang Tenaga Kerja**

Permasalahan di Bidang Tenaga Kerja, sebagai berikut:

a. Pembangunan ketenagakerjaan yang belum optimal. Hal ini terlihat dari capaian Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) yang masih pada status menengah ke bawah dengan capaian pada tahun 2020 sebesar 63,95 dan masih di bawah capaian Nasional yang sebesar 67,64. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan secara komposit

yang mencakup 9 (sembilan) indikator utama pembangunan ketenagakerjaan yang sangat mendasar, yaitu: 1). perencanaan tenaga kerja; 2). penduduk dan tenaga kerja; 3). kesempatan kerja; 4). pelatihan kerja dan kompetensi kerja; 5). produktivitas tenaga kerja; 6). hubungan industrial; 7). kondisi lingkungan kerja; 8). pengupahan dan kesejahteraan pekerja; dan 9). jaminan sosial tenaga kerja.

b. Belum optimalnya penempatan tenaga kerja;Berdasarkan data tahun 2016 jumlah pencari kerja di Bangka Belitung yang terdaftar sebanyak 15.593 orang dengan penempatan hanya sebanyak 424 orang atau sebesar 2,7% sedangkan pada tahun 2019 sebesar 4 persen atau sebanyak 5.225 pencari kerja sebanyak 155 tenaga kerja yang ditempatkan.Hal ini disebabkanadanya ketidaksesuaian antara tingkat kualitas tenaga kerja dan kebutuhan dunia kerja, juga kurang diminatinya lowongan kerja yang ditawarkan perusahaan kepada para pencari kerja.

**2. Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Permasalahan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagai berikut:

a. Belum optimalnya pemberdayaan peningkatan kualitas keluarga; Salah satu faktor meningkatnya kualitas keluarga adalah sisi ekonomi. Dari sisi ekonomi salah satu yang menjadi objek pembinaan adalah Industri Rumahan (IR) yang dikelola oleh perempuan. Dari data tahun 2018 IR yang dikelola oleh perempuan hanya 1.941 atau 0,40 % dibandingkan dengan perempuan yang produktif. Pada tahun 2019 walaupun ada peningkatan tetapi masih jauh perbandingan antara perempuan yang mandiri melalui IR yaitu sebesar 3.129 dengan perempuan produktif 472.545 yaitu sebesar 0,66% tentu dirasakan masih sangat kurang. Hal lain yang menjadi permasalahan adalah belum optimalnya penganggaran kegiatan yang berbasis gender dari data pada tahun 2019. Perangkat Daerah yang sudah menerapkan kegiatan yang berbasis gender sebanyak 22 PD dari 32 PD yang ada di provinsi, begitu juga ketersediaan data pilah masih belum optimal data tahun 2019 menunjukkan bahwa dari 32 PD hanya 22 PD yang telah memiliki data pilah.

b. Belum memadainya SDM perlindungan anak, perempuan dan pemenuhan hak anak; Dari data 2019 SDM perlindungan perempuanyang terdata sebanyak 177 orang jika dibandingkan dengan jumlah perempuan yang harus dilindungi sebanyak 471.329 atau sebesar 0,037% sehingga dapat dikatakan angka tersebut sangat tidak proporsional. Begitu juga SDM perlindungan anak yang terdata sebanyak 790 dengan jumlah anak yang harus dilindungi sebanyak 436.486 atau sebesar 0,18%dan juga dalam pemenuhan hak anak,jumlah SDM yang terdata sebanyak 800dengan perbandingan 436.486 orang anak atau sebesar 0,183%.

**3. Urusan Bidang Pangan**

Permasalahan di Bidang Pangan, sebagai berikut:

a. Belum optimalnya Nilai Skor PPH Ketersediaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2018 Nilai Skor PPH Ketersediaan sebesar 86,09 kemudian meningkat di tahun 2019 sebesar 87,84 dan 87,26 ditahun 2020. Sedangkan tahun 2021 sebesar 87,73 dan tahun 2022 belum dilakukan penghitungan resmi. Meskipun skor PPH Ketersediaan meningkat namun Nilai Skor ini masih rendah dibawah nasional yaitu sebesar 96. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ketahanan pangan wilayah dari aspek ketersediaan

energi telah tercapai, namun masih diperlukan upaya peningkatan keragaman pangan sumber energi.

b. Belum optimalnya Nilai Skor PPH Konsumsi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nilai Skor PPH Konsumsi di Bangka Belitung sangat fluktuatif. Pada tahun 2018 Nilai Skor PPH Konsumsi sebesar 80,9 kemudian meningkat di tahun 2019 sebesar 83,1 dan menurun kembali ditahun 2020 sebesar 82,7. Di tahun 2021 sebesar 82,87 sedangkan untuk tahun 2022 belum dilakukan penghitungan. Meskipun skor PPH Ketersediaan meningkat namun Nilai Skor ini masih rendah dibawah nasional yaitu sebesar 96. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ketahanan pangan wilayah dari aspek ketersediaan energi telah tercapai, namun masih diperlukan upaya peningkatan keragaman pangan sumber energi.

c. Masih adanya penduduk rawan pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dimana dalam rentang tahun 2018-2022, *Prevalence of Undernourishment* (PoU) terus mengalami penurunan. Pada tahun 2018 *Prevalence of Undernourishment* (PoU) sebesar 10,13 persen, kemudian menjadi 7,9 persen pada tahun 2019. Pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 7,50 persen dan kembali turun menjadi 6,90 persen pada tahun 2021. Hal ini menunjukan masih adanya prevalensi penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan atau penduduk rawan pangan. Dengan jumlah penduduk Bangka Belitung yang dihitung sebanyak 1.481.512 jiwa terdapat 99.706 jiwa.

**4. Urusan Bidang Pertanahan**

Permasalahan di Bidang Pertanahan, sebagai berikut:

a. Masih banyaknya kasus sengketa tanah

Masih banyak lahan yang merupakan lahan sengketa, sehingga menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur dan penataan ruang.Penyelesaian kasus sangat fluktuatif. Pada tahun 2016 penyelesaian kasus hanya mencapai 38 persen dari 39 kasus hanya 15 kasus yang terselesaikan. Sedangkan pada tahun 2019 dari 8 kasus terdapat 2 kasus yang tidak terselesaikan. Kemudian masih banyak juga lahan pemerintah yang belum terinventarisir maupun teridentifikasi sehingga perlu dilakukan upaya-upaya untuk dapat memanfaatkannya.Hingga tahun 2019 anggaran untuk bidang pertanahan masih sangat sedikit.Akibatnya masalah-masalah diatas sulit untuk diselesaikan.Bahkan kewajiban daerah untuk menyelesaikan ganti rugi sengketa tanah pembangunan jalan provinsi pun menjadi terhambat. Tingkat partisipasi masyarakat dalam hal penyediaan lahan untuk pembangunan infrastuktur pun masih cukup rendah, dampaknya antara lain adalah biaya pembebasan lahan yang cukup tinggi untuk pelebaran jalan dikarenakan masyarakat menginginkan ganti rugi yang cukup tinggi atas lahan mereka.

**5. Urusan Bidang Lingkungan Hidup**

Permasalahan urusan Bidang Lingkungan Hidup, sebagai berikut:

a. Belum adanya dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup; Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup adalah sebagai instrumen pengendalian, pencegahan kerusakan lingkungan di awal sehingga perlu dokumen perencanaan lingkungan hidup yang mengatur pengelolaan, pemanfaatan, pengendalian serta pengawasan sehingga meminimalkan kerusakan lingkungan. Jika dokumen perencanaan ini tidak tersusun maka akan menyulitkan dalam melakukan pengendalian dan pencegahan kerusakan lingkungan.

b. Masih rendahnya pengaduan masyarakat terhadap permasalahan lingkungan hidup. Pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengaduan kepada instansi penanggung jawab, mengenai dugaan terjadinya pelanggaran, potensi dan/atau dampak di bidang lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan. Pengaduan Masyarakat ini bersumber baik dari hasil pengawasan, pengaduan langsung ke Dinas Lingkungan Hidup ataupun yang berasal dari Media massa baik yang izin lingkungannya dikeluarkan oleh Provinsi maupun oleh kabupaten/kota. Pada tahun 2017 semua pengaduan/kasus yang masuk 100% diverifikasi. Sedangkan pada tahun 2018 pengaduan yang masuk sebanyak 20 kasus (85%), dan yang diverifikasi sebanyak 17 kasus. Pada tahun 2019, pengaduan yang masuk sebanyak 18 kasus dan yang diverifikasi sebanyak 17 kasus atau sebesar 94 persen karena terdapat satu pengaduan yang sudah ditindaklanjuti oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
c. Masih rendahnya Ketaatan Usaha/Kegiatan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);Salah satu instrumen penegak hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu pengawasan terhadap ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, ketaatan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (izin pembuangan air limbah, izin pengelolaan limbah, limbah bahan berbahaya dan beracun (penyimpanan, pengumpulan, pengolahan, penimbunan, pengangkutan) serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dokumen lingkungan, air, udara, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3). Ketaatan usaha/kegiatan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pada kurun waktu tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi, namun dari kondisi tahun 2017 sebesar 60% meningkat menjadi 86% pada tahun 2021. Pada tahun 2021 jumlah usaha/kegiatan yang menggunakan izin lingkungan juga menurun dari sebanyak 50 usaha/kegiatan pada tahun 2017 menjadi 35 usaha/kegiatan di tahun 2021. Sedangkan target tahun 2023 untuk ketaatan usaha /kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan sebesar 75% dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi sebesar 85% dari total izin yang diterbitkan.
d. Masih rendahnya ijin rekomendasi izin lingkungan yang diterbitkan;IzinLingkungan adalah izinyangdiberikankepadasetiaporangyangmelakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan danpengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.Berdasarkan data di atas izin lingkungan yang dikeluarkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitungdari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 meningkat dari 126 usaha/kegiatan (2017) menjadi sebanyak 146 usaha/kegiatan. Namun kondisi ini menurun menjadi 36 usaha/kegiatan di tahun 2020 dan 20 usaha/kegiatan di tahun 2021.
e. Belum adanya TPA Regional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Pada saat ini, TPA Regional sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menampung sampah dari Kota Pangkalpinang dan sekitar Kabupaten Bangka Tengah dan untuk implementasi dari Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Kebijakan Strategi Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pengelolaan dan pengurangan timbulan sampah yang masuk ke TPA di 7 (tujuh)

kabupaten/kota. Verifikasi hasil calon lokasi TPA Regional berada di Pulau Bangka (belum final verifikasi lokasi) dan 1 di Pulau Belitung (telah final verifikasi lokasi dan perlu ditindaklanjuti).

**6. Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**

Permasalahan di Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, sebagai berikut:

a. Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan; Berdasarkan data pada tahun 2018 baru 6 dinas/instansi atau sektor lain yang memanfaatkan data kependudukan, sedangkan di tahun 2019 dinas/instansi atau sektor lain yang memanfaatkan data kependudukan hanya 8. Permasalahan lain masih rendahnya cakupan kepemilikan akta, baik akta nikah, kelahiran dan kematian. Pada tahun 2018 mayarakat yang telah memiliki akta pencatatan sipil sebanyak 63,32% sementara pada tahun 2019 yaitu sebesar 71,10%. Begitu juga cakupan dokumen pendaftaran penduduk yaitu KK,KTP dan KIA belum maksimal. Data tahun 2018 masyarakat Bangka Belitung yang sudah mengurus dokumen kependudukan sebesar 60,41% dan 2019 sebesar 74,41%.

**7. Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Permasalahan urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai berikut:

a. Belum maksimalnya pengelolaan lembaga kemasyarakatan; Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang aktif di Bangka Belitung tahun 2015-2019 dari 65 BUMDes menjadi 289 BUMDes yang tersebar di seluruh desa di Bangka Belitung. Meskipun jumlah BUMDes aktif naik setiap tahunnya namun kenaikan ini belum maksimal. Sebanyak 77 Desa dari 309 desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang belum memiliki BUMDes. Padahal unit usaha ini hal yang wajib dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.Ada beberapa faktor yang menyebabkan belum terbentuknya BUMDes, diantaranya faktor modal, belum adanya kesiapan BPD dan Peraturan Desa.

**8. Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Permasalahan urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sebagai berikut:

a. Meningkatnya Angka Kelahiran Total (TFR); Perbandingan antara tahun 2018 dan 2019 mengalamikenaikansebesar 0,03 % yaitudari 2,27 menjadi 2,30. Hal ini salah satu penyebabnya adalah masih kurang optimalnya pembinaan kepada kabupaten/kota tentang keluarga berencana. Data 2018 menyebutkan hanya 5 dari 7 kabupaten/kota yang intensif menjadi binaan provinsi. Kemudian untuk pembinaan diperbaharui lagi di 2019 dengan mengupayakan pembinaan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bangka Belitung.
b. Masih belum seluruh kabupaten/kota yang memiliki dokumen pengendalian penduduk; Data 2019 menyebutkan bahwa dari 7 kabupaten/kota di Bangka Belitung hanya 4 kabupaten/kota yang telah memiliki dokumen kependudukan (*Grand Design* Kependudukan). Hal ini tentunya akan mempersulit untuk pelaksanaan pemetaan dalam rangka pengendalian penduduk.
c. Belum optimalnya pembentukan Kampung KB;Meskipun dari tahun 2016-2019 pembentukan Kampung KB meningkat namun Data tahun 2019 Kampung KB yang

terbentuk 118 Kampung KB dari target 131 kampung KB yang terbentuk pada akhir masa RPJMD.

**9. Urusan Bidang Perhubungan**

Permasalahan urusan BidangPerhubungan, sebagai berikut:

a. Belum memadainya infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); Meskipun pemenuhan infrastruktur lalu lintas dan angkutan jalan dari tahun 2016-2019 terus meningkat namun peningkatan tersebut belum optimal. Pemenuhan infrastruktur lalu lintas dan angkutan jalan baru mencapai38,12 persen di tahun 2019. Pemenuhan infrastruktur lalu lintas baru terealisasi sebesar 15,25% (1 unit APILL, 1200 m Marka jalan dan 36 unit rambu lalu lintas) atau capaian sampai dengan tahun 2019 sebesar 15,25%. Sedangkan untuk pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) untuk jalan provinsi kawasan perkotaan, dimana kebutuhan perkotaan sebanyak 1.120 unit, sampai dengan tahun 2019 baru dapat terealisasi sebanyak 80 unit.

**10. Urusan Bidang Komunikasi dan Informasi**

Permasalahan urusan BidangKomunikasi dan Informasi, sebagai berikut:

a. Belum optimalnya layanan publik dan pemerintah berbasis *e-government*; meskipun pada tahun 2019 capaian kinerja sudah mencapai 90 persen namun layanan publik dan pemerintah berbasis *e-government* belum optimal dikarenakan belum terintegrasinya data antar instansi dan terbatasnya belum adanya payung hukum yang mengatur terkait dengan pemanfaatan satu data.

**11. Urusan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**

Permasalahan urusan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, sebagai berikut:

a. Menurunnya jumlah koperasi di Bangka Belitung;Jumlah koperasidi Bangka Belitung pada tahun 2016 berjumlah1.149 dan menurun menjadi 1.049 koperasi di 2019. Hal ini dikarenakan adanya pembubaran koperasi dan koperasi yang tidak aktif. Setidaknya dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 terdapat 100 pembubaran koperasi. Sedangkan koperasi tidak aktif bertambah dari 328menjadi 395 ditahun 2019.
b. Belum optimalnya pemberdayaan UMKM; Pada tahun 2016 jumlah UMKM tercatat sebanyak 293.985 UMKM sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 150.948 UMKM dan2019 sebanyak 161.186 UMKM. Jumlah ini menurun dikarenakan terdapat pembaharuan data UMKM di Bangka Belitung. Sedangkan jumlah UMKM yang diberdayakan tercatat pada tahun 2018 sebanyak 3.500 UMKM dan 4.300 UMKM di tahun 2019. Belum optimalnya pemberdayaan UMKM dikarenakan beberapa faktor, seperti : Minimnya modal, kurang inovatif, belum maksimalnya pemasaran secara online, dan sebagainya.

**12. Urusan Bidang Penanaman Modal**

Permasalahan urusan Bidang Penanaman Modal, sebagai berikut:

a. Masih rendahnya persentase capaian realisasi investasi. Pada tahun 2018 nilai sebesar 3,7 triliun dengan realisasi 3,1 triliun PMDN dan 620 miliar untuk PMA. Sedangkan tahun 2019 realisasi investasi sebesar 4,2 trilyun dengan rincian 2,9 triliun PMDN dan 1,3 triliun PMA. Nilai ini jauh dari target nasional 6,85 triliun (2019). Beberapa hambatan dan kendala investor dalam berinvestasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yakni, belum adanya pelabuhan yang representatif, masih banyak investor yang belum

memahami proses mendapatkan NIB pada sistem perizinan melalui OSS (*Online Single Submission*) sehingga ada bebarapa pelaku usaha mengisi rencana investasinya pada OSS tidak sesuai dengan nilai rencana investasi yang akan diinvestasikan.

**13. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga**

Permasalahan urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga, sebagai berikut:

a. Masih rendahnya kualitas pemuda di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dipengaruhi oleh tingkat persaingan yang semakin tinggi sehingga menuntut kualitas dan kinerja manusianya untuk lebih ditingkatkan dimana pada tahun 2019 jumlah pemuda yang berprestasi di tingkat provinsi sebanyak 184 orang dan tahun 2018 sebanyak 199 orang. Hal ini masih sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah seluruh pemuda yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
b. Masih belum optimalnya pembinaan cabang olah raga dimana pada tahun 2019 terdapat 8 cabor yang diikutsertakan dalam 13 cabor pada pertandingan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) dan pada tahun 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan ke 6 dari 7 provinsi yang ikut serta dalam pertandingan Pekan Olahraga Pelajar Wilayah I.

14. **Urusan Bidang Statistik**

Permasalahan urusan Bidang Statistik, sebagai berikut:

Masih rendahnya pemanfaatan data statistik sektoral; Meskipun pemanfaatan data sudah mencapai 95 persen di tahun 2019, namun capaian ini belum optimal mengingat kurangnya pemahaman Perangkat Daerah dalam memanfaatan data statistik dalam perencanaan dan belum adanya regulasi daerah didalam mengatur penggunaan data tersebut dalam perencanaan dan pengambil kebijakan. Untuk itu, perlu penanganan terhadap permasalah tersebut, yaitu dengan kolaborasi dan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan membuat Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Penggunanaan Satu Data Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**15. Urusan Bidang Persandian**

Permasalahan urusan Bidang Persandian, sebagai berikut:

Rendahnya capaian indeks kematangan keamanan informasi; Indeks Kematangan Keamanan Informasi(IKKI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017 dan 2018 Indeks Kematangan Keamanan Informasi(IKKI) yaitu 1 atau berada pada level I (sangat kurang/non existent/kondisi awal) dan tahun 2018 meningkat yaitu 2 atau berada pada level II, dimana level ini masih berada pada kondisi awal penerapan keamanan informasi dan kondisi penerapan kerangka kerja dasar penerapan keamanan informasi. Hal ini menunjukan tingkat sistem elektronik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum dapat dikatakan matang dan sesuai dengan standar ISO 27001:2013 karena belum mencapai level III+ dimana penerapan keamanan informasi telah terdefinisi dan konsisten.

**16. Urusan Bidang Perpustakaan**

Permasalahan di urusan Bidang Perpustakaan, sebagai berikut:

a. Masih rendahnyatingkatpembinaanperpustakaan. Sampai dengan tahun 2021 jumlah perpustakaan yang sudah dibina masih sangat sedikit yaitu sebanyak 102 perpustakaan atau sebesar 6,67 persen dari 1.548 perpustakaan yang ada di Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung. Tujuan dilakukan pembinaan perpustakaan adalah memperkuat peran perpustakaan provinsi dalam peningkatan kemampuan literasi dan pengembangan perpustakaan ditingkat kabupaten/kota dan desa. Dengan adanya pembinaan perpustakaan maka kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) perpustakaan, pengelolaan perpustakaan serta sarana dan prasarana perpustakaanyang memadai, dapat meningkat dengan baik. Maka dari itu pembinaan perpustakaan sangat penting dan perlu didukung oleh semua pihak.

b. Masih rendahnya koleksi buku dan naskah kuno di perpustakaan. Sampai tahun 2021 koleksi buku yang dimiliki perpustakaan daerah masih sangat sedikit yaitu sebanyak 26.209 koleksi buku, sedangkan untuk naskah kuno sangat minim sekali. Sesuai aturan koleksi buku yang harus dimiliki perpustakaan sekurang-kurangnya 0,015 per kapita masyarakat dan subjeknya harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, jumlah koleksi buku di perpustakaan sekurangnya mencapai minimal 50.000 judul.

**17. Urusan Bidang Kebudayaan**

Permasalahan di urusan Bidang Kebudayaan, sebagai berikut:

a Masih rendahnya capaian Indeks Pemajuan Kebudayaan yang disebabkan belum optimalnya koordinasi, kolaborasi dan sinergitas antar pemangku kebijakan, lembaga/instansi pemerintahan dan masyarakat dalam menciptakan inovasi dan pembaharuan kebijakan dan strategi dalam pelestrian, pengembangan dan pemajuan kebudayaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

b Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia yang mumpuni yang terlibat dalam perencanaan, pengelolaan, pengembangan, dan pelestarian, serta monitoring dan evaluasi terhadap pelestarian, pengembangan dan pemajuan kebudayaan sehingga menyebabkan capaian Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perkembangan dan pemajuan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) dan Pokok Pikiran Pemajuan Kebudayaaan (PPKD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih rendah.

c Belum optimalnya perencanaan, pelestarian, pengembangan dan pemajuan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB), serta pemajuan kebudayaan sehingga menyebabkan pertumbuhan pengembangan dan pelestarian Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) dan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih rendah.

**18. Urusan Bidang Kearsipan**

Permasalahan di urusan Bidang Kearsipan,sebagai berikut:

a. Masih rendahnya penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan standar baku kearsipan. Tantangan terberat adalah penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan standar baku kearsipan, di mana berdasarkan hasil Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE) Tahun 2019 sebesar 38,79 yang dilakukan oleh pihak ANRI, belum menunjukkan angka yang baik. Penyebab kegagalan tersebut antara lain disebabkan adanya permasalahan pengelolaan arsip yang belum maksimal walaupun sudah mempunyai Depo Arsip Daerah namun belum memiliki sarana dan prasarana sesuai standar ANRI. Pada tahun 2020 meningkat dan terus meningkat pada tahun 2021 sebesar 56,86 menjadi 66,23 dengan perdikat baik.

d Masih rendahnya arsip yang dilindungi dan diselamatkan sesuai dengan ketentuan kearsipan yang berlaku. Perlindungan dan penyelamatan arsip oleh Pemerintah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung belum menunjukan keseriusan dalam pelaksanaannya, karena belum diimbangi dengan ketersediaan sarana prasarana dan sumber daya manusia kearsipan yang memadai, disamping anggaran yang tersedia minim. Disamping itu, kendala yang dihadapi adalah sebagian besar perangkat daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum pernah menyerahkan arsip inaktifnya ke Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi.Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan telah melakukan berbagai upaya dalam menyelamatkan dan mempromosikan pentingnya arsip untuk diselamatkan.

e Belum adanya layanan perizinan penggunaan arsip yang digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;Program layanan perizinan penggunaan arsip di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum dilaksanakan, hal ini disebabkan belum ada aturan yang mengatur tentang pedoman keterbukaan arsip statis untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta penyelidikan dan penyidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa Peraturan Gubernur.

## C. Urusan Pilihan

### 1. Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan

Permasalahan urusan di Bidang Kelautan dan Perikanan, sebagai berikut:

a. Masih belum optimalnya pemanfaatan luasan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang termanfaatkan;Pemanfaatan ruang lautuntuk kawasan konservasi sampai tahun 2021 baru 595.182,01ha dengan 2 lokasi yakni kawasan konservasi perairan gugusan pulau-pulau momparang dan perairan sekitarnya di Kabupaten Belitung Timur dan kawasan konservasi perairan Kabupaten Belitung yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

b. Pertumbuhan produksi perikanan tangkapmasih sangat rendah;Dengan Potensi kelautan tang besar serta sumber perikanan yang melimpah di Perairan Bangka Belitung seharusnya menjadi hasil perikanan tangkap menjadi sqalah satu sumber penghasilan masyarakat yang potensial terutama di untuk masyarakat sekitar pantai. Melihat perkembangan perumbuhan produksi perikanan tangkappada lima tahun terakhir kurang menggembirakan, tahun 2018 sebesar 4,87 persen menurun menjadi tumbuh negarif sebesar 4,5 tahun 2019 dan meningkat lagi dengan tumbuh sebesar 1,12 persen tahun 2021. Ketidakstabilan pertumbuhan ini disebabkan belum optimalnya pelabuhan perikanan sebagai sentra kegiatan perikanan tangkap dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah; rendahnya teknologi perikanan tangkap; dominasi perikanan tangkap skala kecil; berkurangnya daerah penangkapan ikan (DPI) akibat pemanfaatan ruang perairan pesisir yang multi-sektor; masih terjadinya konflik kepentingan antar sektor yang memanfaatkan wilayah pesisir dan laut terutama sektor kelautan dan perikanan dengan sektor pertambangan;serta masih maraknya kegiatan *illegalunregulatedandunreportedfishing* di wilayah perairan provinsi kepulauan Bangka Belitung.

c. Pertumbuhan produksi perikanan budidaya masih sangat rendah; pertumbuhan produksi perikanan budidaya tahun 2021 sebesar 16,5 persen meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 14,17 persen, walaupun sempat terkontraksi (tumbuh negative) pada tahun 2019 sebesar 23,44 persen. Ketidakstabilan pertumbuhan ini disebabkan karena rendahnya minat masyarakat untuk melakukan budidaya perikanan khususnya

budidaya perairan tawar; adopsi teknologi yang minim; serta suplai pakan dan benih masih didatangkan dari luar Pulau Bangka Belitung. Disisi lain, perkembangan budidaya air payau, terutama budidaya tambak udang vannamei yang bekembang pesat belum disertai dengan adanya peraturan terkaitbudidayavanamei di tingkat provinsi.

d. Masih rendahnya persentase pelaku usaha yang taat aturan; Sampai tahun 2021 baru 69,96% pelaku usaha yang taat aturan. Terkendala dengan minimnya hari operasi kapal pengawas yang dalam setahun hanya memiliki 25 hari operasi pada tahun 2021, jumlah hari operasi yang optimal minimal 100 hari operasi dalam setahun, dan harus memiliki minimal 2 timpatroli, sedangkan saat ini hanya memiliki 1 tim patrol.

e. Jumlah produksi benih ikan yang unggul dari balai pemuliaan milik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum optimal; Beberapa Sarana dan prasarana yang ada di Balai benih air laut telah direhabilitasi guna mengoptimalkan produksi benih ikan laut. Untuk balai benih air payau, karakteristik instalasinya untuk udang windu sedangkan saat ini balai beralih kejenis udang vaname sehingga perlu dilakukan rehabilitasi guna pengoptimalan produksi benih di kedua balai benih. Pada tahun 2021, produksi benih air laut dan air payau hanya berproduksi sebanyak 11 juta ekor.

**2. Urusan Bidang Pertanian**

Permasalahan urusan di Bidang Pertanian, sebagai berikut:

a. Belum optimalnya sarana dan prasarana pertanian; Meskipun capaian rasio sarana dan prasarana meningkat setiap tahun namun belum optimal. Meningkatnya rasio sarana dan prasarana pertanian diikuti dengan peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP), dimana tahun 2020 sebesar 103,94 menjadi 105 pada tahun 2021 sedangkan tahun 2022 menjadi 108,43. Namun peningkatan NTP tersebut tidak berdampak bagi kesejahteraan petani dimana indeks harga yang diterima petani terhadap indeks yang dibayar petani tidak terlalu signifikan. Melambungnya harga saprodi (pupuk dan pestisida) menambah beban produksi petani ditambah dengan masih rendahnya harga lada dan karet menyebabkan menurunnya ketertarikan petani untuk berkebun lada dan karet sehingga terjadi alih fungsi lahan dari pertanian ke pertambangan dan perkebunan sawit yang dianggap lebih menguntungkan

**3. Urusan Bidang Pariwisata**

Permasalahan urusan di Bidang Pariwisata, sebagai berikut:

a. Kunjungan wisatawan yang menurun. Hal ini terlihat dari jumlah kunjungan wisatawan ke Bangka Belitung dalam lima tahun terakhir cenderung menurun, terutama pada saat pandemi COVID-19 mulai menerpa pada pertengahan tahun 2020. Jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2018 sebanyak 438.373 orang, dengan wisatawan mancanegara sebanyak 9.183 orang dan wisatawan nusantara sebanyak 429.190, sedangkan pada tahun 2020 kunjungan wisatawan sebanyak 193.758 orang dengan wisatawan mancanegara sebanyak 3.457 orang dan wisatawan Nusantara sebanyak 191.291 orang, menurun sebesar 119,83 persen. Penurunan ini terjadi sebagai dampak dari pandemi COVID-19 dimana dengan pemberlakuan lockdown/PSBB dan social distancing, pembatasan aktivitas masyarakat serta pembatasan penerbangan menuju dan dari Bangka Belitung menyebabkan menurunnya perekonomian di Bangka belitung.

b. Belum optimalnya sumber daya pariwisata yang terlatih dan tersertifikasi. Hal ini terlihat dari realisasi tenaga kerja sektor pariwisata yang tersertifikasi sampai dengan tahun 2019 hanya sebesar 9 persen atau sebanyak 337 dari 3.642 SDM Pariwisata. Meningkatnya tenaga pariwisata belum diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya pariwisata. Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran dalam memberikan pelatihan bagi sumber daya pariwisata.

**4. Urusan Bidang Kehutanan**

Permasalahan urusan di Bidang Kehutanan, sebagai berikut:

a. Masih rendahnya pengelolaan hutan yang disebabkan karena:
   - kelembagaan pengelola kawasan hutan tingkat tapak, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebanyak 13 (tiga belas) unit yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, baru 8 (delapan) unit yang ditetapkan sebagai UPTD KPH sebagai pelaksana kewenangan urusan kehutanan tingkat provinsi; perlunya peningkatan kapasitas SDM di KPH;
   - luas lahan kritis berdasarkan data Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Baturusa Cerucuk tahun 2013, luas lahan kritis dan sangat kritis tahun 2013 mencapai 216.109 hektar; capaian penanaman tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 seluas 18.973 hektar (LPPD Dinas Kehutanan tahun 2019); masih tingginya kerusakan hutan dan lahan, perlu peningkatan upaya penegakan hukum melalui koordinasi yang sinergis dengan berbagai unsur; kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2019 kebakaran hutan seluas 1.423 ha (LPPD Dinas Kehutanan tahun 2019).

b. Masih rendahnya penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; Hal ini disebabkan oleh belum terbentuk dan ditetapkannya kawasan ekosistem essensial/kawasan yang memiliki nilai ekosistem penting dan lembaga pengelolanya termasuk pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi; belum dimiliki data tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi yang menjadi kewenangan provinsi;

c. Masih rendahnya Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan; hal ini disebabkan olehmasih rendahnya kapasitas penyuluh kehutanan yang berdampak rendahnya kapasitas Kelompok Tani Hutan (KTH). Jumlah KTH tahun 2020 dari 180 KTH, terdiri dari kelas pemula berjumlah 168 KTH, kelas madya berjumlah 15 KTH, kelas utama berjumlah 0 KTH;

d. Belum optimalnya program perhutanan sosial;Hingga tahun 2019 tercatat sebanyak 172 izin dengan luas 38.051 ha, namun baru 52 izin yang sudah menyusun rencana kerja dan melaksanakan kegiatan sesuai jenis usahanya.Rendahnya usulan masyarakat untuk mengusulkan pengelolaan hutan sosial menjadi salah satu belum optimalnya pemanfaatan perhutanan social. Untuk tahun 2020, terdapat 7 usulan (±334 ha) yang sedang berproses untuk pengajuan usulan ke Kementerian.

e. Masih rendahnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS); Dalam Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pengelolaan DAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdapat 433 DAS yang terdiri dari 357 DAS bernama dan 76 DAS belum bernama; sejumlah 162 DAS harus dipulihkan daya dukungnya dan 271 DAS yang dipertahankan daya dukungnya; capaian hingga tahun 2019 sejumlah 4 DAS telah diupayakan dipulihkan daya dukungnya dan 2 DAS yang dipertahankan daya dukungnya;

kelembagaan Forum Koordinasi Pengelolaan DAS (Forum DAS) Kabupaten/Kota baru terbentuk 3 Forum DAS dari 7 kabupaten dan kota.

**5. Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral**

Permasalahan urusan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral,sebagai berikut:

a. Rasio Elektrifikasi (RE) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif berfluktuatif;capaian rasio elektrifikasi tidak akan statis mengingat kebutuhan untuk memiliki rumah dan berkembangnya dunia usaha semakin bertambah tentunya kebutuhan akan listrik juga semakin meningkat.

**6. Urusan Bidang Perdagangan**

Permasalahan urusan di Bidang Perdagangan,sebagai berikut:

a. Menurunnya ekspor di Kepulauan Bangka Belitung; ekspor Bangka Belitung masih sangat didominasi oleh ekspor logam timah. pada tahun 2019 ekspor mengalami penurunan menjadi 1.294 juta USD atau 465,1 juta ton. Hal tersebut disebabkan karena adanya syarat CPI *(competent person of Indonesia)* dalam pengajuan RKAB (Rencana Kegiatan Anggaran Belanja) dan hanya ada empat perusahaan yang memenuhi persyaratan tersebut.
b. Masih rendahnya Indeks Keberdayaan Konsumen dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat dan kurangnya sosialisasi tentang undang-undang perlindungan konsumen, hak advokasi konsumen dan lembaga perlindungan konsumen serta rendahnya perilaku komplain atau mengungkapkan keluhan dikalangan konsumen agar produsen dapat memberikan pelayanan produk yang sesuai aturan.

**7. Urusan Bidang Perindustrian**

Permasalahan urusan di Bidang Perindustrian, sebagai berikut:

a. Rendahnya pertumbuhan jumlah industri; Sektor industri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung mengalami tren penurunan baik industri besar, sedang, dan kecil. Pertumbuhan jumlah industri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat 18,36% (2018), 12,40% (2019), dan 9,20 (2020). Menurunnya pertumbuhan industri di Bangka Belitung, salah satunya disebabkan oleh menurunnya jumlah industri sedangdari 106 unit (2018) menjadi 100 unit (2020). Hal ini membuat persentase pertumbuhan jumlah industri mengalami perlambatan kenaikan sebesar 2%.
b. Kepatuhan perusahaan industri dalam penyampaian data dan informasi industri masih rendah; Industri yang sesuai izin usaha industri (IUI) memenuhi 3 aspek, yang salah satunya merupakan penyampaian data dan informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun2019, untuk penyampaian tersebut perusahaan industri terlebih dahulu harus memiliki akun SIINas,kondisi saat ini baru 30% perusahaan industri yang memiliki akun SIINassehingga tingkat kepatuhan perusahaan industri masih rendah terhadap penyampaian data.

**8. Transmigrasi**

Permasalahan urusan di Bidang Transmigrasi, sebagai berikut:

a. Belum optimalnya pengembangan kawasan transmigrasi; Kawasan Transmigrasi Batu Betumpang, Kabupaten Bangka Selatan dijadikan sebagai kawasan

transmigrasi oleh Kementerian Dalam Negeri yaitu pada tahun 2016 dengan luas 180.278.28 ha. Kemudian pada tahun 2018 ditetapkan 1 kawasan lagi yaitu kawasan Jebus dengan 74.015.27. Meskipun sudah ada 2 kawasan transmigrasi yang ditetapkan akan tetapi pelaksanaan dilapangan belum begitu optimal dalam pengembangan wilayah, terutama menjadikan wilayah yang strategis secara ekonomi dan menjadi pusat perkotaan baru. Pembangunan kota mandiri terpadu perlu mendapat dukungan dari semua sektor agar dapat berkembang dengan baik.

## D. Urusan Pendukung Urusan Pemerintah

### 1. Sekretariat Daerah.

Permasalahan urusan Sekretariat Daerah, sebagai berikut.

a. Belum optimalnya Nilai Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah; Hal ini disebabkankemampuan menyediakan data masih rendah. Data yang disajikan hanya mencapai 60% atau 0-50% data IKK LPPD. Sekitar 30% lainnya sudah cukup baik, mampu menyediakan 50-75% dataIKK. Rendahnya nilai LPPD berimplikasi pada Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) menjadi rendah, *good governance* tidak berjalan. Bila hal ini terjadi tiga tahun berturut-turut, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), pemerintah akan melakukan Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD).

### 2. Sekretariat DPRD

Permasalahan urusan Sekretariat DPRD, sebagai berikut:

a. Pencapaian target jumlah produk hukum yang dihasilkan/ditetapkan dalam 1 tahun masih sulit dilakukan. Biasanya target yang ditetapkan dalam 1 tahun ditentukan berdasarkan program legislasi daerah yang telah disepakati bersama antara legislatif dan eksekutif. Sulitnya pencapaian target tersebut dikarenakan waktu yang diperlukan untuk membahas dan menuntaskan satu produk hukum sulit diprediksi. Satu produk hukum bisa saja dituntaskan dalam waktu yang sebentar namun bisa juga dituntaskan dalam waktu panjang tergantung perkembangan yang terjadi pada saat pembahasan rancangan produk hukum tersebut. Sebagai contoh, untuk tahun 2019 target jumlah produk hukum yang dibahas adalah 23 produk hukum. Namun sampai dengan semester pertama tahun 2019, jumlah produk hukum yang dibahas masih di bawah 10. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa rancangan peraturan daerah yang pembahasannya cukup panjang hingga memakan waktu beberapa bulan. Sehingga Sekretariat DPRD melakukan penyesuaian target yang semula 23 menjadi 10 target saja. Selain itu, pembahasan rancangan perda yang berasal dari eksekutif baru bisa dibahas setelah rancangan perdanya disampaikan oleh eksekutif kepada legislatif. Bisa saja penyampaian rancangan Peraturan Daerahnya mundur dari jadwal semula. Hal ini juga berpengaruh terhadap pembahasan rancangan Peraturan Daerah tersebut.

## E. Urusan Penunjang Urusan Pemerintah

Permasalahan Urusan Penunjang Pemerintah antara lain:

### 1. Unsur Perencanaan

Permasalahan unsur Perencanaan, sebagai berikut:

a. Belum optimalnya Program/indikator dalam RPJMD dengan Renstra PD. Hal ini disebabkan belum terintegrasinya sistem pembangunan daerah satu data secara elektronik, baik perencanaan data dan informasi, serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Hal ini akan berdampak pada belum optimalnya peningkatan nilai akuntabilitas kinerja provinsi untuk komponen perencanaan kinerja dalam upaya peningkatan keselarasan antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan pada tahun 2018 sebesar 23,27 dan tahun 2019 sebesar 23,50 dari bobot maksimal 30.
b. Belum optimalnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah. Hal ini dilihat dari belum optimalnya hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada komponen capaian kinerja pada tahun 2018 dan tahun 2019 hanya sebesar 12,40 dari bobot maksimal 20.

**2. Unsur Keuangan**

Permasalahan unsur Keuangan, sebagai berikut:

a. Rendahnya rata-rata ratio kemandirian keuangan daerah; capaian rasio kemandirian daerah yang mencapai 46,16% sejak tahun 2014, Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih rendah (> 50%), hanya pada tahun 2018 saja angka kemandirian keuangan diatas 50% yaitu 50,20%. Hal ini disebabkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bergerak fluktuatif, sejak tahun 2014 angka kontribusi menunjukkan kinerja yang naik turun dengan rata-rata capaian 31.57%.Dalam kurun waktu 2014-2019 kontribusi PAD terhadap APBD mencapai performa tertinggi pada tahun 2018 yang mencapai angka 35.97 %, sedangkan capaian terendah pada tahun 2016 yaitu sebesar 27.74%.

**3. Unsur Kepegawaian**

Permasalahan Unsur Kepegawaian, sebagai berikut:

a. Kualifikasi pendidikan ASN masih rendah, hal ini terlihat dari masih adanya ASN yang tidak berpendidikan tinggi sebanyak 26,54 persen di thn 2017, tahun 2018 25,50 persen, Tahun 2019 sebesar 22,86 persen, Tahun 2020 21,64 persen, thn 2021 20,50 persen.
b. Kinerja ASN belum optimal, hal ini terlihat dari masih adanya penilaian sasaran kinerja pegawai masih di bawah nilai 70 serta masih ada ASN yang melanggar disiplin pegawai atau mendapat hukuman disiplin, Pada tahun 2018 pelanggaran disiplin ASN sebesar 75,4 persen, Pada tahun 2019 meningkatsebesar 99,89 persen, Namun pada tahun 2020 turun menjadi 99,44 dan pada tahun 2021 naik menjadi 99,81 persen.

**4. Unsur Pendidikan dan Pelatihan**

Permasalahan Unsur Pendidikan dan Pelatihan, sebagai berikut:

a. Kompetensi ASN masih rendah, hal ini terlihat dari jumlah ASN yang meningkat kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan tahun 2018 terealisasi 59,49 persen dari target 57,5 persen, tahun 2019 terealisasi 34,07 persen dari target 69 persen, tahun 2020 terealisasi 48,86 persen dari target 78,5 persen dan realisasi 2021 sebesar 69,90 persen dari target 74 persen.

**5. Unsur Penelitian dan Pengembangan**

Permasalahan Unsur Penelitian dan Pengembangan, sebagai berikut:

a. Hasil penelitian yang digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan daerah masih rendah. Pada tahun 2018 dan tahun 2019 hasil penelitian yang digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan hanya sebesar 75 %.
b. Hasil inovasi daerah yang dikembangkan masih sangat rendah. Pada tahun 2019 Laporan Indeks Inovasi Daerah untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kurang inovatif dengan skor nilai 280.

**6. Unsur Penghubung**

Permasalahan Unsur Penghubung, sebagai berikut:

a. Belum maksimalnya pelayanan Badan Penghubung, dimana Nilai Kepuasan Pelayanan Badan Penghubung pada tahun 2018 sebesar 82, 34 % dan 2019 sebesar 100 %. Selain itu dilihat dari capaian data dan informasi Nilai Sakip Badan Penghubung Mencapai nilai di tahun 2018 (70) dan 2019 (71,18), walaupun mengalami peningkatan namun masih terbatas pada kepuasan pelaksanaan program dan kegiatan belum sepenuhnya mencerminkan kepuasan hasil dari pelayanan Badan Penghubung.

**F. Unsur Pengawasan Pemerintahan**

Permasalahan Unsur Pengawasan, sebagai berikut:

a. Belum optimalnya Nilai Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan. Tujuan yang akan dicapai adalah nilai materialitas temuan hasil pemeriksaan sebesar <5% dari total APBD tahun anggaran berjalan. Data pada tahun anggaran 2018 menunjukkan nilai materialitas temuan hasil pemeriksaan sebesar 0,86%dan pada tahun anggaran 2019 sebesar 0,06%.
b. Belum optimalnya nilai level capaian maturitas SPIP. Hal ini terlihat dari data tahun 2018 masih level 2+ dan tahun 2019 level3 (dengan catatan).
c. Belum optimalnya Indeks Reformasi Birokrasi Area Penguatan Pengawasan. Hal ini terlihat pada realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Area Penguatan Pengawasantahun 2018 memperoleh Nilai 5,66 dan tahun 2019 mendapatkan Nilai 5,74 dari total Nilai Bobot sebesar 12. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya instrumen pengawasan lainnya seperti benturan kepentingan, dan pengelolaan pengaduan masyarakat. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah upaya pembangunan zona integritas yang lebih intensif di unit-unit kerja guna mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) atau Wilayah Bersih Bebas Melayani (WBBM) dengan berpedoman pada Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019 serta mendorong tumbuhnya inovasi-inovasi yang akan menjawab keluhan mengenai pelayanan publik yang selama ini dirasakan masyarakat.

## 2.1. Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Tahun 2022

Penyelenggaraan pembangunan Provinsi Bangka Belitung terdapat berbagai bidang pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Permasalahan

pembangunan daerah merupakan rumusan umum permasalahan pembangunan yang merupakan hasil evaluasi tahun 2022.

Permasalahan pembangunan adalah masalah utama daerah yang harus diprioritaskan yang terkait dengan isu strategis daerah serta berdasarkan penilaian atau pengukuran hasil dari pengendalian dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pembangunan tahun 2022. Beberapa permasalahan pembangunan daerah tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Prioritas I :Pembangunan Ekonomi

**Rendahnya Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian;**

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Atas Dasar Harga Konstan 2010 pada lapangan usaha PDRB Sub Sektor Pertanian yang terdiri dari Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian dalam periode 2017-2020 cukup fluktuatif. Dimana pada tahun 2017 sebesar 1,17% dan meningkat di tahun 2018 menjadi sebesar 4,15%. Pada tahun 2019 pertumbuhan melambat sebesar 1,40%. Kemudian meningkat kembali di tahun 2020 menjadi sebesar 7,78%. Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian sangat fluktuatif karena masih didominasi oleh sub sektor perkebunan terutama sektor kelapa sawit. Rendahnya pertumbuhan pada sektor ini disebabkan fluktuatifnya harga komoditas perkebunan. Adanya kebijakan pembatasan perluasan lahan perkebunan juga sangat mempengaruhi tingkat produksi perkebunan. Ditambah dengan usia tananam perkebunan yang sudah tidak produktif sehingga dilakukan kebijakan replanting (peremajaan) yang otomatis mempengaruhi tingkat produksi sektor perkebunan.

**Rendahnya Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan;**

Laju pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan periode tahun 2017-2020 cukup fluktuatif, dimana pada tahun 2017 tumbuh negatif sebesar -3,24%. Namun pada tahun berikutnya tumbuh positif sebesar 8,10% (2018) dan melambat di tahun 2019 sebesar 5,76% kemudian meningkat kembali di tahun 2020 sebesar 9,76%. Masih rendahnya kontribusi sub sektor perikanan di dalam perekonomian daerah yang secara rata-rata hanya berkontribusi sebesar 7,43% dan tidak sebanding dengan potensi kelautan yang sangat besar mencapai 80% luas wilayah perairan laut Bangka Belitung. Hal ini dikarenakan potensi laut Bangka Belitung belum terkelola secara optimal. Saat ini sektor perikanan lebih mengandalkan produksi perikanan budidaya dibandingkan dengan produksi perikanan tangkap. Produksi perikanan budidaya tumbuh pesat ditahun 2020 sebesar 14,17% dibandingkan dengan produksi perikanan tangkap yang hanya mengalami pertumbuhan sebesar 2,09% (data Dinas Kelautan 2021).

**Rendahnya Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian;**

Rendahnya PDRB Sub Sektor Pertambangan dan Energi disebabkan oleh beberapa faktor antara lain masih rendahnya nilai tambah sektor pertambangan dan penggalian. Menurunnya laju pertumbuhan PDRB sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 2018 berada di angka -0,95%, sedangkan ditahun sebelumnya berada di angka 2,22% (menurun 1,97 poin). Kenaikan pertumbuhan tidak signifikan ditahun 2019 sebesar 0,91% dan kembali minus di tahun 2020 menjadi sebesar -9,23%. Hal ini berimbas pada menurunnya pertumbuhan sub sektor pertambangan minyak, gas, dan panas bumi dari -1,23% (2017) menjadi -16,58% (2018), kemudian naik 2,61% (2019) dan kembali minus ditahun 2020 menjadi sebesar -23,47%. Penurunan pertumbuhan ini pun terjadi pada sub sektor pertambangan biji logam dari 2,90% (2017) menjadi sebesar -0,11% (2018). Kemudian dari -0,30% (2019) menjadi -10,04%(2020). Rendahnya PDRB sub sektor pertambangan dan penggalian disebabkan menurunnya cadangan deposit khususnya logam timah sekunder, mengingat sampai dengan

saat ini belum ada teknologi yang canggih dan ramah lingkungan yang dapat menjangkau timah primer.

**Rendahnya Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Industri Pengolahan;**

Kontribusi sektor industri pengolahan mengalami penurunan dari 6,15% (2017) menjadi 3,97% (2018) menurun kembali menjadi sebesar 1,20% (2019) dan -5,64% (2020). Rendahnya PDRB sub sektor industri pengolahan ini sebagai dampak dari penurunan kontribusi sub sektor industri logam dasar dari 7,70% (2017) menjadi -0,34% (2018) kemudian menurun kembali menjadi sebesar -0,77% (2019) dan -10,08% (2020). Lebih dari 50% industri pengolahan di Bangka Belitung di dominasi oleh sub sektor industri logam dasar, yang mana sub sektor logam dasar ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan dari sub sektor pertambangan biji logam sebagai sumber bahan baku bagi industri pengolahan.

**Rendahnya Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan;**

Sub sektor perdagangan termasuk dalam klasifikasi sektor tersier. Kinerja sektor perdagangan selama 4 (empat) tahun terakhir, yaitu dari tahun 2017 hingga 2020 semakin menurun. Laju pertumbuhan sub sektor perdagangan tahun 2017 sebesar 7,81% dan tumbuh melambat sebesar 2,64% (2018) dan 1,76 (2019). Pada tahun 2020 mengalami laju pertumbuhan negatif menjadi sebesar -4,62%. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan sub sektor perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya yang tumbuh negatif sebesar -21,52% (2020) dan Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor juga tumbuh negatif sebesar 1,41%. Rendahnya Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan sangat dipengaruhi oleh 3 (tiga) sektor yaitu pertanian, pertambangan, dan industri pengolahan. Kontribusi ketiga sektor ini lebih dari 50% mengingat sub sektor perdagangan merupakan sektor sekunder. Ketika tiga sektor ini melemah maka akan berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat.

**Rendahnya laju pertumbuhan kunjungan wisatawan asing dan domestik**

Bangka Belitung memiliki potensi pariwisata yang sangat menakjubkan sehingga bisa diandalkan sebagai potensi unggulan. Dengan keindahan alam dan pantai berpasir putih yang indah dan tersebar di hampir seluruh daerah, maka sektor ini bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk berkunjung ke Bangka Belitung. Namun berdasarkan data BPS, dalam kurun waktu 2017-2020 tercatat jumlah kunjungan wisatawan mengalami fluktuasi. Pada 2017, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 7.143 wisatawan dan domestik 362.279 wisatawan. Pada tahun 2018 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 8.124 wisatawan dan domestik sebanyak 417.818 wisatawan. Sedangkan pada tahun 2019 wisatawan mancanegara sebanyak 9.183 dan domestik 429.190 wisatawan. Di tahun 2020 wisatawan yang datang ke Bangka Belitung mengalami penurunan signifikan yang disebabkan mewabahnya pandemi Covid-19, yaitu Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 2.476 wisatawan dan domestik sebanyak 221.475 wisatawan. Rendahnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik menyebabkan rendahnya laju pertumbuhan kunjungan wisatawan yang berpengaruh terhadap akomodasi, makan minum dan UMKM yang bergerak di bidang pariwisata sehingga menyebabkan rendahnya kontribusi terhadap PDRB sektor pariwisata. Laju pertumbuhan kunjungan wisatawan tahun 2019 sebesar 2,92%, sedangkan tahun 2020 sebesar – 48,45 %.

**Rendahnya pertumbuhan ekspor**

Dalam perdagangan internasional, Bangka Belitung terkenal dengan lada putih dan timah. Sejak lama, kedua komoditas tersebut telah diperdagangkan secara internasional. Selain komoditas logam timah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga menghasilkan lada, minyak kelapa sawit (CPO), karet, dan hasil perikanan. Pertumbuhan ekspor di Bangka Belitung

mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada Desember 2017 pertumbuhan ekspor Bangka Belitung cukup baik sebesar 58,04%. Namun pada tahun-tahun berikutnya mengalami pertumbuhan minus yaitu sebesar -1,49% (2018), -22,59 (2019), dan -6,03(2020). Rendahnya pertumbuhan ekspor Bangka Belitung disebabkan masih relatif terbatasnya komoditas daerah yang akan diekspor, dimana 80 persen ekspor Bangka Belitung masih berasal dari ekspor logam timah.

**Belum maksimalnya nilai investasi (PMA/PMDN) daerah**

Investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan salah satu komponen dalam pertumbuhan ekonomi. Adanya aktivitas investasi akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu daerah. Berdasarkan statusnya, investasi meliputi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Dalam periode 2017 sampai dengan 2021, nilai PMDN dan PMA di Bangka Belitung terus meningkat dengan Perkembangan nilai investasi dari sebesar 3.781 Milyar (2017) menjadi sebesar 4.330 Milyar (2021) dengan rincian 3.677 Milyar PMDN dan 652 Milyar PMA. Pada tahun 2020 nilai investasi ini meliputi 2.371 proyek untuk PMDN dan 287 proyek untuk PMA, hal ini mengalami penurunan yang disebabkan adanya pandemic covid 19 yang berpengaruh terhadap seluruh sector. Capaian investasi Bangka Belitung meskipun diatas target yang di tetapkan, namun masih di di bawah target nasional yaitu sebesar 4,5 triliun.

**1.** Prioritas II : Pembangunan Lingkungan

**Belum optimalnya pengendalian lingkungan hidup**

Dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2017 sampai dengan 2021 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) cenderung fluktuatif. Nilai IKLH dari tahun 2017 hingga tahun 2019 terus menurun dari 67,85 menjadi 64,85 namun pada tahun 2020 meningkat menjadi 73,50. Tahun 2021 nilai IKLH kembali menurun menjadi 72,05. Indikator Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara yang menurun memberikan andil terhadap penurunan IKLH di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Prioritas III : Pembangunan Sumber Daya Manusia

**Rendahnya pembangunan manusia**

Pegukuran Indeks pembangunan manusia (IPM) suatu daerah menggunakan indikator dampak sebagai komponen dasar penghitungannya yaitu, angka harapan hidup waktu lahir, pencapaian pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, serta pengeluaran konsumsi. Nilai IPM suatu negara atau wilayah menunjukkan seberapa jauh suatu wilayah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup 85 tahun, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali), dan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup layak. Adapun capaian IPM Bangka Belitung Pada periode 2017 sampai dengan 2021 terus mengalami peningkatan, pada 2021 mencapai 71,69, meningkat 0,22 poin atau 0,31 persen dibandingkan capaian tahun sebelumnya, Peningkatan IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Namun peningkatan ini belum signifikan. Jika di bandingkan dengan capaian nasional yang sebesar 72,29, Bangka Belitung masih harus dengan usaha yang keras untuk mengejar ketertinggalan.

3. Priortias IV : Pembangunan Demokrasi

**Menurunnya kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga dalam demokrasi**

Kebebasan Sipil (Civil Liberty), hak hak politik (Political Rights), dan lembaga-lembaga demokrasi (Institution of Democracy) adalah tiga aspek demokrasi yang merupakan aspek pembentukan IDI yaitu indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Pada tahun 2019, kebebasan sipil naik 3,17 poin (dari 80,95 menjadi 84,12), hak-hak politik turun 1,85 poin (dari 73,56 menjadi 71,71), dan lembaga-lembaga demokrasi naik 11,72 poin (dari 63,76 menjadi 75,48). Adapun capaian pada tahun 2020, kebebasan sipil sebesar 79,12, hak hak politik sebesar 66,20 dan Lembaga demokrasi 92,97. Penurunan nilai aspek Kebebasan Sipil menunjukkan indikasi bahwa ancaman atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah maupun oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat serta berpendapat mengalami peningkatan. Pada aspek hak-hak politik mengalami penurunan yang disebabkan partisipasi politik masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan agak menurun. Selain 2 aspek yang mengalami penurunan, aspek lembaga demokrasi mengalami peningkatan nilai didukung oleh kinerja DPRD dan pemerintah daerah yang semakin baik, seperti alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan dalam APBD, jumlah kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN, serta berkurangnya keputusan hakim yang kontroversial. Secara umum, perkembangan demokrasi di Bangka Belitung menunjukkan tren ke arah positif. Nilai IDI Bangka Belitung pada 2017-2020 berfluktuasi pada kisaran angka 70 hingga 80-an. IDI Kepulauan Bangka Belitung pada 2020 mencapai 77,39, naik 0,64 poin dibandingkan tahun 2019. Nilai IDI Bangka Belitung ini sudah di atas rata rata nasional yang sebesar 6,71 dan berada pada peringkat ke-9 secara nasional, namun Status demokrasi Bangka Belitung masih berada pada kategori sedang.

4. Priortias V : Pembangunan Wilayah

**Kurangnya ketersediaan infrastruktur**

Keberadaan infrastruktur pada sebuah negara maupun daerah merupakan hal yang mutlak diperlukan, namun dalam membangun dan mengembangkan infrastruktur pada sebuah daerah tidaklah mudah, ada beberapa masalah yang dapat menghambat. Provinsi Bangka Belitung dalam pengembangan infrastruktur sudah bisa di kategorikan baik, dengan sarana prasarana yang sudah dianggap memadai. Namun untuk pelayanan dasar, pembagunan infrastruktur terkendala pada kewenangan provinsi yaitu hanya sebatas pada wilayah regional atau perbatasan antar kabupaten dan kota maupun antar kabupaten dan kabupaten. Pembangunan dan penyediaan infrastruktur air bersih, sanitasi dan persampahan regional di Bangka Belitung sampai saat ini belum terlaksana. Selain itu, dalam hal penanganan Kawasan kumuh, pembagian kewenangan antara Provinsi dan kabupaten/kota masih belum dilaksanakan secara maksimal sehingga pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh provinsi terkait pemenuhan infrastruktur dasar hanya dilaksanakan pada kawasan kumuh kewenangan provinsi yang memiliki luasan 10-15 ha pada Kawasan Strategis Provinsi (KSP) serta pemenuhan prasana sarana utilitas permukiman.

**Rendahnya kualitas dan pemenuhan rencana tata ruang serta perwujudan tertib tata ruang**

Kualitas dan pemenuhan rencana tata ruang serta perwujudan tertib tata ruang dapat dilihat dari evaluasi terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya penilaian terhadap RTRW Provinsi meliputi beberapa hal yaitu terdapatnya perubahan kebijakan dalam RTRW Provinsi, terdapatnya dinamika pembangunan dan ditemukan adanya simpangan dalam pelaksanaan RTRW Provinsi. Simpangan

pemanfaatan ruang berdasarkan overlay peta eksisting dan Rencana peruntukan ruang antara kawasan lindung dengan kawasan budidaya yaitu jumlah luas rencana kawasan lindung dengan kawasan budidaya seluas 1754,479 Ha sementara berdasarkan kondisi eksisting penggunaan lahan yang dimanfaatkan sebesar 1792,669Ha (sumber: data Kajian Peninjauan Kembali RTRWP Tahun 2018). Adapun data terkait penyelenggaraan pemanfaatan ruang dari awal historis tahun 2018 hingga tahun 2020 yaitu sebesar 60% (0,6) yang dihitung dari persentase realisasi pemanfaatan ruang dibagi dengan rencana pemanfaatan ruang yang ada dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 2014-2034.

**Tingginya resiko bencana**

Berdasarkan hasil pengukuran indeks risiko bencana Indonesia (IRBI) tahun 2020, Bangka Belitung memiliki nilai IRBI 161,54. Nilai ini merupakan kelas resiko multi bahaya yang tinggi bersama 3 (tiga) provinsi lainnya, yaitu Bengkulu, Maluku dan Sulawesi Barat. Menurut data dan informasi bencana Indonesia (DIBI), kejadian bencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2011-2020 ada 77 kejadian, yaitu banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim dan kebakaran hutan dan lahan.

**Belum optimalnya pembangunan kawasan pedesaan**

Optimalisasi pembangunan kawasan pedesaan diarahkan sebagai kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dengan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Hal ini dapat dilihat dari Indeks Desa Membangun yang memotret perkembangan status dan kemandirian Desa. Dari 309 Jumlah desa yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, nilai rata-rata IDM statusnya berkembang. Oleh sabab itu berdasarkan pertimbangan nilai tersebut, kapasitas desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu ditingkatkan statusnya, meskipun saat ini sudah tidak ada lagi desa dengan status Desa Tertinggal. Tahun 2020, status Desa Mandiri sebanyak 11 desa, Desa Maju berjumlah 102 desa, dan Desa Berkembang berjumlah 196 desa. Secara nasional peringkat Indeks Desa Membangun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada di peringkat ke-9. sedangkan di wilayah sumatera berada di pringkat ke-2 dibawah provinsi Sumatera Barat.

**Lambatnya penurunan laju pertumbuhan penduduk**

Kepadatan penduduk menunjukkan penurunan, dari 91 jiwa per $km^2$ pada tahun 2019 menjadi 89 jiwa per $km^2$. Pada tahun 2020 penduduk usia non produktif, usia 0-14 tahun berjumlah 363.044 dan usia 65+ tahun berjumlah 72.643 sedangkan penduduk usia produktif, usia 15-64 tahun berjumlah 1.019.991. Dengan demikian, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memasuki era bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari jumlah penduduk usia tidak bekerja. Agar bonus demografi dapat menjadi keuntungan bagi daerah, maka dibutuhkan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan, pengendalian penduduk, hingga kebijakan ekonomi. Adapun laju pertumbuhan penduduk (LPP) Bangka Belitung dari tahun 2017 – 2020 terus mengalami penurunan yaitu sebesar 2,07% (2017), 2,02% (2018), 1,98% (2019), dan 1,93% pada tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2021, laju pertumbuhan penduduk Bangka Belitung 1,84%. Laju pertumbuhan penduduk ini masih di atas rata-rata nasional yang sebesar 0,98%. Pertumbuhan ini disebabkan selisih antara tingkat kematian dan kelahiran yang cukup tinggi di mana penurunan tingkat kematian lebih cepat dibandingkan dengan tingkat kelahiran. Penduduk usia lanjut dan usia produktif termasuk usia angkatan kerja akan bertambah besar proporsinya. Sementara itu penduduk usia muda (bayi dan anak) jumlahnya meningkat.

**6.** Priortasi VI : Pemerataan Pendapatan Masyarakat

**Lambatnya penurunan kemiskinan**

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah baik pusat maupun daerah. Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Bangka Belitung dari tahun 2019 sampai dengan 2021 megalami fluktuasi. Pada September 2019 penduduk miskin diangka 67.37 ribu orang (4,50%) sedangkan pada periode yang sama tahun 2020 sebanyak 72.50 ribu orang (4,89%). Jumlah penduduk miskin pada September 2021 sebesar 69,70 ribu orang dengan persentase sebesar 4,67%. Tingkat kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung jauh di bawah rata-rata nasional yang sebesar 9,71% dan berada pada peringkat 3 (tiga) terendah setelah Provinsi Kalimantan Selatan dan DKI Jakarta. Namun disisi lain, jumlah penduduk miskin berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tahun 2020 yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari sekitar 40% penduduk dengan status kesejahteraan terendah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif cukup banyak, yaitu berjumlah 264.262 Jiwa (80.623 KK). Tingginya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak berdampak signifikan terhadap pengurangan tingkat kemiskinan di wilayah Bangka Belitung. Kemiskinan disebabkan karena struktur sosial dalam masyarakat, yaitu kurang mampunya memanfaatkan pengelolaan sumber daya alam yang melimpah.

**Rendahnya kesempatan kerja**

Tahun 2020 jumlah penduduk usia kerja di Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 1.104.219 orang. Dari total angkatan kerja sebesar 94,75 persen diantaranya bekerja dan sisanya 5,25 persen merupakan pengangguran. Adapun capaian indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) Bangka Belitung tahun 2017 sebesar 58,83 kemudian meningkat sebesar 63,23 (2018) dan 63,82 (2020). Pada tahun 2021 mengalami penurunan yaitu dengan capaian 47,84. Capaian IPK Bangka Belitung sampai saat ini masih masuk kategori menengah ke bawah yaitu < 65,99. Secara umum permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia, termasuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah tingginya laju angkatan kerja, rendahnya mutu tenaga kerja dan rendahnya laju kesempatan kerja yang tersedia. Tingginya laju angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan laju penciptaan lapangan kerja akan mengakibatkan timbulnya banyak pengangguran dan mutu tenaga kerja yang rendah akan mempersulit penyerapan tenaga kerja yang berdampak pada rendahnya penghasilan.yang akhirnya bermuara pada tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT). Berdasarkan data BPS pusat per Agustus 2021 Bangka Belitung menduduki peringkat 18 (delapan belas) dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,03% dan masih di bawah rata-rata nasional yang sebesar 6,49%.

**7.** Prioritas VII : Pembangunan Pemerintahan

**Rendahnya tata kelola pemerintahan**

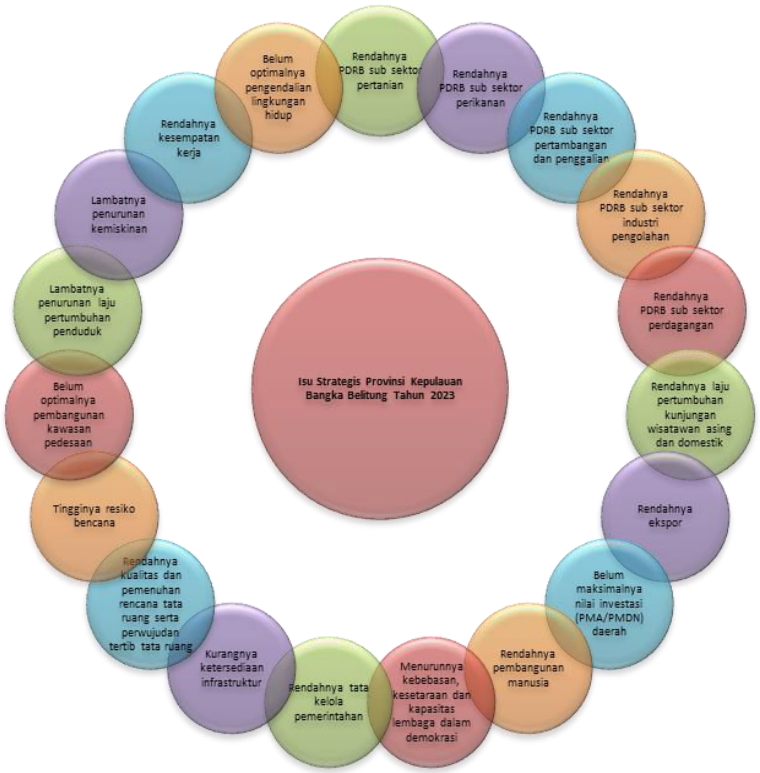
Penatakelolaan pemerintah dilihat dari belum optimalnya capaian indeks reformasi birokrasi dimana pada tahun 2018 capaian yang diperoleh sebesar 65,39 dan tahun 2019 sebesar 66,84, sedangkan capaian pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu dengan capaian sebesar 66,08. Capaian RB tersebut masuk dalam kategori "B" yang bergabung dengan 22 Provinsi lainnya di Indonesia. Capaian sekarang belum merupakan nilai yang terbaik dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan diperlukan 3 (tiga) jenjang lagi untuk mencapai predikan "AA". Hal ini perlu kerjasama dan upaya keras dari seluruh Perangkat Daerah untuk perbaikan dimasa yang akan

datang, serta masih harus diperbaiki terutama sistem pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang saat ini masih dalam bentuk dokumentasi dan penugasan, serta belum diikuti upaya yang nyata untuk dapat mencapai sasaran Reformasi Birokrasi.

## 2.4. Isu Strategis

Evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2022 menjadi dasar bagi perencanaan pembangunan daerah pada Tahun 2024. Dinamika pembangunan dan perekonomian daerah memunculkan berbagai isu dan permasalahan yang masih mengemuka selama pelaksanaan pembangunan Tahun 2022 baik di tingkat nasional maupun regional. Disamping itu berdasarkan highlight substansi dalam RKP 2024 menjadi pedoman untuk dipertimbangkan dalam merumuskan isu strategis rencana pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024. Beberapa isu Strategis Tahun 2024 antara lain:

**Gambar II. 19**
Isu Strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024




*Sumber : RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023*

1. Pertumbuhan ekonomi melambat dan cenderung stagnan

   Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting untuk melihat keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah di samping indikator-indikator lain seperti tingkat pengangguran, angka kemiskinan, laju inflasi, dan lain sebagainya. Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan stabil diharapkan akan memberikan dampak positif baik secara langsung maupun tidak langsung bagi variabel ekonomi lainnya. Dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan, pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai beberapa komponen kebijakan yang bisa digunakan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai.

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi antara lain adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera tahun 2020 terkontraksi sebesar 1,19 persen, turun dibanding tahun 2019 yang tumbuh sebesar 4,55 persen. Total PDRB ADHB Pulau Sumatera pada tahun 2020 mencapai Rp3,37 triliun atau sekitar 21,36 persen dari total PDRB 34 provinsi di Indonesia. Sementara PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya memberikan kontribusi sebesar 2,24 persen terhadap PDRB Pulau Sumatera dan 0,48 persen terhadap total PDRB 34 provinsi di Indonesia. Perekonomian Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp75,53 triliun dan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2020 mencapai Rp52,70 triliun. Sementara itu PDRB per Kapita Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 mencapai Rp49,77 juta, mengalami penurunan dibanding PDRB per Kapita tahun 2019 yang mencapai Rp50,91 juta.

a. Melambatnya pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi

   Perekonomian Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 terkontraksi sebesar 2,30 persen, turun dibandingkan tahun 2019 yang tumbuh sebesar 3,32 persen. Hampir sebagian besar lapangan usaha mengalami kontraksi pertumbuhan, kecuali lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; informasi dan komunikasi serta pertanian, kehutanan dan perikanan yang mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 6,48 persen, 16,22 persen dan 14,42 persen. Dari sisi produksi, sumber pertumbuhan terbesar berasal dari Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu sebesar 1,52 persen.

   Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan ini dipengaruhi oleh kontraksi yang terjadi pada beberapa lapangan usaha yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Struktur perekonomian Kepulauan Bangka Belitung menurut lapangan usaha tahun 2020 didominasi oleh lima lapangan usaha utama yakni Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (20,45 persen); Industri Pengolahan (19,59persen), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan sepeda motor; Konstruksi (10,12 persen) serta Pertambangan dan Penggalian (8,50persen). Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian yang merupakan penyumbang terbesar kelima bagi perekonomian Kepulauan Bangka Belitung mengalami pertumbuhan negatif (terkontraksi). Perlambatan kinerja perekonomian di tahun 2020 juga dipengaruhi oleh Industri Pengolahan yang mengalami perlambatan pertumbuhan. Hal ini merupakan selain dampak dari adanya surat edaran ICDX (Indonesia Commodity and Derivatives Exchange) pada bulan Oktober 2018 yang menolak surat keterangan asal bijih timah yang dikeluarkan oleh Surveyor Indonesia, juga dipengaruhi oleh industri logam timah yang mengalami penurunan produksi sebagai akibat dari pandemi Covid-19 yang melanda dunia secara global, mengakibatkan penurunan permintaan logam timah di pasar dunia serta turunnya harga logam timah yang membuat para produsen logam timah menahan produksinya.

   Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang menjadi sumber pertumbuhan tertinggi Ekonomi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 yakni sebesar 1,52 persen, menunjukkan fenomena bahwa Potensi laut yang kaya, pola konsumsi masyarakat yang gemar mengkonsumsi hasil laut, serta semakin maraknya usaha perikanan budidaya di Kepulauan

Bangka Belitung menjadi pendorong tetap tumbuhnya lapangan usaha Perikanan di tengah pandemi. Produksi komoditas strategis perkebunan Bangka Belitung yakni lada dan kelapa sawit mengalami peningkatan. Pemerintah daerah sedang berupaya untuk mengembalikan kejayaan lada Bangka Belitung agar lebih bersaing di pasar global.

b. Melambatnya pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran

Dari sisi Pengeluaran, Perekonomian Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 secara kumulatif mengalami konstraksi sebesar -1,04 persen. Seluruh komponen pengeluaran mengalami kontraksi kecuali komponen konsumsi LNPRT yang tumbuh sebesar 1,28 persen. Namun demikian Konsumsi LNPRT mengalami penurunan tipis dibanding tahun sebelumnya karena berkurangnya kegiatan lembaga di masa pandemi, tetapi masih didukung dengan adanya pilkada serentak pada bulan Desember 2020. Kinerja Perekonomian dari sisi pengeluaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 ini masih mengalami perlambatan, meskipun mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini didorong komponen ekspor yang menjadi salah satu tumpuan perekonomian Kepulauan Bangka Belitung memiliki kinerja yang kurang baik. Laju pertumbuhan ekspor total Bangka Belitung masih mengalami konstraksi sebesar -0,63 persen. Hal ini dikarenakan berkurangnya permintaan komoditas unggulan Bangka Belitung seperti timah dan lada akibat adanya lockdown pada negara tujuan ekspor. Sementara itu, komponen pengurang PDRB yakni impor barang dan jasa mengalami kontraksi lebih tinggi dibandingkan komponen ekspor yaitu -4,36 persen. Hal ini dikarenakan pada masa pandemi terjadi pengurangan kegiatan produksi, membuat arus masuk barang (barang jadi, bahan baku, modal) dan jasa juga mengalami penurunan.

Struktur ekonomi Kepulauan Bangka Belitung menurut pengeluaran secara kumulatif pada tahun 2020 didominasi oleh komponen pengeluaran rumah tangga dengan kontribusi sebesar 60,83 persen. Komponen ekspor secara total mencakup ekspor luar negeri dan ekspor antar daerah menyumbang porsi sebesar 33,71 persen, namun sumbangan dari komponen pengurang ekspor yakni impor luar negeri dan impor antar daerah mengambil porsi lebih besar pada perekonomian Bangka Belitung sebesar 36,32 persen. Komponen pembentukan modal tetap bruto dan pengeluaran konsumsi pemerintah memberikan sumbangan pada perekonomian dengan kontribusi masing-masing sebesar 26,93 persen dan 13,20 persen.

Sumber pertumbuhan ekonomi utama dipegang oleh komponen LNPRT dengan -0,01 persen. Meskipun laju pertumbuhannya sendiri mengalami perlambatan tetapi porsinya yang besar masih mampu mendukung perekonomian Kepulauan Bangka Belitung. Pertumbuhan komponen ini secara kumulatif didorong oleh oleh adanya pilkada serentak pada bulan Desember 2020 serta Relaksasi ekonomi yang telah berlangsung sejak triwulan III-2020 juga berdampak pada peningkatan kegiatan lembaga yang sempat vakum pada masa pembatasan sosial. Sumber pertumbuhan tertinggi kedua dipegang oleh komponen Konsumsi Rumah Tangga dengan nilai sebesar -0,45 persen, Pandemi menjadi faktor utama penurunan konsumsi masyarakat. Adanya pembatasan sosial selama pandemi mengurangi kegiatan ekonomi masyarakat dan membuat pendapatan berkurang, sehingga penurunan daya beli membuat masyarakat menahan untuk melakukan konsumsi. Namun demikian, bantuan pemerintah dan membaiknya harga komoditas pertanian membuat konsumsi pengeluaran rumah tangga menunjukkan perbaikan dari triwulan sebelumnya. Disamping

itu, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah merupakan sumber pertumbuhan tertinggi selanjutnya dengan sumbangan -3,44 persen.

2. Kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Daya Saing masih rendah

Kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM yang mencerminkan pembangunan manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2018, status pembangunan manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkat dari level "sedang" menjadi "tinggi". Namun masih terdapat 2 (dua) Kabupaten yang capaian IPMnya masih pada level "sedang", yaitu Kabupaten Bangka Barat (69,60) dan Kabupaten Bangka Selatan (67,06). Selama 2010-2021 IPM Provinsi Kepuluan Bangka Belitung rata-rata meningkat sebesar 0,75 persen per tahun, dari 66,02 pada tahun 2010 menjadi 71,69 pada tahun 2021. Pada tahun 2021, IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tumbuh 0,31 persen. Gambaran utama terkait dengan kapasitas dan kualitas SDM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi kesehatan (healty) dan dimensi pengetahuan (Knowledge). Dimensi kesehatan yang mencerminkan umur panjang dan hidup sehat diukur dengan indikator angka harapan hidup saat lahir (AHH). Angka Harapan Hidup menggambarkan aspek kesehatan, yaitu perkiraan lama hidup rata-rata penduduk (dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas). Semakin tinggi capaian indikator AHH maka semakin tinggi kemampuan manusia di suatu wilayah untuk hidup lebih lama. Indikator umur harapan hidup penduduk Kepulauan Bangka Belitung pada saat lahir (Eo) tercatat meningkat dari tahun ke tahun, yaitu dari 69,95 tahun pada tahun 2017 menjadi 70,64 tahun pada tahun 2020 serta pada tahun 2021 sebesar 70,73. Angka sebesar 70,73 tahun ini menggambarkan perkiraan rata-rata usia yang akan dijalani oleh seorang bayi yang dilahirkan hidup di Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2021 hingga akhir hayatnya.

Secara nasional, angka harapan hidup penduduk Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2021 menempati peringkat 15, sementara dalam tingkat regional Sumatera menempati peringkat 3 di bawah Provinsi Riau dan Jambi. Umur harapan hidup masyarakat Kepulauan Bangka Belitung memang menunjukkan peningkatan, namum capaian tersebut masih di bawah angka nasional yang pada tahun 2021 mencapai 71,57 tahun. Secara umum, peningkatan angka harapan hidup penduduk pada saat lahir di suatu wilayah menggambarkan kualitas kesehatan penduduk yang semakin membaik.

Terlebih pada kelompok bayi dan anak berusia di Bawah Lima Tahun (Balita) serta kelompok wanita berusia produktif. Fenomena peningkatan kualitas kesehatan penduduk ini tidak lepas dari upaya pemerintah dalam menjamin dan meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar melalui penyediaan infrastruktur dan sarana kesehatan maupun tenaga kesehatan. Di samping penyediaan infrastruktur dan tenaga kesehatan, upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar dan layanan persalinan secara adil dan merata bagi semua penduduk yang tinggal di wilayah Kepulauan Bangka Belitung juga turut mendorong peningkatan usia harapan hidup penduduk. Faktor lain yang turut berpengaruh terhadap tingginya angka harapan hidup di Kepulauan Bangka Belitung adalah gaya hidup masyarakat yang saat ini semakin peduli dengan kesehatan, terutama kesehatan wanita hamil.

Selama periode 2017-2021, jumlah infrastruktur rumah sakit baik swasta maupun pemerintah mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 hanya ada 10 rumah sakit pemerintah dan 9 rumah sakit swasta di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun pada tahun 2021, sudah ada 12 rumah sakit pemerintah dan satu diantaranya merupakan Rumah Sakit Khusus yang melayani

pasien Covid-19 yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Disamping itu, terdapat 13 rumah sakit swasta dan 3 rumah bersalin di Kepulauan Bangka Belitung. Peningkatan jumlah rumah sakit juga diiringi oleh peningkatan kapasitas tempat tidur dari 1.729 unit di tahun 2017.

Tidak semua penduduk yang mengalami keluhan atau gangguan kesehatan bisa dan mampu mendapatkan pelayanan kesehatan dari rumah sakit, karena ketersediaan sarana yang belum sebanding dengan pertumbuhan penduduk yang mengalami keluhan/gangguan kesehatan. Untuk mengantisipasinya, pemerintah mengembangkan sistem pelayanan kesehatan yang berbasis wilayah kecamatan yang dekat dengan tempat tinggal penduduk serta berbiaya murah dengan sistem berjenjang yang dikenal dengan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Untuk menjangkau daerah sulit dan terpencil, pemerintah mengaktifkan puskesmas pembantu dan puskesmas keliling serta mengaktifkan peran posyandu pada level desa/kelurahan untuk melayani pemeriksaan kesehatan bagi balita, ibu hamil, dan penduduk lansia.

Sampai dengan tahun 2020, di Kepulauan Bangka Belitung terdapat 66 unit puskesmas dan 141 unit puskesmas pembantu. Selain itu, jumlah posyandu sebanyak 1.086 unit, yang artinya di masing-masing kecamatan di Kepulauan Bangka Belitung sudah tersedia Puskesmas serta sarana penunjang kesehatan lainnya sebagai pusat layanan kesehatan bagi masyarakat. Selain fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan juga diperlukan untuk mempermudah jangkauan pelayan kesehatan. Pada tahun 2020, tercatat jumlah tenaga kesehatan yang ada di Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 7.159 orang yang terdiri dari 708 tenaga medis, 3.303 perawat, 1.480 bidan, 651 tenaga farmasi, 219 ahli gizi, 296 tenaga kesehatan masyarakat, 285 teknisi medis dan 151 tenaga sanitasi dan 66 tenaga terapi fisik.

Ketersediaan infrastruktur kesehatan dan tenaga kesehatan yang representatif diyakini menjadi syarat yang diperlukan untuk menjamin kesehatan masyarakat. Namun, hal tersebut belum menjadi syarat kecukupan.Artinya, masih ada aspek yang harus dipenuhi terutama berkaitan dengan daya beli atau kemampuan masyarakat dalam membayar jasa layanan kesehatan yang diaksesnya maupun kemampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan gizi hariannya. Pada tahun 2021, tercatat masih ada 39 bayi yang mengalami gizi buruk dan 1.314 bayi dengan berat badan lahir rendah. Hal ini yang masih akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk segera diatasi agar pembangunan manusia di Kepulauan Bangka Belitung semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Dimensi pengetahuan dalam IPM diukur dengan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata- rata Lama Sekolah (RLS). Indikator tersebut merupakan indikator yang digunakan untuk menggantikan indikator Angka Melek Huruf (AMH) yang dipandang tidak lagi sesuai dengan kondisi sekarang. Harapan lama sekolah dihitung dari jumlah penduduk usia 7 tahun ke atas. Indikator harapan lama sekolah penduduk Kepulauan Bangka Belitung tercatat memiliki pola yang semakin meningkat selama periode 2010-2021. Pada tahun 2021, angka harapan lama sekolah mencapai 12,17 tahun yang menggambarkan angka perkiraan lama tahun sekolah yang akan dijalani oleh penduduk berusia 7 tahun ke atas. Angka ini meningkat 1,69 tahun dibanding tahun 2010 yang sebesar 10,48 tahun.

Sementara, indikator rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas selama periode 2010-2021 meningkat sebesar 1,01 tahun, yaitu dari 7,07 tahun di tahun 2010 menjadi 8,08 tahun di tahun 2021. Angka sebesar 8,08 tahun ini menggambarkan rata-rata

jumlah atau lamanya tahun pendidikan yang telah dijalani oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Angka ini setara dengan pendidikan pada jenjang kelas 8 (delapan) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Secara umum, perkembangan kedua indikator pendidikan tersebut merepresentasikan stok modal manusia (human capital) di Kepulauan Bangka Belitung yang semakin meningkat. Meskipun terjadi peningkatan, namun angka tersebut menunjukkan bahwa program wajib belajar 12 tahun belum berhasil diterapkan di Kepulauan Bangka Belitung, mengingat rata-rata lama sekolah penduduk Kepulauan Bangka Belitung baru mencapai level SLTP.

Pendidikan merupakan sebuah kegiatan investasi yang hasilnya tidak dapat dirasakan atau dinikmati secara instan dalam jangka yang pendek. Output kegiatan pendidikan berupa peningkatan kualitas modal manusia akan dirasakan pada masa mendatang. Pencapaian kedua indikator pendidikan baik harapan lama sekolah maupun rata-rata lama sekolah menggambarkan tolok ukur sejauh mana keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan yang telah dilaksanakan pada masa sekarang dan masa lampau.

Secara nasional, angka harapan lama sekolah penduduk Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2021 berada di peringkat 2 terendah setelah papua, dan dalam tingkat regional Sumatera menempati peringkat terbawah. Sementara angka rata-rata lama sekolah penduduk Kepulauan Bangka Belitung secara nasional berada pada peringkat 11 terbawah, dan dalam tingkat regional Sumatera menempati peringkat terbawah sama dengan Provinsi Lampung. Meskipun capaian indikator pengetahuan Kepulauan Bangka Belitung meningkat dari tahun ke tahun, namun apabila dilihat dari peringkatnya, Kepulauan Bangka Belitung masih tertinggal dari provinsi lainnya.

Rendahnya capaian indikator pengetahuan di Kepulauan Bangka Belitung menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Pola pikir masyarakat yang masih kurang mementingkan pendidikan menjadi salah satu penyebab rendahnya capaian rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah penduduk Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu pemerataan infrastruktur pendidikan, ketersediaan tenaga pendidik, peningkatan alokasi anggaran pendidikan dan juga edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan terutama bagi anak-anak yang masih dalam usia sekolah sangat diperlukan guna meningkatkan capaian indikator ini.

Terkait dengan daya saing, Program kurikulum yang dikembangkan pada jenjang pendidikan menengah belum sepenuhnya menjawab potensi dan kebutuhan pasar kerja. Pada jalur pendidikan dan pelatihan vokasi, peningkatan kualitas layanan belum sepenuhnya didukung dengan sarana dan prasarana pembelajaran dan praktik yang memadai serta berkualitas, kecukupan pendidik produktif berkualitas, kecukupan magang dan praktik kerja, serta keterbatasan kapasitas sertifikasi kompetensi. Selain itu, pembelajaran juga belum mendorong penguasaan soft-skills yang mendukung kebekerjaan, seperti penguasaan literasi.

Prestasi olahraga juga menjadi salah satu indikator daya saing SDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun, budaya dan prestasi olahraga Bangka Belitung masih tertinggal. Hal ini ditandai dengan Indeks Pembangunan olahraga Bangka Belitung masih rendah, yaitu 28,00 point. Peningkatan daya saing olah raga perlu ditempuh melalui pemassalan olahraga untuk mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial, memperbanyak event-event olah raga yang menopang prestasi serta peningkatan sarana prasarana olah raga.

Intervensi berdasarkan kebutuhan yang sesuai dengan tahap kehidupan dan karakteristik individu diperlukan dalam mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Anak, perempuan, dan pemuda merupakan kelompok penduduk yang memiliki kriteria spesifik sehingga dibutuhkan pendekatan yang berbeda demi menjamin kualitas hidup mereka. Pemenuhan hak dan perlindungan anak penting untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Pemberdayaan dan perlindungan perempuan menjadi faktor penting untuk memastikan keterlibatan mereka dalam setiap sektor pembangunan. Sementara itu, pembangunan pemuda memiliki arti penting bagi keberlangsungan suatu bangsa, karena pemuda adalah penerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa dan salah satu penentu optimalisasi bonus demografi.

Pemenuhan hak dan perlindungan anak, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, serta pembangunan pemuda belum berjalan optimal. Sekitar 6,07 persen anak belum memiliki akta kelahiran (BPS 2020). Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Kepulan Bangka Belitung masih tinggi. Tahun 2021 tercatat sebanyak 110 jumlah kasus yang tersebar di tujuh kabupaten/kota. Pelaporan terbanyak di Kota Pangkalpinang dengan jumlah 34 kasus. Ketimpangan gender masih terlihat dari Indeks Pembangunan gender yang mengalami penurunan pada tahun 2020 dibanding tahun sebelumnya, yaitu sebesar 88,92%, sedangkan tahun 2019 sebesar 89,00%. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) didominasi oleh laki-laki (83,68 persen laki-laki dan 46,86 persen perempuan) (BPS, 2021), serta keterwakilan perempuan secara kuantitas dan kualitas di lembaga legislatif masih rendah, yaitu sebesar 6,6%.

Peran dan partisipasi pemuda dalam pembangunan juga belum optimal. Secara nasional, rata-rata lama sekolah pemuda di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati peringkat keenam terendah (9,73 tahun). Bahkan, APK perguruan tinggi merupakan yang terendah (13,20%) dan jauh lebih rendah daripada angka nasional (30,19%). Kondisi tersebut menyebabkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati peringkat kedua terendah setelah Provinsi Papua untuk nilai indeks domain pendidikan. Partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan juga masih rendah (76,40%) dan di bawah angka nasional (81,36%). Begitu pula halnya dengan keaktifan pemuda dalam organisasi dan proporsi pemuda yang memberi saran/pendapat dalam rapat. Nilai kedua indikator tersebut masih berada di bawah angka nasional.

3. Menurunnya Indeks Domokrasi Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 bernilai 77,39 dalam skala indeks 0 sampai 100. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan IDI tahun 2017. Capaian kinerja demokrasi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 berada pada kategori “sedang”, meskipun sebelumnya pada tahun 2017 sempat mencapai kategori “baik”. Capaian IDI dari tahun 2017 hingga 2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017, capaian IDI Kepulauan Bangka Belitung sebesar 80,11. Angka ini terus mengalami perubahan yang berfluktuasi, yaitu tahun 2018 sebesar 72,76, dan tahun 2019 sebesar 76,75. Pada tahun 2020 angka IDI kembali mengalami kenaikan sebesar 0,64 point. Fluktuasi angka IDI adalah cerminan situasi dinamika demokrasi di Indonesia. IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas. Indonesia memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. IDI disusun secara cermat berdasarkan kejadian (evidence-

based) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi. Apalagi tantangan besar terhadap capaian IDI akan terjadi pada tahun 2024, yaitu moment penyelenggaraan Pilkada serentak.

Angka IDI Kepulauan Bangka Belitung 2020 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni aspek Kebebasan Sipil yang bernilai 79,12; aspek Hak-Hak Politik yang bernilai 66,20; dan aspek Lembaga Demokrasi yang bernilai 92,97. Pada periode 2018-2020 Aspek Hak-Hak Politik menunjukkan kecenderungan trend yang semakin menurun. Sementara itu, aspek Kebebasan Sipil cenderung berfluktuasi dan Lembaga Demokrasi menunjukkan kecenderungan trend yang semakin meningkat. Capaian aspek Kebebasan Sipil mengalami penurunan dibandingkan dua tahun sebelumnya.

Dalam tiga aspek demokrasi yang diukur pada tahun 2020, Indeks aspek Lembaga Demokrasi mengalami kenaikan sebesar 5,51 poin. Sedangkan indeks aspek Kebebasan Sipil dan Hak-Hak Politik masing-masing mengalami penurunan sebesar 5 poin dan 5,1 poin. Hampir sama dengan tahun 2019 dimana hanya terdapat satu indeks aspek yang sudah berada pada kategori "baik", namun terjadi perubahan kategori, yaitu indeks aspek kebebasan sipil pada tahun 2019 berada pada kategori "baik", sedangkan pada 2020 berada pada kategori "sedang". Untuk indeks aspek Lembaga Demokrasi pada tahun 2019 berada pada kategori "sedang", sedangkan pada tahun 2020 berada pada kategori "baik". Sementara itu untuk indeks aspek Hak-Hak Politik masih bertahan pada kategori "sedang".

Pada tahun 2020 terdapat enam variabel yang mengalami penurunan indeks dan empat variabel yang mengalami peningkatan. Dari enam variabel yang mengalami penurunan, satu di antaranya menurun cukup tajam. Variabel kebebasan berkumpul dan berserikat menurun paling tajam yaitu sebesar 87,50 poin, dari 100,00 pada 2019 menjadi 12,50 pada 2020. Penurunan terbesar kedua terjadi pada variabel kebebasan berpendapat yang turun 29,60 poin, dari 79,18 pada 2019 menjadi 48,59 pada 2020. Di sisi lain, variabel Peran Peradilan yang Independen meningkat cukup tinggi sebesar 75,00 poin, dari 25,00 pada 2019 menjadi 100,00 pada 2020. Peningkatan nilai indeks ini mengubah posisi variabel Peran Peradilan yang Independen dari kategori "buruk" menjadi kategori "baik". Variabel lain yang juga meningkat adalah Kebebasan Dari Diskriminasi. Variabel ini meningkat sebesar 8,25 poin dari 85,22 pada 2019 menjadi 93,47 pada 2020. Sementara itu terdapat satu variabel yang nilai indeksnya tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, yaitu varibel Pemilu yang Bebas dan Adil dengan nilai indeks sebesar 100,00. Tahun 2024 merupakan tahun yang sarat dengan kepentingan politik, karena pada tahun tersebut Indonesia Akan melaksanakan Pesta Demokrasi Legislatif dan Eksekutif secara serentak di Seluruh daerah. Oleh sebab itu perlunya dukungan Pengalokasian anggaran untuk kegiatan Pemilu dan Kegiatan Cipta Kondisi dalam rangka stabilitas pelaksanaan Pilkada serentak di daerah, sehingga kinerja demokrasi Kepulauan Bangka Belitug dapat mencapai kategori "Baik".

4. Masih Rendahnya Indeks Reformasi Birokrasi

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2020 kembali dapat mempertahankan nilai Indeks Reformasi Birokrasi dengan predikat "B" (66,08), meskipun mengalami penurunan nilai -0,76 dibanding tahun 2019 (66,84). Sedangkan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pertumbuhan nilainya positif. Nilai tersebut meningkat

dibandingkan pencapaian predikat “B” pada tahun 2018 (65,39), namun nilai tersebut masih jauh dari target di akhir tahun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD 2005–2025) yaitu mencapai target nilai 70,00. Fakta ini menggambarkan bahwa masih terdapat kelemahan dan permasalahan terkait dengan upaya percepatan peningkatan predikat yang lebih baik.

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam meningkatkan indeks reformasi birokrasi sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi lebih fokus di tingkat pemerintahan daerah dan belum menyeluruh di setiap perangkat daerah. Selain itu pelaksanaannya belum berfokus pada perubahan yang diharapkan terjadi sebagai akibat dari upaya-upaya pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

b. Agen perubahan masih sebatas melakukan perubahan dalam bentuk proyek perubahan dan belum berperan sebagai agen yang mampu membangun social control di antara rekan kerja dalam upaya penguatan integritas, serta monitoring dan evaluasi atas target kinerja agen perubahan belum optimal;

c. Peta keterkaitan antara kebijakan Pemerintah Provinsi dan Perangkat Daerah belum sepenuhnya disusun;

d. Perlunya mempersiapkan pengalokasian anggaran dan penguatan SDM perencana dalam rangka Penyusunan Ranwal RPJPD 2025-2045

e. Penyetaraan jabatan fungsioanl belum diterapkan sepenuhnya.

f. Peta proses bisnis yang disusun belum sepenuhnya ideal dan belum menunjukkan bentuk penyederhanaan organisasi yang berbasis kinerja.

g. Penerapan E-Government di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum sepenuhnya optimal, seperti belum adanya Grand Design pengembangan SPBE dan beberapa aplikasi belum terintegrasi.

h. Penguatan sistem manajemen SDM belum optimal, yaitu :

   1) Assesment serta tidak lanjut hasil assessment sebagai dasar pengembangan karier individu berbasis komptensi belum dilakukan pada seluruh pegawai.

   2) Penyusunan perencanaan pengembangan kompetensi pegawai atau Human Capital Development (HCDP) belum menyeluruh.

   3) Pemetaan talenta sebagai dasar penempatan jabatan kritikal/ suksesi belum dilakukan.

i. Beberapa Perangkat Daerah ditemukan indikator kinerja tujuan dan sasaran pada proses bisnis yang belum sepenuhnya memenuhi indikator SMART.

j. Pemanfaatan aplikasi monitoring kinerja masih belum berjalan optimal, sehingga informasi kinerja yang dihasilkan masih belum efektif memicu brebagai perbaikan kinerja yang yang diperlukan.

k. Penguatan kebijakan pengawasan internal masih perlu ditingkatkan tidak hanya sebatas pada kebijakan serta sosialiasinya, namun harus pada implemtasinya.

l. Hasil dari survey mandiri terhadap kepuasan masyarakat dalam rangka upaya peningkatan pelayanan public belum sepenuhnya ditindaklanjuti dan dijasikan dasar perbaikan untuk menjawab permasalahan yang ada yang diharapkan oleh pengguna layanan.

5. Disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat masih Tinggi

Pembangunan merupakan suatu proses perbaikan yang berkesinambungan terhadap masyarakat dan sistem sosial ekonomi secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik. Pembangunan adalah upaya multidimensional yang meliputi perubahan pada berbagai aspek termasuk didalamnya struktur sosial, sikap masyarakat, serta intitusional tanpa mengesampingkan tujuan awal yaitu pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan serta perluasan kesempatan kerja dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan pertumbuhan dan distribusi pendapatan yang merata, pertumbuhan yang cepat dan tidak diimbangi dengan pemerataan yang akan menimbulkan ketimpangan wilayah (Regional Disparity). Ketimpangan pembangunan antar daerah dapat terlihat dari adanya daerah yang maju dan daerah yang berkembang bahkan terbelakang. Ketimpangan antar daerah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan pembangunan suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi geografis yang terdapat pada setiap wilayah. Pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terjadi berbagai kendala, baik kendala geografis yang terdiri dari 470 pulau- pulau kecil, maupun potensi sumberdaya alam serta potensi wisata bahari yang belum optimal dimanfaatkan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukungnya. Persebaran penduduk yang tidak merata, serta ketaatan terhadap tata ruang yang masih rendah. Selain itu sumberdaya manusia sebagai tenaga kerja dalam pembangunan juga terkadang menjadi masalah bagi pembangunan itu sendiri dan besaran biaya pembangunan yang dimiliki pemerintah daerah. Untuk mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah Indeks Williamson, sedangkan untuk mengukur ketimpangan pembangunan masyarakat suatu daerah dapat dilihat dari capaian Indeks Gini.

Indeks willamson merupakan pendekatan untuk mengukur derajat ketimpangan antar wilayah berdasarkan PDRB perkapita. Formula ini pada dasarnya sama dengan coefficient of variation (CV) biasa dimana standar deviasi dibagi dengan rataan. Sedangkan Indkes Gini adalah merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Indeks Williamson Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kurun waktu 3 (tiga) tahun ke belakang masih cukup tinggi. Tahun 2017 sebesar 0,193 point meningkat menjadi 0,199 point di tahun 2018 dan 0,200 di tahun 2019. Namun pada tahun 2020 indeks Williamson Bangka Belitung turun menjadi 0,190 point. Capaian ini perlu untuk diperhatikan, mengingat masih belum meratanya ketersediaan infrastruktur, dimana sampai dengan tahun 2020 ketersedian infrastruktur perhubungan baru terpenuhi sebesar 44,12% dan Infrastruktur Pekerjaan Umum sebesar 41,80%. Disamping itu, hal yang perlu diperhatikan adalah masih rendahnya ketaatan tata ruang, terdapatnya beberapa daerah rawan bencana yang belum terkelola dengan baik, belum tercapainya status desa mandiri serta belum meratanya persebaran penduduk di provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sedangkan terkait dengan indeks Gini, meskipun capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung paling rendah secara nasional, yaitu sebesar 0,247 point yang menunjukkan bahwa tingkat

pemerataan distribusi pendapatan di Bangka Belitung sangat baik, namun jumlah penduduk miskin berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tahun 2020 yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari sekitar 40% penduduk dengan status kesejahteraan terendah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif cukup banyak, yaitu berjumlah 264.262 Jiwa (80.623 KK). Disamping itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga masih tinggi diatas rata-rata nasional.

6. Masih rendahnya kualitas lingkungan hidup dan tatakelola sumber daya alam

   a. Degradasi kualitas lingkungan hidup

      Secara umum indeks kualitas tutupan lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2017 – 2020 selalu di bawah rata-rata nasional. Tahun 2020, nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan adalah 39,32 sedangkan nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan Nasional adalah 43,2.

      Kondisi ini disebabkan karena kondisi tutupan lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang semakin menurun. Kegiatan penambangan timah dan konversi lahan hutan menjadi perkebunan monokultur seperti kelapa sawit, lada dan karet oleh masyarakat dan perusahaan adalah salah satu faktor utama menurunnya tutupan dan kualitas lahan. Selain kondisi tutupan lahan yang sudah banyak rusak tersebut, disebutkan bahwa potensi lahan kritis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 20.488 ha atau 1,23% dari total luasan darat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (BPDASHL Baturusa Cerucuk, Tahun 2018).

      Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terhitung dari keseluruhan luas lahan 1.669.419 ha, didapatkan seluas 20.428 ha merupakan lahan kritis, 260 ha berkondisi sangat kritis, seluas 392.437 ha berkondisi agak kritis. Lahan berpotensi kritis seluas 794.718 ha, lahan tidak kritis sebesar 461.576 ha. Luasan terbesar berupa kondisi lahan yang potensial kritis mencapai persentase 47,60 %, kemudian diikuti oleh lahan tidak kritis sebesar 27,65%, lahan agak kritis sebesar 23,51%, lahan kritis 1,22% dan lahan sangat kritis memiliki persentase luasan yang sangat kecil sebesar 0,02%.

   b. Tata Kelola sumber daya alam

      Tiga persoalan besar yang menjadi benang merah terkait dengan tata kelola Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia yaitu Pertama, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi masih bergantung kepada ketersediaan SDA kunci seperti lahan, hutan, tambang, laut, dan energi. Kedua, pertumbuhan industri masih akan terpusat di daerah perkotaan. Polusi industri yang terjadi berkombinasi dengan faktor lingkungan kota seperti sampah dan asap kendaraan. Ketiga, tingginya pertumbuhan ekonomi menciptakan konflik pemanfaatan Sumber Daya Alam, seperti lahan, hutan, laut dan SDA lainnya. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh (Martinuzen, 1997), bahwa hubungan antara perlindungan lingkungan dengan pembangunan ekonomi menunjukkan adanya gap yang cukup lebar. Perhatian yang paling utama adalah bagaimana menciptakan level pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun pada saat bersamaan tidak menyebabkan kerusakan lingkungan. Di sinilah peranan pemerintah diperlukan dalam rangka menciptakan aturan tata kelola SDA yang sesuai.

Konflik antara masyarakat dengan para penambang timah ilegal hampir setiap tahun terus terjadi di Kepulauan Bangka Belitung. Karena kegiatan penambangan ilegal sudah merusak bentang alam, baik di darat maupun di laut yang menyebabkan masyarakat lokal terganggu kehidupannya. Padahal, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah mengatur regulasi terkait tata kelola pemanfaatan sumber daya alam, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang RZWP3K Tahun 2020-2040, yang memuat arah kebijakan lintas sektor dalam pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil, yang meliputi kegiatan perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumberdaya serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Disamping itu, terkait dengan pengelolaan sampah, bahwa tahun 2020 terdapat sebanyak 210.905,58 ton timbulan sampah di Kepulauan Bangka Belitung, akan tetapi yang mampu ditangani oleh Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah hanya sebanyak 104.727,78 ton atau sebesar 49,66% dari timbulan yang ada. Ini mengindikasikan sebesar 40,33% sisanya belum mampu dikelola oleh TPA yang tersedia di semua kabupaten/kota. Pada semua Kabupaten/kota di Kepulauan Bangka Belitung, jumlah sampah yang masuk ke TPA jauh lebih rendah dibandingkan timbulan sampah.

Kota Pangkalpinang merupakan Ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menanggung tekanan jumlah sampah yang besar setiap tahunnya dengan timbulan sampai mencapai 53,63% dari total timbulan sampah di Kepulauan Bangka Belitung. Jika tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan permasalahan yang besar di masa yang akan datang berupa sebaran sampah yang tidak pada tempat semestinya yang telah disiapkan. Dampak terbesar adalah pencemaran lingkungan sekitar oleh keberadaan sampah yang tidak mampu ditangani oleh TPA. Sisa makanan mendominasi konposisi sampah dan cenderung meningkat persentasenya dari tahun ke tahun, diikuti oleh sampah plastik, jenis sampah lainnya dengan persentase cukup besar berupa kertas/karton, diikuti oleh sampah taman, nappies, kain dan Produk tekstil, kayu, gelas dan dengan persentase terkecil berupa logam. Cukup banyak keterdapatan sampah yang tidak mampu diuraikan secara alami (sampah anorganik), akumulasinya dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia terutama jika berupa logam berat. Oleh karena itu diperlukan sistem manajemen pengelolaan sampah yang bersifat terpadu, dengan mengkombinasikan prinsip daur ulang dan pemakaian kembali produk hasil daur ulang sampah berupa produk tertentu.

## 2.5. Capaian Inovasi Daerah

Berdasarkan pasal 386 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Adapun tujuan Inovasi adalah untuk peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan Inovasi yang penilaiannya langsung dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Inovasi Daerah tidak terlepas dari Kekayaan Intelektual di suatu daerah. Kekayaan Intelektual (KI) berupa hak cipta, merek, Indikasi Geografis (IG), pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya

merupakan aset negara dengan potensi sangat tinggi terhadap kemakmuran bangsa, dikarenakan Kekayaan Intelektual memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat yang pada gilirannya dapat menumbuhkan perekonomian daerah. Peranan penting inovasi dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 386 yang menyatakan bahwa ”dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi”. Hal tersebut menggambarkan pentingnya bagi daerah untuk berinovasi terutama kaitannya dalam meningkatkan kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan. Adapun inovasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 dapat diamati pada Tabel 58.

**Tabel.110**

**I**novasi Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022

| No. | Nama Inovasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|
| 1 | Aik Kelekak (Akses, Pendampingan, dan Inovasi Penyuluh Kehutanan dalam Program Pengelolaan Hutan untuk Pemberdayaan Masyarakat Bangka Belitung) | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 2 | Plat BN (Program Layanan Terpadu Bebas Nyeri) | Ruma Sakit Umum Provinsi |
| 3 | Samsat Setempoh | Badan Keuangan Daerah |
| 4 | Kampung Keluarga CIKAR (Cerdas, Inovatif, Kreatif, Aktif dan Responsif) | DP3ACSKB |
| 5 | SISI DUKA (Sistem Informasi Terintegrasi Dunia Kerja) | Dinas Pendidikan |
| 6 | Sikelesen (Sistem Informasi Kendali dan Layanan Kemasan) | UPTD. Rumah Promosi dan Kemasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 7 | Peta Dora untuk Si Anil | Dinas Kesehatan |
| 8 | Si-Dulang Babel | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 9 | TIWI Gadis Baper (Terapi Wicara Gratis Dinsospmd Membawa Perubahan) | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Desa |
| 10 | Si Dulang Babel | Dinas KUKM |
| 11 | Si Duma Babel | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa |
| 12 | Sistem Daring Kamikawa | Bappeda |

Berdasarkan tema RKP tahun 2024 yaitu Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan yang diselaraskan dengan tema pembangunan RKPD tahun 2024 yaitu Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Melalui Pengembangan SDM dan Stabilitas Demokrasi dengan fokus pembangunan ekonomi dan lingkungan, inovasi unggulan telah dicanangkan dengan fokus pada pembangunan ekonomi dan lingkungan untuk mengatasi permasalahan pembangunan terutama yang terkait dengan pengurangan pengangguran, penurunan tingkat kemiskinan ekstrim, dan pengurangan ketimpangan pendapatan dan wilayah, melalui program-program yang bersifat memberdayakan masyarakat sekaligus mengatasi permasalahan lingkungan, meningkatkan

kompetensi SDM, dan meningkatkan daya saing produk melalui Inovasi AIK KELEKAK, SISI DUKA, dan SI KELESAN.

Disamping itu, inovasi perangkat daerah diciptakan dalam rangka implementasi program-program unggulan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026, fokus pada pengembangan kewilayahan guna menciptakan daya saing daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Unggulan pembangunan daerah tersebut ada 7 (tujuh) yaitu:

1. Pembangunan Ekonomi
2. Pembangunan Sumber Daya Manusia
3. Pembangunan Pemerintah
4. Pembangunan Wilayah
5. Pemerataan Pendapatan Masyarakat
6. Pembangunan Lingkungan

### 2.5.1. Inovasi terkait Program Unggulan Pembangunan Daerah

**A. Aik Kelekak**

Inovasi AIK KELEKAK (Akses, Pendampingan, dan Inovasi Penyuluh Kehutanan dalam Program Pengelolaan Hutan untuk Pemberdayaan Masyarakat Bangka Belitung) adalah inovasi yang efektif dalam memberdayakan masyarakat khususnya masyarakat di sekitar hutan produksi dan hutan lindung. Perannya menjadi penting dalam penyelenggaraan penyuluhan kehutanan karena melibatkan integrasi, koordinasi, dan sinkronisasi antara seluruh sistem dalam menyukseskan program-program pemerintah untuk memberdayakan masyarakat sekitar hutan dengan tujuan ekowisata: mengkonservasi lingkungan, melestarikan kehidupan, dan kesejahteraan penduduk setempat. Kehadiran AIK KELEKAK telah mengaktualisasikan integrasi Program Pengelolaan Hutan; Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan; dan Program Pemberdayaan UMKM yang memberikan benefit ekonomi bagi kelompok-kelompok tani hutan (KTH) dan masyarakat disekitarnya karena telah meningkatkan kapasitas SDM kelompok serta membuka keran pengembangan usaha kecil dan menengah melalui diversifikasi produk dan jasa lingkungan yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lowongan pekerjaan, dan hutan yang lestari sesuai dengan tujuan ekowisata. Para penyuluh mempunyai banyak peran dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memberdayakan hutan, sebagai pembimbing kelompok tani hutan, organisator dan dinamisator, pelatih teknisi dan jembatan penghubung antara KTH dan instansi penelitian dan perguruan tinggi di bidang kehutanan. Hal tersebut menghasilkan KTH yang menjadi lebih berdaya, mampu, mandiri, dan tangguh sesuai dengan modal sosial, ekonomi dan lingkungan yang dimiliki masyarakat yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan.

**B. Sisi Duka**

Inovasi SISI DUKA (Sistem Informasi Terintegrasi Dunia Kerja Dengan Alumni SMK diProvinsi Kepulauan Bangka Belitung) telah memberi peluang kerja kepada lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk terhubung ke dunia industri yang menjawab permasalahan bahwa, berdasarkan rilis BPS, lulusan SMK adalah penyumbang paling tinggi angka pengangguran.

Penyebab utamanya adalah terbatasnya akses kerja yang sesuai keahlian dan kompetensi para lulusan SMK. Oleh karena itu, melalui aplikasi SISI DUKA telah memfasilitasi siswa lulusan SMK agar mendapatkan peluang pekerjaan. Aplikasi SISI DUKA membuka profil lulusan siswa yang memuat capaian prestasi baik akademik dan non akademik, pengalaman pembelajaran praktik di industri maupun magang, dan penghargaan di luar akademik. Inovasi tersebut telah memberi ruang kepada dunia usaha dan industri untuk terhubung dengan sekolah-sekolah SMK untuk merekrut lulusan-lulusan SMK yang sesuai dengan kompetensi dan keahliannya. Dalam implementasinya, inovasi tersebut dintegrasikan dengan Balai Pelatihan Tenga Kerja untuk sertifikasi lulusan SMK sebagai pencari kerja yang siap dan sesuai dengan bidang keahlian yang dikuasai. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah telah tersedianya sarana dan prasarana pendidikan untuk mendukung kompetensi lulusan SMK yang berbasis kewirausahaan dan kearifan lokal dengan jumlah pembiayaan yang besar untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia Kepulauan Bangka Belitung yang unggul melalui integrasi program pendidikan, kepariwisataan, dan ketenagakerjaan.

**C. Si Kelesan**

Dalam rangka meningkatkan daya saing produk, SI KELESAN (Sistem Informasi Kendali dan Layanan Kemasan) hadir untuk memudahkan para pelaku usaha IKM yang ada di seluruh Kepulauan Bangka Belitung, baik di Pulau Bangka maupun Pulau Belitung, dapat memesan kemasan tanpa harus datang ke UPTD Rumah Promosi dan Kemasan Provins Kepulauan Bangka Belitung sehingga tidak memerlukan banyak waktu dan menekan biaya produksi. Malalui inovasi tersebut, retribusi Rumah Promosi dan Kemasan menjadi *cashless retribution* yang mana pesanan, laporan perkembangan, maupun persediaan bahan baku akan termonitor dengan baik oleh sistem. Benefit ekonomi inovasi SI KELESAN adalah IKM menghasilkan produk kemasan yang berkualitas yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan daya saing produk di pasar lokal, nasional, dan global.

### 2.5.2. Inovasi Tata Kelola Pemerintah Daerah

**A. Sistem Daring Kamikawa**

Sistem Daring Kamikawa bertujuan untuk merumuskan *evidence-based-palnning* sebagai langkah yang diambil oleh para pengambil kebijakan guna pengembangan pembangunan daerah yang tepat sasaran dan berkualitas. Sistem tersebut mengintegrasi komunikasi ilmiah bagi perencana, analis kebijakan, dan peneliti untuk menghasilkan *evidence-based-policy* yang dapat di implementasikan oleh Pemerintah Daerah. Sistem membahas permasalahan program-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, antara lain membahas inovasi pengembangan aplikasi QR Code berbasis smartphone dalam pendataan pengunjung pada kawasan Geopark Open Pit Nam Salu, menilai perkembangan desa dan pengaruh dana desa terhadap Indeks Desa Membangun, dan mengevaluasi keberdayaan daerah melalui hubungan indeks pembangunan manusia dan produktivitas sumber daya. Data tersebut menjadi dasar dalam menganalisis isu-isu strategis yang selanjutnya diwujudkan dalam program-kegiatan termuat di dalam dokumen perencanaan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### 2.5.3. Inovasi Pelayanan Publik

**A. Samsat Setempoh**

Samsat Setempoh merupakan layanan inovatif Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang akan membayar pajak kendaraan pada wilayah terpencil di pedesaan, bertujuan untuk mewujudkan pelayanan terhadap masyarakat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dan meningkatkan pendapatan asli daerah, serta untuk meningkatkan kesadaraan masyarakat dalam membayar pajak. Terobosan ini diharapkan dapat menjangkau daerah yang tidak dapat terlayani oleh layanan Samsat Induk maupun Samsat Keliling. Samsat Setempoh bertujuan untuk meningkatkan pemerataan pendapatan dan merupakan unggulan pembangunan daerah dalam peningkatan pendapatan pemerintah dengan sasaran meningkatnya pendapatan pemerintah daerah melalui strategi meningkatkan pendapatan asli daerah.

**B. Si Dulang Babel**

Si Dulang Babel (Sistem Informasi Data Tunggal UMKM) adalah sistem pendataan data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang valid dan akuran, memuat lokasi, sektor usaha dan skala usahanya se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pendataan UMKM *by name by address* berbasis Kecamatan ini melibatkan Institute Sains and Business (ISB) Atma Luhur untuk pembuatan aplikasi yang berbasis web. Dalam implementasinya, kegiatan pendataan telah melibatkan pihak desa dan kelurahan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) wilayah dan 47 (empat puluh tujuh) kecamatan. Pada tahun 2022, dilakukan *upgrading* tampilan dan peningkatan *securitas system* untuk mengatasi permasalahan kehilangan inputan data yang dialami oleh operator di kecamatan dan desa.

**C. Si Duma Babel**

SI DUMA (Sistem Informasi Terpadu Dasawisma) bertujuan untuk mewujudkan Administrasi Dasawisma yang tertib dan akuntabel serta mempermudah Kader Dasawisma dalam melakukan pencatatan dan pelaporan data dasawisma sebagai data dasar dalam pelaksanaan kegiatan 10 Program Pokok PKK yang berorientasi kepada program-program strategis pemerintah daerah dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan kondisi riil khususnya masalah kesehatan dan kesejahteraan. SI DUMA mempermudah Kader Dasawisma dalam menyusun basis data pelaksanaan 10 Program Pokok PKK untuk semua tingkatan mulai dari Tim Penggerak (TP) PKK desa/kelurahan, TP. PKK Kecamatan, TP. PKK Kabupaten/Kota, TP. PKK Provinsi sampai dengan TP. PKK Pusat sehingga akan dapat meningkatkan capaian kinerja organisasi dalam memberdayakan masyarakat dan mendukung pelaksanaan program-program strategis pemerintah sebagai mitra pemerintah. Inovasi tersebut telah meningkatkan kapasitas kader dasawisma dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, menciptakan proses pencatatan dan pelaporan yang lebih efektif dan efisien, dan tersedianya data warga dan keluarga yang valid dan *up to date*.

### 2.5.4. Inovasi Daerah lainnya sesuai Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Daerah

**A. Tiwi Gadis Baper**

Tiwi Gadis Baper (Terapi Wicara Gratis Dinas Sosial Membawa Perubahan) merupakan inovasi yang digagas Dinas Sosial karena satu-satunya layanan terapi wicara gratis di Bangka Belitung. Inovasi ini muncul untuk meringankan beban masyarakat terutama orangtua yang memiliki anak disabilitas agar bisa mendapatkan fasilitas latihan khusus yang sebelumnya tidak tersedia. Selain anak mereka bisa mendapatkan terapi wicara gratis, para orang tua juga mendapat informasi berguna untuk menambah wawasan tentang program pengembangan anak berkebutuhan khusus. Tiwi Gadis Baper bertujuan meningkatkan pendidikan masyarakat dan merupakan unggulan pembangunan daerah dalam pembangunan pendidikan dengan sasaran meningkatkan kesejahteraan sosial melalui strategi peningkatan rehabilitasi, jaminan dan perlindungan sosial.

**B. Plat BN**

Plat BN (Program Layanan Terpadu Bebas Nyeri) merupakan Program Layanan Terpadu Bebas Nyeri (PLAT BN) adalah program inovasi pertama di Indonesia untuk pelayanan nyeri secara terintegrasi. Aspek kebaruan dari program terpadu ini meliputi empat aspek yaitu: 1) Terpadu Sumber Daya Manusia (SDM); 2) Terpadu jenis layanan; 3) Terpadu rujukan berjenjang; dan 4) Terpadu aspek dimensi kesehatan. Penamaan PLAT BN terinspirasi dari keseharian di kehidupan masyarakat berupa kode plat nomor kendaraan bermotor yang mudah diingat dan sering dilihat. Plat BN bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan merupakan unggulan pembangunan daerah dalam pembangunan kesehatan dengan sasaran meningkatnya kesehatan masyarakat melalui strategi meningkatkan kualitas kesehatan

**C. Kampung KB Cikar**

Kampung KB Cikar merupakan Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya mengatasi permasalahan sosial di provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti angka perkawinan anak yang tinggi, kasus stunting serta kekerasan pada perempuan dan anak di beberapa wilayah yang cukup tinggi dan mensinergikan seluruh program pembangunan baik dari pusat maupun daerah dalam satu wadah program dengan tujuan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Kampung KB Cikar bertujuan meningkatkan pembangunan sosial masyarakat dan merupakan unggulan pembangunan daerah dalam pembangunan pendidikan dengan sasaran mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui strategi pengendalian tingkat kelahiran penduduk dan perpindahan penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang.

**D. Peta Dora untuk Si Anil**

Peta Dora untuk Si Anil dicetuskan sebagai inovasi pemetaan pendonor darah dikarenakan masih tingginya jumlah kematian ibu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan salah satu penyebabnya adalah perdarahan. Tujuannya adalah untuk menjamin ketersediaan darah yang aman bagi ibu melahirkan. Selain itu, inovasi ini melibatkan kader, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemuka masyarakat lainnya agar berperan aktif mengajak ibu hamil rajin memeriksakan kehamilannya ke petugas kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di wilayah tempat tinggal mereka.

## 2.6. Capaian Sustainable Development Goals (SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan sebuah konsep pembangunan dengan mempertimbangkan berbagai macam aspek, potensi dan

karakteristik yang ada pada suatu daerah. SDGs memuat tujuan dan sasaran global pembangunan berkelanjutan tahun 2016 sampai tahun 2030 dan merupakan penyempurnaan dari Millennium Development Goals (MDGs)/Tujuan Pembangunan Milenium (TPM). Dengan mengusung tema "Mengubah Dunia Kita : Agenda Tahun 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan", SDGs memiliki 17 Tujuan dan 169 Target rencana aksi global yang berlaku bagi seluruh Negara (universal), sehingga seluruh Negara tanpa terkecuali tingkat kemajuan Negara memiliki kewajiban moral untuk mencapai Tujuan dan Target SDGs, yaitu :

1) Tanpa Kemiskinan

Secara keseluruhan untuk tujuan I tanpa kemiskinan dengan indikator Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan Nasional, capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cukup baik. Apabila mengacu pada target angka kemiskinan pada tahun 2022 yang sebesar 5,0 % pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026, masih diperlukan upaya pemerintah daerah dan stakeholders untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bebas dari kemiskinan, khususnya penduduk miskin ekstreem yang harus tuntas pada tahun 2024.

2) Tanpa Kelaparan

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan diprovinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih tinggi disbanding nasional. Pada tahun 2021, prevalensi ketidakcukupan pangan(PoU) di Provsinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkat menjadi 11,05. Artinya terdaat 11 orang dari 100 orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan energi untuk hidup normal, aktif dan sehat. Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat di Provinsi Kepulauan Bangak Belitung semakin meningkat. Pada tahun 2021 angkanya mencapai 3,81 persen.

3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga Kesehatan terlatih di provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung stabil, dari 99,67 persen pada tahun 2020 menjadi 99,37 persen pada tahun 2021. Sedangkan Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan di provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung tetap, dari 95,66 persen pada tahun 2020 menjadi 95,37 persen pada tahun 2021.

4) Pendidikan Berkualitas

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dikenal beberapa indikator untuk mengetahuinya, antara lain Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Melek Aksara, proporsi remaja dan dewasa yang menguasai keterampilan TIK, proporsi tenaga pendidikan bersertifikat kompetensi, dan lain sebagainya. Secara keseluruhan capaian terkait dengan indikator tersebut terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan.

5) Kesetaraan Gender

Selama periode 2019-2021, terjadi kecenderungan penurunan persentase perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau hidup bersama sebelum umur 18 tahun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal yang sama, secara nasional juga mengalami penurunan. Capaian persentase di Bangka Belitung lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Hingga tahun 2021, persentase perempuan umur 20-24 tahun yang. berstatus kawin atau hidup bersama sebelum umur 18 tahun mencapai 14,05 persen. Artinya, terdapat sekitar 14 dari setiap 100 orang perempuan berumur 20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan sebelum umur 18 tahun. Pada tahun 2021, proporsi perempuan yang berada di posisi managerial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 29,39 persen. Jika dibandingkan dengan nasional, proporsi perempuan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung lebih rendah yang berada di posisi managerial.

6) Air Bersih dan Sanitasi Layak

Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum yang layak menunjukkan penurunan selama tahun 2019-2021. Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum yang layak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 sebesar 73,45 persen turun menjadi 73,40 persen pada tahun 2021. Akan tetapi secara agregat, hasil survei memperlihatkan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih lebih rendah dibandingkan rata-rata di Indonesia. Peningkatan capaian yang belum konsisten ini menandakan pemerintah dan masyarakat harus lebih fokus lagi agar target SDGs untuk memberikan kemudahan bagi seluruh penduduk dan menjamin akses perumahan dengan pelayanan dasar yang layak pada tahun 2030 bisa tercapai. Selama tahun 2019-2021 persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak di Bangka Belitung tercatat sebesar 90,32 persen terus meningkat menjadi 92,24 persen di tahun 2021. Menariknya, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih tinggi dibandingkan rata-rata di Indonesia. Dengan peningkatan yang konsisten tiap tahun, target SDGs untuk memberikan akses sanitasi dan kesehatan yang mudah dan merata bagi seluruh penduduk pada tahun 2030 optimis akan tercapai.

7) Energi Bersih dan Terjangkau

Rasio elektrifikasi adalah perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga berlistrik baik dari listrik PLN maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga total. Selama periode tahun 2017-2020, rasio elektrifikasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus mengalami penurunan di mana pada tahun 2017 sebesar 106,35 persen turun menjadi 99 persen pada 2020. Tinggi rendahnya rasio elektrifikasi dapat dijadikan indikator awal untuk mengukur bagaimana tingkat pemenuhan kebutuhan listrik suatu wilayah untuk mewujudkan distribusi energi yang adil dan merata. Rasio penggunaan gas rumah tangga merupakan indikator yang berguna untuk melihat proporsi rumah tangga yang telah memanfaatkan gas sebagai bahan bakar untuk memasak dibanding total rumah tangga secara keseluruhan. Rasio penggunaan gas rumah tangga baik di Provinsi Kepulauan Bangka belitung maupun secara nasional selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2021, rasio penggunaan gas rumah tangga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

meningkat sebesar 0,36 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dan dalam periode dua tahun meningkat sebesar 6,55 persen.

8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan PDRB/PDB per kapita mengukur perubahan standar kehidupan rata-rata penduduk. PDB per kapita diperoleh dengan cara membagi PDB atas harga dasar konstan dengan jumlah penduduk. Pada tahun 2021, laju pertumbuhan PDRB/PDB per kapita baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun secara nasional menunjukan tren peningkatan, setelah mengalami penurunan di tahun 2020 akibat adanya pandemi Covid-19. Capaian laju pertumbuhan PDRB per kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di atas rata-rata Indonesia. Pertumbuhan PDRB per kapita tahun 2021 sebesar 3,52 persen, sedangkan PDB per kapita nasional sebesar 2,51 persen. Sektor pertanian merupakan sektor/lapangan pekerjaan yang banyak menyerap tenaga kerja, khususnya di daerah perdesaan. Sebagian besar pekerja dari sektor pertanian merupakan pekerja informal. Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun nasional cenderung fluktuatif. Bila dibandingkan dengan total tenaga kerja, pekerja informal sektor pertanian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2020 hanya sebesar 74,10 persen atau mengalami peningkatan dari tahun 2019 yaitu sebesar 71,75 persen, namun kemudian kembali menurun pada tahun 2021 yakni menjadi 69,98 persen. Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun secara nasional mengalami penurunan pada tahun 2021. TPT di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurun dari 5,25 persen di tahun 2020 menjadi 5,03 persen pada tahun 2021. Begitu juga secara nasional mengalami penurunan yakni sebesar 0,58 poin menjadi 6,49 persen pada tahun 2021. Ini merupakan dampak dari banyaknya pekerja yang dirumahkan bahkan di PHK akibat pandemi Covid-19. Menariknya, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki capaian TPT yang lebih rendah dibandingkan nasional.

9) Industri, Inovasi dan Infrasruktur

Kontribusi sektor industri manufaktur terhadap PDB di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif stabil selama 2019-2021. Pada tahun 2019, proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur Bangka Belitung sebesar 22,11 persen turun 0,75 poin dari tahun 2020. Namun, pada tahun 2021 meningkat 21,44 persen mengalami peningkatan yang tidak terlalu besar sebesar 0,08 poin dari tahun sebelumnya. Output dari sektor industri manufaktur ini belum mampu berkontribusi secara maksimal dalam mendukung perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sehingga inovasi perlu ditingkatkan untuk mendukung tercapainya industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan. Tingkat akses masyarakat terhadap komunikasi dan informasi melalui jaringan bergerak (mobile) Fixed Wireless Access dan seluler dapat diketahui dengan indikator proporsi individu yang menggunakan telepon genggam/telepon seluler, termasuk smartphone. Secara umum penduduk yang menguasai telepon seluler (HP)/nirkabel di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan peningkatan dari tahun 2019-2021. Pada tahun 2021, meningkat dari 66,61 tahun 2020 menjadi 68,22 persen. Menariknya, proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih tinggi

dibandingkan rata-rata nasional. Internet menjadi alat yang penting bagi publik untuk mengakses informasi, yang juga relevan dengan keterbukaan fundamental terhadap informal. Selain itu, internet juga dapat menjadi indikator untuk mengukur pembangunan masyarakat bidang informasi dan pertumbuhan isi internet. Pengguna internet disini termasuk dalam mengakses media sosial seperti facebook, twitter, BBM, whatsapp, dan lain-lain. Baik di tingkat nasional maupun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, proporsi individu yang menggunakan internet mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, proporsi individu yang menggunakan internet di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 60,94 persen atau naik 9,16 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

10) Berkurangnya Kesenjangan

Selama periode 2018-2021, nilai koefisien gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan penurunan, yang berarti ada kecenderungan penurunan ketimpangan pendapatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara menyeluruh. Nilai koefisien gini pada tahun 2021 sebesar 0,256, menurun 0,025 poin dibandingkan koefisien gini pada tahun 2018 sebesar 0,281. Koefisien gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini merupakan yang terendah di Indonesia, dan dapat diartikan bahwa pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung cenderung lebih merata dibandingkan wilayah lain di Indonesia.

11) Kota dan Permukiman Berkelanjutan

Salah satu indikator ketercapaian dalam tujuan 11 adalah terciptanya permukiman yang berkelanjutan dengan hunian yang aman, layak dan terjangkau. Akses terhadap hunian layak dan terjangkau merupakan hak dan kebutuhan dasar bagi setiap penduduk. Mulai tahun 2019, terjadi perubahan konsep dan definisi perhitungan pada komponen pembangunannya, yaitu air minum layak dan sanitasi layak. Dengan konsep dan definisi baru, ada 27,60 persen rumah tangga telah miliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau di tahun 2021 atau turun 3,04 poin persen dari tahun 2020. Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau selama tahun 2019-2021 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami fluktuatif.

12) Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan

Konsep indikator global untuk target ini adalah melakukan kuantifikasi dan pemantauan atas perkembangan siklus kebijakan yang dibuat oleh negara-negara dalam menyusun instrumen kebijakan yang mengikat dan tidak mengikat, untuk mendukung perubahan menuju ke produksi dan konsumsi berkelanjutan. Secara umum indikator tujuan SDGs ini secara umum capaian telah memenuhi target.

13) Penanganan Perubahan Iklim.

Upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca adalah pelaksanaan rencana kerja dari berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi Gas Rumah Kaca sesuai dengan target pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Penyelenggaraan inventarisasi Gas Rumah Kaca, serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 dilaporkan dalam dokumen Pelaksanaan Kegiatan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2022 dan Dokumen Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2021. Kedua dokumen tersebut yang menjadi indikator pengukuran capaian tujuan SDGs telah dibuat dengan baik.

14) Ekosistem Lautan

Berdasarkan matriks capaian indikator untuk tujuan ekosistem laut melalui status diketahui ada yang perlu mendapat perhatian dan data dukung tidak tersedia, yaitu terkait dengan proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman. Sementara itu, indikator lainnya telah tercapai bahkan melebihi target seperti persentase kepatuhan pelaku usaha.

15) Ekosistem Daratan

Target tujuan SDGs yang perlu mendapat perhatian yaitu dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global sebesar 3.332 Ha. Dengan indikator luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya pada tahun 2021 sebesar 0 Ha.

16) Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh

Setiap warga negara berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun secara nasional mengalami peningkatan. Warga yang merasa aman berjalan sendirian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkat dari 47,8 persen (2017) menjadi 65,91 persen (2020). Walaupun demikian, tetap diperlukan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarkat secara menyeluruh. Setiap kelahiran, warga negara Indonesia wajib melaporkannya dan dibuktikan dengan kepemilikan kutipan Akta Kelahiran. Selama tahun 2019-2021, persentase anak umur 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan yaitu dari 86,25 persen pada tahun 2019 menjadi 88,69 persen pada 2021. Kepemilikan akta kelahiran ini berkaitan dengan terjaminnya pengakuan anak di hadapan hukum. Perlindungan anak akan lebih terjamin dengan adanya akta lahir, termasuk juga anak pada kalangan ke bawah. Secara umum, selama tahun 2019-2021, persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun secara nasional menunjukkan adanya peningkatan. Pada tahun 2021, persentase anak berumur 0-17 tahun dengan pendapatan 40 persen bawah yang memiliki akta kelahiran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sedikit mengalami peningkatan yakni sebesar 1,70 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan akses kelompok masyarakat berpendapatan rendah terhadap kepemilikan akta kelahiran dan berpengaruh pada optimisme dalam mencapai target pemberian identitas yang sah bagi semua. Akta kelahiran dapat menjamin kemudahan anak ketika akan memasuki dunia kerja dan usia pernikahan. Secara umum, persentase anak berumur 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun secara nasional mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2021, capaian persentase yang memiliki akta kelahiran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 96,05 persen meningkat 1,45 poin dari tahun 2019 yakni sebesar 94,60 persen. Capaian persentase anak yang memiliki

akta kelahiran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih tinggi jika dibandingkan dengan dengan rata-rata nasional.

17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Proporsi individu yang menggunakan internet di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia menunjukkan tren yang sama dari tahun ke tahun. Selama tahun 2019-2021, proporsi individu yang menggunakan internet di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus mengalami peningkatan hingga mencapai 60,94 persen pada tahun 2021. Peningkatan ini menunjukkan peran internet sebagai media informasi seiring dengan adanya pembangunan teknologi informasi dan perkembangan masyarakat digital.

# BAB III
# KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

## 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 mengacu pada dokumen rencana pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026, Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Rencana Tata Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 – 2034. Pada tahun 2024 yang akan datang, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah masih dihadapkan pada tantangan dan upaya untuk melakukan percepatan pemulihan kondisi ekonomi dan sosial terhadap dampak pandemi Covid-19. Untuk kedepan, pemerintah akan tetap memprioritaskan kebijakan belanja bidang kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin atau kurang mampu dalam rangka mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem serta penanganan dampak ekonomi terutama menjaga dunia usaha agar tetap tumbuh.

Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menentukan tema RKPD Tahun 2024 yang telah dirumuskan yaitu “Penguatan Ekonomi Berkelanjutan melalui Pengembangan SDM Dan Stabilitas Demokrasi”. Arah kebijakan pembangunan dalam RKPD 2024 memiliki Prioritas pembangunan utama akan difokuskan pada beberapa sektor, yaitu:

1. Pembangunan Ekonomi
2. Pembangunan Lingkungan
3. Pembangunan Sumber Daya Manusia
4. Pembangunan Demokrasi
5. Pembangunan Wilayah
6. Pemerataan Pendapatan Masyarakat
7. Pembangunan Pemerintahan

### 3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi

#### 3.1.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu. PDRB digunakan sebagai dasar perhitungan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Selain itu juga untuk melihat struktur ekonomi suatu wilayah, sebagai indikator tingkat kesejahteraan masyarakat dan disparitas sosial. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah atau wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya, sehingga besarnya PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi di daerah atau wilayah tersebut. PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggambarkan kemampuan daerah tersebut dalam mengelola dan menggunakan sumber

daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Perkembangan PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang tahun 2019-2022 sebagaimana diperlihatkan pada Tabel III.1 menunjukkan tren yang fluktuatif. Secara nominal PDRB pada tahun 2019 Rp 53,942 milyar menurun menjadi Rp52,706 milyar pada tahun 2020 dan hingga tahun 2022 terus meningkat menjadi Rp62,923 milyar.

**Tabel III.1**
PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2024 (Milyar rupiah)

| Lapangan Usaha | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023[e] | 2024[e] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* |
| 1 | Pertanian Kehutanan dan Perikanan | 9,863 | 10,666 | 10,769 | 10,878 | 11,296 | 11,746 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 6,633 | 6,036 | 6,451 | 6,475 | 6,666 | 6,967 |
| 3 | Industri Pengolahan | 11,929 | 11,259 | 11,874 | 12,485 | 12,717 | 13,131 |
| 4 | Pengadaan Listrik, Gas | 53 | 55 | 61 | 59 | 62 | 65 |
| 5 | Pengadaan Air | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| 6 | Konstruksi | 4,810 | 4,695 | 4,898 | 4,846 | 4,154 | 4,376 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran ,dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 7,580 | 7,243 | 7,663 | 8,478 | 9,029 | 9,475 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 2,066 | 1,725 | 1,880 | 2,274 | 2,467 | 2,706 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 1,319 | 1,280 | 1,415 | 1,561 | 1,633 | 1,706 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 1,258 | 1,445 | 1,572 | 1,727 | 1,820 | 1,913 |
| 11 | Jasa Keuangan | 988 | 921 | 973 | 1,027 | 1,070 | 1,113 |
| 12 | Real Estate | 1,727 | 1,807 | 1,929 | 2,027 | 2,113 | 2,199 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 138 | 119 | 126 | 139 | 144 | 148 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan ,Pertahanan danJaminan Sosial Wajib | ,073 | 2,977 | 3,137 | 3,110 | 3,259 | 3,408 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 1,380 | 1,369 | 1,403 | 1,446 | 1,514 | 1,581 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 697 | 705 | 805 | 822 | 861 | 899 |
| 17 | Jasa Lainnya | 421 | 392 | 407 | 439 | 459 | 479 |
| | **PDRB** | **53,942** | **52,706** | **55,370** | **57,803** | **60,274** | **62,923** |

*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2019-2022),*
*Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, proyeksi (2023-2024)*

Dilihat dari perkembangan sektoral pada kurun waktu 2019-2022 Sektor Industri Pengolahan, Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Sektor Pertambangan dan Penggalian merupakan keempat sektor yang dianggap sebagai penggerak PDRB di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tahun 2022, kontribusi PDRB terbesar diperoleh dari sektor industri pengolahan sebesar Rp13,131 Milyar, diikuti sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Rp11,746 milyar, sektor perdagangan besar dan eceran Rp9,475 milyar, dan sektor pertambangan dan penggalian Rp6,967 milyar. Kontribusi keempat sektor tersebut sebesar Rp38,316 milyar

atau sebesar 66,29 persen. Kontribusi sektor lainnya sebesar Rp19,487 milyar atau sebesar 33,71 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangatlah dipengaruhi oleh perkembangan dan kemajuan dari sektor industri pengolahan, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor perdagangan besar dan eceran, serta sektor pertambangan dan penggalian sehingga sektor-sektor ekonomi lainnya sebagai pendukung dan perkembangan serta kemajuannya sangatlah ditentukan oleh perkembangan dan kemajuan dari keempat sektor dominan.

Dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi yang semakin berpihak kepada masyarakat dan dunia usaha, diperkirakan perekonomian daerah sepanjang tahun 2023 dan 2024 akan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2023, diperkirakan PDRB akan meningkat menjadi sebesar Rp60,274 milyar dan pada tahun 2024 diperkirakan akan terus mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp62,923 milyar. Diperkirakan dalam kurun waktu tersebut Sektor Industri Pengolahan, Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, serta Sektor Pertambangan dan Penggalian masih dianggap merupakan keempat sektor potensial yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB ADHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sedangkan sektor-sektor ekonomi lainnya diperkirakan masih sebagai sektor pendukung dari keempat sektor dominan tersebut.

Sementara itu, dilihat dari nilai nominal PDRB berdasarkan pengeluaran atau penggunaan yang menjelaskan bagaimana PDRB suatu wilayah (*region*) digunakan atau dimanfaatkan, baik untuk memenuhi kebutuhan permintaan di dalam wilayah maupun untuk memenuhi kebutuhan di luar wilayah sepanjang tahun 2019-2022 juga menunjukkan tren yang fluktuatif. Sebagaimana diperlihatkan pada tabel III.2 dapat dijelaskan bahwa komponen pengeluaran pembentuk PDRB masih didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga, di mana pada tahun 2019 Rp28,875 milyar, menurun menjadi Rp28,745 milyar pada tahun 2020, dan terus meningkat menjadi Rp31,002 milyar pada tahun 2022.

Komponen pengeluaran terbesar kedua yang berkontribusi terhadap PDRB adalah ekspor, namun sejalan dengan penurunan harga komoditas ekspor di pasar dunia seperti karet dan CPO memberikan dampak negatif terhadap perkembangan ekspor Kepulauan Bangka Belitung, di mana pada tahun 2019 nilai ekspor mencapai Rp21,186 milyar menurun menjadi Rp19,515 milyar pada tahun 2020, dan tahun 2021 juga meningkat menjadi Rp28,787 milyar. Namun pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi menjadi Rp27,985. Sedangkan untuk komponen investasi (dilihat dari nilai pembentukan modal tetap bruto) secara nominal juga mengalami fluktuatif sepanjang periode tahun 2019-2022. Pada tahun 2019 nilai pembentukan modal tetap bruto Rp12,453 milyar, mengalami penurunan menjadi Rp11,633 milyar pada tahun 2020, selanjutnya terus meningkat menjadi Rp12,534 milyar pada tahun 2022.

Pada tahun 2023 dan 2024 diperkirakan konsumsi rumah tangga dan ekspor luar negeri masih terus menguat, hal ini diindikasikan dengan masih kuatnya tingkat keyakinan konsumen dan pelaku usaha yang masih terlihat optimis. Peningkatan harga beberapa komoditi unggulan pada tahun 2023 dan 2024 diperkirakan akan terjadi, sehingga akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi konsumsi rumah tangga.

**Tabel III.2**
PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2024 (Milyar Rupiah)

| Kelompok Pengeluaran | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023[e] | 2024[e] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Pengeluaran Konsumsi RT | 28,875 | 28,745 | 29,521 | 31,002 | 31,711 | 32,420 |
| 2 | Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 373 | 373 | 377 | 394 | 401 | 408 |
| 3 | Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 5,273 | 5,055 | 5,158 | 5,283 | 5,287 | 5,290 |
| 4 | Pembentukan Modal Tetap Bruto | 12,453 | 11,633 | 12,014 | 12,534 | 12,561 | 12,588 |
| 5 | Perubahan Inventori | 482 | 64 | 387 | 76 | 59 | 194 |
| 6 | Ekspor Luar Negeri | 21,186 | 19,515 | 28,787 | 27,985 | 30,261 | 32,533 |
| 7 | Impor Luar Negeri | 492 | 411 | 524 | 896 | 556 | 571 |
| 8 | Net Ekspor Antar Daerah | (14,209) | (12,269) | (20,352) | (18,577) | (19,451) | (19,940) |
| | **PDRB** | **53,942** | **52,706** | **55,369** | **57,803** | **60,274** | **62,923** |

*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2019-2022),*
*Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, proyeksi (2023-2024)*

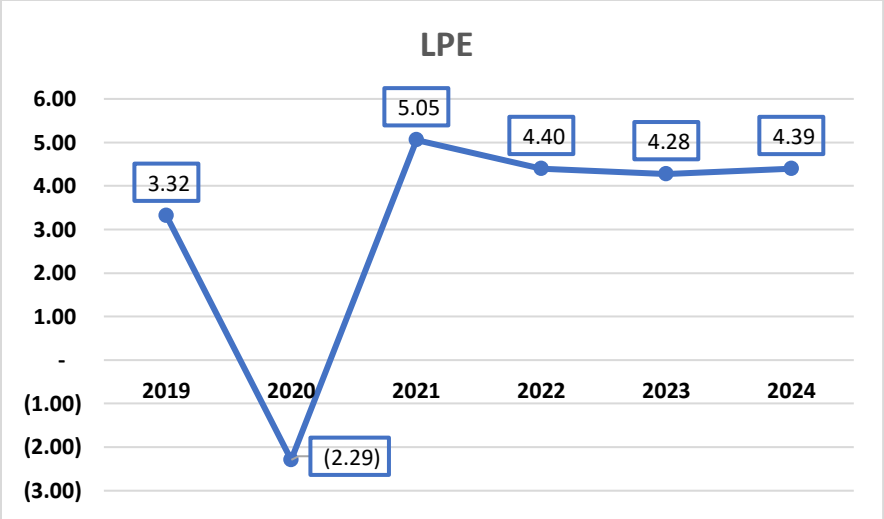
Adanya kebijakan pemerintah terkait dengan pelarangan ekspor *raw materials* sumber daya mineral, juga berdampak positif terhadap investasi di Kepulauan Bangka Belitung. Potensi sumber daya alam yang melimpah juga menjadi salah satu daya tarik investasi, sehingga dengan adanya penambahan kapasitas kegiatan produksi dan bisnis akan memperkuat konsumsi rumah tangga. Sejalan dengan penguatan konsumsi rumah tangga dan investasi, ekspor diperkirakan juga akan mengalami kenaikan seiring dengan membaiknya perekonomian dunia.

Dengan adanya pemulihan pasca pandemi maka penjualan beberapa komoditas unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2023 dan 2024 diperkirakan mulai tumbuh secara positif. Untuk memperkuat perkembangan beberapa komponen pengeluaran tersebut, pengendalian terhadap neraca perdagangan juga harus dilakukan dengan menjaga aktivitas impor lebih rendah dari pada ekspor.

### 3.1.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator dari keberhasilan pembangunan ekonomi yang paling mendasar dan digunakan sampai saat ini. Umumnya pertumbuhan ekonomi diukur dengan perubahan atau kenaikan PDRB, yaitu keseluruhan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam satu tahun. Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang periode Tahun 2019-2022 sebagaimana diperlihatkan pada gambar III.1 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2019 laju pertumbuhan ekonomi mencapai 3,32 persen, pada tahun 2020 mengalami kontraksi 2,29 persen, meningkat menjadi 5,05 persen pada tahun 2021, namun pada tahun 2022 ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2021 yaitu menurun menjadi 4,40.

**Grafik III.I**
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2024




*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2019-2022),*
*Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, proyeksi (2023-2024)*

Terjadinya perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 disebabkan oleh penurunan kinerja perekonomian yang terjadi pada beberapa lapangan usaha yang pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan namun tahun 2022 melambat yaitu lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas yang mengalami kontraksi sebesar 3,39 persen, lapangan usaha Konstruksi mengalami kontraksi sebesar 1,06 persen. Sedangkan pada tahun 2023 dan 2024 pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diperkirakan masih akan melambat dibandingkan tahun 2022 yaitu 4,28 persen dan 4,39 persen.

**Tabel III.3**
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 – 2024

| Lapangan Usaha | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 [e] | 2024 [e] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* |
| A. | Pertanian Kehutanan dan Perikanan | 8.15 | 0.96 | 1.02 | 3.84 | 3.98 |
| B. | Pertambangan dan Penggalian | -9.00 | 6.87 | 0.37 | 2.95 | 4.52 |
| C. | Industri Pengolahan | -5.62 | 5.46 | 5.15 | 1.86 | 3.25 |
| D. | Pengadaan Listrik dan Gas | 5.26 | 10.42 | -3.39 | 5.35 | 5.08 |
| E. | Pengadaan Air | 5.65 | 4.84 | 4.12 | 2.10 | 2.06 |
| F. | Konstruksi | -2.38 | 4.31 | -1.06 | 6.37 | 4.29 |
| G. | Perdagangan Besar dan Eceran ,dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | -4.44 | 5.80 | 10.63 | 6.50 | 4.94 |
| H. | Transportasi dan Pergudangan | -16.47 | 8.94 | 20.96 | 8.50 | 9.69 |
| I. | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | -2.95 | 10.56 | 10.35 | 4.62 | 4.42 |
| J. | Informasi dan Komunikasi | 14.89 | 8.76 | 9.86 | 5.40 | 5.12 |
| K. | Jasa Keuangan | -6.72 | 5.57 | 5.57 | 4.18 | 4.01 |
| L. | Real Estate | 4.64 | 6.73 | 5.12 | 4.24 | 4.07 |

| Lapangan Usaha | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 e | 2024 e |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* |
| M, N. | Jasa Perusahaan | -13.76 | 5.75 | 11.00 | 3.03 | 2.94 |
| 0. | Administrasi Pemerintahan ,Pertahanan danJaminan Sosial Wajib | -3.11 | 5.38 | -0.88 | 4.80 | 4.58 |
| P. | Jasa Pendidikan | -0.81 | 2.42 | 3.13 | 4.66 | 4.45 |
| Q. | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 1.09 | 14.16 | 2.16 | 4.70 | 4.49 |
| R,S.T.U | Jasa Lainnya | -6.95 | 3.73 | 7.88 | 4.60 | 4.40 |
| | **PDRB** | **-2.29** | **5.05** | **4.40** | **4.28** | **4.39** |

*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2020-2022),*
*Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, proyeksi (2023-2024)*

### 3.1.1.3 PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah atau daerah. Data statistik ini merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah atau daerah. PDRB perkapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Jadi besarnya PDRB perkapita tersebut sangat dipengaruhi oleh kedua variabel diatas. PDRB per Kapita ADHB dan ADHK diperlihatkan dalam tabel III.4 yang menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2020-2022 terus mengalami peningkatan

Semula pada tahun 2020 PDRB perkapita ADHB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp52,023,404,00, sedangkan PDRB perkapita ADHK sebesar Rp 34,725,590. Terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2022, PDRB perkapita ADHB sebesar Rp 63,752,237 dan PDRB perkapita ADHK sebesar Rp 38,674,018. Hal ini sejalan dengan perkembangan perekonomian daerah yang terus menunjukan pertumbuhan positif. Selanjutnya pada tahun 2023-2024 PDRB perkapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diperkirakan akan terus mengalami peningkatan dengan asumsi pertumbuhan penduduk pada tahun 2023 sebesar 1,79 persen dan tahun 2024 sebesar 1,74 persen, maka pendapatan perkapita ADHB dan ADHK tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp 66,901,486,00 dan Rp39,618,182 selanjutnya pada tahun 2024 menjadi sebesar Rp 69,954,637,00 dan Rp 40,652,025.

**Tabel III.4**
PDRB Per Kapita ADHB, ADHK (rupiah)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 – 2024

| PDRB Per Kapita | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* |
| Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) | 52,023,404 | 58,351,434 | 63,752,237 | 66,901,486 | 69,954,637 |
| Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) | 34,725,590 | 35,793,231 | 38,674,018 | 39,618,182 | 40,652,025 |

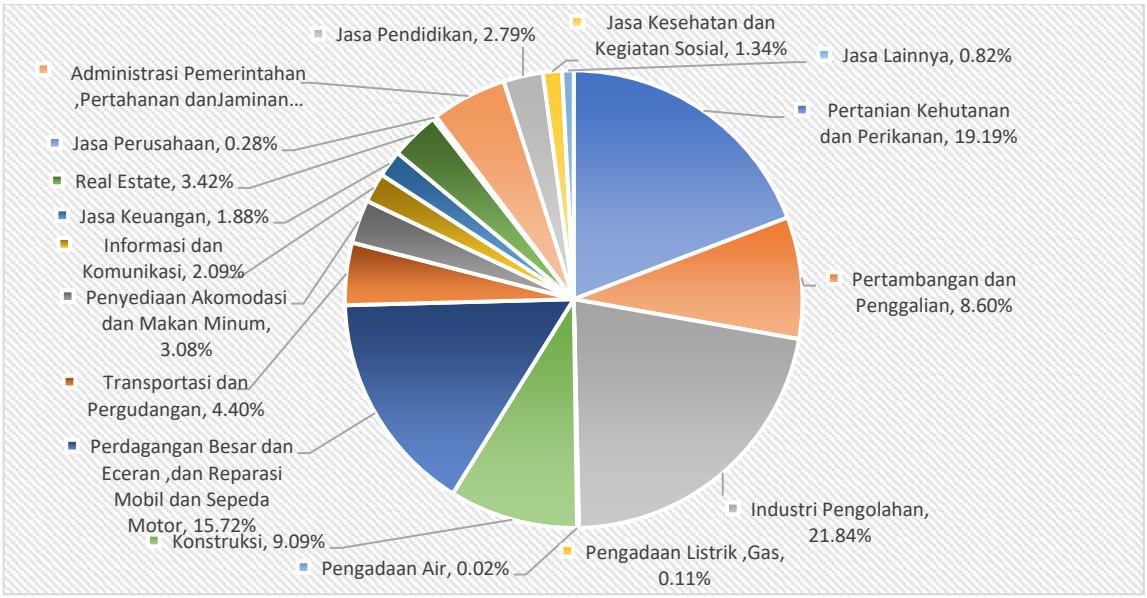
*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2020-2022),*
*Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, proyeksi (2023-2024)*

### 3.1.1.4 Struktur Perekonomian Daerah

Untuk melihat seberapa besar peranan masing-masing sektor ekonomi dan seberapa jauh terjadi pergeseran peranan antara sektor-sektor ekonomi pembentuk PDRB dapat dilihat dari perkembangan struktur ekonomi daerah. Dengan mengetahui struktur perekonomian dapat diperoleh informasi terkait sektor-sektor mana saja yang paling dominan dan potensial untuk dikembangkan.

Struktur perekonomian daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana diperlihatkan pada gambar III.2 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2022 sektor industri pengolahan masih memberikan kontribusi tertinggi yaitu sebesar 21,84 persen. Sektor yang memberikan kontribusi paling tinggi setelah sektor industri pengolahan adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu sebesar 19,92 persen, diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 15,72 persen, sektor konstruksi 9,09 persen serta sektor pertambangan dan penggalian sebesar 8,60 persen.

**Grafik III.2**
Struktur Perekonomian Menurut Lapangan Usaha
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022




*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (data diolah)*

Selanjutnya, sepanjang tahun 2023 dan 2024, diperkirakan sektor industri pengolahan masih merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian daerah dengan rata-rata sebesar 22,64 persen. Selain sektor industri pengolahan, sektor yang memberikan kontribusi terbesar lainnya adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor perdagangan besar dan eceran dengan rata-rata kontibusi sebesar 19,64 persen dan 15,69 persen. Sektor pertambangan dan penggalian walaupun kontribusinya terus menurun, namun diharapkan masih mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah dengan rata-rata sebesar 8,28 persen pada tahun 2023-2024.

**Tabel III.5**
Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020–2024 (dalam persen)

| Lapangan Usaha | | 2020 | 2021* | 2022** | 2023 e | 2024 e |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* |
| A. | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 20.45 | 19.65 | 19.19 | 19.51 | 19.78 |
| B. | Pertambangan dan Penggalian | 8.57 | 9.55 | 8.60 | 8.38 | 8.18 |
| C. | Industri Pengolahan | 18.76 | 20.86 | 21.84 | 22.40 | 22.89 |
| D. | Pengadaan Listrik dan Gas | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| E. | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| F. | Konstruksi | 10.21 | 9.67 | 9.09 | 8.77 | 8.49 |
| G. | Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 15.37 | 14.76 | 15.72 | 15.70 | 15.69 |
| H. | Transportasi dan Pergudangan | 3.62 | 3.60 | 4.40 | 4.39 | 4.38 |
| I. | Penyedian Akomodasi dan Makan Minum | 3.04 | 3.00 | 3.08 | 3.12 | 3.16 |
| J. | Informasi dan Komunikasi | 2.16 | 2.08 | 2.09 | 2.14 | 2.18 |
| K. | Jasa Keuangan dan Asuransi | 1.86 | 1.82 | 1.88 | 1.85 | 1.83 |
| L. | Real Estate | 3.70 | 3.50 | 3.42 | 3.41 | 3.40 |
| M, N. | Jasa Perusahaan | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.27 |
| 0. | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 6.41 | 5.93 | 5.32 | 5.07 | 4.85 |
| P. | Jasa Pendidikan | 3.16 | 2.93 | 2.79 | 2.72 | 2.66 |
| Q. | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 1.39 | 1.42 | 1.34 | 1.34 | 1.34 |
| R,S.T.U | Jasa Lainnya | 0.88 | 0.81 | 0.82 | 0.79 | 0.77 |
| | **PDRB** | **100.00** | **100.00** | **100.00** | **100.00** | **100.00** |

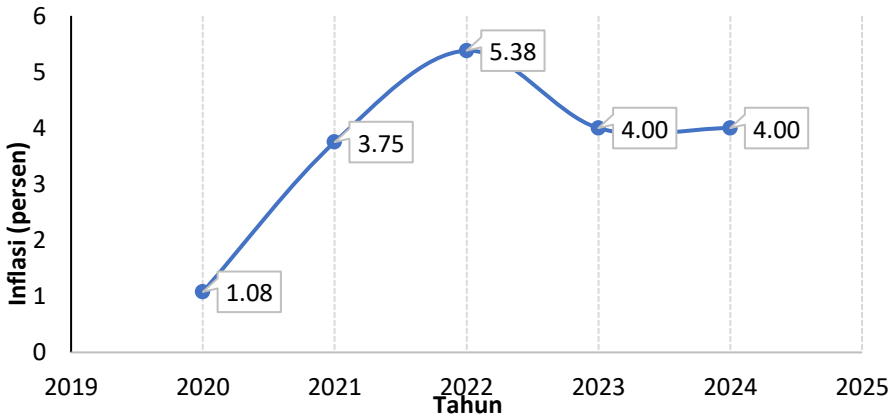
*Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2020-2022)*
*Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, proyeksi (2023-2024)*

Dari hasil estimasi pada tabel III.5 pada tahun 2023-2024, sektor industri pengolahan masih dianggap merupakan sektor potensial utama yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kemudian diikuti sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan besar dan eceran, sektor konstruksi, dan sektor pertambangan dan penggalian.

### 3.1.1.5 Tingkat Inflasi

Pada tahun 2022, Kota Pangkalpinang mengalami inflasi sebesar 6,07 persen dan Kota Tanjungpandan (Kabupaten Belitung) mengalami inflasi sebesar 4,17 persen year on year. Berdasarkan laju inflasi dua kota ini maka inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 sebesar 5,38 persen. Inflasi merupakan cerminan dari kestabilan nilai mata uang. Stabilitas tersebut tercermin dari stabilitas tingkat harga yang kemudian berpengaruh terhadap realisasi pencapaian tujuan pembangunan ekonomi suatu daerah, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan, perluasan kesempatan kerja serta stabilitas ekonomi.

**Grafik III.3**
Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2024




*Sumber: 2020-2022 BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,*
*(2022-2023) Data Estimasi, Proyeksi Bappeda Provinsi Kep. Bangka Belitung*

Jika memperhatikan kondisi inflasi Kota Pangkalpinang dan Tanjung Pandan Tahun 2022, inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2023 dan 2024 diproyeksikan masih berada pada rentang target inflasi Nasional 4,00 persen dengan tekanan yang cenderung mengalami menurun dari 2022. Laju inflasi yang diproyeksikan menurun dibandingkan tahun 2022 sejalan dengan pemulihan ekonomi pasca Covid-19, dinilai akan memberikan dampak terhadap peningkatan daya beli masyarakat di tahun 2023-2024 dan masih dalam kondisi ideal.

### 3.1.1.6 Tingkat Investasi

Diharapkan dengan meningkatnya investasi di daerah dapat memacu pertumbuhan perekonomian daerah sekaligus pemerataan pendapatan masyarakat. Dengan banyaknya investasi yang ditanamkan oleh dunia usaha di daerah maka semakin bertambahnya lapangan kerja yang dapat menampung angkatan kerja, sehingga berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat. Pemerintah daerah turut melakukan upaya untuk menjaga iklim investasi, salah satunya adalah melalui Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2017, tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi. Selain itu Pemerintah juga mempermudah proses perizinan usaha, hal ini dilakukan untuk merespon pesatnya minat pelaku usaha dalam pengajuan izin berusaha.

Realisasi investasi di Provinsi Bangka Belitung terus mengalami trend peningkatan selama periode 2018-2022, investasi PMA pada tahun 2022 mengalami Kenaikan sebesar Rp 1.208,23 Milyar dibanding pada tahun 2021 sebesar Rp 652,92 Milyar, sama halnya dengan investasi PMA, investasi PMDN pada tahun 2022 juga mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp 2.631,60 Milyar dibanding pada tahun 2021 sebesar Rp 3.677,37 Milyar.

Pada Tahun 2023 dan 2024 diperkirakan investasi di Kepulauan Bangka Belitung terus mengalami peningkatan, seperti yang dapat kita lihat pada tabel berikut dibawah ini. Namun selain memiliki potensi produk unggulan dari sektor pertambangan, pertanian, perikanan dan pariwisata. elemen penting untuk optimasi unggula daerah adalah ketersediaan infrastruktur dan kemudahan akses. Oleh karena itu, perbaikan infrastruktur dan peningkatan akses menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**Tabel III.6**
Perkembangan Realisasi Investasi
Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018–2024

| INVESTASI | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| **PMA** | JUMLAH PROYEK | 105 | 183 | 332 | 287 | 294 | 346 | 375 |
| | NILAI (Rp. Juta) | 620,12 | 1330,93 | 697.399,20 | 652.927,68 | 1.861.154,25 | 2.186.952,62 | 2.768.830,14 |
| **PMDN** | JUMLAH PROYEK | 161 | 418 | 988 | 2371 | 1543 | 2.189 | 2.467 |
| | NILAI (Rp. Juta) | 3112,92 | 2915,15 | 1.863.751,50 | 3.677.369,90 | 6.308.975,50 | 7.257.078,97 | 8.885.696,96 |
| **TOTAL INVESTASI (Rp. Juta)** | | **3.733,04** | **4.246,08** | **2.561.150,70** | **4.330.297,58** | **8.170.129,75** | **9.444.031,59** | **11.654.527,10** |

*Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2022)*
*[e] ) 2023-2024 Data Estimasi*

Investasi yang diperkirakan terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu dua tahun kedepan harus diikuti dengan langkah kebijakan diversifikasi dan penyebaran investasi harus secara intensif dilakukan, disesuaikan dengan potensi atau sumber daya spesifik yang dimiliki daerah atau industri.

Beberapa kebijakan strategis yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka meningkatkan Investasi di Bangka Belitung adalah; mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan Kerjasama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah. Melalui Kerjasama lintas sektor beberapa OPD diantaranya KUKM, BAPPEDA, DKP, DISPERINDAG, DPKP, DPMPTSP, DISKOMINFO, DPUPRPRKP. Selain hal tersebut, upaya dalam rangka menarik investor yang terkait dengan sektor produksi yang menjadi unggulan daerah harus terus dilakukan. Hilirisasi dan industrialisasi terhadap sektor pertambangan, pertanian, perikanan dan pariwisata merupakan hal yang menjadi prioritas utama.

### 3.1.1.7 Ekspor dan Impor

Ekspor yang dilakukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagian besar merupakan ekspor logam timah. Jika dilihat dari tren tiga tahun terakhir (2020-2022) ekspor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukan tren yang fluktuatif dan cenderung mengalami peningkatan. Akan tetapi jika dibandingkan dari dua tahun terakhir (2021-2022). Pada Tahun 2022 ekspor timah terjadi penurunan, dimana pada Tahun 2022 nilai ekspor timah sebesar US$ 2,293,30 juta, menurun menjadi US$ 2.93,30 juta. Hal ini serupa dengan perkembangan ekspor non timah juga menunjukan penurunan, pada tahun 2021 sebesar US$ 351,29 juta, menurun menjadi US$ 346,82 juta pada tahun 2022.

**Tabel III.7**
Perkembangan Ekspor Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020- 2024
(dalam juta US$)

| Kelompok Komoditi | Nilai Value (US$) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023[e] | 2024[e] |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* |
| **Timah** | 1.029,66 | 2,320,76 | 2.293,30 | 2.530,45 | 2.720,60 |
| **Non Timah** | 261,50 | 351,29 | 346,82 | 614,22 | 660,37 |

| Kelompok Komoditi | Nilai Value (US$) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* |
| **Total Ekspor** | **1.291,16** | **2.671,05** | **2.640,12** | **3.144,67** | **3.380,97** |

*Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2020-2022), 2023 e -2024 e data Estimasi Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*

Diperkirakan dalam kurun waktu dua tahun kedepan (2023-2024), eskpor timah akan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022, sebesar US$ 2.530,45 juta di tahun 2023 dan US$ 2.720,60 juta di tahun 2024. Hal ini serupan dengan komoditi non timah yang diperkirakan akan mengalami kenaikan di tahun 2023 sebesar US$ 614,22 juta dan tahun 2024 sebesar US$ 660,37 juta. Ringkasan mengenai perkembangan ekspor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 tersaji pada tabel III.8.

Selanjutnya jika dilihat dari perkembangan impor, pada kurun waktu tiga tahun terakhir (2020-2022) menunjukan tren yang terus mengalami peningkatan, semula pada tahun 2020 sebesar US$ 14,62 juta, terus mengalami peningkatan pada tahun 2021-2022 sebesar US$ 34,22 juta dan US$ 76,67 juta. Peningkatan impor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disumbang oleh komoditi non migas, yaitu sebesar US$ 11,54 juta (tahun 2020), US$ 31,45 juta (tahun 2021), dan US$ 74,05 juta (tahun 2022). Sedangkan dari komoditi migas dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2020-2023) terus mengalami penurunan nilai impor, yaitu yaitu sebesar US$ 3,08 juta (tahun 2020), US$ 2,77 juta (tahun 2021), dan US$ 2,62 juta (tahun 2022). Sedangkan pada tahun 2023-2024, impor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diperkirakan bergerak fluktuatif dan cenderung mengalami penurunan, sebesar US$ 52,40 juta (tahun 2023) dan US$ 61,49 juta (tahun 2024).

**Tabel III.8**

Perkembangan Impor Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020- 2024

(dalam juta US$)

| Kelompok Komoditi | Nilai Value (US$) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* |
| **Migas** | 3,08 | 2,77 | 2,62 | 23,80 | 27,92 |
| **Non Migas** | 11,54 | 31,45 | 74,05 | 28,60 | 33,57 |
| **Total Impor** | 14,62 | 34,22 | 76,67 | 52,40 | 61,49 |

*Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2020-2022), 2023 e -2024 e data Estimasi Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*

### 3.1.2 Indikator Pembangunan Bidang Kesejahteraan

#### 3.1.2.1 Pengangguran

Persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2022 sebesar 4,77 persen atau 36.631 jiwa turun 0,26 persen jika dibandingkan tahun 2021 yaitu berada di angka 5,03 atau 37.280. Hal ini dapat diartikan ketika ekonomi tumbuh positif, maka diikuti dengan penurunan TPT pasca pemulihan Covid-19.

Selanjutnya angka pengangguran sama halnya dengan tahun 2022 diperkirakan pada tahun 2023-2024 akan mengalami penurunan seiring dengan perkiraan akan membaiknya pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga berdampak pada peningkatan lapangan kerja dan penyerapan angkatan kerja. Memperhatikan kondisi tersebut dan kebijakan pasca pandemi Covid-19 maka pada tahun 2023-2024 diproyeksikan TPT sebesar 4,40 persen atau 36.036 jiwa dan sebesar 4,37 persen atau 34.516 jiwa.

**Tabel III.9**
Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (persen) dan Jumlah Pengangguran (jiwa)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019–2024

| Kegiatan Utama | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 [e] | 2024 [e] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* |
| Tingkat Pengangguran Terbuka | 3,58 | 5,25 | 5,03 | 4,77 | 4,40 | 4,37 |
| Jumlah Pengangguran | 26.063 | 38.756 | 37.180 | 36.631 | 36.036 | 34.516 |

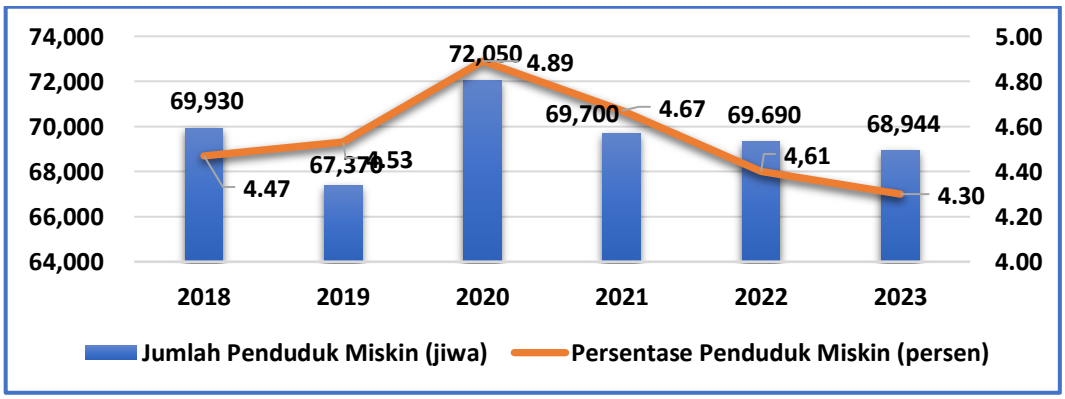
*Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2018-2021)*
*[e]) Tahun 2022-2023 (Proyeksi) Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*

### 3.1.2.2 Kemiskinan

Dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Garis kemiskinan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari ditambah kebutuhan minimum non makanan yang mencakup perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung penduduk yang hidup di bawah Garis Kemiskinan dinyatakan sebagai penduduk miskin atau persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan.

Penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang periode tahun 2018-2022 cenderung bersifat fluktuatif. Semula tahun 2018 sebesar 4,47 persen dan terus meningkat di tahun 2019 sebesar 4,53 persen dan sebesar 4,89 persen tahun 2020. Kondisi ini terjadi akibat dampak dari pandemi Covid-19 yang mempengaruhi banyak sektor ekonomi yang mengalami kontraksi. Selanjutnya tahun 2021 dengan adanya pemulihan ekonomi pasca Covid-19, maka membawa dampak terhadap penurunan persentase penduduk kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 4,67 persen atau 67.700 jiwa. Pada Tahun 2022 persentase penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 4,61 persen atau 69.690 jiwa.

**Grafik III.4**
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2018 – 2023



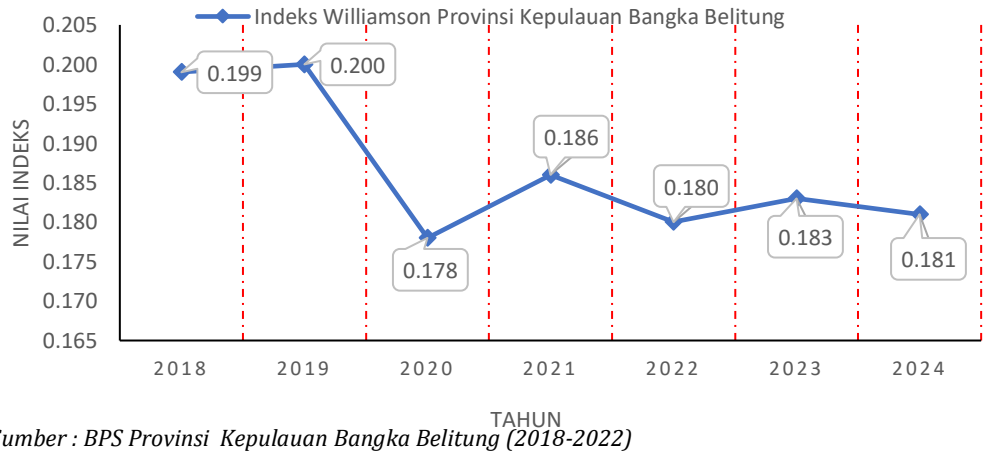

*Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2018-2022)*
*[e]) Tahun 2023 (Proyeksi) Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang diperkirakan akan tumbuh positif, dinilai akan memberikan dampak terhadap penurunan penduduk miskin tahun 2023-2024 yaitu sebesar 4,40 persen atau 66.918 jiwa dan 4,14 persen atau 64.055 jiwa. Hal ini didukung dengan upaya penguatan sektor-sektor ekonomi melalui program-program pemerintah pasca pandemi dalam penanggulangan masalah kemiskinan dengan memfokuskan pada daerah pedesaan mengingat angka kemiskinan tertinggi di Kepulauan Bangka Belitung terjadi di daerah pedesaan. Persentase kemiskinan ekstrem per Maret 2022 di Provinsi kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,82% atau sebanyak 12.272 jiwa. Sementara kemiskinan ekstrem di Kabupaten Belitung dan Bangka berada di atas tingkat Provinsi yaitu sebesar 2,06% dan 1,13%. Hasil pemadanan antara Data P3KE dengan DTKS lebih dari 20% keluarga detail 1 pada setiap kabupaten/kota belum tercatat dalam DTKS.

### 3.1.2.3 Ketimpangan Regional

Untuk mengetahui ketimpangan pembangunan antar daerah dapat dianalisis dengan menggunakan indeks ketimpangan regional yang dinamakan indeks ketimpangan Williamson, Semakin kecil angka yang dihasilkan menunjukkan ketimpangan yang semakin kecil pula atau dapat dikatakan makin merata. Selama kurun waktu tahun 2018-2022 Ketimpangan regional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan angka yang fluktuatif dan cenderung mengalami penurunan.

**Grafik III.5**
Indeks Williamson Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2024




*Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2018-2022)*
*e) Tahun 2023-2024 (Proyeksi*

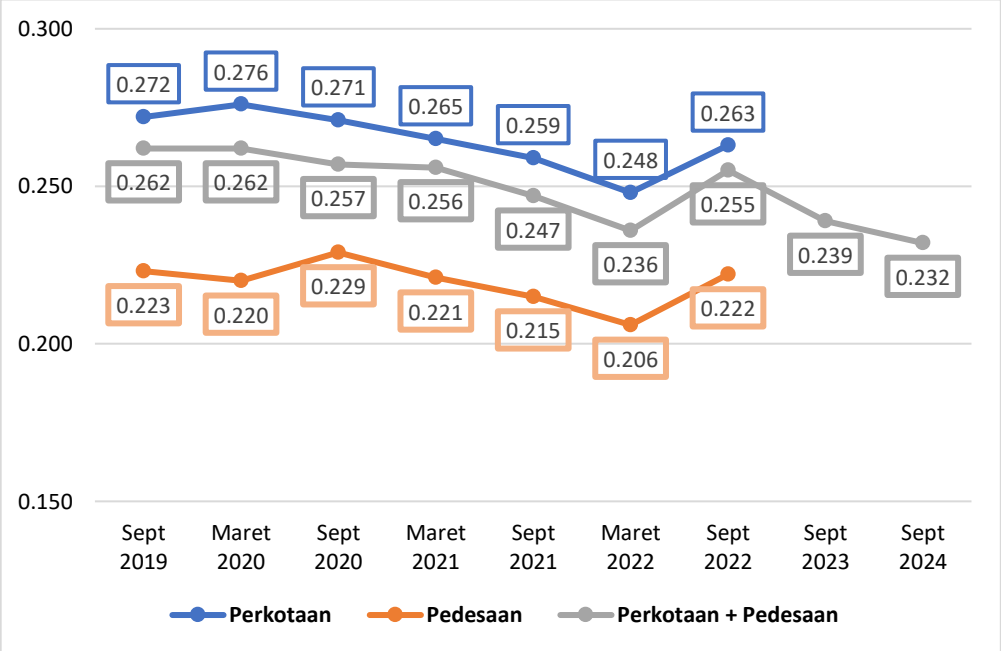
Ketimpangan terendah berada di tahun 2020 sebesar 0,178, selanjutnya pada tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 0,186, namun tahun 2022 kembali mengalami penurunan menjadi 0,180, angka tersebut masih rendah dari target yang ditetapkan pemerintah pada dokumen RPJMD-P 2017-2022 dengan tingkat ketimpangan regional (*Williamson Indeks*) tahun 2021 sebesar 0,203 dan tahun 2022 sebesar 0,205. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukan bahwa angka indeks Williamson Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung mendekati 0, artinya pembangunan wilayah semakin merata atau menunjukkan bahwa adanya peningkatan pemerataan pembangunan regional antar kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya pada tahun 2023 dan 2024, indeks williamson diperkirakan akan berada pada angka sebesar 0,183 dan 0,181 (Gambar III.5).

### 3.1.2.4 Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Koefisien Gini atau Gini Ratio adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Apabila Koefisien Gini mendekati nol menunjukkkan adanya ketimpangan yang rendah dan bila Koefisien Gini mendekati satu menunjukkan ketimpangan yang tinggi. Pada prakteknya, angka ketimpangan untuk daerah-daerah yang ketimpangan distribusi pendapatannya tajam berkisar antara 0,50 hingga 0,70. Sedangkan untuk daerah-daerah yang distribusi pendapatannya relatif paling merata berkisar antara 0,20 sampai 0,35.

**Grafik III.6**

Gini Ratio Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2024




*Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2019-2022)*
*Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, proyeksi (2023-2024)*

Berdasarkan tabel di atas pada September tahun 2022 Gini Ratio Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,255, angka tersebut meningkat 0,008 poin dibandingkan dengan Gini Ratio pada September 2021. Nilai Gini Ratio Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 terendah se-Indonesia, dimana Ratio Gini Indonesia adalah 0,381. Selanjutnya, Gini Ratio untuk tahun 2023 dan 2024 diharapkan akan mengalami penurunan. Harapan ini mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan semakin merata.

## 3.1.3 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023 dan 2024

### 3.1.3.1 Tantangan Perekonomian Global dan Nasional 2023 dan 2024

Ekonomi global saat ini mulai terlihat membaik pada tahun 2022, namun diperkirakan tidak berlanjut pada 2023 dan 2024. Prediksi kemungkinan terjadinya resesi ekonomi global

pada tahun 2023 mendatang disampaikan oleh Bank Dunia dalam laporannya yang berjudul *"Is a Global Recession Imminent?"*. Prediksi tersebut, terasa semakin nyata dengan beberapa indikasi yang sudah mulai terjadi, seperti kenaikan suku bunga acuan secara agresif yang dilakukan bank sentral berbagai negara dalam upaya meredam laju inflasi.

Beberapa faktor pemicu resesi ekonomi global yang dikhawatirkan akan terjadi tahun depan, yaitu:

1. Pandemi Covid-19, walaupun sudah mulai mereda dan banyak negara yang telah membebaskan warganya untuk beraktivitas seperti biasa. Namun pada saat meluasnya wabah Covid-19 pada awal tahun 2020 sampai dengan awal tahun ini, aktivitas ekonomi global menurun drastis. Setiap negara lebih fokus untuk menangani Covid-19 dan menerapkan pembatasan aktivitas, termasuk aktivitas ekonomi. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi secara global pun mengalami kontraksi. Pada saat yang sama, banyak negara melakukan proteksi atas hasil pangan untuk mengantisipasi wabah Covid-19 yang berkepanjangan dan berakibat pada meningkatnya harga pangan karena kurangnya suplai. Indonesia juga sempat mengalami resesi ekonomi pada akhir tahun 2020 akibat pandemi Covid-19.
2. Perang Rusia-Ukraina yang berlangsung sejak bulan Februari lalu, telah menghilangkan PDB global hingga USD2,8 triliun. Perang Rusia- Ukraina mengganggu rantai pasok global sehingga menimbulkan krisis terutama di sektor pangan dan energi, yang pada akhirnya mengakselerasi laju inflasi. Perang Rusia-Ukraina merupakan faktor utama penyebab terjadinya resesi ekonomi global yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2023 mendatang.
3. Tingginya tingkat inflasi. Dalam laporan *World Economic Outlook* edisi Oktober 2022, *International Monetary Fund* (IMF) memproyeksikan laju inflasi global mencapai 8,8% pada 2022 dan akan menurun pada tahun 2023 yaitu menjadi 6,5%. Inflasi Indonesia menurut Bank Indonesia diproyeksikan menurun dan kembali ke dalam sasaran 3,0±1% pada 2023 dan 2,5±1% pada 2024. Menyikapi hal ini, beberapa negara sudah menarik insentif moneter dan fiskalnya sebagai upaya mengatasi risiko dari inflasi yang terus meningkat.
4. Kenaikan suku bunga acuan.

Bank sentral di seluruh dunia secara bersamaan menaikkan suku bunga acuan sejak semester kedua tahun ini, seperti *Bank of England and the Federal Reserve (The Fed).* Tekanan inflasi di negara Barat dan AS membuat bank sentral terus menaikkan suku bunga acuan untuk mengendalikan inflasi. Demikian halnya kenaikan suku bunga acuan di negara-negara anggota G20 seperti Brasil, India, dan Indonesia. Selama tahun 2022 ini, *Bank of England* telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 200 basis poin. Sementara *The Fed* telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 300 basis poin. Merespons hal tersebut, Bank Indonesia ikut menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 5,25% pada bulan November 2022. Kenaikan suku bunga acuan secara bersamaan yang dilakukan oleh bank-bank sentral di seluruh dunia akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan dapat menyebabkan terjadinya resesi ekonomi global.

Kondisi perekonomian Indonesia dinilai masih kuat menghadapi gejolak ekonomi global yang mengarah pada resesi ekonomi. Potensi untuk bertahan menghadapi risiko

terjadinya resesi ekonomi cukup besar karena ditopang oleh PDB yang masih positif serta tingkat inflasi yang relatif lebih rendah dibandingkan banyak negara lain.

Ancaman resesi ekonomi global terhadap Indonesia akan ditandai, antara lain:

1. Permintaan ekspor produk jadi Indonesia seperti tekstil dan kerajinan menurun, terutama dari AS, Eropa, dan Tiongkok;
2. Penurunan harga beberapa komoditas minyak mentah, minyak sawit mentah (CPO), dan logam dasar;
3. Kenaikan suku bunga di negara-negara maju yang menyebabkan aliran modal mengalir ke luar negeri;
4. Pertumbuhan ekonomi melambat;
5. Meningkatnya beban biaya usaha akibat depresiasi rupiah.

Ancaman akan terjadinya resesi ekonomi global ini perlu disikapi oleh pemerintah dengan melakukan langkah antisipatif untuk terus mendorong kinerja perekonomian nasional. Walaupun kinerja perekonomian nasional saat ini cukup positif, namun jika resesi ekonomi global benar-benar terjadi maka Indonesia diyakini akan terkena dampaknya dan dapat menyeret Indonesia ke dalam "jurang" resesi ekonomi tersebut. Pemerintah memerlukan perumusan kebijakan yang tepat terkait dengan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Melihat segala keterbatasan yang dimiliki oleh kemampuan ekonomi nasional saat ini maka pembiayaan infrastruktur memerlukan terobosan inovasi investasi infrastruktur untuk memenuhi pendanaan infrastruktur supaya pengembangan infrastruktur dapat dilakukan percepatan.

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pembiayaan infrastruktur juga dibahas dalam agenda utama G20 investasi infrastruktur berkelanjutan (*sustainable infrastructure investment*). Agenda tersebut sejalan dengan prioritas Indonesia dalam G20 2022 menuju *sustainable, inclusive*, dan *resilient recovery* untuk mewujudkan "*Recover Together, Recover Stronger*". Investasi infrastruktur berkelanjutan menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan dan pertumbuhan berkelanjutan pasca pandemi COVID-19.

Kemampuan fiskal yang terbatas terutama pada negara berkembang menjadi tantangan utama dalam memenuhi gap kebutuhan infrastruktur berkelanjutan. Investasi pembangunan berkelanjutan memiliki masalah kesenjangan pembiayaan yang serius. Oleh karena itu dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta dan Bank Pembangunan Nasional dan Internasional. Beberapa masukan penting dalam dialog disorot oleh Menteri Keuangan diantaranya peningkatan kapasitas dalam *Project Preparation*, perlunya memastikan kualitas infrastruktur tersebut sejalan dengan prinsip *Enviroment, Social Governance (ESG)*, serta pentingnya peningkatan kapasitas manajemen proyek infrastruktur.

Komitmen G20 di bawah Presidensi Indonesia tahun 2022 dalam investasi infrastruktur berkelanjutan adalah sebagai upaya G20 untuk menindaklanjuti 2021 *Sustainable Finance Roadmap* serta mengembangkan infrastruktur sebagai salah satu kelompok aset yang memiliki karakteristik investasi sehingga menarik bagi para investor. Hasil dari dialog ini diharapkan dapat menjadi input dalam penyelesaian *deliverable* pada

agenda investasi infrastruktur berkelanjutan serta mampu memberikan sinyal positif kepada investor, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memobilisasi investasi sektor swasta ke dalam infrastruktur berkelanjutan.

### 3.1.3.2 Tantangan Perekonomian Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 dan 2024

Adanya Presidensi G20 di Indonesia tahun 2022 berkontribusi mendukung pemulihan ekonomi global dan nasional, termasuk juga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Telah dilaksanakannya Pertemuan Tingkat Menteri negara-negara G20 di Belitung pada September 2022 memberikan manfaat untuk mendukung perekonomian nasional dan daerah baik secara langsung seperti menumbuhkan kembali sektor akomodasi, perhotelan, transportasi, UMKM, dan sektor-sektor lainnya. Sementara itu, secara tidak langsung dengan meningkatnya kepercayaan para investor. Kinerja investasi juga diperkirakan membaik seiring optimisme pelaku usaha dengan dukungan Undang-Undang Cipta Kerja dan kemudahan perizinan melalui *Online Single Submission* (OSS) Kemudian untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dinilai akan menimbulkan perbaikan terhadap kinerja sektor unggulan seperti industri pengolahan logam timah, CPO, perikanan tangkap, serta pariwisata.

Pada tahun 2023 dan 2024 perekonomian Bangka Belitung diperkirakan lebih melambat dari tahun 2022 namun mampu tumbuh bertahan sebesar 4,28 persen dan 4,39 persen. Beberapa regulasi pemerintah diterbitkan untuk mendukung percepetan pemulihan ekonomi antara lain PP Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional untuk mendorong pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, penerapan adaptasi baru juga turut menjaga ekspektasi masyarakat dan pelaku usaha juga diiringi dengan berlanjutnya kebijakan pemerintah dalam penerapan tatanan kehidupan baru *(new normal)* di tengah stimulus fiskal maupun moneter dalam rangka penanganan Covid-19. Pada anggaran pendapatan maupun belanja dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota diprediksi mengalami peningkatan pada tahun 2023, sehingga akan berdampak pada peningkatan laju pertumbuhan konsumsi pemerintah di Bangka Belitung. Adanya stimulus fiskal dalam bentuk bantuan sosial, belanja barang dan modal dari pemerintah juga diharapkan dapat lebih mendorong konsumsi masyarakat Bangka Belitung. Kemudian dengan pertimbangan membaiknya daya beli masyarakat seiring dengan membaiknya pendapatan masyarakat antara lain sebagai dampak harga komoditas yang masih tinggi.

Terdapat beberapa isu yang menjadi perhatian dalam pembangunan perekonomian Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 dan 2024, yaitu:

1. Masih belum meratanya pemulihan ekonomi sejumlah sektor daerah di Indonesia dari pandemi Covid-19 dan masuk ke fase endemi;
2. Kondisi pengangguran Indonesia perlahan mengalami perbaikan, tercermin dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan kemiskinan yang mengalami penurunan seiring dengan pemulihan ekonomi. Namun 2 (dua) indikator tersebut belum dapat kembali ke masa sebelum pandemi Covid-19;
3. Adanya risiko-risiko global yang berimbas pada perekonomian Indonesia tahun 2023-2024;

4. Harga komoditas unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diperkirakan melambat mendekati normal meskipun masih lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2022;
5. Adanya isu terkait dengan beberapa smelter swasta yang masih belum mendapatkan persetujuan RKAB hingga Februari 2022 diperkirakan menahan volume ekspor timah 2022;
6. Implementasi Undang-Undang HHP per April 2022 terutama terkait dengan kenaikan PPN dari 10 persen ke 11 persen diperkirakan mendorong inflasi pada tahun 2023;
7. Dari sisi kelompok makanan, minuman, dan tembakau Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki resiko karena sebagai besar komoditas pangan berasal dari luar wilayah Bangka Belitung sehingga apabila terjadi gangguan pasokan dari sentra komoditas pangan strategis utamanya akibat faktor cuaca mampu memberikan dampak inflasi yang lebih tinggi;
8. Dari sisi kelompok *administered prices* Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki risiko kenaikan harga tarif angkutan udara karena meningkatnya mobilitas masyarakat seiring dengan distribusi vaksin dan *booster* Covid19 yang meningkat.

#### 3.1.3.3 Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024

Mulai pulihnya perekonomian di tahun 2022 secara global diharapkan akan terus mampu untuk mendorong meningkatnya permintaan dunia terhadap komoditas primer. Kondisi ini berdampak positif terhadap peningkatan ekspor Kepulauan Bangka Belitung dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Momentum adanya Presidensi G20 di Indonesia serta terbukanya pasar regional dapat memberikan prospek yang cerah bagi pembangunan ekonomi Kepulauan Bangka Belitung. Beberapa peluang yang dapat dioptimalkan dalam rangka pembangunan ekonomi di Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2024 antara lain adalah:

1. Peningkatan konsumsi rumah tangga dan ekspor luar negeri. Hal ini disebabkan kedua sektor ini pada tahun 2022 mengalami peningkatan dan cukup stabil. Oleh karena itu, diharapkan pada tahun 2024 kedua sektor ini dapat terus tumbuh stabil dalam rangka percepatan ekonomi dimasa endemi.
2. Dalam rangka peningkatan investasi daerah, maka perlunya tetap menciptakan kondisi atau iklim yang kondusif. Hal ini terlihat adanya peningkatan jumlah investor baik dalam luar negeri dalam menanamkan modalnya dalam nilai yang besar.
3. Liberalisasi perdagangan ASEAN menyebabkan arus keluar masuk barang untuk pasokan bahan baku maupun bahan jadi. Kondisi pasar bebas dapat menyebabkan produsen untuk memproduksi barang yang berkualitas dan mampu bersaing dengan produk dari daerah atau negara lain.

Kinerja perekonomian daerah pada tahun 2022 tumbuh positif pada angka 4,4 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut mengalami perlambatan jika dibandingkan pada tahun 2022 yang sebesar 5,05 persen. Hal ini disebabkan oleh adanya perlambatan kinerja subkategori Industri Logam Dasar sebagai salah satu penyumbang terbesar kategori ini serta rendahnya

harga logam timah di pasar dunia berdampak pada pengurangan produksi baik bijih maupun logam timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini juga terlihat pada perlambatan kinerja lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yang pada tahun 2022 tumbuh sebesar 0,37 persen setelah pada tahun sebelumnya tumbuh sebesar 6,87 persen.

### 3.1.4 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang terjadi dan berkembang serta memperhatikan kerangka ekonomi makro pada kurun waktu 2018-2021, kebijakan ekonomi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 akan difokuskan pada tujuan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dengan sasaran, antara lain:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan indikator kinerja tujuan yaitu laju pertumbuhan ekonomi yang diintervensi dengan sasaran:
    a. meningkatkan PDRB sub sektor pertanian, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator laju pertumbuhan PDRB sub sektor pertanian;
    b. meningkatkan PDRB sub sektor perikanan, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator laju pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan;
    c. meningkatkan kunjungan wisatawan asing dan domestik, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator laju pertumbuhan kunjungan wisatawan asing dan domestik;
    d. meningkatkan PDRB sektor pertambangan dan penggalian, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator laju pertumbuhan PDRB sektor pertambangan dan penggalian;
    e. meningkatkan PDRB sektor industri pengolahan, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan.
    f. meningkatkan PDRB sub sektor perdagangan, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator laju pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan.
2. Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat yang diukur dengan indikator kinerja tujuan indeks gini yang diintervensi dengan sasaran:
    a. menurunkan tingkat pengangguran, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator tingkat pengangguran terbuka;
    b. menurunkan tingkat kemiskinan, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator angka kemiskinan;

Untuk mencapai indikator tujuan tersebut dapat dilaksanakan melalui penguatan pertumbuhan ekonomi, yaitu:

1. Peningkatan kesadaran dan pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan untuk menekan penyebaran Covid-19. Upaya sosialisasi dan strategi komunikasi kepada masyarakat untuk mendukung implementasi peraturan daerah terkait pencegahan dan pengendalian Covid-19 menjadi hal yang prioritas.
2. Memastikan kelancaran distribusi vaksin dan booster kepada masyarakat sesuai prioritas tahapan program vaksinisasi. Dalam alur distribusi vaksin perlu menjadi perhatian lebih

lanjut terutama terkait dengan mekanisme penyimpanan untuk meminimalisir kerusakannya.

3. Percepatan transformasi ekonomi digital di berbagai sektor ekonomi sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan model bisnis baru akibat pandemi Covid-19. Percepatan transformasi digital bagi pelaku usaha dengan berbasis pada penguatan inovasi dan optimalisasi sistem. Transformasi digital juga diarahkan untuk digitalisasi produk dan layanan publik.
4. Optimalisasi dan percepatan realisasi belanja pemerintah dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi untuk mendorong meningkatnya daya beli masyarakat dan kembalinya aktivitas usaha. Belanja daerah difokuskan pada program yang memberikan *return* dan dampak *multiplier* yang optimal.
5. Mendorong fungsi intermediasi perbankan mencakup perluasan akses kredit/pembiayaan melalui pemanfaatan program PEN, optimalisasi restrukturisasi kredit/pembiayaan dan melakukan *business matching* dengan pelaku usaha potensial.
6. Optimalisasi peluang ekspor non timah sebagai penopang menurunnya lebih lanjut kinerja ekspor luar negeri Bangka Belitung karena menurunnya ekspor timah. Komoditas ekspor yang memiliki potensi tinggi untuk berkembang antara lain dari sektor pertanian seperti ekspor CPO, karet, lada, cassava dan produk perikanan (udang vaname) yang tercatat masih membaik. Penguatan ekspor juga ditunjukkan kepada produk-produk UMKM potensial seperti produk makanan olahan ikan dan kerajinan (batik, tenun, dan kerajinan kriya).
7. Penguatan kinerja UMKM melalui perluasan akses pasar, perluasan akses pembiayaan dan penguatan *go digital*. Hal ini penting karena UMKM memiliki peran signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Bangka Belitung. Perluasan akses pasar ditujukan baik untuk pasar domestik maupun pasar ekspor melalui kegiatan promosi dan kerjasama perdagangan. Penguatan akses pembiyaan melalui pemanfaatan stimulus kredit dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), optimalisasi kredit usaha rakyat dan *business matching* antara pelaku usaha dengan perbankan. Penguatan UMKM *go* digital melalui pemanfaatan pemasaran secara digital dan penggunaan sarana pembayaran non tunai.

## 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pelaksanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari perencanaan dan penganggaran program-program prioritas yang berkualitas. Salah satu komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan adalah perencanaan kebijakan keuangan daerah, sehingga diperlukan analisis terkait kondisi dan proyeksi keuangan daerah untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam kerangka keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-

undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kebijakan dalam pengelolaan APBD memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah karena APBD merupakan salah satu instrumen penting kebijakan fiskal daerah. Kebijakan desentralisasi fiskal daerah mengandung tiga misi utama yaitu:

1. menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya;
2. meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat; dan
3. memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Sedangkan tiga fungsi utama kebijakan fiskal yaitu sebagai alat stabilisasi ekonomi, alat distribusi pendapatan, dan alat alokasi anggaran. Sebagai alat stabilisasi ekonomi, kebijakan fiskal memainkan perannya dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan laju inflasi yang pada gilirannya berpengaruh positif dalam pencapaian ekspansi ekonomi tinggi. Sebagai alat distribusi pendapatan, fungsi kebijakan fiskal tercermin sebagai media dalam penarikan pajak dari masyarakat di mana orang kaya akan membayar pajak lebih tinggi dibandingkan orang miskin. Sedangkan, fungsi kebijakan fiskal sebagai alat alokasi anggaran tercermin dari kualitas anggaran dalam APBD.

Selain memprioritaskan pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal, pemerintah hendaknya juga mendukung dan melaksanakan kebijakan reformasi dalam administrasi keuangan daerah, antara lain tercermin dari penyusunan anggaran berbasis kinerja, sebagai salah satu langkah perubahan dalam upaya membangun sebuah pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, pengelolaan APBD harus melalui tiga tahapan penting yaitu mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian. Dalam paradigma baru dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, perencanaan harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

1. berorientasi pada kepentingan publik/masyarakat luas;
2. disusun berdasarkan pendekatan kinerja;
3. mempunyai keterkaitan yang erat antara pengambil kebijakan (*decisionmaker*) di DPRD dengan perencanaan operasional oleh pemerintah daerah dan penganggaran pada unit kerja Perangkat Daerah (PD); dan
4. terdapat upaya-upaya untuk mensinergikan hubungan antara APBD, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, lembaga pengelola keuangan daerah dan unit-unit pengelola layanan publik dalam pengambilan keputusan.

Mobilisasi pendapatan, penetapan alokasi belanja daerah, dan mobilisasi pembiayaan merupakan pengelolaan keuangan yang telah dilaksanakan di daerah . Untuk memenuhi *sufficient condition* bagi pengelolaan keuangan daerah yang baik, maka daerah perlu memahami dan menggali potensi atau keunggulan daerah serta mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan yang ada. Daerah juga perlu menentukan arah pembangunannya dalam rencana tahunan, jangka menengah hingga jangka panjang yang masing-masing dituangkan ke dalam RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD), dan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah). Selain ketersediaan sumber-sumber

pembiayaan yang ideal, alokasi belanja daerah sangat ditentukan oleh prioritas-prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam ketiga dokumen perencanaan tersebut.

Kebijakan pengelolaan keuangan yang telah dilakukan pada tahun 2022 dan 2023 masih difokuskan untuk mendukung kebijakan pusat dalam percepatan pemulihan ekonomi dan kesehatan masyarakat. Dengan kondisi pandemi Covid-19 yang sudah diyakini mereda dengan adanya kebijakan vaksinisasi dan *booster,* namun penganggaran tetap dengan prioritas perbaikan ekonomi serta SDM pasca pandemi Covid-19*.*

Dalam rangka upaya untuk mencapai seluruh rencana yang ada pada dokumen perencanaan lima tahunan dan satu tahunan, perlu ditetapkan arah pengelolaan keuangan daerah. Pada tahun 2024, kebijakan pengelolaan keuangan dalam pembiayaan program dan kegiatan pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diarahkan untuk mendukung arah kebijakan pembangunan dalam RPD Tahun 2024 dan tema RKP nasional Tahun 2024 yaitu "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", yang memuat 8 (delapan) arah kebijakan pembangunan nasional yang meliputi: (1)Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; (2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan; (3) Revitalitasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;(4) Penguatan Daya Saing Usaha; (5) Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;(6)Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;(7)Pembangunan Ibu Kota Nusantara;(8) Pelaksanaan Pemilu 2024.

### 3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 13 merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait.

Pendapatan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dikelompokkan atas:

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD pada umumnya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah;

b) Pendapatan Transfer, yaitu dana yang bersumber dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa. Untuk transfer antar daerah terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan;

c) lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat, dan/atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari berbagai komponen pendapatan daerah, sumber utama penerimaan daerah adalah pajak kendaraan bermotor dan pajak rokok. Hal ini menunjukkan bahwa perlu segera dilakukan upaya-upaya terobosan untuk mencari sumber-sumber alternatif pendapatan lainnya yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sumber penerimaan

daerah, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari pajak daerah yang bersifat "*limitative*". Hal yang sama juga terjadi pada penerimaan pendapatan transfer yang menunjukkan kecenderungan menurun. Hal ini, antara lain disebabkan oleh hilangnya potensi komponen dana bagi hasil pajak bersumber dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pajak bumi dan bangunan yang diserahkan kepada kabupaten atau kota.

Berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan serta prospek perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 dan 2024 sebagaimana telah diuraikan pada subbab sebelumnya, maka untuk analisa dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebagaimana tertuang di dalam tabel realisasi dan proyeksi atau target pendapatan daerah pada Tabel III.11 berikut ini:

**Tabel III.10**
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2021 s.d. Tahun 2024

| NO | URAIAN | Realisasi APBD 2021 | Realisasi APBD 2022 | Proyeksi APBD 2023 | Proyeksi APBD 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| **1.** | **PENDAPATAN DAERAH** | **2.708.948.573.048,25** | **2.853.460.718.161,51** | **2.626.618.295.546,00** | **2.518.767.327.741,00** |
| **1.1** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | **895.763.028.991,25** | **1.082.132.753.621,51** | **1.038.304.939.546,00** | **1.041.594.147.900,00** |
| 1.1.01 | Pendapatan Pajak Daerah | 813.809.911.776,58 | 981.797.238.331,60 | 848.653.198.396,00 | 906.693.248.600,00 |
| 1.1.02 | Pendapatan Retribusi Daerah | 5.945.520.845,00 | 7.568.838.370,00 | 13.609.682.900,00 | 55.262.836.200,00 |
| 1.1.03 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 5.714.380.624,89 | 6.244.489.812,28 | 6.500.000.000,00 | 10.527.934.600,00 |
| 1.1.04 | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 70.293.215.744,78 | 86.522.187.107,63 | 169.542.058.250,00 | 69.110.128.500,00 |
| **1.2** | **PENDAPATAN TRANSFER** | **1.750.322.876.331,00** | **1.771.327.964.540,00** | **1.588.313.356.000,00** | **1.477.173.179.841,00** |
| **1.2.01** | **Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan** | **1.693.883.879.331,00** | **1.713.196.797.540,00** | **1.588.313.356.000,00** | **1.477.173.179.841,00** |
| **1.2.02** | **Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya** | **56.438.997.000,00** | **58.131.167.000,00** | **-** | **-** |
| **1.2.03** | **Transfer Pemerintah Daerah** | - | **-** | **-** | **-** |
| **1.3** | **LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH** | **62.862.667.726,00** | - | - | - |
| 1.3.01 | Hibah | 62.862.667.726,00 | - | - | - |
| 1.3.02 | Dana Darurat | | - | - | - |
| 1.3.03 | Pendapatan Lainnya | | - | - | - |
| | **Jumlah pendapatan Daerah** | **2.708.948.573.048,25** | **2.853.460.718.161,51** | **2.626.618.295.546,00** | **2.518.767.327.741,00** |

*Sumber: LRA Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Proyeksi Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (data diolah)*

### 3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah meliputi kebijakan peningkatan pendapatan daerah dan kebijakan belanja daerah. Dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan daerah, kinerja belanja daerah dan kinerja pembiayaan daerah, kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana diuraikan berikut ini:

#### 3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam rangka menggali dan menghimpun potensi pendapatan daerah, kebijakan pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2024 diarahkan melalui optimalisasi sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pajak dan retribusi daerah, pendayagunaan aset daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan bagi hasil pajak, bukan pajak serta peningkatan kerjasama pemerintah dan swasta.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah dilakukan dengan cara:

1. memperluas basis penerimaan antara lain yaitu dengan mengidentifikasi pembayar pajak baru atau potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan;
2. memperkuat proses pemungutan dengan mempercepat penyusunan peraturan-peraturan daerah, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi, peningkatan sumber daya manusia yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi tersebut;
3. melakukan inovasi dalam intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan;
4. meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
5. meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan secara insidentil dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak;
6. meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan dengan memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan;
7. meningkatkan peran dan fungsi UPT, UPPD dan balai penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan; dan
8. meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah.

Adapun kebijakan untuk meningkatkan pendapatan transfer sebagai upaya memperkuat kapasitas fiskal daerah dilakukan dengan cara:

1. mengoptimalkan penerimaan dari: Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21, pajak ekspor, dan PPh Badan;
2. meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana perimbangan; dan
3. meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota.

Dalam rangka pencapaian upaya peningkatan pendapatan daerah tersebut, beberapa strategi yang harus diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain sebagai berikut:

1. Strategi pencapaian target peningkatan PAD:
    a. penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan;
    b. pelaksanaan pemungutan atas objek pajak atau retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
    c. pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
    d. melaksanakan pelayanan secara khusus untuk lebih memperhatikan masyarakat pembayar pajak, serta memberikan kemudahan masyarakat dalam membayar pajak melalui *drivethru*, gerai samsat dan samsat *online/mobile*, layanan SMS, dan pengembangan samsat *outlet*;
    e. mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik di beberapa kantor bersama;
    f. penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
    g. revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya agar dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, serta mengoptimalkan peran badan pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan;
    h. optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah;
    i. melakukan pembinaan secara teknis fungsional dalam upaya peningkatan fungsi dan peran PD sebagai unit kerja penghasil di bidang pendapatan daerah; dan
    j. melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan kabupaten atau kota termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan pendapatan daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan PD penghasil.
2. Strategi pencapaian target pendapatan transfer:
    a. sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
    b. peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerja sama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan bagi hasil.
    c. peningkatan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam perhitungan *lifting* migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi;

d. peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran dana bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak, DAU, dan DAK.

#### 3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah diarahkan pada *money follow program priority* yang akan memprioritaskan program atau kegiatan wajib atau mengikat (gaji pegawai, air minum, listrik, air bersih, dan lainnya), kegiatan yang memprioritaskan pada prioritas pembangunan utama (pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan, pembangunan SDM, pembangunan demokrasi) dan program/ kegiatan prioritas yang menunjang pembangunan (pembangunan wilayah dan pemerataan pendapatan masyarakat serta pembangunan pemerintahan). Lebih lanjut belanja pembangunan diarahkan untuk belanja pendukung yang secara spesifik diberikan sebatas kemampuan keuangan daerah mencukupi.

Arah kebijakan belanja daerah juga diarahkan secara fokus pada pendekatan kewilayahan dengan mengedepankan lokus dan fokus pembangunan secara lebih jelas, serta memperhatikan kebutuhan investasi yang secara spesifik harus didekatkan dengan karakteristik wilayah, serta kebutuhan suatu wilayah, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi tematik pembangunan khususnya pada masing-masing kabupaten atau kota secara administratif. Belanja pembangunan tidak hanya memperhatikan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun juga harus memperhatikan anggaran yang bersumber dari APBN, kerjasama pemerintah dan swasta, peran CSR, dan sumber pendanaan lainnya dengan konsep pembangunan yang terintegrasi.

Struktur belanja dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah) dengan uraian sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan belanja yang dianggarkan untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. yang terdiri dari dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Berikut ini merupakan uraian dari belanja operasi yang dianggarkan:

1.) Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Belanja Pegawai pada tahun 2023 dan 2024 diproyeksikan sama sebesar Rp945.162.580.474,00.

2.) Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang atau jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang atau jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada Masyarakat atau pihak ketiga dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah. Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp1.096.369.045.753,03 meningkat dari proyeksi tahun 2023 yang dialokasikan sebesar Rp939.259.037.796,00.

3.) Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman. Pada tahun 2023 dan 2024 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak memproyeksikan anggaran belanja bunga.

4.) Belanja Subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik Negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Sama halnya dengan belanja bunga pada tahun 2023 dan 2024 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak memproyeksikan anggaran belanja subsidi.

5.) Belanja Hibah digunakan menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja Hibah pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp118.229.797.352,00 meningkat dari proyeksi tahun 2023 yang dialokasikan sebesar Rp105.364.852.379,00.

6.) Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Belanja Bantuan Sosial pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp2.865.097.600,00 meningkat dari proyeksi tahun 2023 yang dialokasikan sebesar Rp2.137.430.800,00.

b. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pada tahun 2023 belanja modal diproyeksikan alokasi anggarannya sebesar Rp491.999.213.459,00, kemudian diproyeksikan mengalami peningkatan alokasi menjadi sebesar Rp 501.723.278.541,44 di tahun 2024 yang diarahkan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah. Adapun jenis belanja modal adalah sebagai berikut:

1.) Belanja Tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

2.) Belanja Peralatan dan Mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3.) Belanja Bangunan dan Gedung digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

4.) Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

5.) Belanja Aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok lain dan diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

6.) Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

c. Belanja Tak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja tak terduga pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp75.000.000.000,00 meningkat dari proyeksi tahun 2023 yang dialokasikan sebesar Rp 52.299.481.013,00.

d. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, yang terdiri dari jenis belanja:

1.) Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kota atau pendapatan kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki. Belanja Bagi Hasil pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp550.000.000.000,00 meningkat dari proyeksi tahun 2023 yang dialokasikan sebesar Rp358.607.023.000,00.

2.) Belanja Bantuan Keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait. Bantuan keuangan yang dimaksud terdiri atas Bantuan Keuangan antar-Daerah provinsi, Bantuan Keuangan antar-Daerah kabupaten/kota, Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya, Bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya, dan/atau Bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa. Belanja Bantuan Keuangan pada tahun 2023 dan 2024 diproyeksikan sama sebesar Rp67.464.300.000,00.

Berikut ini pada Tabel III.12 disajikan rincian realisasi dan proyeksi belanja daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah.

**Tabel III.11**

Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 s.d. Tahun 2024

| NO | URAIAN | Realisasi APBD 2021 | Realisasi APBD 2022 | Proyeksi APBD 2023 | Proyeksi APBD 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| **2.** | **BELANJA DAERAH** | **2.465.813.370.118,62** | **2.403.751.230.857,41** | **2.962.293.918.921,00** | **3.255.514.846.561,47** |
| **2.1** | **BELANJA OPERASI** | **1.682.056.492.509,43** | **1.575.415.353.795,41** | **1.991.923.901.449,00** | **2.061.327.268.020,03** |
| 2.1.01 | Belanja Pegawai | 798.499.351.410,01 | 855.824.607.357,00 | 945.162.580.474,00 | 945.162.580.474,00 |
| 2.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 591.600.928.732,42 | 624.702.079.967,41 | 939.259.037.796,00 | 995.069.792.594,03 |
| 2.1.03 | Belanja Bunga | - | - | - | |
| 2.1.04 | Belanja Subsidi | - | 1.981.451.856,00 | - | - |
| 2.1.05 | Belanja Hibah | 290.268.684.767,00 | 90.042.117.015,00 | 105.364.852.379,00 | 118.229.797.352,00 |
| 2.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 1.687.527.600,00 | 2.865.097.600,00 | 2.137.430.800,00 | 2.865.097.600,00 |
| **2.2** | **BELANJA MODAL** | **428.654.245.651,53** | **351.697.572.110,00** | **491.999.213.459,00** | **501.723.278.541,44** |
| **2.3** | **BELANJA TIDAK TERDUGA** | **5.182.540.454,00** | **6.320.800.000,00** | **52.299.481.013,00** | **75.000.000.000,00** |
| **2.4** | **BELANJA TRANSFER** | **349.920.091.503,66** | **470.317.504.952,00** | **426.071.323.000,00** | **617.464.300.000,00** |
| **2.4.01** | **Belanja Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota** | **314.048.588.503,66** | **438.218.171.619,00** | **358.607.023.000,00** | **550.000.000.000,00** |
| **2.4.02** | **Belanja Bantuan Keuangan** | **35.871.503.000,00** | **32.099.333.333,00** | **67.464.300.000,00** | **67.464.300.000,00** |
| | **Total Jumlah Belanja** | **2.465.813.370.118,62** | **2.403.751.230.857,41** | **2.962.293.918.921,00** | **3.255.514.846.561,47** |
| | **Defisit murni / (surplus)** | **243.135.202.929,63** | **449.709.487.304,10** | **(335.675.623.375,00)** | **(736.747.518.820,47)** |

*Sumber: LRA Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Proyeksi Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (data diolah)*

Kebijakan belanja daerah tahun 2024 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, dengan melalui sebagai berikut.

1. meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan sosial. Esensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan sosial oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perda APBD secara tepat waktu pula.
2. meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel.
3. mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari total belanja daerah (APBD) tahun 2023 dalam rangka peningkatan indeks pendidikan meliputi Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah (AMH dan RLS). Sesuai dengan UUD Tahun 1945 Pasal 31 Ayat (4) menyatakan "negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional". Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 49 Ayat (1) menyatakan "dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)".
4. mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sebesar 10% sesuai perintah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 171 Ayat (2) menyatakan: "besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten atau kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji", guna peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan.
5. mengalokasikan kebutuhan belanja *fixed cost, regular cost*, dan *variable cost* secara terukur dan terarah, yaitu:
    a. pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, internet, dan pemeliharaan kendaraan);
    b. pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan TUPOKSI Perangkat Daerah, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dan evaluasi;
    c. pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan Perangkat Daerah;
    d. program atau kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (*committed budget*).
6. meningkatkan alokasi anggaran yang makin diorientasikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
7. penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan dalam penentuan anggaran belanja dengan tujuan dan sasaran pada rencana pembangunan daerah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur.

### 3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil investasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Sedangkan pengeluaran pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Untuk pengeluaran pembiayaan pada tahun 2024 pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalokasikan anggaran untuk Penyertaan Modal (Investasi Daerah) sebesar Rp15.000.000.000,00 dan Pembayaran Pokok Utang sebesar Rp83.193.051.192,00 .

Arah kebijakan penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 sebagaimana yang tergambar pada Tabel III.13, diarahkan pada:

1. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah;
2. meningkatkan pembentukan tak terduga untuk mengantisipasi apabila terjadi kejadian luar biasa pada tahun 2024.

**Tabel III.12**
Realisasi dan Proyeksi/Target
Pembiayaan Daerah Tahun 2021 s.d. Tahun 2024

| NO | URAIAN | Realisasi APBD 2021 | Realisasi APBD 2022 | Proyeksi APBD 2023 | Proyeksi APBD 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| **3.** | **PEMBIAYAAN DAERAH** | | **516.699.144.519,00** | **418.868.674.567,00** | **819.940.570.012,47** |
| **3.1** | **Penerimaan pembiayaan** | **202.422.601.374,62** | **526.699.144.519,00** | **418.868.674.567,00** | **834.940.570.012,47** |
| 3.1.1 | Pengunaaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) | 49.536.738.602,62 | 443.619.025.519,00 | 418.868.674.567,00 | 834.940.570.012,47 |
| 3.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | - | - | - | - |
| 3.1.3 | Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan | - | - | - | - |
| 3.1.4 | Penerimaan Pinjaman daerah | 152.885.862.772,00 | 83.080.119.000,00 | - | - |
| 3.1.5 | Penerimaan kembali pemberian pinjaman | - | - | - | - |
| 3.1.6 | Penerimaan piutang daerah | - | - | - | - |
| | **Jumlah Penerimaan Pembiayaan** | **202.422.601.374,62** | **526.699.144.519,00** | **418.868.674.567,00** | **834.940.570.012,47** |
| **3.2** | **Pengeluaran pembiayaan** | **1.938.878.785,44** | **30.821.106.123,00** | **83.193.051.192,00** | **98.193.051.192,00** |
| 3.2.1 | Pembentukan Dana cadangan | - | - | - | - |
| 3.2.2 | Penyertaan modal (Investasi) daerah | - | 10.000.000.000,00 | - | 15.000.000.000,00 |
| 3.2.3 | Pembayaran Pokok Pinjaman | 1.938.878.785,44 | 20.821.106.123,00 | 83.193.051.192,00 | 83.193.051.192,00 |
| 3.2.4 | Pemberian Pinjaman Daerah | - | - | - | - |
| | **Jumlah Pengeluaran Pembiayaan** | **1.938.878.785,44** | **30.821.106.123,00** | **83.193.051.192,00** | **98.193.051.192,00** |
| | **Jumlah Pembiayaan Netto** | **200.483.722.589,18** | **495.878.038.396,00** | **335.675.623.375,00** | **736.747.518.820,47** |
| | **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)** | **443.618.925.518,81** | **945.587.525.700,10** | **-** | **-** |

*Sumber: LRA Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Proyeksi Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (data diolah)*

# BAB IV
# SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

## 4.1. Tema, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

### 4.1.1 Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 menjadi bagian perencanaan yang krusial dikarenakan tahun 2024 merupakan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026. Sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, maka bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2022 atau Tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD yang akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD, maka Gubernur menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026, selanjutnya Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Provinsi Tahun 2024. Terkait hal tersebut, beberapa dasar yang menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan tema perencanaan pembangunan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran Visi dan Misi Presiden terpilih hasil pemilihan Presiden pada tanggal 17 April 2019, yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Visi Pembangunan RPJMN ke IV Tahun 2020-2024 adalah **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"** yang dituangkan dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional. Agenda Pembangunan Nasional tersebut telah sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Terdapat 4 (empat) pilar untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu: **Pilar Pertama** Kelembagaan politik dan hukum yang mantap; **Pilar Kedua** Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; **Pilar Ketiga** Struktur ekonomi yang semakin maju dan

kokoh; dan **Pilar Keempat** Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas.

**Gambar IV.1**
7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024



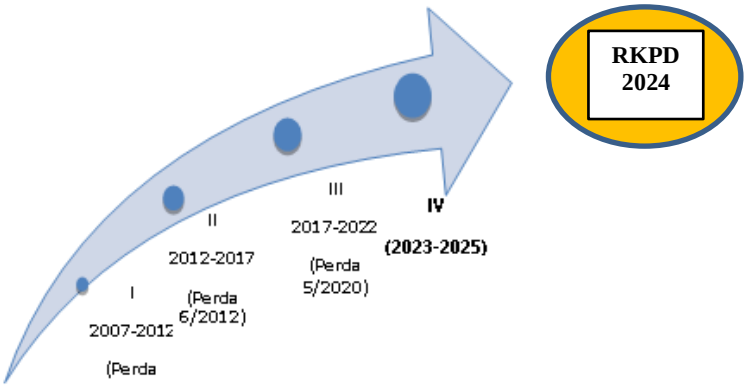

*Sumber: RPJMN 2020-2024, 2022*

## B. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2022 merupakan tahun terakhir penyusunan perencanaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 dan Tahap III (Ketiga) pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025. Prioritas pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahap ke III ini adalah **"Meningkatnya Ekonomi Daerah Dan Terpenuhinya Kapasitas Dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)".** Fokus pembangunan pada tahap ketiga RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005-2025 adalah pada upaya menjaga dan meningkatkan perekonomian daerah serta upaya pemenuhan kapasitas dan kualitas SDM. Pada tahapan ini, peningkatan perekonomian daerah, perlu diberikan perhatian pada upaya memberikan nilai tambah hasil produk unggulan provinsi. Sementara itu, pengembangan kualitas SDM (dalam semua aspek) menjadi perhatian sejalan dengan upaya untuk semakin memantapkan pembangunan ekonomi daerah. Posisi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023 dari target pembangunan tahun terakhir pada Tahap ke III Periode RPJDP 2005-2025 dapat dilihat pada Gambar IV.2

**Gambar IV.2**

Posisi Dokumen RKPD Tahun 2024 Terhadap RPJPD dan Tahun 2016-2023

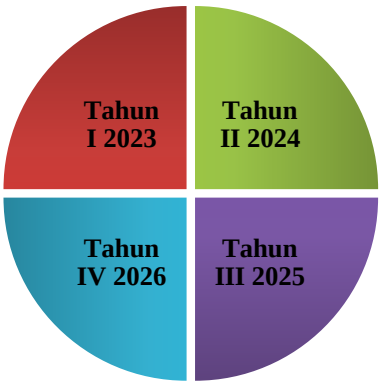



*Sumber: RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022 (diolah)*

## C. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026

Sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, maka bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2022 atau Tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD yang akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD, maka Gubernur menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026, selanjutnya Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Provinsi Tahun. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024 merupakan tahun kedua dari penjabaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

**Gambar IV.3**
Posisi Dokumen RKPD Tahun 2024 Terhadap RPD 2023-2026




*Sumber: RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022 (diolah)*

Keselarasan antara Prioritas Pembangunan Nasional dan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel IV.1**

Ketersediaan dukungan program daerah untuk mendukung program prioritas Nasional (PN) RPJMN sesuai kewenangan daerah

| No | Prioritas Nasional | Program Prioritas | PRIORITAS DAERAH | PROGRAM PRIORITAS DAERAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Berkualitas dan Pertumbuhan yang Berkeadilan | Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT) | Meningkatnya Ekonomi Daerah | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN |
| | | Peningkatan kuantitas / ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi | | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN |
| | | | | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN |
| | | Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN |
| | | | | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT |
| | | | | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN |
| | | | | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN |
| | | | | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN |
| | | | | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN |
| | | | | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN |
| | | | | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER |
| | | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN |
| | | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN |
| | | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN |
| | | Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA |
| | | | | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL |
| | | | | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | | Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil menengah (UMKM), dan koperasi | | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA |
| | | | | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA |
| | | | | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA |
| | | | | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM |
| | | | | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI |
| | | | | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI |
| | | | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN |
| | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI |
| | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) |
| | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM |
| | | Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di industrialisasi | | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL |
| | | | | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL |
| | | | | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL |
| | | | | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL |

| No | Prioritas Nasional | Program Prioritas | PRIORITAS DAERAH | PROGRAM PRIORITAS DAERAH |
|---|---|---|---|---|
| | | sektor riil, dan | | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL |
| | | | | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI |
| | | | | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL |
| | | | | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA |
| | | | | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL |
| | | | | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA |
| | | Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) | | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR |
| | | | | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA |
| | | | | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA |
| | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) |
| | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM |
| | | | | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI |
| | | | | PROGRAM KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG JASA |
| | | Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi | | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL |
| | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF |
| | | | | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA |
| | | | | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING |
| | | | | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN |
| | | | | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN |
| | | | | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN |
| | | | | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN |
| 2 | Membangun Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan | Pembangunan wilayah Sumatera | Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA |
| | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI |
| | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT |
| | | | | PROGRAM PENATAAN DESA |
| | | | | PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA |
| | | | | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA |
| | | | Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi | PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH |
| | | | | PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH |
| 3 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing | Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan | Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK |
| | | | | PROGRAM PENCATATAN SIPIL |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN |
| | | | | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK |
| | | | | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) |
| | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) |
| | | Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL |
| | | | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL |
| | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL |
| | | | | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN |

| No | Prioritas Nasional | Program Prioritas | PRIORITAS DAERAH | PROGRAM PRIORITAS DAERAH |
|---|---|---|---|---|
| | | | | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN |
| | | Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |
| | | | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN |
| | | | | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN |
| | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN |
| | | Peningkatan pemerataan layanan Pendidikan berkualitas | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN |
| | | | | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN |
| | | | | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO |
| | | | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP |
| | | | | PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP |
| | | Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda | | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| | | | | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN |
| | | | | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA |
| | | | | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) |
| | | | | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK |
| | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN |
| | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN |
| | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN |
| | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN |
| | | Pengentasan kemiskinan | | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL |
| | | | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN |
| | | | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL |
| | | | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL |
| | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL |
| | | Peningkatan produktivitas dan daya saing | | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA |
| | | | | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA |
| | | | | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA |
| | | | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN |
| | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI |
| | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) |
| | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM |
| | | | | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN |
| | | | | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN |
| | | | | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN |
| | | | | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN |
| 4 | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Revolusi mental dan pembinaan ideologi pancasila untuk memperkukuh ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, | Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi. | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN |
| | | | | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL |
| | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN |
| | | | | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK |
| | | | | PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI |

| No | Prioritas Nasional | Program Prioritas | PRIORITAS DAERAH | PROGRAM PRIORITAS DAERAH |
|---|---|---|---|---|
| | | dan berkarakter | | PEMBANGUNAN DAERAH |
| | | | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | | | | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | | | | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD |
| | | | | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM |
| | | | | PROGRAM FASILITASI BANTUAN HUKUM |
| | | | | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH |
| | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH |
| | | | | PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG |
| | | | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN |
| | | | | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | | | | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI |
| | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN |
| | | | | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI |
| | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |
| | | Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memengaruhi arah perkembangan peradaban dunia | Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN |
| | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL |
| | | | | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH |
| | | | | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN |
| | | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA |
| | | Peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter | | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN |
| | | | | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO |
| | | | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP |
| | | | | PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP |
| 5 | Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar | Infrastruktur pelayanan dasar | Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM |
| | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE |
| | | Infrastruktur ekonomi | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |
| | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN |
| | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG |
| | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI |
| | | | | PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM |
| | | | | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN |

| No | Prioritas Nasional | Program Prioritas | PRIORITAS DAERAH | PROGRAM PRIORITAS DAERAH |
|---|---|---|---|---|
| | | | | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN |
| | | Infrastruktur perkotaan (khusus penilaian provinsi dan kota) | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG |
| | | | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA |
| | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN |
| | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) |
| | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN |
| | | | | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM |
| | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE |
| | | | | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | | Energi dan ketenagalistrikan (khusus penilaian provinsi) | | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN |
| | | Transformasi digital | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA |
| | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL |
| | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI |
| 6 | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim | Peningkatan kualitas lingkungan hidup | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) |
| | | | | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) |
| | | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) |
| | | | | PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MAYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH |
| | | | | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT |
| | | | | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT |
| | | | | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN |
| | | Peningkatan ketahanan bencana dan iklim | | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA |
| | | | | PROGRAM PENANGANAN BENCANA |
| | | | | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN |
| | | Pembangunan rendah karbon | | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) |
| | | | | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) |
| | | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) |

## D. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi (RTRWP) Tahun 2014-2034

Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (RTRWP) Tahun 2014-2034 merupakan pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berfungsi sebagai arahan struktur dan pola ruang, pemanfaatan sumber daya, dan pembangunan daerah serta penyelaras kebijakan penataan ruang nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034, tujuan penataan ruang provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah "Mewujudkan Tata Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Terpadu, Berimbang dan Berkeadilan Berbasis Agro-Bahari Untuk Menunjang Pariwisata Serta Pengendalian Wilayah Pertambangan Untuk Menjamin Pembangunan Yang Berkelanjutan".

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pembangunan Daerah Tahun 2022 dilaksanakan dalam rangka: (1) Penguatan karakter dan potensi unggulan pusat-pusat pertumbuhan dalam suatu sistem perkotaan yang terpadu; (2) Pengembangan ekonomi wilayah melalui perwilayahan komoditas unggulan yang berdaya saing tinggi berbasis agro-bahari; (3) Pengembangan sektor industri pengolahan hasil agro-bahari yang di dukung infrastruktur yang memadai; Pengembangan kepariwisataan yang berbasis budaya lokal, *heritage* dan bahari serta ramah lingkungan; (4) Pengelolaan pertambangan yang lebih ramah lingkungan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal; (5) Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang mendorong penguatan fungsi-fungsi pusat pertumbuhan dan produktivitas lahan; dan (6) Penciptaan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan antar fungsi ruang dengan basis pembangunan berkelanjutan.

## E. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040 ditetapkan pada tanggal 27 April 2020 dalam bentuk Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020. RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan perencanaan yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar menjadi lebih terintegrasi dan terarah guna mencapai pelaksanaan tujuan pembangunan daerah yang adil dan merata. RZWP3K selanjutnya menjadi bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Kebijakan RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meliputi: (a) mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perairan laut Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; (b) menciptakan kepastian hukum dalam pemanfaatan sumber daya di perairan laut Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan (c) mengendalikan pemanfaatan sumber daya perairan laut Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara efektif, tertib dan berkelanjutan. Di dalam RZWP3K, diatur penggunaan rencana alokasi ruang laut, yang meliputi: (1) Kawasan Pemanfaatan Umum; (2) Kawasan Konservasi; (3) Alur Laut; dan (4) Kawasan Strategis Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 mengacu pada

RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040 sebagai pedoman dalam perencanaan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

## F. Rencana Kerja Pemerintah RI Tahun 2024

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

RKPD disusun dengan berpedoman kepada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, isu strategis nasional yang sedang berkembang, pelayanan dasar, visi, misi, dan program kepala daerah serta tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024 ”Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
3. Revitalitasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
4. Penguatan Daya Saing Usaha;
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
7. Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Secara rinci 8 (delapan) arah kebijakan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Arah kebijakan Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang ditandai dengan pencapain:
   a. Tingkat Kemiskinan: 6,5-7,5%;
   b. Tingkat kemiskinan ekstrem: 0-1%.

   Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
   - MP Reformasi Sistem Perlindungan Sosial.
2. Arah kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita: 14%;
   b. Insidensi tuberkulosis: 297 per 100.000 penduduk;

c. Jumlah kabupaten/kota dengan intensifikasi upaya eliminasi malaria: 95 kabupaten/kota;

d. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta: 514 kabupaten/kota;

e. Nilai rata-rata hasil PISA: (a) Membaca: 396 b) Matematika: 388 (c) Sains 402.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

- MP Reformasi Sistem Kesehatan Nasional;
- MP Refomasi Pendidikan Keterampilan (Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0);
- MP Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting.

3. Arah Kebijakan Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan, yang ditandai dengan pencapaian:

   a. Pertumbuhan PDB industri pengolahan: 5,4%- 5,8% per target RPJMN 8,1%;
   b. Kontribusi PDB industri pengolahan: 19,9%- 20,5% per Target RPJMN 21,0%.

   Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

   - MP Kawasan Industri Prioritas dan Smelter;
   - MP Pengelolaan Terpadu UMKM;
   - MP Destinasi Pariwisata Prioritas;
   - MP Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan);
   - MP Transformasi Digital.

4. Arah kebijakan Penguatan Daya Saing Usaha, yang ditandai dengan pencapaian:

   a. Pertumbuhan Investasi (PMTB): 6,2%-7%;
   b. Nilai devisa pariwisata: USD 7,38–13,08 miliar.

   Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

   - MP Pengelolaan Terpadu UMKM;

5. Arah kebijakan Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi, yang ditandai dengan pencapaian:

   a. Persentase Penurunan emisi GRK kumulatif: 27,27%;
   b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer Nasional: 19,5%

   Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain: MP Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3;

   - MP Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi.

6. Arah kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas, yang ditandai dengan pencapaian:
    a. Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/kabupaten-kota: 95%/74%/64%;
    b. Persentase Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman: 92,76% akses layak dan 15% akses aman;
    c. Persentase Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan: 25,53%;
    d. Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman: 86 % akses layak termasuk 12 % akses aman;
    e. Jumlah Bandara Baru yang Dibangun (kumulatif): 12 lokasi;
    f. Rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik: 1.400 kwh/kapita.

    Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
    - MP Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah);
    - MP Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90 Persen Rumah Tangga);
    - MP Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu.
7. Arah kebijakan Pembangunan Ibu Kota Nusantara, yang ditandai dengan pencapaian:

    Luas area pembangunan Ibu Kota Nusantara: 3.399 Ha dalam 6.671 Ha KIPP, yang ditandai dengan pencapaian:
    a. Persentase Pembangunan di Kawasan Istana Presiden: 100%;
    b. Persentase Pembangunan Kantor Kementerian Koordinator: 100%;
    c. Persentase Pembangunan Hunian ASN dan HANKAM: 100%.

    Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
    - MP Ibu Kota Nusantara;
    - MP Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay.
8. Arah kebijakan Pelaksanaan Pemilu 2024, yang ditandai dengan pencapaian:
    a. Jumlah Satker KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota yang menyelenggarakan Pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal: 553 satker.

    Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
    - Didukung oleh proyek-proyek prioritas.

## G. Dinamika dan Realita Kondisi Umum Daerah (sasaran)

Evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2022 menjadi dasar bagi perencanaan pembangunan daerah pada Tahun 2024. Dinamika pembangunan dan perekonomian daerah memunculkan berbagai isu dan permasalahan yang masih mengemuka selama pelaksanaan pembangunan Tahun 2022 baik di tingkat nasional maupun regional yang menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan Tema RKPD Tahun 2024. Beberapa isu dan permasalahan tersebut antara lain:

Justifikasi Isu Strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian;

   Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Atas Dasar Harga Konstan 2010 pada lapangan usaha PDRB Sub Sektor Pertanian yang terdiri dari Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian dalam periode 2017-2021 cukup fluktuatif. Dimana pada tahun 2017 sebesar 1,17% dan meningkat di tahun 2018 menjadi sebesar 4,15%. Pada tahun 2019 pertumbuhan melambat sebesar 1,40%. Kemudian meningkat kembali di tahun 2020 menjadi sebesar 7,78%, namun pada tahun 2021 mengalami penurunan hingga -0,73%. Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian sangat fluktuatif karena masih didominasi oleh sub sektor perkebunan terutama sektor kelapa sawit. Rendahnya pertumbuhan pada sektor ini disebabkan fluktuatifnya harga komoditas perkebunan. Adanya kebijakan pembatasan perluasan lahan perkebunan juga sangat mempengaruhi tingkat produksi perkebunan. Ditambah dengan usia tanaman perkebunan yang sudah tidak produktif sehingga dilakukan kebijakan replanting (peremajaan) yang otomatis mempengaruhi tingkat produksi sektor perkebunan. Pada tahun 2021 mengalami penurunan yang drastis karena adanya peralihan dari masyarakat petani menjadi penambang.

2. Belum Optimalnya Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan;

   Laju pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan periode tahun 2017-2021 cukup fluktuatif, dimana pada tahun 2017 tumbuh negatif sebesar -3,24%. Namun pada tahun berikutnya tumbuh positif sebesar 8,10% (2018) dan melambat di tahun 2019 sebesar 5,76% kemudian meningkat kembali di tahun 2020 sebesar 9,76% dan pada tahun 2021 mengalami penurunan dan tercatat pada angka 5,04%. Masih rendahnya kontribusi sub sektor perikanan di dalam perekonomian daerah yang secara rata-rata hanya berkontribusi sebesar 7,43% dan tidak sebanding dengan potensi kelautan yang sangat besar mencapai 80% luas wilayah perairan laut Bangka Belitung. Hal ini dikarenakan potensi laut Bangka Belitung belum terkelola secara optimal. Saat ini sektor perikanan lebih mengandalkan produksi perikanan budidaya dibandingkan dengan produksi perikanan tangkap. Pertumbuhan produksi perikanan budidaya masih sangat rendah; pertumbuhan produksi perikanan budidaya tahun 2021 sebesar 16,5 persen meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 14,17 persen, walaupun sempat terkontraksi (tumbuh negative) pada tahun 2019 sebesar 23,44 persen. Ketidakstabilan pertumbuhan ini disebabkan karena rendahnya minat masyarakat untuk melakukan budidaya perikanan khususnya budidaya perairan tawar; adopsi teknologi yang minim; serta suplai pakan dan benih masih didatangkan dari luar Pulau Bangka Belitung. Disisi lain, perkembangan budidaya air payau, terutama budidaya tambak udang vaname yang bekembang pesat

belum disertai dengan adanya peraturan terkait budidaya udang vaname di tingkat provinsi.

3. Rendahnya Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian;

   Rendahnya PDRB Sub Sektor Pertambangan dan Energi disebabkan oleh beberapa faktor antara lain masih rendahnya nilai tambah sektor pertambangan dan penggalian. Menurunnya laju pertumbuhan PDRB sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 2018 berada di angka -0,95%, sedangkan ditahun sebelumnya berada di angka 2,22% (menurun 1,97 poin). Kenaikan pertumbuhan tidak signifikan ditahun 2019 sebesar 0,91% dan kembali minus di tahun 2020 menjadi sebesar -9,23%, namun pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang pesat hingga mencapau 6,78%. Hal ini berimbas pada meningkatnya pertumbuhan sub sektor pertambangan minyak, gas, dan panas bumi dari -1,23% (2017) menjadi -16,58% (2018), kemudian naik 2,61% (2019) dan kembali minus ditahun 2020 menjadi sebesar -23,47% dan naik pada tahun 2021 sehingga berada pada nilai -3,89%. Penurunan pertumbuhan ini pun terjadi pada sub sektor pertambangan biji logam dari 2,90% (2017) menjadi sebesar -0,11% (2018). Kemudian dari -0,30% (2019) menjadi -10,04%(2020), namun pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 9,92%. Naik dan turunnya PDRB sub sektor pertambangan dan penggalian disebabkan menurunnya cadangan deposit khususnya logam timah sekunder, mengingat sampai dengan saat ini belum ada teknologi yang canggih dan ramah lingkungan yang dapat menjangkau timah primer.

4. Belum optimalnya Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Industri Pengolahan;

   Kontribusi sektor industri pengolahan mengalami penurunan dari 6,15% (2017) menjadi 3,97% (2018) menurun kembali menjadi sebesar 1,20% (2019) dan -5,64% (2020) namun mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 5,44%. Belum optimalnya PDRB sub sektor industri pengolahan ini sebagai dampak dari penurunan kontribusi sub sektor industri logam dasar dari 7,70% (2017) menjadi -0,34% (2018) kemudian menurun kembali menjadi sebesar -0,77% (2019) dan -10,08% (2020) namu mengalami peningkatan pada tahun 2021 diangka 7,73%. Lebih dari 50% industri pengolahan di Bangka Belitung di dominasi oleh sub sektor industri logam dasar, yang mana sub sektor logam dasar ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan dari sub sektor pertambangan biji logam sebagai sumber bahan baku bagi industri pengolahan.

5. Belum optimalnya Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan;

   Sub sektor perdagangan termasuk dalam klasifikasi sektor tersier. Kinerja sektor perdagangan selama 4 (empat) tahun terakhir, yaitu dari tahun 2017 hingga 2021 semakin menurun. Laju pertumbuhan sub sektor perdagangan tahun 2017 sebesar 7,81% dan tumbuh melambat sebesar 2,64% (2018) dan 1,76 (2019). Pada tahun 2020 mengalami laju pertumbuhan negatif menjadi sebesar -4,62% namun mengalami peningkatan kembali pada tahun 2021 ebesar 5,78%. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan sub sektor perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya yang tumbuh negatif sebesar -21,52% (2020) namun naik pada tahun 2021 sebesar 27,47 dan Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor juga tumbuh negatif sebesar 1,41% namun naik pada tahun 2021 sebesar 2,51%. Belum optimalnya Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan sangat dipengaruhi oleh 3 (tiga) sektor yaitu pertanian, pertambangan, dan industri pengolahan. Kontribusi ketiga sektor ini

lebih dari 50% mengingat sub sektor perdagangan merupakan sektor sekunder. Ketika tiga sektor ini melemah maka akan berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat.

6. Belum optimalnya laju pertumbuhan kunjungan wisatawan asing dan domestik

   Bangka Belitung memiliki potensi pariwisata yang sangat menakjubkan sehingga bisa diandalkan sebagai potensi unggulan. Dengan keindahan alam dan pantai berpasir putih yang indah dan tersebar di hampir seluruh daerah, maka sektor ini bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk berkunjung ke Bangka Belitung. Namun berdasarkan data BPS, dalam kurun waktu 2017-2020 tercatat jumlah kunjungan wisatawan mengalami fluktuasi. Pada 2017, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 7.143 wisatawan dan domestik 362.279 wisatawan. Pada tahun 2018 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 8.124 wisatawan dan domestik sebanyak 417.818 wisatawan. Sedangkan pada tahun 2019 wisatawan mancanegara sebanyak 9.183 dan domestik 429.190 wisatawan. Di tahun 2020 wisatawan yang datang ke Bangka Belitung mengalami penurunan signifikan yang disebabkan mewabahnya pandemi Covid-19, yaitu Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 2.476 wisatawan dan domestik sebanyak 221.475 wisatawan. Namun pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup tajam yakni terdiri dari 573 orang tamu mancanegara dan 312.475 orang tamu domestic. Belum optimalnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik menyebabkan rendahnya laju pertumbuhan kunjungan wisatawan yang berpengaruh terhadap akomodasi, makan minum dan UMKM yang bergerak di bidang pariwisata sehingga menyebabkan rendahnya kontribusi terhadap PDRB sektor pariwisata. Laju pertumbuhan kunjungan wisatawan tahun 2019 sebesar 2,92%, sedangkan tahun 2020 sebesar – 48,45 % dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 39,79%.

7. Belum optimalnya pertumbuhan ekspor

   Dalam perdagangan internasional, Bangka Belitung terkenal dengan lada putih dan timah. Sejak lama, kedua komoditas tersebut telah diperdagangkan secara internasional. Selain komoditas logam timah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga menghasilkan lada, minyak kelapa sawit (CPO), karet, dan hasil perikanan. Pertumbuhan ekspor di Bangka Belitung Belitung cukup baik sebesar 58,04%. Namun pada tahun-tahun berikutnya mengalami pertumbuhan minus yaitu sebesar -1,49% (2018), -22,59 (2019), dan -6,03(2020) namun pada triwulan I 2022 tercatat tumbuh 26,75% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 0,62% (yoy). Belum optimalnya pertumbuhan ekspor Bangka Belitung disebabkan masih relatif terbatasnya komoditas daerah yang akan diekspor, dimana 80 persen ekspor Bangka Belitung masih berasal dari ekspor logam timah.

8. Belum maksimalnya nilai investasi (PMA/PMDN) daerah

   Investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan salah satu komponen dalam pertumbuhan ekonomi. Adanya aktivitas investasi akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu daerah. Berdasarkan statusnya, investasi meliputi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Dalam periode 2018 sampai dengan 2022, nilai PMDN dan PMA di Bangka Belitung terus meningkat dengan Perkembangan nilai investasi dari sebesar 3.733 Milyar (2018) menjadi sebesar 330 Milyar (2021) dengan rincian 3.677 Milyar PMDN dan 652 Milyar

PMA. Pada tahun 2020 nilai investasi ini meliputi 2.371 proyek untuk PMDN dan 287 proyek untuk PMA, hal ini mengalami penurunan yang disebabkan adanya pandemic covid 19 yang berpengaruh terhadap seluruh sector. Capaian investasi Bangka Belitung meskipun diatas target yang di tetapkan, namun masih di di bawah target nasional yaitu sebesar 4,5 triliun.

9. Belum maksimalnya peningkatan pembangunan manusia

   Pegukuran Indeks pembangunan manusia (IPM) suatu daerah menggunakan indikator dampak sebagai komponen dasar penghitungannya yaitu, angka harapan hidup waktu lahir, pencapaian pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, serta pengeluaran konsumsi. Nilai IPM suatu negara atau wilayah menunjukkan seberapa jauh suatu wilayah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup 85 tahun, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali), dan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup layak. Adapun capaian IPM Bangka Belitung Pada periode 2017 sampai dengan 2021 terus mengalami peningkatan, pada 2021 mencapai 71,69, meningkat 0,22 poin atau 0,31 persen dibandingkan capaian tahun sebelumnya dan pada tahun 2022 IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami pertumbuhan sebesar 0,77% dan berada pada angka 72,24%, Peningkatan IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Namun peningkatan ini belum signifikan. Jika di bandingkan dengan capaian nasional yang sebesar 72,29, Bangka Belitung masih harus dengan usaha yang keras untuk mengejar ketertinggalan.

10. Menurunnya kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga dalam demokrasi

    Kebebasan Sipil (Civil Liberty), hak-hak politik (Political Rights), dan lembaga-lembaga demokrasi (Institution of Democracy) adalah tiga aspek demokrasi yang merupakan aspek pembentukan IDI yaitu indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Pada tahun 2019, kebebasan sipil naik 3,17 poin (dari 80,95 menjadi 84,12), hak-hak politik turun 1,85 poin (dari 73,56 menjadi 71,71), dan lembaga-lembaga demokrasi naik 11,72 poin (dari 63,76 menjadi 75,48). Adapun capaian pada tahun 2020, kebebasan sipil sebesar 79,12, hak hak politik sebesar 66,20 dan Lembaga demokrasi 92,97. Adapun capaian pada tahun 2021, kebebasan sipil sebesar 68,80. Penurunan nilai aspek Kebebasan Sipil menunjukkan indikasi bahwa ancaman atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah maupun oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat serta berpendapat mengalami peningkatan. Pada aspek hak-hak politik mengalami penurunan yang disebabkan partisipasi politik masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan agak menurun. Selain 2 aspek yang mengalami penurunan, aspek lembaga demokrasi mengalami peningkatan nilai didukung oleh kinerja DPRD dan pemerintah daerah yang semakin baik, seperti alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan dalam APBD, jumlah kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN, serta berkurangnya keputusan hakim yang kontroversial. Secara umum, perkembangan demokrasi di Bangka Belitung menunjukkan tren ke arah positif. Nilai IDI Bangka Belitung pada 2017-2020 berfluktuasi pada kisaran angka 70 hingga 80-an. IDI Kepulauan Bangka Belitung pada 2020 mencapai 77,39, naik 0,64 poin dibandingkan tahun 2019. Nilai IDI Bangka Belitung ini sudah di atas rata rata nasional yang sebesar

6,71 dan berada pada peringkat ke-9 secara nasional, namun status demokrasi Bangka Belitung masih berada pada kategori sedang.

11. Belum optimalnya pengendalian lingkungan hidup

    Dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2017 sampai dengan 2021 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) cenderung fluktuatif. Nilai IKLH dari tahun 2017 hingga tahun 2019 terus menurun dari 67,85 menjadi 64,85 namun pada tahun 2020 meningkat menjadi 73,50. Tahun 2021 nilai IKLH kembali menurun menjadi 72,05. Indikator Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara yang menurun memberikan andil terhadap penurunan IKLH di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan hal-hal di atas, terutama untuk menyelaraskan dan menyesuaikan Tema dan Arah Kebijakan Pembangunan dalam RKP Tahun 2024 dan sasaran pembangunan Daerah yang termuat dalam RPD Tahun 2023-2026, serta berdasarkan pertimbangan kondisi umum daerah yang terdampak Pandemi Covid-19, maka ditetapkan **Tema Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2024** adalah "**Penguatan Ekonomi Berkelanjutan melalui Pengembangan SDM dan Stabilitas Demokrasi",** dengan makna yang tertuang secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

(1) **Penguatan Ekonomi Berkelanjutan** dimaknai dengan mengoptimalkan potensi perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan mengandalkan sektor-sektor unggulan dan memprioritaskan penguatan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan;

(2) **Pengembangan SDM** dimaknai dengan menghasilkan sumber daya manasia yang mandiri dan kompetitif, yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia, meningkatnya rata-rata lama sekolah, meningkatnya kualitas pendidikan tenaga kerja serta terpenuhinya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kemampuan dibidangnya masing-masing sesuai kebutuhan organisasi, berinovatif, bertanggung jawab dan selalu berorientasi pada tujuan organisasi.

(3.) **Stabilitas Demokrasi** dimaknai dengan menjaga stabilitas terhadap adanya Pemilihan Serentak pada Tahun 2024, yang ditandai dengan meningkatnya kebebasan masyarakat dalam berdemokrasi dan penguatan lembaga-lembaga pemerintahan.

### 4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Pembangunan Daerah Tahun 2024 berdasarkan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 difokuskan pada upaya pengembangan Sumber Daya Manusia dan penurunan disparitas pembangunan. Disamping itu RKPD 2024 difokuskan untuk penguatan ekonomi berbasis digital dan reformasi birokrasi. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024 adalah merealisasikan Fokus Pembangunan Daerah dengan tema pembangunan **"Penguatan Ekonomi Berkelanjutan melalui Pengembangan SDM dan Stabilitas Demokrasi"**. Hubungan antara tujuan-sasaran pembangunan 2023-2026 disajikan pada Tabel berikut ini

**Tabel IV.2**
Tujuan, Indikator Kerja Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran
Perubahan RPD 2023–2026 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| **PRIORITAS UTAMA** | | | |
| Meningkatnya ekonomi Daerah | Pertumbuhan PDRB | Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian | Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian |
| | | Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perikanan | Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan |
| | | Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian | Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian |
| | | Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan | Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan |
| | | Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan | Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan |
| | | Meningkatnya Kunjungan Wisatawan asing dan domestik | Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan asing dan domestic |
| | | Meningkatnya Ekspor | Laju Pertumbuhan Ekspor |
| | | Meningkatnya Nilai Investasi (PMA/PMDN) Daerah | Pertumbuhan Investasi |
| Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) |
| Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Meningkatnya Pembangunan Manusia | Meningkatnya Pembangunan Manusia |
| Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi. | Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi | Meningkatkan aspek kebebasan , kesetaraan , kapasitas lembaga dalam demokrasi | Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi |
| **PRIORITAS PENDUKUNG** | | | |
| Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan Masyarakat | Indeks Williamson | Meningkatnya ketersediaan infrastruktur | Persentase Ketersediaan Infrastruktur |
| | | Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta | Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang |

| TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| | | Pewujudan Tertib Tata Ruang | |
| | | Menurunnya Resiko Bencana | Indeks Resiko Bencana |
| | | Percepatan pembangunan kawasan perdesaan | Indeks desa membangun |
| | | Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk | Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) |
| | Indeks Gini | Menurunkan Tingkat Kemiskinan | Persentase Angka Kemiskinan |
| | | Meningkatkan Kesempatan Kerja | Tingkat Pengangguran Terbuka |
| Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi. | Indeks Reformasi Birokrasi | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan | Indeks Reformasi Birokrasi |

*Sumber: Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Provinsi Bangka Belitung*

Berdasarkan Tabel IV.2, untuk dapat mencapai 6 (tujuh) tujuan yang ditandai dengan 19 (Sembilan Belas) sasaran. Indikasi keberhasilan dari pelaksanaan Tujuan dapat dilihat dari target capaian indikator sasaran pembangunan. Adapun target sasaran makro pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disandingkan dengan target Nasional yang akan dicapai pada Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut ini

**Tabel IV.3**
Target Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

| INDIKATOR MAKRO | TARGET TAHUN 2024 | | |
|---|---|---|---|
| | ***Nasional*** | ***Rakortekrenbang*** | ***Provinsi*** |
| **Pertumbuhan Ekonomi** | 5,3%-5,7% | 4.6-5.0% | 4,39-5% |
| **Kemiskinan** | 6,5% - 7,5%; | 3.00-3.30% | 4,08-4,10% |
| **Pengangguran** | 5,0 – 5,7%; | 3.31-4.02% | 4,23-4,44% |
| **Gini Ratio** | 0,374-0,377 | 0.251 - 0.253 | 0,229-0,251 |
| **IPM** | 73,99 – 74,02 | 72.94-73.06 | 72,94-73,06 |

*Sumber: RPD Tahun 2023-2026 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*

Capaian tingkat kemiskinan tahun 2022 yakni 4,61% sehingga mengakibatkan target tingkat kemiskinan pada RKPD Tahun 2024 berada pada angka 4,08-4,10% atau turun sebesar 0,53-0,51%. Capaian tingkat pengangguran pada tahun 2022 yakni 4,77% dan target pada tahun 2024 adalah 4,23-4,44% atau turun sebesar 0,54-0,22% dari tahun sebelumnya. Target tujuan dan sasaran makro tersebut lebih lanjut diturunkan menjadi sasaran prioritas daerah sebagaimana yang dijabarkan dalam Rencana Pembanguanan Daerah (RPD) Tahun

2023-2026. Berdasarkan RPD Tahun 2023-2026, terdapat 6 (enam) tujuan dan 7 (tujuh) indikator kinerja tujuan tahun 2024 yang akan dicapai, sebagaimana disajikan pada Tabel sebagai berikut:

**Tabel IV.4**
Target Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2024

| TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | TARGET TAHUN 2024 | KONDISI AKHIR RPD 2023-2026 |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| **PRIORITAS UTAMA** | | | |
| Meningkatnya ekonomi Daerah | Pertumbuhan PDRB | 4,39-5% | 5,78 |
| Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | 75,84 | 77,50 |
| Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 72,94-73,06 | 72,58 |
| Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi. | Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi | 78,40 | 81,42 |
| **PRIORITAS PENDUKUNG** | | | |
| Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat | Indeks Williamson | 0,181 | 0,177 |
| | Indeks Gini | 0,229-0,251 | 0,217 |
| Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi. | Indeks Reformasi Birokrasi | 69 | 70,51 |

*Sumber: RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026*

Target tujuan tersebut lebih lanjut diturunkan menjadi sasaran-sasaran prioritas daerah tahun 2024 yang akan dicapai, sebagaimana disajikan pada Tabel sebagai berikut:

**Tabel IV.5**
Target Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2024

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA SASARAN | TARGET TAHUN 2024 |
|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* |
| **PRIORITAS UTAMA** | | |
| Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian | Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian | 3,98 |
| Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perikanan | Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan | 3,98 |
| Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian | Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian | 4,52 |
| Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan | Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan | 3,25 |
| Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan | Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan | 4,94 |
| Meningkatnya Kunjungan Wisatawan asing dan domestic | Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan asing dan domestik | 4,42 |
| Meningkatnya Ekspor | Laju Pertumbuhan Ekspor | 7,51 |
| Meningkatnya Nilai Investasi (PMA/PMDN) Daerah | Pertumbuhan Investasi | 30,00 |

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA SASARAN | TARGET TAHUN 2024 |
|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* |
| Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | 75,84 |
| Meningkatnya Pembangunan Manusia | Indeks Pembangunan Manusia | 72,94-73,06 |
| Meningkatkan Kebebasan,Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga dalam demokrasi | Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi | 78,40 |
| **PRIORITAS PENDUKUNG** | | |
| Meningkatnya ketersediaan infrastruktur | Persentase Ketersediaan Infrastruktur | 49,51 |
| Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang | Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang | 0,7 |
| Menurunnya Resiko Bencana | Indeks Resiko Bencana | 0,37 |
| Percepatan pembangunan kawasan perdesaan | Indeks desa membangun | 0,73 |
| Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk | Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) | 1,74 |
| Menurunkan Tingkat Kemiskinan | Persentase Angka Kemiskinan | 4,08-4,10% |
| Meningkatkan Kesempatan Kerja | Tingkat Pengangguran Terbuka | 4,23-4,44% |
| Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan | Indeks Reformasi Birokrasi | 69 |

*Sumber: RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026*

### 4.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan serta menjadi rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Strategi pembangunan dalam RKPD ini telah didahului oleh analisis yang cermat atas kondisi makro ekonomi yang ada di daerah dan nasional serta kondisi mikro di daerah. Sebelum masuk pada strategi pembangunan, telah diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan menggunakan analisis SWOT, akhirnya ditetapkan Strategi dan Arah Kebijakan untuk mencapai setiap sasaran pembangunan lengkap dengan indikator kinerja sasaran sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Disamping itu beberapa langkah yang dilakukan dalam penentuan strategi dan arah kebijakan tahun 2024 antara lain:

1. Mengevaluasi dan menganalisis capaian Tujuan dan Sasaran pembangunan pada periode sebelumnya atau N-1.
2. Mengevaluasi dan menganalisis capaian program dan kegiatan pembangunan pada periode sebelumnya atau N-1 serta permasalahan dan isu strategis yang sedang dihadapi
3. Memperhatikan arah kebijakan dan saran pembangunan nasional.

4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya.

Untuk mencapai sasaran pembangunan tahun 2024 maka Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024 disusun dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah seperti yang disajikan pada Tabel berikut ini:

**Tabel IV.6**
Hubungan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN RPD |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| **PRIORITAS UTAMA** | | | |
| Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian | Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian | Meningkatan Produkifitas, Kualitas dan Daya Saing Produk Pertanian serta dan sarana dan prasarana produksi , Nilai Tambah Produk serta Peningkatan Fungsi Kelembagaan Pertanian | Peningkatan Produkifitas, Kualitas dan Daya Saing Produk Pertanian |
| | | | Peningkatan sarana dan prasarana produksi , Nilai Tambah Produk serta Peningkatan Fungsi Kelembagaan Pertanian |
| Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perikanan | Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan | Meningkatan sarana prasarana, produktifitas dan kualitas pengelolaan hasil perikanan tangkap dan perikanan budidaya serta Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan | Peningkatan sarana prasarana, produktifitas dan kualitas pengelolaan hasil perikanan tangkap dan perikanan budidaya |
| | | | Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan |
| Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian | Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian | Meningkatan tata kelola sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan. | Peningkatan tata kelola sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan. |
| Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan | Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan | Meningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Serta Pembinaan Hubungan Industri dan Kesehatan Kerja dan tata kelola industri dan nilai tambah produk | Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Serta Pembinaan Hubungan Industri dan Kesehatan Kerja |
| | | | Peningkatan tata kelola industri dan nilai tambah produk |

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN RPD |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan | Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan | Meningkatan Kualitas dan Daya Saing Produk dan Pengendalian ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan atau Barang Penting | Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Produk |
| | | | Pengendalian ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan atau Barang Penting |
| Meningkatnya Kunjungan Wisatawan asing dan domestik | Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan asing dan domestik | Meningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Eonomi Kreatif, Kebudayaan, Peran Serta Masyarakat dan Kelembagaan Industri Pariwisata dan Sarana dan Prasarana Pengembangan Promosi, Destinasi dan Pemasaran Pariwisata | Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Eonomi Kreatif, Kebudayaan, Peran Serta Masyarakat dan Kelembagaan Industri Pariwisata |
| Meningkatnya Ekspor | Laju Pertumbuhan Ekspor | Meningkatan produktifitas, kualitas dan daya saing produk unggulan daerah. | Peningkatan produktifitas, kualitas dan daya saing produk unggulan daerah. |
| Meningkatnya Nilai Investasi (PMA/PMDN) Daerah | Pertumbuhan Investasi | Mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah; | Mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah; |
| Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Meningkatan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tata kelola kehutanan | Peningkatan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup |
| | | | Peningkatan tata kelola kehutanan |
| Meningkatnya Pembangunan Manusia | Indeks Pembangunan Manusia | Meningkatkan Akses pelayanan dan Mutu Pendidikan serta meningkatkan relevansi dan daya saing serta kualitas hidup, peran perempuan dan anak serta memenuhi | Meningkatkan Akses pelayanan dan Mutu Pendidikan serta meningkatkan relevansi dan daya saing |
| | | | Peningkatan kualitas hidup, peran perempuan dan anak serta memenuhi keadilan dan kesetaraan |

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN RPD |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| | | keadilan dan kesetaraan gender (KKG) | gender (KKG) |
| | | Meningkatkan akses pelayanan dan kualitas kesehatan dengan memperkuat pelayanan dan sistem kesehatan | Meningkatkan akses pelayanan dan kualitas kesehatan dengan memperkuat pelayanan dan sistem kesehatan |
| Meningkatkan aspek kebebasan , kesetaraan , kapasitas lembaga dalam demokrasi | Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi | meningkatkan kebebasan demokrasi, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat, kesetaraan dalam berdemokrasi, dan kapasitas lembaga demokrasi | meningkatkan kebebasan demokrasi |
| | | | Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan Masyarakat |
| | | | meningkatkan kesetaraan dalam berdemokrasi |
| | | | meningkatkan kapasitas lembaga demokrasi |
| **PRIORITAS PENDUKUNG** | | | |
| Meningkatnya ketersediaan infrastruktur | Persentase Ketersediaan Infrastruktur | Memerataan ketersediaan infrastruktur | Pemerataan ketersediaan infrastruktur |
| Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang | Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang | Meningkatan ketaatan tata ruang | Peningkatan ketaatan tata ruang |
| Menurunnya Resiko Bencana | Indeks Resiko Bencana | Meningkatan tata kelola penanggulangan bencana | Peningkatan tata kelola penanggulangan bencana |
| Percepatan pembangunan kawasan perdesaan | Indeks desa membangun | Meningkatan Kapasitas Desa dan penyediaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat pada kawasan transmigrasi | Peningkatan Kapasitas Desa |
| | | | Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat pada kawasan transmigrasi |
| Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk | Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) | Meningkatkan Pengendalian tingkat kelahiran Penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang | Pengendalian tingkat kelahiran Penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang |

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN RPD |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| Menurunkan Tingkat Kemiskinan | Persentase Angka Kemiskinan | Meningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas, Pengembangan sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial, serta Peningkatan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin | Peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas |
| | | | Pengembangan sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan social |
| | | | Peningkatan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin |
| Meningkatkan Kesempatan Kerja | Tingkat Pengangguran Terbuka | meningkatan akses terhadap penciptaan lapangan kesempatan kerja, kualitas hidup, peran perempuan dan anak serta memenuhi keadilan dan kesetaraan gender (KKG), kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan serta peningkatan budaya dan Kesejahteraan Tenaga Kerja | Peningkatan akses terhadap penciptaan lapangan kesempatan kerja |
| | | | Peningkatan kualitas hidup, peran perempuan dan anak serta memenuhi keadilan dan kesetaraan gender (KKG) |
| | | | Peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan serta peningkatan budaya |
| | | | Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja |
| Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan | Indeks Reformasi Birokrasi | Peningkatan akses data dan informasi serta Kualitas Pelayanaan Publik dengan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat | Peningkatan akses data dan informasi serta Kualitas Pelayanaan Publik dengan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat |
| | | Peningkatan transparansi dan layanan Pengadaan barang dan jasa, Penguatan Sistem Manajemen Pemerintahan, Penataan peraturan perundang-undangan, Penguatan Sistem Manajemen | Peningkatan transparansi dan layanan Pengadaan barang dan jasa |
| | | | Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen Pemerintahan |
| | | | Peningkatan Penataan peraturan perundang-undangan |
| | | | Peningkatan Penguatan |

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN RPD |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| | | SDM Aparatur, manajemen aset dan pencatatan pelaporan aset serta laporan realisasi anggaran, tata laksana dan kinerja pemerintah daerah serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel dan kesesuaian antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja | Sistem Manajemen SDM Aparatur |
| | | | Peningkatan manajemen aset dan pencatatan pelaporan aset serta laporan realisasi anggaran |
| | | | Peningkatan tata laksana dan kinerja pemerintah daerah |
| | | | Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel |
| | | | Peningkatan Pelayan Internal Perangkat Daerah |
| | | | Peningkatan kesesuaian antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja |

*Sumber: RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026*

## 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah dan Sasaran Pembangunan

### 4.2.1. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024, disusun dengan memperhatikan RPD Tahun 2023-2026 serta Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024. Diperlukan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan.

Prioritas pembangunan daerah merupakan rumusan yang disusun sebagai upaya untuk mencapai target sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Perumusan prioritas pembangunan didasari dari: 1) hasil evaluasi capaian pembangunan sampai dengan tahun sebelumnya dan tahun berjalan, 2) isu strategis global/nasional/daerah, 3) arahan pemerintah pusat yang relevan dengan kondisi daerah dan, 4) arahan RPD Tahun 2023-2026 pada Tahun 2024.

Penyusunan prioritas dilakukan dengan memperhatikan beberapa kriteria, terutama yang berkorelasi dengan upaya untuk:

1. pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap SDG's, Standar Pelayanan Minimal (SPM), pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan dan sasaran pembangunan nasional;
2. RPD Tahun 2023-2026;
3. pengembangan sektor/bidang yang terkait dengan prioritas dan keunggulan kompetitif daerah; dan
4. penyelesaian isu-isu strategis daerah.

Prioritas daerah tersebut diselesaikan melalui program dan kegiatan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. memenuhi kriteria holistik-tematik, integratif dan spasial;
2. program/kegiatan harus merupakan kewenangan Provinsi dan Pemerintah Pusat, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah bersangkutan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. memiliki korelasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPD 2023-2026;
4. merupakan respon relevan terhadap isu stategis dan masalah yang mendesak dan faktual yang dihadapi pada tahun 2024;
5. program dan kegiatan terpilih merupakan program/kegiatan yang menyentuh secara langsung bagi usaha pemecahan masalah mendasar yang dihadapi oleh masyarakat;
6. selaras dan konsisten dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mengantisipasi dan penyelesaian target-target pembangunan nasional serta sesuai dengan pagu anggaran indikatif sementara.

Prioritas pembangunan daerah untuk tahun 2024 terbagi menjadi prioritas utama dan prioritas pendukung sebagai berikut:

Priotitas Pembangunan Utama:

1. Pembangunan Ekonomi
2. Pembangunan Lingkungan
3. Pembangunan Sumber Daya Manusia
4. Pembangunan Demokrasi

Prioritas Pembangunan Pendukung:

1. Pembangunan Pemerintah
2. Pembangunan Wilayah
3. Pemerataan Pendapatan Masyarakat

**Gambar IV.4**

Prioritas Pembangunan Utama Daerah Tahun 2024




**Gambar IV.5**
Prioritas Pembangunan Pendukung Daerah Tahun 2024




## A. PRIORITAS PEMBANGUNAN UTAMA

### 1. PEMBANGUNAN EKONOMI

Fokus kegiatan pada pemulihan pasca pandemic Covid-19 dalam rangka mengembalikan sektor ekonomi dengan sasaran pada beberapa sektor antara lain sektor Pertanian, Sektor Perikanan, sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Industri Pengolahan, sektor Perdagangan, sektor Pariwisata, Ekspor, dan Nilai Investasi. Hal tersebut guna meningkatkan perekonomian di Provinsi Bangka Belitung dengan cara pemulihan pada sektor yang mempengaruhi PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**2. PEMBANGUNAN LINGKUNGAN**

Fokus kegiatan Mengembangkan pembanguan yang mengedepankan lingkungan agar terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang memperhatikan perlidungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tata kelola kehutanan.

**3. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Fokus kegiatan Memberikan dukungan berupa peningkatan akses pelayanan kesehatan, Pendidikan, dan kualitas hodup untuk dapat mewujudkan SDM yang tangguh dan mempunyai daya saing.

**4. PEMBANGUNAN DEMOKRASI**

Fokus kegiatan Menjadikan Bangka Belitung sebagai provinsi yang memiliki tingkat demokrasi yang tinggi dengan cara meningkatkan aspek kebebasan, kesetaraan dan meningkatkan kapasitas lembaga dalam demokrasi guna meningkatkan kebebasan demokrasi, meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.

**B. PRIORITAS PEMBANGUNAN PENDUKUNG**

**1. PEMBANGUNAN WILAYAH**

Fokus kegiatan Zonasi atau wilayah khusus terhadap keberagaman kebutuhan masyarakat guna memberikan pembangunan yang berkeadilan dengan cara meningkatkan ketersediaan infrastruktur, kualitas dan pemenuhan Rencana Tata Ruang, Meningkatnya Kapasitas Daerah Terhadap Bencana, pembangunan kawasan perdesaan dan mengendaliakn laju pertumbuhan penduduk agar pembangunan merta dan tepat sasaran.

**2. PEMERATAAN PENDAPATAN MASYARAKAT**

Fokus kegiatan membangunan pemerataan pendapatan masyarakat agar tidak terjadinya ketimpangan dengan cara menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesempatan kerja yang diharapkan dapat mendukung pemerataan pendapatan bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**3. PEMBANGUNAN PEMERINTAH**

Fokus kegiatan menjadikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi provinsi yang memliki tata kelola pemerintahan yang baik, dengan cara peningkatan akses data dan informasi, transparansi terhadap layanan dan pengadaan barang atau jasa dan peningkatan terhadap reformasi birokrasi agar menjadi pemerintahan yang dapat memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Keselarasan antara Prioritas Pembangunan daerah dengan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan untuk tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

**Tabel IV.7**
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah RKPD 2024 dengan
Strategi dan Arah Kebijakan RPD

| PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN RPD |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| **PRIORITAS UTAMA** | | | |
| Pembangunan Ekonomi | Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian | Meningkatan Produkifitas, Kualitas dan Daya Saing Produk Pertanian serta dan sarana dan prasarana produksi , Nilai Tambah Produk serta Peningkatan Fungsi Kelembagaan Pertanian | Peningkatan Produkifitas, Kualitas dan Daya Saing Produk Pertanian |
| | | | Peningkatan sarana dan prasarana produksi , Nilai Tambah Produk serta Peningkatan Fungsi Kelembagaan Pertanian |
| | Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan | Meningkatan sarana prasarana, produktifitas dan kualitas pengelolaan hasil perikanan tangkap dan perikanan budidaya serta Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan | Peningkatan sarana prasarana, produktifitas dan kualitas pengelolaan hasil perikanan tangkap dan perikanan budidaya |
| | | | Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan |
| | Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian | Meningkatan tata kelola sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan. | Peningkatan tata kelola sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan. |
| | Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan | Meningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Serta Pembinaan Hubungan Industri dan Kesehatan Kerja dan tata kelola industri dan nilai tambah produk | Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Serta Pembinaan Hubungan Industri dan Kesehatan Kerja |
| | | | Peningkatan tata kelola industri dan nilai tambah |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN RPD |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| | | | produk |
| | Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan | Meningkatan Kualitas dan Daya Saing Produk dan Pengendalian ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan atau Barang Penting | Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Produk |
| | | | Pengendalian ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan atau Barang Penting |
| | Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan asing dan domestic | Meningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Eonomi Kreatif, Kebudayaan, Peran Serta Masyarakat dan Kelembagaan Industri Pariwisata dan Sarana dan Prasarana Pengembangan Promosi, Destinasi dan Pemasaran Pariwisata | Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Eonomi Kreatif, Kebudayaan, Peran Serta Masyarakat dan Kelembagaan Industri Pariwisata |
| | Laju Pertumbuhan Ekspor | Meningkatan produktifitas, kualitas dan daya saing produk unggulan daerah. | Peningkatan produktifitas, kualitas dan daya saing produk unggulan daerah. |
| | Pertumbuhan Investasi | Mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah; | Mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah |
| Pembangunan Lingkungan | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Meningkatan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tata kelola kehutanan | Peningkatan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup |
| | | | Peningkatan tata kelola kehutanan |
| Pembangunan Sumber Daya Manusia | Indeks Pembangunan Manusia | Meningkatkan Akses pelayanan dan Mutu Pendidikan serta meningkatkan relevansi dan daya saing serta kualitas hidup, peran perempuan dan anak serta memenuhi keadilan dan | Meningkatkan Akses pelayanan dan Mutu Pendidikan serta meningkatkan relevansi dan daya saing |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN RPD |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| | | kesetaraan gender (KKG) | |
| | | | Peningkatan kualitas hidup, peran perempuan dan anak serta memenuhi keadilan dan kesetaraan gender (KKG) |
| | | Meningkatkan akses pelayanan dan kualitas kesehatan dengan memperkuat pelayanan dan sistem kesehatan | Meningkatkan akses pelayanan dan kualitas kesehatan dengan memperkuat pelayanan dan sistem Kesehatan |
| Pembangunan Demokrasi | Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi | meningkatkan kebebasan demokrasi, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat, kesetaraan dalam berdemokrasi, dan kapasitas lembaga demokrasi | meningkatkan kebebasan demokrasi |
| | | | Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan Masyarakat |
| | | | meningkatkan kesetaraan dalam berdemokrasi |
| | | | meningkatkan kapasitas lembaga demokrasi |
| **PRIORITAS PENDUKUNG** | | | |
| Pembangunan Wilayah | Persentase Ketersediaan Infrastruktur | Memerataan ketersediaan infrastruktur | Pemerataan ketersediaan infrastruktur |
| | Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang | Meningkatan ketaatan tata ruang | Peningkatan ketaatan tata ruang |
| | Indeks Resiko Bencana | Meningkatan tata kelola penanggulangan bencana | Peningkatan tata kelola penanggulangan bencana |
| | Indeks desa membangun | Meningkatan Kapasitas Desa dan penyediaan sarana dan prasarana serta | Peningkatan Kapasitas Desa |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN RPD |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| | | pemberdayaan masyarakat pada kawasan transmigrasi | |
| | | | Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat pada kawasan transmigrasi |
| | Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) | Meningkatkan Pengendalian tingkat kelahiran Penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang | Pengendalian tingkat kelahiran Penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang |
| Pemerataan Pendapatan Masyarakat | Persentase Angka Kemiskinan | Meningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas, Pengembangan sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial, serta Peningkatan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin | Peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas |
| | | | Pengembangan sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan social |
| | | | Peningkatan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin |
| | Tingkat Pengangguran Terbuka | meningkatan akses terhadap penciptaan lapangan kesempatan kerja, kualitas hidup, peran perempuan dan anak serta memenuhi keadilan dan kesetaraan gender (KKG), kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan serta peningkatan budaya dan Kesejahteraan Tenaga Kerja | Peningkatan akses terhadap penciptaan lapangan kesempatan kerja |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN RPD |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| | | | Peningkatan kualitas hidup, peran perempuan dan anak serta memenuhi keadilan dan kesetaraan gender (KKG) |
| | | | Peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan serta peningkatan budaya |
| | | | Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja |
| Pembangunan Pemerintahan | Indeks Reformasi Birokrasi | Peningkatan akses data dan informasi serta Kualitas Pelayanaan Publik dengan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat | Peningkatan akses data dan informasi serta Kualitas Pelayanaan Publik dengan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi Masyarakat |
| | | Peningkatan transparansi dan layanan Pengadaan barang dan jasa, Penguatan Sistem Manajemen Pemerintahan, Penataan peraturan perundang-undangan, Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur, manajemen aset dan pencatatan pelaporan aset serta laporan realisasi anggaran, tata laksana dan kinerja pemerintah daerah serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel dan kesesuaian antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja | Peningkatan akses data dan informasi serta Kualitas Pelayanaan Publik dengan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi Masyarakat |
| | | | Peningkatan transparansi dan layanan Pengadaan barang dan jasa |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN RPD |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| | | | Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen Pemerintahan |
| | | | Peningkatan Penataan peraturan perundang-undangan |
| | | | Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur |
| | | | Peningkatan manajemen aset dan pencatatan pelaporan aset serta laporan realisasi anggaran |
| | | | Peningkatan tata laksana dan kinerja pemerintah daerah |
| | | | Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel |
| | | | Peningkatan Pelayan Internal Perangkat Daerah |
| | | | Peningkatan kesesuaian antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja |

*Sumber: RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026*

Keselarasan antara Prioritas Pembangunan daerah dengan Strategi serta dukungan Program Daerah untuk tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

**Tabel IV.8**

Sasaran dan Program Prioritas

Yang Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah /RKPD 2024

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **PRIORITAS UTAMA** | | | | | | | |
| **Prioritas Pembangunan Daerah : Pembangunan Ekonomi** | | | | | | | |
| **Tujuan : Meningkatnya ekonomi Daerah** | | | | **5,05** | **4,39** | **4,78** | |
| **Indikator Tujuan : Pertumbuhan PDRB** | | | | **5,05** | **4,39** | **4,78** | |
| **Sasaran : Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian** | | | | **7,78** | **4,23** | **4,60** | |
| **Indikator Sasaran : Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian** | | | | **7,78** | **4,23** | **4,60** | |
| **Strategi : Meningkatan Produkifitas, Kualitas dan Daya Saing Produk Pertanian serta sarana dan prasarana produksi , Nilai Tambah Produk serta Peningkatan Fungsi Kelembagaan Pertanian** | | | | | | | |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan Produkifitas, Kualitas dan Daya Saing Produk Pertanian** | | | | | | | |
| 37296 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN | Persentase meningkatnya ketersediaan pangan utama (beras) | Bidang Pangan | 0 persen | 2,85 persen | 2,95 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| 37661 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | Bidang Pangan | 0 | 84,1 | 86,1 | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| 38026 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Menurunnya Daerah Rentan Rawan Pangan | Bidang Pangan | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| 38392 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | Persentase pangan yang aman dikonsumsi | Bidang Pangan | 0 persen | 86 persen | 86 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| 38438 | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Dokumen Laporan Pengendalian dan Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim (DPI) | Bidang Pertanian | 0 Dok | 1 Dok | 1 Dok | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| 0 | 0 | Terkendalinya Bencana Pertanian | Bidang Pertanian | 0 persen | 3 persen | 3 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| 38803 | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | Dokumen Perizinan Usaha Pertanian | Bidang Pertanian | 0 Dok | 1 Dok | 1 Dok | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| 39168 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Persentase peningkatan metode, teknologi informasi dan kelembagaan penyuluhan pertanian | Bidang Pertanian | 0 persen | 100 persen | 100 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| 38073 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular | Bidang Pertanian | 0 persen | 2 persen | 2 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan sarana dan prasarana produksi , Nilai Tambah Produk serta Peningkatan Fungsi Kelembagaan Pertanian** | | | | | | | |
| 37342 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Peningkatan benih/bibit tanaman (pangan, horti, dan perkebunan) berlabel dan bersertifikat | Bidang Pertanian | 0 persen | 5 persen | 5 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| 0 | 0 | Persentase peningkatan luas tanam perkebunan | Bidang Pertanian | 0 persen | 2,5 persen | 2,5 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| 0 | 0 | Persentase peningkatan luas tanam Tanaman Pangan & Hortikultura (%) | Bidang Pertanian | 0 persen | 5 persen | 5 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 0 | persentase peningkatan produksi benih bermutu | Bidang Pertanian | 0 persen | 5 persen | 10 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| 0 | 0 | Persentase terawasinya peredaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung peningkatan produksi | Bidang Pertanian | 0 persen | 100 persen | 100 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| 37707 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Rasio Ketersediaan Prasarana Pertanian prapanen | Bidang Pertanian | 0 persen | 15 persen | 15 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| 0 | 0 | Rasio ketersedian prasarana pertanian pasca panen | Bidang Pertanian | 0 persen | 5 persen | 5 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| 37342 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Persentase Pertambahan Angka Populasi Ternak | Bidang Pertanian | 0 persen | 5 persen | 5 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| **Sasaran : Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perikanan** | | | | **-9,76** | **4,05** | **4,45** | |
| **Indikator Sasaran : Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan** | | | | **-9,76** | **4,05** | **4,45** | |
| **Strategi : Meningkatan sarana prasarana, produktifitas dan kualitas pengelolaan hasil perikanan tangkap dan perikanan budidaya serta Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan** | | | | | | | |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan sarana prasarana, produktifitas dan kualitas pengelolaan hasil perikanan tangkap dan perikanan budidaya** | | | | | | | |
| 37705 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Volume produksi perikanan tangkap | Bidang Kelautan dan Perikanan | 0 Ton | 229300 Ton | 235650 Ton | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 38071 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Jumlah Produksi Benih Ikan yang unggul (Juta Ekor) | Bidang Kelautan dan Perikanan | 0 Juta Ekor | 11 Juta Ekor | 12 Juta Ekor | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 0 | 0 | Volume produksi perikanan budidaya | Bidang Kelautan dan Perikanan | 0 Ton | 13980 Ton | 15170 Ton | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 38801 | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan | Bidang Kelautan dan Perikanan | 0 ton | 22810 ton | 23910 ton | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 0 | 0 | Persentase UPI yang dibina memenuhi standar mutu dan keamanan pangan (persentase) | Bidang Kelautan dan Perikanan | 0 | 0,87 | 0,9 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 37340 | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | lokasi Jasa Kelautan yang dimanfaatkan untuk peningkatan investasi di perairan Bangka Belitung | Bidang Kelautan dan Perikanan | 0 lokasi | 25 lokasi | 27 lokasi | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| **Arah Kebijakan : Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan** | | | | | | | |
| 38436 | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Persentase Pelaku Usaha yang Taat Aturan (%) | Bidang Kelautan dan Perikanan | 0 | 0,73 | 0,8 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 38436 | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Persentase Pelaku Usaha yang Taat Aturan (%) | Bidang Kelautan dan Perikanan | 0 | 0,73 | 0,8 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 38436 | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Persentase Pelaku Usaha yang Taat Aturan (%) | Bidang Kelautan dan Perikanan | 0 | 0,73 | 0,8 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 38436 | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Persentase Pelaku Usaha yang Taat Aturan (%) | Bidang Kelautan dan Perikanan | 0 | 0,73 | 0,8 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| **Sasaran : Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian** | | | | **-9,23** | **4,52** | **0,46** | |
| **Indikator Sasaran : Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian** | | | | **-9,23** | **4,52** | **0,46** | |
| **Strategi : Meningkatan tata kelola sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan.** | | | | | | | |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan tata kelola sumber daya mineral** | | | | | | | |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **yang berwawasan lingkungan.** | | | | | | | |
| 37344 | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN | Persentase Kepatuhan penataan izin air tanah (Cabdin ESDM Wilayah Bangka) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 % | 85 % | 90 % | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| 0 | 0 | Persentase Kepatuhan penataan izin air tanah (DESDM) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 0,85 | 0,9 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| 37709 | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA | Persentase pertambangan yang "good mining practices" (Cabdin ESDM Wilayah Bangka) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 % | 85 % | 85 % | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| 0 | 0 | Persentase pertambangan yang "good mining practices" (Cabdin ESDM Wilayah Bangka Barat) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 0,85 | 0,85 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| 0 | 0 | Persentase pertambangan yang "good mining practices" (Cabdin ESDM Wilayah Bangka Tengah dan Selatan) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 0,85 | 0,85 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| 0 | 0 | Persentase pertambangan yang "good mining practices" (Cabdin ESDM Wilayah Belitung) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 0,85 | 0,85 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| 0 | 0 | Persentase pertambangan yang "good mining practices" (Cabdin ESDM Wilayah Belitung Timur) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 0,85 | 0,85 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| 0 | 0 | Persentase pertambangan yang "good mining practices" (DESDM) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 0,85 | 0,85 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| 38440 | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN | Persentase Bauran Energi Terbarukan (DESDM) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 0,1298 | 0,1798 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| 38805 | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | Rasio Elektrifikasi (Cabdin ESDM Wilayah Bangka) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 % | 99.99 % | 99.99 % | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| 0 | 0 | Rasio Elektrifikasi (Cabdin ESDM Wilayah Bangka Barat) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 99.99 % | 99.99 % | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| 0 | 0 | Rasio Elektrifikasi (Cabdin ESDM Wilayah Bangka Tengah dan Selatan) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 99.99 % | 99.99 % | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| 0 | 0 | Rasio Elektrifikasi (Cabdin ESDM Wilayah Belitung) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 99.99 % | 99.99 % | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| 0 | 0 | Rasio Elektrifikasi (Cabdin ESDM Wilayah Belitung Timur) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 99.99 % | 99.99 % | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| 0 | 0 | Rasio Elektrifikasi (DESDM) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 99.99 % | 99.99 % | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| 0 | 0 | Terwujudnya Reformasi birokrasi | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 0,95 | 0,95 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| 0 | 0 | Indeks Reformasi Birokrasi | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,9 | 0,9 | 0,9 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| **Sasaran : Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan** | | | | **-5,64** | **3,25** | **4,55** | |
| **Indikator Sasaran : Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan** | | | | **-5,64** | **3,25** | **4,55** | |
| **Strategi : Meningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Serta Pembinaan Hubungan Industri dan Kesehatan Kerja dan** | | | | | | | |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **tata kelola industri dan nilai tambah produk** | | | | | | | |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Serta Pembinaan Hubungan Industri dan Kesehatan Kerja** | | | | | | | |
| 38390 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | Persentase perusahaan yang telah memiliki sarana hubungan industrial | Bidang Tenaga Kerja | 0 | 0,029 | 0,032 | Disnaker |
| 37659 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Persentase Pencari kerja Yang Berkompeten | Bidang Tenaga Kerja | 0 | 0,0525 | 0,0575 | Disnaker |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan tata kelola industri dan nilai tambah produk** | | | | | | | |
| 37346 | PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Persentase Fasilitasi Layanan Desain dan Kemasan Produk UMKM yang Diproduksi (UPTD RPK) | Bidang Perindustrian | 0 % | 60 % | 70 % | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 0 | 0 | Persentase Pertumbuhan Unit Usaha Industri | Bidang Perindustrian | 0 | 0,025 | 0,0275 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 37711 | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | ), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Kawasan Usaha Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Perusahaan Industri dan Kawasan Industri | Bidang Perindustrian | 0 % | 65 % | 75 % | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 0 | 0 | Persentase Pengawasan dan Pengendalian Perusahaan Industri dan Kawasan Industri | Bidang Perindustrian | 0 | 0,55 | 0,65 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 38077 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | Persentase Kepatuhan Perusahaan Industri dan Kawasan Industri pada Akun SIINas | Bidang Perindustrian | 0 | 0,85 | 0,95 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| **Sasaran : Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan** | | | | **-4,62** | **4,94** | **5,55** | |
| **Indikator Sasaran : Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan** | | | | **-4,62** | **4,94** | **5,55** | |
| **Strategi : Meningkatan Kualitas dan Daya Saing Produk dan Pengendalian ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan atau Barang Penting** | | | | | | | |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Produk** | | | | | | | |
| 37345 | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | Persentase Tertib Usaha | Bidang Perdagangan | 0 | 1 | 1 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 37710 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Persentase Barang terdistribusi | Bidang Perdagangan | 0 | 0,84 | 0,88 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 38806 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Nilai Indeks Keberdayaan Konsumen | Bidang Perdagangan | 0 % | 43 % | 44 % | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 0 | 0 | Persentase Komoditi Potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku (UPTD BPSMB) | Bidang Perdagangan | 0 | 1 | 1 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 39171 | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | Persentase Fasilitasi Produk UMKM yang dipasarkan (UPTD RPK) | Bidang Perdagangan | 0 % | 40 % | 50 % | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 0 | 0 | Persentase Produk Lokal yang digunakan, dipromosikan dan dipasarkan melalui Akses Pasar | Bidang Perdagangan | 0 | 0,65 | 0,75 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 0 | 0 | Persentase Pertumbuhan | 0 | 2,00 % | 3,50 % | 4,00 % | DINAS |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Lapangan Usaha Industri Pengolahan | | | | | PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 0 | 0 | Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan | 0 | 14,500 Triliyun Rp | 16,000 Triliyun Rp | 17,500 Triliyun Rp | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| **Arah Kebijakan : Pengendalian ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan atau Barang Penting** | | | | | | | |
| 38076 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING | Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok | Bidang Perdagangan | 0 | 8,30 % | 8,00 % | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| **Sasaran : Meningkatnya Kunjungan Wisatawan asing dan domestic** | | | | **43,00** | **2,63** | **2,50** | |
| **Indikator Sasaran : Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan asing dan domestic** | | | | **43,00** | **2,63** | **2,50** | |
| **Strategi : Meningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Eonomi Kreatif, Kebudayaan, Peran Serta Masyarakat dan Kelembagaan Industri Pariwisata dan Sarana dan Prasarana Pengembangan Promosi, Destinasi dan Pemasaran Pariwisata** | | | | | | | |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Eonomi Kreatif, Kebudayaan, Peran Serta Masyarakat dan Kelembagaan Industri Pariwisata** | | | | | | | |
| 37309 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Persentase kebudayaan lokal yang dikembangkan | Bidang Kebudayaan | 0 persen | 49,33 persen | 49,33 persen | DIPARBUDKEPORA |
| 37674 | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan | Bidang Kebudayaan | 0 persen | 100 persen | 100 persen | DIPARBUDKEPORA |
| 38039 | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | Persentase Sejarah Lokal yang Dibina | Bidang Kebudayaan | 0 persen | 71 persen | 100 persen | DIPARBUDKEPORA |
| 38405 | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikelola | Bidang Kebudayaan | 0 persen | 62 persen | 100 persen | DIPARBUDKEPORA |
| 38770 | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | Persentase museum yang dikelola | Bidang Kebudayaan | 0 persen | 100 persen | 100 persen | DIPARBUDKEPORA |
| 37341 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Persentase Destinasi Pariwisata Provinsi yang Ditingkatkan Kualitasnya di Pulau Belitung, Geopark Belitong dan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang | Bidang Pariwisata | 0 % | 25 % | 100 % | DIPARBUDKEPORA |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengembangan Promosi, Destinasi dan Pemasaran Pariwisata** | | | | | | | |
| 37706 | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | Jumlah Kunjungan Wisatawan | Bidang Pariwisata | 0 kunjungan 26 | 5144 kunjungan | 6331 kunjungan | DIPARBUDKEPORA |
| 0 | 0 | Jumlah Kunjungan Wisatawan di Pulau Belitung | Bidang Pariwisata | 0 Kunjungan 18 | 2027 Kunjungan | 9785 Kunjungan | DIPARBUDKEPORA |
| 38072 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | Persentase Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan | Bidang Pariwisata | 0 | 0,3077 | 0,8 | DIPARBUDKEPORA |
| 38437 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Persentase SDM Pariwisata dan Ekraf yang Memiliki Kompetensi | Bidang Pariwisata | 0 | 0,1 | 0,097 | DIPARBUDKEPORA |
| **Sasaran : Meningkatnya Ekspor** | | | | **106,95** | **7,51** | **6,53** | |
| **Indikator Sasaran : Laju Pertumbuhan Ekspor** | | | | **106,95** | **7,51** | **6,53** | |
| **Strategi : Meningkatan produktifitas, kualitas dan daya saing produk unggulan daerah.** | | | | | | | |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan produktifitas, kualitas dan daya saing produk unggulan daerah.** | | | | | | | |
| 38441 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor | Bidang Perdagangan | 0 | 4,5 % | 0,06 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | | PERDAGANGAN |
| **Sasaran : Meningkatnya Nilai Investasi (PMA/PMDN) Daerah** | | | | **-39,68** | **30,00** | **34,12** | |
| **Indikator Sasaran : Pertumbuhan Investasi** | | | | **-39,68** | **30,00** | **34,12** | |
| **Strategi : Mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah;** | | | | | | | |
| **Arah Kebijakan : Mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah;** | | | | | | | |
| 37305 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | Banyaknya investor yang menanamkan modal | Bidang Penanaman Modal | 0 Investor | 25 Investor | 105 Investor | DPMPTSP |
| 37670 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Peluang penanaman modal yang dipromosikan | Bidang Penanaman Modal | 0 Peluang | 2 Peluang | 2 Peluang | DPMPTSP |
| 38035 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Pelaku Usaha yang terlayani | Bidang Penanaman Modal | 0 Pelaku Usaha | 1000 Pelaku Usaha | 4125 Pelaku Usaha | DPMPTSP |
| 38401 | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Persentase Perusahaan Yang Patuh Terhadap Perundang-Undangan | Bidang Penanaman Modal | 0 | 0,011 | 0,013 | DPMPTSP |
| 38766 | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | Sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang dikelola | Bidang Penanaman Modal | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | DPMPTSP |
| **Prioritas Pembangunan Daerah : Pembangunan Lingkungan** | | | | | | | |
| **Tujuan : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam** | | | | **72,05** | **75,84** | **77,50** | |
| **Indikator Tujuan : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)** | | | | **72,05** | **75,84** | **77,50** | |
| **Sasaran : Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup** | | | | **72,05** | **75,84** | **77,50** | |
| **Indikator Sasaran :Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)** | | | | **72,05** | **75,84** | **77,50** | |
| **Strategi :Meningkatan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tata kelola kehutanan** | | | | | | | |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup** | | | | | | | |
| 37298 | PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP | Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun | Bidang Lingkungan Hidup | 0 | 1 | 1 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 37663 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase Pengujian Sampel Parameter Kualitas Lingkungan yang terlayani (Laboratorium Lingkungan) | Bidang Lingkungan Hidup | 0 % | 90 % | 90 % | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Persentase Penurunan Emisi GRK dari Sektor Limbah dan Kehutanan | Bidang Lingkungan Hidup | 0 | 1 | 1 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Persentase Titik Sampling Uji Kualitas Lingkungan | Bidang Lingkungan Hidup | 0 | 0,65 | 0,7 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 38028 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang dilaksanakan | Bidang Lingkungan Hidup | 0 | 1 | 1 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 38394 | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) | Bidang Lingkungan Hidup | 0 | 1 | 1 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 38759 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Persentase Ketaatan Usaha/ Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Bidang Lingkungan Hidup | 0 | 0,65 | 0,75 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 39124 | PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT | Persentase penyusunan Rekomendasi pengakuan MHA, Kearifan Lokal atau | Bidang Lingkungan Hidup | 0 | 1 | 1 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH | Pengetahuan Tradisonal dan Hak MHA terkait dengan PPLH | | | | | |
| 39489 | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase kelompok swadaya masyarakat yang aktif dan mandiri | Bidang Lingkungan Hidup | 0 | 0,7 | 0,9 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 39855 | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup yang diberikan | Bidang Lingkungan Hidup | 0 | 0,8 | 0,9 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 40220 | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase Penanganan Pengaduan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diverifikasi | Bidang Lingkungan Hidup | 0 | 1 | 1 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 40585 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Persentase Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional | Bidang Lingkungan Hidup | 0 % | 25 % | 25 % | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Persentase Pengelolaan Persampahan di TPA Regional | Bidang Lingkungan Hidup | 0 | 0,05 | 0,15 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan tata kelola kehutanan** | | | | | | | |
| 37708 | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi) (DLHK) | Bidang Kehutanan | 0 % | 20 % | 20 % | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi) (UPTD KPH Belantu Mendanau) | Bidang Kehutanan | 0 | 0,2 | 0,2 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi) (UPTD KPH Bubus Panca) | Bidang Kehutanan | 0 | 0,2 | 0,2 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi) (UPTD KPH Gunung Duren) | Bidang Kehutanan | 0 | 0,2 | 0,2 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi) (UPTD KPH Jebu Bembang Antan) | Bidang Kehutanan | 0 | 0,2 | 0,2 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi) (UPTD KPH Muntai Palas) | Bidang Kehutanan | 0 | 0,2 | 0,2 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi) (UPTD KPH Rambat Menduyung) | Bidang Kehutanan | 0 | 0,2 | 0,2 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi) (UPTD KPH Sigambir Kotawaringin) | Bidang Kehutanan | 0 | 0,2 | 0,2 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi) (UPTD KPH Sungai Sembulan) | Bidang Kehutanan | 0 | 0,2 | 0,2 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (DLHK) | Bidang Kehutanan | 0 | 13.17 % | 13.17 % | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (UPTD KPH Belantu Mendanau) | Bidang Kehutanan | 0 | 13.17 % | 13.17 % | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (UPTD KPH Bubus Panca) | Bidang Kehutanan | 0 | 13.17 % | 13.17 % | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi | Bidang Kehutanan | 0 | 13.17 % | 13.17 % | Dinas Lingkungan Hidup dan |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | (UPTD KPH Gunung Duren) | | | | | Kehutanan |
| 0 | 0 | Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (UPTD KPH Jebu Bembang Antan) | Bidang Kehutanan | 0 | 13.17 % | 13.17 % | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (UPTD KPH Muntai Palas) | Bidang Kehutanan | 0 | 13.17 % | 13.17 % | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (UPTD KPH Rambat Menduyung) | Bidang Kehutanan | 0 | 13.17 % | 13.17 % | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (UPTD KPH Sigambir KotaWaringin) | Bidang Kehutanan | 0 | 13.17 % | 13.17 % | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (UPTD KPH Sungai Sembulan) | Bidang Kehutanan | 0 | 13.17 % | 13.17 % | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Persentase Pemanfaatan Kawasan Hutan (DLHK) | Bidang Kehutanan | 0 | 35.65 % | 35.41 % | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Persentase Pemanfaatan Kawasan Hutan (UPTD KPH Belantu Mendanau) | Bidang Kehutanan | 0 | 35.65 % | 35.41 % | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Persentase Pemanfaatan Kawasan Hutan (UPTD KPH Bubus Panca) | Bidang Kehutanan | 0 | 35.65 % | 35.41 % | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Persentase Pemanfaatan Kawasan Hutan (UPTD KPH Gunung Duren) | Bidang Kehutanan | 0 | 35.65 % | 35.41 % | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Persentase Pemanfaatan Kawasan Hutan (UPTD KPH Jebu Bembang Antan) | Bidang Kehutanan | 0 | 35.65 % | 35.41 % | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Persentase Pemanfaatan Kawasan Hutan (UPTD KPH Muntai Palas) | Bidang Kehutanan | 0 | 35.65 % | 35.41 % | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Persentase Pemanfaatan Kawasan Hutan (UPTD KPH Rambat Menduyung) | Bidang Kehutanan | 0 | 36.65 % | 35.41 % | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Persentase Pemanfaatan Kawasan Hutan (UPTD KPH Sigambir Kotawaringin) | Bidang Kehutanan | 0 | 35.65 % | 35.41 % | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Persentase Pemanfaatan Kawasan Hutan (UPTD KPH Sungai Sembulan) | Bidang Kehutanan | 0 | 35.65 % | 35.41 % | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 38074 | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA | Persentase Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (DLHK) | Bidang Kehutanan | 0 | 1 | 1 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 38439 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (DLHK) | Bidang Kehutanan | 0 % | 40 % | 50 % | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (UPTD KPH Belantu Mendanau) | Bidang Kehutanan | 0 | 0,4 | 0,5 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (UPTD KPH Bubus Panca) | Bidang Kehutanan | 0 | 0,4 | 0,5 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Peningkatan akses legal | Bidang | 0 | 0,4 | 0,5 | Dinas Lingkungan |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (UPTD KPH Gunung Duren) | Kehutanan | | | | Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (UPTD KPH Muntai Palas) | Bidang Kehutanan | 0 | 0,4 | 0,5 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (UPTD KPH Sigambir Kotawaringin) | Bidang Kehutanan | 0 | 0,4 | 0,5 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (UPTD KPH Sungai Sembulan) | Bidang Kehutanan | 0 | 0,4 | 0,5 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (UPT KPH Jebu Bembang Antan) | Bidang Kehutanan | 0 | 0,4 | 0,5 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (UPT KPH Rambat Menduyung) | Bidang Kehutanan | 0 | 0,4 | 0,5 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 38804 | PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) | Persentase luas DAS yang dikelola (DLHK) | Bidang Kehutanan | 0 | 0,0913 | 0,0913 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| **Prioritas Pembangunan Daerah : Pembangunan Sumber Daya Manusia** | | | | | | | |
| **Tujuan : Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM** | | | | **71,69** | **72,13** | **72,57** | |
| **Indikator Tujuan : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** | | | | **71,69** | **72,13** | **72,57** | |
| **Sasaran : Meningkatnya Pembangunan Manusia** | | | | **71,69** | **72,13** | **72,57** | |
| **Indikator Sasaran : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** | | | | **71,69** | **72,13** | **72,57** | |
| **Strategi : Meningkatkan Akses pelayanan dan Mutu Pendidikan serta meningkatkan relevansi dan daya saing serta kualitas hidup, peran perempuan dan anak serta memenuhi keadilan dan kesetaraan gender (KKG)** | | | | | | | |
| **Arah Kebijakan : Meningkatkan Akses pelayanan dan Mutu Pendidikan serta meningkatkan relevansi dan daya saing** | | | | | | | |
| 0 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 0 | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 0 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | persentase guru yang bersertifikat pendidik | Pendidikan | 0 | 65 | 0 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Persentase Satuan Pendidikan Khusus terakreditasi A di cabdin V | Pendidikan | 0 persen | 100 persen | 0 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Persentase Satuan Pendidikan Khusus terakreditasi A di Cabdin WIlayah III | Pendidikan | 0 persen | 100 persen | 0 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Persentase Satuan Pendidikan Khusus terakreditasi A di Cabdin Wilayah IV | Pendidikan | 0 persen | 100 persen | 0 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Persentase Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus terakreditasi A | Pendidikan | 0 persen | 100 persen | 0 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Persentase Satuan Pendidikan pendidikan khusus terakreditasi A di | Pendidikan | 0 persen | 100 persen | 0 | Dinas Pendidikan |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Cabdin Wilayah I | | | | | |
| 0 | 0 | Persentase Satuan Pendidikan pendidikan khusus terakreditasi A di Cabdin WIlayah II | Pendidikan | 0 persen | 100 persen | 0 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Persentase Satuan Pendidikan SMA terakreditasi A | Pendidikan | 0 persen | 51,29 persen | 0 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Persentase Satuan Pendidikan SMA terakreditasi A di Cabdin I | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 0 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Persentase Satuan Pendidikan SMA terakreditasi A di Cabdin Wilayah II | Pendidikan | 0 persen | 50 persen | 0 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Persentase Satuan Pendidikan SMA terakreditasi A di Cabdin Wilayah III | Pendidikan | 0 persen | 83,3 persen | 0 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Persentase Satuan Pendidikan SMA terakreditasi A di Cabdin WIlayah IV | Pendidikan | 0 persen | 44,4 persen | 0 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Persentase Satuan Pendidikan SMA terakreditasi A di Cabdin Wilayah V | Pendidikan | 0 persen | 18,75 persen | 0 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Persentase Satuan Pendidikan SMK terakreditasi A | Pendidikan | 0 persen | 73,6 persen | 0 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Persentase Satuan Pendidikan SMK terakreditasi A di Cabdin I | Pendidikan | 0 persen | 80 persen | 0 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Persentase Satuan Pendidikan SMK terakreditasi A di Cabdin WIlayah II | Pendidikan | 0 persen | 76,5 persen | 0 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Persentase Satuan Pendidikan SMK terakreditasi A di Cabdin WIlayah III | Pendidikan | 0 persen | 42,9 persen | 0 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Persentase Satuan Pendidikan SMK terakreditasi A di Cabdin Wilayah IV | Pendidikan | 0 persen | 90 persen | 0 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Persentase Satuan Pendidikan SMK terakreditasi A di Cabdin Wilayah V | Pendidikan | 0 persen | 78,6 persen | 0 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Proporsi Guru dan Siswa yang menguasai TIK | Pendidikan | 0 persen | 70 persen | 0 | Dinas Pendidikan |
| 37257 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Persentase lulusan SMA yang memiliki kompetensi TIK | Pendidikan | 0 persen | 73 persen | 80 persen | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Persentase lulusan SMA yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin WIlayah I | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 70 persen | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Persentase lulusan SMA yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah II | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 70 persen | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Persentase lulusan SMA yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah III | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 70 persen | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Persentase lulusan SMA yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 70 persen | Dinas Pendidikan |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Wilayah IV | | | | | |
| 0 | 0 | Persentase lulusan SMA yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah V | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 70 persen | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Persentase lulusan SMK yang memiliki kompetensi TIK | Pendidikan | 0 persen | 73 persen | 80 persen | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Persentase lulusan SMK yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah I | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 70 persen | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Persentase lulusan SMK yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah II | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 70 persen | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Persentase lulusan SMK yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah III | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 70 persen | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Persentase lulusan SMK yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah IV | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 70 persen | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Persentase lulusan SMK yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah V | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 70 persen | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Persentase lulusan SMK yang memiliki sertifikast kompetensi | Pendidikan | 0 persen | 68 persen | 75 persen | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Persentase lulusan SMK yang terserap di DUDIKA | Pendidikan | 0 persen | 59 persen | 59 persen | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Persentase siswa PK yang melanjutkan pendidikan di PTN dan PTS | Pendidikan | 0 persen | 6 persen | 10 persen | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Persentase siswa SMA yang melanjutkan pendidikan di PTN dan PTS | Pendidikan | 0 persen | 55 persen | 65 persen | Dinas Pendidikan |
| 37310 | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Persentasi Perpustakaan Yang di Bina | Bidang Perpustakaan | 0 | 0,37 | 0,44 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| 37675 | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | Jumlah Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno | Bidang Perpustakaan | 0 Dokumen | 5 Dokumen | 5 Dokumen | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| 37676 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | Persentase Berkas Arsip Yang Di Lindungi Dan Di Selamatkan Sesuai Dengan Ketentuan | Bidang Kearsipan | 0 | 0,25 | 0,25 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| 37311 | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Kearsipan Sesuai Dengan Standart Baku Kearsipan | Bidang Kearsipan | 0 | 0,2 | 0,2 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| 38041 | PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP | Persentase Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup | Bidang Kearsipan | 0 | 12,50 % | 0,13 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan kualitas hidup, peran perempuan dan anak serta memenuhi keadilan dan kesetaraan gender (KKG)** | | | | | | | |
| 37295 | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Persentase ARG pada Belanja Operasi dan belanja modal APBD | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 persen | 2.6 persen | 2.8 persen | DP3CASKB |
| 37660 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Persentase kebijakan perlindungan perempuan | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan | 0 persen | 100 persen | 100 persen | DP3CASKB |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Perlindungan Anak | | | | |
| 0 | 0 | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 persen | 100 persen | 100 persen | DP3CASKB |
| 38025 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | Tingkat partisipasi angkatan kerja Perempuan | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 persen | 44.98 persen | 45.86 persen | DP3CASKB |
| 38756 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Persentase peningkatan SDM dalam Pemenuhan Partisipasi ANAK | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 persen | 19.90 persen | 20.90 persen | DP3CASKB |
| 39121 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 persen | 100 persen | 100 persen | DP3CASKB |
| 0 | 0 | Persentase Peningkatan SDM Perlindungan Anak | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 persen | 33 persen | 37 persen | DP3CASKB |
| 38391 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | Persentase capaian OPD yang menyediakan data pilah gender dan anak | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 persen | 92.59 persen | 96.29 persen | DP3CASKB |
| 37299 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Persentase masyarakat yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk (KK, KTP, KIA) | Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0 persen | 89.8 persen | 93.27 persen | DP3CASKB |
| 37664 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | Persentase masyarakat yang memiliki akta pencatatan sipil (Akta Lahir, Akta Mati, Akta Perkawinan) | Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0 persen | 89.5 persen | 96.50 persen | DP3CASKB |
| 38029 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Persentase perangkat daerah dan sektor lain yang mengadakan pejanjian Kerjasama | Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0 Persen | 37.14 Persen | 48.57 Persen | DP3CASKB |
| 38395 | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | Persentase penyediaan penyajian data kependudukan tingkat provinsi | Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0 persen | 100 persen | 100 persen | DP3CASKB |
| 37301 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Persentase pembinaan Penyediaan dan pemanfaatan data kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga di kabupaten/kota | Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 persen | 71.42 persen | 100 persen | DP3CASKB |
| 37666 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA | persentase pembinaan keluarga berencana dan | Bidang Pengendalian | 0 persen | 100 persen | 100 persen | DP3CASKB |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | BERENCANA (KB) | kesehatan reproduksi di kabupaten/kota | Penduduk dan Keluarga Berencana | | | | |
| 38031 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | persentase pembinaan kampung KB | Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 persen | 63 persen | 84 persen | DP3CASKB |
| **Strategi : Meningkatkan akses pelayanan dan kualitas kesehatan dengan memperkuat pelayanan dan sistem kesehatan** | | | | | | | |
| **Arah Kebijakan : Meningkatkan akses pelayanan dan kualitas kesehatan dengan memperkuat pelayanan dan sistem kesehatan** | | | | | | | |
| 37258 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) | Kesehatan | 0 persen | 100 persen | 100 persen | Dinas Kesehatan |
| 0 | 0 | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi minimal madya | Kesehatan | 0 fasyankes | 86 fasyankes | 88 fasyankes | Dinas Kesehatan |
| 0 | 0 | Persentase pelaksanaan sinkronisasi penerapan standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan lintas kab/kota | Kesehatan | 0 persen | 100 persen | 100 persen | Dinas Kesehatan |
| 0 | 0 | Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit | Kesehatan | 0 persen | 94 persen | 94 persen | Dinas Kesehatan |
| 0 | 0 | Persentase peningkatan kesehatan Masyarakat | Kesehatan | 0 persen | 87 persen | 89 persen | Dinas Kesehatan |
| 0 | 0 | Persentase peningkatan pemeriksaan laboratorium kesehatan | Kesehatan | 0 persen | 100 persen | 100 persen | Dinas Kesehatan |
| 0 | 0 | Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin essensial | Kesehatan | 0 persen | 87 persen | 88 persen | Dinas Kesehatan |
| 37623 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase tenaga kesehatan yang mendapatkan peningkatan kompetensi | Kesehatan | 0 persen | 87 persen | 88 persen | Dinas Kesehatan |
| 37988 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Persentase sarana sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat | Kesehatan | 0 persen | 89 persen | 90 persen | Dinas Kesehatan |
| 38354 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) | Kesehatan | 0 persen | 88 persen | 89 persen | Dinas Kesehatan |
| 37258 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase Pemenuhan Layanan Kesehatan Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna | Kesehatan | 0 persen | 85 persen | 86 persen | RSUP |
| 37623 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai klasifikasi Rumah Sakit tipe B | Kesehatan | 0 persen | 85 persen | 86 persen | RSUP |
| 38354 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan, kemitraan bidang Kesehatan | Kesehatan | 0 persen | 100 persen | 100 persen | RSUP |
| 37258 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase fasilitas pelayanan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai kelas | Kesehatan | 0 persen | 82 persen | 85 persen | RUMAH SAKIT JIWA |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Rumah Sakit | | | | | |
| 0 | 0 | Persentase masyarakat ataupun perorangan yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa dan non jiwa | Kesehatan | 0 persen | 82 persen | 85 persen | RUMAH SAKIT JIWA |
| 0 | 0 | Persentase masyarakat ataupun perorangan yang mendapat pelayanan penunjang | Kesehatan | 0 persen | 82 persen | 85 persen | RUMAH SAKIT JIWA |
| 0 | 0 | Persentase masyarakat ataupun perseorangan yang mendapat penanganan penyalahgunaan NAPZA | Kesehatan | 0 persen | 82 persen | 82 persen | RUMAH SAKIT JIWA |
| 37623 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase SDM kesehatan sesuai analisa beban kerja RS Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Kesehatan | 0 persen | 86 persen | 88 persen | RUMAH SAKIT JIWA |
| 0 | 0 | Persentase SDM kesehatan yang mendapat pendidikan dan pelatihan | Kesehatan | 0 persen | 86 persen | 88 persen | RUMAH SAKIT JIWA |
| **Prioritas Pembangunan Daerah : Pembangunan Demokrasi** | | | | | | | |
| **Tujuan : Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi.** | | | | **77,79** | **78,40** | **80,42** | |
| **Indikator Tujuan : Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi** | | | | **77,79** | **78,40** | **80,42** | |
| **Sasaran : Meningkatkan aspek kebebasan , kesetaraan , kapasitas lembaga dalam demokrasi** | | | | **77,79** | **78,40** | **80,42** | |
| **Indikator Sasaran :Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi** | | | | **77,79** | **78,40** | **80,42** | |
| **Strategi : meningkatkan kebebasan demokrasi, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat, kesetaraan dalam berdemokrasi, dan kapasitas lembaga demokrasi** | | | | | | | |
| **Arah Kebijakan : meningkatkan kebebasan demokrasi** | | | | | | | |
| 37469 | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | Persentase Jumlah konflik yang berlatarbelakang Ideologi | urusan pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik | 0 | 0,5 | 0,25 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 38930 | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | Persentase Daerah terlibat Konflik Sosial | urusan pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik | 0 | 0,5 | 0,25 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| **Arah Kebijakan : Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan Masyarakat** | | | | | | | |
| 37261 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase anggota satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan | Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat | 0 % | 31,14 % | 40,8 % | Satpol PP |
| 0 | 0 | Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan | Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat | 0 | 1 | 1 | Satpol PP |
| 0 | 0 | Persentase perda dan perkada yang ditegakkan | Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat | 0 | 0,393 | 0,5 | Satpol PP |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 0 | Persentase personil Satpol PP yang berkompeten | Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat | 0 | 0,811 | 0,865 | Satpol PP |
| 37991 | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Persentase respontime 15 menit kejadian kebakaran/pertolongan | Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat | 0 | 0,67 | 78,5 % | Satpol PP |
| **Arah Kebijakan : meningkatkan kesetaraan dalam berdemokrasi** | | | | | | | |
| 38565 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | Persentase pembinaan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Daerah | urusan pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik | 0 | 0,3 | 1 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 37469 | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | 0 | urusan pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik | 0 | 0 | 0 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 38200 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | 0 | urusan pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 0 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| **Arah Kebijakan : meningkatkan kapasitas lembaga demokrasi** | | | | | | | |
| 37834 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | Persentase pembinaan politik di daerah | urusan pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik | 0 | 0,3 | 1 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| **PRIORITAS PENDUKUNG** | | | | | | | |
| **Prioritas Pembangunan Daerah : Pembangunan Wilayah** | | | | | | | |
| **Tujuan : Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan Masyarakat** | | | | | | | |
| **Indikator Tujuan : Indeks Williamson** | | | | **0,190** | **0,181** | **0,176** | |
| **Sasaran : Meningkatnya ketersediaan infrastruktur** | | | | | | | |
| **Indikator Sasaran :Persentase Ketersediaan Infrastruktur** | | | | | | | |
| **Strategi : Memerataan ketersediaan infrastruktur** | | | | | | | |
| **Arah Kebijakan : Pemerataan ketersediaan infrastruktur** | | | | | | | |
| 37259 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | - Rasio Jaringan Irigasi | BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0 % | 0 % | 0 % | DPUPRPERKIM |
| 0 | 0 | 0 | BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0 | 0,0039 | 0,0056 | DPUPRPERKIM |
| 37624 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Persentase Penyelenggaraan Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi | BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0 % | 29 % | 29 % | DPUPRPERKIM |
| 0 | 0 | Persentase Readiness Criteria pengelolaan dan | BIDANG PEKERJAAN | 0 | 0,25 | 0,25 | DPUPRPERKIM |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | pengembangan sistem penyediaan air minum | UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | |
| 0 | 0 | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak | BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0 | 0 | 0 | DPUPRPERKIM |
| 37989 | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan | BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0 % | 100 % | 0 % | DPUPRPERKIM |
| 0 | 0 | Persentase Readiness Criteria pembangunan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional yang disiapkan | BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0 | 0 | 0 | DPUPRPERKIM |
| 0 | 0 | Persentase rumah tangga yang terlayani pengelolaan sampah | BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0 | 0 | 0,1 | DPUPRPERKIM |
| 38355 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Persentase Readiness Criteria pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah yang disiapkan | BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0 % | 18 % | 27 % | DPUPRPERKIM |
| 0 | 0 | Persentase rumah tangga yang besanitasi | BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0 | 0,06 | 0,06 | DPUPRPERKIM |
| 38720 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Persentase Readiness Criteria pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang disiapkan | BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0 | 0,5 | 0 | DPUPRPERKIM |
| 37302 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Bidang Perhubungan | 0 | 0,2321 | 0,4 | Dinas Perhubungan |
| 37667 | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pelabuhan | Bidang Perhubungan | 0 % | 13.30 % | 25.00 % | Dinas Perhubungan |
| 0 | 0 | Predikat RB Perangkat Daerah (Dinas Perhubungan) | Bidang Perhubungan | - % | 0,51 | 0,6 | Dinas Perhubungan |
| 0 | 0 | Nilai RB Perangkat Daerah (Dinas Perhubungan) | Bidang Perhubungan | - % | 0,51 | 0,6 | Dinas Perhubungan |
| **Sasaran : Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang** | | | | **0,6** | **0,70** | **0,80** | |
| **Indikator Sasaran : Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang** | | | | **0,6** | **0,70** | **0,80** | |
| **Strategi : Meningkatan ketaatan tata ruang** | | | | **0,6** | **0,70** | **0,80** | |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan ketaatan tata ruang** | | | | **0,6** | **0,70** | **0,80** | |
| 39450 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Persentase jumlah bangunan gedung yang terselenggara | BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0 % | 65 % | 100 % | DPUPRPERKIM |
| 0 | 0 | Persentase Readiness Criteria bangunan gedung yang disiapkan | BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0 | 1 | 1 | DPUPRPERKIM |
| 39816 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | Persentase Luas kawasan yang tertata | BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN | 0 | 0,44 | 1 | DPUPRPERKIM |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | PENATAAN RUANG | | | | |
| 40181 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Persentase jalan dalam kondisi mantap | BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0 | 0,9107 | 0,9283 | DPUPRPERKIM |
| 40546 | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Rasio ketersediaan penyelenggaraan jasa konstruksi | BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0 | 0,3915 | 0,7058 | DPUPRPERKIM |
| 40911 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Persentase Kesesuaian Rencana Tata Ruang dengan Pemanfaatan Ruang | BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0 | 0,86 | 0,88 | DPUPRPERKIM |
| 37260 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Persentase ketersediaan Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 0 % | 20 % | 20 % | DPUPRPERKIM |
| 0 | 0 | Persentase penyelenggaraan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 0 | 0,25 | 0,25 | DPUPRPERKIM |
| 0 | 0 | Persentasi Pengembangan perumahan korban Bencana atau relokasi program provinsi | BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 0 | 1 | 1 | DPUPRPERKIM |
| 37625 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | Persentase Kawasan Kumuh yang sudah direncanakan | BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 0 % | 23 % | 31 % | DPUPRPERKIM |
| 0 | 0 | Persentase luasan kawasan kumuh yang tertangani | BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 0 | 0,06 | 0,06 | DPUPRPERKIM |
| 38356 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Persentase Pemukiman yang terfasilitasi oleh PSU | BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 0 | 0,25 | 1 | DPUPRPERKIM |
| 38721 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Persentase layanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman tingkat kemampuan menengah yang ditingkatkan | BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 0 | 0,25 | 0,25 | DPUPRPERKIM |
| 37662 | PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM | Presentase Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum | BIDANG PERTANAHAN | 0 | 0,3 | 0,5 | DPUPRPERKIM |
| 38027 | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan | BIDANG PERTANAHAN | 0 | 0,2 | 0,3 | DPUPRPERKIM |
| 38393 | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan | BIDANG PERTANAHAN | 0 | 0,85 | 1 | DPUPRPERKIM |
| **Sasaran : Menurunnya Resiko Bencana** | | | | **0,34** | **0,37** | **0,39** | |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Indikator Sasaran : Indeks Resiko Bencana** | | | | **0,34** | **0,37** | **0,39** | |
| **Strategi : Meningkatan tata kelola penanggulangan bencana** | | | | **0,34** | **0,37** | **0,39** | |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan tata kelola penanggulangan bencana** | | | | **0,34** | **0,37** | **0,39** | |
| 37626 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Persentase Penanganan Pasca Bencana | Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat | 0 % | 71,5 % | 85,7 % | BPBD |
| 0 | 0 | Persentase Penanganan Pra Bencana | Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat | 0 | 1 | 1 | BPBD |
| 0 | 0 | Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana | Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat | 0 | 1 | 1 | BPBD |
| 38723 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Persentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan dan jaminan social | BIDANG SOSIAL | 0 | 25,15 % | 1 | Dinsospemdes |
| **Sasaran : Percepatan pembangunan kawasan perdesaan** | | | | **0,704** | **0,730** | **0,748** | |
| **Indikator Sasaran : Indeks desa membangun** | | | | **0,704** | **0,730** | **0,748** | |
| **Strategi : Meningkatan Kapasitas Desa dan penyediaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat pada kawasan transmigrasi** | | | | **0,704** | **0,730** | **0,748** | |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan Kapasitas Desa** | | | | | | | |
| 37300 | PROGRAM PENATAAN DESA | Persentase Penataan Desa yang dibina | bidang pemberdayaan masyarakat dan desa | 0 | 0,25 | 1 | Dinsospemdes |
| 37665 | PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA | Persentase kerjasama desa yang dilaksanakan | bidang pemberdayaan masyarakat dan desa | 0 | 22,50 % | 1 | Dinsospemdes |
| 38030 | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Persentase Administrasi Pemerintahan Desa yang Dibina | bidang pemberdayaan masyarakat dan desa | 0 | 0,25 | 1 | Dinsospemdes |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat pada kawasan transmigrasi** | | | | | | | |
| 3.32.04 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI | Persentase Kawasan Transmigrasi Yang dikembangkan | Bidang Transmigrasi | 0 Desa | 1 Desa | 1 Desa | Disnaker |
| 38396 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif | bidang pemberdayaan masyarakat dan desa | 0 | 0,25 | 1 | Dinsospemdes |
| **Sasaran :Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk** | | | | **1,93** | **1,74** | **1,68** | |
| **Indikator Sasaran : Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)** | | | | **1,93** | **1,74** | **1,68** | |
| **Strategi : Meningkatkan Pengendalian tingkat kelahiran Penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang** | | | | **1,93** | **1,74** | **1,68** | |
| **Arah Kebijakan : Pengendalian tingkat kelahiran Penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang** | | | | **1,93** | | **1,68** | |
| 37299 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Persentase masyarakat yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk (KK, KTP, KIA) | Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan | 0 persen | 89.8 persen | 93.27 persen | DP3CASKB |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Sipil | | | | |
| 37664 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | Persentase masyarakat yang memiliki akta pencatatan sipil (Akta Lahir, Akta Mati, Akta Perkawinan) | Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0 persen | 89.5 persen | 96.50 persen | DP3CASKB |
| 38029 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Persentase perangkat daerah dan sektor lain yang mengadakan pejanjian Kerjasama | Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0 Persen | 37.14 Persen | 48.57 Persen | DP3CASKB |
| 38395 | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | Persentase penyediaan penyajian data kependudukan tingkat provinsi | Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0 persen | 100 persen | 100 persen | DP3CASKB |
| 37301 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Persentase pembinaan Penyediaan dan pemanfaatan data kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga di kabupaten/kota | Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 persen | 71.42 persen | 100 persen | DP3CASKB |
| 37666 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | persentase pembinaan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di kabupaten/kota | Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 persen | 100 persen | 100 persen | DP3CASKB |
| 38031 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | persentase pembinaan kampung KB | Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 persen | 63 persen | 84 persen | DP3CASKB |
| **Prioritas Pembangunan Daerah : Pembangunan Pendapatan Masyarakat** | | | | | | | |
| **Indikator Tujuan : Indeks Gini** | | | | **0,247** | **0,229** | **0,217** | |
| **Sasaran : Menurunkan Tingkat Kemiskinan** | | | | **4,67** | **4,20** | **4,01** | |
| **Indikator Sasaran : Persentase Angka Kemiskinan** | | | | **4,67** | **4,20** | **4,01** | |
| **Strategi : Meningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas, Pengembangan sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial, serta Peningkatan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin** | | | | | | | |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas** | | | | | | | |
| 37627 | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang di ditangani | BIDANG SOSIAL | 0 | 23,81 % | 1 | Dinsospemdes |
| 37992 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase PMKS yang di Rehabilitasi sosial di Dalam Panti | BIDANG SOSIAL | 0 % | 22,58 % | 100 % | Dinsospemdes |
| 0 | 0 | Persentase PMKS yang di rehabilitasi sosial di dalam Panti Sosial Bina Laras Hijrah | BIDANG SOSIAL | 0 | 0,3 | 1 | Dinsospemdes |
| 0 | 0 | Persentase PMKS yang di Rehabilitasi Sosial di Dalam Panti Sosial Bina Serumpun | BIDANG SOSIAL | 0 | 0,2143 | 1 | Dinsospemdes |
| **Arah Kebijakan : Pengembangan sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan social** | | | | | | | |
| 38358 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan | BIDANG SOSIAL | 0 | 25,28 % | 1 | Dinsospemdes |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | jaminan social | | | | | |
| 39088 | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Persentase TMP yang dikelola | BIDANG SOSIAL | 0 | 1 | 1 | Dinsospemdes |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin** | | | | | | | |
| 37262 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Persentase PMKS/PSKS yg terberdayakan | BIDANG SOSIAL | 0 | 1 | 1 | Dinsospemdes |
| **Sasaran : Meningkatkan Kesempatan Kerja** | | | | **5,03** | **4,39** | **4,19** | |
| **Indikator Sasaran : Tingkat Pengangguran Terbuka** | | | | **5,03** | **4,39** | **4,19** | |
| **Strategi : meningkatan akses terhadap penciptaan lapangan kesempatan kerja, kualitas hidup, peran perempuan dan anak serta memenuhi keadilan dan kesetaraan gender (KKG), kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan serta peningkatan budaya dan Kesejahteraan Tenaga Kerja** | | | | | | | |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan akses terhadap penciptaan lapangan kesempatan kerja** | | | | | | | |
| 37294 | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | Persentase dokumen Perencanaan Ketenagakerjaan kab/kota | Bidang Tenaga Kerja | 0 | 1 | 1 | Disnaker |
| 37659 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Persentase Pencari kerja Yang Berkompeten | Bidang Tenaga Kerja | 0 | 0,0525 | 0,0575 | Disnaker |
| 38024 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | Persentase Tenga Kerja Yang Ditempatkan | Bidang Tenaga Kerja | 0 | 0,05 | 0,05 | Disnaker |
| 37304 | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | Persentase Izin Usaha Simpan Pinjam yang Difasilitasi | Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 0 | 0,03 | 0,05 | DKUKM |
| 37669 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Persentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa | Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 0 | 0,2 | 0,27 | DKUKM |
| 38034 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | Persentase Kesehatan KSP/USP yang dinilai | Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 0 | 0,67 | 0,67 | DKUKM |
| 38400 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Persentase SDM Koperasi, UKM yang Terlatih (BALATKOP KUKM) | Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 0 | 0,00277 | 0,00298 | DKUKM |
| 38765 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | Persentase Koperasi yang diberdayakan | Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 0 | 0,44 | 0,69 | DKUKM |
| 39130 | PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Persentase UMKM yang Diberdayakan | Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 0 | 0,51 % | 0,62 % | DKUKM |
| 39495 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Persentase Usaha Kecil Yang Meningkat Menjadi Usaha Menengah | Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 0 | 0,11 % | 0,13 % | DKUKM |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan kualitas hidup, peran perempuan dan anak serta memenuhi keadilan dan kesetaraan gender (KKG)** | | | | | | | |
| 37295 | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Persentase ARG pada Belanja Operasi dan belanja modal APBD | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 persen | 2.6 persen | 2.8 persen | DP3CASKB |
| 37660 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Persentase kebijakan perlindungan perempuan | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 persen | 100 persen | 100 persen | DP3CASKB |
| 0 | 0 | Persentase Perempuan | Bidang | 0 persen | 100 persen | 100 | DP3CASKB |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | persen | |
| 38025 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 persen | 44.98 persen | 45.86 persen | DP3CASKB |
| 38756 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Persentase peningkatan SDM dalam Pemenuhan Partisipasi ANAK | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 persen | 19.90 persen | 20.90 persen | DP3CASKB |
| 39121 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 persen | 100 persen | 100 persen | DP3CASKB |
| 0 | 0 | Persentase Peningkatan SDM Perlindungan Anak | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 persen | 33 persen | 37 persen | DP3CASKB |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan serta peningkatan budaya** | | | | | | | |
| 37671 | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Persentase Cabang Olahraga yang dibina | Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 0 persen | 61.11 persen | 69.44 persen | DIPARBUDKEPORA |
| 37306 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina | Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 0 organisasi | 35 organisasi | 35 organisasi | DIPARBUDKEPORA |
| 38036 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | Persentase tingkat keaktifan Organisasi Pramuka | Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 0 persen | 19.51 persen | 19.51 persen | DIPARBUDKEPORA |
| 37306 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Persentase Pemuda Yang dibina | Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 0 persen | 0.42 persen | 0.50 persen | DIPARBUDKEPORA |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja** | | | | | | | |
| 38755 | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN | Persentase perusahaan yang dilakukan pengawasan Norma Ketenagakerjaan | Bidang Tenaga Kerja | 0 | 0,175 | 0,225 | Disnaker |
| **Prioritas Pembangunan Daerah : Pembangunan Pemerintahan** | | | | | | | |
| **Tujuan : Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi.** | | | | **66,08** | **69,00** | **70,50** | |
| **Indikator Tujuan :Indeks Reformasi Birokrasi** | | | | **66,08** | **69,00** | **70,50** | |
| **Sasaran : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan** | | | | **66,08** | **69,00** | **70,50** | |
| **Indikator Sasaran :Indeks Reformasi Birokrasi** | | | | **66,08** | **69,00** | **70,50** | |
| **Strategi : Peningkatan akses data dan informasi serta Kualitas Pelayanaan Publik dengan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi Masyarakat** | | | | | | | |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan akses data dan informasi serta Kualitas Pelayanaan Publik dengan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi Masyarakat** | | | | | **Rp6** | | |
| 37303 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebarluasan informasi public | Bidang Komunikasi dan Informatika | 0 | 1 | 1 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 37668 | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | Persentase ketersediaan infrastruktur, teknologi dan sistem elektronik. | Bidang Komunikasi dan | 0,8 | 0,85 | 1 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Informatika | | | | |
| 37307 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Presentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah | Bidang Statistik | 0 | 0,75 | 1 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 37308 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Presentase tingkat keamanan informasi pemerintah daerah | Bidang Persandian | 0 | 0,75 | 1 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | Program Kesejahteraan Rakyat | Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Kesejahteraan Rakyat yang tersusun | Penunjang Urusan Pemerintah | 70% | 70% | 70% | Biro Kesejahteraan Rakyat |
| | PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH (meningkatnya Usulan Kebijakan Daerah dibidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah ) | Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang tersusun | | 90% | 75% | | Biro Pemerintahan |
| | PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH (Meningkatnya Usulan Kebijakan Daerah dibidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah ) | Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang tersusun | | 90% | 75% | | Biro Pemerintahan |
| | PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH (meningkatnya Usulan Kebijakan Daerah dibidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah ) | Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang tersusun | | 90% | 75% | | Biro Pemerintahan |
| **Strategi : Peningkatan transparansi dan layanan Pengadaan barang dan jasa, Penguatan Sistem Manajemen Pemerintahan, Penataan peraturan perundang-undangan, Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur, manajemen aset dan pencatatan pelaporan aset serta laporan realisasi anggaran, tata laksana dan kinerja pemerintah daerah serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel dan kesesuaian antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja** | | | | | | | |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan transparansi dan layanan Pengadaan barang dan jasa** | | | | | | | |
| | Program Kebijakan Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa | Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Pengadaan Barang dan Jasa yang tersusun | Penunjang Urusan Pemerintah | 50% | 80% | 80% | Biro Pengadaan Barang Jasa |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen Pemerintahan** | | | | | | | |
| 37378 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Jumlah kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan | Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan | 0 Kab/Kota | 7 Kab/Kota | 7 Kab/Kota | Bakuda |
| 0 | 0 | Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi, | Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan | 0 Nilai | 2 Nilai | 2 Nilai | Bakuda |
| 0 | 0 | Nilai ketepatan waktu penetapan APBD dan Perubahan APBD | Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan | 0 Nilai | 2 Nilai | 2 Nilai | Bakuda |
| 0 | 0 | persentase pemenuhan ketaatan pada peraturan terhadap penyaluran Dana Transfer dan BTT | Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan | 0 | 1 | 1 | Bakuda |
| 0 | 0 | persentase realisasi penyediaan dana belanja APBD | Urusan Pemerintahan Unsur | 0 | 0,93 | 0,94 | Bakuda |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Keuangan | | | | |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan Penataan peraturan perundang-undangan** | | | | | | | |
| 37348 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Persentase meningkatnya fungsi legislasi lembaga DPRD<br>Persentase meningkatnya fungsi penganggaran lembaga DPRD dan | Urusan Pemerintahan Unsur Sekretariat DPRD | 0 % | 82 % | 82 % | SEKRETARIAT DPRD |
| 0 | 0 | Persentase meningkatnya fungsi pengawasan lembaga DPRD | Urusan Pemerintahan Unsur Sekretariat DPRD | 0 | 0,82 | 0,82 | SEKRETARIAT DPRD |
| | Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | | Pendukung Urusan Pemerintah | | 90 | | Biro Hukum |
| | Fasilitasi Bantuan Hukum | | | | | | Biro Hukum |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur** | | | | | | | |
| 37379 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Persentase ASN yang ditingkatkan kapasitasnya | Urusan Pemerintahan Unsur Kepegawaian | 0 % | 26,60 % | 31,04 % | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| 0 | 0 | Persentase ASN yang memiliki kinerja minimal baik | Urusan Pemerintahan Unsur Kepegawaian | 0 | 99.87 % | 99.91 % | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| 0 | 0 | Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui mutasi, promosi | Urusan Pemerintahan Unsur Kepegawaian | 0 | 0,95 | 0,97 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| 0 | 0 | Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui pengadaan | Urusan Pemerintahan Unsur Kepegawaian | 0 | 0,86 | 0,88 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| 0 | 0 | Nilai Indeks Profesionalitas ASN | 0 | 66.20 Nilai | 68 Nilai | 70 Nilai | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| 0 | 0 | Persentase ASN yang Memenuhi Kompetensi Sesuai dengan Jabatan | 0 | 79.30 Persen | 82 Persen | 86 Persen | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| 37380 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Persentase ASN yang meningkat pengembangan kompetensi manajerial, fungsional dan teknis | Urusann Pemerintahan Unsur Pendidikan dan Pelatihan | 0 | 0,75 | 0,85 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan manajemen aset dan pencatatan pelaporan aset serta laporan realisasi anggaran** | | | | | | | |
| 37743 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Nilai Kepatuhan Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Peraturan perundang- undangan | Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan | 0 Nilai | 2 Nilai | 2 Nilai | Bakuda |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan tata laksana dan kinerja pemerintah daerah** | | | | | | | |
| 37383 | PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG | Survey kepuasan pelayanan Badan Penghubung | Urusan Pemerintahan Unsur Penghubung | 0 | 0,82 | 0,92 | Badan Penghubung |
| | PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN (Meningkatnya Usulan Kebijakan Daerah dibidang Perekonomian dan Pembangunan) | Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Perekonomian dan Pembangunan yang tersusun | | 65% | 65% | 65% | Biro Pembangunan Ekonomi |
| | PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN (Meningkatnya Usulan Kebijakan Daerah dibidang Perekonomian dan Pembangunan) | Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Perekonomian dan Pembangunan yang tersusun | | 65% | 65% | 65% | Biro Pembangunan Ekonomi |
| | PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN (Meningkatnya Usulan Kebijakan Daerah dibidang Perekonomian dan Pembangunan) | Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Perekonomian dan Pembangunan yang tersusun | | 65% | 65% | 65% | Biro Pembangunan Ekonomi |
| | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN (Meningkatnya Usulan Kebijakan Daerah dibidang Administrasi Pembangunan) | Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Administrasi Pembangunan yang tersusun | | 75% | 75% | 75% | Biro Pembangunan Ekonomi |
| | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI | Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Penataan Organisasi | | | 80% | 80% | Biro Organisasi |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel** | | | | | | | |
| 37408 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Nilai Materialitas Hasil Temuan Hasil Pengawasan dibawah 5%, Bidang Pemerintahan dan Aparatur; Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya. | Urusan Pemerintahan Unsur pengawasan | 0 | >5 % | >5 % | Inspektorat Daerah |
| 0 | 0 | Nilai Hasil Kapabilitas APIP dan Nilai Hasil Evaluasi Maturitas SPIP Level 3 | 0 | 3 Level | 3 Level | 3 Level | Inspektorat Daerah |
| 37773 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Nilai Hasil Kapabilitas APIP dan Nilai Hasil Evaluasi Maturitas SPIP Level 3 (INSPEKTORAT) | Urusan Pemerintahan Unsur pengawasan | 0 Level | 3 Level | 3 Level | Inspektorat Daerah |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan Pelayan Internal Perangkat Daerah** | | | | | | | |
| X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indeks Kepuasan pelayanan internal | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 90 Nilai | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal (Cabdin Wilayah II) | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 90 Nilai | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal (Cabdin Wilayah III) | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 90 Nilai | Dinas Pendidikan |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal (Cabdin Wilayah IV) | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 90 Nilai | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal (Cabdin Wilayah V) | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 90 Nilai | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SLB N 31 PKLK NEGERI PANGKALPINANG | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 90 Nilai | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SLB N KOBA | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 90 Nilai | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SLBN Manggar | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 90 Nilai | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SLBN MUNTOK | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 90 Nilai | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SLB N SUNGAILIAT | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 90 Nilai | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SLB N TANJUNGPANDAN | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 90 Nilai | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 AIRGEGAS | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 90 Nilai | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal (SMAN 1 BELINYU) | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 90 Nilai | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 GANTUNG | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 90 Nilai | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 JEBUS | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 90 Nilai | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 KELAPA | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 90 Nilai | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 KELAPA KAMPIT | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 90 Nilai | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 KEP. PONGOK | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 90 Nilai | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 KOBA | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 0 Nilai | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 LEPAR PONGOK | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 90 Nilai | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 LUBUK BESAR | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 90 Nilai | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 MANGGAR | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 90 Nilai | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 MEMBALONG | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 90 Nilai | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 MENDO BARAT | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 90 Nilai | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 MERAWANG | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 90 Nilai | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 MUNTOK | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 90 Nilai | Dinas Pendidikan |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 NAMANG | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 90 Nilai | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 PANGKALAN BARU | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 90 Nilai | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 PANGKAL PINANG | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 90 Nilai | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 PARITTIGA | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 90 Nilai | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 PAYUNG | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 90 Nilai | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 PEMALI | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 90 Nilai | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 PUDING BESAR | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 90 Nilai | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 RIAU SILIP | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 90 Nilai | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 SIJUK | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 90 Nilai | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 SIMPANG PESAK | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 90 Nilai | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 SIMPANG RIMBA | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 90 Nilai | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 SP TERITIP | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 90 Nilai | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 SUNGAI LIAT | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 90 Nilai | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 SUNGAI SELAN | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 90 Nilai | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 TANJUNG PANDAN | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 90 Nilai | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 TEMPILANG | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 9- Nilai | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 TOBOALI | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 90 Nilai | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 2 MENDO BARAT | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 90 Nilai | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 2 PANGKAL PINANG | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 90 Nilai | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 2 SUNGAI SELAN | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 90 Nilai | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 2 TANJUNG PANDAN | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 90 Nilai | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 2 TOBOALI | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 90 Nilai | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 3 PANGKAL PINANG | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 90 Nilai | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan | Urusan | 0 Nilai | 90 Nilai | 90 Nilai | Dinas Pendidikan |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | pelayanan internal SMAN 4 PANGKAL PINANG | Penunjang pemerintahan | | | | |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal (SMA Negeri 1 Damar) | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 90 Nilai | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMA NEGERI 1 PULAU BESAR | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 90 Nilai | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMA NEGERI 2 PUDING BESAR | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 90 Nilai | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMA NEGERI 3 TOBOALI | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 90 Nilai | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN OLAHRAGA MUHAMMAD NOER | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 90 Nilai | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 1 AIRGEGAS | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 90 Nilai | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 1 BADAU | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 0 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMK N 1 BAKAM | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 0 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 1 BELINYU | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 0 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 1 KELAPA | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 0 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 1 KELAPA KAMPIT | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 0 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 1 KOBA | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 0 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 1 MANGGAR | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 0 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 1 MENDOBARAT | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 0 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 1 MUNTOK | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 0 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 1 PANGKALAN BARU | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 0 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | SMKN 1 PANGKALPINANG | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 0 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 1 PARIT TIGA | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 0 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 1 PAYUNG | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 0 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 1 SELAT NASIK | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 0 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 1 SIMPANG KATIS | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 0 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 1 SIMPANG RENGGIANG | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 0 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan | Urusan | 0 Nilai | 90 Nilai | 0 | Dinas Pendidikan |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | pelayanan internal SMKN 1 SUNGAILIAT | Penunjang pemerintahan | | | | |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 1 TANJUNGPANDAN | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 0 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 1 TEMPILANG | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 0 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 1 TOBOALI | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 0 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 1 TUKAK SADAI | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 0 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 2 KOBA | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 0 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 2 PANGKALPINANG | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 0 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 2 SUNGAILIAT | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 0 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 2 TANJUNGPANDAN | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 0 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 3 PANGKALPINANG | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 0 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 3 TANJUNGPANDAN | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 0 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 4 PANGKALPINANG | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 0 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 5 PANGKALPINANG | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 0 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMK NEGERI 1 DENDANG | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 0 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMK NEGERI 1 PULAU BESAR | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 0 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMK NEGERI 1 SIJUK | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 0 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | SMK NEGERI 1 SIMPANG RIMBA | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 0 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMK NEGERI 1 SIMPANG TERITIP | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 0 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMK NEGERI 1 SUNGAISELAN | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 0 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal (UPT BALAI TEKOMDIK) | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 0 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Kepuasan pelayanan internal (Cabdin WIlayah I) | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 0 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | SLB Negeri TOBOALI | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 0 | Dinas Pendidikan |
| X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indeks kepuasan pelayanan internal Perangkat Daerah (Dinas Kesehatan) | Urusan Penunjang Pemerintahan | 0 nilai | 82 nilai | 83 nilai | Dinas Kesehatan |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 0 | Indeks kepuasan pelayanan internal (UPTD Labkes) | Urusan Penunjang Pemerintahan | 0 nilai | 82 nilai | 83 nilai | Dinas Kesehatan |
| 0 | 0 | Nilai Sakip PD (Dinas Kesehatan) | Urusan Penunjang Pemerintahan | 0 nilai | 80 nilai | 80 nilai | Dinas Kesehatan |
| X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (RSUP) | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 nilai | 77 nilai | 79 nilai | RSUP |
| 0 | 0 | Nilai Sakip Perangkat daerah (RSUP) | Urusan Penunjang pemerintahan | 0 nilai | 78 nilai | 79 nilai | RSUP |
| X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (RSJ) | Urusan Penunjang Pemerintahan | 0 nilai | 80 nilai | 82 nilai | RUMAH SAKIT JIWA |
| 0 | 0 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (RSJ) | Urusan Penunjang Pemerintahan | 0 nilai | 81.1 nilai | 81.3 nilai | RUMAH SAKIT JIWA |
| X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai Sakip PD (Dinas PUPR PRKP) | Urusan Penunjang Pemerintahan | 0 Nilai | 79 Nilai | 81 Nilai | DPUPRPERKIM |
| 0 | 0 | Survey Kepuasan Pelayanan Internal (Dinas PUPR PRKP) | Urusan Penunjang Pemerintahan | 0 Nilai | 80 Nilai | 82 Nilai | DPUPRPERKIM |
| X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indeks kepuasan pelayanan internal (Satpol PP) | Urusan Penunjang Pemerintahan | 0 Nilai | 77 Nilai | 81 Nilai | Satpol PP |
| 0 | 0 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Satpol PP) | Urusan Penunjang Pemerintahan | 0 NIlai | 80 NIlai | 81 NIlai | Satpol PP |
| X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (BPBD) | Urusan Penunjang Pemerintahan | 0 Nilai | 82.86 Nilai | 82.90 Nilai | BPBD |
| 0 | 0 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (BPBD) | Urusan Penunjang Pemerintahan | 0 Nilai | 77,14 Nilai | 77,18 Nilai | BPBD |
| X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (DinsosPMD) | Urusan Penunjang Pemerintahan | 0 % | 90 % | 90 % | Dinsospemdes |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (PSBLH) | Urusan Penunjang Pemerintahan | 0 | 0,9 | 0,9 | Dinsospemdes |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (PSBS) | Urusan Penunjang Pemerintahan | 0 | 0,9 | 0,9 | Dinsospemdes |
| 0 | 0 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (DinsosPMD) | Urusan Penunjang Pemerintahan | 0 | 0,781 | 0,783 | Dinsospemdes |
| 0 | 0 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (PSBLH) | Urusan Penunjang Pemerintahan | 0 | 0,781 | 0,783 | Dinsospemdes |
| X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (Disnaker) | Urusan Penunjang Daerah | 0 % | 99 % | 99 % | Disnaker |
| 0 | 0 | Nilai sakip perangkat daerah (DISNAKER) | Urusan Penunjang Daerah | 0 Nilai | 87 Nilai | 88 Nilai | Disnaker |
| X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (DP3ACSKB) | Urusan Penunjang Pemerintahan | 0 nilai | 76 nilai | 80 nilai | DP3CASKB |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (UPTD PPA) | Urusan Penunjang Pemerintahan | 0 Nilai | 76 Nilai | 80 Nilai | DP3CASKB |
| 0 | 0 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (DP3ACSKB) | Urusan Penunjang Pemerintahan | 0 nilai | 74.5 nilai | 75.5 nilai | DP3CASKB |
| X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (DPKP) | Urusan Penunjang Pemerintahan | 0 nilai | 80 nilai | 80 nilai | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan Pelayanan internal (DPKP-UPTD Balai Benih) | Urusan Penunjang Pemerintahan | 0 Nilai | 80 Nilai | 80 Nilai | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| 0 | 0 | Indeks kepuasan Pelayanan Internal (DPKP-UPTD PMKP) | Urusan Penunjang Pemerintahan | 0 Nilai | 80 Nilai | 80 Nilai | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal(DPKP- UPTD Proteksi) | Urusan Penunjang Pemerintahan | 0 Nilai | 80 Nilai | 80 Nilai | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| 0 | 0 | Indeks kepuasan Pelayanan Internal (DPKP-UPTD - PSMB) | Urusan Penunjang Pemerintahan | 0 nilai | 80 nilai | 80 nilai | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| 0 | 0 | Nilai SAKIP PD (DPKP) | Urusan Penunjang Pemerintahan | 0 nilai | 81,29 nilai | 82,1 nilai | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (DLHK) | Urusan Penunjang Pemerintahan | 0 nilai | 90 nilai | 90 nilai | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (UPTD KPH Belantu Mendanau) | Urusan Penunjang Pemerintahan | 0 nilai | 90 nilai | 90 nilai | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (UPTD KPH Bubus Panca) | Urusan Penunjang Pemerintahan | 0 nilai | 90 nilai | 90 nilai | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (UPTD KPH Gunung Duren) | Urusan Penunjang Pemerintahan | 0 nilai | 90 nilai | 90 nilai | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (UPTD KPH Jebu Bembang Antan) | Urusan Penunjang Pemerintahan | 0 nilai | 90 nilai | 90 nilai | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (UPTD KPH Muntai Palas) | Urusan Penunjang Pemerintahan | 0 nilai | 90 nilai | 90 nilai | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (UPTD KPH Rambat Menduyung) | Urusan Penunjang Pemerintahan | 0 nilai | 90 nilai | 90 nilai | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (UPTD KPH Sigambir Kota Waringin) | Urusan Penunjang Pemerintahan | 0 nilai | 90 nilai | 90 nilai | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (UPTD KPH Sungai Sembulan) | Urusan Penunjang Pemerintahan | 0 nilai | 90 nilai | 90 nilai | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (DLHK) | Urusan Penunjang Pemerintahan | 0 nilai | 81 nilai | 85 nilai | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Perhubungan) | Urusan Penunjnag Pemerintahan | 0 % | 51 % | 60 % | Dinas Perhubungan |
| 0 | 0 | Survei Kepuasan Internal Daerah (Dinas Perhubungan) | Urusan Penunjnag Pemerintahan | 0 | 0,85 | 0,85 | Dinas Perhubungan |
| X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai SAKIP PD (DISKOMINFO) | Urusan Penunjang Pemerintahan | 82 | 83 | 84 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 0 | 0 | Survey Kepuasan Pelayanan Internal PD (DISKOMINFO) | Urusan Penunjang Pemerintahan | | 84 | 86 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai SAKIP Perangat Daerah (DKUKM) | Urusan Penunjang Pemerintah | | 81 | 82 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (DKUKM) | Urusan Penunjang Pemerintah | | 84 | 86 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Indeks kepuasan Pelayanan Internal (UPTD-Balkop) | Urusan Penunjang Pemerintah | | 80,5 | 86 | UPT Balkop |
| X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (DPMPTSP) | Urusan Penunjang Pemerintahan | 0 Nilai | 70 Nilai | 75 Nilai | DPMPTSP |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (UPT PPT WILAYAH BELITUNG) | Urusan Penunjang Pemerintahan | 0 Nilai | 69 Nilai | 71 Nilai | DPMPTSP |
| 0 | 0 | Nilai Sakip PD (DPMPTSP) | Urusan Penunjang Pemerintahan | 0 Nilai | 79 Nilai | 81 Nilai | DPMPTSP |
| X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indeks kepuasan pelayanan internal (PARBUDKEPORA) | Urusan Penunjang Pemerintahan | 0 Nilai | 68 Nilai | 70 Nilai | DIPARBUDKEPORA |
| 0 | 0 | Indeks kepuasan pelayanan internal UPTD Belitung (PARBUDKEPORA) | Urusan Penunjang Pemerintahan | 0 Nilai | 68 Nilai | 70 Nilai | DIPARBUDKEPORA |
| 0 | 0 | Nilai SAKIP PD (PARBUDKEPORA) | Urusan Penunjang Pemerintahan | 0 Nilai | 78 Nilai | 80 Nilai | DIPARBUDKEPORA |
| X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal PD (DKPUS) | Urusan Penunjang Pemerintahan | 0 Nilai | 100 Nilai | 100 Nilai | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| 0 | 0 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (DKPUS) | Urusan Penunjang Pemerintahan | 0 Nilai | 78 nilai | 80 Nilai | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (DKP) | Urusan Penunjang Pemerintahan | 0 % | 84 % | 86 % | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 0 | 0 | Indeks kepuasan Pelayanan Internal (UPTD-BPI) | Urusan Penunjang Pemerintahan | 0 | 0,84 | 0,86 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 0 | 0 | Indeks kepuasan Pelayanan Internal (UPTD-LPPMHP) | Urusan Penunjang Pemerintahan | 0 | 0,84 | 0,86 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 0 | 0 | Nilai SAKIP Perangat Daerah (DKP) | Urusan Penunjang Pemerintahan | 0 Nilai | 79,5 Nilai | 80,5 Nilai | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (Cabdin ESDM Wilayah Bangka) | Urusan Penunjang Pemerintahan | 0 nilai | 92 nilai | 92 nilai | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (Cabdin ESDM Wilayah Bangka Barat) | Urusan Penunjang Pemerintahan | 0 nilai | 92 nilai | 92 nilai | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (Cabdin ESDM Wilayah Bangka Tengah dan Selatan) | Urusan Penunjang Pemerintahan | 0 nilai | 92 nilai | 92 nilai | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (Cabdin ESDM Wilayah Belitung) | Urusan Penunjang Pemerintahan | 0 nilai | 92 nilai | 92 nilai | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (Cabdin ESDM Wilayah Belitung Timur) | Urusan Penunjang Pemerintahan | 0 nilai | 92 nilai | 92 nilai | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (DESDM) | Urusan Penunjang Pemerintahan | 0 nilai | 92 nilai | 92 nilai | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| 0 | 0 | Nilai SAKIP PD (DESDM) | Urusan Penunjang Pemerintahan | 0 nilai | 87 nilai | 91 nilai | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai Sakip Perangkat Daerah (Disperindag) | | 80 | 80 | 80 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | | PERDAGANGAN |
| | | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Disperindag) | | 80 | 60 | 60 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 2 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (BPSMB) | Indeks Kepuasan Pelayanan Teknis Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang | | 80 | 77 | 77 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (UPTD BPSMB) |
| 3 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (RPK) | Indeks Kepuasan Pelayanan Teknis Rumah Promosi dan Kemasan | | 80 | 77 | 77 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (UPTD RPK) |
| X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (Setwan) | Urusan Penunjang Pemerintahan | 0 Nilai | 92 Nilai | 92 Nilai | SEKRETARIAT DPRD |
| 0 | 0 | Nilai Sakip PD (Sekretariat DPRD) | Urusan Penunjang Pemerintahan | 0 nilai | 79 nilai | 79 nilai | SEKRETARIAT DPRD |
| X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai Sakip PD (Bappeda) | Urusan Penunjang Pemerintahan | 0 Nilai | 83,33 | 83,35 | Bappeda |
| 0 | 0 | Survey Kepuasan Pelayanan Internal (BAPPEDA) | Urusan Penunjang Pemerintahan | 0 Nilai | 80 | 82 | Bappeda |
| X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indek Kepuasan Pelayanan (Bakuda : UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA ) | Urusan Penunjang Pemerintahan | 0 Nilai | 81 Nilai | 83 Nilai | Bakuda |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (Bakuda) | Urusan Penunjang Pemerintahan | 0 Nilai | 79 Nilai | 81 Nilai | Bakuda |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (Bakuda : UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA BARAT) | Urusan Penunjang Pemerintahan | 0 Nilai | 80.50 Nilai | 81 Nilai | Bakuda |
| 0 | 0 | indeks kepuasan pelayanan internal ( Bakuda: UPTB WILAYAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR) | Urusan Penunjang Pemerintahan | 0 Nilai | 80 Nilai | 82 Nilai | Bakuda |
| 0 | 0 | Indeks kepuasan Pelayanan internal (Bakuda : UPTB WILAYAH KOTA PANGKALPINANG) | Urusan Penunjang Pemerintahan | 0 Nilai | 82 Nilai | 84 Nilai | Bakuda |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal ( UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA SELATAN ) | Urusan Penunjang Pemerintahan | 0 Nilai | 81 Nilai | 82.5 Nilai | Bakuda |
| 0 | 0 | Indeks kepuasan pelayanan internal ( UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA TENGAH ) | Urusan Penunjang Pemerintahan | 0 Nilai | 80 Nilai | 81 Nilai | Bakuda |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal ( UPTB WILAYAH KABUPATEN BELITUNG ) | Urusan Penunjang Pemerintahan | 0 Nilai | 81 Nilai | 82 Nilai | Bakuda |
| 0 | 0 | Nilai Sakip Perangkat Daerah (Bakuda) | Urusan Penunjang Pemerintahan | 0 Nilai | 81 Nilai | 83 Nilai | Bakuda |
| X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (BKPSDM) | Urusan Penunjang Pemerintahan | 0 Nilai | 71 Nilai | 73 Nilai | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | | MANUSIA DAERAH |
| 0 | 0 | Nilai Sakip PD (BKPSDM) | Urusan Penunjang Pemerintahan | 0 Nilai | 82,25 Nilai | 82,75 Nilai | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Derah (Badan Penghubung) | Urusan Penunjang Pemerintahan | 0 % | 80 % | 90 % | Badan Penghubung |
| 0 | 0 | Nilai Sakip PD (Badan Penghubung) | Urusan Penunjang Pemerintahan | 0 Nilai | 72 Nilai | 75 Nilai | Badan Penghubung |
| X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (INSPEKTORAT) | Urusan Penunjang Pemerintahan | 0 Nilai | 90 Nilai | 90 Nilai | Inspektorat Daerah |
| 0 | 0 | Nilai Sakip PD (INSPEKTORAT) | Urusan Penunjang Pemerintahan | 0 Nilai | 80 Nilai | 81 Nilai | Inspektorat Daerah |
| X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indeks kepuasan Pelayanan Internal (BAKESBANGPOL) | Urusan Penunjang Pemerintahan | 0 Nilai | 77,5 Nilai | 80 Nilai | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 0 | 0 | Nilai Sakip PD (BAKESBANGPOL) | Urusan Penunjang Pemerintahan | 0 Nilai | 80 Nilai | 82 Nilai | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai Sakip PD Setda | Urusan Penunjang Pemerintahan | 0,76 | 0,77 | 79 Nilai | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | Meningkatkan Pelayanan Internal PD Setda | Urusan Penunjang Pemerintahan | 50% | 80% | 80% | SEKRETARIAT DAERAH |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan kesesuaian antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja** | | | | | | | |
| 38109 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | pertumbuhan PAD | Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan | 0 % | 10 % | 13 % | Bakuda |
| 0 | 0 | pertumbuhan Pajak Daerah pada UPTB ( UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA ) | Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan | 0 | 0,1052 | 0,1273 | Bakuda |
| 0 | 0 | pertumbuhan Pajak Daerah pada UPTB (UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA BARAT) | Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan | 0 | 0,1068 | 0,1292 | Bakuda |
| 0 | 0 | pertumbuhan Pajak Daerah pada UPTB ( UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA SELATAN ) | Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan | 0 | 12.36 % | 14.99 % | Bakuda |
| 0 | 0 | pertumbuhan Pajak Daerah pada UPTB ( UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA TENGAH ) | Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan | 0 | 12.39 % | 14.99 % | Bakuda |
| 0 | 0 | pertumbuhan Pajak Daerah pada UPTB ( UPTB WILAYAH KABUPATEN BELITUNG) | Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan | 0 | 12.39 % | 14.99 % | Bakuda |
| 0 | 0 | pertumbuhan Pajak Daerah pada UPTB ( UPTB WILAYAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR) | Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan | 0 | 12.39 % | 14.99 % | Bakuda |
| 0 | 0 | pertumbuhan Pajak Daerah pada UPTB (UPTB WILAYAH KOTA PANGKALPINANG) | Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan | 0 | 0,0566 | 0,0624 | Bakuda |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37377 | PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase Konsistensi Program Pembangunan di RKPD dengan RPJMD dan Renstra dengan RPJMD | Urusan Pemerintahan Unsur Perencanaan | 0 | 1 | 1 | Bappeda |
| 0 | 0 | Persentase Renstra PD yang baik (memiliki rencana kinerja yang baik, tepat, dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat) | 0 | 1 | 1 | 1 | Bappeda |
| 37742 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Urusan Pemerintahan Unsur Perencanaan | 0 % | 1 | 1 | Bappeda |
| 0 | 0 | Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Urusan Pemerintahan Unsur Perencanaan | 0 | 1 | 1 | Bappeda |
| 0 | 0 | Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam | Urusan Pemerintahan Unsur Perencanaan | 0 | 1 | 1 | Bappeda |
| 0 | 0 | Predikat capaian kinerja hasil perencanaan pembangunan dengan kategori tinggi | 0 | Tinggi Predikat | Tinggi Predikat | nggi Predikat | Bappeda |
| 0 | 0 | Persentase capaian sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah | 0 | 0,9259 | 0,93 | 0,95 | Bappeda |
| 37377 | PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase Rumusan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti | Urusan Pemerintahan Unsur Perencanaan | 0 | 0,75 | 0,8 | Bappeda |
| 0 | 0 | Persentase capaian program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah dengan predikat kinerja tinggi | 0 | 0,9099 | 0,92 | 0,92 | Bappeda |
| 37742 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase Rumusan Hasil Pengendalian dan Evaluasi pada Dokumen Perencanaan PD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Urusan Pemerintahan Unsur Perencanaan | 0 % | 0,9 | 0,9 | Bappeda |
| 0 | 0 | Persentase Rumusan Hasil Pengendalian dan Evaluasi pada Dokumen Perencanaan PD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 0 | 0 | 0,9 | 0,9 | Bappeda |
| 0 | 0 | Persentase Rumusan Hasil Pengendalian dan Evaluasi pada Dokumen Perencanaan PD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 0 | 0 | 0,9 | 0,9 | Bappeda |
| 0 | 0 | Nilai perencanaan kinerja dalam Lakip Provinsi | 0 | 23.63 Nilai | 23.75 Nilai | 24.00 Nilai | Bappeda |
| 0 | 0 | Persentase Renstra PD yang baik (memiliki rencana kinerja yang baik, tepat, dan jelas sasaran dan tujuannya | 0 | 1 | 1 | 1 | Bappeda |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | dengan indikator yang tepat) | | | | | |
| 37381 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang digunakan Sebagai Bahan Perumusan Kebijakan | Urusan Pemerintahan Unsur Perencanaan | 0 % | 0,8 | 0,85 | Bappeda |
| 0 | 0 | Persentase Jumlah Inovasi Daerah yang dikembangkan | Urusan Pemerintahan Unsur Perencanaan | 0 | 0,8 | 0,8 | Bappeda |

### 4.2.2. Penyelarasan Permasalahan Pembangunan, Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2024

**Tabel IV.9**

Keselarasan Antara permasalahan, isu strategis dan Prioritas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

| PERMASALAHAN | ISU STRATEGIS | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH |
|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* |
| **Prioritas Utama** | | |
| Rendahnya PDRB sub sektor pertanian | Pertumbuhan ekonomi melambat dan cenderung stagnan | Pembangunan Ekonomi |
| Rendahnya PDRB sub sektor perikanan | | |
| Rendahnya PDRB sub sektor pertambangan dan penggalian | | |
| Rendahnya PDRB sub sektor industri pengolahan | | |
| Rendahnya PDRB sub sektor perdagangan | | |
| Rendahnya laju pertumbuhan kunjungan wisatawan asing dan domestic | | |
| Rendahnya ekspor | | |
| Belum maksimalnya nilai investasi (PMA/PMDN) daerah | | |
| Belum optimalnya pengendalian lingkungan hidup | Masih rendahnya kualitas lingkungan hidup dan tatakelola sumber daya alam | Pembangunan Lingkungan |
| Rendahnya pembangunan manusia | Kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Daya Saing masih rendah | Pembangunan Sumber Daya Manusia |
| Menurunnya kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga dalam demokrasi | Menurunnya Indeks Domokrasi Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Pembangunan Demokrasi |
| **Prioritas Pendukung** | | |
| Kurangnya ketersediaan infrastruktur | Disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat masih Tinggi | Pembangunan Wilayah |
| Rendahnya kualitas dan pemenuhan rencana tata ruang serta perwujudan | | |

| PERMASALAHAN | ISU STRATEGIS | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH |
|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* |
| tertib tata ruang | | |
| Tingginya resiko bencana | | |
| Belum optimalnya pembangunan kawasan pedesaan | | |
| Lambatnya penurunan laju pertumbuhan penduduk | | |
| Lambatnya penurunan kemiskinan | | Pemerataan Pendapatan Masyarakat |
| Rendahnya kesempatan kerja | | |
| Rendahnya tata kelola pemerintahan | Masih Rendahnya Indeks Reformasi Birokrasi | Pembangunan Pemerintahan |

### 4.2.3 Prioritas Pembangunan Nasional, Program Prioritas, Arah Kebijakan Nasional dan Program Pembangunan Daerah

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

**Tabel IV.10**
Tabel Keterkaitan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan PN RPJMN

| SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA SASARAN | TARGET KINERJA 2024 | PRIORITAS NASIONAL RKP 2024 | KETERKAITAN (YA/TIDAK) |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian | Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian | 4,23 | **PRIORITAS NASIONAL 1 :** MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS DAN BERKEADILAN | **YA** |
| Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perikanan | Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan | 4,05 | | |
| Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian | Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian | 4,52 | | |
| Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan | Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan | 3,25 | | |
| Meningkatnya PDRB Sub Sektor | Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor | 4,92 | | |

| SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA SASARAN | TARGET KINERJA 2024 | PRIORITAS NASIONAL RKP 2024 | KETERKAITAN (YA/TIDAK) |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| Perdagangan | Perdagangan | | | |
| Meningkatnya Kunjungan Wisatawan asing dan domestik | Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan asing dan domestik | 2,63 | | |
| Meningkatnya Ekspor | Laju Pertumbuhan Ekspor | 7,50 | | |
| Meningkatnya Nilai Investasi (PMA/PMDN) Daerah | Pertumbuhan Investasi | 30,00 | | |
| Menurunkan Tingkat Kemiskinan | Persentase Angka Kemiskinan | 4,20 | **PRIORITAS NASIONAL 2:** MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN | **YA** |
| Meningkatkan Kesempatan Kerja | Tingkat Pengangguran Terbuka | 4,39 | | |
| Meningkatnya Pembangunan Manusia | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 72,13 | **PRIORITAS NASIONAL 3:** MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING; MANUSIA MERUPAKAN MODAL UTAMA PEMBANGUNAN NASIONAL UNTUK MENUJU PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN MERATA DI SELURUH WILAYAH. PEMERINTAH INDONESIA BERKOMITMEN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS DAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) YAITU SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) YANG SEHAT DAN CERDAS, ADAPTIF, INOVATIF, TERAMPIL, DAN BERKARAKTER | |
| Meningkatkan aspek kebebasan , kesetaraan , kapasitas lembaga dalam demokrasi | Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi | 78,40 | **PRIORITAS NASIONAL 4:** REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN | **YA** |
| Meningkatnya ketersediaan infrastruktur | Sasaran :Persentase Ketersediaan Infrastruktur | 0,181 | **PRIORITAS NASIONAL 5:** MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK | **YA** |

| SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA SASARAN | TARGET KINERJA 2024 | PRIORITAS NASIONAL RKP 2024 | KETERKAITAN (YA/TIDAK) |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| | | | MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR | |
| Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang | Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang | 0,70 | | |
| Menurunnya Resiko Bencana | Indeks Ketahanan Bencana | 0,37 | | |
| Percepatan pembangunan kawasan perdesaan | Indeks desa membangun | 0,730 | | |
| Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk | Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) | 1,74 | | |
| Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | 75,84 | **PRIORITAS NASIONAL 6:** MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, DAN PERUBAHAN IKLIM | **YA** |
| Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan | Indeks Reformasi Birokrasi | 69,00 | **PRIORITAS NASIONAL 7:** MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK | **YA** |

*Sumber: RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 dan RKP Tahun 2023*

**Tabel IV.11**
Keselarasan Prioritas Nasional Dalam RKP 2024 Dengan
Prioritas Pembangunan Daerah Dalam RKPD 2024

| NO | PRIORITAS NASIONAL (PN) DAN SASARAN PN DALAM RKP 2024 | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RKPD 2024 | KESELARASAN (YA/TIDAK) |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1 | PN1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | YA |
| 2. | PN 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan | • Pembangunan Ekonomi<br>• Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) | YA |
| 3. | PN 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing | • Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)<br>• Pemerataan Pendapatan | YA |

| NO | PRIORITAS NASIONAL (PN) DAN SASARAN PN DALAM RKP 2024 | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RKPD 2024 | KESELARASAN (YA/TIDAK) |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 4. | PN 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | • Pembangunan Demokrasi<br>• Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) | YA |
| 5. | PN 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar | • Pembangunan Wilayah<br>• Pembangunan Lingkungan | YA |
| 6. | PN 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim | Pembangunan Lingkungan | YA |
| **7.** | **PN 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik** | • Pembangunan Demokrasi<br>• Pembangunan Pemerintahan | YA |

### 4.2.4 Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Penyelarasan antara Priotitas Pembangunan Daerah dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel IV.12**
Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM)

| NO | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | SPM Tahun 2024<br>Target | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| ***SPM Bidang Pendidikan*** | | | | | |
| 1 | PROGRAM SPM PENDIDIKAN MENENGAH | 1 Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SMA/SMK/Paket C/MA/MAK) | 1 Pendataan warga negara usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang tidak bersekolah | 1100 | Dinas Pendidikan |
| | | | 2 Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus | 4000 | Dinas Pendidikan |
| | | | 3 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tamping | 1100 | Dinas Pendidikan |
| | | | 4 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal | - | |
| | | 2 Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SMA/SMK/Paket C) | 1 Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun | 1 | Dinas Pendidikan |
| | | | 2 Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan | 1 | Dinas Pendidikan |
| | | | 3 Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | 300 orang | Dindik, BKD |
| | | | 4 Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif | 30 orang | Dindik, BKD |
| | | | 5 Penempatan lulusan pendidikan | 1 | Dindik, BKD |

| NO | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | SPM Tahun 2024 Target | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| | | | dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah | | |
| | | | 6 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah | 1 | Dindik, BKD |
| | | | 7 Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan | 80% | Dinas Pendidikan |
| | | 3 Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SMA/SMK/Paket C/MA/MAK) | 1 Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut | 70% | Dinas Pendidikan |
| | | | 2 Fasilitasi pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru | 1 | Dinas Pendidikan |
| | | 4 Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan (SMA/SMK/Paket C/MA/MAK) | 1 Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan | 1 | Dinas Pendidikan |
| | | | 2 Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun | 1 | Dinas Pendidikan |
| | | | 3 Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat | 10 | Dinas Pendidikan |
| | | | 4 Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran | 1 | Dinas Pendidikan |
| | | 5 Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SMA/SMK/Paket C) | 1 Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan | 1 | Dinas Pendidikan |
| | | | 2 Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan | 5 | Dinas Pendidikan |
| | | | 3 Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak | 80% | Dinas Pendidikan |
| | | 6 Tingkat penyerapan lulusan (SMK) | 1 Penyediaan data penelusuran lulusan untuk mengukur keterserapan lulusan | 9.983 | Dinas Pendidikan |
| | | | 2 Pemetaan lembaga sertifikasi dan dunia kerja yang memiliki sistem sertifikasi untuk mendorong sertifikasi kompetensi bagi Peserta Didik | 4 | Dinas Pendidikan |
| | | 7 Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja | 1 Fasilitasi kemitraan antara dunia kerja dan SMK untuk penyesuaian pembelajaran di SMK terhadap | 6 | Dinas Pendidikan |

| NO | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | SPM Tahun 2024 Target | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| | | lulusan (SMK) | kebutuhan dunia kerja. | | |
| 2 | PROGRAM SPM PENDIDIKAN KHUSUS | 1 Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Pendidikan Khusus | 1 Pendataan warga negara usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun penyandang disabilitas yang tidak bersekolah | 7 | Dinas Pendidikan |
| | | | 2 Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik berkebutuhan khusus dari keluarga tidak mampu sampai lulus | 500 | Dinas Pendidikan |
| | | | 3 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tamping | 150 | Dinas Pendidikan |
| | | | 4 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal | | |
| | | 2 Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik Pendidikan Khusus | 1 Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut | 9 | Dinas Pendidikan |
| | | | 2 Pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru | 5 | Dinas Pendidikan |
| | | 3 Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan | 1 Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan | 9 | Dinas Pendidikan |
| | | | 2 Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun | 3 | Dinas Pendidikan |
| | | | 3 Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat | 3 | Dinas Pendidikan |
| | | | 4 Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran | 1 | Dinas Pendidikan |
| | | 4 Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan | 1 Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun | 1 | Dinas Pendidikan |
| | | | 2 Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan | 1 | Dinas Pendidikan |
| | | | 3 Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | 30 | Dindik, BKD |
| | | | 4 Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan | | |
| | | | 5 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah | 87% | Dindik, BKD |
| | | | 6 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas | 72% | Dindik, BKD |

| NO | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | SPM Tahun 2024 Target | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| | | | sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah | | |
| | | | 7 Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan | 80% | Dinas Pendidikan |
| | | 5 Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan khusus | 1 Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan | 1 | Dinas Pendidikan |
| | | | 2 Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan | 5 | Dinas Pendidikan |
| | | | 3 Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak | 80% | Dinas Pendidikan |
| *SPM Bidang Sosial* | | | | | |
| | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | 1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | 1 Penyediaan permakanan | 15 | BIDANG REHSOS DINSOSPMD |
| | | | | 15 | UPT BSBS DINSOSPMD |
| | | | | 20 | UPTD PSBLH DINSOSPMD |
| | | | JUMLAH | 50 | DINSOSPMD |
| | | | 2 Penyediaan sandang | 8 | BIDANG REHSOS DINSOSPMD |
| | | | | 15 | UPT BSBS DINSOSPMD |
| | | | | 20 | UPTD PSBLH DINSOSPMD |
| | | | JUMLAH | 43 | DINSOSPMD |
| | | | 3 Penyediaan asrama yang mudah diakses | 3 | BIDANG REHSOS DINSOSPMD |
| | | | | 15 | UPT BSBS DINSOSPMD |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 4 Penyediaan alat bantu | 31 | BIDANG REHSOS DINSOSPMD |
| | | | | 15 | UPT BSBS DINSOSPMD |
| | | | | 20 | UPTD PSBLH DINSOSPMD |
| | | | JUMLAH | 66 | DINSOSPMD |
| | | | 5 Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti | 40 | BIDANG REHSOS DINSOSPMD |
| | | | | 15 | UPT BSBS DINSOSPMD |
| | | | | 20 | UPTD PSBLH DINSOSPMD |
| | | | JUMLAH | 75 | DINSOSPMD |
| | | | 6 Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan social | 144 | BIDANG REHSOS DINSOSPMD |
| | | | | 15 | UPT BSBS DINSOSPMD |
| | | | | 20 | UPTD PSBLH DINSOSPMD |
| | | | JUMLAH | 179 | DINSOSPMD |
| | | | 7 Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari | 10 | BIDANG REHSOS DINSOSPMD |
| | | | | 15 | UPT BSBS |

| NO | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | SPM Tahun 2024 Target | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| | | | | | DINSOSPMD |
| | | | | 20 | UPTD PSBLH DINSOSPMD |
| | | | JUMLAH | 45 | DINSOSPMD |
| | | | 8 Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi penyandang disabilitas | 21 | BIDANG REHSOS DINSOSPMD |
| | | | | 15 | UPT BSBS DINSOSPMD |
| | | | | 20 | UPTD PSBLH DINSOSPMD |
| | | | JUMLAH | 56 | DINSOSPMD |
| | | | 9 Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar | 14 | BIDANG REHSOS DINSOSPMD |
| | | | | 15 | UPT BSBS DINSOSPMD |
| | | | | 9 | UPTD PSBLH DINSOSPMD |
| | | | JUMLAH | 38 | DINSOSPMD |
| | | | 10 Pemberian pelayanan penelusuran peluarga | 10 | BIDANG REHSOS DINSOSPMD |
| | | | | 15 | UPT BSBS DINSOSPMD |
| | | | | 8 | UPTD PSBLH DINSOSPMD |
| | | | JUMLAH | 33 | DINSOSPMD |
| | | | 11 Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga | 10 | BIDANG REHSOS DINSOSPMD |
| | | | | 15 | UPT BSBS DINSOSPMD |
| | | | | 8 | UPTD PSBLH DINSOSPMD |
| | | | JUMLAH | 33 | DINSOSPMD |
| | | | 12 Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan bidang rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar | 1 | BIDANG REHSOS DINSOSPMD |
| | | | | 15 | UPT BSBS DINSOSPMD |
| | | | | 13 | UPTD PSBLH DINSOSPMD |
| | | | JUMLAH | 29 | DINSOSPMD |
| | | 2 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | 1 Pengasuhan | 20 | BIDANG REHSOS DINSOSPMD |
| | | | | 15 | UPT BSBS DINSOSPMD |
| | | | | 20 | UPTD PSBLH DINSOSPMD |
| | | | JUMLAH | 55 | DINSOSPMD |
| | | | 2 Penyediaan makanan | 80 | BIDANG REHSOS DINSOSPMD |
| | | | | 15 | UPT BSBS DINSOSPMD |
| | | | | 20 | UPTD PSBLH DINSOSPMD |
| | | | JUMLAH | 115 | DINSOSPMD |
| | | | 3 Penyediaan sandang | 80 | BIDANG REHSOS DINSOSPMD |
| | | | | 15 | UPT BSBS DINSOSPMD |
| | | | | 20 | UPTD PSBLH DINSOSPMD |
| | | | JUMLAH | 115 | DINSOSPMD |
| | | | 4 Penyediaan asrama yang mudah diakses | 10 | BIDANG REHSOS DINSOSPMD |
| | | | | 15 | UPT BSBS DINSOSPMD |
| | | | | 20 | UPTD PSBLH |

| NO | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | SPM Tahun 2024 Target | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| | | | | | DINSOSPMD |
| | | | JUMLAH | 45 | DINSOSPMD |
| | | | 5 Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti | 80 | BIDANG REHSOS DINSOSPMD |
| | | | | 15 | UPT BSBS DINSOSPMD |
| | | | | 20 | UPTD PSBLH DINSOSPMD |
| | | | JUMLAH | 115 | DINSOSPMD |
| | | | 6 Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan social | 200 | BIDANG REHSOS DINSOSPMD |
| | | | | 15 | UPT BSBS DINSOSPMD |
| | | | | 20 | UPTD PSBLH DINSOSPMD |
| | | | JUMLAH | 235 | DINSOSPMD |
| | | | 7 Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari | 80 | BIDANG REHSOS DINSOSPMD |
| | | | | 15 | UPT BSBS DINSOSPMD |
| | | | | 20 | UPTD PSBLH DINSOSPMD |
| | | | JUMLAH | 115 | DINSOSPMD |
| | | | 8 Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Identitas Anak | 20 | BIDANG REHSOS DINSOSPMD |
| | | | | 15 | UPT BSBS DINSOSPMD |
| | | | | 20 | UPTD PSBLH DINSOSPMD |
| | | | JUMLAH | 55 | DINSOSPMD |
| | | | 9 Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar | 20 | BIDANG REHSOS DINSOSPMD |
| | | | | 15 | UPT BSBS DINSOSPMD |
| | | | | 15 | UPTD PSBLH DINSOSPMD |
| | | | JUMLAH | 50 | DINSOSPMD |
| | | | 10 Pemberian pelayanan penelusuran keluarga | 1 | BIDANG REHSOS DINSOSPMD |
| | | | | 15 | UPT BSBS DINSOSPMD |
| | | | | 20 | UPTD PSBLH DINSOSPMD |
| | | | JUMLAH | 36 | DINSOSPMD |
| | | | 11 Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga | 1 | BIDANG REHSOS DINSOSPMD |
| | | | | 15 | UPT BSBS DINSOSPMD |
| | | | | | |
| | | | JUMLAH | 16 | DINSOSPMD |
| | | | 12 Akses layanan pengasuhan kepada keluarga penganti | 1 | BIDANG REHSOS DINSOSPMD |
| | | | | 15 | UPT BSBS DINSOSPMD |
| | | | | | |
| | | | JUMLAH | 16 | DINSOSPMD |
| | | | 13 Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti | 7 | BIDANG REHSOS DINSOSPMD |
| | | | | 15 | UPT BSBS DINSOSPMD |
| | | | | 13 | UPTD PSBLH DINSOSPMD |
| | | | JUMLAH | 35 | DINSOSPMD |
| | | 3 Rehabilitasi Sosial Dasar | 1 Penyediaan permakanan | 20 | BIDANG REHSOS DINSOSPMD |

| NO | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | SPM Tahun 2024 Target | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| | | Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | | 15 | UPT BSBS DINSOSPMD |
| | | | | 20 | UPTD PSBLH DINSOSPMD |
| | | | JUMLAH | 55 | DINSOSPMD |
| | | | 2 Penyediaan sandang | 10 | BIDANG REHSOS DINSOSPMD |
| | | | | 15 | UPT BSBS DINSOSPMD |
| | | | | 20 | UPTD PSBLH DINSOSPMD |
| | | | JUMLAH | 45 | DINSOSPMD |
| | | | 3 Penyediaan asrama yang mudah diakses | 5 | BIDANG REHSOS DINSOSPMD |
| | | | | 15 | UPT BSBS DINSOSPMD |
| | | | | 20 | UPTD PSBLH DINSOSPMD |
| | | | JUMLAH | 40 | DINSOSPMD |
| | | | 4 Penyediaan alat bantu | 5 | BIDANG REHSOS DINSOSPMD |
| | | | | 15 | UPT BSBS DINSOSPMD |
| | | | | 20 | UPTD PSBLH DINSOSPMD |
| | | | JUMLAH | 40 | DINSOSPMD |
| | | | 5 Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti social | 5 | BIDANG REHSOS DINSOSPMD |
| | | | | 15 | UPT BSBS DINSOSPMD |
| | | | | 20 | UPTD PSBLH DINSOSPMD |
| | | | JUMLAH | 40 | DINSOSPMD |
| | | | 6 Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan social | 125 | BIDANG REHSOS DINSOSPMD |
| | | | | 15 | UPT BSBS DINSOSPMD |
| | | | | 20 | UPTD PSBLH DINSOSPMD |
| | | | JUMLAH | 160 | DINSOSPMD |
| | | | 7 Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari | 10 | BIDANG REHSOS DINSOSPMD |
| | | | | 15 | UPT BSBS DINSOSPMD |
| | | | | 20 | UPTD PSBLH DINSOSPMD |
| | | | JUMLAH | 45 | DINSOSPMD |
| | | | 8 Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi penyandang disabilitas | 3 | BIDANG REHSOS DINSOSPMD |
| | | | | 15 | UPT BSBS DINSOSPMD |
| | | | | 20 | UPTD PSBLH DINSOSPMD |
| | | | JUMLAH | 38 | DINSOSPMD |
| | | | 9 Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar | 3 | BIDANG REHSOS DINSOSPMD |
| | | | | 15 | UPT BSBS DINSOSPMD |
| | | | | 15 | UPTD PSBLH DINSOSPMD |
| | | | JUMLAH | 33 | DINSOSPMD |
| | | | 10 Pemberian pelayanan penelusuran keluarga | 5 | BIDANG REHSOS DINSOSPMD |
| | | | | 15 | UPT BSBS DINSOSPMD |

| NO | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | SPM Tahun 2024 Target | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| | | | | 20 | UPTD PSBLH DINSOSPMD |
| | | | JUMLAH | 40 | DINSOSPMD |
| | | | 11 Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga | 5 | BIDANG REHSOS DINSOSPMD |
| | | | | 15 | UPT BSBS DINSOSPMD |
| | | | | 2 | UPTD PSBLH DINSOSPMD |
| | | | JUMLAH | 22 | DINSOSPMD |
| | | | 12 Pemulasaraan | 3 | BIDANG REHSOS DINSOSPMD |
| | | | | 15 | UPT BSBS DINSOSPMD |
| | | | | 2 | UPTD PSBLH DINSOSPMD |
| | | | JUMLAH | 20 | DINSOSPMD |
| | | | 13 Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis terlantar di dalam panti | 1 | BIDANG REHSOS DINSOSPMD |
| | | | | 15 | UPT BSBS DINSOSPMD |
| | | | | 13 | UPTD PSBLH DINSOSPMD |
| | | | JUMLAH | 29 | DINSOSPMD |
| | | 4 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti | 1 Penyediaan permakanan | 12 | BIDANG REHSOS DINSOSPMD |
| | | | | 15 | UPT BSBS DINSOSPMD |
| | | | | | |
| | | | JUMLAH | 27 | DINSOSPMD |
| | | | 2 Penyediaan sandang | 12 | BIDANG REHSOS DINSOSPMD |
| | | | | 15 | UPT BSBS DINSOSPMD |
| | | | | | |
| | | | JUMLAH | 27 | DINSOSPMD |
| | | | 3 Penyediaan asrama/wisma yang mudah diakses | 12 | BIDANG REHSOS DINSOSPMD |
| | | | | 15 | UPT BSBS DINSOSPMD |
| | | | | | |
| | | | JUMLAH | 27 | DINSOSPMD |
| | | | 4 Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti | 12 | BIDANG REHSOS DINSOSPMD |
| | | | | 15 | UPT BSBS DINSOSPMD |
| | | | | | |
| | | | JUMLAH | 27 | DINSOSPMD |
| | | | 5 Pemberian bimbingan fisik, mental, spritual dan social | 12 | BIDANG REHSOS DINSOSPMD |
| | | | | 15 | UPT BSBS DINSOSPMD |
| | | | | | |
| | | | JUMLAH | 27 | DINSOSPMD |
| | | | 6 Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari | 12 | BIDANG REHSOS DINSOSPMD |
| | | | | 15 | UPT BSBS DINSOSPMD |
| | | | | | |
| | | | JUMLAH | 27 | DINSOSPMD |
| | | | 7 Pemberian bimbingan keterampilan dasar | 12 | BIDANG REHSOS DINSOSPMD |
| | | | | 15 | UPT BSBS DINSOSPMD |

| NO | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | SPM Tahun 2024 Target | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| | | | | | |
| | | | JUMLAH | 27 | DINSOSPMD |
| | | | 8 Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak | 12 | BIDANG REHSOS DINSOSPMD |
| | | | | 15 | UPT BSBS DINSOSPMD |
| | | | | | |
| | | | JUMLAH | 27 | DINSOSPMD |
| | | | 9 Akses kelayanan pendidikan dan kesehatan dasar | 12 | BIDANG REHSOS DINSOSPMD |
| | | | | 15 | UPT BSBS DINSOSPMD |
| | | | | | |
| | | | JUMLAH | 27 | DINSOSPMD |
| | | | 10 Pemulangan ke daerah asal | 12 | BIDANG REHSOS DINSOSPMD |
| | | | | 15 | UPT BSBS DINSOSPMD |
| | | | | | |
| | | | JUMLAH | 27 | DINSOSPMD |
| | | | 11 Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis terlantar di dalam panti | 1 | BIDANG REHSOS DINSOSPMD |
| | | | | 15 | UPT BSBS DINSOSPMD |
| | | | | | |
| | | | JUMLAH | 16 | DINSOSPMD |
| 2 | Program Penanganan Bencana | 1 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi | 1 Penyediaan Permakananan | 50 | BIDANG PERLINDUNGAN, JAMINAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN BENCANA DINSOSPMD |
| | | | 2 Penyediaan Sandang | 100 | |
| | | | 3 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | 10 | |
| | | | 4 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | 15 | |
| | | | 5 Pelayanan Dukungan Psikososial | 40 | |
| *SPM Bidang Kesehatan* | | | | | |
| 1 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | Dinas Kesehatan |
| | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) | | | 100 persen | Dinas Kesehatan |
| | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi minimal madya | | | 86 fasyankes | Dinas Kesehatan |
| | Persentase pelaksanaan sinkronisasi penerapan standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan lintas kab/kota | | | 100 persen | Dinas Kesehatan |
| | Persentase | | | 94 persen | Dinas Kesehatan |

| NO | Program | Kegiatan | | Sub Kegiatan | | SPM Tahun 2024 Target | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | | *4* | | *5* | *6* |
| | pencegahan dan pengendalian penyakit | | | | | | |
| | Persentase peningkatan kesehatan masyarakat | | | | | 87 persen | Dinas Kesehatan |
| | Persentase peningkatan pemeriksaan laboratorium kesehatan | | | | | 100 persen | Dinas Kesehatan |
| | Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin essensial | | | | | 87 persen | Dinas Kesehatan |
| | | 1 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | 100 persen | Dinas Kesehatan |
| | | | Persentase pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana | | | | Dinas Kesehatan |
| | | | Persentase puskesmas yang Melaksanakan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) | | | | Dinas Kesehatan |
| | | | | 1 | sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | 70 orang | Dinas Kesehatan |
| | | | | | Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar | | Dinas Kesehatan |
| | | | | 2 | sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | 55 orang | Dinas Kesehatan |
| | | | | | Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | Dinas Kesehatan |
| SPM | Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | | DPUPRPERKIM |

| NO | Program | Kegiatan | | Sub Kegiatan | | SPM Tahun 2024 Target | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | | *4* | | *5* | *6* |
| | SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | | | | | | |
| | Persentase Penyelenggaraan Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi | | | | | 29% | DPUPRPERKIM |
| | Persentase Readiness Criteria pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum | | | | | 0,25 | DPUPRPERKIM |
| | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak | | | | | 0 | DPUPRPERKIM |
| | | 1 | Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | | | | DPUPRPERKIM |
| | | | | 1 | Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM | | DPUPRPERKIM |
| | | | | | Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM | 2 Dokumen | DPUPRPERKIM |
| | | | | 2 | Sub Kegiatan Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi | | DPUPRPERKIM |
| | | | | | Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan kelembagaan pengelolaan SPAM | 7 Kab/Kota | DPUPRPERKIM |
| | | | | 3 | Sub Kegiatan Survei dan Investigasi untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota | | DPUPRPERKIM |
| | | | | | Jumlah Data dan Informasi Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota | 1 Ddokumen | DPUPRPERKIM |
| | Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional | | | | | | DPUPRPERKIM |
| | | 1 | Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional | | | | DPUPRPERKIM |
| | | | | 1 | Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi | | DPUPRPERKIM |
| | | | | | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi | 1 Dokumen | DPUPRPERKIM |

| NO | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | SPM Tahun 2024 Target | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| | | | dan Teknis Sistem Pengelolaan TPA/TPS/SPA Kewenangan Provinsi yang Disusun | | |
| | | | 2 Sub Kegiatan Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan | | DPUPRPERKIM |
| | | | Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | 1 Kelompok Masyarakat | DPUPRPERKIM |
| | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | | | | DPUPRPERKIM |
| | Persentase Readiness Criteria pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah yang disiapkan | | | 18% | DPUPRPERKIM |
| | Persentase rumah tangga yang besanitasi | | | 0,06 | DPUPRPERKIM |
| | | 1 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional | | | DPUPRPERKIM |
| | | | 1 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | | DPUPRPERKIM |
| | | | Jumlah Rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem Air Limbah domestik yang Tersusun | 1 Dokumen | DPUPRPERKIM |
| | | | 2 Sub Kegiatan Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk | | DPUPRPERKIM |
| | | | Jumlah Unit Prasarana Cubluk yang Disediakan | 140 Unit | DPUPRPERKIM |
| | | | 3 Sub Kegiatan Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik | | DPUPRPERKIM |
| | | | Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik | 2 Kelompok Masyarakat | DPUPRPERKIM |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN | | | | DISHUB |
| | | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi | | 4 Jenis Perlengakapan Jalan | DISHUB |
| | | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan | 5 jenis perlengkapan jalan | DISHUB |
| | | Penyediaan Angkutan Umum | | | DISHUB |

| NO | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | SPM Tahun 2024 Target | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| | | untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | |
| | | | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi | 1 Laporan | DISHUB |
| | | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi | | | DISHUB |
| | | | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi | 1 Laporan (Penyelenggaraan Pos PAM Lebaran dan NATARU) | DISHUB |
| | | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | | | DISHUB |
| | | | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | 7 Laporan | DISHUB |
| | | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) untuk Jalan Provinsi | | | DISHUB |
| | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | 6 laporan | DISHUB |
| | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | | | | DISHUB |
| | | Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja ( DLKr ) / Daerah Lingkungan Kepentingan ( DLKp ) Pelabuhan Pengumpan Regional | | | DISHUB |
| | | | Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja ( DLKr ) / Daerah Lingkungan Kepentingan ( DLkp ) Pelabuhan Pengumpan Regional | 2 Laporan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja ( DLKr ) / Daerah Lingkungan Kepentingan ( DLKp ) Pelabuhan Pengumpan Regional | DISHUB |
| | | Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional | | | DISHUB |
| | | | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan | 2 Unit | DISHUB |
| | | Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi | | | DISHUB |
| | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut | 60 Perusahaan | DISHUB |

| NO | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | SPM Tahun 2024<br>Target | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| | | | Kewenangan Provinsi | | |
| | | Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | | DISHUB |
| | | | Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten / Kota dalam Daerah Provinsi | 1 Dokumen (Pembuatan Aplikasi Perizinan dan Sistem Informasi Data di Pelabuhan Penyeberangan | DISHUB |
| | | | Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten / Kota dalam Daerah Provinsi | 2 Laporan (Penyusunan Kajian Master Plan Lintas Penyeberangan Provinsi dan SPM ASDP) | DISHUB |
| | | Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar daerah Kabupaten / Kota dalam Daerah Provinsi | | | DISHUB |
| | | | Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | DISHUB |
| | | | Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar daerah Kabupaten/Kota | 2 Dokumen | DISHUB |
| | | | Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antardaerah Kabupaten/Kota | 4 Laporan | DISHUB |
| | | Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas | | | DISHUB |
| | | | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa | 1 Dokumen | DISHUB |

| NO | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | SPM Tahun 2024<br>Target | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| | | | Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas | | |
| | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas | 2 laporan | DISHUB |
| | | Penerbitan Izin Usaha Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional | | | DISHUB |
| | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional | 1 Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional | DISHUB |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | | | | DISHUB |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | DISHUB |
| | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Gedung Dishub dan Gedung VIP | DISHUB |
| | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan Taman | DISHUB |
| SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | | | | | |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | | | | DPUPRPERKIM |
| | Persentase ketersediaan Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | | | 20% | DPUPRPERKIM |
| | Persentase penyelenggaraan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | | | 0,25 | DPUPRPERKIM |

| NO | Program | Kegiatan | | Sub Kegiatan | | SPM Tahun 2024 Target | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | | *4* | | *5* | *6* |
| | Persentasi Pengembangan perumahan korban Bencana atau relokasi program provinsi | | | | | 1 | DPUPRPERKIM |
| | | 1 | Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | | | | DPUPRPERKIM |
| | | | | 1 | Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi | | DPUPRPERKIM |
| | | | | | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi | 1 Dokumen | DPUPRPERKIM |
| | | | | 2 | Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana | | DPUPRPERKIM |
| | | | | | Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah | 1 Dokumen | DPUPRPERKIM |
| | | | | 3 | Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi | | DPUPRPERKIM |
| | | | | | Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terverifikasi | 1 Dokumen | DPUPRPERKIM |
| | | | | 4 | Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus | | DPUPRPERKIM |
| | | | | | Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus | 1 Dokumen | DPUPRPERKIM |
| | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | DPUPRPERKIM |
| | Persentase Kawasan Kumuh yang sudah direncanakan | | | | | 23% | DPUPRPERKIM |
| | Persentase luasan kawasan kumuh yang tertangani | | | | | 0,06 | DPUPRPERKIM |
| | | 1 | Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | | | | DPUPRPERKIM |
| | | | | 1 | Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) | | DPUPRPERKIM |

| NO | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | SPM Tahun 2024 Target | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| | | | Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | | |
| | | | Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | 1 Dokumen | DPUPRPERKIM |
| | | | 2 Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | | DPUPRPERKIM |
| | | | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki | 170 Unit Rumah | DPUPRPERKIM |
| | | | 3 Sub Kegiatan Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | | DPUPRPERKIM |
| | | | Jumlah Dokumen Data Masyarakat Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | 1 Dokumen | DPUPRPERKIM |
| | | | 4 Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | | DPUPRPERKIM |
| | | | Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar | 20 Ha | DPUPRPERKIM |
| **SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat** | | | | | |
| | Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | | SATPOL PP |
| | Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi | | | 1 laporan | SATPOL PP |
| | | 1 Penanganan Gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi | | | SATPOL PP |
| | | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat | | | SATPOL PP |

| NO | Program | Kegiatan | | Sub Kegiatan | | SPM Tahun 2024 Target | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | | *4* | | *5* | *6* |
| | | | dari penegakan hukum perda dan perkada provinsi | | | | |
| | | | | 1 | Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakkan peraturan daerah dan peraturan gubernur | | SATPOL PP |
| | | | | | warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil | 7 orang | SATPOL PP |
| | | | | | warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan | 8 orang | SATPOL PP |
| | | 2 | Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu | | | | SATPOL PP |
| | | | | 1 | Penegakan Perda sesuai SOP | 62 kali | SATPOL PP |
| | | | | 2 | Pelaksanaan penegakan Perda sesuai dengan standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai standar | 30 kali | SATPOL PP |
| | | | | 3 | Pelaksanaan penegakan perda menggunakan Sarpras sesuai standar | 32 kali | SATPOL PP |
| | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran (Damkar) | | | | | | SATPOL PP |
| | | 1 | Penyelenggaraan pemetaan rawan bencana kebakaran | | | | SATPOL PP |
| | | | | 1 | Penyediaan dan pemutakhiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran | 1 | SATPOL PP |
| | | | | 2 | Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung | 18 | SATPOL PP |
| | | | | 3 | Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung | 0 | SATPOL PP |
| | | | | 4 | Pembinaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan Provinsi dan Kab/Kota | 1 | SATPOL PP |
| | | | | 5 | Bimtek terkait pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran Provinsi dan Kab/Kota | 60 | SATPOL PP |
| | | | | 6 | Penyelenggaaan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran, dan penyelamatan non kebakaran | 1 | SATPOL PP |
| | | 2 | Pembinaan dan pengawasan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan | | | | SATPOL PP |

| NO | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | SPM Tahun 2024 Target | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| | | penyelamatan non kebakaran | | | |
| | | | 1 Pembinaan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran | 1 | SATPOL PP |

### 4.2.5 Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan SDGs

Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan SDGs disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel IV.13**
Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan SDGs

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/ outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan** | | | | | | | |
| **Prioritas Pembangunan Daerah : Penurunan Disparitas Wilayah** | | | | | | | |
| 38723 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Persentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial | BIDANG SOSIAL | 0 | 25,15% | 1 | Dinsospemdes |
| 37300 | PROGRAM PENATAAN DESA | Persentase Penataan Desa yang dibina | bidang pemberdayaan masyarakat dan desa | 0 | 0,25 | 1 | Dinsospemdes |
| 37665 | PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA | Persentase kerjasama desa yang dilaksanakan | bidang pemberdayaan masyarakat dan desa | 0 | 22,50% | 1 | Dinsospemdes |
| 38030 | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Persentase Administrasi Pemerintahan Desa yang Dibina | bidang pemberdayaan masyarakat dan desa | 0 | 0,25 | 1 | Dinsospemdes |
| 38396 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif | bidang pemberdayaan masyarakat dan desa | 0 | 0,25 | 1 | Dinsospemdes |
| **Prioritas Pembangunan Daerah : Pemerataan Pendapatan Masyarakat** | | | | | | | |
| 37627 | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang di ditangani | BIDANG SOSIAL | 0 | 23,81% | 1 | Dinsospemdes |
| 37992 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase PMKS yang di Rehabilitasi sosial di Dalam Panti | BIDANG SOSIAL | 0% | 22,58% | 100% | Dinsospemdes |
| | | Persentase PMKS yang di rehabilitasi sosial di dalam Panti Sosial Bina Laras Hijrah | BIDANG SOSIAL | 0 | 0,3 | 1 | Dinsospemdes |
| | | Persentase PMKS yang di Rehabilitasi Sosial di Dalam Panti Sosial Bina Serumpun | BIDANG SOSIAL | 0 | 0,2143 | 1 | Dinsospemdes |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/ outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 |
| 38358 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial | BIDANG SOSIAL | 0 | 25,28% | 1 | Dinsospemdes |
| 39088 | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Persentase TMP yang dikelola | BIDANG SOSIAL | 0 | 1 | 1 | Dinsospemdes |
| 37262 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Persentase PMKS/PSKS yg terberdayakan | BIDANG SOSIAL | 0 | 1 | 1 | Dinsospemdes |
| 37671 | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Persentase Cabang Olahraga yang dibina | Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 0 persen | 61.11 persen | 69.44 persen | DIPARBUDKEPORA |
| 37306 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina | Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 0 organisasi | 35 organisasi | 35 organisasi | DIPARBUDKEPORA |
| 38036 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | Persentase tingkat keaktifan Organisasi Pramuka | Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 0 persen | 19.51 persen | 19.51 persen | DIPARBUDKEPORA |
| 37306 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Persentase Pemuda Yang dibina | Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 0 persen | 0.42 persen | 0.50 persen | DIPARBUDKEPORA |
| **Tujuan 2 Tanpa Kelaparan** | | | | | | | |
| **Prioritas Pembangunan Daerah : Pembangunan Ekonomi** | | | | | | | |
| 37296 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN | Persentase meningkatnya ketersediaan pangan utama (beras) | Bidang Pangan | 0 persen | 2,85 persen | 2,95 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| 37661 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | Bidang Pangan | 0 | 84,1 | 86,1 | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| 38026 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Menurunnya Daerah Rentan Rawan Pangan | Bidang Pangan | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| 38392 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | Persentase pangan yang aman dikonsumsi | Bidang Pangan | **0 persen** | 86 persen | 86 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| 38438 | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Dokumen Laporan Pengendalian dan Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim (DPI) | Bidang Pertanian | 0 Dok | 1 Dok | 1 Dok | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| | | Terkendalinya Bencana Pertanian | Bidang Pertanian | 0 persen | 3 persen | 3 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| 38803 | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | Dokumen Perizinan Usaha Pertanian | Bidang Pertanian | 0 Dok | 1 Dok | 1 Dok | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| 39168 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Persentase peningkatan metode, teknologi informasi dan kelembagaan penyuluhan pertanian | Bidang Pertanian | 0 persen | 100 persen | 100 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| 38073 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular | Bidang Pertanian | 0 persen | 2 persen | 2 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| 37342 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Peningkatan benih/bibit tanaman (pangan, horti, dan perkebunan) berlabel dan bersertifikat | Bidang Pertanian | 0 persen | 5 persen | 5 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| | | Persentase peningkatan luas tanam perkebunan | Bidang Pertanian | 0 persen | 2,5 persen | 2,5 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| | | Persentase peningkatan luas tanam Tanaman Pangan & Hortikultura (%) | Bidang Pertanian | 0 persen | 5 persen | 5 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/ outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | persentase peningkatan produksi benih bermutu | Bidang Pertanian | 0 persen | 5 persen | 10 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| | | Persentase terawasinya peredaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung peningkatan produksi | Bidang Pertanian | 0 persen | 100 persen | 100 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| 37707 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Rasio Ketersediaan Prasarana Pertanian prapanen | Bidang Pertanian | 0 persen | 15 persen | 15 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| | | Rasio ketersedian prasarana pertanian pasca panen | Bidang Pertanian | 0 persen | 5 persen | 5 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| 37342 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Persentase Pertambahan Angka Populasi Ternak | Bidang Pertanian | 0 persen | 5 persen | 5 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| 37705 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Volume produksi perikanan tangkap | Bidang Kelautan dan Perikanan | 0 Ton | 229300 Ton | 235650 Ton | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 38071 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Jumlah Produksi Benih Ikan yang unggul (Juta Ekor) | Bidang Kelautan dan Perikanan | 0 Juta Ekor | 11 Juta Ekor | 12 Juta Ekor | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | Volume produksi perikanan budidaya | Bidang Kelautan dan Perikanan | 0 Ton | 13980 Ton | 15170 Ton | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 38801 | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan | Bidang Kelautan dan Perikanan | 0 ton | 22810 ton | 23910 ton | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | Persentase UPI yang dibina memenuhi standar mutu dan keamanan pangan (persentase) | Bidang Kelautan dan Perikanan | 0 | 0,87 | 0,9 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 37340 | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | lokasi Jasa Kelautan yang dimanfaatkan untuk peningkatan investasi di perairan Bangka Belitung | Bidang Kelautan dan Perikanan | 0 lokasi | 25 lokasi | 27 lokasi | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 38436 | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Persentase Pelaku Usaha yang Taat Aturan (%) | Bidang Kelautan dan Perikanan | 0 | 0,73 | 0,8 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 38436 | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Persentase Pelaku Usaha yang Taat Aturan (%) | Bidang Kelautan dan Perikanan | 0 | 0,73 | 0,8 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 38436 | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Persentase Pelaku Usaha yang Taat Aturan (%) | Bidang Kelautan dan Perikanan | 0 | 0,73 | 0,8 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 38436 | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Persentase Pelaku Usaha yang Taat Aturan (%) | Bidang Kelautan dan Perikanan | 0 | 0,73 | 0,8 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| **Prioritas Pembangunan Daerah: Pembangunan Manusia** | | | | | | | |
| 38391 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | Persentase capaian OPD yang menyediakan data pilah gender dan anak | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 persen | 92.59 persen | 96.29 persen | DP3CASKB |
| 37299 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Persentase masyarakat yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk (KK, KTP, KIA) | Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0 persen | 89.8 persen | 93.27 persen | DP3CASKB |
| 37664 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | Persentase masyarakat yang memiliki akta pencatatan sipil (Akta Lahir, Akta Mati, Akta Perkawinan) | Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0 persen | 89.5 persen | 96.50 persen | DP3CASKB |
| 38029 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Persentase perangkat daerah dan sektor lain yang mengadakan pejanjian kerjasama | Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0 Persen | 37.14 Persen | 48.57 Persen | DP3CASKB |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/ outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 38395 | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | Persentase penyediaan penyajian data kependudukan tingkat provinsi | Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0 persen | 100 persen | 100 persen | DP3CASKB |
| 37301 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Persentase pembinaan Penyediaan dan pemanfaatan data kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga di kabupaten/kota | Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 persen | 71.42 persen | 100 persen | DP3CASKB |
| 37666 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | persentase pembinaan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di kabupaten/kota | Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 persen | 100 persen | 100 persen | DP3CASKB |
| 38031 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | persentase pembinaan kampung KB | Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 persen | 63 persen | 84 persen | DP3CASKB |
| 37258 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) | Kesehatan | 0 persen | 100 persen | 100 persen | Dinas Kesehatan |
| | | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi minimal madya | Kesehatan | 0 fasyankes | 86 fasyankes | 88 fasyankes | Dinas Kesehatan |
| | | Persentase pelaksanaan sinkronisasi penerapan standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan lintas kab/kota | Kesehatan | 0 persen | 100 persen | 100 persen | Dinas Kesehatan |
| | | Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit | Kesehatan | 0 persen | 94 persen | 94 persen | Dinas Kesehatan |
| | | Persentase peningkatan kesehatan masyarakat | Kesehatan | 0 persen | 87 persen | 89 persen | Dinas Kesehatan |
| | | Persentase peningkatan pemeriksaan laboratorium kesehatan | Kesehatan | 0 persen | 100 persen | 100 persen | Dinas Kesehatan |
| | | Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin essensial | Kesehatan | 0 persen | 87 persen | 88 persen | Dinas Kesehatan |
| 37623 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase tenaga kesehatan yang mendapatkan peningkatan kompetensi | Kesehatan | 0 persen | 87 persen | 88 persen | Dinas Kesehatan |
| 37988 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Persentase sarana sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat | Kesehatan | 0 persen | 89 persen | 90 persen | Dinas Kesehatan |
| 38354 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) | Kesehatan | 0 persen | 88 persen | 89 persen | Dinas Kesehatan |
| 37258 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase Pemenuhan Layanan Kesehatan Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna | Kesehatan | 0 persen | 85 persen | 86 persen | RSUP |
| 37623 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai klasifikasi Rumah Sakit tipe B | Kesehatan | 0 persen | 85 persen | 86 persen | RSUP |
| 38354 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG | Persentase hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, | Kesehatan | 0 persen | 100 persen | 100 persen | RSUP |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/ outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | KESEHATAN | penggalangan, kemitraan bidang kesehatan | | | | | |
| 37258 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase fasilitas pelayanan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai kelas Rumah Sakit | Kesehatan | 0 persen | 82 persen | 85 persen | RUMAH SAKIT JIWA |
| | | Persentase masyarakat ataupun perorangan yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa dan non jiwa | Kesehatan | 0 persen | 82 persen | 85 persen | RUMAH SAKIT JIWA |
| | | Persentase masyarakat ataupun perorangan yang mendapat pelayanan penunjang | Kesehatan | 0 persen | 82 persen | 85 persen | RUMAH SAKIT JIWA |
| | | Persentase masyarakat ataupun perseorangan yang mendapat penanganan penyalahgunaan NAPZA | Kesehatan | 0 persen | 82 persen | 82 persen | RUMAH SAKIT JIWA |
| 37623 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase SDM kesehatan sesuai analisa beban kerja RS Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Kesehatan | 0 persen | 86 persen | 88 persen | RUMAH SAKIT JIWA |
| | | Persentase SDM kesehatan yang mendapat pendidikan dan pelatihan | Kesehatan | 0 persen | 86 persen | 88 persen | RUMAH SAKIT JIWA |
| 37262 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Persentase PMKS/PSKS yg terberdayakan | BIDANG SOSIAL | 0 | 1 | 1 | Dinsospemdes |
| **Prioritas Pembangun Daerah : Pemerataan Pendapatan Masyarakat** | | | | | | | |
| 37294 | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | Persentase dokumen Perencanaan Ketenagakerjaan kab/kota | Bidang Tenaga Kerja | 0 | 1 | 1 | Disnaker |
| 37659 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Persentase Pencari kerja Yang Berkompeten | Bidang Tenaga Kerja | 0 | 0,0525 | 0,0575 | Disnaker |
| 38024 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | Persentase Tenga Kerja Yang Ditempatkan | Bidang Tenaga Kerja | 0 | 0,05 | 0,05 | Disnaker |
| 37304 | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | Persentase Izin Usaha Simpan Pinjam yang Difasilitasi | Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 0 | 0,03 | 0,05 | DKUKM |
| 37669 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Persentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa | Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 0 | 0,2 | 0,27 | DKUKM |
| 38034 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | Persentase Kesehatan KSP/USP yang dinilai | Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 0 | 0,67 | 0,67 | DKUKM |
| 38400 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Persentase SDM Koperasi, UKM yang Terlatih (BALATKOP KUKM) | Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 0 | 0,00277 | 0,00298 | DKUKM |
| 38765 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | Persentase Koperasi yang diberdayakan | Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 0 | 0,44 | 0,69 | DKUKM |
| 39130 | PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Persentase UMKM yang Diberdayakan | Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 0 | 0,51% | 0,62% | DKUKM |
| 39495 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Persentase Usaha Kecil Yang Meningkat Menjadi Usaha Menengah | Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 0 | 0,11% | 0,13% | DKUKM |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/ outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera** | | | | | | | |
| **Prioritas Pembangunan Daerah: Pembangunan Manusia** | | | | | | | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | persentase guru yang bersertifikat pendidik | Pendidikan | 0 | 65 | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan Khusus terakreditasi A di cabdin V | Pendidikan | 0 persen | 100 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan Khusus terakreditasi A di Cabdin WIlayah III | Pendidikan | 0 persen | 100 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan Khusus terakreditasi A di Cabdin Wilayah IV | Pendidikan | 0 persen | 100 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus terakreditasi A | Pendidikan | 0 persen | 100 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan pendidikan khusus terakreditasi A di Cabdin Wilayah I | Pendidikan | 0 persen | 100 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan pendidikan khusus terakreditasi A di Cabdin WIlayah II | Pendidikan | 0 persen | 100 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan SMA terakreditasi A | Pendidikan | 0 persen | 51,29 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan SMA terakreditasi A di Cabdin I | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan SMA terakreditasi A di Cabdin Wilayah II | Pendidikan | 0 persen | 50 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan SMA terakreditasi A di Cabdin Wilayah III | Pendidikan | 0 persen | 83,3 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan SMA terakreditasi A di Cabdin WIlayah IV | Pendidikan | 0 persen | 44,4 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan SMA terakreditasi A di Cabdin Wilayah V | Pendidikan | 0 persen | 18,75 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan SMK terakreditasi A | Pendidikan | 0 persen | 73,6 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan SMK terakreditasi A di Cabdin I | Pendidikan | 0 persen | 80 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan SMK terakreditasi A di Cabdin WIlayah II | Pendidikan | 0 persen | 76,5 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan SMK terakreditasi A di Cabdin WIlayah III | Pendidikan | 0 persen | 42,9 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan SMK terakreditasi A di Cabdin Wilayah IV | Pendidikan | 0 persen | 90 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan SMK | Pendidikan | 0 persen | 78,6 persen | | Dinas Pendidikan |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/ outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | terakreditasi A di Cabdin Wilayah V | | | | | |
| | | Proporsi Guru dan Siswa yang menguasai TIK | Pendidikan | 0 persen | 70 persen | | Dinas Pendidikan |
| 37257 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Persentase lulusan SMA yang memiliki kompetensi TIK | Pendidikan | 0 persen | 73 persen | 80 persen | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase lulusan SMA yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin WIlayah I | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 70 persen | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase lulusan SMA yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah II | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 70 persen | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase lulusan SMA yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah III | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 70 persen | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase lulusan SMA yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah IV | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 70 persen | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase lulusan SMA yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah V | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 70 persen | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase lulusan SMK yang memiliki kompetensi TIK | Pendidikan | 0 persen | 73 persen | 80 persen | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase lulusan SMK yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah I | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 70 persen | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase lulusan SMK yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah II | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 70 persen | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase lulusan SMK yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah III | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 70 persen | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase lulusan SMK yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah IV | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 70 persen | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase lulusan SMK yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah V | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 70 persen | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase lulusan SMK yang memiliki sertifikast kompetensi | Pendidikan | 0 persen | 68 persen | 75 persen | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase lulusan SMK yang terserap di DUDIKA | Pendidikan | 0 persen | 59 persen | 59 persen | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase siswa PK yang melanjutkan pendidikan di PTN dan PTS | Pendidikan | 0 persen | 6 persen | 10 persen | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase siswa SMA yang melanjutkan pendidikan di PTN dan PTS | Pendidikan | 0 persen | 55 persen | 65 persen | Dinas Pendidikan |
| 37661 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | Bidang Pangan | 0 | 84,1 | 86,1 | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| 38073 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular | Bidang Pertanian | 0 persen | 2 persen | 2 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| 38071 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Jumlah Produksi Benih Ikan yang unggul (Juta Ekor) | Bidang Kelautan dan Perikanan | 0 Juta Ekor | 11 Juta Ekor | 12 Juta Ekor | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 38806 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Nilai Indeks Keberdayaan Konsumen | Bidang Perdagangan | 0% | 43% | 44% | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | Persentase Komoditi Potensial yang sesuai | Bidang Perdagangan | 0 | 1 | 1 | DINAS PERINDUSTRIAN |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/ outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | dengan ketentuan berlaku (UPTD BPSMB) | | | | | DAN PERDAGANGAN |
| 37663 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase Pengujian Sampel Parameter Kualitas Lingkungan yang terlayani (Laboratorium Lingkungan) | Bidang Lingkungan Hidup | 0% | 90% | 90% | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase Penurunan Emisi GRK dari Sektor Limbah dan Kehutanan | Bidang Lingkungan Hidup | 0 | 1 | 1 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase Titik Sampling Uji Kualitas Lingkungan | Bidang Lingkungan Hidup | 0 | 0,65 | 0,7 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 38394 | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) | Bidang Lingkungan Hidup | 0 | 1 | 1 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 39489 | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase kelompok swadaya masyarakat yang aktif dan mandiri | Bidang Lingkungan Hidup | 0 | 0,7 | 0,9 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 40585 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Persentase Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional | Bidang Lingkungan Hidup | 0% | 25% | 25% | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase Pengelolaan Persampahan di TPA Regional | Bidang Lingkungan Hidup | 0 | 0,05 | 0,15 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 38025 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 persen | 44.98 persen | 45.86 persen | DP3CASKB |
| 37299 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Persentase masyarakat yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk (KK, KTP, KIA) | Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0 persen | 89.8 persen | 93.27 persen | DP3CASKB |
| 37664 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | Persentase masyarakat yang memiliki akta pencatatan sipil (Akta Lahir, Akta Mati, Akta Perkawinan) | Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0 persen | 89.5 persen | 96.50 persen | DP3CASKB |
| 38029 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Persentase perangkat daerah dan sektor lain yang mengadakan pejanjian kerjasama | Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0 Persen | 37.14 Persen | 48.57 Persen | DP3CASKB |
| 37301 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Persentase pembinaan Penyediaan dan pemanfaatan data kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga di kabupaten/kota | Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 persen | 71.42 persen | 100 persen | DP3CASKB |
| 37666 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | persentase pembinaan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di kabupaten/kota | Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 persen | 100 persen | 100 persen | DP3CASKB |
| 38031 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | persentase pembinaan kampung KB | Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 persen | 63 persen | 84 persen | DP3CASKB |
| 37258 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan Sistem | Kesehatan | 0 persen | 100 persen | 100 persen | Dinas Kesehatan |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/ outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | KESEHATAN MASYARAKAT | Informasi Kesehatan (SIK) | | | | | |
| | | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi minimal madya | Kesehatan | 0 fasyankes | 86 fasyankes | 88 fasyankes | Dinas Kesehatan |
| | | Persentase pelaksanaan sinkronisasi penerapan standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan lintas kab/kota | Kesehatan | 0 persen | 100 persen | 100 persen | Dinas Kesehatan |
| | | Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit | Kesehatan | 0 persen | 94 persen | 94 persen | Dinas Kesehatan |
| | | Persentase peningkatan kesehatan masyarakat | Kesehatan | 0 persen | 87 persen | 89 persen | Dinas Kesehatan |
| | | Persentase peningkatan pemeriksaan laboratorium kesehatan | Kesehatan | 0 persen | 100 persen | 100 persen | Dinas Kesehatan |
| | | Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin essensial | Kesehatan | 0 persen | 87 persen | 88 persen | Dinas Kesehatan |
| 37623 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase tenaga kesehatan yang mendapatkan peningkatan kompetensi | Kesehatan | 0 persen | 87 persen | 88 persen | Dinas Kesehatan |
| 37988 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Persentase sarana sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat | Kesehatan | 0 persen | 89 persen | 90 persen | Dinas Kesehatan |
| 38354 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) | Kesehatan | 0 persen | 88 persen | 89 persen | Dinas Kesehatan |
| 37258 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase Pemenuhan Layanan Kesehatan Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna | Kesehatan | 0 persen | 85 persen | 86 persen | RSUP |
| 37623 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai klasifikasi Rumah Sakit tipe B | Kesehatan | 0 persen | 85 persen | 86 persen | RSUP |
| 38354 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan, kemitraan bidang kesehatan | Kesehatan | 0 persen | 100 persen | 100 persen | RSUP |
| 37258 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase fasilitas pelayanan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai kelas Rumah Sakit | Kesehatan | 0 persen | 82 persen | 85 persen | RUMAH SAKIT JIWA |
| | | Persentase masyarakat ataupun perorangan yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa dan non jiwa | Kesehatan | 0 persen | 82 persen | 85 persen | RUMAH SAKIT JIWA |
| | | Persentase masyarakat ataupun perorangan yang mendapat pelayanan penunjang | Kesehatan | 0 persen | 82 persen | 85 persen | RUMAH SAKIT JIWA |
| | | Persentase masyarakat ataupun perseorangan yang mendapat penanganan penyalahgunaan NAPZA | Kesehatan | 0 persen | 82 persen | 82 persen | RUMAH SAKIT JIWA |
| 37623 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase SDM kesehatan sesuai analisa beban kerja RS Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Kesehatan | 0 persen | 86 persen | 88 persen | RUMAH SAKIT JIWA |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/ outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Persentase SDM kesehatan yang mendapat pendidikan dan pelatihan | Kesehatan | 0 persen | 86 persen | 88 persen | RUMAH SAKIT JIWA |
| 37624 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Persentase Penyelenggaraan Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi | BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0% | 29% | 29% | DPUPRPERKIM |
| | | Persentase Readiness Criteria pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum | BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0 | 0,25 | 0,25 | DPUPRPERKIM |
| | | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak | BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0 | 0 | 0 | DPUPRPERKIM |
| 37989 | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan | BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0% | 100% | 0% | DPUPRPERKIM |
| | | Persentase Readiness Criteria pembangunan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional yang disiapkan | BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0 | 0 | 0 | DPUPRPERKIM |
| | | Persentase rumah tangga yang terlayani pengelolaan sampah | BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0 | 0 | 0,1 | DPUPRPERKIM |
| 38355 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Persentase Readiness Criteria pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah yang disiapkan | BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0% | 18% | 27% | DPUPRPERKIM |
| | | Persentase rumah tangga yang besanitasi | BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0 | 0,06 | 0,06 | DPUPRPERKIM |
| 38720 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Persentase Readiness Criteria pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang disiapkan | BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0 | 0,5 | 0 | DPUPRPERKIM |
| 39816 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | Persentase Luas kawasan yang tertata | BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0 | 0,44 | 1 | DPUPRPERKIM |
| 37260 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Persentase ketersediaan Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 0% | 20% | 20% | DPUPRPERKIM |
| | | Persentase penyelenggaraan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 0 | 0,25 | 0,25 | DPUPRPERKIM |
| | | Persentasi Pengembangan | BIDANG | 0 | 1 | 1 | DPUPRPERKIM |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/ outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | perumahan korban Bencana atau relokasi program provinsi | PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | |
| 37625 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | Persentase Kawasan Kumuh yang sudah direncanakan | BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 0% | 23% | 31% | DPUPRPERKIM |
| | | Persentase luasan kawasan kumuh yang tertangani | BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 0 | 0,06 | 0,06 | DPUPRPERKIM |
| 38356 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Persentase Pemukiman yang terfasilitasi oleh PSU | BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 0 | 0,25 | 1 | DPUPRPERKIM |
| 37626 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Persentase Penanganan Pasca Bencana | Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat | 0% | 71,50% | 85,70% | BPBD |
| | | Persentase Penanganan Pra Bencana | Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat | 0 | 1 | 1 | BPBD |
| | | Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana | Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat | 0 | 1 | 1 | BPBD |
| 38723 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Persentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial | BIDANG SOSIAL | 0 | 25,15% | 1 | Dinsospemdes |
| 38396 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif | bidang pemberdayaan masyarakat dan desa | 0 | 0,25 | 1 | Dinsospemdes |
| 38358 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial | BIDANG SOSIAL | 0 | 25,28% | 1 | Dinsospemdes |
| 37262 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Persentase PMKS/PSKS yg terberdayakan | BIDANG SOSIAL | 0 | 1 | 1 | Dinsospemdes |
| 37659 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Persentase Pencari kerja Yang Berkompeten | Bidang Tenaga Kerja | 0 | 0,0525 | 0,0575 | Disnaker |
| 38034 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | Persentase Kesehatan KSP/USP yang dinilai | Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 0 | 0,67 | 0,67 | DKUKM |
| 39130 | PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Persentase UMKM yang Diberdayakan | Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 0 | 0,51% | 0,62% | DKUKM |
| 39495 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Persentase Usaha Kecil Yang Meningkat Menjadi Usaha Menengah | Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 0 | 0,11% | 0,13% | DKUKM |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/ outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37660 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Persentase kebijakan perlindungan perempuan | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 persen | 100 persen | 100 persen | DP3CASKB |
| | | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 persen | 100 persen | 100 persen | DP3CASKB |
| | | Persentase Peningkatan SDM Perlindungan Anak | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 persen | 33 persen | 37 persen | DP3CASKB |
| 37671 | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Persentase Cabang Olahraga yang dibina | Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 0 persen | 61.11 persen | 69.44 persen | DIPARBUDKEPORA |
| 37303 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebarluasan informasi publik | Bidang Komunikasi dan Informatika | 0 | 1 | 1 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | Program Kesejahteraan Rakyat | Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Kesejahteraan Rakyat yang tersusun | Penunjang Urusan Pemerintah | 70% | 70% | 70% | Biro Kesejahteraan Rakyat |
| 37378 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Jumlah kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan | Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan | 0 Kab/Kota | 7 Kab/Kota | 7 Kab/Kota | Bakuda |
| | | Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi, | Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan | 0 Nilai | 2 Nilai | 2 Nilai | Bakuda |
| | | Nilai ketepatan waktu penetapan APBD dan Perubahan APBD | Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan | 0 Nilai | 2 Nilai | 2 Nilai | Bakuda |
| | | persentase pemenuhan ketaatan pada peraturan terhadap penyaluran Dana Transfer dan BTT | Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan | 0 | 1 | 1 | Bakuda |
| | | persentase realisasi penyediaan dana belanja APBD | Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan | 0 | 0,93 | 0,94 | Bakuda |
| 37380 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Persentase ASN yang meningkat pengembangan kompetensi manajerial, fungsional dan teknis | Urusann Pemerintahan Unsur Pendidikan dan Pelatihan | 0 | 0,75 | 0,85 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| 37408 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Nilai Materialitas Hasil Temuan Hasil Pengawasan dibawah 5%, Bidang Pemerintahan dan Aparatur; Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya. | Urusan Pemerintahan Unsur pengawasan | 0 | >5 % | >5 % | Inspektorat Daerah |
| | | Nilai Hasil Kapabilitas APIP dan Nilai Hasil Evaluasi Maturitas SPIP Level 3 | | 3 Level | 3 Level | 3 Level | Inspektorat Daerah |
| 37377 | PROGRAM PERENCANAAN | Persentase Konsistensi Program Pembangunan di | Urusan Pemerintahan | 0 | 1 | 1 | Bappeda |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/ outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | RKPD dengan RPJMD dan Renstra dengan RPJMD | Unsur Perencanaan | | | | |
| | | Persentase Renstra PD yang baik (memiliki rencana kinerja yang baik, tepat, dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat) | | 1 | 1 | 1 | Bappeda |
| 37742 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase Rumusan Hasil Pengendalian dan Evaluasi pada Dokumen Perencanaan PD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Urusan Pemerintahan Unsur Perencanaan | 0% | 0,9 | 0,9 | Bappeda |
| | | Persentase Rumusan Hasil Pengendalian dan Evaluasi pada Dokumen Perencanaan PD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | | 0 | 0,9 | 0,9 | Bappeda |
| | | Persentase Rumusan Hasil Pengendalian dan Evaluasi pada Dokumen Perencanaan PD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam | | 0 | 0,9 | 0,9 | Bappeda |
| | | Nilai perencanaan kinerja dalam Lakip Provinsi | | 23.63 Nilai | 23.75 Nilai | 24.00 Nilai | Bappeda |
| | | Persentase Renstra PD yang baik (memiliki rencana kinerja yang baik, tepat, dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat) | | 1 | 1 | 1 | Bappeda |
| **Tujuan 5 Kesetaraan Gender** | | | | | | | |
| **Prioritas Pembangunan Daerah: Pembangunan Ekonomi** | | | | | | | |
| 38392 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | Persentase pangan yang aman dikonsumsi | Bidang Pangan | **0 persen** | 86 persen | 86 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| 37659 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Persentase Pencari kerja Yang Berkompeten | Bidang Tenaga Kerja | 0 | 0,0525 | 0,0575 | Disnaker |
| 38806 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Nilai Indeks Keberdayaan Konsumen | Bidang Perdagangan | 0% | 43% | 44% | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | Persentase Komoditi Potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku (UPTD BPSMB) | Bidang Perdagangan | 0 | 1 | 1 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 39171 | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | Persentase Fasilitasi Produk UMKM yang dipasarkan (UPTD RPK) | Bidang Perdagangan | 0% | 40% | 50% | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | Persentase Produk Lokal yang digunakan, dipromosikan dan dipasarkan melalui Akses Pasar | Bidang Perdagangan | 0 | 0,65 | 0,75 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | Persentase Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan | | 2,00% | 3,50% | 4,00% | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan | | 14,500 Triliyun | 16,000 Triliyun | 17,500 Triliyun | DINAS |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/ outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | Rp | Rp | Rp | PERINDUSTRIAN DAN |
| | | | | | | | PERDAGANGAN |
| 37309 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Persentase kebudayaan lokal yang dikembangkan | Bidang Kebudayaan | 0 persen | 49,33 persen | 49,33 persen | DIPARBUDKEPORA |
| 38072 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | Persentase Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan | Bidang Pariwisata | 0 | 0,3077 | 0,8 | DIPARBUDKEPORA |
| 38437 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Persentase SDM Pariwisata dan Ekraf yang Memiliki Kompetensi | Bidang Pariwisata | 0 | 0,1 | 0,097 | DIPARBUDKEPORA |
| 38035 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Pelaku Usaha yang terlayani | Bidang Penanaman Modal | 0 Pelaku Usaha | 1000 Pelaku Usaha | 4125 Pelaku Usaha | DPMPTSP |
| 38766 | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | Sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang dikelola | Bidang Penanaman Modal | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | DPMPTSP |
| **Prioritas Pembangunan Daerah: Pembangunan Sumber Daya Manusia** | | | | | | | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | persentase guru yang bersertifikat pendidik | Pendidikan | 0 | 65 | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan Khusus terakreditasi A di cabdin V | Pendidikan | 0 persen | 100 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan Khusus terakreditasi A di Cabdin WIlayah III | Pendidikan | 0 persen | 100 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan Khusus terakreditasi A di Cabdin Wilayah IV | Pendidikan | 0 persen | 100 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus terakreditasi A | Pendidikan | 0 persen | 100 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan pendidikan khusus terakreditasi A di Cabdin Wilayah I | Pendidikan | 0 persen | 100 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan pendidikan khusus terakreditasi A di Cabdin WIlayah II | Pendidikan | 0 persen | 100 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan SMA terakreditasi A | Pendidikan | 0 persen | 51,29 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan SMA terakreditasi A di Cabdin I | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan SMA terakreditasi A di Cabdin Wilayah II | Pendidikan | 0 persen | 50 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan SMA terakreditasi A di Cabdin Wilayah III | Pendidikan | 0 persen | 83,3 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan SMA terakreditasi A di Cabdin WIlayah IV | Pendidikan | 0 persen | 44,4 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan SMA | Pendidikan | 0 persen | 18,75 persen | | Dinas Pendidikan |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/ outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | terakreditasi A di Cabdin Wilayah V | | | | | |
| | | Persentase Satuan Pendidikan SMK terakreditasi A | Pendidikan | 0 persen | 73,6 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan SMK terakreditasi A di Cabdin I | Pendidikan | 0 persen | 80 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan SMK terakreditasi A di Cabdin WIlayah II | Pendidikan | 0 persen | 76,5 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan SMK terakreditasi A di Cabdin WIlayah III | Pendidikan | 0 persen | 42,9 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan SMK terakreditasi A di Cabdin Wilayah IV | Pendidikan | 0 persen | 90 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan SMK terakreditasi A di Cabdin Wilayah V | Pendidikan | 0 persen | 78,6 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Proporsi Guru dan Siswa yang menguasai TIK | Pendidikan | 0 persen | 70 persen | | Dinas Pendidikan |
| 37257 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Persentase lulusan SMA yang memiliki kompetensi TIK | Pendidikan | 0 persen | 73 persen | 80 persen | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase lulusan SMA yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin WIlayah I | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 70 persen | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase lulusan SMA yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah II | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 70 persen | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase lulusan SMA yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah III | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 70 persen | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase lulusan SMA yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah IV | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 70 persen | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase lulusan SMA yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah V | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 70 persen | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase lulusan SMK yang memiliki kompetensi TIK | Pendidikan | 0 persen | 73 persen | 80 persen | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase lulusan SMK yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah I | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 70 persen | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase lulusan SMK yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah II | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 70 persen | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase lulusan SMK yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah III | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 70 persen | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase lulusan SMK yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah IV | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 70 persen | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase lulusan SMK yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah V | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 70 persen | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase lulusan SMK yang memiliki sertifikast kompetensi | Pendidikan | 0 persen | 68 persen | 75 persen | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase lulusan SMK yang terserap di DUDIKA | Pendidikan | 0 persen | 59 persen | 59 persen | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase siswa PK yang melanjutkan pendidikan di PTN dan PTS | Pendidikan | 0 persen | 6 persen | 10 persen | Dinas Pendidikan |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/ outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Persentase siswa SMA yang melanjutkan pendidikan di PTN dan PTS | Pendidikan | 0 persen | 55 persen | 65 persen | Dinas Pendidikan |
| 37295 | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Persentase ARG pada Belanja Operasi dan belanja modal APBD | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 persen | 2.6 persen | 2.8 persen | DP3CASKB |
| 37660 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Persentase kebijakan perlindungan perempuan | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 persen | 100 persen | 100 persen | DP3CASKB |
| | | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 persen | 100 persen | 100 persen | DP3CASKB |
| 38025 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 persen | 44.98 persen | 45.86 persen | DP3CASKB |
| 38756 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Persentase peningkatan SDM dalam Pemenuhan Partisipasi ANAK | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 persen | 19.90 persen | 20.90 persen | DP3CASKB |
| 39121 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 persen | 100 persen | 100 persen | DP3CASKB |
| | | Persentase Peningkatan SDM Perlindungan Anak | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 persen | 33 persen | 37 persen | DP3CASKB |
| 38391 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | Persentase capaian OPD yang menyediakan data pilah gender dan anak | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 persen | 92.59 persen | 96.29 persen | DP3CASKB |
| 37299 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Persentase masyarakat yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk (KK, KTP, KIA) | Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0 persen | 89.8 persen | 93.27 persen | DP3CASKB |
| 37664 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | Persentase masyarakat yang memiliki akta pencatatan sipil (Akta Lahir, Akta Mati, Akta Perkawinan) | Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0 persen | 89.5 persen | 96.50 persen | DP3CASKB |
| 38029 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Persentase perangkat daerah dan sektor lain yang mengadakan pejanjian kerjasama | Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0 Persen | 37.14 Persen | 48.57 Persen | DP3CASKB |
| 38395 | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | Persentase penyediaan penyajian data kependudukan tingkat provinsi | Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan | 0 persen | 100 persen | 100 persen | DP3CASKB |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/ outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Sipil | | | | |
| 37301 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Persentase pembinaan Penyediaan dan pemanfaatan data kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga di kabupaten/kota | Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 persen | 71.42 persen | 100 persen | DP3CASKB |
| 37666 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | persentase pembinaan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di kabupaten/kota | Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 persen | 100 persen | 100 persen | DP3CASKB |
| 38031 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | persentase pembinaan kampung KB | Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 persen | 63 persen | 84 persen | DP3CASKB |
| 37258 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) | Kesehatan | 0 persen | 100 persen | 100 persen | Dinas Kesehatan |
| | | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi minimal madya | Kesehatan | 0 fasyankes | 86 fasyankes | 88 fasyankes | Dinas Kesehatan |
| | | Persentase pelaksanaan sinkronisasi penerapan standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan lintas kab/kota | Kesehatan | 0 persen | 100 persen | 100 persen | Dinas Kesehatan |
| | | Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit | Kesehatan | 0 persen | 94 persen | 94 persen | Dinas Kesehatan |
| | | Persentase peningkatan kesehatan masyarakat | Kesehatan | 0 persen | 87 persen | 89 persen | Dinas Kesehatan |
| | | Persentase peningkatan pemeriksaan laboratorium kesehatan | Kesehatan | 0 persen | 100 persen | 100 persen | Dinas Kesehatan |
| | | Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin essensial | Kesehatan | 0 persen | 87 persen | 88 persen | Dinas Kesehatan |
| 37623 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase tenaga kesehatan yang mendapatkan peningkatan kompetensi | Kesehatan | 0 persen | 87 persen | 88 persen | Dinas Kesehatan |
| 38354 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) | Kesehatan | 0 persen | 88 persen | 89 persen | Dinas Kesehatan |
| 37258 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase Pemenuhan Layanan Kesehatan Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna | Kesehatan | 0 persen | 85 persen | 86 persen | RSUP |
| 37623 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai klasifikasi Rumah Sakit tipe B | Kesehatan | 0 persen | 85 persen | 86 persen | RSUP |
| 38354 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan, kemitraan bidang kesehatan | Kesehatan | 0 persen | 100 persen | 100 persen | RSUP |
| 37258 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase fasilitas pelayanan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai kelas Rumah Sakit | Kesehatan | 0 persen | 82 persen | 85 persen | RUMAH SAKIT JIWA |
| | | Persentase masyarakat ataupun perorangan yang | Kesehatan | 0 persen | 82 persen | 85 persen | RUMAH SAKIT JIWA |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/ outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | mendapat pelayanan kesehatan jiwa dan non jiwa | | | | | |
| | | Persentase masyarakat ataupun perorangan yang mendapat pelayanan penunjang | Kesehatan | 0 persen | 82 persen | 85 persen | RUMAH SAKIT JIWA |
| | | Persentase masyarakat ataupun perseorangan yang mendapat penanganan penyalahgunaan NAPZA | Kesehatan | 0 persen | 82 persen | 82 persen | RUMAH SAKIT JIWA |
| 37623 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase SDM kesehatan sesuai analisa beban kerja RS Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Kesehatan | 0 persen | 86 persen | 88 persen | RUMAH SAKIT JIWA |
| | | Persentase SDM kesehatan yang mendapat pendidikan dan pelatihan | Kesehatan | 0 persen | 86 persen | 88 persen | RUMAH SAKIT JIWA |
| **Prioritas Pembangunan Daerah: Pembangunan Demokrai** | | | | | | | |
| 37834 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | Persentase pembinaan politik di daerah | urusan pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik | 0 | 0,3 | 1 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| **Prioritas Pembangunan Daerah: Pembangunan Wilayah** | | | | | | | |
| 38356 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Persentase Pemukiman yang terfasilitasi oleh PSU | BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 0 | 0,25 | 1 | DPUPRPERKIM |
| 37626 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Persentase Penanganan Pasca Bencana | Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat | 0% | 71,50% | 85,70% | BPBD |
| | | Persentase Penanganan Pra Bencana | Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat | 0 | 1 | 1 | BPBD |
| | | Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana | Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat | 0 | 1 | 1 | BPBD |
| 38723 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Persentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial | BIDANG SOSIAL | 0 | 25,15% | 1 | Dinsospemdes |
| 38396 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif | bidang pemberdayaan masyarakat dan desa | 0 | 0,25 | 1 | Dinsospemdes |
| 37627 | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang di ditangani | BIDANG SOSIAL | 0 | 23,81% | 1 | Dinsospemdes |
| **Prioritas Pembangunan Daerah: Pemerataan Pendapatan Masyarakat** | | | | | | | |
| 37992 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase PMKS yang di Rehabilitasi sosial di Dalam Panti | BIDANG SOSIAL | 0% | 22,58% | 100% | Dinsospemdes |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/ outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Persentase PMKS yang di rehabilitasi sosial di dalam Panti Sosial Bina Laras Hijrah | BIDANG SOSIAL | 0 | 0,3 | 1 | Dinsospemdes |
| | | Persentase PMKS yang di Rehabilitasi Sosial di Dalam Panti Sosial Bina Serumpun | BIDANG SOSIAL | 0 | 0,2143 | 1 | Dinsospemdes |
| 38358 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial | BIDANG SOSIAL | 0 | 25,28% | 1 | Dinsospemdes |
| 37262 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Persentase PMKS/PSKS yg terberdayakan | BIDANG SOSIAL | 0 | 1 | 1 | Dinsospemdes |
| 37659 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Persentase Pencari kerja Yang Berkompeten | Bidang Tenaga Kerja | 0 | 0,0525 | 0,0575 | Disnaker |
| 38024 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | Persentase Tenga Kerja Yang Ditempatkan | Bidang Tenaga Kerja | 0 | 0,05 | 0,05 | Disnaker |
| 38400 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Persentase SDM Koperasi, UKM yang Terlatih (BALATKOP KUKM) | Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 0 | 0,00277 | 0,00298 | DKUKM |
| 39130 | PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Persentase UMKM yang Diberdayakan | Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 0 | 0,51% | 0,62% | DKUKM |
| 39495 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Persentase Usaha Kecil Yang Meningkat Menjadi Usaha Menengah | Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 0 | 0,11% | 0,13% | DKUKM |
| 37671 | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Persentase Cabang Olahraga yang dibina | Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 0 persen | 61.11 persen | 69.44 persen | DIPARBUDKEPORA |
| 38036 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | Persentase tingkat keaktifan Organisasi Pramuka | Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 0 persen | 19.51 persen | 19.51 persen | DIPARBUDKEPORA |
| **Prioritas Pembangunan Daerah: Pembangunan Pemerintahan** | | | | | | | |
| 37303 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebarluasan informasi publik | Bidang Komunikasi dan Informatika | 0 | 1 | 1 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 37668 | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | Persentase ketersediaan infrastruktur, teknologi dan sistem elektronik. | Bidang Komunikasi dan Informatika | 0,8 | 0,85 | 1 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 37307 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Presentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah | Bidang Statistik | 0 | 0,75 | 1 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 37378 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Jumlah kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan | Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan | 0 Kab/Kota | 7 Kab/Kota | 7 Kab/Kota | Bakuda |
| | | Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi, | Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan | 0 Nilai | 2 Nilai | 2 Nilai | Bakuda |
| | | Nilai ketepatan waktu penetapan APBD dan Perubahan APBD | Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan | 0 Nilai | 2 Nilai | 2 Nilai | Bakuda |
| | | persentase pemenuhan ketaatan pada peraturan terhadap penyaluran Dana Transfer dan BTT | Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan | 0 | 1 | 1 | Bakuda |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/ outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | persentase realisasi penyediaan dana belanja APBD | Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan | 0 | 0,93 | 0,94 | Bakuda |
| 37379 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Persentase ASN yang ditingkatkan kapasitasnya | Urusan Pemerintahan Unsur Kepegawaian | 0% | 26,60% | 31,04% | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | | Persentase ASN yang memiliki kinerja minimal baik | Urusan Pemerintahan Unsur Kepegawaian | 0 | 99.87 % | 99.91 % | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | | Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui mutasi, promosi | Urusan Pemerintahan Unsur Kepegawaian | 0 | 0,95 | 0,97 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | | Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui pengadaan | Urusan Pemerintahan Unsur Kepegawaian | 0 | 0,86 | 0,88 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | | Nilai Indeks Profesionalitas ASN | | 66.20 Nilai | 68 Nilai | 70 Nilai | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | | Persentase ASN yang Memenuhi Kompetensi Sesuai dengan Jabatan | | 79.30 Persen | 82 Persen | 86 Persen | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| 37380 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Persentase ASN yang meningkat pengembangan kompetensi manajerial, fungsional dan teknis | Urusann Pemerintahan Unsur Pendidikan dan Pelatihan | 0 | 0,75 | 0,85 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| 37377 | PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase Konsistensi Program Pembangunan di RKPD dengan RPJMD dan Renstra dengan RPJMD | Urusan Pemerintahan Unsur Perencanaan | 0 | 1 | 1 | Bappeda |
| | | Persentase Renstra PD yang baik (memiliki rencana kinerja yang baik, tepat, dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat) | | 1 | 1 | 1 | Bappeda |
| 37742 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase Rumusan Hasil Pengendalian dan Evaluasi pada Dokumen Perencanaan PD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Urusan Pemerintahan Unsur Perencanaan | 0% | 0,9 | 0,9 | Bappeda |
| | | Persentase Rumusan Hasil | | 0 | 0,9 | 0,9 | Bappeda |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/ outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Pengendalian dan Evaluasi pada Dokumen Perencanaan PD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | | | | | |
| | | Persentase Rumusan Hasil Pengendalian dan Evaluasi pada Dokumen Perencanaan PD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam | | 0 | 0,9 | 0,9 | Bappeda |
| | | Nilai perencanaan kinerja dalam Lakip Provinsi | | 23.63 Nilai | 23.75 Nilai | 24.00 Nilai | Bappeda |
| | | Persentase Renstra PD yang baik (memiliki rencana kinerja yang baik, tepat, dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat) | | 1 | 1 | 1 | Bappeda |
| 37381 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang digunakan Sebagai Bahan Perumusan Kebijakan | Urusan Pemerintahan Unsur Perencanaan | 0% | 0,8 | 0,85 | Bappeda |
| | | Persentase Jumlah Inovasi Daerah yang dikembangkan | Urusan Pemerintahan Unsur Perencanaan | 0 | 0,8 | 0,8 | Bappeda |
| **Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak** | | | | | | | |
| **Prioritas Pembangunan Daerah : Pembangunan Wilayah** | | | | | | | |
| 37259 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | - | BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0% | 0% | 0% | DPUPRPERKIM |
| | | Rasio Jaringan Irigasi | | | | | |
| | | | BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0 | 0,0039 | 0,0056 | DPUPRPERKIM |
| 37624 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Persentase Penyelenggaraan Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi | BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0% | 29% | 29% | DPUPRPERKIM |
| | | Persentase Readiness Criteria pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum | BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0 | 0,25 | 0,25 | DPUPRPERKIM |
| | | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak | BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0 | 0 | 0 | DPUPRPERKIM |
| 37989 | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan | BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0% | 100% | 0% | DPUPRPERKIM |
| | | Persentase Readiness Criteria pembangunan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional yang disiapkan | BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0 | 0 | 0 | DPUPRPERKIM |
| | | Persentase rumah tangga yang terlayani pengelolaan | BIDANG PEKERJAAN | 0 | 0 | 0,1 | DPUPRPERKIM |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/ outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | sampah | UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | |
| 38355 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Persentase Readiness Criteria pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah yang disiapkan | BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0% | 18% | 27% | DPUPRPERKIM |
| | | Persentase rumah tangga yang besanitasi | BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0 | 0,06 | 0,06 | DPUPRPERKIM |
| 37625 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | Persentase Kawasan Kumuh yang sudah direncanakan | BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 0% | 23% | 31% | DPUPRPERKIM |
| | | Persentase luasan kawasan kumuh yang tertangani | BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 0 | 0,06 | 0,06 | DPUPRPERKIM |
| **Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan** | | | | | | | |
| **Prioritas Pembangunan Daerah : Pembangunan Wilayah** | | | | | | | |
| 37259 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | - | BIDANG PEKERJAAN | 0% | 0% | 0% | DPUPRPERKIM |
| | | Rasio Jaringan Irigasi | UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | |
| | | | BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0 | 0,0039 | 0,0056 | DPUPRPERKIM |
| 37624 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Persentase Penyelenggaraan Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi | BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0% | 29% | 29% | DPUPRPERKIM |
| | | Persentase Readiness Criteria pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum | BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0 | 0,25 | 0,25 | DPUPRPERKIM |
| | | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak | BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0 | 0 | 0 | DPUPRPERKIM |
| 37989 | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan | BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0% | 100% | 0% | DPUPRPERKIM |
| | | Persentase Readiness Criteria pembangunan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional yang disiapkan | BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0 | 0 | 0 | DPUPRPERKIM |
| | | Persentase rumah tangga yang terlayani pengelolaan sampah | BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0 | 0 | 0,1 | DPUPRPERKIM |
| 38355 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN | Persentase Readiness Criteria pengelolaan dan | BIDANG PEKERJAAN | 0% | 18% | 27% | DPUPRPERKIM |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/ outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | SISTEM AIR LIMBAH | pengembangan sistem air limbah yang disiapkan | UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | |
| | | Persentase rumah tangga yang besanitasi | BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0 | 0,06 | 0,06 | DPUPRPERKIM |
| 37260 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Persentase ketersediaan Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 0% | 20% | 20% | DPUPRPERKIM |
| | | Persentase penyelenggaraan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 0 | 0,25 | 0,25 | DPUPRPERKIM |
| | | Persentasi Pengembangan perumahan korban Bencana atau relokasi program provinsi | BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 0 | 1 | 1 | DPUPRPERKIM |
| 37625 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | Persentase Kawasan Kumuh yang sudah direncanakan | BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 0% | 23% | 31% | DPUPRPERKIM |
| | | Persentase luasan kawasan kumuh yang tertangani | BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 0 | 0,06 | 0,06 | DPUPRPERKIM |
| 38393 | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan | BIDANG PERTANAHAN | 0 | 0,85 | 1 | DPUPRPERKIM |
| **Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung jawab** | | | | | | | |
| **Prioritas Pembangunan Daerah : Pembangunan Lingkungan** | | | | | | | |
| 37663 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase Pengujian Sampel Parameter Kualitas Lingkungan yang terlayani (Laboratorium Lingkungan) | Bidang Lingkungan Hidup | 0% | 90% | 90% | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase Penurunan Emisi GRK dari Sektor Limbah dan Kehutanan | Bidang Lingkungan Hidup | 0 | 1 | 1 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase Titik Sampling Uji Kualitas Lingkungan | Bidang Lingkungan Hidup | 0 | 0,65 | 0,7 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 40585 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Persentase Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional | Bidang Lingkungan Hidup | 0% | 25% | 25% | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase Pengelolaan Persampahan di TPA Regional | Bidang Lingkungan Hidup | 0 | 0,05 | 0,15 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 37708 | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi) (DLHK) | Bidang Kehutanan | 0% | 20% | 20% | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi) (UPTD KPH Belantu Mendanau) | Bidang Kehutanan | 0 | 0,2 | 0,2 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi) (UPTD KPH Bubus Panca) | Bidang Kehutanan | 0 | 0,2 | 0,2 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/ outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi) (UPTD KPH Gunung Duren) | Bidang Kehutanan | 0 | 0,2 | 0,2 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi) (UPTD KPH Jebu Bembang Antan) | Bidang Kehutanan | 0 | 0,2 | 0,2 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi) (UPTD KPH Muntai Palas) | Bidang Kehutanan | 0 | 0,2 | 0,2 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi) (UPTD KPH Rambat Menduyung) | Bidang Kehutanan | 0 | 0,2 | 0,2 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi) (UPTD KPH Sigambir Kotawaringin) | Bidang Kehutanan | 0 | 0,2 | 0,2 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi) (UPTD KPH Sungai Sembulan) | Bidang Kehutanan | 0 | 0,2 | 0,2 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (DLHK) | Bidang Kehutanan | 0 | 13.17 % | 13.17 % | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (UPTD KPH Belantu Mendanau) | Bidang Kehutanan | 0 | 13.17 % | 13.17 % | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (UPTD KPH Bubus Panca) | Bidang Kehutanan | 0 | 13.17 % | 13.17 % | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (UPTD KPH Gunung Duren) | Bidang Kehutanan | 0 | 13.17 % | 13.17 % | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (UPTD KPH Jebu Bembang Antan) | Bidang Kehutanan | 0 | 13.17 % | 13.17 % | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (UPTD KPH Muntai Palas) | Bidang Kehutanan | 0 | 13.17 % | 13.17 % | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (UPTD KPH Rambat Menduyung) | Bidang Kehutanan | 0 | 13.17 % | 13.17 % | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (UPTD KPH Sigambir KotaWaringin) | Bidang Kehutanan | 0 | 13.17 % | 13.17 % | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (UPTD KPH Sungai Sembulan) | Bidang Kehutanan | 0 | 13.17 % | 13.17 % | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase Pemanfaatan Kawasan Hutan (DLHK) | Bidang Kehutanan | 0 | 35.65 % | 35.41 % | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase Pemanfaatan Kawasan Hutan (UPTD KPH Belantu Mendanau) | Bidang Kehutanan | 0 | 35.65 % | 35.41 % | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase Pemanfaatan Kawasan Hutan (UPTD KPH Bubus Panca) | Bidang Kehutanan | 0 | 35.65 % | 35.41 % | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase Pemanfaatan Kawasan Hutan (UPTD KPH Gunung Duren) | Bidang Kehutanan | 0 | 35.65 % | 35.41 % | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase Pemanfaatan Kawasan Hutan (UPTD | Bidang Kehutanan | 0 | 35.65 % | 35.41 % | Dinas Lingkungan Hidup dan |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/ outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | KPH Jebu Bembang Antan) | | | | | Kehutanan |
| | | Persentase Pemanfaatan Kawasan Hutan (UPTD KPH Muntai Palas) | Bidang Kehutanan | 0 | 35.65 % | 35.41 % | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase Pemanfaatan Kawasan Hutan (UPTD KPH Rambat Menduyung) | Bidang Kehutanan | 0 | 36.65 % | 35.41 % | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase Pemanfaatan Kawasan Hutan (UPTD KPH Sigambir Kotawaringin) | Bidang Kehutanan | 0 | 35.65 % | 35.41 % | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase Pemanfaatan Kawasan Hutan (UPTD KPH Sungai Sembulan) | Bidang Kehutanan | 0 | 35.65 % | 35.41 % | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 38074 | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA | Persentase Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (DLHK) | Bidang Kehutanan | 0 | 1 | 1 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 38439 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (DLHK) | Bidang Kehutanan | 0% | 40% | 50% | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (UPTD KPH Belantu Mendanau) | Bidang Kehutanan | 0 | 0,4 | 0,5 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (UPTD KPH Bubus Panca) | Bidang Kehutanan | 0 | 0,4 | 0,5 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (UPTD KPH Gunung Duren) | Bidang Kehutanan | 0 | 0,4 | 0,5 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (UPTD KPH Muntai Palas) | Bidang Kehutanan | 0 | 0,4 | 0,5 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (UPTD KPH Sigambir Kotawaringin) | Bidang Kehutanan | 0 | 0,4 | 0,5 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (UPTD KPH Sungai Sembulan) | Bidang Kehutanan | 0 | 0,4 | 0,5 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (UPT KPH Jebu Bembang Antan) | Bidang Kehutanan | 0 | 0,4 | 0,5 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (UPT KPH Rambat Menduyung) | Bidang Kehutanan | 0 | 0,4 | 0,5 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 38804 | PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) | Persentase luas DAS yang dikelola (DLHK) | Bidang Kehutanan | 0 | 0,0913 | 0,0913 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| **Tujuan 15 Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Daratan** | | | | | | | |
| **Prioritas Pembangunan Daerah : Pembangunan Lingkungan** | | | | | | | |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/ outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37708 | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi) (DLHK) | Bidang Kehutanan | 0% | 20% | 20% | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi) (UPTD KPH Belantu Mendanau) | Bidang Kehutanan | 0 | 0,2 | 0,2 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi) (UPTD KPH Bubus Panca) | Bidang Kehutanan | 0 | 0,2 | 0,2 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi) (UPTD KPH Gunung Duren) | Bidang Kehutanan | 0 | 0,2 | 0,2 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi) (UPTD KPH Jebu Bembang Antan) | Bidang Kehutanan | 0 | 0,2 | 0,2 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi) (UPTD KPH Muntai Palas) | Bidang Kehutanan | 0 | 0,2 | 0,2 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi) (UPTD KPH Rambat Menduyung) | Bidang Kehutanan | 0 | 0,2 | 0,2 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi) (UPTD KPH Sigambir Kotawaringin) | Bidang Kehutanan | 0 | 0,2 | 0,2 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi) (UPTD KPH Sungai Sembulan) | Bidang Kehutanan | 0 | 0,2 | 0,2 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (DLHK) | Bidang Kehutanan | 0 | 13.17 % | 13.17 % | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (UPTD KPH Belantu Mendanau) | Bidang Kehutanan | 0 | 13.17 % | 13.17 % | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (UPTD KPH Bubus Panca) | Bidang Kehutanan | 0 | 13.17 % | 13.17 % | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (UPTD KPH Gunung Duren) | Bidang Kehutanan | 0 | 13.17 % | 13.17 % | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (UPTD KPH Jebu Bembang Antan) | Bidang Kehutanan | 0 | 13.17 % | 13.17 % | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (UPTD KPH Muntai Palas) | Bidang Kehutanan | 0 | 13.17 % | 13.17 % | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (UPTD KPH Rambat Menduyung) | Bidang Kehutanan | 0 | 13.17 % | 13.17 % | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (UPTD KPH Sigambir KotaWaringin) | Bidang Kehutanan | 0 | 13.17 % | 13.17 % | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (UPTD KPH Sungai Sembulan) | Bidang Kehutanan | 0 | 13.17 % | 13.17 % | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase Pemanfaatan Kawasan Hutan (DLHK) | Bidang Kehutanan | 0 | 35.65 % | 35.41 % | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/ outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 |
| | | Persentase Pemanfaatan Kawasan Hutan (UPTD KPH Belantu Mendanau) | Bidang Kehutanan | 0 | 35.65 % | 35.41 % | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase Pemanfaatan Kawasan Hutan (UPTD KPH Bubus Panca) | Bidang Kehutanan | 0 | 35.65 % | 35.41 % | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase Pemanfaatan Kawasan Hutan (UPTD KPH Gunung Duren) | Bidang Kehutanan | 0 | 35.65 % | 35.41 % | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase Pemanfaatan Kawasan Hutan (UPTD KPH Jebu Bembang Antan) | Bidang Kehutanan | 0 | 35.65 % | 35.41 % | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase Pemanfaatan Kawasan Hutan (UPTD KPH Muntai Palas) | Bidang Kehutanan | 0 | 35.65 % | 35.41 % | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase Pemanfaatan Kawasan Hutan (UPTD KPH Rambat Menduyung) | Bidang Kehutanan | 0 | 36.65 % | 35.41 % | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase Pemanfaatan Kawasan Hutan (UPTD KPH Sigambir Kotawaringin) | Bidang Kehutanan | 0 | 35.65 % | 35.41 % | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase Pemanfaatan Kawasan Hutan (UPTD KPH Sungai Sembulan) | Bidang Kehutanan | 0 | 35.65 % | 35.41 % | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 38074 | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA | Persentase Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (DLHK) | Bidang Kehutanan | 0 | 1 | 1 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 38439 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (DLHK) | Bidang Kehutanan | 0% | 40% | 50% | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (UPTD KPH Belantu Mendanau) | Bidang Kehutanan | 0 | 0,4 | 0,5 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (UPTD KPH Bubus Panca) | Bidang Kehutanan | 0 | 0,4 | 0,5 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (UPTD KPH Gunung Duren) | Bidang Kehutanan | 0 | 0,4 | 0,5 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (UPTD KPH Muntai Palas) | Bidang Kehutanan | 0 | 0,4 | 0,5 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (UPTD KPH Sigambir Kotawaringin) | Bidang Kehutanan | 0 | 0,4 | 0,5 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (UPTD KPH Sungai Sembulan) | Bidang Kehutanan | 0 | 0,4 | 0,5 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (UPT KPH Jebu Bembang Antan) | Bidang Kehutanan | 0 | 0,4 | 0,5 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/ outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (UPT KPH Rambat Menduyung) | Bidang Kehutanan | 0 | 0,4 | 0,5 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 38804 | PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) | Persentase luas DAS yang dikelola (DLHK) | Bidang Kehutanan | 0 | 0,0913 | 0,0913 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |

### 4.2.6 Strategi Dan Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan Pembangunan Lintas Bidang Melalui Pendekatan Holistik-Tematik, Integratif Dan Spasial

Penyelarasan Strategi Dan Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan Pembangunan Lintas Bidang Melalui Pendekatan Holistik-Tematik, Integratif Dan Spasial disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel IV.14**

Strategi Dan Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan Pembangunan Lintas Bidang Melalui Pendekatan Holistik-Tematik, Integratif Dan Spasial

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Rp | |
| *1* | | *2* | *3* | *4* | *5* |
| **PRIORITAS UTAMA** | | | | | |
| **THIS Prioritas Pembangunan Daerah : Pembangunan Ekonomi** | | | | | |
| **Sasaran : Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian** | | | **4.23** | **Rp23,289,000,000** | |
| **Indikator Sasaran : Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian** | | | **4.23** | **Rp23,289,000,000** | |
| **Strategi : Meningkatan Produkifitas, Kualitas dan Daya Saing Produk Pertanian serta sarana dan prasarana produksi , Nilai Tambah Produk serta Peningkatan Fungsi Kelembagaan Pertanian** | | | | **Rp23,289,000,000** | |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan Produkifitas, Kualitas dan Daya Saing Produk Pertanian** | | | | **Rp4,782,750,000** | |
| 37296 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN | Persentase meningkatnya ketersediaan pangan utama (beras) | 2,85 persen | Rp262,500,000 | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| 37661 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | 84,1 | Rp787,500,000 | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| 38026 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Menurunnya Daerah Rentan Rawan Pangan | 1 Dokumen | Rp262,500,000 | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| 38392 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | Persentase pangan yang aman dikonsumsi | 86 persen | Rp241,500,000 | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| 38438 | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Dokumen Laporan Pengendalian dan Penanggulangan Dampak | 1 Dok | Rp262,500,000 | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | | |
| | | | Target | Rp | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Perubahan Iklim (DPI) | | | |
| 0 | 0 | Terkendalinya Bencana Pertanian | 3 persen | Rp288,750,000 | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| 38803 | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | Dokumen Perizinan Usaha Pertanian | 1 Dok | Rp52,500,000 | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| 39168 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Persentase peningkatan metode, teknologi informasi dan kelembagaan penyuluhan pertanian | 100 persen | Rp1,312,500,000 | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| 38073 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular | 2 persen | Rp1,312,500,000 | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan sarana dan prasarana produksi , Nilai Tambah Produk serta Peningkatan Fungsi Kelembagaan Pertanian** | | | | **Rp18,506,250,000** | |
| 37342 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Peningkatan benih/bibit tanaman (pangan, horti, dan perkebunan) berlabel dan bersertifikat | 5 persen | Rp288,750,000 | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| 0 | 0 | Persentase peningkatan luas tanam Perkebunan | 2,5 persen | Rp4,200,000,000 | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| 0 | 0 | Persentase peningkatan luas tanam Tanaman Pangan & Hortikultura (%) | 5 persen | Rp3,412,500,000 | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| 0 | 0 | persentase peningkatan produksi benih bermutu | 5 persen | Rp735,000,000 | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| 0 | 0 | Persentase terawasinya peredaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung peningkatan produksi | 100 persen | Rp262,500,000 | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| 37707 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Rasio Ketersediaan Prasarana Pertanian prapanen | 15 persen | Rp6,772,500,000 | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| 0 | 0 | Rasio ketersedian prasarana pertanian pasca panen | 5 persen | Rp210,000,000 | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| 37342 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Persentase Pertambahan Angka Populasi Ternak | 5 persen | Rp2,625,000,000 | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| **Sasaran : Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perikanan** | | | **4.05** | **Rp30,454,800,000** | |
| **Indikator Sasaran : Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan** | | | **4.05** | **Rp30,454,800,000** | |
| **Strategi : Meningkatan sarana prasarana, produktifitas dan kualitas pengelolaan hasil perikanan tangkap dan perikanan budidaya serta Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan** | | | | **Rp30,454,800,000** | |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan sarana prasarana, produktifitas dan kualitas pengelolaan hasil perikanan tangkap dan perikanan budidaya** | | | | **Rp28,004,800,000** | |
| 37705 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Volume produksi perikanan tangkap | 229300 Ton | Rp18,770,000,000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 38071 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Jumlah Produksi Benih Ikan yang unggul (Juta Ekor) | 11 Juta Ekor | Rp3,074,800,000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 0 | 0 | Volume produksi perikanan budidaya | 13980 Ton | Rp2,220,000,000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | | |
| | | | Target | Rp | |
| *1* | | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 38801 | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan | 22810 ton | Rp940,000,000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 0 | 0 | Persentase UPI yang dibina memenuhi standar mutu dan keamanan pangan (persentase) | 0.87 | Rp200,000,000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 37340 | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | lokasi Jasa Kelautan yang dimanfaatkan untuk peningkatan investasi di perairan Bangka Belitung | 25 lokasi | Rp2,800,000,000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| **Arah Kebijakan : Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan** | | | | **Rp2,450,000,000** | |
| 38436 | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Persentase Pelaku Usaha yang Taat Aturan (%) | 0.73 | Rp1,800,000,000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 38436 | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Persentase Pelaku Usaha yang Taat Aturan (%) | 0.73 | Rp325,000,000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 38436 | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Persentase Pelaku Usaha yang Taat Aturan (%) | 0.73 | Rp200,000,000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 38436 | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Persentase Pelaku Usaha yang Taat Aturan (%) | 0.73 | Rp125,000,000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| **Sasaran : Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian** | | | **4.52** | **Rp6,055,000,000** | |
| **Indikator Sasaran : Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian** | | | **4.52** | **Rp6,055,000,000** | |
| **Strategi : Meningkatan tata kelola sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan.** | | | | **Rp6,055,000,000** | |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan tata kelola sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan.** | | | | **Rp6,055,000,000** | |
| 37344 | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN | Persentase Kepatuhan penataan izin air tanah (Cabdin ESDM Wilayah Bangka) | 85 % | Rp30,000,000 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| 0 | 0 | Persentase Kepatuhan penataan izin air tanah (DESDM) | 0.85 | Rp1,435,000,000 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| 37709 | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA | Persentase pertambangan yang "good mining practices" (Cabdin ESDM Wilayah Bangka) | 85 % | Rp30,000,000 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| 0 | 0 | Persentase pertambangan yang "good mining practices" (Cabdin ESDM Wilayah Bangka Barat) | 0.85 | Rp80,000,000 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| 0 | 0 | Persentase pertambangan yang "good mining practices" (Cabdin ESDM Wilayah Bangka Tengah dan Selatan) | 0.85 | Rp40,000,000 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| 0 | 0 | Persentase pertambangan yang "good mining practices" (Cabdin ESDM Wilayah Belitung) | 0.85 | Rp60,000,000 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| 0 | 0 | Persentase pertambangan yang "good mining practices" (Cabdin ESDM Wilayah Belitung Timur) | 0.85 | Rp105,000,000 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | | |
| | | | Target | Rp | |
| *1* | | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 0 | 0 | Persentase pertambangan yang "good mining practices" (DESDM) | 0.85 | Rp1,790,000,000 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| 38440 | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN | Persentase Bauran Energi Terbarukan (DESDM) | 0.1298 | Rp510,000,000 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| 38805 | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | Rasio Elektrifikasi (Cabdin ESDM Wilayah Bangka) | 99.99 % | Rp925,000,000 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| 0 | 0 | Rasio Elektrifikasi (Cabdin ESDM Wilayah Bangka Barat) | 99.99 % | Rp40,000,000 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| 0 | 0 | Rasio Elektrifikasi (Cabdin ESDM Wilayah Bangka Tengah dan Selatan) | 99.99 % | Rp25,000,000 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| 0 | 0 | Rasio Elektrifikasi (Cabdin ESDM Wilayah Belitung) | 99.99 % | Rp25,000,000 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| 0 | 0 | Rasio Elektrifikasi (Cabdin ESDM Wilayah Belitung Timur) | 99.99 % | Rp35,000,000 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| 0 | 0 | Rasio Elektrifikasi (DESDM) | 99.99 % | Rp925,000,000 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| 0 | 0 | Terwujudnya Reformasi birokrasi | 0.95 | Rp0 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| 0 | 0 | Indeks Reformasi Birokrasi | 0.9 | Rp0 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| **Sasaran : Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan** | | | **3.25** | **Rp14,050,000,000** | |
| **Indikator Sasaran : Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan** | | | **3.25** | **Rp14,050,000,000** | |
| **Strategi : Meningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Serta Pembinaan Hubungan Industri dan Kesehatan Kerja dan tata kelola industri dan nilai tambah produk** | | | | **Rp14,050,000,000** | |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Serta Pembinaan Hubungan Industri dan Kesehatan Kerja** | | | | **Rp5,800,000,000** | |
| 38390 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | Persentase perusahaan yang telah memiliki sarana hubungan industrial | 0.029 | Rp800,000,000 | Disnaker |
| 37659 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Persentase Pencari kerja Yang Berkompeten | 0.0525 | Rp5,000,000,000 | Disnaker |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan tata kelola industri dan nilai tambah produk** | | | | **Rp8,250,000,000** | |
| 37346 | PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Persentase Fasilitasi Layanan Desain dan Kemasan Produk UMKM yang Diproduksi (UPTD RPK) | 60 % | Rp1,250,000,000 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 0 | 0 | Persentase Pertumbuhan Unit Usaha Industri | 0.025 | Rp5,025,000,000 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 37711 | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | ), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Kawasan Usaha Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Perusahaan Industri dan Kawasan Industri | 65 % | Rp230,000,000 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 0 | 0 | Persentase Pengawasan dan Pengendalian Perusahaan Industri dan Kawasan Industri | 0.55 | Rp1,200,000,000 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | | |
| | | | Target | Rp | |
| *1* | | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 38077 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | Persentase Kepatuhan Perusahaan Industri dan Kawasan Industri pada Akun SIINas | 0.85 | Rp545,000,000 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| **Sasaran : Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan** | | | **4.94** | **Rp5,467,300,000** | |
| **Indikator Sasaran : Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan** | | | **4.94** | **Rp5,467,300,000** | |
| **Strategi : Meningkatan Kualitas dan Daya Saing Produk dan Pengendalian ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan atau Barang Penting** | | | | **Rp5,467,300,000** | |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Produk** | | | | **Rp4,727,000,000** | |
| 37345 | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | Persentase Tertib Usaha | 1 | Rp344,300,000 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 37710 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Persentase Barang terdistribusi | 0.84 | Rp600,000,000 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 38806 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Nilai Indeks Keberdayaan Konsumen | 43 % | Rp1,195,700,000 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 0 | 0 | Persentase Komoditi Potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku (UPTD BPSMB) | 1 | Rp857,000,000 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 39171 | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | Persentase Fasilitasi Produk UMKM yang dipasarkan (UPTD RPK) | 40 % | Rp380,000,000 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 0 | 0 | Persentase Produk Lokal yang digunakan, dipromosikan dan dipasarkan melalui Akses Pasar | 0.65 | Rp1,350,000,000 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 0 | 0 | Persentase Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan | 3,50 % | Rp0 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 0 | 0 | Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan | 16,000 Triliyun Rp | Rp0 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| **Arah Kebijakan : Pengendalian ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan atau Barang Penting** | | | | **Rp740,300,000** | |
| 38076 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING | Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok | 8,30 % | Rp740,300,000 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| **Sasaran : Meningkatnya Kunjungan Wisatawan asing dan domestik** | | | **2.63** | **Rp26,459,397,500** | |
| **Indikator Sasaran : Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan asing dan domestik** | | | **2.63** | **Rp26,459,397,500** | |
| **Strategi : Meningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Eonomi Kreatif, Kebudayaan, Peran Serta Masyarakat dan Kelembagaan Industri Pariwisata dan Sarana dan Prasarana Pengembangan Promosi, Destinasi dan Pemasaran Pariwisata** | | | | **Rp26,459,397,500** | |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | | |
| | | | Target | Rp | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Eonomi Kreatif, Kebudayaan, Peran Serta Masyarakat dan Kelembagaan Industri Pariwisata** | | | | **Rp9,510,000,000** | |
| 37309 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Persentase kebudayaan lokal yang dikembangkan | 49,33 persen | Rp4,875,000,000 | DIPARBUDKEPORA |
| 37674 | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan | 100 persen | Rp850,000,000 | DIPARBUDKEPORA |
| 38039 | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | Persentase Sejarah Lokal yang Dibina | 71 persen | Rp430,000,000 | DIPARBUDKEPORA |
| 38405 | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikelola | 62 persen | Rp600,000,000 | DIPARBUDKEPORA |
| 38770 | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | Persentase museum yang dikelola | 100 persen | Rp1,375,000,000 | DIPARBUDKEPORA |
| 37341 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Persentase Destinasi Pariwisata Provinsi yang Ditingkatkan Kualitasnya di Pulau Belitung, Geopark Belitong dan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang | 25 % | Rp1,380,000,000 | DIPARBUDKEPORA |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengembangan Promosi, Destinasi dan Pemasaran Pariwisata** | | | | **Rp16,949,397,500** | |
| 37706 | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | Jumlah Kunjungan Wisatawan | 5144 kunjungan | Rp4,649,397,500 | DIPARBUDKEPORA |
| 0 | 0 | Jumlah Kunjungan Wisatawan di Pulau Belitung | 2027 Kunjungan | Rp2,400,000,000 | DIPARBUDKEPORA |
| 38072 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | Persentase Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan | 0.3077 | Rp4,400,000,000 | DIPARBUDKEPORA |
| 38437 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Persentase SDM Pariwisata dan Ekraf yang Memiliki Kompetensi | 0.1 | Rp5,500,000,000 | DIPARBUDKEPORA |
| **Sasaran : Meningkatnya Ekspor** | | | **7.51** | **Rp1,925,000,000** | |
| **Indikator Sasaran : Laju Pertumbuhan Ekspor** | | | **7.51** | **Rp1,925,000,000** | |
| **Strategi : Meningkatan produktifitas, kualitas dan daya saing produk unggulan daerah.** | | | | **Rp1,925,000,000** | |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan produktifitas, kualitas dan daya saing produk unggulan daerah.** | | | | **Rp1,925,000,000** | |
| 38441 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor | 4,5 % | Rp1,925,000,000 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| **Sasaran : Meningkatnya Nilai Investasi (PMA/PMDN) Daerah** | | | **30.00** | **Rp4,800,000,000** | |
| **Indikator Sasaran : Pertumbuhan Investasi** | | | **30.00** | **Rp4,800,000,000** | |
| **Strategi : Mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah;** | | | | **Rp4,800,000,000** | |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | | |
| | | | Target | Rp | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Arah Kebijakan : Mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah;** | | | | **Rp4,800,000,000** | |
| 37305 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | Banyaknya investor yang menanamkan modal | 25 Investor | Rp1,300,000,000 | DPMPTSP |
| 37670 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Peluang penanaman modal yang dipromosikan | 2 Peluang | Rp950,000,000 | DPMPTSP |
| 38035 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Pelaku Usaha yang terlayani | 1000 Pelaku Usaha | Rp1,600,000,000 | DPMPTSP |
| 38401 | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Persentase Perusahaan Yang Patuh Terhadap Perundang-Undangan | 0.011 | Rp900,000,000 | DPMPTSP |
| 38766 | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | Sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang dikelola | 1 Dokumen | Rp50,000,000 | DPMPTSP |
| **THIS Prioritas Pembangunan Daerah : Pembangunan Lingkungan** | | | | | |
| **Sasaran : Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup** | | | **75.84** | **Rp43,014,561,051** | |
| **Indikator Sasaran :Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)** | | | **75.84** | **Rp43,014,561,051** | |
| **Strategi :Meningkatan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tata kelola kehutanan** | | | | **Rp43,014,561,051** | |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup** | | | | **Rp32,086,874,426** | |
| 37298 | PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP | Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun | 1 | Rp1,000,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 37663 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase Pengujian Sampel Parameter Kualitas Lingkungan yang terlayani (Laboratorium Lingkungan) | 90 % | Rp4,767,624,426 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Persentase Penurunan Emisi GRK dari Sektor Limbah dan Kehutanan | 1 | Rp294,250,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Persentase Titik Sampling Uji Kualitas Lingkungan | 0.65 | Rp510,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 38028 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang dilaksanakan | 1 | Rp460,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 38394 | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) | 1 | Rp575,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 38759 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Persentase Ketaatan Usaha/ Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | 0.65 | Rp740,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 39124 | PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK | Persentase penyusunan Rekomendasi pengakuan MHA, Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisonal dan Hak MHA terkait | 1 | Rp240,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | | |
| | | | Target | Rp | |
| *1* | | *2* | *3* | *4* | *5* |
| | MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH | dengan PPLH | | | |
| 39489 | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase kelompok swadaya masyarakat yang aktif dan mandiri | 0.7 | Rp700,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 39855 | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup yang diberikan | 0.8 | Rp200,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 40220 | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase Penanganan Pengaduan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diverifikasi | 1 | Rp200,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 40585 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Persentase Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional | 25 % | Rp11,200,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Persentase Pengelolaan Persampahan di TPA Regional | 0.05 | Rp11,200,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan tata kelola kehutanan** | | | | **Rp10,927,686,625** | |
| 37708 | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi) (DLHK) | 20 % | Rp1,800,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi) (UPTD KPH Belantu Mendanau) | 0.2 | Rp75,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi) (UPTD KPH Bubus Panca) | 0.2 | Rp76,950,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi) (UPTD KPH Gunung Duren) | 0.2 | Rp50,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi) (UPTD KPH Jebu Bembang Antan) | 0.2 | Rp103,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi) (UPTD KPH Muntai Palas) | 0.2 | Rp75,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi) (UPTD KPH Rambat Menduyung) | 0.2 | Rp103,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi) (UPTD KPH Sigambir Kotawaringin) | 0.2 | Rp53,760,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi) (UPTD KPH Sungai Sembulan) | 0.2 | Rp50,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (DLHK) | 13.17 % | Rp250,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (UPTD KPH Belantu Mendanau) | 13.17 % | Rp45,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (UPTD KPH Bubus Panca) | 13.17 % | Rp133,500,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (UPTD KPH Gunung Duren) | 13.17 % | Rp50,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | | |
| | | | Target | Rp | |
| *1* | | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 0 | 0 | Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (UPTD KPH Jebu Bembang Antan) | 13.17 % | Rp133,500,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (UPTD KPH Muntai Palas) | 13.17 % | Rp50,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (UPTD KPH Rambat Menduyung) | 13.17 % | Rp133,500,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (UPTD KPH Sigambir KotaWaringin) | 13.17 % | Rp25,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (UPTD KPH Sungai Sembulan) | 13.17 % | Rp45,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Persentase Pemanfaatan Kawasan Hutan (DLHK) | 35.65 % | Rp2,800,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Persentase Pemanfaatan Kawasan Hutan (UPTD KPH Belantu Mendanau) | 35.65 % | Rp130,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Persentase Pemanfaatan Kawasan Hutan (UPTD KPH Bubus Panca) | 35.65 % | Rp59,500,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Persentase Pemanfaatan Kawasan Hutan (UPTD KPH Gunung Duren) | 35.65 % | Rp350,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Persentase Pemanfaatan Kawasan Hutan (UPTD KPH Jebu Bembang Antan) | 35.65 % | Rp34,962,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Persentase Pemanfaatan Kawasan Hutan (UPTD KPH Muntai Palas) | 35.65 % | Rp75,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Persentase Pemanfaatan Kawasan Hutan (UPTD KPH Rambat Menduyung) | 36.65 % | Rp47,524,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Persentase Pemanfaatan Kawasan Hutan (UPTD KPH Sigambir Kotawaringin) | 35.65 % | Rp115,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Persentase Pemanfaatan Kawasan Hutan (UPTD KPH Sungai Sembulan) | 35.65 % | Rp330,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 38074 | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA | Persentase Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (DLHK) | 1 | Rp1,178,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 38439 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (DLHK) | 40 % | Rp390,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (UPTD KPH Belantu Mendanau) | 0.4 | Rp340,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (UPTD KPH Bubus Panca) | 0.4 | Rp65,450,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (UPTD KPH Gunung Duren) | 0.4 | Rp144,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (UPTD KPH Muntai Palas) | 0.4 | Rp292,340,625 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | | |
| | | | Target | Rp | |
| *1* | | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 0 | 0 | Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (UPTD KPH Sigambir Kotawaringin) | 0.4 | Rp37,200,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (UPTD KPH Sungai Sembulan) | 0.4 | Rp44,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (UPT KPH Jebu Bembang Antan) | 0.4 | Rp65,450,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (UPT KPH Rambat Menduyung) | 0.4 | Rp177,050,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 38804 | PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) | Persentase luas DAS yang dikelola (DLHK) | 0.0913 | Rp1,000,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| **THIS Prioritas Pembangunan Daerah : Pembangunan Sumber Daya Manusia** | | | | | |
| **Sasaran : Meningkatnya Pembangunan Manusia** | | | **72.13** | **Rp357,853,020,367** | |
| **Indikator Sasaran : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** | | | **72.13** | **Rp357,853,020,367** | |
| **Strategi : Meningkatkan Akses pelayanan dan Mutu Pendidikan serta meningkatkan relevansi dan daya saing serta kualitas hidup, peran perempuan dan anak serta memenuhi keadilan dan kesetaraan gender (KKG)** | | | | **Rp171,496,253,169** | |
| **Arah Kebijakan : Meningkatkan Akses pelayanan dan Mutu Pendidikan serta meningkatkan relevansi dan daya saing** | | | | **Rp165,834,553,169** | |
| 0 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 0 | 60 persen | Rp1,000,000,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | persentase guru yang bersertifikat pendidik | 65 | Rp4,217,953,169 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Persentase Satuan Pendidikan Khusus terakreditasi A di cabdin V | 100 persen | Rp2,300,000,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Persentase Satuan Pendidikan Khusus terakreditasi A di Cabdin WIlayah III | 100 persen | Rp900,000,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Persentase Satuan Pendidikan Khusus terakreditasi A di Cabdin Wilayah IV | 100 persen | Rp1,000,000,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Persentase Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus terakreditasi A | 100 persen | Rp12,415,800,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Persentase Satuan Pendidikan pendidikan khusus terakreditasi A di Cabdin Wilayah I | 100 persen | Rp150,000,000 | Dinas Pendidikan |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | | |
| | | | Target | Rp | |
| *1* | | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 0 | 0 | Persentase Satuan Pendidikan pendidikan khusus terakreditasi A di Cabdin WIlayah II | 100 persen | Rp150,000,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Persentase Satuan Pendidikan SMA terakreditasi A | 51,29 persen | Rp23,500,800,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Persentase Satuan Pendidikan SMA terakreditasi A di Cabdin I | 60 persen | Rp9,400,000,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Persentase Satuan Pendidikan SMA terakreditasi A di Cabdin Wilayah II | 50 persen | Rp11,110,000,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Persentase Satuan Pendidikan SMA terakreditasi A di Cabdin Wilayah III | 83,3 persen | Rp7,925,000,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Persentase Satuan Pendidikan SMA terakreditasi A di Cabdin WIlayah IV | 44,4 persen | Rp9,800,000,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Persentase Satuan Pendidikan SMA terakreditasi A di Cabdin Wilayah V | 18,75 persen | Rp10,350,000,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Persentase Satuan Pendidikan SMK terakreditasi A | 73,6 persen | Rp16,359,600,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Persentase Satuan Pendidikan SMK terakreditasi A di Cabdin I | 80 persen | Rp3,100,000,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Persentase Satuan Pendidikan SMK terakreditasi A di Cabdin WIlayah II | 76,5 persen | Rp13,150,000,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Persentase Satuan Pendidikan SMK terakreditasi A di Cabdin WIlayah III | 42,9 persen | Rp2,650,000,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Persentase Satuan Pendidikan SMK terakreditasi A di Cabdin Wilayah IV | 90 persen | Rp4,600,000,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Persentase Satuan Pendidikan SMK terakreditasi A di Cabdin Wilayah V | 78,6 persen | Rp12,920,000,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Proporsi Guru dan Siswa yang menguasai TIK | 70 persen | Rp3,600,000,000 | Dinas Pendidikan |
| 37257 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Persentase lulusan SMA yang memiliki kompetensi TIK | 73 persen | Rp500,000,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Persentase lulusan SMA yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin WIlayah I | 60 persen | Rp550,000,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Persentase lulusan SMA yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah II | 60 persen | Rp500,000,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Persentase lulusan SMA yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah III | 60 persen | Rp450,000,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Persentase lulusan SMA yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah IV | 60 persen | Rp400,000,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Persentase lulusan SMA yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah V | 60 persen | Rp450,000,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Persentase lulusan SMK yang memiliki kompetensi TIK | 73 persen | Rp2,925,000,000 | Dinas Pendidikan |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | | |
| | | | Target | Rp | |
| *1* | | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 0 | 0 | Persentase lulusan SMK yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah I | 60 persen | Rp450,000,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Persentase lulusan SMK yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah II | 60 persen | Rp400,000,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Persentase lulusan SMK yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah III | 60 persen | Rp350,000,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Persentase lulusan SMK yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah IV | 60 persen | Rp350,000,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Persentase lulusan SMK yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah V | 60 persen | Rp500,000,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Persentase lulusan SMK yang memiliki sertifikast kompetensi | 68 persen | Rp2,000,000,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Persentase lulusan SMK yang terserap di DUDIKA | 59 persen | Rp500,000,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Persentase siswa PK yang melanjutkan pendidikan di PTN dan PTS | 6 persen | Rp75,000,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Persentase siswa SMA yang melanjutkan pendidikan di PTN dan PTS | 55 persen | Rp200,000,000 | Dinas Pendidikan |
| 37310 | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Persentasi Perpustakaan Yang di Bina | 0.37 | Rp1,912,900,000 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| 37675 | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | Jumlah Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno | 5 Dokumen | Rp1,347,500,000 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| 37676 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | Persentase Berkas Arsip Yang Di Lindungi Dan Di Selamatkan Sesuai Dengan Ketentuan | 0.25 | Rp748,000,000 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| 37311 | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Kearsipan Sesuai Dengan Standart Baku Kearsipan | 0.2 | Rp577,500,000 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| 38041 | PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP | Persentase Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup | 12,50 % | Rp49,500,000 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan kualitas hidup, peran perempuan dan anak serta memenuhi keadilan dan kesetaraan gender (KKG)** | | | | **Rp5,661,700,000** | |
| 37295 | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Persentase ARG pada Belanja Operasi dan belanja modal APBD | 2.6 persen | Rp495,000,000 | DP3CASKB |
| 37660 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Persentase kebijakan perlindungan perempuan | 100 persen | Rp220,000,000 | DP3CASKB |
| 0 | 0 | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif | 100 persen | Rp220,000,000 | DP3CASKB |
| 38025 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan | 44.98 persen | Rp583,000,000 | DP3CASKB |
| 38756 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Persentase peningkatan SDM dalam Pemenuhan Partisipasi ANAK | 19.90 persen | Rp296,600,000 | DP3CASKB |
| 39121 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif | 100 persen | Rp119,600,000 | DP3CASKB |
| 0 | 0 | Persentase Peningkatan SDM Perlindungan Anak | 33 persen | Rp145,000,000 | DP3CASKB |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | | |
| | | | Target | Rp | |
| *1* | | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 38391 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | Persentase capaian OPD yang menyediakan data pilah gender dan anak | 92.59 persen | Rp80,000,000 | DP3CASKB |
| 37299 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Persentase masyarakat yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk (KK, KTP, KIA) | 89.8 persen | Rp759,000,000 | DP3CASKB |
| 37664 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | Persentase masyarakat yang memiliki akta pencatatan sipil (Akta Lahir, Akta Mati, Akta Perkawinan) | 89.5 persen | Rp703,000,000 | DP3CASKB |
| 38029 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Persentase perangkat daerah dan sektor lain yang mengadakan pejanjian kerjasama | 37.14 Persen | Rp583,000,000 | DP3CASKB |
| 38395 | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | Persentase penyediaan penyajian data kependudukan tingkat provinsi | 100 persen | Rp67,500,000 | DP3CASKB |
| 37301 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Persentase pembinaan Penyediaan dan pemanfaatan data kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga di kabupaten/kota | 71.42 persen | Rp255,000,000 | DP3CASKB |
| 37666 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | persentase pembinaan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di kabupaten/kota | 100 persen | Rp505,000,000 | DP3CASKB |
| 38031 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | persentase pembinaan kampung KB | 63 persen | Rp630,000,000 | DP3CASKB |
| **Strategi : Meningkatkan akses pelayanan dan kualitas kesehatan dengan memperkuat pelayanan dan sistem kesehatan** | | | | **Rp186,356,767,198** | |
| **Arah Kebijakan : Meningkatkan akses pelayanan dan kualitas kesehatan dengan memperkuat pelayanan dan sistem kesehatan** | | | | **Rp186,356,767,198** | |
| 37258 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) | 100 persen | Rp206,000,000 | Dinas Kesehatan |
| 0 | 0 | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi minimal madya | 86 fasyankes | Rp34,886,671,650 | Dinas Kesehatan |
| 0 | 0 | Persentase pelaksanaan sinkronisasi penerapan standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan lintas kab/kota | 100 persen | Rp103,000,000 | Dinas Kesehatan |
| 0 | 0 | Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit | 94 persen | Rp1,837,571,500 | Dinas Kesehatan |
| 0 | 0 | Persentase peningkatan kesehatan masyarakat | 87 persen | Rp602,550,000 | Dinas Kesehatan |
| 0 | 0 | Persentase peningkatan pemeriksaan laboratorium kesehatan | 100 persen | Rp2,884,964,548 | Dinas Kesehatan |
| 0 | 0 | Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin essensial | 87 persen | Rp118,965,000 | Dinas Kesehatan |
| 37623 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase tenaga kesehatan yang mendapatkan peningkatan kompetensi | 87 persen | Rp2,075,450,000 | Dinas Kesehatan |
| 37988 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Persentase sarana sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang | 89 persen | Rp161,710,000 | Dinas Kesehatan |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | | |
| | | | Target | Rp | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | memenuhi syarat | | | |
| 38354 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) | 88 persen | Rp314,150,000 | Dinas Kesehatan |
| 37258 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase Pemenuhan Layanan Kesehatan Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna | 85 persen | Rp99,600,000,000 | RSUP |
| 37623 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai klasifikasi Rumah Sakit tipe B | 85 persen | Rp30,970,000,000 | RSUP |
| 38354 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan, kemitraan bidang kesehatan | 100 persen | Rp325,000,000 | RSUP |
| 37258 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase fasilitas pelayanan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai kelas Rumah Sakit | 82 persen | Rp1,330,000,000 | RUMAH SAKIT JIWA |
| 0 | 0 | Persentase masyarakat ataupun perorangan yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa dan non jiwa | 82 persen | Rp2,372,005,500 | RUMAH SAKIT JIWA |
| 0 | 0 | Persentase masyarakat ataupun perorangan yang mendapat pelayanan penunjang | 82 persen | Rp300,000,000 | RUMAH SAKIT JIWA |
| 0 | 0 | Persentase masyarakat ataupun perseorangan yang mendapat penanganan penyalahgunaan NAPZA | 82 persen | Rp173,581,000 | RUMAH SAKIT JIWA |
| 37623 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase SDM kesehatan sesuai analisa beban kerja RS Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 86 persen | Rp6,845,148,000 | RUMAH SAKIT JIWA |
| 0 | 0 | Persentase SDM kesehatan yang mendapat pendidikan dan pelatihan | 86 persen | Rp1,250,000,000 | RUMAH SAKIT JIWA |
| **THIS Prioritas Pembangunan Daerah : Pembangunan Demokrasi** | | | | | |
| **Sasaran : Meningkatkan aspek kebebasan , kesetaraan , kapasitas lembaga dalam demokrasi** | | | **78.40** | **Rp165,520,564,919** | |
| **Indikator Sasaran :Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi** | | | **78.40** | **Rp165,520,564,919** | |
| **Strategi : meningkatkan kebebasan demokrasi, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat, kesetaraan dalam berdemokrasi, dan kapasitas lembaga demokrasi** | | | | **Rp165,520,564,919** | |
| **Arah Kebijakan : meningkatkan kebebasan demokrasi** | | | | **Rp6,886,843,497** | |
| 37469 | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | Persentase Jumlah konflik yang berlatarbelakang Ideologi | 0.5 | Rp3,689,342,040 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 38930 | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | Persentase Daerah terlibat Konflik Sosial | 0.5 | Rp3,197,501,457 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | | |
| | | | Target | Rp | |
| *1* | | *2* | *3* | *4* | *5* |
| **Arah Kebijakan : Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat** | | | | **Rp10,139,450,000** | |
| 37261 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase anggota satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan | 31,14 % | Rp175,000,000 | Satpol PP |
| 0 | 0 | Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan | 1 | Rp8,325,000,000 | Satpol PP |
| 0 | 0 | Persentase perda dan perkada yang ditegakkan | 0.393 | Rp50,000,000 | Satpol PP |
| 0 | 0 | Persentase personil Satpol PP yang berkompeten | 0.811 | Rp175,000,000 | Satpol PP |
| 37991 | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Persentase respontime 15 menit kejadian kebakaran/pertolongan | 0.67 | Rp1,414,450,000 | Satpol PP |
| **Arah Kebijakan : meningkatkan kesetaraan dalam berdemokrasi** | | | | **Rp6,370,427,422** | |
| 38565 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | Persentase pembinaan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Daerah | 0.3 | Rp5,626,427,422 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 38200 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | 0 | 1 Dokumen | Rp744,000,000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| **Arah Kebijakan : meningkatkan kapasitas lembaga demokrasi** | | | | **Rp142,123,844,000** | |
| 37834 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | Persentase pembinaan politik di daerah | 0.3 | Rp142,123,844,000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| **PRIORITAS PENDUKUNG** | | | | | |
| **THIS Prioritas Pembangunan Daerah : Pembangunan Wilayah** | | | | | |
| **Sasaran : Meningkatnya ketersediaan infrastruktur** | | | | **Rp98,948,874,923** | |
| **Indikator Sasaran :Persentase Ketersediaan Infrastruktur** | | | | **Rp98,948,874,923** | |
| **Strategi : Memerataan ketersediaan infrastruktur** | | | | **Rp98,948,874,923** | |
| **Arah Kebijakan : Pemerataan ketersediaan infrastruktur** | | | | **Rp98,948,874,923** | |
| 37259 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | - Rasio Jaringan Irigasi | 0 % | Rp35,003,142,298 | DPUPRPERKIM |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | | |
| | | | Target | Rp | |
| *1* | | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 0 | 0 | 0 | 0.0039 | Rp44,086,732,625 | DPUPRPERKIM |
| 37624 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Persentase Penyelenggaraan Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi | 29 % | 0 | DPUPRPERKIM |
| 0 | 0 | Persentase Readiness Criteria pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum | 0.25 | Rp1,050,000,000 | DPUPRPERKIM |
| 0 | 0 | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak | 0 | Rp0 | DPUPRPERKIM |
| 37989 | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan | 100 % | 100000000 | DPUPRPERKIM |
| 0 | 0 | Persentase Readiness Criteria pembangunan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional yang disiapkan | 0 | Rp0 | DPUPRPERKIM |
| 0 | 0 | Persentase rumah tangga yang terlayani pengelolaan sampah | 0 | Rp0 | DPUPRPERKIM |
| 38355 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Persentase Readiness Criteria pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah yang disiapkan | 18 % | Rp2,255,000,000 | DPUPRPERKIM |
| 0 | 0 | Persentase rumah tangga yang besanitasi | 0.06 | Rp0 | DPUPRPERKIM |
| 38720 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Persentase Readiness Criteria pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang disiapkan | 0.5 | Rp800,000,000 | DPUPRPERKIM |
| 37302 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | 0.2321 | Rp13,774,000,000 | Dinas Perhubungan |
| 37667 | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pelabuhan | 13.30 % | Rp1,980,000,000 | Dinas Perhubungan |
| 0 | 0 | Predikat RB Perangkat Daerah (Dinas Perhubungan) | 0.51 | Rp0 | Dinas Perhubungan |
| 0 | 0 | Nilai RB Perangkat Daerah (Dinas Perhubungan) | 0.51 | Rp0 | Dinas Perhubungan |
| **Sasaran : Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang** | | | **0.70** | **Rp249,650,142,000** | |
| **Indikator Sasaran : Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang** | | | **0.70** | **Rp249,650,142,000** | |
| **Strategi : Meningkatan ketaatan tata ruang** | | | **0.70** | **Rp249,650,142,000** | |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan ketaatan tata ruang** | | | **0.70** | **Rp249,650,142,000** | |
| 39450 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Persentase jumlah bangunan gedung yang terselenggara | 65 % | Rp18,990,000,000 | DPUPRPERKIM |
| 0 | 0 | Persentase Readiness Criteria bangunan gedung yang disiapkan | 1 | Rp0 | DPUPRPERKIM |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | | |
| | | | Target | Rp | |
| *1* | | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 39816 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | Persentase Luas kawasan yang tertata | 0.44 | Rp6,660,000,000 | DPUPRPERKIM |
| 40181 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Persentase jalan dalam kondisi mantap | 0.9107 | Rp172,600,142,000 | DPUPRPERKIM |
| 40546 | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Rasio ketersediaan penyelenggaraan jasa konstruksi | 0.3915 | Rp0 | DPUPRPERKIM |
| 40911 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Persentase Kesesuaian Rencana Tata Ruang dengan Pemanfaatan Ruang | 0.86 | Rp3,350,000,000 | DPUPRPERKIM |
| 37260 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Persentase ketersediaan Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | 20 % | Rp29,075,000,000 | DPUPRPERKIM |
| 0 | 0 | Persentase penyelenggaraan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | 0.25 | Rp0 | DPUPRPERKIM |
| 0 | 0 | Persentasi Pengembangan perumahan korban Bencana atau relokasi program provinsi | 1 | Rp0 | DPUPRPERKIM |
| 37625 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | Persentase Kawasan Kumuh yang sudah direncanakan | 23 % | Rp2,350,000,000 | DPUPRPERKIM |
| 0 | 0 | Persentase luasan kawasan kumuh yang tertangani | 0.06 | Rp0 | DPUPRPERKIM |
| 38356 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Persentase Pemukiman yang terfasilitasi oleh PSU | 0.25 | Rp14,925,000,000 | DPUPRPERKIM |
| 38721 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Persentase layanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman tingkat kemampuan menengah yang ditingkatkan | 0.25 | Rp50,000,000 | DPUPRPERKIM |
| 37662 | PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM | Presentase Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum | 0.3 | Rp550,000,000 | DPUPRPERKIM |
| 38027 | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan | 0.2 | Rp400,000,000 | DPUPRPERKIM |
| 38393 | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan | 0.85 | Rp700,000,000 | DPUPRPERKIM |
| **Sasaran : Menurunnya Resiko Bencana** | | | **0.37** | **Rp9,186,022,984** | |
| **Indikator Sasaran : Indeks Ketahanan Bencana** | | | **0.37** | **Rp9,186,022,984** | |
| **Strategi : Meningkatan tata kelola penanggulangan bencana** | | | **0.37** | **Rp9,186,022,984** | |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan tata kelola penanggulangan bencana** | | | **0.37** | **Rp9,186,022,984** | |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | | |
| | | | Target | Rp | |
| *1* | | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 37626 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Persentase Penanganan Pasca Bencana | 71,5 % | Rp679,500,000 | BPBD |
| 0 | 0 | Persentase Penanganan Pra Bencana | 1 | Rp1,449,000,000 | BPBD |
| 0 | 0 | Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana | 1 | Rp4,855,265,000 | BPBD |
| 38723 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Persentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial | 25,15 % | Rp2,202,257,984 | Dinsospemdes |
| **Sasaran : Percepatan pembangunan kawasan perdesaan** | | | **0.730** | **Rp7,229,095,272** | |
| **Indikator Sasaran : Indeks desa membangun** | | | **0.730** | **Rp7,229,095,272** | |
| **Strategi : Meningkatan Kapasitas Desa dan penyediaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat pada kawasan transmigrasi** | | | **0.730** | **Rp7,229,095,272** | |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan Kapasitas Desa** | | | | **Rp4,495,190,887** | |
| 37300 | PROGRAM PENATAAN DESA | Persentase Penataan Desa yang dibina | 0.25 | Rp661,133,000 | Dinsospemdes |
| 37665 | PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA | Persentase kerjasama desa yang dilaksanakan | 22,50 % | Rp337,187,042 | Dinsospemdes |
| 38030 | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Persentase Administrasi Pemerintahan Desa yang Dibina | 0.25 | Rp3,496,870,845 | Dinsospemdes |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat pada kawasan transmigrasi** | | | | **Rp2,733,904,385** | |
| 3.32.04 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI | Persentase Kawasan Transmigrasi Yang dikembangkan | 1 Desa | Rp280,000,000 | Disnaker |
| 38396 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif | 0.25 | Rp2,453,904,385 | Dinsospemdes |
| **Sasaran :Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk** | | | **1.74** | **Rp3,502,500,000** | |
| **Indikator Sasaran : Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)** | | | **1.74** | **Rp3,502,500,000** | |
| **Strategi : Meningkatkan Pengendalian tingkat kelahiran Penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang** | | | **1.74** | **Rp3,502,500,000** | |
| **Arah Kebijakan : Pengendalian tingkat kelahiran Penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang** | | | | **Rp3,502,500,000** | |
| 37299 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Persentase masyarakat yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk (KK, KTP, KIA) | 89.8 persen | Rp759,000,000 | DP3CASKB |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | | |
| | | | Target | Rp | |
| *1* | | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 37664 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | Persentase masyarakat yang memiliki akta pencatatan sipil (Akta Lahir, Akta Mati, Akta Perkawinan) | 89.5 persen | Rp703,000,000 | DP3CASKB |
| 38029 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Persentase perangkat daerah dan sektor lain yang mengadakan pejanjian kerjasama | 37.14 Persen | Rp583,000,000 | DP3CASKB |
| 38395 | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | Persentase penyediaan penyajian data kependudukan tingkat provinsi | 100 persen | Rp67,500,000 | DP3CASKB |
| 37301 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Persentase pembinaan Penyediaan dan pemanfaatan data kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga di kabupaten/kota | 71.42 persen | Rp255,000,000 | DP3CASKB |
| 37666 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | persentase pembinaan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di kabupaten/kota | 100 persen | Rp505,000,000 | DP3CASKB |
| 38031 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | persentase pembinaan kampung KB | 63 persen | Rp630,000,000 | DP3CASKB |
| **THIS Prioritas Pembangunan Daerah : Pembangunan Pendapatan Masyarakat** | | | | | |
| **Sasaran : Menurunkan Tingkat Kemiskinan** | | | **4.20** | **Rp19,391,623,531** | |
| **Indikator Sasaran : Persentase Angka Kemiskinan** | | | **4.20** | **Rp19,391,623,531** | |
| **Strategi : Meningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas, Pengembangan sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial, serta Peningkatan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin** | | | | **Rp19,391,623,531** | |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas** | | | | **Rp10,101,452,923** | |
| 37627 | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang di ditangani | 23,81 % | Rp96,935,000 | Dinsospemdes |
| 37992 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase PMKS yang di Rehabilitasi sosial di Dalam Panti | 22,58 % | Rp2,257,864,490 | Dinsospemdes |
| 0 | 0 | Persentase PMKS yang di rehabilitasi sosial di dalam Panti Sosial Bina Laras Hijrah | 0.3 | Rp4,222,170,033 | Dinsospemdes |
| 0 | 0 | Persentase PMKS yang di Rehabilitasi Sosial di Dalam Panti Sosial Bina Serumpun | 0.2143 | Rp3,524,483,400 | Dinsospemdes |
| **Arah Kebijakan : Pengembangan sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial** | | | | **Rp7,095,508,059** | |
| 38358 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial | 25,28 % | Rp6,289,834,738 | Dinsospemdes |
| 39088 | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Persentase TMP yang dikelola | 1 | Rp805,673,321 | Dinsospemdes |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | | |
| | | | Target | Rp | |
| *1* | | *2* | *3* | *4* | *5* |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin** | | | | **Rp2,194,662,549** | |
| 37262 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Persentase PMKS/PSKS yg terberdayakan | 1 | Rp2,194,662,549 | Dinsospemdes |
| **Sasaran : Meningkatkan Kesempatan Kerja** | | | **4.39** | **Rp67,840,011,673** | |
| **Indikator Sasaran : Tingkat Pengangguran Terbuka** | | | **4.39** | **Rp67,840,011,673** | |
| **Strategi : meningkatan akses terhadap penciptaan lapangan kesempatan kerja, kualitas hidup, peran perempuan dan anak serta memenuhi keadilan dan kesetaraan gender (KKG), kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan serta peningkatan budaya dan Kesejahteraan Tenaga Kerja** | | | | **Rp67,840,011,673** | |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan akses terhadap penciptaan lapangan kesempatan kerja** | | | | **Rp14,370,500,000** | |
| 37294 | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | Persentase dokumen Perencanaan Ketenagakerjaan kab/kota | 1 | Rp250,000,000 | Disnaker |
| 37659 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Persentase Pencari kerja Yang Berkompeten | 0.0525 | Rp5,000,000,000 | Disnaker |
| 38024 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | Persentase Tenga Kerja Yang Ditempatkan | 0.05 | Rp755,000,000 | Disnaker |
| 37304 | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | Persentase Izin Usaha Simpan Pinjam yang Difasilitasi | 0.03 | Rp200,000,000 | DKUKM |
| 37669 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Persentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa | 0.2 | Rp380,000,000 | DKUKM |
| 38034 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | Persentase Kesehatan KSP/USP yang dinilai | 0.67 | Rp200,000,000 | DKUKM |
| 38400 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Persentase SDM Koperasi, UKM yang Terlatih (BALATKOP KUKM) | 0.00277 | Rp805,500,000 | DKUKM |
| 38765 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | Persentase Koperasi yang diberdayakan | 0.44 | Rp950,000,000 | DKUKM |
| 39130 | PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Persentase UMKM yang Diberdayakan | 0,51 % | Rp3,300,000,000 | DKUKM |
| 39495 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Persentase Usaha Kecil Yang Meningkat Menjadi Usaha Menengah | 0,11 % | Rp2,530,000,000 | DKUKM |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan kualitas hidup, peran perempuan dan anak serta memenuhi keadilan dan kesetaraan gender (KKG)** | | | | **Rp2,079,200,000** | |
| 37295 | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Persentase ARG pada Belanja Operasi dan belanja modal APBD | 2.6 persen | Rp495,000,000 | DP3CASKB |
| 37660 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Persentase kebijakan perlindungan perempuan | 100 persen | Rp220,000,000 | DP3CASKB |
| 0 | 0 | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif | 100 persen | Rp220,000,000 | DP3CASKB |
| 38025 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan | 44.98 persen | Rp583,000,000 | DP3CASKB |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | | |
| | | | Target | Rp | |
| *1* | | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 38756 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Persentase peningkatan SDM dalam Pemenuhan Partisipasi ANAK | 19.90 persen | Rp296,600,000 | DP3CASKB |
| 39121 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif | 100 persen | Rp119,600,000 | DP3CASKB |
| 0 | 0 | Persentase Peningkatan SDM Perlindungan Anak | 33 persen | Rp145,000,000 | DP3CASKB |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan serta peningkatan budaya** | | | | **Rp50,790,311,673** | |
| 37671 | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Persentase Cabang Olahraga yang dibina | 61.11 persen | Rp45,450,000,000 | DIPARBUDKEPORA |
| 37306 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina | 35 organisasi | Rp677,600,000 | DIPARBUDKEPORA |
| 38036 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | Persentase tingkat keaktifan Organisasi Pramuka | 19.51 persen | Rp2,420,000,000 | DIPARBUDKEPORA |
| 37306 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Persentase Pemuda Yang dibina | 0.42 persen | Rp2,242,711,673 | DIPARBUDKEPORA |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja** | | | | **Rp600,000,000** | |
| 38755 | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN | Persentase perusahaan yang dilakukan pengawasan Norma Ketenagakerjaan | 0.175 | Rp600,000,000 | Disnaker |
| **THIS Prioritas Pembangunan Daerah : Pembangunan Pemerintahan** | | | | | |
| **Sasaran : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan** | | | **69.00** | **Rp1,818,126,677,634** | |
| **Indikator Sasaran :Indeks Reformasi Birokrasi** | | | **69.00** | **Rp1,818,126,677,634** | |
| **Strategi : Peningkatan akses data dan informasi serta Kualitas Pelayanaan Publik dengan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat** | | | | **Rp80,232,692,225** | |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan akses data dan informasi serta Kualitas Pelayanaan Publik dengan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat** | | | **Rp6** | **Rp80,232,692,225** | |
| 37303 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebarluasan informasi publik | 1 | Rp9,345,000,000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 37668 | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | Persentase ketersediaan infrastruktur, teknologi dan sistem elektronik. | 0.85 | Rp4,509,750,000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 37307 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Presentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah | 0.75 | Rp383,250,000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 37308 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Presentase tingkat keamanan informasi pemerintah daerah | 0.75 | Rp757,000,000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | | |
| | | | Target | Rp | |
| *1* | | *2* | *3* | *4* | *5* |
| | Program Kesejahteraan Rakyat | Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Kesejahteraan Rakyat yang tersusun | 70% | Rp63,605,405,094 | Biro Kesejahteraan Rakyat |
| | PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH (meningkatnya Usulan Kebijakan Daerah dibidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah ) | Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang tersusun | 75% | Rp727,497,148 | Biro Pemerintahan |
| | PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH (Meningkatnya Usulan Kebijakan Daerah dibidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah ) | Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang tersusun | 75% | Rp859,789,983 | Biro Pemerintahan |
| | PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH (meningkatnya Usulan Kebijakan Daerah dibidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah ) | Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang tersusun | 75% | Rp45,000,000 | Biro Pemerintahan |
| **Strategi : Peningkatan transparansi dan layanan Pengadaan barang dan jasa, Penguatan Sistem Manajemen Pemerintahan, Penataan peraturan perundang-undangan, Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur, manajemen aset dan pencatatan pelaporan aset serta laporan realisasi anggaran, tata laksana dan kinerja pemerintah daerah serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel dan kesesuaian antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja** | | | | **Rp1,737,893,985,409** | |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan transparansi dan layanan Pengadaan barang dan jasa** | | | | **Rp3,008,902,809** | |
| | Program Kebijakan Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa | Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Pengadaan Barang dan Jasa yang tersusun | 80% | Rp3,008,902,809 | Biro Pengadaan Barang Jasa |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen Pemerintahan** | | | | **Rp473,123,984,279** | |
| 37378 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Jumlah kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan | 7 Kab/Kota | Rp1,823,755,000 | Bakuda |
| 0 | 0 | Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi, | 2 Nilai | Rp531,877,500 | Bakuda |
| 0 | 0 | Nilai ketepatan waktu penetapan APBD dan Perubahan APBD | 2 Nilai | Rp1,155,452,764 | Bakuda |
| 0 | 0 | persentase pemenuhan ketaatan pada peraturan terhadap penyaluran Dana Transfer dan BTT | 1 | Rp469,198,149,015 | Bakuda |
| 0 | 0 | persentase realisasi penyediaan dana belanja APBD | 0.93 | Rp414,750,000 | Bakuda |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan Penataan peraturan perundang-undangan** | | | | **Rp77,166,185,360** | |
| 37348 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Persentase meningkatnya fungsi legislasi lembaga DPRD<br>Persentase meningkatnya fungsi penganggaran lembaga DPRD dan | 82 % | Rp24,801,264,680 | SEKRETARIAT DPRD |
| 0 | 0 | Persentase meningkatnya fungsi pengawasan lembaga DPRD | 0.82 | Rp50,859,687,529 | SEKRETARIAT DPRD |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | | |
| | | | Target | Rp | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | | 90 | Rp1,328,969,523 | Biro Hukum |
| | Fasilitasi Bantuan Hukum | | | Rp176,263,628 | Biro Hukum |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur** | | | | **Rp27,851,760,488** | |
| 37379 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Persentase ASN yang ditingkatkan kapasitasnya | 26,60 % | Rp3,705,156,250 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| 0 | 0 | Persentase ASN yang memiliki kinerja minimal baik | 99.87 % | Rp515,000,000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| 0 | 0 | Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui mutasi, promosi | 0.95 | Rp900,000,000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| 0 | 0 | Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui pengadaan | 0.86 | Rp1,456,404,238 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| 0 | 0 | Nilai Indeks Profesionalitas ASN | 68 Nilai | Rp0 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| 0 | 0 | Persentase ASN yang Memenuhi Kompetensi Sesuai dengan Jabatan | 82 Persen | Rp0 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| 37380 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Persentase ASN yang meningkat pengembangan kompetensi manajerial, fungsional dan teknis | 0.75 | Rp21,275,200,000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan manajemen aset dan pencatatan pelaporan aset serta laporan realisasi anggaran** | | | | **Rp794,062,500** | |
| 37743 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Nilai Kepatuhan Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Peraturan perundang- undangan | 2 Nilai | Rp794,062,500 | Bakuda |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan tata laksana dan kinerja pemerintah daerah** | | | | **Rp6,604,342,230** | |
| 37383 | PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG | Survey kepuasan pelayanan Badan Penghubung | 0.82 | Rp2,623,092,457 | Badan Penghubung |
| | PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN (Meningkatnya Usulan Kebijakan Daerah dibidang Perekonomian dan Pembangunan) | Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Perekonomian dan Pembangunan yang tersusun | 65% | Rp475,000,000 | Biro Pembangunan Ekonomi |
| | PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN (Meningkatnya Usulan Kebijakan Daerah dibidang Perekonomian dan Pembangunan) | Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Perekonomian dan Pembangunan yang tersusun | 65% | Rp450,000,000 | Biro Pembangunan Ekonomi |
| | PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN (Meningkatnya Usulan Kebijakan Daerah | Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Perekonomian dan | 65% | Rp450,000,000 | Biro Pembangunan Ekonomi |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | | |
| | | | Target | Rp | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | dibidang Perekonomian dan Pembangunan) | Pembangunan yang tersusun | | | |
| | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN (Meningkatnya Usulan Kebijakan Daerah dibidang Administrasi Pembangunan) | Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Administrasi Pembangunan yang tersusun | 75% | Rp471,400,000 | Biro Pembangunan Ekonomi |
| | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI | Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Penataan Organisasi | 80% | Rp2,134,849,773 | Biro Organisasi |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel** | | | | **Rp4,324,014,587** | |
| 37408 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Nilai Materialitas Hasil Temuan Hasil Pengawasan dibawah 5%, Bidang Pemerintahan dan Aparatur; Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya. | >5 % | Rp3,485,775,478 | Inspektorat Daerah |
| 0 | 0 | Nilai Hasil Kapabilitas APIP dan Nilai Hasil Evaluasi Maturitas SPIP Level 3 | 3 Level | Rp0 | Inspektorat Daerah |
| 37773 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Nilai Hasil Kapabilitas APIP dan Nilai Hasil Evaluasi Maturitas SPIP Level 3 (INSPEKTORAT) | 3 Level | Rp838,239,109 | Inspektorat Daerah |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan Pelayan Internal Perangkat Daerah** | | | | **Rp1,131,741,178,156** | |
| X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indeks Kepuasan pelayanan internal | 90 Nilai | Rp314,525,976,449 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal (Cabdin Wilayah II) | 90 Nilai | Rp0 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal (Cabdin Wilayah III) | 90 Nilai | Rp0 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal (Cabdin Wilayah IV) | 90 Nilai | Rp0 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal (Cabdin Wilayah V) | 90 Nilai | Rp0 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SLB N 31 PKLK NEGERI PANGKALPINANG | 90 Nilai | Rp433,950,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SLB N KOBA | 90 Nilai | Rp166,650,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SLBN Manggar | 90 Nilai | Rp188,100,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SLBN MUNTOK | 90 Nilai | Rp145,200,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SLB N SUNGAILIAT | 90 Nilai | Rp267,300,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SLB N TANJUNGPANDAN | 90 Nilai | Rp259,050,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 AIRGEGAS | 90 Nilai | Rp250,920,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal (SMAN 1 BELINYU) | 90 Nilai | Rp208,800,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 GANTUNG | 90 Nilai | Rp257,400,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 JEBUS | 90 Nilai | Rp257,040,000 | Dinas Pendidikan |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | | |
| | | | Target | Rp | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 KELAPA | 90 Nilai | Rp240,120,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 KELAPA KAMPIT | 90 Nilai | Rp182,880,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 KEP. PONGOK | 90 Nilai | Rp70,200,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 KOBA | 90 Nilai | Rp255,240,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 LEPAR PONGOK | 90 Nilai | Rp116,640,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 LUBUK BESAR | 90 Nilai | Rp211,320,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 MANGGAR | 90 Nilai | Rp293,400,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 MEMBALONG | 90 Nilai | Rp189,720,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 MENDO BARAT | 90 Nilai | Rp181,440,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 MERAWANG | 90 Nilai | Rp173,880,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 MUNTOK | 90 Nilai | Rp268,920,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 NAMANG | 90 Nilai | Rp197,640,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 PANGKALAN BARU | 90 Nilai | Rp207,000,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 PANGKAL PINANG | 90 Nilai | Rp371,160,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 PARITTIGA | 90 Nilai | Rp178,560,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 PAYUNG | 90 Nilai | Rp233,640,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 PEMALI | 90 Nilai | Rp318,240,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 PUDING BESAR | 90 Nilai | Rp142,560,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 RIAU SILIP | 90 Nilai | Rp166,680,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 SIJUK | 90 Nilai | Rp166,320,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 SIMPANG PESAK | 90 Nilai | Rp159,480,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 SIMPANG RIMBA | 90 Nilai | Rp152,280,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 SP TERITIP | 90 Nilai | Rp213,480,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 SUNGAI LIAT | 90 Nilai | Rp358,560,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 SUNGAI SELAN | 90 Nilai | Rp130,320,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 TANJUNG PANDAN | 90 Nilai | Rp288,000,000 | Dinas Pendidikan |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | | |
| | | | Target | Rp | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 TEMPILANG | 90 Nilai | Rp159,480,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 TOBOALI | 90 Nilai | Rp342,000,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 2 MENDO BARAT | 90 Nilai | Rp108,360,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 2 PANGKAL PINANG | 90 Nilai | Rp324,000,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 2 SUNGAI SELAN | 90 Nilai | Rp216,720,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 2 TANJUNG PANDAN | 90 Nilai | Rp256,680,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 2 TOBOALI | 90 Nilai | Rp198,360,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 3 PANGKAL PINANG | 90 Nilai | Rp345,600,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 4 PANGKAL PINANG | 90 Nilai | Rp250,200,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal (SMA Negeri 1 Damar) | 90 Nilai | Rp142,560,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMA NEGERI 1 PULAU BESAR | 90 Nilai | Rp78,480,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMA NEGERI 2 PUDING BESAR | 90 Nilai | Rp142,560,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMA NEGERI 3 TOBOALI | 90 Nilai | Rp30,000,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN OLAHRAGA MUHAMMAD NOER | 90 Nilai | Rp1,275,000,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 1 AIRGEGAS | 90 Nilai | Rp146,160,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 1 BADAU | 90 Nilai | Rp161,280,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMK N 1 BAKAM | 90 Nilai | Rp133,200,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 1 BELINYU | 90 Nilai | Rp154,800,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 1 KELAPA | 90 Nilai | Rp555,600,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 1 KELAPA KAMPIT | 90 Nilai | Rp126,720,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 1 KOBA | 90 Nilai | Rp646,800,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 1 MANGGAR | 90 Nilai | Rp265,680,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 1 MENDOBARAT | 90 Nilai | Rp94,320,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 1 MUNTOK | 90 Nilai | Rp661,200,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 1 PANGKALAN BARU | 90 Nilai | Rp1,186,800,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | SMKN 1 PANGKALPINANG | 90 Nilai | Rp1,186,800,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 1 PARIT TIGA | 90 Nilai | Rp939,600,000 | Dinas Pendidikan |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | | |
| | | | Target | Rp | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 1 PAYUNG | 90 Nilai | Rp478,800,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 1 SELAT NASIK | 90 Nilai | Rp195,600,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 1 SIMPANG KATIS | 90 Nilai | Rp351,360,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 1 SIMPANG RENGGIANG | 90 Nilai | Rp52,560,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 1 SUNGAILIAT | 90 Nilai | Rp367,200,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 1 TANJUNGPANDAN | 90 Nilai | Rp337,680,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 1 TEMPILANG | 90 Nilai | Rp132,120,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 1 TOBOALI | 90 Nilai | Rp259,920,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 1 TUKAK SADAI | 90 Nilai | Rp118,800,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 2 KOBA | 90 Nilai | Rp273,600,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 2 PANGKALPINANG | 90 Nilai | Rp553,680,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 2 SUNGAILIAT | 90 Nilai | Rp284,760,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 2 TANJUNGPANDAN | 90 Nilai | Rp990,000,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 3 PANGKALPINANG | 90 Nilai | Rp994,800,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 3 TANJUNGPANDAN | 90 Nilai | Rp217,440,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 4 PANGKALPINANG | 90 Nilai | Rp270,000,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 5 PANGKALPINANG | 90 Nilai | Rp147,600,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMK NEGERI 1 DENDANG | 90 Nilai | Rp61,920,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMK NEGERI 1 PULAU BESAR | 90 Nilai | Rp37,080,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMK NEGERI 1 SIJUK | 90 Nilai | Rp129,240,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | SMK NEGERI 1 SIMPANG RIMBA | 90 Nilai | Rp76,680,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMK NEGERI 1 SIMPANG TERITIP | 90 Nilai | Rp63,000,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal SMK NEGERI 1 SUNGAISELAN | 90 Nilai | Rp77,760,000 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan pelayanan internal (UPT BALAI TEKOMDIK) | 90 Nilai | Rp0 | Dinas Pendidikan |
| 0 | 0 | Kepuasan pelayanan internal (Cabdin WIlayah I) | 90 Nilai | Rp0 | Dinas Pendidikan |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | | |
| | | | Target | Rp | |
| *1* | | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 0 | 0 | SLB Negeri TOBOALI | 90 Nilai | Rp165,000,000 | Dinas Pendidikan |
| X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indeks kepuasan pelayanan internal Perangkat Daerah (Dinas Kesehatan) | 82 nilai | Rp27,264,815,409 | Dinas Kesehatan |
| 0 | 0 | Indeks kepuasan pelayanan internal (UPTD Labkes) | 82 nilai | Rp3,321,130,800 | Dinas Kesehatan |
| 0 | 0 | Nilai Sakip PD (Dinas Kesehatan) | 80 nilai | Rp157,075,000 | Dinas Kesehatan |
| X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (RSUP) | 77 nilai | 111842000000 | RSUP |
| 0 | 0 | Nilai Sakip Perangkat daerah (RSUP) | 78 nilai | Rp500,000,000 | RSUP |
| X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (RSJ) | 80 nilai | Rp49,564,789,000 | RUMAH SAKIT JIWA |
| 0 | 0 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (RSJ) | 81.1 nilai | Rp40,000,000 | RUMAH SAKIT JIWA |
| X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai Sakip PD (Dinas PUPR PRKP) | 79 Nilai | Rp1,100,000,000 | DPUPRPERKIM |
| 0 | 0 | Survey Kepuasan Pelayanan Internal (Dinas PUPR PRKP) | 80 Nilai | Rp32,000,000,000 | DPUPRPERKIM |
| X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indeks kepuasan pelayanan internal (Satpol PP) | 77 Nilai | Rp58,000,000 | Satpol PP |
| 0 | 0 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Satpol PP) | 80 NIlai | Rp13,603,750,000 | Satpol PP |
| X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (BPBD) | 82.86 Nilai | Rp14,313,712,693 | BPBD |
| 0 | 0 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (BPBD) | 77,14 Nilai | Rp317,625,000 | BPBD |
| X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (DinsosPMD) | 90 % | Rp31,673,164,649 | Dinsospemdes |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (PSBLH) | 0.9 | Rp3,628,461,573 | Dinsospemdes |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (PSBS) | 0.9 | Rp6,318,652,834 | Dinsospemdes |
| 0 | 0 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (DinsosPMD) | 0.781 | Rp261,016,888 | Dinsospemdes |
| 0 | 0 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (PSBLH) | 0.781 | Rp20,360,000 | Dinsospemdes |
| X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (Disnaker) | 99 % | Rp23,271,083,646 | Disnaker |
| 0 | 0 | Nilai sakip perangkat daerah (DISNAKER) | 87 Nilai | Rp350,000,000 | Disnaker |
| X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (DP3ACSKB) | 76 nilai | Rp9,846,995,421 | DP3CASKB |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (UPTD PPA) | 76 Nilai | Rp131,000,000 | DP3CASKB |
| 0 | 0 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (DP3ACSKB) | 74.5 nilai | Rp99,000,000 | DP3CASKB |
| X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (DPKP) | 80 nilai | Rp37,438,433,474 | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan Pelayanan internal (DPKP-UPTD Balai Benih) | 80 Nilai | Rp577,500,000 | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| 0 | 0 | Indeks kepuasan Pelayanan Internal (DPKP-UPTD PMKP) | 80 Nilai | Rp283,500,000 | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | | |
| | | | Target | Rp | |
| *1* | | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal(DPKP- UPTD Proteksi) | 80 Nilai | Rp367,500,000 | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| 0 | 0 | Indeks kepuasan Pelayanan Internal (DPKP-UPTD - PSMB) | 80 nilai | Rp367,500,000 | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| 0 | 0 | Nilai SAKIP PD (DPKP) | 81,29 nilai | Rp288,750,000 | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (DLHK) | 90 nilai | Rp36,705,003,231 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (UPTD KPH Belantu Mendanau) | 90 nilai | Rp62,200,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (UPTD KPH Bubus Panca) | 90 nilai | Rp319,230,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (UPTD KPH Gunung Duren) | 90 nilai | Rp435,980,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (UPTD KPH Jebu Bembang Antan) | 90 nilai | Rp319,230,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (UPTD KPH Muntai Palas) | 90 nilai | Rp437,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (UPTD KPH Rambat Menduyung) | 90 nilai | Rp328,260,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (UPTD KPH Sigambir Kota Waringin) | 90 nilai | Rp297,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (UPTD KPH Sungai Sembulan) | 90 nilai | Rp549,500,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 0 | 0 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (DLHK) | 81 nilai | Rp173,145,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Perhubungan) | 51 % | Rp312,000,000 | Dinas Perhubungan |
| 0 | 0 | Survei Kepuasan Internal Daerah (Dinas Perhubungan) | 0.85 | Rp31,277,999,180 | Dinas Perhubungan |
| X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai SAKIP PD (DISKOMINFO) | 83 | Rp520,000,000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 0 | 0 | Survey Kepuasan Pelayanan Internal PD (DISKOMINFO) | 84 | Rp13,472,700,000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai SAKIP Perangat Daerah (DKUKM) | 81 | Rp90,000,000 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (DKUKM) | 84 | Rp8,790,463,531 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | | Indeks kepuasan Pelayanan Internal (UPTD-Balkop) | 80.5 | Rp424,721,131 | UPT Balkop |
| X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (DPMPTSP) | 70 Nilai | Rp11,846,246,365 | DPMPTSP |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (UPT PPT WILAYAH BELITUNG) | 69 Nilai | Rp608,000,000 | DPMPTSP |
| 0 | 0 | Nilai Sakip PD (DPMPTSP) | 79 Nilai | Rp414,750,000 | DPMPTSP |
| X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indeks kepuasan pelayanan internal (PARBUDKEPORA) | 68 Nilai | Rp28,463,546,245 | DIPARBUDKEPORA |
| 0 | 0 | Indeks kepuasan pelayanan internal UPTD Belitung (PARBUDKEPORA) | 68 Nilai | Rp827,200,000 | DIPARBUDKEPORA |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | | |
| | | | Target | Rp | |
| *1* | | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 0 | 0 | Nilai SAKIP PD (PARBUDKEPORA) | 78 Nilai | Rp553,640,000 | DIPARBUDKEPORA |
| X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal PD (DKPUS) | 100 Nilai | Rp39,592,447,328 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| 0 | 0 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (DKPUS) | 78 nilai | Rp187,000,000 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (DKP) | 84 % | Rp19,070,980,000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 0 | 0 | Indeks kepuasan Pelayanan Internal (UPTD-BPI) | 0.84 | Rp1,835,250 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 0 | 0 | Indeks kepuasan Pelayanan Internal (UPTD-LPPMHP) | 0.84 | Rp572,250,000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 0 | 0 | Nilai SAKIP Perangat Daerah (DKP) | 79,5 Nilai | Rp490,000,000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (Cabdin ESDM Wilayah Bangka) | 92 nilai | Rp372,140,000 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (Cabdin ESDM Wilayah Bangka Barat) | 92 nilai | Rp574,600,000 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (Cabdin ESDM Wilayah Bangka Tengah dan Selatan) | 92 nilai | Rp468,200,000 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (Cabdin ESDM Wilayah Belitung) | 92 nilai | Rp400,200,000 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (Cabdin ESDM Wilayah Belitung Timur) | 92 nilai | Rp439,700,000 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (DESDM) | 92 nilai | Rp20,657,700,000 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| 0 | 0 | Nilai SAKIP PD (DESDM) | 87 nilai | Rp250,000,000 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai Sakip Perangkat Daerah (Disperindag) | 80 | Rp260,000,000 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Disperindag) | 60 | Rp17,409,237,248 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 2 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (BPSMB) | Indeks Kepuasan Pelayanan Teknis Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang | 77 | Rp720,250,000 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (UPTD BPSMB) |
| 3 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (RPK) | Indeks Kepuasan Pelayanan Teknis Rumah Promosi dan Kemasan | 77 | Rp1,898,640,000 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (UPTD RPK) |
| X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (Setwan) | 92 Nilai | Rp76,907,930,295 | SEKRETARIAT DPRD |
| 0 | 0 | Nilai Sakip PD (Sekretariat DPRD) | 79 nilai | Rp735,000,000 | SEKRETARIAT DPRD |
| X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai Sakip PD (Bappeda) | 83.33 | Rp167,000,000 | Bappeda |
| 0 | 0 | Survey Kepuasan Pelayanan Internal (BAPPEDA) | 80 | Rp15,894,000,000 | Bappeda |
| X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indek Kepuasan Pelayanan (Bakuda : UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA ) | 81 Nilai | Rp1,347,075,000 | Bakuda |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (Bakuda) | 79 Nilai | Rp74,498,218,393 | Bakuda |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (Bakuda : UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA BARAT) | 80.50 Nilai | Rp851,095,385 | Bakuda |
| 0 | 0 | indeks kepuasan pelayanan internal ( Bakuda: UPTB WILAYAH KABUPATEN | 80 Nilai | Rp1,063,040,336 | Bakuda |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | | |
| | | | Target | Rp | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | BELITUNG TIMUR) | | | |
| 0 | 0 | Indeks kepuasan Pelayanan internal (Bakuda : UPTB WILAYAH KOTA PANGKALPINANG) | 82 Nilai | Rp1,316,950,000 | Bakuda |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal ( UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA SELATAN ) | 81 Nilai | Rp986,342,905 | Bakuda |
| 0 | 0 | Indeks kepuasan pelayanan internal ( UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA TENGAH ) | 80 Nilai | Rp1,408,105,000 | Bakuda |
| 0 | 0 | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal ( UPTB WILAYAH KABUPATEN BELITUNG ) | 81 Nilai | Rp1,472,475,000 | Bakuda |
| 0 | 0 | Nilai Sakip Perangkat Daerah (Bakuda) | 81 Nilai | Rp144,375,000 | Bakuda |
| X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (BKPSDM) | 71 Nilai | Rp23,822,653,845 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| 0 | 0 | Nilai Sakip PD (BKPSDM) | 82,25 Nilai | Rp144,000,000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Derah (Badan Penghubung) | 80 % | Rp13,556,604,103 | Badan Penghubung |
| 0 | 0 | Nilai Sakip PD (Badan Penghubung) | 72 Nilai | Rp7,496,761 | Badan Penghubung |
| X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (INSPEKTORAT) | 90 Nilai | Rp19,324,053,658 | Inspektorat Daerah |
| 0 | 0 | Nilai Sakip PD (INSPEKTORAT) | 80 Nilai | Rp68,250,000 | Inspektorat Daerah |
| X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indeks kepuasan Pelayanan Internal (BAKESBANGPOL) | 77,5 Nilai | Rp9,675,723,528 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 0 | 0 | Nilai Sakip PD (BAKESBANGPOL) | 80 Nilai | Rp503,771,602 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai Sakip PD Setda | 0.77 | Rp343,000,000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | Meningkatkan Pelayanan Internal PD Setda | 80% | Rp50,553,580,000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan kesesuaian antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja** | | | | **Rp13,279,555,000** | |
| 38109 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | pertumbuhan PAD | 10 % | Rp981,750,000 | Bakuda |
| 0 | 0 | pertumbuhan Pajak Daerah pada UPTB ( UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA ) | 0.1052 | Rp535,500,000 | Bakuda |
| 0 | 0 | pertumbuhan Pajak Daerah pada UPTB (UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA BARAT) | 0.1068 | Rp143,430,000 | Bakuda |
| 0 | 0 | pertumbuhan Pajak Daerah pada UPTB ( UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA SELATAN ) | 12.36 % | Rp389,025,000 | Bakuda |
| 0 | 0 | pertumbuhan Pajak Daerah pada UPTB ( UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA TENGAH ) | 12.39 % | Rp254,100,000 | Bakuda |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | | |
| | | | Target | Rp | |
| *1* | | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 0 | 0 | pertumbuhan Pajak Daerah pada UPTB ( UPTB WILAYAH KABUPATEN BELITUNG) | 12.39 % | Rp261,500,000 | Bakuda |
| 0 | 0 | pertumbuhan Pajak Daerah pada UPTB ( UPTB WILAYAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR) | 12.39 % | Rp362,250,000 | Bakuda |
| 0 | 0 | pertumbuhan Pajak Daerah pada UPTB (UPTB WILAYAH KOTA PANGKALPINANG) | 0.0566 | Rp252,000,000 | Bakuda |
| 37377 | PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase Konsistensi Program Pembangunan di RKPD dengan RPJMD dan Renstra dengan RPJMD | 1 | Rp2,650,000,000 | Bappeda |
| 0 | 0 | Persentase Renstra PD yang baik (memiliki rencana kinerja yang baik, tepat, dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat) | 1 | Rp0 | Bappeda |
| 37742 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 1 | Rp700,000,000 | Bappeda |
| 0 | 0 | Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 1 | Rp850,000,000 | Bappeda |
| 0 | 0 | Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 1 | Rp700,000,000 | Bappeda |
| 0 | 0 | Predikat capaian kinerja hasil perencanaan pembangunan dengan kategori tinggi | Tinggi Predikat | Ti | Bappeda |
| 0 | 0 | Persentase capaian sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah | 0.93 | Rp0 | Bappeda |
| 37377 | PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase Rumusan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti | 0.75 | Rp550,000,000 | Bappeda |
| 0 | 0 | Persentase capaian program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah dengan predikat kinerja tinggi | 0.92 | Rp0 | Bappeda |
| 37742 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase Rumusan Hasil Pengendalian dan Evaluasi pada Dokumen Perencanaan PD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 0.9 | Rp400,000,000 | Bappeda |
| 0 | 0 | Persentase Rumusan Hasil Pengendalian dan Evaluasi pada Dokumen Perencanaan PD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 0.9 | Rp400,000,000 | Bappeda |
| 0 | 0 | Persentase Rumusan Hasil Pengendalian dan Evaluasi pada Dokumen Perencanaan PD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 0.9 | Rp400,000,000 | Bappeda |
| 0 | 0 | Nilai perencanaan kinerja dalam Lakip Provinsi | 23.75 Nilai | Rp0 | Bappeda |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | | |
| | | | Target | Rp | |
| *1* | | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 0 | 0 | Persentase Renstra PD yang baik (memiliki rencana kinerja yang baik, tepat, dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat) | 1 | Rp0 | Bappeda |
| 37381 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang digunakan Sebagai Bahan Perumusan Kebijakan | 0.8 | Rp2,750,000,000 | Bappeda |
| 0 | 0 | Persentase Jumlah Inovasi Daerah yang dikembangkan | 0.8 | Rp700,000,000 | Bappeda |

**Tabel IV. 15**
Hasil kesepakatan Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan (Rakortekbang) Tahun 2023

PRIORITAS NASIONAL : Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
PROGRAM PRIORITAS : Infrastruktur Ekonomi
KEGIATAN PRIORITAS : Konektivitas Laut
PROYEK PRIORITAS : Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut
MAJOR PROJECT :
ISU STRATEGIS PROVINSI : Belum meratanya layanan infrastruktur dasar di seluruh wilayah

| No | Rancangan Awal Renja K/L | | | | Usulan Daerah | | | | Dukungan Kesiapan Daerah | | Kesepakatan | Catatan Pembahasan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kementerian/ Lembaga | Program | Kegiatan | Rincian Output | Prov/ Kab/Kota | Usulan Proyek | Target | Lokasi | Sub Kegiatan | Uraian Dukungan | | |
| 1, | Kementerian Perhubungan | Infrastruktur Ekonomi | Konektivitas Laut | Pengembangan Pelabuhan Tanjung Batu | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 003 - Pengembangan Pelabuhan Tanjung Batu Kabupaten Belitung | 1 | 1902 - Kab. Belitung | | 1.DED | Ditolak | Kesepakatan:<br>Ditolak, karena pelabuhan sudah operasional<br>Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:<br>1. Pelabuhan Tanjung Batu ada di Kab. Belitung, diharapkan pelabuhan ini dapat menggantikan Pelabuhan Tanjung Pandan yang sudah tidak dapat dikembangkan<br>2. Pelabuhan Tanjung Batu sudah operasional dan sarpras sudah terpenuhi<br>Direktorat Transportasi, Bappenas:<br>1. Pelabuhan Tanjung Batu ada di RIPN dan hierarkinya adalah Pelabuhan Pengumpul (PP), seharusnya ada kegiatan optimalisasi karena merupakan pelabuhan kewenangan pusat<br>2. Perlu diinfokan kebutuhan teknis dari Pemda ke Kemenhub<br>3. Pelabuhan sudah operasional, jika nanti demand sudah meningkat dan butuh peningkatan kapasitas dimohon dari Pemda berkoordinasi dengan UPP Tanjung Pandan |

| No | Rancangan Awal Renja K/L | | | | Usulan Daerah | | | | Dukungan Kesiapan Daerah | | Kesepakatan | Catatan Pembahasan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kementerian/ Lembaga | Program | Kegiatan | Rincian Output | Prov/ Kab/Kota | Usulan Proyek | Target | Lokasi | Sub Kegiatan | Uraian Dukungan | | |
| | | | | | | | | | | | | Direktorat Kepelabuhanan, Kementerian Perhubungan:<br>1. Pelabuhan Tanjung Batu (PP) merupakan kewenangan Dirjen Perhubungan Laut<br>2. Untuk Pelabuhan Tanjung Batu, DED sudah ada di 2018, DLKR dan DLKP sudah ada di 2020<br>3. Belum ada rencana pengembangan di tahun 2024. Data dari Satker, fasilitas infrastruktur Pelabuhan Tanjung Batu sudah memenuhi untuk operasional dan sudah operasional, sehingga untuk tahun 2024 belum mengusulkan pengembangan/kegiatan di Pelabuhan Tanjung Batu |

PRIORITAS NASIONAL : Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
PROGRAM PRIORITAS : Infrastruktur Ekonomi
KEGIATAN PRIORITAS : Konektivitas Darat
PROYEK PRIORITAS : Penyediaan Layanan Perintis Angkutan Darat untuk Penumpang dan Barang
MAJOR PROJECT :
ISU STRATEGIS PROVINSI : Belum meratanya layanan infrastruktur dasar di seluruh wilayah

| No | Rancangan Awal Renja K/L | | | | Usulan Daerah | | | | Dukungan Kesiapan Daerah | | Kesepakatan Prov/ Kab/Kota | Catatan Pembahasan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kementerian/ Lembaga | Program | Kegiatan | Rincian Output | Prov/ Kab/Kota | Usulan Proyek | Kementerian/ Lembaga | Program | Kegiatan | Rincian Output | | |

| No | Rancangan Awal Renja K/L | | | | Usulan Daerah | | | | Dukungan Kesiapan Daerah | | Kesepakatan Prov/ Kab/Kota | Catatan Pembahasan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kementerian/ Lembaga | Program | Kegiatan | Rincian Output | Prov/ Kab/Kota | Usulan Proyek | Kementerian/ Lembaga | Program | Kegiatan | Rincian Output | | |
| 1, | Kementerian Perhubungan | Infrastruktur Ekonomi | Konektivitas Darat | Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis (Prioritas Nasional) | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 004 - Pengembangan pelabuhan ASDP Pulau Seliu | 1 | 1902 - Kab. Belitung | | 1.DED (TA.2022)<br>2.AMDAL(TA.2022)<br>3. SSID (TA. 2022) | Dibahas lebih lanjut | Kesepakatan:<br>Dibahas lebih lanjut, dengan catatan untuk kesiapan lahan akan dicek kembali dan berkoordinasi dengan BPTD Sumsel - Babel<br>Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:<br>1. Dibutuhkan untuk pengubung antar pulau di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung<br>2. Sudah ada dokumen DED, AMDAL, dan SSID<br>3. Untuk ketersediaan lahan akan dicek kembali dan akan koordinasi dengan BPTD Sumsel - Babel<br>Direktorat Transportasi, Bappenas:<br>1. Perlu dipastikan terkait dokumen kesiapan dan ketersediaan lahan untuk Pelabuhan Seliu<br>Kementerian Perhubungan:<br>1. Pelabuan Seliu adalah pelabuhan penyebrangan, untuk nomenklatur bisa diperbaiki menjadi Pelabuhan Penyebrangan Seliu<br>2. Sudah masuk dalam longlist pagu kebutuhan Kemenhub, namun ada data teknis dokumen perencanaan yang harus disiapkan, karena dokumen perencanaan belum diterima oleh Kemenhub<br>3. Pemda diharapkan koordinasi dengan Balai BPTD Sumsel - Babel, untuk nanti disampaikan ke Direktorat Teknis TSDP<br>Kemenhub |

PRIORITAS NASIONAL : Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
PROGRAM PRIORITAS : Infrastruktur Pelayanan Dasar
KEGIATAN PRIORITAS : Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur
PROYEK PRIORITAS : Pembangunan dan Rehabilitasi Infrastruktur Ketahanan Bencana
MAJOR PROJECT :
ISU STRATEGIS PROVINSI : Kualitas lingkungan hidup menurun dan risiko bencana yang tinggi

| No | Rancangan Awal Renja K/L | | | | Usulan Daerah | | | | Dukungan Kesiapan Daerah | | Kesepakatan Prov/ Kab/Kota | Catatan Pembahasan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kementerian/ Lembaga | Program | Kegiatan | Rincian Output | Prov/ Kab/Kota | Usulan Proyek | Kementerian/ Lembaga | Program | Kegiatan | Rincian Output | | |
| 1, | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Infrastruktur Pelayanan Dasar | Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur | Pengendalian Banjir Kota Pangkalpinang yang dibangun (Tahap II) | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 005 - Pengendalian Banjir Kota Pangkalpinang | 1 | 1971 - Kota Pangkal Pinang | | Amdal 2022(Pemkot) Desain 2021. Lahan akan deselesaikan tahun2022 oleh pemkot | Diakomodir | Kesepakatan:<br>Diakomodir<br>Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:<br>1. Pengendalian Banjir Kota Pangkalpinang ini merupakan lanjutan dari tahun 2023 (Pengerjaan Tahap 2) dari BBWS Bangka Belitung, sudah dibahas dalam Rakorbangwil dan Konreg Kementerian PUPR<br>SDA, Kementerian PUPR:<br>1. Pada tahun 2023 sudah diprogramkan untuk kolam retensi dengan pembiayaan SBSN, untuk tahun 2024 direncanakan menggunakan SBSN, namun masih hasil Trilateral Meeting selanjutnya antara Kementerian PUPR, Bappenas, dan Kemenkeu<br>BPIW, Kementerian PUPR:<br>1. Proses Perencanaan Kementerian PUPR tahun 2024 sudah melalui Rakorbangwil dan Konreg, usulan Pengendalian Banjir Kota Pangkalpinang sudah disetujui dan sudah masuk dalam perencanaan tahun 2024<br>Direktorat SDA, Bappenas:<br>1. Sepakat dengan Kementerian PUPR untuk berlanjut di tahun 2024<br>Bangda, Kementerian Dalam Negeri:<br>1. Perlu dijelaskan dukungan yang menjadi kewenangan |

| No | Rancangan Awal Renja K/L | | | | Usulan Daerah | | | | Dukungan Kesiapan Daerah | | Kesepakatan Prov/ Kab/Kota | Catatan Pembahasan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kementerian/ Lembaga | Program | Kegiatan | Rincian Output | Prov/ Kab/Kota | Usulan Proyek | Kementerian/ Lembaga | Program | Kegiatan | Rincian Output | | |
| | | | | | | | | | | | | pemerintah daerah |

PRIORITAS NASIONAL : Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
PROGRAM PRIORITAS : Infrastruktur Pelayanan Dasar
KEGIATAN PRIORITAS : Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau
PROYEK PRIORITAS : Fasilitasi Penanganan Permukiman Kumuh
MAJOR PROJECT :
ISU STRATEGIS PROVINSI : Daya saing dan produktivitas sumber daya manusia relatif rendah

| No | Rancangan Awal Renja K/L | | | | Usulan Daerah | | | | Dukungan Kesiapan Daerah | | Kesepakatan | Catatan Pembahasan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kementerian/ Lembaga | Program | Kegiatan | Rincian Output | Prov/ Kab/Kota | Usulan Proyek | Target | Lokasi | Sub Kegiatan | Uraian Dukungan | | |
| 1, | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Infrastruktur Pelayanan Dasar | Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau | Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat di Perkotaan | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 006 - Pembangunan Fisik Kota Pusaka Kluster Eropa | 6 | 1903 - Kab. Bangka Barat | | - | Diakomodir | Kesepakatan:<br>Diakomodir<br>Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung<br>1. Usulan berlokasi di Kota Muntok, Kab. Bangka Barat untuk pembangunan fisik dan merupakan prioritas BPPW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung<br>2. Usulan untuk mendukung pariwisata budaya<br>3. Dokumen perencanaan sudah disusun, kerjasama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota<br>Direktorat Perkim, Bappenas:<br>1. Usulan Kota Pusaka tidak bisa diakomodir karena tidak mendukung langsung PN di Bidang Permukiman, kecuali ada Direktif Presiden ke Kementerian PUPR dalam bentuk penugasan khusus |

| No | Rancangan Awal Renja K/L | | | | Usulan Daerah | | | | Dukungan Kesiapan Daerah | | Kesepakatan | Catatan Pembahasan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kementerian/ Lembaga | Program | Kegiatan | Rincian Output | Prov/ Kab/Kota | Usulan Proyek | Target | Lokasi | Sub Kegiatan | Uraian Dukungan | | |
| | | | | | | | | | | | | BPIW, Kementerian PUPR:<br>1. Usulan sudah masuk dalam Rakorbangwil dan Konreg, sepakat untuk disetujui dan masuk dalam perencanaan tahun 2024. Lokasi Muntok berkaitan dengan Bukit Menumbing dan mendukung KSPN Provinsi |

PRIORITAS NASIONAL : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
PROGRAM PRIORITAS : Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing
KEGIATAN PRIORITAS : Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri
PROYEK PRIORITAS : Reformasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
MAJOR PROJECT : Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0
ISU STRATEGIS PROVINSI : Daya saing dan produktivitas sumber daya manusia relatif rendah

| No | Rancangan Awal Renja K/L | | | | Usulan Daerah | | | | Dukungan Kesiapan Daerah | | Kesepakatan | Catatan Pembahasan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kementerian/ Lembaga | Program | Kegiatan | Rincian Output | Prov/ Kab/Kota | Usulan Proyek | Target | Lokasi | Sub Kegiatan | Uraian Dukungan | | |
| 1, | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi | Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing | Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri | SMK yang Dikembangkan Berbasis Industri 4.0 | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 001 - Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan | 1 | 1971 - Kota Pangkal Pinang | | SMK 5 telah mendapatkan penguatan kelembagaan dari Kemendikbud dan kemenprin pada tahun 2022 dan kesiapan APBD mengembangkan SMK 5 menjadi berbasis industri 4.0 | Dibahas lebih lanjut | Kesepakatan:<br>Dibahas lebih lanjut<br>Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka<br>1. SMK 5 sudah ada dukungan dari Kemenperin, namun untuk pembinaan lebih lanjut masih dibutuhkan dari Kemendikbud untuk program vokasi<br>2. Pada tahun 2022, sudah ada dukungan SMK berbasis industri. Tahun 2023 diusulkan untuk penguatan pembelajaran dan diharapkan ada dukungan DAK untuk pembangunan toilet dan pembangunan ruang OSIS<br>3. Tahun 2024 mengusulkan pengerjaan fisik laboratorium<br>Direktorat APK, Bappenas:<br>1. Tahun 2022 sudah mendapat peralatan dan tahun 2023 mengusulkan untuk program pembelajaran |

| No | Rancangan Awal Renja K/L | | | | Usulan Daerah | | | | Dukungan Kesiapan Daerah | | Kesepakatan | Catatan Pembahasan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kementerian/ Lembaga | Program | Kegiatan | Rincian Output | Prov/ Kab/Kota | Usulan Proyek | Target | Lokasi | Sub Kegiatan | Uraian Dukungan | | |
| | | | | | | | | | | | | 2. Untuk 2024 perlu dibahas lebih lanjut, karena harus ada master plan<br>3. Kebijakan DAK masih dalam proses, diusulkan untuk dibahas lebih lanjut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi:<br>1. Program bantuan SMK 4.0 ada di Direktorat SMK. Direktorat SMK tahun 2023 akan melakukan seleksi terhadap SMK penerima<br>2. SMK penerima diharapkan mendapat bantuan selama 3 tahun. Namun ada kebijakan bahwa SMK yang menerima dana<br>APBN, tidak akan menerima dana DAK |

PRIORITAS NASIONAL : Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
PROGRAM PRIORITAS : Infrastruktur Pelayanan Dasar
KEGIATAN PRIORITAS : Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman
PROYEK PRIORITAS : Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman
MAJOR PROJECT :
ISU STRATEGIS PROVINSI : Belum meratanya layanan infrastruktur dasar di seluruh wilayah

| No | Rancangan Awal Renja K/L | | | | Usulan Daerah | | | | Dukungan Kesiapan Daerah | | Kesepakatan | Catatan Pembahasan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kementerian/ Lembaga | Program | Kegiatan | Rincian Output | Prov/ Kab/Kota | Usulan Proyek | Target | Lokasi | Sub Kegiatan | Uraian Dukungan | | |

| No | Rancangan Awal Renja K/L | | | | Usulan Daerah | | | | Dukungan Kesiapan Daerah | | Kesepakatan | Catatan Pembahasan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kementerian/ Lembaga | Program | Kegiatan | Rincian Output | Prov/ Kab/Kota | Usulan Proyek | Target | Lokasi | Sub Kegiatan | Uraian Dukungan | | |
| 1, | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Infrastruktur Pelayanan Dasar | Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman | Pembangunan SPAM Kabupaten/ Kota | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 007 - Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | 15 | 1901 - Kab. Bangka | | Mendukung pencapaian target penguatan infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, khususnya ketersediaan akses air minum layak dan aman. Kabupaten Bangka sudah menyiapkan data dukung berupa<br>1. RAB<br>2. DED<br>3. Surat Lahan Selain itu, terdapat pula anggara | Ditolak | Kesepakatan:<br>Ditolak, dengan catatan usulan diarahkan melalui DAK atau Program IBM<br>Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:<br>1. Usulan merupakan Program PAMSIMAS dari BPPW Bangka Belitung<br>2. Usulan berlokasi di Kab. Bangka<br>Direktorat Perkim, Bappenas:<br>1. Usulan belum dapat diakomodir melalui APBN, namun jika menjadi lokasi prioritas DAK nantinya bisa diusulkan melalui DAK<br>BPIW, Kementerian PUPR:<br>1. Usulan merupakan pembangunan baru dan kewenangan daerah, sehingga tidak memungkinkan untuk dikerjakan pada tahun 2024<br>Cipta Karya, Kementerian PUPR:<br>1. PAMSIMAS termasuk dalam Infarastruktu Berbasis Masyarakat (IBM), pendanaannya bisa diarahkan melalui DAK atau APBN khusus IBM<br>2. Selain melalui DAK, bisa diarahkan untuk Bupati Bangka bersurat ke Kementerian<br>PUPR untuk mengusulkan program IBM |

PRIORITAS NASIONAL : Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
PROGRAM PRIORITAS : Infrastruktur Pelayanan Dasar
KEGIATAN PRIORITAS : Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman
PROYEK PRIORITAS : Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman
MAJOR PROJECT : Akses Sanitasi (air limbah domestik) Layak dan Aman (90 persen Rumah Tangga)
ISU STRATEGIS PROVINSI : Belum meratanya layanan infrastruktur dasar di seluruh wilayah

| No | Rancangan Awal Renja K/L | | | | Usulan Daerah | | | | Dukungan Kesiapan Daerah | | Kesepakatan | Catatan Pembahasan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kementerian/ Lembaga | Program | Kegiatan | Rincian Output | Prov/ Kab/Kota | Usulan Proyek | Target | Lokasi | Sub Kegiatan | Uraian Dukungan | | |
| 1, | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Infrastruktur Pelayanan Dasar | Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman | Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 002 - Peningkatan TPA Kenanga Sungailiat | 1 | 1901 - Kab. Bangka | | Mendukung pencapaian target penguatan infrastruktur untuk mendung pelayanan dasar, khususnya ketersediaan akses sanitasi layak dan aman dengan data dukung 1. Pernyataan minat Bupati; 2. Surat Keterangan Lembaga pengelola TPA Kenanga; 3. Kesiapan Biaya Ope | Ditolak | Kesepakatan:<br>Ditolak, dengan catatan diarahkan untuk diusulkan menjadi TPST dan lahan disiapkan<br>Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:<br>1. Peningkatan TPA Kenanga Sungaliat di Kab. Bangka pada Rakortekrenbang Tahun 2022 sudah diusulkan<br>2. Permasalahan yang dihadapai dari Kab. adalah Surat Pinjam Pakai Lahan (masih dalam proses)<br>3. Usulan termasuk mendesak dan merupakan prioritas daerah, setiap tahun diusulkan dalam proses penyusunan perencanaan<br>BPIW, Kementerian PUPR<br>1. Pembangunan TPA merupakan kewenangan daerah, jika dari Pusat maka membutuhkan serah terima aset dan tidak mungkin dilakukan pada tahun 2024<br>2. TPA di Bangka Belitung memang urgent, namun ada beberapa kewenangan daerah.<br>3. TPA harus dilakukan dengan Sanitary Landfill<br>4. Ada penambangan ilegal timah dilokasi dekat pembangunan TPA, hal ini menyebabkan TPA menjadi rentan hancur dan perlu menjadi prioritas dari Pemerintah Daerah<br>Cipta Karya, Kementerian PUPR:<br>1. Kedepannya tidak diprioritaskan untuk TPA, namun diarahkan dalam bentuk TPST supaya sampah dapat olah terlebih dahulu<br>2. Usulan diarahkan dalam bentuk TPST<br>3. Permasalahan lahan untuk persampahan harus sudah clean and clear<br>Direktorat Perkim, Bappenas:<br>1. Keberadaan TPA akan diminimalkan |

| No | Rancangan Awal Renja K/L | | | | Usulan Daerah | | | | Dukungan Kesiapan Daerah | | Kesepakatan | Catatan Pembahasan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kementerian/ Lembaga | Program | Kegiatan | Rincian Output | Prov/ Kab/Kota | Usulan Proyek | Target | Lokasi | Sub Kegiatan | Uraian Dukungan | | |
| | | | | | | | | | | | | dan lebih diarahkan ke TPST atau TPS3R<br>2. Urgensi dari peningkatan TPA perlu dijelaskan oleh Pemerintah Daerah, jika tidak terlalu mendesak diarahkan ke TPST atau TPS3R |

PRIORITAS NASIONAL : Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
PROGRAM PRIORITAS : Infrastruktur Ekonomi
KEGIATAN PRIORITAS : Konektivitas Darat
PROYEK PRIORITAS : Penyediaan Layanan Perintis Angkutan Darat untuk Penumpang dan Barang
MAJOR PROJECT :
ISU STRATEGIS PROVINSI : Belum meratanya layanan infrastruktur dasar di seluruh wilayah

| No | Rancangan Awal Renja K/L | | | | Usulan Daerah | | | | Dukungan Kesiapan Daerah | | Kesepakatan | Catatan Pembahasan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kementerian/ Lembaga | Program | Kegiatan | Rincian Output | Prov/ Kab/Kota | Usulan Proyek | Target | Lokasi | Sub Kegiatan | Uraian Dukungan | | |
| 1, | Kementerian Perhubungan | Infrastruktur Ekonomi | Konektivitas Darat | Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis (Prioritas | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 008 - Pembangunan Pelabuhan Sibetik Pulau Pongok/ Liat | 1 | 1905 - Kab. Bangka Selatan | | - | Ditolak | Kesepakatan:<br>Ditolak, dengan catatan masih perlu melengkapi dokumen perencanaan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:<br>1. Pelabuhan Sibetik masih ada |

| No | Rancangan Awal Renja K/L | | | | Usulan Daerah | | | | Dukungan Kesiapan Daerah | | Kesepakatan | Catatan Pembahasan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kementerian/ Lembaga | Program | Kegiatan | Rincian Output | Prov/ Kab/Kota | Usulan Proyek | Target | Lokasi | Sub Kegiatan | Uraian Dukungan | | |
| | | | | Nasional) | | | | | | | | permasalahan di lahan dan dokumen perencanaan yang masih dalam proses<br>2. Tidak semua usulan yang ada di Rakortekrenbang 2023 ada di Renja perangkat daerah. Kendala di daerah adalah adanya batasan kewenangan dari Kepmen 150<br>3. Pelabuhan berada di selatan Pulau Bangka dan merupakan Pelabuhan Penyebangan<br>Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:<br>1. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan lintas sabuk tengah untuk menghubungkan pelabuhan eksisting (Pelabuhan Sadai, Pelabuhan Tanjung Gading, Pelabuhan Tanjung Nyato, dan Pelabuhan Tanjung Ru)<br>2. Pra FS, FS dan DED sudah dikerjakan, untuk tahun 2023 ada pengerjaan AMDAL<br>3. Pelabuhan sabuk tengah Bangka Belitung merupakan bagian dari mata rantai nasional yang nantinya akan membantu menghubungkan Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan<br>4. Pelabuhan merupakan pelabuhan penyebrangan baru, namun ada beberapa studi yang belum dilakukan seperti RIP<br>Kementerian Perhubungan:<br>1. Pelabuhan Sibetik masuk dalam pelabuhan PL (Pengumpan Lokal), masih dalam rencana dan belum eksisting<br>2. Data dukung untuk perancangan dan perencanaan masih belum ada<br>3. Belum ada usulan dari UPTD untuk pengerjaan FS<br>4. Perlu dibedakan antara pelabuhan laut atau pelabuhan penyebrangan, karena ada perbedaan kewenangan<br>5. Pelabuhan Sibetik masih A2 dan |

| No | Rancangan Awal Renja K/L | | | | Usulan Daerah | | | | Dukungan Kesiapan Daerah | | Kesepakatan | Catatan Pembahasan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kementerian/ Lembaga | Program | Kegiatan | Rincian Output | Prov/ Kab/Kota | Usulan Proyek | Target | Lokasi | Sub Kegiatan | Uraian Dukungan | | |
| | | | | | | | | | | | | merupakan lokasi rencana pelabuhan, jika sudah ada FS dan DED dimohon untuk disampaikan ke Direktorat Kepelabuhanan Kemenhub untuk mendapatkan rekomendasi<br>Direktorat Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan<br>1. Jika merupakan pelabuhan penyebrangan, masih belum masuk dalam perencanaan<br>2. Diusulkan dalam review RIPN dimunculkan kedalam rencana pelabuhan<br>3. Akses lahan dan akses jalan perlu dipastikan kembali<br>4. Pembangunan pelabuhan baru dibutuhkan dokumen Rencana Induk Pelabuhan (RIP)<br>Bangda, Kementerian Dalam Negeri:<br>1. Perlu ada sinkronisasi program antara daerah dan pusat<br>2. Disarankan dari Dinas Perhubungan Provinsi untuk mencantumkan usulan pelabuhan dalam Renja Dinas Perhubungan, supaya nantinya dapat masuk dalam Renja Kementerian/Lembaga |

PRIORITAS NASIONAL : Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
PROGRAM PRIORITAS : Infrastruktur Ekonomi
KEGIATAN PRIORITAS : Konektivitas Jalan
PROYEK PRIORITAS : Preservasi Jalan Nasional (termasuk Peningkatan/Pelebaran)
MAJOR PROJECT :
ISU STRATEGIS PROVINSI : Belum meratanya layanan infrastruktur dasar di seluruh wilayah

| No | Rancangan Awal Renja K/L | | | | Usulan Daerah | | | | Dukungan Kesiapan Daerah | | Kesepakatan | Catatan Pembahasan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kementerian/ Lembaga | Program | Kegiatan | Rincian Output | Prov/ Kab/Kota | Usulan Proyek | Target | Lokasi | Sub Kegiatan | Uraian Dukungan | | |
| 1, | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Infrastruktur Ekonomi | Konektivitas Jalan | Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 009 - Peningkatan (2 Jalur) Jalan Nasional Ruas Jalan Air Bara-Toboali (Jeriji-Gadung) | 10 | 1905 - Kab. Bangka Selatan | | Terlampir | Ditolak | Kesepakatan:<br>Ditolak, dengan catatan ruas yang diusulkan berbeda dengan preservasi jalan dan jembatan yang disetujui (Ruas Namang - Koba - Batas Kab. Bangka Tengah/Bangka Selatan Air Bara - Toboali - Sadai dibiayai oleh SBSN)<br>Dinas PUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:<br>1. Peningkatan 2 jalur Ruas Jalan Air Bara - Toboali merupakan kewenangan pusat dan merupakan jalan akses menuju KI Sadai<br>BPIW, Kementerian PUPR:<br>1. Jalan merupakan pembangunan baru<br>2. Dalam Konreg sudah dibahas dan diarahkan untuk Preservasi Jalan dan Jembatan Namang - Koba - Batas Kab. Bangka Tengah/Bangka Selatan Air Bara - Toboali - Sadai<br>3. Ruas Namang - Koba - Batas Kab. Bangka Tengah/Bangka Selatan Air Bara - Toboali - Sadai disetujui dan dibiayai oleh SBSN, dilanjutkan melalui forum Konreg<br>4. Preservasi Jalan dan Jembatan Namang - Koba - Batas Kab. Bangka panjangnya 7,09 km<br>5. Ruas yang diusulkan berbeda dengan preservasi jalan dan jembatan yang disetujui<br>Direktorat Transportasi, Bappenas:<br>1. Peningkatan jalan bisa dilihat terkait tingkat LHR menuju KI Sadai dan progress pengembangan KI Sadai |

PRIORITAS NASIONAL : Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
PROGRAM PRIORITAS : Infrastruktur Ekonomi
KEGIATAN PRIORITAS : Konektivitas Laut
PROYEK PRIORITAS : Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut

MAJOR PROJECT :
ISU STRATEGIS PROVINSI : Belum meratanya layanan infrastruktur dasar di seluruh wilayah

| No | Rancangan Awal Renja K/L | | | | Usulan Daerah | | | | Dukungan Kesiapan Daerah | | Kesepakatan | Catatan Pembahasan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kementerian/ Lembaga | Program | Kegiatan | Rincian Output | Prov/ Kab/Kota | Usulan Proyek | Target | Lokasi | Sub Kegiatan | Uraian Dukungan | | |

| No | Rancangan Awal Renja K/L | | | | Usulan Daerah | | | | Dukungan Kesiapan Daerah | | Kesepakatan | Catatan Pembahasan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kementerian/ Lembaga | Program | Kegiatan | Rincian Output | Prov/ Kab/Kota | Usulan Proyek | Target | Lokasi | Sub Kegiatan | Uraian Dukungan | | |
| 1, | Kementerian Perhubungan | Infrastruktur Ekonomi | Konektivitas Laut | Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Tanjung Ular | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 012 - Pengembangan Pelabuhan Tanjung Gudang Kabupaten Bangka | 1 | 1901 - Kab. Bangka | | 1.DED (TA.2022)<br>2.AMDAL(TA.2022)<br>3. SSID (TA. 2022) | Ditolak | Kesepakatan:<br>Ditolak, dengan catatan bukan kewenangan pemerintah pusat<br>Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:<br>1. Pelabuhan ini direncanakan mengggantikan Pelabuhan Pangkal Balam yang sudah tidak layak dikembangkan<br>2. Pelabuhan Tanjung Gudang merupakan Pelabuhan Pengumpul<br>Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:<br>1. Ada 2 pelabuhan andalan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Pelabuhan Pangkal Balam dan Pelabuhan Tanjung Gudang Belinyu<br>2. Pelabuhan Pangkal Balam masuk sungai dan ada jembatan, sehingga alur pelayaran tidak maksimal. Efektif pelabuhan hanya 7 jam dan 17 jam sisanya sedang surut (kapal tidak bisa masuk)<br>3. Pelabuhan Tanjung Gudang Belinyu diharapkan dapat mengakomodir kapal-kapal besar. Pelabuhan Tanjung Gudang menjadi kewenangan Kemenhub, namun opersionalisasinya oleh Pelindo<br>4. Provinsi kepulauan seharusnya memiliki pelabuhan besar skala utama<br>5. Diharapkan dari Kemenhub untuk mendorong Pelindo melakukan pengembangan pelabuhan<br>Direktorat Transportasi, Bappenas:<br>1. Pelabuhan milik Pelindo akan sulit untuk bisa masuk Renja K/L, namun nanti akan coba dikoordinasikan lebih lanjut dengan Pelindo<br>Direktorat Kepelabuhanan, Kementerian Perhubungan:<br>1. Pelabuhan Tanjung Gudang dalam RIPN disebut sebagai Pelabuhan |

| No | Rancangan Awal Renja K/L | | | | Usulan Daerah | | | | Dukungan Kesiapan Daerah | | Kesepakatan | Catatan Pembahasan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kementerian/ Lembaga | Program | Kegiatan | Rincian Output | Prov/ Kab/Kota | Usulan Proyek | Target | Lokasi | Sub Kegiatan | Uraian Dukungan | | |
| | | | | | | | | | | | | Belinyu<br>2. Pelabuhan Belinyu adalah milik Pelindo, untuk pengembangannya adalah hak dari Pelindo. Kemenhub tidak dapat mengakomodir karena sudah dikerjasamakan dengan Pelindo, untuk pengembangan dan pembangunan sepenuhnya menjadi kewenangan Pelindo |

PRIORITAS NASIONAL : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
PROGRAM PRIORITAS : Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan
KEGIATAN PRIORITAS : Peningkatan Produksi, Produktivitas, Standardisasi Mutu dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan
PROYEK PRIORITAS : Peningkatan Produksi Perikanan
MAJOR PROJECT :
ISU STRATEGIS PROVINSI : Belum meratanya layanan infrastruktur dasar di seluruh wilayah

| No | Rancangan Awal Renja K/L | | | | Usulan Daerah | | | | Dukungan Kesiapan Daerah | | Kesepakatan | Catatan Pembahasan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kementerian/ Lembaga | Program | Kegiatan | Rincian Output | Prov/ Kab/Kota | Usulan Proyek | Target | Lokasi | Sub Kegiatan | Uraian Dukungan | | |

| No | Rancangan Awal Renja K/L | | | | Usulan Daerah | | | | Dukungan Kesiapan Daerah | | Kesepakatan | Catatan Pembahasan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kementerian/ Lembaga | Program | Kegiatan | Rincian Output | Prov/ Kab/Kota | Usulan Proyek | Target | Lokasi | Sub Kegiatan | Uraian Dukungan | | |
| 1, | Kementerian Kelautan dan Perikanan | Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan | Peningkatan Produksi, Produktivitas, Standardisasi Mutu dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan | Sarana penangkapan ikan yang tersalurkan | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 013 - Dermaga, Tempat Pelelangan Ikan (TPI Higienies), Jalan Lingkungan TPI, Groud Water Tank Kapasitas 5 mÂ³, Tower Air t. 10 m, Toilet. c. Bengkel Kapal & Perbaikan Jaring, Fasilitas Parkir, Land Mark. | 2 | 1904 - Kab. Bangka Tengah | | https://bit.ly/UsulanRakortekRenbangBangkaTengah2023 | Ditolak | Kesepakatan:<br>Ditolak<br>Dinas Perikanan Kab. Bangka Tengah:<br>1. Sudah ada DED, FS, dan tahun 2023 AMDAL sedang proses<br>2. Sudah melalukan audiensi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, alternatifnya bisa menggunakan DAK atau APBN<br>3. Lokasi usulan berada di Koba, Kab. Bangka Tengah<br>4. Ibukota Kab. Bangka Tengah pernah masuk dalam Rencana Induk Pelabuhan Perikanan, Kab. Bangka Tengah merupakan sentra nelayan. Nelayan kecil diberikan fasilitas berupa sarana prasarana.<br>5. Lahan sudah clean and clear (milik Pemda Kab. Bangka Tengah) seluar 4 Ha<br>6. Dokumen perencanaan sudah disiapkan, namun memang ada keterbatasan APBD<br>7. Sudah berkoordinasi dengan BWS Bangka Belitung terkait dengan Talud. Untuk Pelabuhan diharapkan bisa melalui APBN<br>Direktorat Kelautan dan Perikanan, Bappenas:<br>1. Dibutuhkan konfirmasi dari Pemerintah Daerah untuk lokasi ditujukan untuk pelabuhan atau sentra nelayan karena akan menentukan arah kebijkan. Jika pelahuban bisa disampaikan nama pelabuhan, namun jika sentra nelayan bisa disampaikan nama kampung/desa nelayan<br>2. Pelabuhan jika mengacu pada Renja 2023, ada RO untuk peningkatan fasilitas di pelabuhan perikanan UPT daerah. Namun, untuk Renja 2024 RO tersebut masih dibahas antara Bappenas dan Kementerian Keuangan |

| No | Rancangan Awal Renja K/L | | | | Usulan Daerah | | | | Dukungan Kesiapan Daerah | | Kesepakatan | Catatan Pembahasan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kementerian/ Lembaga | Program | Kegiatan | Rincian Output | Prov/ Kab/Kota | Usulan Proyek | Target | Lokasi | Sub Kegiatan | Uraian Dukungan | | |
| | | | | | | | | | | | | 3. Sektor Perikanan bisa didukung melalui DAK dan jika mengacu pada DAK 2023 terdapat menu untuk pembangunan atau rehabilitasi sarpras pelabuhan perikanan.<br>4. Usulan lebih dari satu, sebaiknya Dinas KP Kab. Bangka Tengah memilih prioritas usulan<br>Kementerian Kelautan dan Perikanan:<br>1. Pemerintah Kab. Bangka Tengah harus menentukan prioritas usulan<br>2. RO yang dipilih masih belum tepat<br>3. Dilihat dari detail usulan, lebih diusulkan untuk melalui Menu DAK |

PRIORITAS NASIONAL : Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
PROGRAM PRIORITAS : Infrastruktur Ekonomi
KEGIATAN PRIORITAS : Konektivitas Laut
PROYEK PRIORITAS : Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut
MAJOR PROJECT :
ISU STRATEGIS PROVINSI : Belum meratanya layanan infrastruktur dasar di seluruh wilayah

| No | Rancangan Awal Renja K/L | | | | Usulan Daerah | | | | Dukungan Kesiapan Daerah | | Kesepakatan | Catatan Pembahasan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kementerian/ Lembaga | Program | Kegiatan | Rincian Output | Prov/ Kab/Kota | Usulan Proyek | Target | Lokasi | Sub Kegiatan | Uraian Dukungan | | |

| No | Rancangan Awal Renja K/L | | | | Usulan Daerah | | | | Dukungan Kesiapan Daerah | | Kesepakatan | Catatan Pembahasan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kementerian/ Lembaga | Program | Kegiatan | Rincian Output | Prov/ Kab/Kota | Usulan Proyek | Target | Lokasi | Sub Kegiatan | Uraian Dukungan | | |
| 1, | Kementerian Perhubungan | Infrastruktur Ekonomi | Konektivitas Laut | Pengembangan Pelabuhan Tanjung Batu | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 011 - Pembangunan Pelabuhan Laut Dendang | 1 | 1906 - Kab. Belitung Timur | | Terlampir | Ditolak | Kesepakatan:<br>Ditolak, dengan catatan lahan belum siap<br>Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:<br>1. Pelabuhan ini akan dibangun di Kab. Belitung Timur<br>2. Manggar memiliki 2 pelabuhan, yaitu pelabuhan laut dan pelabuhan penyebrangan, namun pelabuhan tidak beroperasi karena sedimentasi.<br>3. Pra FS, FS, DED, AMDAL sudah dilakukan melalui APBD, namun saat rencana pembangunan teralihkan karena Pandemi Covid-19<br>4. Lahan sudah disertifikatkan, namun belum dihibahkan ke Kemenhub<br>5. Pelabuhan Dendang sudah ada pertemuan dari Dirjen dengan Bupati di Kementerian Perhubungan, ada beberapa yang belum terselesaikan (AMDAL masih proses, lahan menunggu kesepakatan dengan pihak swasta, dan studi sudah siap)<br>Direktorat Transportasi, Bappenas:<br>1. Pelabuhan Dendang sudah koordinasi intensif dengan Direktorat Transportasi dan Regional<br>2. Penyiapan dokumen harus dicek lagi dengan Direktorat Kepelabuhanan, Kemenhub dan kepastian jalan akses (masih ada milik swasta)<br>3. Direktorat Transportasi ikut mengawal, namun perlu rekomendasi teknis dari Direktorat Kepelabuhanan, Kemenhub<br>4. Pelabuhan sudah masuk concern Bappenas, namun untuk kesiapan dan rekomendasi teknis menunggu dari Kementerian Perhubungan<br>Direktorat Kepelabuhanan, Kementerian Perhubungan:<br>1. Sudah ada SID dan DED |

| No | Rancangan Awal Renja K/L | | | | Usulan Daerah | | | | Dukungan Kesiapan Daerah | | Kesepakatan | Catatan Pembahasan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kementerian/ Lembaga | Program | Kegiatan | Rincian Output | Prov/ Kab/Kota | Usulan Proyek | Target | Lokasi | Sub Kegiatan | Uraian Dukungan | | |
| | | | | | | | | | | | | 2. Sudah dilakukan sinkronisasi, sudah diakomodir namun karena kendala kemampuan fiskal<br>3. Daerah perlu berkoordinasi dengan UPTD terkait usulan Pelabuhan Dendang<br>4. Lahan belum dihibahkan ke Kemenhub, sehingga dalam pelaksanaannya menjadi terbatas<br>5. Perlu koordinasi lebih lanjut antara Pemerintah Daerah dan Direktorat Kepelabuhanan, Kementerian Perhubungan |

PRIORITAS NASIONAL : Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
PROGRAM PRIORITAS : Infrastruktur Ekonomi
KEGIATAN PRIORITAS : Konektivitas Laut
PROYEK PRIORITAS : Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut
MAJOR PROJECT :
ISU STRATEGIS PROVINSI : Perlu adanya transformasi struktur ekonomi dan diversifikasi sumber pendapatan

| No | Rancangan Awal Renja K/L | | | | Usulan Daerah | | | | Dukungan Kesiapan Daerah | | Kesepakatan | Catatan Pembahasan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kementerian/ Lembaga | Program | Kegiatan | Rincian Output | Prov/ Kab/Kota | Usulan Proyek | Target | Lokasi | Sub Kegiatan | Uraian Dukungan | | |
| 1, | Kementerian Perhubungan | Infrastruktur Ekonomi | Konektivitas Laut | Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Tanjung Ular | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 014 - Pembangunan Terminal Kargo Pelabuhan Tanjung Ular | 1 | 1903 - Kab. Bangka Barat | | - | Ditolak | Kesepakatan:<br>Ditolak, dengan catatan sudah terakomodir pada tahun 2022 melalui SBSN<br>Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:<br>1. Pelabuhan direncanakan untuk pengganti Pelabuhan Mentok (Pelabuhan Pengumpan Regional)<br>2. Pelabuhan Tanjung Ular sudah eksisting dan sudah beroperasi, namun masih membutuhkan fasilitas<br>Direktorat Transportasi, Bappenas:<br>1. Pelabuhan Tanjung Ular ada penanganan melalui SBSN Tahun 2022 dan diharapkan sudah selesai untuk |

| No | Rancangan Awal Renja K/L | | | | Usulan Daerah | | | | Dukungan Kesiapan Daerah | | Kesepakatan | Catatan Pembahasan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kementerian/ Lembaga | Program | Kegiatan | Rincian Output | Prov/ Kab/Kota | Usulan Proyek | Target | Lokasi | Sub Kegiatan | Uraian Dukungan | | |
| | | | | | | | | | | | | pembangunan terminal kargo<br>2. Untuk tahun 2023 ada penanganan prioritas bidang dan tahun 2024 untuk kelengkapan<br>Direktorat Kepelabuhanan, Kementerian Perhubungan:<br>1. Pembangunan Pelabuhan Tanjung Ular sudah selesai dengan SBSN Tahun 2022<br>2. Pembangunan Pelabuhan Tanjung Ular mendapat Ranking 1 pembangunan SBSN Tahun 2022 dan mendapat reward dari Kementerian Keuangan<br>3. KSOP Muntok untuk tahun 2023 mengusulkan untuk operasional wilayah kantor dan tahun 2024 tidak mengusulkan pembangunan Pelabuhan Tanjung Ular<br>4. Pengembangan sisi luar menuju Pelabuhan Tanjung Ular merupakan kewenangan provinsi |

PRIORITAS NASIONAL : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
PROGRAM PRIORITAS : Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi
KEGIATAN PRIORITAS : Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok
PROYEK PRIORITAS : Peningkatan Aksesibilitas, Amenitas, dan Atraksi, serta Daya Dukung Destinasi Pariwisata
MAJOR PROJECT : Destinasi Pariwisata Prioritas
ISU STRATEGIS PROVINSI : Perlu adanya transformasi struktur ekonomi dan diversifikasi sumber pendapatan

| No | Rancangan Awal Renja K/L | | | | Usulan Daerah | | | | Dukungan Kesiapan Daerah | | Kesepakatan | Catatan Pembahasan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kementerian/ Lembaga | Program | Kegiatan | Rincian Output | Prov/ Kab/Kota | Usulan Proyek | Target | Lokasi | Sub Kegiatan | Uraian Dukungan | | |

| No | Rancangan Awal Renja K/L | | | | Usulan Daerah | | | | Dukungan Kesiapan Daerah | | Kesepakatan | Catatan Pembahasan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kementerian/ Lembaga | Program | Kegiatan | Rincian Output | Prov/ Kab/Kota | Usulan Proyek | Target | Lokasi | Sub Kegiatan | Uraian Dukungan | | |
| 1, | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi | Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok | Desa Wisata di Wilayah Destinasi II yang Dikembangkan | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 015 - Pengembangan destinasi wisata geosite (UGG) Bukit Paramun | 1 | 1902 - Kab. Belitung | | - | Ditolak | Kesepakatan:<br>Ditolak, dengan catatan pada tahun 2023 telah mendapatkan alokasi DAK dan menunggu Kepmen untuk diserahkan kepada daerah<br>Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:<br>1. Usulan ditujukan untuk mendukung destinasi wisata Bukit Peramun<br>Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:<br>1. Dari BPPW Bangka Belitung untuk Bukit Peramun masuk dalam tahun 2024<br>Direktorat IPEK, Bappenas:<br>1. Perlu diperjelas terkait detail dukungan untuk destinasi wisata Bukit Peramun<br>2. Diarahkan untuk diusulkan melalui DAK Bidang Pariwisata<br>Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif:<br>1. Lahan harus clean and clear<br>2. Untuk DAK, master plan harus berasal dari DTW yang diusulkan, bukan menggunakan master plan dari IAD<br>3. Usulan terkait DTW Bukit Peramun pada tahun 2023 sudah mendapat DAK, namun masih menunggu surat keputusan Kepmen |

PRIORITAS NASIONAL : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
PROGRAM PRIORITAS : Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan Koperasi
KEGIATAN PRIORITAS : Peningkatan Kemitraan Usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar
PROYEK PRIORITAS : Penguatan Kapasitas Kelembagaan untuk Bermitra
MAJOR PROJECT : Pengelolaan Terpadu UMKM
ISU STRATEGIS PROVINSI : Perlu adanya transformasi struktur ekonomi dan diversifikasi sumber pendapatan

| No | Rancangan Awal Renja K/L | Usulan Daerah | Dukungan Kesiapan Daerah | Kesepakatan | Catatan Pembahasan |
|---|---|---|---|---|---|

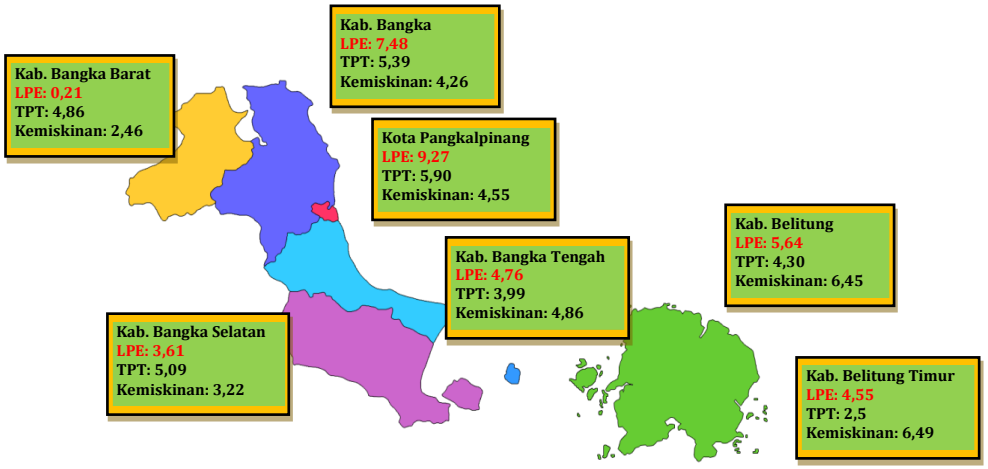
| | Kementerian/ Lembaga | Program | Kegiatan | Rincian Output | Prov/ Kab/Kota | Usulan Proyek | Target | Lokasi | Sub Kegiatan | Uraian Dukungan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, | Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah | Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan Koperasi | Peningkatan Kemitraan Usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar | Kebijakan sarana dan prasarana Factory Sharing UKM yang direkomendasikan | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 010 - Implementasi Produk HUB Olahan Hasil Laut | 1 | 1904 - Kab. Bangka Tengah | | Setatus lahan sudah clean and clear, DID diusulkan pelaksanaanya di Tahun 2023 | Dibahas lebih lanjut | Kesepakatan:<br>Dibahas lebih lanjut, dengan catatan daerah perlu menyampaikan proposal kepada Kementerian Koperasi dan UKM<br>Dinas Koperasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:<br>1. Usulan ditujukan untuk pembangunan Implementasi Produk HUB Olahan Hasil Laut<br>2. Pengembangan UMKM hasil laut dan rasio kerwirausahaan Kab. Bangka Tengah termasuk sangat tinggi<br>3. Diharapkan ada pembangunan produk olahan hasil laut<br>Direktorat PUMKMK, Bappenas:<br>1. Usulan bisa melalui Rumah Produksi Bersama, daerah bisa mengusulkan melalui prosposal<br>2. Rumah Produksi Bersama merupakan proyek prioritas dan akan dibahas lebih lanjut untuk tahun 2024, karena perlu melihat kesiapan daerah dan menyampaikan proposal<br>3. Rumah Produksi Bersama harus ada koperasi pengelola, daerah diharapkan sudah memiliki koperasi yang nantinya akan mengelola Rumah Produksi Bersama<br>4. Penentuan lokasi dan timeline pengusulan akan ditentukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM<br>Kementerian Koperasi dan UKM:<br>1. Rumah Produksi Bersama untuk tahun 2024 tidak untuk membangun baru, namun menggunakan bangunan yang sudah diberikan dari K/L yang sudah tidak berjalan, bantuan lebih ditujukan untuk bantuan peralatan<br>2. Usulan by proposal, untuk deadline belum ada informasi lebih lanjut dan bisa langsung diusulkan saja ke Kementerian Koperasi dan |

# BAB V
# ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

## 5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan kewilayahan Kabupaten/Kota tahun 2023 bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan kawasan terutama untuk daerah yang terpencil dan jauh. Percepatan pertumbuhan ekonomi di fokuskan pada pengembangan sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perikanan dan pariwisata yang dapat meningkatkan nilai tambah dan pendapatan, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan nilai perdagangan wilayah serta meningkatkan daya saing daerah. Fokus percepatan pertumbuhan kewilayahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan dengan mengembangkan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang di Kabupaten Belitung, Kawasan Industri (KI) Sadai di Kabupaten Bangka Selatan dan Kawasan Industri (KI) Tanjung Ular di Kabupaten Bangka Barat serta Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung Gunung di Kaabupaten Bangka Tengah dan Lintas Timur Pulau Bangka Di Kabupaten Bangka.

**Gambar V.I**
Perkembangan indikator Makro Pembangunan Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung




*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022(diolah)*

Pengembangan kewilayahan diharapkan mampu membangkitkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Berdasarkan peta diatas dari hasil capaian indikator makro tahun 2022, pengangguran tertinggi di Kota Pangkalpinang sebesar 5,90%; untuk tingkat kemiskinan tertinggi yaitu di Kabupaten Belitung Timur sebesar 6,49%, Oleh karena itu perlu adanya pengembangan wilayah agar perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat merata.

**Tabel V.1**
Perkembangan indikator Makro Pembangunan Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| Kabupaten/Kota | *Jobles* | *Poor* | IPM | RLS | UHH | *Stunting* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kab. Bangka | 5,39 | 4,26 | 72,95 | 8,27* | 71,37 | 1,34 |
| Kab. Belitung | 4,30 | 6,45 | 73,38 | 8,74* | 71,31 | 6,60 |
| Kab. Bangka Barat | 4,86 | 2,46 | 70,12 | 7,46* | 70,25 | 9,56 |
| Kab. Bangka Tengah | 3,99 | 4,86 | 71,40<br><br>71,40 | 7,22* | 71,82* | 2,83 |
| Kab. Bangka Selatan | 5,09 | 3,22 | 67,95 | 6,89* | 68,68* | 2,28 |
| Belitung Timur | 2,5 | 6,49 | 72,29 | 8,67* | 72,33* | 4,50 |
| Kota Pangkalpinang | 5,90 | 4,55 | 79,24 | 10,27* | 73,68* | 0,65 |
| **Provinsi Kep. Babel** | **4,77** | **4,61** | **72,24** | **8,11** | **70,98** | **3,45** |

**KETERANGAN**
1. Jobles : Pengangguran
2. Poor : Kemiskinan
3. IPM : Indeks Pembangunan Manusia
4. RLS : Rata-rata Lama Sekolah
5. AHH : Angka Harapan Hidup
6. Stunting

Dari hasil capaian indikator makro tahun 2020, 2021 dan 2022, pengangguran tertinggi di Kota Pangkalpinang sebesar 5,9%; Kemiskinan tertinggi di Kabupaten Belitung Timur sebesar 6,49%; Capaian IPM terendah di Kabupaten Bangka Selatan sebesar 67,95 dan angka stunting tertinggi di Kabupaten Bangka Barat sebesar 9,56%.

Prioritas pengembangan wilayah sesuai dengan Tema Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 yaitu *"**Penguatan Ekonomi Berkelanjutan melalui Pengembangan SDM dan Stabilitas Demokrasi**"* yang diarahkan pada pemulihan ekonomi dampak dari penyebaran virus Covid-19 melalui pengembangan potensi lokal yang dimiliki oleh masing-masing Kabupaten/Kota dan peningkatan pelaksanaan pelayanan dasar seperti penyaluran bantuan sosial dan jaringan pengaman nasional.

Perumusan kebijakan kewilayahan didasarkan pada faktor sosial dan ekonomi Kabupaten/Kota, yang meliputi pendidikan, kesehatan, jumlah penduduk miskin dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan kewilayahan ini merupakan keterpaduan pembangunan antar sektor guna menciptakan daya saing daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum, kebijakan pembangunan kewilayahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diarahkan pada :

1. Kota Pangkalpinang diarahkan sebagai Pengembangan Transportasi dan Pergudangan.
2. Kabupaten Bangka diarahkan dalam Pengembangan Perkebunan (Karet dan Sawit), Timah, serta makanan dan minuman.

3. Kabupaten Bangka Barat diarahkan untuk Pengembangan Industri Pengolahan Logam Timah; Pertambangan dan Penggalian, Pertanian ( sawit, hortikultura).
4. Kabupaten Bangka Tengah diarahkan dalam Pengembangan Pertambangan (mineral timah dan Pasir Kuarsa) dan Perdagangan besar dan Eceran.
5. Kabupaten Bangka Selatan diarahkan dalam pengembangan Pertanian (lumbung pangan dan Lada), pertambangan dan penggalian (timah).
6. Kabupaten Belitung diarahkan dalam pengembangan Pertanian (lada), Kehutanan, dan Perikanan (perikanan tangkap serta Budidaya KJA).
7. Kabupaten Belitung Timur diarahkan dalam pengembangan Pertanian (lada), Perikanan tangkap dan Budidaya (kakap merah, cumi, kepiting dan budidaya KJA), Pertambangan dan Penggalian (timah dan Kuarsa).

Berdasarkan gambar V.I maka uraian tentang prioritas dan fokus pembangunan wilayah pada masing-masing Kabupaten/Kota tahun 2024 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dijabarkan pada pembahasan di bawah ini.

**Tabel V.2**
Sasaran Pokok Provinsi dan Kabupaten/Kota
Tahun 2023-2026

| SASARAN POKOK | INDIKATOR | KONDISI AWAL 2021 | TARGET | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| Kesejahteraan Rakyat | 1. Kemiskinan (%) | | | | | | |
| | Kepulauan Bangka Belitung | 4,67 | 4,40 | 4,60 | 4,52 | 4,41 | 4,33 |
| | Pangkalpinang | 4,76 | 4,66 | 4,56 | 4,46 | 4,36 | 4,26 |
| | Bangka | 4,81 | 4,71 | 4,61 | 4,51 | 4,41 | 4,31 |
| | Bangka Tengah | 5,13 | 5,03 | 4,93 | 4,83 | 4,73 | 4,63 |
| | Bangka Barat | 2,75 | 2,65 | 2,55 | 2,45 | 2,35 | 2,25 |
| | Bangka Selatan | 3,69 | 3,59 | 3,49 | 3,39 | 3,29 | 3,19 |
| | Belitung | 7,15 | 7,05 | 6,95 | 6,85 | 6,75 | 6,65 |
| | Belitung Timur | 7,20 | 7,10 | 7,00 | 6,90 | 6,80 | 6,70 |
| | | | | | | | |
| | 2. Pengangguran (%) | | | | | | |
| | Kepulauan Bangka Belitung | 5,03 | 4,45 | 3,85 | 3,19 | 2,49 | 1,64 |
| | Pangkalpinang | 6,81 | 6,71 | 6,61 | 6,51 | 6,41 | 6,31 |
| | Bangka | 5,97 | 5,87 | 5,77 | 5,67 | 5,57 | 5,47 |

| SASARAN POKOK | INDIKATOR | KONDISI AWAL 2021 | TARGET | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| | Bangka Tengah | 4,95 | 4,85 | 4,75 | 4,65 | 4,55 | 4,45 |
| | Bangka Barat | 3,83 | 3,73 | 3,63 | 3,53 | 3,43 | 3,33 |
| | Bangka Selatan | 5,29 | 5,19 | 5,09 | 4,99 | 4,89 | 4,79 |
| | Belitung | 3,51 | 3,41 | 3,31 | 3,21 | 3,11 | 3,01 |
| | Belitung Timur | 3,78 | 3,68 | 3,58 | 3,48 | 3,38 | 3,28 |
| | | | | | | | |
| Meningkatnya ekonomi daerah | 3. Pertumbuhan PDRB (%) | | | | | | |
| | Kepulauan Bangka Belitung | 5,05 | 4,25 | 4,28 | 4,39 | 4,46 | 4,78 |
| | Pangkalpinang | 7,15 | 7,30 | 7,45 | 7,60 | 7,75 | 7,90 |
| | Bangka | 6,02 | 6,17 | 6,32 | 6,47 | 6,62 | 6,77 |
| | Bangka Tengah | 2,87 | 3,02 | 3,17 | 3,32 | 3,47 | 3,62 |
| | Bangka Barat | -1,08 | 1,00 | 1,15 | 1,30 | 1,45 | 1,60 |
| | Bangka Selatan | 2,45 | 2,60 | 2,75 | 2,90 | 3,05 | 3,20 |
| | Belitung | 4,29 | 4,40 | 4,59 | 4,74 | 4,89 | 5,04 |
| | Belitung Timur | 3,01 | 3,16 | 3,31 | 3,46 | 3,61 | 3,76 |
| | 4. Inflasi (%) | | | | | | |
| | Kepulauan Bangka Belitung | 3,75 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | Pangkalpinang | 3,60 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | Tanjung Pandan | 4,01 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM | 5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | DITAMBAH 0,25 | | | | | |
| | Kepulauan Bangka Belitung | 71,69 | | 71,91 | 72,13 | 72,35 | 72,57 |
| | Pangkalpinang | 78,57 | 78,82 | 79,07 | 79,32 | 79,57 | 79,82 |
| | Bangka | 72,46 | 72,71 | 72,96 | 73,21 | 73,46 | 73,71 |
| | Bangka Tengah | 70,89 | 71,14 | 71,39 | 71,64 | 71,89 | 72,14 |
| | Bangka Barat | 69,6 | 69,85 | 70,10 | 70,35 | 7,60 | 70,85 |
| | Bangka Selatan | 67,06 | 67,31 | 67,56 | 67,81 | 68,06 | 68,31 |
| | Belitung | 72,57 | 72,85 | 73,07 | 73,32 | 73,57 | 73,82 |
| | Belitung Timur | 71,42 | 71,67 | 71,92 | 72,17 | 72,42 | 72,67 |

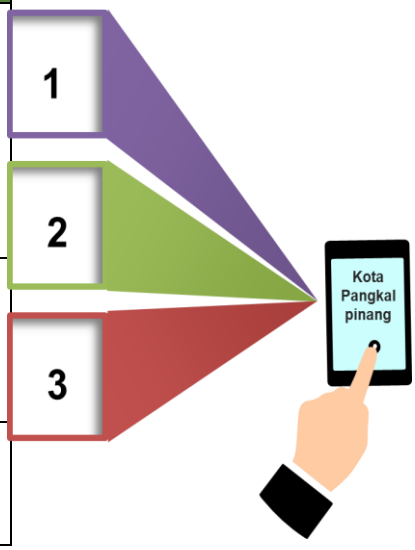
Sasaran pokok yang akan dicapai Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam rincian tabel diatas adalah penjabaran atas tujuan dan sasaran yang tercantum RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 20232-2026. Dikarenakan sasaran pokok dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah lebih merujuk pada dokumen RPJPD.

### 5.1.1. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Pangkalpinang

Pembangunan Kota Pangkalpinang difokuskan pada peningkatan kesempatan kerja dengan strategi dan arah kebijakan yakni (1) Peningkatan akses terhadap penciptaan lapangan kesempatan kerja, (2) Peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan serta peningkatan budaya, dan (3) Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja. Untuk fokus berikutnya pada peningkatan laju pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan dengan strategi dan arah kebijakan yakni (1) Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Produk dan (2) Pengendalian ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan atau Barang Penting, sedangkan untuk fokus pada peningkatan ketersediaan infrastruktur dengan strategi dan arah kebijakan yakni memerataan ketersediaan infrastruktur.

**Gambar V.2**
Sasaran Pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2024

| Strategi Dan Arah Kebijakan | Sasaran |
|---|---|
| ○ Peningkatan akses terhadap penciptaan lapangan kesempatan kerja<br>○ Peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan serta peningkatan budaya<br>○ Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja | Meningkatkan Kesempatan Kerja |
| ○ Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Produk<br>○ Pengendalian ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan atau Barang Penting | Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan |
| ○ Pemerataan ketersediaan infrastruktur | Meningkatnya ketersediaan infrastruktur |




**Tabel V.3**
Sasaran, Arah Kebijakan dan Program Prioritas di Kota Pangkalpinang Tahun 2024

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Prioritas Pembangunan Daerah : Pembangunan Ekonomi** | | | | | | |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Sasaran : Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan** | | | | **-4,62** | **4,94** | **5,55** | |
| **Indikator Sasaran : Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan** | | | | **-4,62** | **4,94** | **5,55** | |
| **Strategi : Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Produk dan Pengendalian ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan atau Barang Penting** | | | | | | | |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Produk** | | | | | | | |
| | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | Persentase Tertib Usaha | Bidang Perdagangan | 0 | 1 | 1 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Persentase Barang terdistribusi | Bidang Perdagangan | 0 | 0,84 | 0,88 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Nilai Indeks Keberdayaan Konsumen | Bidang Perdagangan | 0 % | 43 % | 44 % | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | Persentase Komoditi Potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku (UPTD BPSMB) | Bidang Perdagangan | 0 | 1 | 1 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | Persentase Fasilitasi Produk UMKM yang dipasarkan (UPTD RPK) | Bidang Perdagangan | 0 % | 40 % | 50 % | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | Persentase Produk Lokal yang digunakan, dipromosikan dan dipasarkan melalui Akses Pasar | Bidang Perdagangan | 0 | 0,65 | 0,75 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | Persentase Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan | | 2,00 % | 3,50 % | 4,00 % | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan | | 14,500 Triliyun Rp | 16,000 Triliyun Rp | 17,500 Triliyun Rp | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| **Arah Kebijakan : Pengendalian ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan atau Barang Penting** | | | | | | | |
| | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING | Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok | Bidang Perdagangan | 0 | 8,30 % | 8,00 % | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| **Prioritas Pembangunan Daerah : Pembangunan Wilayah** | | | | | | | |
| **Sasaran : Meningkatnya ketersediaan infrastruktur** | | | | | | | |
| **Indikator Sasaran :Persentase Ketersediaan Infrastruktur** | | | | | | | |
| **Strategi : Pemerataan ketersediaan infrastruktur** | | | | | | | |
| **Arah Kebijakan : Pemerataan ketersediaan infrastruktur** | | | | | | | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | - Rasio Jaringan Irigasi | BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0 % | 0 % | 0 % | DPUPRPERKIM |
| | | | BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0 | 0,0039 | 0,0056 | DPUPRPERKIM |
| | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Persentase Penyelenggaraan Pembinaan Teknis SDM dan | BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN | 0 % | 29 % | 29 % | DPUPRPERKIM |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi | PENATAAN RUANG | | | | |
| | | Persentase Readiness Criteria pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum | BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0 | 0,25 | 0,25 | DPUPRPERKIM |
| | | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak | BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0 | 0 | 0 | DPUPRPERKIM |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan | BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0 % | 100 % | 0 % | DPUPRPERKIM |
| | | Persentase Readiness Criteria pembangunan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional yang disiapkan | BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0 | 0 | 0 | DPUPRPERKIM |
| | | Persentase rumah tangga yang terlayani pengelolaan sampah | BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0 | 0 | 0,1 | DPUPRPERKIM |
| | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Persentase Readiness Criteria pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah yang disiapkan | BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0 % | 18 % | 27 % | DPUPRPERKIM |
| | | Persentase rumah tangga yang bersanitasi | BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0 | 0,06 | 0,06 | DPUPRPERKIM |
| | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Persentase Readiness Criteria pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang disiapkan | BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0 | 0,5 | 0 | DPUPRPERKIM |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Bidang Perhubungan | 0 | 0,2321 | 0,4 | Dinas Perhubungan |
| | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pelabuhan | Bidang Perhubungan | 0 % | 13.30 % | 25.00 % | Dinas Perhubungan |
| | | Predikat RB Perangkat Daerah (Dinas Perhubungan) | Bidang Perhubungan | - % | 0,51 | 0,6 | Dinas Perhubungan |
| | | Nilai RB Perangkat Daerah (Dinas Perhubungan) | Bidang Perhubungan | - % | 0,51 | 0,6 | Dinas Perhubungan |
| **Prioritas Pembangunan Daerah : Pemerataan Pendapatan Masyarakat** | | | | | | | |
| **Sasaran : Meningkatkan Kesempatan Kerja** | | | | **5,03** | **4,39** | **4,19** | |
| **Indikator Sasaran : Tingkat Pengangguran Terbuka** | | | | **5,03** | **4,39** | **4,19** | |

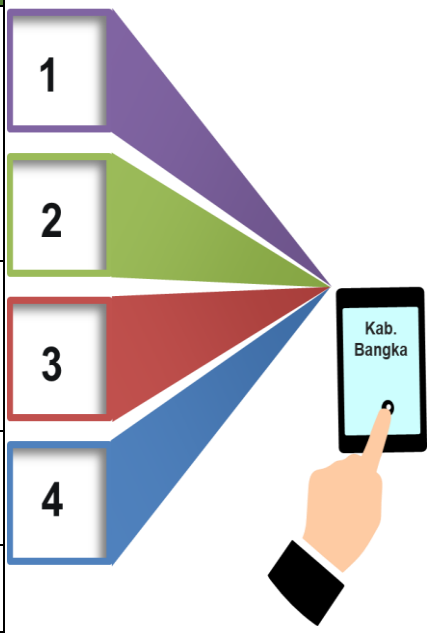
| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Strategi : meningkatkan akses terhadap penciptaan lapangan kesempatan kerja, kualitas hidup, peran perempuan dan anak serta memenuhi keadilan dan kesetaraan gender (KKG), kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan serta peningkatan budaya dan Kesejahteraan Tenaga Kerja** | | | | | | | |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan akses terhadap penciptaan lapangan kesempatan kerja** | | | | | | | |
| | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | Persentase dokumen Perencanaan Ketenagakerjaan kab/kota | Bidang Tenaga Kerja | 0 | 1 | 1 | Disnaker |
| | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Persentase Pencari kerja Yang Berkompeten | Bidang Tenaga Kerja | 0 | 0,0525 | 0,0575 | Disnaker |
| | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | Persentase Tenga Kerja Yang Ditempatkan | Bidang Tenaga Kerja | 0 | 0,05 | 0,05 | Disnaker |
| | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | Persentase Izin Usaha Simpan Pinjam yang Difasilitasi | Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 0 | 0,03 | 0,05 | DKUKM |
| | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Persentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa | Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 0 | 0,2 | 0,27 | DKUKM |
| | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | Persentase Kesehatan KSP/USP yang dinilai | Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 0 | 0,67 | 0,67 | DKUKM |
| | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Persentase SDM Koperasi, UKM yang Terlatih (BALATKOP KUKM) | Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 0 | 0,00277 | 0,00298 | DKUKM |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | Persentase Koperasi yang diberdayakan | Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 0 | 0,44 | 0,69 | DKUKM |
| | PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Persentase UMKM yang Diberdayakan | Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 0 | 0,51 % | 0,62 % | DKUKM |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Persentase Usaha Kecil Yang Meningkat Menjadi Usaha Menengah | Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 0 | 0,11 % | 0,13 % | DKUKM |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan serta peningkatan budaya** | | | | | | | |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Persentase Cabang Olahraga yang dibina | Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 0 persen | 61.11 persen | 69.44 persen | DIPARBUDKEPORA |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina | Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 0 organisasi | 35 organisasi | 35 organisasi | DIPARBUDKEPORA |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | Persentase tingkat keaktifan Organisasi Pramuka | Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 0 persen | 19.51 persen | 19.51 persen | DIPARBUDKEPORA |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Persentase Pemuda Yang dibina | Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 0 persen | 0.42 persen | 0.50 persen | DIPARBUDKEPORA |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja** | | | | | | | |
| | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN | Persentase perusahaan yang dilakukan pengawasan Norma Ketenagakerjaan | Bidang Tenaga Kerja | 0 | 0,175 | 0,225 | Disnaker |

### 5.1.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bangka

Pembangunan Kabupaten Bangka difokuskan pada empat sasaran utama yaitu: (1) Meningkatnya kesempatan kerja melalui strategi dan arah kebijakan peningkatan akses terhadap penciptaan lapangan kesempatan kerja; strategi dan arah kebijakan peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan serta peningkatan budaya; strategi dan arah kebijakan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja; (2) Laju pertumbuhan PDRB sub sektor pertanian melalui strategi dan arah kebijakan peningkatan produkifitas, kualitas dan daya saing produk pertanian; strategi dan arah kebijakan peningkatan kualitas SDM, standarisasi produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sub sektor pertanian; (3) Meningkatnya PDRB sub sektor perdagangan melalui strategi dan arah kebijakan peningkatan kualitas dan daya saing produk dan pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting; (4) Meningkatnya PDRB sub sektor pertambangan dan penggalian melalui strategi dan arah kebijakan peningkatan tata kelola sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan.

**Gambar V.3**
Sasaran Pembangunan Kabupaten Bangka Tahun 2024

| Strategi Dan Arah Kebijakan | Sasaran |
|---|---|
| ○ Peningkatan akses terhadap penciptaan lapangan kesempatan kerja;<br>○ Peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan serta peningkatan budaya;<br>○ Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja. | Meningkatkan Kesempatan Kerja |
| ○ Peningkatan Produkivitas, Kualitas dan Daya Saing Produk Pertanian;<br>○ Peningkatan Kualitas SDM, Standarisasi Produk dan Jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing Sub Sektor Pertanian . | Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian |
| ○ Penimgkatan Kualitas dan Daya Saing Produk dan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan atau Barang Penting | Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan |
| ○ Peningkatan Tata Kelola Sumber Daya Mineral yang Berwawasan Lingkungan. | Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian |




**Tabel V.4**
Sasaran, Arah Kebijakan dan Program Prioritas di Kabupaten Bangka Tahun 2024

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | Indikator Kinerja (Program/outcome ) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | |
| | | | | Target | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Prioritas Pembangunan Daerah : Pembangunan Ekonomi** | | | | | | |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome ) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 |
| **Sasaran : Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian** | | | | **7,78** | **4,23** | **4,60** | |
| **Indikator Sasaran : Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian** | | | | **7,78** | **4,23** | **4,60** | |
| **Strategi : Meningkatan Produkifitas, Kualitas dan Daya Saing Produk Pertanian serta sarana dan prasarana produksi , Nilai Tambah Produk serta Peningkatan Fungsi Kelembagaan Pertanian** | | | | | | | |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan Produkifitas, Kualitas dan Daya Saing Produk Pertanian** | | | | | | | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN | Persentase meningkatnya ketersediaan pangan utama (beras) | Bidang Pangan | 0 persen | 2,85 persen | 2,95 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | Bidang Pangan | 0 | 84,1 | 86,1 | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Menurunnya Daerah Rentan Rawan Pangan | Bidang Pangan | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | Persentase pangan yang aman dikonsumsi | Bidang Pangan | 0 persen | 86 persen | 86 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Dokumen Laporan Pengendalian dan Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim (DPI) | Bidang Pertanian | 0 Dok | 1 Dok | 1 Dok | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| | | Terkendalinya Bencana Pertanian | Bidang Pertanian | 0 persen | 3 persen | 3 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | Dokumen Perizinan Usaha Pertanian | Bidang Pertanian | 0 Dok | 1 Dok | 1 Dok | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Persentase peningkatan metode, teknologi informasi dan kelembagaan penyuluhan pertanian | Bidang Pertanian | 0 persen | 100 persen | 100 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular | Bidang Pertanian | 0 persen | 2 persen | 2 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan sarana dan prasarana produksi , Nilai Tambah Produk serta Peningkatan Fungsi Kelembagaan Pertanian** | | | | | | | |
| | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Peningkatan benih/bibit tanaman (pangan, horti, dan perkebunan) berlabel dan bersertifikat | Bidang Pertanian | 0 persen | 5 persen | 5 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| | | Persentase peningkatan luas tanam perkebunan | Bidang Pertanian | 0 persen | 2,5 persen | 2,5 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| | | Persentase peningkatan luas tanam Tanaman Pangan & Hortikultura (%) | Bidang Pertanian | 0 persen | 5 persen | 5 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| | | persentase peningkatan produksi benih bermutu | Bidang Pertanian | 0 persen | 5 persen | 10 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| | | Persentase terawasinya peredaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana | Bidang Pertanian | 0 persen | 100 persen | 100 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome ) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 |
| | | pendukung peningkatan produksi | | | | | |
| | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Rasio Ketersediaan Prasarana Pertanian prapanen | Bidang Pertanian | 0 persen | 15 persen | 15 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| | | | | | | | |
| | | Rasio ketersedian prasarana pertanian pasca panen | Bidang Pertanian | 0 persen | 5 persen | 5 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Persentase Pertambahan Angka Populasi Ternak | Bidang Pertanian | 0 persen | 5 persen | 5 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| **Sasaran : Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian** | | | | **-9,23** | **4,52** | **0,46** | |
| **Indikator Sasaran : Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian** | | | | **-9,23** | **4,52** | **0,46** | |
| **Strategi : Meningkatan tata kelola sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan.** | | | | | | | |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan tata kelola sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan.** | | | | | | | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN | Persentase Kepatuhan penataan izin air tanah (Cabdin ESDM Wilayah Bangka) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 % | 85 % | 90 % | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | | Persentase Kepatuhan penataan izin air tanah (DESDM) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 0,85 | 0,9 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA | Persentase pertambangan yang "good mining practices" (Cabdin ESDM Wilayah Bangka) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 % | 85 % | 85 % | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | | Persentase pertambangan yang "good mining practices" (Cabdin ESDM Wilayah Bangka Barat) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 0,85 | 0,85 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | | Persentase pertambangan yang "good mining practices" (Cabdin ESDM Wilayah Bangka Tengah dan Selatan) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 0,85 | 0,85 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | | Persentase pertambangan yang "good mining practices" (Cabdin ESDM Wilayah Belitung) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 0,85 | 0,85 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | | Persentase pertambangan yang "good mining practices" (Cabdin ESDM Wilayah Belitung Timur) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 0,85 | 0,85 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | | Persentase pertambangan yang "good mining practices" (DESDM) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 0,85 | 0,85 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN | Persentase Bauran Energi Terbarukan (DESDM) | Bidang Energi dan Sumber | 0 | 0,1298 | 0,1798 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome ) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 |
| | | | Daya Mineral | | | | |
| | | | | | | | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | Rasio Elektrifikasi (Cabdin ESDM Wilayah Bangka) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 % | 99.99 % | 99.99 % | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | | Rasio Elektrifikasi (Cabdin ESDM Wilayah Bangka Barat) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 99.99 % | 99.99 % | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | | Rasio Elektrifikasi (Cabdin ESDM Wilayah Bangka Tengah dan Selatan) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 99.99 % | 99.99 % | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | | Rasio Elektrifikasi (Cabdin ESDM Wilayah Belitung) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 99.99 % | 99.99 % | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | | Rasio Elektrifikasi (Cabdin ESDM Wilayah Belitung Timur) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 99.99 % | 99.99 % | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | | Rasio Elektrifikasi (DESDM) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 99.99 % | 99.99 % | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | | Terwujudnya Reformasi birokrasi | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 0,95 | 0,95 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | | Indeks Reformasi Birokrasi | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,9 | 0,9 | 0,9 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| **Sasaran : Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan** | | | | **-4,62** | **4,94** | **5,55** | |
| **Indikator Sasaran : Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan** | | | | **-4,62** | **4,94** | **5,55** | |
| **Strategi : Meningkatan Kualitas dan Daya Saing Produk dan Pengendalian ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan atau Barang Penting** | | | | | | | |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Produk** | | | | | | | |
| | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | Persentase Tertib Usaha | Bidang Perdagangan | 0 | 1 | 1 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Persentase Barang terdistribusi | Bidang Perdagangan | 0 | 0,84 | 0,88 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Nilai Indeks Keberdayaan Konsumen | Bidang Perdagangan | 0 % | 43 % | 44 % | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | Persentase Komoditi Potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku (UPTD BPSMB) | Bidang Perdagangan | 0 | 1 | 1 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | Persentase Fasilitasi Produk UMKM yang | Bidang Perdagangan | 0 % | 40 % | 50 % | DINAS PERINDUSTRIAN |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome ) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 |
| | | dipasarkan (UPTD RPK) | | | | | DAN PERDAGANGAN |
| | | Persentase Produk Lokal yang digunakan, dipromosikan dan dipasarkan melalui Akses Pasar | Bidang Perdagangan | 0 | 0,65 | 0,75 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | Persentase Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan | | 2,00 % | 3,50 % | 4,00 % | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan | | 14,500 Triliyun Rp | 16,000 Triliyun Rp | 17,500 Triliyun Rp | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| **Arah Kebijakan : Pengendalian ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan atau Barang Penting** | | | | | | | |
| | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING | Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok | Bidang Perdagangan | 0 | 8,30 % | 8,00 % | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| **Prioritas Pembangunan Daerah : Pemerataan Pendapatan Masyarakat** | | | | | | | |
| **Sasaran : Meningkatkan Kesempatan Kerja** | | | | **5,03** | **4,39** | **4,19** | |
| **Indikator Sasaran : Tingkat Pengangguran Terbuka** | | | | **5,03** | **4,39** | **4,19** | |
| **Strategi : meningkatan akses terhadap penciptaan lapangan kesempatan kerja, kualitas hidup, peran perempuan dan anak serta memenuhi keadilan dan kesetaraan gender (KKG), kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan serta peningkatan budaya dan Kesejahteraan Tenaga Kerja** | | | | | | | |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan akses terhadap penciptaan lapangan kesempatan kerja** | | | | | | | |
| | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | Persentase dokumen Perencanaan Ketenagakerjaan kab/kota | Bidang Tenaga Kerja | 0 | 1 | 1 | Disnaker |
| | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Persentase Pencari kerja Yang Berkompeten | Bidang Tenaga Kerja | 0 | 0,0525 | 0,0575 | Disnaker |
| | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | Persentase Tenga Kerja Yang Ditempatkan | Bidang Tenaga Kerja | 0 | 0,05 | 0,05 | Disnaker |
| | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | Persentase Izin Usaha Simpan Pinjam yang Difasilitasi | Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 0 | 0,03 | 0,05 | DKUKM |
| | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Persentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa | Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 0 | 0,2 | 0,27 | DKUKM |
| | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | Persentase Kesehatan KSP/USP yang dinilai | Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 0 | 0,67 | 0,67 | DKUKM |
| | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Persentase SDM Koperasi, UKM yang Terlatih (BALATKOP KUKM) | Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 0 | 0,00277 | 0,00298 | DKUKM |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | Persentase Koperasi yang diberdayakan | Bidang Koperasi, Usaha | 0 | 0,44 | 0,69 | DKUKM |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome ) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 |
| | | | Kecil dan Menengah | | | | |
| | PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Persentase UMKM yang Diberdayakan | Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 0 | 0,51 % | 0,62 % | DKUKM |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Persentase Usaha Kecil Yang Meningkat Menjadi Usaha Menengah | Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 0 | 0,11 % | 0,13 % | DKUKM |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan serta peningkatan budaya** | | | | | | | |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Persentase Cabang Olahraga yang dibina | Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 0 persen | 61.11 persen | 69.44 persen | DIPARBUDKEPORA |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina | Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 0 organisasi | 35 organisasi | 35 organisasi | DIPARBUDKEPORA |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | Persentase tingkat keaktifan Organisasi Pramuka | Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 0 persen | 19.51 persen | 19.51 persen | DIPARBUDKEPORA |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Persentase Pemuda Yang dibina | Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 0 persen | 0.42 persen | 0.50 persen | DIPARBUDKEPORA |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja** | | | | | | | |
| | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN | Persentase perusahaan yang dilakukan pengawasan Norma Ketenagakerjaan | Bidang Tenaga Kerja | 0 | 0,175 | 0,225 | Disnaker |

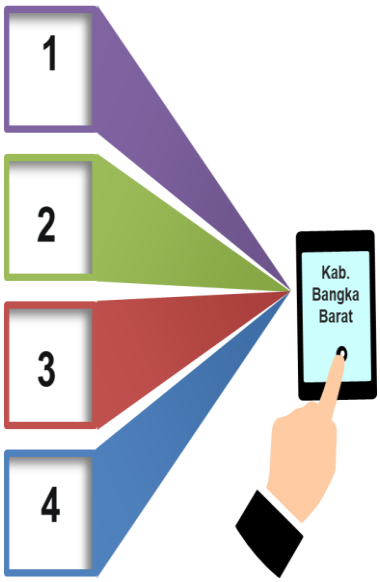
### 5.1.3. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bangka Barat

Pembangunan Kabupaten Bangka Barat difokuskan pada empat sasaran utama yaitu: (1) Meningkatnya pembangunan Manusia melalui strategi dan arah kebijakan Meningkatkan Akses pelayanan dan Mutu Pendidikan serta meningkatkan relevansi dan daya saing; Meningkatkan akses pelayanan dan kualitas kesehatan dengan memperkuat pelayanan dan sistem kesehatan. (2) meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian melalui strategi dan arah kebijakan Meningkatan Produkifitas, Kualitas dan Daya Saing Produk Pertanian serta dan sarana dan prasarana produksi , Nilai Tambah Produk serta Peningkatan Fungsi Kelembagaan Pertanian. (3) Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan melalui strategi dan arah kebijakan Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Serta Pembinaan Hubungan Industri dan Kesehatan Kerja; Peningkatan tata kelola industri dan nilai tambah produk. (4) Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian melalui strategi dan arah kebijakan Meningkatan tata kelola sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan.

**Gambar V.4**

Sasaran Pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024

| Strategi Dan Arah Kebijakan | Sasaran |
|---|---|
| ○ Meningkatkan Akses pelayanan dan Mutu Pendidikan serta meningkatkan relevansi dan daya saing;<br>○ Meningkatkan akses pelayanan dan kualitas kesehatan dengan memperkuat pelayanan dan sistem kesehatan. | Meningkatnya pembangunan Manusia |
| ○ Meningkatkan Produkifitas, Kualitas dan Daya Saing Produk Pertanian serta dan sarana dan prasarana produksi , Nilai Tambah Produk serta Peningkatan Fungsi Kelembagaan Pertanian | Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian |
| ○ Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Serta Pembinaan Hubungan Industri dan Kesehatan Kerja<br>○ Peningkatan tata kelola industri dan nilai tambah produk | Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan |
| ○ Meningkatkan tata kelola sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan. | Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian |




**Tabel V.5**

Sasaran, Arah Kebijakan dan Program Prioritas di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Prioritas Pembangunan Daerah: Pembangunan Ekonomi** | | | | | | |
| **Sasaran : Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian** | | | **7,78** | **4,23** | **4,60** | |
| **Indikator Sasaran : Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian** | | | **7,78** | **4,23** | **4,60** | |
| **Strategi : Meningkatan Produkifitas, Kualitas dan Daya Saing Produk Pertanian serta sarana dan prasarana produksi , Nilai Tambah Produk serta Peningkatan Fungsi Kelembagaan Pertanian** | | | | | | |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan Produkifitas, Kualitas dan Daya Saing Produk Pertanian** | | | | | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN | Persentase meningkatnya ketersediaan pangan utama (beras) | Bidang Pangan | 0 persen | 2,85 persen | 2,95 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | Bidang Pangan | 0 | 84,1 | 86,1 | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Menurunnya Daerah Rentan Rawan Pangan | Bidang Pangan | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | Persentase pangan yang aman dikonsumsi | Bidang Pangan | 0 persen | 86 persen | 86 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Dokumen Laporan Pengendalian dan Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim (DPI) | Bidang Pertanian | 0 Dok | 1 Dok | 1 Dok | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 |
| | Terkendalinya Bencana Pertanian | Bidang Pertanian | 0 persen | 3 persen | 3 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | Dokumen Perizinan Usaha Pertanian | Bidang Pertanian | 0 Dok | 1 Dok | 1 Dok | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Persentase peningkatan metode, teknologi informasi dan kelembagaan penyuluhan pertanian | Bidang Pertanian | 0 persen | 100 persen | 100 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular | Bidang Pertanian | 0 persen | 2 persen | 2 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan sarana dan prasarana produksi , Nilai Tambah Produk serta Peningkatan Fungsi Kelembagaan Pertanian** | | | | | | |
| PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Peningkatan benih/bibit tanaman (pangan, horti, dan perkebunan) berlabel dan bersertifikat | Bidang Pertanian | 0 persen | 5 persen | 5 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| | Persentase peningkatan luas tanam perkebunan | Bidang Pertanian | 0 persen | 2,5 persen | 2,5 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| | Persentase peningkatan luas tanam Tanaman Pangan & Hortikultura (%) | Bidang Pertanian | 0 persen | 5 persen | 5 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| | persentase peningkatan produksi benih bermutu | Bidang Pertanian | 0 persen | 5 persen | 10 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| | Persentase terawasinya peredaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung peningkatan produksi | Bidang Pertanian | 0 persen | 100 persen | 100 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Rasio Ketersediaan Prasarana Pertanian prapanen | Bidang Pertanian | 0 persen | 15 persen | 15 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| | Rasio ketersedian prasarana pertanian pasca panen | Bidang Pertanian | 0 persen | 5 persen | 5 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Persentase Pertambahan Angka Populasi Ternak | Bidang Pertanian | 0 persen | 5 persen | 5 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| **Sasaran : Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian** | | | **-9,23** | **4,52** | **0,46** | |
| **Indikator Sasaran : Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian** | | | **-9,23** | **4,52** | **0,46** | |
| **Strategi : Meningkatan tata kelola sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan.** | | | | | | |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan tata kelola sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan.** | | | | | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN | Persentase Kepatuhan penataan izin air tanah (Cabdin ESDM Wilayah Bangka) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 % | 85 % | 90 % | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | Persentase Kepatuhan penataan izin air tanah (DESDM) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 0,85 | 0,9 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 |
| PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA | Persentase pertambangan yang "good mining practices" (Cabdin ESDM Wilayah Bangka) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 % | 85 % | 85 % | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | Persentase pertambangan yang "good mining practices" (Cabdin ESDM Wilayah Bangka Barat) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 0,85 | 0,85 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | Persentase pertambangan yang "good mining practices" (Cabdin ESDM Wilayah Bangka Tengah dan Selatan) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 0,85 | 0,85 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | Persentase pertambangan yang "good mining practices" (Cabdin ESDM Wilayah Belitung) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 0,85 | 0,85 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | Persentase pertambangan yang "good mining practices" (Cabdin ESDM Wilayah Belitung Timur) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 0,85 | 0,85 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | Persentase pertambangan yang "good mining practices" (DESDM) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 0,85 | 0,85 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN | Persentase Bauran Energi Terbarukan (DESDM) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 0,1298 | 0,1798 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | Rasio Elektrifikasi (Cabdin ESDM Wilayah Bangka) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 % | 99.99 % | 99.99 % | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | Rasio Elektrifikasi (Cabdin ESDM Wilayah Bangka Barat) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 99.99 % | 99.99 % | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | Rasio Elektrifikasi (Cabdin ESDM Wilayah Bangka Tengah dan Selatan) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 99.99 % | 99.99 % | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | Rasio Elektrifikasi (Cabdin ESDM Wilayah Belitung) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 99.99 % | 99.99 % | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | Rasio Elektrifikasi (Cabdin ESDM Wilayah Belitung Timur) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 99.99 % | 99.99 % | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | Rasio Elektrifikasi (DESDM) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 99.99 % | 99.99 % | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | Terwujudnya Reformasi birokrasi | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 0,95 | 0,95 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | Indeks Reformasi Birokrasi | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,9 | 0,9 | 0,9 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| **Sasaran : Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan** | | | **-5,64** | **3,25** | **4,55** | |
| **Indikator Sasaran : Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan** | | | **-5,64** | **3,25** | **4,55** | |
| **Strategi : Meningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Serta Pembinaan Hubungan Industri dan Kesehatan Kerja dan tata kelola industri dan nilai tambah produk** | | | | | | |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Serta Pembinaan Hubungan Industri dan Kesehatan Kerja** | | | | | | |
| PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | Persentase perusahaan yang telah memiliki sarana hubungan industrial | Bidang Tenaga Kerja | 0 | 0,029 | 0,032 | Disnaker |
| PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Persentase Pencari kerja Yang Berkompeten | Bidang Tenaga Kerja | 0 | 0,0525 | 0,0575 | Disnaker |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan tata kelola industri dan nilai tambah produk** | | | | | | |
| PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Persentase Fasilitasi Layanan Desain dan Kemasan Produk UMKM yang Diproduksi (UPTD RPK) | Bidang Perindustrian | 0 % | 60 % | 70 % | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | Persentase Pertumbuhan Unit Usaha Industri | Bidang Perindustrian | 0 | 0,025 | 0,0275 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | ), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Kawasan Usaha Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Perusahaan Industri dan Kawasan Industri | Bidang Perindustrian | 0 % | 65 % | 75 % | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | Persentase Pengawasan dan Pengendalian Perusahaan Industri dan Kawasan Industri | Bidang Perindustrian | 0 | 0,55 | 0,65 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | Persentase Kepatuhan Perusahaan Industri dan Kawasan Industri pada Akun SIINas | Bidang Perindustrian | 0 | 0,85 | 0,95 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| **Prioritas Pembangunan Daerah : Pembangunan Sumber Daya Manusia** | | | | | | |
| **Sasaran : Meningkatnya Pembangunan Manusia** | | | **71,69** | **72,13** | **72,57** | |
| **Indikator Sasaran : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** | | | **71,69** | **72,13** | **72,57** | |
| **Strategi : Meningkatkan Akses pelayanan dan Mutu Pendidikan serta meningkatkan relevansi dan daya saing serta kualitas hidup, peran perempuan dan anak serta memenuhi keadilan dan kesetaraan gender (KKG)** | | | | | | |
| **Arah Kebijakan : Meningkatkan Akses pelayanan dan Mutu Pendidikan serta meningkatkan relevansi dan daya saing** | | | | | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | | Dinas Pendidikan |
| | persentase guru yang bersertifikat pendidik | Pendidikan | 0 | 65 | | Dinas Pendidikan |
| | Persentase Satuan Pendidikan Khusus terakreditasi A di cabdin V | Pendidikan | 0 persen | 100 persen | | Dinas Pendidikan |
| | Persentase Satuan Pendidikan Khusus terakreditasi A di Cabdin WIlayah III | Pendidikan | 0 persen | 100 persen | | Dinas Pendidikan |
| | Persentase Satuan Pendidikan Khusus | Pendidikan | 0 persen | 100 persen | | Dinas Pendidikan |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 |
| | terakreditasi A di Cabdin Wilayah IV | | | | | |
| | Persentase Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus terakreditasi A | Pendidikan | 0 persen | 100 persen | | Dinas Pendidikan |
| | Persentase Satuan Pendidikan pendidikan khusus terakreditasi A di Cabdin Wilayah I | Pendidikan | 0 persen | 100 persen | | Dinas Pendidikan |
| | Persentase Satuan Pendidikan pendidikan khusus terakreditasi A di Cabdin WIlayah II | Pendidikan | 0 persen | 100 persen | | Dinas Pendidikan |
| | Persentase Satuan Pendidikan SMA terakreditasi A | Pendidikan | 0 persen | 51,29 persen | | Dinas Pendidikan |
| | Persentase Satuan Pendidikan SMA terakreditasi A di Cabdin I | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | | Dinas Pendidikan |
| | Persentase Satuan Pendidikan SMA terakreditasi A di Cabdin Wilayah II | Pendidikan | 0 persen | 50 persen | | Dinas Pendidikan |
| | Persentase Satuan Pendidikan SMA terakreditasi A di Cabdin Wilayah III | Pendidikan | 0 persen | 83,3 persen | | Dinas Pendidikan |
| | Persentase Satuan Pendidikan SMA terakreditasi A di Cabdin WIlayah IV | Pendidikan | 0 persen | 44,4 persen | | Dinas Pendidikan |
| | Persentase Satuan Pendidikan SMA terakreditasi A di Cabdin Wilayah V | Pendidikan | 0 persen | 18,75 persen | | Dinas Pendidikan |
| | Persentase Satuan Pendidikan SMK terakreditasi A | Pendidikan | 0 persen | 73,6 persen | | Dinas Pendidikan |
| | Persentase Satuan Pendidikan SMK terakreditasi A di Cabdin I | Pendidikan | 0 persen | 80 persen | | Dinas Pendidikan |
| | Persentase Satuan Pendidikan SMK terakreditasi A di Cabdin WIlayah II | Pendidikan | 0 persen | 76,5 persen | | Dinas Pendidikan |
| | Persentase Satuan Pendidikan SMK terakreditasi A di Cabdin WIlayah III | Pendidikan | 0 persen | 42,9 persen | | Dinas Pendidikan |
| | Persentase Satuan Pendidikan SMK terakreditasi A di Cabdin Wilayah IV | Pendidikan | 0 persen | 90 persen | | Dinas Pendidikan |
| | Persentase Satuan Pendidikan SMK terakreditasi A di Cabdin Wilayah V | Pendidikan | 0 persen | 78,6 persen | | Dinas Pendidikan |
| | Proporsi Guru dan Siswa yang menguasai TIK | Pendidikan | 0 persen | 70 persen | | Dinas Pendidikan |
| PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Persentase lulusan SMA yang memiliki kompetensi TIK | Pendidikan | 0 persen | 73 persen | 80 persen | Dinas Pendidikan |
| | Persentase lulusan SMA yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin WIlayah I | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 70 persen | Dinas Pendidikan |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 |
| | Persentase lulusan SMA yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah II | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 70 persen | Dinas Pendidikan |
| | Persentase lulusan SMA yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah III | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 70 persen | Dinas Pendidikan |
| | Persentase lulusan SMA yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah IV | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 70 persen | Dinas Pendidikan |
| | Persentase lulusan SMA yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah V | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 70 persen | Dinas Pendidikan |
| | Persentase lulusan SMK yang memiliki kompetensi TIK | Pendidikan | 0 persen | 73 persen | 80 persen | Dinas Pendidikan |
| | Persentase lulusan SMK yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah I | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 70 persen | Dinas Pendidikan |
| | Persentase lulusan SMK yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah II | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 70 persen | Dinas Pendidikan |
| | Persentase lulusan SMK yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah III | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 70 persen | Dinas Pendidikan |
| | Persentase lulusan SMK yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah IV | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 70 persen | Dinas Pendidikan |
| | Persentase lulusan SMK yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah V | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 70 persen | Dinas Pendidikan |
| | Persentase lulusan SMK yang memiliki sertifikast kompetensi | Pendidikan | 0 persen | 68 persen | 75 persen | Dinas Pendidikan |
| | Persentase lulusan SMK yang terserap di DUDIKA | Pendidikan | 0 persen | 59 persen | 59 persen | Dinas Pendidikan |
| | Persentase siswa PK yang melanjutkan pendidikan di PTN dan PTS | Pendidikan | 0 persen | 6 persen | 10 persen | Dinas Pendidikan |
| | Persentase siswa SMA yang melanjutkan pendidikan di PTN dan PTS | Pendidikan | 0 persen | 55 persen | 65 persen | Dinas Pendidikan |
| PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Persentasi Perpustakaan Yang di Bina | Bidang Perpustakaan | 0 | 0,37 | 0,44 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | Jumlah Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno | Bidang Perpustakaan | 0 Dokumen | 5 Dokumen | 5 Dokumen | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | Persentase Berkas Arsip Yang Di Lindungi Dan Di Selamatkan Sesuai Dengan Ketentuan | Bidang Kearsipan | 0 | 0,25 | 0,25 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Kearsipan Sesuai Dengan Standart Baku Kearsipan | Bidang Kearsipan | 0 | 0,2 | 0,2 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 |
| PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP | Persentase Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup | Bidang Kearsipan | 0 | 12,50 % | 0,13 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan kualitas hidup, peran perempuan dan anak serta memenuhi keadilan dan kesetaraan gender (KKG)** | | | | | | |
| PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Persentase ARG pada Belanja Operasi dan belanja modal APBD | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 persen | 2.6 persen | 2.8 persen | DP3CASKB |
| PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Persentase kebijakan perlindungan perempuan | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 persen | 100 persen | 100 persen | DP3CASKB |
| | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 persen | 100 persen | 100 persen | DP3CASKB |
| PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 persen | 44.98 persen | 45.86 persen | DP3CASKB |
| PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Persentase peningkatan SDM dalam Pemenuhan Partisipasi ANAK | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 persen | 19.90 persen | 20.90 persen | DP3CASKB |
| PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 persen | 100 persen | 100 persen | DP3CASKB |
| | Persentase Peningkatan SDM Perlindungan Anak | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 persen | 33 persen | 37 persen | DP3CASKB |
| PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | Persentase capaian OPD yang menyediakan data pilah gender dan anak | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 persen | 92.59 persen | 96.29 persen | DP3CASKB |
| PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Persentase masyarakat yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk (KK, KTP, KIA) | Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0 persen | 89.8 persen | 93.27 persen | DP3CASKB |
| PROGRAM PENCATATAN SIPIL | Persentase masyarakat yang memiliki akta pencatatan sipil (Akta Lahir, Akta Mati, Akta Perkawinan) | Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0 persen | 89.5 persen | 96.50 persen | DP3CASKB |
| PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Persentase perangkat daerah dan sektor lain yang | Bidang Administrasi Kependudukan | 0 Persen | 37.14 Persen | 48.57 Persen | DP3CASKB |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 |
| | mengadakan pejanjian kerjasama | dan Pencatatan Sipil | | | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | Persentase penyediaan penyajian data kependudukan tingkat provinsi | Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0 persen | 100 persen | 100 persen | DP3CASKB |
| PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Persentase pembinaan Penyediaan dan pemanfaatan data kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga di kabupaten/kota | Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 persen | 71.42 persen | 100 persen | DP3CASKB |
| PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | persentase pembinaan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di kabupaten/kota | Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 persen | 100 persen | 100 persen | DP3CASKB |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | persentase pembinaan kampung KB | Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 persen | 63 persen | 84 persen | DP3CASKB |
| **Strategi : Meningkatkan akses pelayanan dan kualitas kesehatan dengan memperkuat pelayanan dan sistem kesehatan** | | | | | | |
| **Arah Kebijakan : Meningkatkan akses pelayanan dan kualitas kesehatan dengan memperkuat pelayanan dan sistem kesehatan** | | | | | | |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) | Kesehatan | 0 persen | 100 persen | 100 persen | Dinas Kesehatan |
| | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi minimal madya | Kesehatan | 0 fasyankes | 86 fasyankes | 88 fasyankes | Dinas Kesehatan |
| | Persentase pelaksanaan sinkronisasi penerapan standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan lintas kab/kota | Kesehatan | 0 persen | 100 persen | 100 persen | Dinas Kesehatan |
| | Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit | Kesehatan | 0 persen | 94 persen | 94 persen | Dinas Kesehatan |
| | Persentase peningkatan kesehatan masyarakat | Kesehatan | 0 persen | 87 persen | 89 persen | Dinas Kesehatan |
| | Persentase peningkatan pemeriksaan laboratorium kesehatan | Kesehatan | 0 persen | 100 persen | 100 persen | Dinas Kesehatan |
| | Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin essensial | Kesehatan | 0 persen | 87 persen | 88 persen | Dinas Kesehatan |

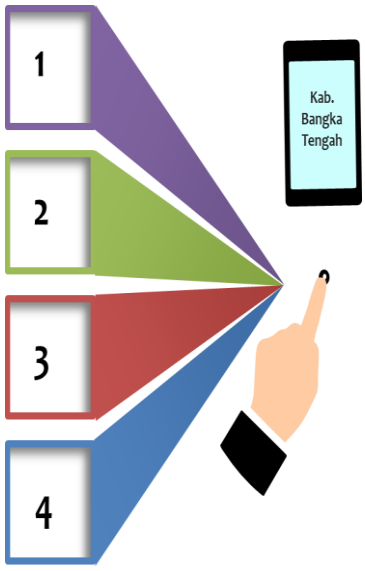
| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 |
| PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase tenaga kesehatan yang mendapatkan peningkatan kompetensi | Kesehatan | 0 persen | 87 persen | 88 persen | Dinas Kesehatan |
| PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Persentase sarana sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat | Kesehatan | 0 persen | 89 persen | 90 persen | Dinas Kesehatan |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) | Kesehatan | 0 persen | 88 persen | 89 persen | Dinas Kesehatan |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase Pemenuhan Layanan Kesehatan Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna | Kesehatan | 0 persen | 85 persen | 86 persen | RSUP |
| PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai klasifikasi Rumah Sakit tipe B | Kesehatan | 0 persen | 85 persen | 86 persen | RSUP |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan, kemitraan bidang kesehatan | Kesehatan | 0 persen | 100 persen | 100 persen | RSUP |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase fasilitas pelayanan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai kelas Rumah Sakit | Kesehatan | 0 persen | 82 persen | 85 persen | RUMAH SAKIT JIWA |
| | Persentase masyarakat ataupun perorangan yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa dan non jiwa | Kesehatan | 0 persen | 82 persen | 85 persen | RUMAH SAKIT JIWA |
| | Persentase masyarakat ataupun perorangan yang mendapat pelayanan penunjang | Kesehatan | 0 persen | 82 persen | 85 persen | RUMAH SAKIT JIWA |
| | Persentase masyarakat ataupun perseorangan yang mendapat penanganan penyalahgunaan NAPZA | Kesehatan | 0 persen | 82 persen | 82 persen | RUMAH SAKIT JIWA |
| PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase SDM kesehatan sesuai analisa beban kerja RS Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Kesehatan | 0 persen | 86 persen | 88 persen | RUMAH SAKIT JIWA |
| | Persentase SDM kesehatan yang mendapat pendidikan dan pelatihan | Kesehatan | 0 persen | 86 persen | 88 persen | RUMAH SAKIT JIWA |

### 5.1.4. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bangka Tengah

Pembangunan Kabupaten Bangka Tengah difokuskan pada tiga sasaran utama yaitu (1) Meningkatnya pembangunan Manusia melalui strategi dan arah kebijakan peningkatan Akses pelayanan dan Mutu Pendidikan serta meningkatkan relevansi dan daya saing dan peningkatan akses pelayanan dan kualitas kesehatan dengan memperkuat pelayanan dan sistem kesehatan. (2) Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian melalui strategi dan arah kebijakan Meningkatan tata kelola sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan. (3) Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan melalui strategi dan arah kebijakan Meningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Serta Pembinaan Hubungan Industri dan Kesehatan Kerja dan tata kelola industri dan nilai tambah produk. (4) Menurunkan tingkat kemiskinan melalui strategi dan arah kebijakan Peningkatan jangkauan pelayanan dan Rehsos yg berkualitas, Pengembangan Sistem Pemberdayaan dan Linjamsos dan Peningkatan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin.

**Gambar V.5**
Sasaran Pembangunan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

| Strategi Dan Arah Kebijakan | Sasaran |
|---|---|
| ○ Meningkatkan Akses pelayanan dan Mutu Pendidikan serta meningkatkan relevansi dan daya saing;<br>○ Meningkatkan akses pelayanan dan kualitas kesehatan dengan memperkuat pelayanan dan sistem kesehatan. | Meningkatnya pembangunan Manusia |
| ○ Meningkatkan tata kelola sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan. | Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian |
| ○ Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Produk dan Pengendalian ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan atau Barang Penting | Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan |
| ○ Peningkatan jangkauan pelayanan dan Rehsos yg berkualitas<br>○ Pengembangan Sistem Pemberdayaan dan Linjamsos<br>○ Peningkatan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin | Menurunkan tingkat kemiskinan |




**Tabel V.6**
Sasaran Arah Kebijakan dan Program Prioritas di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Prioritas Pembangunan Daerah : Pembangunan Ekonomi** | | | | | | |
| **Sasaran : Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian** | | | **-9,23** | **4,52** | **0,46** | |
| **Indikator Sasaran : Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian** | | | **-9,23** | **4,52** | **0,46** | |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 |
| **Strategi : Meningkatkan tata kelola sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan.** | | | | | | | |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan tata kelola sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan.** | | | | | | | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN | Persentase Kepatuhan penataan izin air tanah (Cabdin ESDM Wilayah Bangka) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 % | 85 % | 90 % | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | | Persentase Kepatuhan penataan izin air tanah (DESDM) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 0,85 | 0,9 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA | Persentase pertambangan yang "good mining practices" (Cabdin ESDM Wilayah Bangka) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 % | 85 % | 85 % | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | | Persentase pertambangan yang "good mining practices" (Cabdin ESDM Wilayah Bangka Barat) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 0,85 | 0,85 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | | Persentase pertambangan yang "good mining practices" (Cabdin ESDM Wilayah Bangka Tengah dan Selatan) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 0,85 | 0,85 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | | Persentase pertambangan yang "good mining practices" (Cabdin ESDM Wilayah Belitung) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 0,85 | 0,85 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | | Persentase pertambangan yang "good mining practices" (Cabdin ESDM Wilayah Belitung Timur) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 0,85 | 0,85 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | | Persentase pertambangan yang "good mining practices" (DESDM) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 0,85 | 0,85 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN | Persentase Bauran Energi Terbarukan (DESDM) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 0,1298 | 0,1798 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | Rasio Elektrifikasi (Cabdin ESDM Wilayah Bangka) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 % | 99.99 % | 99.99 % | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | | Rasio Elektrifikasi (Cabdin ESDM Wilayah Bangka Barat) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 99.99 % | 99.99 % | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | | Rasio Elektrifikasi (Cabdin ESDM Wilayah Bangka Tengah dan Selatan) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 99.99 % | 99.99 % | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | | Rasio Elektrifikasi (Cabdin ESDM Wilayah Belitung) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 99.99 % | 99.99 % | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | | Rasio Elektrifikasi (Cabdin ESDM Wilayah Belitung Timur) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 99.99 % | 99.99 % | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Rasio Elektrifikasi (DESDM) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 99.99 % | 99.99 % | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | | Terwujudnya Reformasi birokrasi | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 0,95 | 0,95 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | | Indeks Reformasi Birokrasi | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,9 | 0,9 | 0,9 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| **Sasaran : Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan** | | | | **-4,62** | **4,94** | **5,55** | |
| **Indikator Sasaran : Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan** | | | | **-4,62** | **4,94** | **5,55** | |
| **Strategi : Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Produk dan Pengendalian ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan atau Barang Penting** | | | | | | | |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Produk** | | | | | | | |
| | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | Persentase Tertib Usaha | Bidang Perdagangan | 0 | 1 | 1 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Persentase Barang terdistribusi | Bidang Perdagangan | 0 | 0,84 | 0,88 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Nilai Indeks Keberdayaan Konsumen | Bidang Perdagangan | 0 % | 43 % | 44 % | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | Persentase Komoditi Potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku (UPTD BPSMB) | Bidang Perdagangan | 0 | 1 | 1 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | Persentase Fasilitasi Produk UMKM yang dipasarkan (UPTD RPK) | Bidang Perdagangan | 0 % | 40 % | 50 % | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | Persentase Produk Lokal yang digunakan, dipromosikan dan dipasarkan melalui Akses Pasar | Bidang Perdagangan | 0 | 0,65 | 0,75 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | Persentase Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan | | 2,00 % | 3,50 % | 4,00 % | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan | | 14,500 Triliyun Rp | 16,000 Triliyun Rp | 17,500 Triliyun Rp | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| **Arah Kebijakan : Pengendalian ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan atau Barang Penting** | | | | | | | |
| | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING | Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok | Bidang Perdagangan | 0 | 8,30 % | 8,00 % | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| **Prioritas Pembangunan Daerah : Pembangunan Sumber Daya Manusia** | | | | | | | |
| **Tujuan : Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM** | | | | **71,69** | **72,13** | **72,57** | |
| **Indikator Tujuan : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** | | | | **71,69** | **72,13** | **72,57** | |
| **Sasaran : Meningkatnya Pembangunan Manusia** | | | | **71,69** | **72,13** | **72,57** | |
| **Indikator Sasaran : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** | | | | **71,69** | **72,13** | **72,57** | |
| **Strategi : Meningkatkan Akses pelayanan dan Mutu Pendidikan serta meningkatkan relevansi dan daya saing** | | | | | | | |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 |
| **serta kualitas hidup, peran perempuan dan anak serta memenuhi keadilan dan kesetaraan gender (KKG)** | | | | | | | |
| **Arah Kebijakan : Meningkatkan Akses pelayanan dan Mutu Pendidikan serta meningkatkan relevansi dan daya saing** | | | | | | | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | persentase guru yang bersertifikat pendidik | Pendidikan | 0 | 65 | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan Khusus terakreditasi A di cabdin V | Pendidikan | 0 persen | 100 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan Khusus terakreditasi A di Cabdin WIlayah III | Pendidikan | 0 persen | 100 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan Khusus terakreditasi A di Cabdin Wilayah IV | Pendidikan | 0 persen | 100 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus terakreditasi A | Pendidikan | 0 persen | 100 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan pendidikan khusus terakreditasi A di Cabdin Wilayah I | Pendidikan | 0 persen | 100 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan pendidikan khusus terakreditasi A di Cabdin WIlayah II | Pendidikan | 0 persen | 100 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan SMA terakreditasi A | Pendidikan | 0 persen | 51,29 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan SMA terakreditasi A di Cabdin I | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan SMA terakreditasi A di Cabdin Wilayah II | Pendidikan | 0 persen | 50 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan SMA terakreditasi A di Cabdin Wilayah III | Pendidikan | 0 persen | 83,3 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan SMA terakreditasi A di Cabdin WIlayah IV | Pendidikan | 0 persen | 44,4 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan SMA terakreditasi A di Cabdin Wilayah V | Pendidikan | 0 persen | 18,75 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan SMK terakreditasi A | Pendidikan | 0 persen | 73,6 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan SMK terakreditasi A di Cabdin I | Pendidikan | 0 persen | 80 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan SMK terakreditasi A di Cabdin WIlayah II | Pendidikan | 0 persen | 76,5 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan SMK | Pendidikan | 0 persen | 42,9 persen | | Dinas Pendidikan |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 |
| | | terakreditasi A di Cabdin WIlayah III | | | | | |
| | | Persentase Satuan Pendidikan SMK terakreditasi A di Cabdin Wilayah IV | Pendidikan | 0 persen | 90 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan SMK terakreditasi A di Cabdin Wilayah V | Pendidikan | 0 persen | 78,6 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Proporsi Guru dan Siswa yang menguasai TIK | Pendidikan | 0 persen | 70 persen | | Dinas Pendidikan |
| | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Persentase lulusan SMA yang memiliki kompetensi TIK | Pendidikan | 0 persen | 73 persen | 80 persen | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase lulusan SMA yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin WIlayah I | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 70 persen | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase lulusan SMA yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah II | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 70 persen | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase lulusan SMA yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah III | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 70 persen | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase lulusan SMA yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah IV | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 70 persen | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase lulusan SMA yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah V | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 70 persen | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase lulusan SMK yang memiliki kompetensi TIK | Pendidikan | 0 persen | 73 persen | 80 persen | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase lulusan SMK yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah I | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 70 persen | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase lulusan SMK yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah II | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 70 persen | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase lulusan SMK yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah III | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 70 persen | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase lulusan SMK yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah IV | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 70 persen | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase lulusan SMK yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah V | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 70 persen | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase lulusan SMK yang memiliki sertifikast kompetensi | Pendidikan | 0 persen | 68 persen | 75 persen | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase lulusan SMK yang terserap di DUDIKA | Pendidikan | 0 persen | 59 persen | 59 persen | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase siswa PK yang melanjutkan pendidikan di PTN dan PTS | Pendidikan | 0 persen | 6 persen | 10 persen | Dinas Pendidikan |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 |
| | | Persentase siswa SMA yang melanjutkan pendidikan di PTN dan PTS | Pendidikan | 0 persen | 55 persen | 65 persen | Dinas Pendidikan |
| | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Persentasi Perpustakaan Yang di Bina | Bidang Perpustakaan | 0 | 0,37 | 0,44 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | Jumlah Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno | Bidang Perpustakaan | 0 Dokumen | 5 Dokumen | 5 Dokumen | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | Persentase Berkas Arsip Yang Di Lindungi Dan Di Selamatkan Sesuai Dengan Ketentuan | Bidang Kearsipan | 0 | 0,25 | 0,25 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Kearsipan Sesuai Dengan Standart Baku Kearsipan | Bidang Kearsipan | 0 | 0,2 | 0,2 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP | Persentase Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup | Bidang Kearsipan | 0 | 12,50 % | 0,13 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan kualitas hidup, peran perempuan dan anak serta memenuhi keadilan dan kesetaraan gender (KKG)** | | | | | | | |
| | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Persentase ARG pada Belanja Operasi dan belanja modal APBD | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 persen | 2.6 persen | 2.8 persen | DP3CASKB |
| | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Persentase kebijakan perlindungan perempuan | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 persen | 100 persen | 100 persen | DP3CASKB |
| | | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 persen | 100 persen | 100 persen | DP3CASKB |
| | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 persen | 44.98 persen | 45.86 persen | DP3CASKB |
| | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Persentase peningkatan SDM dalam Pemenuhan Partisipasi ANAK | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 persen | 19.90 persen | 20.90 persen | DP3CASKB |
| | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 persen | 100 persen | 100 persen | DP3CASKB |
| | | Persentase Peningkatan SDM Perlindungan Anak | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan | 0 persen | 33 persen | 37 persen | DP3CASKB |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 |
| | | | Perlindungan Anak | | | | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | Persentase capaian OPD yang menyediakan data pilah gender dan anak | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 persen | 92.59 persen | 96.29 persen | DP3CASKB |
| | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Persentase masyarakat yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk (KK, KTP, KIA) | Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0 persen | 89.8 persen | 93.27 persen | DP3CASKB |
| | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | Persentase masyarakat yang memiliki akta pencatatan sipil (Akta Lahir, Akta Mati, Akta Perkawinan) | Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0 persen | 89.5 persen | 96.50 persen | DP3CASKB |
| | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Persentase perangkat daerah dan sektor lain yang mengadakan pejanjian kerjasama | Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0 Persen | 37.14 Persen | 48.57 Persen | DP3CASKB |
| | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | Persentase penyediaan penyajian data kependudukan tingkat provinsi | Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0 persen | 100 persen | 100 persen | DP3CASKB |
| | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Persentase pembinaan Penyediaan dan pemanfaatan data kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga di kabupaten/kota | Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 persen | 71.42 persen | 100 persen | DP3CASKB |
| | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | persentase pembinaan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di kabupaten/kota | Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 persen | 100 persen | 100 persen | DP3CASKB |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | persentase pembinaan kampung KB | Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 persen | 63 persen | 84 persen | DP3CASKB |
| **Strategi : Meningkatkan akses pelayanan dan kualitas kesehatan dengan memperkuat pelayanan dan sistem kesehatan** | | | | | | | |
| **Arah Kebijakan : Meningkatkan akses pelayanan dan kualitas kesehatan dengan memperkuat pelayanan dan sistem kesehatan** | | | | | | | |
| | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) | Kesehatan | 0 persen | 100 persen | 100 persen | Dinas Kesehatan |
| | | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi minimal madya | Kesehatan | 0 fasyankes | 86 fasyankes | 88 fasyankes | Dinas Kesehatan |
| | | Persentase pelaksanaan | Kesehatan | 0 persen | 100 persen | 100 persen | Dinas Kesehatan |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 |
| | | sinkronisasi penerapan standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan lintas kab/kota | | | | | |
| | | Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit | Kesehatan | 0 persen | 94 persen | 94 persen | Dinas Kesehatan |
| | | Persentase peningkatan kesehatan masyarakat | Kesehatan | 0 persen | 87 persen | 89 persen | Dinas Kesehatan |
| | | Persentase peningkatan pemeriksaan laboratorium kesehatan | Kesehatan | 0 persen | 100 persen | 100 persen | Dinas Kesehatan |
| | | Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin essensial | Kesehatan | 0 persen | 87 persen | 88 persen | Dinas Kesehatan |
| | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase tenaga kesehatan yang mendapatkan peningkatan kompetensi | Kesehatan | 0 persen | 87 persen | 88 persen | Dinas Kesehatan |
| | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Persentase sarana sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat | Kesehatan | 0 persen | 89 persen | 90 persen | Dinas Kesehatan |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) | Kesehatan | 0 persen | 88 persen | 89 persen | Dinas Kesehatan |
| | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase Pemenuhan Layanan Kesehatan Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna | Kesehatan | 0 persen | 85 persen | 86 persen | RSUP |
| | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai klasifikasi Rumah Sakit tipe B | Kesehatan | 0 persen | 85 persen | 86 persen | RSUP |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan, kemitraan bidang kesehatan | Kesehatan | 0 persen | 100 persen | 100 persen | RSUP |
| | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase fasilitas pelayanan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai kelas Rumah Sakit | Kesehatan | 0 persen | 82 persen | 85 persen | RUMAH SAKIT JIWA |
| | | Persentase masyarakat ataupun perorangan yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa dan non jiwa | Kesehatan | 0 persen | 82 persen | 85 persen | RUMAH SAKIT JIWA |
| | | Persentase masyarakat ataupun | Kesehatan | 0 persen | 82 persen | 85 persen | RUMAH SAKIT JIWA |

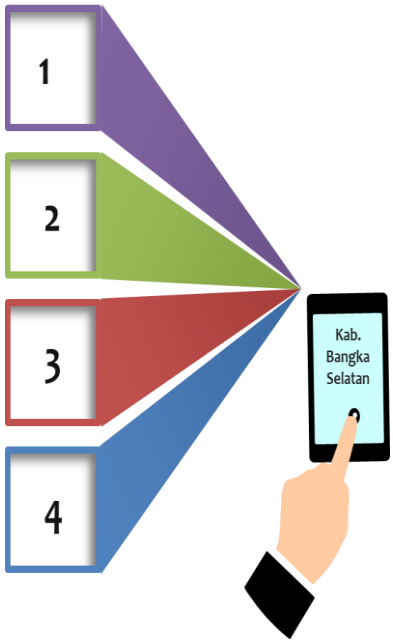
| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | perorangan yang mendapat pelayanan penunjang | | | | | |
| | | Persentase masyarakat ataupun perseorangan yang mendapat penanganan penyalahgunaan NAPZA | Kesehatan | 0 persen | 82 persen | 82 persen | RUMAH SAKIT JIWA |
| | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase SDM kesehatan sesuai analisa beban kerja RS Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Kesehatan | 0 persen | 86 persen | 88 persen | RUMAH SAKIT JIWA |
| | | Persentase SDM kesehatan yang mendapat pendidikan dan pelatihan | Kesehatan | 0 persen | 86 persen | 88 persen | RUMAH SAKIT JIWA |
| **Prioritas Pembangunan Daerah : Pembangunan Pendapatan Masyarakat** | | | | | | | |
| **Sasaran : Menurunkan Tingkat Kemiskinan** | | | | **4,67** | **4,20** | **4,01** | |
| **Indikator Sasaran : Persentase Angka Kemiskinan** | | | | **4,67** | **4,20** | **4,01** | |
| **Strategi : Meningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas, Pengembangan sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial, serta Peningkatan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin** | | | | | | | |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas** | | | | | | | |
| | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang di ditangani | BIDANG SOSIAL | 0 | 23,81 % | 1 | Dinsospemdes |
| | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase PMKS yang di Rehabilitasi sosial di Dalam Panti | BIDANG SOSIAL | 0 % | 22,58 % | 100 % | Dinsospemdes |
| | | Persentase PMKS yang di rehabilitasi sosial di dalam Panti Sosial Bina Laras Hijrah | BIDANG SOSIAL | 0 | 0,3 | 1 | Dinsospemdes |
| | | Persentase PMKS yang di Rehabilitasi Sosial di Dalam Panti Sosial Bina Serumpun | BIDANG SOSIAL | 0 | 0,2143 | 1 | Dinsospemdes |
| **Arah Kebijakan : Pengembangan sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial** | | | | | | | |
| | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial | BIDANG SOSIAL | 0 | 25,28 % | 1 | Dinsospemdes |
| | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Persentase TMP yang dikelola | BIDANG SOSIAL | 0 | 1 | 1 | Dinsospemdes |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin** | | | | | | | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Persentase PMKS/PSKS yg terberdayakan | BIDANG SOSIAL | 0 | 1 | 1 | Dinsospemdes |

### 5.1.5. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bangka Selatan

Pembangunan Kabupaten Bangka difokuskan pada empat sasaran utama yaitu (1) Meningkatnya pembangunan Manusia melalui strategi dan arah kebijakan Meningkatkan Akses pelayanan dan Mutu Pendidikan serta meningkatkan relevansi dan daya saing danMeningkatkan akses pelayanan dan kualitas kesehatan dengan memperkuat pelayanan dan sistem kesehatan. (2) Menurunkan Tingkat Kemiskinan melalui strategi dan arah kebijakan Meningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas, Pengembangan sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial, serta Peningkatan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin. (3) Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian melalui strategi dan arah kebijakan Peningkatan Produkifitas, Kualitas dan Daya Saing Produk Pertanian dan Peningkatan Kualitas SDM, Standarisasi Produk dan Jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sub sektor pertanian. (4) Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian melalui strategi dan arah kebijakan Meningkatan tata kelola sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan.

**Gambar V.6**
Sasaran Pembangunan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024

| Strategi Dan Arah Kebijakan | Sasaran |
|---|---|
| ○ Meningkatkan Akses pelayanan dan Mutu Pendidikan serta meningkatkan relevansi dan daya saing;<br>○ Meningkatkan akses pelayanan dan kualitas kesehatan dengan memperkuat pelayanan dan sistem kesehatan. | Meningkatnya pembangunan Manusia |
| ○ Meningkatkan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas, Pengembangan sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial, serta Peningkatan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin | Menurunkan Tingkat Kemiskinan |
| ○ Peningkatan Produkifitas, Kualitas dan Daya Saing Produk Pertanian<br>○ Peningkatan Kualitas SDM, Standarisasi Produk dan Jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sub sektor pertanian | Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian |
| ○ Meningkatkan tata kelola sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan. | Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian |




**Tabel V.7**
Sasaran. Arah Kebijakan dan Program Prioritas di Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | Indikator Kinerja (Program/ outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Prioritas Pembangunan Daerah : Pembangunan Ekonomi** | | | | | | |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | Indikator Kinerja (Program/ outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Sasaran : Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian** | | | **7,78** | **4,23** | **4,60** | |
| **Indikator Sasaran : Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian** | | | **7,78** | **4,23** | **4,60** | |
| **Strategi : Meningkatkan Produkifitas, Kualitas dan Daya Saing Produk Pertanian serta sarana dan prasarana produksi , Nilai Tambah Produk serta Peningkatan Fungsi Kelembagaan Pertanian** | | | | | | |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan Produkifitas, Kualitas dan Daya Saing Produk Pertanian** | | | | | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN | Persentase meningkatnya ketersediaan pangan utama (beras) | Bidang Pangan | 0 persen | 2,85 persen | 2,95 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | Bidang Pangan | 0 | 84,1 | 86,1 | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Menurunnya Daerah Rentan Rawan Pangan | Bidang Pangan | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | Persentase pangan yang aman dikonsumsi | Bidang Pangan | 0 persen | 86 persen | 86 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Dokumen Laporan Pengendalian dan Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim (DPI) | Bidang Pertanian | 0 Dok | 1 Dok | 1 Dok | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| | Terkendalinya Bencana Pertanian | Bidang Pertanian | 0 persen | 3 persen | 3 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | Dokumen Perizinan Usaha Pertanian | Bidang Pertanian | 0 Dok | 1 Dok | 1 Dok | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Persentase peningkatan metode, teknologi informasi dan kelembagaan penyuluhan pertanian | Bidang Pertanian | 0 persen | 100 persen | 100 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular | Bidang Pertanian | 0 persen | 2 persen | 2 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan sarana dan prasarana produksi , Nilai Tambah Produk serta Peningkatan Fungsi Kelembagaan Pertanian** | | | | | | |
| PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Peningkatan benih/bibit tanaman (pangan, horti, dan perkebunan) berlabel dan bersertifikat | Bidang Pertanian | 0 persen | 5 persen | 5 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| | Persentase peningkatan luas tanam perkebunan | Bidang Pertanian | 0 persen | 2,5 persen | 2,5 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| | Persentase peningkatan luas tanam Tanaman Pangan & Hortikultura (%) | Bidang Pertanian | 0 persen | 5 persen | 5 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| | persentase peningkatan produksi benih bermutu | Bidang Pertanian | 0 persen | 5 persen | 10 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| | Persentase terawasinya peredaran pupuk, pestisida, alsintan | Bidang Pertanian | 0 persen | 100 persen | 100 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | Indikator Kinerja (Program/ outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | dan sarana pendukung peningkatan produksi | | | | | |
| PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Rasio Ketersediaan Prasarana Pertanian prapanen | Bidang Pertanian | 0 persen | 15 persen | 15 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| | Rasio ketersedian prasarana pertanian pasca panen | Bidang Pertanian | 0 persen | 5 persen | 5 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Persentase Pertambahan Angka Populasi Ternak | Bidang Pertanian | 0 persen | 5 persen | 5 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| **Sasaran : Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian** | | | **-9,23** | **4,52** | **0,46** | |
| **Indikator Sasaran : Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian** | | | **-9,23** | **4,52** | **0,46** | |
| **Strategi : Meningkatkan tata kelola sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan.** | | | | | | |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan tata kelola sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan.** | | | | | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN | Persentase Kepatuhan penataan izin air tanah (Cabdin ESDM Wilayah Bangka) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 % | 85 % | 90 % | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | Persentase Kepatuhan penataan izin air tanah (DESDM) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 0,85 | 0,9 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA | Persentase pertambangan yang "good mining practices" (Cabdin ESDM Wilayah Bangka) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 % | 85 % | 85 % | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | Persentase pertambangan yang "good mining practices" (Cabdin ESDM Wilayah Bangka Barat) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 0,85 | 0,85 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | Persentase pertambangan yang "good mining practices" (Cabdin ESDM Wilayah Bangka Tengah dan Selatan) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 0,85 | 0,85 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | Persentase pertambangan yang "good mining practices" (Cabdin ESDM Wilayah Belitung) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 0,85 | 0,85 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | Persentase pertambangan yang "good mining practices" (Cabdin ESDM Wilayah Belitung Timur) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 0,85 | 0,85 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | Persentase pertambangan yang "good mining practices" (DESDM) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 0,85 | 0,85 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN | Persentase Bauran Energi Terbarukan (DESDM) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 0,1298 | 0,1798 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | Rasio Elektrifikasi (Cabdin ESDM Wilayah Bangka) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 % | 99.99 % | 99.99 % | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | Indikator Kinerja (Program/ outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Rasio Elektrifikasi (Cabdin ESDM Wilayah Bangka Barat) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 99.99 % | 99.99 % | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | Rasio Elektrifikasi (Cabdin ESDM Wilayah Bangka Tengah dan Selatan) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 99.99 % | 99.99 % | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | Rasio Elektrifikasi (Cabdin ESDM Wilayah Belitung) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 99.99 % | 99.99 % | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | Rasio Elektrifikasi (Cabdin ESDM Wilayah Belitung Timur) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 99.99 % | 99.99 % | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | Rasio Elektrifikasi (DESDM) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 99.99 % | 99.99 % | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | Terwujudnya Reformasi birokrasi | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 0,95 | 0,95 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | Indeks Reformasi Birokrasi | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,9 | 0,9 | 0,9 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| **Prioritas Pembangunan Daerah : Pembangunan Sumber Daya Manusia** | | | | | | |
| **Tujuan : Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM** | | | **71,69** | **72,13** | **72,57** | |
| **Indikator Tujuan : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** | | | **71,69** | **72,13** | **72,57** | |
| **Sasaran : Meningkatnya Pembangunan Manusia** | | | **71,69** | **72,13** | **72,57** | |
| **Indikator Sasaran : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** | | | **71,69** | **72,13** | **72,57** | |
| **Strategi : Meningkatkan Akses pelayanan dan Mutu Pendidikan serta meningkatkan relevansi dan daya saing serta kualitas hidup, peran perempuan dan anak serta memenuhi keadilan dan kesetaraan gender (KKG)** | | | | | | |
| **Arah Kebijakan : Meningkatkan Akses pelayanan dan Mutu Pendidikan serta meningkatkan relevansi dan daya saing** | | | | | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | | Dinas Pendidikan |
| | persentase guru yang bersertifikat pendidik | Pendidikan | 0 | 65 | | Dinas Pendidikan |
| | Persentase Satuan Pendidikan Khusus terakreditasi A di cabdin V | Pendidikan | 0 persen | 100 persen | | Dinas Pendidikan |
| | Persentase Satuan Pendidikan Khusus terakreditasi A di Cabdin WIlayah III | Pendidikan | 0 persen | 100 persen | | Dinas Pendidikan |
| | Persentase Satuan Pendidikan Khusus terakreditasi A di Cabdin Wilayah IV | Pendidikan | 0 persen | 100 persen | | Dinas Pendidikan |
| | Persentase Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus terakreditasi A | Pendidikan | 0 persen | 100 persen | | Dinas Pendidikan |
| | Persentase Satuan Pendidikan pendidikan khusus terakreditasi A di Cabdin Wilayah I | Pendidikan | 0 persen | 100 persen | | Dinas Pendidikan |
| | Persentase Satuan Pendidikan pendidikan khusus terakreditasi A di Cabdin WIlayah II | Pendidikan | 0 persen | 100 persen | | Dinas Pendidikan |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | Indikator Kinerja (Program/ outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 |
| | Persentase Satuan Pendidikan SMA terakreditasi A | Pendidikan | 0 persen | 51,29 persen | | Dinas Pendidikan |
| | Persentase Satuan Pendidikan SMA terakreditasi A di Cabdin I | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | | Dinas Pendidikan |
| | Persentase Satuan Pendidikan SMA terakreditasi A di Cabdin Wilayah II | Pendidikan | 0 persen | 50 persen | | Dinas Pendidikan |
| | Persentase Satuan Pendidikan SMA terakreditasi A di Cabdin Wilayah III | Pendidikan | 0 persen | 83,3 persen | | Dinas Pendidikan |
| | Persentase Satuan Pendidikan SMA terakreditasi A di Cabdin WIlayah IV | Pendidikan | 0 persen | 44,4 persen | | Dinas Pendidikan |
| | Persentase Satuan Pendidikan SMA terakreditasi A di Cabdin Wilayah V | Pendidikan | 0 persen | 18,75 persen | | Dinas Pendidikan |
| | Persentase Satuan Pendidikan SMK terakreditasi A | Pendidikan | 0 persen | 73,6 persen | | Dinas Pendidikan |
| | Persentase Satuan Pendidikan SMK terakreditasi A di Cabdin I | Pendidikan | 0 persen | 80 persen | | Dinas Pendidikan |
| | Persentase Satuan Pendidikan SMK terakreditasi A di Cabdin WIlayah II | Pendidikan | 0 persen | 76,5 persen | | Dinas Pendidikan |
| | Persentase Satuan Pendidikan SMK terakreditasi A di Cabdin WIlayah III | Pendidikan | 0 persen | 42,9 persen | | Dinas Pendidikan |
| | Persentase Satuan Pendidikan SMK terakreditasi A di Cabdin Wilayah IV | Pendidikan | 0 persen | 90 persen | | Dinas Pendidikan |
| | Persentase Satuan Pendidikan SMK terakreditasi A di Cabdin Wilayah V | Pendidikan | 0 persen | 78,6 persen | | Dinas Pendidikan |
| | Proporsi Guru dan Siswa yang menguasai TIK | Pendidikan | 0 persen | 70 persen | | Dinas Pendidikan |
| PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Persentase lulusan SMA yang memiliki kompetensi TIK | Pendidikan | 0 persen | 73 persen | 80 persen | Dinas Pendidikan |
| | Persentase lulusan SMA yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin WIlayah I | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 70 persen | Dinas Pendidikan |
| | Persentase lulusan SMA yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah II | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 70 persen | Dinas Pendidikan |
| | Persentase lulusan SMA yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah III | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 70 persen | Dinas Pendidikan |
| | Persentase lulusan SMA yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah IV | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 70 persen | Dinas Pendidikan |
| | Persentase lulusan SMA yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah V | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 70 persen | Dinas Pendidikan |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | Indikator Kinerja (Program/ outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Persentase lulusan SMK yang memiliki kompetensi TIK | Pendidikan | 0 persen | 73 persen | 80 persen | Dinas Pendidikan |
| | Persentase lulusan SMK yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah I | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 70 persen | Dinas Pendidikan |
| | Persentase lulusan SMK yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah II | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 70 persen | Dinas Pendidikan |
| | Persentase lulusan SMK yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah III | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 70 persen | Dinas Pendidikan |
| | Persentase lulusan SMK yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah IV | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 70 persen | Dinas Pendidikan |
| | Persentase lulusan SMK yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah V | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 70 persen | Dinas Pendidikan |
| | Persentase lulusan SMK yang memiliki sertifikast kompetensi | Pendidikan | 0 persen | 68 persen | 75 persen | Dinas Pendidikan |
| | Persentase lulusan SMK yang terserap di DUDIKA | Pendidikan | 0 persen | 59 persen | 59 persen | Dinas Pendidikan |
| | Persentase siswa PK yang melanjutkan pendidikan di PTN dan PTS | Pendidikan | 0 persen | 6 persen | 10 persen | Dinas Pendidikan |
| | Persentase siswa SMA yang melanjutkan pendidikan di PTN dan PTS | Pendidikan | 0 persen | 55 persen | 65 persen | Dinas Pendidikan |
| PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Persentasi Perpustakaan Yang di Bina | Bidang Perpustakaan | 0 | 0,37 | 0,44 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | Jumlah Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno | Bidang Perpustakaan | 0 Dokumen | 5 Dokumen | 5 Dokumen | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | Persentase Berkas Arsip Yang Di Lindungi Dan Di Selamatkan Sesuai Dengan Ketentuan | Bidang Kearsipan | 0 | 0,25 | 0,25 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Kearsipan Sesuai Dengan Standart Baku Kearsipan | Bidang Kearsipan | 0 | 0,2 | 0,2 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP | Persentase Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup | Bidang Kearsipan | 0 | 12,50 % | 0,13 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan kualitas hidup, peran perempuan dan anak serta memenuhi keadilan dan kesetaraan gender (KKG)** | | | | | | |
| PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Persentase ARG pada Belanja Operasi dan belanja modal APBD | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 persen | 2.6 persen | 2.8 persen | DP3CASKB |
| PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Persentase kebijakan | Bidang Pemberdayaan | 0 persen | 100 persen | 100 persen | DP3CASKB |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | Indikator Kinerja (Program/ outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 |
| | perlindungan perempuan | Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | |
| | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 persen | 100 persen | 100 persen | DP3CASKB |
| PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 persen | 44.98 persen | 45.86 persen | DP3CASKB |
| PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Persentase peningkatan SDM dalam Pemenuhan Partisipasi ANAK | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 persen | 19.90 persen | 20.90 persen | DP3CASKB |
| PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 persen | 100 persen | 100 persen | DP3CASKB |
| | Persentase Peningkatan SDM Perlindungan Anak | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 persen | 33 persen | 37 persen | DP3CASKB |
| PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | Persentase capaian OPD yang menyediakan data pilah gender dan anak | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 persen | 92.59 persen | 96.29 persen | DP3CASKB |
| PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Persentase masyarakat yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk (KK, KTP, KIA) | Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0 persen | 89.8 persen | 93.27 persen | DP3CASKB |
| PROGRAM PENCATATAN SIPIL | Persentase masyarakat yang memiliki akta pencatatan sipil (Akta Lahir, Akta Mati, Akta Perkawinan) | Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0 persen | 89.5 persen | 96.50 persen | DP3CASKB |
| PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Persentase perangkat daerah dan sektor lain yang mengadakan pejanjian kerjasama | Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0 Persen | 37.14 Persen | 48.57 Persen | DP3CASKB |
| PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | Persentase penyediaan penyajian data kependudukan tingkat provinsi | Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0 persen | 100 persen | 100 persen | DP3CASKB |
| PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Persentase pembinaan Penyediaan dan pemanfaatan data kependudukan, | Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 persen | 71.42 persen | 100 persen | DP3CASKB |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | Indikator Kinerja (Program/ outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | keluarga berencana dan pembangunan keluarga di kabupaten/kota | | | | | |
| PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | persentase pembinaan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di kabupaten/kota | Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 persen | 100 persen | 100 persen | DP3CASKB |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | persentase pembinaan kampung KB | Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 persen | 63 persen | 84 persen | DP3CASKB |
| **Strategi : Meningkatkan akses pelayanan dan kualitas kesehatan dengan memperkuat pelayanan dan sistem kesehatan** | | | | | | |
| **Arah Kebijakan : Meningkatkan akses pelayanan dan kualitas kesehatan dengan memperkuat pelayanan dan sistem kesehatan** | | | | | | |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) | Kesehatan | 0 persen | 100 persen | 100 persen | Dinas Kesehatan |
| | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi minimal madya | Kesehatan | 0 fasyankes | 86 fasyankes | 88 fasyankes | Dinas Kesehatan |
| | Persentase pelaksanaan sinkronisasi penerapan standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan lintas kab/kota | Kesehatan | 0 persen | 100 persen | 100 persen | Dinas Kesehatan |
| | Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit | Kesehatan | 0 persen | 94 persen | 94 persen | Dinas Kesehatan |
| | Persentase peningkatan kesehatan masyarakat | Kesehatan | 0 persen | 87 persen | 89 persen | Dinas Kesehatan |
| | Persentase peningkatan pemeriksaan laboratorium kesehatan | Kesehatan | 0 persen | 100 persen | 100 persen | Dinas Kesehatan |
| | Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin essensial | Kesehatan | 0 persen | 87 persen | 88 persen | Dinas Kesehatan |
| PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase tenaga kesehatan yang mendapatkan peningkatan kompetensi | Kesehatan | 0 persen | 87 persen | 88 persen | Dinas Kesehatan |
| PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Persentase sarana sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat | Kesehatan | 0 persen | 89 persen | 90 persen | Dinas Kesehatan |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase kabupaten/kota yang memiliki | Kesehatan | 0 persen | 88 persen | 89 persen | Dinas Kesehatan |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | Indikator Kinerja (Program/ outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) | | | | | |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase Pemenuhan Layanan Kesehatan Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna | Kesehatan | 0 persen | 85 persen | 86 persen | RSUP |
| | | | | | | |
| PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai klasifikasi Rumah Sakit tipe B | Kesehatan | 0 persen | 85 persen | 86 persen | RSUP |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan, kemitraan bidang kesehatan | Kesehatan | 0 persen | 100 persen | 100 persen | RSUP |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase fasilitas pelayanan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai kelas Rumah Sakit | Kesehatan | 0 persen | 82 persen | 85 persen | RUMAH SAKIT JIWA |
| | Persentase masyarakat ataupun perorangan yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa dan non jiwa | Kesehatan | 0 persen | 82 persen | 85 persen | RUMAH SAKIT JIWA |
| | Persentase masyarakat ataupun perorangan yang mendapat pelayanan penunjang | Kesehatan | 0 persen | 82 persen | 85 persen | RUMAH SAKIT JIWA |
| | Persentase masyarakat ataupun perseorangan yang mendapat penanganan penyalahgunaan NAPZA | Kesehatan | 0 persen | 82 persen | 82 persen | RUMAH SAKIT JIWA |
| PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase SDM kesehatan sesuai analisa beban kerja RS Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Kesehatan | 0 persen | 86 persen | 88 persen | RUMAH SAKIT JIWA |
| | Persentase SDM kesehatan yang mendapat pendidikan dan pelatihan | Kesehatan | 0 persen | 86 persen | 88 persen | RUMAH SAKIT JIWA |
| **Prioritas Pembangunan Daerah : Pembangunan Pendapatan Masyarakat** | | | | | | |
| **Sasaran : Menurunkan Tingkat Kemiskinan** | | | **4,67** | **4,20** | **4,01** | |
| **Indikator Sasaran : Persentase Angka Kemiskinan** | | | **4,67** | **4,20** | **4,01** | |
| **Strategi : Meningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas, Pengembangan sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial, serta Peningkatan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin** | | | | | | |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas** | | | | | | |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | Indikator Kinerja (Program/ outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 |
| PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang di ditangani | BIDANG SOSIAL | 0 | 23,81 % | 1 | Dinsospemdes |
| PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase PMKS yang di Rehabilitasi sosial di Dalam Panti | BIDANG SOSIAL | 0 % | 22,58 % | 100 % | Dinsospemdes |
| | Persentase PMKS yang di rehabilitasi sosial di dalam Panti Sosial Bina Laras Hijrah | BIDANG SOSIAL | 0 | 0,3 | 1 | Dinsospemdes |
| | Persentase PMKS yang di Rehabilitasi Sosial di Dalam Panti Sosial Bina Serumpun | BIDANG SOSIAL | 0 | 0,2143 | 1 | Dinsospemdes |
| **Arah Kebijakan : Pengembangan sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial** | | | | | | |
| PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial | BIDANG SOSIAL | 0 | 25,28 % | 1 | Dinsospemdes |
| PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Persentase TMP yang dikelola | BIDANG SOSIAL | 0 | 1 | 1 | Dinsospemdes |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin** | | | | | | |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Persentase PMKS/PSKS yg terberdayakan | BIDANG SOSIAL | 0 | 1 | 1 | Dinsospemdes |

### 5.1.6. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Belitung

Pembangunan Kabupaten Belitung difokuskan pada lima sasaran utama yaitu: (1) Menurunkan tingkat kemiskinan melalui strategi dan arah kebijakan peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas; strategi dan arah kebijakan pengembangan sistem pemberdayaan, perlindungan, dan jaminan sosial; strategi dan arah kebijakan peningkatan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin; (2) Meningkatnya pembangunan manusia melalui strategi dan arah kebijakan meningkatkan akses pelayanan dan mutu pendidikan serta meningkatkan relevansi dan daya saing serta kualitas hidup, peran perempuan dan anak serta memehuni keadilan dan kesetaraan gender (KKG); strategi dan arah kebijakan meningkatkan akses pelayanan dan kualitas kesehatan dengan memperkuat pelayanan dan sistem kesehatan; (3) Laju pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan melalui strategi dan arah kebijakan peningkatan sarana prasarana, produktifitas dan kualitas pengelolaan hasil perikanan tangkap dan perikanan budidaya; strategi dan arah kebijakan peningkatan kualitas SDM, standarisasi produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sub sektor perikanan; (4) Meningkatnya PDRB sub sektor pertanian melalui strategi dan arah kebijakan meningkatkan produktivitas, kualitas dan daya saing produk pertanian serta sarana dan prasarana produksi, nilai tambah produk serta peningkatan fungsi kelembagaan pertanian; (5) Meningkatkan pengendalian, lingkungan hidup melalui strategi dan arah kebijakan meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tata kelola kehutanan..

**Gambar V.7**
Sasaran Pembangunan Kabupaten Belitung Tahun 2024

| Strategi Dan Arah Kebijakan | Sasaran |
|---|---|
| ○ Peningkatan Jangkauan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial yang Berkualitas;<br>○ Pengembangan Sistem Pemberdayaan dan Linjamsos;<br>○ Peningkatan Pendapatan dan Mengurangi Beban Pengeluaran Penduduk Miskin. | Menurunkan Tingkat Kemiskinan |
| ○ Meningkatkan Akses Pelayanan dan Mutu Pendidikan serta Meningkatkan Relevansi dan Daya Saing serta Kualitas Hidup, Peran Perempuan dan Anak serta Memenuhi Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG);<br>○ Meningkatkan Akses Pelayanan dan Kualitas Kesehatan dengan Memperkuat Pelayanan dan Sistem Kesehatan. | Meningkatnya Pembangunan Manusia |
| ○ Peningkatan Sarana Prasarana, Produktivitas dan Kualitas Pengelolaan Hasil Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya;<br>○ Peningkatan Kualitas SDM, Standarisasi Produk dan Jasa KUKM dalam Meningkatkan Daya Saing Sub Sektor Perikanan. | Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan |
| ○ Meningkatkan Produkivitas, Kualitas dan Daya Saing Produk Pertanian serta dan Sarana dan Prasarana Produksi , Nilai Tambah Produk serta Peningkatan Fungsi Kelembagaan Pertanian. | Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian |
| ○ Meningkatkan Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Tata Kelola Kehutanan. | Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup |




**Tabel V.8**
Sasaran, Arah Kebijakan dan Program Prioritas di Kabupaten Belitung Tahun 2024

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Prioritas Pembangunan Daerah : Pembangunan Ekonomi** | | | | | | | |
| **Sasaran : Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian** | | | | 7,78 | 4,23 | 4,60 | |
| **Indikator Sasaran : Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian** | | | | 7,78 | 4,23 | 4,60 | |
| **Strategi : Meningkatan Produkifitas, Kualitas dan Daya Saing Produk Pertanian serta sarana dan prasarana produksi , Nilai Tambah Produk serta Peningkatan Fungsi Kelembagaan Pertanian** | | | | | | | |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan Produkifitas, Kualitas dan Daya Saing Produk Pertanian** | | | | | | | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN | Persentase meningkatnya ketersediaan pangan utama (beras) | Bidang Pangan | 0 persen | 2,85 persen | 2,95 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | Bidang Pangan | 0 | 84,1 | 86,1 | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Menurunnya Daerah Rentan Rawan Pangan | Bidang Pangan | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | Persentase pangan yang aman dikonsumsi | Bidang Pangan | 0 persen | 86 persen | 86 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Dokumen Laporan Pengendalian dan Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim (DPI) | Bidang Pertanian | 0 Dok | 1 Dok | 1 Dok | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| | | Terkendalinya Bencana Pertanian | Bidang Pertanian | 0 persen | 3 persen | 3 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | Dokumen Perizinan Usaha Pertanian | Bidang Pertanian | 0 Dok | 1 Dok | 1 Dok | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Persentase peningkatan metode, teknologi informasi dan kelembagaan penyuluhan pertanian | Bidang Pertanian | 0 persen | 100 persen | 100 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular | Bidang Pertanian | 0 persen | 2 persen | 2 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan sarana dan prasarana produksi , Nilai Tambah Produk serta Peningkatan Fungsi Kelembagaan Pertanian** | | | | | | | |
| | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Peningkatan benih/bibit tanaman (pangan, horti, dan perkebunan) berlabel dan bersertifikat | Bidang Pertanian | 0 persen | 5 persen | 5 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| | | Persentase peningkatan luas tanam perkebunan | Bidang Pertanian | 0 persen | 2,5 persen | 2,5 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| | | Persentase peningkatan luas tanam Tanaman Pangan & Hortikultura (%) | Bidang Pertanian | 0 persen | 5 persen | 5 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| | | persentase peningkatan produksi benih bermutu | Bidang Pertanian | 0 persen | 5 persen | 10 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| | | Persentase terawasinya peredaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung peningkatan produksi | Bidang Pertanian | 0 persen | 100 persen | 100 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Rasio Ketersediaan Prasarana Pertanian prapanen | Bidang Pertanian | 0 persen | 15 persen | 15 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| | | Rasio ketersedian prasarana pertanian pasca panen | Bidang Pertanian | 0 persen | 5 persen | 5 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Persentase Pertambahan Angka Populasi Ternak | Bidang Pertanian | 0 persen | 5 persen | 5 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| **Sasaran : Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perikanan** | | | | **-9,76** | **4,05** | **4,45** | |
| **Indikator Sasaran : Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan** | | | | **-9,76** | **4,05** | **4,45** | |
| **Strategi : Meningkatan sarana prasarana, produktifitas dan kualitas pengelolaan hasil perikanan tangkap dan** | | | | | | | |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 |
| **perikanan budidaya serta Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan** | | | | | | | |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan sarana prasarana, produktifitas dan kualitas pengelolaan hasil perikanan tangkap dan perikanan budidaya** | | | | | | | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Volume produksi perikanan tangkap | Bidang Kelautan dan Perikanan | 0 Ton | 229300 Ton | 235650 Ton | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Jumlah Produksi Benih Ikan yang unggul (Juta Ekor) | Bidang Kelautan dan Perikanan | 0 Juta Ekor | 11 Juta Ekor | 12 Juta Ekor | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | Volume produksi perikanan budidaya | Bidang Kelautan dan Perikanan | 0 Ton | 13980 Ton | 15170 Ton | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan | Bidang Kelautan dan Perikanan | 0 ton | 22810 ton | 23910 ton | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | Persentase UPI yang dibina memenuhi standar mutu dan keamanan pangan (persentase) | Bidang Kelautan dan Perikanan | 0 | 0,87 | 0,9 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | lokasi Jasa Kelautan yang dimanfaatkan untuk peningkatan investasi di perairan Bangka Belitung | Bidang Kelautan dan Perikanan | 0 lokasi | 25 lokasi | 27 lokasi | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| **Arah Kebijakan : Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan** | | | | | | | |
| | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Persentase Pelaku Usaha yang Taat Aturan (%) | Bidang Kelautan dan Perikanan | 0 | 0,73 | 0,8 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Persentase Pelaku Usaha yang Taat Aturan (%) | Bidang Kelautan dan Perikanan | 0 | 0,73 | 0,8 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Persentase Pelaku Usaha yang Taat Aturan (%) | Bidang Kelautan dan Perikanan | 0 | 0,73 | 0,8 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Persentase Pelaku Usaha yang Taat Aturan (%) | Bidang Kelautan dan Perikanan | 0 | 0,73 | 0,8 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| **Prioritas Pembangunan Daerah : Pembangunan Lingkungan** | | | | | | | |
| **Sasaran : Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup** | | | | **72,05** | **75,84** | **77,50** | |
| **Indikator Sasaran :Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)** | | | | **72,05** | **75,84** | **77,50** | |
| **Strategi :Meningkatan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tata kelola kehutanan** | | | | | | | |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup** | | | | | | | |
| | PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP | Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun | Bidang Lingkungan Hidup | 0 | 1 | 1 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase Pengujian Sampel Parameter Kualitas Lingkungan yang terlayani (Laboratorium Lingkungan) | Bidang Lingkungan Hidup | 0 % | 90 % | 90 % | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase Penurunan Emisi GRK dari Sektor Limbah dan Kehutanan | Bidang Lingkungan Hidup | 0 | 1 | 1 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 |
| | | Persentase Titik Sampling Uji Kualitas Lingkungan | Bidang Lingkungan Hidup | 0 | 0,65 | 0,7 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang dilaksanakan | Bidang Lingkungan Hidup | 0 | 1 | 1 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) | Bidang Lingkungan Hidup | 0 | 1 | 1 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Persentase Ketaatan Usaha/ Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Bidang Lingkungan Hidup | 0 | 0,65 | 0,75 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH | Persentase penyusunan Rekomendasi pengakuan MHA, Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisonal dan Hak MHA terkait dengan PPLH | Bidang Lingkungan Hidup | 0 | 1 | 1 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase kelompok swadaya masyarakat yang aktif dan mandiri | Bidang Lingkungan Hidup | 0 | 0,7 | 0,9 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup yang diberikan | Bidang Lingkungan Hidup | 0 | 0,8 | 0,9 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase Penanganan Pengaduan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diverifikasi | Bidang Lingkungan Hidup | 0 | 1 | 1 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Persentase Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional | Bidang Lingkungan Hidup | 0 % | 25 % | 25 % | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase Pengelolaan Persampahan di TPA Regional | Bidang Lingkungan Hidup | 0 | 0,05 | 0,15 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan tata kelola kehutanan** | | | | | | | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi) (DLHK) | Bidang Kehutanan | 0 % | 20 % | 20 % | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi) (UPTD KPH Belantu Mendanau) | Bidang Kehutanan | 0 | 0,2 | 0,2 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase kerusakan hutan pertahun | Bidang Kehutanan | 0 | 0,2 | 0,2 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 |
| | | (deforestrasi) (UPTD KPH Bubus Panca) | | | | | |
| | | Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi) (UPTD KPH Gunung Duren) | Bidang Kehutanan | 0 | 0,2 | 0,2 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi) (UPTD KPH Jebu Bembang Antan) | Bidang Kehutanan | 0 | 0,2 | 0,2 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi) (UPTD KPH Muntai Palas) | Bidang Kehutanan | 0 | 0,2 | 0,2 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi) (UPTD KPH Rambat Menduyung) | Bidang Kehutanan | 0 | 0,2 | 0,2 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi) (UPTD KPH Sigambir Kotawaringin) | Bidang Kehutanan | 0 | 0,2 | 0,2 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi) (UPTD KPH Sungai Sembulan) | Bidang Kehutanan | 0 | 0,2 | 0,2 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (DLHK) | Bidang Kehutanan | 0 | 13.17 % | 13.17 % | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (UPTD KPH Belantu Mendanau) | Bidang Kehutanan | 0 | 13.17 % | 13.17 % | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (UPTD KPH Bubus Panca) | Bidang Kehutanan | 0 | 13.17 % | 13.17 % | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (UPTD KPH Gunung Duren) | Bidang Kehutanan | 0 | 13.17 % | 13.17 % | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (UPTD KPH Jebu Bembang Antan) | Bidang Kehutanan | 0 | 13.17 % | 13.17 % | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (UPTD KPH Muntai Palas) | Bidang Kehutanan | 0 | 13.17 % | 13.17 % | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (UPTD KPH Rambat Menduyung) | Bidang Kehutanan | 0 | 13.17 % | 13.17 % | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (UPTD KPH Sigambir KotaWaringin) | Bidang Kehutanan | 0 | 13.17 % | 13.17 % | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 |
| | | Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (UPTD KPH Sungai Sembulan) | Bidang Kehutanan | 0 | 13.17 % | 13.17 % | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase Pemanfaatan Kawasan Hutan (DLHK) | Bidang Kehutanan | 0 | 35.65 % | 35.41 % | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase Pemanfaatan Kawasan Hutan (UPTD KPH Belantu Mendanau) | Bidang Kehutanan | 0 | 35.65 % | 35.41 % | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase Pemanfaatan Kawasan Hutan (UPTD KPH Bubus Panca) | Bidang Kehutanan | 0 | 35.65 % | 35.41 % | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase Pemanfaatan Kawasan Hutan (UPTD KPH Gunung Duren) | Bidang Kehutanan | 0 | 35.65 % | 35.41 % | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase Pemanfaatan Kawasan Hutan (UPTD KPH Jebu Bembang Antan) | Bidang Kehutanan | 0 | 35.65 % | 35.41 % | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase Pemanfaatan Kawasan Hutan (UPTD KPH Muntai Palas) | Bidang Kehutanan | 0 | 35.65 % | 35.41 % | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase Pemanfaatan Kawasan Hutan (UPTD KPH Rambat Menduyung) | Bidang Kehutanan | 0 | 36.65 % | 35.41 % | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase Pemanfaatan Kawasan Hutan (UPTD KPH Sigambir Kotawaringin) | Bidang Kehutanan | 0 | 35.65 % | 35.41 % | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Persentase Pemanfaatan Kawasan Hutan (UPTD KPH Sungai Sembulan) | Bidang Kehutanan | 0 | 35.65 % | 35.41 % | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA | Persentase Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (DLHK) | Bidang Kehutanan | 0 | 1 | 1 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (DLHK) | Bidang Kehutanan | 0 % | 40 % | 50 % | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (UPTD KPH Belantu Mendanau) | Bidang Kehutanan | 0 | 0,4 | 0,5 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan | Bidang Kehutanan | 0 | 0,4 | 0,5 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 |
| | | melalui Perhutanan Sosial (UPTD KPH Bubus Panca) | | | | | |
| | | Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (UPTD KPH Gunung Duren) | Bidang Kehutanan | 0 | 0,4 | 0,5 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (UPTD KPH Muntai Palas) | Bidang Kehutanan | 0 | 0,4 | 0,5 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (UPTD KPH Sigambir Kotawaringin) | Bidang Kehutanan | 0 | 0,4 | 0,5 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (UPTD KPH Sungai Sembulan) | Bidang Kehutanan | 0 | 0,4 | 0,5 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (UPT KPH Jebu Bembang Antan) | Bidang Kehutanan | 0 | 0,4 | 0,5 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (UPT KPH Rambat Menduyung) | Bidang Kehutanan | 0 | 0,4 | 0,5 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) | Persentase luas DAS yang dikelola (DLHK) | Bidang Kehutanan | 0 | 0,0913 | 0,0913 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| **Prioritas Pembangunan Daerah : Pembangunan Sumber Daya Manusia** | | | | | | | |
| **Sasaran : Meningkatnya Pembangunan Manusia** | | | | **71,69** | **72,13** | **72,57** | |
| **Indikator Sasaran : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** | | | | **71,69** | **72,13** | **72,57** | |
| **Strategi : Meningkatkan Akses pelayanan dan Mutu Pendidikan serta meningkatkan relevansi dan daya saing serta kualitas hidup, peran perempuan dan anak serta memenuhi keadilan dan kesetaraan gender (KKG)** | | | | | | | |
| **Arah Kebijakan : Meningkatkan Akses pelayanan dan Mutu Pendidikan serta meningkatkan relevansi dan daya saing** | | | | | | | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | persentase guru yang bersertifikat pendidik | Pendidikan | 0 | 65 | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan Khusus terakreditasi A di cabdin V | Pendidikan | 0 persen | 100 persen | | Dinas Pendidikan |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 |
| | | Persentase Satuan Pendidikan Khusus terakreditasi A di Cabdin WIlayah III | Pendidikan | 0 persen | 100 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan Khusus terakreditasi A di Cabdin Wilayah IV | Pendidikan | 0 persen | 100 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus terakreditasi A | Pendidikan | 0 persen | 100 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan pendidikan khusus terakreditasi A di Cabdin Wilayah I | Pendidikan | 0 persen | 100 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan pendidikan khusus terakreditasi A di Cabdin WIlayah II | Pendidikan | 0 persen | 100 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan SMA terakreditasi A | Pendidikan | 0 persen | 51,29 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan SMA terakreditasi A di Cabdin I | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan SMA terakreditasi A di Cabdin Wilayah II | Pendidikan | 0 persen | 50 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan SMA terakreditasi A di Cabdin Wilayah III | Pendidikan | 0 persen | 83,3 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan SMA terakreditasi A di Cabdin WIlayah IV | Pendidikan | 0 persen | 44,4 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan SMA terakreditasi A di Cabdin Wilayah V | Pendidikan | 0 persen | 18,75 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan SMK terakreditasi A | Pendidikan | 0 persen | 73,6 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan SMK terakreditasi A di Cabdin I | Pendidikan | 0 persen | 80 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan SMK terakreditasi A di Cabdin WIlayah II | Pendidikan | 0 persen | 76,5 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan SMK terakreditasi A di Cabdin WIlayah III | Pendidikan | 0 persen | 42,9 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan SMK terakreditasi A di Cabdin Wilayah IV | Pendidikan | 0 persen | 90 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan SMK terakreditasi A di Cabdin Wilayah V | Pendidikan | 0 persen | 78,6 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Proporsi Guru dan Siswa yang menguasai TIK | Pendidikan | 0 persen | 70 persen | | Dinas Pendidikan |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 |
| | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Persentase lulusan SMA yang memiliki kompetensi TIK | Pendidikan | 0 persen | 73 persen | 80 persen | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase lulusan SMA yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin WIlayah I | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 70 persen | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase lulusan SMA yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah II | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 70 persen | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase lulusan SMA yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah III | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 70 persen | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase lulusan SMA yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah IV | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 70 persen | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase lulusan SMA yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah V | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 70 persen | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase lulusan SMK yang memiliki kompetensi TIK | Pendidikan | 0 persen | 73 persen | 80 persen | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase lulusan SMK yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah I | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 70 persen | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase lulusan SMK yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah II | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 70 persen | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase lulusan SMK yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah III | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 70 persen | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase lulusan SMK yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah IV | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 70 persen | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase lulusan SMK yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah V | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 70 persen | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase lulusan SMK yang memiliki sertifikast kompetensi | Pendidikan | 0 persen | 68 persen | 75 persen | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase lulusan SMK yang terserap di DUDIKA | Pendidikan | 0 persen | 59 persen | 59 persen | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase siswa PK yang melanjutkan pendidikan di PTN dan PTS | Pendidikan | 0 persen | 6 persen | 10 persen | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase siswa SMA yang melanjutkan pendidikan di PTN dan PTS | Pendidikan | 0 persen | 55 persen | 65 persen | Dinas Pendidikan |
| | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Persentasi Perpustakaan Yang di Bina | Bidang Perpustakaan | 0 | 0,37 | 0,44 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | Jumlah Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno | Bidang Perpustakaan | 0 Dokumen | 5 Dokumen | 5 Dokumen | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 |
| | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | Persentase Berkas Arsip Yang Di Lindungi Dan Di Selamatkan Sesuai Dengan Ketentuan | Bidang Kearsipan | 0 | 0,25 | 0,25 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Kearsipan Sesuai Dengan Standart Baku Kearsipan | Bidang Kearsipan | 0 | 0,2 | 0,2 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP | Persentase Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup | Bidang Kearsipan | 0 | 12,50 % | 0,13 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan kualitas hidup, peran perempuan dan anak serta memenuhi keadilan dan kesetaraan gender (KKG)** | | | | | | | |
| | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Persentase ARG pada Belanja Operasi dan belanja modal APBD | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 persen | 2.6 persen | 2.8 persen | DP3CASKB |
| | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Persentase kebijakan perlindungan perempuan | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 persen | 100 persen | 100 persen | DP3CASKB |
| | | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 persen | 100 persen | 100 persen | DP3CASKB |
| | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 persen | 44.98 persen | 45.86 persen | DP3CASKB |
| | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Persentase peningkatan SDM dalam Pemenuhan Partisipasi ANAK | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 persen | 19.90 persen | 20.90 persen | DP3CASKB |
| | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 persen | 100 persen | 100 persen | DP3CASKB |
| | | Persentase Peningkatan SDM Perlindungan Anak | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 persen | 33 persen | 37 persen | DP3CASKB |
| | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | Persentase capaian OPD yang menyediakan data pilah gender dan anak | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 persen | 92.59 persen | 96.29 persen | DP3CASKB |
| | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Persentase masyarakat yang memiliki dokumen pendaftaran | Bidang Administrasi Kependudukan dan | 0 persen | 89.8 persen | 93.27 persen | DP3CASKB |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | penduduk (KK, KTP, KIA) | Pencatatan Sipil | | | | |
| | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | Persentase masyarakat yang memiliki akta pencatatan sipil (Akta Lahir, Akta Mati, Akta Perkawinan) | Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0 persen | 89.5 persen | 96.50 persen | DP3CASKB |
| | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Persentase perangkat daerah dan sektor lain yang mengadakan pejanjian kerjasama | Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0 Persen | 37.14 Persen | 48.57 Persen | DP3CASKB |
| | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | Persentase penyediaan penyajian data kependudukan tingkat provinsi | Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0 persen | 100 persen | 100 persen | DP3CASKB |
| | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Persentase pembinaan Penyediaan dan pemanfaatan data kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga di kabupaten/kota | Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 persen | 71.42 persen | 100 persen | DP3CASKB |
| | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | persentase pembinaan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di kabupaten/kota | Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 persen | 100 persen | 100 persen | DP3CASKB |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | persentase pembinaan kampung KB | Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 persen | 63 persen | 84 persen | DP3CASKB |
| **Strategi : Meningkatkan akses pelayanan dan kualitas kesehatan dengan memperkuat pelayanan dan sistem kesehatan** | | | | | | | |
| **Arah Kebijakan : Meningkatkan akses pelayanan dan kualitas kesehatan dengan memperkuat pelayanan dan sistem kesehatan** | | | | | | | |
| | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) | Kesehatan | 0 persen | 100 persen | 100 persen | Dinas Kesehatan |
| | | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi minimal madya | Kesehatan | 0 fasyankes | 86 fasyankes | 88 fasyankes | Dinas Kesehatan |
| | | Persentase pelaksanaan sinkronisasi penerapan standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan lintas kab/kota | Kesehatan | 0 persen | 100 persen | 100 persen | Dinas Kesehatan |
| | | Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit | Kesehatan | 0 persen | 94 persen | 94 persen | Dinas Kesehatan |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 |
| | | Persentase peningkatan kesehatan masyarakat | Kesehatan | 0 persen | 87 persen | 89 persen | Dinas Kesehatan |
| | | Persentase peningkatan pemeriksaan laboratorium kesehatan | Kesehatan | 0 persen | 100 persen | 100 persen | Dinas Kesehatan |
| | | Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin essensial | Kesehatan | 0 persen | 87 persen | 88 persen | Dinas Kesehatan |
| | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase tenaga kesehatan yang mendapatkan peningkatan kompetensi | Kesehatan | 0 persen | 87 persen | 88 persen | Dinas Kesehatan |
| | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Persentase sarana sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat | Kesehatan | 0 persen | 89 persen | 90 persen | Dinas Kesehatan |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) | Kesehatan | 0 persen | 88 persen | 89 persen | Dinas Kesehatan |
| | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase Pemenuhan Layanan Kesehatan Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna | Kesehatan | 0 persen | 85 persen | 86 persen | RSUP |
| | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai klasifikasi Rumah Sakit tipe B | Kesehatan | 0 persen | 85 persen | 86 persen | RSUP |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan, kemitraan bidang kesehatan | Kesehatan | 0 persen | 100 persen | 100 persen | RSUP |
| | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase fasilitas pelayanan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai kelas Rumah Sakit | Kesehatan | 0 persen | 82 persen | 85 persen | RUMAH SAKIT JIWA |
| | | Persentase masyarakat ataupun perorangan yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa dan non jiwa | Kesehatan | 0 persen | 82 persen | 85 persen | RUMAH SAKIT JIWA |
| | | Persentase masyarakat ataupun perorangan yang mendapat pelayanan penunjang | Kesehatan | 0 persen | 82 persen | 85 persen | RUMAH SAKIT JIWA |
| | | Persentase masyarakat ataupun perseorangan yang mendapat penanganan | Kesehatan | 0 persen | 82 persen | 82 persen | RUMAH SAKIT JIWA |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | penyalahgunaan NAPZA | | | | | |
| | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase SDM kesehatan sesuai analisa beban kerja RS Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Kesehatan | 0 persen | 86 persen | 88 persen | RUMAH SAKIT JIWA |
| | | Persentase SDM kesehatan yang mendapat pendidikan dan pelatihan | Kesehatan | 0 persen | 86 persen | 88 persen | RUMAH SAKIT JIWA |
| **Prioritas Pembangunan Daerah : Pembangunan Pendapatan Masyarakat** | | | | | | | |
| **Sasaran : Menurunkan Tingkat Kemiskinan** | | | | **4,67** | **4,20** | **4,01** | |
| **Indikator Sasaran : Persentase Angka Kemiskinan** | | | | **4,67** | **4,20** | **4,01** | |
| **Strategi : Meningkatkan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas, Pengembangan sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial, serta Peningkatan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin** | | | | | | | |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas** | | | | | | | |
| | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang di ditangani | BIDANG SOSIAL | 0 | 23,81 % | 1 | Dinsospemdes |
| | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase PMKS yang di Rehabilitasi sosial di Dalam Panti | BIDANG SOSIAL | 0 % | 22,58 % | 100 % | Dinsospemdes |
| | | Persentase PMKS yang di rehabilitasi sosial di dalam Panti Sosial Bina Laras Hijrah | BIDANG SOSIAL | 0 | 0,3 | 1 | Dinsospemdes |
| | | Persentase PMKS yang di Rehabilitasi Sosial di Dalam Panti Sosial Bina Serumpun | BIDANG SOSIAL | 0 | 0,2143 | 1 | Dinsospemdes |
| **Arah Kebijakan : Pengembangan sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial** | | | | | | | |
| | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial | BIDANG SOSIAL | 0 | 25,28 % | 1 | Dinsospemdes |
| | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Persentase TMP yang dikelola | BIDANG SOSIAL | 0 | 1 | 1 | Dinsospemdes |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin** | | | | | | | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Persentase PMKS/PSKS yg terberdayakan | BIDANG SOSIAL | 0 | 1 | 1 | Dinsospemdes |

### 5.1.7. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Belitung Timur

Pembangunan Kabupaten Belitung Timur difokuskan pada lima sasaran utama yaitu (1) Menurunkan Tingkat Kemiskinan melalui strategi dan arah kebijakanPeningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas, Pengembangan system pemerdayaan dan Linjamsos dan Peningkatan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin; (2) Meningkatnya pembangunan Manusia melalui strategi dan arah kebijakan Meningkatkan akses pelayanan dan kualitas kesehatan dengan memperkuat pelayanan dan sistem kesehatan; (3) Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian melalui strategi dan arah kebijakanMeningkatan Produkifitas, Kualitas dan Daya Saing Produk Pertanian serta dan sarana dan prasarana produksi , Nilai Tambah Produk serta Peningkatan Fungsi Kelembagaan Pertanian ; (4) Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan melalui strategi dan arah kebijakan Peningkatan sarana prasarana, produktifitas dan kualitas pengelolaan hasil perikanan tangkap dan perikanan budidaya dan Peningkatan Kualitas SDM, Standarisasi Produk dan Jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sub sektor Perikanan dan (5)Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian melalui strategi dan arah kebijakan Meningkatan tata kelola sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan.

**Gambar V.8**
Sasaran Pembangunan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024

| Strategi Dan Arah Kebijakan | Sasaran |
|---|---|
| ○ Peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas<br>○ Pengembangan system pemerdayaan dan Linjamsos<br>○ Peningkatan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin | Menurunkan Tingkat Kemiskinan |
| ○ Meningkatkan akses pelayanan dan kualitas kesehatan dengan memperkuat pelayanan dan sistem kesehatan | Meningkatnya pembangunan Manusia |
| ○ Meningkatan Produkifitas, Kualitas dan Daya Saing Produk Pertanian serta dan sarana dan prasarana produksi , Nilai Tambah Produk serta Peningkatan Fungsi Kelembagaan Pertanian | Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian |
| ○ Peningkatan sarana prasarana, produktifitas dan kualitas pengelolaan hasil perikanan tangkap dan perikanan budidaya<br>○ Peningkatan Kualitas SDM, Standarisasi Produk dan Jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sub sektor Perikanan | Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan |
| ○ Meningkatan tata kelola sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan | Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian |



**Tabel V.9**

Sasaran, Arah Kebijakan dan Program Prioritas di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 |
| **Prioritas Pembangunan Daerah : Pembangunan Ekonomi** | | | | | | | |
| **Sasaran : Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian** | | | | **7,78** | **4,23** | **4,60** | |
| **Indikator Sasaran : Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian** | | | | **7,78** | **4,23** | **4,60** | |
| **Strategi : Meningkatkan Produkifitas, Kualitas dan Daya Saing Produk Pertanian serta sarana dan prasarana produksi , Nilai Tambah Produk serta Peningkatan Fungsi Kelembagaan Pertanian** | | | | | | | |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan Produkifitas, Kualitas dan Daya Saing Produk Pertanian** | | | | | | | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN | Persentase meningkatnya ketersediaan pangan utama (beras) | Bidang Pangan | 0 persen | 2,85 persen | 2,95 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | Bidang Pangan | 0 | 84,1 | 86,1 | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Menurunnya Daerah Rentan Rawan Pangan | Bidang Pangan | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | Persentase pangan yang aman dikonsumsi | Bidang Pangan | 0 persen | 86 persen | 86 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Dokumen Laporan Pengendalian dan Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim (DPI) | Bidang Pertanian | 0 Dok | 1 Dok | 1 Dok | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| | | Terkendalinya Bencana Pertanian | Bidang Pertanian | 0 persen | 3 persen | 3 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | Dokumen Perizinan Usaha Pertanian | Bidang Pertanian | 0 Dok | 1 Dok | 1 Dok | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Persentase peningkatan metode, teknologi informasi dan kelembagaan penyuluhan pertanian | Bidang Pertanian | 0 persen | 100 persen | 100 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular | Bidang Pertanian | 0 persen | 2 persen | 2 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan sarana dan prasarana produksi , Nilai Tambah Produk serta Peningkatan Fungsi Kelembagaan Pertanian** | | | | | | | |
| | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Peningkatan benih/bibit tanaman (pangan, horti, dan perkebunan) berlabel dan bersertifikat | Bidang Pertanian | 0 persen | 5 persen | 5 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| | | Persentase peningkatan luas tanam perkebunan | Bidang Pertanian | 0 persen | 2,5 persen | 2,5 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| | | Persentase peningkatan luas tanam Tanaman Pangan & Hortikultura (%) | Bidang Pertanian | 0 persen | 5 persen | 5 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | persentase peningkatan produksi benih bermutu | Bidang Pertanian | 0 persen | 5 persen | 10 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| | | Persentase terawasinya peredaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung peningkatan produksi | Bidang Pertanian | 0 persen | 100 persen | 100 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Rasio Ketersediaan Prasarana Pertanian prapanen | Bidang Pertanian | 0 persen | 15 persen | 15 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| | | Rasio ketersedian prasarana pertanian pasca panen | Bidang Pertanian | 0 persen | 5 persen | 5 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Persentase Pertambahan Angka Populasi Ternak | Bidang Pertanian | 0 persen | 5 persen | 5 persen | Dinas Pertanian dam Ketahanan Pangan |
| **Sasaran : Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perikanan** | | | | **-9,76** | **4,05** | **4,45** | |
| **Indikator Sasaran : Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan** | | | | **-9,76** | **4,05** | **4,45** | |
| **Strategi : Meningkatan sarana prasarana, produktifitas dan kualitas pengelolaan hasil perikanan tangkap dan perikanan budidaya serta Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan** | | | | | | | |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan sarana prasarana, produktifitas dan kualitas pengelolaan hasil perikanan tangkap dan perikanan budidaya** | | | | | | | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Volume produksi perikanan tangkap | Bidang Kelautan dan Perikanan | 0 Ton | 229300 Ton | 235650 Ton | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Jumlah Produksi Benih Ikan yang unggul (Juta Ekor) | Bidang Kelautan dan Perikanan | 0 Juta Ekor | 11 Juta Ekor | 12 Juta Ekor | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | Volume produksi perikanan budidaya | Bidang Kelautan dan Perikanan | 0 Ton | 13980 Ton | 15170 Ton | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan | Bidang Kelautan dan Perikanan | 0 ton | 22810 ton | 23910 ton | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | Persentase UPI yang dibina memenuhi standar mutu dan keamanan pangan (persentase) | Bidang Kelautan dan Perikanan | 0 | 0,87 | 0,9 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | lokasi Jasa Kelautan yang dimanfaatkan untuk peningkatan investasi di perairan Bangka Belitung | Bidang Kelautan dan Perikanan | 0 lokasi | 25 lokasi | 27 lokasi | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| **Arah Kebijakan : Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan** | | | | | | | |
| | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Persentase Pelaku Usaha yang Taat Aturan (%) | Bidang Kelautan dan Perikanan | 0 | 0,73 | 0,8 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Persentase Pelaku Usaha yang Taat Aturan (%) | Bidang Kelautan dan Perikanan | 0 | 0,73 | 0,8 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Persentase Pelaku Usaha yang Taat Aturan (%) | Bidang Kelautan dan Perikanan | 0 | 0,73 | 0,8 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Persentase Pelaku Usaha yang Taat Aturan (%) | Bidang Kelautan dan Perikanan | 0 | 0,73 | 0,8 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| **Sasaran : Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian** | | | | **-9,23** | **4,52** | **0,46** | |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Indikator Sasaran : Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian** | | | | **-9,23** | **4,52** | **0,46** | |
| **Strategi : Meningkatan tata kelola sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan.** | | | | | | | |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan tata kelola sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan.** | | | | | | | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN | Persentase Kepatuhan penataan izin air tanah (Cabdin ESDM Wilayah Bangka) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 % | 85 % | 90 % | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | | Persentase Kepatuhan penataan izin air tanah (DESDM) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 0,85 | 0,9 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA | Persentase pertambangan yang "good mining practices" (Cabdin ESDM Wilayah Bangka) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 % | 85 % | 85 % | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | | Persentase pertambangan yang "good mining practices" (Cabdin ESDM Wilayah Bangka Barat) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 0,85 | 0,85 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | | Persentase pertambangan yang "good mining practices" (Cabdin ESDM Wilayah Bangka Tengah dan Selatan) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 0,85 | 0,85 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | | Persentase pertambangan yang "good mining practices" (Cabdin ESDM Wilayah Belitung) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 0,85 | 0,85 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | | Persentase pertambangan yang "good mining practices" (Cabdin ESDM Wilayah Belitung Timur) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 0,85 | 0,85 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | | Persentase pertambangan yang "good mining practices" (DESDM) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 0,85 | 0,85 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN | Persentase Bauran Energi Terbarukan (DESDM) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 0,1298 | 0,1798 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | Rasio Elektrifikasi (Cabdin ESDM Wilayah Bangka) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 % | 99.99 % | 99.99 % | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | | Rasio Elektrifikasi (Cabdin ESDM Wilayah Bangka Barat) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 99.99 % | 99.99 % | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | | Rasio Elektrifikasi (Cabdin ESDM Wilayah Bangka Tengah dan Selatan) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 99.99 % | 99.99 % | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | | Rasio Elektrifikasi (Cabdin ESDM Wilayah Belitung) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 99.99 % | 99.99 % | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | | Rasio Elektrifikasi (Cabdin ESDM | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 99.99 % | 99.99 % | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 |
| | | Wilayah Belitung Timur) | | | | | |
| | | Rasio Elektrifikasi (DESDM) | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 99.99 % | 99.99 % | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | | Terwujudnya Reformasi birokrasi | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 0,95 | 0,95 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | | Indeks Reformasi Birokrasi | Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,9 | 0,9 | 0,9 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| **Prioritas Pembangunan Daerah : Pembangunan Sumber Daya Manusia** | | | | | | | |
| **Sasaran : Meningkatnya Pembangunan Manusia** | | | | **71,69** | **72,13** | **72,57** | |
| **Indikator Sasaran : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** | | | | **71,69** | **72,13** | **72,57** | |
| **Strategi : Meningkatkan Akses pelayanan dan Mutu Pendidikan serta meningkatkan relevansi dan daya saing serta kualitas hidup, peran perempuan dan anak serta memenuhi keadilan dan kesetaraan gender (KKG)** | | | | | | | |
| **Arah Kebijakan : Meningkatkan Akses pelayanan dan Mutu Pendidikan serta meningkatkan relevansi dan daya saing** | | | | | | | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | persentase guru yang bersertifikat pendidik | Pendidikan | 0 | 65 | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan Khusus terakreditasi A di cabdin V | Pendidikan | 0 persen | 100 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan Khusus terakreditasi A di Cabdin WIlayah III | Pendidikan | 0 persen | 100 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan Khusus terakreditasi A di Cabdin Wilayah IV | Pendidikan | 0 persen | 100 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus terakreditasi A | Pendidikan | 0 persen | 100 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan pendidikan khusus terakreditasi A di Cabdin Wilayah I | Pendidikan | 0 persen | 100 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan pendidikan khusus terakreditasi A di Cabdin WIlayah II | Pendidikan | 0 persen | 100 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan SMA terakreditasi A | Pendidikan | 0 persen | 51,29 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan SMA terakreditasi A di Cabdin I | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan SMA terakreditasi A di Cabdin Wilayah II | Pendidikan | 0 persen | 50 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan SMA terakreditasi A di Cabdin Wilayah III | Pendidikan | 0 persen | 83,3 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan SMA | Pendidikan | 0 persen | 44,4 persen | | Dinas Pendidikan |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 |
| | | terakreditasi A di Cabdin WIlayah IV | | | | | |
| | | Persentase Satuan Pendidikan SMA terakreditasi A di Cabdin Wilayah V | Pendidikan | 0 persen | 18,75 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan SMK terakreditasi A | Pendidikan | 0 persen | 73,6 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan SMK terakreditasi A di Cabdin I | Pendidikan | 0 persen | 80 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan SMK terakreditasi A di Cabdin WIlayah II | Pendidikan | 0 persen | 76,5 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan SMK terakreditasi A di Cabdin WIlayah III | Pendidikan | 0 persen | 42,9 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan SMK terakreditasi A di Cabdin Wilayah IV | Pendidikan | 0 persen | 90 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Satuan Pendidikan SMK terakreditasi A di Cabdin Wilayah V | Pendidikan | 0 persen | 78,6 persen | | Dinas Pendidikan |
| | | Proporsi Guru dan Siswa yang menguasai TIK | Pendidikan | 0 persen | 70 persen | | Dinas Pendidikan |
| | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Persentase lulusan SMA yang memiliki kompetensi TIK | Pendidikan | 0 persen | 73 persen | 80 persen | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase lulusan SMA yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin WIlayah I | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 70 persen | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase lulusan SMA yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah II | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 70 persen | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase lulusan SMA yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah III | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 70 persen | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase lulusan SMA yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah IV | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 70 persen | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase lulusan SMA yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah V | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 70 persen | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase lulusan SMK yang memiliki kompetensi TIK | Pendidikan | 0 persen | 73 persen | 80 persen | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase lulusan SMK yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah I | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 70 persen | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase lulusan SMK yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah II | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 70 persen | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase lulusan SMK yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah III | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 70 persen | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase lulusan SMK yang memiliki | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 70 persen | Dinas Pendidikan |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 |
| | | kompetensi TIK di Cabdin Wilayah IV | | | | | |
| | | Persentase lulusan SMK yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah V | Pendidikan | 0 persen | 60 persen | 70 persen | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase lulusan SMK yang memiliki sertifikast kompetensi | Pendidikan | 0 persen | 68 persen | 75 persen | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase lulusan SMK yang terserap di DUDIKA | Pendidikan | 0 persen | 59 persen | 59 persen | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase siswa PK yang melanjutkan pendidikan di PTN dan PTS | Pendidikan | 0 persen | 6 persen | 10 persen | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase siswa SMA yang melanjutkan pendidikan di PTN dan PTS | Pendidikan | 0 persen | 55 persen | 65 persen | Dinas Pendidikan |
| | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Persentasi Perpustakaan Yang di Bina | Bidang Perpustakaan | 0 | 0,37 | 0,44 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | Jumlah Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno | Bidang Perpustakaan | 0 Dokumen | 5 Dokumen | 5 Dokumen | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | Persentase Berkas Arsip Yang Di Lindungi Dan Di Selamatkan Sesuai Dengan Ketentuan | Bidang Kearsipan | 0 | 0,25 | 0,25 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Kearsipan Sesuai Dengan Standart Baku Kearsipan | Bidang Kearsipan | 0 | 0,2 | 0,2 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP | Persentase Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup | Bidang Kearsipan | 0 | 12,50 % | 0,13 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan kualitas hidup, peran perempuan dan anak serta memenuhi keadilan dan kesetaraan gender (KKG)** | | | | | | | |
| | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Persentase ARG pada Belanja Operasi dan belanja modal APBD | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 persen | 2.6 persen | 2.8 persen | DP3CASKB |
| | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Persentase kebijakan perlindungan perempuan | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 persen | 100 persen | 100 persen | DP3CASKB |
| | | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 persen | 100 persen | 100 persen | DP3CASKB |
| | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan | 0 persen | 44.98 persen | 45.86 persen | DP3CASKB |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 |
| | | | Perlindungan Anak | | | | |
| | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Persentase peningkatan SDM dalam Pemenuhan Partisipasi ANAK | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 persen | 19.90 persen | 20.90 persen | DP3CASKB |
| | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 persen | 100 persen | 100 persen | DP3CASKB |
| | | Persentase Peningkatan SDM Perlindungan Anak | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 persen | 33 persen | 37 persen | DP3CASKB |
| | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | Persentase capaian OPD yang menyediakan data pilah gender dan anak | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 persen | 92.59 persen | 96.29 persen | DP3CASKB |
| | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Persentase masyarakat yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk (KK, KTP, KIA) | Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0 persen | 89.8 persen | 93.27 persen | DP3CASKB |
| | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | Persentase masyarakat yang memiliki akta pencatatan sipil (Akta Lahir, Akta Mati, Akta Perkawinan) | Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0 persen | 89.5 persen | 96.50 persen | DP3CASKB |
| | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Persentase perangkat daerah dan sektor lain yang mengadakan pejanjian kerjasama | Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0 Persen | 37.14 Persen | 48.57 Persen | DP3CASKB |
| | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | Persentase penyediaan penyajian data kependudukan tingkat provinsi | Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0 persen | 100 persen | 100 persen | DP3CASKB |
| | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Persentase pembinaan Penyediaan dan pemanfaatan data kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga di kabupaten/kota | Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 persen | 71.42 persen | 100 persen | DP3CASKB |
| | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | persentase pembinaan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di kabupaten/kota | Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 persen | 100 persen | 100 persen | DP3CASKB |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | persentase pembinaan kampung KB | Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 persen | 63 persen | 84 persen | DP3CASKB |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 |
| **Strategi : Meningkatkan akses pelayanan dan kualitas kesehatan dengan memperkuat pelayanan dan sistem kesehatan** | | | | | | | |
| **Arah Kebijakan : Meningkatkan akses pelayanan dan kualitas kesehatan dengan memperkuat pelayanan dan sistem kesehatan** | | | | | | | |
| | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) | Kesehatan | 0 persen | 100 persen | 100 persen | Dinas Kesehatan |
| | | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi minimal madya | Kesehatan | 0 fasyankes | 86 fasyankes | 88 fasyankes | Dinas Kesehatan |
| | | Persentase pelaksanaan sinkronisasi penerapan standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan lintas kab/kota | Kesehatan | 0 persen | 100 persen | 100 persen | Dinas Kesehatan |
| | | Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit | Kesehatan | 0 persen | 94 persen | 94 persen | Dinas Kesehatan |
| | | Persentase peningkatan kesehatan masyarakat | Kesehatan | 0 persen | 87 persen | 89 persen | Dinas Kesehatan |
| | | Persentase peningkatan pemeriksaan laboratorium kesehatan | Kesehatan | 0 persen | 100 persen | 100 persen | Dinas Kesehatan |
| | | Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin essensial | Kesehatan | 0 persen | 87 persen | 88 persen | Dinas Kesehatan |
| | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase tenaga kesehatan yang mendapatkan peningkatan kompetensi | Kesehatan | 0 persen | 87 persen | 88 persen | Dinas Kesehatan |
| | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Persentase sarana sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat | Kesehatan | 0 persen | 89 persen | 90 persen | Dinas Kesehatan |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) | Kesehatan | 0 persen | 88 persen | 89 persen | Dinas Kesehatan |
| | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase Pemenuhan Layanan Kesehatan Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna | Kesehatan | 0 persen | 85 persen | 86 persen | RSUP |
| | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai klasifikasi Rumah Sakit tipe B | Kesehatan | 0 persen | 85 persen | 86 persen | RSUP |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan, kemitraan bidang kesehatan | Kesehatan | 0 persen | 100 persen | 100 persen | RSUP |
| | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase fasilitas pelayanan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai kelas Rumah Sakit | Kesehatan | 0 persen | 82 persen | 85 persen | RUMAH SAKIT JIWA |
| | | Persentase masyarakat ataupun perorangan yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa dan non jiwa | Kesehatan | 0 persen | 82 persen | 85 persen | RUMAH SAKIT JIWA |
| | | Persentase masyarakat ataupun perorangan yang mendapat pelayanan penunjang | Kesehatan | 0 persen | 82 persen | 85 persen | RUMAH SAKIT JIWA |
| | | Persentase masyarakat ataupun perseorangan yang mendapat penanganan penyalahgunaan NAPZA | Kesehatan | 0 persen | 82 persen | 82 persen | RUMAH SAKIT JIWA |
| | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase SDM kesehatan sesuai analisa beban kerja RS Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Kesehatan | 0 persen | 86 persen | 88 persen | RUMAH SAKIT JIWA |
| | | Persentase SDM kesehatan yang mendapat pendidikan dan pelatihan | Kesehatan | 0 persen | 86 persen | 88 persen | RUMAH SAKIT JIWA |
| **Prioritas Pembangunan Daerah : Pembangunan Pendapatan Masyarakat** | | | | | | | |
| **Sasaran : Menurunkan Tingkat Kemiskinan** | | | | **4,67** | **4,20** | **4,01** | |
| **Indikator Sasaran : Persentase Angka Kemiskinan** | | | | **4,67** | **4,20** | **4,01** | |
| **Strategi : Meningkatkan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas, Pengembangan sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial, serta Peningkatan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin** | | | | | | | |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas** | | | | | | | |
| | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang di ditangani | BIDANG SOSIAL | 0 | 23,81 % | 1 | Dinsospemdes |
| | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase PMKS yang di Rehabilitasi sosial di Dalam Panti | BIDANG SOSIAL | 0 % | 22,58 % | 100 % | Dinsospemdes |
| | | Persentase PMKS yang di rehabilitasi sosial di dalam Panti Sosial Bina Laras Hijrah | BIDANG SOSIAL | 0 | 0,3 | 1 | Dinsospemdes |
| | | Persentase PMKS yang di Rehabilitasi Sosial di Dalam | BIDANG SOSIAL | 0 | 0,2143 | 1 | Dinsospemdes |

| Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah | | Indikator Kinerja (Program/outcome) | Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021 | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 Target | Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026 | PD yang Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 |
| | | Panti Sosial Bina Serumpun | | | | | |
| **Arah Kebijakan : Pengembangan sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial** | | | | | | | |
| | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial | BIDANG SOSIAL | 0 | 25,28 % | 1 | Dinsospemdes |
| | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Persentase TMP yang dikelola | BIDANG SOSIAL | 0 | 1 | 1 | Dinsospemdes |
| **Arah Kebijakan : Peningkatan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin** | | | | | | | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Persentase PMKS/PSKS yg terberdayakan | BIDANG SOSIAL | 0 | 1 | 1 | Dinsospemdes |

## 5.2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan pedoman perencanaan yang harus diacu dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Di dalam dokumen RTRW telah ditetapkan Rencana Pola Ruang, Rencana Struktur Ruang, serta Rencana Kawasan Strategis.

### 1. Rencana Pola Ruang

a. Kawasan Lindung;
b. Kawasan Budidaya.

Di dalam rencana pola ruang telah ditetapkan rencana pengembangan kawasan lindung yang meliputi:

a. Kawasan hutan lindung;
b. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
c. Kawasan perlindungan setempat;
d. kawasan suaka alam;
e. pelestarian alam, situs dan kawasan cagar budaya;
f. kawasan rawan bencana alam.

### 2. Rencana Struktur Ruang Wilayah

a. Rencana Sistem Perkotaan;
b. Rencana Sistem Jaringan Transportasi;
c. Rencana Sistem Jaringan Energi;
d. Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi;
e. Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air;
f. Sistem Prasarana Lingkungan.

### 3. Rencana Kawasan Strategis

a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya;

c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

### 5.2.1 Indikasi Program Utama Lima Tahunan RTRW Kepulauan Bangka Belitung

Tujuan penataan ruang wilayah provinsi merupakan arahan perwujudan ruang wilayah provinsi yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun pada Tahun 2011 dan pemberlakuannya sampai dengan Tahun 2034 sehingga saat ini tahapan tersebut telah memasuki tahapan 5 (lima) tahun kedua yang berarti diperlukan kolaborasi atau penyesuaian terhadap visi dan misi kepala daerah.

Tahapan RTRW yang kedua ini juga masih merujuk pada indikasi program utama yang ditetapkan pada saat penyusunan dan penetapan terhadap Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034 dikarenakan belum ada peninjauan kembali maupun revisi terhadap RTRW tersebut.

Indikasi program utama pada tahun tahapan kedua (Tahun 2017-2022) dimaksud mencakup :

A. Pemantapan Sistem Perkotaan
   - A.1 Perwujudan PKNp Pangkal Pinang
   - A.2 Perwujudan PKW Muntok
   - A.3 Perwujudan PKW Tanjung Pandan
   - A.4 Perwujudan PKW Manggar
   - A.5 Perwujudan PKL Kelapa
   - A.6 Perwujudan PKL Puding Besar
   - A.7 Perwujudan PKL Sungai Selan
   - A.8 Perwujudan PKL Payung
   - A.9 Perwujudan PKL Sungailiat
   - A.10 Perwujudan PKWp Koba
   - A.11 Perwujudan PKWp Toboali

B. Perwujudan Sistem Prasarana Wilayah
   - B.1 Perwujudan Sistem Transportasi
   - B.2 Perwujudan Sistem Jaringan Energi/Listrik
   - B.3 Perwujudan Sistem Telekomunikasi
   - B.4 Perwujudan Sistem Sumber Daya Air
   - B.5 Perwujudan Sistem Prasarana Permukiman

C. Perwujudan Pola Ruang
   - C.1 Perwujudan Kawasan Lindung
   - C.2 Perwujudan Kawasan Budidaya

D. Perwujudan Kawasan Strategis
   - D.1 Perwujudan Kawasan Tanjung Kalian
   - D.2 Perwujudan Kawasan Industri Perikanan Terpadu di Teluk Klabat Belinyu
   - D.3 Perwujudan Pelabuhan dan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Berikat
   - D.4 Perwujudan KTM Batu Betumpang
   - D.5 Perwujudan Kawasan Minapolitan Lepar Pongok
   - D.6 Perwujudan Kawasan etalase Perikanan Selat Nasik
   - D.7 Perwujudan Kawasan Industri Perikanan Tanjung Binga
   - D.8 Perwujuduan Kawasan Kota Terpadu Mandiri
   - D.9 Perwujuduan Kawasan Industri Terpadu Air Kelik (KIAK)

D.10 Perwujuduan Pelabuhan ASDP Manggar – Kepang
D.11 Perwujuduan Kota Tua Muntok
D.12 Perwujudan Kawasan Universitas Bangka Belitung (UBB)
D.13 Perwujudan PLTN (Bangka Barat & Bangka Selatan)
D.14 Pengelolaan Kawasan Gunung Lalang (Cagar Alam)
D.15 Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Kemanan (Kawasan Latihan Tempur Militer Buding)

Penjabaran terhadap beberapa indikator utama tersebut dituangkan dalam beberapa kegiatan seperti yang terinci pada tabel berikut dibawah ini. Dalam perkembangannya seperti yang telah dikemukakan di atas maka diperlukan penyesuain mulai dari visi dan misi kepala daerah terbarukan (tahapan kedua RTRW), kemudian terhadap evaluasi dan (rencana revisi RTRW) serta penyesuaian terhadap aturan terbarukan dari nama program, kegiatan sampai dengan sub kegiatan sehingga pada sub bab ini bersifat mengulas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034 berdasarkan tahapannya, yang berarti bahwa penyesuaian akan dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan pada bab dan sub bab berikutnya yang telah terbarukan (sesuai dengan kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Organisasi Perangkat Daerah). Indikator Program Utama Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 2014-2034 Tahapan 2021-2034 sebagaimana Tabel V.8 dibawah ini :

**Tabel V.10**

Indikator Program Utama Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 2014-2034 Tahapan 2021-2034

| NO | RENCANA PEMANFAATAN RUANG | | PENANGGUNG JAWAB | TAHUN PELAKSANAAN | | | | SUMBER DANA | PELAKSANA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INDIKASI PROGRAM | KEGIATAN | | Tahap I | Tahap II | Tahap III | Tahap IV | | | |
| | | | | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | | |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* |
| A | **Pemantapan Sistem Perkotaan** | | | | | | | | | |
| A1 | **Perwujudan PKNP Pangkal Pinang** | Penyusunan RDTR Kota Pangkal Pinang | Dinas Pekerjaan Umum | √ | | | | APBD Kab/Kota | Dinas Pekerjaan Umum | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Pengembangan kantor Provinsi dan permukiman di Bukit Intan | Dinas Pekerjaan Umum | √ | | | | APBD Prov | Dinas Pekerjaan Umum | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Pembangunan Kawasan Industri di Pangkalbalam | Dinas Perindag | √ | | | | APBD Kab/Kota | Dinas Perindag | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Pengembangan inner ringroad dan outer ring road | Dinas Pekerjaan Umum | √ | | | | APBD Prov | Dinas Pekerjaan Umum | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Pengembangan taman kota | Dinas Pekerjaan Umum | | | | | APBD Kab/Kota | Dinas Pekerjaan Umum | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| | | Pemanfaatan kolong dan lahan genangan secara lebih bermanfaat | Badan Lingkhungan Hidup Daerah (DLHD) | | | | | APBD Kab/Kota | Badan Lingkhungan Hidup Daerah (DLHD) | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| | | Mengembangkan Pelabuhan Pangkalbalam | Dinas Perhubungan | | | | | APBD Prov | Dinas Perhubungan | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| | | Pengembangan kawasan wisata kota di Pasirpadi | Dinas Budpar | √ | | | | APBD Kab/Kota | Dinas Budpar | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Peningkatan terminal | Dinas Perhubungan | √ | | | | APBD Prov | Dinas Perhubungan | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| A2 | **Perwujudan PKW Muntok** | Pemantapan tata batas kawasan kota tua | BPN | √ | | | | | BPN | (seharusnya) selesai pada tahap I |

| NO | RENCANA PEMANFAATAN RUANG | | PENANGGUNG JAWAB | TAHUN PELAKSANAAN | | | | SUMBER DANA | PELAKSANA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INDIKASI PROGRAM | KEGIATAN | | Tahap I | Tahap II | Tahap III | Tahap IV | | | |
| | | | | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | | Penyusunan RDTR Kota tua | Dinas Pekerjaan Umum | √ | | | | APBD Kab/Kota | Dinas Pekerjaan Umum | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Melakukan restorasi dan revitalisasi bangunan bersejarah | Dinas Pekerjaan Umum | | | | | APBN/APBD | Dinas Pekerjaan Umum | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| | | Perbaikan dan pembangunan jalan antar pusat kegiatan | Dinas Pekerjaan Umum | | | | | APBD Kab/Kota | Dinas Pekerjaan Umum | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| | | Pembangunan sistem penyediaan air minum | Dinas Pekerjaan Umum | √ | | | | APBD Kab/Kota | Dinas Pekerjaan Umum | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Pembangunan fasiltias kesehatan rumah sakit tipe B | Dinas Kesehatan | √ | | | | APBD Prov | Dinas Kesehatan | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Pembangunan IPAL pada pusat perdagangan, fasilitas sosial/umum dan kawasan wisata | Badan Lingkhungan Hidup Daerah | √ | | | | APBD Kab/Kota | Badan Lingkhungan Hidup Daerah | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| A3 | **Perwujudan PKW Tanjung Pandan** | Pembangunan kawasan ekonomi khusus Tanjung Batu | Disperindag | √ | | | | APBD Prov | Disperindag | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Pengembangan kawasan wisata | Disbudpar | √ | | | | APBD Kab/Kota | Disbudpar | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Pembangunan infrastruktur pendukung wisata bahari | Dinas Pekerjaan Umum | √ | | | | APBD Kab/Kota | Dinas Pekerjaan Umum | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Pembangunan fasilitas perdagangan berskala regional (pulau) | Disperindag | √ | | | | APBD Prov | Disperindag | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Pembangunan museum bahari | Disbudpar | √ | | | | APBD Prov | Disbudpar | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Pembangunan terminal tipe B | Dinas Pekerjaan Umum | √ | | | | APBD Prov | Dinas Pekerjaan Umum | (seharusnya) selesai pada tahap I |

| NO | RENCANA PEMANFAATAN RUANG | | PENANGGUNG JAWAB | TAHUN PELAKSANAAN | | | | SUMBER DANA | PELAKSANA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INDIKASI PROGRAM | KEGIATAN | | Tahap I | Tahap II | Tahap III | Tahap IV | | | |
| | | | | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | | |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* |
| | | Pembangunan sistem penyediaan air minum | Dinas Pekerjaan Umum | √ | | | | APBD Kab/Kota | Dinas Pekerjaan Umum | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Pembangunan fasiltias kesehatan rumah sakit tipe B | Dinas Kesehatan | √ | | | | APBD Prov | Dinas Kesehatan | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Pembangunan IPAL pada pusat perdagangan, fasilitas sosial/umum dan kawasan wisata | DLHD | √ | | | | APBD Kab/Kota | DLHD | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| A4 | Perwujudan **PKW Manggar** | Penyusunan RDTR kawasan perkotaan Manggar | Dinas Pekerjaan Umum | √ | | | | APBD Kab/Kota | Dinas Pekerjaan Umum | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Rehabilitasi dan Refungsionalisasi Kolong | DLHD | √ | | | | APBD Prov/ APBD Kab/Kota | DLHD | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Pembangunan fasilitas pendukung pelabuhan Manggar | Dinas Perhubungan | √ | | | | APBN/ APBD Prov | Dinas Perhubungan | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Pembangunan terminal tipe B Pembangunan sistem penyediaan ari minum | Dinas Perhubungan | √ | | | | APBD Prov | Dinas Perhubungan | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Pembangunan fasiltias kesehatan rumah sakit tipe B | Dinas Kesehatan | √ | | | | APBD Prov | Dinas Kesehatan | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Pembangunan IPAL pada pusat perdagangan, fasilitas sosial/umum dan kawasan wisata | Dinas PU | √ | | | | APBD Kab/Kota | Dinas PU | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| A5 | Perwujudan **PKL Kelapa** | Penetapan kawasan permukiman dan kelengkapan fasilitas pendukung | Dinas PU | √ | | | | APBD Kab/Kota | Dinas PU | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Penyusunan masterplan kawasan perdagangan | Disperindag | √ | | | | APBD Kab/Kota | Disperindag | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Pembangunan fasilitas wisata air panas | Disbudpar | √ | | | | APBD Kab/Kota | Disbudpar | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Pembangunan industri pengolahan sawit | Diperindag | | | | | APBD Prov/ APBD Kab/Kota | Diperindag | Merupakan lanjutan dari Tahap I |

| NO | RENCANA PEMANFAATAN RUANG | | PENANGGUNG JAWAB | TAHUN PELAKSANAAN | | | | SUMBER DANA | PELAKSANA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INDIKASI PROGRAM | KEGIATAN | | Tahap I | Tahap II | Tahap III | Tahap IV | | | |
| | | | | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | | Perbaikan dan peningkatan jalan ke pusat permukiman perdesaan | Dinas PU | | | | | APBD Kab/Kota | Dinas PU | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| | | Pembangunan IPAL pada pusat perdagangan, fasilitas sosial/umum dan kawasan wisata | DLHD | √ | | | | APBD Prov/ APBD Kab/Kota | DLHD | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| A6 | **Perwujudan PKL Puding Besar** | Pembangunan fasilitas rest area | Dinas Perhubungan | √ | | | | APBD Kab/Kota | Dinas Perhubungan | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Rehabilitasi dan Refungsionalisasi Kolong | DLHD | | | | | APBD Kab/Kota | DLHD | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| | | Pembangunan fasilitas perdagangan | Disperindag | √ | | | | APBD Kab/Kota | Disperindag | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Perbaikan dan peningkatan jalan ke pusat permukiman perdesaan | Dinas PU | | | | | APBD Kab/Kota | Dinas PU | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| | | Perbaikan lingkungan kawasan permukiman | Dinas PU | | | | | APBD Kab/Kota | Dinas PU | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| | | Peningkatan daya layan fasilitas kesehatan dan pendidikan | Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan | | | | | APBD Kab/Kota | Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| A7 | Perwujudan **PKL Sungai Selan** | Perbaikan dan peningkatan jalan ke pusat permukiman perdesaan | Dinas PU | | | | | APBD Kab/Kota | Dinas PU | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| | | Perbaikan lingkungan kawasan permukiman | Dinas PU | | | | | | Dinas PU | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| | | Peningkatan daya layan fasilitas kesehatan dan pendidikan | Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan | | | | | APBD Kab/Kota | Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| A8 | Perwujudan **PKL Payung** | Perbaikan dan peningkatan jalan ke pusat permukiman perdesaan | Dinas PU | | | | | APBD Kab/Kota | Dinas PU | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| | | Rehabilitasi dan Refungsionalisasi Kolong | DLHD | | | | | APBD Kab/Kota | DLHD | Merupakan lanjutan dari Tahap I |

| NO | RENCANA PEMANFAATAN RUANG | | PENANGGUNG JAWAB | TAHUN PELAKSANAAN | | | | SUMBER DANA | PELAKSANA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INDIKASI PROGRAM | KEGIATAN | | Tahap I | Tahap II | Tahap III | Tahap IV | | | |
| | | | | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | | |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* |
| | | Pembangunan fasilitas perdagangan | Disperindag | √ | | | | APBD Kab/Kota | Disperindag | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Perbaikan dan peningkatan jalan ke pusat permukiman perdesaan | Dinas PU | | | | | APBD Kab/Kota | Dinas PU | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| | | Perbaikan lingkungan kawasan permukiman | Dinas PU | | | | | APBN/APBD Prov/ APBD Kab/Kota | Dinas PU | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| | | Peningkatan daya layan fasilitas kesehatan dan pendidikan | Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan | | | | | APBN/APBD Prov/ APBD Kab/Kota | Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| A9 | Perwujudan **PKL Sungailiat** | Penyusunan RDTR kawasan perkotaan Sungailiat | Dinas PU | √ | | | | APBD Kab/Kota | Dinas PU | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Rehabilitasi dan Refungsionalisasi Kolong | DLHD | | | | | APBN/APBD Prov/ APBD Kab/Kota | DLHD | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| | | Pembangunan terminal tipe C | Dishub | √ | | | | APBD Kab/Kota | Dishub | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Pembangunan fasilitas pelayanan wisatawan | Dibudpar | | | | | APBD Kab/Kota | Dibudpar | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| | | Peningkatan penyediaan sistem air bersih | Dinas PU | | | | | | Dinas PU | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| | | Pembangunan IPAL pada pusat perdagangan, fasilitas sosial/umum dan kawasan wisata | DLHD | √ | | | | APBN/APBD Prov/ APBD Kab/Kota | DLHD | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| A10 | Perwujudan **PKWp Koba** | Penyusunan RDTR kawasan perkotaan Koba | Dinas PU | √ | | | | APBD Kab/Kota | Dinas PU | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Rehabilitasi dan Refungsionalisasi Kolong | DLHD | | | | | APBN/APBD Prov/ APBD Kab/Kota | DLHD | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| | | Pembangunan Pembangunan terminal tipe C | Dishub | √ | | | | APBD Kab/Kota | Dishub | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Pembangunan fasilitas pelayanan wisatawan | Disbudpar | | | | | APBD Kab/Kota | Disbudpar | Merupakan lanjutan dari Tahap I |

| NO | RENCANA PEMANFAATAN RUANG | | PENANGGUNG JAWAB | TAHUN PELAKSANAAN | | | | SUMBER DANA | PELAKSANA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INDIKASI PROGRAM | KEGIATAN | | Tahap I | Tahap II | Tahap III | Tahap IV | | | |
| | | | | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | | Peningkatan penyediaan sistem air bersih | Dinas PU | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas PU | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| | | Pembangunan IPAL pada pusat perdagangan, fasilitas sosial/umum dan kawasan wisata | DLHD | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | DLHD | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| A11 | Perwujudan **PKWp Toboali** | Penyusunan RDTR kawasan perkotaan Toboali | Dinas PU | √ | | | | APBD Kab/Kota | Dinas PU | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Rehabilitasi dan Refungsionalisasi Kolong | DLHD | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | DLHD | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| | | Pembangunan Pembangunan terminal tipe C | Dinas Perhubungan | √ | | | | APBD Kab/Kota | Dinas Perhubungan | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Pembangunan fasilitas pelayanan wisatawan | Disbudpar | | | | | APBD Kab/Kota | Disbudpar | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| | | Peningkatan penyediaan sistem air bersih | Dinas PU | √ | | | | APBD Kab/Kota | Dinas PU | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Pembangunan IPAL pada pusat perdagangan, fasilitas sosial/umum dan kawasan wisata | DLHD | √ | | | | APBD Kab/Kota | DLHD | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| B | **Perwujudan Sistem Prasarana Wilayah** | | | | | | | | | |
| B1 | **Perwujudan Sistem Transportasi** | | | | | | | | | |
| a | **Sistem Transportasi Darat** | Peningkatan kondisi dan daya layan jalan kolektor primer | Dinas PU | | | | | APBN | Dinas PU | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| | | Pembangunan jalan kolektor dan lokal primer yang menghubungkan PKL dengan PPK di seluruh wilayah kota/kabupaten | Dinas PU | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas PU | Merupakan lanjutan dari Tahap I |

| NO | RENCANA PEMANFAATAN RUANG | | PENANGGUNG JAWAB | TAHUN PELAKSANAAN | | | | SUMBER DANA | PELAKSANA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INDIKASI PROGRAM | KEGIATAN | | Tahap I | Tahap II | Tahap III | Tahap IV | | | |
| | | | | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | | |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* |
| | | Peningkatan dan pembangunan terminal B di Muntok, Sungailiat, Tanjung Pandan dan Manggar. | Dinas PU | √ | | | | APBD Prov | Dinas PU | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| b | **Sistem Transportasi Laut** | Percepatan penyelesaian pembangunan fasilitas penunjang pelabuhan utama Tanjung Batu | Dinas Perhubungan | √ | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas Perhubungan | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Perbaikan dan peningkatan daya layan pelabuhan Tanjung Gudang (Belinyu), Tanjung Kelian (Muntok), Pangkal Balam (Pangkal Pinang), Tanjung Pandan (Tanjung Pandan), Pelabuhan Pangkal Sadai (Toboali) dan Pelabuhan Manggar (Manggar) | Dinas Perhubungan | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas Perhubungan | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| | | Pembangunan fasilitas dan infrastruktur penunjang pelabuhan laut | Dinas Perhubungan | √ | | | | APBN/APBD Prov/ APBD Kab/Kota | Dinas Perhubungan | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| c | **Sistem Transportasi Udara** | Peningkatan daya dan kualitas layanan bandara Depati Amir | Dinas Perhubungan | √ | | | | APBN/APBD Prov | Dinas Perhubungan | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Peningkatan daya dan kualitas layanan H. AS Hanandjoeddin | Dinas Perhubungan | √ | | | | APBN/APBD Prov | Dinas Perhubungan | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Pengembangan fasilitas pendukung bandara | Dinas Perhubungan | √ | | | | APBN/APBD Prov | Dinas Perhubungan | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Penetapan dan sosialisasi kawasan keamanan operasi penerbangan (KKOP) setiap bandara | Dinas Perhubungan | √ | | | | APBN/APBD Prov | Dinas Perhubungan | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| B2 | **Perwujudan Sistem Jaringan Energi/Listrik** | Pengembangan jaringan sampai pada kawasan perdesaan yang belum terlayani aliran listrik | PLN | | | | | APBN/APBD Prov/Masyarakat | PLN | Merupakan lanjutan dari Tahap I |

| NO | RENCANA PEMANFAATAN RUANG | | PENANGGUNG JAWAB | TAHUN PELAKSANAAN | | | | SUMBER DANA | PELAKSANA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INDIKASI PROGRAM | KEGIATAN | | Tahap I | Tahap II | Tahap III | Tahap IV | | | |
| | | | | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | | Pengembangan sumber pembangkit listrik tenaga batubara, mikrohidro dan nuklir | Dinas Pertambangan dan Energi | | | | | APBN/APBD Prov/Masyarakat | Dinas Pertambangan dan Energi | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| | | Peningkatan pelayanan dan penyediaan gardu induk di seluruh PKW dan PKL | Dinas Pertambangan dan Energi | | | | | APBN/APBD Prov/Masyarakat | Dinas Pertambangan dan Energi | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| | | Mendorong pengembangan energi terbarukan dengan sumber tenaga yang berasal dari angin, udara dan sinar matahari | Dinas Pertambangan dan Energi | | | | | APBN/APBD Prov/Masyarakat | Dinas Pertambangan dan Energi | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| | | Penyediaan sumber energi listrik secara memadai untuk kawasan pariwisata, industri, bandara, pelabuhan laut dan rumah sakit | Dinas Pertambangan dan Energi | | | | | APBN/APBD Prov/Masyarakat | Dinas Pertambangan dan Energi | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| B3 | **Perwujudan Sistem Telekomunikasi** | Pemanfaatan jaringan optik secara optimal, karena provinsi Kep. Bangka Belitung dilintasi jaringan telekomunikasi serat optik internasional | Dinas Kominfo | | | | | APBN/APBD Prov/Swasta | Dinas Kominfo | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| | | pengaturan penempatan menara telekomunikasi secara efektif dan efisien dengan mendorong pengguanaan menara bersama antara operator (*join operation*) | Dinas Kominfo | √ | | | | Swasta | Dinas Kominfo | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | pengembangan jaringan dan pelayanan informasi dan telekomunikasi sampai pada kawasan perdesaan. | Dinas Kominfo | | | | | APBN/Swasta | Dinas Kominfo | Merupakan lanjutan dari Tahap I |

| NO | RENCANA PEMANFAATAN RUANG | | PENANGGUNG JAWAB | TAHUN PELAKSANAAN | | | | SUMBER DANA | PELAKSANA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INDIKASI PROGRAM | KEGIATAN | | Tahap I | Tahap II | Tahap III | Tahap IV | | | |
| | | | | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | | Pengembangan dan peningkatan pelayanan telekomunikasi dan informasi untuk pelayanan publik dan usaha | Dinas Kominfo | | | | | APBN/ Swasta | Dinas Kominfo | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| B4 | **Perwujudan Sistem Sumber Daya Air** | Pemanfaatan sumber daya air untuk; pembangkit tenaga listrik mikrohidro | Dinas PU | | | | | APBN/APBD Prov | Dinas PU | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| | | Pemanfaatan sumber daya air untuk; bahan baku air mimun | Dinas PU | | | | | APBN/APBD Prov | Dinas PU | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| | | Pemanfaatan sumber daya air untuk; bahan baku pengarian sawah (irigasi) dan industri | Dinas PU | | | | | APBN/APBD Prov | Dinas PU | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| | | Pemanfaatan sumber daya air untuk; air baku pelabuhan laut | Dinas PU | | | | | | Dinas PU | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| | | Pemanfaatan sumber daya air untuk; budidaya perikanan air tawar<br>Pembangunan sistem drainase pada kawasan permukiman, areal rawan banjir dan sepanjang sisi jalan | Dinas PU | | | | | APBN/APBD Prov | Dinas PU | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| | | Pembangunan cekdam pada hulu sungai | Dinas PU | √ | | | | APBN/APBD Prov | Dinas PU | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Sistem pengamanan pantai dari abrasi dilakukan melalui pendekatan struktur dan non struktur | Dinas PU | | | | | APBN/APBD Prov | Dinas PU | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| B5 | **Perwujudan Sistem Prasarana Permukiman** | Penyusunan masterplan dan pembangunan sistem drainase pada seluruh wilayah perkotaan (PKNp, PKW dan PKL) | Dinas PU | √ | | | | APBN/APBD Prov | Dinas PU | (seharusnya) selesai pada tahap I |

| NO | RENCANA PEMANFAATAN RUANG | | PENANGGUNG JAWAB | TAHUN PELAKSANAAN | | | | SUMBER DANA | PELAKSANA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INDIKASI PROGRAM | KEGIATAN | | Tahap I | Tahap II | Tahap III | Tahap IV | | | |
| | | | | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | | |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* |
| | | Pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) untuk kawasan perkotaan Pangkalpinang, Muntok, Tanjung Pandan dan Manggar | Dinas PU | √ | | | | APBN/APBD Prov | Dinas PU | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Pembangunan IPAL pada kawasan perkotaan Pangkalpinang, Muntok, Tanjung Pandan dan Manggar, kawasan wisata, komersial dan kawasan industri (IPAL industri) serta instalasi pengolah limbah beracun dan berbahaya (B3) | DLHD | √ | | | | APBN/APBD Prov | DLHD | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Penyediaan air bersih untuk setiap pusat permukiman, kawasan wisata, industri dan pelabuhan. | Dinas PU | √ | | | | APBN/APBD Prov | Dinas PU | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| C | **Perwujudan Rencana Pola Ruang** | | | | | | | | | |
| C1 | **Perwujudan Kawasan Lindung** | | | | | | | | | |
| | Perwujudan Kawasan Hutan Lindung | Rehabilitasi dan konservasi lahan di kawasan lindung guna mengembali-kan/ meningkatkan fungsi lindung; | Dinas Kerhutanan | √ | | | | APBN/APBD Prov | Dinas Kerhutanan | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung; | Dinas Kerhutanan | | | | | APBN/APBD Prov/LSM | Dinas Kerhutanan | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| | | Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan; | Dinas Kerhutanan | | | | | APBN/APBD Prov/LSM | Dinas Kerhutanan | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| | | Pengembangan pola insentif dan disinsentif pengelolaan kawasan lindung; | Dinas Kerhutanan | | | | | APBN/APBD Prov/LSM | Dinas Kerhutanan | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| | | Pengawasan kawasan lindung. | Dinas Kerhutanan | | | | | APBN/APBD Prov/LSM | Dinas Kerhutanan | Merupakan lanjutan dari Tahap I |

| NO | RENCANA PEMANFAATAN RUANG | | PENANGGUNG JAWAB | TAHUN PELAKSANAAN | | | | SUMBER DANA | PELAKSANA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INDIKASI PROGRAM | KEGIATAN | | Tahap I | Tahap II | Tahap III | Tahap IV | | | |
| | | | | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | | |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* |
| | | Pengamanan kawasan lindung | Dinas Kerhutanan | | | | | APBN/APBD Prov/LSM | Dinas Kerhutanan | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| | Pengelolaan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya | Mencegah timbulnya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah di kawasan hutan lindung; | Dinas PU | | | | | APBN/APBD Prov/LSM | Dinas PU | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| | | Memberikan ruang yang cukup bagi resapan air hujan pada kawasan resapan air untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir. | Dinas PU | | | | | APBD Prov | Dinas PU | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| | Pengelolaan kawasan perlindungan setempat | Sosialisasi batas sempadan dan manfaat serta resiko kerusakan sempadan | DLHD | √ | | | | APBN/APBD Prov/LSM | DLHD | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Rehabilitasi dan penghijauan sempadan | DLHD | | | | | APBN/APBD Prov/LSM | DLHD | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| | | Pengembangan sempadan sebagai jalur hijau produktif sehingga mempunyai nilai tambah | DLHD | | | | | APBN/APBD Prov/LSM | DLHD | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| | | Penguatan legalitas sempadan melalui peraturan daerah | DLHD | √ | | | | APBN/APBD Prov/LSM | DLHD | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Pengembangan kerjasama penguatan fungsi sempadan dengan lembaga usaha dan atau lembaga masyarakat | DLHD | | | | | APBN/APBD Prov/LSM | DLHD | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| | | Pemasangan batas fisik pemelihara sempadan | DLHD | | | | | APBN/APBD Prov/ Masyarakat | DLHD | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| | Pengelolaan kawasan cagar budaya | (penjelasan pada kawasan strategis Kota Tua Muntok) | - | | | | | - | - | |

| NO | RENCANA PEMANFAATAN RUANG | | PENANGGUNG JAWAB | TAHUN PELAKSANAAN | | | | SUMBER DANA | PELAKSANA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INDIKASI PROGRAM | KEGIATAN | | Tahap I | Tahap II | Tahap III | Tahap IV | | | |
| | | | | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | Pengelolaan kawasan rawan bencana alam | Menginventarisir kawasan rawan bencana alam di Kepulauan Bangka Belitung secara lebih akurat | DLHD | √ | | | | APBN/APBD Prov/LSM | DLHD | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Pengaturan kegiatan manusia di kawasan rawan bencana alam untuk melindungi manusia dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia | DLHD | | | | | APBN/APBD | DLHD | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| | | Melakukan upaya untuk mengurangi/ meniadakan resiko bencana alam seperti melakukan penghijauan pada lahan kritis | DLHD | | | | | APBN/APBD/LSM | DLHD | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| | | Melakukan sosialisasi bencana alam pada masyarakat, terutama masyarakat yang berada pada/dekat dengan daerah rawan bencana alam | DLHD | | | | | APBN/APBD/LSM | DLHD | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| | Pengelolaan kawasan lindung lainnya | pengembangan dan pemeliharaan kawasan konservasi laut daerah (KKLD) yang berlokasi di Kabupaten Bangka Tengah. | DLHD | | | | | APBN/APBD/LSM | DLHD | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| C2 | **Perwujudan Kawasan Budidaya** | | | | | | | | | |
| a | **Perwujudan Kawasan Hutan Produksi** | Pemantapan tata batas hutan produksi sehingga terdapat kepastian dalam pengelolaan dan investasi jangka panjang | Dinas Kehutanan | √ | | | | APBN | Dinas Kehutanan | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Penyusunan pemetakan (siteplan) hutan dan rencana usaha (business plan) | Dinas Kehutanan | √ | | | | APBN | Dinas Kehutanan | (seharusnya) selesai pada tahap I |

| NO | RENCANA PEMANFAATAN RUANG | | PENANGGUNG JAWAB | TAHUN PELAKSANAAN | | | | SUMBER DANA | PELAKSANA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INDIKASI PROGRAM | KEGIATAN | | Tahap I | Tahap II | Tahap III | Tahap IV | | | |
| | | | | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | | Pembangunan jalan produksi | Dinas Kehutanan | √ | | | | APBN/APBD Prov | Dinas Kehutanan | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (seperti komoditi rotan, tanaman obat, atau sutera alam) | Dinas Kehutanan | | | | | APBN | Dinas Kehutanan | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| | | Pengembangan tanaman hutan atau tanaman obat-obatan pada lahan hutan rakyat | Dinas Kehutanan | √ | | | | APBN | Dinas Kehutanan | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| b | **Perwujudan Kawasan Hutan Rakyat** | Pemantapan tata batas hutan rakyat sehingga terdapat kepastian dalam pengelolaan dan investasi jangka panjang | Dinas Kehutanan | √ | | | | APBD Prov | Dinas Kehutanan | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Melakukan rehabilitasi hutan yang mengalami kerusakan | Dinas Kehutanan | √ | | | | APBD Prov | Dinas Kehutanan | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Penyusunan pemetakan (siteplan) hutan dan rencana usaha (business plan) | Dinas Kehutanan | √ | | | | APBD Prov | Dinas Kehutanan | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Pembangunan jalan produksi dean inspeksi | Dinas Kehutanan | √ | | | | APBD Prov | Dinas Kehutanan | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (seperti komoditi rotan, tanaman obat, atau sutera alam) | Dinas Kehutanan | | | | | APBD Prov | Dinas Kehutanan | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| | | Pengembangan tanaman hutan atau tanaman obat-obatan pada lahan hutan rakyat | Dinas Kehutanan | | | | | APBD Prov | Dinas Kehutanan | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| c | **Perwujudan Kawasan Peruntukan Pertanian** | Menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagai bagian dari pertahanan pangan nasional | Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan | √ | | | | APBD Kab/Kota | Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan | (seharusnya) selesai pada tahap I |

| NO | RENCANA PEMANFAATAN RUANG | | PENANGGUNG JAWAB | TAHUN PELAKSANAAN | | | | SUMBER DANA | PELAKSANA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INDIKASI PROGRAM | KEGIATAN | | Tahap I | Tahap II | Tahap III | Tahap IV | | | |
| | | | | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | | |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* |
| | | Meningkatkan pemanfaatan lahan kering kurang produktif sebagai lahan pertanian pangan dan pertanian hortikultur | Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan | √ | | | | APBD Kab/Kota | Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Pengembangan pertanian dapat dilakukan dengan pendekatan agropolitan | Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan | √ | | | | APBN/APBD Prov/ APBD Kab/Kota | Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Menetapkan tata batas kawasan perkebunan komoditas unggulan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan | Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan | √ | | | | APBD Kab/Kota | Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Mengembangkan bibit unggul komoditas unggulan pertanian dan atau perkebunan dan melakukan peremajaan secara berkala | Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan | | | | | APBN/APBD Prov/ APBD Kab/Kota | Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| | | Menetapkan kawasan sentra peternakan ternak besar, kecil dan unggas secara integratif dengan kegaitan pertanian hortikultur dan atau perkebunan | Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan | √ | | | | APBD Kab/Kota | Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Membangun prasarana dan sarana pertanian/perkebunan guna peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk | Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan | | | | | APBD Kab/Kota | Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| d | Perwujudan Sentra Perikanan | Menetapkan kawasan sentra perikanan budidaya dan perikanan tangkap dengan pendekatan minapolitan | Dinas Kelautan dan Perikanan | √ | | | | APBD Kab/Kota | Dinas Kelautan dan Perikanan | (seharusnya) selesai pada tahap I |

| NO | RENCANA PEMANFAATAN RUANG | | PENANGGUNG JAWAB | TAHUN PELAKSANAAN | | | | SUMBER DANA | PELAKSANA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INDIKASI PROGRAM | KEGIATAN | | Tahap I | Tahap II | Tahap III | Tahap IV | | | |
| | | | | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | | Menyusun masterplan minapolitan perikanan budidaya dan perikanan tangkap | Dinas Kelautan dan Perikanan | √ | | | | APBD Kab/Kota | Dinas Kelautan dan Perikanan | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Pengelolaan sumber daya air secara optimal bagi pengembangan perikanan budidaya | Dinas Kelautan dan Perikanan | | | | | APBN/APBD Prov/ APBD Kab/Kota | Dinas Kelautan dan Perikanan | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| | | Pembangunan sarana dan prasarana peningkatan produktivitas perikanan budidaya | Dinas Kelautan dan Perikanan | √ | | | | APBN/APBD Prov/ APBD Kab/Kota | Dinas Kelautan dan Perikanan | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Penyediaan perlengkapan dan prasarana penunjang untuk pengingkatan produktivitas perikanan tangkap | Dinas Kelautan dan Perikanan | √ | | | | APBN/APBD Prov/ APBD Kab/Kota | Dinas Kelautan dan Perikanan | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Pengembangan kegiatan pengolahan (industri) perikanan terutama perikanan tangkap | Dinas Kelautan dan Perikanan | √ | | | | APBN/APBD Prov/ APBD Kab/Kota | Dinas Kelautan dan Perikanan | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| e | Perwujudan Kawasan Peruntukan Pertambangan | Pemantapan tata batas wilayah pertambangan (WP) dan wilayah pertambangan rakyat (WPR) | Dinas Pertembangan dan Energi | √ | | | | APBN/APBD Prov/ APBD Kab/Kota | Dinas Pertembangan dan Energi | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Menyusun dan menyepakati pola dan teknik pertambangan timah yang ramah lingkungan | Dinas Pertembangan dan Energi | √ | | | | APBN/APBD Prov/ APBD Kab/Kota | Dinas Pertembangan dan Energi | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Mendorong bertumbuhnya industri rakyat pengolahan timah yang ramah lingkungan | Dinas Pertembangan dan Energi | √ | | | | APBN/APBD Prov/ APBD Kab/Kota | Dinas Pertembangan dan Energi | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Pembangunan prasarana dan sarana penunjang kegiatan pertambangan, terutama pertambangan rakyat | Dinas Pertembangan dan Energi | √ | | | | APBN/APBD Prov/ APBD Kab/Kota | Dinas Pertembangan dan Energi | (seharusnya) selesai pada tahap I |

| NO | RENCANA PEMANFAATAN RUANG | | PENANGGUNG JAWAB | TAHUN PELAKSANAAN | | | | SUMBER DANA | PELAKSANA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INDIKASI PROGRAM | KEGIATAN | | Tahap I | Tahap II | Tahap III | Tahap IV | | | |
| | | | | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | | Mendorong pembangunan dan penyediaan peralatan pengolahan limbah yang ramah lingkungan | Dinas Pertembangan dan Energi | | | | | APBD Kab/Kota | Dinas Pertembangan dan Energi | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| | | Mengembangkan seluruh bentuk kegiatan pertambangan dengan skenario hijau | Dinas Pertembangan dan Energi | | | | | APBN/APBD Prov/ APBD Kab/Kota | Dinas Pertembangan dan Energi | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| | | Pemanfaatan kolong sebagai wahana budidaya perikanan dan wisata air | Dinas Pertembangan dan Energi | | | | | APBN/APBD Prov/ APBD Kab/Kota | Dinas Pertembangan dan Energi | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| **f** | **Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri** | Menetapkan dan menyepakati kawasan-kawasan industri di Kepulauan Bangka Belitung | Dinas Perindag | √ | | | | APBD Kab/Kota | Dinas Perindag | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Membangun sistem transportasi terpadu antara darat dan laut untuk mendukung kegiatan industri | Dinas Perindag | √ | | | | APBN/APBD Prov/ APBD Kab/Kota | Dinas Perindag | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Membangun instalasi penyediaan air bersih dan air baku untuk kebutuhan industri | Dinas Perindag | √ | | | | APBN/APBD Prov/ APBD Kab/Kota | Dinas Perindag | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Penyediaan sumber energi (listrik) dengan mengembangkan energi terbarukan | Dinas Perindag | √ | | | | APBN | Dinas Perindag | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Mendorong dan memastikan pembangunan atau penyediaan instalasi pengolahan limbah industri secara aman dan ramah lingkungan. | Dinas Perindag | √ | | | | APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas Perindag | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| **g** | **Perwujudan Kawasan Peruntukan Pariwisata** | Identifikasi kawasan potensial dan kawasan wisata yang sudah bertumbuh | Dinas Budaya dan Pariwisata | √ | | | | APBD Kab/Kota | Dinas Budaya dan Pariwisata | (seharusnya) selesai pada tahap I |

| NO | RENCANA PEMANFAATAN RUANG | | PENANGGUNG JAWAB | TAHUN PELAKSANAAN | | | | SUMBER DANA | PELAKSANA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INDIKASI PROGRAM | KEGIATAN | | Tahap I | Tahap II | Tahap III | Tahap IV | | | |
| | | | | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | | |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* |
| | | Penyusunan masterplan (rencana induk pengembangan pariwisata daerah) Kepulauan Bangka Berlitung | Dinas Budaya dan Pariwisata | √ | | | | APBD Kab/Kota | Dinas Budaya dan Pariwisata | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Revitalisasi, restorasi dan perbaikan bangunan dan kawasan wisata yang ada | Dinas Budaya dan Pariwisata | √ | | | | APBN/ APBD Prov/APBD Kab/Kota/ Masyarakat | Dinas Budaya dan Pariwisata | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Pengembangan kawasan potensial menjadi kawasan wisata strategis provinsi | Dinas Budaya dan Pariwisata | | | | | APBD Kab/Kota | Dinas Budaya dan Pariwisata | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| | | Peningkatan aksesibilitas pada kawasan-kawasan pariwisata yang potensial dalam satu kesatuan sistem perjalanan wisata (*trip*) | Dinas Budaya dan Pariwisata | √ | | | | APBN/ APBD Prov/APBD Kab/Kota/Masyarakat | Dinas Budaya dan Pariwisata | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| **h** | **Perwujudan Kawasan Peruntukan Permukiman** | Penetapan kawasan permukiman perkotaan maupun perdesaan | Dinas PU | √ | | | | APBD Kab/Kota | Dinas PU | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Penyusunan rencana strategis dan pengembangan perumahan dan infrastruktur kota | Dinas PU | √ | | | | APBN/APBD Prov | Dinas PU | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Penyusunan masterpal perencanaa kota yang ditetapkan | Dinas PU | √ | | | | APBD Kab/Kota | Dinas PU | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Identifikasi dan perbaikan perumahan yang tidak layak huni | Dinas PU | √ | | | | APBD Kab/Kota | Dinas PU | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Peningaktan kualitas lingkungan permukiman (desa/kota) | Dinas PU | √ | | | | APBN/ APBD Prov/APBD Kab/Kota/ Masyarakat | Dinas PU | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| **D** | **Perwujudan Kawasan Strategis** | | | | | | | | | |

| NO | RENCANA PEMANFAATAN RUANG | | PENANGGUNG JAWAB | TAHUN PELAKSANAAN | | | | SUMBER DANA | PELAKSANA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INDIKASI PROGRAM | KEGIATAN | | Tahap I | Tahap II | Tahap III | Tahap IV | | | |
| | | | | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| **D1** | **Perwujudan Kawasan Tanjung Kalian** | Penyusunan rencana rinci dan rencana teknis kawasan | Dinas PU | √ | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas PU | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Penyusunan masterplan dan businnes plan setiap komponen kegiatan | Dinas PU | √ | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas PU | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Pembangunan infrastruktur pendukung | Dinas PU | √ | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas PU | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Pembangunan komponen utama seperti PLTU, Stockpile, pelabuhan, terminal, kawasan wisata dan prasarana lainnya. | Dinas Pertambangan dan Energi; PU; Perhubungan; Perindag | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas Pertambangan dan Energi; PU; Perhubungan; Perindag | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| **D2** | **Perwujudan Kawasan Industri Perikanan Terpadu di Teluk Klabat Belinyu** | Penyusunan masterplan kawasan industri | Dinas Perindag | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas Perindag | |
| | | Penyusunan masterplan pelabuhan Belinyu | Dinas Perhubungan | √ | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas Perhubungan | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Penguasaan lahan untuk lahan industri dan pelabuhan dan pengembangannya | Dinas Perhubungan | √ | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas Perhubungan | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Pembangunan prasarana dan sarana penunjang | Dinas Perhubungan | √ | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas Perhubungan | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Pembangunan jalan akses dari Belinyu ke pelabuhan | Dinas Perhubungan | √ | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas Perhubungan | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Pembangunan dermaga & terminal | Dinas Perhubungan | √ | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas Perhubungan | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Pembangunan pabrik pengolahan ikan | Dinas Kelautan dan Perikanan | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas Kelautan dan Perikanan | Merupakan lanjutan dari Tahap I |

| NO | RENCANA PEMANFAATAN RUANG | | PENANGGUNG JAWAB | TAHUN PELAKSANAAN | | | | SUMBER DANA | PELAKSANA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INDIKASI PROGRAM | KEGIATAN | | Tahap I | Tahap II | Tahap III | Tahap IV | | | |
| | | | | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | | |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* |
| **D3** | **Perwujudan Pelabuhan dan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Berikat** | Penyusunan masterplan kawasan | Dinas Perindag | √ | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas Perindag | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Penyusunan proposal dan syarat pembangunan kawasan ekonomi khusus | Dinas Perindag | √ | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas Perindag | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Pengusulan kawasan ekonomi khusus Tanjung Berikat | Dinas Perindag | √ | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas Perindag | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Legalisasi kawasan ekonomi khusus tanjung Berikat | Dinas Perindag | √ | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas Perindag | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Pembangunan jalan akses dari Koba – Tanjung Berikat | Dinas Perindag | √ | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas Perindag | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Pembangunan kawasan wisata | Dinas Perindag | √ | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas Perindag | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Pembangunan pelabuhan (dermaga dan terminal) | Dinas Perindag | √ | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas Perindag | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Pembagunan sub kawasan industri (pabrik pengolahan) | Dinas Perindag | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas Perindag | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| **D4** | **Perwujudan KTM Batu Betumpang** | Penyusunan RDTR KTM Batu Betumpang | Dinas PU | √ | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas PU | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Penyusunan DED Infrastruktur dan permukiman kawasan | Dinas PU | √ | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas PU | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Pembangunan infrastruktur permukiman | Dinas PU | √ | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas PU | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Pembangunan sarana sosial budaya | Dinas PU | √ | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas PU | (seharusnya) selesai pada tahap I |

| NO | RENCANA PEMANFAATAN RUANG | | PENANGGUNG JAWAB | TAHUN PELAKSANAAN | | | | SUMBER DANA | PELAKSANA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INDIKASI PROGRAM | KEGIATAN | | Tahap I | Tahap II | Tahap III | Tahap IV | | | |
| | | | | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | | Pengembangan kawasan pertanian | Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan | √ | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Pengembangan kawasan lindung dan RTH | DLHD | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | DLHD | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| **D5** | **Perwujudan Kawasan Minapolitan Lepar Pongok** | Penyusunan masterplan Minapolitan Lepar Pongok | Dinas Kelautan & Perikanan | √ | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas Kelautan & Perikanan | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Penyiapan kelembagaan pengelola minapolitan | Dinas Kelautan & Perikanan | √ | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas Kelautan & Perikanan | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Pengesahan kawasan minapolitan | Dinas Kelautan & Perikanan | √ | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas Kelautan & Perikanan | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Pembangunan sarana penunjang utama kegaitan Minapolitan | Dinas Kelautan & Perikanan | √ | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas Kelautan & Perikanan | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Pembangunan infrastruktur pendukung | Dinas PU/ Dinas Kelautan & Perikanan | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas PU/ Dinas Kelautan & Perikanan | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| | | Pembangunan kawasan industri pengolahan ikan | Dinas Kelautan &Perikanan | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas Kelautan &Perikanan | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| **D6** | **Perwujudan Kawasan Etalase Perikanan Selat Nasik** | Penyusunan masterplan kawasan industri perikanan tangkap dan budidaya | Dinas Kelautan & Perikanan | √ | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas Kelautan & Perikanan | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Pembangunan pabrik pengolahan ikan | Dinas Kelautan & Perikanan | √ | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas Kelautan & Perikanan | (seharusnya) selesai pada tahap I |

| NO | RENCANA PEMANFAATAN RUANG | | PENANGGUNG JAWAB | TAHUN PELAKSANAAN | | | | SUMBER DANA | PELAKSANA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INDIKASI PROGRAM | KEGIATAN | | Tahap I | Tahap II | Tahap III | Tahap IV | | | |
| | | | | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | | |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* |
| | | Pembangunan kawasan habitat ikan alami dengan mangrove | DLHD/ Dinas Kelautan & Perikanan | √ | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | DLHD/ Dinas Kelautan & Perikanan | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Pembangunan tambak ikan | Dinas Kelautan & Perikanan | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas Kelautan & Perikanan | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| | | Pembangunan rumah ikan (pengolahan, budidaya dan hias) | Dinas Kelautan & Perikanan | √ | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas Kelautan & Perikanan | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| **D7** | **Perwujudan Kawasan Industri Perikanan Tanjung Binga** | Penyusunan masterplan kawasan industri | Dinas Perindag | √ | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas Perindag | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Penguasaan lahan untuk lahan industri dan pelabuhan dan pengembangannya | Dinas Perindag | √ | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas Perindag | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Pembangunan prasarana dan sarana penunjang | Dinas Perindag/PU | √ | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas Perindag/PU | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Pembangunan jalan akses ke Tanjung Binga (pabrik) | Dinas PU | √ | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas PU | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Pembangunan dermaga & terminal | Dinas PU | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas PU | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| | | Pembangunan pabrik pengolahan ikan | Dinas Kelautan dan Perikanan | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas Kelautan dan Perikanan | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| **D8** | **Perwujduan Kawasan Kota Terpadu Mandiri** | Penyusunan RDTR KTM Gantung | Dinas PU | √ | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas PU | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Penyusunan DED Infrastruktur dan permukiman kawasan | Dinas PU | √ | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas PU | (seharusnya) selesai pada tahap I |

| NO | RENCANA PEMANFAATAN RUANG | | PENANGGUNG JAWAB | TAHUN PELAKSANAAN | | | | SUMBER DANA | PELAKSANA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INDIKASI PROGRAM | KEGIATAN | | Tahap I | Tahap II | Tahap III | Tahap IV | | | |
| | | | | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | | |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* |
| | | Pembangunan infrastruktur permukiman | Dinas PU | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas PU | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| | | Pembangunan kampung budaya Laskar Pelangi | Dinas Budpar | √ | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas Budpar | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Pengembangan kawasan pertanian | Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| | | Pengembangan kawasan lindung dan RTH | DLHD | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | DLHD | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| **D9** | **Perwujduan Kawasan Industri Terpadu Air Kelik (KIAK)** | Penyusunan masterplan kawasan | Dinas Perindag | √ | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas Perindag | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Penyiapan lahan | Dinas Perindag | √ | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas Perindag | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Pembangunan jalan askes | Dinas PU | √ | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas PU | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Pembangunan infrastruktur penunjang | Dinas PU | √ | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas PU | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Pembangunan sistem pengolahan ikan ekspor | Dinas Perindag | √ | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas Perindag | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Pembangunan dermaga dan terminal (pelabuhan) | Dinas Perhubungan | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas Perhubungan | Merupakan lanjutan dari Tahap I |

| NO | RENCANA PEMANFAATAN RUANG | | PENANGGUNG JAWAB | TAHUN PELAKSANAAN | | | | SUMBER DANA | PELAKSANA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INDIKASI PROGRAM | KEGIATAN | | Tahap I | Tahap II | Tahap III | Tahap IV | | | |
| | | | | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | | |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* |
| | | Pembangunan kawasan wisata | Dinas Budpar | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas Budpar | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| | | Pembangunan prasarana penunjang lainnya | Dinas PU | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas PU | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| **D10** | **Perwujduan Pelabuhan ASDP Manggar – Kepang** | Penyusunan masterplan pengembangan ASDP Manggar | Dinas Perhubungan | √ | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas Perhubungan | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Penyediaan lahan | Dinas Perhubungan | √ | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas Perhubungan | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Pembangunan infrastruktur pendukung Perbaikan dan peningkatan kapasitas dermaga dan terminal | Dinas PU | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas PU | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| | | Pengadaan kapal penumpang | Dinas Perhubungan | √ | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas Perhubungan | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Penyediaan sistem air baku dan air minum | Dinas PU | √ | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas PU | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| **D11** | **Perwujduan Kota Tua Muntok** | Identifikasi dan klasifikasi lokasi dan jenis bangunan *heritage* | Dinas Budpar | √ | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas Budpar | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Penyusunan proposal pengajuan Kota Tua Muntok sebagai Kawasan Pusaka Nasional, *Asian Herritage* dan diupayakan menjadi *World Heritage* | Dinas Budpar | √ | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas Budpar | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Penataan kawasan dan restorasi bangunan | Dinas Budpar | √ | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas Budpar | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Pengesahan Kota Tua Muntok sebagai kawasan heritage (nasional/dunia) | Dinas Budpar | √ | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas Budpar | (seharusnya) selesai pada tahap I |

| NO | RENCANA PEMANFAATAN RUANG | | PENANGGUNG JAWAB | TAHUN PELAKSANAAN | | | | SUMBER DANA | PELAKSANA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INDIKASI PROGRAM | KEGIATAN | | Tahap I | Tahap II | Tahap III | Tahap IV | | | |
| | | | | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | | Penyusunan heritage map dan promosi kawasan | Dinas Budpar | √ | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas Budpar | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Penyusunan agenda tahunan | Dinas Budpar | √ | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas Budpar | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Penyelenggaraan atraksi budaya (reguler) | Dinas Budpar | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas Budpar | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| | | Pengembangan kota Muntok dengan banchmark kota tua | Dinas Budpar | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas Budpar | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| | | Pelestariaan dan pemeliharaan bangunan/kawasan tua | Dinas Budpar | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas Budpar | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| **D12** | **Perwujudan Kawasan Universitas Bangka Belitung (UBB), STAIN, Kota Tua Muntok & Museum Nasional Maritim** | Pengembangan kawasan pendidikan | Dinas Pendidikan | √ | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas Pendidikan | |
| | | penetapan kawasan sekitar UUB dan STAIN adalah kawasan (aglomerasi) pendidikan | Dinas Pendidikan | √ | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas Pendidikan | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | penyusunan masterplan kawasan pendidikan terpadu skala regional, masterplan kawasan Kota Tua Muntok, dan masterplan Museum Nasional Maritim | Dinas Pendidikan | √ | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas Pendidikan | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | pembangunan sarana penunjang pendidikan | Dinas PU | √ | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas PU | (seharusnya) selesai pada tahap I |

| NO | RENCANA PEMANFAATAN RUANG | | PENANGGUNG JAWAB | TAHUN PELAKSANAAN | | | | SUMBER DANA | PELAKSANA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INDIKASI PROGRAM | KEGIATAN | | Tahap I | Tahap II | Tahap III | Tahap IV | | | |
| | | | | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | | pembangunan kawasan wisata pendidikan dan laboratorium alam | | √ | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | pengembangan kerjasama pendidikan dengan universitas luar negeri | Dinas Pendidikan | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas Pendidikan | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| | | pembangunan infrastruktur pendukung kawasan pendidikan terpadu skala regional, kawasan Kota Tua Muntok, dan Museum Nasional Maritim | Dinas Pendidikan | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas Pendidikan | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| **D14** | **Pengelolaan Cagar Alam Gunung Lalang (Belitung), Gunung Menumbing (Bangka Barat), Hutan Konservasi Gunung Maras (Bangka), Gunung Mangkol (Bangka Tengah), Gunung Permisan (Bangka Selatan), Jering Menduyung (Bangka Barat), Kota Kapur (Bangka), Kawasan Kepulauan Buku Limau (Belitung Timur), Taman Kehati (Belitung); dan Karantina Hewan (Pulau Nadu, Kabupaten Belitung)** | Pemantapan tata batas kawasan Cagar Alam & Hutan Konservasi | Dinas Kehutanan | √ | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas Kehutanan | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Identifikasi kawasan/areal kritis yang mengalami deforestasi dan kerusakan lingkungan | Dinas Kehutanan | √ | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas Kehutanan | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Rehabilitasi kawasan melalui reboisasi dan perbaikan tanah | Dinas Kehutanan | √ | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas Kehutanan | (seharusnya) selesai pada tahap I |

| NO | RENCANA PEMANFAATAN RUANG | | PENANGGUNG JAWAB | TAHUN PELAKSANAAN | | | | SUMBER DANA | PELAKSANA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INDIKASI PROGRAM | KEGIATAN | | Tahap I | Tahap II | Tahap III | Tahap IV | | | |
| | | | | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | | |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* |
| | | | | | | | | | | |
| | | Perbaikan fasilitas penunjang | Dinas Kehutanan | √ | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas Kehutanan | (seharusnya) selesai pada tahap I |
| | | Penguatan perlindungan cagar alam, baik yang bersifat fisik maupun non fisik | Dinas Kehutanan | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota | Dinas Kehutanan | Merupakan lanjutan dari Tahap I |
| | | Peningkatan fasilitas karantina hewan | | | | | | | | Merupakan lanjutan dari Tahap I |

*Sumber: Hasil Analisis Tim RTRW 2010 (dibarukan oleh Bappeda, 2020*

**Tabel V.11**
Indikasi Program Pengembangan Pariwisata Daerah

| NO | STRATEGI | PROGRAM | INDIKASI KEGIATAN | TAHUN PELAKSANAAN | | | | | | PELAKSANA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | PENANGGUNG JAWAB | PENDUKUNG |
| 1 | Menetapkan Kota Pangkalpinang dan Tanjungpandan sebagai pusat pelayanan primer pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta Muntok, Sungailiat, Toboali, dan Pulau Mendanau sebagai pusat pelayanan sekunder pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. | Program pembangunan perwilayahan pariwisata | a.Penyusunan dan penetapan rencana pengembangan pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata Provinsi Kepulauan Babel. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan | ○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perencanaan pembangunan, bidang tata ruang, dan bidang hukum dan peraturan perundangan;<br>○ PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan dan bidang perencanaan pembangunan<br>○ Perguruan tinggi bidang perencanaan |
| | | | b.Sosialisasi dan sinkronisasi rencana pengembangan pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata Provinsi Kepulauan Babel. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan | ○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perencanaan pembangunan dan bidang tata ruang;<br>○ PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan dan bidang perencanaan pembangunan |
| | | | c. Fasilitasi pengembangan kemitraan dan kolaborasi program dalam pe-ngembangan pusat pela-yanan primer dan sekun-der pariwisata Provinsi Kepulauan Babel. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan | ○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perencanaan pembangunan dan bidang tata ruang;<br>○ PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan dan bidang perencanaan pembangunan |
| | | | d.Pelaksanaan pemantau-an dan evaluasi pelaksanaan rencana pengem-bangan pusat pelayanan primer dan sekunder pari-wisata Provinsi Kepulauan Babel. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan | ○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perencanaan pembangunan dan bidang tata ruang;<br>○ PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan dan bidang perencanaan pembangunan |
| 2 | Pembangun Destinasi Pariwisata | Program pembangunan | a.Penyusunan jalur wisata tematik lokal (dalam DPP), | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung | ○ PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan; |

| NO | STRATEGI | PROGRAM | INDIKASI KEGIATAN | TAHUN PELAKSANAAN | | | | | | PELAKSANA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | PENANGGUNG JAWAB | PENDUKUNG |
| | Provinsi (DPP) Wilayah Utara Kepulauan Bangka Belitung dan DPP Wilayah Selatan Kepulauan Bangka Belitung untuk mendorong pertumbuhan pariwisata yang seimbang dan terpadu antara wilayah utara dan selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. | daya tarik wisata | provinsi, nasional, dan internasional sesuai dengan keunggulan daya tarik wisata di wilayah DPP dan tema pengembangan KSPP & KPPP. | | | | | | | bidang kepariwisataan | ○ Asosiasi perjalanan wisata Provinsi Kep. Bangka Belitung;<br>○ Perguruan tinggi bidang kepariwisataan |
| | | | b.Sosialisasi dan sinkronisasi program dan kegiatan pengembangan jalur wisata tematik di DPP. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan | ○ Kementerian bidang kepariwisataan;<br>○ Kabupaten/Kota bid. kepariwisataan;<br>○ Asosiasi perjalanan wisata Provinsi Babel;<br>○ Perguruan tinggi bid. kepariwisataan |
| | | | c.Pendampingan pengem-bangan produk pariwisata dan ujicoba jalur wisata tematik. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Babel bidang kepariwisataan | ○ Kementerian bidang kepariwisataan;<br>○ Kabupaten/Kota bid. kepariwisataan;<br>○ Asosiasi perjalanan wisata Provinsi Kep. Babel; |
| | | | d.Pelaksanaan pemantau-an dan evaluasi pelaksa-naan jalur wisata tematik lokal (dalam DPP), provinsi, nasional, dan internasional sesuai dengan keunggulan daya tarik wisata di wilayah DPP dan tema pengem-bangan KSPP dan KPPP. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan | ○ Kementerian bidang kepariwisataan;<br>○ PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan;<br>○ Asosiasi perjalanan wisata Provinsi Kep. Bangka Belitung;<br>○ Perguruan tinggi bidang kepariwisataan |
| 3 | Membangun Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) Muntok dan sekitarnya, KSPP | Program pembangunan perwilayahan pariwisata | a.Penyusunan dan penetapan Rencana Induk dan Rencana Aksi Multipihak Pembangunan KSPP Muntok dan sekitarnya. | | | | | | | PD Provinsi Bangka Belitung bidang kepariwisataan | ○ PD Provinsi Bangka Belitung bidang perencanaan pembangunan, tata ruang, dan hukum; |

| NO | STRATEGI | PROGRAM | INDIKASI KEGIATAN | TAHUN PELAKSANAAN | | | | | | PELAKSANA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | PENANGGUNG JAWAB | PENDUKUNG |
| | Belinyu- Sungailiat dan sekitarnya, KSPP Pangkalpinang-Mendo Barat-Bangka Tengah, serta KSPP Pulau Belitung dan sekitarnya untuk memberikan nilai tambah yang positif bagi identitas provinsi sebagai wilayah pertambangan timah dan penghasil lada di Indonesia, memberikan perlindungan terhadap sumber daya alam dan budaya, peningkatan kualitas ekosistem alam, serta pemulihan kerusakan lingkungan. | | b.Penyusunan dan penetapan Rencana Induk dan Rencana Aksi Multipihak Pembangunan KSPP Belinyu-Sungailiat dan sekitarnya. | | | | | | | SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan | ○ PD Provinsi Bangka Belitung bidang perencanaan pembangunan, tata ruang, dan hukum;<br>○ PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan dan perencanaan;<br>○ Perguruan tinggi bidang perencanaan |
| | | | c. Penyusunan dan penetapan Rencana Induk dan Rencana Aksi Multipihak Pembangunan KSPP Pangkalpinang-Mendo Barat Bangka Tengah. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan | ○ PD Provinsi Bangka Belitung bidang perencanaan pembangunan, tata ruang, dan hukum;<br>○ PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan;<br>○ Perguruan tinggi Bid. Kepariwisataan |
| | | | d. Penyusunan dan penetapan Rencana Induk dan Rencana Aksi Multipihak Pembangunan KSPP Pulau Belitung dan sekitarnya. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan | ○ PD Provinsi Bangka Belitung bidang perencanaan pembangunan, tata ruang, dan hukum;<br>○ PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan;<br>○ Perguruan tinggi Bid. Kepariwisataan |
| | | | e. Sinkronisasi dan kola-borasi program dan kegiatan dalam Rencana Induk dan Rencana Aksi Multipihak KSPP Kepulauan Bangka Belitung. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan | ○ PD Provinsi Bangka Belitung bidang perencanaan dan bidang tata ruang;<br>○ PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan. |
| | | | f.Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk dan Rencana Aksi Multipihak Pembangunan KSPP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan | ○ PD Provinsi Bangka Belitung bidang perencanaan pembangunan, tata ruang;<br>○ PD Kabupaten/Kota bidang perencanaan dan kepariwisataan;<br>○ Perguruan tinggi Bid. Kepariwisataan |
| 4 | Membangun Kawa-san Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP) Toboali dan sekitarnya, KPPP | Program pembangunan perwilayahan pariwisata | a. Penyusunan dan penetapan Rencana Induk dan Rencana Aksi Multipihak Pembangunan KPPP Toboali dan sekitarnya. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan | ○ PD Provinsi bidang perencanaan pembangunan, bidang tata ruang;<br>○ PD Kabupaten/Kota bidang perencanaam dan kepariwisataan; |
| | | | | | | | | | | | |

| NO | STRATEGI | PROGRAM | INDIKASI KEGIATAN | TAHUN PELAKSANAAN | | | | | | PELAKSANA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | PENANGGUNG JAWAB | PENDUKUNG |
| | Gugusan Pulau di Selat Gaspar untuk memperkuat citra sebagai destinasi pariwisata bahari & budaya khas, meningkatkan daya saing produk pari-wisata secara inter-nasional, mencipta-kan keterpaduan pembangunan & penyebaran perkembangan pariwisata yang lebih luas. | | b. Penyusunan dan penetapan Rencana Induk dan Rencana Aksi Multipihak Pembangunan KPPP Gugusan Pulau di Selat Gaspar. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan | ○ PD Provinsi Bangka Belitung bidang perencanaan, tata ruang, dan bidang hukum dan peraturan perundangan;<br>○ PD Kabupaten/Kota bidang perencanaan dan Kepariwisataan |
| | | | c. Sinkronisasi dan kolaborasi program dan kegiatan dalam Rencana Induk dan Rencana Aksi Multipihak KSPP Babel. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan | ○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perencanaan pembangunan, bidang tata ruang;<br>○ PD Kabupaten/Kota bid. perencanaan; |
| | | | d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk dan Rencana Aksi Multipihak Pembangunan KPPP Prov. Kep. Babel. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan | ○ PD Provinsi Bangka Belitung bidang perencanaan dan idang tata ruang;<br>○ PD Kabupaten/Kota bidang perencanaan; |
| 5 | Memadukan pembangunan perwilayahan DPP, KPPP, dan KSPP Kep. Babel dengan DPN Palembang- Bangka Belitung, KSPN Tanjung Kelayang & sekitar-nya, KPPN Belinyu & sekitarnya, KPPN Pangkalpinang-Sungailiat dan sekitarnya, serta KPPN Punai- Belitung dan sekitarnya. | Program pembangunan perwilayahan pariwisata | a.Sosialisasi dan sinkronisasi program dan kegiatan dalam Rencana Induk dan Rencana Aksi Multipihak KSPP Pulau Belitung dengan Rencana Induk dan Rencana Detil KSPN TanjungKelayang & sekitarnya. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan | ○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perencanaan pembangunan, bidang tata ruang;<br>○ PD Kabupaten/Kota bidang perencanaam dan kepariwisataan;<br>○ Perguruan tinggi Bid. Kepariwisataan |
| | | | b.Penandatangan naskah kesepakatan bersama pembagian peran dalam pembangunan KSPN Tanjung kelayang & KSPP Pulau Belitung. | | | | | | | Kementerian bidang kepariwisataan | ○ PD Provinsi bid. perencanaan, bid. tata ruang, dan kepariwisataan;<br>○ PD Kabupaten/Kota bidang perencanaan dan kepariwisataan;<br>○ Perguruan tinggi Bid. Kepariwisataan; |
| | | | c.Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembagian peran dalam pembangunan KSPN Tanjungkelayang dan KSPP Pulau Belitung. | | | | | | | Kementerian bidang kepariwisataan | ○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perencanaan pembangunan, bidang tata ruang, dan kepariwisataan; |
| 6 | Mengembangkan sistem mitigasi dan adaptasi terhadap bencana, kerusakan lingkungan akibat kegiatan | Program pembangunan perwilayahan pariwisata | a.Penyusunan dan penetapan sistem mitigasi dan adaptasi pariwisata terhadap bencana. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang penanggulangan bencana | ○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perencanaan, bidang Hukum, bidang lingkungan hidup, dan kepariwisataan;<br>○ PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan; |

| NO | STRATEGI | PROGRAM | INDIKASI KEGIATAN | TAHUN PELAKSANAAN | | | | | | PELAKSANA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | PENANGGUNG JAWAB | PENDUKUNG |
| | pertambangan dan sektor lain di KSPP dan KPPP, serta dampak lingkungan akibat pariwisata di seluruh wilayah DPP. | | b.Penyusunan dan penetapan sistem mitigasi dan adaptasi terhadap kerusakan lingkungan di KSPP dan KPPP. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang lingkungan hidup | ○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perencanaan, bidang Hukum, bidang lingkungan hidup;<br>○ PD Kabupaten/Kota bidang perencanaan; |
| | | | c. Sosialiasi dan sinkronisasi sistem mitigasi dan adaptasi dengan rencana sektor lain. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perencanaan pembangunan | ○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang lingkungan hidup, Bencana, dan kepariwisataan;<br>○ PD Kabupaten/Kota bidang perencanaan; |
| | | | d.Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan mitigasi dan adaptasi bencana dan kerusakan | | | | | | | PD Provinsi Kep. Babel bidang perencanaan pembangunan | ○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang Bencana, dan kepariwisataan; |
| 7 | Menetapkan dan mengembangkan daya tarik wisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berbasis pesisir, pantai, pulau- pulau kecil, formasi geologis batuan granit, perkebunan lada, adat-istiadat khas | Program pembangunan daya tarik wisata | a.Penyusunan dan penetapan standar pembangunan dan pengelolaan bagi daya tarik wisata provinsi. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bid. kepariwisataan | ○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang Pekerjaan Umum, Kebudayaan dan Hukum dan Peraturan |
| | | | b.Dukungan dan pendam-pingan penerapan standar pembangunan dan pengelo-laan daya tarik wisata provinsi. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan | ○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang Pekerjaan Umum, Kebudayaan;<br>○ Perguruan tinggi bidang perencanaan kepariwisataan |
| | | | c.Pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan standar pembangunan dan pengelo-laan daya tarik wisata provinsi. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan | ○ PD Provinsi Bangka Belitung bidang Pekerjaan Umum dan kebudayaan;<br>○ Perguruan tinggi bidang perencanaan kepariwisataan |
| | | | d.Pemberian penghargaan/ insentif bagi daya tarik wisata provinsi berkinerja tinggi. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan | ○ PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan;<br>○ Perguruan tinggi bidang perencanaan kepariwisataan |
| 8 | Mengembangkan keterpaduan | Program pembangunan | a.Sinkronisasi program/ kegiatan pengembangan daya | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung | ○ Kementerian bidang kepariwisataan |

| NO | STRATEGI | PROGRAM | INDIKASI KEGIATAN | TAHUN PELAKSANAAN | | | | | | PELAKSANA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | PENANGGUNG JAWAB | PENDUKUNG |
| | pembangunan dengan daya tarik wisata nasional dan daya tarik wisata kab/kota yang terletak di sekitar daya tarik wisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. | daya tarik wisata | tarik wisata provinsi dengan daya tarik wisata nasional dan daya tarik wisata kabupaten/ kota di sekitarnya. | | | | | | | bidang kepariwisataan | o PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan |
| | | | b.Penyusunan paket wisata terpadu daya tarik wisata provinsi, daya tarik wisata nasional, daya tarik wisata kabupaten/kota. | | | | | | | Asosiasi perjalanan wisata Provinsi Kep. Bangka Belitung | o Kementerian bidang kepariwisataan<br>o PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan<br>o PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan |
| 9 | Mengembangkan interpretasi sesuai tema daya tarik dan jalur wisata tematik DPP Kepulauan Bangka Belitung. | Program pembangunan daya tarik wisata | a.Perencanaan interpretasi jalur wisata tematik. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan | o Kementerian bidang kepariwisataan;<br>o PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan;<br>o Perguruan tinggi bidang kepariwisataan |
| | | | b.Perencanaan interpretasi di daya tarik wisata dalam jalur wisata tematik. | | | | | | | Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan | o Kementerian bidang kepariwisataan;<br>o PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan;<br>o Perguruan tinggi bidang kepariwisataan |
| | | | c.Pembuatan dan pemasangan papan interpretasi di daya tarik wisata dan di jalan dalam jalur wisata tematik. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bid. kepariwisataan | o PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan dan Perhubungan;<br>o Perguruan tinggi bidang kepariwisataan |
| | | | d.Pembuatan panduan bagi interpreter. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bid. kepariwisataan | o PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan;<br>o Perguruan tinggi bid. kepariwisataan |
| | | | e. Pembuatan brosur/leaflet interpretasi di daya tarik wisata. | | | | | | | Pengelola daya tarik wisata | o PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan;<br>o PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan;<br>o Perguruan tinggi bidang kepariwisataan |

| NO | STRATEGI | PROGRAM | INDIKASI KEGIATAN | TAHUN PELAKSANAAN | | | | | | PELAKSANA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | PENANGGUNG JAWAB | PENDUKUNG |
| | | | f. Pelatihan interpretasi bagi para pemandu wisata. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan | o PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan;<br>o Perguruan tinggi bidang kepariwisataan |
| 10 | Merencanakan dan menerapkan pengelolaan pengunjung pada daya tarik wisata primer dan sekunder pada KSPP dan KPPP Kepulauan Bangka Belitung. | Program pembangunan daya tarik wisata | a.Penyusunan pedoman rencana pengelolaan pengunjung di daya tarik wisata. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bid. kepariwisataan | o Pengelola daya tarik wisata;<br>o Perguruan tinggi bidang kepariwisataan |
| | | | b.Penyusunan rencana pengelolaan pengunjung di daya tarik wisata. | | | | | | | Pengelola daya tarik wisata | o Perguruan tinggi bidang kepariwisataan |
| | | | c. Pemantauan dan evaluasi penerapan rencana pengelolaan pengunjung daya tarik wisata. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan | o PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan;<br>o Pengelola daya tarik wisata;<br>o Perguruan tinggi bid.kepariwisataan |
| 11 | Merencanakan dan menerapkan informasi terpadu antara daya tarik wisata yang memiliki keterkaitan tema. | Program pembangunan daya tarik wisata | a.Penyusunan sistem informasi daya tarik wisata terpadu berbasis teknologi informasi | | | | | | | PD Provinsi bidang komunikasi dan infprmatika | o PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kominfo, Bid. kepariwisataan;<br>o PD Kabupaten/Kota bid. pariwisata; |
| | | | b.Penyediaan informasi tentang daya tarik wisata sekitar dan daya tarik wisata yang memilki keterkaitan tema dengan daya tarik wisata primer dan sekunder | | | | | | | Pengelola daya tarik wisata | o PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan;<br>o PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan;<br>o Perguruan tinggi bid. kepariwisataan |
| 12 | Mengembangkan program geowisata pada daya tarik wisata alam berbasis pesisir, pantai, pulau-pulau kecil, dan formasi geologis batuan granit. | Program pembangunan daya tarik wisata | a.Penyusunan interpretasi berbasis geowisata di daya tarik wisata. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan | o PD Provinsi bid. geologis/sumber daya mineral, kehutanan, pertanian, perkebunan., kebudayaan;<br>o PD Kabupaten/Kota bid. pariwisata;<br>o Perguruan tinggi bid. kepariwisataan |
| | | | | | | | | | | | |

| NO | STRATEGI | PROGRAM | INDIKASI KEGIATAN | TAHUN PELAKSANAAN | | | | | | PELAKSANA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | PENANGGUNG JAWAB | PENDUKUNG |
| | | | b.Penyelenggaraan program wisata pendidikan geowisata didaya tarik wisata bagi wisatawan umum/pelajar/ mahasiswa | | | | | | | Pengelola daya tarik wisata | ○ PD Provinsi bidang kepariwisataan;<br>○ PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan;<br>○ Asosiasi usaha perjalanan wisata |
| | | | c.Penyusunan dan penyelenggaraan paket geowisata. | | | | | | | Asosiasi usaha perjalanan wisata | ○ PD Provinsi bidang kepariwisataan;<br>○ PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan;<br>○ Asosiasi usaha perjalanan wisata di Bandung |
| 13 | Mengembangkan program wisata minat khusus bahari (selam, *snorkeling*, memancing di tengah laut) pada daya tarik wisata berbasis pantai dan pulau-pulau kecil. | Program pembangunan daya tarik wisata | a.Penyusunan interpretasi berbasis ekowisata bahari di daya tarik wisata pantai dan pulau-pulau kecil | | | | | | | PDKabupaten/Kota bidang kepariwisataan | ○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisata, bidang kelautan dan perikanan;<br>○ Perguruan tinggi bid. kepariwisataan |
| | | | b.Sosialisasi keselamatan dan keamanan penyelenggaraan wisata minat khusus bahari. | | | | | | | Daerah Provinsi | ○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisata, bidang kelautan dan perikanan;<br>○ Perguruan tinggi bid. kepariwisataan |
| | | | c.Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas dan pelayanan keselamatan dan keamanan penyelenggaraan wisata minat khusus bahari. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kelautan dan perikanan | ○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan;<br>○ PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan;<br>○ Perguruan tinggi bid. kepariwisataan |
| 14 | Mengembangkan program wisata edukatif dan kreatif pada daya tarik wisata budaya berbasis pesisir, agrowisata lada dan lainnya, dan adat-istiadat khas | Program pembangunan daya tarik wisata | a.Penyusunan dan penyelenggaraan program wisata pendidikan dan wisata kreatif pada daya tarik agrowisata (lada dan lainnya). | | | | | | | -PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang pertanian dan perkebunan<br>-Pengelola daya tarik wisata | ○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan;<br>○ PD Kabupaten/Kota bid. kepariwisataan;<br>○ Perguruan tinggi bid. kepariwisataan |

| NO | STRATEGI | PROGRAM | INDIKASI KEGIATAN | TAHUN PELAKSANAAN | | | | | | PELAKSANA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | PENANGGUNG JAWAB | PENDUKUNG |
| | Kepulauan Bangka Belitung, khususnya nanggung dan upacara adat perkawinan. | | b.Penyusunan dan penyeleng-garaan program wisata kreatif pada daya tarik wisata seni, budaya pesisir. | | | | | | | -PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kebudayaan<br>-Pengelola daya tarik wisata | ○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan;<br>○ PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan;<br>○ Perguruan tinggi bid. kepariwisataan |
| | | | c.Penyusunan dan penyeleng-garaan paket wisata edukatif dan kreatif di desa wisata. | | | | | | | Pengelola desa wisata | ○ PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan;<br>○ Asosiasi perjalanan wisata Provinsi Kep. Bangka Belitung |
| 15 | 15. Meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan jaringan jalan menuju daya tarik wisata provinsi. | Program peningkatan aksesibilitas | a.Sinkronisasi kebutuhan peningkatan kualitas dan kapasitas jaringan jalan menuju daya tarik wisata provinsi dengan rencana pembangunan jaringan jalan provinsi dan kabupaten/kota. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang pekerjaan umum | ○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan;<br>○ PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan, bidang pekerjaan umum;<br>○ Asosiasi perjalanan wisata Provinsi Kep. Bangka Belitung |
| | | | b.Perbaikan dan pemeliharaan jaringan jalan menuju daya tarik wisata provinsi | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka | ○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang PU |
| 16 | Membangun jaringan transportasi sungai untuk mendukung pariwisata. | Program peningkatan aksesibilitas | a.Studi kelayakan pembangunan jaringan transportasi sungai untuk mendukung pariwisata Kepulauan Bangka Belitung. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perhubungan | ○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan;<br>○ PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan,bid. perhubungan;<br>○ Perguruan tinggi bidang transportasi |
| | | | b.Penyusunan, penetapan, dan sosialisasi rencana pembangunan jaringan transportasi sungai untuk mendukung pariwisata Kepulauan Bangka Belitung. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perhubungan Belitung bidang pekerjaan umum | ○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan |
| | | | | | | | | | | | |

| NO | STRATEGI | PROGRAM | INDIKASI KEGIATAN | TAHUN PELAKSANAAN | | | | | | PELAKSANA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | PENANGGUNG JAWAB | PENDUKUNG |
| | | | c. Sinkronisasi program pembangunan jaringan transportasi sungai untuk mendukung pariwisata Kepulauan Bangka Belitung. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perhubungan | ○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan;<br>○ PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan; bidang perhubungan |
| | | | d.Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan jaringan transportasi sungai untuk mendukung pariwisata Kepulauan Bangka Belitung. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perhubungan | ○ - SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan |
| 17 | Memadukan jaringan transportasi Daerah Provinsi dengan sistem transportasi lintas Sumatera untuk mendukung pariwisata. | Program peningkatan aksesibilitas | a.Sosialisasi program/kegiatan pembangunan keterpaduan jaringan transportasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan sistem transportasi lintas Sumatera. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perhubungan | ○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan;<br>○ PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan, bidang perhubungan |
| | | | b.Sinkronisasi program/ kegiatan pembangunan sistem transportasi lintas Sumatera yang dapat mendukung pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perhubungan | ○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan;<br>○ PD Kabupaten/Kota bid. Kepari wisataan, bidang perhubungan |
| | | | c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan sistem transportasi lintas Sumatera yang dapat mendukung pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perhubungan | ○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan;<br>○ PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan,bidang perhubungan;<br>○ Perguruan tinggi bidang transportasi |
| 18 | Meningkatkan kualitas dan | | a.Sosialisasi kebutuhan peningkatan kualitas dan | | | | | | | | ○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan; |

| NO | STRATEGI | PROGRAM | INDIKASI KEGIATAN | TAHUN PELAKSANAAN | | | | | | PELAKSANA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | PENANGGUNG JAWAB | PENDUKUNG |
| | kapasitas pelayanan angkutan umum yang menghubungkan KSPP dan KPPP, serta pusat pelayanan pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Program peningkatan aksesibilitas | kapasitas pelayanan angkutan umum yang menghubungkan KSPP dan KPPP, serta pusat pelayanan primer dan sekunder. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perhubungan | o PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan, bidang perhubungan |
| | | | b.Penambahan rute angkutan umum menuju daya tarik wisata primer dan sekunder di KSPP dan KPPP. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perhubungan | o PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan;<br>o PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan, bidang perhubungan |
| 19 | Mengembangkan transportasi wisata untuk mendukung jalur wisata tematik di DPP. | Program peningkatan aksesibilitas | a.Sosialisasi dan sinkronisasi kebutuhan penyediaan transportasi wisata untuk memperkuat jalur wisata lokal & reg. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perhubungan | o PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan;<br>o PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan,Bidang perhubungan |
| | | | b.Penyediaan angkutan wisata dan kelengkapannya, rambu petunjuk arah, serta papan peta dan informasi menuju daya tarik wisata. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perhubungan | o PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan;<br>o PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan; bidang perhubungan |
| | | | c.Perbaikan dan pemeliharaan angkutan wisata. | | | | | | | PD Provinsi bidang perhubungan | o PD Provinsi bidang kepariwisataan;<br>o PD Kabupaten/Kota bid. Pariwisata; |
| 20 | Mengembangkan transportasi terpadu yang menghubungkan bandara/ pelabuhan dengan pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata Provinsi | Program peningkatan aksesibilitas | a.Penyediaan angkutan umum rute bandara/pelabuhan TanjungPandan,bandara/ pelab-Pangkalpinang, bandara/ pelab –Sungailiat, bandara/ pelabuhan–Muntok, band/ pelab–Pulau Mendanau | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perhubungan | o PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan;<br>o PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan,bidang perhubungan |
| | | | b.Penyusunan dan penerapan standar pelayanan transpor- | | | | | | | | o PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan; |

| NO | STRATEGI | PROGRAM | INDIKASI KEGIATAN | TAHUN PELAKSANAAN | | | | | | PELAKSANA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | PENANGGUNG JAWAB | PENDUKUNG |
| | Kepulauan Bangka Belitung. | | tasi terpadu menghubungkan bandara/pelab. dengan pusat pelayanan primer /sekunder. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perhubungan | ○ PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan bidang perhubungan;<br>○ Perguruan tinggi bidang transportasi |
| 21 | Mengembangkan rute dan frekuensi penerbangan langsung dari Jakarta, Palembang, Jawa Barat, Yogyakarta, Bali, Batam, Medan, dan Balikpapan. | Program peningkatan aksesibilitas | a.Koordinasi pengembangan rute & frekuensi penerbangan langsung dari Jakarta, Palem-bang, Jawa Barat, Yogyakarta, Bali,Batam,Medan,&Balikppan. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bid. perhubungan | ○ Kementerian bidang kepariwisataan;<br>○ Kementerian bidang perhubungan<br>○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan |
| | | | b.Penyusunan dan penerapan sistem pengelolaan penerbangan Babel | | | | | | | -PD Provinsi bid. perhubungan<br>-Pengelola bandara | ○ Kementerian bidang perhubungan |
| | | | c. Penyusunan dan penerapan standar pelayanan di bandara. | | | | | | | PD Provinsi bid .perhubungan/bandara | ○ Kementerian bidang perhubungan;<br>○ Perguruan tinggi bidang transportasi |
| 22 | Mengembangkan rute dan frekuensi penerbangan dari Malaysia dan Singapura, dan negara sumber pasar wisatawan mancanegara lainnya. | Program peningkatan aksesibilitas | a.Koordinasi pengembangan rute dan frekuensi penerbangan langsung dari Malaysia dan Singapura. | | | | | | | - PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bid. perhubungan | ○ Kementerian bidang perhubungan;<br>○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perencanaan pembangunan |
| | | | b.Studi penilaian kebutuhan pengembangan rute dan frekuensi penerbangan internasional untuk mendukung pariwisata. | | | | | | | - PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bid. perhubungan | ○ Kementerian bidang perhubungan<br>○ Perguruan tinggi bidang transportasi |
| 23 | Mengembangkan rute dan frekuensi pelayaran dari Jakarta, Batam, dan daerah sumber pasar wisatawan nusantara lainnya. | Program peningkatan aksesibilitas | a.Koordinasi pengembangan rute dan frekuensi pelayaran dari Jakarta, Batam. | | | | | | | - PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bid. perhubungan | ○ Kementerian bidang perhubungan;<br>○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perencanaan pembangunan |
| | | | b.Studi penilaian kebutuhan pengembangan rute dan frekuensi pelayaran nasional untuk mendukung pariwisata. | | | | | | | - PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bid. perhubungan | ○ Kementerian bidang perhubungan<br>○ Perguruan tinggi bidang transportasi |
| 24 | Menetapkan standar kenyamanan, | | a.Penyusunan dan penetapan standar kenyamanan, | | | | | | | | ○ PD Kabupaten/ Kota bidang perhubungan; |

| NO | STRATEGI | PROGRAM | INDIKASI KEGIATAN | TAHUN PELAKSANAAN | | | | | | PELAKSANA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | PENANGGUNG JAWAB | PENDUKUNG |
| | keselamatan, dan keamanan bagi moda transportasi darat dan laut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Program peningkatan aksesibilitas | keselamatan, dan keamanan angkutan umum darat dan laut di Prov. Kep. Babel | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perhubungan | ○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang hukum dan peraturan perundangan |
| | | | b.Pendampingan penerapan standar kenyamanan, keselamatan, dan keamanan angkutan umum darat dan laut di Prov. Kep. Babel | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perhubungan | ○ PD Kabupaten/ Kota bidang perhubungan;<br>○ Perguruan tinggi bidang transportasi |
| | | | c.Pemantauan dan evaluasi penerapan standar kenyamanan, keselamatan, dan keamanan angkutan umum darat dan laut di Prov. Kep. Babel | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perhubungan | ○ PD Kabupaten/ Kota bidang perhubungan;<br>○ Perguruan tinggi bidang transportasi |
| 25 | Meningkatkan kesadaran kolektif para pemangku kepentingan terhadap standar nasional dan internasional bagi penyediaan & pe-ngelolaan prasarana umum dan fasilitas umum di daya tarik wisata provinsi, des-tinasi pariwisata provinsi, kawasan pengembangan pariwisata provinsi, dan kawasan strategis pariwisata provinsi. | Program pembangunan prasarana dan fasilitas umum | a.Sosialisasi standar nasional dan internasional bagi penyediaan dan pengelolaan prasarana umum dan fasilitas umum di daya tarik wisata provinsi, destinasi pariwisata provinsi, kawasan pengembangan pariwisata provinsi, dan kawasan strategis pariwisata provinsi. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang pekerjaan umum | ○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan;<br>○ PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan, bidang pekerjaan umum |
| | | | b.Pelatihan dan pendampingan penerapan standar nasional dan internasional bagi penyediaan dan pengelolaan prasarana umum dan fasilitas umum di daya tarik wisata provinsi, destinasi pariwisata provinsi, kawasan pengembangan pariwisata provinsi, dan kawasan | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang pekerjaan umum | ○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan;<br>○ PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan<br>○ PD Kabupaten/ Kota bidang pekerjaan umum;<br>○ Perguruan tinggi bidang teknik sipil<br>○ Perguruan tinggi bidang kepariwisataan |
| | | | c. Pemantauan dan evaluasi penerapan standar nasional | | | | | | | SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung | ○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan; |

| NO | STRATEGI | PROGRAM | INDIKASI KEGIATAN | TAHUN PELAKSANAAN | | | | | | PELAKSANA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | PENANGGUNG JAWAB | PENDUKUNG |
| | | | dan internasional bagi penyediaan dan pengelolaan prasarana umum dan fasilitas umum di daya tarik wisata provinsi, destinasi pariwisata provinsi, kawasan pengembangan pariwisata provinsi, dan kawasan strategis pariwisata provinsi. | | | | | | | bidang pekerjaan umum | o PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan;<br>o PD Kabupaten/ Kota bidang pekerjaan umum;<br>o Perguruan tinggi bidang teknik sipil |
| 26 | Mengembangkan kemitraan dengan pihak swasta, pengelola daya tarik wisata, dan masyarakat dalam pembangunan prasarana umum dan fasilitas umum berstandar nasional dan internasional di daya tarik wisata provinsi, destinasi pariwisata provinsi, kawasan pengembangan pariwisata provinsi, dan kawasan strategis pariwisata provinsi. | Program pembangunan prasarana dan fasilitas umum | a.Sosialisasi dan sinkronisasi kebutuhan pembangunan prasarana umum dan fasilitas umum berstandar nasional dan internasional kepada pihak swasta, pengelola daya tarik wisata, dan masyarakat. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang pekerjaan umum | o PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan;<br>o PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan;<br>o PD Kabupaten/ Kota bidang pekerjaan umum |
| | | | b.Fasilitasi pengembangan kerja sama pembangunan prasarana umum dan fasilitas umum berstandar nasional dan internasional. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang pekerjaan umum | o PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan;<br>o PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan;<br>o PD Kabupaten/ Kota bidang pekerjaan umum |
| | | | | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang pekerjaan umum | o PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan, perhubungan;<br>o PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan, perhubungan |
| 27 | Meningkatkan kesadaran kolektif para pemangku kepentingan terhadap standar nasional dan internasional bagi penyediaan dan pengelolaan fasilitas pariwisata. | Program pembangunan fasilitas pariwisata | a.Sosialisasi standar nasional dan internasional bagi penyediaan dan pengelolaan fasilitas pariwisata. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan | o PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang pekerjaan umum;<br>o PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan;bid. pekerjaan umum |
| | | | b.Pelatihan dan pendampigan penerapan standar nasional dan internasional bagi penyediaan dan pengelolaan fasilitas pariwisata | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan | o PD Provinsi Babel bidang PU;<br>o PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan, Bid.PU<br>o Perguruan tinggi bidang kepariwisataan |

| NO | STRATEGI | PROGRAM | INDIKASI KEGIATAN | TAHUN PELAKSANAAN | | | | | | PELAKSANA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | PENANGGUNG JAWAB | PENDUKUNG |
| | | | c. Pemantauan dan evaluasi penerapan standar nasional dan internasional bagi penyediaan dan pengelolaan fasilitas pariwisata. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan | ○ PD Provinsi Babel bidang PU;<br>○ PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan, Bid.PU<br>○ Perguruan tinggi bidang kepariwisataan |
| 28 | Menyusun dan menetapkan standar bangunan berciri khas lokal dan pelayanan berkarakter budaya dan nilai-nilai agama yang berlaku di masyarakat Kepulauan Bangka Belitung. | Program pembangunan fasilitas pariwisata | a.Penyusunan dan penetapan pedoman bangunan fasilitas pariwisata berciri khas budaya Kepulauan Bangka Belitung. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang pekerjaan umum | ○ PD Provinsi bid. kepariwisataan; bid. hukum dan peraturan perundangan;<br>○ PD Kabupaten/ Kota bid. kepariwisataan, pekerjaan umum<br>○ Perguruan tinggi bid kepariwisataan |
| | | | b.Penyusunan dan penetapan pedoman pelayanan berkarakter budaya dan nilai-nilai agama yang berlaku di masyarakat Babel | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan | ○ PD Provinsi bid. kebudayaan, hukum & peraturan perundangan;<br>○ PD Kabupaten/Kota bid. pariwisata;<br>○ Perguruan tinggi bidang kepariwisataan & bid. kebudayaan |
| | | | c. Penyusunan dan penetapan regulasi waktu operasional fasilitas hiburan dan rekreasi di Kepulauan Bangka Belitung | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bid. kepariwisataan | ○ PD Kabupaten/Kota bid.pariwisata;<br>○ PD Provinsi bidang hukum dan peraturan perundangan |
| | | | d.Sosialisasi standar bangunan berciri pelayanan berkarakter budaya dan nilai-nilai agama yang berlaku di masyarakat Kepulauan Babel (khas lokal) | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan | ○ PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan |
| | | | e. Pelatihan dan pendampingan penerapan standar pelayanan berkarakter budaya dan nilai-nilai agama yang berlaku di masyarakat. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan | ○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kebudayaan, bidang hukum dan peraturan perundangan;<br>○ PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan;<br>○ Perguruan tinggi bidang kepariwisataan; bidang kebudayaan |
| | | | | | | | | | | | |

| NO | STRATEGI | PROGRAM | INDIKASI KEGIATAN | TAHUN PELAKSANAAN | | | | | | PELAKSANA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | PENANGGUNG JAWAB | PENDUKUNG |
| | | | f. Pemantauan dan evaluasi penerapan regulasi waktu operasional fasilitas hiburan dan rekreasi di Kepulauan Bangka Belitung. | | | | | | | PD Kabupaten/ Kota bidang kesatuan polisi pamong praja | ○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan;<br>○ PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan |
| 29 | Membangun fasilitas akomodasi, fasilitas makan dan minum, fasilitas perjalanan wisata, dan fasilitas informasi yang berstandar internasional dan ramah lingkungan di Kota Pangkalpinang dan Tanjungpandan sebagai pusat pelayanan primer. | Program pembangunan fasilitas pariwisata | a.Sosialisasi standar pelayanan dan pengelolaan ramah lingkungan untuk fasilitas akomodasi, fasilitas makan minum, fasilitas perjalanan wisata, dan fasilitas informasi. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan | ○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang lingkungan hidup;<br>○ PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan |
| | | | b.Pemantauan dan evaluasi penerapan standar internasi-onal dan ramah lingkungan bagi fasilitas akomodasi. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan | ○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang lingkungan hidup;<br>○ PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan; |
| | | | c. Pemantauan dan evaluasi penerapan standar internasional dan ramah lingkungan bagi fasilitas makan dan minum. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kesehatan | ○ PD Provinsi bid. kepariwisataan, bid. lingkungan hidup;<br>○ PD Kabupaten/Kota bid. pariwisata;<br>○ Perguruan tinggi bidang kepariwisataan, bidang lingkungan |
| | | | d.Pemantauan dan evaluasi penerapan standar internasional dan ramah lingkungan bagi fasilitas perjalanan wisata. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan | ○ PD Provinsi bid. lingkungan hidup;<br>○ PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan;<br>○ Perguruan tinggi bidang kepariwisataan, bidang lingkungan |
| | | | e. Pemantauan dan evaluasi penerapan standar internasional dan ramah lingkungan bagi fasilitas informasi. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan | ○ PD Provinsi bid.g komunikasi dan informatika, bid. lingkungan hidup;<br>○ PD Kabupaten/Kota bid. pariwisata;<br>○ Perguruan tinggi bidang kepariwisataan, bidang lingkungan |
| | | | f. Pemberian insentif bagi fasilitas akomodasi, fasilitas | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung | ○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang lingkungan hidup |

| NO | STRATEGI | PROGRAM | INDIKASI KEGIATAN | TAHUN PELAKSANAAN | | | | | | PELAKSANA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | PENANGGUNG JAWAB | PENDUKUNG |
| | | | makan dan minum, fasilitas perjalanan wisata, dan fasilitas informasi berstandar internasional yang menerapkan prinsip-prinsip ramah lingkungan. | | | | | | | bidang kepariwisataan | ○ PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan;<br>○ Perguruan tinggi bidang kepariwisataan;<br>○ Perguruan tinggi bidang lingkungan |
| 30 | Mempercepat peningkatan pembangunan fasilitas akomodasi berkelas bintang di Kota Pangkalpinang dan Tanjungpandan sebagai pusat pelayanan primer pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. | Program pembangunan fasilitas pariwisata | a.Penelitian kuota dan lokasi fasilitas akomodasi kelas bintang di Kota Pangkalpinang dan Tanjungpandan. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan | ○ PD Kota Pangkalpinang, Kabupaten Belitung bidang kepariwisataan;<br>○ PD Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Belitung bidang tata ruang;<br>○ Perguruan tinggi bidang kepariwisataan |
| | | | b.Penyusunan, penetapan, dan sosialisasi mekanisme percepatan pengurusan perizinan pembangunan hotel bintang di Kepulauan Bangka Belitung. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perizinan terpadu | ○ PD Provinsi /Kab/Kota bidang kepariwisataan;<br>○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang hukum dan peraturan perundangan;<br>○ PD Kabupaten/ Kota bidang perizinan terpadu |
| | | | c. Fasilitasi konsultasi pembangunan hotel bintang dengan para pakar arsitektur, struktur bangunan, dan perhotelan. | | | | | | | SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan | ○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang pekerjaan umum;<br>○ Perguruan tinggi bidang arsitektur |
| | | | d.Sosialisasi persyaratan fasilitas dan pelayanan hotel bintang kepada hotel nonbintang dalam rangka peningkatan kelas hotel. | | | | | | | SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan | ○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang pekerjaan umum;<br>○ PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan |
| | | | | | | | | | | SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung | ○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang pekerjaan umum; |

| NO | STRATEGI | PROGRAM | INDIKASI KEGIATAN | TAHUN PELAKSANAAN | | | | | | PELAKSANA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | PENANGGUNG JAWAB | PENDUKUNG |
| | | | e. Fasilitasi peningkatan kelas hotel dari hotel nonbintang ke hotel bintang. | | | | | | | bidang kepariwisataan | ○ PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan |
| 31 | Mempercepat peningkatan pembangunan fasilitas akomodasi berkelas nonbintang dan pondok wisata (*homestay*) berstandar nasional dan internasional di Muntok, Sungailiat, Toboali, dan Pulau Mendanau sebagai pusat pelayanan sekunder pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. | Program pembangunan fasilitas pariwisata | a.Penelitian kuota dan lokasi fasilitas akomodasi kelas nonbintang di Muntok, Sungailiat, Toboali, dan Pulau Mendanau. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan | ○ PD Kota Pangkalpinang bidang Kepariwisataan;<br>○ PD Kabupaten Belitung bidang kepariwisataan;<br>○ PD Kota Pangkalpinang bidang tata |
| | | | b.Penyusunan, penetapan, dan sosialisasi mekanisme percepatan pengurusan perizinan pembangunan hotel nonbintang di Babel | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perizinan terpadu | ○ PD Provinsi bid kepariwisataan; Bid. Hukum & peraturan perundangan;<br>○ PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan;bid perizinan |
| | | | c. Pembinaan pengembangan pondok wisata (*homestay*) di Muntok, Sungailiat, Toboali, dan Pulau Mendanau. | | | | | | | PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan | ○ Kementerian bidang kepariwisataan;<br>○ PD Provinsi bidang kepariwisataan;<br>○ Perguruan tinggi bidang |
| | | | d.Dukungan pengembangan pondok wisata (*homestay*) di Muntok, Sungailiat, Toboali, dan Pulau Mendanau. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan | ○ Kementerian bidang kepariwisataan;<br>○ PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan |
| 32 | Mengendalikan pembangunan fasilitas pariwisata di daerah sempadan pantai dan sempadan lainnya dengan memperhatikan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan; | Program pembangunan fasilitas pariwisata | a.Kajian pelanggaran daerah sempadan (pantai, sungai, dll) oleh fasilitas pariwisata dan tindakan penanganannya. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang tata ruang | ○ PD Provinsi bid. perencanaan pemb; bidang kepariwisataan;<br>○ Perguruan tinggi bidang perencanaan wilayah dan kota. |
| | | | b.Sosialisasi daerah sempadan (pantai, sungai, dll) kepada seluruh pemangku kepentingan pariwisata, termasuk pengelola usaha | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang tata ruang | ○ PD Provinsi bidang perencanaan pembangunan, bidang kepariwisataan |
| | | | c.Sosialisasi sanksi pelanggaran daerah sempadan oleh fasilitas pariwisata. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang tata ruang | ○ PD Provinsi bidang perencanaan pembangunan; bidang kepariwisataan |

| NO | STRATEGI | PROGRAM | INDIKASI KEGIATAN | TAHUN PELAKSANAAN | | | | | | PELAKSANA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | PENANGGUNG JAWAB | PENDUKUNG |
| | | | d.Penandatangan kesepakatan tindakan penanganan pelanggaran daerah sempadan oleh fasilitas pariwisata berdasarkan hasil kajian. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang tata ruang | ○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perencanaan pembangunan; bidang kepariwisataan;<br>○ Asosiasi usaha pariwisata |
| 33 | Mengembangkan pondok wisata (*homestay*) di KSPP dan KPPP Kepulauan Bangka Belitung. | Program pembangunan fasilitas pariwisata | a.Sosialisasi pondok wisata (*homestay*) kepada masyarakat di KSPP dan KPPP Kepulauan Bangka Belitung. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan | ○ PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan<br>○ Kecamatan/Kelurahan |
| | | | b.Penyusunan dan pemutakhiran basis data dan penilaian kesiapan pondok wisata (homestay) di KSPP dan KPPP Babel | | | | | | | SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang | ○ PD Kabupaten/ Kota bidang |
| | | | c. Pembinaan pengembangan pondok wisata (*homestay*) di KSPP dan KPPP Kepulauan Bangka Belitung. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan | ○ PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan;<br>○ Kecamatan/ Kelurahan/ Desa;<br>○ Perguruan tinggi bidang kepariwisataan |
| | | | d.Dukungan pengembangan pondok wisata (*homestay*) di KSPP dan KPPP Kepulauan Bangka Belitung. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan | ○ PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan;<br>○ Kecamatan/ Kelurahan/ Desa |
| 34 | Meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat terhadap pembangunan destinasi pariwisata | Program peningkatan peran masyarakat | a.Sosialisasi kualitas pelayanan dan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat bagi destinasi pariwisata berdaya saing global / berkelanjutan. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan | ○ PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan;<br>○ Perguruan tinggi bidang kepariwisataan;<br>○ Asosiasi usaha pariwisata |

| NO | STRATEGI | PROGRAM | INDIKASI KEGIATAN | TAHUN PELAKSANAAN | | | | | | PELAKSANA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | PENANGGUNG JAWAB | PENDUKUNG |
| | berdaya saing global dan berkelanjutan. | | b.Pelatihan dan pembinaan kapasitas masyarakat dalam mendukung pembangunan destinasi pariwisata berdaya saing global /berkelanjutan. | | | | | | | PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan | ○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan;<br>○ Perguruan tinggi bidang kepariwisataan;<br>○ Asosiasi usaha pariwisata |
| 35 | Meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan berstandar nasional dan internasional di daya tarik wisata provinsi. | Program peningkatan peran masyarakat | a.Identifikasi potensi dan kelembagaan masyarakat di sekitar daya tarik wisata provinsi. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan | ○ PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan;<br>○ Perguruan tinggi dan Asosiasi usaha pariwisata |
| | | | b.Fasilitasi pertemuan masya-rakat dengan pengelola daya tarik wisata provinsi untuk sinkronisasi kebutuhan daya tarik wisata berstandar nasional dan internasional dengan potensi masyarakat. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan | ○ PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan;<br>○ Kecamatan/Kelurahan/ desa |
| | | | c.Pembentukan dan pengembangan lembaga masyarakat sebagai mitra pengelola dan atau pengelola daya tarik wisata provinsi. | | | | | | | SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang | ○ PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan |
| | | | d.Pemantauan dan evaluasi keberhasilan program pening-katan peran masyarakat dalam pengelolaan berstandar nasional dan internasional di daya tarik wisata provinsi. | | | | | | | SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan | ○ PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan;<br>○ Kecamatan/Kelurahan/ desa |
| 36 | Meningkatkan peran Pokdarwis untuk mendukung penge-lolaan KSPP dan KPPP Kepulauan Bangka Belitung yang berdaya saing global. | Program peningkatan peran masyarakat | a.Penguatan organisasi Pokdarwis yang sudah ada. | | | | | | | SKPD Kabupaten/ Kota bid. kepariwisataan | ○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan;<br>○ Kecamatan/Kelurahan/ desa |
| | | | b.Pembentukan dan pengembangan Pokdarwis di KSPP dan KPPP Kepulauan Bangka Belitung. | | | | | | | SKPD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan | ○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan;<br>○ Kecamatan/Kelurahan/ desa |
| 37 | | | | | | | | | | | ○ Kementerian bid. kepariwisataan; |

| NO | STRATEGI | PROGRAM | INDIKASI KEGIATAN | TAHUN PELAKSANAAN | | | | | | PELAKSANA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | PENANGGUNG JAWAB | PENDUKUNG |
| | Menguatkan peran masyarakat dalam pengembangan tata kelola destinasi pariwisata berkelanjutan di KSPN Tanjungkelayang dan sekitarnya. | Program peningkatan peran masyarakat | a.Dukungan terhadap penguatan organisasi tata kelola destinasi pariwisata berbasis masyarakat di KSPN Tanjung Kelayang & sekitarnya | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang pariwisata | ○ PD Kabupaten Belitung bidang kepariwisataan;<br>○ Kelompok Kerja Lokal Pariwisata DMO Belitung |
| | | | b.Penguatan kelembagaan masyarakat dalam mendukung pengelolaan KSPN Tanjung Kelayang dan sekitarnya. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan | ○ Kementerian bidan kepariwisataan;<br>○ PD Kab. Belitung bid. pariwisata;<br>○ Kelompok Kerja Lokal Pariwisata DMO Belitung |
| | | | c.Penguatan lembaga koperasi pariwisata sebagai lembaga bisnis pariwisata yang dikelola masyarakat. | | | | | | | PDK Kabupaten Belitung bidang koperasi | ○ Kementerian bidang koperasi;<br>○ PD Provinsi bidang kepariwisataan;<br>○ PD Kab. Belitung bid. pariwisata;<br>○ Kelompok Kerja Lokal Pariwisata DMO Belitung |
| 38 | Mengembangkan mekanisme keterpaduan investasi pariwisata, perdagangan, dan bidang lainnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Program peningkatan investasi pariwisata | a.Penyusunan dan sosialisasi profil investasi terpadu Kepulauan Bangka Belitung berbasis teknologi informasi. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang investasi | ○ PD Provinsi bidang kepariwisataan;<br>○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perdagangan |
| | | | b.Penyusunan dan penetapan mekanisme investasi terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang investasi | ○ PD Provinsi bid. kepariwisataan; bid. Perdagangan, bid. hukum dan peraturan perundangan;<br>○ Perguruan tinggi bidang ekonomi |
| | | | c.Penyelenggaraan forum komunikasi dan koordinasi investasi terpadu Prov.i Babel | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang investasi | ○ PD Provinsi bidang kepariwisataan, bidang perdagangan, dan bidang terkait lainnya |
| | | | d.Penyepakatan program prioritas bersama pengembangan investasi terpadu Provinsi Babel. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang investasi | ○ PD Provinsi bidang kepariwisataan bid. Perdagangan dan bidang terkait lainnya |
| | | | e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program program prioritas bersama pengembangan investasi terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang investasi | ○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan; bid. perdagangan & bid. terkait lainnya;<br>○ Perguruan tinggi bidang ekonomi |

| NO | STRATEGI | PROGRAM | INDIKASI KEGIATAN | TAHUN PELAKSANAAN | | | | | | PELAKSANA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | PENANGGUNG JAWAB | PENDUKUNG |
| 39 | Menetapkan dan mengembangkan regulasi investasi yang berorientasi pada pengembangan masyarakat, perlindungan lingkungan alam, pelestarian budaya, dan percepatan pembangunan daerah. | Program peningkatan investasi Pariwisata | a.Penyusunan dan penetapan regulasi investasi pariwisata yang berorientasi pada pengembangan masyarakat, perlindungan lingkungan alam, pelestarian budaya, dan percepatan pembangunan daerah. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang Investasi | ○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan, bidang lingkungan hidup, bidang kebudayaan, bidang pemberdayaan masyarakat; bidang hukum dan peraturan perundangan;<br>○ Perguruan tinggi bidang ekonomi |
| | | | b.Sosialisasi regulasi investasi pariwisata yang berorientasi pada pengembangan masyarakat, perlindungan lingkungan alam, pelestarian budaya, dan percepatan pembangunan daerah. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang investasi | ○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan, bidang lingkungan hidup, bidang kebudayaan, bidang pemberdayaan masyarakat;<br>○ Perguruan tinggi bidang ekonomi dan bidang kepariwisataan |
| | | | c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan regulasi investasi pariwisata yang berorientasi pada pengembangan masyarakat, perlindungan lingkungan alam, pelestarian budaya, dan percepatan pembangunan daerah. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang investasi | ○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan; bidang lingkungan hidup; bidang kebudayaan, dan bidang pemberdayaan |
| 40 | Mengembangkan mekanisme pengendalian investasi pariwisata berbasiskan penelitian untuk membangun iklim usaha yang sehat dan berdaya saing, serta berwawasan lingkungan alam dan budaya. | Program peningkatan investasi pariwisata | a.Penelitian kebutuhan investasi pariwisata dan pendukungnya untuk me-wujudkan destinasi pariwisata berdaya saing global. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan | ○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang investasi;<br>○ Perguruan tinggi bidang ekonomi<br>○ Perguruan tinggi bidang kepariwisataan |
| | | | b.Penelitian dampak investasi pariwisata dan pendukung-nya terhadap perwujudan Kepulauan Bangka Belitung sebagai destinasi pariwisata berdaya saing global. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan | ○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang investasi;<br>○ Perguruan tinggi bidang ekonomi;<br>○ Perguruan tinggi bidang kepariwisataan |
| | | | c. Penelitian dampak investasi pariwisata terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya Kep. Babel | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan | ○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang investasi;<br>○ Perguruan tinggi bidang kepariwisataan |

| NO | STRATEGI | PROGRAM | INDIKASI KEGIATAN | TAHUN PELAKSANAAN | | | | | | PELAKSANA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | PENANGGUNG JAWAB | PENDUKUNG |
| | | | d.Penelitian dampak investasi pariwisata terhadap peningkatan peran masyarakat dalam pariwisata dan kesejahteraan masyarakat. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan | ○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang investasi;<br>○ Perguruan tinggi bidang ekonomi/ bidang kepariwisataan |
| | | | e. Perumusan dan penetapan mekanisme pengendalian investasi pariwisata berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang investasi | ○ PD Provinsi Bangka Belitung bidang kepariwisataan; LH, kebudayaan, pemberdayaan masyarakat, hukum, Perguruan tinggi bidang ekonomi/bidang kepariwisataan |
| | | | f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan mekanisme pengendalian investasi pariwisata. | | | | | | | PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang investasi | ○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan, bidang lingkungan hidup, bidang kebudayaan, bidang pemberdayaan masyarakat;<br>○ Perguruan tinggi bidang ekonomi;<br>○ Perguruan tinggi bidang kepariwisataan |
| | | | | | | | | | | | |

# BAB VI
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 merupakan dokumen rencana tahunan memuat program dan kegiatan yang merupakan penjabaran RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026, dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun dengan memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD, isu strategis yang berkembang, aspirasi masyarakat serta pokok-pokok pikiran DPRD.

**Tabel VI.1**
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD)
Provinsi Bangka Belitung Tahun 2024

## 6.1. Pagu Indikatif Perangkat Daerah

Pagu Indikatif merupakan batasan anggaran yang diberikan kepada masing-masing Perangkat Daerah untuk merencanakan program/kegiatan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Berdasarkan Tabel VI.2 penentuan pagu indikatif tidak lagi menganut "*money follow function*" akan tetapi berasaskan "*money follow priority programme*". Berikut adalah rekapitulasi pagu indikatif Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

**Tabel VI.2**
Rekapitulasi Pagu Indikatif Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

| NO. | PERANGKAT DAERAH | TOTAL |
|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* |
| 1 | DINAS PENDIDIKAN | **Rp 976.672.464.769,00** |
| 2 | DINAS KESEHATAN | **Rp 102.287.130.027,00** |
| 3 | RSUP | **Rp 162.578.490.226,00** |
| 4 | RSJD | **Rp 64.104.176.325,00** |
| 5 | DINAS PUPR PERKIM | **Rp 197.053.488.565,00** |
| 6 | SATPOL PP | **Rp 26.430.519.520,00** |
| 7 | BADAN KESBANGPOL | **Rp 74.437.196.883,00** |
| 8 | DINAS SOSIAL PEMDES | **Rp 52.598.895.981,00** |
| 9 | BPBD | **Rp 18.552.991.853,00** |
| 10 | DISNAKER | **Rp 24.686.653.096,00** |
| 11 | DP3ACSKB | **Rp 17.680.167.419,95** |
| 12 | DLH KEHUTANAN | **Rp 63.838.526.107,00** |
| 13 | DINAS PERHUBUNGAN | **Rp 29.243.463.514,00** |
| 14 | DINAS KOMINFO | **Rp 23.119.209.165,00** |
| 15 | DINAS KUKM | **Rp 23.966.051.862,00** |
| 16 | DINAS PMPTSP | **Rp 15.654.752.964,00** |
| 17 | DIBUDPARPORA | **Rp 55.057.653.031,00** |
| 18 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | **Rp 16.685.779.654,00** |
| 19 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | **Rp 47.575.049.104,00** |
| 20 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | **Rp 71.320.787.370,00** |
| 21 | DINAS ESDM | **Rp 25.777.006.568,00** |
| 22 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | **Rp 28.556.836.313,00** |

| NO. | PERANGKAT DAERAH | TOTAL |
|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* |
| 23 | BAPPEDA | **Rp 26.470.548.455,00** |
| 24 | BAKUDA | **Rp 808.880.369.764,00** |
| 25 | BKPSDM | **Rp 39.042.041.873,00** |
| 26 | SEKRETARIAT DEWAN | **Rp 128.078.442.065,00** |
| 27 | INSPEKTORAT | **Rp 30.547.868.839,00** |
| 28 | SEKRETARIAT DAERAH | **Rp 172.177.003.675,52** |
| 32 | BADAN PENGHUBUNG | **Rp 14.666.518.595,00** |
| | **TOTAL** | **Rp 3.338.340.083.583,47** |

## 6.2. Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

**Tabel VI.3**
Pokok Pikiran DPRD
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Prioritas Daerah: Pembangunan Ekonomi** | | | | | | | | | | | | |
| 526 | 30/01/2023 | HERYAWANDI, SE | Sarana dan prasarana Perikanan tangkap masih minim dan belum memadai (Tambat labuh/Pelabuhan Perkanan/Alat bantu Penangkapan) | nelayan air menduyung mengajukan pengadaan jetti | Desa Air Mendukung, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 548 | 30/01/2023 | Drs. H. ERWANDI A. RANI | Pengelolaan Ruang Laut, Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir belum optimal, serta Sarana dan Prasarana di Pulau-pulau Kecil belum memadai | Dalam meningkatkan keamanan di daerah pesisir masyarakat mohon adanya bantuan untuk breakwater atau pemecah ombak | Pulau Seliuk Kab. Belitung, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 554 | 30/01/2023 | Drs. H. ERWANDI A. RANI | Pemeliharaan Rutin/Berkala Jalan Jembatan | bantuan untuk Dermaga yang sudah rusak parah | Desa Gunung Riting Kab. Belitung, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 617 | 31/01/2023 | EKA BUDIARTHA, S.Mn., M.Si | Pembangunan Jalan & Jembatan | Penambalan panjang dermaga/ pelabuhan nelayan di Desa Barung Mandi | DESA BURUNG MANDI, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 620 | 31/01/2023 | EKA BUDIARTHA, S.Mn., M.Si | Kurangnya pemenuhan infrastruktur pelabuhan pengumpan regional | Bantuan sarana kapal nelayan untuk kelompok nelayan di Desa Air Kelik, Mempaya dan Burung Mandi | DESA AIR KELIK, MEMPAYA DAN BURUNG MANDI, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERHUBUNGAN | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverifikasi sesuai kewenangan urusan dan anggaran |
| 660 | 02/02/2023 | HERMAN SUHADI, S.Sos | Sarana dan prasarana Perikanan tangkap masih minim dan belum memadai (Tambat labuh/Pelabuhan Perkanan/Alat bantu Penangkapan) | Pembangunan Parak (tempat penjemuran ikan) Permanen | Desa Tanjung Binga, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 691 | 02/02/2023 | EKA BUDIARTHA, S.Mn., M.Si | Pengelolaan Ruang Laut, Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir belum optimal, serta Sarana dan Prasarana di Pulau-pulau Kecil belum memadai | Kepada DKP untuk melakukan operasi penertiban di laut di Kecematan Simpang Pesak di karenakan banyak beroperasi kapal cantrang besar yang berasal dari luar Belitung | Kecamatan Simpang Pesak, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 736 | 03/02/2023 | H. TAUFIK MARDIN, S.Sos | Pembangunan Jalan & Jembatan | Pembangunan dermaga | Desa sungai padang, desa batu itam dan desa perpat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya..koordinasi dengan dinas perhubungan atau dinas kelautan |
| 738 | 03/02/2023 | H. TAUFIK MARDIN, S.Sos | Perencanaan, Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai | Pembangunan dermaga dan pemecah ombak | Pulau Seliu, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya..koordinasi dan wewenang balai BWS |
| 530 | 30/01/2023 | HERYAWANDI, SE | - masih kurangnya kajian terhadap objek pemajuan kebudayaan (WBTB) | bantuan dana pelaksanaan event budaya ruah Tempilang Cup dan Penyampak Cup | Tempilang dan Penyampak, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Dinas terkait |
| 540 | 30/01/2023 | NATA SUMITRA | Masih rendahnya promosi pariwisata melalui media elektronik, media cetak & media lainnya | Bantuan pengadaan TV android 52 inch | Bandara Belitung, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Dinas terkait |
| 541 | 30/01/2023 | NATA SUMITRA | Masih kurangnya ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga | Rehab lapangan volly tapak suci | Desa Kurnia Jaya, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Untuk ditindaklanjuti. |
| 552 | 30/01/2023 | DODY KUSDIAN, ST., MH | Masih rendahnya promosi pariwisata melalui media elektronik, | Pengadaan kamera dan perlengkapannya untuk menunjang kegiatan di Dinas Pariwisata | Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Dinas terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | media cetak & media lainnya | | | | | | | | | |
| 612 | 31/01/2023 | FIRMANSYAH LEVI | Masih kurangnya ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga | Pembangunan stadion mini lapangan bola Desa Penyamun Kecamatan Pemali | Desa Penyamun Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Untuk ditindaklanjuti. |
| 679 | 02/02/2023 | FITRA WIJAYA | Masih kurangnya ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga | belum adanya fasilitas olahraga yang memadai | Desa Bukit Kijang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Untuk ditindaklanjuti. |
| 680 | 02/02/2023 | FITRA WIJAYA | Masih kurangnya ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga | Tidak adanya gedung olahraga untuk masyarakat | Desa Bukit Kijang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Untuk ditindaklanjuti. |
| 750 | 04/02/2023 | AMRI CAHYADI, ST | - masih rendahnya kompetensi SDM kebudayaan | peningkatan SDM wisata | desa dalil, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Dinas terkait |
| 760 | 04/02/2023 | AMRI CAHYADI, ST | - masih rendahnya lembaga kesenian tradisional yang dibina | usulan pembina budaya tradisional seperti pencak silat | bakam dan puding besar, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Dinas terkait |
| 461 | 27/01/2023 | RUDI HARTONO | Belum tersedia dana untuk melakukan monitoring ke kabupaten/kota dalam melakukan pendataan perusahaan/UMKM yang | Masih sulitnya masyarakat untuk membuat izin usaha | Desa Membalong Kecamatan Tanjung Pandan, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke dinas terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | sudah/ belum melakukan kemitraan dengan investor | | | | | | | | | |
| 535 | 30/01/2023 | Drs. H. ERWANDI A. RANI | Belum Optimalnya pemanfaaatan teknologi informasi khususnya pelayanan perizinan | Bantuan dalam hal pengurusan izin Perikanan Kelauatan dan Nelayan dari Pass Kapal beralih ke KSOP | Kab. Belitung, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke dinas terkait |
| 49 | 20/01/2023 | TONI MUKTI, SH | Permasalahan pertanahan (status lahan) yang belum jelas untuk berinvestasi | pengalihan status lahan pasar menjadi SP3AT dikarenakan banyaknya rumah warga yang membangun rumah tidak bisa disuratkan dikomplek pasar sumber jaya permai | Komplek Pasar Sumber Jaya Permai RT 17, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke dinas terkait |
| 438 | 27/01/2023 | NATA SUMITRA | Pembangunan Sarana Prasarana Masyarakat | Belum adanya pasar sebagai pusat pemenuhan kebutuhan masyarakat dan tolok ukur pertumbuhan ekonomi masyarakat | Perkantoran Kecamatan Simpang Renggiang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 11 | 20/01/2023 | TONI MUKTI, SH | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | pemintaan bibit sawit agar menambah pendapatan pondok pesantren dilahan pesantren Dusun Jernang | Desa Jernang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 15 | 20/01/2023 | TONI MUKTI, SH | prasarana pertanian ( JUT, JUP, irigasi, lantai jemur, dll) sub sekotor tanaman pangan, | pembangunan bendungan perairan sawah untuk pengaturan pengairan sawah | Di Bukit Tawar dan Bukit Jenang Desa Batu Betumpang , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke PD terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | hortikultura, perkebunan dan peternakan masih minim | | | | | | | | | |
| 16 | 20/01/2023 | ADET, SH., MH | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | Masyarakat kurang mengetahui bagaimana prosedur untuk mendapatkan bantuan bibit sawit | Desa Puput Kecamatan Simpang Katis, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 29 | 20/01/2023 | ADET, SH., MH | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | Masyarakat menginginkan bantuan bibit bidang pertanian | Desa pinang sebatang kecamatan simpang katis, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 33 | 20/01/2023 | ADET, SH., MH | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | Mengharapkan adanya bantuan bibit yang tidak membutuhkan lahan yang luas | Desa Pinang sebatang kecamatan simpang katis, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 37 | 20/01/2023 | ADET, SH., MH | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas | Masyarakat kurang mengetahui cara mendapatkan bantuan bidang pertanian dan perkebunan | Desa Sungkap Kecamatan simpang katis, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | | | | | | | | | |
| 53 | 20/01/2023 | TONI MUKTI, SH | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | Meminta Bantuan bibit sapi | Desa Sumber Jaya Permai, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 81 | 20/01/2023 | ADET, SH., MH | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | Masyarakat menginginkan bantuan bidang pertanian (bibit cabe) | Desa Teru Kecamatan Simpang Katis, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 91 | 20/01/2023 | TONI MUKTI, SH | prasarana pertanian ( JUT, JUP, irigasi, lantai jemur, dll) sub sekotor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan masih minim | Peningkatan kajian ilmiah area persawahan dikarenakan tidak bisa digarap di wilayah persawahan | Desa Batu Betumpang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 174 | 25/01/2023 | ADET, SH., MH | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman | Mengharapkan bantuan bidang pertanian | Desa Katis Kecamatan Simpang Katis, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | | | | | | | | | |
| 182 | 25/01/2023 | TONI PURNAMA, S.IP | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | banyak sawah milik masyarakat tidak produktif lagi, sehingga masyarakat ingin beralih ke perkebunan sawit dan menginginkan bantuan bibit sawit | kecamatan payung, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 188 | 25/01/2023 | ADET, SH., MH | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | Minimnya bantuan bidang pertanian dan perkebunan | Desa Beruas Kecamatan Simpang Katis, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 199 | 25/01/2023 | NATA SUMITRA | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | Terjadinya kelangkaan Pupuk subsidi untuk tanaman Lada masyarakat | Desa Aik Madu dan Desa Jangkar Asam Kecamatan Simpang Renggiang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 218 | 25/01/2023 | TONI PURNAMA, S.IP | prasarana pertanian ( JUT, JUP, irigasi, lantai jemur, dll) sub sekotor tanaman | pada saat musim panen padi, alat penggilingan padi tidak tersedia | desa irat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan masih minim | | | | | | | | | |
| 235 | 25/01/2023 | EVI JUNITA | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | Bibit Peternak Sapi Desa Pedindang | Jl.Raya Desa Pedindang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 236 | 25/01/2023 | EVI JUNITA | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | Bibit Pertanian Desa Pedindang | Jl. Raya Desa Pedindang Kecamatan Pangkalan baru Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 265 | 26/01/2023 | RUDI HARTONO | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | Perkebunan sawit foresta, tinggi dan mahalnya harga pupuk | Desa Membalong Kec. Tanjung Pandan, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 281 | 26/01/2023 | RINGGIT KECUBUNG, S.Pd | prasarana pertanian ( JUT, JUP, irigasi, lantai jemur, dll) sub sekotor tanaman pangan, | bantuan bibit ayam pedaging untuk keompok tani " Gapoktan Tunas Harapan" Desa Telah Parit Tiga | JL. Raya Desa Telak Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | hortikultura, perkebunan dan peternakan masih minim | | | | | | | | | |
| 298 | 26/01/2023 | RUDI HARTONO | prasarana pertanian ( JUT, JUP, irigasi, lantai jemur, dll) sub sekotor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan masih minim | Masih banyaknya program-program dari pemerintah daerah tentang pertanian yang tidak diketahui oleh masyarakat | Desa Perawas Kec. Tanjung Pandan, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 300 | 26/01/2023 | RUDI HARTONO | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | Masih banyaknya pengiriman bumbu dapur dari luar (seperti lengkuas, kunyit dll) sedangkan penanaman dapat dilakukan dihalaman rumah setiap masyarakat | Desa Perawas Kec. Tanjung Pandan, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 301 | 26/01/2023 | RUDI HARTONO | prasarana pertanian ( JUT, JUP, irigasi, lantai jemur, dll) sub sekotor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan masih minim | Harga ternak yang selalu dibawah harga pokok produksi menyebabkan para peternak merugi | Desa Perawas Kecamatan Tanjung Pandan, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 304 | 26/01/2023 | RUDI HARTONO | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura | Masih banyaknya pengiriman ayam dan bebek dari luar Pulau Bangka Belitung | Desa Perawas, Desa Air Merbau Kec. Tanjung Pandan dan Desa Batu Itam Kec. Sijuk, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | dan perkebunan masih kurang | | | | | | | | | |
| 360 | 26/01/2023 | YUS DERAHMAN | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | Pengadaan Kembali pupuk subsidi untuk tanaman lada, kakret, dan sawit. Pupuk subsidi dicabut dan petani merasakan harga pupuk mahal | Desa Jebus, Desa Cupat, Desa Telak, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 363 | 26/01/2023 | ADET, SH., MH | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | Masyarakat banyak tidak mendapatkan pupuk bersubsidi | Desa Sarang Mandi Kecamatan Sungaiselan, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 381 | 26/01/2023 | ADET, SH., MH | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | Minimnya peralatan pertanian | Desa Teru Kecamatan Simpang Katis, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 389 | 26/01/2023 | ADET, SH., MH | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman | Masyarakat dianjurkan pemerintah untuk berkebun tetapi masyarakat kesulitan mendapatkan pupuk | Desa Romadon Kecamatan Sungaiselan, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | | | | | | | | | |
| 390 | 26/01/2023 | ADET, SH., MH | prasarana pertanian ( JUT, JUP, irigasi, lantai jemur, dll) sub sekotor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan masih minim | Pemasangan portal di perusahaan sawit harus ada pos karena jalan tersebut merupakan jalan utama perkebunan masyarakat | Desa Romadon Kecamatan Sungaiselan, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 391 | 26/01/2023 | ADET, SH., MH | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | Bantuan dari pemerintah kabupaten untuk tanam tumbuh dipekarangan rumah untuk diganti jenis kelapa hibrida | Desa Romadon Kecamatan Sungaiselan, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 399 | 26/01/2023 | EDI JUNAIDI FOE | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | kelompok tani bina sejahtera mebutuhkan bantuan perlatan dan perlengkapan untuk perkebunan porang | Jl. Dr. Wahidin kampung Bukit, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 413 | 26/01/2023 | H. MULYADI | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman | bantuan pupuk subsidi | desa lampur, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | | | | | | | | | |
| 417 | 26/01/2023 | H. MULYADI | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | BANTUAN PUPUK SUBSIDI KETERBATASAN PUPUK BAGI MASYARAKAT | DESA PERLANG, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 422 | 26/01/2023 | ADET, SH., MH | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | Bantuan pupuk subsidi untuk tanaman holtikultura | Desa Beruas Kecamatan simpang katis, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 423 | 26/01/2023 | ADET, SH., MH | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | Sudah disurvey tetapi sampai saat ini belum ada bantuan bibit sapi | Desa Teru Kecamatan Simpang Katis, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 424 | 26/01/2023 | H. MULYADI | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas | pengajuan untuk bantuan sarana dan prasarana | desa tanjung pura, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | | | | | | | | | |
| 426 | 26/01/2023 | H. MULYADI | prasarana pertanian ( JUT, JUP, irigasi, lantai jemur, dll) sub sekotor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan masih minim | pembanguan muara untuk pembuangan air diperkebunan guna menghindari dari banjir | desa tanjung pura, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 437 | 26/01/2023 | ADET, SH., MH | prasarana pertanian ( JUT, JUP, irigasi, lantai jemur, dll) sub sekotor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan masih minim | Harga Karet turun | Desa Pinang Sebatang Kecamatan Simpang Katis, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 451 | 27/01/2023 | MANSAH | Pembangunan Jalan & Jembatan | Masyarakat megeluhkan menganai kondisi Jalan Usaha Tani (JUT) yang rusak parah, sehingga mengusulkan untuk perbaikan jalan tersebut | Desa Sinar Sari, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya..koordinasi dengan dinas pertanian |
| 490 | 27/01/2023 | EDI JUNAIDI FOE | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, | Kelompok Tani Air Mancur Membutuhkan bantuan bibit tanam porang serta perlengkapan berkebun lainnya | Desa Pasir Putih Kecamatan Tukak Sadai , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | hortikultura dan perkebunan masih kurang | | | | | | | | | |
| 491 | 27/01/2023 | EDI JUNAIDI FOE | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | Kelompok Tani Air Mancur membutuhkan bantuan bibit tanaman porang serta perlengkapan berkebun lainnya | Desa Pasir Putih Kecamatan Tukak Sadai, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 493 | 27/01/2023 | MANSAH | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | Memohon Bantuan alat alsintan atau | Desa Mancung, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 494 | 27/01/2023 | MANSAH | prasarana pertanian ( JUT, JUP, irigasi, lantai jemur, dll) sub sekotor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan masih minim | Pengajuan bibit sapi 20 ekor kelompok ternak Taman Batu Belawang, desa Mancung | Desa Mancung, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 501 | 28/01/2023 | YOGA NURSIAWAN, A.Md | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman | tingginya harga pupuk dan kurangnya bantuan pupuk bersubsidi | Kec.tanjung pendam, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | | | | | | | | | |
| 511 | 29/01/2023 | Ir. H. AZWARI HELMI | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | masyarakat kekurangan dana untuk pupuk | desa mancung, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 524 | 29/01/2023 | Ir. H. AZWARI HELMI | prasarana pertanian ( JUT, JUP, irigasi, lantai jemur, dll) sub sekotor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan masih minim | permohonan bantuan peternakan bagi kelompok ternak desa dendang | desa dendang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 560 | 31/01/2023 | BELIADI, S.IP | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | PERLUNYA BANTUAN PUPUK DAN HARGA SUBSIDI DARI PEMERINTAH UNTUK MERINGANKAN BEBAN PARA PETANI YANG ADA DI KECAMATAN GANTUNG INI | JL. RAYA MANGGAR – GANTUNG KECAMATAN GANTUNG KABUPATEN BELITUNG TIMUR, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 575 | 31/01/2023 | BELIADI, S.IP | prasarana pertanian ( JUT, JUP, irigasi, lantai jemur, dll) sub sekotor tanaman pangan, hortikultura, | MEMOHON BANTUAN DARI PEMERINTAH PROVINSI UNTUK MENJALANKAN BUMDES KAMI | JL. RAYA MANGGAR – GANTUNG KECAMATAN GANTUNG KABUPATEN BELITUNG TIMUR, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | perkebunan dan peternakan masih minim | | | | | | | | | |
| 579 | 31/01/2023 | BELIADI, S.IP | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | PERLU ADANYA PERHATIAN DARI PEMERINTAH PROVINSI TERKAIT ADANYA MASALAH HARGA PUPUK | JL. TENGAH TANJUNGPANDAN – MANGGAR DESA AIR MADU KEC. SIMPANG RENGGIANG KAB. BELITUNG TIMUR, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 580 | 31/01/2023 | BELIADI, S.IP | Belum ditetapkannya secara tepat peruntukan lahan untuk investasi di setiap keb/kota | PENGUSULAN PEMBAGIAN LAHAN DESA YANG TENTUNYA AKAN DIGUNAKAN SEBAGAI LAHAN PERTANIAN BAGI MASYARAKAT DESA | JL. TENGAH TANJUNGPANDAN – MANGGAR DESA AIR MADU KEC. SIMPANG RENGGIANG KAB. BELITUNG TIMUR, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Dinas terkait |
| 629 | 31/01/2023 | EKA BUDIARTHA, S.Mn., M.Si | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | Bantuan bibit tanaman untuk kelompok tani | KECEMATAN DAMAR, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 632 | 31/01/2023 | DODY KUSDIAN, ST., MH | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | permohonan bantuan bibit kelapa sawit kelompok tani matras makmur | kel. Matras, Kec. Sungailiat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 634 | 31/01/2023 | DODY KUSDIAN, ST., MH | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | permohonan bibit kelapa sawit kelompok tani piyai karya maju petaling jaya | desa petaling Kec. Mendo Barat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 635 | 31/01/2023 | DODY KUSDIAN, ST., MH | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | permohonan bantuan bibit kelapa sawit kelompok taruna tani | kel. simpang perlang, kec. koba, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 669 | 02/02/2023 | HERMAN SUHADI, S.Sos | Pembangunan Jalan & Jembatan | Pembuatan Jalan Usaha Tani di Simpang Ilut Desa Petaling Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka | Simpang Ilut Desa Petaling Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya..koordinasi dengan dinas pertanian |
| 681 | 02/02/2023 | FITRA WIJAYA | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan | Kurangnya bibit sawit bagi petani | Desa Bukit Kijang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | perkebunan masih kurang | | | | | | | | | |
| 684 | 02/02/2023 | FITRA WIJAYA | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | Masih terbatasnya bibit sapi di desa bukit kijang | Desa Bukit Kijang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 707 | 03/02/2023 | H. JAWARNO KS, S.IP | prasarana pertanian ( JUT, JUP, irigasi, lantai jemur, dll) sub sekotor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan masih minim | Belum adanya gudang tempat penyimpanan alat mesin (gudang alsin) | Desa Paya Benua, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 708 | 03/02/2023 | H. JAWARNO KS, S.IP | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | PPL di Kec. Mendo Barat sangat keterbatasan sarana dan fasilitas alat pertanian | Kecamatan Mendo Barat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 709 | 03/02/2023 | H. JAWARNO KS, S.IP | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura | Gapoktan Desa Penagan keluhkan bantuan pupuk subsidi yang sudah tidak ada lagi | Kecamatan Mendo Barat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | dan perkebunan masih kurang | | | | | | | | | |
| 710 | 03/02/2023 | H. JAWARNO KS, S.IP | Pembangunan Jalan & Jembatan | Jalan usaha tani yang belum diselesaikan awal dibangun tahun 2019 | Desa Paya Benua, Desa Kemuja, Desa Petaling, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya..koordinasi dengan dinas pertanian |
| 719 | 03/02/2023 | WARKAMNI | prasarana pertanian ( JUT, JUP, irigasi, lantai jemur, dll) sub sekotor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan masih minim | Minimnya produksi sapi di bangka belitung, sehingga membuat warga berkeinginan ternak sapi | Desa Nibung, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 720 | 03/02/2023 | WARKAMNI | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | Kurangnya pasokan daging sapi untuk wilaya bangka belitung sehingga membuat masyarakat berniat untuk beternak sapi (bibit sapi) | Desa Munggu, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 732 | 03/02/2023 | H. TAUFIK MARDIN, S.Sos | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura | bantuan pengadaan bibit sapi | desa sijuk, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | dan perkebunan masih kurang | | | | | | | | | |
| 734 | 03/02/2023 | H. TAUFIK MARDIN, S.Sos | Belum ditetapkannya secara tepat peruntukan lahan untuk investasi di setiap keb/kota | program pembukaan lahan dan pengadaan bibit sawit | Desa sungai padang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Dinas terkait |
| 752 | 04/02/2023 | AMRI CAHYADI, ST | prasarana pertanian ( JUT, JUP, irigasi, lantai jemur, dll) sub sekotor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan masih minim | usulan peternakan sapi untuk mewujudkan ekonomi masyarakat | desa tanjung pura bangka, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 755 | 04/02/2023 | AMRI CAHYADI, ST | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | usulan bantuan bibit sawit | desa kemuja, desa petaling, bakam, puding besar, berbura, riau silip, dan belinyu, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 761 | 04/02/2023 | AMRI CAHYADI, ST | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | usulan bibit pertanian yang produktif berupa sawit, teh, kopi dll | desa kota kapur, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| **Prioritas Daerah: Pembangunan Sumber Daya Manusia** | | | | | | | | | | | | |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 19/01/2023 | ARIYANTO, SH., MH | masih terbatasnya beasiswa bagi siswa | Untuk beasiswa bagi siswa kurang mampu dan guru ingin melanjutkan pendiddkan | SMK N 1 MUNTOK KEC,MUNTOK, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait. |
| 7 | 19/01/2023 | ARBIYANTO | Pengelolaan sekolah belum memadai | Belum tersedianya sarana dan prasarana yang baik seperti alat alat rebana/alat musik | SMA N 1 Simpang Teritip KEC, Simpang teritip, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait. |
| 10 | 20/01/2023 | EFREDI EFFENDY | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Kurangnya Ruang Belajar/Kelas ,sehingga sebagian siswa belajar menggunakan ruang laboratorium | SMAN 2 PANGKALPINANG, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 12 | 20/01/2023 | TONI MUKTI, SH | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | pembangunan rehabilitasi gedung dikarenakan atap yang sudah bocor | Desa Batu Betumpang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 23 | 20/01/2023 | TONI MUKTI, SH | masih kurangnya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan | Pengajuan untuk tunjangan honor guru pesantren Darul Hikmah karena kurangnya tenaga guru pesantren | Desa Batu Betumpang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 25 | 20/01/2023 | EFREDI EFFENDY | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Belum Ada Ruang Laboratorium Bahasa | SMAN 2 PANGKALPINANG , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 34 | 20/01/2023 | EFREDI EFFENDY | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Permohonan Pembangunan Masjid/Musholla ALKAUTSAR, Musholla yang ada Tidak Bisa Menampung Semua Siswa yang Setiap Tahunnya Bertambah | SMAN 4 PANGKALPINANG , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 20/01/2023 | EFREDI EFFENDY | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Pembangunan atau Renovasi Lapangan Basket dan Voli yang Rusak dan digenangi Air | SMAN 4 PANGKALPINANG , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 44 | 20/01/2023 | EFREDI EFFENDY | Pengelolaan sekolah belum memadai | Pembangunan atau Renovasi Kantin | SMAN 4 PANGKALPINANG , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 50 | 20/01/2023 | EFREDI EFFENDY | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Permohonan Kamera CCTV | SMAN 4 PANGKALPINANG , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 66 | 20/01/2023 | EVI JUNITA | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Sebagai upaya melahirkan anak didik yang beradab, reliqius, dan memiliki kesadaran beribadah dan tahu tata cara dalam pelaksanaannya, MAN Insan Cendikia Bangka Tengah sangat membutuhkan adanya masjid dilingkungan Sekolah MAN Insan Cendikia Bangka Tengah yang tidak hanya sebagai sarana ibadah namun juga sebagai sarana pembelajaran | JL. Raya Desa Sungkap Kec. Simpang Katis Kab. Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 20/01/2023 | EVI JUNITA | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Dalam meningkatkan sarana dan prasaran sekolah yang berstandar Nasional perlu adanya saran yang mendukung untuk menompang dunia pendidikan yang lebih baik, terutama sarana jalan setapak yang ada di MAN Insan Cendikia ketika musim hujan jalan yang dilalu dari gerbang sampai kelas tergenang air dan becek lumpur. Oleh karen itu sangat penting adanya bantuan dari Pemerintah untuk sarana jalan setapak di Lingkungan MAN Insan Cendikia Bangka Tengah | JL. Raya Desa Sungkap Kec. Simpang Katis Kab. Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 68 | 20/01/2023 | EVI JUNITA | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Listrik merupakan hal yang penting dalam peningkatan dan penunjang secara administrasi dunia pendidikan. Dimana listrik sangat lah penting dalam kegiatan belajar mengajar | JL. Raya Desa Sungkap Kec. Simpang Katis Kab. Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 69 | 20/01/2023 | EVI JUNITA | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Dalam peningkatan mutu pendidikan di Ponpes Nurul Falah dimana para santri membutuhkan pelayanan kesehatan yang cepat sebelum terjadi hal-hal yang tidak di inginkan, oleh karena itu sangat penting adanya wadah atau ruang berupa gedung klinik kesehatan pospes nurul falah air mesu | Jl. Desa Air Mesu Kec. Pangkalan Baru Kab, Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 20/01/2023 | RINGGIT KECUBUNG, S.Pd | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Terbatasnya ruang, sesuai dengan Permen Diknas Nomor 24 tahun 2007, ruang perpustakaan minimal seukuran ruang kelas, namun di sisi lain ruang kelas yang ada di SMK Muhammadiyah Muntok hanya cukup digunakan untuk kegiatan KBM siswa/i, oleh karena itu sangat penting adanya ruang perpustakaan sekolah | JL. Argotirto Kp. Air Trejun RT 04 RW 02, Kel. Sungai Daeng Kec. Muntok Kab. Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 72 | 20/01/2023 | RINGGIT KECUBUNG, S.Pd | masih terbatasnya beasiswa bagi siswa | Dalam Undang-Undang 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan dari kemerdekaan adalah mencerdaskan kehidupan bangka, namun masih minimnya keinginan orangtua untuk menyesekolahkan anaknya karena tidak ada biaya, oleh karena itu bantuan beasiswa sangat diperlukan agar siswa tidak ada yang putus sekolah serta tidak membebani para orangtua khususnya siswa/i di SMK Muhammadiyah Muntok | JL. Argotirto Kp. Air Trejun RT 04 RW 02, Kel. Sungai Daeng Kec. Muntok Kab. Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 73 | 20/01/2023 | RINGGIT KECUBUNG, S.Pd | Masih kurangnya ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga | Sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional serta dalam meningkatkan minat dan bakat para peserta didik sebagai salah satu bagian dari Eskul, maka sangat penting adanya sarana olahraga di MA Terpadi Bina Insan Cendikia Muntok | JL. Lingkar Masjid Agung Baitur Ridho Pal IV Dusun V Desa Belo Laut Kec. Muntok Kab. Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Untuk ditindaklanjuti. |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 20/01/2023 | RINGGIT KECUBUNG, S.Pd | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Di era globalisasi seperti sekarang ini Perkembangan teknologi telah membawa pengaruh terhadap bidang pendidikan dalam proses pembelajaran. Siswa di tuntut untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman, serta untuk menghadapi tantangan global. Apa lagi sekarang tidak hanya dalam pembelajaran saja namun dalam ujian sekolah sekarang sudah berbasis teknologi (UNBK), karena itu sangat penting adanya komputer di MA terpadu Bina Insan Cendikia Muntok | JL. Lingkar Masjid Agung Baitur Ridho Pal IV Dusun V Desa Belo Laut Kec. Muntok Kab. Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 76 | 20/01/2023 | RINGGIT KECUBUNG, S.Pd | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Untuk meningkatkan pemahaman siswa dibidang sain, tidak hanya diperlukan teori saja, melain ilmu terapan yakni praktek, sehingga sangat penting adanya ruangan khusus untuk Laboratorium Sekolah SMA Negeri 1 Parit Tiga agar pembelajaran lebih efesien dan efektif dalam kegiatan belajar mengajar | JL. Raya Desa Telak Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 82 | 20/01/2023 | RINGGIT KECUBUNG, S.Pd | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Bantuan Sarana dan Prasaran Pagar Sekolah SMA Negeri 1 Parit Tiga | JL. Raya Desa Telak Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 20/01/2023 | RINGGIT KECUBUNG, S.Pd | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Selama ini siswa dan guru kesulitan mengakses air bersih, lantaran kondisi sekolah tersebut kekurangan air bersih karena sumur bor terbatas. Sementara jumlah siswa terus bertambah bahkan saat ini mencapai 500 lebih siswa, jumlah itu akan terus bertambah mengingat sekolah SMA Negeri 1 Parit Tiga merupaka sekolah proritas dari para orangtua untk menyesekolahkan anaknya | JL. Raya Desa Telak Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 102 | 20/01/2023 | TONI MUKTI, SH | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | pembangunan pagar SMKN 1 Pulau Besar dikarenakan belum ada pagar sekolah | SMK N 1 Pulau Besar, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 103 | 20/01/2023 | TONI MUKTI, SH | Belum terpenuhinya sarana dan prasarana jaringan internet di kabupaten/Kota | Peningkatan RPS Kultur Jaringan SMKN 1 Pulau Besar dikarenakan kurang kuat signal sehingga menghambat proses belajar mengajar | SMK N 1 Pulau Besar, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke dinas terkait |
| 104 | 20/01/2023 | TONI MUKTI, SH | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | peningkatan sarana prasarana (komputer dan alat praktek) di SMK N 1 Pulau besar dikarenakan kurang memadai fasilitas komputer | SMK N 1 Pulau Besar, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 105 | 20/01/2023 | TONI MUKTI, SH | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar | peningkatan rehabilitasi gedung SMKN I Pulau Besar dikarenakan sudah banyak rusak | SMK N 1 Pulau Besar, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nasional Pendidikan | | | | | | | | | |
| 114 | 20/01/2023 | TONI MUKTI, SH | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | pembangunan 3 ruang kelas baru dan 1 aula pertemuan di SMA N 1 Pulau Besar | SMA N 1 Pulau Besar, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 118 | 24/01/2023 | H. AKSAN VISYAWAN, S.ST., MH | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Bantuan Pendidikan Anak - anak yang Tidak Mampu | Desa Paya Benua Kec. Mendo Barat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 122 | 24/01/2023 | SUSI | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Banyaknya Fasilitas sekolah yang belum memadai seperti pagar sekolah | SMK N 1 Simpang Rimba Kecamatan Simpang Rimba, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 124 | 24/01/2023 | SUSI | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Fasilitas wc/toilet di sekolah untuk siswa/i belum memadai | SMKN 1 Simpang Rimba Kecamatan Simpang Rimba, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 125 | 24/01/2023 | SUSI | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Fasilitas sekolah belum memadai seperti pendingin ruang laboratorium dan ruang praktek untuk kegiatan belajar mengajar siswa/i | SMKN 1 Simpang Rimba Kecamatan Simpang Rimba, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 24/01/2023 | SUSI | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | pembangunan pos satpam untuk keamanan sekolah | SMKN 1 Simpang Rimba Kecamatan Simpang Rimba, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 130 | 24/01/2023 | Drs. RUSTAMSYAH | Permasalahan pertanahan (status lahan) yang belum jelas untuk berinvestasi | Tidak adanya lahan untuk pertanian dan peternakan | SMKN 1 MENDO BARAT , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke dinas terkait |
| 131 | 24/01/2023 | Drs. RUSTAMSYAH | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Belum ada Ruang UKS | SMKN 1 MENDO BARAT , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 132 | 24/01/2023 | Drs. RUSTAMSYAH | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Pembangunan atau Renovasi Ruang Kelas yang kurang layak | SMKN 1 Mendo Barat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 133 | 24/01/2023 | Drs. RUSTAMSYAH | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Pembangunan pagar sekolah depan dan belakang | SMKN 1 MENDO BARAT , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 134 | 24/01/2023 | Drs. RUSTAMSYAH | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Pengadaan Komputer Lab Multimedia yang speknya tidak memenuhi syarat untuk jurusan multimedia | SMKN 1 MENDO BARAT, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 24/01/2023 | Drs. RUSTAMSYAH | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Kurangnya sarana dan prasarana Moubiler Kelas | SMKN 1 MENDO BARAT, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 138 | 24/01/2023 | MATZAN | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Belum adanya pagar sekolah dibagian belakang sekolah | SMAN 1 BAKAM Kecamatan Bakam, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 139 | 24/01/2023 | MATZAN | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Pembangunan atau Renovasi Ruang Kelas yang Kurang Layak | SMAN 1 BAKAM Kecamatan Bakam, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 140 | 24/01/2023 | MATZAN | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Pembangunan Gedung Serba Guna Untuk Fasilitas Kegiatan Sekolah | SMAN 1 BAKAM Kecamatan Bakam, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 141 | 24/01/2023 | ARIYANTO, SH., MH | Pengelolaan sekolah belum memadai | Belum tersedianya sarana dan prasarana yang baik untuk pembangunan gedung serba guna | SMK N 1 Muntok Kec.Muntok, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 158 | 25/01/2023 | TONI PURNAMA, S.IP | Keterbatasan daya tampung sekolah | kekurangan asrama santri pondok pesantern | Pondok Pesantren Khoirul Desa Payung, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 25/01/2023 | H. AKSAN VISYAWAN, S.ST., MH | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Bantuan Sarana Prasarana Fasilitas Mengajar Berupa Kipas Angin, AC, Komputer dan Peralatan Praktek Kerja | MAN 1 MADRASAH ALIYAH SUNGAILIAT, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 184 | 25/01/2023 | H. AKSAN VISYAWAN, S.ST., MH | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Permintaan Bantuan Pengadaan Buku dan Try Out Untuk Pra- Test Masuk Perguruan Tinggi | SMANSA 1 PEMALI KEC. PEMALI, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 186 | 25/01/2023 | H. AKSAN VISYAWAN, S.ST., MH | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Terkait Efektivitas Kegiatan Belajar Mengajar/ Menerapkan Sitem Full Day Scholl | SMANSA 1 PEMALI KEC. PEMALI, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 198 | 25/01/2023 | TONI PURNAMA, S.IP | Pengelolaan sekolah belum memadai | belum dibangun pagar sekolah | SMA N 1 Pulau Besar dan SMA N 1 Payung, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 200 | 25/01/2023 | Drs. RUSTAMSYAH | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Tidak adanya fasilitas untuk praktek siswa/siswi berupa kandang ayam yang berbasis teknologi dengan tampungan 20 ribu ayam | SMKN 1 MENDO BARAT, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 201 | 25/01/2023 | EFREDI EFFENDY | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Pembangunan atau Renovasi Lapangan Basket dan Futsal yang Rusak dan digenangi air | SMAN 2 PANGKALPINANG, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 25/01/2023 | EFREDI EFFENDY | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Pembangunan atau Renovasi Ruang Belajar yang tidak memiliki jendela atau fentilasi udara | SMAN 4 PANGKALPINANG, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 203 | 25/01/2023 | MATZAN | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Pengadaan Bus sekolah untuk anak didik yang tidak memiliki kendaraan an tempat untuk menuju sekolah | SMAN 1 BAKAM KECAMATAN BAKAM , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 204 | 25/01/2023 | MATZAN | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Kurangnya Moubiler diRuang Belajar | SMAN 1 BAKAM KECAMATAN BAKAM , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 205 | 25/01/2023 | MATZAN | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Renovasi Ruang Kepala Sekolah , Tata Usaha, Perpustakaan, Musholla, Rumah Penjaga Sekolah, dan ruang olahraga yang Kurang layak | SMAN 1 BAKAM KECAMATAN BAKAM , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 206 | 25/01/2023 | TONI PURNAMA, S.IP | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | kurangnya sarana dan prasarana sekolah taman kanak-kanak | TK N 1 Pulau Besar, TK Gazania Desa Panca Tunggal, TK Nurhidayatullah Iman Ds Fajar Indah, TK Nurul Hikmah Ds Sukajaya, TK Pertiwi Ds Sumberjaya Pertiwi, TK RA Darul Hikmah Ds Batu Betumpang Kec Pulau Besar, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 208 | 25/01/2023 | MATZAN | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum | Pengadaan sarana dan prasarana olahraga seperti Futsal, basket, dan volly | SMAN 1 BAKAM KECAMATAN BAKAM, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | memenuhi Standar Nasional Pendidikan | | | | | | | | | ditindaklanjuti usulan ini. |
| 210 | 25/01/2023 | MATZAN | masih kurangnya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan | Tidak adanya Staf Bagian Keuangan atau Bendahara | SMAN 1 BAKAM KECAMATAN BAKAM , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 213 | 25/01/2023 | MATZAN | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Pengadaan Laptop untuk jurusan multimedia, Komputer yang ada speknya tidak memenuhi syarat | SMAN 1 BAKAM KECAMATAN BAKAM , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 216 | 25/01/2023 | MATZAN | masih terbatasnya beasiswa bagi siswa | Masih Kurangnya Bantuan Beasiswa untuk santri yang kurang mampu | Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Daarul Iman Desa Kimak Kecamatan Merawang , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 219 | 25/01/2023 | MATZAN | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Pembangunan atau Renovasi Musholla untuk santriwati , yang saat ini masih bergabung sholat di musholla santriwan | Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Daarul Iman Desa Kimak Kecamatan Merawang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 220 | 25/01/2023 | EVI JUNITA | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | dalam meningkatkan keamanan untuk para siswa sekolah apa lagi kebanyakan lokasi rumah siswa berada jauh dari sekolah, oleh karena itu perlu adanya mobil sekolah untuk antar jemput para siswa | Jl. Raya Desa Sungkap Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 222 | 25/01/2023 | TONI PURNAMA, S.IP | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar | ketersediaan air bersih disekolah tidak memadai, membutuhkan sumur bor yang besar | SMA N 1 Payung, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nasional Pendidikan | | | | | | | | | |
| 223 | 25/01/2023 | EVI JUNITA | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Sarana Prasarana Pendidikan yang masih belum memenuhi standar Nasional pendidikan yang masih kurangnya air bersih dalam ponpes nurul falah air mesu | Jl. Desa Air Mesu Kecamatan Pangkalan baru Kabupaten bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 225 | 25/01/2023 | EVI JUNITA | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Ruang Perpustakaan MA Nurul Falah Air Mesu | Jl. Raya Desa Air Mesu Timur Kecamatan pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 238 | 25/01/2023 | MATZAN | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Tidak adanya Rumah Untuk Guru/ Pengajar para Santri | Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Darul Iman Desa Kimak Kecamatan Merawang , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 239 | 25/01/2023 | MATZAN | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Pembangunan Dapur Umum | Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Darul Iman Desa Kimak Kecamatan Merawang , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 242 | 25/01/2023 | SUSI | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Banyaknya fasilitas sekolah yang belum memadai seperti Banguna gedung serba guna, ruang Olahraga dan ruang pertemuan | SMKN 1 Simpang Rimba Kecamatan Simpang Rimba, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | 25/01/2023 | SUSI | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Banyaknya fasilitas sekolah yang belum memadai seperti Rumah Dinas Penjaga Sekolah | SMKN 1 Simpang Rimba Kecamatan Simpang Rimba, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 245 | 25/01/2023 | SUSI | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Pembangunan UKS untuk menunjang fasilitas kesehatan siswa/i di lingkungan sekolah | SMKN 1 Simpang Rimba, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 246 | 25/01/2023 | RANTO SENDHU, SE | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | rusak berat atap gedung sekolah, dan kerusakan berat pada dinding, plafon, pondasi dan struktur gedung | SMK Yapensu Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 252 | 25/01/2023 | ADET, SH., MH | Pengelolaan sekolah belum memadai | Kondisi sekolah yang tidak ada pagar sekolah menjadi tempat pemuda pemudi berkumpul di pekarangan sekolah | SMP N simpang katis di desa puput kecamatan simpang katis, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 270 | 26/01/2023 | EDI JUNAIDI FOE | Pengelolaan sekolah belum memadai | Mengharapkan bantuan pembangunan pagar sekolah karena pagar yang lama sudah rusak | SMK N 1 Toboali , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 303 | 26/01/2023 | HERYAWANDI, SE | Keterbatasan daya tampung sekolah | Pengajuan Ruang Kelas untuk PAUD di TK Cendrawasih Tempilang | PAUD Cendrawasih Desa Tempilang Kab. Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 305 | 26/01/2023 | HERYAWANDI, SE | Keterbatasan daya tampung sekolah | Pengajuan Renovasi gedung Taman Kanak-Kanak dan Kondisi bangunan perlu direnovasi | PAUD Cendrawasih Desa Tempilang Kab. Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 | 26/01/2023 | HERYAWANDI, SE | Pengelolaan sekolah belum memadai | Kurang tersedianya ATK untuk bahan praktek anak-anak | PAUD Cendrawasih Desa Tempilang Kab. Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 313 | 26/01/2023 | FERDIYANSYAH, A.Md | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Kurangnya kuota yang didapatkan, hanya 15% | Kecamatan Gerunggang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 318 | 26/01/2023 | FERDIYANSYAH, A.Md | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | banyak alat praktik yang sudah rusak yang mesti dilakukan peremajaan dan pergantian unit baru | SMK N 2 Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 319 | 26/01/2023 | FERDIYANSYAH, A.Md | masih kurangnya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan | banyak guru yang mau pensiun sehingga sekolah kekurangan guru, khususnya guru kejuruan | SMK N 2 Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 323 | 26/01/2023 | HERYAWANDI, SE | Pengelolaan sekolah belum memadai | Mengajukan Pembangunan Tempat untuk Penjaga Sekolah dan Asrama untuk guru yang yang berdomisili di Pangkalpinang | SMKN 1 Kelapa, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 324 | 26/01/2023 | HERYAWANDI, SE | Pengelolaan sekolah belum memadai | Mengajukan tambahan bantuan modal untuk Siswa/siswi untuk mendidik siswa/siswi berwirausaha di bidang pertanian | SMKN 1 Kelapa, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 325 | 26/01/2023 | HERYAWANDI, SE | Pengelolaan sekolah belum memadai | Mengajukan pembuatan jalan aspal dari depan Gerbang menuju ke sekolah | SMKN 1 Kelapa, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327 | 26/01/2023 | HERYAWANDI, SE | Keterbatasan daya tampung sekolah | Mengajukan tambahan Laboratorium pertanian untuk kegiatan praktek siswa/siswi jurusan pengolahan hasil pertanian | SMKN 1 Kelapa, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 328 | 26/01/2023 | EDI JUNAIDI FOE | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | bangunan mushola belum memadai | SMK N1 Toboali, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 329 | 26/01/2023 | HERYAWANDI, SE | Pengelolaan sekolah belum memadai | Mengajukan bantuan alat-alat praktek pertanian antara lain traktor, cangkul , pupuk dll untuk menunjang kegiatan praktek siswa/siswi. | SMKN 1 kelapa, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 330 | 26/01/2023 | EDI JUNAIDI FOE | Pengelolaan sekolah belum memadai | perluasan lahan parkir sekolah | SMK N1 Toboali, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 333 | 26/01/2023 | EDI JUNAIDI FOE | Keterbatasan daya tampung sekolah | membutuhkan tambahan meja, kursi, dan pendingin ruangan | SMK N1 Toboali, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 334 | 26/01/2023 | HERYAWANDI, SE | Kompetensi guru masih kurang | Mengajukan Permintaan bantuan guru pendidik untuk program study Pengolahan Hasil Pertanian. | SMKN 1 Kelapa, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 335 | 26/01/2023 | HERYAWANDI, SE | Keterbatasan daya tampung sekolah | Mengajukan Permintaan bantuan ruang kelas | SMKN 1 Kelapa, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 336 | 26/01/2023 | ADET, SH., MH | Pengelolaan sekolah belum memadai | Tidak ada pagar sekolah | SDN 3 Desa Sungkap di Desa Sungkap Kecamatan Simpang Katis, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | ditindaklanjuti usulan ini. |
| 337 | 26/01/2023 | EDI JUNAIDI FOE | Pengelolaan sekolah belum memadai | membutuhkan 1 buah bus sekolah | SMK N1 Toboali, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 339 | 26/01/2023 | HERYAWANDI, SE | Permasalahan pertanahan (status lahan) yang belum jelas untuk berinvestasi | Permintaan lokasi lahan tanah yang subur untuk dijadikan lahan praktek pertanian.Kurangnya lahan subur untuk dijadikan lahan praktek, lahan yang ada masih belum maksimal dan berdampingan dengan lahan milik perusahaan | SMKN 1 Kelapa, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke dinas terkait |
| 340 | 26/01/2023 | EDI JUNAIDI FOE | Pengelolaan sekolah belum memadai | membutuhkan pembangunan sarana dan prasarana sekolah untuk mengantipasi datangnya banjir | SMK N1 Toboali, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 345 | 26/01/2023 | HERYAWANDI, SE | Keterbatasan daya tampung sekolah | Mengajukan pembangunan Ruang Osis, Ruang BK dan Ruang Kesiswaan. | SMKN 1 Simpang Teritip, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 346 | 26/01/2023 | YUS DERAHMAN | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Tidak tersedianya alat drum band di SMA N 1 Jebus sebagai bagian dari kegiatan ekstrakulikuler siswa. Selama ini dalam berbagai event atau kegiatan di Kecamatan Jebus sering menyewa drumb band dari sekolah di Kecamatan Kelapa | SMAN 1 Jebus, Desa Jebus, Kecamatan Jebus, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 347 | 26/01/2023 | EDI JUNAIDI FOE | Pengelolaan sekolah belum memadai | bantuan tambahan buku baru, terutama buku fisika dan biologi | SMK N1 Toboali, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349 | 26/01/2023 | HERYAWANDI, SE | Keterbatasan daya tampung sekolah | Mengajukan pembangunan Gerbang dan Pagar Sekolah. | SMKN 1 Simpang teritip, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 351 | 26/01/2023 | EDI JUNAIDI FOE | Pengelolaan sekolah belum memadai | membutuhkan perangkat tambahan drumband | SMK N1 Toboali, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 352 | 26/01/2023 | HERYAWANDI, SE | Pengelolaan sekolah belum memadai | Mengajukan pembuatan Sumur Bor/ Sumur Gali | SMKN 1 Simpang Teritip, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 353 | 26/01/2023 | EDI JUNAIDI FOE | Keterbatasan daya tampung sekolah | membutuhkan bantuan sertifikasi buku pelaut bagi taruna-taruni | SMK N1 Tukak Sadai , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 355 | 26/01/2023 | EDI JUNAIDI FOE | Pengelolaan sekolah belum memadai | membutuhkan bus sekolah | SMK N1 Tukak Sadai , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 356 | 26/01/2023 | HERYAWANDI, SE | Pengelolaan sekolah belum memadai | Mengajukan Pembuatan Laboratorium Bahasa Indonesia, Lab Fisika, Lab. Kimia, Lab. Bahasa Inggris beserta peralatan laboratorium. | SMKN 1 Simpang Teritip, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 357 | 26/01/2023 | YUS DERAHMAN | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Rumah Kompos dalam persiapan perlombangaan tingkat nasional. Rumah kompos sebagai bagian syarat perlombaan saat ini kondisinya sudah hamper roboh dan tidak layak | SMAN 1 Jebus, Desa Jebus, Kecamatan Jebus, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 358 | 26/01/2023 | EDI JUNAIDI FOE | Keterbatasan daya tampung sekolah | membutuhkan perluasan tanah/lahan sekolah | SMK N1 Tukak Sadai , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | ditindaklanjuti usulan ini. |
| 359 | 26/01/2023 | EDI JUNAIDI FOE | Pengelolaan sekolah belum memadai | membutuhkan perluasan lahan mushola karena kurangnya daya tampung taruna-taruni untuk menjalankan ibadah | SMK N1 Tukak Sadai , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 361 | 26/01/2023 | EDI JUNAIDI FOE | Pengelolaan sekolah belum memadai | membutuhkan perluasan lahan parkir sekolah | SMK N1 Tukak Sadai , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 364 | 26/01/2023 | EDI JUNAIDI FOE | Pengelolaan sekolah belum memadai | bantuan pembangunan pagar sekolah | SMK N1 Tukak Sadai , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 365 | 26/01/2023 | EDI JUNAIDI FOE | Pengelolaan sekolah belum memadai | membutuhkan tambahan meja, kursi, dan pendingin ruangan | SMK N1 Tukak Sadai , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 370 | 26/01/2023 | EDI JUNAIDI FOE | Pengelolaan sekolah belum memadai | membutuhkan ruang UKS, BK, dan Gedung Osis | SMK N1 Tukak Sadai , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 371 | 26/01/2023 | HERYAWANDI, SE | Kompetensi guru rendah | Mengajukan pembangunan ruang guru | SMKN 1 Simpang Teritip, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 372 | 26/01/2023 | HERYAWANDI, SE | Masih terbatasnya sarana dan prasarana kepemudaan | Mengajukan pembuatan parkir kendaraan siswa | SMKN 1 Simpang Teritip, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Untuk ditindaklanjuti. |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | 26/01/2023 | HERYAWANDI, SE | Kompetensi guru masih kurang | Permintaan guru Produktif Pengelasan sebanyak 3 orang, guru Produktif DPB sebanyak 1 orang, guru matematika sebanyak 1 orang dan guru kimia. | SMKN 1 Simpang Teritip, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 375 | 26/01/2023 | HERYAWANDI, SE | Kompetensi guru masih kurang | permintaan Laboran bengkel sebanyak 2 orang, laboran perpustakaan sebanyak 1 orang, tukang kebun sebanyak 2 orang, satpam sekolah sebanyak 1 orang, OB sekolah sebanyak 1 orang | SMKN 1 Simpang Teritip, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 393 | 26/01/2023 | YUS DERAHMAN | masih terbatasnya beasiswa bagi siswa | Beasiswa provinsi diharapkan include dengan uang saku. Orang tua siswa yang kurang mampu masih kesulitan dalam memberikan uang saku kepada anaknya yang sekolah atau kuliah | Desa Cupat, Kecamatan Parittiga, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 396 | 26/01/2023 | YUS DERAHMAN | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Kesejahteraan supir dan service bus sekolah di optimalkan lagi. Supir bus sekolah kini tidak di gaji, tidaka ada uang bensin, dan tidak ada anggaran service berkala bus | Desa Cupat, Kecamatan Parittiga, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 402 | 26/01/2023 | YUS DERAHMAN | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Pembangunan pagar sekolah dasar. Pagar SD Telak roboh akibat dari pelebaran jalan yang dilakukan | Desa Telak, Kecamatan Parittiga, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 408 | 26/01/2023 | EDI JUNAIDI FOE | Keterbatasan daya tampung sekolah | membutuhkan aula pertemuan sekolah | SMK N1 Toboali, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 410 | 26/01/2023 | EDI JUNAIDI FOE | Keterbatasan daya tampung sekolah | membutuhkan laboratorium simulator nautika | SMK N1 Tukak Sadai Toboali, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | ditindaklanjuti usulan ini. |
| 459 | 27/01/2023 | H. MARSIDI H. SATAR, SH | masih terbatasnya beasiswa bagi siswa | terdapat siswa yang kurang mampu dan siswa berprestasi di SMA Muhammadiyah Toboali Kabupaten Bangka Selatan | Jl.Jend Sudirman Toboali Kab. Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 460 | 27/01/2023 | H. MARSIDI H. SATAR, SH | Pengelolaan sekolah belum memadai | 1. pada saat hujan terdapat daerah yang digenangi air/banjir, seperti halaman sekolah, lapangan Upacara, rest area | Jl. Puput, Toboali, Kec. Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung 33783, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 463 | 27/01/2023 | H. MARSIDI H. SATAR, SH | Pengelolaan sekolah belum memadai | masih minimnya pagar sekolah, sehingga timbul kekhawatiran untuk keamanan sekolah | Jl. Air Benar No.33183, Teladan, Kec. Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung 33783, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 464 | 27/01/2023 | H. MARSIDI H. SATAR, SH | Pengelolaan sekolah belum memadai | tidak terdapat ruang aula, perluasan area parkir, dan banyak kursi dan meja yang rusak | Jl. Air Benar No.33183, Teladan, Kec. Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung 33783, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 465 | 27/01/2023 | H. MARSIDI H. SATAR, SH | Pengelolaan sekolah belum memadai | terdapat siswa dan siswi yang berasal dari tukak Sadai, Lepar Pongok, tanjung Labu yang jaraknya sangat jauh dari sekolah, sehingga perlu dibangun asrama putra dan putri Untuk menampung/penginapan kepada anak-anak tersebut | Jl.Jend Sudirman Toboali Kab. Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 468 | 27/01/2023 | FERDIYANSYAH, A.Md | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Pengembangan motor dan mobil listrik yang sudah ada | SMKN 2 PANGKALPINANG, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 479 | 27/01/2023 | FERDIYANSYAH, A.Md | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | tidak adanya kendaraan operasional sekolah yang membuat sulitnya siswa untuk praktik diluar sekolah | SMK N 2 Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 483 | 27/01/2023 | DODY KUSDIAN, ST., MH | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Permohonan Bantuan Beasiswa Pendidikan Perkuliahan dan fasilitas Penunjang Perkuliahan di UBB | Jl. KH Ahamd Dahlan RT/RW 008/003 Kel. Keramat Kec. Rangkui, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Untuk usulan sarana prasarana bangunan fisik bisa diajukan ke PUPR. Untuk beasiswa mahasiswa yang sudah kuliah diajukan ke Biro Kesra. Untuk siswa SMA/SMK/SLB bisa berkoordinasi dengan DInas Pendidikan |
| 485 | 27/01/2023 | DODY KUSDIAN, ST., MH | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Permohonan bantuan untuk sarana dan prasarana SMK Sore Pangkalpinang | Jl. Mustika I No 32 Semabung Lama Kec. Bukit Intan, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 486 | 27/01/2023 | DODY KUSDIAN, ST., MH | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Permohonan bantuan dana untuk pengadaan meubelair dan peralatan praktik teknologi laboratoirum medik untuk menunjang proses pembelajaran siswa | Jl. Satama RT/RW 09/03 Semabung Baru Kec. Girimaya, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 487 | 27/01/2023 | EDI JUNAIDI FOE | Pengelolaan sekolah belum memadai | Membutuhkan kendaraan untuk kebutuhan praktek | SMK N1 Toboali, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 488 | 27/01/2023 | EDI JUNAIDI FOE | Pengelolaan sekolah belum memadai | Membutuhkan perahu untuk kebutuhan praktek | SMK N1 Tukak Sadai Toboali, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 489 | 27/01/2023 | EDI JUNAIDI FOE | Pengelolaan sekolah belum memadai | Membutuhkan pembatas wudhu | SMK N1 Toboali, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 503 | 28/01/2023 | YOGA NURSIAWAN, A.Md | Pengelolaan sekolah belum memadai | Belum adanya sarana dan prasarana yang menunjang praktek perhotelan | SMKN 1 Sijuk, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 525 | 30/01/2023 | Drs. RUSTAMSYAH | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | pengadaan Kandang ayam yang berbasis teknologi dengan tampungan 20 ribu ayam untuk Fasilitas Praktek siswa siswi Jurusan Peternakan | SMKN 1 MENDO BARAT , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 544 | 30/01/2023 | NATA SUMITRA | Pengelolaan sekolah belum memadai | Pengadaan pagar SMA N 1 Damar | SMA N 1 Desa Damar, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 545 | 30/01/2023 | NATA SUMITRA | Pengelolaan sekolah belum memadai | Pembangunan gedung serbaguna SMA N 1 Manggar | SMA N 1 Manggar , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 546 | 30/01/2023 | NATA SUMITRA | Pengelolaan sekolah belum memadai | Pembangunan Gapura SMA N 1 Manggar | SMA N 1 Manggar, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 558 | 31/01/2023 | NICO PLAMONIA UTAMA, ST., MM | Kurangnya sarana produktif SMK | Setiap musim hujan lapangan upacara sering tergenang air | SMK PGRI PANGKALPINANG, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | ditindaklanjuti usulan ini. |
| 559 | 31/01/2023 | NICO PLAMONIA UTAMA, ST., MM | Kurangnya sarana produktif SMK | Terbatasnya ruangan yang ada | SMK NEGERI 5 PANGKALPINANG, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 566 | 31/01/2023 | NICO PLAMONIA UTAMA, ST., MM | Kurangnya sarana produktif SMK | Rehab asrama Putra dan Putri di SMK N 4 sudah tidak layak | SMK NEGERI 4 PANGKALPINANG, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 568 | 31/01/2023 | NICO PLAMONIA UTAMA, ST., MM | Kurangnya sarana produktif SMK | Perbaikan WC dan saluran air yang tersumbat karena sangat mengganggu aktivitas belajar mengajar | SMK NEGERI 4 PANGKALPINANG, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 569 | 31/01/2023 | BELIADI, S.IP | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | PERLU ADANYA PENINGKATAN MUTU SDM DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR INI, DENGAN CARA MENEMPATKAN PERGURUAN TINGGI SETIDAKNYA MENEMPAT SATU FAKULTAS DARI SATU PERGURUAN TINGGI YANG ADA DI PROVINSI BANGKA BELITUNG | JL. RAYA MANGGAR – GANTUNG KECAMATAN GANTUNG KABUPATEN BELITUNG TIMUR, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 572 | 31/01/2023 | NICO PLAMONIA UTAMA, ST., MM | Pengelolaan sekolah belum memadai | Perbaikan atap genteng karena banyaknya dalam kondisi rusak | SMK NEGERI 4 PANGKALPINANG, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 576 | 31/01/2023 | NICO PLAMONIA UTAMA, ST., MM | Kurangnya sarana produktif SMK | Agar pihak stasiun TV dapat memberikan kuota 10% untuk penayangan produk lokal kepada siswa-siswa di SMK | SMK-SMK PANGKALPINANG, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 588 | 31/01/2023 | NICO PLAMONIA UTAMA, ST., MM | Pengelolaan sekolah belum memadai | Pengadaan kelengkapan peralatan alat praktek di Lab Multimedia | SMK PGRI PANGKALPINANG, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 589 | 31/01/2023 | NICO PLAMONIA UTAMA, ST., MM | Keterbatasan daya tampung sekolah | Kurang transparannya dalam PPDB untuk sekolah Negeri | SMK - SMK NEGERI PANGKALPINANG, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 590 | 31/01/2023 | NICO PLAMONIA UTAMA, ST., MM | Pengelolaan sekolah belum memadai | Peninjauan kembali untuk rencana 6 hari belajar di sekolah | SMK PGRI PANGKALPINANG, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 591 | 31/01/2023 | NICO PLAMONIA UTAMA, ST., MM | Permasalahan pertanahan (status lahan) yang belum jelas untuk berinvestasi | Terbatasnya lahan | SMK NEGERI 5 PANGKALPINANG, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Dinas terkait |
| 592 | 31/01/2023 | NICO PLAMONIA UTAMA, ST., MM | Kurangnya sarana produktif SMK | Kekurangan kelengkapan peralatan dan perlengkapan sekolah khususnya alat lab dan juga ruang praktek yang tidak ada untuk jurusan teknik laboratorium medik | SMK Negeri 5 Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 593 | 31/01/2023 | NICO PLAMONIA UTAMA, ST., MM | Pembangunan Sarana Prasarana Masyarakat | Belum adanya Universitas di Bangka Belitung untuk jurusan S1 Farmasi dan Profesi Apoteker | SMK Negeri 5 Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 594 | 31/01/2023 | NICO PLAMONIA UTAMA, ST., MM | Kurangnya sarana produktif SMK | Pengadaan AC | SMK NEGERI 5 PANGKALPINANG, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 595 | 31/01/2023 | NICO PLAMONIA UTAMA, ST., MM | Keterbatasan Anggaran | Banyaknya anggaran untuk SMK yang terpotong | SMK NEGERI 5 PANGKALPINANG, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Dinas terkait masukan untuk urusan dinas pendidikan |
| 596 | 31/01/2023 | NICO PLAMONIA UTAMA, ST., MM | Kurangnya sarana produktif SMK | Tidak sesuainya antara pengadaan bahan praktek dan kebutuhan | SMK NEGERI 5 PANGKALPINANG, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 597 | 31/01/2023 | NICO PLAMONIA UTAMA, ST., MM | Pengelolaan sekolah belum memadai | Mengingat bangka belitung merupakan provinsi kepulauan dan SMK N4 pangkalpinang merupakan sekolah keluatan dan perikanan agar menjadikan SMKN 4 PKP menjadi SMK Unggulan di Provinsi Bangka Belitung | SMK NEGERI 4 PANGKALPINANG, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 599 | 31/01/2023 | NICO PLAMONIA UTAMA, ST., MM | Fasilitasi, Pelatihan, Sertifikasi Tenaga Ahli & Tenaga Terampil Konstruksi | Permohonan pengadaan peralatab uji kompetensi perangkat dan aplikasi CBT untuk jurusan Teknika Kapal Niaga dan Nautika Kapal Niaga | SMK Negeri 4 Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 600 | 31/01/2023 | NICO PLAMONIA UTAMA, ST., MM | Kompetensi guru masih kurang | Penambahan alokasi guru | SMK NEGERI 5 PANGKALPINANG, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 601 | 31/01/2023 | NICO PLAMONIA UTAMA, ST., MM | Pengelolaan sekolah belum memadai | Pengecetan gedung sekolah, di karenakan belum pernah ada pengecetan ulang sejak di bangun 2011 | SMK NEGERI 5 PANGKALPINANG, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 602 | 31/01/2023 | NICO PLAMONIA UTAMA, ST., MM | Masih kurangnya ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga | Pengadaan gedung olahraga, karena lapangan olahraga sebelumnya sudah terendam banjir dan tidak layak di gunakan | SMK NEGERI 4 PANGKALPINANG, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Untuk ditindaklanjuti. |
| 604 | 31/01/2023 | NICO PLAMONIA UTAMA, ST., MM | Pembangunan Sarana Prasarana Masyarakat | Permohonan peningkatan sarana/prasarana dan aprovval SMK NEGERI 4 PANGKALPINANG | SMK NEGERI 4 PANGKALPINANG, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | ketersediaan anggarannya |
| 605 | 31/01/2023 | NICO PLAMONIA UTAMA, ST., MM | Kurangnya sarana produktif SMK | Mengingat bangka belitung merupakan provinsi kepulauan dan SMK NEGERI 4 PANGKALPINANG merupakan sekolah kelautan dan perikanan agar menjadikan SMK NEGERI 4 PANGKALPINANG menjadi sentra laut dan perikanan | SMK NEGERI 4 PANGKALPINANG, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 606 | 31/01/2023 | NICO PLAMONIA UTAMA, ST., MM | Pembangunan Sarana Prasarana Masyarakat | Belum adanya Universitas di Bangka Belitung untuk Jurusan Teknik Laboratorium Medik | SMK NEGERI 5 PANGKALPINANG, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 608 | 31/01/2023 | FIRMANSYAH LEVI | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Renovasi Ruang Guru SMKN 1 Sungailiat | SMKN 1 Sungailiat Kec. Sungailiat Kab.Bangka, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 609 | 31/01/2023 | FIRMANSYAH LEVI | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Renovasi ruang Lab. Perkantoran + peningkatan pembangunan ruang kelas Belajar SMKN1 Sungailiat | SMKN 1 Sungailiat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 610 | 31/01/2023 | FIRMANSYAH LEVI | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar | Rehabilitasi Ruang Pertemuan (Peningkatan Luas Ruang Pertemuan) SMAN 1 Sungailiat | SMAN 1 Sungailiat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nasional Pendidikan | | | | | | | | | |
| 630 | 31/01/2023 | FIRMANSYAH LEVI | Pengelolaan sekolah belum memadai | Perbaikan dan pembangunan SD 11 Kel.Lubuk Kelik | Lubuk Kelik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 638 | 31/01/2023 | EKA BUDIARTHA, S.Mn., M.Si | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Kepada masyarakat Provinsi untuk bisa memberikan penghargaan kepada anak didik SD, SMP yang telah mewakili Provinsi dan kegiatan ELS2N di Tingkat Nasional | KECEMATAN SIMPANG PESAK, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 655 | 02/02/2023 | HERMAN SUHADI, S.Sos | Pengelolaan sekolah belum memadai | belum adanya pagar sekolah | SMP Negeri 3 Belinyu, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 686 | 02/02/2023 | MUHAMMAD AMIN | Pembangunan Sarana Prasarana Masyarakat | Belum tersedianya / adanya Ruang Praktik Siswa ( RPS) Jurusan Teknik Sepeda Motor untuk Pengembangan Bengkel Praktik Siswa di SMKN I Payung Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan | SMKN I PAYUNG KECAMATAN PAYUNG KABUPATEN BANGKA SELATAN, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 705 | 03/02/2023 | H. JAWARNO KS, S.IP | Pengelolaan sekolah belum memadai | Belum adanya bus sekolah menuju SMA di Petaling | Desa Paya Benua, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 714 | 03/02/2023 | WARKAMNI | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Minimnya sarana pendukung pendidikan yakni plafon sekolah TK-TPA Raudhatul Jannah yang belum bisa terpasang | Desa Nibung, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 715 | 03/02/2023 | WARKAMNI | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Masih kurangnya sarana prasarana gedung belajar santri | Desa Munggu, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 727 | 03/02/2023 | H. TAUFIK MARDIN, S.Sos | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Pembangunan Pagar dan Tempat parkir | SMA N 1 Sijuk, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 739 | 03/02/2023 | H. TAUFIK MARDIN, S.Sos | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Pembangunan gedung serbaguna untuk olahraga | SMA N I membalong, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 744 | 04/02/2023 | AMRI CAHYADI, ST | masih kurangnya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan | kekurangan guru profesional | SMAN 1 Belinyu , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 745 | 04/02/2023 | AMRI CAHYADI, ST | masih kurangnya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan | kurangnya guru profesional | SMAN 1 Riau Silip, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 746 | 04/02/2023 | AMRI CAHYADI, ST | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | sarana masih dirasakan kurang memenuhi standar pendidikan nasional | SMAN 1 Riau Silip, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 20/01/2023 | EFREDI EFFENDY | Keterbatasan daya tampung sekolah | Pembangunan atau penambahan Lahan Parkir ,Lahan parkir yang ada sudah penuh dan menumpuk, sehingga menyulitkan para siswa untuk memarkirkan Kendaraan | SMAN 2 PANGKALPINANG , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 45 | 20/01/2023 | EFREDI EFFENDY | Keterbatasan daya tampung sekolah | Pembangunan Lahan Parkir yang Sudah penuh dan Menumpuk | SMAN 4 PANGKALPINANG , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 48 | 20/01/2023 | EFREDI EFFENDY | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Belum ada Ruang Osis dan MPK | SMAN 4 PANGKALPINANG , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 8 | 19/01/2023 | ARBIYANTO | Keterbatasan daya tampung sekolah | Belum tersedianya sarana dan prasarana yang baik,seperti pembangunan gedung serba guna | SMA N 1 Simpang Teritip Kec Simpang Teritip, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait. |
| 9 | 19/01/2023 | ARBIYANTO | Pengelolaan sekolah belum memadai | Kurangnya pagar untuk membatasi sekolah | SMA N 1 Simpang Teritip Kec,Simpang Teritip, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait. |
| 362 | 26/01/2023 | HERYAWANDI, SE | Masih banyaknya kawasan permukiman yang belum terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) seperti jalan lingkungan dan drainase yang belum memadai, serta masih banyaknya rumah tidak layak huni yang | Mengajukan pembuatan talud sekolah | SMKN 1 Simpang Teritip, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ditempati oleh masyarakat. | | | | | | | | | |
| 367 | 26/01/2023 | HERYAWANDI, SE | Pembangunan Sarana Prasarana Masyarakat | Mengajukan pembangunan Ruang Pertemuan / Ruang Serba Guna | SMKN 1 Simpang Teritip, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 585 | 31/01/2023 | BELIADI, S.IP | Belum terpenuhinya sarana dan prasarana jaringan internet di kabupaten/Kota | PENGADAAN BUKU BACAAN KHUSUS KOLEKSI ANAK-ANAK DAN BANTUAN WIFI UNTUK PERPUSTAKAAN DESA | JL. TENGAH TANJUNGPANDAN – MANGGAR DESA AIR MADU KEC. SIMPANG RENGGIANG KAB. BELITUNG TIMUR, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Dinas terkait masukan untuk urusan dinas perpustakaan |
| 26 | 20/01/2023 | TONI MUKTI, SH | Penyediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di fasilitas kesehatan masih kurang | Peningkatan fasilitasi puskesmas (alkes, laptop dan printer ) untuk mempelancar dalam pelayanan | Desa Batu Betumpang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KESEHATAN | DINAS KESEHATAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke Dinas Kesehatan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 28 | 20/01/2023 | TONI MUKTI, SH | Penyediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di fasilitas kesehatan masih kurang | kurangnya fasilitasi (meja dan kursi tunggu pasien) puskesmas sehingga pelayanan kurang maksimal | Desa Batu Betumpang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KESEHATAN | DINAS KESEHATAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke Dinas Kesehatan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 30 | 20/01/2023 | TONI MUKTI, SH | Peningkatan Kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan masih rendah | Penambahan dokter umum dikarenakan kekurangan tenaga dokter umum di puskesmas | Desa Batu Betumpang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KESEHATAN | DINAS KESEHATAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke Dinas Kesehatan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 20/01/2023 | TONI MUKTI, SH | Penyediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di fasilitas kesehatan masih kurang | pembangunan gedung rapat puskesmas kecamatan pulau besar dikarenakan belum adanya ruang rapat | Desa Batu Betumpang kecamatan Pulau besar, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KESEHATAN | DINAS KESEHATAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke Dinas Kesehatan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 119 | 24/01/2023 | H. AKSAN VISYAWAN, S.ST., MH | Belum terpenuhinya UHC (Universal Health Coverage) atau jaminan kesehatan | Bantuan Bpjs Kesehatan untuk Masyarakat tidak Mampu Bayar, dan Insedental Kecelakan | Desa Paya Benua Kec. Mendo Barat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KESEHATAN | DINAS KESEHATAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke Dinas Kesehatan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 151 | 24/01/2023 | Ir. HENDRIYANSEN | Belum terpenuhinya UHC (Universal Health Coverage) atau jaminan kesehatan | Masalah kesehatan bagi lansia atau orang tua | Kelurahan Ketapang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KESEHATAN | DINAS KESEHATAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke Dinas Kesehatan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 197 | 25/01/2023 | TONI PURNAMA, S.IP | Penyediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di fasilitas kesehatan masih kurang | tidak tersedianya mobil ambulans desa | desa jelutung II, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KESEHATAN | DINAS KESEHATAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke Dinas Kesehatan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 228 | 25/01/2023 | EVI JUNITA | Penyediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di fasilitas kesehatan masih kurang | Gedung Poskesdes Desa Pedindang | Jl. Raya Desa Pedindang Kecamatan Pangkalan Baru kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KESEHATAN | DINAS KESEHATAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke Dinas Kesehatan Propinsi Bangka Belitung |
| 283 | 26/01/2023 | TONI PURNAMA, S.IP | Penyediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di fasilitas kesehatan masih kurang | belum tersedianya Gedung ICU,PICU,NICU,PONEK | RS Kriopanting Kec Payung, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KESEHATAN | DINAS KESEHATAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke Dinas Kesehatan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 293 | 26/01/2023 | RINGGIT KECUBUNG, S.Pd | Belum terpenuhinya UHC (Universal Health Coverage) atau jaminan kesehatan | Bantuan Iuran Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional PBPU dan BP Pemda Bangka Barat | Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat JL. Daya Baru Pal 4 , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KESEHATAN | DINAS KESEHATAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke Dinas Kesehatan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516 | 29/01/2023 | Ir. H. AZWARI HELMI | Angka Kematian Ibu, anak, dan stunting masih tinggi | tingkat stunting di desa peradong masih sangat tinggi sehingga kualitas SDM sulit meningkat | desa peradong, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KESEHATAN | DINAS KESEHATAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke Dinas Kesehatan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 517 | 29/01/2023 | Ir. H. AZWARI HELMI | Angka Kematian Ibu, anak, dan stunting masih tinggi | masyarakat ingin adanya sosialisasi terkait cara mengatasi stunting | desa peradong, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KESEHATAN | DINAS KESEHATAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke Dinas Kesehatan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 763 | 04/02/2023 | AMRI CAHYADI, ST | Angka kejadian penyakit menular dan tidak menular masih tinggi | usulan pengetatan bahaya penyakit menular dan sosilasi hal tsb masih minim | desa mabat - mangka, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KESEHATAN | DINAS KESEHATAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke Dinas Kesehatan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 758 | 04/02/2023 | AMRI CAHYADI, ST | Masih tingginya kekerasan terhadap perempuan | minimnya perlindugan anak yang mengarah pada pelanggaran HAM | se kabupaten bangka, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| **Prioritas Daerah: Pembangunan Wilayah** | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 24/01/2023 | Ir. HENDRIYANSEN | Masih banyaknya kawasan permukiman yang belum terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) seperti jalan lingkungan dan | Normalisasi Salurah di Kelurahan Ketapang | Pangkalbalam, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | drainase yang belum memadai, serta masih banyaknya rumah tidak layak huni yang ditempati oleh masyarakat. | | | | | | | | | |
| 172 | 25/01/2023 | TONI PURNAMA, S.IP | Pelebaran Jalan Menuju Standar | jalan sempit menyebabkan kecelakaan | desa irat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 233 | 25/01/2023 | HELLYANA, SH | Perencanaan, Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai | rumah warga terendam banjir apabila musim barat | desa air saga, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 282 | 26/01/2023 | RUDI HARTONO | Pelebaran Jalan Menuju Standar | Jalan yang belum sesuai dengan standar | Ibul, Badau, Kab. Belitung, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 285 | 26/01/2023 | BELIADI, S.IP | Perencanaan Jalan & Jembatan | BANYAK JALAN – JALAN DI JALAN RAYA GANTUNG YANG SUDAH RUSAK | JL. RAYA MANGGAR – GANTUNG KECAMATAN GANTUNG KABUPATEN BELITUNG TIMUR, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 26/01/2023 | FERDIYANSYAH, A.Md | Masih banyaknya kawasan permukiman yang belum terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) seperti jalan lingkungan dan drainase yang belum memadai, serta masih banyaknya rumah tidak layak huni yang ditempati oleh masyarakat. | sering terjadinya banjir dibelakang SD 3 Kota Pangkalpinang | Belakang SD 3 Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 306 | 26/01/2023 | FERDIYANSYAH, A.Md | Pembangunan Sarana Prasarana Masyarakat | pemanfaatan lahan kosong seluas 5,3 Ha milik kota Pangkalpinang untuk dijadikan RTH | RT 06 Kelurahan Air Kepala Tujuh , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 341 | 26/01/2023 | ADET, SH., MH | Masih banyaknya kawasan permukiman yang belum terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) seperti jalan lingkungan dan drainase yang belum memadai, serta masih banyaknya rumah tidak layak huni yang | Sering banjir | RT 02 dan RT 03 Desa Sungkap Kecamatan Simpang Katis, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ditempati oleh masyarakat. | | | | | | | | | |
| 354 | 26/01/2023 | ADET, SH., MH | Masih banyaknya kawasan permukiman yang belum terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) seperti jalan lingkungan dan drainase yang belum memadai, serta masih banyaknya rumah tidak layak huni yang ditempati oleh masyarakat. | Sering banjir saat hujan | RT 01 s.d. RT 10 Desa Sarang Mandi Kecamatan Sungaiselan, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 388 | 26/01/2023 | ADET, SH., MH | Masih banyaknya kawasan permukiman yang belum terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) seperti jalan lingkungan dan drainase yang belum memadai, serta masih banyaknya rumah tidak layak huni yang ditempati oleh masyarakat. | Adanya keluhan masyarakat terhadap pembuangan limbah | Desa Romadon Kecamatan Sungaiselan, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 397 | 26/01/2023 | ADET, SH., MH | Masih banyaknya kawasan permukiman yang belum terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) seperti jalan lingkungan dan drainase yang belum memadai, serta masih banyaknya rumah tidak layak huni yang ditempati oleh masyarakat. | Masyarakat menginginkan untuk dibangun tempat pemandian umum | Desa Katis Kecamatan Simpang Katis, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 407 | 26/01/2023 | ADET, SH., MH | Redistribusi Tanah | Konsidi sekolah berdempetan dengan rumah warga sehingga diusulkan sekolah untuk dipindahkan | Desa Beruas Kecamatan Simpang Katis, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 409 | 26/01/2023 | ADET, SH., MH | Masih banyaknya kawasan permukiman yang belum terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) seperti jalan lingkungan dan drainase yang belum memadai, serta masih banyaknya rumah tidak layak huni yang | Jalan sudah banyak pemukiman penduduk | RT 08 Desa Beruas Kecamatan Simpang Katis, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ditempati oleh masyarakat. | | | | | | | | | |
| 414 | 26/01/2023 | H. MULYADI | Peningkatan keselamatan angkutan dan jalan | ASPAL JALAN SERING TERJADINYA KECELAKAN | DESA LAMPUR, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERHUBUNGAN | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverifikasi sesuai kewenangan urusan dan anggaran |
| 443 | 27/01/2023 | NATA SUMITRA | Perencanaan, Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai | Perbaikan Talud sepanjang Jalan Sulawesi sampai ke Dusun Kurnia Jaya, karena rusaknya Talud dan terjadi banjir Rob | Jalan Sulawesi RT 37 Kawasan Minapolitan Dusun Assalam, Desa Baru Kecamatan Manggar, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 492 | 27/01/2023 | MANSAH | Masih banyaknya kawasan permukiman yang belum terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) seperti jalan lingkungan dan drainase yang belum memadai, serta masih banyaknya rumah tidak layak huni yang ditempati oleh masyarakat. | Pembangunan talud / tembok penahan tanah dsri ujung siring pembuangan aliran parit jalan propinsi di RT 03 desa kayu arang | Desa Kayu Arang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 564 | 31/01/2023 | BELIADI, S.IP | Pelebaran Jalan Menuju Standar | PERLU ADANYA PERBAIKAN JALAN LASKAR PELANGI DARI KECAMATAN GANTUNG MENUJU KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG | JL. LASKAR PELANGI SIMPANG RENGGIANG – GANTUNG KABUPATEN BELITUNG TIMUR, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 574 | 31/01/2023 | BELIADI, S.IP | Perencanaan Jalan & Jembatan | PROSES PERBAIKAN DI JALAN SIMPANG PESAK YANG ASAL – ASALAN , SEHARUSNYA PIHAK TERKAIT LEBIH MENGAWASI PENGERJAAN TERSEBUT | JL RAYA DENDANG - GANTUNG KABUPATEN BELIUTNG TIMUR, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 577 | 31/01/2023 | BELIADI, S.IP | Pelebaran Jalan Menuju Standar | JALAN DARI GANTUNG KE DESA LILANGAN KEMUDIAN SAMPAI KE DESA BADAU KABUPATEN BELITUNG BANYAK SEKALI JALAN YANG SUDAH BERLUBANG KALAU PUN MEMANG TIDAK BISA MENGANGGARKAN JALAN YANG BARU SETIDAKNYA ADA BIAYA PENAMBALAN LOBANG – LOBANG JALAN YANG SANGAT MENGKHAWATIRKAN DAN TAKUTNYA MEMAKAN BANYAK KORBAN KARENA MENGHINDARI LOBANG, DAN KEPADA PERUSAHAAN YANG MENDAPATKAN TENDER MEMPERBAIKI JALAN YANG BERLOBANG AGAR MENGERJAKANNYA DENGAN RAPI | JL RAYA DENDANG - GANTUNG KABUPATEN BELITUNG TIMUR, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 626 | 31/01/2023 | EKA BUDIARTHA, S.Mn., M.Si | Pemeliharaan Rutin/Berkala Jalan Jembatan | Pembangunan lanjutan untuk embung mempaya | DESA MEMPAYA, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | | | | kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 651 | 31/01/2023 | EKA BUDIARTHA, S.Mn., M.Si | Pelebaran Jalan Menuju Standar | Pelebaran Jalan di Dusun Nujek Desa Batu Penyu Kecematan Gantung | DESA BATU PENYU, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 652 | 31/01/2023 | EKA BUDIARTHA, S.Mn., M.Si | Pelebaran Jalan Menuju Standar | Pelebaran Jalan di Dusun Lilangan Kecematan Gantung | DESA LILANGAN, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 653 | 31/01/2023 | EKA BUDIARTHA, S.Mn., M.Si | Perencanaan, Pembangunan Tanggul Sungai | Pembuatan Alur Sungai Sekamandi Kecematan Damar | KECEMATAN DAMAR, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 702 | 03/02/2023 | JOHANSEN TUMANGGOR, SE., M.Ak | Pemeliharaan Rutin/Berkala Jalan Jembatan | Jalan berlobang dan rusak | jl RE Martadinata , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 711 | 03/02/2023 | H. JAWARNO KS, S.IP | Perencanaan, Pembangunan Pengembangan, Pengelolaan, | Diakibatkan aliran saluran air yang cukup memprihatinkan di daerah kemuja | Desa Kemuja, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pemeliharaan Jaringan Irigasi | | | | | PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | | | | sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 721 | 03/02/2023 | WARKAMNI | Masih banyaknya kawasan permukiman yang belum terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) seperti jalan lingkungan dan drainase yang belum memadai, serta masih banyaknya rumah tidak layak huni yang ditempati oleh masyarakat. | Akibat curah hujan yang cukup tinggi membuat air naik kerumah warga saat hujan | Desa Nibung, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 723 | 03/02/2023 | WARKAMNI | Masih banyaknya kawasan permukiman yang belum terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) seperti jalan lingkungan dan drainase yang belum memadai, serta masih banyaknya rumah tidak layak huni yang ditempati oleh masyarakat. | Akibat curah hujan yang cukup tinggi membuat air masuk ke badan jalan, tak jarang juga masuk kerumah warga | Desa Pinang Sebatang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 728 | 03/02/2023 | H. TAUFIK MARDIN, S.Sos | Masih banyaknya kawasan permukiman yang belum terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) seperti jalan lingkungan dan drainase yang belum memadai, serta masih banyaknya rumah tidak layak huni yang ditempati oleh masyarakat. | Pengerukan aliran sungai yang sudah dangkal | Desa Air Selumar dan desa batu itam, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 142 | 24/01/2023 | Ir. HENDRIYANSEN | Kurangnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan provinsi (5 jenis) | Pemeliharaan PJU Sekota Pangkalpinang | Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERHUBUNGAN | DINAS PERHUBUNGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverifikasi sesuai kewenangan urusan dan anggaran |
| 153 | 24/01/2023 | Ir. HENDRIYANSEN | Kurangnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan provinsi (5 jenis) | Banyaknya warga merasa terganggu adanya mobil Mobil Tronton di Jalanan utama kota Pangkalpinang | Kelurahan Ketapang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERHUBUNGAN | DINAS PERHUBUNGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverifikasi sesuai kewenangan urusan dan anggaran |
| 159 | 25/01/2023 | TONI PURNAMA, S.IP | Lampu Penerangan Jalan | kondisi jalan gelap dikhawatirkan terjadi kecelakaan dan tindak kriminal pada malam hari | desa batu betumpang - desa bedengung, desa nyelanding - desa air gegas, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERHUBUNGAN | DINAS PERHUBUNGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverifikasi sesuai kewenangan urusan dan anggaran |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 25/01/2023 | ADET, SH., MH | Lampu Penerangan Jalan | Sudah banyak yang rusak dan dalam kondisi mati | Desa Katis Kecamatan Simpang Katis, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERHUBUNGAN | DINAS PERHUBUNGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverifikasi sesuai kewenangan urusan dan anggaran |
| 190 | 25/01/2023 | ADET, SH., MH | Lampu Penerangan Jalan | kondisi sudah mati dan rusak | Desa Beruas Kecamatan Simpang Katis, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERHUBUNGAN | DINAS PERHUBUNGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverifikasi sesuai kewenangan urusan dan anggaran |
| 207 | 25/01/2023 | TONI PURNAMA, S.IP | Lampu Penerangan Jalan | jalan desa gelap gulita pada malam hari yang dapat menyebabkan tindakan kriminal dan kecelakaan | desa pangkalbuluh, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERHUBUNGAN | DINAS PERHUBUNGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverifikasi sesuai kewenangan urusan dan anggaran |
| 229 | 25/01/2023 | EVI JUNITA | Lampu Penerangan Jalan | Lampu penerang sepanjang jalan Desa Pedindang | Jl. Raya Desa Pedindang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERHUBUNGAN | DINAS PERHUBUNGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverifikasi sesuai kewenangan urusan dan anggaran |
| 274 | 26/01/2023 | YUS DERAHMAN | Kurangnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan provinsi (5 jenis) | Rambu lalu lintas di persimpangan SMA N 1 Jebus sehingga sering terjadi kecelakaan karena tidak adanya rambu-rambu lalu lintas | Desa Jebus, Kecamatan Jebus, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERHUBUNGAN | DINAS PERHUBUNGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverifikasi sesuai kewenangan urusan dan anggaran |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 | 26/01/2023 | RUDI HARTONO | Lampu Penerangan Jalan | Tidak ada lampu jalan di sepanjang jalan desa bantan, simpang rusa dan lassar rawan terjadi kecelakaan | Desa Bantan, Desa Simpang Rusa dan Desa Lassar, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERHUBUNGAN | DINAS PERHUBUNGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverifikasi sesuai kewenangan urusan dan anggaran |
| 496 | 27/01/2023 | MANSAH | Lampu Penerangan Jalan | pemasangan lampu penerangan jalan di sepanjang jalan propinsi dari simpang 4 kelapa sampai dengn pelabuhan ferry kayuarang | Desa Kelapa, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERHUBUNGAN | DINAS PERHUBUNGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverifikasi sesuai kewenangan urusan dan anggaran |
| 508 | 29/01/2023 | Ir. H. AZWARI HELMI | Lampu Penerangan Jalan | tidak adanya lampu jalan didesa mancung sehingga sering kecelakaan | jalan desa mancung, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERHUBUNGAN | DINAS PERHUBUNGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverifikasi sesuai kewenangan urusan dan anggaran |
| 549 | 30/01/2023 | NATA SUMITRA | Kurangnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan provinsi (5 jenis) | Peningkatan jalan provinsi | Desa Batu Penyu, Desa Gantung, Desa Lenggang Kecamatan Gantung, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERHUBUNGAN | DINAS PERHUBUNGAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverifikasi sesuai kewenangan urusan dan anggaran |
| 550 | 30/01/2023 | NATA SUMITRA | Kurangnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan provinsi (5 jenis) | Peningkatan jalan provinsi | Kecamatan Damar, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERHUBUNGAN | DINAS PERHUBUNGAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverifikasi sesuai kewenangan urusan dan anggaran |
| 624 | 31/01/2023 | EKA BUDIARTHA, S.Mn., M.Si | Kurangnya pemenuhan infrastruktur pelabuhan pengumpan regional | Pengadaan lampu suar di pelabuhan dan lampu di dermaga nelayan | DESA AIR KELIK, MEMPAYA DAN BURUNG MANDI, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERHUBUNGAN | DINAS PERHUBUNGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverifikasi sesuai |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | kewenangan urusan dan anggaran |
| 639 | 31/01/2023 | EKA BUDIARTHA, S.Mn., M.Si | Lampu Penerangan Jalan | Pengadaan lampu jalan di jalan Provinsi Kecematan Simpang Pesak | KECEMATAN SIMPANG PESAK, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERHUBUNGAN | DINAS PERHUBUNGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverifikasi sesuai kewenangan urusan dan anggaran |
| **Prioritas Daerah: Pemerataan Pendapatan Masyarakat** | | | | | | | | | | | | |
| 312 | 26/01/2023 | HERYAWANDI, SE | Butuh banyak pendampingan oleh konsultan Plut KUKM terhadap UMKM yang sebarannya tidak merata antara di desa dan kota | Mengajukan Lahan Khusus di Desa Tempilang untuk UMKM yang peruntukkannya dikhususkan untuk Wisata kuliner Desa Tempilang | Desa Tempilang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD |
| 348 | 26/01/2023 | ADET, SH., MH | Butuh banyak pendampingan oleh konsultan Plut KUKM terhadap UMKM yang sebarannya tidak merata antara di desa dan kota | Kurangnya pelatihan | Koperasi Wanita Flamboyan Desa Sungkap Kecamatan Simpang Katis, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke PD |
| 439 | 27/01/2023 | NATA SUMITRA | Butuh banyak pendampingan oleh konsultan Plut KUKM terhadap UMKM yang sebarannya tidak merata antara di desa dan kota | Belum berkembangnya produksi Dodol Nanas Kelompok Usaha Bersama Amnas Berehun dan belum adanya tempat produksi yang permanen | Desa Aik Madu RT 1 RW 1 Desa Air Madu Kecamatan Simpang Reggiang , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke PD |
| 473 | 27/01/2023 | DODY KUSDIAN, ST., MH | Belum tersedia dana untuk melakukan monitoring ke kabupaten/kota | Bantuan dana usaha untuk pengembangan usaha tersebut | Jl. KH. Ahmad Dahlan RT/RW 009/003 Kel. Keramat Kec. Rangkui, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke dinas terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | dalam melakukan pendataan perusahaan/UMKM yang sudah/ belum melakukan kemitraan dengan investor | | | | | | | | | |
| 476 | 27/01/2023 | DODY KUSDIAN, ST., MH | Belum tersedia dana untuk melakukan monitoring ke kabupaten/kota dalam melakukan pendataan perusahaan/UMKM yang sudah/ belum melakukan kemitraan dengan investor | Permohonan Modal Usaha Katering untuk Pengembangan Usaha | Kec. Rangkui, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke dinas terkait |
| 482 | 27/01/2023 | DODY KUSDIAN, ST., MH | Belum tersedia dana untuk melakukan monitoring ke kabupaten/kota dalam melakukan pendataan perusahaan/UMKM yang sudah/ belum melakukan kemitraan dengan investor | Bantuan Dana untuk usaha kuliner Barokah Es Cream | JL. Cempedak II Kel. Keramat Kec. Rangkui, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke dinas terkait |
| 484 | 27/01/2023 | DODY KUSDIAN, ST., MH | Butuh banyak pendampingan oleh konsultan Plut KUKM terhadap UMKM yang sebarannya tidak merata antara di desa dan kota | Kurangnya informasi proses masuk ke PT Jamkrida milik Pemerintah Provinsi agar bisa ada jaminan bantuan untuk UMKM | Jl. Sumedang Kel. Kejaksaan Kec. Tamansari, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan Ke PD |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 539 | 30/01/2023 | Drs. H. ERWANDI A. RANI | Belum semua UKM dapat mengakses permodalan | Masih banyaknya para pelalu UMKM butuh bantuan modal dalam pengembangan produksi produk olahan UMKM nya | Kecamatan Sijuk Kab. Belitung, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan Ke PD |
| 586 | 31/01/2023 | BELIADI, S.IP | Terbatasnya akses pengembangan usaha | PERLUNYA BANTUAN UMKM TERHADAP USAHA RUMAHAN YANG IA RINTIS, YAITU PRODUKSI KERIPIK SINGKONG DAN KERIPIK PISANG | JL. TENGAH TANJUNGPANDAN – MANGGAR DESA AIR MADU KEC. SIMPANG RENGGIANG KAB. BELITUNG TIMUR, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan Ke PD |
| 706 | 03/02/2023 | H. JAWARNO KS, S.IP | Butuh banyak pendampingan oleh konsultan Plut KUKM terhadap UMKM yang sebarannya tidak merata antara di desa dan kota | Pegiat UKM di Desa Paya Benua belum memiliki kelompok/organisasi | Desa Paya Benua, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke PD |
| 157 | 25/01/2023 | TONI PURNAMA, S.IP | Masih kurangnya ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga | belum memiliki GOR | desa nadung, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Untuk ditindaklanjuti. |
| 195 | 25/01/2023 | TONI PURNAMA, S.IP | Masih kurangnya ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga | belum ada sport centre | kecamatan payung, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Untuk ditindaklanjuti. |
| 254 | 25/01/2023 | ADET, SH., MH | Masih kurangnya ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga | Masyarakat menginginkan adanya pembangunan tempat olahraga untuk pemuda pemudi | Desa Simpang Katis Kecamatan simpang katis, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Untuk ditindaklanjuti. |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 374 | 26/01/2023 | ADET, SH., MH | Masih kurangnya ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga | Masyarakat menginginkan adanya pembangunan tempat olahraga untuk pemuda pemudi | Desa Teru Kecamatan Simpang Katis, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Untuk ditindaklanjuti. |
| 382 | 26/01/2023 | YUS DERAHMAN | Masih kurangnya ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga | Pagar lapangan bola dusun Kerang . Menganggu aktivitas bermain bola dan terkena rumah warga | Dusun Kerang, Desa Jebus, Kecamatan Jebus, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Untuk ditindaklanjuti. |
| 383 | 26/01/2023 | YUS DERAHMAN | Masih kurangnya ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga | Lampu lapangan bola desa Jebus. Menganggu aktivitas pemantauan aktivitas masyarakat di malam hari | Lapangan Bola Desa Jebus, Kecamatan Jebus, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Untuk ditindaklanjuti. |
| 480 | 27/01/2023 | DODY KUSDIAN, ST., MH | Masih kurangnya ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga | Permohonan Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga (lapangan bola) | Semabung Lama Depan Kantor Lurah Semabung Lama, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Untuk ditindaklanjuti. |
| 342 | 26/01/2023 | HERYAWANDI, SE | Belum maksimalnya kelompok masyarakat yang mendayagunakan teknologi tepat guna (TTG) | Mengajukan bantuan fasilitas penunjang untuk mengembangkan teknologi pertanian | SMKN 1 Kelapa, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan keperangkat daerah terkait |
| 387 | 26/01/2023 | ADET, SH., MH | Masih kurangnya fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan | Kepada Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten untuk dapat memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan desa untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat | Desa Romadon Kecamatan Sungaiselan, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | pendapatan asli desa | | | | | | | | | |
| 764 | 04/02/2023 | AMRI CAHYADI, ST | Belum maksimalnya kelompok masyarakat yang mendayagunakan teknologi tepat guna (TTG) | usulan sosialisasi penggunaan teknologi yang efeektif | desa kapuk - maras senang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan keperangkat daerah terkait |
| 561 | 31/01/2023 | BELIADI, S.IP | Kurangnya tenaga kerja yang ditempatkan dikarenakan lapangan usaha masih kurang serta tingkat kesenjangan pendidikan yang masih tinggi | PERLUNYA PEMERINTAH PROVINSI MENYIAPKAN LAPANGAN PEKERJAAN SETELAH PERTAMBANGAN TIMAH SELESAI ATAU HABIS AGAR PEREKONOMIAN MASYARAKAT BANGAK BELITUNG INI TERUS BERJALAN | JL. RAYA MANGGAR – GANTUNG KECAMATAN GANTUNG KABUPATEN BELITUNG TIMUR, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS TENAGA KERJA | DINAS TENAGA KERJA | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 603 | 31/01/2023 | NICO PLAMONIA UTAMA, ST., MM | Belum optimal dan kurangnya instruktur pelatihan kerjasama dengan sektor swasta dan instansi pemerintah lainnya untuk menyedia instruktur serta sarana dan prasarana lembaga latihan kerja | Sekolah swasra kurang mendapat perhatian dari Pemprov | SMK - SMK SWASTA DI BANGKA BELITUNG, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS TENAGA KERJA | UPTD BLK DINAS TENAGA KERJA | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| **Prioritas Daerah: Pembangunan Pemerintahan** | | | | | | | | | | | | |
| 271 | 26/01/2023 | HELLYANA, SH | Sarana prasarana pendukung | kurangnya pengadaan motor untuk menjaga kawasan wisata | kawasan wisata desa air saga, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | BADAN KEUANGAN DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Dinas terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | pariwisata belum memadai | | | | | | | | | |
| 70 | 20/01/2023 | RINGGIT KECUBUNG, S.Pd | belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | Sebagai upaya melahirkan anak didik yang beradab, reliqius, dan memiliki kesadaran beribadah dan tahu tata cara dalam pelaksanaannya maka sangat penting adanya masjid di lingkungan sekolah SMK Muhammadiyah Muntok | JL. Argotirto Kp. Air Trejun RT 04 RW 02, Kel. Sungai Daeng Kec. Muntok Kab. Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | Biro Kesejahteran Rakyat | Biro Kesejahteran Rakyat | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 101 | 20/01/2023 | TONI MUKTI, SH | belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | pembangunan papin blok masjid Desa Fajar indah dikarenakan sering banjir | Desa Fajar Indah, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | Biro Kesejahteran Rakyat | Biro Kesejahteran Rakyat | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 110 | 20/01/2023 | TONI MUKTI, SH | belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | pembangunan rehabilitasi gedung TK / Paud dikarenakan sudah layak tidak layak dan rawan bocor | Desa Fajar Indah, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | Biro Kesejahteran Rakyat | Biro Kesejahteran Rakyat | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 20/01/2023 | TONI MUKTI, SH | belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | peningkatan sarana prasarana (konblok, sumur bor, MCK) pondok Pesantren Syarifatul Hidayah dikarenakan belum tersedianya sumur bor dan MCK | Desa Sumber Jaya Permai, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | Biro Kesejahteran Rakyat | Biro Kesejahteran Rakyat | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 115 | 20/01/2023 | TONI MUKTI, SH | belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | pembangunan papin blok halaman darul Hikmah dikarenakan terdapatnya genangan air sehingga menghambat pelaksanaan upacara | Desa Batu Betumpang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | Biro Kesejahteran Rakyat | Biro Kesejahteran Rakyat | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 116 | 24/01/2023 | H. AKSAN VISYAWAN, S.ST., MH | belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | Pembangunan Masjid Nurul Iman Belum Tuntas, Mohon Bantuan Dana Hibah dari Provinsi | Desa Paya Benua Kec. Mendo Barat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | Biro Kesejahteran Rakyat | Biro Kesejahteran Rakyat | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 117 | 24/01/2023 | H. AKSAN VISYAWAN, S.ST., MH | belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non | Bantuan Sarana dan Prasarana TK/TPA dan Sarana Pengajian Ibu-ibu | Desa Paya Benua Kec. Mendo Barat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | Biro Kesejahteran Rakyat | Biro Kesejahteran Rakyat | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | | | | | | | | | |
| 123 | 24/01/2023 | H. AKSAN VISYAWAN, S.ST., MH | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Bantuan Beasiswa yang Mengalami Penundaan Pembayaran SPP | Kampus Stisipol Pahlawan 12 Sungailiat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | Biro Kesejahteran Rakyat | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 126 | 24/01/2023 | H. AKSAN VISYAWAN, S.ST., MH | belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | Bantuan Pembangunan Mushola/ Renovasi Mushola Karena Tidak Bisa Lagi Menampung Jama'ah | Kampus Stisipol Pahlawan 12 Sungailiat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | Biro Kesejahteran Rakyat | Biro Kesejahteran Rakyat | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 177 | 25/01/2023 | H. AKSAN VISYAWAN, S.ST., MH | belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | Permohonan Bantuan Peningkatan Bangunan Mushola Di karenakan Kapasitas mushola tidak bisa Menampung Sejumlah Siswa dan Guru | SMANSA 1 PEMALI KEC. PEMALI, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | Biro Kesejahteran Rakyat | Biro Kesejahteran Rakyat | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 268 | 26/01/2023 | RINGGIT KECUBUNG, S.Pd | belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non | Pembangunan masjid Baiturrahman | Dusun Bangun Jaya Desa Air Kuang Kec. Jebus Kab. Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | Biro Kesejahteran Rakyat | Biro Kesejahteran Rakyat | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | | | | | | | | | |
| 378 | 26/01/2023 | HERYAWANDI, SE | Pembangunan Sarana Prasarana Masyarakat | Remaja Masjid Desa Buyan Kelumbi meminta bantuan Soundsystem untuk di Masjid Desa Buyan kelumbi dan juga Seragam Rompi untuk Panitia Kegiatan Masjid . | Masjid Buyan Kelumbi, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Biro Kesejahteran Rakyat | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 398 | 26/01/2023 | ADET, SH., MH | Masih banyaknya kawasan permukiman yang belum terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) seperti jalan lingkungan dan drainase yang belum memadai, serta masih banyaknya rumah tidak layak huni yang ditempati oleh masyarakat. | Pemasangan pagar perkuburan | Desa Katis Kecamatan Simpang Katis, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Biro Kesejahteran Rakyat | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 470 | 27/01/2023 | DODY KUSDIAN, ST., MH | belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat | Permohonan Pembangunan dan renovasi gedung GOJU (tempat latihan tarung), kurangnya anggaran untuk merenovasi gedung | Jl. Bukit Manggis RT/RW 07/02 Kel. Bukit Merapin Kec. Gerunggang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | Biro Kesejahteran Rakyat | Biro Kesejahteran Rakyat | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pelayanan Dasar | | | | | | | | | |
| 474 | 27/01/2023 | DODY KUSDIAN, ST., MH | belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | Bantuan dana pengadaan sarana prasarana alat bantu penunjang fasilitas pembelajaran TPA Al Amanah | Jl. Cempedak 1 RT/RW 08/03, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | Biro Kesejahteran Rakyat | Biro Kesejahteran Rakyat | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 475 | 27/01/2023 | DODY KUSDIAN, ST., MH | belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | Permohonan bantuan dana renovasi masjid | Pasir Putih, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | Biro Kesejahteran Rakyat | Biro Kesejahteran Rakyat | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 477 | 27/01/2023 | DODY KUSDIAN, ST., MH | belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | Bantuan dana untuk kelengkapan kegiatan rebana dan seragam qosidah | Kec. Rangkui, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | Biro Kesejahteran Rakyat | Biro Kesejahteran Rakyat | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 478 | 27/01/2023 | FERDIYANSYAH, A.Md | Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya | honorarium kepada ustadz/ustadzah yang memberikan kajian di masjid-masjid diperkampungan | Seluruh Masjid di Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Biro Kesejahteran Rakyat | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Teruskan kepada PD terkait |
| 481 | 27/01/2023 | DODY KUSDIAN, ST., MH | belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | Pembangunan masjid Al-Barokah | Jl. Gandaria I Gang Sumber Rezeki RT/RW 07/03 Kel. Air Kepala Tujuh Kec. gerunggang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | Biro Kesejahteran Rakyat | Biro Kesejahteran Rakyat | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 532 | 30/01/2023 | RINGGIT KECUBUNG, S.Pd | belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | Bantuan Dana Pembangunan Masjid AL ITTIHAD Dusun Sungkai Desa Tugang | Dusun Sungkai RT 14 Desa Tugang Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | Biro Kesejahteran Rakyat | Biro Kesejahteran Rakyat | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 556 | 30/01/2023 | Drs. H. ERWANDI A. RANI | belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | Bantuan Dana untuk Pembangunan Masjid AN NUR | Desa Sijuk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | Biro Kesejahteran Rakyat | Biro Kesejahteran Rakyat | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 633 | 31/01/2023 | FIRMANSYAH LEVI | belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | Pembangunan Tempat Belajar Agama (TPA) di Kelurahan Lubuk kelik. | Kelurahan Lubuk Kelik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | Biro Kesejahteran Rakyat | Biro Kesejahteran Rakyat | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 696 | 03/02/2023 | Ust. H. DEDE PURNAMA ALZULAMI Lc. MA, Hk | belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | BANTUAN DANA HIBAH UNTUK YAYASAB DARUL ADZKAR PANGKALPINANG | JALAN JEBUNG DALAM, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | Biro Kesejahteran Rakyat | Biro Kesejahteran Rakyat | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 697 | 03/02/2023 | Ust. H. DEDE PURNAMA ALZULAMI Lc. MA, Hk | belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | BANTUAN DANA HIBAH UNTUK PONDOK PESANTREN TAHFIDHUL QUR'AN MANAABI'UL KAROMAH | JALAN HORMEN MADDATI, KELURAHAN MELINTANG, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | Biro Kesejahteran Rakyat | Biro Kesejahteran Rakyat | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 740 | 03/02/2023 | H. TAUFIK MARDIN, S.Sos | belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan | Bantuan dana hibah untuk pembangunan masjid al-jariyah | desa membalong, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | Biro Kesejahteran Rakyat | Biro Kesejahteran Rakyat | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | | | | | | | | | |
| 741 | 03/02/2023 | H. TAUFIK MARDIN, S.Sos | belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | Bantua dana hibah untuk pembangunan ruang kelas yayasan an-nawawi mubarok | Desa membalong, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | Biro Kesejahteran Rakyat | Biro Kesejahteran Rakyat | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 747 | 04/02/2023 | AMRI CAHYADI, ST | belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | pengajuan pembanguan masjid Al Barokah desa kimak | Desa Kimak, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | Biro Kesejahteran Rakyat | Biro Kesejahteran Rakyat | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 748 | 04/02/2023 | AMRI CAHYADI, ST | belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | usulan pembangunan tempat wudhu, kamar mandi, dan pemasangan baja ringan masjid at taqwa pangkal niur desa banyuasin | Desa Banyuasin, Riau Silip, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | Biro Kesejahteran Rakyat | Biro Kesejahteran Rakyat | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 749 | 04/02/2023 | AMRI CAHYADI, ST | belum optimalnya Kebijakan | usulan seragam majelis taklim yayasan mujahidin | sungailiat, bangka, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | Biro Kesejahteran Rakyat | Biro Kesejahteran Rakyat | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | | | | | | | | | |
| 751 | 04/02/2023 | AMRI CAHYADI, ST | belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | usulan perabikan dan pembangunan masjid nurul iman, desa saing | desa sang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | Biro Kesejahteran Rakyat | Biro Kesejahteran Rakyat | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 753 | 04/02/2023 | AMRI CAHYADI, ST | belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | usulan bantuan pembangunan masjid nurul falah desa bakam | desa bakam, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | Biro Kesejahteran Rakyat | Biro Kesejahteran Rakyat | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 762 | 04/02/2023 | AMRI CAHYADI, ST | belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat | usulan renovasi fisik musola tanwirul umam desa kemuja | desa kemuja, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | Biro Kesejahteran Rakyat | Biro Kesejahteran Rakyat | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pelayanan Dasar | | | | | | | | | |
| 412 | 26/01/2023 | H. MULYADI | Pelebaran Jalan Menuju Standar | pergantian sertifikat akibat pelabaran jalan | desa lampur, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Biro Pemerintahan | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 128 | 24/01/2023 | H. AKSAN VISYAWAN, S.ST., MH | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Bantuan CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Perkembangan Kampus STISIPOL | Kampus Stisipol Pahlawan 12 Sungailiat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 571 | 31/01/2023 | BELIADI, S.IP | Permasalahan pertanahan (status lahan) yang belum jelas untuk berinvestasi | MASYARAKAT TIDAK BISA MENGGUNAKAN LAHAN TIDUR KARENA TERBENTUR KEPEMILIKAN LAHAN DARI PERUSAHAAN – PERUSAHAAN YANG TIDAK DIPERGUNAKAN | JL. RAYA MANGGAR – GANTUNG KECAMATAN GANTUNG KABUPATEN BELITUNG TIMUR, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Dinas terkait |
| 32 | 20/01/2023 | TONI MUKTI, SH | Belum terpenuhinya sarana dan prasarana jaringan internet di kabupaten/Kota | peningkatan jaringan internet di puskesmas Batu Betumpang untuk kelancaran jaringan dalam e- puskesmas, pelaporan kegiatan program PKM | Desa Batu Betumpang , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke dinas terkait |
| 36 | 20/01/2023 | TONI MUKTI, SH | Belum terpenuhinya sarana dan prasarana jaringan internet di kabupaten/Kota | pembangunan tower mini dikarenakan kurang kuatnya signal | Desa Panca Tunggal dan Desa Batu Betumpang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke dinas terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286 | 26/01/2023 | TONI PURNAMA, S.IP | Belum terpenuhinya sarana dan prasarana jaringan internet di kabupaten/Kota | koneksi internet sering tidak tersambung, dimana sistem pekerjaan sekarang di semua sektor menggunakan internet seperti pendidikan, pemerintahan, kesehatan, pertanian dan sebagainya | desa - desa di kecamatan pulau besar, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke dinas terkait |
| 403 | 26/01/2023 | YUS DERAHMAN | Belum terpenuhinya sarana dan prasarana jaringan internet di kabupaten/Kota | Pengembangan sistem jaringan seluler dari beberapa provider. Susah sinyal sehingga berakibat pada pembelajaran Pendidikan dan aktivitas lain yang memerlukan jaringan internet | Desa Telak, Kecamatan Parittiga, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke dinas terkait |
| 628 | 31/01/2023 | DODY KUSDIAN, ST., MH | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi | Permohonan Bnatuan Peralatan Kantor Sekretariat KBO Bangka Belitung" | Jl. Pulau Bangka Ruko Citra Square no 3 air itam, bukit intan, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Akan diteruskan ke PD terkait untuk dipelajari dan ditindaklanjuti |
| 191 | 25/01/2023 | TONI PURNAMA, S.IP | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | dana pembangunan masjid secara swadaya masih minim | Masjid Amaliah Desa Payung, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 255 | 25/01/2023 | ADET, SH., MH | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | Kekurangan dana untuk pembangunan masjid | Desa Simpang Katis Kecamatan Simpang Katis, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 256 | 25/01/2023 | ADET, SH., MH | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | Kekurangan dana untuk pembangunan pesantren | Pesantren di Desa Simpang Katis Kecamatan Simpang Katis, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 258 | 25/01/2023 | ADET, SH., MH | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | Kurangnya perhatian kepada pengurus masjid | Desa Simpang Katis Kecamatan simpang katis, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 287 | 26/01/2023 | HERYAWANDI, SE | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | masyarakat mengajukan renovasi masjid Al-Huda Desa Simpang Yul | Desa Simpang Yul, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 288 | 26/01/2023 | HERYAWANDI, SE | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | masyarakat mengajukan pembangunan shiring pembuangan air dekat masjid simpang yul | Desa Simpang Yul.Kecamatan tempilang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | 26/01/2023 | HERYAWANDI, SE | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | masyarakat mengajukan renovasi masjid dusun Nyikep Desa penyampak | Dusun Nyikep,Desa Penyampak, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 290 | 26/01/2023 | HERYAWANDI, SE | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | masyarakat mengajukan renovasi Masjid Dusun Luenc,Desa simpang Yul | Dusun Luenc,Desa Simpang Yul, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 292 | 26/01/2023 | HERYAWANDI, SE | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | masyarakat mengajukan pembangunan Masjid Dusun Ganjan Desa dendang | Dusun Ganjan,Desa Dendang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 294 | 26/01/2023 | HERYAWANDI, SE | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | masyarakat mengajukan renovasi masjid Dusun Juruh desa Dendang | Dusun Juruh, Desa dendang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 295 | 26/01/2023 | HERYAWANDI, SE | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | masyarakat mengajukan renovasi masjid dusun Sungkai desa tugang | dusun Sungkai,Desa Tugang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 296 | 26/01/2023 | HERYAWANDI, SE | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | masyarakat mengajukan renovasi masjid Desa telak | desa telak,, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 297 | 26/01/2023 | HERYAWANDI, SE | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | masyarakat mengajukan renovasi masjid desa sinar sari | desa Sinar sari, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 338 | 26/01/2023 | ADET, SH., MH | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | Kurangnya dana untuk pembangunan masjid | Desa Sungkap Kecamatan Simpang Katis, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 344 | 26/01/2023 | HERYAWANDI, SE | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | Mengajukan Pembangunan Mushola Sekolah | SMKN 1 Simpang Teritip, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 376 | 26/01/2023 | ADET, SH., MH | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | Kekurangan dana untuk pembangunan masjid | Desa Teru Kecamatan Simpang Katis, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 380 | 26/01/2023 | ADET, SH., MH | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | Kekurangan dana untuk pembangunan masjid | Desa Romadon Kecamatan Sungai Selan, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 400 | 26/01/2023 | ADET, SH., MH | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | Kurangnya dana untuk pembangunan masjid | Desa Beruas Kecamatan Simpang Katis, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 | 26/01/2023 | EDI JUNAIDI FOE | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | bantuan pembangunan bangunan utama, wc/tempat wudhu, pagar, dan balai Masjid Ar-Rozzaq | Jl. Melayu RT. 001/ RW. 006, Kel. Teladan, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 406 | 26/01/2023 | EDI JUNAIDI FOE | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | membutuhkan pembangunan pagar Masjid Al-Fithrah | Jl. AMD. RT 09/ RW. 06 Teladan Toboali, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 428 | 26/01/2023 | Ir. AGUNG SETIAWAN, MM | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | Pembangunan /renovasi masjid baitul iman | dusun air anyir desa air anyir kec. merawang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 429 | 26/01/2023 | Ir. AGUNG SETIAWAN, MM | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | penyelesaian pembangunan gedung gereja dan prasarana gereja GBI Jemaat Sihin | Dusun sinar rembulan desa riding panjabg Kec. Merawang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 430 | 26/01/2023 | Ir. AGUNG SETIAWAN, MM | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | pembangunan panti asuhan kabar baik pada yayasan kabar baik bangka | dusun sigambir desa air ruay kec. pemali, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 431 | 26/01/2023 | Ir. AGUNG SETIAWAN, MM | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | pengadan sarana dan alat musik yayasan elsadai bedukang pada gereja panteskota di indonesia (Gpdi) | yayasan elsadai bedukang pada gereja panteskota di indonesia (Gpdi), Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 435 | 26/01/2023 | Ir. AGUNG SETIAWAN, MM | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | pembangunan gereja kabar baik indonesia | pemali, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 456 | 27/01/2023 | HERYAWANDI, SE | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | masyarakat desa kelumbi mengajukan renovasi masjid | Desa Buyan Kelumbi, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 457 | 27/01/2023 | H. MARSIDI H. SATAR, SH | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | Dikarenakan jumlah siswa yang semakin banyak, maka diperlukan perluasan tempat ibadah/Mushola di SMK Negeri I (STM) Toboali Kabupaten Bangka Selatan | Jl. Air Benar No.33183, Teladan, Kec. Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung 33783, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 458 | 27/01/2023 | H. MARSIDI H. SATAR, SH | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | Tempat wudhu antara siswa dan siswi di SMA 1 Toboali saat ini masih bergabung, oleh karena itu agar dibangun batas tempat wudhu antara siswa dan siswi | Jl. Puput, Toboali, Kec. Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung 33783, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 504 | 28/01/2023 | YOGA NURSIAWAN, A.Md | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | Belum adanya sarana dan prasarana ibadah yang memadai | Kel.paal satu, kec.tanjungpandan, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 510 | 29/01/2023 | Ir. H. AZWARI HELMI | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | belum adanya teras masjid desa mancung | desa mancung, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 536 | 30/01/2023 | HERYAWANDI, SE | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | renovasi masjid dusun Linkun desa penyampak | Dusun Linkun Desa Penyampak, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 557 | 31/01/2023 | NICO PLAMONIA UTAMA, ST., MM | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | Belum ada dan belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai | SMK PGRI PANGKALPINANG, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 607 | 31/01/2023 | FIRMANSYAH LEVI | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | Renovasi dan perluasan masjid Nurul Hidayah Kampung Jawa Belinyu | Masjid Nurul Hidayah Kec.Belinyu Kab. Bangka , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 644 | 31/01/2023 | FIRMANSYAH LEVI | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | Pembangunan kawasan pemakaman tionghoa | Kelurahan Kenanga Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 648 | 31/01/2023 | FIRMANSYAH LEVI | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | Pembanguan TPA masjid Al-Ma'firoh | Kelurahan Kuday tepatnya di kawasan/perkampungan Air Hanyut Pengerukan bekas eks tambang , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 654 | 02/02/2023 | HERMAN SUHADI, S.Sos | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | Bantuan Pembangunan dan Peralatan/Perlengkapan Pondok Pesantren Nurul Hikmah Al Azhar | Desa Air Ruai Kecamatan Pemali , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 661 | 02/02/2023 | HERMAN SUHADI, S.Sos | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | Pembangunan/Rehabilitasi Gereja HKBP Sungailiat | Gereja HKBP Sungailiat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 662 | 02/02/2023 | HERMAN SUHADI, S.Sos | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | Pembangunan/Rehabilitas Kelenteng Kwanti Miau Amal Abadi Desa Batu Rusa | Desa Batu Rusa , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 663 | 02/02/2023 | HERMAN SUHADI, S.Sos | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | Pembangunan/Rehabilitasi Masjid Agung Sungailiat | Masjid Agung Sungailiat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 664 | 02/02/2023 | HERMAN SUHADI, S.Sos | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | Pembangunan/Rehabilitasi GPDI Eklesia Deniang Cit | Desa Cit Kecamatan Riau Silip, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 665 | 02/02/2023 | HERMAN SUHADI, S.Sos | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | Pembangunan/Rehabilitasi Yayasan Daarusalam Karya Makmur Pemali | Desa Karya Makmur Kecamatan Pemali, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 666 | 02/02/2023 | HERMAN SUHADI, S.Sos | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | Pembangunan/Rehabilitasi Yayasan Roudotul Ilmi Pemali (Pondok Modern Roudotul Ilmi Pemali) | Kecamatan Pemali, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 667 | 02/02/2023 | HERMAN SUHADI, S.Sos | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | Pembangunan Masjid Santri Perempuan Ponpes Bahrul Ulum Islamic Center Sungailiat | Sinar Baru, Sungailiat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 675 | 02/02/2023 | FITRA WIJAYA | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | Rehabilitasi Masjid | Desa Tanjung Gunung, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 695 | 02/02/2023 | FITRA WIJAYA | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | Pembangunan Gereja karena belum ada gereja | Koba, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 724 | 03/02/2023 | WARKAMNI | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | Tempat ibadah (masjid) yang sempit dan terasa panas membuat para warga merasa tidak nyaman dalam beribadah sehingga berusaha mengusulkan untuk pemasangan bajaringan untuk masjid | Desa Nibung, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 518 | 29/01/2023 | Ir. H. AZWARI HELMI | Belum Optimalnya Fungsi Lembaga DPRD | masyarakat desa peradong masih belum paham terkait reses | desa kelabat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DPRD | SEKRETARIAT DPRD | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| **Prioritas Daerah: Pembangunan Lingkungan Hidup** | | | | | | | | | | | | |
| 156 | 25/01/2023 | TONI PURNAMA, S.IP | Kurangnya pengelolaan DAS melalui upaya mempertahankan DAS baik dan memulihkan DAS rusak. | sering terjadi banjir | desa pangkalbuluh, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KEHUTANAN | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Dibahas lebih lanjut oleh Dinas LHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 | 26/01/2023 | RUDI HARTONO | Luasnya lahan kritis, Tingginya kejadian kebakaran hutan dan lahan dan lahan serta tingginya pemanfaatan kawasan hutan dan hasil hutan secara illegal. | Legalitas lahan hutan pemerintah yang telah menjadi pemukiman warga terutama di Desa Air Mancur | Desa Air Saga Kecamatan Tanjung Pandan, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KEHUTANAN | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Dibahas lebih lanjut oleh Dinas LHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 385 | 26/01/2023 | ADET, SH., MH | Luasnya lahan kritis, Tingginya kejadian kebakaran hutan dan lahan dan lahan serta tingginya pemanfaatan kawasan hutan dan hasil hutan secara illegal. | Tidak adanya sosialisasi tentang batas hutan kepada masyarakat | Desa Romadon Kecamatan Sungaiselan, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KEHUTANAN | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Dibahas lebih lanjut oleh Dinas LHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 394 | 26/01/2023 | ADET, SH., MH | Masih rendahnya pengembangan hasil hutan kayu dari hutan tanaman dan rendahnya pengembangan hasil hutan bukan kayu dari hasil budidaya | Masyarakat kesulitan mengelola hutan dalam kawasan hutan | Desa Katis Kecamatan Simpang Katis, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KEHUTANAN | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Dibahas lebih lanjut oleh Dinas LHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 523 | 29/01/2023 | Ir. H. AZWARI HELMI | Permasalahan pertanahan (status lahan) yang belum jelas untuk berinvestasi | masyarakat menginginkan pembebeasan lahan TPU yang berada di hutan kawasan di desa kelabat | desa kelabat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke dinas terkait |
| 555 | 30/01/2023 | Drs. H. ERWANDI A. RANI | masih rendahnya kepatuhan pemegang izin penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan | masyarakat mohon adanya penyelesaian kawasan kebun warga dengan kawasan hutan lindung | Kecamatan Sijuk, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KEHUTANAN | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Dibahas lebih lanjut oleh Dinas LHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 625 | 31/01/2023 | EKA BUDIARTHA, S.Mn., M.Si | masih rendahnya kepatuhan pemegang izin penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan | Pengaliaan fungsi kawasan hutan di kawasan industri air kelik dan kawasan permukiman gunung nayo dan di pelabuhan nelayan di teluk asa | DESA AIR KELIK, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KEHUTANAN | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Dibahas lebih lanjut oleh Dinas LHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 637 | 31/01/2023 | EKA BUDIARTHA, S.Mn., M.Si | Masih rendahnya pengembangan hasil hutan kayu dari hutan tanaman dan rendahnya pengembangan hasil hutan bukan kayu dari hasil budidaya | Untuk dapat di lakukan perubahan kawasan hutan di pesisir dan perkampungan masyarakat di Desa Tanjung Kelumpang | DESA TANJUNG KELUMPANG, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KEHUTANAN | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Dibahas lebih lanjut oleh Dinas LHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 640 | 31/01/2023 | EKA BUDIARTHA, S.Mn., M.Si | Permasalahan pertanahan (status lahan) yang belum jelas untuk berinvestasi | Legalitas lahan pertanian dan permukiman di HL Gng Kik Karak Kelapa Kampit | KECEMATAN KELAPA KAMPIT, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Dinas terkait |
| 694 | 02/02/2023 | EKA BUDIARTHA, S.Mn., M.Si | masih rendahnya kepatuhan pemegang izin penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan | Untuk dapat di lakukan perubahan kawasan hutan di pesisir dan perkampungan masyarakat di Desa Tanjung Kelumpang | Desa Tanjung kelumpang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KEHUTANAN | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Dibahas lebih lanjut oleh Dinas LHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |

| ID USULAN | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37415 | 19-01-2023 | TONI MUKTI, SH | Perencanaan, Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai | belum mempunyai tambatan perahu / dermaga sehingga perlu pembangunan untuk mempermudah perahu nelayan untuk bersandar | Desa Batu Betumpang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Ditolak | Dokumen Perencanaan, Dok Lingkungan dan Dok PKPRL belum tersedia. Masih terdapat PR DED yang belum dilaksanakan, DKP Provinsi | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverifikasi sesuai kewenangan urusan dan anggaran |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | fokus pada yg telah readyness creteria | | |
| 37528 | 19-01-2023 | ARIYANTO, SH., MH | masih terbatasnya beasiswa bagi siswa | Untuk beasiswa bagi siswa kurang mampu dan guru ingin melanjutkan pendiddkan | SMK N 1 MUNTOK KEC,MUNTOK, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait. |
| 37563 | 19-01-2023 | ARIYANTO, SH., MH | Kurangyna Sarana dan Prasarana Perpustakaan | Masih kurang tersedianya sarana buku di SMAN 1 Simpang Teritip tersebut | SMAN 1 Simpang Teritip Kec. Simpang Teritip, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | Ditolak | diteruskan ke dinas pendidikan | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 37862 | 19-01-2023 | ARBIYANTO | Pengelolaan sekolah belum memadai | Belum tersedianya sarana dan prasarana yang baik seperti alat alat rebana/alat musik | SMA N 1 Simpang Teritip KEC, Simpang teritip, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait. |
| 37887 | 19-01-2023 | ARBIYANTO | Keterbatasan daya tampung sekolah | Belum tersedianya sarana dan prasarana yang baik,seperti pembangunan gedung serba guna | SMA N 1 Simpang Teritip Kec Simpang Teritip, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait. |
| 37916 | 19-01-2023 | ARBIYANTO | Pengelolaan sekolah belum memadai | Kurangnya pagar untuk membatasi sekolah | SMA N 1 Simpang Teritip Kec,Simpang Teritip, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait. |
| 39043 | 20-01-2023 | EFREDI EFFENDY | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Kurangnya Ruang Belajar/Kelas ,sehingga sebagian siswa belajar menggunakan ruang laboratorium | SMAN 2 PANGKALPINANG, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 39048 | 20-01-2023 | TONI MUKTI, SH | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | pemintaan bibit sawit agar menambah pendapatan pondok pesantren dilahan pesantren Dusun Jernang | Desa Jernang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 39062 | 20-01-2023 | TONI MUKTI, SH | Sarana Prasarana pendidikan yang masih | pembangunan rehabilitasi gedung dikarenakan atap yang sudah bocor | Desa Batu Betumpang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | | | | | | | | | ditindaklanjuti usulan ini. |
| 39086 | 20-01-2023 | TONI MUKTI, SH | prasarana pertanian ( JUT, JUP, irigasi, lantai jemur, dll) sub sekotor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan masih minim | pembangunan bendungan perairan sawah untuk pengaturan pengairan sawah | Di Bukit Tawar dan Bukit Jenang Desa Batu Betumpang , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke PD terkait |
| 39087 | 20-01-2023 | ADET, SH., MH | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | Masyarakat kurang mengetahui bagaimana prosedur untuk mendapatkan bantuan bibit sawit | Desa Puput Kecamatan Simpang Katis, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 39112 | 20-01-2023 | TONI MUKTI, SH | Pembangunan Jalan & Jembatan | pembangunan jembatan menuju mercusuar sehingga mempermudah akses pokdarwis dalam pengelolaannya | Desa Batu Betumpang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | Belum ada Dokumen Perencanaan (Master plan dan DED) | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverifikasi sesuai kewenangan urusan dan anggaran |
| 39121 | 20-01-2023 | TONI MUKTI, SH | masih kurangnya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan | Pengajuan untuk tunjangan honor guru pesantren Darul Hikmah karena kurangnya tenaga guru pesantren | Desa Batu Betumpang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 39127 | 20-01-2023 | EFREDI EFFENDY | Keterbatasan daya tampung sekolah | Pembangunan atau penambahan Lahan Parkir ,Lahan parkir yang ada sudah penuh dan menumpuk, sehingga menyulitkan para siswa untuk memarkirkan Kendaraan | SMAN 2 PANGKALPINANG , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39131 | 20-01-2023 | EFREDI EFFENDY | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Belum Ada Ruang Laboratorium Bahasa | SMAN 2 PANGKALPINANG , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 39132 | 20-01-2023 | TONI MUKTI, SH | Penyediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di fasilitas kesehatan masih kurang | Peningkatan fasilitasi puskesmas (alkes, laptop dan printer ) untuk mempelancar dalam pelayanan | Desa Batu Betumpang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KESEHATAN | DINAS KESEHATAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke Dinas Kesehatan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 39136 | 20-01-2023 | TONI MUKTI, SH | Penyediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di fasilitas kesehatan masih kurang | kurangnya fasilitasi (meja dan kursi tunggu pasien) puskesmas sehingga pelayanan kurang maksimal | Desa Batu Betumpang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KESEHATAN | DINAS KESEHATAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke Dinas Kesehatan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 39140 | 20-01-2023 | ADET, SH., MH | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | Masyarakat menginginkan bantuan bibit bidang pertanian | Desa pinang sebatang kecamatan simpang katis, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 39143 | 20-01-2023 | TONI MUKTI, SH | Peningkatan Kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan masih rendah | Penambahan dokter umum dikarenakan kekurangan tenaga dokter umum di puskesmas | Desa Batu Betumpang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KESEHATAN | DINAS KESEHATAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke Dinas Kesehatan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 39149 | 20-01-2023 | HELLYANA, SH | Normalisasi / Restorasi Sungai | Resiko banjir diperumahan sekitar sungai ketika musim hujan | Desa Air Raya, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | Ditolak | Akan dilakukan Perencanaan SID/DED terlebih dahulu | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverifikasi sesuai kewenangan |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | KAWASAN PERMUKIMAN | | | | urusan dan anggaran |
| 39150 | 20-01-2023 | TONI MUKTI, SH | Belum terpenuhinya sarana dan prasarana jaringan internet di kabupaten/Kota | peningkatan jaringan internet di puskesmas Batu Betumpang untuk kelancaran jaringan dalam e- puskesmas, pelaporan kegiatan program PKM | Desa Batu Betumpang , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke dinas terkait |
| 39153 | 20-01-2023 | ADET, SH., MH | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | Mengharapkan adanya bantuan bibit yang tidak membutuhkan lahan yang luas | Desa Pinang sebatang kecamatan simpang katis, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 39156 | 20-01-2023 | EFREDI EFFENDY | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Permohonan Pembangunan Masjid/Musholla ALKAUTSAR, Musholla yang ada Tidak Bisa Menampung Semua Siswa yang Setiap Tahunnya Bertambah | SMAN 4 PANGKALPINANG , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 39160 | 20-01-2023 | TONI MUKTI, SH | Belum terpenuhinya sarana dan prasarana jaringan internet di kabupaten/Kota | pembangunan tower mini dikarenakan kurang kuatnya signal | Desa Panca Tunggal dan Desa Batu Betumpang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke dinas terkait |
| 39161 | 20-01-2023 | ADET, SH., MH | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan | Masyarakat kurang mengetahui cara mendapatkan bantuan bidang pertanian dan perkebunan | Desa Sungkap Kecamatan simpang katis, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | perkebunan masih kurang | | | | | | | | | |
| 39180 | 20-01-2023 | TONI MUKTI, SH | Masih banyaknya kawasan permukiman yang belum terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) seperti jalan lingkungan dan drainase yang belum memadai, serta masih banyaknya rumah tidak layak huni yang ditempati oleh masyarakat. | perbaikan aspal hotmix jalan rambutan dikarenakan jalan rusak parah Di Desa Panca Tunggal | Jalan Rambutan Desa Panca, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | Bukan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverifikasi sesuai kewenangan urusan dan anggaran |
| 39188 | 20-01-2023 | ADET, SH., MH | Masih banyaknya kawasan permukiman yang belum terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) seperti jalan lingkungan dan drainase yang belum memadai, serta masih banyaknya rumah tidak layak huni yang ditempati oleh masyarakat. | Pada musim hujan terjadi kebanjiran | RT 04 RW 05 Desa Sungkap Kecamatan Simpang Katis, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | Kawasan Kumuh bukan kewenangan Provinsi | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverifikasi sesuai kewenangan urusan dan anggaran |
| 39191 | 20-01-2023 | EFREDI EFFENDY | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar | Pembangunan atau Renovasi Lapangan Basket dan Voli yang Rusak dan digenangi Air | SMAN 4 PANGKALPINANG , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nasional Pendidikan | | | | | | | | | |
| 39197 | 20-01-2023 | TONI MUKTI, SH | Penyediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di fasilitas kesehatan masih kurang | pembangunan gedung rapat puskesmas kecamatan pulau besar dikarenakan belum adanya ruang rapat | Desa Batu Betumpang kecamatan Pulau besar, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KESEHATAN | DINAS KESEHATAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke Dinas Kesehatan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 39207 | 20-01-2023 | EFREDI EFFENDY | Pengelolaan sekolah belum memadai | Pembangunan atau Renovasi Kantin | SMAN 4 PANGKALPINANG , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 39215 | 20-01-2023 | EFREDI EFFENDY | Keterbatasan daya tampung sekolah | Pembangunan Lahan Parkir yang Sudah penuh dan Menumpuk | SMAN 4 PANGKALPINANG , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 39220 | 20-01-2023 | TONI MUKTI, SH | Pemeliharaan Rutin/Berkala Jalan Jembatan | Perbaikan hotmix Jalan Desa Panca Tungga ke Pulau Besar agar memudahkan para pengendara untuk melintasi jalan dikarenakan banyak hotmix rusak | Jalan Desa Panca Tunggal ke Pulau Besar, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | tidak masuk kedalam kewenangan provinsi | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverifikasi sesuai kewenangan urusan dan anggaran |
| 39233 | 20-01-2023 | TONI MUKTI, SH | Masih banyaknya kawasan permukiman yang belum terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) seperti jalan lingkungan dan drainase yang belum memadai, serta masih banyaknya rumah tidak layak huni yang ditempati oleh masyarakat. | Pembangunan shiring Jalan Raya Panca Tunggal dikarenakan belumadanya shiring jalan | Jalan Raya Panca Tunggal, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | Aset bukan milik Provinsi | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverifikasi sesuai kewenangan urusan dan anggaran |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39257 | 20-01-2023 | EFREDI EFFENDY | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Belum ada Ruang Osis dan MPK | SMAN 4 PANGKALPINANG , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 39267 | 20-01-2023 | TONI MUKTI, SH | Permasalahan pertanahan (status lahan) yang belum jelas untuk berinvestasi | pengalihan status lahan pasar menjadi SP3AT dikarenakan banyaknya rumah warga yang membangun rumah tidak bisa disuratkan dikomplek pasar sumber jaya permai | Komplek Pasar Sumber Jaya Permai RT 17, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke dinas terkait |
| 39274 | 20-01-2023 | EFREDI EFFENDY | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Permohonan Kamera CCTV | SMAN 4 PANGKALPINANG , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 39284 | 20-01-2023 | TONI MUKTI, SH | Masih banyaknya kawasan permukiman yang belum terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) seperti jalan lingkungan dan drainase yang belum memadai, serta masih banyaknya rumah tidak layak huni yang ditempati oleh masyarakat. | normalisasi saluran pembangunan primer dikarenakan setiap tahun banjir di Desa Sumber Jaya Permai | Desa Sumber Jaya Permai, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | Bukan kewenangan Provinsi | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 39299 | 20-01-2023 | ADET, SH., MH | Pembangunan Jalan & Jembatan | Adanya pengaspalan jalan dikarenakan adanya pemukiman penduduk | Desa sungkap tembus ke desa cambai dan desa celuak di desa sungkap kecamatan simpang katis, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN | Ditolak | tidak masuk kedalam kewenangan provinsi | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | | | | kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 39301 | 20-01-2023 | TONI MUKTI, SH | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | Meminta Bantuan bibit sapi | Desa Sumber Jaya Permai, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 39362 | 20-01-2023 | ADET, SH., MH | Masih banyaknya kawasan permukiman yang belum terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) seperti jalan lingkungan dan drainase yang belum memadai, serta masih banyaknya rumah tidak layak huni yang ditempati oleh masyarakat. | Jalan utama masyarakat menuju ke kebun masyarakat | Desa Sarang Mandi tembus ke Batu Iser di Desa Sarang Mandi Kecamatan Sungaiselan, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | Belum adanya Perencanan SID/DED drainase dari kota Pangkalpinang | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 39672 | 20-01-2023 | EVI JUNITA | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Sebagai upaya melahirkan anak didik yang beradab, reliqius, dan memiliki kesadaran beribadah dan tahu tata cara dalam pelaksanaannya, MAN Insan Cendikia Bangka Tengah sangat membutuhkan adanya masjid dilingkungan Sekolah MAN Insan Cendikia Bangka Tengah yang tidak hanya sebagai sarana ibadah namun | JL. Raya Desa Sungkap Kec. Simpang Katis Kab. Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | juga sebagai sarana pembelajaran | | | | | | | | |
| 39680 | 20-01-2023 | EVI JUNITA | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Dalam meningkatkan sarana dan prasaran sekolah yang berstandar Nasional perlu adanya saran yang mendukung untuk menompang dunia pendidikan yang lebih baik, terutama sarana jalan setapak yang ada di MAN Insan Cendikia ketika musim hujan jalan yang dilalu dari gerbang sampai kelas tergenang air dan becek lumpur. Oleh karen itu sangat penting adanya bantuan dari Pemerintah untuk sarana jalan setapak di Lingkungan MAN Insan Cendikia Bangka Tengah | JL. Raya Desa Sungkap Kec. Simpang Katis Kab. Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 39691 | 20-01-2023 | EVI JUNITA | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Listrik merupakan hal yang penting dalam peningkatan dan penunjang secara administrasi dunia pendidikan. Dimana listrik sangat lah penting dalam kegiatan belajar mengajar | JL. Raya Desa Sungkap Kec. Simpang Katis Kab. Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 39716 | 20-01-2023 | EVI JUNITA | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Dalam peningkatan mutu pendidikan di Ponpes Nurul Falah dimana para santri membutuhkan pelayanan kesehatan yang cepat sebelum terjadi hal-hal yang tidak di inginkan, oleh karena itu sangat penting adanya wadah atau ruang berupa gedung klinik kesehatan pospes nurul falah air mesu | Jl. Desa Air Mesu Kec. Pangkalan Baru Kab, Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 39739 | 20-01-2023 | RINGGIT KECUBUNG, S.Pd | belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat | Sebagai upaya melahirkan anak didik yang beradab, reliqius, dan memiliki kesadaran beribadah dan tahu tata cara dalam pelaksanaannya maka sangat penting adanya masjid di lingkungan sekolah SMK Muhammadiyah Muntok | JL. Argotirto Kp. Air Trejun RT 04 RW 02, Kel. Sungai Daeng Kec. Muntok Kab. Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | Biro Kesejahteran Rakyat | Biro Kesejahteran Rakyat | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pelayanan Dasar | | | | | | | | | |
| 39756 | 20-01-2023 | RINGGIT KECUBUNG, S.Pd | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Terbatasnya ruang, sesuai dengan Permen Diknas Nomor 24 tahun 2007, ruang perpustakaan minimal seukuran ruang kelas, namun di sisi lain ruang kelas yang ada di SMK Muhammadiyah Muntok hanya cukup digunakan untuk kegiatan KBM siswa/i, oleh karena itu sangat penting adanya ruang perpustakaan sekolah | JL. Argotirto Kp. Air Trejun RT 04 RW 02, Kel. Sungai Daeng Kec. Muntok Kab. Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 39769 | 20-01-2023 | RINGGIT KECUBUNG, S.Pd | masih terbatasnya beasiswa bagi siswa | Dalam Undang-Undang 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan dari kemerdekaan adalah mencerdaskan kehidupan bangka, namun masih minimnya keinginan orangtua untuk menyesekolahkan anaknya karena tidak ada biaya, oleh karena itu bantuan beasiswa sangat diperlukan agar siswa tidak ada yang putus sekolah serta tidak membebani para orangtua khususnya siswa/i di SMK Muhammadiyah Muntok | JL. Argotirto Kp. Air Trejun RT 04 RW 02, Kel. Sungai Daeng Kec. Muntok Kab. Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 39778 | 20-01-2023 | RINGGIT KECUBUNG, S.Pd | Masih kurangnya ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga | Sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional serta dalam meningkatkan minat dan bakat para peserta didik sebagai salah satu bagian dari Eskul, maka sangat penting adanya sarana olahraga di MA Terpadi Bina Insan Cendikia Muntok | JL. Lingkar Masjid Agung Baitur Ridho Pal IV Dusun V Desa Belo Laut Kec. Muntok Kab. Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Untuk ditindaklanjuti . |
| 39793 | 20-01-2023 | RINGGIT KECUBUNG, S.Pd | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Di era globalisasi seperti sekarang ini Perkembangan teknologi telah membawa pengaruh terhadap bidang pendidikan dalam proses pembelajaran. Siswa di tuntut untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman, serta untuk menghadapi tantangan global. Apa lagi sekarang tidak hanya dalam | JL. Lingkar Masjid Agung Baitur Ridho Pal IV Dusun V Desa Belo Laut Kec. Muntok Kab. Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | pembelajaran saja namun dalam ujian sekolah sekarang sudah berbasis teknologi (UNBK), karena itu sangat penting adanya komputer di MA terpadu Bina Insan Cendikia Muntok | | | | | | | |
| 39814 | 20-01-2023 | RINGGIT KECUBUNG, S.Pd | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Untuk meningkatkan pemahaman siswa dibidang sain, tidak hanya diperlukan teori saja, melain ilmu terapan yakni praktek, sehingga sangat penting adanya ruangan khusus untuk Laboratorium Sekolah SMA Negeri 1 Parit Tiga agar pembelajaran lebih efesien dan efektif dalam kegiatan belajar mengajar | JL. Raya Desa Telak Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 39853 | 20-01-2023 | ADET, SH., MH | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | Masyarakat menginginkan bantuan bidang pertanian (bibit cabe) | Desa Teru Kecamatan Simpang Katis, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 39862 | 20-01-2023 | RINGGIT KECUBUNG, S.Pd | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Bantuan Sarana dan Prasaran Pagar Sekolah SMA Negeri 1 Parit Tiga | JL. Raya Desa Telak Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 39873 | 20-01-2023 | RINGGIT KECUBUNG, S.Pd | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Selama ini siswa dan guru kesulitan mengakses air bersih, lantaran kondisi sekolah tersebut kekurangan air bersih karena sumur bor terbatas. Sementara jumlah siswa terus bertambah bahkan saat ini mencapai 500 lebih siswa, jumlah itu akan terus bertambah mengingat sekolah SMA Negeri 1 Parit Tiga | JL. Raya Desa Telak Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | merupaka sekolah proritas dari para orangtua untk menyesekolahkan anaknya | | | | | | | | |
| 40004 | 20-01-2023 | TONI MUKTI, SH | prasarana pertanian ( JUT, JUP, irigasi, lantai jemur, dll) sub sekotor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan masih minim | Peningkatan kajian ilmiah area persawahan dikarenakan tidak bisa digarap di wilayah persawahan | Desa Batu Betumpang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 40010 | 20-01-2023 | TONI MUKTI, SH | Masih banyaknya kawasan permukiman yang belum terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) seperti jalan lingkungan dan drainase yang belum memadai, serta masih banyaknya rumah tidak layak huni yang ditempati oleh masyarakat. | Pembangunan TPS dikarenakan belum adanya tempat pembuangan sampah di Desa Batu Betumpang | Desa Batu Betumpang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | Bukan kewenangan provinsi, diusulkan lewat DABA | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 40013 | 20-01-2023 | TONI MUKTI, SH | Perencanaan, Pembangunan Pengembangan, Pengelolaan, Pemeliharaan Jaringan Irigasi | Pembangunan saluran irigasi persawahan /primer dikarenakan persawahan tidak bisa ditanami | Desa Sukajaya Kecamatan Pulau Besar, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 40019 | 20-01-2023 | TONI MUKTI, SH | Pembangunan Jalan & Jembatan | Pembangunan jembatan jalan usaha tani dikarenakan sungai terlalu lebar | Desa Sukajaya, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN | Ditolak | tidak masuk kedalam kewenangan provinsi | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | | | | kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 40022 | 20-01-2023 | TONI MUKTI, SH | Pemeliharaan Rutin/Berkala Jalan Jembatan | Perbaikan pelebaran jalan dikarenakan jalan terlalu sempit | Desa Suka jaya, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | tidak masuk kedalam kewenangan provinsi | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 40048 | 20-01-2023 | TONI MUKTI, SH | Pemeliharaan Rutin/Berkala Jalan Jembatan | Peningkatan pengaspalan jalan jalur 2 dan jalan lingkar pendidikan yang sudah rusak | Desa fajar Indah Kecamatan Pulau Besar, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | tidak masuk kedalam kewenangan provinsi | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 40057 | 20-01-2023 | TONI MUKTI, SH | belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | pembangunan papin blok masjid Desa Fajar indah dikarenakan sering banjir | Desa Fajar Indah, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | Biro Kesejahteran Rakyat | Biro Kesejahteran Rakyat | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 40065 | 20-01-2023 | TONI MUKTI, SH | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | pembangunan pagar SMKN 1 Pulau Besar dikarenakan belum ada pagar sekolah | SMK N 1 Pulau Besar, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 40068 | 20-01-2023 | TONI MUKTI, SH | Belum terpenuhinya sarana dan prasarana | Peningkatan RPS Kultur Jaringan SMKN 1 Pulau Besar dikarenakan kurang kuat | SMK N 1 Pulau Besar, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke dinas terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | jaringan internet di kabupaten/Kota | signal sehingga menghambat proses belajar mengajar | | | TERPADU SATU PINTU | | | | | |
| 40070 | 20-01-2023 | TONI MUKTI, SH | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | peningkatan sarana prasarana (komputer dan alat praktek) di SMK N 1 Pulau besar dikarenakan kurang memadai fasilitas komputer | SMK N 1 Pulau Besar, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 40074 | 20-01-2023 | TONI MUKTI, SH | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | peningkatan rehabilitasi gedung SMKN I Pulau Besar dikarenakan sudah banyak rusak | SMK N 1 Pulau Besar, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 40118 | 20-01-2023 | TONI MUKTI, SH | belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | pembangunan rehabilitasi gedung TK / Paud dikarenakan sudah layak tidak layak dan rawan bocor | Desa Fajar Indah, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | Biro Kesejahteran Rakyat | Biro Kesejahteran Rakyat | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 40129 | 20-01-2023 | TONI MUKTI, SH | belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | peningkatan sarana prasarana (konblok, sumur bor, MCK) pondok Pesantren Syarifatul Hidayah dikarenakan belum tersedianya sumur bor dan MCK | Desa Sumber Jaya Permai, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | Biro Kesejahteran Rakyat | Biro Kesejahteran Rakyat | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40133 | 20-01-2023 | TONI MUKTI, SH | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | pembangunan 3 ruang kelas baru dan 1 aula pertemuan di SMA N 1 Pulau Besar | SMA N 1 Pulau Besar, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 40138 | 20-01-2023 | TONI MUKTI, SH | belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | pembangunan papin blok halaman darul Hikmah dikarenakan terdapatnya genangan air sehingga menghambat pelaksanaan upacara | Desa Batu Betumpang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | Biro Kesejahteran Rakyat | Biro Kesejahteran Rakyat | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 43651 | 24-01-2023 | H. AKSAN VISYAWAN, S.ST., MH | belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | Pembangunan Masjid Nurul Iman Belum Tuntas, Mohon Bantuan Dana Hibah dari Provinsi | Desa Paya Benua Kec. Mendo Barat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | Biro Kesejahteran Rakyat | Biro Kesejahteran Rakyat | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 43662 | 24-01-2023 | H. AKSAN VISYAWAN, S.ST., MH | belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | Bantuan Sarana dan Prasarana TK/TPA dan Sarana Pengajian Ibu-ibu | Desa Paya Benua Kec. Mendo Barat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | Biro Kesejahteran Rakyat | Biro Kesejahteran Rakyat | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43669 | 24-01-2023 | H. AKSAN VISYAWAN, S.ST., MH | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Bantuan Pendidikan Anak - anak yang Tidak Mampu | Desa Paya Benua Kec. Mendo Barat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 43674 | 24-01-2023 | H. AKSAN VISYAWAN, S.ST., MH | Belum terpenuhinya UHC (Universal Health Coverage) atau jaminan kesehatan | Bantuan Bpjs Kesehatan untuk Masyarakat tidak Mampu Bayar, dan Insedental Kecelakan | Desa Paya Benua Kec. Mendo Barat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KESEHATAN | DINAS KESEHATAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke Dinas Kesehatan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 43684 | 24-01-2023 | SUSI | Pembangunan Jalan & Jembatan | Perbaikan Jalan dari Simpang Rimba sampai Desa Rajik | Kecamatan Simpang Rimba, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | tidak masuk kedalam kewenangan provinsi | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 43690 | 24-01-2023 | SUSI | Kurangnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan provinsi (5 jenis) | Penerangan Jalan dari Desa Simpang Rimba sampai Desa Rajik | Desa Simpang Rimba Kecamatan Simpang Rimba, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERHUBUNGAN | DINAS PERHUBUNGAN | Ditolak | Bukan Kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverifikasi sesuai kewenangan urusan dan anggaran |
| 43692 | 24-01-2023 | SUSI | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Banyaknya Fasilitas sekolah yang belum memadai seperti pagar sekolah | SMK N 1 Simpang Rimba Kecamatan Simpang Rimba, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 43693 | 24-01-2023 | H. AKSAN VISYAWAN, S.ST., MH | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar | Bantuan Beasiswa yang Mengalami Penundaan Pembayaran SPP | Kampus Stisipol Pahlawan 12 Sungailiat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | Biro Kesejahteran Rakyat | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nasional Pendidikan | | | | | | | | | |
| 43695 | 24-01-2023 | SUSI | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Fasilitas wc/toilet di sekolah untuk siswa/i belum memadai | SMKN 1 Simpang Rimba Kecamatan Simpang Rimba, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 43699 | 24-01-2023 | SUSI | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Fasilitas sekolah belum memadai seperti pendingin ruang laboratorium dan ruang praktek untuk kegiatan belajar mengajar siswa/i | SMKN 1 Simpang Rimba Kecamatan Simpang Rimba, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 43700 | 24-01-2023 | H. AKSAN VISYAWAN, S.ST., MH | belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | Bantuan Pembangunan Mushola/ Renovasi Mushola Karena Tidak Bisa Lagi Menampung Jama'ah | Kampus Stisipol Pahlawan 12 Sungailiat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | Biro Kesejahteran Rakyat | Biro Kesejahteran Rakyat | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 43704 | 24-01-2023 | SUSI | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | pembangunan pos satpam untuk keamanan sekolah | SMKN 1 Simpang Rimba Kecamatan Simpang Rimba, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 43709 | 24-01-2023 | H. AKSAN VISYAWAN, S.ST., MH | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar | Bantuan CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Perkembangan Kampus STISIPOL | Kampus Stisipol Pahlawan 12 Sungailiat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nasional Pendidikan | | | | | | | | | |
| 43731 | 24-01-2023 | Drs. RUSTAMSYAH | Permasalahan pertanahan (status lahan) yang belum jelas untuk berinvestasi | Tidak adanya lahan untuk pertanian dan peternakan | SMKN 1 MENDO BARAT , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke dinas terkait |
| 43736 | 24-01-2023 | Drs. RUSTAMSYAH | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Belum ada Ruang UKS | SMKN 1 MENDO BARAT , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 43738 | 24-01-2023 | Drs. RUSTAMSYAH | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Pembangunan atau Renovasi Ruang Kelas yang kurang layak | SMKN 1 Mendo Barat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 43741 | 24-01-2023 | Drs. RUSTAMSYAH | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Pembangunan pagar sekolah depan dan belakang | SMKN 1 MENDO BARAT , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 43756 | 24-01-2023 | Drs. RUSTAMSYAH | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Pengadaan Komputer Lab Multimedia yang speknya tidak memenuhi syarat untuk jurusan multimedia | SMKN 1 MENDO BARAT, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 43776 | 24-01-2023 | Drs. RUSTAMSYAH | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar | Kurangnya sarana dan prasarana Moubiler Kelas | SMKN 1 MENDO BARAT, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nasional Pendidikan | | | | | | | | | |
| 43796 | 24-01-2023 | Drs. RUSTAMSYAH | Pembangunan Jalan & Jembatan | Belum selesainya Pengaspalan Jalan Rusak | Desa Neknang Kecamatan Bakam , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | tidak masuk kedalam kewenangan provinsi, masuk kedalam jalan nasional | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 43812 | 24-01-2023 | Drs. RUSTAMSYAH | Perencanaan, Pembangunan Embung, Polder, kolam retensi untuk penyediaan air baku | Pembangunan atau Renovasi Embung yang tidak berfungsi untuk mendistribusikan ketersediaan air untuk kebutuhan masyarakat | Desa Neknang Kecamatan Bakam , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | Bukan Aset Provinsi. tidak bisa dilakukan rehab. | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 43899 | 24-01-2023 | MATZAN | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Belum adanya pagar sekolah dibagian belakang sekolah | SMAN 1 BAKAM Kecamatan Bakam, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 43923 | 24-01-2023 | MATZAN | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Pembangunan atau Renovasi Ruang Kelas yang Kurang Layak | SMAN 1 BAKAM Kecamatan Bakam, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 43931 | 24-01-2023 | MATZAN | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Pembangunan Gedung Serba Guna Untuk Fasilitas Kegiatan Sekolah | SMAN 1 BAKAM Kecamatan Bakam, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44457 | 24-01-2023 | ARIYANTO, SH., MH | Pengelolaan sekolah belum memadai | Belum tersedianya sarana dan prasarana yang baik untuk pembangunan gedung serba guna | SMK N 1 Muntok Kec.Muntok, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 45898 | 24-01-2023 | Ir. HENDRIYANSEN | Kurangnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan provinsi (5 jenis) | Pemeliharaan PJU Sekota Pangkalpinang | Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERHUBUNGAN | DINAS PERHUBUNGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverifikasi sesuai kewenangan urusan dan anggaran |
| 45900 | 24-01-2023 | Ir. HENDRIYANSEN | Kurangnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan provinsi (5 jenis) | Pemasangan lampu jalan di kecamatan Kelurahan Girimaya, dan Kelurahan Air Mawar | Kecamatan Bukit Intan, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERHUBUNGAN | DINAS PERHUBUNGAN | Ditolak | Bukan Kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverifikasi sesuai kewenangan urusan dan anggaran |
| 45908 | 24-01-2023 | Ir. HENDRIYANSEN | Pembangunan Jalan & Jembatan | Pembangunan Trotoar dan saluran air Jalan Sudirman | Jalan Sudirman Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | masuk kedalam kewenangan pusat | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 45922 | 24-01-2023 | Ir. HENDRIYANSEN | Kurangnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan provinsi (5 jenis) | Pemasangan lampu jalan di Kelurahan Sriwijaya dan kelurahan semabung | Kelurahan Semabung Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERHUBUNGAN | DINAS PERHUBUNGAN | Ditolak | Sudah dipasang Tahun 2023 | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverifikasi sesuai kewenangan urusan dan anggaran |
| 45926 | 24-01-2023 | Ir. HENDRIYANSEN | Masih banyaknya kawasan permukiman yang belum terfasilitasi Prasarana, Sarana dan | Normalisasi saluran air di kelurahan bintang, air salemba dan kelurahan melintang | Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | Ditolak | Aset bukan milik provinsi | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Utilitas Umum (PSU) seperti jalan lingkungan dan drainase yang belum memadai, serta masih banyaknya rumah tidak layak huni yang ditempati oleh masyarakat. | | | | | KAWASAN PERMUKIMAN | | | | ketersediaan anggarannya |
| 45928 | 24-01-2023 | Ir. HENDRIYANSEN | Masih banyaknya kawasan permukiman yang belum terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) seperti jalan lingkungan dan drainase yang belum memadai, serta masih banyaknya rumah tidak layak huni yang ditempati oleh masyarakat. | Pembangunan saluran tersier dari rumah penduduk | Kelurahan Ketapang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | Belum adanya Perencanan SID/DED drainase dari kota Pangkalpinang | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 45941 | 24-01-2023 | Ir. HENDRIYANSEN | Kurangnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan provinsi (5 jenis) | Penerangan lampu jalan Kaldera Semabung | Kelurahan Semabung, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERHUBUNGAN | DINAS PERHUBUNGAN | Ditolak | Sudah dipasang sebanyak 30 Unit | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverifikasi sesuai kewenangan urusan dan anggaran |
| 45949 | 24-01-2023 | Ir. HENDRIYANSEN | Masih banyaknya kawasan permukiman yang belum terfasilitasi Prasarana, Sarana dan | Pembangunan dan perbaikan tanggul di kelurahan Bintang yang mengalir dari sungai Pedindang | Kelurahan Bintang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | Ditolak | Bukan Kewenangan Provinsi karena Aset masuk Kota Pangkalpinang | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Utilitas Umum (PSU) seperti jalan lingkungan dan drainase yang belum memadai, serta masih banyaknya rumah tidak layak huni yang ditempati oleh masyarakat. | | | | | KAWASAN PERMUKIMAN | | | | ketersediaan anggarannya |
| 45977 | 24-01-2023 | Ir. HENDRIYANSEN | Belum terpenuhinya UHC (Universal Health Coverage) atau jaminan kesehatan | Masalah kesehatan bagi lansia atau orang tua | Kelurahan Ketapang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KESEHATAN | DINAS KESEHATAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke Dinas Kesehatan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 45980 | 24-01-2023 | Ir. HENDRIYANSEN | Kurangnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan provinsi (5 jenis) | Perbaikan lampu jalan yang sudah tidak berfungsi | Kelurahan Ketapang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERHUBUNGAN | DINAS PERHUBUNGAN | Ditolak | Bukan Kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kewenangan BPTD Kemenhub | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverifikasi sesuai kewenangan urusan dan anggaran |
| 45994 | 24-01-2023 | Ir. HENDRIYANSEN | Kurangnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan provinsi (5 jenis) | Banyaknya warga merasa terganggu adanya mobil Mobil Tronton di Jalanan utama kota Pangkalpinang | Kelurahan Ketapang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERHUBUNGAN | DINAS PERHUBUNGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverifikasi sesuai kewenangan urusan dan anggaran |
| 45996 | 24-01-2023 | Ir. HENDRIYANSEN | Masih banyaknya kawasan permukiman yang belum terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) seperti jalan | Normalisasi Salurah di Kelurahan Ketapang | Pangkalbalam, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | lingkungan dan drainase yang belum memadai, serta masih banyaknya rumah tidak layak huni yang ditempati oleh masyarakat. | | | | | | | | | |
| 45997 | 24-01-2023 | Ir. HENDRIYANSEN | Pelebaran Jalan Menuju Standar | Pememliharan jalan setapak di lingkungan rumah warga kota Pangkalpinang | Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | Tidak masuk dalam Aset Provinsi | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 46434 | 25-01-2023 | TONI PURNAMA, S.IP | Kurangnya pengelolaan DAS melalui upaya mempertahankan DAS baik dan memulihkan DAS rusak. | sering terjadi banjir | desa pangkalbuluh, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KEHUTANAN | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Dibahas lebih lanjut oleh Dinas LHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 46440 | 25-01-2023 | TONI PURNAMA, S.IP | Masih kurangnya ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga | belum memiliki GOR | desa nadung, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Untuk ditindaklanjuti. |
| 46446 | 25-01-2023 | TONI PURNAMA, S.IP | Keterbatasan daya tampung sekolah | kekurangan asrama santri pondok pesantern | Pondok Pesantren Khoirul Desa Payung, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 46450 | 25-01-2023 | TONI PURNAMA, S.IP | Lampu Penerangan Jalan | kondisi jalan gelap dikhawatirkan terjadi kecelakaan dan tindak kriminal pada malam hari | desa batu betumpang - desa bedengung, desa nyelanding - desa air gegas, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERHUBUNGAN | DINAS PERHUBUNGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverifikasi sesuai kewenangan |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | urusan dan anggaran |
| 46473 | 25-01-2023 | TONI PURNAMA, S.IP | Pemeliharaan Rutin/Berkala Jalan Jembatan | banyak jalan yang rusak | jalan desa bedengung - desa batu betumpang, jalan desa payung - desa bedengung, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | sudah masuk kedalam kegiatan apbd 2023 | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 46493 | 25-01-2023 | H. AKSAN VISYAWAN, S.ST., MH | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Bantuan Sarana Prasarana Fasilitas Mengajar Berupa Kipas Angin, AC, Komputer dan Peralatan Praktek Kerja | MAN 1 MADRASAH ALIYAH SUNGAILIAT, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 46496 | 25-01-2023 | ADET, SH., MH | Lampu Penerangan Jalan | Sudah banyak yang rusak dan dalam kondisi mati | Desa Katis Kecamatan Simpang Katis, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERHUBUNGAN | DINAS PERHUBUNGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverifikasi sesuai kewenangan urusan dan anggaran |
| 46503 | 25-01-2023 | TONI PURNAMA, S.IP | Pelebaran Jalan Menuju Standar | jalan sempit menyebabkan kecelakaan | desa irat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 46506 | 25-01-2023 | ADET, SH., MH | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan | Mengharapkan bantuan bidang pertanian | Desa Katis Kecamatan Simpang Katis, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | perkebunan masih kurang | | | | | | | | | |
| 46512 | 25-01-2023 | H. AKSAN VISYAWAN, S.ST., MH | belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | Permohonan Bantuan Peningkatan Bangunan Mushola Di karenakan Kapasitas mushola tidak bisa Menampung Sejumlah Siswa dan Guru | SMANSA 1 PEMALI KEC. PEMALI, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | Biro Kesejahteran Rakyat | Biro Kesejahteran Rakyat | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 46529 | 25-01-2023 | TONI PURNAMA, S.IP | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | banyak sawah milik masyarakat tidak produktif lagi, sehingga masyarakat ingin beralih ke perkebunan sawit dan menginginkan bantuan bibit sawit | kecamatan payung, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 46536 | 25-01-2023 | H. AKSAN VISYAWAN, S.ST., MH | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Permintaan Bantuan Pengadaan Buku dan Try Out Untuk Pra- Test Masuk Perguruan Tinggi | SMANSA 1 PEMALI KEC. PEMALI, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 46546 | 25-01-2023 | H. AKSAN VISYAWAN, S.ST., MH | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Terkait Efektivitas Kegiatan Belajar Mengajar/ Menerapkan Sitem Full Day Scholl | SMANSA 1 PEMALI KEC. PEMALI, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 46552 | 25-01-2023 | ADET, SH., MH | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, | Minimnya bantuan bidang pertanian dan perkebunan | Desa Beruas Kecamatan Simpang Katis, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | | | | | KETAHANAN PANGAN | | | | |
| 46565 | 25-01-2023 | ADET, SH., MH | Lampu Penerangan Jalan | kondisi sudah mati dan rusak | Desa Beruas Kecamatan Simpang Katis, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERHUBUNGAN | DINAS PERHUBUNGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverifikasi sesuai kewenangan urusan dan anggaran |
| 46567 | 25-01-2023 | TONI PURNAMA, S.IP | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | dana pembangunan masjid secara swadaya masih minim | Masjid Amaliah Desa Payung, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 46631 | 25-01-2023 | ADET, SH., MH | Pembangunan Jalan & Jembatan | Perlunya berbaikan jalan tetapi terkendala jalan kabupaten sehingga kurangnya perhatian pemerintah kabupaten agar jalan dialihkan ke provinsi | Desa Romadon Kecamatan Sungai selan, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | masuk kedalam kewenangan kabupaten | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 46649 | 25-01-2023 | TONI PURNAMA, S.IP | Masih kurangnya ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga | belum ada sport centre | kecamatan payung, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Untuk ditindaklanjuti. |
| 46672 | 25-01-2023 | TONI PURNAMA, S.IP | Penyediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di fasilitas kesehatan masih kurang | tidak tersedianya mobil ambulans desa | desa jelutung II, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KESEHATAN | DINAS KESEHATAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke Dinas Kesehatan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 46680 | 25-01-2023 | TONI PURNAMA, S.IP | Pengelolaan sekolah belum memadai | belum dibangun pagar sekolah | SMA N 1 Pulau Besar dan SMA N 1 Payung, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | ditindaklanjuti usulan ini. |
| 46689 | 25-01-2023 | NATA SUMITRA | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | Terjadinya kelangkaan Pupuk subsidi untuk tanaman Lada masyarakat | Desa Aik Madu dan Desa Jangkar Asam Kecamatan Simpang Renggiang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 46693 | 25-01-2023 | Drs. RUSTAMSYAH | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Tidak adanya fasilitas untuk praktek siswa/siswi berupa kandang ayam yang berbasis teknologi dengan tampungan 20 ribu ayam | SMKN 1 MENDO BARAT, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 46705 | 25-01-2023 | EFREDI EFFENDY | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Pembangunan atau Renovasi Lapangan Basket dan Futsal yang Rusak dan digenangi air | SMAN 2 PANGKALPINANG, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 46709 | 25-01-2023 | EFREDI EFFENDY | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Pembangunan atau Renovasi Ruang Belajar yang tidak memiliki jendela atau fentilasi udara | SMAN 4 PANGKALPINANG, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 46717 | 25-01-2023 | MATZAN | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Pengadaan Bus sekolah untuk anak didik yang tidak memiliki kendaraan an tempat untuk menuju sekolah | SMAN 1 BAKAM KECAMATAN BAKAM , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46720 | 25-01-2023 | MATZAN | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Kurangnya Moubiler diRuang Belajar | SMAN 1 BAKAM KECAMATAN BAKAM , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 46728 | 25-01-2023 | MATZAN | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Renovasi Ruang Kepala Sekolah , Tata Usaha, Perpustakaan, Musholla, Rumah Penjaga Sekolah, dan ruang olahraga yang Kurang layak | SMAN 1 BAKAM KECAMATAN BAKAM , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 46772 | 25-01-2023 | TONI PURNAMA, S.IP | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | kurangnya sarana dan prasarana sekolah taman kanak-kanak | TK N 1 Pulau Besar, TK Gazania Desa Panca Tunggal, TK Nurhidayatullah Iman Ds Fajar Indah, TK Nurul Hikmah Ds Sukajaya, TK Pertiwi Ds Sumberjaya Pertiwi, TK RA Darul Hikmah Ds Batu Betumpang Kec Pulau Besar, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 46780 | 25-01-2023 | TONI PURNAMA, S.IP | Lampu Penerangan Jalan | jalan desa gelap gulita pada malam hari yang dapat menyebabkan tindakan kriminal dan kecelakaan | desa pangkalbuluh, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERHUBUNGAN | DINAS PERHUBUNGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverifikasi sesuai kewenangan urusan dan anggaran |
| 46791 | 25-01-2023 | MATZAN | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Pengadaan sarana dan prasarana olahraga seperti Futsal, basket, dan volly | SMAN 1 BAKAM KECAMATAN BAKAM, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 46800 | 25-01-2023 | TONI PURNAMA, S.IP | Perencanaan, Pembangunan Pengembangan, Pengelolaan, Pemeliharaan Jaringan Irigasi | debit air sungai yang menuju ke laut terlalu banyak, sehingga tidak bisa tertampung sehingga dapat merusak sawah | dusun serdang Desa Jelutung II, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN | Ditolak | Masih proses alih kewenangan dari Kabupaten Bangka | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | | Selatan ke Provinsi, terkait permasalahan Banjir di Jelutung 2 terdapat saluran pembuang menuju sungai yang perlu dilakukan normalisasi, akan tetapi saluran/sungai tersebut masuk kawasan Hutan (HP). | | kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 46805 | 25-01-2023 | MATZAN | masih kurangnya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan | Tidak adanya Staf Bagian Keuangan atau Bendahara | SMAN 1 BAKAM KECAMATAN BAKAM , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 46811 | 25-01-2023 | MATZAN | Pemeliharaan Rutin/Berkala Jalan Jembatan | Perbaikan Jalan antara Bukit Layang sampai ke Desa Dalil yang rusak | Desa Bukit Layang Sampai Ke Desa Dalil , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | bukan kewenangan provinsi | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 46815 | 25-01-2023 | TONI PURNAMA, S.IP | PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | kurangnya sumber air bersih | desa payung, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | Perlu disiapkan terlebih dahulu sumber air baku yang layak dari BSW BANGKA BELITUNG/ BIDANG SDA untuk pembangunan intake | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46823 | 25-01-2023 | MATZAN | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Pengadaan Laptop untuk jurusan multimedia, Komputer yang ada speknya tidak memenuhi syarat | SMAN 1 BAKAM KECAMATAN BAKAM , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 46825 | 25-01-2023 | TONI PURNAMA, S.IP | Masih banyaknya kawasan permukiman yang belum terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) seperti jalan lingkungan dan drainase yang belum memadai, serta masih banyaknya rumah tidak layak huni yang ditempati oleh masyarakat. | masih banyaknya jalan yang tidak memiliki siring/ drainase sehingga apabila hujan air masuk ke rumah warga | desa jelutung II, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | Saluran Jalan adalah bagian Konstruksi Jalan. Aset jalan bukan milik Provinsi | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 46830 | 25-01-2023 | HELLYANA, SH | Masih banyaknya kawasan permukiman yang belum terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) seperti jalan lingkungan dan drainase yang belum memadai, serta masih banyaknya rumah tidak layak huni yang ditempati oleh masyarakat. | mencegah kerusakan jalan akinat debit air hujan yang banyak | komplek pelataran pilang desa dukong, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | Aset bukan milik Provinsi | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46833 | 25-01-2023 | MATZAN | masih terbatasnya beasiswa bagi siswa | Masih Kurangnya Bantuan Beasiswa untuk santri yang kurang mampu | Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Daarul Iman Desa Kimak Kecamatan Merawang , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 46835 | 25-01-2023 | HELLYANA, SH | Perencanaan, Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai | menanggulangi abrasi dan mencegah kerusakan pemukiman sekitar pantai | pantai tanjung pendam, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | Akan dilakukan Perencanaan SID/DED | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya. kewenangan Balai BWS |
| 46843 | 25-01-2023 | TONI PURNAMA, S.IP | prasarana pertanian ( JUT, JUP, irigasi, lantai jemur, dll) sub sekotor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan masih minim | pada saat musim panen padi, alat penggilingan padi tidak tersedia | desa irat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 46849 | 25-01-2023 | MATZAN | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Pembangunan atau Renovasi Musholla untuk santriwati , yang saat ini masih bergabung sholat di musholla santriwan | Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Daarul Iman Desa Kimak Kecamatan Merawang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 46854 | 25-01-2023 | EVI JUNITA | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | dalam meningkatkan keamanan untuk para siswa sekolah apa lagi kebanyakan lokasi rumah siswa berada jauh dari sekolah, oleh karena itu perlu adanya mobil sekolah untuk antar jemput para siswa | Jl. Raya Desa Sungkap Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 46855 | 25-01-2023 | HELLYANA, SH | Pembangunan Jalan & Jembatan | jalan setapak sudah rusak parah | jalan pattimura desa tanjung pendam, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM | Ditolak | bukan pembangunan baru, | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | | tidak masuk kedalam kewenangan provinsi | | untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 46857 | 25-01-2023 | TONI PURNAMA, S.IP | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | ketersediaan air bersih disekolah tidak memadai, membutuhkan sumur bor yang besar | SMA N 1 Payung, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 46860 | 25-01-2023 | EVI JUNITA | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Sarana Prasarana Pendidikan yang masih belum memenuhi standar Nasional pendidikan yang masih kurangnya air bersih dalam ponpes nurul falah air mesu | Jl. Desa Air Mesu Kecamatan Pangkalan baru Kabupaten bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 46875 | 25-01-2023 | EVI JUNITA | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Ruang Perpustakaan MA Nurul Falah Air Mesu | Jl. Raya Desa Air Mesu Timur Kecamatan pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 46876 | 25-01-2023 | HELLYANA, SH | Masih banyaknya kawasan permukiman yang belum terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) seperti jalan lingkungan dan drainase yang belum memadai, serta masih banyaknya | belum ada selokan, apabila hujan menyebabkan banjir | jalan swadaya RT 08, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | Saluran jalan adalah bagian dari Konstruksi Jalan.AsetJalannya bukan milik Provinsi | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | rumah tidak layak huni yang ditempati oleh masyarakat. | | | | | | | | | |
| 46878 | 25-01-2023 | HELLYANA, SH | Pemeliharaan Rutin/Berkala Jalan Jembatan | jalan bergelombang menyebabkan kecelakaan | jalan basuki rahmat s.d jalan dahlan kelurahan pangkalalang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | bukan kewenangan provinsi | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 46881 | 25-01-2023 | EVI JUNITA | Penyediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di fasilitas kesehatan masih kurang | Gedung Poskesdes Desa Pedindang | Jl. Raya Desa Pedindang Kecamatan Pangkalan Baru kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KESEHATAN | DINAS KESEHATAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke Dinas Kesehatan Propinsi Bangka Belitung |
| 46889 | 25-01-2023 | EVI JUNITA | Lampu Penerangan Jalan | Lampu penerang sepanjang jalan Desa Pedindang | Jl. Raya Desa Pedindang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERHUBUNGAN | DINAS PERHUBUNGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverifikasi sesuai kewenangan urusan dan anggaran |
| 46891 | 25-01-2023 | HELLYANA, SH | Kurangnya pemenuhan infrastruktur pelabuhan pengumpan regional | dermaga kondisi rusak berat | Dermaga baro kelurahan pangkalalang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERHUBUNGAN | DINAS PERHUBUNGAN | Ditolak | Ditolak karena Dermaga baro kelurahan pangkalalang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan kewenangan dari dinas kelautan dan perikanan | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverifikasi sesuai kewenangan urusan dan anggaran |
| 46895 | 25-01-2023 | HELLYANA, SH | Sarana prasarana pendukung pariwisata | belum ada pembatas TPU dengan tempat wisata suak parak mangrove | Lokasi wisata suak parak mangrove, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN | Ditolak | bukan kewenangan provinsi , masuk | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Dinas terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | belum memadai | | | | | PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | | kewenangan kota | | |
| 46909 | 25-01-2023 | HELLYANA, SH | Perencanaan, Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai | rumah warga terendam banjir apabila musim barat | desa air saga, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 46919 | 25-01-2023 | HELLYANA, SH | Pemeliharaan Rutin/Berkala Jalan Jembatan | jalan sudah rusak parah selama belasan tahun | Jalan mendaran s.d desa pelempang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | bukan kewenangan provinsi | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 46926 | 25-01-2023 | EVI JUNITA | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | Bibit Peternak Sapi Desa Pedindang | Jl.Raya Desa Pedindang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 46931 | 25-01-2023 | EVI JUNITA | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | Bibit Pertanian Desa Pedindang | Jl. Raya Desa Pedindang Kecamatan Pangkalan baru Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46944 | 25-01-2023 | EVI JUNITA | Masih banyaknya kawasan permukiman yang belum terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) seperti jalan lingkungan dan drainase yang belum memadai, serta masih banyaknya rumah tidak layak huni yang ditempati oleh masyarakat. | Rumah Layak Huni Desa Pedindang | Jl.Raya Desa Pedindang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Ditolak | Aset Bukan milik Provinsi | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 46949 | 25-01-2023 | MATZAN | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Tidak adanya Rumah Untuk Guru/ Pengajar para Santri | Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Darul Iman Desa Kimak Kecamatan Merawang , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 46953 | 25-01-2023 | MATZAN | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Pembangunan Dapur Umum | Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Darul Iman Desa Kimak Kecamatan Merawang , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 46955 | 25-01-2023 | EVI JUNITA | Masih banyaknya kawasan permukiman yang belum terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) seperti jalan lingkungan dan | Sharing Jalan Desa Pedindang (pasar tradisional desa pedindang) | Jl.Raya Desa Pedindang kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | Bukan kewenangan SDA/provinsi | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | drainase yang belum memadai, serta masih banyaknya rumah tidak layak huni yang ditempati oleh masyarakat. | | | | | | | | | |
| 46957 | 25-01-2023 | SUSI | Masih banyaknya kawasan permukiman yang belum terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) seperti jalan lingkungan dan drainase yang belum memadai, serta masih banyaknya rumah tidak layak huni yang ditempati oleh masyarakat. | Pembuatan talut di sekolah karena ketika hujan banyak yang tergenang air | SMKN 1 Simpang Rimba Kecamatan Simpang Rimba, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III | Ditolak | Aset Bukan milik Provinsi | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 46959 | 25-01-2023 | SUSI | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Banyaknya fasilitas sekolah yang belum memadai seperti Banguna gedung serba guna, ruang Olahraga dan ruang pertemuan | SMKN 1 Simpang Rimba Kecamatan Simpang Rimba, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 46961 | 25-01-2023 | SUSI | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Banyaknya fasilitas sekolah yang belum memadai seperti Rumah Dinas Penjaga Sekolah | SMKN 1 Simpang Rimba Kecamatan Simpang Rimba, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 46980 | 25-01-2023 | SUSI | Sarana Prasarana pendidikan | Pembangunan UKS untuk menunjang fasilitas kesehatan siswa/i di lingkungan sekolah | SMKN 1 Simpang Rimba, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | | | | | | | | | untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 46997 | 25-01-2023 | RANTO SENDHU, SE | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | rusak berat atap gedung sekolah, dan kerusakan berat pada dinding, plafon, pondasi dan struktur gedung | SMK Yapensu Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 47008 | 25-01-2023 | EVI JUNITA | Belum maksimalnya UEM (Bumdes) yang dapat meningkatkan PADesa | bantuan mobil sampah Desa Pendindang | JL. Raya Desa Pendindang Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Ditolak | tidak diakomodir, bukan kewenangan dinsospmd. Diarahkan ke program CSR melalui kab kota | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah |
| 47114 | 25-01-2023 | ADET, SH., MH | Pembangunan Jalan & Jembatan | Sudah rusak parah | Desa simpang katis - desa puput - desa pinang sebatang di desa puput kecamatan simpang katis, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | sudah masuk kedalan kegiatan apbd tahun 2023 | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 47125 | 25-01-2023 | ADET, SH., MH | Pengelolaan sekolah belum memadai | Kondisi sekolah yang tidak ada pagar sekolah menjadi tempat pemuda pemudi berkumpul di pekarangan sekolah | SMP N simpang katis di desa puput kecamatan simpang katis, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 47130 | 25-01-2023 | ADET, SH., MH | Pembangunan Jalan & Jembatan | Perlunya perbaikan shiring jalan | Desa simpang katis - desa puput - desa pinang sebatang di Desa Simpang Katis Kecamatan Simpang Katis, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | sudah masuk kedalam kegiatan apbd tahun 2023 | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47138 | 25-01-2023 | ADET, SH., MH | Masih kurangnya ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga | Masyarakat menginginkan adanya pembangunan tempat olahraga untuk pemuda pemudi | Desa Simpang Katis Kecamatan simpang katis, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Untuk ditindaklanjuti. |
| 47140 | 25-01-2023 | ADET, SH., MH | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | Kekurangan dana untuk pembangunan masjid | Desa Simpang Katis Kecamatan Simpang Katis, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 47145 | 25-01-2023 | ADET, SH., MH | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | Kekurangan dana untuk pembangunan pesantren | Pesantren di Desa Simpang Katis Kecamatan Simpang Katis, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 47148 | 25-01-2023 | ADET, SH., MH | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | Kurangnya perhatian kepada pengurus masjid | Desa Simpang Katis Kecamatan simpang katis, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 47158 | 25-01-2023 | ADET, SH., MH | Pembangunan Jalan & Jembatan | Perlunya perbaikan shiring jalan yang sudah rusak | Desa simpang katis - desa puput - desa pinang sebatang di desa pinang sebatang kecamatan simpang katis, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | sudah masuk kedalam kegiatan apbd tahun 2023 | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 48195 | 26-01-2023 | RANTO SENDHU, SE | Sarana dan prasarana Perikanan tangkap masih minim dan belum memadai (Tambat labuh/Pelabuhan Perkanan/Alat bantu Penangkapan) | mesin perahu nelayan sudah banyak yang lama pemakaiannya ditambah jaraak tempuh tangkap yang jauah | Pantai Matras Kelurahan Matras Kecamatan Sungailiat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Ditolak | Mengembalikan peran sesuai kewenangan kabupaten/kota (kapal <5GT) | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 48200 | 26-01-2023 | RANTO SENDHU, SE | Sarana dan prasarana Perikanan tangkap masih minim dan belum memadai (Tambat | nelayan kesulitan berlabuh saat angin utara | Pantai Matras Kelurahan Matras Kecamatan Sungailiat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Ditolak | Dokumen perencanaan, Dok Lingkungan dan Dok PKPRL belum tersedia, | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | labuh/Pelabuhan Perkanan/Alat bantu Penangkapan) | | | | | | | dan memprioritaskan pembangunan jetty yang telah lengkap dokumen pendukung yang telah disiapkan oleh dkp provinsi. Saran jetty bisa dibangun melalui anggaran desa. | | |
| 48339 | 26-01-2023 | RUDI HARTONO | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | Perkebunan sawit foresta, tinggi dan mahalnya harga pupuk | Desa Membalong Kec. Tanjung Pandan, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 48343 | 26-01-2023 | YUS DERAHMAN | Pelebaran Jalan Menuju Standar | Pelebaran jalan Tanjung Gadung | Jalan Tanjung Gadung, Desa Benteng Kota, Kecamatan Tempilang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | bukan dalam kewenangan provinsi | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 48345 | 26-01-2023 | RINGGIT KECUBUNG, S.Pd | belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan | Pembangunan masjid Baiturrahman | Dusun Bangun Jaya Desa Air Kuang Kec. Jebus Kab. Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | Biro Kesejahteran Rakyat | Biro Kesejahteran Rakyat | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | | | | | | | | | |
| 48347 | 26-01-2023 | YUS DERAHMAN | Pelebaran Jalan Menuju Standar | Perbaikan jalan dari Klekak Kabung hingga ke Desa Tegak. | Desa Benteng Kota, Kecamatan Tempilang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | bukan dalam kewenangan provinsi | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 48349 | 26-01-2023 | EDI JUNAIDI FOE | Pengelolaan sekolah belum memadai | Mengharapkan bantuan pembangunan pagar sekolah karena pagar yang lama sudah rusak | SMK N 1 Toboali , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 48351 | 26-01-2023 | HELLYANA, SH | Sarana prasarana pendukung pariwisata belum memadai | kurangnya pengadaan motor untuk menjaga kawasan wisata | kawasan wisata desa air saga, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | BADAN KEUANGAN DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Dinas terkait |
| 48353 | 26-01-2023 | HELLYANA, SH | Pembangunan Jalan & Jembatan | kondisi jalan rusak parah | kavling bintang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | bukan dalam kewenangan provinsi | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 48356 | 26-01-2023 | YUS DERAHMAN | Masih banyaknya kawasan permukiman yang belum terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) seperti jalan lingkungan dan drainase yang belum | Pembuatan drainase dekat pasar desa Jebus, desa Tumbak Petar , dan daerah jembatan Jebus. Drainase ada yang mampet dan di beberapa wilayah tidak ada drainase sama sekali sehingga menyebabkan banjir | Desa Jebus, Kecamatan Jebus, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | Aset Bukan milik Provinsi | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | memadai, serta masih banyaknya rumah tidak layak huni yang ditempati oleh masyarakat. | | | | | | | | | |
| 48359 | 26-01-2023 | YUS DERAHMAN | Kurangnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan provinsi (5 jenis) | Rambu lalu lintas di persimpangan SMA N 1 Jebus sehingga sering terjadi kecelakaan karena tidak adanya rambu-rambu lalu lintas | Desa Jebus, Kecamatan Jebus, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERHUBUNGAN | DINAS PERHUBUNGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverifikasi sesuai kewenangan urusan dan anggaran |
| 48369 | 26-01-2023 | RUDI HARTONO | Luasnya lahan kritis, Tingginya kejadian kebakaran hutan dan lahan dan lahan serta tingginya pemanfaatan kawasan hutan dan hasil hutan secara illegal. | Legalitas lahan hutan pemerintah yang telah menjadi pemukiman warga terutama di Desa Air Mancur | Desa Air Saga Kecamatan Tanjung Pandan, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KEHUTANAN | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Dibahas lebih lanjut oleh Dinas LHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 48375 | 26-01-2023 | RUDI HARTONO | Kurangnya pertambangan yang "good mining practices" di wilayah Belitung | Legalitas reklamasi di Desa Air Saga yang sampai saat ini belum diketahui legalitas dan pemanfaatannya untuk masyarakat | Desa Air Saga, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | Cabang Dinas ESDM Wilayah Belitung | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Ditolak | Legalitas reklamasi bukan kewenangan DESDM | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Dinas ESDM untuk dibahas lebih lanjut |
| 48378 | 26-01-2023 | RUDI HARTONO | Luasnya lahan kritis, Tingginya kejadian kebakaran hutan dan lahan dan lahan serta tingginya pemanfaatan kawasan hutan dan hasil hutan secara illegal. | Batas hutan pemerintah dengan pemukiman masyarakat | Desa Membalong Kec. Tanjung Pandan, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KEHUTANAN | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | Ditolak | Bukan kewenangan provinsi, melainkan kewenangan pusat, di daerah melalui BPKHTL XIII Pangkalpinang Agar berkoordinasi dengan BPKHTL | Validasi Sekretariat Dewan | Dibahas lebih lanjut oleh Dinas LHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48399 | 26-01-2023 | RINGGIT KECUBUNG, S.Pd | Sarana dan prasarana Perikanan tangkap masih minim dan belum memadai (Tambat labuh/Pelabuhan Perkanan/Alat bantu Penangkapan) | Permohonan bantuan mesin kapal sebagai alat tangkap ikan untuk kelompok nelayan Desa Semulut Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung | Desa Semulut Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Ditolak | Pembagian peran kewenangan pemberdayaan nelayan kecil untuk Kapal 0-5GT di Kabupaten/ Kota | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 48435 | 26-01-2023 | RINGGIT KECUBUNG, S.Pd | prasarana pertanian ( JUT, JUP, irigasi, lantai jemur, dll) sub sekotor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan masih minim | bantuan bibit ayam pedaging untuk keompok tani " Gapoktan Tunas Harapan" Desa Telah Parit Tiga | JL. Raya Desa Telak Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 48459 | 26-01-2023 | RUDI HARTONO | Pelebaran Jalan Menuju Standar | Jalan yang belum sesuai dengan standar | Ibul, Badau, Kab. Belitung, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 48493 | 26-01-2023 | TONI PURNAMA, S.IP | Penyediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di fasilitas kesehatan masih kurang | belum tersedianya Gedung ICU,PICU,NICU,PONEK | RS Kriopanting Kec Payung, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KESEHATAN | DINAS KESEHATAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke Dinas Kesehatan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 48514 | 26-01-2023 | RINGGIT KECUBUNG, S.Pd | Masih banyaknya kawasan permukiman yang belum terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) seperti | Bantuan rumah tidak layak huni bagi warga yang kurang mampu | Desa cupat Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Ditolak | Pekerjaan tersebut dilakukan oleh Biro Pemerintah Kabupaten/ Kota | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | jalan lingkungan dan drainase yang belum memadai, serta masih banyaknya rumah tidak layak huni yang ditempati oleh masyarakat. | | | | | | | | | |
| 48533 | 26-01-2023 | BELIADI, S.IP | Perencanaan Jalan & Jembatan | BANYAK JALAN – JALAN DI JALAN RAYA GANTUNG YANG SUDAH RUSAK | JL. RAYA MANGGAR – GANTUNG KECAMATAN GANTUNG KABUPATEN BELITUNG TIMUR, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 48552 | 26-01-2023 | TONI PURNAMA, S.IP | Belum terpenuhinya sarana dan prasarana jaringan internet di kabupaten/Kota | koneksi internet sering tidak tersambung, dimana sistem pekerjaan sekarang di semua sektor menggunakan internet seperti pendidikan, pemerintahan, kesehatan, pertanian dan sebagainya | desa - desa di kecamatan pulau besar, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke dinas terkait |
| 48557 | 26-01-2023 | HERYAWANDI, SE | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | masyarakat mengajukan renovasi masjid Al-Huda Desa Simpang Yul | Desa Simpang Yul, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 48567 | 26-01-2023 | HERYAWANDI, SE | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | masyarakat mengajukan pembangunan shiring pembuangan air dekat masjid simpang yul | Desa Simpang Yul.Kecamatan tempilang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 48583 | 26-01-2023 | HERYAWANDI, SE | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | masyarakat mengajukan renovasi masjid dusun Nyikep Desa penyampak | Dusun Nyikep,Desa Penyampak, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 48590 | 26-01-2023 | HERYAWANDI, SE | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | masyarakat mengajukan renovasi Masjid Dusun Luenc,Desa simpang Yul | Dusun Luenc,Desa Simpang Yul, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 48592 | 26-01-2023 | TONI PURNAMA, S.IP | Masih banyaknya kawasan permukiman yang belum | masih banyak warga yang tidak mampu belum mempunyai rumah layak huni | desa - desa di kecamatan payung, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN | Ditolak | Pekerjaan tersebut dilakukan oleh Biro Pemerintah | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) seperti jalan lingkungan dan drainase yang belum memadai, serta masih banyaknya rumah tidak layak huni yang ditempati oleh masyarakat. | | | | | MASYARAKAT DESA | | Kabupaten/ Kota | | sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 48595 | 26-01-2023 | HERYAWANDI, SE | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | masyarakat mengajukan pembangunan Masjid Dusun Ganjan Desa dendang | Dusun Ganjan,Desa Dendang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 48598 | 26-01-2023 | RINGGIT KECUBUNG, S.Pd | Belum terpenuhinya UHC (Universal Health Coverage) atau jaminan kesehatan | Bantuan Iuran Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional PBPU dan BP Pemda Bangka Barat | Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat JL. Daya Baru Pal 4 , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KESEHATAN | DINAS KESEHATAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke Dinas Kesehatan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 48603 | 26-01-2023 | HERYAWANDI, SE | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | masyarakat mengajukan renovasi masjid Dusun Juruh desa Dendang | Dusun Juruh, Desa dendang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 48607 | 26-01-2023 | HERYAWANDI, SE | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | masyarakat mengajukan renovasi masjid dusun Sungkai desa tugang | dusun Sungkai,Desa Tugang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 48615 | 26-01-2023 | HERYAWANDI, SE | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | masyarakat mengajukan renovasi masjid Desa telak | desa telak,, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 48624 | 26-01-2023 | HERYAWANDI, SE | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | masyarakat mengajukan renovasi masjid desa sinar sari | desa Sinar sari, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 48637 | 26-01-2023 | RUDI HARTONO | prasarana pertanian ( JUT, JUP, irigasi, lantai jemur, dll) sub sekotor tanaman pangan, hortikultura, | Masih banyaknya program-program dari pemerintah daerah tentang pertanian yang tidak diketahui oleh masyarakat | Desa Perawas Kec. Tanjung Pandan, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | perkebunan dan peternakan masih minim | | | | | | | | | |
| 48640 | 26-01-2023 | FERDIYANSYAH, A.Md | Lampu Penerangan Jalan | pemasangan lampu jalan karna sering terjadi kecelakaan dan adanya transaksi narkoba digang yang gelap serta lampu jalan yang ada kebanyakan sudah rusak | kecamatan gerunggang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERHUBUNGAN | DINAS PERHUBUNGAN | Ditolak | Kewenangan Kota Pangkalpinang, Sesuai Status Jalan | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverifikasi sesuai kewenangan urusan dan anggaran |
| 48651 | 26-01-2023 | RUDI HARTONO | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | Masih banyaknya pengiriman bumbu dapur dari luar (seperti lengkuas, kunyit dll) sedangkan penanaman dapat dilakukan dihalaman rumah setiap masyarakat | Desa Perawas Kec. Tanjung Pandan, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 48657 | 26-01-2023 | RUDI HARTONO | prasarana pertanian ( JUT, JUP, irigasi, lantai jemur, dll) sub sekotor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan masih minim | Harga ternak yang selalu dibawah harga pokok produksi menyebabkan para peternak merugi | Desa Perawas Kecamatan Tanjung Pandan, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 48664 | 26-01-2023 | FERDIYANSYAH, A.Md | Masih banyaknya kawasan permukiman yang belum terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) seperti jalan lingkungan dan drainase yang belum memadai, serta | sering terjadinya banjir dibelakang SD 3 Kota Pangkalpinang | Belakang SD 3 Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | masih banyaknya rumah tidak layak huni yang ditempati oleh masyarakat. | | | | | | | | | |
| 48665 | 26-01-2023 | HERYAWANDI, SE | Keterbatasan daya tampung sekolah | Pengajuan Ruang Kelas untuk PAUD di TK Cendrawasih Tempilang | PAUD Cendrawasih Desa Tempilang Kab. Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 48672 | 26-01-2023 | RUDI HARTONO | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | Masih banyaknya pengiriman ayam dan bebek dari luar Pulau Bangka Belitung | Desa Perawas, Desa Air Merbau Kec. Tanjung Pandan dan Desa Batu Itam Kec. Sijuk, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 48678 | 26-01-2023 | HERYAWANDI, SE | Keterbatasan daya tampung sekolah | Pengajuan Renovasi gedung Taman Kanak-Kanak dan Kondisi bangunan perlu direnovasi | PAUD Cendrawasih Desa Tempilang Kab. Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 48680 | 26-01-2023 | FERDIYANSYAH, A.Md | Pembangunan Sarana Prasarana Masyarakat | pemanfaatan lahan kosong seluas 5,3 Ha milik kota Pangkalpinang untuk dijadikan RTH | RT 06 Kelurahan Air Kepala Tujuh , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 48683 | 26-01-2023 | RUDI HARTONO | Lampu Penerangan Jalan | Tidak ada lampu jalan di sepanjang jalan desa bantan, simpang rusa dan lassar rawan terjadi kecelakaan | Desa Bantan, Desa Simpang Rusa dan Desa Lassar, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERHUBUNGAN | DINAS PERHUBUNGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverifikasi sesuai kewenangan urusan dan anggaran |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48686 | 26-01-2023 | HERYAWANDI, SE | Pengelolaan sekolah belum memadai | Kurang tersedianya ATK untuk bahan praktek anak-anak | PAUD Cendrawasih Desa Tempilang Kab. Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 48700 | 26-01-2023 | FERDIYANSYAH, A.Md | Kurangnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan provinsi (5 jenis) | sering terjadinya kecelakaan karena tidak adanya rambu-rambu lalu lintas (lensa cembung) | simpang pesantren Darul Muhabbah dan RT 01 Kelurahan Air Kepala Tujuh, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERHUBUNGAN | DINAS PERHUBUNGAN | Ditolak | Kewenangan Kota Pangkalpinang | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverifikasi sesuai kewenangan urusan dan anggaran |
| 48711 | 26-01-2023 | HERYAWANDI, SE | Butuh banyak pendampingan oleh konsultan Plut KUKM terhadap UMKM yang sebarannya tidak merata antara di desa dan kota | Mengajukan Lahan Khusus di Desa Tempilang untuk UMKM yang peruntukkannya dikhususkan untuk Wisata kuliner Desa Tempilang | Desa Tempilang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD |
| 48717 | 26-01-2023 | FERDIYANSYAH, A.Md | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Kurangnya kuota yang didapatkan, hanya 15% | Kecamatan Gerunggang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 48726 | 26-01-2023 | RUDI HARTONO | banyaknya dokumen rencana pengelolaan hutan RKTP dan sistem informasi tata hutan yang perlu direview | Masalah SK Tahura terkait dengan struktur mengelola kawasan hutan yang mandek di Kementerian | Desa Perawas Kecamatan Tanjung Pandan, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KEHUTANAN | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | Ditolak | Pengelolaan Tahura bukan kewenangan provinsi, Pemerintah kabupaten agar lebik aktif berkoordinasi dengan KLHK | Validasi Sekretariat Dewan | Dibahas lebih lanjut oleh Dinas LHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 48730 | 26-01-2023 | FERDIYANSYAH, A.Md | Masih banyaknya kawasan permukiman | jalan belum diaspal | Jl. Kurma Rt.08 Kelurahan Air Kepala Tujuh, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN | Ditolak | akan di survey terlebih dahulu | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | yang belum terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) seperti jalan lingkungan dan drainase yang belum memadai, serta masih banyaknya rumah tidak layak huni yang ditempati oleh masyarakat. | | | | | RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | | terkait aset jalan dan kondisi jalan | | diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 48741 | 26-01-2023 | HERYAWANDI, SE | Pembangunan Sarana Prasarana Masyarakat | Mengajukan Pembangunan Kantor Desa Terpadu | Desa Tempilang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | Lahan dan Aset bukan milik Provinsi | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 48742 | 26-01-2023 | FERDIYANSYAH, A.Md | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | banyak alat praktik yang sudah rusak yang mesti dilakukan peremajaan dan pergantian unit baru | SMK N 2 Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 48755 | 26-01-2023 | FERDIYANSYAH, A.Md | masih kurangnya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan | banyak guru yang mau pensiun sehingga sekolah kekurangan guru, khususnya guru kejuruan | SMK N 2 Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 48761 | 26-01-2023 | HERYAWANDI, SE | Perencanaan, Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai | Pengajuan pembuatan jalan di pesisir pantai | Desa tempilang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | Bukan kewenangan pupr prkp provinsi | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | ketersediaan anggarannya |
| 48774 | 26-01-2023 | HERYAWANDI, SE | Pengelolaan sekolah belum memadai | Mengajukan Pembangunan Tempat untuk Penjaga Sekolah dan Asrama untuk guru yang yang berdomisili di Pangkalpinang | SMKN 1 Kelapa, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 48789 | 26-01-2023 | HERYAWANDI, SE | Pengelolaan sekolah belum memadai | Mengajukan tambahan bantuan modal untuk Siswa/siswi untuk mendidik siswa/siswi berwirausaha di bidang pertanian | SMKN 1 Kelapa, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 48795 | 26-01-2023 | HERYAWANDI, SE | Pengelolaan sekolah belum memadai | Mengajukan pembuatan jalan aspal dari depan Gerbang menuju ke sekolah | SMKN 1 Kelapa, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 48843 | 26-01-2023 | TONI PURNAMA, S.IP | Masih banyaknya kawasan permukiman yang belum terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) seperti jalan lingkungan dan drainase yang belum memadai, serta masih banyaknya rumah tidak layak huni yang ditempati oleh masyarakat. | banyaknya jalan - jalan yang belum mempunyai siring/ drainase sehingga apabila hujan air masuk ke rumah serta fasilitas umum yang tidak terawat | desa - desa di kecamatan payung, kecamatan pulau besar dan kecamatan simpang rimba, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | drainase jalan termasuk bangunan pendukung jalan, sehingga penyediaan drainase termasuk pada pekerjaan peningkatan jalan tersebut, sementara aset jalan tersebut bukan aset PSU Provinsi. | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 48846 | 26-01-2023 | HERYAWANDI, SE | Keterbatasan daya tampung sekolah | Mengajukan tambahan Laboratorium pertanian untuk kegiatan praktek siswa/siswi jurusan pengolahan hasil pertanian | SMKN 1 Kelapa, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 48860 | 26-01-2023 | EDI JUNAIDI FOE | Sarana Prasarana pendidikan | bangunan mushola belum memadai | SMK N1 Toboali, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | | | | | | | | | untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 48861 | 26-01-2023 | HERYAWANDI, SE | Pengelolaan sekolah belum memadai | Mengajukan bantuan alat-alat praktek pertanian antara lain traktor, cangkul , pupuk dll untuk menunjang kegiatan praktek siswa/siswi. | SMKN 1 kelapa, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 48871 | 26-01-2023 | EDI JUNAIDI FOE | Pengelolaan sekolah belum memadai | perluasan lahan parkir sekolah | SMK N1 Toboali, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 48890 | 26-01-2023 | HERYAWANDI, SE | belum optimalnya Kebijakan bidang perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah yang tersusun | Megajukan bantuan transportasi khusus Guru dari Pangkalpinang ke Mentok PP, karena kendaraan umum (bus) Pangkalpinang - Mentok yg ada sangat terbatas. | SMKN 1 Kelapa, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan | DINAS PERHUBUNGAN | Ditolak | Pengusulan Melalui Mekanisme hibah Kepala Daerah | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 48891 | 26-01-2023 | EDI JUNAIDI FOE | Keterbatasan daya tampung sekolah | membutuhkan tambahan meja, kursi, dan pendingin ruangan | SMK N1 Toboali, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 48893 | 26-01-2023 | HERYAWANDI, SE | Kompetensi guru masih kurang | Mengajukan Permintaan bantuan guru pendidik untuk program study Pengolahan Hasil Pertanian. | SMKN 1 Kelapa, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 48896 | 26-01-2023 | HERYAWANDI, SE | Keterbatasan daya tampung sekolah | Mengajukan Permintaan bantuan ruang kelas | SMKN 1 Kelapa, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 48897 | 26-01-2023 | ADET, SH., MH | Pengelolaan sekolah belum memadai | Tidak ada pagar sekolah | SDN 3 Desa Sungkap di Desa Sungkap Kecamatan Simpang | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Katis, Provinsi Bangka Belitung | | | | | | | untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 48903 | 26-01-2023 | EDI JUNAIDI FOE | Pengelolaan sekolah belum memadai | membutuhkan 1 buah bus sekolah | SMK N1 Toboali, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 48906 | 26-01-2023 | ADET, SH., MH | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | Kurangnya dana untuk pembangunan masjid | Desa Sungkap Kecamatan Simpang Katis, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 48910 | 26-01-2023 | HERYAWANDI, SE | Permasalahan pertanahan (status lahan) yang belum jelas untuk berinvestasi | Permintaan lokasi lahan tanah yang subur untuk dijadikan lahan praktek pertanian.Kurangnya lahan subur untuk dijadikan lahan praktek, lahan yang ada masih belum maksimal dan berdampingan dengan lahan milik perusahaan | SMKN 1 Kelapa, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke dinas terkait |
| 48920 | 26-01-2023 | EDI JUNAIDI FOE | Pengelolaan sekolah belum memadai | membutuhkan pembangunan sarana dan prasarana sekolah untuk mengantipasi datangnya banjir | SMK N1 Toboali, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 48924 | 26-01-2023 | ADET, SH., MH | Masih banyaknya kawasan permukiman yang belum terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) seperti jalan lingkungan dan drainase yang belum memadai, serta masih banyaknya rumah tidak layak huni yang ditempati oleh masyarakat. | Sering banjir | RT 02 dan RT 03 Desa Sungkap Kecamatan Simpang Katis, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48926 | 26-01-2023 | HERYAWANDI, SE | Belum maksimalnya kelompok masyarakat yang mendayagunakan teknologi tepat guna (TTG) | Mengajukan bantuan fasilitas penunjang untuk mengembangkan teknologi pertanian | SMKN 1 Kelapa, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan keperangkat daerah terkait |
| 48930 | 26-01-2023 | ADET, SH., MH | Masih banyaknya kawasan permukiman yang belum terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) seperti jalan lingkungan dan drainase yang belum memadai, serta masih banyaknya rumah tidak layak huni yang ditempati oleh masyarakat. | Adanya keluhan masyarakat terhadap pembuangan limbah | RT 06 dan RT 03 Desa Sungkap Kecamatan Simpang Katis, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | PSU Perumahan untuk kewenangan Kabupaten/ Kota | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 48933 | 26-01-2023 | HERYAWANDI, SE | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | Mengajukan Pembangunan Mushola Sekolah | SMKN 1 Simpang Teritip, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 48939 | 26-01-2023 | HERYAWANDI, SE | Keterbatasan daya tampung sekolah | Mengajukan pembangunan Ruang Osis, Ruang BK dan Ruang Kesiswaan. | SMKN 1 Simpang Teritip, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 48943 | 26-01-2023 | YUS DERAHMAN | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Tidak tersedianya alat drum band di SMA N 1 Jebus sebagai bagian dari kegiatan ekstrakulikuler siswa. Selama ini dalam berbagai event atau kegiatan di Kecamatan Jebus sering menyewa drumb band dari sekolah di Kecamatan Kelapa | SMAN 1 Jebus, Desa Jebus, Kecamatan Jebus, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48947 | 26-01-2023 | EDI JUNAIDI FOE | Pengelolaan sekolah belum memadai | bantuan tambahan buku baru, terutama buku fisika dan biologi | SMK N1 Toboali, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 48949 | 26-01-2023 | ADET, SH., MH | Butuh banyak pendampingan oleh konsultan Plut KUKM terhadap UMKM yang sebarannya tidak merata antara di desa dan kota | Kurangnya pelatihan | Koperasi Wanita Flamboyan Desa Sungkap Kecamatan Simpang Katis, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke PD |
| 48957 | 26-01-2023 | HERYAWANDI, SE | Keterbatasan daya tampung sekolah | Mengajukan pembangunan Gerbang dan Pagar Sekolah. | SMKN 1 Simpang teritip, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 48962 | 26-01-2023 | ADET, SH., MH | Pembangunan Jalan & Jembatan | Jalan sudah rusak parah | Desa sarang mandi - desa romadon dan desa air medang di desa sarang mandi kecamatan sungaiselan, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | bukan kewenangan provinsi | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 48965 | 26-01-2023 | EDI JUNAIDI FOE | Pengelolaan sekolah belum memadai | membutuhkan perangkat tambahan drumband | SMK N1 Toboali, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 48968 | 26-01-2023 | HERYAWANDI, SE | Pengelolaan sekolah belum memadai | Mengajukan pembuatan Sumur Bor/ Sumur Gali | SMKN 1 Simpang Teritip, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 48970 | 26-01-2023 | EDI JUNAIDI FOE | Keterbatasan daya tampung sekolah | membutuhkan bantuan sertifikasi buku pelaut bagi taruna-taruni | SMK N1 Tukak Sadai , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48971 | 26-01-2023 | ADET, SH., MH | Masih banyaknya kawasan permukiman yang belum terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) seperti jalan lingkungan dan drainase yang belum memadai, serta masih banyaknya rumah tidak layak huni yang ditempati oleh masyarakat. | Sering banjir saat hujan | RT 01 s.d. RT 10 Desa Sarang Mandi Kecamatan Sungaiselan, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 48975 | 26-01-2023 | EDI JUNAIDI FOE | Pengelolaan sekolah belum memadai | membutuhkan bus sekolah | SMK N1 Tukak Sadai , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 48976 | 26-01-2023 | HERYAWANDI, SE | Pengelolaan sekolah belum memadai | Mengajukan Pembuatan Laboratorium Bahasa Indonesia, Lab Fisika, Lab. Kimia, Lab. Bahasa Inggris beserta peralatan laboratorium. | SMKN 1 Simpang Teritip, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 48980 | 26-01-2023 | YUS DERAHMAN | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Rumah Kompos dalam persiapan perlombangaan tingkat nasional. Rumah kompos sebagai bagian syarat perlombaan saat ini kondisinya sudah hamper roboh dan tidak layak | SMAN 1 Jebus, Desa Jebus, Kecamatan Jebus, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 48982 | 26-01-2023 | EDI JUNAIDI FOE | Keterbatasan daya tampung sekolah | membutuhkan perluasan tanah/lahan sekolah | SMK N1 Tukak Sadai , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 48990 | 26-01-2023 | EDI JUNAIDI FOE | Pengelolaan sekolah belum memadai | membutuhkan perluasan lahan mushola karena kurangnya | SMK N1 Tukak Sadai , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | daya tampung taruna-taruni untuk menjalankan ibadah | | | | | | | | untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 48991 | 26-01-2023 | YUS DERAHMAN | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | Pengadaan Kembali pupuk subsidi untuk tanaman lada, kakret, dan sawit. Pupuk subsidi dicabut dan petani merasakan harga pupuk mahal | Desa Jebus, Desa Cupat, Desa Telak, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 48994 | 26-01-2023 | EDI JUNAIDI FOE | Pengelolaan sekolah belum memadai | membutuhkan perluasan lahan parkir sekolah | SMK N1 Tukak Sadai , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 48995 | 26-01-2023 | HERYAWANDI, SE | Masih banyaknya kawasan permukiman yang belum terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) seperti jalan lingkungan dan drainase yang belum memadai, serta masih banyaknya rumah tidak layak huni yang ditempati oleh masyarakat. | Mengajukan pembuatan talud sekolah | SMKN 1 Simpang Teritip, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 49005 | 26-01-2023 | ADET, SH., MH | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman | Masyarakat banyak tidak mendapatkan pupuk bersubsidi | Desa Sarang Mandi Kecamatan Sungaiselan, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | | | | | | | | | |
| 49010 | 26-01-2023 | EDI JUNAIDI FOE | Pengelolaan sekolah belum memadai | bantuan pembangunan pagar sekolah | SMK N1 Tukak Sadai , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 49014 | 26-01-2023 | EDI JUNAIDI FOE | Pengelolaan sekolah belum memadai | membutuhkan tambahan meja, kursi, dan pendingin ruangan | SMK N1 Tukak Sadai , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 49015 | 26-01-2023 | ADET, SH., MH | Masih banyaknya kawasan permukiman yang belum terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) seperti jalan lingkungan dan drainase yang belum memadai, serta masih banyaknya rumah tidak layak huni yang ditempati oleh masyarakat. | Pemasangan pasar kubur | Desa Sarang Mandi Kecamatan Sungaiselan, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | Lahan dan Aset bukan milik Provinsi | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 49019 | 26-01-2023 | HERYAWANDI, SE | Pembangunan Sarana Prasarana Masyarakat | Mengajukan pembangunan Ruang Pertemuan / Ruang Serba Guna | SMKN 1 Simpang Teritip, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 49023 | 26-01-2023 | ADET, SH., MH | Masih banyaknya kawasan | Pemasangan pagar karena kondisi dipinggir | Perbatasan desa keretak ke desa sarang mandi di desa sarang mandi kecamatan | Kabupaten / Kota | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN | DINAS PEKERJAAN UMUM | Ditolak | memfasilitasi masyarakat | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | permukiman yang belum terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) seperti jalan lingkungan dan drainase yang belum memadai, serta masih banyaknya rumah tidak layak huni yang ditempati oleh masyarakat. | | sungaiselan, Provinsi Bangka Belitung | | KAWASAN PERMUKIMAN | PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | | MC/K di sungai tidak sesuai dengan pelayanan pemerintah. | | untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 49039 | 26-01-2023 | ADET, SH., MH | Pembangunan Jalan & Jembatan | Pengaspalan jalan karena sering terjadi banjir sehingga air masuk keperkarangan sekolah | SDN 4 Sungai Selan Desa Sarang Mandi Kecamatan Sungaiselan, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | masuk kedalam kewenangan kabupaten | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 49042 | 26-01-2023 | EDI JUNAIDI FOE | Pengelolaan sekolah belum memadai | membutuhkan ruang UKS, BK, dan Gedung Osis | SMK N1 Tukak Sadai , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 49052 | 26-01-2023 | HERYAWANDI, SE | Kompetensi guru rendah | Mengajukan pembangunan ruang guru | SMKN 1 Simpang Teritip, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 49074 | 26-01-2023 | HERYAWANDI, SE | Masih terbatasnya sarana dan prasarana kepemudaan | Mengajukan pembuatan parkir kendaraan siswa | SMKN 1 Simpang Teritip, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Untuk ditindaklanjuti . |
| 49085 | 26-01-2023 | HERYAWANDI, SE | Kompetensi guru masih kurang | Permintaan guru Produktif Pengelasan sebanyak 3 orang, guru Produktif DPB sebanyak 1 orang, guru matematika sebanyak 1 orang dan guru kimia. | SMKN 1 Simpang Teritip, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49086 | 26-01-2023 | ADET, SH., MH | Masih kurangnya ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga | Masyarakat menginginkan adanya pembangunan tempat olahraga untuk pemuda pemudi | Desa Teru Kecamatan Simpang Katis, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Untuk ditindaklanjuti. |
| 49092 | 26-01-2023 | HERYAWANDI, SE | Kompetensi guru masih kurang | permintaan Laboran bengkel sebanyak 2 orang, laboran perpustakaan sebanyak 1 orang, tukang kebun sebanyak 2 orang, satpam sekolah sebanyak 1 orang, OB sekolah sebanyak 1 orang | SMKN 1 Simpang Teritip, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 49096 | 26-01-2023 | ADET, SH., MH | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | Kekurangan dana untuk pembangunan masjid | Desa Teru Kecamatan Simpang Katis, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 49101 | 26-01-2023 | ADET, SH., MH | Masih banyaknya kawasan permukiman yang belum terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) seperti jalan lingkungan dan drainase yang belum memadai, serta masih banyaknya rumah tidak layak huni yang ditempati oleh masyarakat. | Kondisi jalan sudah rusak parah berlobang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas | Desa Teru Kecamatan Simpang Katis, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | jalan bukan aset provinsi | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 49105 | 26-01-2023 | HERYAWANDI, SE | Pembangunan Sarana Prasarana Masyarakat | Remaja Masjid Desa Buyan Kelumbi meminta bantuan Soundsystem untuk di Masjid Desa Buyan kelumbi dan juga Seragam Rompi untuk Panitia Kegiatan Masjid . | Masjid Buyan Kelumbi, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Biro Kesejahteran Rakyat | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49114 | 26-01-2023 | HERYAWANDI, SE | Pembangunan Sarana Prasarana Masyarakat | Ibu-ibu PKK Desa Buyan Kelumbi meminta bantuan Speaker / sound system, Baju seragam untuk ibu-ibu Majelis Taqlim dan Gendang Rebana. | Desa Buyan Kelumbi, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Ditolak | Keg PKK di dinsospmd prov bersifat pembinaan kelembagaan,tidak ada akun belanja modal, agar diusulkan melalui kab Babar | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 49115 | 26-01-2023 | ADET, SH., MH | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | Kekurangan dana untuk pembangunan masjid | Desa Romadon Kecamatan Sungai Selan, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 49119 | 26-01-2023 | ADET, SH., MH | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | Minimnya peralatan pertanian | Desa Teru Kecamatan Simpang Katis, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 49121 | 26-01-2023 | YUS DERAHMAN | Masih kurangnya ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga | Pagar lapangan bola dusun Kerang . Menganggu aktivitas bermain bola dan terkena rumah warga | Dusun Kerang, Desa Jebus, Kecamatan Jebus, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Untuk ditindaklanjuti . |
| 49128 | 26-01-2023 | YUS DERAHMAN | Masih kurangnya ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga | Lampu lapangan bola desa Jebus. Menganggu aktivitas pemantauan aktivitas masyarakat di malam hari | Lapangan Bola Desa Jebus, Kecamatan Jebus, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Untuk ditindaklanjuti . |
| 49132 | 26-01-2023 | YUS DERAHMAN | PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN | PAM tidak hidup lagi. Susah dalam mendapatkan sumber air di musim kemarau | Desa Jebus, Kecamatan Jebus, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN | Ditolak | Tahun 2023 ada kegiatan Perluasan Jaringan SPAM dari | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | AIR MINUM | | | | | PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | | BPPW di jebus dan pemasangan SR | | sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 49150 | 26-01-2023 | ADET, SH., MH | Luasnya lahan kritis, Tingginya kejadian kebakaran hutan dan lahan dan lahan serta tingginya pemanfaatan kawasan hutan dan hasil hutan secara illegal. | Tidak adanya sosialisasi tentang batas hutan kepada masyarakat | Desa Romadon Kecamatan Sungaiselan, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KEHUTANAN | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Dibahas lebih lanjut oleh Dinas LHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 49163 | 26-01-2023 | ADET, SH., MH | Masih kurangnya fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa | Kepada Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten untuk dapat memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan desa untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat | Desa Romadon Kecamatan Sungaiselan, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah |
| 49173 | 26-01-2023 | ADET, SH., MH | Masih banyaknya kawasan permukiman yang belum terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) seperti jalan lingkungan dan drainase yang belum memadai, serta masih banyaknya rumah tidak layak huni yang ditempati oleh masyarakat. | Adanya keluhan masyarakat terhadap pembuangan limbah | Desa Romadon Kecamatan Sungaiselan, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49180 | 26-01-2023 | ADET, SH., MH | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | Masyarakat dianjurkan pemerintah untuk berkebun tetapi masyarakat kesulitan mendapatkan pupuk | Desa Romadon Kecamatan Sungaiselan, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 49188 | 26-01-2023 | ADET, SH., MH | prasarana pertanian ( JUT, JUP, irigasi, lantai jemur, dll) sub sekotor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan masih minim | Pemasangan portal di perusahaan sawit harus ada pos karena jalan tersebut merupakan jalan utama perkebunan masyarakat | Desa Romadon Kecamatan Sungaiselan, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 49194 | 26-01-2023 | ADET, SH., MH | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | Bantuan dari pemerintah kabupaten untuk tanam tumbuh dipekarangan rumah untuk diganti jenis kelapa hibrida | Desa Romadon Kecamatan Sungaiselan, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 49198 | 26-01-2023 | YUS DERAHMAN | Sarana dan prasarana Perikanan tangkap masih minim dan belum memadai (Tambat labuh/Pelabuhan Perkanan/Alat bantu Penangkapan) | Fokus perbaikan dan pengembangan Pelabuhan. Kondisi rusak dan tidak terawat | Desa Cupat, Kecamatan Parittiga, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Ditolak | Dokumen Perencanaan, Dok Lingkungan dan Dok PKPRL belum tersedia. Masih terdapat PRDED yang belum dilaksanakan, DKP | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Provinsi fokus pada yg telah readyness creteria | | |
| 49203 | 26-01-2023 | YUS DERAHMAN | masih terbatasnya beasiswa bagi siswa | Beasiswa provinsi diharapkan include dengan uang saku. Orang tua siswa yang kurang mampu masih kesulitan dalam memberikan uang saku kepada anaknya yang sekolah atau kuliah | Desa Cupat, Kecamatan Parittiga, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 49210 | 26-01-2023 | ADET, SH., MH | Masih rendahnya pengembangan hasil hutan kayu dari hutan tanaman dan rendahnya pengembangan hasil hutan bukan kayu dari hasil budidaya | Masyarakat kesulitan mengelola hutan dalam kawasan hutan | Desa Katis Kecamatan Simpang Katis, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KEHUTANAN | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Dibahas lebih lanjut oleh Dinas LHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 49218 | 26-01-2023 | ADET, SH., MH | Pembangunan Jalan & Jembatan | Kondisi sudah rusak | RT 01 Desa Katis Kecamatan simpang katis, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | bukan kewenangan provinsi | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 49219 | 26-01-2023 | YUS DERAHMAN | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Kesejahteraan supir dan service bus sekolah di optimalkan lagi. Supir bus sekolah kini tidak di gaji, tidaka ada uang bensin, dan tidak ada anggaran service berkala bus | Desa Cupat, Kecamatan Parittiga, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 49222 | 26-01-2023 | ADET, SH., MH | Masih banyaknya kawasan permukiman yang belum terfasilitasi Prasarana, Sarana dan | Masyarakat menginginkan untuk dibangun tempat pemandian umum | Desa Katis Kecamatan Simpang Katis, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Utilitas Umum (PSU) seperti jalan lingkungan dan drainase yang belum memadai, serta masih banyaknya rumah tidak layak huni yang ditempati oleh masyarakat. | | | | | KAWASAN PERMUKIMAN | | | | ketersediaan anggarannya |
| 49228 | 26-01-2023 | ADET, SH., MH | Masih banyaknya kawasan permukiman yang belum terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) seperti jalan lingkungan dan drainase yang belum memadai, serta masih banyaknya rumah tidak layak huni yang ditempati oleh masyarakat. | Pemasangan pagar perkuburan | Desa Katis Kecamatan Simpang Katis, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Biro Kesejahteran Rakyat | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 49231 | 26-01-2023 | EDI JUNAIDI FOE | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | kelompok tani bina sejahtera mebutuhkan bantuan perlatan dan perlengkapan untuk perkebunan porang | Jl. Dr. Wahidin kampung Bukit, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 49232 | 26-01-2023 | ADET, SH., MH | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | Kurangnya dana untuk pembangunan masjid | Desa Beruas Kecamatan Simpang Katis, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49236 | 26-01-2023 | EDI JUNAIDI FOE | Pembangunan Sarana Prasarana Masyarakat | membutuhkan pembangunan pagar kantor DPC NU | Jl. Teladan Toboali, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Biro Kesejahteran Rakyat | Ditolak | PSU Perumahan untuk kewenangan Kabupaten/ Kota | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 49239 | 26-01-2023 | YUS DERAHMAN | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Pembangunan pagar sekolah dasar. Pagar SD Telak roboh akibat dari pelebaran jalan yang dilakukan | Desa Telak, Kecamatan Parittiga, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 49244 | 26-01-2023 | YUS DERAHMAN | Belum terpenuhinya sarana dan prasarana jaringan internet di kabupaten/Kota | Pengembangan sistem jaringan seluler dari beberapa provider. Susah sinyal sehingga berakibat pada pembelajaran Pendidikan dan aktivitas lain yang memerlukan jaringan internet | Desa Telak, Kecamatan Parittiga, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke dinas terkait |
| 49246 | 26-01-2023 | EDI JUNAIDI FOE | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | bantuan pembangunan bangunan utama, wc/tempat wudhu, pagar, dan balai Masjid Ar-Rozzaq | Jl. Melayu RT. 001/ RW. 006, Kel. Teladan, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 49249 | 26-01-2023 | YUS DERAHMAN | Kurangnya pertambangan yang "good mining practices" di wilayah Bangka Barat | Kenaikan harga jual timah dan tidak ada Razia tambang masyarakat. Susah dalam menjual timah dan muncul rasa tidak aman dalam bekerja akibat munculnya isu Razia tambang timah | Desa Telak, Kecamatan Parittiga, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | Cabang Dinas ESDM Wilayah Bangka Barat | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Ditolak | Setiap pemilik tambang harus memiliki IUJP | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Dinas ESDM untuk dibahas lebih lanjut |
| 49250 | 26-01-2023 | EDI JUNAIDI FOE | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | membutuhkan pembangunan pagar Masjid Al-Fithrah | Jl. AMD. RT 09/ RW. 06 Teladan Toboali, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 49263 | 26-01-2023 | ADET, SH., MH | Redistribusi Tanah | Konsidi sekolah berdempetan dengan rumah warga sehingga diusulkan sekolah untuk dipindahkan | Desa Beruas Kecamatan Simpang Katis, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | ketersediaan anggarannya |
| 49265 | 26-01-2023 | EDI JUNAIDI FOE | Keterbatasan daya tampung sekolah | membutuhkan aula pertemuan sekolah | SMK N1 Toboali, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 49270 | 26-01-2023 | ADET, SH., MH | Masih banyaknya kawasan permukiman yang belum terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) seperti jalan lingkungan dan drainase yang belum memadai, serta masih banyaknya rumah tidak layak huni yang ditempati oleh masyarakat. | Jalan sudah banyak pemukiman penduduk | RT 08 Desa Beruas Kecamatan Simpang Katis, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 49271 | 26-01-2023 | EDI JUNAIDI FOE | Keterbatasan daya tampung sekolah | membutuhkan laboratorium simulator nautika | SMK N1 Tukak Sadai Toboali, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 49279 | 26-01-2023 | H. MULYADI | Peningkatan keselamatan angkutan dan jalan | bantuan shiring jalan/jalan rusak | desa lampur, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERHUBUNGAN | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | sudah masuk kedalam pemeliharaan rutin jalan | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverifikasi sesuai kewenangan urusan dan anggaran |
| 49281 | 26-01-2023 | H. MULYADI | Pelebaran Jalan Menuju Standar | pergantian sertifikat akibat pelabaran jalan | desa lampur, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Biro Pemerintahan | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | dan ketersediaan anggarannya |
| 49283 | 26-01-2023 | H. MULYADI | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | bantuan pupuk subsidi | desa lampur, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 49288 | 26-01-2023 | H. MULYADI | Peningkatan keselamatan angkutan dan jalan | ASPAL JALAN SERING TERJADINYA KECELAKAN | DESA LAMPUR, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERHUBUNGAN | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverifikasi sesuai kewenangan urusan dan anggaran |
| 49290 | 26-01-2023 | H. MULYADI | Peningkatan keselamatan angkutan dan jalan | ASPAL JALAN YANG BELU DIASPAL AKIBAT SERING TERJADI KECELAKAAN | DESA PERLANG, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERHUBUNGAN | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | masuk kedalam kegiatan apbd tahun 2023 | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverifikasi sesuai kewenangan urusan dan anggaran |
| 49292 | 26-01-2023 | H. MULYADI | Masih banyaknya kawasan permukiman yang belum terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) seperti jalan lingkungan dan drainase yang belum memadai, serta masih banyaknya | PEMASANGAN DRAINASE/SHIRING YANG RUSAK KEBANJIRAN | DESA PERLANG, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | aset jalan bukan aset provinsi | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | rumah tidak layak huni yang ditempati oleh masyarakat. | | | | | | | | | |
| 49297 | 26-01-2023 | H. MULYADI | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | BANTUAN PUPUK SUBSIDI KETERBATASAN PUPUK BAGI MASYARAKAT | DESA PERLANG, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 49342 | 26-01-2023 | ADET, SH., MH | Masih banyaknya kawasan permukiman yang belum terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) seperti jalan lingkungan dan drainase yang belum memadai, serta masih banyaknya rumah tidak layak huni yang ditempati oleh masyarakat. | Kondisi jalan mudah banjir | Desa Beruas Kecamatan Simpang Katis, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | aset jalan bukan aset provinsi | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 49346 | 26-01-2023 | ADET, SH., MH | Pembangunan Jalan & Jembatan | Sering terjadi kecelakaan karena kondisi jalan miring | SDN 2 Beruas Desa Beruas Kecamatan Simpang Katis, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | kewenangan kabupaten | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 49357 | 26-01-2023 | ADET, SH., MH | Sarana pertanian ( ketersediaan | Bantuan pupuk subsidi untuk tanaman holtikultura | Desa Beruas Kecamatan simpang katis, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN | Diteruskan ke Musrenbang | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | | | | | KETAHANAN PANGAN | Provinsi/Kabupaten/Kota | | | |
| 49367 | 26-01-2023 | ADET, SH., MH | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | Sudah disurvey tetapi sampai saat ini belum ada bantuan bibit sapi | Desa Teru Kecamatan Simpang Katis, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 49372 | 26-01-2023 | H. MULYADI | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | pengajuan untuk bantuan sarana dan prasarana | desa tanjung pura, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 49380 | 26-01-2023 | ADET, SH., MH | masih rendahnya kepatuhan pemegang izin penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan | Masuk dalam kawasan hutan konservasi | Desa Teru Kecamtan Simpang Katis, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KEHUTANAN | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | Ditolak | Bukan kewenangan provinsi. Hutan Konservasi (Tahura Gunung Mangkol) adalah kewenangan Kabupaten | Validasi Sekretariat Dewan | Dibahas lebih lanjut oleh Dinas LHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 49386 | 26-01-2023 | H. MULYADI | prasarana pertanian ( JUT, JUP, irigasi, lantai jemur, | pembanguan muara untuk pembuangan air diperkebunan guna menghindari dari banjir | desa tanjung pura, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | dll) sub sekotor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan masih minim | | | | | KETAHANAN PANGAN | | | | |
| 49396 | 26-01-2023 | H. MULYADI | Sarana dan prasarana Perikanan tangkap masih minim dan belum memadai (Tambat labuh/Pelabuhan Perkanan/Alat bantu Penangkapan) | pengadaan perlengkapan alat penangkapan ikan | desa tanjung pura, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Ditolak | Pembagian peran kewenangan pemberdayaan nelayan kecil <5GT di Kabupaten/ Kota | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 49409 | 26-01-2023 | Ir. AGUNG SETIAWAN, MM | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | Pembangunan /renovasi masjid baitul iman | dusun air anyir desa air anyir kec. merawang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 49417 | 26-01-2023 | Ir. AGUNG SETIAWAN, MM | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | penyelesaian pembangunan gedung gereja dan prasarana gereja GBI Jemaat Sihin | Dusun sinar rembulan desa riding panjabg Kec. Merawang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 49423 | 26-01-2023 | Ir. AGUNG SETIAWAN, MM | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | pembangunan panti asuhan kabar baik pada yayasan kabar baik bangka | dusun sigambir desa air ruay kec. pemali, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 49430 | 26-01-2023 | Ir. AGUNG SETIAWAN, MM | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | pengadan sarana dan alat musik yayasan elsadai bedukang pada gereja panteskota di indonesia (Gpdi) | yayasan elsadai bedukang pada gereja panteskota di indonesia (Gpdi), Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 49440 | 26-01-2023 | Ir. AGUNG SETIAWAN, MM | Sarana dan prasarana Perikanan tangkap masih minim dan belum memadai (Tambat labuh/Pelabuhan Perkanan/Alat bantu Penangkapan) | pengadaan cool box fiber | dikelurahan jelitik dan sungailiat kec. sungailiat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Ditolak | Pembagian peran kewenangan pemberdayaan nelayan kecil <5GT di Kabupaten/ Kota | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49448 | 26-01-2023 | Ir. AGUNG SETIAWAN, MM | Pembangunan Jalan & Jembatan | pembangunan jalan lingkungan | parit pekir kel. sungailiat kec. sungailiat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | Aset bukan milik Provinsi | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 49456 | 26-01-2023 | Ir. AGUNG SETIAWAN, MM | Masih banyaknya kawasan permukiman yang belum terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) seperti jalan lingkungan dan drainase yang belum memadai, serta masih banyaknya rumah tidak layak huni yang ditempati oleh masyarakat. | permohonan pembersihan saluran/drainase | parit pekir kel. sungailiat kec. sungailiat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | Saluran Drainase bukan aset provinsi | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 49460 | 26-01-2023 | Ir. AGUNG SETIAWAN, MM | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | pembangunan gereja kabar baik indonesia | pemali, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 49464 | 26-01-2023 | Ir. AGUNG SETIAWAN, MM | Masih banyaknya kawasan permukiman yang belum terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) seperti jalan lingkungan dan drainase yang belum memadai, serta masih | pembuatan saluran dijalan kabupaten diperumahan griya kedaton B2 | KEL PARIT PADANG KEC. SUNGAILIAT, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | psu perumahan kewenangan kabupaten | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | banyaknya rumah tidak layak huni yang ditempati oleh masyarakat. | | | | | | | | | |
| 49502 | 26-01-2023 | ADET, SH., MH | prasarana pertanian ( JUT, JUP, irigasi, lantai jemur, dll) sub sekotor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan masih minim | Harga Karet turun | Desa Pinang Sebatang Kecamatan Simpang Katis, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 49645 | 27-01-2023 | NATA SUMITRA | Pembangunan Sarana Prasarana Masyarakat | Belum adanya pasar sebagai pusat pemenuhan kebutuhan masyarakat dan tolok ukur pertumbuhan ekonomi masyarakat | Perkantoran Kecamatan Simpang Renggiang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 49660 | 27-01-2023 | NATA SUMITRA | Butuh banyak pendampingan oleh konsultan Plut KUKM terhadap UMKM yang sebarannya tidak merata antara di desa dan kota | Belum berkembangnya produksi Dodol Nanas Kelompok Usaha Bersama Amnas Berehun dan belum adanya tempat produksi yang permanen | Desa Aik Madu RT 1 RW 1 Desa Air Madu Kecamatan Simpang Reggiang , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke PD |
| 49671 | 27-01-2023 | NATA SUMITRA | Masih banyaknya kawasan permukiman yang belum terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) seperti jalan lingkungan dan drainase yang belum memadai, serta | Sempitnya jalan dan buruknya drainase | Desa Lilangan RT.17 Dusun Gunung Tiung Kecamatan Gantung , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | jln dalam RT (gang) kewenangan kabupaten | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | masih banyaknya rumah tidak layak huni yang ditempati oleh masyarakat. | | | | | | | | | |
| 49683 | 27-01-2023 | NATA SUMITRA | Pembangunan Jalan & Jembatan | Kurang berkembangnya ekonomi masyarakat di Dusun Desa Baru dan Dusun Desa Kurnia Jaya, karena tidak adanya jembatan penghubung antara kedua Dusun | Desa Baru dan Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | bukan kewenangan provinsi | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 49694 | 27-01-2023 | NATA SUMITRA | Perencanaan, Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai | Terjadinya abrasi air laut di Pantai Serdang alur Muara Bandung | Pantai Serdang RT 17 Dusun Baru Selatan, Desa Baru Kecamatan Manggar, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | Akan dilakukan Perencanaan SID/DED Terlebih dahulu | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 49697 | 27-01-2023 | NATA SUMITRA | Perencanaan, Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai | Perbaikan Talud sepanjang Jalan Sulawesi sampai ke Dusun Kurnia Jaya, karena rusaknya Talud dan terjadi banjir Rob | Jalan Sulawesi RT 37 Kawasan Minapolitan Dusun Assalam, Desa Baru Kecamatan Manggar, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 49806 | 27-01-2023 | MANSAH | Pembangunan Jalan & Jembatan | Masyarakat meminta sebagai salah satu pembangunan prioritas yaitu pembuatan jembatan penghubung Belit-Mancung. | DESA MANCUNG, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | kewenangan kabupaten | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 49823 | 27-01-2023 | MANSAH | Perencanaan, Pembangunan Tanggul Sungai | Masyarakat meminta perbaikan tanggul sawah Desa Mancung dan dijadikan sebagai salah satu media dalam budidaya ikan lele | Desa Mancung, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN | Ditolak | Bukan kewenangan Provinsi | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | | | | sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 49826 | 27-01-2023 | MANSAH | Pembangunan Jalan & Jembatan | Masyarakat megeluhkan menganai kondisi Jalan Usaha Tani (JUT) yang rusak parah, sehingga mengusulkan untuk perbaikan jalan tersebut | Desa Sinar Sari, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya..koordinasi dengan dinas pertanian |
| 50682 | 27-01-2023 | PRETTY SEPTRIANNI, SH | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | ingginya harga pupuk dan kurangnya bantuan pupuk subsidi | kecamatan tanjung pendam, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | - | Ditolak | pengusul bukan anggota DPRD | - | - |
| 50701 | 27-01-2023 | PRETTY SEPTRIANNI, SH | Kurangnya pertambangan yang "good mining practices" di wilayah Belitung | masyarakat mengharapkan adanya reklamasi lahan bekas tambang untuk lahan pertanian | kecamatan tanjung pendam, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | Cabang Dinas ESDM Wilayah Belitung | - | Ditolak | pengusul bukan anggota DPRD | - | - |
| 50705 | 27-01-2023 | PRETTY SEPTRIANNI, SH | Pengelolaan sekolah belum memadai | Belum tersedianya sarana penunjang praktek perhotelan | SMK N 1 Sijuk, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | - | Ditolak | pengusul bukan anggota DPRD | - | - |
| 50720 | 27-01-2023 | PRETTY SEPTRIANNI, SH | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | belum adanya sarana dan prasarana ibadah yang memadai | kelurahan Paal satu, kecamatan tanjung pandan, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | - | Ditolak | pengusul bukan anggota DPRD | - | - |
| 50722 | 27-01-2023 | HERYAWANDI, SE | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | masyarakat desa kelumbi mengajukan renovasi masjid | Desa Buyan Kelumbi, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50812 | 27-01-2023 | H. MARSIDI H. SATAR, SH | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | Dikarenakan jumlah siswa yang semakin banyak, maka diperlukan perluasan tempat ibadah/Mushola di SMK Negeri I (STM) Toboali Kabupaten Bangka Selatan | Jl. Air Benar No.33183, Teladan, Kec. Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung 33783, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 50816 | 27-01-2023 | H. MARSIDI H. SATAR, SH | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | Tempat wudhu antara siswa dan siswi di SMA 1 Toboali saat ini masih bergabung, oleh karena itu agar dibangun batas tempat wudhu antara siswa dan siswi | Jl. Puput, Toboali, Kec. Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung 33783, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 50849 | 27-01-2023 | H. MARSIDI H. SATAR, SH | masih terbatasnya beasiswa bagi siswa | terdapat siswa yang kurang mampu dan siswa berprestasi di SMA Muhammadiyah Toboali Kabupaten Bangka Selatan | Jl.Jend Sudirman Toboali Kab. Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 50868 | 27-01-2023 | H. MARSIDI H. SATAR, SH | Pengelolaan sekolah belum memadai | 1. pada saat hujan terdapat daerah yang digenangi air/banjir, seperti halaman sekolah, lapangan Upacara, rest area<br>2. pagar sekolah tidak memenuhi standar, perlu diperbaiki untuk penambahan ketinggiannya, dan untuk menjaga keamanan sekolah | Jl. Puput, Toboali, Kec. Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung 33783, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 50888 | 27-01-2023 | RUDI HARTONO | Belum tersedia dana untuk melakukan monitoring ke kabupaten/kota dalam melakukan pendataan perusahaan/UMKM yang sudah/ belum melakukan kemitraan dengan investor | Masih sulitnya masyarakat untuk membuat izin usaha | Desa Membalong Kecamatan Tanjung Pandan, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke dinas terkait |
| 50896 | 27-01-2023 | RUDI HARTONO | Kurangnya pertambangan yang "good mining practices" di wilayah Belitung | Tatacara perpanjangan IUP yang masih banyak belum diketahui oleh masyarakat | Desa Perawas Kecamatan Tanjung Pandan, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | Cabang Dinas ESDM Wilayah Belitung | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Ditolak | Permohonan perpanjangan IUP OP dilaksanakan melalui Sistem Perizinan | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Dinas ESDM untuk dibahas lebih lanjut |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) yang diterbitkan DPTSP, DESDM dalam hal ini hanya memberikan rekomendasi teknis terkait permohonan perpanjangan IUP OP yang diajukan. | | |
| 50900 | 27-01-2023 | H. MARSIDI H. SATAR, SH | Pengelolaan sekolah belum memadai | masih minimnya pagar sekolah, sehingga timbul kekhawatiran untuk keamanan sekolah | Jl. Air Benar No.33183, Teladan, Kec. Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung 33783, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 50902 | 27-01-2023 | H. MARSIDI H. SATAR, SH | Pengelolaan sekolah belum memadai | tidak terdapat ruang aula, perluasan area parkir, dan banyak kursi dan meja yang rusak | Jl. Air Benar No.33183, Teladan, Kec. Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung 33783, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 50910 | 27-01-2023 | H. MARSIDI H. SATAR, SH | Pengelolaan sekolah belum memadai | terdapat siswa dan siswi yang berasal dari tukak Sadai, Lepar Pongok, tanjung Labu yang jaraknya sangat jauh dari sekolah, sehingga perlu dibangun asrama putra dan putri Untuk menampung/penginapan kepada anak-anak tersebut | Jl.Jend Sudirman Toboali Kab. Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 51050 | 27-01-2023 | FERDIYANSYAH, A.Md | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Pengembangan motor dan mobil listrik yang sudah ada | SMKN 2 PANGKALPINANG, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51079 | 27-01-2023 | DODY KUSDIAN, ST., MH | belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | Permohonan Pembangunan dan renovasi gedung GOJU (tempat latihan tarung), kurangnya anggaran untuk merenovasi gedung | Jl. Bukit Manggis RT/RW 07/02 Kel. Bukit Merapin Kec. Gerunggang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | Biro Kesejahteran Rakyat | Biro Kesejahteran Rakyat | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 51082 | 27-01-2023 | MANSAH | Sarana dan prasarana budidaya air payau (Vaname, Kepiting Bakau) dan budidaya air laut (Kerapu) belum didukung dengan teknologi terbaru dan belum dikembangkan di sentra budidaya yang ada | Meminta bantuan budidaya air tawar diperkebunan sawit masyarakat | Desa Kayu Arang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Ditolak | Pembagian peran kewenangan pemberdayaan pembudidaya air tawar di di Kabupaten/ Kota | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 51089 | 27-01-2023 | DODY KUSDIAN, ST., MH | Belum tersedia dana untuk melakukan monitoring ke kabupaten/kota dalam melakukan pendataan perusahaan/UMKM yang sudah/ belum melakukan kemitraan dengan investor | Bantuan dana usaha untuk pengembangan usaha tersebut | Jl. KH. Ahmad Dahlan RT/RW 009/003 Kel. Keramat Kec. Rangkui, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke dinas terkait |
| 51096 | 27-01-2023 | DODY KUSDIAN, ST., MH | belum optimalnya Kebijakan | Bantuan dana pengadaan sarana prasarana alat bantu | Jl. Cempedak 1 RT/RW 08/03, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | Biro Kesejahteran Rakyat | Biro Kesejahteran Rakyat | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | penunjang fasilitas pembelajaran TPA Al Amanah | | | | | | | | |
| 51098 | 27-01-2023 | DODY KUSDIAN, ST., MH | belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | Permohonan bantuan dana renovasi masjid | Pasir Putih, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | Biro Kesejahteran Rakyat | Biro Kesejahteran Rakyat | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 51103 | 27-01-2023 | DODY KUSDIAN, ST., MH | Belum tersedia dana untuk melakukan monitoring ke kabupaten/kota dalam melakukan pendataan perusahaan/UMKM yang sudah/ belum melakukan kemitraan dengan investor | Permohonan Modal Usaha Katering untuk Pengembangan Usaha | Kec. Rangkui, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke dinas terkait |
| 51105 | 27-01-2023 | DODY KUSDIAN, ST., MH | belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan | Bantuan dana untuk kelengkapan kegiatan rebana dan seragam qosidah | Kec. Rangkui, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | Biro Kesejahteran Rakyat | Biro Kesejahteran Rakyat | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rakyat Pelayanan Dasar | | | | | | | | | |
| 51114 | 27-01-2023 | FERDIYANSYAH, A.Md | Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya | honorarium kepada ustadz/ustadzah yang memberikan kajian di masjid-masjid diperkampungan | Seluruh Masjid di Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Biro Kesejahteran Rakyat | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Teruskan kepada PD terkait |
| 51116 | 27-01-2023 | FERDIYANSYAH, A.Md | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | tidak adanya kendaraan operasional sekolah yang membuat sulitnya siswa untuk praktik diluar sekolah | SMK N 2 Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 51126 | 27-01-2023 | DODY KUSDIAN, ST., MH | Masih kurangnya ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga | Permohonan Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga (lapangan bola) | Semabung Lama Depan Kantor Lurah Semabung Lama, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Untuk ditindaklanjuti. |
| 51132 | 27-01-2023 | DODY KUSDIAN, ST., MH | belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | Pembangunan masjid Al-Barokah | Jl. Gandaria I Gang Sumber Rezeki RT/RW 07/03 Kel. Air Kepala Tujuh Kec. gerunggang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | Biro Kesejahteran Rakyat | Biro Kesejahteran Rakyat | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 51135 | 27-01-2023 | DODY KUSDIAN, ST., MH | Belum tersedia dana untuk melakukan monitoring ke kabupaten/kota dalam melakukan pendataan perusahaan/UMKM yang | Bantuan Dana untuk usaha kuliner Barokah Es Cream | JL. Cempedak II Kel. Keramat Kec. Rangkui, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke dinas terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | sudah/ belum melakukan kemitraan dengan investor | | | | | | | | | |
| 51143 | 27-01-2023 | DODY KUSDIAN, ST., MH | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Permohonan Bantuan Beasiswa Pendidikan Perkuliahan dan fasilitas Penunjang Perkuliahan di UBB | Jl. KH Ahamd Dahlan RT/RW 008/003 Kel. Keramat Kec. Rangkui, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Untuk usulan sarana prasarana bangunan fisik bisa diajukan ke PUPR. Untuk beasiswa mahasiswa yang sudah kuliah diajukan ke Biro Kesra. Untuk siswa SMA/SMK/SLB bisa berkoordinasi dengan DInas Pendidikan |
| 51155 | 27-01-2023 | DODY KUSDIAN, ST., MH | Butuh banyak pendampingan oleh konsultan Plut KUKM terhadap UMKM yang sebarannya tidak merata antara di desa dan kota | Kurangnya informasi proses masuk ke PT Jamkrida milik Pemerintah Provinsi agar bisa ada jaminan bantuan untuk UMKM | Jl. Sumedang Kel. Kejaksaan Kec. Tamansari, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan Ke PD |
| 51163 | 27-01-2023 | DODY KUSDIAN, ST., MH | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Permohonan bantuan untuk sarana dan prasarana SMK Sore Pangkalpinang | Jl. Mustika I No 32 Semabung Lama Kec. Bukit Intan, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 51168 | 27-01-2023 | DODY KUSDIAN, ST., MH | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar | Permohonan bantuan dana untuk pengadaan meubelair dan peralatan praktik teknologi laboratoirum medik untuk menunjang proses pembelajaran siswa | Jl. Satama RT/RW 09/03 Semabung Baru Kec. Girimaya, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nasional Pendidikan | | | | | | | | | |
| 51204 | 27-01-2023 | EDI JUNAIDI FOE | Pengelolaan sekolah belum memadai | Membutuhkan kendaraan untuk kebutuhan praktek | SMK N1 Toboali, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 51208 | 27-01-2023 | EDI JUNAIDI FOE | Pengelolaan sekolah belum memadai | Membutuhkan perahu untuk kebutuhan praktek | SMK N1 Tukak Sadai Toboali, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 51214 | 27-01-2023 | EDI JUNAIDI FOE | Pengelolaan sekolah belum memadai | Membutuhkan pembatas wudhu | SMK N1 Toboali, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 51232 | 27-01-2023 | EDI JUNAIDI FOE | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | Kelompok Tani Air Mancur Membutuhkan bantuan bibit tanam porang serta perlengkapan berkebun lainnya | Desa Pasir Putih Kecamatan Tukak Sadai , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 51239 | 27-01-2023 | EDI JUNAIDI FOE | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | Kelompok Tani Air Mancur membutuhkan bantuan bibit tanaman porang serta perlengkapan berkebun lainnya | Desa Pasir Putih Kecamatan Tukak Sadai, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 51521 | 27-01-2023 | MANSAH | Masih banyaknya kawasan permukiman yang belum | Pembangunan talud / tembok penahan tanah dsri ujung siring pembuangan aliran parit jalan propinsi di RT 03 desa kayu arang | Desa Kayu Arang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) seperti jalan lingkungan dan drainase yang belum memadai, serta masih banyaknya rumah tidak layak huni yang ditempati oleh masyarakat. | | | | | PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | | | | sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 51542 | 27-01-2023 | MANSAH | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | Memohon Bantuan alat alsintan atau alat pertanian seperti : traktor, quik dan lain sebangainya.Agar dapat membantu kegiatan menjadi lebih cepat - Hand tranktor 3 unit - Mesin perontok padi 3 unit - cultivator 3 unit | Desa Mancung, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 51559 | 27-01-2023 | MANSAH | prasarana pertanian ( JUT, JUP, irigasi, lantai jemur, dll) sub sekotor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan masih minim | Pengajuan bibit sapi 20 ekor kelompok ternak Taman Batu Belawang, desa Mancung | Desa Mancung, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 51571 | 27-01-2023 | MANSAH | Pelebaran Jalan Menuju Standar | Pelebaran jalan propinsi dan pembangunan siring diupayakan agar air bisa mengalir jalan di ruas jalan propinsi di desa Mancung | Desa Mancung, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | masuk kedalam kegiatan apbd tahun 2023 | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51579 | 27-01-2023 | MANSAH | Lampu Penerangan Jalan | pemasangan lampu penerangan jalan di sepanjang jalan propinsi dari simpang 4 kelapa sampai dengn pelabuhan ferry kayuarang | Desa Kelapa, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERHUBUNGAN | DINAS PERHUBUNGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverifikasi sesuai kewenangan urusan dan anggaran |
| 52004 | 28-01-2023 | PRETTY SEPTRIANNI, SH | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | Tingginya harga pupuk dan kurangnya bantuan pupuk bersubsidi | Kecamatan tanjung pendam, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | - | Ditolak | Pengusul bukan anggota DPRD | - | - |
| 52007 | 28-01-2023 | PRETTY SEPTRIANNI, SH | Pengelolaan sekolah belum memadai | Belum adanya sarana dan prasarana yang menunjang praktek perhotelan | SMKN 1 Sijuk, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | - | Ditolak | Pengusul bukan anggota DPRD | - | - |
| 52011 | 28-01-2023 | PRETTY SEPTRIANNI, SH | Kurangnya pertambangan yang "good mining practices" | Reklamasi bahan bekas tambang untuk lahan pertanian | Kecamatan tanjung pendam, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | - | Ditolak | Pengusul bukan anggota DPRD | - | - |
| 52013 | 28-01-2023 | PRETTY SEPTRIANNI, SH | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | Belum tersedianya sarana prasarana ibadah yang memadai | Kel.paal satu, kec.tanjung pandan, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | - | Ditolak | Pengusul bukan anggota DPRD | - | - |
| 52044 | 28-01-2023 | YOGA NURSIAWAN, A.Md | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | tingginya harga pupuk dan kurangnya bantuan pupuk bersubsidi | Kec.tanjung pendam, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 52049 | 28-01-2023 | YOGA NURSIAWAN, A.Md | Pengelolaan sekolah belum memadai | Belum adanya sarana dan prasarana yang menunjang praktek perhotelan | SMKN 1 Sijuk, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 52051 | 28-01-2023 | YOGA NURSIAWAN, A.Md | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | Belum adanya sarana dan prasarana ibadah yang memadai | Kel.paal satu, kec.tanjungpandan, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 57032 | 29-01-2023 | Ir. H. AZWARI HELMI | Pemeliharaan Rutin/Berkala Jalan Jembatan | PORPROV 2023 akan diadakan di Desa Mancung namun infrastruktur berupa jalan belum memadai | Desa Mancung, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | masuk kedalam kegiatan apbd tahun 2023 | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 57039 | 29-01-2023 | Ir. H. AZWARI HELMI | Perencanaan, Pembangunan Tanggul Sungai | tanggul sawah di desa mancung jebol karena tidak mampu menahan debit air | desa mancung, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | Daerah Irigasi Bukan Kewenangan Provinsi | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 57040 | 29-01-2023 | Ir. H. AZWARI HELMI | Pemeliharaan Rutin/Berkala Jalan Jembatan | sering terjadi kecelakaan di dekat lapangan bola desa mancung akibat jalan rusak | desa mancung, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | masuk kedalam kegiatan apbd tahun 2023 | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 57042 | 29-01-2023 | Ir. H. AZWARI HELMI | Lampu Penerangan Jalan | tidak adanya lampu jalan didesa mancung sehingga sering kecelakaan | jalan desa mancung, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERHUBUNGAN | DINAS PERHUBUNGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverifikasi sesuai kewenangan urusan dan anggaran |
| 57046 | 29-01-2023 | Ir. H. AZWARI HELMI | Perencanaan, Pembangunan Bangunan | tidak adanya tempat berteduh bagi nelayan desa mancung | pantai desa mancung, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN | Ditolak | Bukan Kewenangan Provinsi | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pengaman Pantai | | | | | RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | | | | diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 57048 | 29-01-2023 | Ir. H. AZWARI HELMI | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | belum adanya teras masjid desa mancung | desa mancung, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 57049 | 29-01-2023 | Ir. H. AZWARI HELMI | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | masyarakat kekurangan dana untuk pupuk | desa mancung, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 57059 | 29-01-2023 | Ir. H. AZWARI HELMI | Pembangunan Sarana Prasarana Masyarakat | masyarakat menginginkan pengadaan PC didesa mancung agar tidak kesulitan meminjam di ibukota | desa mancung, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | Bukan termasuk kegiatan DPUPRPRKP | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 57065 | 29-01-2023 | Ir. H. AZWARI HELMI | Kurangnya Ketaatan Perusahaan Industri mengurus dokumen perizinan | masyarakat mempertanyakan terkait izin PT. Bangun Rimba Sejahtera agar segera dapat dipergunakan masyarakat | desa peradong, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | Ditolak | Kasifikasi industri masuk menengah kecil, sesuai UU 23/2014 merupakan kewenangan kabupaten kota | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan Ke PD |
| 57067 | 29-01-2023 | Ir. H. AZWARI HELMI | Pemeliharaan Rutin/Berkala Jalan Jembatan | jalan didesa peradong agar segera dihotmix karena rawan kecelakaan | desa peradong, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | Ditolak | kewenangan kabupaten | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | KAWASAN PERMUKIMAN | | | | ketersediaan anggarannya |
| 57069 | 29-01-2023 | Ir. H. AZWARI HELMI | Angka Kematian Ibu, anak, dan stunting masih tinggi | tingkat stunting di desa peradong masih sangat tinggi sehingga kualitas SDM sulit meningkat | desa peradong, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KESEHATAN | DINAS KESEHATAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke Dinas Kesehatan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 57073 | 29-01-2023 | Ir. H. AZWARI HELMI | Angka Kematian Ibu, anak, dan stunting masih tinggi | masyarakat ingin adanya sosialisasi terkait cara mengatasi stunting | desa peradong, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KESEHATAN | DINAS KESEHATAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke Dinas Kesehatan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 57076 | 29-01-2023 | Ir. H. AZWARI HELMI | Belum Optimalnya Fungsi Lembaga DPRD | masyarakat desa peradong masih belum paham terkait reses | desa kelabat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DPRD | SEKRETARIAT DPRD | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 57080 | 29-01-2023 | Ir. H. AZWARI HELMI | Pemeliharaan Rutin/Berkala Jalan Jembatan | jalan menuju kantor desa kelabat rusak parah sehingga sering kecelakaan dan sulit diakses | desa kelabat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | bukan kewenangan provinsi | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 57085 | 29-01-2023 | Ir. H. AZWARI HELMI | Perencanaan, Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai | nelayan desa kelabat meminta bantunan pembangunan talud untuk pesisir karena adanya abrasi | desa kelabat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | Belum adanya Perencanaan dan akan dilakukan survey terlebih dahulu | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 57087 | 29-01-2023 | Ir. H. AZWARI HELMI | Lampu Penerangan Jalan | jalan yang gelap didesa kelabat sehingga sring terjadi kecelakaan | desa kelabat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERHUBUNGAN | DINAS PERHUBUNGAN | Ditolak | Kewenangan Kabupaten Bangka Barat | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverifikasi sesuai kewenangan urusan dan anggaran |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57089 | 29-01-2023 | Ir. H. AZWARI HELMI | Permasalahan pertanahan (status lahan) yang belum jelas untuk berinvestasi | masyarakat menginginkan pembebeasan lahan TPU yang berada di hutan kawasan di desa kelabat | desa kelabat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke dinas terkait |
| 57099 | 29-01-2023 | Ir. H. AZWARI HELMI | prasarana pertanian ( JUT, JUP, irigasi, lantai jemur, dll) sub sekotor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan masih minim | permohonan bantuan peternakan bagi kelompok ternak desa dendang | desa dendang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 59277 | 30-01-2023 | Drs. RUSTAMSYAH | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | pengadaan Kandang ayam yang berbasis teknologi dengan tampungan 20 ribu ayam untuk Fasilitas Praktek siswa siswi Jurusan Peternakan | SMKN 1 MENDO BARAT , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 59302 | 30-01-2023 | HERYAWANDI, SE | Sarana dan prasarana Perikanan tangkap masih minim dan belum memadai (Tambat labuh/Pelabuhan Perkanan/Alat bantu Penangkapan) | nelayan air menduyung mengajukan pengadaan jetti | Desa Air Mendukung, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 59319 | 30-01-2023 | HERYAWANDI, SE | Belum terfasilitasi pemberian izin usaha untuk badan usaha pelabuhan. | masyrakat Dusun Basun Desa Sinar Surya mengajukan pembangunan Dermaga untuk nelayan | Susun Basun,desa Sinar Surya, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERHUBUNGAN | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Ditolak | Dokumen Perencanaan, Dok Lingkungan dan Dok PKPRL belum tersedia. Masih terdapat PR DED yang belum | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverifikasi sesuai kewenangan urusan dan anggaran |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | dilaksanakan, DKP Provinsi fokus pada yg telah readyness creteria | | |
| 59967 | 30-01-2023 | HERYAWANDI, SE | Kurangnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan provinsi (5 jenis) | pelebaran dan perawatanberkala jalan Kelurahan kelapa(simpang Tempilang) sampai dengan Desa sangku | Kelapa-sangku, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERHUBUNGAN | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | masuk kedalam kegiatan apbd tahun 2023 | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverifikasi sesuai kewenangan urusan dan anggaran |
| 59983 | 30-01-2023 | HERYAWANDI, SE | - masih kurangnya kajian terhadap objek pemajuan kebudayaan (WBTB) | bantuan dana pelaksanaan event budaya ruah Tempilang Cup dan Penyampak Cup | Tempilang dan Penyampak, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Dinas terkait |
| 60149 | 30-01-2023 | RINGGIT KECUBUNG, S.Pd | belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | Bantuan Dana Pembangunan Masjid AL ITTIHAD Dusun Sungkai Desa Tugang | Dusun Sungkai RT 14 Desa Tugang Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | Biro Kesejahteran Rakyat | Biro Kesejahteran Rakyat | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 60156 | 30-01-2023 | HERYAWANDI, SE | Sarana dan prasarana Perikanan tangkap masih minim dan belum memadai (Tambat labuh/Pelabuhan Perkanan/Alat bantu Penangkapan) | bantuan perahu dan mesin untuk nelayan desa Penyampak | desa penyampak, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Ditolak | Pembagian peran kewenangan pemberdayaan nelayan kecil <5GT di Kabupaten/Kota | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60177 | 30-01-2023 | HERYAWANDI, SE | Sarana dan prasarana Perikanan tangkap masih minim dan belum memadai (Tambat labuh/Pelabuhan Perkanan/Alat bantu Penangkapan) | bantuan perahu dan mesin untuk nelayan desa Beruas | desa Beruas, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Ditolak | Pembagian peran kewenangan pemberdayaan nelayan kecil <5GT di Kabupaten/ Kota | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 60228 | 30-01-2023 | Drs. H. ERWANDI A. RANI | Belum Optimalnya pemanfaaatan teknologi informasi khususnya pelayanan perizinan | Bantuan dalam hal pengurusan izin Perikanan Kelauatan dan Nelayan dari Pass Kapal beralih ke KSOP | Kab. Belitung, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke dinas terkait |
| 60335 | 30-01-2023 | HERYAWANDI, SE | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | renovasi masjid dusun Linkun desa penyampak | Dusun Linkun Desa Penyampak, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 60383 | 30-01-2023 | Drs. H. ERWANDI A. RANI | Sarana dan prasarana Perikanan tangkap masih minim dan belum memadai (Tambat labuh/Pelabuhan Perkanan/Alat bantu Penangkapan) | Bantuan Dermaga untuk sandaran perahu Pulau Seliuk Membolang Beitung | Pulau Seliuk Kec. Membolang Kab. Belitung, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Ditolak | Dokumen Perencanaan, Dok Lingkungan dan Dok PKPRL belum tersedia. Masih terdapat PR DED yang belum dilaksanakan, DKP Provinsi fokus pada yg telah readyness creteria | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 60430 | 30-01-2023 | Drs. H. ERWANDI A. RANI | Sarana prasarana pendukung pariwisata belum memadai | Masih banyaknya sarana dan prasaran kawasan pariwisata yang belum memadai di Kecamatan Sijuk Kab. Belitung | Kecamatan Sijuk Kab. Belitung, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | Ditolak | Aset bukan milik Provinsi | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Dinas terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | KAWASAN PERMUKIMAN | | | | |
| 60445 | 30-01-2023 | Drs. H. ERWANDI A. RANI | Belum semua UKM dapat mengakses permodalan | Masih banyaknya para pelalu UMKM butuh bantuan modal dalam pengembangan produksi produk olahan UMKM nya | Kecamatan Sijuk Kab. Belitung, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan Ke PD |
| 60448 | 30-01-2023 | NATA SUMITRA | Masih rendahnya promosi pariwisata melalui media elektronik, media cetak & media lainnya | Bantuan pengadaan TV android 52 inch | Bandara Belitung, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Dinas terkait |
| 60459 | 30-01-2023 | NATA SUMITRA | Masih kurangnya ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga | Rehab lapangan volly tapak suci | Desa Kurnia Jaya, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Untuk ditindaklanjuti. |
| 60470 | 30-01-2023 | Drs. H. ERWANDI A. RANI | PENYELENGGARAAN JALAN | pemerintah Desa Perpat monon bantuan untuk pengaspalan jalan yang merupakan jalan produksi | Desa Perpat Kab. Belitung, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | bukan kewenangan provinsi | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 60475 | 30-01-2023 | NATA SUMITRA | Sarana dan prasarana Perikanan tangkap masih minim dan belum memadai (Tambat labuh/Pelabuhan Perkanan/Alat bantu Penangkapan) | Pengadaan mesin ketinting untuk nelayan kater pantai serdang | Pantai Serdang Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Ditolak | Pembagian peran kewenangan pemberdayaan nelayan kecil untuk Kapal 0-5GT di Kabupaten/ Kota | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 60488 | 30-01-2023 | NATA SUMITRA | Pengelolaan sekolah belum memadai | Pengadaan pagar SMA N 1 Damar | SMA N 1 Desa Damar, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | ditindaklanjuti usulan ini. |
| 60495 | 30-01-2023 | NATA SUMITRA | Pengelolaan sekolah belum memadai | Pembangunan gedung serbaguna SMA N 1 Manggar | SMA N 1 Manggar , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 60505 | 30-01-2023 | NATA SUMITRA | Pengelolaan sekolah belum memadai | Pembangunan Gapura SMA N 1 Manggar | SMA N 1 Manggar, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 60531 | 30-01-2023 | Drs. H. ERWANDI A. RANI | Pengelolaan Ruang Laut, Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir belum optimal, serta Sarana dan Prasarana di Pulau-pulau Kecil belum memadai | Dalam meningkatkan keamanan di daerah pesisir masyarakat mohon adanya bantuan untuk breakwater atau pemecah ombak | Pulau Seliuk Kab. Belitung, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 60540 | 30-01-2023 | NATA SUMITRA | Kurangnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan provinsi (5 jenis) | Peningkatan jalan provinsi | Desa Batu Penyu, Desa Gantung, Desa Lenggang Kecamatan Gantung, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERHUBUNGAN | DINAS PERHUBUNGAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverifikasi sesuai kewenangan urusan dan anggaran |
| 60551 | 30-01-2023 | NATA SUMITRA | Kurangnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan provinsi (5 jenis) | Peningkatan jalan provinsi | Kecamatan Damar, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERHUBUNGAN | DINAS PERHUBUNGAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverifikasi sesuai kewenangan urusan dan anggaran |
| 60565 | 30-01-2023 | Drs. H. ERWANDI A. RANI | Sarana dan prasarana Perikanan tangkap masih minim dan | Permohonan bantuan jaring, pukat dan alat tangkap untuk memudahkan nelayan dalam meningkatkan tangkapan ikan | Desa Perpat Kab. Belitung, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Ditolak | Pembagian peran kewenangan pemberdayaan nelayan | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | belum memadai (Tambat labuh/Pelabuhan Perkanan/Alat bantu Penangkapan) | | | | | | | kecil untuk Kapal 0-5GT di Kabupaten/ Kota | | |
| 60580 | 30-01-2023 | DODY KUSDIAN, ST., MH | Masih rendahnya promosi pariwisata melalui media elektronik, media cetak & media lainnya | Pengadaan kamera dan perlengkapannya untuk menunjang kegiatan di Dinas Pariwisata | Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Dinas terkait |
| 60606 | 30-01-2023 | Drs. H. ERWANDI A. RANI | Pemeliharaan Rutin/Berkala Jalan Jembatan | Masyarakat Gunung Riting mohon adanya bantuan untuk jalan sawah yang dusah rusak parah yang merupakan Aset pemerintah provinsi | Desa Gunung Riting Kab. Belitung, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | bukan kewenangan provinsi | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 60623 | 30-01-2023 | Drs. H. ERWANDI A. RANI | Pemeliharaan Rutin/Berkala Jalan Jembatan | bantuan untuk Dermaga yang sudah rusak parah | Desa Gunung Riting Kab. Belitung, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 60652 | 30-01-2023 | Drs. H. ERWANDI A. RANI | masih rendahnya kepatuhan pemegang izin penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan | masyarakat mohon adanya penyelesaian kawasan kebun warga dengan kawasan hutan lindung | Kecamatan Sijuk, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KEHUTANAN | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Dibahas lebih lanjut oleh Dinas LHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 61008 | 30-01-2023 | Drs. H. ERWANDI A. RANI | belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan | Bantuan Dana untuk Pembangunan Masjid AN NUR | Desa Sijuk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | Biro Kesejahteran Rakyat | Biro Kesejahteran Rakyat | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | | | | | | | | | |
| 63579 | 31-01-2023 | NICO PLAMONIA UTAMA, ST., MM | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | Belum ada dan belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai | SMK PGRI PANGKALPINANG, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 63585 | 31-01-2023 | NICO PLAMONIA UTAMA, ST., MM | Kurangnya sarana produktif SMK | Setiap musim hujan lapangan upacara sering tergenang air | SMK PGRI PANGKALPINANG, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 63588 | 31-01-2023 | NICO PLAMONIA UTAMA, ST., MM | Kurangnya sarana produktif SMK | Terbatasnya ruangan yang ada | SMK NEGERI 5 PANGKALPINANG, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 63736 | 31-01-2023 | BELIADI, S.IP | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | PERLUNYA BANTUAN PUPUK DAN HARGA SUBSIDI DARI PEMERINTAH UNTUK MERINGANKAN BEBAN PARA PETANI YANG ADA DI KECAMATAN GANTUNG INI | JL. RAYA MANGGAR – GANTUNG KECAMATAN GANTUNG KABUPATEN BELITUNG TIMUR, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 63764 | 31-01-2023 | BELIADI, S.IP | Kurangnya tenaga kerja yang ditempatkan dikarenakan lapangan usaha masih kurang serta tingkat kesenjangan pendidikan yang masih tinggi | PERLUNYA PEMERINTAH PROVINSI MENYIAPKAN LAPANGAN PEKERJAAN SETELAH PERTAMBANGAN TIMAH SELESAI ATAU HABIS AGAR PEREKONOMIAN MASYARAKAT BANGAK BELITUNG INI TERUS BERJALAN | JL. RAYA MANGGAR – GANTUNG KECAMATAN GANTUNG KABUPATEN BELITUNG TIMUR, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS TENAGA KERJA | DINAS TENAGA KERJA | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 63780 | 31-01-2023 | BELIADI, S.IP | Sarana dan prasarana Perikanan | PERHATIAN PEMERINTAH TERHADAP PARA NELAYAN DIHARAPKAN TERUS | JL. RAYA MANGGAR – GANTUNG KECAMATAN GANTUNG KABUPATEN | Kabupaten / Kota | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | DINAS KELAUTAN | Ditolak | Pembagian peran kewenangan | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | tangkap masih minim dan belum memadai (Tambat labuh/Pelabuhan Perkanan/Alat bantu Penangkapan) | MENERUS HADIR DI PROVINSI IN, AGAR PEREKONOMIAN SELAIN TIMAH TERUS BERJALAN DAN TERBANTUAN DENGAN PROFESI LAIN | BELITUNG TIMUR, Provinsi Bangka Belitung | | | DAN PERIKANAN | | pemberdayaan nelayan kecil <5GT di Kabupaten/ Kota | | |
| 63782 | 31-01-2023 | NICO PLAMONIA UTAMA, ST., MM | PENYELENGGARAAN JALAN | Mengingat sekolah lebih rendah dari jalan sehingga sering terjadi banjir | SMK NEGERI 4 PANGKALPINANG, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | kewenangan nasional | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 63795 | 31-01-2023 | BELIADI, S.IP | Pelebaran Jalan Menuju Standar | PERLU ADANYA PERBAIKAN JALAN LASKAR PELANGI DARI KECAMATAN GANTUNG MENUJU KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG | JL. LASKAR PELANGI SIMPANG RENGGIANG – GANTUNG KABUPATEN BELITUNG TIMUR, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 63801 | 31-01-2023 | BELIADI, S.IP | Masih banyaknya kawasan permukiman yang belum terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) seperti jalan lingkungan dan drainase yang belum memadai, serta masih banyaknya rumah tidak layak huni yang ditempati oleh masyarakat. | PERLU ADANYA PERBAIKAN DRAINASE ATAU SIRING ALIRAN AIR YANG SUDAH RUSAK | JL. LASKAR PELANGI GANTUNG SIMPANG RENGGIANG, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | aset jalan bukan aset provinsi | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63807 | 31-01-2023 | NICO PLAMONIA UTAMA, ST., MM | Kurangnya sarana produktif SMK | Rehab asrama Putra dan Putri di SMK N 4 sudah tidak layak | SMK NEGERI 4 PANGKALPINANG, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 63823 | 31-01-2023 | NICO PLAMONIA UTAMA, ST., MM | Kurangnya sarana produktif SMK | Perbaikan WC dan saluran air yang tersumbat karena sangat mengganggu aktivitas belajar mengajar | SMK NEGERI 4 PANGKALPINANG, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 63832 | 31-01-2023 | BELIADI, S.IP | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | PERLU ADANYA PENINGKATAN MUTU SDM DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR INI, DENGAN CARA MENEMPATKAN PERGURUAN TINGGI SETIDAKNYA MENEMPAT SATU FAKULTAS DARI SATU PERGURUAN TINGGI YANG ADA DI PROVINSI BANGKA BELITUNG | JL. RAYA MANGGAR – GANTUNG KECAMATAN GANTUNG KABUPATEN BELITUNG TIMUR, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 63863 | 31-01-2023 | BELIADI, S.IP | Perencanaan, Pembangunan Tanggul Sungai | UNTUK MENGANTISIPASI BANJIR DI KECAMATAN GANTUNG INI PERLU ADA PEMBANGUNAN TANGGUL DI DAERAH PICE SUNGAI LENGGANG | JL. RAYA MANGGAR – GANTUNG KECAMATAN GANTUNG KABUPATEN BELITUNG TIMUR, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | Akan dilakukan Perencanaan SID/DED terlebih dahulu | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 63878 | 31-01-2023 | BELIADI, S.IP | Permasalahan pertanahan (status lahan) yang belum jelas untuk berinvestasi | MASYARAKAT TIDAK BISA MENGGUNAKAN LAHAN TIDUR KARENA TERBENTUR KEPEMILIKAN LAHAN DARI PERUSAHAAN – PERUSAHAAN YANG TIDAK DIPERGUNAKAN | JL. RAYA MANGGAR – GANTUNG KECAMATAN GANTUNG KABUPATEN BELITUNG TIMUR, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Dinas terkait |
| 63879 | 31-01-2023 | NICO PLAMONIA UTAMA, ST., MM | Pengelolaan sekolah belum memadai | Perbaikan atap genteng karena banyaknya dalam kondisi rusak | SMK NEGERI 4 PANGKALPINANG, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 63885 | 31-01-2023 | BELIADI, S.IP | Perencanaan, Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai | KARENA DI AREA PANTAI GUSONG CINE DESA KAMI DESA BATU PENYU SUDAH MENGALAMI ABRASI ATAU PENGIKISAN WILAYAH PANTAINYA, KAMI HARAP ADA PERHATIAN DARI PIHAK | JL. PANTAI GUSUNG CINE DESA BATUPENYU KECAMATAN GANTUNG KABUPATEN BELIUTNG TIMUR, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | Ditolak | Akan dilakukan Perencanaan SID/DED Terlebih dahulu | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PROVINSI UNTUK MENCEGA AGAR TIDAK TERGERUS TERUS MENERUS | | | | KAWASAN PERMUKIMAN | | | | dan ketersediaan anggarannya |
| 63900 | 31-01-2023 | BELIADI, S.IP | Perencanaan Jalan & Jembatan | PROSES PERBAIKAN DI JALAN SIMPANG PESAK YANG ASAL – ASALAN , SEHARUSNYA PIHAK TERKAIT LEBIH MENGAWASI PENGERJAAN TERSEBUT | JL RAYA DENDANG - GANTUNG KABUPATEN BELIUTNG TIMUR, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 63908 | 31-01-2023 | BELIADI, S.IP | prasarana pertanian ( JUT, JUP, irigasi, lantai jemur, dll) sub sekotor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan masih minim | MEMOHON BANTUAN DARI PEMERINTAH PROVINSI UNTUK MENJALANKAN BUMDES KAMI | JL. RAYA MANGGAR – GANTUNG KECAMATAN GANTUNG KABUPATEN BELITUNG TIMUR, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 63915 | 31-01-2023 | NICO PLAMONIA UTAMA, ST., MM | Kurangnya sarana produktif SMK | Agar pihak stasiun TV dapat memberikan kuota 10% untuk penayangan produk lokal kepada siswa-siswa di SMK | SMK-SMK PANGKALPINANG, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 63921 | 31-01-2023 | BELIADI, S.IP | Pelebaran Jalan Menuju Standar | JALAN DARI GANTUNG KE DESA LILANGAN KEMUDIAN SAMPAI KE DESA BADAU KABUPATEN BELITUNG BANYAK SEKALI JALAN YANG SUDAH BERLUBANG KALAU PUN MEMANG TIDAK BISA MENGANGGARKAN JALAN YANG BARU SETIDAKNYA ADA BIAYA PENAMBALAN LOBANG – LOBANG JALAN YANG SANGAT MENGKHAWATIRKAN DAN TAKUTNYA MEMAKAN BANYAK KORBAN KARENA MENGHINDARI LOBANG, DAN KEPADA PERUSAHAAN YANG MENDAPATKAN TENDER MEMPERBAIKI JALAN YANG BERLOBANG AGAR | JL RAYA DENDANG - GANTUNG KABUPATEN BELITUNG TIMUR, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MENGERJAKANNYA DENGAN RAPI | | | | | | | | |
| 63926 | 31-01-2023 | BELIADI, S.IP | Lampu Penerangan Jalan | PENERANGAN LAMPU JALAN SEPANJANG JALAN YANG ADA TIKUNGAN DAN DAERAH YANG MASIH RIMBUN POHON AGAR DIBERI PENERANGAN, SETIDAKNYA PENERANGAN DARI TENAGA SURYA | JL RAYA DENDANG - GANTUNG KABUPATEN BELITUNG TIMUR, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERHUBUNGAN | DINAS PERHUBUNGAN | Ditolak | Kewenangan Dinas ESDM | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverifikasi sesuai kewenangan urusan dan anggaran |
| 63930 | 31-01-2023 | BELIADI, S.IP | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | PERLU ADANYA PERHATIAN DARI PEMERINTAH PROVINSI TERKAIT ADANYA MASALAH HARGA PUPUK | JL. TENGAH TANJUNGPANDAN – MANGGAR DESA AIR MADU KEC. SIMPANG RENGGIANG KAB. BELITUNG TIMUR, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 63934 | 31-01-2023 | BELIADI, S.IP | Belum ditetapkannya secara tepat peruntukan lahan untuk investasi di setiap keb/kota | PENGUSULAN PEMBAGIAN LAHAN DESA YANG TENTUNYA AKAN DIGUNAKAN SEBAGAI LAHAN PERTANIAN BAGI MASYARAKAT DESA | JL. TENGAH TANJUNGPANDAN – MANGGAR DESA AIR MADU KEC. SIMPANG RENGGIANG KAB. BELITUNG TIMUR, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Dinas terkait |
| 63981 | 31-01-2023 | BELIADI, S.IP | Sarana dan prasarana Perikanan tangkap masih minim dan belum memadai (Tambat labuh/Pelabuhan Perkanan/Alat bantu Penangkapan) | PEMBERIAN BANTUAN KEPADA KELOMPOK NELAYAN DARAT, SEPERTI ALAT TANGKAP DLL | JL. TENGAH TANJUNGPANDAN – MANGGAR DESA AIR MADU KEC. SIMPANG RENGGIANG KAB. BELITUNG TIMUR, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Ditolak | Pembagian peran kewenangan pemberdayaan nelayan kecil <5GT di Kabupaten/ Kota | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 63996 | 31-01-2023 | BELIADI, S.IP | Lampu Penerangan Jalan | BUTUHNYA PENERANGAN DI PERBATASAN KABUPATEN BELITUNG DAN BELITUNG TIMUR | JL. TENGAH TANJUNGPANDAN – MANGGAR DESA AIR MADU KEC. SIMPANG RENGGIANG KAB. BELITUNG TIMUR, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERHUBUNGAN | DINAS PERHUBUNGAN | Ditolak | Kewenangan Nasional, BPTD Kemenhub | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverifikasi sesuai kewenangan |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | urusan dan anggaran |
| 64008 | 31-01-2023 | BELIADI, S.IP | Lampu Penerangan Jalan | PERLUNYA PEMASANGAN PENERANGAN DI TIKUNGAN JALAN AGAR DIPASANG PENERANGAN JALAN, PENERANGAN YANG MENGGUNAKAN TENAGA SURYA | JL. SIMPANG RENGGIANG - GANTUNG, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERHUBUNGAN | DINAS PERHUBUNGAN | Ditolak | Kewenangan Dinas ESDM | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverifikasi sesuai kewenangan urusan dan anggaran |
| 64023 | 31-01-2023 | BELIADI, S.IP | Pembangunan Jalan & Jembatan | PERBAIKAN JALAN YANG BERLOBANG DARI SIMPANG RENGGIANG MENUJU KECAMATAN GANTUNG AGAR DIPERBAIKI KEMUDIAN KAMI JUGA BERHARAP AGAR JALAN JALAN YANG BELUM DI TEMPATI MASYARAKAT YANG MASIH TERDAPAT HUTAN DAN TIKUNGAN JALAN AGAR DIPASANG PENERANGAN JALAN, PENERANGAN YANG MENGGUNAKAN TENAGA SURYA | JL. SIMPANG RENGGIANG - GANTUNG, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | sudah termasuk pada usulan yang lain | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 64028 | 31-01-2023 | BELIADI, S.IP | Belum terpenuhinya sarana dan prasarana jaringan internet di kabupaten/Kota | PENGADAAN BUKU BACAAN KHUSUS KOLEKSI ANAK-ANAK DAN BANTUAN WIFI UNTUK PERPUSTAKAAN DESA | JL. TENGAH TANJUNGPANDAN – MANGGAR DESA AIR MADU KEC. SIMPANG RENGGIANG KAB. BELITUNG TIMUR, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Dinas terkait masukan untuk urusan dinas perpustakaan |
| 64046 | 31-01-2023 | BELIADI, S.IP | Terbatasnya akses pengembangan usaha | PERLUNYA BANTUAN UMKM TERHADAP USAHA RUMAHAN YANG IA RINTIS, YAITU PRODUKSI KERIPIK SINGKONG DAN KERIPIK PISANG | JL. TENGAH TANJUNGPANDAN – MANGGAR DESA AIR MADU KEC. SIMPANG RENGGIANG KAB. BELITUNG TIMUR, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan Ke PD |
| 64077 | 31-01-2023 | BELIADI, S.IP | Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan blm maksimal | MENJADIKAN HEWAN ENDEMIK YANG ADA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG INI DILINDUNGI AGAR KEBERLANGSUNGAN HIDUPNYA TERUS MENERUS DAN TAK TERJADI KEPUNAHAN | JL. RAYA MANGGAR – GANTUNG KECAMATAN GANTUNG KABUPATEN BELITUNG TIMUR, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | Ditolak | Ditolak, bukan kewenangan provinsi | Validasi Sekretariat Dewan | Dibahas lebih lanjut oleh Dinas LHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 64088 | 31-01-2023 | NICO PLAMONIA UTAMA, ST., MM | Pengelolaan sekolah belum memadai | Pengadaan kelengkapan peralatan alat praktek di Lab Multimedia | SMK PGRI PANGKALPINANG, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 64121 | 31-01-2023 | NICO PLAMONIA UTAMA, ST., MM | Keterbatasan daya tampung sekolah | Kurang transparannya dalam PPDB untuk sekolah Negeri | SMK - SMK NEGERI PANGKALPINANG, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 64128 | 31-01-2023 | NICO PLAMONIA UTAMA, ST., MM | Pengelolaan sekolah belum memadai | Peninjauan kembali untuk rencana 6 hari belajar di sekolah | SMK PGRI PANGKALPINANG, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 64135 | 31-01-2023 | NICO PLAMONIA UTAMA, ST., MM | Permasalahan pertanahan (status lahan) yang belum jelas untuk berinvestasi | Terbatasnya lahan | SMK NEGERI 5 PANGKALPINANG, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Dinas terkait |
| 64159 | 31-01-2023 | NICO PLAMONIA UTAMA, ST., MM | Kurangnya sarana produktif SMK | Kekurangan kelengkapan peralatan dan perlengkapan sekolah khususnya alat lab dan juga ruang praktek yang tidak ada untuk jurusan teknik laboratorium medik | SMK Negeri 5 Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 64182 | 31-01-2023 | NICO PLAMONIA UTAMA, ST., MM | Pembangunan Sarana Prasarana Masyarakat | Belum adanya Universitas di Bangka Belitung untuk jurusan S1 Farmasi dan Profesi Apoteker | SMK Negeri 5 Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 64198 | 31-01-2023 | NICO PLAMONIA UTAMA, ST., MM | Kurangnya sarana produktif SMK | Pengadaan AC | SMK NEGERI 5 PANGKALPINANG, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 64205 | 31-01-2023 | NICO PLAMONIA UTAMA, ST., MM | Keterbatasan Anggaran | Banyaknya anggaran untuk SMK yang terpotong | SMK NEGERI 5 PANGKALPINANG, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Dinas terkait masukan untuk urusan dinas pendidikan |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64218 | 31-01-2023 | NICO PLAMONIA UTAMA, ST., MM | Kurangnya sarana produktif SMK | Tidak sesuainya antara pengadaan bahan praktek dan kebutuhan | SMK NEGERI 5 PANGKALPINANG, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 64264 | 31-01-2023 | NICO PLAMONIA UTAMA, ST., MM | Pengelolaan sekolah belum memadai | Mengingat bangka belitung merupakan provinsi kepulauan dan SMK N4 pangkalpinang merupakan sekolah keluatan dan perikanan agar menjadikan SMKN 4 PKP menjadi SMK Unggulan di Provinsi Bangka Belitung | SMK NEGERI 4 PANGKALPINANG, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 64303 | 31-01-2023 | NICO PLAMONIA UTAMA, ST., MM | Fasilitasi, Pelatihan, Sertifikasi Tenaga Ahli & Tenaga Terampil Konstruksi | SMK Negeri 4 Pangkalpinang dapat mengeluarkan sertifikat ANT-IV karna sangat di butuhkan untuk bekerja secara profesional | SMK NEGERI 4 PANGKALPINANG, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | bukan kewenangan provinsi dan dinas puprprkp | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 64319 | 31-01-2023 | NICO PLAMONIA UTAMA, ST., MM | Fasilitasi, Pelatihan, Sertifikasi Tenaga Ahli & Tenaga Terampil Konstruksi | Permohonan pengadaan peralatab uji kompetensi perangkat dan aplikasi CBT untuk jurusan Teknika Kapal Niaga dan Nautika Kapal Niaga | SMK Negeri 4 Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 64335 | 31-01-2023 | NICO PLAMONIA UTAMA, ST., MM | Kompetensi guru masih kurang | Penambahan alokasi guru | SMK NEGERI 5 PANGKALPINANG, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 66429 | 31-01-2023 | NICO PLAMONIA UTAMA, ST., MM | Pengelolaan sekolah belum memadai | Pengecetan gedung sekolah, di karenakan belum pernah ada pengecetan ulang sejak di bangun 2011 | SMK NEGERI 5 PANGKALPINANG, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 66433 | 31-01-2023 | NICO PLAMONIA UTAMA, ST., MM | Masih kurangnya ketersediaan dan | Pengadaan gedung olahraga, karena lapangan olahraga sebelumnya sudah terendam | SMK NEGERI 4 PANGKALPINANG, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Untuk ditindaklanjuti . |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga | banjir dan tidak layak di gunakan | | | | | | | | |
| 66434 | 31-01-2023 | NICO PLAMONIA UTAMA, ST., MM | Belum optimal dan kurangnya instruktur pelatihan kerjasama dengan sektor swasta dan instansi pemerintah lainnya untuk menyedia instruktur serta sarana dan prasarana lembaga latihan kerja | Sekolah swasra kurang mendapat perhatian dari Pemprov | SMK - SMK SWASTA DI BANGKA BELITUNG, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS TENAGA KERJA | UPTD BLK DINAS TENAGA KERJA | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 66439 | 31-01-2023 | NICO PLAMONIA UTAMA, ST., MM | Pembangunan Sarana Prasarana Masyarakat | Permohonan peningkatan sarana/prasarana dan aprovval SMK NEGERI 4 PANGKALPINANG | SMK NEGERI 4 PANGKALPINANG, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 66442 | 31-01-2023 | NICO PLAMONIA UTAMA, ST., MM | Kurangnya sarana produktif SMK | Mengingat bangka belitung merupakan provinsi kepulauan dan SMK NEGERI 4 PANGKALPINANG merupakan sekolah kelautan dan perikanan agar menjadikan SMK NEGERI 4 PANGKALPINANG menjadi sentra laut dan perikanan | SMK NEGERI 4 PANGKALPINANG, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 66449 | 31-01-2023 | NICO PLAMONIA UTAMA, ST., MM | Pembangunan Sarana Prasarana Masyarakat | Belum adanya Universitas di Bangka Belitung untuk Jurusan Teknik Laboratorium Medik | SMK NEGERI 5 PANGKALPINANG, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67626 | 31-01-2023 | FIRMANSYAH LEVI | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | Renovasi dan perluasan masjid Nurul Hidayah Kampung Jawa Belinyu | Masjid Nurul Hidayah Kec.Belinyu Kab. Bangka , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 67644 | 31-01-2023 | FIRMANSYAH LEVI | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Renovasi Ruang Guru SMKN 1 Sungailiat | SMKN 1 Sungailiat Kec. Sungailiat Kab.Bangka, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 67658 | 31-01-2023 | FIRMANSYAH LEVI | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Renovasi ruang Lab. Perkantoran + peningkatan pembangunan ruang kelas Belajar SMKN1 Sungailiat | SMKN 1 Sungailiat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 67663 | 31-01-2023 | FIRMANSYAH LEVI | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Rehabilitasi Ruang Pertemuan (Peningkatan Luas Ruang Pertemuan) SMAN 1 Sungailiat | SMAN 1 Sungailiat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 67669 | 31-01-2023 | EKA BUDIARTHA, S.Mn., M.Si | Pembangunan Jalan & Jembatan | Pembangunan peninggian jalan di lokasi banjir berlokasi di ujung Desa Sukamandi | DESA SUKAMANDI, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | bukan kewenangan provinsi | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 67680 | 31-01-2023 | FIRMANSYAH LEVI | Masih kurangnya ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga | Pembangunan stadion mini lapangan bola Desa Penyamun Kecamatan Pemali | Desa Penyamun Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Untuk ditindaklanjuti . |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67691 | 31-01-2023 | EKA BUDIARTHA, S.Mn., M.Si | Pembangunan Jalan & Jembatan | Pembangunan jalan di desa suka mandi dari mulai kantor desa mengkubang menuju ujung Desa Suka Mandi | DESA SUKAMANDI, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | bukan kewenangan provinsi | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 67699 | 31-01-2023 | EKA BUDIARTHA, S.Mn., M.Si | Pembangunan Jalan & Jembatan | Pembangunan jalan di Desa Mempaya | DESA MEMPAYA, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | tidak ada kegiatan pembangunan jalan baru | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 67734 | 31-01-2023 | EKA BUDIARTHA, S.Mn., M.Si | Pembangunan Jalan & Jembatan | Pembangunan jalan di Desa Air Kelik | DESA AIR KELIK, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | tidak ada kegiatan pembangunan jalan baru | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 67756 | 31-01-2023 | DODY KUSDIAN, ST., MH | Sarana dan prasarana Perikanan tangkap masih minim dan belum memadai (Tambat labuh/Pelabuhan Perkanan/Alat bantu Penangkapan) | Permohonan Bantuan Alat Tangkap dan keperluan nelayan Kelompok Nelayan "Tunas Baru";<br>1. Fiber es uk 60 liter, AKI GS stra 70 Ampere, Lampu DC 50 Watt Mitsuyama, Pukat Udang, GPS Garmin 78S, Pancing Cumi Yozuri, Reel dan JoranShimano, Mata pancing Captain No 3, Timah jaring. | Kelurahan Temberan Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Ditolak | Pembagian peran kewenangan pemberdayaan nelayan kecil untuk Kapal 0-5GT di Kabupaten/ Kota | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 67760 | 31-01-2023 | EKA BUDIARTHA, S.Mn., M.Si | Pembangunan Jalan & Jembatan | Penambalan panjang dermaga/ pelabuhan nelayan di Desa Barung Mandi | DESA BURUNG MANDI, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | ketersediaan anggarannya |
| 67795 | 31-01-2023 | DODY KUSDIAN, ST., MH | Sarana dan prasarana Perikanan tangkap masih minim dan belum memadai (Tambat labuh/Pelabuhan Perkanan/Alat bantu Penangkapan) | Permohonan Bantuan Alat Tangkap dan Keperluan Nelayan Kelompok " ALAM SERRAT";<br>1. Fibe res uk 60 liter, aki GS ASTRA 70 Ampere, lampun DC 50 watt Mitsuyama, Pukat udang, GPS Garmin 78s, pancing cumi Yozuri, reel dan joran Shimano, mata pancing captain no 3, timah jaring | Kelurahan Air Itam, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Ditolak | Pembagian peran kewenangan pemberdayaan nelayan kecil untuk Kapal 0-5GT di Kabupaten/ Kota | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 67815 | 31-01-2023 | EKA BUDIARTHA, S.Mn., M.Si | Kurangnya pemenuhan infrastruktur pelabuhan pengumpan regional | Pembangunan dermaga/ pelabuhan nelayan di Dusun Malang lepar Desa Burung Mandi | DESA BURUNG MANDI, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERHUBUNGAN | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Ditolak | Dokumen Perencanaan, Dok Lingkungan dan Dok PKPRL belum tersedia. Masih terdapat PR DED yang belum dilaksanakan, DKP Provinsi fokus pada yg telah readyness creteria | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverifikasi sesuai kewenangan urusan dan anggaran |
| 67843 | 31-01-2023 | EKA BUDIARTHA, S.Mn., M.Si | Kurangnya pemenuhan infrastruktur pelabuhan pengumpan regional | Bantuan sarana kapal nelayan untuk kelompok nelayan di Desa Air Kelik, Mempaya dan Burung Mandi | DESA AIR KELIK, MEMPAYA DAN BURUNG MANDI, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERHUBUNGAN | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverifikasi sesuai kewenangan urusan dan anggaran |
| 67848 | 31-01-2023 | DODY KUSDIAN, ST., MH | Sarana dan prasarana Perikanan tangkap masih minim dan belum memadai (Tambat | Permohonan Bantuan Alat Tangkap Kelompok Usaha Bersama (KUB) " TUNAS HARAPAN";<br>1. Aki GS ASTRA 70 Ampere, lampun DC 50 watt Mitsuyama, GPS Garmin 78s, reel PANCING PENN BELT III 10.000, TALI | Jl. Depati Hamzah rt/rw 003/001 kel. air itam, bukit intan,, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Ditolak | Pembagian peran kewenangan pemberdayaan nelayan kecil untuk Kapal 0-5GT di | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | labuh/Pelabuhan Perkanan/Alat bantu Penangkapan) | ARIS MILLENIUM JALIN 0,75, kail kaptain no 3 | | | | | | Kabupaten/ Kota | | |
| 67865 | 31-01-2023 | EKA BUDIARTHA, S.Mn., M.Si | Sarana dan prasarana balai belum memadai dan masih minim serta penguatan SDM di Balai Pemuliaan ikan (Kualitas dan Kuantitas) belum optimal | Asuransi nelayan, bibit budaya ikan laut serta fiksi | DESA AIR KELIK, MEMPAYA DAN BURUNG MANDI, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Ditolak | data pendukung usulan dr pokir belum siap | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 67882 | 31-01-2023 | DODY KUSDIAN, ST., MH | Sarana dan prasarana Perikanan tangkap masih minim dan belum memadai (Tambat labuh/Pelabuhan Perkanan/Alat bantu Penangkapan) | permohonan bantuan alat tangkap nelayan KUB "PRLITA HATI";<br>1. Pukat milenium uk 6 inch, joran abu garsia, reel abu garsia 9000, mesin Yamaha 15 PK, Aki 70 Ampere, GPS Garmin 78S | jL. smp 10 rt/rw 008/003 kEL. sINAR bULAN kEC. bUKIT iNTAN, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Ditolak | Pembagian peran kewenangan pemberdayaan nelayan kecil untuk Kapal 0-5GT di Kabupaten/ Kota | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 67886 | 31-01-2023 | EKA BUDIARTHA, S.Mn., M.Si | Kurangnya pemenuhan infrastruktur pelabuhan pengumpan regional | Pengadaan lampu suar di pelabuhan dan lampu di dermaga nelayan | DESA AIR KELIK, MEMPAYA DAN BURUNG MANDI, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERHUBUNGAN | DINAS PERHUBUNGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverifikasi sesuai kewenangan urusan dan anggaran |
| 67904 | 31-01-2023 | EKA BUDIARTHA, S.Mn., M.Si | masih rendahnya kepatuhan pemegang izin penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan | Pengaliaan fungsi kawasan hutan di kawasan industri air kelik dan kawasan permukiman gunung nayo dan di pelabuhan nelayan di teluk asa | DESA AIR KELIK, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KEHUTANAN | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Dibahas lebih lanjut oleh Dinas LHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 67915 | 31-01-2023 | EKA BUDIARTHA, S.Mn., M.Si | Pemeliharaan Rutin/Berkala Jalan Jembatan | Pembangunan lanjutan untuk embung mempaya | DESA MEMPAYA, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | | | | diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 67926 | 31-01-2023 | FIRMANSYAH LEVI | Masih banyaknya kawasan permukiman yang belum terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) seperti jalan lingkungan dan drainase yang belum memadai, serta masih banyaknya rumah tidak layak huni yang ditempati oleh masyarakat. | Pembangunan dan perbaikan jalan akses rumah warga di Jalan Melati RT. 008 Parit 10 | Kelurahan Lubuk Kelik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | Aset bukan milik Provinsi | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 67929 | 31-01-2023 | DODY KUSDIAN, ST., MH | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi | Permohonan Bnatuan Peralatan Kantor Sekretariat KBO Bangka Belitung" 1. 1 unit PC sPESIFIKASI cORE i7, VGA GTX 1650, RAM 16 GB, MONITOR LED 24 INCH, HARDISK 2 TB, Hardisk ekternal, mic clip on full set, lampu led philipm50 watt, kamera canon 80d, lensa tamron 17-135mm, drone DJI Mavix, baterai drone | Jl. Pulau Bangka Ruko Citra Square no 3 air itam, bukit intan, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Akan diteruskan ke PD terkait untuk dipelajari dan ditindaklanjuti |
| 67937 | 31-01-2023 | EKA BUDIARTHA, S.Mn., M.Si | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan | Bantuan bibit tanaman untuk kelompok tani | KECEMATAN DAMAR, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | perkebunan masih kurang | | | | | | | | | |
| 67941 | 31-01-2023 | FIRMANSYAH LEVI | Pengelolaan sekolah belum memadai | Perbaikan dan pembangunan SD 11 Kel.Lubuk Kelik | Lubuk Kelik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 67947 | 31-01-2023 | EKA BUDIARTHA, S.Mn., M.Si | Pembangunan Jalan & Jembatan | Pembangunan jalan sepanjang 4 km di Desa Simpang Pesak | DESA SIMPANG PESAK, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | tidak ada kegiatan pembangunan jalan | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 67952 | 31-01-2023 | DODY KUSDIAN, ST., MH | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | permohonan bantuan bibit kelapa sawit kelompok tani matras makmur | kel. Matras, Kec. Sungailiat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 67962 | 31-01-2023 | FIRMANSYAH LEVI | belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | Pembangunan Tempat Belajar Agama (TPA) di Kelurahan Lubuk kelik. | Kelurahan Lubuk Kelik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | Biro Kesejahteran Rakyat | Biro Kesejahteran Rakyat | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 67968 | 31-01-2023 | DODY KUSDIAN, ST., MH | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) | permohonan bibit kelapa sawit kelompok tani piyai karya maju petaling jaya | desa petaling Kec. Mendo Barat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | | | | | | | | | |
| 67985 | 31-01-2023 | DODY KUSDIAN, ST., MH | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | permohonan bantuan bibit kelapa sawit kelompok taruna tani | kel. simpang perlang, kec. koba, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 67998 | 31-01-2023 | FIRMANSYAH LEVI | Lampu Penerangan Jalan | Pemasangan dan penambahan tiang listrik di kawasan rumah warga di belakang pasar kenanga | Kelurahan Kenanga Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERHUBUNGAN | DINAS PERHUBUNGAN | Ditolak | Kewenangan PT.PLN | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverifikasi sesuai kewenangan urusan dan anggaran |
| 68045 | 31-01-2023 | EKA BUDIARTHA, S.Mn., M.Si | Masih rendahnya pengembangan hasil hutan kayu dari hutan tanaman dan rendahnya pengembangan hasil hutan bukan kayu dari hasil budidaya | Untuk dapat di lakukan perubahan kawasan hutan di pesisir dan perkampungan masyarakat di Desa Tanjung Kelumpang | DESA TANJUNG KELUMPANG, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KEHUTANAN | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Dibahas lebih lanjut oleh Dinas LHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 68060 | 31-01-2023 | EKA BUDIARTHA, S.Mn., M.Si | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Kepada masyarakat Provinsi untuk bisa memberikan penghargaan kepada anak didik SD, SMP yang telah mewakili Provinsi dan kegiatan ELS2N di Tingkat Nasional | KECEMATAN SIMPANG PESAK, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68069 | 31-01-2023 | EKA BUDIARTHA, S.Mn., M.Si | Lampu Penerangan Jalan | Pengadaan lampu jalan di jalan Provinsi Kecematan Simpang Pesak | KECEMATAN SIMPANG PESAK, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERHUBUNGAN | DINAS PERHUBUNGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverifikasi sesuai kewenangan urusan dan anggaran |
| 68078 | 31-01-2023 | EKA BUDIARTHA, S.Mn., M.Si | Permasalahan pertanahan (status lahan) yang belum jelas untuk berinvestasi | Legalitas lahan pertanian dan permukiman di HL Gng Kik Karak Kelapa Kampit | KECEMATAN KELAPA KAMPIT, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Dinas terkait |
| 68084 | 31-01-2023 | EKA BUDIARTHA, S.Mn., M.Si | Pelebaran Jalan Menuju Standar | Pelebaran Jalan Provinsi di Dusun Balai Selatan dan Dusun Penirokan di Desa Mayang Kelapa Kampit Belitung Timur | DESA MAYANG, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | sudah masuk kedalam kegiatan apbd tahun 2023 | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 68087 | 31-01-2023 | FIRMANSYAH LEVI | Masih banyaknya kawasan permukiman yang belum terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) seperti jalan lingkungan dan drainase yang belum memadai, serta masih banyaknya rumah tidak layak huni yang ditempati oleh masyarakat. | Penambahan daya listrik untuk rumah warga di belakang pasar kenanga yang menurun menjelang malam | Kelurahan Kenanga Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Cabang Dinas ESDM Wilayah Bangka | Ditolak | Aset bukan milik Provinsi | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 68090 | 31-01-2023 | EKA BUDIARTHA, S.Mn., M.Si | Pelebaran Jalan Menuju Standar | Pelebaran Jalan di Dusun Aik Kelik Kecematan Damar Belitung Timur | DESA AIR KELIK, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN | Ditolak | masuk kedalam kegiatan apbd tahun 2023 | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | | | | sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 68094 | 31-01-2023 | FIRMANSYAH LEVI | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | Pembangunan kawasan pemakaman tionghoa | Kelurahan Kenanga Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 68100 | 31-01-2023 | EKA BUDIARTHA, S.Mn., M.Si | Pelebaran Jalan Menuju Standar | Pelebaran Jalan di Mempayak Kecematan Damar Belitung Timur | DESA MEMPAYA, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | masuk kedalam kegiatan apbd tahun 2023 | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 68106 | 31-01-2023 | FIRMANSYAH LEVI | Lampu Penerangan Jalan | Penambahan penerangan lampu jalan | Kelurahan Kuday Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERHUBUNGAN | DINAS PERHUBUNGAN | Ditolak | Kewenangan Kabupaten Bangka | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverifikasi sesuai kewenangan urusan dan anggaran |
| 68107 | 31-01-2023 | EKA BUDIARTHA, S.Mn., M.Si | Pelebaran Jalan Menuju Standar | Pelebaran Jalan di Desa Suka Mandi Kecematan Damar | DESA SUKA MANDI, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | masuk kedalam kegiatan apbd tahun 2023 | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 68115 | 31-01-2023 | FIRMANSYAH LEVI | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | Pembanguan TPA masjid Al-Ma'firoh | Kelurahan Kuday tepatnya di kawasan/perkampungan Air Hanyut Pengerukan bekas eks tambang , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 68122 | 31-01-2023 | EKA BUDIARTHA, S.Mn., M.Si | Pemeliharaan Rutin/Berkala Jalan Jembatan | Perbaikan Jalan Provinsi di jembatan Gantung Kecematan Gantung | KECEMATAN GANTUNG, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | Ditolak | bukan kewenangan provinsi | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | KAWASAN PERMUKIMAN | | | | dan ketersediaan anggarannya |
| 68129 | 31-01-2023 | EKA BUDIARTHA, S.Mn., M.Si | Pelebaran Jalan Menuju Standar | Pelebaran Jalan di Dusun Nujek Desa Batu Penyu Kecematan Gantung | DESA BATU PENYU, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 68137 | 31-01-2023 | EKA BUDIARTHA, S.Mn., M.Si | Pelebaran Jalan Menuju Standar | Pelebaran Jalan di Dusun Lilangan Kecematan Gantung | DESA LILANGAN, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 68150 | 31-01-2023 | EKA BUDIARTHA, S.Mn., M.Si | Perencanaan, Pembangunan Tanggul Sungai | Pembuatan Alur Sungai Sekamandi Kecematan Damar | KECEMATAN DAMAR, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 76617 | 02-02-2023 | HERMAN SUHADI, S.Sos | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | Bantuan Pembangunan dan Peralatan/Perlengkapan Pondok Pesantren Nurul Hikmah Al Azhar | Desa Air Ruai Kecamatan Pemali , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 76626 | 02-02-2023 | HERMAN SUHADI, S.Sos | Pengelolaan sekolah belum memadai | belum adanya pagar sekolah | SMP Negeri 3 Belinyu, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 76636 | 02-02-2023 | HERMAN SUHADI, S.Sos | Masih banyaknya kawasan permukiman yang belum terfasilitasi Prasarana, Sarana dan | Pembangunan/Rehabilitasi Pasar Kite Sungailiat | Pasar Kite Sungailiat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | Ditolak | Aset bukan milik Provinsi | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Utilitas Umum (PSU) seperti jalan lingkungan dan drainase yang belum memadai, serta masih banyaknya rumah tidak layak huni yang ditempati oleh masyarakat. | | | | | KAWASAN PERMUKIMAN | | | | ketersediaan anggarannya |
| 76640 | 02-02-2023 | HERMAN SUHADI, S.Sos | Pembangunan Jalan & Jembatan | Pembuatan Jalan Usaha Tani | Desa Dalil Kecamatan Bakam, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Ditolak | Aset bukan Milik Provinsi | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya..koordinasi dengan dinas pertanian |
| 76647 | 02-02-2023 | HERMAN SUHADI, S.Sos | Pelebaran Jalan Menuju Standar | Pelebaran Jalan Sungailiat Puding Besar (dari jalan Sri Ayu ke jalan Simpang Telkom) | Jalan Sungailiat Puding Besar, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | dilaksanakan pada ta. 2023 | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 76660 | 02-02-2023 | HERMAN SUHADI, S.Sos | Sarana dan prasarana Perikanan tangkap masih minim dan belum memadai (Tambat labuh/Pelabuhan Perkanan/Alat bantu Penangkapan) | Membutuhkan Perahu dan Mesin Tempel untuk Nelayan di Kabupaten Bangka | Para Nelayan di Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Ditolak | Pembagian peran kewenangan pemberdayaan nelayan kecil <5GT di Kabupaten/ Kota | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76684 | 02-02-2023 | HERMAN SUHADI, S.Sos | Sarana dan prasarana Perikanan tangkap masih minim dan belum memadai (Tambat labuh/Pelabuhan Perkanan/Alat bantu Penangkapan) | Pembangunan Parak (tempat penjemuran ikan) Permanen | Desa Tanjung Binga, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 76691 | 02-02-2023 | HERMAN SUHADI, S.Sos | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | Pembangunan/Rehabilitasi Gereja HKBP Sungailiat | Gereja HKBP Sungailiat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 76702 | 02-02-2023 | HERMAN SUHADI, S.Sos | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | Pembangunan/Rehabilitas Kelenteng Kwanti Miau Amal Abadi Desa Batu Rusa | Desa Batu Rusa , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 76713 | 02-02-2023 | HERMAN SUHADI, S.Sos | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | Pembangunan/Rehabilitasi Masjid Agung Sungailiat | Masjid Agung Sungailiat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 76721 | 02-02-2023 | HERMAN SUHADI, S.Sos | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | Pembangunan/Rehabilitasi GPDI Eklesia Deniang Cit | Desa Cit Kecamatan Riau Silip, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 76735 | 02-02-2023 | HERMAN SUHADI, S.Sos | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | Pembangunan/Rehabilitasi Yayasan Daarusalam Karya Makmur Pemali | Desa Karya Makmur Kecamatan Pemali, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 76752 | 02-02-2023 | HERMAN SUHADI, S.Sos | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | Pembangunan/Rehabilitasi Yayasan Roudotul Ilmi Pemali (Pondok Modern Roudotul Ilmi Pemali) | Kecamatan Pemali, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 76762 | 02-02-2023 | HERMAN SUHADI, S.Sos | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | Pembangunan Masjid Santri Perempuan Ponpes Bahrul Ulum Islamic Center Sungailiat | Sinar Baru, Sungailiat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 76883 | 02-02-2023 | HERMAN SUHADI, S.Sos | Pelebaran Jalan Menuju Standar | pembebasan lahan yang masih terselesaikan | depan kantor Oprasional PDAM merawang s.d ruas jalan pesantren Nurul Ikhlas Baturusa Kecamatan Merawang , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | Bukan kewenangan Provinsi | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya,,k |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | ordinasin dengan balai jalan nasional |
| 76927 | 02-02-2023 | HERMAN SUHADI, S.Sos | Pembangunan Jalan & Jembatan | Pembuatan Jalan Usaha Tani di Simpang Ilut Desa Petaling Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka | Simpang Ilut Desa Petaling Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya..kordinasi dengan dinas pertanian |
| 76935 | 02-02-2023 | HERMAN SUHADI, S.Sos | Pembangunan Jalan & Jembatan | Pembangunan Jalan Dusun Cengel Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka – Khap Hin Desa Air Duren Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka | Dusun Cengel Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka – Khap Hin Desa Air Duren Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | bukan kewenangan provinsi | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 77138 | 02-02-2023 | H. MUHAMAD YUNUS, SE., MM | Pembangunan Sarana Prasarana Masyarakat | Belum adanya Pembangunan & Pengembangan Bengkel Praktik Siswa di SMKN I Payung | SMKN I PAYUNG KECAMATAN PAYUNG KABUPATEN BANGKA SELATAN, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | - | Ditolak | salah nama pengusul | - | - |
| 77174 | 02-02-2023 | H. MUHAMAD YUNUS, SE., MM | Pembangunan Sarana Prasarana Masyarakat | Belum adanya Pembangunan Gedung Laboratorium Kultur Jaringan beserta Peralatannya di SMKN I Pulau Besar Kecamatan Pulau Besar Kabupaten Bangka Selatan | SMKN I Pulau Besar Kecamatan Pulau Besar Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | - | Ditolak | salah nama pengusul | - | - |
| 77216 | 02-02-2023 | H. MUHAMAD YUNUS, SE., MM | Pembangunan Sarana Prasarana Masyarakat | Belum tersedianya Sumur bor untuk pemenuhan kebutuhan air bersih di SMKN I Pulau Besar Kecamatan Pulau Besar Kabupaten Bangka Selatan | SMKN I PULAU BESAR KECAMATAN PULAU BESAR KABUPATEN BANGKA SELATAN, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | - | Ditolak | salah nama pengusul | - | - |
| 77496 | 02-02-2023 | FITRA WIJAYA | Lampu Penerangan Jalan | Kurangnya penerangan di sepanjang jalan desa bukit kijang | Desa Bukit Kijang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERHUBUNGAN | DINAS PERHUBUNGAN | Ditolak | Kewenangan Nasional | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverifikasi sesuai |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | kewenangan urusan dan anggaran |
| 77500 | 02-02-2023 | FITRA WIJAYA | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | Rehabilitasi Masjid | Desa Tanjung Gunung, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 77518 | 02-02-2023 | FITRA WIJAYA | Masih banyaknya kawasan permukiman yang belum terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) seperti jalan lingkungan dan drainase yang belum memadai, serta masih banyaknya rumah tidak layak huni yang ditempati oleh masyarakat. | Rehabilitasi balai desa | Desa Tanjung Gunung, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | Aset bukan Milik Provinsi | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 77526 | 02-02-2023 | FITRA WIJAYA | Pembangunan Jalan & Jembatan | Tidak adanya Pagar Perkuburan | Desa Bukit Kijang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Biro Kesejahteran Rakyat | Ditolak | Aset bukan Milik Provinsi | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 77538 | 02-02-2023 | FITRA WIJAYA | Masih banyaknya kawasan permukiman yang belum terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) seperti jalan lingkungan dan drainase yang | Tidak ada tedmon dirumah wakaf | Desa Bukit Kijang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Biro Kesejahteran Rakyat | Ditolak | PSU Perumahan untuk kewenangan Kabupaten/ Kota | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | belum memadai, serta masih banyaknya rumah tidak layak huni yang ditempati oleh masyarakat. | | | | | | | | | |
| 77557 | 02-02-2023 | FITRA WIJAYA | Masih kurangnya ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga | belum adanya fasilitas olahraga yang memadai | Desa Bukit Kijang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Untuk ditindaklanjuti. |
| 77569 | 02-02-2023 | FITRA WIJAYA | Masih kurangnya ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga | Tidak adanya gedung olahraga untuk masyarakat | Desa Bukit Kijang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Untuk ditindaklanjuti. |
| 77576 | 02-02-2023 | FITRA WIJAYA | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | Kurangnya bibit sawit bagi petani | Desa Bukit Kijang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 77585 | 02-02-2023 | FITRA WIJAYA | Sarana dan prasarana Perikanan tangkap masih minim dan belum memadai (Tambat labuh/Pelabuhan Perkanan/Alat bantu Penangkapan) | Banyaknya jaring ikan milik nelayan yang sudah tidak layak pakai | Desa Bukit Kijang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Ditolak | Pembagian peran kewenangan pemberdayaan nelayan kecil <5GT di Kabupaten/Kota | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77593 | 02-02-2023 | FITRA WIJAYA | Sarana dan prasarana Perikanan tangkap masih minim dan belum memadai (Tambat labuh/Pelabuhan Perkanan/Alat bantu Penangkapan) | Mesin perahu nelayan yang sudah tidak berfungsi dengan semestinya | Desa Bukit Kijang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Ditolak | Pembagian peran kewenangan pemberdayaan nelayan kecil <5GT di Kabupaten/ Kota | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 77605 | 02-02-2023 | FITRA WIJAYA | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | Masih terbatasnya bibit sapi di desa bukit kijang | Desa Bukit Kijang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 77891 | 02-02-2023 | EKA BUDIARTHA, S.Mn., M.Si | Kurangnya pemenuhan infrastruktur pelabuhan pengumpan regional | Perbaikan Dermaga Nelayan di Burung Mandi dan Malang Lepau Kecematan Damar | Kecematan Damar, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERHUBUNGAN | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Ditolak | Dokumen Perencanaan, Dok Lingkungan dan Dok PKPRL belum tersedia. Masih terdapat PR DED yang belum dilaksanakan, DKP Provinsi fokus pada yg telah readyness creteria | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverifikasi sesuai kewenangan urusan dan anggaran |
| 78073 | 02-02-2023 | MUHAMMAD AMIN | Pembangunan Sarana Prasarana Masyarakat | Belum tersedianya / adanya Ruang Praktik Siswa ( RPS) Jurusan Teknik Sepeda Motor untuk Pengembangan Bengkel Praktik Siswa di SMKN I | SMKN I PAYUNG KECAMATAN PAYUNG KABUPATEN BANGKA SELATAN, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Payung Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan | | | | | | | | kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 78097 | 02-02-2023 | MUHAMMAD AMIN | Pembangunan Sarana Prasarana Masyarakat | Belum tersedianya Pembangunan Gedung Laboratorium Kultur Jaringan beserta Peralatannya | SMKN I PULAU BESAR KECAMATAN PULAU BESAR KABUPATEN BANGKA SELATAN, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS PENDIDIKAN | Ditolak | PSU Perumahan untuk kewenangan Kabupaten/ Kota | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 78128 | 02-02-2023 | MUHAMMAD AMIN | Pembangunan Sarana Prasarana Masyarakat | Belum tersedianya sumur bor untuk ketersediaan Air bersih di SMKN I Pulau Besar Kecamatan Pulau Besar Kabupaten Bangka Selatan | SMKN I PULAU BESAR KECAMATAN PULAU BESAR KABUPATEN BANGKA SELATAN, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III | Ditolak | PSU Perumahan untuk kewenangan Kabupaten/ Kota | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 78213 | 02-02-2023 | EKA BUDIARTHA, S.Mn., M.Si | Perencanaan, Pembangunan Pengembangan, Pengelolaan, Pemeliharaan Jaringan Irigasi | pembangunan talud atau siring di Desa Mempaya | Desa mempaya, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | bukan kewenangan provinsi | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 78232 | 02-02-2023 | EKA BUDIARTHA, S.Mn., M.Si | Pembangunan Sarana Prasarana Masyarakat | bantuan mobil pengangkutan sampah untuk TPS | Kecamatan Damar, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | Usulan Fasilitas Kendaraan diusulkan ke BPPW lewat aplikasi SI-SPKP | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 78261 | 02-02-2023 | EKA BUDIARTHA, S.Mn., M.Si | Pengelolaan Ruang Laut, Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pemberdayaan Masyarakat | Kepada DKP untuk melakukan operasi penertiban di laut di Kecematan Simpang Pesak di karenakan banyak beroperasi kapal cantrang besar yang berasal dari luar Belitung | Kecamatan Simpang Pesak, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pesisir belum optimal, serta Sarana dan Prasarana di Pulau-pulau Kecil belum memadai | | | | | | | | | |
| 78267 | 02-02-2023 | EKA BUDIARTHA, S.Mn., M.Si | Sarana dan prasarana budidaya air payau (Vaname, Kepiting Bakau) dan budidaya air laut (Kerapu) belum didukung dengan teknologi terbaru dan belum dikembangkan di sentra budidaya yang ada | Kepada pemerintah provinsi untuk membuat standar perizinan tambak udang yang banyak di bangun di Desa Tanjung Kelumpang Kecematan Simpang Pesak | desa Tanjung Kelumpang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Ditolak | Kewenangan ada di Kabupaten Belitung Timur | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 78273 | 02-02-2023 | EKA BUDIARTHA, S.Mn., M.Si | Kurangnya pertambangan yang "good mining practices" di wilayah Belitung Timur | Di minta kepada perusahaan pertambangan pasirfan kaolin di Kecematan Simpang Pesak untuk melakukan reklamasi atas bebas lahan tambang dan melakukan koordinasi dengan desa dan pihak Kecematan | Kecamatan Simpang Pesak, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | Cabang Dinas ESDM Wilayah Belitung Tmur | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Ditolak | Ditolak, namun DESDM secara berkala mengingatkan para pemegang IUP melaksanakan kewajiban reklamasi | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Dinas ESDM untuk dibahas lebih lanjut |
| 78280 | 02-02-2023 | EKA BUDIARTHA, S.Mn., M.Si | masih rendahnya kepatuhan pemegang izin penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan | Untuk dapat di lakukan perubahan kawasan hutan di pesisir dan perkampungan masyarakat di Desa Tanjung Kelumpang | Desa Tanjung kelumpang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KEHUTANAN | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Dibahas lebih lanjut oleh Dinas LHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 78578 | 02-02-2023 | FITRA WIJAYA | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | Pembangunan Gereja karena belum ada gereja | Koba, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79361 | 03-02-2023 | Ust. H. DEDE PURNAMA ALZULAMI Lc. MA, Hk | belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | BANTUAN DANA HIBAH UNTUK YAYASAB DARUL ADZKAR PANGKALPINANG | JALAN JEBUNG DALAM, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | Biro Kesejahteran Rakyat | Biro Kesejahteran Rakyat | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 79371 | 03-02-2023 | Ust. H. DEDE PURNAMA ALZULAMI Lc. MA, Hk | belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | BANTUAN DANA HIBAH UNTUK PONDOK PESANTREN TAHFIDHUL QUR'AN MANAABI'UL KAROMAH | JALAN HORMEN MADDATI, KELURAHAN MELINTANG, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | Biro Kesejahteran Rakyat | Biro Kesejahteran Rakyat | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 79379 | 03-02-2023 | Ust. H. DEDE PURNAMA ALZULAMI Lc. MA, Hk | Masih banyaknya kawasan permukiman yang belum terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) seperti jalan lingkungan dan drainase yang belum memadai, serta masih banyaknya rumah tidak layak huni yang ditempati oleh masyarakat. | PEMBUATAN SIRING DI JALAN JEBUNG DALAM | JALAN JEBUNG DALAM, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | aset jalan bukan aset provinsi | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80567 | 03-02-2023 | JOHANSEN TUMANGGOR, SE., M.Ak | Lampu Penerangan Jalan | lampu penerangan jalan tidak hidip | JL Klenteng kelurahan jerambah gantung, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERHUBUNGAN | DINAS PERHUBUNGAN | Ditolak | Kewenangan Kota Pangkalpinang | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverifikasi sesuai kewenangan urusan dan anggaran |
| 80577 | 03-02-2023 | JOHANSEN TUMANGGOR, SE., M.Ak | Masih banyaknya kawasan permukiman yang belum terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) seperti jalan lingkungan dan drainase yang belum memadai, serta masih banyaknya rumah tidak layak huni yang ditempati oleh masyarakat. | rumah dinas pendeta dan ruang sekolah mingguan | jemaat HKI Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Biro Kesejahteran Rakyat | Ditolak | PSU Perumahan untuk kewenangan Kabupaten/ Kota | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya..koordinasi dengan kesra |
| 80589 | 03-02-2023 | JOHANSEN TUMANGGOR, SE., M.Ak | Pemeliharaan Rutin/Berkala Jalan Jembatan | perbaikan bandar RT 1 DAN RT IV | JAALAN PATIN 1 SAMPAI SUMBER REJO, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | Saluran Jalan adalah bagian Konstruksi Jalan. Aset jalan bukan milik Provinsi | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 80596 | 03-02-2023 | JOHANSEN TUMANGGOR, SE., M.Ak | Pemeliharaan Rutin/Berkala Jalan Jembatan | Jalan berlobang dan rusak | jl RE Martadinata , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80599 | 03-02-2023 | JOHANSEN TUMANGGOR, SE., M.Ak | Pemeliharaan Rutin/Berkala Jalan Jembatan | pembuatan talud untuk tanah perkuburan | kelurahan ampui, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | masuk dalam jalan nasional | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 80601 | 03-02-2023 | JOHANSEN TUMANGGOR, SE., M.Ak | Lampu Penerangan Jalan | lampu jalan | konghin desa mangkol, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERHUBUNGAN | DINAS PERHUBUNGAN | Ditolak | Kewenangan Kabupaten Bangka Tengah | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverifikasi sesuai kewenangan urusan dan anggaran |
| 81181 | 03-02-2023 | H. JAWARNO KS, S.IP | Pengelolaan sekolah belum memadai | Belum adanya bus sekolah menuju SMA di Petaling | Desa Paya Benua, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 81192 | 03-02-2023 | H. JAWARNO KS, S.IP | Butuh banyak pendampingan oleh konsultan Plut KUKM terhadap UMKM yang sebarannya tidak merata antara di desa dan kota | Pegiat UKM di Desa Paya Benua belum memiliki kelompok/organisasi | Desa Paya Benua, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke PD |
| 81203 | 03-02-2023 | H. JAWARNO KS, S.IP | prasarana pertanian ( JUT, JUP, irigasi, lantai jemur, dll) sub sekotor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan masih minim | Belum adanya gudang tempat penyimpanan alat mesin (gudang alsin) | Desa Paya Benua, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 81229 | 03-02-2023 | H. JAWARNO KS, S.IP | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, | PPL di Kec. Mendo Barat sangat keterbatasan sarana dan fasilitas alat pertanian | Kecamatan Mendo Barat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | | | | | KETAHANAN PANGAN | | | | |
| 81240 | 03-02-2023 | H. JAWARNO KS, S.IP | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | Gapoktan Desa Penagan keluhkan bantuan pupuk subsidi yang sudah tidak ada lagi | Kecamatan Mendo Barat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 81250 | 03-02-2023 | H. JAWARNO KS, S.IP | Pembangunan Jalan & Jembatan | Jalan usaha tani yang belum diselesaikan awal dibangun tahun 2019 | Desa Paya Benua, Desa Kemuja, Desa Petaling, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya..koordinasi dengan dinas pertanian |
| 81267 | 03-02-2023 | H. JAWARNO KS, S.IP | Perencanaan, Pembangunan Pengembangan, Pengelolaan, Pemeliharaan Jaringan Irigasi | Diakibatkan aliran saluran air yang cukup memprihatinkan di daerah kemuja | Desa Kemuja, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 81280 | 03-02-2023 | H. JAWARNO KS, S.IP | Pembangunan Jalan & Jembatan | Karena pembangunan jalan penghubung dari desa terak menuju desa kace belum terealisasi dan diharapkan ditahun 2023 dapat terealisasi | Desa Kace, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN | Ditolak | bukan kewenangan provinsi | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | | | | kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 81299 | 03-02-2023 | H. JAWARNO KS, S.IP | Masih banyaknya kawasan permukiman yang belum terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) seperti jalan lingkungan dan drainase yang belum memadai, serta masih banyaknya rumah tidak layak huni yang ditempati oleh masyarakat. | Banyaknya drainase yang tidak berfungsi maksimal di Desa Kace sehingga menyebabkan banjir | Desa Kace, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | aset bukan aset provinsi | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 81707 | 03-02-2023 | WARKAMNI | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Minimnya sarana pendukung pendidikan yakni plafon sekolah TK-TPA Raudhatul Jannah yang belum bisa terpasang | Desa Nibung, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 81727 | 03-02-2023 | WARKAMNI | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Masih kurangnya sarana prasarana gedung belajar santri | Desa Munggu, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 81738 | 03-02-2023 | WARKAMNI | Lampu Penerangan Jalan | Minimnya penerangan jalan disepanjang jalan dusun mulia Desa Penyaki | Dusun Mulia Desa Penyak, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERHUBUNGAN | DINAS PERHUBUNGAN | Ditolak | Kewenangan Nasional | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverifikasi sesuai kewenangan |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | urusan dan anggaran |
| 81749 | 03-02-2023 | WARKAMNI | Lampu Penerangan Jalan | Minimnya lampu penerangan jalan yang mengarah ke masjid al-hidayah desa nibung | Desa Nibung, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERHUBUNGAN | DINAS PERHUBUNGAN | Ditolak | Kewenangan Kabupaten Bangka Tengah | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverifikasi sesuai kewenangan urusan dan anggaran |
| 82071 | 03-02-2023 | WARKAMNI | Lampu Penerangan Jalan | Kurangnya akses penerangan jalan desa beluluk | Desa Beluluk, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERHUBUNGAN | DINAS PERHUBUNGAN | Ditolak | Kewenangan Nasional BPTD Kemenhub | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverifikasi sesuai kewenangan urusan dan anggaran |
| 82078 | 03-02-2023 | WARKAMNI | prasarana pertanian ( JUT, JUP, irigasi, lantai jemur, dll) sub sekotor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan masih minim | Minimnya produksi sapi di bangka belitung, sehingga membuat warga berkeinginan ternak sapi | Desa Nibung, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 82087 | 03-02-2023 | WARKAMNI | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | Kurangnya pasokan daging sapi untuk wilaya bangka belitung sehingga membuat masyarakat berniat untuk beternak sapi (bibit sapi) | Desa Munggu, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 82094 | 03-02-2023 | WARKAMNI | Masih banyaknya kawasan permukiman yang belum terfasilitasi Prasarana, | Akibat curah hujan yang cukup tinggi membuat air naik kerumah warga saat hujan | Desa Nibung, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sarana dan Utilitas Umum (PSU) seperti jalan lingkungan dan drainase yang belum memadai, serta masih banyaknya rumah tidak layak huni yang ditempati oleh masyarakat. | | | | | KAWASAN PERMUKIMAN | | | | dan ketersediaan anggarannya |
| 82100 | 03-02-2023 | WARKAMNI | Masih banyaknya kawasan permukiman yang belum terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) seperti jalan lingkungan dan drainase yang belum memadai, serta masih banyaknya rumah tidak layak huni yang ditempati oleh masyarakat. | Drainasi sepanjang jalan beluluk (belakang puskesmas pangkalan baru) belum punya siring | Desa Beluluk, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | aset jalan bukan aset provinsi | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 82105 | 03-02-2023 | WARKAMNI | Masih banyaknya kawasan permukiman yang belum terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) seperti jalan lingkungan dan drainase yang belum memadai, serta masih | Akibat curah hujan yang cukup tinggi membuat air masuk ke badan jalan, tak jarang juga masuk kerumah warga | Desa Pinang Sebatang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | banyaknya rumah tidak layak huni yang ditempati oleh masyarakat. | | | | | | | | | |
| 82115 | 03-02-2023 | WARKAMNI | Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah | Tempat ibadah (masjid) yang sempit dan terasa panas membuat para warga merasa tidak nyaman dalam beribadah sehingga berusaha mengusulkan untuk pemasangan bajaringan untuk masjid | Desa Nibung, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 82408 | 03-02-2023 | H. JAWARNO KS, S.IP | Pemeliharaan Rutin/Berkala Jalan Jembatan | Cukup banyak jalan yang rusak parah dan sudah beberapa kali diusulkan perbaikan | Desa Kace, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | bukan kewenangan provinsi | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 82462 | 03-02-2023 | H. TAUFIK MARDIN, S.Sos | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Pembangunan Pagar dan Tempat parkir | SMA N 1 Sijuk, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 82476 | 03-02-2023 | H. TAUFIK MARDIN, S.Sos | Masih banyaknya kawasan permukiman yang belum terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) seperti jalan lingkungan dan drainase yang belum memadai, serta masih banyaknya rumah tidak layak huni yang | Pengerukan aliran sungai yang sudah dangkal | Desa Air Selumar dan desa batu itam, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ditempati oleh masyarakat. | | | | | | | | | |
| 82505 | 03-02-2023 | H. TAUFIK MARDIN, S.Sos | Pelebaran Jalan Menuju Standar | Pelebaran jalan dari desa pelepak puteh sampai trans bali | Kecamatan sijuk, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | sudah masuk kedalam kegiatan apbd tahun 2023 | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 82519 | 03-02-2023 | H. TAUFIK MARDIN, S.Sos | Pembangunan Sarana Prasarana Masyarakat | Pembangunan gapura batas kabupaten di Desa Pelepak puteh dengan desa cendil | Kecamata Sijuk, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | Pekerjaan tersebut dilakukan oleh Biro Pemerintah Kabupaten/ Kota | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 82529 | 03-02-2023 | H. TAUFIK MARDIN, S.Sos | Lampu Penerangan Jalan | Pengadaan lampu penerangan dan tangga dermaga | Desa Tanjung tinggi, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERHUBUNGAN | DINAS PERHUBUNGAN | Ditolak | Kewenangan Nasional BPTD Kemenhub | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverifikasi sesuai kewenangan urusan dan anggaran |
| 82535 | 03-02-2023 | H. TAUFIK MARDIN, S.Sos | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | bantuan pengadaan bibit sapi | desa sijuk, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 82546 | 03-02-2023 | H. TAUFIK MARDIN, S.Sos | Perencanaan, Pembangunan Pengembangan, Pengelolaan, Pemeliharaan Jaringan Irigasi | Perbaikan jalan irigasi dari desa air selumar ke desa sijuk | Kecamatan Sijuk, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | Ditolak | Bukan Kewenangan Dinas PUPRPRKP Provinsi | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | KAWASAN PERMUKIMAN | | | | dan ketersediaan anggarannya |
| 82583 | 03-02-2023 | H. TAUFIK MARDIN, S.Sos | Belum ditetapkannya secara tepat peruntukan lahan untuk investasi di setiap keb/kota | program pembukaan lahan dan pengadaan bibit sawit | Desa sungai padang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Dinas terkait |
| 82638 | 03-02-2023 | H. TAUFIK MARDIN, S.Sos | Pembangunan Jalan & Jembatan | Pembangunan dermaga | Desa sungai padang, desa batu itam dan desa perpat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya..koordinasi dengan dinas perhubungan atau dinas kelautan |
| 82676 | 03-02-2023 | H. TAUFIK MARDIN, S.Sos | Sarana dan prasarana Perikanan tangkap masih minim dan belum memadai (Tambat labuh/Pelabuhan Perkanan/Alat bantu Penangkapan) | Pembangunan pancang perahu karena sudah banyak yang rusak | Desa batu itam, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Ditolak | Pembagian peran kewenangan pemberdayaan nelayan kecil <5GT di Kabupaten/ Kota | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 82712 | 03-02-2023 | H. TAUFIK MARDIN, S.Sos | Perencanaan, Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai | Pembangunan dermaga dan pemecah ombak | Pulau Seliu, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya..koordinasi dan wewenang balai BWS |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82717 | 03-02-2023 | H. TAUFIK MARDIN, S.Sos | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | Pembangunan gedung serbaguna untuk olahraga | SMA N I membalong, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 82729 | 03-02-2023 | H. TAUFIK MARDIN, S.Sos | belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | Bantuan dana hibah untuk pembangunan masjid al-jariyah | desa membalong, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | Biro Kesejahteran Rakyat | Biro Kesejahteran Rakyat | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 82744 | 03-02-2023 | H. TAUFIK MARDIN, S.Sos | belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | Bantua dana hibah untuk pembangunan ruang kelas yayasan an-nawawi mubarok | Desa membalong, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | Biro Kesejahteran Rakyat | Biro Kesejahteran Rakyat | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 82745 | 03-02-2023 | H. TAUFIK MARDIN, S.Sos | Pembangunan Jalan & Jembatan | Pembangunan plat duiker | Desa air selumar, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | sudah masuk kedalam kegiatan apbd tahun 2023 | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |
| 82771 | 03-02-2023 | H. TAUFIK MARDIN, S.Sos | Sarana dan prasarana Perikanan tangkap masih | Pengadaan alat tangkap ikan untuk nelayan | Desa perpat, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Ditolak | Pembagian peran kewenangan pemberdaya | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | minim dan belum memadai (Tambat labuh/Pelabuhan Perkanan/Alat bantu Penangkapan) | | | | | | | an nelayan kecil <5GT di Kabupaten/ Kota | | |
| 84285 | 04-02-2023 | AMRI CAHYADI, ST | masih kurangnya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan | kekurangan guru profesional | SMAN 1 Belinyu , Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 84286 | 04-02-2023 | AMRI CAHYADI, ST | masih kurangnya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan | kurangnya guru profesional | SMAN 1 Riau Silip, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 84287 | 04-02-2023 | AMRI CAHYADI, ST | Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan | sarana masih dirasakan kurang memenuhi standar pendidikan nasional | SMAN 1 Riau Silip, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 84289 | 04-02-2023 | AMRI CAHYADI, ST | belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | pengajuan pembanguan masjid Al Barokah desa kimak | Desa Kimak, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | Biro Kesejahteran Rakyat | Biro Kesejahteran Rakyat | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 84292 | 04-02-2023 | AMRI CAHYADI, ST | belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan | usulan pembangunan tempat wudhu, kamar mandi, dan pemasangan baja ringan masjid at taqwa pangkal niur desa banyuasin | Desa Banyuasin, Riau Silip, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | Biro Kesejahteran Rakyat | Biro Kesejahteran Rakyat | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | | | | | | | | | |
| 84295 | 04-02-2023 | AMRI CAHYADI, ST | belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | usulan seragam majelis taklim yayasan mujahidin | sungailiat, bangka, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | Biro Kesejahteran Rakyat | Biro Kesejahteran Rakyat | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 84298 | 04-02-2023 | AMRI CAHYADI, ST | - masih rendahnya kompetensi SDM kebudayaan | peningkatan SDM wisata | desa dalil, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Dinas terkait |
| 84301 | 04-02-2023 | AMRI CAHYADI, ST | belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | usulan perabikan dan pembangunan masjid nurul iman, desa saing | desa sang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | Biro Kesejahteran Rakyat | Biro Kesejahteran Rakyat | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 84306 | 04-02-2023 | AMRI CAHYADI, ST | prasarana pertanian ( JUT, JUP, irigasi, lantai jemur, dll) sub sekotor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan | usulan peternakan sapi untuk mewujudkan ekonomi masyarakat | desa tanjung pura bangka, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | dan peternakan masih minim | | | | | | | | | |
| 84309 | 04-02-2023 | AMRI CAHYADI, ST | belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | usulan bantuan pembangunan masjid nurul falah desa bakam | desa bakam, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | Biro Kesejahteran Rakyat | Biro Kesejahteran Rakyat | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 84311 | 04-02-2023 | AMRI CAHYADI, ST | Lampu Penerangan Jalan | usulan penerangan lampu jalan sepanjang pangkalpinang - mentok | desa petaling - kemuja - puding - bakam, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERHUBUNGAN | DINAS PERHUBUNGAN | Ditolak | Kewenangan Nasional BPTD Kemenhub | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverifikasi sesuai kewenangan urusan dan anggaran |
| 84313 | 04-02-2023 | AMRI CAHYADI, ST | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | usulan bantuan bibit sawit | desa kemuja, desa petaling, bakam, puding besar, berbura, riau silip, dan belinyu, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |
| 84316 | 04-02-2023 | AMRI CAHYADI, ST | Sarana dan prasarana Perikanan tangkap masih minim dan belum memadai (Tambat labuh/Pelabuhan Perkanan/Alat bantu Penangkapan) | tangkap ikan bagi nelayan | desa belinyu, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Ditolak | Pembagian peran kewenangan pemberdayaan nelayan kecil <5GT di Kabupaten/ Kota | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84321 | 04-02-2023 | AMRI CAHYADI, ST | Kurangyna Sarana dan Prasarana Perpustakaan | usulan rumah baca | desa bakam, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | Ditolak | tidak diakomodir karena kewenangan kabupaten/ kota bukan provinsi | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 84326 | 04-02-2023 | AMRI CAHYADI, ST | Masih tingginya kekerasan terhadap perempuan | minimnya perlindugan anak yang mengarah pada pelanggaran HAM | se kabupaten bangka, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti usulan ini. |
| 84329 | 04-02-2023 | AMRI CAHYADI, ST | Masih rendahnya Masyarakat Desa yang terlatih dalam Kewirausahaan | usulan pelatih traingi wirausahan untuk meningkatkan kompetensi usaha di desa desa | se kabupaten bangka, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Ditolak | tidak diakomodir, bukan kewenangan dinsospmd tetapi kewenangan kab kota | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan keperangkat daerah |
| 84336 | 04-02-2023 | AMRI CAHYADI, ST | - masih rendahnya lembaga kesenian tradisional yang dibina | usulan pembina budaya tradisional seperti pencak silat | bakam dan puding besar, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Dinas terkait |
| 84340 | 04-02-2023 | AMRI CAHYADI, ST | Sarana pertanian ( ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang | usulan bibit pertanian yang produktif berupa sawit, teh, kopi dll | desa kota kapur, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke PD terkait |

| NO | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84349 | 04-02-2023 | AMRI CAHYADI, ST | belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | usulan renovasi fisik musola tanwirul umam desa kemuja | desa kemuja, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | Biro Kesejahteran Rakyat | Biro Kesejahteran Rakyat | Diteruskan ke Forum SKPD | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke perangkat daerah terkait |
| 84365 | 04-02-2023 | AMRI CAHYADI, ST | Angka kejadian penyakit menular dan tidak menular masih tinggi | usulan pengetatan bahaya penyakit menular dan sosilasi hal tsb masih minim | desa mabat - mangka, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS KESEHATAN | DINAS KESEHATAN | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan ke Dinas Kesehatan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 84371 | 04-02-2023 | AMRI CAHYADI, ST | Belum maksimalnya kelompok masyarakat yang mendayagunakan teknologi tepat guna (TTG) | usulan sosialisasi penggunaan teknologi yang efeektif | desa kapuk - maras senang, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota | - | Validasi Sekretariat Dewan | diteruskan keperangkat daerah terkait |
| 84378 | 04-02-2023 | AMRI CAHYADI, ST | Kurangnya Fasilitasi dan Promosi Pelaku Usaha Ekspor | usulan pembinaan pelaku ekspor | bangka, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | Ditolak | Kasifikasi UKM Micro, sesuai UU 23/2014 merupakan kewenangan kabupaten kota | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke PD |
| 84380 | 04-02-2023 | AMRI CAHYADI, ST | Pelebaran Jalan Menuju Standar | usulan pelebaran jalan | desa sempan, Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten / Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | Ditolak | defisit anggaran | Validasi Sekretariat Dewan | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverfiikasi sesuai urusan, kewenangan, dan ketersediaan anggarannya |

**Tabel 6.1**

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)**

**PROVINSI BANGKA BELITUNG**

**TAHUN 2024**

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | DINAS PENDIDIKAN | | | | | | 566.899.270.826,00 | | | | | | | 649.522.126.075,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 566.899.270.826,00 | | | | | | | 649.522.126.075,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 566.899.270.826,00 | | | | | | | 649.522.126.075,00 | |
| 1 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 404.764.846.121,00 | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 485.838.235.064,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 1.000.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 1.000.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 5 Dokumen | 700.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 700.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 7 Laporan | 300.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 393.412.969.889,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 475.600.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 3000 Orang/ Bulan | 392.812.969.889,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 475.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 14 Laporan | 600.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 600.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | - | | | - | 223.359.832,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 223.359.832,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 2 Laporan | 223.359.832,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 223.359.832,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 250.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 250.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.05 | 0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | 1 Unit | 250.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 250.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 6.174.011.680,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 6.174.075.232,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 10.999.980,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 11.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 30.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 30.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 12 Paket | 29.997.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 30.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 Paket | 10.000.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 10.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 Paket | 749.997.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 750.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 12 Dokumen | 14.360.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 14.360.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 12 Paket | 162.696.700,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 162.755.232,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 12 Laporan | 4.250.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 4.250.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 915.960.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 915.960.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 950.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 950.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 1 Unit | 450.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 450.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 10 Unit | 500.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 2.154.797.720,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 384.800.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 26.400.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 26.400.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 167.997.720,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 168.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 0 Laporan | 0,00 | Kab. Bangka, Merawang, Batu Rusa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 1.960.400.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 190.400.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 599.707.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 1.256.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 46.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Simpang Teritip, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 50.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 2 Unit | 120.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 120.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 28 Unit | 86.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Tanjungpendam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 86.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 347.707.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 1.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| 2 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 158.384.424.705,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 159.933.891.011,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | - | - | | | - | 63.463.781.579,00 | | | - | - | - | - | 67.177.141.985,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0001 | Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | | | | 1 Unit | 4.500.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | - | - | | 4.500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | | | | 5 Ruang | 1.500.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 1.500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0010 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 2 Ruang | 640.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 350.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0012 | Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun | | | | 0 Ruang | 0,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 5.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0013 | Pembangunan Asrama Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 1 Unit | 500.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0014 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 8 Unit | 2.500.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 3.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0016 | Pembangunan Kantin Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 3 Unit | 495.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 495.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0019 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 10 Ruang | 2.500.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 2.500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0020 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 1 Ruang | 132.810.579,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 132.810.579,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0022 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 3 Ruang | 900.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 900.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0023 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 3 Ruang | 900.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 900.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0025 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 7 Ruang | 1.750.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 1.750.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0026 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laboratorium IPA yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 3 Ruang | 900.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 900.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0027 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 2 Ruang | 450.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 450.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0028 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 3 Ruang | 900.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 900.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0029 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 0 Ruang | 0,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 1.500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0036 | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | | | | 10 Paket | 1.000.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 1.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0038 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | | | | 10 Paket | 1.000.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Simpang Pesak | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 1.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0039 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | | | | 1 Paket | 2.000.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 2.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0041 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | | | | 0 Paket | 1.000.000.000,00 | Kab. Bangka, Merawang, Batu Rusa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 1.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0045 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | | | | 5000 Peserta didik | 5.000.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 5.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0046 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | | | | 1 Paket | 1.187.089.594,00 | Kab. Bangka Selatan, Simpang Rimba, Simpang Rimba | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 1.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0049 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 250 Peserta Didik | 5.000.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 7.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0051 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | | | | 33 Orang | 400.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Parittiga, Telak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0052 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | | | | 71 Satuan Pendidikan | 1.200.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 1.200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0053 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS | | | | 23 Satuan Pendidikan | 13.083.070.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 13.083.070.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0060 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | 1 Dokumen | 560.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0061 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | | | | 1 Dokumen | 500.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0068 | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat | | | | 3 Unit | 1.000.000.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 1.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0070 | Pembangunan Ruang Laboratorium | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun | | | | 4 Ruang | 6.049.100.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 1.199.550.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0071 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 3 Ruang | 900.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 900.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0072 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | | | | 2 Ruang | 1.816.711.406,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 1.816.711.406,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0073 | Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi sedang/berat | | | | 2 Unit | 500.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0075 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | | | | 400 Orang | 2.500.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 2.500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0078 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | | | | 45 Satuan Pendidikan | 200.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | - | - | | | - | 77.215.885.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 75.051.990.900,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0004 | Pembangunan Ruang Praktik Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun | | | | 7 Ruang | 8.976.603.222,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 8.976.603.222,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0005 | Pembangunan Ruang Laboratorium | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun | | | | 13 Ruang | 6.640.718.072,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 6.640.718.072,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0006 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 5 Ruang | 680.726.604,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 680.726.604,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0007 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 1 Ruang | 1.318.985.583,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 1.318.985.583,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0008 | Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun | | | | 2 Ruang | 1.200.143.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 1.325.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0010 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 12 Unit | 2.687.873.068,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 2.687.873.068,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0018 | Rehabilitasi Ruang Laboratorium | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi | | | | 8 Ruang | 1.600.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Bukit Betung | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 1.600.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0028 | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | | | | 1 Paket | 5.000.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 5.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0030 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia | | | | 1 Paket | 1.000.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Bukit Betung | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 1.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0031 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | | | | 2000 Paket | 2.000.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 5.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0033 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | | | | 5 Paket | 5.000.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangka Selatan, Simpang Rimba, Permis | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 5.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0035 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | | | | 3 Unit | 235.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 235.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0037 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | | | | 2000 Peserta didik | 2.000.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Dendang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 2.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0038 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | | | | 1 Paket | 5.012.785.451,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Penyampak | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 5.012.785.451,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0041 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 250 Peserta Didik | 5.090.450.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Tanjung Binga | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 800.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0043 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | | | | 50 Orang | 300.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Ranggas | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0045 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | | | | 0 Satuan Pendidikan | 7.000.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 6.501.698.900,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0046 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS | | | | 58 Satuan Pendidikan | 15.196.700.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Tukak | DAK NON FISIK-BOS REGULER | - | - | - | | 15.196.700.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0053 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | 1 Dokumen | 500.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0054 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | | | | 1 Dokumen | 500.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0065 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 5 Unit | 2.000.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 2.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0069 | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat | | | | 0 Ruang | 500.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0072 | Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | | | | 0 Satuan Pendidikan | 275.900.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 275.900.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0073 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | | | | 250 Orang | 2.500.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Wilayah | - | | 2.500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | - | - | | | - | 17.704.758.126,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 17.704.758.126,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | | | | 1 Ruang | 195.742.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 195.742.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 2 Ruang | 391.484.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 391.484.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0005 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 1 Ruang | 229.288.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 229.288.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0008 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 5 Unit | 978.710.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 978.710.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0010 | Pembangunan Kantin Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 1 Unit | 863.990.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 863.990.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0037 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | | | | 9 Paket | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0038 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | | | | 1 Paket | 400.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 400.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0040 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | | | | 1 Paket | 409.607.494,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 409.607.494,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0044 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | | | | 9 Peserta Didik | 750.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 750.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0045 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | | | | 1 Paket | 500.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0048 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 350 Peserta Didik | 5.000.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Damar, Sukamandi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 5.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0051 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | | | | 9 Satuan Pendidikan | 3.500.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 3.500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0052 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS | | | | 2 Satuan Pendidikan | 1.099.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Koba, Nibung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 1.099.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0059 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | 1 Dokumen | 200.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0060 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | | | | 1 Dokumen | 200.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0070 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah | | | | 6 Ruang | 1.174.452.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 1.174.452.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0071 | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | | | | 9 Satuan Pendidikan | 250.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 250.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0073 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | | | | 150 Orang | 500.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0079 | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat | | | | 8 Ruang | 1.062.484.632,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 1.062.484.632,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| 3 | 1 | 01 | 03 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | - | 35persen | | | - | 1.250.000.000,00 | | | | | | 25persen | 1.250.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 03 | 1.01 | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah | - | - | | | - | 500.000.000,00 | | | - | Pembangunan Wilayah | - | - | 500.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 03 | 1.01 | 0003 | Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersedia | | | | 1 Buku | 500.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Wilayah | - | | 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 03 | 1.02 | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus | - | - | | | - | 750.000.000,00 | | | - | Pembangunan Wilayah | - | - | 750.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 03 | 1.02 | 0003 | Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersedia | | | | 1 Buku | 500.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Wilayah | - | | 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 03 | 1.02 | 0004 | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkat Kompetensinya | | | | 27 Orang | 250.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 250.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| 4 | 1 | 01 | 04 | | | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | - | 88persen | | | - | 1.500.000.000,00 | | | | | | 86persen | 1.500.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 04 | 1.01 | | Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi | - | - | | | - | 1.500.000.000,00 | | | - | Pembangunan Wilayah | - | - | 1.500.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 04 | 1.01 | 0001 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus | | | | 1 Dokumen | 500.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Wilayah | - | | 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 04 | 1.01 | 0002 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus | | | | 3 Laporan | 1.000.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Wilayah | - | | 1.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| 5 | 1 | 01 | 06 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA | - | 100persen | | | - | 1.000.000.000,00 | | | | | | 100persen | 1.000.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 06 | 1.01 | | Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | - | - | | | - | 1.000.000.000,00 | | | - | Pembangunan Wilayah | - | - | 1.000.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 06 | 1.01 | 0006 | Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi | | | | 100 Peserta Didik | 1.000.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Wilayah | - | | 1.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | | | | | | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I | | | | | | 65.712.524.705,00 | | | | | | | 74.143.200.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 65.712.524.705,00 | | | | | | | 74.143.200.000,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 65.712.524.705,00 | | | | | | | 74.143.200.000,00 | |
| 6 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 7.601.000.000,00 | | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 6.106.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 525.000.000,00 | | | - | - | - | - | 530.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 5.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Jeruk | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 10.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 3 Paket | 20.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Beluluk | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 20.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 20.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Beluluk | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 20.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 7 Paket | 80.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Beluluk | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 80.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 5 Laporan | 400.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Beluluk | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 400.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I |
| | 1 | 01 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 6.400.000.000,00 | | | - | - | - | - | 4.900.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 3 Paket | 300.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Beluluk | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 300.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I |
| | 1 | 01 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I |
| | 1 | 01 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 5.500.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 4.000.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I |
| | 1 | 01 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 500.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Beluluk | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 600.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 496.000.000,00 | | | - | - | - | - | 496.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 6.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Beluluk | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 6.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 3 Laporan | 145.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Beluluk | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 145.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 45.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Beluluk | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 45.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 3 Laporan | 300.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Beluluk | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 300.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 180.000.000,00 | | | - | - | - | - | 180.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 4 Unit | 80.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Beluluk | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 80.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 4 Unit | 100.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Beluluk | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 100.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I |
| 7 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 58.111.524.705,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 68.037.200.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | - | - | | | - | 31.037.200.000,00 | | | - | - | - | - | 34.461.700.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0001 | Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | | | | 3 Unit | 6.000.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Beluluk | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 5.500.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | | | | 3 Ruang | 1.000.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Beluluk | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 1.000.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0011 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 1 Ruang | 500.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Beluluk | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 500.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0014 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 7 Unit | 1.750.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Beluluk | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 600.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0019 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 4 Ruang | 540.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Beluluk | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 350.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0020 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 4 Ruang | 300.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Beluluk | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 300.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0036 | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | | | | 23 Paket | 5.782.200.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Beluluk | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 5.950.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0038 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | | | | 10 Paket | 1.200.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Beluluk | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 1.200.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0039 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | | | | 10 Paket | 800.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Beluluk | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 1.800.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0046 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | | | | 3 Paket | 500.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 500.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0049 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 1000 Peserta Didik | 965.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Beluluk | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 965.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0050 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | 1 Orang | 6.000.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Beluluk | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 6.446.700.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0051 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | | | | 23 Orang | 150.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Beluluk | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 150.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0052 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | | | | 3 Satuan Pendidikan | 300.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Beluluk | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 1.000.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0057 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | | 200 Orang | 200.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Beluluk | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 5.000.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0068 | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat | | | | 7 Unit | 3.050.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Beluluk | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 2.200.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0072 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | | | | 3 Ruang | 1.800.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 800.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0073 | Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi sedang/berat | | | | 3 Unit | 200.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Beluluk | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 200.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | - | - | | | - | 22.824.324.705,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 24.832.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0010 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 12 Unit | 5.310.324.705,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 4.000.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0028 | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | | | | 3 Paket | 325.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Beluluk | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0032 | Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia | | | | 1 Unit | 700.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 750.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0033 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | | | | 5 Paket | 3.284.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 3.500.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0038 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | | | | 5 Paket | 1.815.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 1.900.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0041 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 1000 Peserta Didik | 700.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Beluluk | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 700.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0042 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | 1 Orang | 7.900.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Beluluk | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 7.992.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0043 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | | | | 10 Orang | 140.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Beluluk | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 140.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0045 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | | | | 23 Satuan Pendidikan | 100.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Beluluk | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 3.000.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0050 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | | 200 Orang | 100.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Beluluk | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 400.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0064 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | | | | 3 Ruang | 1.700.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Beluluk | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 1.700.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0069 | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat | | | | 4 Ruang | 750.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Beluluk | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 750.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | - | - | | | - | 4.250.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 8.743.500.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | | | | 1 Ruang | 385.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Beluluk | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0008 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 7 Unit | 1.815.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 5.000.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0045 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | | | | 3 Paket | 100.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Beluluk | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 100.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0049 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus | | | | 1 Orang | 1.200.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Beluluk | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 1.493.500.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0050 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | | | | 50 Orang | 150.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Beluluk | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 150.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0070 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah | | | | 6 Ruang | 600.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Beluluk | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 2.000.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I |
| | | | | | | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II | | | | | | 55.135.357.000,00 | | | | | | | 39.824.381.500,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 55.135.357.000,00 | | | | | | | 39.824.381.500,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 55.135.357.000,00 | | | | | | | 39.824.381.500,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 8 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 1.865.500.000,00 | | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 1.800.500.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 922.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 987.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 10.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 20.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 150.000.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 150.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 15.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 20.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 40.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 35.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 7.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 7.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 1 Paket | 60.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 60.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 1 Laporan | 40.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 45.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 600.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 650.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II |
| | 1 | 01 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 350.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 250.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 1 Paket | 150.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 50.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II |
| | 1 | 01 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 200.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 200.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 263.500.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 268.500.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 5.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 5.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 70.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 75.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 188.500.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 188.500.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 330.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 295.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 60.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 70.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 1 Unit | 20.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 25.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 200.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 150.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 50.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 50.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II |
| 9 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 53.269.857.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 38.023.881.500,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | - | - | | | - | 38.137.257.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 22.744.080.500,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0001 | Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | | | | 1 Unit | 17.858.341.500,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Sinar Jaya Jelutung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0014 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 14 Unit | 2.903.380.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 5.672.700.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0015 | Pembangunan Fasilitas Parkir | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun | | | | 1 Unit | 157.800.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 330.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0016 | Pembangunan Kantin Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 1 Unit | 156.805.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 495.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0019 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 7 Ruang | 2.154.278.500,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 2.154.278.500,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0020 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 2 Ruang | 430.826.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 440.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0022 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 2 Ruang | 231.000.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 231.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0023 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 1 Ruang | 220.140.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 231.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0024 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 1 Ruang | 229.333.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 231.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0027 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 1 Ruang | 220.000.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 220.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0028 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 1 Ruang | 406.700.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 462.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0036 | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | | | | 7 Paket | 2.249.480.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 2.254.428.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0041 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | | | | 9 Paket | 2.244.000.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 935.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0049 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 150 Peserta Didik | 700.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 770.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0050 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | 167 Orang | 4.901.800.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 4.901.800.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0067 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 1 Unit | 219.620.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 665.874.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0068 | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat | | | | 6 Unit | 1.218.196.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 1.331.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0071 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 2 Ruang | 231.000.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 231.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0073 | Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi sedang/berat | | | | 2 Unit | 292.767.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 418.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0075 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | | | | 150 Orang | 700.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 550.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0076 | Penataan Ruang/Sudut Baca | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata | | | | 1 Ruang | 411.790.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 220.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | - | - | | | - | 13.600.600.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 13.520.600.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0004 | Pembangunan Ruang Praktik Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun | | | | 1 Ruang | 3.000.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Sinar Jaya Jelutung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 1.500.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0010 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 1 Unit | 1.000.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Sinar Jaya Jelutung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 1.500.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0016 | Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi | | | | 1 Ruang | 1.800.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 2.000.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0032 | Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia | | | | 540 Unit | 1.080.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Sinar Jaya Jelutung<br>Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung<br>Kab. Bangka, Belinyu, Air Jukung<br>Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling Banjar<br>Kab. Bangka, Bakam, Bakam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 1.500.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0041 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 100 Peserta Didik | 500.000.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 600.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0042 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | 130 Orang | 3.520.600.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 3.520.600.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0062 | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat | | | | 1 Unit | 500.000.000,00 | Kab. Bangka, Belinyu, Air Jukung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 600.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0069 | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat | | | | 10 Ruang | 2.000.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Sinar Jaya Jelutung<br>Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung<br>Kab. Bangka, Belinyu, Air Jukung<br>Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling Banjar<br>Kab. Bangka, Bakam, Bakam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 2.000.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0073 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | | | | 0 Orang | 200.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 300.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | - | - | | | - | 1.532.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 1.759.201.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0008 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 2 Unit | 568.200.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 462.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0009 | Pembangunan Fasilitas Parkir | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun | | | | 1 Unit | 137.600.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 231.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0040 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | | | | 1 Paket | 227.201.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 227.201.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0049 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus | | | | 22 Orang | 377.000.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 377.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0069 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 1 Unit | 106.299.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 231.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0077 | Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat | | | | 1 Ruang | 115.700.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 231.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II |
| | | | | | | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III | | | | | | 41.083.000.000,00 | | | | | | | 41.918.700.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 41.083.000.000,00 | | | | | | | 41.918.700.000,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 41.083.000.000,00 | | | | | | | 41.918.700.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 10 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 3.037.500.000,00 | | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 3.285.200.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 1.150.000.000,00 | | | - | - | - | - | 1.251.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 5 Paket | 520.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 550.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 2 Paket | 100.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 110.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 50.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 55.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 6.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 3 Paket | 75.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 80.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 500 Laporan | 400.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 450.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III |
| | 1 | 01 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 1.200.000.000,00 | | | - | - | - | - | 1.300.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1.200.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 1.300.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 627.500.000,00 | | | - | - | - | - | 668.200.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 7.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 7.700.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 30.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 33.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 25.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 27.500.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 13 Laporan | 565.500.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 600.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 60.000.000,00 | | | - | - | - | - | 66.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 5 Unit | 50.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 55.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 4 Unit | 10.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 11.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III |
| 11 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 38.045.500.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 38.633.500.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | - | - | | | - | 17.329.300.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 19.594.900.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | | | | 1 Ruang | 702.400.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Bangka Selatan, Simpang Rimba, Permis | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 705.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0014 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 7 Unit | 2.350.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 3.000.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0015 | Pembangunan Fasilitas Parkir | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun | | | | 4 Unit | 400.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 300.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0016 | Pembangunan Kantin Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 2 Unit | 544.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 1.000.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0019 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 7 Ruang | 1.300.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 1.000.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0022 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 2 Ruang | 400.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 430.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0036 | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | | | | 400 Paket | 1.151.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 900.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0049 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 100 Peserta Didik | 600.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 550.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0050 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | 261 Orang | 7.109.900.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 7.109.900.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0051 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | | | | 100 Orang | 300.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 200.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0067 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 2 Unit | 952.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 1.000.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0072 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | | | | 3 Ruang | 1.270.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 3.000.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0076 | Penataan Ruang/Sudut Baca | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata | | | | 6 Ruang | 250.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 400.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | - | - | | | - | 19.637.600.000,00 | | | - | - | - | - | 18.360.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0008 | Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun | | | | 1 Ruang | 2.820.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 3.300.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0010 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 1000 m dan 1 musholl Unit | 2.801.100.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 3.000.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0011 | Pembangunan Fasilitas Parkir | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun | | | | 6 Unit | 300.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 330.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0016 | Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi | | | | 2 Ruang | 300.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 300.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0028 | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | | | | 50 Paket | 470.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 170.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0038 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | | | | 4 Paket | 3.925.800.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 2.000.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0041 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 0 Peserta Didik | 405.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 410.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0042 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | 107 Orang | 4.033.900.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 4.500.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0062 | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat | | | | 3 Unit | 300.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 300.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0064 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | | | | 2 Ruang | 1.301.800.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 3.200.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0069 | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat | | | | 15 Ruang | 2.980.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 850.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | - | - | | | - | 1.078.600.000,00 | | | - | - | - | - | 678.600.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0008 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 1 Unit | 400.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0049 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus | | | | 16 Orang | 678.600.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 678.600.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III |
| | | | | | | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV | | | | | | 30.678.265.098,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 29.523.365.098,00 | | | | | | | 0,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 29.523.365.098,00 | | | | | | | 0,00 | |
| 12 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 772.686.385,00 | | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 32.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 32.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 593.186.385,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 0 Paket | 3.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 40 Paket | 500.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 0 Paket | 28.200.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 0 Dokumen | 3.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 1 Paket | 28.986.385,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 0 Laporan | 30.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 125.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 0 Laporan | 85.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 0 Laporan | 40.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 22.500.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 0 Unit | 15.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 0 Unit | 7.500.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV |
| 13 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 28.750.678.713,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | - | - | | | - | 18.256.466.713,00 | | | - | - | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | | | | 0 Ruang | 975.428.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0010 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 0 Ruang | 0,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0011 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 0 Ruang | 0,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | - | | 0,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0012 | Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun | | | | 0 Ruang | 1.300.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0014 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 0 Unit | 942.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0019 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 0 Ruang | 800.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0020 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 0 Ruang | 2.563.042.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0022 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 0 Ruang | 450.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0023 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 0 Ruang | 475.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0025 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 0 Ruang | 400.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0036 | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | | | | 0 Paket | 500.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0039 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | | | | 0 Paket | 500.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0040 | Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia | | | | 0 Unit | 0,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0041 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | | | | 0 Paket | 300.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0046 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | | | | 0 Paket | 0,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0049 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 0 Peserta Didik | 411.056.341,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0050 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | 0 Orang | 3.732.300.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0051 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | | | | 0 Orang | 0,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0052 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | | | | 0 Satuan Pendidikan | 500.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0067 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 0 Unit | 424.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0068 | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat | | | | 0 Unit | 500.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0070 | Pembangunan Ruang Laboratorium | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun | | | | 0 Ruang | 1.595.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0071 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 0 Ruang | 558.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0072 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | | | | 0 Ruang | 980.640.372,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0073 | Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi sedang/berat | | | | 0 Unit | 350.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | - | - | | | - | 7.291.200.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0010 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 0 Unit | 600.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0028 | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | | | | 0 Paket | 500.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0033 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | | | | 0 Paket | 500.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0041 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 0 Peserta Didik | 172.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0042 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | 0 Orang | 3.619.200.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0045 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | | | | 0 Satuan Pendidikan | 100.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0064 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | | | | 0 Ruang | 1.100.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0065 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 0 Unit | 500.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0069 | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat | | | | 0 Ruang | 0,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0073 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | | | | 0 Orang | 200.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | - | - | | | - | 3.203.012.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0035 | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | | | | 0 Paket | 200.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0038 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | | | | 0 Paket | 200.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0040 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | | | | 0 Paket | 200.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0042 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | | | | 0 Unit | 700.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0049 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus | | | | 0 Orang | 565.500.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0050 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | | | | 0 Orang | 150.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0076 | Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 0 Unit | 600.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0078 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 0 Ruang | 587.512.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV |
| | X | | | | | NON URUSAN | | | | | | 1.154.900.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | X | XX | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX | | | | | | 1.154.900.000,00 | | | | | | | 0,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 14 | X | XX | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 1.154.900.000,00 | | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 0,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 180.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 0,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 0 Laporan | 180.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV |
| | X | XX | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 750.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 0,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 2 Unit | 750.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV |
| | X | XX | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 152.800.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 0,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 0 Laporan | 2.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV |
| | X | XX | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 0 Laporan | 150.800.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV |
| | X | XX | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 72.100.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 0,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 0 Unit | 72.100.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV |
| | | | | | | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V | | | | | | 76.896.333.000,00 | | | | | | | 85.714.600.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 76.896.333.000,00 | | | | | | | 85.714.600.000,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 76.896.333.000,00 | | | | | | | 85.714.600.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 15 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 1.525.933.000,00 | | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 1.678.600.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 741.293.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 811.900.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 42.265.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 46.500.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 54.000.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 60.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 3.600.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 4.200.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 1 Paket | 47.928.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 52.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 1 Laporan | 54.500.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 58.200.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 495.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 547.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 1 Dokumen | 44.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 44.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V |
| | 1 | 01 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 382.600.000,00 | | | - | - | - | - | 452.500.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 1 Unit | 300.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 350.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V |
| | 1 | 01 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 10 Unit | 82.600.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 102.500.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 263.900.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 269.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 11.000.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 12.500.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 64.400.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 68.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 188.500.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 188.500.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 138.140.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 145.200.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 3 Unit | 138.140.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 145.200.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V |
| 16 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 75.370.400.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 84.036.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | - | - | | | - | 35.170.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 34.170.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | | | | 3 Ruang | 1.000.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 1.500.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0010 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 6 Ruang | 1.000.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 1.200.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0011 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 3 Ruang | 1.000.000.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0012 | Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun | | | | 4 Ruang | 3.000.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 2.000.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0014 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 22 Unit | 3.000.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 2.000.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0015 | Pembangunan Fasilitas Parkir | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun | | | | 4 Unit | 1.000.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 600.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0016 | Pembangunan Kantin Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 6 Unit | 2.000.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 1.000.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0019 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 21 Ruang | 3.000.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 3.000.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0020 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 1 Ruang | 300.000.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 100.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0024 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 1 Ruang | 300.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 500.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0036 | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | | | | 25 Paket | 1.000.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 1.000.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0038 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | | | | 13 Paket | 2.000.000.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 1.000.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0039 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | | | | 6051 Paket | 500.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 1.000.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0041 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | | | | 13 Paket | 1.000.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 2.000.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0049 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 200 Peserta Didik | 1.500.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 2.000.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0050 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | 100 Orang | 3.770.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 3.770.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0061 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | | | | 1 Dokumen | 500.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 500.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0067 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 2 Unit | 800.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 1.000.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0068 | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat | | | | 5 Unit | 1.000.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 2.000.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0070 | Pembangunan Ruang Laboratorium | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun | | | | 9 Ruang | 3.000.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 4.500.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0071 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 2 Ruang | 700.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 1.000.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0072 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | | | | 10 Ruang | 3.000.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 1.500.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0074 | Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat | | | | 1 Unit | 300.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 500.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0075 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | | | | 100 Orang | 500.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 500.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | - | - | | | - | 35.934.400.000,00 | | | - | - | - | - | 45.635.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | | | | 4 Ruang | 2.000.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 2.400.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0004 | Pembangunan Ruang Praktik Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun | | | | 3 Ruang | 4.000.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 6.250.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0005 | Pembangunan Ruang Laboratorium | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun | | | | 3 Ruang | 2.000.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 1.500.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0006 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 3 Ruang | 500.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 750.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0008 | Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun | | | | 3 Ruang | 3.000.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 1.450.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0009 | Pembangunan Asrama Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 2 Unit | 2.000.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 2.500.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0010 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 15 Unit | 10.000.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 15.500.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0018 | Rehabilitasi Ruang Laboratorium | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi | | | | 2 Ruang | 200.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 300.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0028 | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | | | | 1 Paket | 500.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 625.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0030 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia | | | | 12 Paket | 1.000.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 2.250.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0031 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | | | | 5 Paket | 500.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 925.600.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0041 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 1250 Peserta Didik | 1.250.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 1.550.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0042 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | 172 Orang | 6.484.400.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 6.484.400.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0054 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | | | | 1 Dokumen | 500.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 500.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0063 | Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi | | | | 5 Ruang | 1.000.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 1.550.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0065 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 1 Unit | 500.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 600.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0073 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | | | | 100 Orang | 500.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 500.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | - | - | | | - | 4.266.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 4.231.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0008 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 2 Unit | 1.000.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 1.000.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0038 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | | | | 270 Paket | 135.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 500.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0049 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus | | | | 30 Orang | 1.131.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 1.131.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0060 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | | | | 1 Dokumen | 500.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 500.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0070 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah | | | | 2 Ruang | 1.000.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 600.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0073 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | | | | 100 Orang | 500.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 500.000.000,00 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V |
| | | | | | | SMAN 1 PANGKAL PINANG | | | | | | 2.817.255.000,00 | | | | | | | 1.014.455.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 2.817.255.000,00 | | | | | | | 1.014.455.000,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 2.817.255.000,00 | | | | | | | 1.014.455.000,00 | |
| 17 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 488.255.000,00 | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 488.255.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 442.755.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 442.755.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 39.984.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 39.984.000,00 | SMAN 1 PANGKAL PINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 49.950.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 49.950.000,00 | SMAN 1 PANGKAL PINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 21.835.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 21.835.000,00 | SMAN 1 PANGKAL PINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 89.996.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 89.996.000,00 | SMAN 1 PANGKAL PINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 12 Dokumen | 2.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 2.000.000,00 | SMAN 1 PANGKAL PINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 2 Paket | 120.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 120.000.000,00 | SMAN 1 PANGKAL PINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 118.990.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 118.990.000,00 | SMAN 1 PANGKAL PINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 3.500.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 3.500.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 3 Laporan | 3.500.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 3.500.000,00 | SMAN 1 PANGKAL PINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 42.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 42.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 22.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 22.000.000,00 | SMAN 1 PANGKAL PINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 20 Unit | 20.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 20.000.000,00 | SMAN 1 PANGKAL PINANG |
| 18 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 2.329.000.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 526.200.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | - | - | | | - | 2.329.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 526.200.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0043 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | | | | 10 Unit | 156.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 16.200.000,00 | SMAN 1 PANGKAL PINANG |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0049 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 1083 Peserta Didik | 348.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 348.000.000,00 | SMAN 1 PANGKAL PINANG |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0053 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS | | | | 1 Satuan Pendidikan | 1.620.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOS REGULER | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 162.000.000,00 | SMAN 1 PANGKAL PINANG |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0078 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | | | | 1 Satuan Pendidikan | 205.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMAN 1 PANGKAL PINANG |
| | | | | | | SMAN 2 PANGKAL PINANG | | | | | | 2.491.500.000,00 | | | | | | | 1.188.000.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 2.491.500.000,00 | | | | | | | 1.188.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 2.491.500.000,00 | | | | | | | 1.188.000.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 19 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 324.000.000,00 | | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 378.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 180.950.000,00 | | | - | - | - | - | 216.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 15.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 20.000.000,00 | SMAN 2 PANGKAL PINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 25.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 30.300.000,00 | SMAN 2 PANGKAL PINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 23.450.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 35.000.000,00 | SMAN 2 PANGKAL PINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 10.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 10.000.000,00 | SMAN 2 PANGKAL PINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 2.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 3.000.000,00 | SMAN 2 PANGKAL PINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 1 Paket | 60.500.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 67.500.000,00 | SMAN 2 PANGKAL PINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 120 Laporan | 45.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 50.200.000,00 | SMAN 2 PANGKAL PINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 99.500.000,00 | | | - | - | - | - | 101.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 2.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 2.000.000,00 | SMAN 2 PANGKAL PINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 97.500.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 99.000.000,00 | SMAN 2 PANGKAL PINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 43.550.000,00 | | | - | - | - | - | 61.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 6.100.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 6.000.000,00 | SMAN 2 PANGKAL PINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 30 Unit | 10.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 15.000.000,00 | SMAN 2 PANGKAL PINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 27.450.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 40.000.000,00 | SMAN 2 PANGKAL PINANG |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 20 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 2.167.500.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 810.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | - | - | | | - | 2.167.500.000,00 | | | - | - | - | - | 810.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0049 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 1010 Peserta Didik | 324.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 378.000.000,00 | SMAN 2 PANGKAL PINANG |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0053 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS | | | | 0 Satuan Pendidikan | 1.411.500.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOS REGULER | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMAN 2 PANGKAL PINANG |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0078 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | | | | 1 Satuan Pendidikan | 432.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 432.000.000,00 | SMAN 2 PANGKAL PINANG |
| | | | | | | SMAN 3 PANGKAL PINANG | | | | | | 1.152.000.000,00 | | | | | | | 1.344.000.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 1.152.000.000,00 | | | | | | | 1.344.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 1.152.000.000,00 | | | | | | | 1.344.000.000,00 | |
| 21 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 345.600.000,00 | | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 403.200.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 278.600.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 324.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 17.600.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 20.000.000,00 | SMAN 3 PANGKAL PINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 70.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 80.000.000,00 | SMAN 3 PANGKAL PINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 12.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 15.000.000,00 | SMAN 3 PANGKAL PINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 4 Paket | 65.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 75.000.000,00 | SMAN 3 PANGKAL PINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 12 Dokumen | 9.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 9.000.000,00 | SMAN 3 PANGKAL PINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 4 Paket | 70.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat | PAJAK DAERAH | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 80.000.000,00 | SMAN 3 PANGKAL PINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 4 Laporan | 35.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 45.000.000,00 | SMAN 3 PANGKAL PINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 4.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 5.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 4 Laporan | 4.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 5.000.000,00 | SMAN 3 PANGKAL PINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 63.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 74.200.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 3.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 4.200.000,00 | SMAN 3 PANGKAL PINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 30 Unit | 60.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 70.000.000,00 | SMAN 3 PANGKAL PINANG |
| 22 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 806.400.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 940.800.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | - | - | | | - | 806.400.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 940.800.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0049 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 1044 Peserta Didik | 346.752.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 404.544.000,00 | SMAN 3 PANGKAL PINANG |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0078 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | | | | 1044 Satuan Pendidikan | 459.648.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 536.256.000,00 | SMAN 3 PANGKAL PINANG |
| | | | | | | SMAN 4 PANGKAL PINANG | | | | | | 834.000.000,00 | | | | | | | 943.000.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 834.000.000,00 | | | | | | | 943.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 834.000.000,00 | | | | | | | 943.000.000,00 | |
| 23 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 250.200.000,00 | | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 261.900.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 210.840.000,00 | | | - | - | - | - | 211.500.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 22.500.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Gabek, Gabek Dua | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 24.400.000,00 | SMAN 4 PANGKAL PINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 2 Paket | 24.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Gabek, Gabek Dua | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 28.800.000,00 | SMAN 4 PANGKAL PINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 2.400.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Gabek, Gabek Dua | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 3.000.000,00 | SMAN 4 PANGKAL PINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 12.240.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Gabek, Gabek Dua | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 9.600.000,00 | SMAN 4 PANGKAL PINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 0 Dokumen | 5.700.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 5.700.000,00 | SMAN 4 PANGKAL PINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 1 Paket | 84.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Gabek, Gabek Dua | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 80.000.000,00 | SMAN 4 PANGKAL PINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 60.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Gabek, Gabek Dua | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 60.000.000,00 | SMAN 4 PANGKAL PINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 2.400.000,00 | | | - | - | - | - | 2.900.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 2.400.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Gabek, Gabek Dua | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 2.900.000,00 | SMAN 4 PANGKAL PINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 36.960.000,00 | | | - | - | - | - | 47.500.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 6.960.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Gabek, Gabek Dua | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 11.500.000,00 | SMAN 4 PANGKAL PINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 14 Unit | 30.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Gabek, Gabek Dua | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 36.000.000,00 | SMAN 4 PANGKAL PINANG |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 24 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 583.800.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 681.100.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | - | - | | | - | 583.800.000,00 | | | - | - | - | - | 681.100.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0046 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | | | | 1 Paket | 180.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Gabek, Gabek Dua | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 220.000.000,00 | SMAN 4 PANGKAL PINANG |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0049 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 180 Peserta Didik | 223.800.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Gabek, Gabek Dua | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 241.100.000,00 | SMAN 4 PANGKAL PINANG |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0078 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | | | | 1 Satuan Pendidikan | 180.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Gabek, Gabek Dua | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 220.000.000,00 | SMAN 4 PANGKAL PINANG |
| | | | | | | SMA N 1 BAKAM | | | | | | 639.900.000,00 | | | | | | | 656.300.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 639.900.000,00 | | | | | | | 656.300.000,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 639.900.000,00 | | | | | | | 656.300.000,00 | |
| 25 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 85.320.000,00 | | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 80.500.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 64.500.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 57.500.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 Paket | 9.500.000,00 | Kab. Bangka, Bakam, Dalil | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 9.500.000,00 | SMA N 1 BAKAM |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 10.000.000,00 | Kab. Bangka, Bakam, Dalil | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 10.000.000,00 | SMA N 1 BAKAM |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 12 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Bangka, Bakam, Dalil | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 8.000.000,00 | SMA N 1 BAKAM |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 35.000.000,00 | Kab. Bangka, Bakam, Dalil | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 30.000.000,00 | SMA N 1 BAKAM |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 6.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 7.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 6.000.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 7.000.000,00 | SMA N 1 BAKAM |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 14.820.000,00 | | | - | - | - | - | 16.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 2.450.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 3.000.000,00 | SMA N 1 BAKAM |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 12 Unit | 12.370.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 13.000.000,00 | SMA N 1 BAKAM |
| 26 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 554.580.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 575.800.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | - | - | | | - | 554.580.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 575.800.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0045 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | | | | 235 Peserta didik | 23.520.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 24.000.000,00 | SMA N 1 BAKAM |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0049 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 235 Peserta Didik | 61.800.000,00 | Kab. Bangka, Bakam, Dalil | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 61.800.000,00 | SMA N 1 BAKAM |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0053 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS | | | | 1 Satuan Pendidikan | 355.500.000,00 | Kab. Bangka, Bakam, Dalil | DAK NON FISIK-BOS REGULER | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 375.000.000,00 | SMA N 1 BAKAM |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0078 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | | | | 1 Satuan Pendidikan | 113.760.000,00 | Kab. Bangka, Bakam, Dalil | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 115.000.000,00 | SMA N 1 BAKAM |
| | | | | | | SMAN 1 BELINYU | | | | | | 1.632.000.000,00 | | | | | | | 1.478.840.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 1.632.000.000,00 | | | | | | | 1.478.840.000,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 1.632.000.000,00 | | | | | | | 1.478.840.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 27 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 234.400.000,00 | | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 248.880.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 225.900.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 236.380.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 2 Paket | 27.000.000,00 | Kab. Bangka, Belinyu, Kuto Panji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 30.000.000,00 | SMAN 1 BELINYU |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 4.500.000,00 | Kab. Bangka, Belinyu, Kuto Panji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 5.000.000,00 | SMAN 1 BELINYU |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 5 Paket | 24.200.000,00 | Kab. Bangka, Belinyu, Kuto Panji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 27.200.000,00 | SMAN 1 BELINYU |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 4 Paket | 125.600.000,00 | Kab. Bangka, Belinyu, Kuto Panji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 125.600.000,00 | SMAN 1 BELINYU |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 48 Laporan | 44.600.000,00 | Kab. Bangka, Belinyu, Kuto Panji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 48.580.000,00 | SMAN 1 BELINYU |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 8.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 11.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 4 Laporan | 8.000.000,00 | Kab. Bangka, Belinyu, Kuto Panji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 11.000.000,00 | SMAN 1 BELINYU |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 500.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 1.500.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 500.000,00 | Kab. Bangka, Belinyu, Kuto Panji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 1.500.000,00 | SMAN 1 BELINYU |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 28 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 1.397.600.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 1.229.960.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | - | - | | | - | 1.397.600.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 1.229.960.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0041 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | | | | 6 Paket | 64.000.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 80.000.000,00 | SMAN 1 BELINYU |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0045 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | | | | 82 Peserta didik | 81.960.000,00 | Kab. Bangka, Belinyu, Kuto Panji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 88.920.000,00 | SMAN 1 BELINYU |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0049 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 94 Peserta Didik | 201.840.000,00 | Kab. Bangka, Belinyu, Kuto Panji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 65.040.000,00 | SMAN 1 BELINYU |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0052 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | | | | 1 Satuan Pendidikan | 55.000.000,00 | Kab. Bangka, Belinyu, Kuto Panji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMAN 1 BELINYU |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0053 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS | | | | 1 Satuan Pendidikan | 936.000.000,00 | Kab. Bangka, Belinyu, Kuto Panji | DAK NON FISIK-BOS REGULER | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 936.000.000,00 | SMAN 1 BELINYU |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0078 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | | | | 1 Satuan Pendidikan | 58.800.000,00 | Kab. Bangka, Belinyu, Kuto Panji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 60.000.000,00 | SMAN 1 BELINYU |
| | | | | | | SMAN 1 PEMALI | | | | | | 2.374.800.000,00 | | | | | | | 2.551.600.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 2.330.560.000,00 | | | | | | | 2.491.900.000,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 2.330.560.000,00 | | | | | | | 2.491.900.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 29 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 334.000.000,00 | | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 393.580.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 60.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 82.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | 1 Dokumen | 60.000.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 82.000.000,00 | SMAN 1 PEMALI |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 115.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 134.950.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 2 Paket | 30.000.000,00 | Kab. Bangka, Pemali, Air Duren | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 36.650.000,00 | SMAN 1 PEMALI |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 3 Paket | 40.000.000,00 | Kab. Bangka, Pemali, Air Duren | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 46.650.000,00 | SMAN 1 PEMALI |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 6 Paket | 45.000.000,00 | Kab. Bangka, Pemali, Air Duren | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 51.650.000,00 | SMAN 1 PEMALI |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 114.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 125.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 6 Laporan | 6.000.000,00 | Kab. Bangka, Pemali, Air Duren | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 10.000.000,00 | SMAN 1 PEMALI |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 108.000.000,00 | Kab. Bangka, Pemali, Air Duren | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 115.000.000,00 | SMAN 1 PEMALI |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 45.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 51.630.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 3 Unit | 45.000.000,00 | Kab. Bangka, Pemali, Air Duren | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 51.630.000,00 | SMAN 1 PEMALI |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 30 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 1.996.560.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 2.098.320.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | - | - | | | - | 1.996.560.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 2.098.320.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0041 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | | | | 4 Paket | 12.560.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMAN 1 PEMALI |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0043 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | | | | 25 Unit | 50.000.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 72.000.000,00 | SMAN 1 PEMALI |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0045 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | | | | 155 Peserta didik | 100.000.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 122.000.000,00 | SMAN 1 PEMALI |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0049 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 886 Peserta Didik | 250.000.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 282.850.000,00 | SMAN 1 PEMALI |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0053 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS | | | | 1 Satuan Pendidikan | 1.314.000.000,00 | Kab. Bangka, Pemali, Pemali | DAK NON FISIK-BOS REGULER | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 1.314.000.000,00 | SMAN 1 PEMALI |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0068 | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat | | | | 3 Unit | 15.000.000,00 | Kab. Bangka, Pemali, Karya Makmur | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 30.470.000,00 | SMAN 1 PEMALI |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0077 | Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi sedang/berat | | | | 3 Unit | 15.000.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMAN 1 PEMALI |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0078 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | | | | 1 Satuan Pendidikan | 240.000.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 277.000.000,00 | SMAN 1 PEMALI |
| | X | | | | | NON URUSAN | | | | | | 44.240.000,00 | | | | | | | 59.700.000,00 | |
| | X | XX | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX | | | | | | 44.240.000,00 | | | | | | | 59.700.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 31 | X | XX | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 44.240.000,00 | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 59.700.000,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 44.240.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 59.700.000,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 2 Paket | 14.240.000,00 | Kab. Bangka, Pemali, Air Duren | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 23.050.000,00 | SMAN 1 PEMALI |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 30 Laporan | 30.000.000,00 | Kab. Bangka, Pemali, Air Duren | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 36.650.000,00 | SMAN 1 PEMALI |
| | | | | | | SMAN 1 MENDO BARAT | | | | | | 1.411.800.000,00 | | | | | | | 1.512.600.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 1.411.800.000,00 | | | | | | | 1.512.600.000,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 1.411.800.000,00 | | | | | | | 1.512.600.000,00 | |
| 32 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 181.440.000,00 | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 211.680.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 115.172.250,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 145.412.250,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 12 Paket | 16.281.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 16.281.500,00 | SMAN 1 MENDO BARAT |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 12 Paket | 11.410.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 11.410.500,00 | SMAN 1 MENDO BARAT |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 Paket | 5.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 5.000.000,00 | SMAN 1 MENDO BARAT |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 48 Dokumen | 3.718.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 3.718.500,00 | SMAN 1 MENDO BARAT |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 12 Paket | 50.541.750,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 80.781.750,00 | SMAN 1 MENDO BARAT |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 28.220.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 28.220.000,00 | SMAN 1 MENDO BARAT |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 38.247.580,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 38.247.580,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 2.250.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 2.250.000,00 | SMAN 1 MENDO BARAT |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 35.997.580,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 35.997.580,00 | SMAN 1 MENDO BARAT |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 28.020.170,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 28.020.170,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 12.721.000,00 | Kab. Bangka, Mendo Barat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 12.721.000,00 | SMAN 1 MENDO BARAT |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 15.299.170,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 15.299.170,00 | SMAN 1 MENDO BARAT |
| 33 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 1.230.360.000,00 | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 1.300.920.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | - | - | | | - | 1.230.360.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 1.300.920.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0041 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | | | | 1 Paket | 49.950.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 49.950.000,00 | SMAN 1 MENDO BARAT |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0049 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 533 Peserta Didik | 110.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 140.240.000,00 | SMAN 1 MENDO BARAT |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0052 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | | | | 1 Satuan Pendidikan | 55.045.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 95.365.000,00 | SMAN 1 MENDO BARAT |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0053 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS | | | | 1 Satuan Pendidikan | 807.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOS REGULER | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 807.000.000,00 | SMAN 1 MENDO BARAT |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0078 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | | | | 1 Satuan Pendidikan | 208.365.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 208.365.000,00 | SMAN 1 MENDO BARAT |
| | | | | | | SMAN 2 MENDO BARAT | | | | | | 808.020.000,00 | | | | | | | 861.020.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 808.020.000,00 | | | | | | | 861.020.000,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 808.020.000,00 | | | | | | | 861.020.000,00 | |
| 34 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 69.500.000,00 | | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 69.500.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 54.500.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 54.500.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 7.000.000,00 | Kab. Bangka, Mendo Barat, Penagan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 7.000.000,00 | SMAN 2 MENDO BARAT |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 5.500.000,00 | Kab. Bangka, Mendo Barat, Penagan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 5.500.000,00 | SMAN 2 MENDO BARAT |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 2.000.000,00 | Kab. Bangka, Mendo Barat, Penagan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 2.000.000,00 | SMAN 2 MENDO BARAT |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 15.000.000,00 | Kab. Bangka, Mendo Barat, Penagan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 15.000.000,00 | SMAN 2 MENDO BARAT |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 4 Laporan | 25.000.000,00 | Kab. Bangka, Mendo Barat, Penagan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 25.000.000,00 | SMAN 2 MENDO BARAT |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 15.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 15.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 15.000.000,00 | Kab. Bangka, Mendo Barat, Penagan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 15.000.000,00 | SMAN 2 MENDO BARAT |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 35 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 738.520.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 791.520.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | - | - | | | - | 738.520.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 791.520.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0041 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | | | | 3 Paket | 27.000.000,00 | Kab. Bangka, Mendo Barat, Penagan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 27.000.000,00 | SMAN 2 MENDO BARAT |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0043 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | | | | 1 Unit | 25.000.000,00 | Kab. Bangka, Mendo Barat, Penagan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 25.000.000,00 | SMAN 2 MENDO BARAT |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0049 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 279 Peserta Didik | 135.620.000,00 | Kab. Bangka, Mendo Barat, Penagan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 135.620.000,00 | SMAN 2 MENDO BARAT |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0051 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | | | | 20 Orang | 3.000.000,00 | Kab. Bangka, Mendo Barat, Penagan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 3.000.000,00 | SMAN 2 MENDO BARAT |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0053 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS | | | | 1 Satuan Pendidikan | 447.000.000,00 | Kab. Bangka, Mendo Barat, Penagan | DAK NON FISIK-BOS REGULER | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 500.000.000,00 | SMAN 2 MENDO BARAT |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0078 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | | | | 0 Satuan Pendidikan | 100.900.000,00 | Kab. Bangka, Mendo Barat, Penagan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 100.900.000,00 | SMAN 2 MENDO BARAT |
| | | | | | | SMAN 1 MERAWANG | | | | | | 1.329.600.000,00 | | | | | | | 1.426.200.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 1.255.600.000,00 | | | | | | | 1.345.840.000,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 1.255.600.000,00 | | | | | | | 1.345.840.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 36 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 99.880.000,00 | | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 122.500.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 89.500.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 108.500.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 15.000.000,00 | Kab. Bangka, Merawang, Batu Rusa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 25.000.000,00 | SMAN 1 MERAWANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 50.000.000,00 | Kab. Bangka, Merawang, Batu Rusa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 55.000.000,00 | SMAN 1 MERAWANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 4 Paket | 17.000.000,00 | Kab. Bangka, Merawang, Batu Rusa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 20.000.000,00 | SMAN 1 MERAWANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 12 Dokumen | 7.500.000,00 | Kab. Bangka, Merawang, Batu Rusa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 8.500.000,00 | SMAN 1 MERAWANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 3.500.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 4.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 0 Laporan | 3.500.000,00 | Kab. Bangka, Merawang, Batu Rusa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 4.000.000,00 | SMAN 1 MERAWANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 6.880.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 10.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 2 Unit | 6.880.000,00 | Kab. Bangka, Merawang, Batu Rusa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 10.000.000,00 | SMAN 1 MERAWANG |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 37 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 1.155.720.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 1.223.340.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | - | - | | | - | 1.035.720.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 1.073.340.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0045 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | | | | 492 Peserta didik | 135.720.000,00 | Kab. Bangka, Merawang, Batu Rusa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 140.000.000,00 | SMAN 1 MERAWANG |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0049 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 500 Peserta Didik | 60.000.000,00 | Kab. Bangka, Merawang, Batu Rusa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 90.000.000,00 | SMAN 1 MERAWANG |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0053 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS | | | | 1 Satuan Pendidikan | 750.000.000,00 | Kab. Bangka, Merawang, Batu Rusa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 750.000.000,00 | SMAN 1 MERAWANG |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0078 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | | | | 1 Satuan Pendidikan | 90.000.000,00 | Kab. Bangka, Merawang, Batu Rusa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 93.340.000,00 | SMAN 1 MERAWANG |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | - | - | | | - | 120.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 150.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0045 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | | | | 4 Paket | 120.000.000,00 | Kab. Bangka, Merawang, Batu Rusa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 150.000.000,00 | SMAN 1 MERAWANG |
| | X | | | | | NON URUSAN | | | | | | 74.000.000,00 | | | | | | | 80.360.000,00 | |
| | X | XX | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX | | | | | | 74.000.000,00 | | | | | | | 80.360.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | X | XX | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 32.000.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 35.360.000,00 | |
| | X | XX | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | - | - | | | - | 32.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 35.360.000,00 | |
| | X | XX | 02 | 1.01 | 0037 | Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia | | | | 4 Paket | 32.000.000,00 | Kab. Bangka, Merawang, Batu Rusa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 35.360.000,00 | SMAN 1 MERAWANG |
| 39 | X | XX | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 42.000.000,00 | | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 45.000.000,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 42.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 45.000.000,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 42.000.000,00 | Kab. Bangka, Merawang, Batu Rusa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 45.000.000,00 | SMAN 1 MERAWANG |
| | | | | | | SMAN 1 PUDING BESAR | | | | | | 1.039.200.000,00 | | | | | | | 999.000.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 904.800.000,00 | | | | | | | 904.500.000,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 904.800.000,00 | | | | | | | 904.500.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 40 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 69.800.000,00 | | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 80.500.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 30.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 40.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | 1 Dokumen | 30.000.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 40.000.000,00 | SMAN 1 PUDING BESAR |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 27.800.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 28.500.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 4.800.000,00 | Kab. Bangka, Puding Besar, Puding Besar | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 5.000.000,00 | SMAN 1 PUDING BESAR |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 2.500.000,00 | Kab. Bangka, Puding Besar, Puding Besar | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 3.000.000,00 | SMAN 1 PUDING BESAR |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 4.500.000,00 | Kab. Bangka, Puding Besar, Puding Besar | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 4.500.000,00 | SMAN 1 PUDING BESAR |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 16.000.000,00 | Kab. Bangka, Puding Besar, Puding Besar | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 16.000.000,00 | SMAN 1 PUDING BESAR |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 2.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 2.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 2.000.000,00 | Kab. Bangka, Puding Besar, Puding Besar | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 2.000.000,00 | SMAN 1 PUDING BESAR |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 10.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 10.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 1 Unit | 10.000.000,00 | Kab. Bangka, Puding Besar, Puding Besar | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 10.000.000,00 | SMAN 1 PUDING BESAR |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 41 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 835.000.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 824.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | - | - | | | - | 799.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 779.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0043 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | | | | 1 Unit | 15.000.000,00 | Kab. Bangka, Puding Besar, Puding Besar | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 17.000.000,00 | SMAN 1 PUDING BESAR |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0045 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | | | | 1 Peserta didik | 20.000.000,00 | Kab. Bangka, Puding Besar, Puding Besar | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 20.000.000,00 | SMAN 1 PUDING BESAR |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0049 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 1 Peserta Didik | 130.000.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 75.000.000,00 | SMAN 1 PUDING BESAR |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0053 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS | | | | 1 Satuan Pendidikan | 579.000.000,00 | Kab. Bangka, Puding Besar, Puding Besar | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 600.000.000,00 | SMAN 1 PUDING BESAR |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0078 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | | | | 1 Satuan Pendidikan | 55.000.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 67.000.000,00 | SMAN 1 PUDING BESAR |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | - | - | | | - | 36.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 45.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0045 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | | | | 1 Paket | 36.000.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 45.000.000,00 | SMAN 1 PUDING BESAR |
| | X | | | | | NON URUSAN | | | | | | 134.400.000,00 | | | | | | | 94.500.000,00 | |
| | X | XX | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX | | | | | | 134.400.000,00 | | | | | | | 94.500.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | X | XX | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 134.400.000,00 | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 94.500.000,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 95.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 70.500.000,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 15.000.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 8.500.000,00 | SMAN 1 PUDING BESAR |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 30.000.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 25.000.000,00 | SMAN 1 PUDING BESAR |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 1 Paket | 50.000.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 37.000.000,00 | SMAN 1 PUDING BESAR |
| | X | XX | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 39.400.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 24.000.000,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 39.400.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 24.000.000,00 | SMAN 1 PUDING BESAR |
| | | | | | | SMA NEGERI 2 PUDING BESAR | | | | | | 539.800.000,00 | | | | | | | 577.600.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 539.800.000,00 | | | | | | | 577.600.000,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 539.800.000,00 | | | | | | | 577.600.000,00 | |
| 43 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 96.200.000,00 | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 120.200.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 70.200.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 87.200.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 5.000.000,00 | Kab. Bangka, Puding Besar, Saing | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 6.000.000,00 | SMA NEGERI 2 PUDING BESAR |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 14.000.000,00 | Kab. Bangka, Puding Besar, Saing | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 16.000.000,00 | SMA NEGERI 2 PUDING BESAR |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 10.000.000,00 | Kab. Bangka, Puding Besar, Saing | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 12.000.000,00 | SMA NEGERI 2 PUDING BESAR |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 1.200.000,00 | Kab. Bangka, Puding Besar, Saing | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 1.200.000,00 | SMA NEGERI 2 PUDING BESAR |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 1 Paket | 20.000.000,00 | Kab. Bangka, Puding Besar, Saing | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 22.000.000,00 | SMA NEGERI 2 PUDING BESAR |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 20.000.000,00 | Kab. Bangka, Puding Besar, Saing | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 30.000.000,00 | SMA NEGERI 2 PUDING BESAR |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 22.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 25.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 2.000.000,00 | Kab. Bangka, Puding Besar, Saing | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 2.000.000,00 | SMA NEGERI 2 PUDING BESAR |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 20.000.000,00 | Kab. Bangka, Puding Besar, Saing | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 23.000.000,00 | SMA NEGERI 2 PUDING BESAR |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 4.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 8.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 4.000.000,00 | Kab. Bangka, Puding Besar, Saing | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 8.000.000,00 | SMA NEGERI 2 PUDING BESAR |
| 44 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 443.600.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 457.400.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | - | - | | | - | 443.600.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 457.400.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0043 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | | | | 1 Unit | 50.000.000,00 | Kab. Bangka, Puding Besar, Saing | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 50.000.000,00 | SMA NEGERI 2 PUDING BESAR |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0049 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 198 Peserta Didik | 47.100.000,00 | Kab. Bangka, Puding Besar, Saing | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 55.000.000,00 | SMA NEGERI 2 PUDING BESAR |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0053 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS | | | | 1 Satuan Pendidikan | 313.000.000,00 | Kab. Bangka, Puding Besar, Saing | DAK NON FISIK-BOS REGULER | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 313.000.000,00 | SMA NEGERI 2 PUDING BESAR |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0078 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | | | | 1 Satuan Pendidikan | 33.500.000,00 | Kab. Bangka, Puding Besar, Saing | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 39.400.000,00 | SMA NEGERI 2 PUDING BESAR |
| | | | | | | SMAN 1 RIAU SILIP | | | | | | 1.311.600.000,00 | | | | | | | 1.404.200.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 1.311.600.000,00 | | | | | | | 1.404.200.000,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 1.311.600.000,00 | | | | | | | 1.404.200.000,00 | |
| 45 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 166.680.000,00 | | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 194.460.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 126.680.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 149.460.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 0 Paket | 25.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 35.000.000,00 | SMAN 1 RIAU SILIP |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 56.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 60.000.000,00 | SMAN 1 RIAU SILIP |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 10.680.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 19.460.000,00 | SMAN 1 RIAU SILIP |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 35.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 35.000.000,00 | SMAN 1 RIAU SILIP |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 8.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 8.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 01 Laporan | 8.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 8.000.000,00 | SMAN 1 RIAU SILIP |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 32.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 37.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 2.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 2.000.000,00 | SMAN 1 RIAU SILIP |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 8 Unit | 30.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 35.000.000,00 | SMAN 1 RIAU SILIP |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 46 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 1.144.920.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 1.209.740.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | - | - | | | - | 1.144.920.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 1.209.740.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0049 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 504 Peserta Didik | 168.920.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 203.740.000,00 | SMAN 1 RIAU SILIP |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0053 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS | | | | 1 Satuan Pendidikan | 756.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOS REGULER | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 756.000.000,00 | SMAN 1 RIAU SILIP |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0078 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | | | | 1 Satuan Pendidikan | 220.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 250.000.000,00 | SMAN 1 RIAU SILIP |
| | | | | | | SMAN 1 SUNGAI LIAT | | | | | | 2.690.700.000,00 | | | | | | | 2.884.900.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 2.690.700.000,00 | | | | | | | 2.884.900.000,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 2.690.700.000,00 | | | | | | | 2.884.900.000,00 | |
| 47 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 491.200.000,00 | | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 535.400.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 340.877.600,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 340.877.600,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 35.323.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 35.323.000,00 | SMAN 1 SUNGAI LIAT |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 39.959.100,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 39.959.100,00 | SMAN 1 SUNGAI LIAT |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 5 Paket | 60.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 60.000.000,00 | SMAN 1 SUNGAI LIAT |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 19.995.100,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 19.995.100,00 | SMAN 1 SUNGAI LIAT |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 4 Paket | 55.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 55.000.000,00 | SMAN 1 SUNGAI LIAT |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 14.720.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 14.720.000,00 | SMAN 1 SUNGAI LIAT |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 1 Paket | 90.890.400,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 90.890.400,00 | SMAN 1 SUNGAI LIAT |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 24.990.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 24.990.000,00 | SMAN 1 SUNGAI LIAT |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 150.322.400,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 194.522.400,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 4 Laporan | 5.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMAN 1 SUNGAI LIAT |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 145.322.400,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 194.522.400,00 | SMAN 1 SUNGAI LIAT |
| 48 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 2.199.500.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 2.349.500.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | - | - | | | - | 2.199.500.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 2.349.500.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0041 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | | | | 6 Paket | 150.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 200.000.000,00 | SMAN 1 SUNGAI LIAT |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0045 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | | | | 1080 Peserta didik | 189.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 239.000.000,00 | SMAN 1 SUNGAI LIAT |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0049 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 1080 Peserta Didik | 175.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 175.000.000,00 | SMAN 1 SUNGAI LIAT |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0051 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | | | | 80 Orang | 20.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 20.000.000,00 | SMAN 1 SUNGAI LIAT |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0052 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | | | | 1 Satuan Pendidikan | 20.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 20.000.000,00 | SMAN 1 SUNGAI LIAT |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0053 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS | | | | 1 Satuan Pendidikan | 1.495.500.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung | DAK NON FISIK-BOS REGULER | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 1.495.500.000,00 | SMAN 1 SUNGAI LIAT |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0078 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | | | | 1 Satuan Pendidikan | 150.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 200.000.000,00 | SMAN 1 SUNGAI LIAT |
| | | | | | | SMAN 1 KOBA | | | | | | 2.002.800.000,00 | | | | | | | 1.747.560.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 2.002.800.000,00 | | | | | | | 1.747.560.000,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 2.002.800.000,00 | | | | | | | 1.747.560.000,00 | |
| 49 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 255.240.000,00 | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 297.780.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 124.680.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 159.030.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 63.810.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Koba, Arung Dalam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 89.334.000,00 | SMAN 1 KOBA |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 5.104.800,00 | Kab. Bangka Tengah, Koba, Arung Dalam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 5.955.600,00 | SMAN 1 KOBA |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 45 Laporan | 55.765.200,00 | Kab. Bangka Tengah, Koba, Arung Dalam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 63.740.400,00 | SMAN 1 KOBA |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 111.500.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 117.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 3.500.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Koba, Arung Dalam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 3.000.000,00 | SMAN 1 KOBA |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 2 Laporan | 108.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Koba, Arung Dalam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 114.000.000,00 | SMAN 1 KOBA |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 19.060.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 21.750.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 3.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Koba, Arung Dalam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 3.500.000,00 | SMAN 1 KOBA |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 22 Unit | 16.060.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Koba, Arung Dalam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 18.250.000,00 | SMAN 1 KOBA |
| 50 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 1.747.560.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 1.449.780.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | - | - | | | - | 1.747.560.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 1.449.780.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0049 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 1 Peserta Didik | 255.240.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Koba, Arung Dalam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 297.780.000,00 | SMAN 1 KOBA |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0053 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS | | | | 1 Satuan Pendidikan | 1.152.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Koba, Arung Dalam | DAK NON FISIK-BOS REGULER | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 1.152.000.000,00 | SMAN 1 KOBA |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0078 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | | | | 1 Satuan Pendidikan | 340.320.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Koba, Arung Dalam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMAN 1 KOBA |
| | | | | | | SMAN 1 LUBUK BESAR | | | | | | 1.623.900.000,00 | | | | | | | 1.623.900.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 1.623.900.000,00 | | | | | | | 1.623.900.000,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 1.623.900.000,00 | | | | | | | 1.623.900.000,00 | |
| 51 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 211.320.000,00 | | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 211.320.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 204.450.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 204.450.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 17.223.500,00 | Kab. Bangka Tengah, Lubuk Besar, Lubuk Lingkuk | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 17.223.500,00 | SMAN 1 LUBUK BESAR |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 5.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Lubuk Besar, Lubuk Lingkuk | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 5.000.000,00 | SMAN 1 LUBUK BESAR |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 35.545.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 35.545.000,00 | SMAN 1 LUBUK BESAR |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 22.142.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Lubuk Besar, Lubuk Lingkuk | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 22.142.000,00 | SMAN 1 LUBUK BESAR |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 15.074.500,00 | Kab. Bangka Tengah, Lubuk Besar, Lubuk Lingkuk | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 15.074.500,00 | SMAN 1 LUBUK BESAR |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 1 Paket | 70.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Lubuk Besar, Lubuk Lingkuk | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 70.000.000,00 | SMAN 1 LUBUK BESAR |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 39.465.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Lubuk Besar, Lubuk Lingkuk | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 39.465.000,00 | SMAN 1 LUBUK BESAR |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 4.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 4.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 400 Laporan | 4.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 4.000.000,00 | SMAN 1 LUBUK BESAR |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 2.870.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 2.870.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 2.870.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Lubuk Besar, Lubuk Lingkuk | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 2.870.000,00 | SMAN 1 LUBUK BESAR |
| 52 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 1.412.580.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 1.412.580.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | - | - | | | - | 1.324.447.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 1.324.447.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0039 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | | | | 1 Paket | 151.200.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Lubuk Besar, Lubuk Lingkuk | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 151.200.000,00 | SMAN 1 LUBUK BESAR |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0045 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | | | | 100 Peserta didik | 100.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Lubuk Besar, Lubuk Lingkuk | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 100.000.000,00 | SMAN 1 LUBUK BESAR |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0049 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 100 Peserta Didik | 77.164.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Lubuk Besar, Lubuk Lingkuk | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 77.164.000,00 | SMAN 1 LUBUK BESAR |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0053 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS | | | | 1 Satuan Pendidikan | 919.500.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Lubuk Besar, Lubuk Lingkuk | DAK NON FISIK-BOS REGULER | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 919.500.000,00 | SMAN 1 LUBUK BESAR |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0078 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | | | | 1 Satuan Pendidikan | 76.583.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Lubuk Besar, Lubuk Lingkuk | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 76.583.000,00 | SMAN 1 LUBUK BESAR |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | - | - | | | - | 88.133.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 88.133.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0045 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | | | | 1 Paket | 88.133.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Lubuk Besar, Lubuk Lingkuk | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 88.133.000,00 | SMAN 1 LUBUK BESAR |
| | | | | | | SMAN 1 NAMANG | | | | | | 1.587.300.000,00 | | | | | | | 748.570.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 1.587.300.000,00 | | | | | | | 748.570.000,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 1.587.300.000,00 | | | | | | | 748.570.000,00 | |
| 53 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 277.640.000,00 | | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 300.550.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 167.550.000,00 | | | - | - | - | - | 187.960.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 8.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Namang, Jelutung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 10.000.000,00 | SMAN 1 NAMANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 50.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Namang, Jelutung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 50.000.000,00 | SMAN 1 NAMANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 22.020.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Namang, Jelutung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 28.960.000,00 | SMAN 1 NAMANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 7.500.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Namang, Jelutung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 8.000.000,00 | SMAN 1 NAMANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 56.030.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Namang, Jelutung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 57.000.000,00 | SMAN 1 NAMANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 36 Dokumen | 4.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Namang, Jelutung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 4.000.000,00 | SMAN 1 NAMANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 60 Laporan | 20.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Namang, Jelutung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 30.000.000,00 | SMAN 1 NAMANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 102.090.000,00 | | | - | - | - | - | 102.090.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 6 Laporan | 5.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Namang, Jelutung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 5.000.000,00 | SMAN 1 NAMANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 97.090.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Namang, Jelutung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 97.090.000,00 | SMAN 1 NAMANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 8.000.000,00 | | | - | - | - | - | 10.500.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 3.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangka Tengah, Namang, Jelutung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 3.500.000,00 | SMAN 1 NAMANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 5 Unit | 5.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Namang, Jelutung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 7.000.000,00 | SMAN 1 NAMANG |
| 54 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 1.309.660.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 448.020.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | - | - | | | - | 1.259.660.000,00 | | | - | - | - | - | 398.020.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0041 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | | | | 1 Paket | 25.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Namang, Jelutung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 30.000.000,00 | SMAN 1 NAMANG |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0049 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 60 Peserta Didik | 306.160.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Namang, Jelutung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 368.020.000,00 | SMAN 1 NAMANG |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0053 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS | | | | 1 Satuan Pendidikan | 928.500.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Namang, Jelutung | DAK NON FISIK-BOS REGULER, DAK NON FISIK-BOS KINERJA | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | SMAN 1 NAMANG |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0060 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Bangka Tengah, Namang, Jelutung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | SMAN 1 NAMANG |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0078 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | | | | 1 Satuan Pendidikan | 0,00 | Kab. Bangka Tengah, Namang, Jelutung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | SMAN 1 NAMANG |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | - | - | | | - | 50.000.000,00 | | | - | - | - | - | 50.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0042 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | | | | 1 Unit | 50.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Namang, Jelutung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 50.000.000,00 | SMAN 1 NAMANG |
| | | | | | | SMAN 1 PANGKALAN BARU | | | | | | 690.000.000,00 | | | | | | | 805.000.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 690.000.000,00 | | | | | | | 805.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 690.000.000,00 | | | | | | | 805.000.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 55 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 207.000.000,00 | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 241.500.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 74.905.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 105.905.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 5.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Jeruk | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 10.000.000,00 | SMAN 1 PANGKALAN BARU |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 4 Paket | 29.905.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Jeruk | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 45.905.000,00 | SMAN 1 PANGKALAN BARU |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 80 Laporan | 40.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Jeruk | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 50.000.000,00 | SMAN 1 PANGKALAN BARU |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 123.680.000,00 | | | - | - | - | - | 123.680.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1.100.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Jeruk | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 1.100.000,00 | SMAN 1 PANGKALAN BARU |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 36 Laporan | 122.580.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Jeruk | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 122.580.000,00 | SMAN 1 PANGKALAN BARU |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 8.415.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 11.915.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 35 Unit | 4.415.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Jeruk | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 4.415.000,00 | SMAN 1 PANGKALAN BARU |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 12 Unit | 4.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Jeruk | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 7.500.000,00 | SMAN 1 PANGKALAN BARU |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 56 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 483.000.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 563.500.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | - | - | | | - | 483.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 563.500.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0041 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | | | | 4 Paket | 110.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Jeruk | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 120.000.000,00 | SMAN 1 PANGKALAN BARU |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0043 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | | | | 12 Unit | 65.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Jeruk | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 75.000.000,00 | SMAN 1 PANGKALAN BARU |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0049 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 570 Peserta Didik | 308.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 368.500.000,00 | SMAN 1 PANGKALAN BARU |
| | | | | | | SMAN 1 SUNGAI SELAN | | | | | | 1.073.400.000,00 | | | | | | | 1.073.400.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 1.073.400.000,00 | | | | | | | 1.073.400.000,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 1.073.400.000,00 | | | | | | | 1.073.400.000,00 | |
| 57 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 130.320.000,00 | | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 130.320.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 88.320.000,00 | | | - | - | - | - | 88.320.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 2 Paket | 25.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Sungai Selan Atas | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 25.000.000,00 | SMAN 1 SUNGAI SELAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 1.800.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Sungai Selan Atas | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 1.800.000,00 | SMAN 1 SUNGAI SELAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 2 Laporan | 61.520.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Sungai Selan Atas | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 61.520.000,00 | SMAN 1 SUNGAI SELAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 36.000.000,00 | | | - | - | - | - | 36.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 6.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Sungai Selan Atas | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 6.000.000,00 | SMAN 1 SUNGAI SELAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 30.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Sungai Selan Atas | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 30.000.000,00 | SMAN 1 SUNGAI SELAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 6.000.000,00 | | | - | - | - | - | 6.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 6.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Sungai Selan Atas | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 6.000.000,00 | SMAN 1 SUNGAI SELAN |
| 58 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 943.080.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 943.080.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | - | - | | | - | 943.080.000,00 | | | - | - | - | - | 943.080.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0049 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 5 Peserta Didik | 304.080.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Sungai Selan Atas | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 304.080.000,00 | SMAN 1 SUNGAI SELAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0053 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS | | | | 3 Satuan Pendidikan | 639.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Sungai Selan Atas | DAK NON FISIK-BOS REGULER | - | - | - | | 639.000.000,00 | SMAN 1 SUNGAI SELAN |
| | | | | | | SMAN 2 SUNGAI SELAN | | | | | | 1.677.900.000,00 | | | | | | | 1.296.047.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 1.677.900.000,00 | | | | | | | 1.296.047.000,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 1.677.900.000,00 | | | | | | | 1.296.047.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 59 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 216.720.000,00 | | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 381.047.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 157.715.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 243.767.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 17.670.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Keretak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 20.670.000,00 | SMAN 2 SUNGAI SELAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 42.705.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Keretak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 52.705.000,00 | SMAN 2 SUNGAI SELAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 68.870.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Keretak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 91.922.000,00 | SMAN 2 SUNGAI SELAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 12 Dokumen | 2.400.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Keretak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 2.400.000,00 | SMAN 2 SUNGAI SELAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 1 Paket | 20.870.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Keretak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 20.870.000,00 | SMAN 2 SUNGAI SELAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 5.200.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Keretak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 55.200.000,00 | SMAN 2 SUNGAI SELAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 59.005.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 137.280.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 5.005.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Keretak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 49.000.000,00 | SMAN 2 SUNGAI SELAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 54.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Keretak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 88.280.000,00 | SMAN 2 SUNGAI SELAN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 60 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 1.461.180.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 915.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | - | - | | | - | 1.461.180.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 915.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0049 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 627 Peserta Didik | 131.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Keretak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMAN 2 SUNGAI SELAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0053 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS | | | | 1 Satuan Pendidikan | 955.500.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Keretak | DAK NON FISIK-BOS REGULER | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 915.000.000,00 | SMAN 2 SUNGAI SELAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0078 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | | | | 1 Satuan Pendidikan | 374.680.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Keretak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMAN 2 SUNGAI SELAN |
| | | | | | | SMAN 1 JEBUS | | | | | | 2.133.465.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 2.133.465.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 2.133.465.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| 61 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 335.185.000,00 | | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 30.000.000,00 | | | - | - | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 200 Dokumen | 30.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | SMAN 1 JEBUS |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 135.000.000,00 | | | - | - | - | - | 0,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 0 Paket | 15.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Jebus, Jebus | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | SMAN 1 JEBUS |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 0 Paket | 120.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Jebus, Jebus | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | SMAN 1 JEBUS |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 170.185.000,00 | | | - | - | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 10.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Jebus, Jebus | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | SMAN 1 JEBUS |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 50.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Jebus, Jebus | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | SMAN 1 JEBUS |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 3 Laporan | 100.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Jebus, Jebus | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | SMAN 1 JEBUS |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 3 Laporan | 10.185.000,00 | Kab. Bangka Barat, Jebus, Jebus | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | SMAN 1 JEBUS |
| 62 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 1.798.280.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | - | - | | | - | 1.754.760.432,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0028 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 1 Ruang | 45.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMAN 1 JEBUS |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0041 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | | | | 5 Paket | 120.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Jebus, Jebus | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | SMAN 1 JEBUS |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0043 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | | | | 15 Unit | 62.910.432,00 | Kab. Bangka Barat, Jebus, Jebus | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | SMAN 1 JEBUS |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0049 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 707 Peserta Didik | 250.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Jebus, Jebus | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | SMAN 1 JEBUS |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0053 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS | | | | 1 Satuan Pendidikan | 1.276.850.000,00 | Kab. Bangka Barat, Jebus, Jebus | DAK NON FISIK-BOS REGULER, PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | SMAN 1 JEBUS |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | - | - | | | - | 43.519.568,00 | | | - | - | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0075 | Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 1 Unit | 43.519.568,00 | Kab. Bangka Barat, Jebus, Jebus | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | SMAN 1 JEBUS |
| | | | | | | SMAN 1 KELAPA | | | | | | 1.876.100.000,00 | | | | | | | 2.030.040.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 1.876.100.000,00 | | | | | | | 2.030.040.000,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 1.876.100.000,00 | | | | | | | 2.030.040.000,00 | |
| 63 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 240.210.000,00 | | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 280.140.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 226.710.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 267.140.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 8.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 12.000.000,00 | SMAN 1 KELAPA |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 40.500.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 75.390.000,00 | SMAN 1 KELAPA |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 82.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 83.000.000,00 | SMAN 1 KELAPA |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 1 Paket | 19.685.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 18.710.000,00 | SMAN 1 KELAPA |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 20 Laporan | 76.525.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 78.040.000,00 | SMAN 1 KELAPA |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 3.500.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 3.500.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 350 Laporan | 3.500.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 3.500.000,00 | SMAN 1 KELAPA |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 10.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 9.500.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | | | | 2 Unit | 10.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 9.500.000,00 | SMAN 1 KELAPA |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 64 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 1.635.890.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 1.749.900.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | - | - | | | - | 1.635.890.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 1.749.900.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0039 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | | | | 1 Paket | 21.190.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 36.050.000,00 | SMAN 1 KELAPA |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0041 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | | | | 2 Paket | 350.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 345.000.000,00 | SMAN 1 KELAPA |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0049 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 709 Peserta Didik | 189.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 199.000.000,00 | SMAN 1 KELAPA |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0053 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS | | | | 1 Satuan Pendidikan | 1.075.700.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOS REGULER | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 1.169.850.000,00 | SMAN 1 KELAPA |
| | | | | | | SMAN 1 MUNTOK | | | | | | 2.066.650.000,00 | | | | | | | 2.216.050.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 2.066.650.000,00 | | | | | | | 2.216.050.000,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 2.066.650.000,00 | | | | | | | 2.216.050.000,00 | |
| 65 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 268.920.000,00 | | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 313.740.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 252.784.800,00 | | | - | - | - | - | 294.915.600,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 13.446.000,00 | Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 15.687.000,00 | SMAN 1 MUNTOK |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 5 Paket | 86.054.400,00 | Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 100.396.800,00 | SMAN 1 MUNTOK |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 3 Paket | 8.067.600,00 | Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 9.412.200,00 | SMAN 1 MUNTOK |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 2 Paket | 21.513.600,00 | Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 25.099.200,00 | SMAN 1 MUNTOK |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 4 Laporan | 123.703.200,00 | Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 144.320.400,00 | SMAN 1 MUNTOK |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 12.773.700,00 | | | - | - | - | - | 15.462.900,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 400 Laporan | 4.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 4.000.000,00 | SMAN 1 MUNTOK |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 8.773.700,00 | Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 11.462.900,00 | SMAN 1 MUNTOK |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 3.361.500,00 | | | - | - | - | - | 3.361.500,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 3.361.500,00 | Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 3.361.500,00 | SMAN 1 MUNTOK |
| 66 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 1.797.730.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 1.902.310.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | - | - | | | - | 1.797.730.000,00 | | | - | - | - | - | 1.902.310.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0039 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | | | | 1 Paket | 71.712.000,00 | Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 113.664.000,00 | SMAN 1 MUNTOK |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0041 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | | | | 1 Paket | 286.848.000,00 | Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 304.656.000,00 | SMAN 1 MUNTOK |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0049 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 768 Peserta Didik | 107.906.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 112.557.000,00 | SMAN 1 MUNTOK |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0053 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS | | | | 1 Satuan Pendidikan | 1.170.250.000,00 | Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut | DAK NON FISIK-BOS REGULER | - | - | - | | 1.170.250.000,00 | SMAN 1 MUNTOK |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0078 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | | | | 1 Satuan Pendidikan | 161.014.000,00 | Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 201.183.000,00 | SMAN 1 MUNTOK |
| | | | | | | SMAN 1 SP TERITIP | | | | | | 1.548.600.000,00 | | | | | | | 1.667.200.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 1.548.600.000,00 | | | | | | | 1.667.200.000,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 1.548.600.000,00 | | | | | | | 1.667.200.000,00 | |
| 67 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 213.480.000,00 | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 249.060.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 204.473.736,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 240.053.736,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 106.740.000,00 | Kab. Bangka Barat, Simpang Teritip, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 124.530.000,00 | SMAN 1 SP TERITIP |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 10.674.000,00 | Kab. Bangka Barat, Simpang Teritip, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 12.453.000,00 | SMAN 1 SP TERITIP |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 4.800.000,00 | Kab. Bangka Barat, Simpang Teritip, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 4.800.000,00 | SMAN 1 SP TERITIP |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 120 Laporan | 82.259.736,00 | Kab. Bangka Barat, Simpang Teritip, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 98.270.736,00 | SMAN 1 SP TERITIP |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 4.500.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 4.500.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 4.500.000,00 | Kab. Bangka Barat, Simpang Teritip, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 4.500.000,00 | SMAN 1 SP TERITIP |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 4.506.264,00 | | | - | - | - | - | 4.506.264,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 4.506.264,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 4.506.264,00 | SMAN 1 SP TERITIP |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 68 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 1.335.120.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 1.418.140.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | - | - | | | - | 1.335.120.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 1.418.140.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0049 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 60 Peserta Didik | 213.480.000,00 | Kab. Bangka Barat, Simpang Teritip, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 249.060.000,00 | SMAN 1 SP TERITIP |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0053 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS | | | | 1 Satuan Pendidikan | 837.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Simpang Teritip, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOS REGULER | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 837.000.000,00 | SMAN 1 SP TERITIP |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0078 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | | | | 1 Satuan Pendidikan | 284.640.000,00 | Kab. Bangka Barat, Simpang Teritip, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 332.080.000,00 | SMAN 1 SP TERITIP |
| | | | | | | SMAN 1 TEMPILANG | | | | | | 1.324.950.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 1.324.950.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 1.324.950.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| 69 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 159.480.000,00 | | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 108.880.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 11.880.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMAN 1 TEMPILANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 20.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | SMAN 1 TEMPILANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 10.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMAN 1 TEMPILANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 32.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMAN 1 TEMPILANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 30 Laporan | 35.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMAN 1 TEMPILANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 28.100.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 10 Laporan | 13.100.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMAN 1 TEMPILANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 20 Laporan | 15.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMAN 1 TEMPILANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 22.500.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 10.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMAN 1 TEMPILANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 15 Unit | 12.500.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMAN 1 TEMPILANG |
| 70 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 1.165.470.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | - | - | | | - | 1.165.470.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0038 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | | | | 1 Paket | 24.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMAN 1 TEMPILANG |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0039 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | | | | 1 Paket | 30.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMAN 1 TEMPILANG |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0041 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | | | | 1 Paket | 60.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMAN 1 TEMPILANG |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0043 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | | | | 10 Unit | 25.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMAN 1 TEMPILANG |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0049 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 463 Peserta Didik | 90.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMAN 1 TEMPILANG |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0051 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | | | | 29 Orang | 60.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMAN 1 TEMPILANG |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0053 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS | | | | 1 Satuan Pendidikan | 793.350.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOS REGULER | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMAN 1 TEMPILANG |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0078 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | | | | 1 Satuan Pendidikan | 83.120.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMAN 1 TEMPILANG |
| | | | | | | SMAN 1 PARITTIGA | | | | | | 1.365.550.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 1.365.550.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 1.365.550.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| 71 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 178.560.000,00 | | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 163.560.000,00 | | | - | - | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 0 Paket | 78.060.000,00 | Kab. Bangka Barat, Parittiga, Telak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | SMAN 1 PARITTIGA |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 0 Paket | 10.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Parittiga, Telak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | SMAN 1 PARITTIGA |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 25.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Parittiga, Telak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | SMAN 1 PARITTIGA |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 1 Paket | 5.500.000,00 | Kab. Bangka Barat, Parittiga, Telak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | SMAN 1 PARITTIGA |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 0 Laporan | 45.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Parittiga, Telak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | SMAN 1 PARITTIGA |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 15.000.000,00 | | | - | - | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 15.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Parittiga, Telak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | SMAN 1 PARITTIGA |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 72 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 1.186.990.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | - | - | | | - | 1.186.990.000,00 | | | - | - | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0039 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | | | | 0 Paket | 30.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Parittiga, Telak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | SMAN 1 PARITTIGA |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0041 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | | | | 0 Paket | 90.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Parittiga, Telak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | SMAN 1 PARITTIGA |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0043 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | | | | 1 Unit | 33.980.000,00 | Kab. Bangka Barat, Parittiga, Telak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | SMAN 1 PARITTIGA |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0049 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 497 Peserta Didik | 178.560.000,00 | Kab. Bangka Barat, Parittiga, Telak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | SMAN 1 PARITTIGA |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0051 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | | | | 33 Orang | 24.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Parittiga, Telak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | SMAN 1 PARITTIGA |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0053 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS | | | | 1 Satuan Pendidikan | 770.350.000,00 | Kab. Bangka Barat, Parittiga, Telak | DAK NON FISIK-BOS REGULER | - | - | - | | 0,00 | SMAN 1 PARITTIGA |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0078 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | | | | 1 Satuan Pendidikan | 60.100.000,00 | Kab. Bangka Barat, Parittiga, Telak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | SMAN 1 PARITTIGA |
| | | | | | | SMAN 1 AIRGEGAS | | | | | | 1.953.800.000,00 | | | | | | | 1.953.800.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 1.953.800.000,00 | | | | | | | 1.953.800.000,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 1.953.800.000,00 | | | | | | | 1.953.800.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 73 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 250.920.000,00 | | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 250.920.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 30.250.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 30.250.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 30.250.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Air Gegas, Airgegas | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 30.250.000,00 | SMAN 1 AIRGEGAS |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 210.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 210.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 50.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Air Gegas, Airgegas | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 50.000.000,00 | SMAN 1 AIRGEGAS |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 12.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Air Gegas, Airgegas | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 12.000.000,00 | SMAN 1 AIRGEGAS |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 8.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Air Gegas, Airgegas | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 8.000.000,00 | SMAN 1 AIRGEGAS |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 1 Paket | 60.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Air Gegas, Airgegas | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 60.000.000,00 | SMAN 1 AIRGEGAS |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 80.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Air Gegas, Airgegas | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 80.000.000,00 | SMAN 1 AIRGEGAS |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 10.670.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 10.670.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 3.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Air Gegas, Airgegas | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 3.000.000,00 | SMAN 1 AIRGEGAS |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 7 Unit | 7.670.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Air Gegas, Airgegas | DAK NON FISIK-BOS REGULER | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 7.670.000,00 | SMAN 1 AIRGEGAS |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 74 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 1.702.880.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 1.702.880.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | - | - | | | - | 1.702.880.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 1.702.880.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0049 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 700 Peserta Didik | 350.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Air Gegas, Airgegas | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 350.000.000,00 | SMAN 1 AIRGEGAS |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0051 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | | | | 55 Orang | 40.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Air Gegas, Airgegas | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 40.000.000,00 | SMAN 1 AIRGEGAS |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0053 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS | | | | 1 Satuan Pendidikan | 1.117.400.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Air Gegas, Airgegas | DAK NON FISIK-BOS REGULER | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 1.117.400.000,00 | SMAN 1 AIRGEGAS |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0078 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | | | | 1 Satuan Pendidikan | 195.480.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Air Gegas, Airgegas | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 195.480.000,00 | SMAN 1 AIRGEGAS |
| | | | | | | SMAN 1 LEPAR PONGOK | | | | | | 852.370.000,00 | | | | | | | 237.500.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 852.370.000,00 | | | | | | | 237.500.000,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 852.370.000,00 | | | | | | | 237.500.000,00 | |
| 75 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 99.140.000,00 | | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 82.500.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 21.450.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 20.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 21.450.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Lepar Pongok, Tanjunglabu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 20.000.000,00 | SMAN 1 LEPAR PONGOK |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 45.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 46.500.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 5.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Lepar Pongok, Tanjunglabu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 3.000.000,00 | SMAN 1 LEPAR PONGOK |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 3.500.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Lepar Pongok, Tanjunglabu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 10.000.000,00 | SMAN 1 LEPAR PONGOK |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 3.500.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Lepar Pongok, Tanjunglabu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 3.500.000,00 | SMAN 1 LEPAR PONGOK |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 1 Paket | 21.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Lepar Pongok, Tanjunglabu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 20.000.000,00 | SMAN 1 LEPAR PONGOK |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 12.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Lepar Pongok, Tanjunglabu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 10.000.000,00 | SMAN 1 LEPAR PONGOK |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 31.340.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 14.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 3.100.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Lepar Pongok, Tanjunglabu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 4.000.000,00 | SMAN 1 LEPAR PONGOK |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 28.240.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Lepar Pongok, Tanjunglabu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 10.000.000,00 | SMAN 1 LEPAR PONGOK |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 1.350.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 2.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 1.350.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Lepar Pongok, Tanjunglabu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 2.000.000,00 | SMAN 1 LEPAR PONGOK |
| 76 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 753.230.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 155.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | - | - | | | - | 753.230.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 155.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0037 | Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia | | | | 1 Paket | 15.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Lepar Pongok, Tanjunglabu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 10.000.000,00 | SMAN 1 LEPAR PONGOK |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0038 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | | | | 1 Paket | 2.500.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Lepar Pongok, Tanjunglabu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 5.000.000,00 | SMAN 1 LEPAR PONGOK |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0049 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 1 Peserta Didik | 116.640.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Lepar Pongok, Tanjunglabu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 20.000.000,00 | SMAN 1 LEPAR PONGOK |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0053 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS | | | | 1 Satuan Pendidikan | 463.570.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Lepar Pongok, Tanjunglabu | DAK NON FISIK-BOS REGULER | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 100.000.000,00 | SMAN 1 LEPAR PONGOK |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0078 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | | | | 1 Satuan Pendidikan | 155.520.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Lepar Pongok, Tanjunglabu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 20.000.000,00 | SMAN 1 LEPAR PONGOK |
| | | | | | | SMAN 1 KEP. PONGOK | | | | | | 499.760.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 491.760.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 491.760.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| 77 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 76.000.000,00 | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 33.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 6.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMAN 1 KEP. PONGOK |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 1 Paket | 5.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMAN 1 KEP. PONGOK |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 22.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMAN 1 KEP. PONGOK |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 26.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 4.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMAN 1 KEP. PONGOK |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 2 Laporan | 22.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMAN 1 KEP. PONGOK |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 17.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 7.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMAN 1 KEP. PONGOK |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 12 Unit | 10.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMAN 1 KEP. PONGOK |
| 78 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 415.760.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | - | - | | | - | 415.760.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0041 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | | | | 1 Paket | 24.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMAN 1 KEP. PONGOK |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0049 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 70 Peserta Didik | 98.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMAN 1 KEP. PONGOK |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0053 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS | | | | 1 Satuan Pendidikan | 265.760.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOS REGULER | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMAN 1 KEP. PONGOK |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0078 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | | | | 1 Satuan Pendidikan | 28.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMAN 1 KEP. PONGOK |
| | X | | | | | NON URUSAN | | | | | | 8.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | X | XX | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX | | | | | | 8.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 79 | X | XX | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 8.000.000,00 | | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 0,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 8.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 0,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 8.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMAN 1 KEP. PONGOK |
| | | | | | | SMAN 1 PAYUNG | | | | | | 1.776.910.000,00 | | | | | | | 1.792.500.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 1.776.910.000,00 | | | | | | | 1.792.500.000,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 1.776.910.000,00 | | | | | | | 1.792.500.000,00 | |
| 80 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 260.160.000,00 | | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 262.500.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 40.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 36.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | | | | 45 Paket | 40.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 36.000.000,00 | SMAN 1 PAYUNG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 204.160.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 208.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 30.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Payung, Payung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 31.000.000,00 | SMAN 1 PAYUNG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 30.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Payung, Payung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 30.000.000,00 | SMAN 1 PAYUNG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 16.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Payung, Payung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 17.000.000,00 | SMAN 1 PAYUNG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 1 Paket | 35.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Payung, Payung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 36.000.000,00 | SMAN 1 PAYUNG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 93.160.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Payung, Payung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 94.000.000,00 | SMAN 1 PAYUNG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 4.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 4.500.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 4.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Payung, Payung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 4.500.000,00 | SMAN 1 PAYUNG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 12.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 14.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 7.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Payung, Payung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 8.000.000,00 | SMAN 1 PAYUNG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 1 Unit | 5.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Payung, Payung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 6.000.000,00 | SMAN 1 PAYUNG |
| 81 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 1.516.750.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 1.530.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | - | - | | | - | 1.516.750.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 1.530.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0049 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 652 Peserta Didik | 280.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Payung, Payung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 290.000.000,00 | SMAN 1 PAYUNG |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0053 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS | | | | 1 Satuan Pendidikan | 998.110.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Payung, Payung | DAK NON FISIK-BOS REGULER | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 1.000.000.000,00 | SMAN 1 PAYUNG |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0078 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | | | | 1 Satuan Pendidikan | 238.640.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 240.000.000,00 | SMAN 1 PAYUNG |
| | | | | | | SMAN 1 SIMPANG RIMBA | | | | | | 1.105.560.000,00 | | | | | | | 1.105.560.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 1.105.560.000,00 | | | | | | | 1.105.560.000,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 1.105.560.000,00 | | | | | | | 1.105.560.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 82 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 155.688.000,00 | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 155.688.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 27.630.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 27.630.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 27.630.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Simpang Rimba, Simpang Rimba | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 27.630.000,00 | SMAN 1 SIMPANG RIMBA |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 91.902.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 91.902.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 8.798.500,00 | Kab. Bangka Selatan, Simpang Rimba, Simpang Rimba | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 8.798.500,00 | SMAN 1 SIMPANG RIMBA |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 16.400.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Simpang Rimba, Simpang Rimba | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 16.400.000,00 | SMAN 1 SIMPANG RIMBA |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 6.553.500,00 | Kab. Bangka Selatan, Simpang Rimba, Simpang Rimba | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 6.553.500,00 | SMAN 1 SIMPANG RIMBA |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 17.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Simpang Rimba, Simpang Rimba | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 17.000.000,00 | SMAN 1 SIMPANG RIMBA |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 4.800.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Simpang Rimba, Simpang Rimba | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 4.800.000,00 | SMAN 1 SIMPANG RIMBA |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 1 Paket | 25.350.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Simpang Rimba, Simpang Rimba | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 25.350.000,00 | SMAN 1 SIMPANG RIMBA |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 13.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Simpang Rimba, Simpang Rimba | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 13.000.000,00 | SMAN 1 SIMPANG RIMBA |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 32.300.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 32.300.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 6.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Simpang Rimba, Simpang Rimba | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 6.000.000,00 | SMAN 1 SIMPANG RIMBA |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 26.300.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Simpang Rimba, Simpang Rimba | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 26.300.000,00 | SMAN 1 SIMPANG RIMBA |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 3.856.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 3.856.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 3.856.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Simpang Rimba, Simpang Rimba | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 3.856.000,00 | SMAN 1 SIMPANG RIMBA |
| 83 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 949.872.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 949.872.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | - | - | | | - | 949.872.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 949.872.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0046 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | | | | 1 Paket | 28.500.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Simpang Rimba, Simpang Rimba | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 28.500.000,00 | SMAN 1 SIMPANG RIMBA |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0049 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 395 Peserta Didik | 229.612.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Simpang Rimba, Simpang Rimba | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 229.612.000,00 | SMAN 1 SIMPANG RIMBA |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0053 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS | | | | 1 Satuan Pendidikan | 597.960.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOS REGULER | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 597.960.000,00 | SMAN 1 SIMPANG RIMBA |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0078 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | | | | 1 Satuan Pendidikan | 93.800.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Simpang Rimba, Simpang Rimba | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 93.800.000,00 | SMAN 1 SIMPANG RIMBA |
| | | | | | | SMAN 1 TOBOALI | | | | | | 2.280.540.000,00 | | | | | | | 2.473.000.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 2.280.540.000,00 | | | | | | | 2.473.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 2.280.540.000,00 | | | | | | | 2.473.000.000,00 | |
| 84 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 542.000.000,00 | | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 363.000.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 508.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 325.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 30.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 31.000.000,00 | SMAN 1 TOBOALI |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 20.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 21.000.000,00 | SMAN 1 TOBOALI |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 200.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 28.000.000,00 | SMAN 1 TOBOALI |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 70.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 46.000.000,00 | SMAN 1 TOBOALI |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 8.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 9.000.000,00 | SMAN 1 TOBOALI |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 1 Paket | 160.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 165.000.000,00 | SMAN 1 TOBOALI |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 20.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 25.000.000,00 | SMAN 1 TOBOALI |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 24.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 27.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 4.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 5.000.000,00 | SMAN 1 TOBOALI |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 20.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 22.000.000,00 | SMAN 1 TOBOALI |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 10.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 11.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 10.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 11.000.000,00 | SMAN 1 TOBOALI |
| 85 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 1.738.540.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 2.110.000.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | - | - | | | - | 1.738.540.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 2.110.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0039 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | | | | 1 Paket | 256.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 460.000.000,00 | SMAN 1 TOBOALI |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0049 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 932 Peserta Didik | 342.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 350.000.000,00 | SMAN 1 TOBOALI |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0053 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS | | | | 1 Satuan Pendidikan | 1.140.540.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 1.300.000.000,00 | SMAN 1 TOBOALI |
| | | | | | | SMAN 2 TOBOALI | | | | | | 1.503.780.000,00 | | | | | | | 1.654.158.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 1.483.780.000,00 | | | | | | | 1.632.158.000,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 1.483.780.000,00 | | | | | | | 1.632.158.000,00 | |
| 86 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 137.600.000,00 | | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 151.360.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 33.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 36.300.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | | | | 44 Paket | 33.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Toboali, Rias | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 36.300.000,00 | SMAN 2 TOBOALI |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 50.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 55.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 25.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Toboali, Rias | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 27.500.000,00 | SMAN 2 TOBOALI |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 1 Paket | 25.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Toboali, Rias | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 27.500.000,00 | SMAN 2 TOBOALI |
| | 1 | 01 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 45.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 49.500.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 3 Unit | 45.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Toboali, Rias | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 49.500.000,00 | SMAN 2 TOBOALI |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 9.600.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 10.560.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 3.600.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 3.960.000,00 | SMAN 2 TOBOALI |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 6.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Toboali, Rias | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 6.600.000,00 | SMAN 2 TOBOALI |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 87 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 1.346.180.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 1.480.798.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | - | - | | | - | 1.346.180.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 1.480.798.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0037 | Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia | | | | 4 Paket | 25.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Toboali, Rias | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 27.500.000,00 | SMAN 2 TOBOALI |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0038 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | | | | 1 Paket | 50.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Toboali, Rias | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 55.000.000,00 | SMAN 2 TOBOALI |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0039 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | | | | 1 Paket | 140.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Toboali, Rias | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 154.000.000,00 | SMAN 2 TOBOALI |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0045 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | | | | 500 Peserta didik | 75.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Toboali, Rias | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 82.500.000,00 | SMAN 2 TOBOALI |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0049 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 500 Peserta Didik | 100.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Toboali, Rias | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 110.000.000,00 | SMAN 2 TOBOALI |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0053 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS | | | | 1 Satuan Pendidikan | 842.580.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Toboali, Rias | DAK NON FISIK-BOS REGULER | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 926.838.000,00 | SMAN 2 TOBOALI |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0068 | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat | | | | 2 Unit | 79.002.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Toboali, Rias | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 86.902.200,00 | SMAN 2 TOBOALI |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0077 | Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi sedang/berat | | | | 3 Unit | 34.598.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Toboali, Rias | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 38.057.800,00 | SMAN 2 TOBOALI |
| | X | | | | | NON URUSAN | | | | | | 20.000.000,00 | | | | | | | 22.000.000,00 | |
| | X | XX | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX | | | | | | 20.000.000,00 | | | | | | | 22.000.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 88 | X | XX | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 20.000.000,00 | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 22.000.000,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 4.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 4.400.000,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 4 Laporan | 4.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Toboali, Rias | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 4.400.000,00 | SMAN 2 TOBOALI |
| | X | XX | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 16.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 17.600.000,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 6.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Toboali, Rias | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 6.600.000,00 | SMAN 2 TOBOALI |
| | X | XX | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 20 Unit | 10.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Toboali, Rias | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 11.000.000,00 | SMAN 2 TOBOALI |
| | | | | | | SMA NEGERI 1 PULAU BESAR | | | | | | 596.820.000,00 | | | | | | | 627.800.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 596.820.000,00 | | | | | | | 627.800.000,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 596.820.000,00 | | | | | | | 627.800.000,00 | |
| 89 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 78.480.000,00 | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 92.570.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 11.700.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 12.500.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 11.700.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Batu Betumpang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 12.500.000,00 | SMA NEGERI 1 PULAU BESAR |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 52.740.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 64.200.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 3.695.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Batu Betumpang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 5.000.000,00 | SMA NEGERI 1 PULAU BESAR |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 16.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Batu Betumpang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 18.000.000,00 | SMA NEGERI 1 PULAU BESAR |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 12 Dokumen | 1.045.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Batu Betumpang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 1.200.000,00 | SMA NEGERI 1 PULAU BESAR |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 1 Paket | 8.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Batu Betumpang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 10.000.000,00 | SMA NEGERI 1 PULAU BESAR |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 24 Laporan | 24.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Batu Betumpang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 30.000.000,00 | SMA NEGERI 1 PULAU BESAR |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 14.040.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 15.870.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 14.040.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Batu Betumpang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 15.870.000,00 | SMA NEGERI 1 PULAU BESAR |
| 90 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 518.340.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 535.230.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | - | - | | | - | 417.340.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 424.530.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0049 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 90 % Peserta Didik | 82.120.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 83.270.000,00 | SMA NEGERI 1 PULAU BESAR |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0053 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS | | | | 1 Satuan Pendidikan | 335.220.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Batu Betumpang | DAK NON FISIK-BOS REGULER | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 341.260.000,00 | SMA NEGERI 1 PULAU BESAR |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | - | - | | | - | 101.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 110.700.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0042 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | | | | 3 Unit | 8.700.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 12.000.000,00 | SMA NEGERI 1 PULAU BESAR |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0071 | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | | | | 90 % Satuan Pendidikan | 92.300.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Batu Betumpang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 98.700.000,00 | SMA NEGERI 1 PULAU BESAR |
| | | | | | | SMAN 1 TANJUNG PANDAN | | | | | | 2.243.880.000,00 | | | | | | | 2.445.930.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 2.243.880.000,00 | | | | | | | 2.445.930.000,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 2.243.880.000,00 | | | | | | | 2.445.930.000,00 | |
| 91 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 673.164.000,00 | | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 817.050.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 486.014.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 577.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 60.614.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpendam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 80.000.000,00 | SMAN 1 TANJUNG PANDAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 2 Paket | 76.450.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpendam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 90.000.000,00 | SMAN 1 TANJUNG PANDAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 3 Paket | 26.674.800,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpendam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 30.000.000,00 | SMAN 1 TANJUNG PANDAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 62.000.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpendam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 65.000.000,00 | SMAN 1 TANJUNG PANDAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 12 Dokumen | 12.000.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpendam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 12.000.000,00 | SMAN 1 TANJUNG PANDAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 3 Paket | 128.275.200,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpendam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 150.000.000,00 | SMAN 1 TANJUNG PANDAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 64 Laporan | 120.000.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpendam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 150.000.000,00 | SMAN 1 TANJUNG PANDAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 128.100.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 173.500.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 4 Laporan | 3.500.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpendam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 3.500.000,00 | SMAN 1 TANJUNG PANDAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 52 Laporan | 124.600.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpendam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 170.000.000,00 | SMAN 1 TANJUNG PANDAN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 59.050.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 66.550.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 1.550.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpendam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 1.550.000,00 | SMAN 1 TANJUNG PANDAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 28 Unit | 12.500.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpendam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 15.000.000,00 | SMAN 1 TANJUNG PANDAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 5 Unit | 45.000.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpendam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 50.000.000,00 | SMAN 1 TANJUNG PANDAN |
| 92 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 1.570.716.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 1.628.880.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | - | - | | | - | 1.570.716.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 1.628.880.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0046 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | | | | 2 Paket | 85.000.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpendam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 95.000.000,00 | SMAN 1 TANJUNG PANDAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0049 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 286 Peserta Didik | 201.836.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpendam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 250.000.000,00 | SMAN 1 TANJUNG PANDAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0053 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS | | | | 1 Satuan Pendidikan | 1.283.880.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpendam | DAK NON FISIK-BOS REGULER | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 1.283.880.000,00 | SMAN 1 TANJUNG PANDAN |
| | | | | | | SMAN 2 TANJUNG PANDAN | | | | | | 1.974.120.000,00 | | | | | | | 1.974.120.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 1.974.120.000,00 | | | | | | | 1.974.120.000,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 1.974.120.000,00 | | | | | | | 1.974.120.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 93 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 267.848.000,00 | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 267.848.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 54.980.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 54.980.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 54.980.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 54.980.000,00 | SMAN 2 TANJUNG PANDAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 151.168.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 151.168.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 2 Paket | 10.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 10.000.000,00 | SMAN 2 TANJUNG PANDAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 0 Paket | 13.668.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 13.668.000,00 | SMAN 2 TANJUNG PANDAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 7.500.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 7.500.000,00 | SMAN 2 TANJUNG PANDAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 10.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 10.000.000,00 | SMAN 2 TANJUNG PANDAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 7.000.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 7.000.000,00 | SMAN 2 TANJUNG PANDAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 1 Paket | 88.000.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 88.000.000,00 | SMAN 2 TANJUNG PANDAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 5 Laporan | 15.000.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 15.000.000,00 | SMAN 2 TANJUNG PANDAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 57.200.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 57.200.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 2.200.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 2.200.000,00 | SMAN 2 TANJUNG PANDAN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 55.000.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 55.000.000,00 | SMAN 2 TANJUNG PANDAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 4.500.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 4.500.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 4.500.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 4.500.000,00 | SMAN 2 TANJUNG PANDAN |
| 94 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 1.706.272.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 1.706.272.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | - | - | | | - | 1.606.272.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 1.606.272.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0043 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | | | | 5 Unit | 239.980.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 239.980.000,00 | SMAN 2 TANJUNG PANDAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0045 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | | | | 100 Peserta didik | 100.000.000,00 | Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 100.000.000,00 | SMAN 2 TANJUNG PANDAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0049 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 100 Peserta Didik | 154.440.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 154.440.000,00 | SMAN 2 TANJUNG PANDAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0053 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS | | | | 0 Satuan Pendidikan | 1.111.852.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOS REGULER | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 1.111.852.000,00 | SMAN 2 TANJUNG PANDAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | - | - | | | - | 100.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 100.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0045 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | | | | 1 Paket | 100.000.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 100.000.000,00 | SMAN 2 TANJUNG PANDAN |
| | | | | | | SMAN 1 SIJUK | | | | | | 1.282.920.000,00 | | | | | | | 1.375.320.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 1.282.920.000,00 | | | | | | | 1.375.320.000,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 1.282.920.000,00 | | | | | | | 1.375.320.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 95 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 166.320.000,00 | | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 194.040.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 128.120.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 148.940.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 11.600.000,00 | Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 15.000.000,00 | SMAN 1 SIJUK |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 12.600.000,00 | Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 14.600.000,00 | SMAN 1 SIJUK |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 30.600.000,00 | Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 34.000.000,00 | SMAN 1 SIJUK |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 3 Dokumen | 5.600.000,00 | Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 6.000.000,00 | SMAN 1 SIJUK |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 1 Paket | 37.520.000,00 | Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 41.340.000,00 | SMAN 1 SIJUK |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 16 Laporan | 30.200.000,00 | Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 38.000.000,00 | SMAN 1 SIJUK |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 34.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 40.400.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 4.000.000,00 | Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 5.400.000,00 | SMAN 1 SIJUK |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 4 Laporan | 30.000.000,00 | Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 35.000.000,00 | SMAN 1 SIJUK |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 4.200.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 4.700.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 4.200.000,00 | Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 4.700.000,00 | SMAN 1 SIJUK |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 96 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 1.116.600.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 1.181.280.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | - | - | | | - | 1.015.600.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 1.061.280.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0037 | Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia | | | | 1 Paket | 50.000.000,00 | Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 56.000.000,00 | SMAN 1 SIJUK |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0046 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | | | | 1 Paket | 50.000.000,00 | Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 58.000.000,00 | SMAN 1 SIJUK |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0049 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 350 Peserta Didik | 161.080.000,00 | Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 184.760.000,00 | SMAN 1 SIJUK |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0053 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS | | | | 1 Satuan Pendidikan | 728.520.000,00 | Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk | DAK NON FISIK-BOS REGULER | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 728.520.000,00 | SMAN 1 SIJUK |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0055 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | | | | 560 Unit | 26.000.000,00 | Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 34.000.000,00 | SMAN 1 SIJUK |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | - | - | | | - | 48.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 56.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0035 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | | | | 40 Unit | 48.000.000,00 | Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 56.000.000,00 | SMAN 1 SIJUK |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | - | - | | | - | 53.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 64.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0042 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | | | | 15 Unit | 53.000.000,00 | Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 64.000.000,00 | SMAN 1 SIJUK |
| | | | | | | SMAN 1 MEMBALONG | | | | | | 1.463.880.000,00 | | | | | | | 1.522.000.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 1.463.880.000,00 | | | | | | | 1.522.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 1.463.880.000,00 | | | | | | | 1.522.000.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 97 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 264.720.000,00 | | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 280.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 148.520.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 156.500.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 14.000.000,00 | Kab. Belitung, Membalong, Membalong | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 16.000.000,00 | SMAN 1 MEMBALONG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 3 Paket | 14.720.000,00 | Kab. Belitung, Membalong, Membalong | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 15.000.000,00 | SMAN 1 MEMBALONG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 36.000.000,00 | Kab. Belitung, Membalong, Membalong | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 37.500.000,00 | SMAN 1 MEMBALONG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 3 Dokumen | 4.500.000,00 | Kab. Belitung, Membalong, Membalong | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 5.000.000,00 | SMAN 1 MEMBALONG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 1 Paket | 26.000.000,00 | Kab. Belitung, Membalong, Membalong | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 28.000.000,00 | SMAN 1 MEMBALONG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 15 Laporan | 53.300.000,00 | Kab. Belitung, Membalong, Membalong | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 55.000.000,00 | SMAN 1 MEMBALONG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 37.600.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 39.700.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 3.600.000,00 | Kab. Belitung, Membalong, Membalong | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 3.700.000,00 | SMAN 1 MEMBALONG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 4 Laporan | 34.000.000,00 | Kab. Belitung, Membalong, Membalong | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 36.000.000,00 | SMAN 1 MEMBALONG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 78.600.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 83.800.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 3.600.000,00 | Kab. Belitung, Membalong, Membalong | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 3.800.000,00 | SMAN 1 MEMBALONG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 12 Unit | 75.000.000,00 | Kab. Belitung, Membalong, Membalong | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 80.000.000,00 | SMAN 1 MEMBALONG |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 98 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 1.199.160.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 1.242.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | - | - | | | - | 1.199.160.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 1.242.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0037 | Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia | | | | 1 Paket | 50.900.000,00 | Kab. Belitung, Membalong, Membalong | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 52.000.000,00 | SMAN 1 MEMBALONG |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0043 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | | | | 30 Unit | 37.000.000,00 | Kab. Belitung, Membalong, Membalong | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 40.000.000,00 | SMAN 1 MEMBALONG |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0046 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | | | | 3 Paket | 57.000.000,00 | Kab. Belitung, Membalong, Membalong | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 60.000.000,00 | SMAN 1 MEMBALONG |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0049 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 500 Peserta Didik | 200.000.000,00 | Kab. Belitung, Membalong, Membalong | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 220.000.000,00 | SMAN 1 MEMBALONG |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0053 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS | | | | 0 Satuan Pendidikan | 831.480.000,00 | Kab. Belitung, Membalong, Membalong | DAK NON FISIK-BOS REGULER | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 845.000.000,00 | SMAN 1 MEMBALONG |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0055 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | | | | 580 Unit | 22.780.000,00 | Kab. Belitung, Membalong, Membalong | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 25.000.000,00 | SMAN 1 MEMBALONG |
| | | | | | | SMAN 1 GANTUNG | | | | | | 2.013.520.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 2.013.520.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 2.013.520.000,00 | | | | | | | 0,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 99 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 303.900.000,00 | | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 194.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 5.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMAN 1 GANTUNG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 13.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMAN 1 GANTUNG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 0 Paket | 7.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMAN 1 GANTUNG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 16.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMAN 1 GANTUNG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMAN 1 GANTUNG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 1 Paket | 33.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMAN 1 GANTUNG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 1 Laporan | 5.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMAN 1 GANTUNG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 110.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMAN 1 GANTUNG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 45.500.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 2.500.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMAN 1 GANTUNG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 43.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMAN 1 GANTUNG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 64.400.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 1 Unit | 4.400.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMAN 1 GANTUNG |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 60.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMAN 1 GANTUNG |
| 100 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 1.709.620.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | - | - | | | - | 1.307.520.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0045 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | | | | 100 Peserta didik | 100.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMAN 1 GANTUNG |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0051 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | | | | 10 Orang | 40.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMAN 1 GANTUNG |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0053 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS | | | | 1 Satuan Pendidikan | 1.155.520.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOS REGULER | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMAN 1 GANTUNG |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0078 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | | | | 1 Satuan Pendidikan | 12.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMAN 1 GANTUNG |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | - | - | | | - | 170.900.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0035 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | | | | 1 Unit | 13.500.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMAN 1 GANTUNG |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0041 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 100 Peserta Didik | 157.400.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMAN 1 GANTUNG |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | - | - | | | - | 231.200.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0040 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | | | | 1 Paket | 120.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMAN 1 GANTUNG |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0048 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 100 Peserta Didik | 111.200.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMAN 1 GANTUNG |
| | | | | | | SMAN 1 KELAPA KAMPIT | | | | | | 1.528.050.000,00 | | | | | | | 1.511.190.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 1.528.050.000,00 | | | | | | | 1.511.190.000,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 1.528.050.000,00 | | | | | | | 1.511.190.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 101 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 182.880.000,00 | | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 217.360.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 111.880.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 137.360.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 5 Paket | 15.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Mentawak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 15.000.000,00 | SMAN 1 KELAPA KAMPIT |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 5 Paket | 15.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Mentawak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 20.000.000,00 | SMAN 1 KELAPA KAMPIT |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 3 Paket | 4.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Mentawak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 4.000.000,00 | SMAN 1 KELAPA KAMPIT |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 5 Paket | 20.480.000,00 | Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Mentawak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 30.000.000,00 | SMAN 1 KELAPA KAMPIT |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 2.400.000,00 | Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Mentawak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 2.400.000,00 | SMAN 1 KELAPA KAMPIT |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 5 Paket | 35.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Mentawak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 40.000.000,00 | SMAN 1 KELAPA KAMPIT |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 15 Laporan | 20.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Mentawak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 25.960.000,00 | SMAN 1 KELAPA KAMPIT |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 36.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 40.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 36.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Mentawak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 40.000.000,00 | SMAN 1 KELAPA KAMPIT |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 35.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 40.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 10.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Mentawak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 10.000.000,00 | SMAN 1 KELAPA KAMPIT |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 4 Unit | 25.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Mentawak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 30.000.000,00 | SMAN 1 KELAPA KAMPIT |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 102 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 1.345.170.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 1.293.830.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | - | - | | | - | 1.345.170.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 1.293.830.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0046 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | | | | 3 Paket | 25.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Mentawak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 25.000.000,00 | SMAN 1 KELAPA KAMPIT |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0049 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 100 Peserta Didik | 182.880.000,00 | Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Mentawak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 213.360.000,00 | SMAN 1 KELAPA KAMPIT |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0053 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS | | | | 1 Satuan Pendidikan | 918.450.000,00 | Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Mentawak | DAK NON FISIK-BOS REGULER | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 795.990.000,00 | SMAN 1 KELAPA KAMPIT |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0078 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | | | | 1 Satuan Pendidikan | 218.840.000,00 | Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Mentawak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 259.480.000,00 | SMAN 1 KELAPA KAMPIT |
| | | | | | | SMAN 1 MANGGAR | | | | | | 2.334.480.000,00 | | | | | | | 1.123.400.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 2.334.480.000,00 | | | | | | | 1.123.400.000,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 2.334.480.000,00 | | | | | | | 1.123.400.000,00 | |
| 103 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 293.400.000,00 | | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 324.700.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 166.200.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 197.500.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 6 Paket | 20.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 20.000.000,00 | SMAN 1 MANGGAR |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 5 Paket | 23.700.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 25.000.000,00 | SMAN 1 MANGGAR |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 15.500.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 18.500.000,00 | SMAN 1 MANGGAR |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 4 Paket | 9.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 10.000.000,00 | SMAN 1 MANGGAR |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 12 Dokumen | 6.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 6.000.000,00 | SMAN 1 MANGGAR |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 4 Paket | 27.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 38.000.000,00 | SMAN 1 MANGGAR |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 65.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 80.000.000,00 | SMAN 1 MANGGAR |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 124.200.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 124.200.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 tahun Laporan | 3.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 3.000.000,00 | SMAN 1 MANGGAR |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 tahun Laporan | 121.200.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 121.200.000,00 | SMAN 1 MANGGAR |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 3.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 3.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 3.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 3.000.000,00 | SMAN 1 MANGGAR |
| 104 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 2.041.080.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 798.700.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | - | - | | | - | 1.971.080.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 713.700.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0038 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | | | | 12 Paket | 20.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 25.000.000,00 | SMAN 1 MANGGAR |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0039 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | | | | 12 Paket | 60.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 70.000.000,00 | SMAN 1 MANGGAR |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0043 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | | | | 10 Unit | 35.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 45.000.000,00 | SMAN 1 MANGGAR |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0045 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | | | | 75 Peserta didik | 65.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 70.000.000,00 | SMAN 1 MANGGAR |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0049 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 75 Peserta Didik | 90.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 100.000.000,00 | SMAN 1 MANGGAR |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0051 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | | | | 45 Orang | 55.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 60.000.000,00 | SMAN 1 MANGGAR |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0053 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS | | | | 0 Satuan Pendidikan | 1.356.480.000,00 | Kab. Belitung Timur, Manggar, Mekar Jaya | DAK NON FISIK-BOS REGULER | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMAN 1 MANGGAR |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0057 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | | 50 Orang | 36.200.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 51.400.000,00 | SMAN 1 MANGGAR |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0058 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | | | | 50 Konten Digital | 57.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 67.000.000,00 | SMAN 1 MANGGAR |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0059 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan | | | | 50 Orang | 55.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 68.000.000,00 | SMAN 1 MANGGAR |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0075 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | | | | 50 Orang | 56.400.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 67.300.000,00 | SMAN 1 MANGGAR |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0078 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | | | | 1 Satuan Pendidikan | 85.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 90.000.000,00 | SMAN 1 MANGGAR |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | - | - | | | - | 70.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 85.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0042 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | | | | 10 Unit | 35.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 45.000.000,00 | SMAN 1 MANGGAR |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0045 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | | | | 12 Paket | 35.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 40.000.000,00 | SMAN 1 MANGGAR |
| | | | | | | SMAN 1 SIMPANG PESAK | | | | | | 1.194.140.000,00 | | | | | | | 1.375.540.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 1.194.140.000,00 | | | | | | | 1.375.540.000,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 1.194.140.000,00 | | | | | | | 1.375.540.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 105 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 358.242.000,00 | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 408.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 239.122.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 275.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 12 Paket | 12.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Simpang Pesak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 15.000.000,00 | SMAN 1 SIMPANG PESAK |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 5 Paket | 25.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Simpang Pesak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 30.000.000,00 | SMAN 1 SIMPANG PESAK |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 12 Paket | 20.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Simpang Pesak | PENDAPATAN ASLI DAERAH | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 25.000.000,00 | SMAN 1 SIMPANG PESAK |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 Paket | 34.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Simpang Pesak | PENDAPATAN ASLI DAERAH | - | - | - | | 40.000.000,00 | SMAN 1 SIMPANG PESAK |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 Paket | 25.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Simpang Pesak | PENDAPATAN ASLI DAERAH | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 30.000.000,00 | SMAN 1 SIMPANG PESAK |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 36 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Simpang Pesak | PENDAPATAN ASLI DAERAH | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 15.000.000,00 | SMAN 1 SIMPANG PESAK |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 15 Paket | 45.122.000,00 | Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Simpang Pesak | PENDAPATAN ASLI DAERAH | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 50.000.000,00 | SMAN 1 SIMPANG PESAK |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 30 Laporan | 68.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Simpang Pesak | PENDAPATAN ASLI DAERAH | - | - | - | | 70.000.000,00 | SMAN 1 SIMPANG PESAK |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 59.120.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 67.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 8 Laporan | 20.620.000,00 | Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Simpang Pesak | PENDAPATAN ASLI DAERAH | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 25.000.000,00 | SMAN 1 SIMPANG PESAK |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 38.500.000,00 | Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Simpang Pesak | PENDAPATAN ASLI DAERAH | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 42.000.000,00 | SMAN 1 SIMPANG PESAK |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 60.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 66.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 2 Unit | 15.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Simpang Pesak | PENDAPATAN ASLI DAERAH | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 18.000.000,00 | SMAN 1 SIMPANG PESAK |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 6 Unit | 45.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Simpang Pesak | PENDAPATAN ASLI DAERAH | - | - | - | | 48.000.000,00 | SMAN 1 SIMPANG PESAK |
| 106 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 835.898.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 967.540.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | - | - | | | - | 777.898.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 896.540.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0049 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 420 Peserta Didik | 67.358.000,00 | Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Simpang Pesak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 70.000.000,00 | SMAN 1 SIMPANG PESAK |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0051 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | | | | 42 Orang | 30.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Simpang Pesak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 40.000.000,00 | SMAN 1 SIMPANG PESAK |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0053 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS | | | | 1 Satuan Pendidikan | 662.540.000,00 | Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Simpang Pesak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 762.540.000,00 | SMAN 1 SIMPANG PESAK |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0057 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | | 4 Orang | 18.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Simpang Pesak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 24.000.000,00 | SMAN 1 SIMPANG PESAK |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | - | - | | | - | 38.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 46.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0030 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia | | | | 5 Paket | 18.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Simpang Pesak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 24.000.000,00 | SMAN 1 SIMPANG PESAK |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0035 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | | | | 10 Unit | 20.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Simpang Pesak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 22.000.000,00 | SMAN 1 SIMPANG PESAK |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | - | - | | | - | 20.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 25.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0045 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | | | | 3 Paket | 20.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Simpang Pesak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 25.000.000,00 | SMAN 1 SIMPANG PESAK |
| | | | | | | SMA Negeri 1 Damar | | | | | | 1.076.510.000,00 | | | | | | | 1.090.850.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 1.076.510.000,00 | | | | | | | 1.090.850.000,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 1.076.510.000,00 | | | | | | | 1.090.850.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 107 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 142.560.000,00 | | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 150.600.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 142.560.000,00 | | | - | - | - | - | 150.600.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 12 Paket | 40.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Damar, Mengkubang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 41.000.000,00 | SMA NEGERI 1 DAMAR |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 12 Paket | 30.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Damar, Mengkubang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 35.000.000,00 | SMA NEGERI 1 DAMAR |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 Paket | 3.600.000,00 | Kab. Belitung Timur, Damar, Mengkubang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 4.000.000,00 | SMA NEGERI 1 DAMAR |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 Paket | 55.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Damar, Mengkubang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 56.000.000,00 | SMA NEGERI 1 DAMAR |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 12 Dokumen | 4.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 4.200.000,00 | SMA NEGERI 1 DAMAR |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 4 Laporan | 3.360.000,00 | Kab. Belitung Timur, Damar, Mengkubang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 3.400.000,00 | SMA NEGERI 1 DAMAR |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 6.600.000,00 | Kab. Belitung Timur, Damar, Mengkubang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 7.000.000,00 | SMA NEGERI 1 DAMAR |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 108 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | APK PENDIDIKAN KHUSUS<br>APK PENDIDIKAN KHUSUS DI CABDIN I<br>APK PENDIDIKAN KHUSUS DI CABDIN II<br>APK PENDIDIKAN KHUSUS DI CABDIN III<br>APK PENDIDIKAN KHUSUS DI CABDIN IV<br>Persentase lulusan SMA yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah II<br>Persentase Satuan Pendidikan SMA terakreditasi A di Cabdin Wilayah V<br>Persentase Satuan Pendidikan SMK terakreditasi A<br>Persentase Satuan Pendidikan SMK terakreditasi A di Cabdin I<br>Persentase Satuan Pendidikan SMK terakreditasi A di Cabdin WIlayah II<br>Persentase Satuan Pendidikan SMK terakreditasi A di Cabdin WIlayah III<br>Persentase Satuan Pendidikan SMK terakreditasi A di Cabdin Wilayah IV<br>Persentase Satuan Pendidikan SMK terakreditasi A di Cabdin Wilayah V<br>Persentase siswa PK yang | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | 77,75 persen<br>74 persen<br>86 persen<br>90 persen<br>52,5 persen<br>60 persen<br>18,75 persen<br>73,6 persen<br>80 persen<br>76,5 persen<br>42,9 persen<br>90 persen<br>78,6 persen<br>6 persen<br>55 persen<br>12 persen<br>70 Persen<br>86 persen<br>42 persen<br>42,24 persen<br>39,54 persen<br>49,06 persen<br>37,71 persen<br>41,45 persen<br>37,02 persen<br>47,13 persen<br>34,22 persen | 933.950.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 940.250.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Guru dan siswa yang menguasai TIK di sekolah menengah atas ( UPT BALAI TEKOMDIK )<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (CABDIN I)<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (CABDIN II)<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (CABDIN III)I)<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (CABDIN IV)<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (CABDIN V)<br>jumlah pengadaan sarana prasarana Akses<br>jumlah pengadaan sarana prasarana Akses (CABDIN I) | - | | | 50 Satuan Pendidikan<br>225 orang<br>173 orang<br>189 orang<br>130 orang<br>159 orang<br>2900 unit<br>8330 unit<br>7221 unit<br>4752 unit<br>4730 unit<br>5868 unit<br>500 unit<br>16 unit<br>17 unit<br>10 unit<br>15 unit<br>7 unit<br>8 unit<br>15 unit<br>7 unit<br>11 unit<br>7 unit<br>5 unit<br>23 unit<br>24 unit | 816.510.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 822.800.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0043 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | | | | 12 Unit | 70.200.000,00 | Kab. Belitung Timur, Damar, Mengkubang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 70.300.000,00 | SMA NEGERI 1 DAMAR |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0045 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | | | | 150 Peserta didik | 45.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 45.500.000,00 | SMA NEGERI 1 DAMAR |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0049 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 150 Peserta Didik | 100.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Damar, Mengkubang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 105.000.000,00 | SMA NEGERI 1 DAMAR |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0053 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS | | | | 1 Satuan Pendidikan | 601.310.000,00 | Kab. Belitung Timur, Damar, Mengkubang | DAK NON FISIK-BOS REGULER | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 602.000.000,00 | SMA NEGERI 1 DAMAR |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | - | - | | | - | 117.440.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 117.450.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0045 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | | | | 8 Paket | 117.440.000,00 | Kab. Belitung Timur, Damar, Mengkubang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 117.450.000,00 | SMA NEGERI 1 DAMAR |
| | | | | | | SMAN OLAHRAGA MUHAMMAD NOER | | | | | | 4.739.053.300,00 | | | | | | | 4.983.365.910,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 4.624.053.300,00 | | | | | | | 4.863.365.910,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 4.624.053.300,00 | | | | | | | 4.863.365.910,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 109 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 330.553.300,00 | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 363.865.910,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 206.876.300,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 226.065.910,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 19.998.200,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Padang Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 23.000.000,00 | SMAN OLAHRAGA MUHAMMAD NOER |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 24.989.900,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Padang Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 27.488.890,00 | SMAN OLAHRAGA MUHAMMAD NOER |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 10.391.600,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Padang Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 11.430.760,00 | SMAN OLAHRAGA MUHAMMAD NOER |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 8.899.800,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Padang Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 9.789.780,00 | SMAN OLAHRAGA MUHAMMAD NOER |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 2.100.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Padang Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 2.310.000,00 | SMAN OLAHRAGA MUHAMMAD NOER |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 1 Paket | 15.496.800,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Padang Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 17.046.480,00 | SMAN OLAHRAGA MUHAMMAD NOER |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 125.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Padang Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 135.000.000,00 | SMAN OLAHRAGA MUHAMMAD NOER |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 61.300.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 63.300.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 3.300.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Padang Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 3.300.000,00 | SMAN OLAHRAGA MUHAMMAD NOER |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 58.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Padang Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 60.000.000,00 | SMAN OLAHRAGA MUHAMMAD NOER |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 62.377.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 74.500.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 1 Unit | 7.480.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Padang Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 9.500.000,00 | SMAN OLAHRAGA MUHAMMAD NOER |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 2 Unit | 54.897.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Padang Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 65.000.000,00 | SMAN OLAHRAGA MUHAMMAD NOER |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 110 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Persentase Satuan Pendidikan SMA terakreditasi A | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | 51,29 persen | 4.293.500.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 4.499.500.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Rata rata kompetensi literasi SMA ; numerasi (SMA OLAHRAGA MUHAMMAD NOER) | - | | | 2,23;2,08 Nilai | 4.293.500.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 4.499.500.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0045 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | | | | 72 Peserta didik | 2.850.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Padang Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 2.950.000.000,00 | SMAN OLAHRAGA MUHAMMAD NOER |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0049 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 72 Peserta Didik | 1.250.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Padang Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 1.350.000.000,00 | SMAN OLAHRAGA MUHAMMAD NOER |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0051 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | | | | 15 Orang | 28.500.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Padang Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 29.500.000,00 | SMAN OLAHRAGA MUHAMMAD NOER |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0053 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS | | | | 1 Satuan Pendidikan | 105.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Padang Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 105.000.000,00 | SMAN OLAHRAGA MUHAMMAD NOER |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0078 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | | | | 1 Satuan Pendidikan | 60.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Padang Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 65.000.000,00 | SMAN OLAHRAGA MUHAMMAD NOER |
| | X | | | | | NON URUSAN | | | | | | 115.000.000,00 | | | | | | | 120.000.000,00 | |
| | X | XX | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX | | | | | | 115.000.000,00 | | | | | | | 120.000.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 111 | X | XX | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 115.000.000,00 | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 120.000.000,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 115.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 120.000.000,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 2 Unit | 115.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Padang Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 120.000.000,00 | SMAN OLAHRAGA MUHAMMAD NOER |
| | | | | | | SMKN 1 PANGKALPINANG | | | | | | 2.370.400.000,00 | | | | | | | 2.483.800.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 2.370.400.000,00 | | | | | | | 2.483.800.000,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 2.370.400.000,00 | | | | | | | 2.483.800.000,00 | |
| 112 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 434.400.000,00 | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 487.200.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 222.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 258.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 36.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 40.000.000,00 | SMKN 1 PANGKALPINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 40.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 40.000.000,00 | SMKN 1 PANGKALPINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 40.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 42.000.000,00 | SMKN 1 PANGKALPINANG |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 40.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 40.000.000,00 | SMKN 1 PANGKALPINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 12 Dokumen | 6.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 6.000.000,00 | SMKN 1 PANGKALPINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 1 Paket | 40.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 40.000.000,00 | SMKN 1 PANGKALPINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 20.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 50.000.000,00 | SMKN 1 PANGKALPINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 97.400.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 99.200.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1.400.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 3.200.000,00 | SMKN 1 PANGKALPINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 96.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 96.000.000,00 | SMKN 1 PANGKALPINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 115.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 130.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 60 Unit | 30.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 40.000.000,00 | SMKN 1 PANGKALPINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 40 Unit | 85.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 90.000.000,00 | SMKN 1 PANGKALPINANG |
| 113 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 1.936.000.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 1.996.600.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | - | - | | | - | 1.936.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 1.996.600.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0030 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia | | | | 1 Paket | 5.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 62.600.000,00 | SMKN 1 PANGKALPINANG |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0038 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | | | | 1 Paket | 35.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 50.000.000,00 | SMKN 1 PANGKALPINANG |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0041 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 859 Peserta Didik | 359.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 380.000.000,00 | SMKN 1 PANGKALPINANG |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0046 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS | | | | 1 Satuan Pendidikan | 1.392.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal | DAK NON FISIK-BOS REGULER | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 1.414.000.000,00 | SMKN 1 PANGKALPINANG |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0072 | Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | | | | 1 Satuan Pendidikan | 145.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 90.000.000,00 | SMKN 1 PANGKALPINANG |
| | | | | | | SMKN 2 PANGKALPINANG | | | | | | 3.924.500.000,00 | | | | | | | 3.614.500.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 3.924.500.000,00 | | | | | | | 3.614.500.000,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 3.924.500.000,00 | | | | | | | 3.614.500.000,00 | |
| 114 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 374.500.000,00 | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 414.500.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 186.000.000,00 | | | - | - | - | - | 216.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 30.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Kejaksaan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 35.000.000,00 | SMKN 2 PANGKALPINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 30.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Kejaksaan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 35.000.000,00 | SMKN 2 PANGKALPINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 30.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Kejaksaan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 35.000.000,00 | SMKN 2 PANGKALPINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 25.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Kejaksaan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 30.000.000,00 | SMKN 2 PANGKALPINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 25.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Kejaksaan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 30.000.000,00 | SMKN 2 PANGKALPINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 6.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Kejaksaan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 6.000.000,00 | SMKN 2 PANGKALPINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 1 Paket | 25.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Kejaksaan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 30.000.000,00 | SMKN 2 PANGKALPINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 15.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Kejaksaan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 15.000.000,00 | SMKN 2 PANGKALPINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 173.500.000,00 | | | - | - | - | - | 183.500.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 3.500.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Kejaksaan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 3.500.000,00 | SMKN 2 PANGKALPINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 170.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Kejaksaan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 180.000.000,00 | SMKN 2 PANGKALPINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 15.000.000,00 | | | - | - | - | - | 15.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 1 Unit | 15.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Kejaksaan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 15.000.000,00 | SMKN 2 PANGKALPINANG |
| 115 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | | - | 3.550.000.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 3.200.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | - | - | | | - | 3.550.000.000,00 | | | - | - | - | - | 3.200.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0037 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | | | | 1 Peserta didik | 450.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Kejaksaan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 50.000.000,00 | SMKN 2 PANGKALPINANG |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0041 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 1 Peserta Didik | 600.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Kejaksaan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 650.000.000,00 | SMKN 2 PANGKALPINANG |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0046 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS | | | | 1 Satuan Pendidikan | 2.500.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Kejaksaan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 2.500.000.000,00 | SMKN 2 PANGKALPINANG |
| | | | | | | SMKN 3 PANGKALPINANG | | | | | | 2.273.200.000,00 | | | | | | | 2.439.000.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 2.270.200.000,00 | | | | | | | 2.434.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 2.270.200.000,00 | | | | | | | 2.434.000.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 116 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 321.340.000,00 | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 343.180.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 53.900.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 53.900.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitbesar | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMKN 3 PANGKALPINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 245.440.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 304.860.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 20.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitbesar | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 26.680.000,00 | SMKN 3 PANGKALPINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 88.440.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitbesar | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 95.000.000,00 | SMKN 3 PANGKALPINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 22.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitbesar | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 30.000.000,00 | SMKN 3 PANGKALPINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 2 Paket | 85.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitbesar | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 98.000.000,00 | SMKN 3 PANGKALPINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 200 Laporan | 30.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitbesar | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 55.180.000,00 | SMKN 3 PANGKALPINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 10.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 18.320.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1000 Laporan | 10.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitbesar | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 18.320.000,00 | SMKN 3 PANGKALPINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 12.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 20.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 12.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitbesar | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 20.000.000,00 | SMKN 3 PANGKALPINANG |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 117 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 1.948.860.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 2.090.820.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | - | - | | | - | 1.948.860.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 2.090.820.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0041 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 813 Peserta Didik | 272.540.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitbesar | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 348.180.000,00 | SMKN 3 PANGKALPINANG |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0046 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS | | | | 1 Satuan Pendidikan | 1.278.400.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitbesar | DAK NON FISIK-BOS REGULER | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 1.278.400.000,00 | SMKN 3 PANGKALPINANG |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0072 | Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | | | | 1 Satuan Pendidikan | 397.920.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitbesar | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 464.240.000,00 | SMKN 3 PANGKALPINANG |
| | X | | | | | NON URUSAN | | | | | | 3.000.000,00 | | | | | | | 5.000.000,00 | |
| | X | XX | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX | | | | | | 3.000.000,00 | | | | | | | 5.000.000,00 | |
| 118 | X | XX | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 3.000.000,00 | | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 5.000.000,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 3.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 5.000.000,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 36 Dokumen | 3.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitbesar | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 5.000.000,00 | SMKN 3 PANGKALPINANG |
| | | | | | | SMKN 4 PANGKALPINANG | | | | | | 2.018.400.000,00 | | | | | | | 1.118.400.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 2.018.400.000,00 | | | | | | | 1.118.400.000,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 2.018.400.000,00 | | | | | | | 1.118.400.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 119 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 270.000.000,00 | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 85.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 20.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMKN 4 PANGKALPINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 40.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMKN 4 PANGKALPINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 13.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMKN 4 PANGKALPINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 12 Dokumen | 2.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMKN 4 PANGKALPINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 120 Laporan | 10.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMKN 4 PANGKALPINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 162.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 2.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMKN 4 PANGKALPINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 160.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMKN 4 PANGKALPINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 23.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 3.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMKN 4 PANGKALPINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 24 Unit | 10.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMKN 4 PANGKALPINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 10.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMKN 4 PANGKALPINANG |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 120 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 1.748.400.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 1.118.400.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | - | - | | | - | 1.748.400.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 1.118.400.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0041 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 250 Peserta Didik | 360.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMKN 4 PANGKALPINANG |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0046 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS | | | | 1 Satuan Pendidikan | 1.118.400.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Temberan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOS REGULER | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 1.118.400.000,00 | SMKN 4 PANGKALPINANG |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0072 | Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | | | | 1 Satuan Pendidikan | 270.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMKN 4 PANGKALPINANG |
| | | | | | | SMKN 5 PANGKALPINANG | | | | | | 1.143.200.000,00 | | | | | | | 1.157.600.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 1.143.200.000,00 | | | | | | | 1.157.600.000,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 1.143.200.000,00 | | | | | | | 1.157.600.000,00 | |
| 121 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 237.600.000,00 | | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 240.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 137.000.000,00 | | | - | - | - | - | 137.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 7.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 7.000.000,00 | SMKN 5 PANGKALPINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 20.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 20.000.000,00 | SMKN 5 PANGKALPINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 3.900.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 3.900.000,00 | SMKN 5 PANGKALPINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 24.500.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 24.500.000,00 | SMKN 5 PANGKALPINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 3.600.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 3.600.000,00 | SMKN 5 PANGKALPINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 1 Paket | 60.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 60.000.000,00 | SMKN 5 PANGKALPINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 18.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 18.000.000,00 | SMKN 5 PANGKALPINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 92.000.000,00 | | | - | - | - | - | 92.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 2.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 2.000.000,00 | SMKN 5 PANGKALPINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 90.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 90.000.000,00 | SMKN 5 PANGKALPINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 8.600.000,00 | | | - | - | - | - | 11.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 3.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 3.000.000,00 | SMKN 5 PANGKALPINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 8 Unit | 5.600.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 8.000.000,00 | SMKN 5 PANGKALPINANG |
| 122 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 905.600.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 917.600.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | - | - | | | - | 905.600.000,00 | | | - | - | - | - | 917.600.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0041 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 60 Peserta Didik | 186.400.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 186.400.000,00 | SMKN 5 PANGKALPINANG |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0043 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | | | | 35 Orang | 48.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 55.000.000,00 | SMKN 5 PANGKALPINANG |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0045 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | | | | 1 Satuan Pendidikan | 20.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 25.000.000,00 | SMKN 5 PANGKALPINANG |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0046 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS | | | | 1 Satuan Pendidikan | 651.200.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI DAERAH - LRA | - | - | - | | 651.200.000,00 | SMKN 5 PANGKALPINANG |
| | | | | | | SMKN 1 SUNGAILIAT | | | | | | 2.849.600.000,00 | | | | | | | 3.107.000.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 2.849.600.000,00 | | | | | | | 3.107.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 2.849.600.000,00 | | | | | | | 3.107.000.000,00 | |
| 123 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 367.200.000,00 | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 405.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 227.200.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 255.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 20.600.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 25.000.000,00 | SMKN 1 SUNGAILIAT |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 25.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 30.000.000,00 | SMKN 1 SUNGAILIAT |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 23.600.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 25.000.000,00 | SMKN 1 SUNGAILIAT |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 70.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 80.000.000,00 | SMKN 1 SUNGAILIAT |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 1 Paket | 33.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 35.000.000,00 | SMKN 1 SUNGAILIAT |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 100 Laporan | 55.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 60.000.000,00 | SMKN 1 SUNGAILIAT |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 140.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 150.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 36 Laporan | 140.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 150.000.000,00 | SMKN 1 SUNGAILIAT |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 124 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 2.482.400.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 2.702.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | - | - | | | - | 2.482.400.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 2.702.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0029 | Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia | | | | 2 Paket | 50.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 52.000.000,00 | SMKN 1 SUNGAILIAT |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0030 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia | | | | 2 Paket | 50.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 50.000.000,00 | SMKN 1 SUNGAILIAT |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0035 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | | | | 5 Unit | 25.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 30.000.000,00 | SMKN 1 SUNGAILIAT |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0037 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | | | | 200 Peserta didik | 50.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 52.000.000,00 | SMKN 1 SUNGAILIAT |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0038 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | | | | 5 Paket | 81.800.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 82.000.000,00 | SMKN 1 SUNGAILIAT |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0041 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 1036 Peserta Didik | 120.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 110.000.000,00 | SMKN 1 SUNGAILIAT |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0043 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | | | | 10 Orang | 35.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 40.000.000,00 | SMKN 1 SUNGAILIAT |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0045 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | | | | 1 Satuan Pendidikan | 25.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 30.000.000,00 | SMKN 1 SUNGAILIAT |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0046 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS | | | | 1 Satuan Pendidikan | 1.625.600.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 1.800.000.000,00 | SMKN 1 SUNGAILIAT |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0050 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | | 50 Orang | 35.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 40.000.000,00 | SMKN 1 SUNGAILIAT |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0051 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | | | | 20 Konten Digital | 50.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 52.000.000,00 | SMKN 1 SUNGAILIAT |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0052 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan | | | | 10 Orang | 30.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 35.000.000,00 | SMKN 1 SUNGAILIAT |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0053 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | 15 Dokumen | 15.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 20.000.000,00 | SMKN 1 SUNGAILIAT |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0054 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | | | | 10 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 7.000.000,00 | SMKN 1 SUNGAILIAT |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0060 | Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi | | | | 360 Orang | 105.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 110.000.000,00 | SMKN 1 SUNGAILIAT |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0069 | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat | | | | 4 Ruang | 105.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 110.000.000,00 | SMKN 1 SUNGAILIAT |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0070 | Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi sedang/berat | | | | 3 Unit | 50.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 52.000.000,00 | SMKN 1 SUNGAILIAT |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0072 | Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | | | | 1 Satuan Pendidikan | 25.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 30.000.000,00 | SMKN 1 SUNGAILIAT |
| | | | | | | SMKN 2 SUNGAILIAT | | | | | | 2.142.800.000,00 | | | | | | | 2.387.400.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 2.142.800.000,00 | | | | | | | 2.387.400.000,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 2.142.800.000,00 | | | | | | | 2.387.400.000,00 | |
| 125 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 284.760.000,00 | | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 332.220.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 188.760.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 225.220.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 40.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 50.000.000,00 | SMKN 2 SUNGAILIAT |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 30.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 40.000.000,00 | SMKN 2 SUNGAILIAT |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 15.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 15.000.000,00 | SMKN 2 SUNGAILIAT |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 40.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 48.220.000,00 | SMKN 2 SUNGAILIAT |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 5.000.000,00 | SMKN 2 SUNGAILIAT |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 1 Paket | 28.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 35.000.000,00 | SMKN 2 SUNGAILIAT |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 5 Laporan | 30.760.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 32.000.000,00 | SMKN 2 SUNGAILIAT |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 88.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 98.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 8.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 8.000.000,00 | SMKN 2 SUNGAILIAT |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 80.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 90.000.000,00 | SMKN 2 SUNGAILIAT |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 8.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 9.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 8.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 9.000.000,00 | SMKN 2 SUNGAILIAT |
| 126 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 1.858.040.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 2.055.180.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | - | - | | | - | 1.778.040.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 1.955.180.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0035 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | | | | 1 Unit | 85.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 100.000.000,00 | SMKN 2 SUNGAILIAT |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0037 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | | | | 5 Peserta didik | 10.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 15.000.000,00 | SMKN 2 SUNGAILIAT |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0041 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 45 Peserta Didik | 259.440.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 290.180.000,00 | SMKN 2 SUNGAILIAT |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0046 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS | | | | 1 Satuan Pendidikan | 1.193.600.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 1.280.000.000,00 | SMKN 2 SUNGAILIAT |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0072 | Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | | | | 1 Satuan Pendidikan | 230.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 270.000.000,00 | SMKN 2 SUNGAILIAT |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | - | - | | | - | 80.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 100.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0045 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | | | | 1 Paket | 80.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 100.000.000,00 | SMKN 2 SUNGAILIAT |
| | | | | | | SMKN 1 BELINYU | | | | | | 1.165.600.000,00 | | | | | | | 545.743.400,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 1.165.600.000,00 | | | | | | | 545.743.400,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 1.165.600.000,00 | | | | | | | 545.743.400,00 | |
| 127 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 171.410.000,00 | | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 175.743.400,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 58.690.850,00 | | | - | - | - | - | 60.750.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 16.610.000,00 | Kab. Bangka, Belinyu, Bukit Ketok | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 18.000.000,00 | SMKN 1 BELINYU |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 1 Paket | 29.330.850,00 | Kab. Bangka, Belinyu, Bukit Ketok | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 30.000.000,00 | SMKN 1 BELINYU |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 12.750.000,00 | Kab. Bangka, Belinyu, Bukit Ketok | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 12.750.000,00 | SMKN 1 BELINYU |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 88.944.450,00 | | | - | - | - | - | 90.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 88.944.450,00 | Kab. Bangka, Belinyu, Bukit Ketok | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 90.000.000,00 | SMKN 1 BELINYU |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 23.774.700,00 | | | - | - | - | - | 24.993.400,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 6.993.400,00 | Kab. Bangka, Belinyu, Bukit Ketok | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 6.993.400,00 | SMKN 1 BELINYU |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 20 Unit | 16.781.300,00 | Kab. Bangka, Belinyu, Bukit Ketok | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 18.000.000,00 | SMKN 1 BELINYU |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 128 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 994.190.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 370.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | - | - | | | - | 994.190.000,00 | | | - | - | - | - | 370.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0033 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | | | | 3 Paket | 135.000.000,00 | Kab. Bangka, Belinyu, Bukit Ketok | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 160.000.000,00 | SMKN 1 BELINYU |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0041 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 420 Peserta Didik | 95.940.000,00 | Kab. Bangka, Belinyu, Bukit Ketok | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 96.000.000,00 | SMKN 1 BELINYU |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0046 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS | | | | 1 Satuan Pendidikan | 649.600.000,00 | Kab. Bangka, Belinyu, Belinyu | DAK NON FISIK-BOS REGULER | - | - | - | | 0,00 | SMKN 1 BELINYU |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0072 | Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | | | | 1 Satuan Pendidikan | 113.650.000,00 | Kab. Bangka, Belinyu, Bukit Ketok | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 114.000.000,00 | SMKN 1 BELINYU |
| | | | | | | SMK N 1 BAKAM | | | | | | 1.040.800.000,00 | | | | | | | 1.118.000.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 1.040.800.000,00 | | | | | | | 1.118.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 1.040.800.000,00 | | | | | | | 1.118.000.000,00 | |
| 129 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 133.200.000,00 | | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 155.400.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 73.200.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 95.400.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 15.000.000,00 | Kab. Bangka, Bakam, Bakam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 25.000.000,00 | SMK N 1 BAKAM |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 4 Paket | 17.200.000,00 | Kab. Bangka, Bakam, Bakam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 27.200.000,00 | SMK N 1 BAKAM |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 4 Paket | 20.000.000,00 | Kab. Bangka, Bakam, Bakam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 22.200.000,00 | SMK N 1 BAKAM |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 2 Paket | 21.000.000,00 | Kab. Bangka, Bakam, Bakam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 21.000.000,00 | SMK N 1 BAKAM |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 60.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 60.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 60.000.000,00 | Kab. Bangka, Bakam, Bakam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 60.000.000,00 | SMK N 1 BAKAM |
| 130 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 907.600.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 962.600.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | - | - | | | - | 907.600.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 962.600.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0038 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | | | | 2 Paket | 40.800.000,00 | Kab. Bangka, Bakam, Bakam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 70.000.000,00 | SMK N 1 BAKAM |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0041 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 14 Peserta Didik | 90.000.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 110.000.000,00 | SMK N 1 BAKAM |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0045 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | | | | 1 Satuan Pendidikan | 90.000.000,00 | Kab. Bangka, Bakam, Bakam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 92.600.000,00 | SMK N 1 BAKAM |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0046 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS | | | | 1 Satuan Pendidikan | 596.800.000,00 | Kab. Bangka, Bakam, Bakam | DAK NON FISIK-BOS REGULER | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 600.000.000,00 | SMK N 1 BAKAM |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0072 | Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | | | | 1 Satuan Pendidikan | 90.000.000,00 | Kab. Bangka, Bakam, Bakam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 90.000.000,00 | SMK N 1 BAKAM |
| | | | | | | SMKN 1 MENDOBARAT | | | | | | 733.100.000,00 | | | | | | | 743.950.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 733.100.000,00 | | | | | | | 743.950.000,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 733.100.000,00 | | | | | | | 743.950.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 131 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 95.420.000,00 | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 110.040.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 70.500.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 79.190.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 12.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 13.200.000,00 | SMKN 1 MENDOBARAT |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 6 Paket | 12.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 13.200.000,00 | SMKN 1 MENDOBARAT |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 8 Paket | 6.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 7.740.000,00 | SMKN 1 MENDOBARAT |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 12 Dokumen | 2.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 2.000.000,00 | SMKN 1 MENDOBARAT |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 6 Paket | 24.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 26.400.000,00 | SMKN 1 MENDOBARAT |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 12 Laporan | 8.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 9.500.000,00 | SMKN 1 MENDOBARAT |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 6.500.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 7.150.000,00 | SMKN 1 MENDOBARAT |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 2.200.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 1.200.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2 Laporan | 2.200.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 1.200.000,00 | SMKN 1 MENDOBARAT |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 22.720.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 29.650.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 1.250.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 1.250.000,00 | SMKN 1 MENDOBARAT |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 18 Unit | 21.470.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 28.400.000,00 | SMKN 1 MENDOBARAT |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 132 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 637.680.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 633.910.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | - | - | | | - | 637.680.000,00 | | | - | - | - | - | 633.910.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0038 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | | | | 4 Paket | 65.760.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 41.270.000,00 | SMKN 1 MENDOBARAT |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0041 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 252 Peserta Didik | 94.320.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 110.040.000,00 | SMKN 1 MENDOBARAT |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0046 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS | | | | 1 Satuan Pendidikan | 417.600.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 417.600.000,00 | SMKN 1 MENDOBARAT |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0072 | Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | | | | 1 Satuan Pendidikan | 60.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 65.000.000,00 | SMKN 1 MENDOBARAT |
| | | | | | | SMKN 1 KOBA | | | | | | 1.541.200.000,00 | | | | | | | 1.649.000.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 1.541.200.000,00 | | | | | | | 1.649.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 1.541.200.000,00 | | | | | | | 1.649.000.000,00 | |
| 133 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 286.800.000,00 | | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 334.600.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 208.800.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 255.600.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 2 Paket | 20.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Koba, Penyak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 20.000.000,00 | SMKN 1 KOBA |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 30.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Koba, Penyak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 50.000.000,00 | SMKN 1 KOBA |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 28.800.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Koba, Penyak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 35.600.000,00 | SMKN 1 KOBA |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 2 Paket | 30.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Koba, Penyak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 35.000.000,00 | SMKN 1 KOBA |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 5 Paket | 30.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Koba, Penyak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 30.000.000,00 | SMKN 1 KOBA |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 50 Laporan | 70.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Koba, Penyak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 85.000.000,00 | SMKN 1 KOBA |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 78.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 79.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 5 Laporan | 6.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Koba, Penyak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 7.000.000,00 | SMKN 1 KOBA |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 72.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Koba, Penyak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 72.000.000,00 | SMKN 1 KOBA |
| 134 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 1.254.400.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 1.314.400.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | - | - | | | - | 1.254.400.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 1.314.400.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0041 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 550 Peserta Didik | 120.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Koba, Penyak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 130.000.000,00 | SMKN 1 KOBA |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0043 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | | | | 60 Orang | 40.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Koba, Penyak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 50.000.000,00 | SMKN 1 KOBA |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0046 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS | | | | 1 Satuan Pendidikan | 894.400.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Koba, Penyak | DAK NON FISIK-BOS REGULER | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 894.400.000,00 | SMKN 1 KOBA |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0072 | Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | | | | 1 Satuan Pendidikan | 200.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Koba, Penyak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 240.000.000,00 | SMKN 1 KOBA |
| | | | | | | SMKN 2 KOBA | | | | | | 2.040.000.000,00 | | | | | | | 2.040.000.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 2.040.000.000,00 | | | | | | | 2.040.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 2.040.000.000,00 | | | | | | | 2.040.000.000,00 | |
| 135 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 188.784.000,00 | | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 188.784.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 82.080.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 82.080.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 19.152.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Koba, Arung Dalam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 19.152.000,00 | SMKN 2 KOBA |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 21.888.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Koba, Arung Dalam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 21.888.000,00 | SMKN 2 KOBA |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 60 Laporan | 41.040.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Koba, Arung Dalam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 41.040.000,00 | SMKN 2 KOBA |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 106.704.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 106.704.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 2.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Koba, Arung Dalam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 2.000.000,00 | SMKN 2 KOBA |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 104.704.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Koba, Arung Dalam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 104.704.000,00 | SMKN 2 KOBA |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 136 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 1.851.216.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 1.851.216.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | - | - | | | - | 1.851.216.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 1.851.216.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0031 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | | | | 1 Paket | 84.816.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Koba, Arung Dalam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 84.816.000,00 | SMKN 2 KOBA |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0041 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 699 Peserta Didik | 273.600.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Koba, Arung Dalam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 273.600.000,00 | SMKN 2 KOBA |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0046 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS | | | | 1 Satuan Pendidikan | 1.128.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Koba, Arung Dalam | DAK NON FISIK-BOS REGULER | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 1.128.000.000,00 | SMKN 2 KOBA |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0072 | Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | | | | 1 Satuan Pendidikan | 364.800.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Koba, Arung Dalam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 364.800.000,00 | SMKN 2 KOBA |
| | | | | | | SMKN 1 PANGKALAN BARU | | | | | | 2.636.400.000,00 | | | | | | | 2.873.400.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 2.636.400.000,00 | | | | | | | 2.873.400.000,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 2.636.400.000,00 | | | | | | | 2.873.400.000,00 | |
| 137 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 358.715.000,00 | | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 365.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 47.412.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 50.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 2 Dokumen | 47.412.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 50.000.000,00 | SMKN 1 PANGKALAN BARU |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 311.303.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 315.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 0 Laporan | 311.303.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 315.000.000,00 | SMKN 1 PANGKALAN BARU |
| 138 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 2.277.685.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 2.508.400.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | - | - | | | - | 2.277.685.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 2.508.400.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0035 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | | | | 55 Unit | 12.222.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 13.000.000,00 | SMKN 1 PANGKALAN BARU |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0037 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | | | | 50 Peserta didik | 136.169.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 140.000.000,00 | SMKN 1 PANGKALAN BARU |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0041 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 100 Peserta Didik | 231.506.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 235.000.000,00 | SMKN 1 PANGKALAN BARU |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0046 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS | | | | 1 Satuan Pendidikan | 1.449.600.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Beluluk | DAK NON FISIK-BOS REGULER | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 1.670.400.000,00 | SMKN 1 PANGKALAN BARU |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0072 | Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | | | | 0 Satuan Pendidikan | 448.188.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 450.000.000,00 | SMKN 1 PANGKALAN BARU |
| | | | | | | SMKN 1 SIMPANG KATIS | | | | | | 2.745.400.000,00 | | | | | | | 1.366.400.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 2.745.400.000,00 | | | | | | | 1.366.400.000,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 2.745.400.000,00 | | | | | | | 1.366.400.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 139 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 812.300.000,00 | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 950.447.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 441.960.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 548.152.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 85.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 95.532.000,00 | SMKN 1 SIMPANG KATIS |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 87.041.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Simpang Katis, Terak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 112.560.000,00 | SMKN 1 SIMPANG KATIS |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 55.619.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Simpang Katis, Terak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 75.760.000,00 | SMKN 1 SIMPANG KATIS |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 154.500.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Simpang Katis, Terak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 184.500.000,00 | SMKN 1 SIMPANG KATIS |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 4.800.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Simpang Katis, Terak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 4.800.000,00 | SMKN 1 SIMPANG KATIS |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 180 Laporan | 55.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Simpang Katis, Terak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 75.000.000,00 | SMKN 1 SIMPANG KATIS |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 75.500.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 86.500.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 5.500.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Simpang Katis, Terak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 6.500.000,00 | SMKN 1 SIMPANG KATIS |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 70.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Simpang Katis, Terak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 80.000.000,00 | SMKN 1 SIMPANG KATIS |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 294.840.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 315.795.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 1 Unit | 134.895.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Simpang Katis, Terak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 155.850.000,00 | SMKN 1 SIMPANG KATIS |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 159.945.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Simpang Katis, Terak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 159.945.000,00 | SMKN 1 SIMPANG KATIS |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 140 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 1.933.100.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 415.953.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | - | - | | | - | 1.933.100.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 415.953.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0041 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 150 Peserta Didik | 100.200.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Simpang Katis, Terak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 150.203.000,00 | SMKN 1 SIMPANG KATIS |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0043 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | | | | 14 Orang | 70.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Simpang Katis, Terak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 70.000.000,00 | SMKN 1 SIMPANG KATIS |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0046 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS | | | | 1 Satuan Pendidikan | 1.574.200.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Simpang Katis, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | SMKN 1 SIMPANG KATIS |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0072 | Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | | | | 1 Satuan Pendidikan | 188.700.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Simpang Katis, Terak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 195.750.000,00 | SMKN 1 SIMPANG KATIS |
| | | | | | | SMK NEGERI 1 SUNGAISELAN | | | | | | 555.200.000,00 | | | | | | | 560.000.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 555.200.000,00 | | | | | | | 560.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 555.200.000,00 | | | | | | | 560.000.000,00 | |
| 141 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 77.760.000,00 | | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 77.760.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 27.760.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 27.760.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 1 Paket | 22.810.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Lampur | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 22.810.000,00 | SMK NEGERI 1 SUNGAISELAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 25 Laporan | 4.950.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Lampur | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 4.950.000,00 | SMK NEGERI 1 SUNGAISELAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 50.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 50.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 2.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Lampur | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 2.000.000,00 | SMK NEGERI 1 SUNGAISELAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 48.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Lampur | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 48.000.000,00 | SMK NEGERI 1 SUNGAISELAN |
| 142 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 477.440.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 482.240.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | - | - | | | - | 477.440.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 482.240.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0030 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia | | | | 1 Paket | 30.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Lampur | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 30.000.000,00 | SMK NEGERI 1 SUNGAISELAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0046 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS | | | | 1 Satuan Pendidikan | 296.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Lampur | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 300.800.000,00 | SMK NEGERI 1 SUNGAISELAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0072 | Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | | | | 1 Satuan Pendidikan | 151.440.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Lampur | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 151.440.000,00 | SMK NEGERI 1 SUNGAISELAN |
| | | | | | | SMKN 1 MUNTOK | | | | | | 1.580.250.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 1.580.250.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 1.580.250.000,00 | | | | | | | 0,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 143 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 198.360.000,00 | | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 166.210.000,00 | | | - | - | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 5.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Mentok, Air Belo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | SMKN 1 MUNTOK |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 53.520.000,00 | Kab. Bangka Barat, Mentok, Air Belo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | SMKN 1 MUNTOK |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 4.800.000,00 | Kab. Bangka Barat, Mentok, Air Belo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | SMKN 1 MUNTOK |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 4.550.000,00 | Kab. Bangka Barat, Mentok, Air Belo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | SMKN 1 MUNTOK |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 3.600.000,00 | Kab. Bangka Barat, Mentok, Air Belo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | SMKN 1 MUNTOK |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 94.740.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | SMKN 1 MUNTOK |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 500.000,00 | | | - | - | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 500.000,00 | Kab. Bangka Barat, Mentok, Air Belo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | SMKN 1 MUNTOK |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 31.650.000,00 | | | - | - | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 3.700.000,00 | Kab. Bangka Barat, Mentok, Air Belo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | SMKN 1 MUNTOK |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | | | | 550 Unit | 13.750.000,00 | Kab. Bangka Barat, Mentok, Air Belo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | SMKN 1 MUNTOK |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 21 Unit | 14.200.000,00 | Kab. Bangka Barat, Mentok, Air Belo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | SMKN 1 MUNTOK |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 144 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 1.381.890.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | - | - | | | - | 1.381.890.000,00 | | | - | - | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0038 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | | | | 5 Paket | 264.480.000,00 | Kab. Bangka Barat, Mentok, Air Belo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | SMKN 1 MUNTOK |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0041 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 76 Peserta Didik | 91.200.000,00 | Kab. Bangka Barat, Mentok, Air Belo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | SMKN 1 MUNTOK |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0046 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS | | | | 1 Satuan Pendidikan | 919.050.000,00 | Kab. Bangka Barat, Mentok, Air Belo | DAK NON FISIK-BOS REGULER | - | - | - | | 0,00 | SMKN 1 MUNTOK |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0072 | Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | | | | 1 Satuan Pendidikan | 107.160.000,00 | Kab. Bangka Barat, Mentok, Air Belo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | SMKN 1 MUNTOK |
| | | | | | | SMKN 1 KELAPA | | | | | | 1.209.000.000,00 | | | | | | | 1.390.700.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 1.209.000.000,00 | | | | | | | 1.390.700.000,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 1.209.000.000,00 | | | | | | | 1.390.700.000,00 | |
| 145 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 166.680.000,00 | | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 194.460.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 162.780.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 190.260.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 2 Paket | 6.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Kelapa, Kelapa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 7.500.000,00 | SMKN 1 KELAPA |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 64.280.000,00 | Kab. Bangka Barat, Kelapa, Kelapa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 76.500.000,00 | SMKN 1 KELAPA |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 5.500.000,00 | Kab. Bangka Barat, Kelapa, Kelapa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 6.500.000,00 | SMKN 1 KELAPA |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 2 Paket | 27.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Kelapa, Kelapa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 31.360.000,00 | SMKN 1 KELAPA |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 4 Laporan | 60.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Kelapa, Kelapa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 68.400.000,00 | SMKN 1 KELAPA |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 3.900.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 4.200.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 3.900.000,00 | Kab. Bangka Barat, Kelapa, Kelapa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 4.200.000,00 | SMKN 1 KELAPA |
| 146 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 1.042.320.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 1.196.240.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | - | - | | | - | 1.042.320.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 1.196.240.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0041 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 502 Peserta Didik | 166.680.000,00 | Kab. Bangka Barat, Kelapa, Kelapa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 194.460.000,00 | SMKN 1 KELAPA |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0046 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS | | | | 1 Satuan Pendidikan | 653.400.000,00 | Kab. Bangka Barat, Kelapa, Kelapa | DAK NON FISIK-BOS REGULER | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 742.500.000,00 | SMKN 1 KELAPA |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0072 | Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | | | | 1 Satuan Pendidikan | 222.240.000,00 | Kab. Bangka Barat, Kelapa, Kelapa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 259.280.000,00 | SMKN 1 KELAPA |
| | | | | | | SMKN 1 TEMPILANG | | | | | | 1.045.870.000,00 | | | | | | | 1.064.500.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 1.045.870.000,00 | | | | | | | 1.064.500.000,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 1.045.870.000,00 | | | | | | | 1.064.500.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 147 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 132.120.000,00 | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 149.500.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 79.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 95.500.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 7.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Tempilang, Penyampak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 7.500.000,00 | SMKN 1 TEMPILANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 20.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Tempilang, Penyampak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 25.000.000,00 | SMKN 1 TEMPILANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 12.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Tempilang, Penyampak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 13.000.000,00 | SMKN 1 TEMPILANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 40.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Tempilang, Penyampak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 50.000.000,00 | SMKN 1 TEMPILANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 53.120.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 54.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 53.120.000,00 | Kab. Bangka Barat, Tempilang, Penyampak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 54.000.000,00 | SMKN 1 TEMPILANG |
| 148 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 913.750.000,00 | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 915.000.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | - | - | | | - | 913.750.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 915.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0031 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | | | | 1 Paket | 50.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Tempilang, Penyampak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 30.000.000,00 | SMKN 1 TEMPILANG |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0035 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | | | | 1 Unit | 38.200.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 45.000.000,00 | SMKN 1 TEMPILANG |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0038 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | | | | 1 Paket | 120.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Tempilang, Penyampak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 130.000.000,00 | SMKN 1 TEMPILANG |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0041 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 150 Peserta Didik | 100.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Tempilang, Penyampak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 90.000.000,00 | SMKN 1 TEMPILANG |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0046 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS | | | | 1 Satuan Pendidikan | 605.550.000,00 | Kab. Bangka Barat, Tempilang, Penyampak | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 620.000.000,00 | SMKN 1 TEMPILANG |
| | | | | | | SMKN 1 PARIT TIGA | | | | | | 2.246.400.000,00 | | | | | | | 2.380.210.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 2.246.400.000,00 | | | | | | | 2.380.210.000,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 2.246.400.000,00 | | | | | | | 2.380.210.000,00 | |
| 149 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 281.880.000,00 | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 325.510.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 217.230.000,00 | | | - | - | - | - | 251.360.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 15.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Parittiga, Sekar Biru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 17.500.000,00 | SMKN 1 PARIT TIGA |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 5 Paket | 79.500.000,00 | Kab. Bangka Barat, Parittiga, Sekar Biru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 80.000.000,00 | SMKN 1 PARIT TIGA |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 16.750.000,00 | Kab. Bangka Barat, Parittiga, Sekar Biru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 18.000.000,00 | SMKN 1 PARIT TIGA |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 2 Paket | 27.500.000,00 | Kab. Bangka Barat, Parittiga, Sekar Biru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 30.000.000,00 | SMKN 1 PARIT TIGA |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 58 Laporan | 78.480.000,00 | Kab. Bangka Barat, Parittiga, Sekar Biru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 105.860.000,00 | SMKN 1 PARIT TIGA |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 20.500.000,00 | | | - | - | - | - | 20.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 5.500.000,00 | Kab. Bangka Barat, Parittiga, Sekar Biru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 5.000.000,00 | SMKN 1 PARIT TIGA |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 3 Laporan | 15.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Parittiga, Sekar Biru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 15.000.000,00 | SMKN 1 PARIT TIGA |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 44.150.000,00 | | | - | - | - | - | 54.150.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 4.150.000,00 | Kab. Bangka Barat, Parittiga, Sekar Biru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 4.150.000,00 | SMKN 1 PARIT TIGA |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 4 Unit | 40.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Parittiga, Sekar Biru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 50.000.000,00 | SMKN 1 PARIT TIGA |
| 150 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 1.964.520.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 2.054.700.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | - | - | | | - | 1.964.520.000,00 | | | - | - | - | - | 2.054.700.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0031 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | | | | 1 Paket | 30.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Parittiga, Sekar Biru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 30.000.000,00 | SMKN 1 PARIT TIGA |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0041 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 500 Peserta Didik | 251.880.000,00 | Kab. Bangka Barat, Parittiga, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 298.860.000,00 | SMKN 1 PARIT TIGA |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0043 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | | | | 65 Orang | 40.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Parittiga, Sekar Biru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 40.000.000,00 | SMKN 1 PARIT TIGA |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0046 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS | | | | 1 Satuan Pendidikan | 1.306.800.000,00 | Kab. Bangka Barat, Parittiga, Sekar Biru | DAK NON FISIK-BOS REGULER | - | - | - | | 1.350.000.000,00 | SMKN 1 PARIT TIGA |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0072 | Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | | | | 1 Satuan Pendidikan | 335.840.000,00 | Kab. Bangka Barat, Parittiga, Sekar Biru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 335.840.000,00 | SMKN 1 PARIT TIGA |
| | | | | | | SMKN 1 TOBOALI | | | | | | 2.028.820.000,00 | | | | | | | 2.132.520.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 2.028.820.000,00 | | | | | | | 2.132.520.000,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 2.028.820.000,00 | | | | | | | 2.132.520.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 151 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 259.920.000,00 | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 287.520.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 205.920.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 227.520.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 30.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Toboali, Teladan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 32.000.000,00 | SMKN 1 TOBOALI |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 6.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Toboali, Teladan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 6.500.000,00 | SMKN 1 TOBOALI |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 15.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Toboali, Teladan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 16.500.000,00 | SMKN 1 TOBOALI |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 4 Dokumen | 2.520.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Toboali, Teladan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 2.520.000,00 | SMKN 1 TOBOALI |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 1 Paket | 137.400.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Toboali, Teladan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 150.000.000,00 | SMKN 1 TOBOALI |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 30 Laporan | 15.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Toboali, Teladan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 20.000.000,00 | SMKN 1 TOBOALI |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 49.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 55.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 4 Laporan | 5.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Toboali, Teladan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 5.000.000,00 | SMKN 1 TOBOALI |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 8 Laporan | 44.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Toboali, Teladan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 50.000.000,00 | SMKN 1 TOBOALI |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 5.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 5.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 5.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Toboali, Teladan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 5.000.000,00 | SMKN 1 TOBOALI |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 152 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 1.768.900.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 1.845.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | - | - | | | - | 1.768.900.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 1.845.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0035 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | | | | 66 Unit | 66.480.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Toboali, Teladan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 40.000.000,00 | SMKN 1 TOBOALI |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0041 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 725 Peserta Didik | 240.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Toboali, Teladan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 250.000.000,00 | SMKN 1 TOBOALI |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0043 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | | | | 10 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Toboali, Teladan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 55.000.000,00 | SMKN 1 TOBOALI |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0046 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS | | | | 1 Satuan Pendidikan | 1.162.420.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Toboali, Teladan | DAK NON FISIK-BOS REGULER | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 1.200.000.000,00 | SMKN 1 TOBOALI |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0072 | Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | | | | 1 Satuan Pendidikan | 250.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Toboali, Teladan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 300.000.000,00 | SMKN 1 TOBOALI |
| | | | | | | SMKN 1 PAYUNG | | | | | | 1.061.300.000,00 | | | | | | | 1.154.300.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 1.051.730.000,00 | | | | | | | 1.143.773.000,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 1.051.730.000,00 | | | | | | | 1.143.773.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 153 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 125.400.000,00 | | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 137.940.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 112.200.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 123.420.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 2 Paket | 16.500.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Payung, Payung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 18.150.000,00 | SMKN 1 PAYUNG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 2 Paket | 8.800.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Payung, Payung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 9.680.000,00 | SMKN 1 PAYUNG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 2 Dokumen | 5.500.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Payung, Payung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 6.050.000,00 | SMKN 1 PAYUNG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 0 Paket | 11.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Payung, Payung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 12.100.000,00 | SMKN 1 PAYUNG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 2 Laporan | 70.400.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Payung, Payung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 77.440.000,00 | SMKN 1 PAYUNG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 9.900.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 10.890.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2 Laporan | 9.900.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Payung, Payung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 10.890.000,00 | SMKN 1 PAYUNG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 3.300.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 3.630.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 2 Unit | 3.300.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Payung, Payung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 3.630.000,00 | SMKN 1 PAYUNG |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 154 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 926.330.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 1.005.833.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | - | - | | | - | 192.170.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 225.907.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0049 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 2 Peserta Didik | 192.170.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 211.387.000,00 | SMKN 1 PAYUNG |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0060 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | 2 Dokumen | 0,00 | Kab. Bangka Selatan, Payung, Payung | - | - | - | - | | 14.520.000,00 | SMKN 1 PAYUNG |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | - | - | | | - | 595.700.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 595.700.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0046 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS | | | | 2 Satuan Pendidikan | 595.700.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOS REGULER | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 595.700.000,00 | SMKN 1 PAYUNG |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | Jumlah Guru dan siswa yang menguasai TIK di sekolah menengah atas ( UPT BALAI TEKOMDIK )<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (CABDIN I)<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (CABDIN II)<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (CABDIN III)I)<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (CABDIN IV)<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (CABDIN V)<br>jumlah pengadaan sarana prasarana Akses<br>jumlah pengadaan sarana prasarana Akses (CABDIN I) | - | | | 50 Satuan Pendidikan<br>225 orang<br>173 orang<br>189 orang<br>130 orang<br>159 orang<br>2900 unit<br>8330 unit<br>7221 unit<br>4752 unit<br>4730 unit<br>5868 unit<br>500 unit<br>16 unit<br>17 unit<br>10 unit<br>15 unit<br>7 unit<br>8 unit<br>15 unit<br>7 unit<br>11 unit<br>7 unit<br>5 unit<br>23 unit<br>24 unit | 138.460.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 184.226.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0045 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | | | | 2 Paket | 114.260.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Payung, Payung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 157.606.000,00 | SMKN 1 PAYUNG |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0071 | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | | | | 2 Satuan Pendidikan | 24.200.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Payung, Payung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 26.620.000,00 | SMKN 1 PAYUNG |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | X | | | | | NON URUSAN | | | | | | 9.570.000,00 | | | | | | | 10.527.000,00 | |
| | X | XX | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX | | | | | | 9.570.000,00 | | | | | | | 10.527.000,00 | |
| 155 | X | XX | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 9.570.000,00 | | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 10.527.000,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 9.570.000,00 | | | - | - | - | - | 10.527.000,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 2 Paket | 9.570.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Payung, Payung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 10.527.000,00 | SMKN 1 PAYUNG |
| | | | | | | SMKN 1 TUKAK SADAI | | | | | | 916.030.000,00 | | | | | | | 982.030.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 916.030.000,00 | | | | | | | 982.030.000,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 916.030.000,00 | | | | | | | 982.030.000,00 | |
| 156 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 118.800.000,00 | | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 138.600.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 70.273.000,00 | | | - | - | - | - | 77.600.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 0.84 Paket | 4.395.930,00 | Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Tukak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 5.000.000,00 | SMKN 1 TUKAK SADAI |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 0.84 Paket | 6.237.070,00 | Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Tukak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 6.500.000,00 | SMKN 1 TUKAK SADAI |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 0.84 Paket | 2.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Tukak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 2.500.000,00 | SMKN 1 TUKAK SADAI |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 0.84 Paket | 12.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Tukak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 13.000.000,00 | SMKN 1 TUKAK SADAI |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 0.84 Dokumen | 2.640.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Tukak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 3.600.000,00 | SMKN 1 TUKAK SADAI |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 0.84 Paket | 35.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Tukak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 38.000.000,00 | SMKN 1 TUKAK SADAI |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 0.84 Laporan | 8.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Tukak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 9.000.000,00 | SMKN 1 TUKAK SADAI |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 27.500.000,00 | | | - | - | - | - | 32.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 0.84 Laporan | 3.500.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Tukak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 4.000.000,00 | SMKN 1 TUKAK SADAI |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 0.84 Laporan | 24.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Tukak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 28.000.000,00 | SMKN 1 TUKAK SADAI |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 21.027.000,00 | | | - | - | - | - | 29.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | | | | 0.84 Unit | 5.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Tukak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 5.000.000,00 | SMKN 1 TUKAK SADAI |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 0.84 Unit | 16.027.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Tukak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 24.000.000,00 | SMKN 1 TUKAK SADAI |
| 157 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 797.230.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 843.430.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | - | - | | | - | 797.230.000,00 | | | - | - | - | - | 843.430.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0041 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 0.84 Peserta Didik | 117.200.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Tukak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 148.400.000,00 | SMKN 1 TUKAK SADAI |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0046 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS | | | | 0.84 Satuan Pendidikan | 520.030.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Tukak | DAK NON FISIK-BOS REGULER | - | - | - | | 520.030.000,00 | SMKN 1 TUKAK SADAI |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0072 | Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | | | | 0.84 Satuan Pendidikan | 160.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Tukak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 175.000.000,00 | SMKN 1 TUKAK SADAI |
| | | | | | | SMKN 1 AIRGEGAS | | | | | | 1.142.470.000,00 | | | | | | | 1.070.470.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 1.142.470.000,00 | | | | | | | 1.070.470.000,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 1.142.470.000,00 | | | | | | | 1.070.470.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 158 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 267.200.000,00 | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 267.200.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 24.750.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 24.750.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 24.750.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Air Gegas, Ranggas | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 24.750.000,00 | SMKN 1 AIRGEGAS |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 166.450.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 166.450.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 12.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 12.000.000,00 | SMKN 1 AIRGEGAS |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 10.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Air Gegas, Ranggas | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 10.000.000,00 | SMKN 1 AIRGEGAS |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 7.050.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Air Gegas, Ranggas | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 7.050.000,00 | SMKN 1 AIRGEGAS |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 25.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 25.000.000,00 | SMKN 1 AIRGEGAS |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 2.400.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Air Gegas, Ranggas | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 2.400.000,00 | SMKN 1 AIRGEGAS |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 1 Paket | 60.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Air Gegas, Ranggas | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 60.000.000,00 | SMKN 1 AIRGEGAS |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 50.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Air Gegas, Ranggas | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 50.000.000,00 | SMKN 1 AIRGEGAS |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 76.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 76.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 4.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Air Gegas, Ranggas | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 4.000.000,00 | SMKN 1 AIRGEGAS |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 72.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Air Gegas, Ranggas | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 72.000.000,00 | SMKN 1 AIRGEGAS |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 159 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 875.270.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 803.270.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | - | - | | | - | 70.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 70.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0078 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | | | | 1 Satuan Pendidikan | 70.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Air Gegas, Ranggas | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 70.000.000,00 | SMKN 1 AIRGEGAS |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | - | - | | | - | 655.270.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 655.270.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0046 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS | | | | 1 Satuan Pendidikan | 655.270.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Air Gegas, Ranggas | DAK NON FISIK-BOS REGULER | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 655.270.000,00 | SMKN 1 AIRGEGAS |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | - | - | | | - | 150.000.000,00 | | | - | - | - | - | 78.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0045 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | | | | 1 Paket | 80.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 8.000.000,00 | SMKN 1 AIRGEGAS |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0048 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 406 Peserta Didik | 70.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Air Gegas, Ranggas | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 70.000.000,00 | SMKN 1 AIRGEGAS |
| | | | | | | SMK NEGERI 1 PULAU BESAR | | | | | | 293.870.000,00 | | | | | | | 328.997.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 293.870.000,00 | | | | | | | 328.997.000,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 293.870.000,00 | | | | | | | 328.997.000,00 | |
| 160 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 41.100.000,00 | | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 52.200.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 21.100.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 24.200.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 3.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 4.000.000,00 | SMK NEGERI 1 PULAU BESAR |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 2.383.990,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 3.000.000,00 | SMK NEGERI 1 PULAU BESAR |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 1 Paket | 5.716.010,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 5.200.000,00 | SMK NEGERI 1 PULAU BESAR |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 10.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 12.000.000,00 | SMK NEGERI 1 PULAU BESAR |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 10.000.000,00 | | | - | - | - | - | 13.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 10.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 13.000.000,00 | SMK NEGERI 1 PULAU BESAR |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 10.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 15.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 4 Unit | 10.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 15.000.000,00 | SMK NEGERI 1 PULAU BESAR |
| 161 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 252.770.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 276.797.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | - | - | | | - | 252.770.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 276.797.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0030 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia | | | | 1 Paket | 2.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 2.500.000,00 | SMK NEGERI 1 PULAU BESAR |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0035 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | | | | 4 Unit | 5.500.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 7.000.000,00 | SMK NEGERI 1 PULAU BESAR |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0041 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 30 Peserta Didik | 20.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 24.000.000,00 | SMK NEGERI 1 PULAU BESAR |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0043 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | | | | 14 Orang | 7.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 8.000.000,00 | SMK NEGERI 1 PULAU BESAR |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0046 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS | | | | 1 Satuan Pendidikan | 170.270.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOS REGULER | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 187.297.000,00 | SMK NEGERI 1 PULAU BESAR |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0072 | Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | | | | 1 Satuan Pendidikan | 48.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 48.000.000,00 | SMK NEGERI 1 PULAU BESAR |
| | | | | | | SMK NEGERI 1 SIMPANG RIMBA | | | | | | 640.390.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 640.390.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 640.390.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| 162 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 76.680.000,00 | | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 36.680.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 0 Paket | 10.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Simpang Rimba, Permis | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | SMK NEGERI 1 SIMPANG RIMBA |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 6.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Simpang Rimba, Permis | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | SMK NEGERI 1 SIMPANG RIMBA |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 12.230.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Simpang Rimba, Permis | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | SMK NEGERI 1 SIMPANG RIMBA |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 2 Laporan | 8.450.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Simpang Rimba, Permis | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | SMK NEGERI 1 SIMPANG RIMBA |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 40.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 4.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Simpang Rimba, Permis | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | SMK NEGERI 1 SIMPANG RIMBA |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 36.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Simpang Rimba, Permis | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | SMK NEGERI 1 SIMPANG RIMBA |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 163 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 563.710.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | - | - | | | - | 563.710.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0033 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | | | | 1 Paket | 72.680.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Simpang Rimba, Permis | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | SMK NEGERI 1 SIMPANG RIMBA |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0038 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | | | | 1 Paket | 90.360.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Simpang Rimba, Simpang Rimba | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | SMK NEGERI 1 SIMPANG RIMBA |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0041 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 229 Peserta Didik | 15.880.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Simpang Rimba, Permis | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | SMK NEGERI 1 SIMPANG RIMBA |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0046 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS | | | | 0 Satuan Pendidikan | 384.790.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Simpang Rimba, Permis | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | SMK NEGERI 1 SIMPANG RIMBA |
| | | | | | | SMKN 1 TANJUNGPANDAN | | | | | | 2.700.940.000,00 | | | | | | | 2.906.800.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 2.700.940.000,00 | | | | | | | 2.906.800.000,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 2.700.940.000,00 | | | | | | | 2.906.800.000,00 | |
| 164 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 482.680.000,00 | | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 578.960.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 162.380.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 213.260.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 12 Paket | 10.000.000,00 | Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 10.000.000,00 | SMKN 1 TANJUNGPANDAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 12 Paket | 10.000.000,00 | Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 10.000.000,00 | SMKN 1 TANJUNGPANDAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 3.000.000,00 | Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 3.000.000,00 | SMKN 1 TANJUNGPANDAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 Paket | 32.600.000,00 | Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 53.260.000,00 | SMKN 1 TANJUNGPANDAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 4 Dokumen | 4.000.000,00 | Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 4.000.000,00 | SMKN 1 TANJUNGPANDAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 12 Paket | 35.000.000,00 | Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 58.000.000,00 | SMKN 1 TANJUNGPANDAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 67.780.000,00 | Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 75.000.000,00 | SMKN 1 TANJUNGPANDAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 172.800.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 178.200.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 3 Laporan | 2.400.000,00 | Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 2.400.000,00 | SMKN 1 TANJUNGPANDAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 0 Laporan | 170.400.000,00 | Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 175.800.000,00 | SMKN 1 TANJUNGPANDAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 147.500.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 187.500.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 2.500.000,00 | Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 2.500.000,00 | SMKN 1 TANJUNGPANDAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 21 Unit | 145.000.000,00 | Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 185.000.000,00 | SMKN 1 TANJUNGPANDAN |
| 165 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 2.218.260.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 2.327.840.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | - | - | | | - | 2.218.260.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 2.327.840.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0031 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | | | | 5 Paket | 95.000.000,00 | Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 115.000.000,00 | SMKN 1 TANJUNGPANDAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0033 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | | | | 10 Paket | 275.000.000,00 | Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 285.000.000,00 | SMKN 1 TANJUNGPANDAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0035 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | | | | 100 Unit | 162.920.000,00 | Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 224.240.000,00 | SMKN 1 TANJUNGPANDAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0041 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 100 Peserta Didik | 110.000.000,00 | Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 110.000.000,00 | SMKN 1 TANJUNGPANDAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0046 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS | | | | 0 Satuan Pendidikan | 1.575.340.000,00 | Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOS REGULER | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 1.593.600.000,00 | SMKN 1 TANJUNGPANDAN |
| | | | | | | SMKN 2 TANJUNGPANDAN | | | | | | 2.359.500.000,00 | | | | | | | 2.341.900.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 2.276.782.420,00 | | | | | | | 2.255.320.000,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 2.276.782.420,00 | | | | | | | 2.255.320.000,00 | |
| 166 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 214.282.420,00 | | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 192.820.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 87.482.420,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 66.020.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 7.400.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Aik Ketekok | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 7.400.000,00 | SMKN 2 TANJUNGPANDAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 7.500.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Aik Ketekok | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 7.500.000,00 | SMKN 2 TANJUNGPANDAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 15.862.420,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Aik Ketekok | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 16.000.000,00 | SMKN 2 TANJUNGPANDAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 2 Paket | 24.000.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Aik Ketekok | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 2.400.000,00 | SMKN 2 TANJUNGPANDAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 3 Laporan | 32.720.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Aik Ketekok | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 32.720.000,00 | SMKN 2 TANJUNGPANDAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 73.300.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 73.300.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1.300.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Aik Ketekok | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 1.300.000,00 | SMKN 2 TANJUNGPANDAN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 2 Laporan | 72.000.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Aik Ketekok | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 72.000.000,00 | SMKN 2 TANJUNGPANDAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 53.500.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 53.500.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 1.500.000,00 | Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 1.500.000,00 | SMKN 2 TANJUNGPANDAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 1 Unit | 10.000.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Aik Ketekok | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 10.000.000,00 | SMKN 2 TANJUNGPANDAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 5 Unit | 42.000.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Aik Ketekok | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 42.000.000,00 | SMKN 2 TANJUNGPANDAN |
| 167 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 2.062.500.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 2.062.500.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | - | - | | | - | 2.062.500.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 2.062.500.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0038 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | | | | 7 Paket | 229.900.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Aik Ketekok | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 229.900.000,00 | SMKN 2 TANJUNGPANDAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0041 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 700 Peserta Didik | 188.500.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Aik Ketekok | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 188.500.000,00 | SMKN 2 TANJUNGPANDAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0043 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | | | | 74 Orang | 34.600.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Aik Ketekok | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 34.600.000,00 | SMKN 2 TANJUNGPANDAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0046 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS | | | | 1 Satuan Pendidikan | 1.369.500.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Aik Ketekok | DAK NON FISIK-BOS REGULER | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 1.369.500.000,00 | SMKN 2 TANJUNGPANDAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0072 | Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | | | | 1 Satuan Pendidikan | 240.000.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Aik Ketekok | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 240.000.000,00 | SMKN 2 TANJUNGPANDAN |
| | X | | | | | NON URUSAN | | | | | | 82.717.580,00 | | | | | | | 86.580.000,00 | |
| | X | XX | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX | | | | | | 82.717.580,00 | | | | | | | 86.580.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 168 | X | XX | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 82.717.580,00 | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 86.580.000,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 68.117.580,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 68.117.500,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | | | | 2 Paket | 68.117.580,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Aik Ketekok | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 68.117.500,00 | SMKN 2 TANJUNGPANDAN |
| | X | XX | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 14.600.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 18.462.500,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 8.000.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Aik Ketekok | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 8.262.500,00 | SMKN 2 TANJUNGPANDAN |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 5 Dokumen | 6.600.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Aik Ketekok | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 10.200.000,00 | SMKN 2 TANJUNGPANDAN |
| | | | | | | SMKN 3 TANJUNGPANDAN | | | | | | 1.845.300.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 1.845.300.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 1.845.300.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| 169 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 553.590.000,00 | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 363.990.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 0 Paket | 12.000.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMKN 3 TANJUNGPANDAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 6 Paket | 40.000.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMKN 3 TANJUNGPANDAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 37.500.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMKN 3 TANJUNGPANDAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 5 Paket | 105.000.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMKN 3 TANJUNGPANDAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 72 Dokumen | 4.800.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMKN 3 TANJUNGPANDAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 9 Paket | 68.690.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMKN 3 TANJUNGPANDAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 96.000.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMKN 3 TANJUNGPANDAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 156.500.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 10 Laporan | 6.500.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMKN 3 TANJUNGPANDAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 150.000.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMKN 3 TANJUNGPANDAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 33.100.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 5.600.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMKN 3 TANJUNGPANDAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 14 Unit | 27.500.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMKN 3 TANJUNGPANDAN |
| 170 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 1.291.710.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | - | - | | | - | 1.291.710.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 0,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0016 | Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi | | | | 1 Ruang | 15.000.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMKN 3 TANJUNGPANDAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0029 | Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia | | | | 2 Paket | 12.500.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMKN 3 TANJUNGPANDAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0031 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | | | | 2 Paket | 16.210.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMKN 3 TANJUNGPANDAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0033 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | | | | 2 Paket | 15.000.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMKN 3 TANJUNGPANDAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0037 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | | | | 700 Peserta didik | 30.000.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMKN 3 TANJUNGPANDAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0041 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 700 Peserta Didik | 40.500.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMKN 3 TANJUNGPANDAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0046 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS | | | | 1 Satuan Pendidikan | 1.120.500.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit | DAK NON FISIK-BOS REGULER | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMKN 3 TANJUNGPANDAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0062 | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat | | | | 6 Unit | 15.000.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMKN 3 TANJUNGPANDAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0072 | Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | | | | 1 Satuan Pendidikan | 12.000.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMKN 3 TANJUNGPANDAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0073 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | | | | 10 Orang | 15.000.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMKN 3 TANJUNGPANDAN |
| | | | | | | SMKN 1 BADAU | | | | | | 1.156.060.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 1.156.060.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 1.156.060.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| 171 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 232.993.400,00 | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 37.673.400,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | | | | 60 Paket | 37.673.400,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMKN 1 BADAU |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 91.320.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 10.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMKN 1 BADAU |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 10.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMKN 1 BADAU |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 12.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMKN 1 BADAU |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 10.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMKN 1 BADAU |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 3 Dokumen | 5.400.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMKN 1 BADAU |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 3 Paket | 30.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMKN 1 BADAU |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 4 Laporan | 13.920.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMKN 1 BADAU |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 37.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 2.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMKN 1 BADAU |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 4 Laporan | 35.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMKN 1 BADAU |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 67.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 2.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMKN 1 BADAU |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 16 Unit | 65.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMKN 1 BADAU |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 172 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 923.066.600,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | - | - | | | - | 923.066.600,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0029 | Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia | | | | 1 Paket | 25.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMKN 1 BADAU |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0031 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | | | | 1 Paket | 25.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMKN 1 BADAU |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0035 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | | | | 30 Unit | 40.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMKN 1 BADAU |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0038 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | | | | 1 Paket | 73.600.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMKN 1 BADAU |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0041 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 340 Peserta Didik | 47.326.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMKN 1 BADAU |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0046 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS | | | | 1 Satuan Pendidikan | 712.140.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOS REGULER | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMKN 1 BADAU |
| | | | | | | SMKN 1 SELAT NASIK | | | | | | 484.440.000,00 | | | | | | | 541.900.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 484.440.000,00 | | | | | | | 541.900.000,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 484.440.000,00 | | | | | | | 541.900.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 173 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 169.332.000,00 | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 182.900.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 16.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 15.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | | | | 24 Paket | 16.000.000,00 | Kab. Belitung, Selat Nasik, Selat Nasik | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 15.000.000,00 | SMKN 1 SELAT NASIK |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 79.932.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 85.900.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 5.000.000,00 | Kab. Belitung, Selat Nasik, Selat Nasik | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 6.000.000,00 | SMKN 1 SELAT NASIK |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 3 Paket | 13.400.000,00 | Kab. Belitung, Selat Nasik, Selat Nasik | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 15.000.000,00 | SMKN 1 SELAT NASIK |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 2 Paket | 3.500.000,00 | Kab. Belitung, Selat Nasik, Selat Nasik | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 4.000.000,00 | SMKN 1 SELAT NASIK |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 2 Paket | 5.000.000,00 | Kab. Belitung, Selat Nasik, Selat Nasik | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 5.000.000,00 | SMKN 1 SELAT NASIK |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 24 Dokumen | 2.400.000,00 | Kab. Belitung, Selat Nasik, Selat Nasik | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 2.400.000,00 | SMKN 1 SELAT NASIK |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 3 Paket | 11.500.000,00 | Kab. Belitung, Selat Nasik, Selat Nasik | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 11.500.000,00 | SMKN 1 SELAT NASIK |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 8 Laporan | 6.632.000,00 | Kab. Belitung, Selat Nasik, Selat Nasik | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 7.000.000,00 | SMKN 1 SELAT NASIK |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 10 Laporan | 32.500.000,00 | Kab. Belitung, Selat Nasik, Selat Nasik | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 35.000.000,00 | SMKN 1 SELAT NASIK |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 47.400.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 49.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 50 Laporan | 1.500.000,00 | Kab. Belitung, Selat Nasik, Selat Nasik | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 2.000.000,00 | SMKN 1 SELAT NASIK |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 55 Laporan | 45.900.000,00 | Kab. Belitung, Selat Nasik, Selat Nasik | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 47.000.000,00 | SMKN 1 SELAT NASIK |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 26.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 33.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 2.000.000,00 | Kab. Belitung, Selat Nasik, Selat Nasik | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 3.000.000,00 | SMKN 1 SELAT NASIK |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 2 Unit | 24.000.000,00 | Kab. Belitung, Selat Nasik, Selat Nasik | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 30.000.000,00 | SMKN 1 SELAT NASIK |
| 174 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 315.108.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 359.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | - | - | | | - | 315.108.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 359.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0033 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | | | | 2 Paket | 18.268.000,00 | Kab. Belitung, Selat Nasik, Selat Nasik | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 50.000.000,00 | SMKN 1 SELAT NASIK |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0035 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | | | | 3 Unit | 8.000.000,00 | Kab. Belitung, Selat Nasik, Selat Nasik | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 9.000.000,00 | SMKN 1 SELAT NASIK |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0046 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS | | | | 1 Satuan Pendidikan | 288.840.000,00 | Kab. Belitung, Selat Nasik, Selat Nasik | DAK NON FISIK-BOS REGULER | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 300.000.000,00 | SMKN 1 SELAT NASIK |
| | | | | | | SMKN 1 MANGGAR | | | | | | 2.143.110.000,00 | | | | | | | 255.460.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 2.137.110.000,00 | | | | | | | 245.460.000,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 2.137.110.000,00 | | | | | | | 245.460.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 175 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 259.680.000,00 | | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 245.460.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 204.680.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 185.460.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 20.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 25.000.000,00 | SMKN 1 MANGGAR |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 0 Paket | 50.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMKN 1 MANGGAR |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 10.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 14.000.000,00 | SMKN 1 MANGGAR |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 3 Paket | 25.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 30.000.000,00 | SMKN 1 MANGGAR |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 1 Paket | 30.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 36.460.000,00 | SMKN 1 MANGGAR |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 69.680.000,00 | Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 80.000.000,00 | SMKN 1 MANGGAR |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 50.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 60.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 50.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 60.000.000,00 | SMKN 1 MANGGAR |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 5.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 5.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | SMKN 1 MANGGAR |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 176 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 1.877.430.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | - | - | | | - | 1.877.430.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0031 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | | | | 0 Paket | 100.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | SMKN 1 MANGGAR |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0033 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | | | | 0 Paket | 119.240.000,00 | Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | SMKN 1 MANGGAR |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0035 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | | | | 0 Unit | 65.680.000,00 | Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | SMKN 1 MANGGAR |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0041 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 0 Peserta Didik | 100.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | SMKN 1 MANGGAR |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0043 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | | | | 0 Orang | 75.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | SMKN 1 MANGGAR |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0046 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS | | | | 0 Satuan Pendidikan | 1.257.510.000,00 | Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | SMKN 1 MANGGAR |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0072 | Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | | | | 1 Satuan Pendidikan | 160.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | SMKN 1 MANGGAR |
| | X | | | | | NON URUSAN | | | | | | 6.000.000,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |
| | X | XX | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX | | | | | | 6.000.000,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 177 | X | XX | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 6.000.000,00 | | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 10.000.000,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 6.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 10.000.000,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 6.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 10.000.000,00 | SMKN 1 MANGGAR |
| | | | | | | SMKN 1 KELAPA KAMPIT | | | | | | 801.620.000,00 | | | | | | | 801.620.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 752.240.000,00 | | | | | | | 752.240.000,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 752.240.000,00 | | | | | | | 752.240.000,00 | |
| 178 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 81.600.000,00 | | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 81.600.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 81.600.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 81.600.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | 3 0 | 11.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Mentawak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 11.000.000,00 | SMKN 1 KELAPA KAMPIT |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 3 Paket | 15.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 15.000.000,00 | SMKN 1 KELAPA KAMPIT |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 3 Paket | 20.600.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 20.600.000,00 | SMKN 1 KELAPA KAMPIT |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 3 Paket | 15.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 15.000.000,00 | SMKN 1 KELAPA KAMPIT |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 3 Paket | 20.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 20.000.000,00 | SMKN 1 KELAPA KAMPIT |
| 179 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 670.640.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 670.640.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | - | - | | | - | 670.640.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 670.640.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0033 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | | | | 3 Paket | 75.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 75.000.000,00 | SMKN 1 KELAPA KAMPIT |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0035 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | | | | 1 Unit | 40.800.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 40.800.000,00 | SMKN 1 KELAPA KAMPIT |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0037 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | | | | 80 Peserta didik | 40.600.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 40.600.000,00 | SMKN 1 KELAPA KAMPIT |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0041 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 130 Peserta Didik | 60.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 60.000.000,00 | SMKN 1 KELAPA KAMPIT |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0046 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS | | | | 1 Satuan Pendidikan | 454.240.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOS REGULER | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 454.240.000,00 | SMKN 1 KELAPA KAMPIT |
| | X | | | | | NON URUSAN | | | | | | 49.380.000,00 | | | | | | | 49.380.000,00 | |
| | X | XX | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX | | | | | | 49.380.000,00 | | | | | | | 49.380.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 180 | X | XX | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 49.380.000,00 | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 49.380.000,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 49.380.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 49.380.000,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 4.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 4.000.000,00 | SMKN 1 KELAPA KAMPIT |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 4 Laporan | 45.380.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 45.380.000,00 | SMKN 1 KELAPA KAMPIT |
| | | | | | | SMK NEGERI 1 DENDANG | | | | | | 692.570.000,00 | | | | | | | 726.970.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 692.570.000,00 | | | | | | | 726.970.000,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 692.570.000,00 | | | | | | | 726.970.000,00 | |
| 181 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 101.340.000,00 | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 121.980.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 73.080.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 93.720.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 5 Paket | 10.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Dendang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 14.000.000,00 | SMK NEGERI 1 DENDANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 3.600.000,00 | Kab. Belitung Timur, Dendang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 3.600.000,00 | SMK NEGERI 1 DENDANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 4 Laporan | 59.480.000,00 | Kab. Belitung Timur, Dendang, Dendang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 76.120.000,00 | SMK NEGERI 1 DENDANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 25.260.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 25.260.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 25.260.000,00 | Kab. Belitung Timur, Dendang, Dendang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 25.260.000,00 | SMK NEGERI 1 DENDANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 3.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 3.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 3 Unit | 3.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Dendang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 3.000.000,00 | SMK NEGERI 1 DENDANG |
| 182 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 591.230.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 604.990.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | - | - | | | - | 591.230.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 604.990.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0033 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | | | | 3 Paket | 25.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Dendang, Dendang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 30.000.000,00 | SMK NEGERI 1 DENDANG |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0037 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | | | | 200 Peserta didik | 184.710.000,00 | Kab. Belitung Timur, Dendang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 184.710.000,00 | SMK NEGERI 1 DENDANG |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0041 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 200 Peserta Didik | 10.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Dendang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 10.000.000,00 | SMK NEGERI 1 DENDANG |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0043 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | | | | 30 Orang | 7.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Dendang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 10.000.000,00 | SMK NEGERI 1 DENDANG |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0046 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS | | | | 1 Satuan Pendidikan | 313.960.000,00 | Kab. Belitung Timur, Dendang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOS REGULER | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 313.960.000,00 | SMK NEGERI 1 DENDANG |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0072 | Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | | | | 200 Satuan Pendidikan | 50.560.000,00 | Kab. Belitung Timur, Dendang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 56.320.000,00 | SMK NEGERI 1 DENDANG |
| | | | | | | SMKN 1 SIMPANG RENGGIANG | | | | | | 409.000.000,00 | | | | | | | 446.550.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 409.000.000,00 | | | | | | | 446.550.000,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 409.000.000,00 | | | | | | | 446.550.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 183 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 72.560.000,00 | | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 84.320.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 7.560.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 8.320.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 12 Laporan | 7.560.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 8.320.000,00 | SMKN 1 SIMPANG RENGGIANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 22.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 25.500.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 5 Laporan | 2.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 2.500.000,00 | SMKN 1 SIMPANG RENGGIANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 10 Laporan | 20.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 23.000.000,00 | SMKN 1 SIMPANG RENGGIANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 20.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 23.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 3 Unit | 20.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 23.000.000,00 | SMKN 1 SIMPANG RENGGIANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.16 | | Layanan Administrasi DPRD | - | - | | | - | 23.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 27.500.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.16 | 0003 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | | | | 10 Laporan | 23.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Renggiang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 27.500.000,00 | SMKN 1 SIMPANG RENGGIANG |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 184 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 336.440.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 362.230.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | - | - | | | - | 336.440.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 362.230.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0029 | Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia | | | | 4 Paket | 10.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 11.000.000,00 | SMKN 1 SIMPANG RENGGIANG |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0033 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | | | | 10 Paket | 35.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 40.000.000,00 | SMKN 1 SIMPANG RENGGIANG |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0037 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | | | | 100 Peserta didik | 22.560.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 25.000.000,00 | SMKN 1 SIMPANG RENGGIANG |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0041 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 160 Peserta Didik | 30.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 36.320.000,00 | SMKN 1 SIMPANG RENGGIANG |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0046 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS | | | | 1 Satuan Pendidikan | 233.800.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOS REGULER | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 242.150.000,00 | SMKN 1 SIMPANG RENGGIANG |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0072 | Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | | | | 1 Satuan Pendidikan | 5.080.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 7.760.000,00 | SMKN 1 SIMPANG RENGGIANG |
| | | | | | | SMK NEGERI 1 SIMPANG TERITIP | | | | | | 500.400.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 500.400.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 500.400.000,00 | | | | | | | 0,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 185 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 63.000.000,00 | | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 13.600.000,00 | | | - | - | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1.350.000,00 | Kab. Bangka Barat, Simpang Teritip, Berang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | SMK NEGERI 1 SIMPANG TERITIP |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 5.095.000,00 | Kab. Bangka Barat, Simpang Teritip, Berang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | SMK NEGERI 1 SIMPANG TERITIP |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1.500.000,00 | Kab. Bangka Barat, Simpang Teritip, Berang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | SMK NEGERI 1 SIMPANG TERITIP |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1.675.000,00 | Kab. Bangka Barat, Simpang Teritip, Berang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | SMK NEGERI 1 SIMPANG TERITIP |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 1.500.000,00 | Kab. Bangka Barat, Simpang Teritip, Berang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | SMK NEGERI 1 SIMPANG TERITIP |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 2.480.000,00 | Kab. Bangka Barat, Simpang Teritip, Berang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | SMK NEGERI 1 SIMPANG TERITIP |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 47.500.000,00 | | | - | - | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1.500.000,00 | Kab. Bangka Barat, Simpang Teritip, Berang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | SMK NEGERI 1 SIMPANG TERITIP |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 46.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Simpang Teritip, Berang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | SMK NEGERI 1 SIMPANG TERITIP |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 1.900.000,00 | | | - | - | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 1.900.000,00 | Kab. Bangka Barat, Simpang Teritip, Berang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | SMK NEGERI 1 SIMPANG TERITIP |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 186 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 437.400.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | - | - | | | - | 353.400.000,00 | | | - | - | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0041 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 286 Peserta Didik | 37.405.000,00 | Kab. Bangka Barat, Simpang Teritip, Berang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | SMK NEGERI 1 SIMPANG TERITIP |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0046 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS | | | | 1 Satuan Pendidikan | 290.400.000,00 | Kab. Bangka Barat, Simpang Teritip, Berang | DAK NON FISIK-BOS REGULER | - | - | - | | 0,00 | SMK NEGERI 1 SIMPANG TERITIP |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0072 | Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | | | | 1 Satuan Pendidikan | 25.595.000,00 | Kab. Bangka Barat, Simpang Teritip, Berang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | SMK NEGERI 1 SIMPANG TERITIP |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | - | - | | | - | 84.000.000,00 | | | - | - | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0045 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | | | | 2 Paket | 84.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Simpang Teritip, Berang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | SMK NEGERI 1 SIMPANG TERITIP |
| | | | | | | SMK NEGERI 1 SIJUK | | | | | | 932.120.000,00 | | | | | | | 1.003.920.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 932.120.000,00 | | | | | | | 1.003.920.000,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 932.120.000,00 | | | | | | | 1.003.920.000,00 | |
| 187 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 129.240.000,00 | | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 150.780.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 81.240.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 92.780.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 8.000.000,00 | Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 8.000.000,00 | SMK NEGERI 1 SIJUK |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 8.000.000,00 | Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 10.000.000,00 | SMK NEGERI 1 SIJUK |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 8.000.000,00 | Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 10.000.000,00 | SMK NEGERI 1 SIJUK |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 3.000.000,00 | Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 4.000.000,00 | SMK NEGERI 1 SIJUK |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 5.000.000,00 | Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 8.000.000,00 | SMK NEGERI 1 SIJUK |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 2 Dokumen | 2.000.000,00 | Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 2.000.000,00 | SMK NEGERI 1 SIJUK |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 1 Paket | 10.000.000,00 | Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 10.000.000,00 | SMK NEGERI 1 SIJUK |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 4 Laporan | 10.000.000,00 | Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 10.000.000,00 | SMK NEGERI 1 SIJUK |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 4 Laporan | 27.240.000,00 | Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 30.780.000,00 | SMK NEGERI 1 SIJUK |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 33.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 38.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 3.000.000,00 | Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 3.000.000,00 | SMK NEGERI 1 SIJUK |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 2 Laporan | 30.000.000,00 | Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 35.000.000,00 | SMK NEGERI 1 SIJUK |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 15.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 20.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | | | | 1 Unit | 15.000.000,00 | Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 20.000.000,00 | SMK NEGERI 1 SIJUK |
| 188 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 802.880.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 853.140.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | - | - | | | - | 802.880.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 853.140.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0033 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | | | | 1 Paket | 61.560.000,00 | Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 81.820.000,00 | SMK NEGERI 1 SIJUK |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0035 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | | | | 1 Unit | 80.000.000,00 | Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 80.000.000,00 | SMK NEGERI 1 SIJUK |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0037 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | | | | 120 Peserta didik | 60.000.000,00 | Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 70.000.000,00 | SMK NEGERI 1 SIJUK |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0041 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 120 Peserta Didik | 75.000.000,00 | Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 85.000.000,00 | SMK NEGERI 1 SIJUK |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0043 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | | | | 5 Orang | 25.000.000,00 | Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 35.000.000,00 | SMK NEGERI 1 SIJUK |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0046 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS | | | | 1 Satuan Pendidikan | 501.320.000,00 | Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga | DAK NON FISIK-BOS REGULER | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 501.320.000,00 | SMK NEGERI 1 SIJUK |
| | | | | | | SLB N 31 PKLK NEGERI PANGKALPINANG | | | | | | 2.479.000.000,00 | | | | | | | 2.479.000.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 2.479.000.000,00 | | | | | | | 2.479.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 2.479.000.000,00 | | | | | | | 2.479.000.000,00 | |
| 189 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 470.500.000,00 | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 470.500.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 55.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 55.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 55.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 55.000.000,00 | SLB N 31 PKLK NEGERI PANGKALPINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 273.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 273.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 35.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 35.000.000,00 | SLB N 31 PKLK NEGERI PANGKALPINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 70.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 70.000.000,00 | SLB N 31 PKLK NEGERI PANGKALPINANG |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 23.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 23.000.000,00 | SLB N 31 PKLK NEGERI PANGKALPINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 35.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 35.000.000,00 | SLB N 31 PKLK NEGERI PANGKALPINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 3.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 3.000.000,00 | SLB N 31 PKLK NEGERI PANGKALPINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 3 Paket | 95.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 95.000.000,00 | SLB N 31 PKLK NEGERI PANGKALPINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 200 Laporan | 12.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 12.000.000,00 | SLB N 31 PKLK NEGERI PANGKALPINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 54.500.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 54.500.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 350 Laporan | 4.500.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 4.500.000,00 | SLB N 31 PKLK NEGERI PANGKALPINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 50.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 50.000.000,00 | SLB N 31 PKLK NEGERI PANGKALPINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 88.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 88.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | | | | 2 Unit | 63.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 63.000.000,00 | SLB N 31 PKLK NEGERI PANGKALPINANG |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 25 Unit | 25.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 25.000.000,00 | SLB N 31 PKLK NEGERI PANGKALPINANG |
| 190 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 2.008.500.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 2.008.500.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | - | - | | | - | 2.008.500.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 2.008.500.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0048 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 300 Peserta Didik | 355.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 355.000.000,00 | SLB N 31 PKLK NEGERI PANGKALPINANG |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0052 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS | | | | 1 Satuan Pendidikan | 1.032.500.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 1.032.500.000,00 | SLB N 31 PKLK NEGERI PANGKALPINANG |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0071 | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | | | | 1 Satuan Pendidikan | 621.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 621.000.000,00 | SLB N 31 PKLK NEGERI PANGKALPINANG |
| | | | | | | SLB N SUNGAILIAT | | | | | | 1.542.000.000,00 | | | | | | | 1.547.008.300,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 1.542.000.000,00 | | | | | | | 1.547.008.300,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 1.542.000.000,00 | | | | | | | 1.547.008.300,00 | |
| 191 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 312.300.000,00 | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 317.308.300,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 143.414.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 148.422.300,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 44.991.700,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 50.000.000,00 | SLB N SUNGAILIAT |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 2.200.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 2.200.000,00 | SLB N SUNGAILIAT |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 960.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 960.000,00 | SLB N SUNGAILIAT |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 1 Paket | 84.762.300,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 84.762.300,00 | SLB N SUNGAILIAT |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 10.500.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 10.500.000,00 | SLB N SUNGAILIAT |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 65.480.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 65.480.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 3.500.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 3.500.000,00 | SLB N SUNGAILIAT |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 61.980.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 61.980.000,00 | SLB N SUNGAILIAT |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 103.406.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 103.406.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 58.406.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 58.406.000,00 | SLB N SUNGAILIAT |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 45.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 45.000.000,00 | SLB N SUNGAILIAT |
| 192 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 1.229.700.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 1.229.700.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | - | - | | | - | 1.229.700.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 1.229.700.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0045 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | | | | 1 Paket | 61.489.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 61.489.000,00 | SLB N SUNGAILIAT |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0048 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 191 Peserta Didik | 103.211.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 103.211.000,00 | SLB N SUNGAILIAT |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0052 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS | | | | 1 Satuan Pendidikan | 651.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung | DAK NON FISIK-BOS REGULER | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 651.000.000,00 | SLB N SUNGAILIAT |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0071 | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | | | | 1 Satuan Pendidikan | 414.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 414.000.000,00 | SLB N SUNGAILIAT |
| | | | | | | SLB N KOBA | | | | | | 976.700.000,00 | | | | | | | 1.062.900.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 976.700.000,00 | | | | | | | 1.062.900.000,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 976.700.000,00 | | | | | | | 1.062.900.000,00 | |
| 193 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 166.650.000,00 | | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 217.500.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 85.250.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 120.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 25.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 30.000.000,00 | SLB N KOBA |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 9.984.100,00 | Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 15.000.000,00 | SLB N KOBA |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 15.276.100,00 | Kab. Bangka Tengah, Koba, Nibung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 25.000.000,00 | SLB N KOBA |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 9.999.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Koba, Nibung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 15.000.000,00 | SLB N KOBA |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 1 Paket | 14.990.800,00 | Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 20.000.000,00 | SLB N KOBA |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 20 Laporan | 10.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 15.000.000,00 | SLB N KOBA |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 42.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 47.500.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 25 Laporan | 2.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 2.500.000,00 | SLB N KOBA |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 4 Laporan | 40.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 45.000.000,00 | SLB N KOBA |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 39.400.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 50.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | | | | 2 Unit | 39.400.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 50.000.000,00 | SLB N KOBA |
| 194 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 810.050.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 845.400.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | - | - | | | - | 338.850.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 374.200.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0078 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | | | | 1 Satuan Pendidikan | 338.850.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 374.200.000,00 | SLB N KOBA |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | - | - | | | - | 471.200.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 471.200.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0048 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 100 Peserta Didik | 50.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 50.000.000,00 | SLB N KOBA |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0052 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS | | | | 1 Satuan Pendidikan | 421.200.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 421.200.000,00 | SLB N KOBA |
| | | | | | | SLBN MUNTOK | | | | | | 801.680.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 801.680.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 801.680.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| 195 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 145.200.000,00 | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 26.150.000,00 | | | - | - | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 5 Paket | 8.450.000,00 | Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | SLBN MUNTOK |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 5 Paket | 8.750.000,00 | Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | SLBN MUNTOK |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 0 Paket | 8.950.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | SLBN MUNTOK |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 68.050.000,00 | | | - | - | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 4 Laporan | 29.200.000,00 | Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | SLBN MUNTOK |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 3 Laporan | 7.200.000,00 | Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | SLBN MUNTOK |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 4 Laporan | 31.650.000,00 | Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | SLBN MUNTOK |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 51.000.000,00 | | | - | - | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 10.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | SLBN MUNTOK |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 41.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | SLBN MUNTOK |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 196 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 656.480.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | - | - | | | - | 656.480.000,00 | | | - | - | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0048 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 92 Peserta Didik | 145.200.000,00 | Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | SLBN MUNTOK |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0052 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS | | | | 1 Satuan Pendidikan | 317.680.000,00 | Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut | DAK NON FISIK-BOS REGULER | - | - | - | | 0,00 | SLBN MUNTOK |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0071 | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | | | | 1 Satuan Pendidikan | 193.600.000,00 | Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | SLBN MUNTOK |
| | | | | | | SLB Negeri TOBOALI | | | | | | 906.530.000,00 | | | | | | | 1.025.390.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 906.530.000,00 | | | | | | | 1.025.390.000,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 906.530.000,00 | | | | | | | 1.025.390.000,00 | |
| 197 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 28.000.000,00 | | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 34.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 12.000.000,00 | | | - | - | - | - | 16.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 12.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Toboali, Gadung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 16.000.000,00 | SLB NEGERI TOBOALI |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 16.000.000,00 | | | - | - | - | - | 18.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 96 Laporan | 16.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Toboali, Gadung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 18.000.000,00 | SLB NEGERI TOBOALI |
| 198 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 878.530.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 991.390.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | - | - | | | - | 878.530.000,00 | | | - | - | - | - | 991.390.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0044 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | | | | 96 Peserta Didik | 470.610.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Toboali, Gadung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 520.000.000,00 | SLB NEGERI TOBOALI |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0045 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 1 Peserta Didik | 51.390.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Toboali, Gadung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 71.390.000,00 | SLB NEGERI TOBOALI |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0052 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS | | | | 96 Satuan Pendidikan | 356.530.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Toboali, Gadung | DAK NON FISIK-BOS REGULER | - | - | - | | 400.000.000,00 | SLB NEGERI TOBOALI |
| | | | | | | SLB N TANJUNGPANDAN | | | | | | 1.434.980.000,00 | | | | | | | 1.498.980.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 1.434.980.000,00 | | | | | | | 1.498.980.000,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 1.434.980.000,00 | | | | | | | 1.498.980.000,00 | |
| 199 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 444.450.000,00 | | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 459.050.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 27.250.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 27.250.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | | | | 29 Paket | 27.250.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 27.250.000,00 | SLB N TANJUNGPANDAN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 178.300.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 178.300.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 3 Paket | 25.000.000,00 | Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 25.000.000,00 | SLB N TANJUNGPANDAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 3 Paket | 35.000.000,00 | Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 35.000.000,00 | SLB N TANJUNGPANDAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 3 Paket | 2.000.000,00 | Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 2.000.000,00 | SLB N TANJUNGPANDAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 3 Paket | 10.000.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 10.000.000,00 | SLB N TANJUNGPANDAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 3 Paket | 55.000.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 55.000.000,00 | SLB N TANJUNGPANDAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 3 Laporan | 51.300.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 51.300.000,00 | SLB N TANJUNGPANDAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 20.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 20.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 5.000.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 5.000.000,00 | SLB N TANJUNGPANDAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 3 Laporan | 15.000.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 15.000.000,00 | SLB N TANJUNGPANDAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 218.900.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 233.500.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 2 Unit | 33.500.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 33.500.000,00 | SLB N TANJUNGPANDAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 10 Unit | 185.400.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 200.000.000,00 | SLB N TANJUNGPANDAN |
| 200 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 990.530.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 1.039.930.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | - | - | | | - | 990.530.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 1.039.930.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0042 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | | | | 10 Unit | 29.050.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 29.050.000,00 | SLB N TANJUNGPANDAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0044 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | | | | 150 Peserta Didik | 20.000.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 20.000.000,00 | SLB N TANJUNGPANDAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0045 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | | | | 7 Paket | 160.000.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 176.800.000,00 | SLB N TANJUNGPANDAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0048 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 150 Peserta Didik | 200.000.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 232.600.000,00 | SLB N TANJUNGPANDAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0050 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | | | | 31 Orang | 10.000.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 10.000.000,00 | SLB N TANJUNGPANDAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0052 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS | | | | 1 Satuan Pendidikan | 571.480.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang | DAK NON FISIK-BOS REGULER | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 571.480.000,00 | SLB N TANJUNGPANDAN |
| | | | | | | SLBN Manggar | | | | | | 1.043.100.000,00 | | | | | | | 1.100.100.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 1.043.100.000,00 | | | | | | | 1.100.100.000,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 1.043.100.000,00 | | | | | | | 1.100.100.000,00 | |
| 201 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 237.500.000,00 | | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 268.700.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 170.100.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 190.700.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 30.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Damar, Sukamandi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 35.000.000,00 | SLBN MANGGAR |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 34.100.000,00 | Kab. Belitung Timur, Damar, Sukamandi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 40.000.000,00 | SLBN MANGGAR |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 50.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Damar, Sukamandi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 55.000.000,00 | SLBN MANGGAR |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 15.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Damar, Sukamandi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 15.000.000,00 | SLBN MANGGAR |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 12 Dokumen | 6.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Damar, Sukamandi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 6.000.000,00 | SLBN MANGGAR |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 35.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Damar, Sukamandi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 39.700.000,00 | SLBN MANGGAR |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 18.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 18.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 300 Laporan | 3.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Damar, Sukamandi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 3.000.000,00 | SLBN MANGGAR |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 15.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Damar, Sukamandi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 15.000.000,00 | SLBN MANGGAR |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 49.400.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 60.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 46.400.000,00 | Kab. Belitung Timur, Damar, Sukamandi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 55.000.000,00 | SLBN MANGGAR |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 5 Unit | 3.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Damar, Sukamandi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 5.000.000,00 | SLBN MANGGAR |
| 202 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 805.600.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 831.400.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | - | - | | | - | 805.600.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 831.400.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0042 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | | | | 4 Unit | 20.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Damar, Sukamandi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 30.000.000,00 | SLBN MANGGAR |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0044 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | | | | 121 Peserta Didik | 192.500.000,00 | Kab. Belitung Timur, Damar, Sukamandi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 192.500.000,00 | SLBN MANGGAR |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0048 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 121 Peserta Didik | 165.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Damar, Sukamandi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 177.800.000,00 | SLBN MANGGAR |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0052 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS | | | | 1 Satuan Pendidikan | 416.100.000,00 | Kab. Belitung Timur, Damar, Sukamandi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 416.100.000,00 | SLBN MANGGAR |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0059 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | 1 Dokumen | 12.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Damar, Sukamandi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 15.000.000,00 | SLBN MANGGAR |
| | | | | | | UPTD Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan | | | | | | 5.000.580.840,00 | | | | | | | 7.707.472.600,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 5.000.580.840,00 | | | | | | | 7.707.472.600,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 5.000.580.840,00 | | | | | | | 7.707.472.600,00 | |
| 203 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | - | 2.929.091.700,00 | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 5.267.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 652.491.700,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 930.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 9.995.900,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 15.000.000,00 | UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 37.995.800,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 40.000.000,00 | UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 10.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 20.000.000,00 | UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 100.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 220.000.000,00 | UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 4.500.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 5.000.000,00 | UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 1 Paket | 60.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 70.000.000,00 | UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 250.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 250.000.000,00 | UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 110.000.000,00 | UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 1 Dokumen | 180.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 200.000.000,00 | UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 1.150.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 3.050.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 5 Unit | 850.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 2.500.000.000,00 | UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 300.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 550.000.000,00 | UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 601.600.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 677.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 300.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 300.000.000,00 | UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 301.600.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 377.000.000,00 | UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 525.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 610.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | | | | 2 Unit | 50.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 60.000.000,00 | UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 1 Unit | 125.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 130.000.000,00 | UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 100.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 120.000.000,00 | UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 250.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 300.000.000,00 | UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN |
| 204 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 2.071.489.140,00 | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 2.440.472.600,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | - | - | | | - | 861.261.900,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 1.100.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0057 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | | 100 Orang | 300.261.900,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 450.000.000,00 | UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0058 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | | | | 4 Konten Digital | 325.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 350.000.000,00 | UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0059 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan | | | | 40 Orang | 236.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 300.000.000,00 | UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | - | - | | | - | 891.534.440,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 980.472.600,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0050 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | | 75 Orang | 360.472.600,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 360.472.600,00 | UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0051 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | | | | 4 Konten Digital | 300.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 320.000.000,00 | UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0052 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan | | | | 40 Orang | 231.061.840,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 300.000.000,00 | UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | - | - | | | - | 318.692.800,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 360.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0056 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | | 40 Orang | 125.515.200,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 130.000.000,00 | UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0057 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | | | | 1 Konten Digital | 93.177.600,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 100.000.000,00 | UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0058 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan | | | | 10 Orang | 100.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 130.000.000,00 | UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN |
| | | | | | | SMAN 3 TOBOALI | | | | | | 251.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 251.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 251.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| 205 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>91,5Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | | | | - | 54.200.000,00 | | | | | | 90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>92Persen<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai<br>90Nilai | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 40.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 2.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMAN 3 TOBOALI |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 2.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMAN 3 TOBOALI |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 3.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMAN 3 TOBOALI |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 6.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMAN 3 TOBOALI |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 1 Paket | 7.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMAN 3 TOBOALI |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 20.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMAN 3 TOBOALI |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 14.200.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMAN 3 TOBOALI |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 13.200.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMAN 3 TOBOALI |
| 206 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | 59persen<br>71,4persen<br>93,3persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>70persen<br>75persen<br>43,5persen<br>41,04persen<br>91persen<br>50,56persen<br>70persen<br>66,6persen<br>88,2persen<br>26,57persen<br>70persen<br>28,69persen<br>80persen<br>10persen<br>65persen<br>70persen<br>66,89persen<br>100persen<br>100persen | | | - | 196.800.000,00 | | | | | | 59persen<br>57,1persen<br>86,6persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>65persen<br>74,5persen<br>42,75persen<br>40,29persen<br>90,5persen<br>49,81persen<br>65persen<br>58,3persen<br>82,4persen<br>25,82persen<br>65persen<br>27,94persen<br>76persen<br>8persen<br>60persen<br>65persen<br>59,08persen<br>100persen<br>100persen | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | - | - | | | - | 196.800.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0038 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | | | | 1 Paket | 1.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMAN 3 TOBOALI |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0049 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 1 Peserta Didik | 36.100.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMAN 3 TOBOALI |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0051 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | | | | 1 Orang | 2.200.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMAN 3 TOBOALI |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0053 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS | | | | 1 Satuan Pendidikan | 151.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOS REGULER | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMAN 3 TOBOALI |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0078 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | | | | 1 Satuan Pendidikan | 6.500.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | SMAN 3 TOBOALI |
| | | | | | | DINAS KESEHATAN | | | | | | 97.295.130.027,00 | | | | | | | 97.648.869.140,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 97.295.130.027,00 | | | | | | | 97.648.869.140,00 | |
| | 1 | 02 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | 97.295.130.027,00 | | | | | | | 97.648.869.140,00 | |
| 207 | 1 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 80nilai<br>83nilai<br>83nilai | | | - | 25.029.475.000,00 | | | | | | 80nilai<br>82nilai<br>83nilai | 25.119.317.250,00 | |
| | 1 | 02 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 407.075.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 161.787.250,00 | |
| | 1 | 02 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 15 Dokumen | 250.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 111.787.250,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 15 Laporan | 157.075.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 20.625.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 20.800.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 139 Orang/ Bulan | 20.500.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 20.500.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 125.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 2 Laporan | 75.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 175.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 75.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 02 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 10 Orang | 75.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 735.100.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 671.500.000,00 | |
| | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 5.100.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 150.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 165.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 50.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 55.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 2 Paket | 15.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 16.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 2 Laporan | 15.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 16.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 40 Laporan | 300.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 330.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 1 Dokumen | 200.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 77.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 130.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 143.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 2 Paket | 30.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 33.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 8 Unit | 100.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 110.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 2.407.300.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 2.648.030.000,00 | |
| | 1 | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 10.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 550.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 605.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1.847.300.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 2.032.030.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 650.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 695.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 12 Unit | 300.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 330.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 170 Unit | 100.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 110.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 4 Unit | 200.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 200.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 8 Unit | 50.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 55.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 208 | 1 | 02 | 02 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | - | 88fasyankes<br>100persen<br>100persen<br>89persen<br>94persen<br>88persen | | | - | 67.948.848.540,00 | | | | | | 87fasyankes<br>100persen<br>100persen<br>88persen<br>94persen<br>88persen | 68.886.810.190,00 | |
| | 1 | 02 | 02 | 1.01 | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | - | - | | | - | 2.421.394.700,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 2.469.792.500,00 | |
| | 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0004 | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar | | | | 1 Unit | 154.500.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 159.135.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0006 | Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan | | | | 1 Layanan | 50.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 79.567.500,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0010 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan | | | | 8 Unit | 100.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 125.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0020 | Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | | | | 1 Unit | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 106.090.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0025 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan | | | | 1 Dokumen | 217.315.700,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 200.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0027 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | | | | 1 Paket | 1.799.579.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 1.800.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 1.02 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | - | - | | | - | 64.717.453.840,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 65.426.554.890,00 | |
| | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar | | | | 70 Orang | 50.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 55.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 55 Orang | 50.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak | | | | 3 Dokumen | 280.818.100,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 112.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif | | | | 1 Dokumen | 150.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 107.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut | | | | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 105.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | 1 Dokumen | 200.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 109.969.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 39.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Wilayah | - | | 40.567.500,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0009 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 125.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | | | | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 106.090.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | 1 Dokumen | 685.406.700,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 650.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji | | | | 1 Dokumen | 120.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 150.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | 1 Dokumen | 80.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 80.657.500,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapakan Rehabilitasi Medis | | | | 7 Orang | 80.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 105.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0016 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | | 1 Dokumen | 57.864.709.040,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 57.864.709.040,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0017 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | 1 Dokumen | 150.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 125.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0018 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota | | | | 7 Dokumen | 103.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 10.609.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0019 | Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan | | | | 1 Dokumen | 1.250.520.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 2.000.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0020 | Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas | | | | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 105.886.500,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0021 | Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0023 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | | | | 1 Unit | 2.450.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 2.200.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0024 | Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | 1 Dokumen | 150.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 80.935.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0025 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan | | | | 8 Paket | 50.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 47.041.350,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0026 | Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan | | | | 1 Dokumen | 200.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 950.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0030 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas | | | | 1 Keluarga | 103.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 106.090.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 1.03 | | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | - | | | - | 300.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 77.500.000,00 | |
| | 1 | 02 | 02 | 1.03 | 0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | 1 Dokumen | 300.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 77.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 1.04 | | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | - | - | | | - | 510.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 912.962.800,00 | |
| | 1 | 02 | 02 | 1.04 | 0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya | | | | 2 Unit | 310.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 342.609.800,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 1.04 | 0002 | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar | | | | 3 Unit | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 390.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 1.04 | 0003 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan | | | | 13 Unit | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 180.353.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 209 | 1 | 02 | 03 | | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | - | 88persen | | | - | 3.248.158.700,00 | | | | | | 88persen | 3.253.257.200,00 | |
| | 1 | 02 | 03 | 1.01 | | Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi | - | - | | | - | 169.950.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 175.048.500,00 | |
| | 1 | 02 | 03 | 1.01 | 0001 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) | | | | 3120 Orang | 84.950.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 85.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 03 | 1.01 | 0002 | Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi | | | | 148 Orang | 85.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 90.048.500,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 03 | 1.02 | | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | - | - | | | - | 3.078.208.700,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 3.078.208.700,00 | |
| | 1 | 02 | 03 | 1.02 | 0001 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat | | | | 3120 Orang | 3.078.208.700,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 3.078.208.700,00 | DINAS KESEHATAN |
| 210 | 1 | 02 | 04 | | | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | - | 90persen | | | - | 128.000.000,00 | | | | | | 88persen | 47.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 04 | 1.01 | | Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) | - | - | | | - | 68.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 22.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 04 | 1.01 | 0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan | | | | 16 Sarana | 68.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 22.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 04 | 1.02 | | Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) | - | - | | | - | 60.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 25.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 04 | 1.02 | 0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional | | | | 4 Sarana | 60.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 25.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 211 | 1 | 02 | 05 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | - | 89persen | | | - | 940.647.787,00 | | | | | | 88persen | 342.484.500,00 | |
| | 1 | 02 | 05 | 1.02 | | Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi | - | - | | | - | 830.647.787,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 236.394.500,00 | |
| | 1 | 02 | 05 | 1.02 | 0001 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | | 1 Dokumen | 150.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 125.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 05 | 1.02 | 0002 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | | 1 Dokumen | 680.647.787,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 111.394.500,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 05 | 1.03 | | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi | - | - | | | - | 110.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 106.090.000,00 | |
| | 1 | 02 | 05 | 1.03 | 0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM | | | | 1 Dokumen | 110.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 106.090.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | | | UPTD BALAI LABOLATORIUM KESEHATAN PEMELIHARAAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN | | | | | | 4.992.000.000,00 | | | | | | | 4.231.000.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 4.992.000.000,00 | | | | | | | 4.231.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | 4.992.000.000,00 | | | | | | | 4.231.000.000,00 | |
| 212 | 1 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 80nilai<br>83nilai<br>83nilai | | | - | 3.450.000.000,00 | | | | | | 80nilai<br>82nilai<br>83nilai | 3.036.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 295.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 103.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 10.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 4.000.000,00 | UPTD BALAI LABOLATORIUM KESEHATAN PEMELIHARAAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 70.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 50.000.000,00 | UPTD BALAI LABOLATORIUM KESEHATAN PEMELIHARAAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 10.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 10.000.000,00 | UPTD BALAI LABOLATORIUM KESEHATAN PEMELIHARAAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 1 Laporan | 5.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 5.000.000,00 | UPTD BALAI LABOLATORIUM KESEHATAN PEMELIHARAAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 200.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 34.000.000,00 | UPTD BALAI LABOLATORIUM KESEHATAN PEMELIHARAAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 172.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 100.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 1 Paket | 72.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 50.000.000,00 | UPTD BALAI LABOLATORIUM KESEHATAN PEMELIHARAAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 5 Unit | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 50.000.000,00 | UPTD BALAI LABOLATORIUM KESEHATAN PEMELIHARAAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 203.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 153.000.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 3.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 3.000.000,00 | UPTD BALAI LABOLATORIUM KESEHATAN PEMELIHARAAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 200.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 150.000.000,00 | UPTD BALAI LABOLATORIUM KESEHATAN PEMELIHARAAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 280.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 180.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | | | | 5 Unit | 80.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 50.000.000,00 | UPTD BALAI LABOLATORIUM KESEHATAN PEMELIHARAAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 20 Unit | 50.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 30.000.000,00 | UPTD BALAI LABOLATORIUM KESEHATAN PEMELIHARAAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 2 Unit | 150.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 100.000.000,00 | UPTD BALAI LABOLATORIUM KESEHATAN PEMELIHARAAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 01 | 1.10 | | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 2.500.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 2.500.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 01 | 1.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | | 1 Unit Kerja | 2.500.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 2.500.000.000,00 | UPTD BALAI LABOLATORIUM KESEHATAN PEMELIHARAAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN |
| 213 | 1 | 02 | 02 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | - | 88fasyankes<br>100persen<br>100persen<br>89persen<br>94persen<br>88persen | | | - | 1.542.000.000,00 | | | | | | 87fasyankes<br>100persen<br>100persen<br>88persen<br>94persen<br>88persen | 1.195.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 02 | 1.01 | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | - | - | | | - | 1.080.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 645.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0007 | Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Dilakukan Pengembangan | | | | 1 Unit | 100.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 125.000.000,00 | UPTD BALAI LABOLATORIUM KESEHATAN PEMELIHARAAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0008 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan | | | | 4 Unit | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 120.000.000,00 | UPTD BALAI LABOLATORIUM KESEHATAN PEMELIHARAAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0013 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara | | | | 5 Unit | 80.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 100.000.000,00 | UPTD BALAI LABOLATORIUM KESEHATAN PEMELIHARAAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0017 | Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar | | | | 33 Unit | 450.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | UPTD BALAI LABOLATORIUM KESEHATAN PEMELIHARAAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0027 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | | | | 1 Paket | 350.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 300.000.000,00 | UPTD BALAI LABOLATORIUM KESEHATAN PEMELIHARAAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 1.02 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | - | - | | | - | 312.000.000,00 | | | - | - | - | - | 370.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 130 Orang | 12.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 20.000.000,00 | UPTD BALAI LABOLATORIUM KESEHATAN PEMELIHARAAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | 1 Dokumen | 300.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 350.000.000,00 | UPTD BALAI LABOLATORIUM KESEHATAN PEMELIHARAAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 1.04 | | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | - | - | | | - | 150.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 180.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 02 | 1.04 | 0003 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan | | | | 1 Unit | 150.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 180.000.000,00 | UPTD BALAI LABOLATORIUM KESEHATAN PEMELIHARAAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN |
| | | | | | | RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI | | | | | | 162.578.490.226,00 | | | | | | | 193.810.000.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 155.973.090.226,00 | | | | | | | 187.125.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | 155.973.090.226,00 | | | | | | | 187.125.000.000,00 | |
| 214 | 1 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 79nilai<br>79nilai | | | - | 114.310.000.000,00 | | | | | | 78nilai<br>79nilai | 124.645.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 150.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 125.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 8 Dokumen | 150.000.000,00 | Kab. Bangka, Merawang, Air Anyir | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 125.000.000,00 | RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI |
| | 1 | 02 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 55.285.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 55.375.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 400 Orang/ Bulan | 55.100.000.000,00 | Kab. Bangka, Merawang, Air Anyir | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 55.125.000.000,00 | RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI |
| | 1 | 02 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 3 Dokumen | 85.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 80.000.000,00 | RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI |
| | 1 | 02 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 1 Laporan | 50.000.000,00 | Kab. Bangka, Merawang, Air Anyir | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 85.000.000,00 | RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI |
| | 1 | 02 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 1 Laporan | 50.000.000,00 | Kab. Bangka, Merawang, Air Anyir | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 85.000.000,00 | RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | - | | | - | 75.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 150.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 01 | 1.03 | 0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | | | 1 Laporan | 25.000.000,00 | Kab. Bangka, Merawang, Air Anyir | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 50.000.000,00 | RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI |
| | 1 | 02 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 1 Laporan | 25.000.000,00 | Kab. Bangka, Merawang, Air Anyir | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 50.000.000,00 | RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI |
| | 1 | 02 | 01 | 1.03 | 0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 1 Dokumen | 25.000.000,00 | Kab. Bangka, Merawang, Air Anyir | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 50.000.000,00 | RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI |
| | 1 | 02 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 225.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 525.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 01 | 1.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | 1 Dokumen | 25.000.000,00 | Kab. Bangka, Merawang, Air Anyir | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 25.000.000,00 | RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI |
| | 1 | 02 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 25 Orang | 200.000.000,00 | Kab. Bangka, Merawang, Air Anyir | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 500.000.000,00 | RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI |
| | 1 | 02 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 900.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 720.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 100.000.000,00 | Kab. Bangka, Merawang, Air Anyir | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 100.000.000,00 | RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI |
| | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 100.000.000,00 | Kab. Bangka, Merawang, Air Anyir | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 120.000.000,00 | RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI |
| | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 100.000.000,00 | Kab. Bangka, Merawang, Air Anyir | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 200.000.000,00 | RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI |
| | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 12 Laporan | 100.000.000,00 | Kab. Bangka, Merawang, Air Anyir | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 100.000.000,00 | RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI |
| | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 500.000.000,00 | Kab. Bangka, Merawang, Air Anyir | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 200.000.000,00 | RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI |
| | 1 | 02 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 5.500.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 10.500.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 1 Paket | 500.000.000,00 | Kab. Bangka, Merawang, Air Anyir | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 500.000.000,00 | RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI |
| | 1 | 02 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 2 Unit | 2.500.000.000,00 | Kab. Bangka, Merawang, Air Anyir | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 5.000.000.000,00 | RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI |
| | 1 | 02 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 2 Unit | 2.500.000.000,00 | Kab. Bangka, Merawang, Air Anyir | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 5.000.000.000,00 | RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI |
| | 1 | 02 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 7.175.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 7.050.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2 Laporan | 25.000.000,00 | Kab. Bangka, Merawang, Air Anyir | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 50.000.000,00 | RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI |
| | 1 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 7.150.000.000,00 | Kab. Bangka, Merawang, Air Anyir | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 7.000.000.000,00 | RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 7.500.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 10.200.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | | | | 10 Unit | 500.000.000,00 | Kab. Bangka, Merawang, Air Anyir | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 200.000.000,00 | RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI |
| | 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 2 Unit | 4.000.000.000,00 | Kab. Bangka, Merawang, Air Anyir | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 5.000.000.000,00 | RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI |
| | 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 3.000.000.000,00 | Kab. Bangka, Merawang, Air Anyir | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 5.000.000.000,00 | RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI |
| | 1 | 02 | 01 | 1.10 | | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 37.500.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 40.000.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 01 | 1.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | | 1 Unit Kerja | 37.500.000.000,00 | Kab. Bangka, Merawang, Air Anyir | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 40.000.000.000,00 | RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI |
| 215 | 1 | 02 | 02 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | - | 86persen | | | - | 20.533.090.226,00 | | | | | | 86persen | 31.500.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 02 | 1.01 | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | - | - | | | - | 18.500.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 30.000.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0002 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun | | | | 1 Unit | 6.000.000.000,00 | Kab. Bangka, Merawang, Air Anyir | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 7.000.000.000,00 | RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI |
| | 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0010 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan | | | | 1 Unit | 4.000.000.000,00 | Kab. Bangka, Merawang, Air Anyir | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 5.000.000.000,00 | RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI |
| | 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0013 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara | | | | 10 Unit | 2.000.000.000,00 | Kab. Bangka, Merawang, Air Anyir | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 5.000.000.000,00 | RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI |
| | 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0017 | Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar | | | | 7 Unit | 2.000.000.000,00 | Kab. Bangka, Merawang, Air Anyir | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 5.000.000.000,00 | RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI |
| | 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0027 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | | | | 1 Paket | 4.500.000.000,00 | Kab. Bangka, Merawang, Air Anyir | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 8.000.000.000,00 | RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI |
| | 1 | 02 | 02 | 1.02 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | - | - | | | - | 900.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 750.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | 1 Dokumen | 300.000.000,00 | Kab. Bangka, Merawang, Air Anyir | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 350.000.000,00 | RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI |
| | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0009 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | 2 Dokumen | 350.000.000,00 | Kab. Bangka, Merawang, Air Anyir | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 200.000.000,00 | RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI |
| | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0022 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit | | | | 1 Dokumen | 250.000.000,00 | Kab. Bangka, Merawang, Air Anyir | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 200.000.000,00 | RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI |
| | 1 | 02 | 02 | 1.03 | | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | - | | | - | 633.090.226,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 600.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 02 | 1.03 | 0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | 1 Dokumen | 633.090.226,00 | Kab. Bangka, Merawang, Air Anyir | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 600.000.000,00 | RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI |
| | 1 | 02 | 02 | 1.04 | | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | - | - | | | - | 500.000.000,00 | | | - | - | - | - | 150.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 02 | 1.04 | 0003 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan | | | | 1 Unit | 500.000.000,00 | Kab. Bangka, Merawang, Air Anyir | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 150.000.000,00 | RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI |
| 216 | 1 | 02 | 03 | | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | - | 86persen | | | - | 20.830.000.000,00 | | | | | | 86persen | 30.680.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 03 | 1.01 | | Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi | - | - | | | - | 20.000.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 30.000.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 03 | 1.01 | 0001 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) | | | | 350 Orang | 20.000.000.000,00 | Kab. Bangka, Merawang, Air Anyir | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 30.000.000.000,00 | RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI |
| | 1 | 02 | 03 | 1.02 | | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | - | - | | | - | 830.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 680.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 03 | 1.02 | 0001 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat | | | | 171 Orang | 750.000.000,00 | Kab. Bangka, Merawang, Air Anyir | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 600.000.000,00 | RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI |
| | 1 | 02 | 03 | 1.02 | 0002 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | 1 Dokumen | 80.000.000,00 | Kab. Bangka, Merawang, Air Anyir | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 80.000.000,00 | RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI |
| 217 | 1 | 02 | 05 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | - | 100persen | | | - | 300.000.000,00 | | | | | | 100persen | 300.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 05 | 1.01 | | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | - | - | | | - | 300.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 300.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 05 | 1.01 | 0001 | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | 2 Dokumen | 300.000.000,00 | Kab. Bangka, Merawang, Air Anyir | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 300.000.000,00 | RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI |
| | X | | | | | NON URUSAN | | | | | | 6.605.400.000,00 | | | | | | | 6.685.000.000,00 | |
| | X | XX | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX | | | | | | 6.605.400.000,00 | | | | | | | 6.685.000.000,00 | |
| 218 | X | XX | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 79nilai<br>79nilai | | | - | 6.605.400.000,00 | | | | | | 78nilai<br>79nilai | 6.685.000.000,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 86.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 125.000.000,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 8 Laporan | 86.000.000,00 | Kab. Bangka, Merawang, Air Anyir | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 125.000.000,00 | RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI |
| | X | XX | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | - | | | - | 25.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 50.000.000,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 3 Dokumen | 25.000.000,00 | Kab. Bangka, Merawang, Air Anyir | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 50.000.000,00 | RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI |
| | X | XX | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 10.000.000,00 | | | - | - | - | - | 10.000.000,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Bangka, Merawang, Air Anyir | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 10.000.000,00 | RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI |
| | X | XX | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 6.484.400.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 6.500.000.000,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 3 Laporan | 6.484.400.000,00 | Kab. Bangka, Merawang, Air Anyir | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 6.500.000.000,00 | RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI |
| | | | | | | RUMAH SAKIT JIWA | | | | | | 64.104.176.325,00 | | | | | | | 49.176.292.117,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 64.104.176.325,00 | | | | | | | 49.176.292.117,00 | |
| | 1 | 02 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | 63.104.176.325,00 | | | | | | | 49.176.292.117,00 | |
| 219 | 1 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal PD<br>Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (RSJ)<br>Nilai SAKIP Perangkat Daerah (RSJ) | 82nilai<br>82nilai<br>81.3nilai<br>81.3nilai<br>82nilai | | | 80 nilai<br>80 nilai<br>81.1 nilai | 46.293.410.659,00 | | | | | | 81nilai<br>81nilai<br>81.2nilai<br>81.2nilai<br>81nilai | 38.413.389.678,00 | |
| | 1 | 02 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun dengan baik | - | | | 9 dokumen | 15.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 20.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 6 Dokumen | 7.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 10.000.000,00 | RUMAH SAKIT JIWA |
| | 1 | 02 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 6 Laporan | 8.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 10.000.000,00 | RUMAH SAKIT JIWA |
| | 1 | 02 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah | - | | | 77.5 nilai | 31.048.825.209,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 33.670.799.678,00 | |
| | 1 | 02 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 220 Orang/ Bulan | 31.040.825.209,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 33.660.799.678,00 | RUMAH SAKIT JIWA |
| | 1 | 02 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 2 Laporan | 8.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 10.000.000,00 | RUMAH SAKIT JIWA |
| | 1 | 02 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 140.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 200.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 14 Orang | 140.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 200.000.000,00 | RUMAH SAKIT JIWA |
| | 1 | 02 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 765.156.200,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 852.225.000,00 | |
| | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 50.824.600,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 75.000.000,00 | RUMAH SAKIT JIWA |
| | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 100.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 120.000.000,00 | RUMAH SAKIT JIWA |
| | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 89.040.600,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 100.000.000,00 | RUMAH SAKIT JIWA |
| | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 2 Paket | 224.468.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 250.000.000,00 | RUMAH SAKIT JIWA |
| | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 12 Dokumen | 24.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 24.000.000,00 | RUMAH SAKIT JIWA |
| | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 1 Laporan | 16.775.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 20.000.000,00 | RUMAH SAKIT JIWA |
| | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 243.225.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 243.225.000,00 | RUMAH SAKIT JIWA |
| | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 1 Dokumen | 16.823.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 20.000.000,00 | RUMAH SAKIT JIWA |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 2.134.943.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 350.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 1 Paket | 200.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 200.000.000,00 | RUMAH SAKIT JIWA |
| | 1 | 02 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 15 Unit | 100.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 150.000.000,00 | RUMAH SAKIT JIWA |
| | 1 | 02 | 01 | 1.07 | 0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1.834.943.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 0,00 | RUMAH SAKIT JIWA |
| | 1 | 02 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 3.835.238.250,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 2.825.365.000,00 | |
| | 1 | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 9.365.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 9.365.000,00 | RUMAH SAKIT JIWA |
| | 1 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 632.973.250,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 750.000.000,00 | RUMAH SAKIT JIWA |
| | 1 | 02 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 42.600.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 50.000.000,00 | RUMAH SAKIT JIWA |
| | 1 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 3.150.300.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 2.016.000.000,00 | RUMAH SAKIT JIWA |
| | 1 | 02 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 354.248.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 495.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 14 Unit | 197.788.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 220.000.000,00 | RUMAH SAKIT JIWA |
| | 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 10 Unit | 56.460.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 75.000.000,00 | RUMAH SAKIT JIWA |
| | 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 100.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 200.000.000,00 | RUMAH SAKIT JIWA |
| | 1 | 02 | 01 | 1.10 | | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 8.000.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 02 | 01 | 1.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | | 1 Unit Kerja | 8.000.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang | PENDAPATAN DARI BLUD | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 0,00 | RUMAH SAKIT JIWA |
| 220 | 1 | 02 | 02 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | - | 85persen<br>82persen<br>85persen<br>85persen | | | - | 8.016.372.193,00 | | | | | | 83persen<br>83persen<br>83persen<br>83persen | 2.597.474.439,00 | |
| | 1 | 02 | 02 | 1.01 | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | - | - | | | - | 4.635.542.754,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 250.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit | | | | 11 Unit | 699.895.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 0,00 | RUMAH SAKIT JIWA |
| | 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0010 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan | | | | 29 Unit | 3.569.905.604,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 0,00 | RUMAH SAKIT JIWA |
| | 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0013 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara | | | | 65 Unit | 100.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 100.000.000,00 | RUMAH SAKIT JIWA |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0017 | Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar | | | | 10 Unit | 115.525.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 150.000.000,00 | RUMAH SAKIT JIWA |
| | 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0027 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | | | | 5 Paket | 150.217.150,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 0,00 | RUMAH SAKIT JIWA |
| | 1 | 02 | 02 | 1.02 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | - | - | | | - | 2.355.870.439,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 2.058.360.439,00 | |
| | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut | | | | 1 Dokumen | 107.040.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 107.040.000,00 | RUMAH SAKIT JIWA |
| | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | 1 Dokumen | 297.510.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 0,00 | RUMAH SAKIT JIWA |
| | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | 1 Dokumen | 327.496.500,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 327.496.500,00 | RUMAH SAKIT JIWA |
| | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0009 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | 1 Dokumen | 408.097.025,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 408.097.025,00 | RUMAH SAKIT JIWA |
| | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | 1 Dokumen | 477.751.250,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 477.751.250,00 | RUMAH SAKIT JIWA |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | 6 Dokumen | 457.330.664,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 457.330.664,00 | RUMAH SAKIT JIWA |
| | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapakan Rehabilitasi Medis | | | | 10 Orang | 280.645.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 280.645.000,00 | RUMAH SAKIT JIWA |
| | 1 | 02 | 02 | 1.03 | | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | - | | | - | 735.845.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 02 | 02 | 1.03 | 0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | 1 Dokumen | 735.845.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 0,00 | RUMAH SAKIT JIWA |
| | 1 | 02 | 02 | 1.04 | | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | - | - | | | - | 289.114.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 289.114.000,00 | |
| | 1 | 02 | 02 | 1.04 | 0002 | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar | | | | 1 Unit | 113.157.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 113.157.000,00 | RUMAH SAKIT JIWA |
| | 1 | 02 | 02 | 1.04 | 0003 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan | | | | 1 Unit | 175.957.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 175.957.000,00 | RUMAH SAKIT JIWA |
| 221 | 1 | 02 | 03 | | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase SDM kesehatan sesuai analisa beban kerja RS Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung<br>Persentase SDM kesehatan yang mendapat pendidikan dan pelatihan | 88persen<br>88persen<br>88persen<br>88persen | | | 86 persen<br>86 persen | 8.794.393.473,00 | | | | | | 87persen<br>87persen<br>87persen<br>87persen | 8.165.428.000,00 | |
| | 1 | 02 | 03 | 1.01 | | Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi | 1. Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang tersedia di RS.Jiwa | - | | | 170 orang | 8.165.428.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 8.165.428.000,00 | |
| | 1 | 02 | 03 | 1.01 | 0001 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) | | | | 161 Orang | 8.165.428.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 8.165.428.000,00 | RUMAH SAKIT JIWA |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 02 | 03 | 1.02 | | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah SDMK yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan | - | | | 200 tenaga kesehatan | 628.965.473,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 02 | 03 | 1.02 | 0001 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat | | | | 320 Orang | 619.539.057,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 0,00 | RUMAH SAKIT JIWA |
| | 1 | 02 | 03 | 1.02 | 0002 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | 1 Dokumen | 9.426.416,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 0,00 | RUMAH SAKIT JIWA |
| | 1 | - | | | | - | | | | | | 1.000.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| 222 | 1 | - | 02 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | - | 85persen<br>82persen<br>85persen<br>85persen | | | - | 1.000.000.000,00 | | | | | | 83persen<br>83persen<br>83persen<br>83persen | 0,00 | |
| | 1 | - | 02 | 1.01 | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | - | - | | | - | 1.000.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 0,00 | |
| | 1 | - | 02 | 1.01 | 0026 | Pengembangan Rumah Sakit | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 | | | | 1 Unit | 1.000.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 0,00 | RUMAH SAKIT JIWA |
| | | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | 197.053.488.565,00 | | | | | | | 35.817.146.415,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 133.769.228.306,00 | | | | | | | 34.540.146.414,00 | |
| | 1 | 03 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | | 111.689.554.631,00 | | | | | | | 34.540.146.412,00 | |
| 223 | 1 | 03 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Survey Kepuasan Pelayanan Internal (Dinas PUPR PRKP)<br>Nilai Sakip PD (Dinas PUPR PRKP) | 81Nilai<br>82Nilai | | | 80 Nilai<br>79 Nilai | 32.303.383.408,00 | | | | | | 80Nilai<br>80Nilai | 32.438.383.411,00 | |
| | 1 | 03 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Survey Kepuasan Pelayanan Keuangan | - | | | 80 | 25.632.583.408,00 | | | - | Pembangunan Wilayah | - | - | 26.632.583.408,00 | |
| | 1 | 03 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 192 Orang/ Bulan | 25.582.583.408,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 26.582.583.408,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1 | 03 | 01 | 1.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | 2 Dokumen | 50.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 50.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1 | 03 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Survey Kepuasan Pelayanan adminitrasi barang milik daerah | - | | | 80 | 75.000.000,00 | | | - | Pembangunan Wilayah | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 03 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 2 Laporan | 75.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1 | 03 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | survey kepuasan pelayanan kepegawaian | - | | | 80 | 440.000.000,00 | | | - | - | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 03 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | | | | 2 Paket | 360.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1 | 03 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 5 Orang | 80.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Survey Kepuasan Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah<br>Survey Kepuasan Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | 80 % | 350.000.000,00 | | | - | Pembangunan Wilayah | - | - | 3,00 | |
| | 1 | 03 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 1 Unit | 350.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 1,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1 | 03 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 0 Unit | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 1,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1 | 03 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 0 Unit | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 1,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1 | 03 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Survey Kepuasan Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | 80 | 5.805.800.000,00 | | | - | Pembangunan Wilayah | - | - | 5.805.800.000,00 | |
| | 1 | 03 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 13 Laporan | 5.805.800.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 5.805.800.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1 | 03 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Survey Kepuasan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | 80 | 0,00 | | | - | Pembangunan Wilayah | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | | | | 0 Unit | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| 224 | 1 | 03 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | -<br>Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air | 100% | | | 64,74 %<br>2,74 % | 100.000.000,00 | | | | | | 80,52% | 0,00 | |
| | 1 | 03 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase penurunan luas kawasan yang terdampak daya rusak air di WS Kewenangan Provinsi | - | | | 0,6 % | 100.000.000,00 | | | - | Pembangunan Wilayah | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 03 | 02 | 1.01 | 0078 | Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 0,00 | Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1 | 03 | 02 | 1.01 | 0090 | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan | | | | 1 Lembaga | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| 225 | 1 | 03 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak<br>Persentase Penyelenggaraan Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi<br>Persentase Readiness Criteria pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum | 100%<br>100%<br>0.829% | | | 0 %<br>28 %<br>25 % | 780.000.000,00 | | | | | | 25%<br>29%<br>0.237% | 0,00 | |
| | 1 | 03 | 03 | 1.01 | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | Jumlah debit pelayanan SPAM<br>jumlah dokumen perencanaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun<br>Jumlah Penyelenggaraan Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi | - | | | 0 liter/detik<br>2 Dokumen<br>2 Penyelenggaraan | 780.000.000,00 | | | - | Pembangunan Wilayah | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 03 | 03 | 1.01 | 0015 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun | | | | 3 Dokumen | 780.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| 226 | 1 | 03 | 04 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | Persentase Readiness Criteria pembangunan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional yang disiapkan<br>Persentase rumah tangga yang terlayani pengelolaan sampah | 10%<br>100% | | | 25 %<br>0 % | 0,00 | | | | | | 0%<br>25% | 0,00 | |
| | 1 | 03 | 04 | 1.01 | | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional | jumlah dokumen perencanaan pembangunan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan yang disusun<br>Jumlah infrastruktur persampahan yang tersedia<br>Jumlah penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan | - | | | 0 Dokumen<br>0 Unit<br>2 Penyelenggaraan | 0,00 | | | - | Pembangunan Wilayah | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 03 | 04 | 1.01 | 0016 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun | | | | 0 Dokumen | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| 227 | 1 | 03 | 05 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Persentase rumah tangga yang besanitasi<br>Persentase Readiness Criteria pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah yang disiapkan | 27%<br>6% | | | 6 %<br>18 % | 3.675.000.000,00 | | | | | | 27%<br>6% | 0,00 | |
| | 1 | 03 | 05 | 1.01 | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional | jumlah dokumen perencanaan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah yang disusun<br>Jumlah KK yang terlayani prasarana sistem air limbah | - | | | 1 Dokumen<br>140 KK | 3.675.000.000,00 | | | - | Pembangunan Wilayah | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 03 | 05 | 1.01 | 0014 | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | | | | 560 Orang | 3.675.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| 228 | 1 | 03 | 08 | | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Persentase Readiness Criteria bangunan gedung yang disiapkan<br>Persentase jumlah bangunan gedung yang terselenggara | 100%<br>100% | | | 100 %<br>100 % | 4.450.899.316,00 | | | | | | 100%<br>100% | 0,00 | |
| | 1 | 03 | 08 | 1.01 | | Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | Jumlah Bangunan Gedung Strategi Provinsi yang diselenggarakan<br>Jumlah Perencanaan Bangunan Gedung Strategi Provinsi yang disiapkan | - | | | 1 Unit<br>1 Dok | 4.450.899.316,00 | | | - | Pembangunan Wilayah | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 03 | 08 | 1.01 | 0019 | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | | | | 1 Dokumen | 4.450.899.316,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| 229 | 1 | 03 | 10 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Persentase jalan dalam kondisi mantap | 92.83% | | | 91.07 % | 67.068.371.907,00 | | | | | | 91.89% | 1,00 | |
| | 1 | 03 | 10 | 1.01 | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | Persentase jalan dalam kondisi mantap hasil dari kegiatan pelebaran dan peningkatan jalan<br>Persentase jalan dalam kondisi mantap hasil pemeiharaan Jalan<br>Persentase jembatan dalam kondisi baik hasil pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan | - | | | 0.182<br>99.82<br>80 | 67.068.371.907,00 | | | - | Pembangunan Wilayah | - | - | 1,00 | |
| | 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0027 | Pemeliharaan Berkala Jembatan | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala | | | | 0 Jembatan | 0,00 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0028 | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya | | | | 0 KM | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0033 | Pemeliharaan Rutin Jalan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin | | | | 850.99 KM | 31.696.537.997,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0036 | Penggantian Jembatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Jembatan yang Diganti | | | | 60 Jembatan | 2.867.732.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0038 | Pemeliharaan Berkala Jalan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala | | | | 8.55 KM | 30.966.193.910,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Pembangunan Wilayah | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0041 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun | | | | 0 Dokumen | 1.097.908.000,00 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 1,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0043 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya | | | | 2 KM | 440.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| 230 | 1 | 03 | 11 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Rasio ketersediaan penyelenggaraan jasa konstruksi | 70.58% | | | 39.15 % | 1.811.900.000,00 | | | | | | 53.79% | 2.101.763.000,00 | |
| | 1 | 03 | 11 | 1.01 | | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi | "Persentase Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi " | - | | | 35.03 % | 1.337.000.000,00 | | | - | Pembangunan Wilayah | - | - | 1.437.000.000,00 | |
| | 1 | 03 | 11 | 1.01 | 0009 | Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan | | | | 15 Orang | 215.000.000,00 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 215.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1 | 03 | 11 | 1.01 | 0011 | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih | | | | 180 Orang | 1.122.000.000,00 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 1.222.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1 | 03 | 11 | 1.02 | | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi | Persentase Tingkat Kepuasan Layanan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi | - | | | 55 % | 474.900.000,00 | | | - | Pembangunan Wilayah | - | - | 475.763.000,00 | |
| | 1 | 03 | 11 | 1.02 | 0008 | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 184.137.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 185.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1 | 03 | 11 | 1.02 | 0009 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | | | 30 Orang | 290.763.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 290.763.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1 | 03 | 11 | 1.03 | | Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi | Jumlah Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi | - | | | 0 % | 0,00 | | | - | Pembangunan Wilayah | - | - | 189.000.000,00 | |
| | 1 | 03 | 11 | 1.03 | 0004 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan | | | | 0 Paket Pekerjaan | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 189.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| 231 | 1 | 03 | 12 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Persentase Kesesuaian Rencana Tata Ruang dengan Pemanfaatan Ruang | 88% | | | 86 % | 1.500.000.000,00 | | | | | | 87% | 0,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 03 | 12 | 1.01 | | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi | Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi yang ditetapkan | - | | | 1 Dokumen | 250.000.000,00 | | | - | Pembangunan Wilayah | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 03 | 12 | 1.01 | 0009 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi | | | | 1 Orang | 250.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1 | 03 | 12 | 1.02 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang | - | | | 1 Dokumen | 250.000.000,00 | | | - | Pembangunan Wilayah | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 03 | 12 | 1.02 | 0004 | Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat | | | | 1 Laporan | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1 | 03 | 12 | 1.02 | 0009 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Tersedianya Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi Ranperda RTRW Kab/Kota sesuai dengan ketentuan waktu yaitu 15 hari | | | | 1 Dokumen | 150.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1 | 03 | 12 | 1.03 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi | - | - | | | - | 100.000.000,00 | | | - | Pembangunan Wilayah | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 03 | 12 | 1.03 | 0003 | Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku | | | | 1 Layanan | 70.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1 | 03 | 12 | 1.03 | 0005 | Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah layanan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku | | | | 1 Layanan | 30.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1 | 03 | 12 | 1.04 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi<br>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi | - | | | 1 Dokumen | 900.000.000,00 | | | - | Pembangunan Wilayah | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 03 | 12 | 1.04 | 0003 | Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang | | | | 1 Kasus | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1 | 03 | 12 | 1.04 | 0004 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | | | | 1 Dokumen | 400.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1 | 03 | 12 | 1.04 | 0006 | Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat | | | | 1 Dokumen | 300.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1 | 03 | 12 | 1.04 | 0011 | Penilaian Perwujudan RTR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR | | | | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1 | 04 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| 232 | 1 | 04 | 05 | | | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Persentase Pemukiman yang terfasilitasi oleh PSU | 100% | | | 100 % | 0,00 | | | | | | 25% | 0,00 | |
| | 1 | 04 | 05 | 1.01 | | Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman | Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU | - | | | 0,4,0 Dokumen, Lokasi, Laporan | 0,00 | | | - | Pembangunan Wilayah | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 04 | 05 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman | | | | 1 Laporan | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1 | 04 | 05 | 1.01 | 0004 | Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari Pengembang | | | | 7 Laporan | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1 | 04 | 05 | 1.01 | 0005 | Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 650.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 2 | 10 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | | | | | | 650.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| 233 | 2 | 10 | 03 | | | PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM | Presentase Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum | 50% | | | 30 % | 50.000.000,00 | | | | | | 40% | 0,00 | |
| | 2 | 10 | 03 | 1.01 | | Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi | Jumlah Dokumen Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi | - | | | 1 | 50.000.000,00 | | | - | Pembangunan Wilayah | - | - | 0,00 | |
| | 2 | 10 | 03 | 1.01 | 0001 | Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| 234 | 2 | 10 | 04 | | | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan | 30% | | | 20 % | 50.000.000,00 | | | | | | 25% | 0,00 | |
| | 2 | 10 | 04 | 1.01 | | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | - | | | 1 | 50.000.000,00 | | | - | Pembangunan Wilayah | - | - | 0,00 | |
| | 2 | 10 | 04 | 1.01 | 0001 | Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| 235 | 2 | 10 | 05 | | | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan | 100% | | | 30 % | 550.000.000,00 | | | | | | 90% | 0,00 | |
| | 2 | 10 | 05 | 1.01 | | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | - | | | 1 | 550.000.000,00 | | | - | Pembangunan Wilayah | - | - | 0,00 | |
| | 2 | 10 | 05 | 1.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 2 | 10 | 05 | 1.01 | 0002 | Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan | | | | 1 Laporan | 500.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 133.769.228.306,00 | | | | | | | 34.540.146.414,00 | |
| | 1 | - | | | | - | | | | | | 22.079.673.675,00 | | | | | | | 2,00 | |
| 236 | 1 | - | 10 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Persentase jalan dalam kondisi mantap | 92.83% | | | 91.07 % | 22.079.673.675,00 | | | | | | 91.89% | 2,00 | |
| | 1 | - | 10 | 1.01 | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | Persentase jalan dalam kondisi mantap hasil dari kegiatan pelebaran dan peningkatan jalan<br>Persentase jalan dalam kondisi mantap hasil pemeiharaan Jalan<br>Persentase jembatan dalam kondisi baik hasil pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan | - | | | 0.182<br>99.82<br>80 | 22.079.673.675,00 | | | - | Pembangunan Wilayah | - | - | 2,00 | |
| | 1 | - | 10 | 1.01 | 0026 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin | | | | 3437.86 M | 3.183.305.757,00 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 1,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1 | - | 10 | 1.01 | 0030 | Rehabilitasi Jalan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Panjang Jalan yang Direhabilitasi | | | | 0.5 KM | 8.897.201.300,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1 | - | 10 | 1.01 | 0040 | Pelebaran Jalan Menuju Standar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar | | | | 1.55 KM | 9.999.166.618,00 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 1,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | - | | | | | - | | | | | | 62.634.260.259,00 | | | | | | | 1.277.000.001,00 | |
| | - | 03 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | | 34.564.260.259,00 | | | | | | | 1.277.000.001,00 | |
| 237 | - | 03 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai Sakip PD (Dinas PUPR PRKP)<br>Survey Kepuasan Pelayanan Internal (Dinas PUPR PRKP) | 81Nilai<br>82Nilai | | | 79 Nilai<br>80 Nilai | 4.026.000.000,00 | | | | | | 80Nilai<br>80Nilai | 977.000.001,00 | |
| | - | 03 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dianalisis | - | | | 16 Dokumen | 950.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 0,00 | |
| | - | 03 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 7 Dokumen | 400.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | - | 03 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 9 Laporan | 550.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | - | 03 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Survey Kepuasan Pelayanan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan | - | | | 80 | 884.000.000,00 | | | - | Pembangunan Wilayah | - | - | 0,00 | |
| | - | 03 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 50.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | - | 03 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | - | 03 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | - | 03 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 30.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | - | 03 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 30.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | - | 03 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 24.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | - | 03 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 12 Laporan | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | - | 03 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 450.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | - | 03 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Survey Kepuasan Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah<br>Survey Kepuasan Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | 80 % | 650.000.000,00 | | | - | Pembangunan Wilayah | - | - | 500.000.001,00 | |
| | - | 03 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 1 Paket | 350.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 1,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | - | 03 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 15 Unit | 300.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | - | 03 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Survey Kepuasan Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | 80 | 442.000.000,00 | | | - | Pembangunan Wilayah | - | - | 477.000.000,00 | |
| | - | 03 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 50.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 120.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | - | 03 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 392.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 357.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | - | 03 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Survey Kepuasan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | 80 | 1.100.000.000,00 | | | - | Pembangunan Wilayah | - | - | 0,00 | |
| | - | 03 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | | | | 21 Unit | 375.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | - | 03 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 30 Unit | 175.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | - | 03 | 01 | 1.09 | 0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | | | | 2 Unit | 200.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | - | 03 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 350.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| 238 | - | 03 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | - Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air | 100% | | | 64,74 %<br>2,74 % | 26.961.205.840,00 | | | | | | 80,52% | 300.000.000,00 | |
| | - | 03 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase penurunan luas kawasan yang terdampak daya rusak air di WS Kewenangan Provinsi | - | | | 0,6 % | 16.524.778.300,00 | | | - | - | - | - | 300.000.000,00 | |
| | - | 03 | 02 | 1.01 | 0009 | Pembangunan Tanggul Sungai | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun | | | | 0.15 KM | 791.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | - | 03 | 02 | 1.01 | 0079 | Normalisasi/Restorasi Sungai | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi | | | | 1.3 KM | 1.572.125.400,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | - | 03 | 02 | 1.01 | 0089 | Pembangunan Polder/Kolam Retensi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun | | | | 1 Unit | 2.400.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | - | 03 | 02 | 1.01 | 0101 | Operasi dan Pemeliharaan Sungai | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara | | | | 10.5 KM | 3.981.652.900,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | - | 03 | 02 | 1.01 | 0119 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun | | | | 0 Dokumen | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | - | 03 | 02 | 1.01 | 0120 | Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun | | | | 2 Unit | 6.380.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Keretak | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | - | 03 | 02 | 1.01 | 0121 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun | | | | 2 Dokumen | 500.000.000,00 | Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Bangka, Mendo Barat, Kemuja | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | - | 03 | 02 | 1.01 | 0122 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun | | | | 1 Dokumen | 900.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 300.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | - | 03 | 02 | 1.02 | | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | luas daerah irigasi kewengan provinsi dengan sistem irigasi primer dan sekunder yang dikembangkan dan dikelola | - | | | 540 Ha | 10.436.427.540,00 | | | - | Pembangunan Wilayah | - | - | 0,00 | |
| | - | 03 | 02 | 1.02 | 0008 | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan | | | | 4 KM | 6.684.763.980,00 | Kab. Bangka, Mendo Barat, Kemuja<br>Kab. Bangka Selatan, Toboali, Kepoh<br>Kab. Bangka Barat, Kelapa, Kelapa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | - | 03 | 02 | 1.02 | 0016 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi | | | | 5 KM | 2.370.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Toboali, Serdang<br>Kab. Bangka Selatan, Air Gegas, Pergam | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | - | 03 | 02 | 1.02 | 0021 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara | | | | 3 KM | 282.392.360,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Bangka, Merawang, Kimak<br>Kab. Bangka Selatan, Toboali, Kepoh<br>Kab. Bangka Barat, Kelapa, Kelapa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | - | 03 | 02 | 1.02 | 0023 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara | | | | 3 KM | 249.271.200,00 | Kab. Bangka Selatan, Toboali, Serdang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | - | 03 | 02 | 1.02 | 0032 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun | | | | 1 Dokumen | 500.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Toboali, Bikang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | - | 03 | 02 | 1.02 | 0034 | Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi | | | | 1 Lembaga | 350.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| 239 | - | 03 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak<br>Persentase Penyelenggaraan Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi<br>Persentase Readiness Criteria pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum | 100%<br>100%<br>0.829% | | | 0 %<br>28 %<br>25 % | 100.000.000,00 | | | | | | 25%<br>29%<br>0.237% | 0,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | - | 03 | 03 | 1.01 | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | Jumlah debit pelayanan SPAM<br>jumlah dokumen perencanaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun<br>Jumlah Penyelenggaraan Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi | - | | | 0 liter/detik<br>2 Dokumen<br>2 Penyelenggaraan | 100.000.000,00 | | | - | Pembangunan Wilayah | - | - | 0,00 | |
| | - | 03 | 03 | 1.01 | 0016 | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | | | | 2 Orang | 100.000.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| 240 | - | 03 | 04 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | Persentase Readiness Criteria pembangunan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional yang disiapkan<br>Persentase rumah tangga yang terlayani pengelolaan sampah | 10%<br>100% | | | 25 %<br>0 % | 75.000.000,00 | | | | | | 0%<br>25% | 0,00 | |
| | - | 03 | 04 | 1.01 | | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional | jumlah dokumen perencanaan pembangunan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan yang disusun<br>Jumlah infrastruktur persampahan yang tersedia<br>Jumlah penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan | - | | | 0 Dokumen<br>0 Unit<br>2 Penyelenggaraan | 75.000.000,00 | | | - | Pembangunan Wilayah | - | - | 0,00 | |
| | - | 03 | 04 | 1.01 | 0014 | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan | | | | 2 Orang | 75.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| 241 | - | 03 | 05 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Persentase rumah tangga yang besanitasi<br>Persentase Readiness Criteria pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah yang disiapkan | 27%<br>6% | | | 6 %<br>18 % | 400.000.000,00 | | | | | | 27%<br>6% | 0,00 | |
| | - | 03 | 05 | 1.01 | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional | jumlah dokumen perencanaan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah yang disusun<br>Jumlah KK yang terlayani prasarana sistem air limbah | - | | | 1 Dokumen<br>140 KK | 400.000.000,00 | | | - | Pembangunan Wilayah | - | - | 0,00 | |
| | - | 03 | 05 | 1.01 | 0015 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun | | | | 1 Dokumen | 400.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| 242 | - | 03 | 06 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Persentase Readiness Criteria pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang disiapkan | 0% | | | 25 % | 100.000.000,00 | | | | | | 50% | 0,00 | |
| | - | 03 | 06 | 1.01 | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi | jumlah dokumen perencanaan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang disusun | - | | | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | | | - | Pembangunan Wilayah | - | - | 0,00 | |
| | - | 03 | 06 | 1.01 | 0012 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun | | | | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| 243 | - | 03 | 08 | | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Persentase Readiness Criteria bangunan gedung yang disiapkan Persentase jumlah bangunan gedung yang terselenggara | 100% 100% | | | 100 % 100 % | 370.000.000,00 | | | | | | 100% 100% | 0,00 | |
| | - | 03 | 08 | 1.01 | | Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | Jumlah Bangunan Gedung Strategi Provinsi yang diselenggarakan Jumlah Perencanaan Bangunan Gedung Strategi Provinsi yang disiapkan | - | | | 1 Unit 1 Dok | 370.000.000,00 | | | - | Pembangunan Wilayah | - | - | 0,00 | |
| | - | 03 | 08 | 1.01 | 0013 | Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Rumah Negara yang Dikelola | | | | 1 Rumah Negara | 50.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | - | 03 | 08 | 1.01 | 0015 | Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo) | | | | 10 Bangunan Gedung Negara | 50.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | - | 03 | 08 | 1.01 | 0018 | Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara | | | | 7 Kabupaten/Kota | 220.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | - | 03 | 08 | 1.01 | 0021 | Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Mendapatkan Kompensasi, Insentif dan Disinsentif | | | | 1 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| 244 | - | 03 | 09 | | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | Persentase Luas kawasan yang tertata | 100% | | | 22 % | 2.532.054.419,00 | | | | | | 100% | 0,00 | |
| | - | 03 | 09 | 1.01 | | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Luas Kawasan yang ditata Bangunan dan Lingkungannya | - | | | 5 Ha | 2.532.054.419,00 | | | - | Pembangunan Wilayah | - | - | 0,00 | |
| | - | 03 | 09 | 1.01 | 0008 | Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata | | | | 3 Kawasan | 1.932.054.419,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | - | 03 | 09 | 1.01 | 0009 | Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun | | | | 1 Dokumen | 500.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | - | 03 | 09 | 1.01 | 0011 | Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | - | 03 | 09 | 1.01 | 0012 | Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan | | | | 1 kabupaten/kota | 50.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | - | 04 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | 28.070.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 245 | - | 04 | 02 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Persentase ketersediaan Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi<br>Persentasi Pengembangan perumahan korban Bencana atau relokasi program provinsi<br>Persentase penyelenggaraan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | 20%<br>100%<br>25% | | | 100 %<br>0 %<br>100 % | 350.000.000,00 | | | | | | 27%<br>100%<br>25% | 0,00 | |
| | - | 04 | 02 | 1.01 | | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | - | | | 3 Dokoumen | 250.000.000,00 | | | - | Pembangunan Wilayah | - | - | 0,00 | |
| | - | 04 | 02 | 1.01 | 0006 | Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus | | | | 1 Dokumen | 75.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | - | 04 | 02 | 1.01 | 0009 | Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Provinsi Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | - | 04 | 02 | 1.01 | 0010 | Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Wilayah | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | - | 04 | 02 | 1.01 | 0011 | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi | | | | 1 Dokumen | 75.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | - | 04 | 02 | 1.02 | | Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | Jumlah penyelenggaraan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | - | | | 1 Penyelenggaraan | 100.000.000,00 | | | - | Pembangunan Wilayah | - | - | 0,00 | |
| | - | 04 | 02 | 1.02 | 0001 | Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana | | | | 50 Orang | 100.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| 246 | - | 04 | 03 | | | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | Persentase luasan kawasan kumuh yang tertangani<br>Persentase Kawasan Kumuh yang sudah direncanakan | 31%<br>6% | | | 6 %<br>23 % | 22.975.000.000,00 | | | | | | 23%<br>6% | 0,00 | |
| | - | 04 | 03 | 1.01 | | Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | Jumlah instrumen penyelenggaraan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh | - | | | 1 Dokoumen,laporan,rumah,Ha | 425.000.000,00 | | | - | Pembangunan Wilayah | - | - | 0,00 | |
| | - | 04 | 03 | 1.01 | 0008 | Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi | | | | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | - | 04 | 03 | 1.01 | 0017 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman | | | | 2 Laporan | 325.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | - | 04 | 03 | 1.02 | | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | Nilai kekumuhan | - | | | 30 Nilai | 22.550.000.000,00 | | | - | Pembangunan Wilayah | - | - | 0,00 | |
| | - | 04 | 03 | 1.02 | 0003 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki | | | | 170 Unit Rumah | 14.640.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | - | 04 | 03 | 1.02 | 0009 | Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | | | | 170 Rumah Tangga | 100.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | - | 04 | 03 | 1.02 | 0013 | Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan | | | | 20 Hektar | 7.310.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | - | 04 | 03 | 1.02 | 0014 | Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar | | | | 5 Ha | 500.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| 247 | - | 04 | 05 | | | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Persentase Pemukiman yang terfasilitasi oleh PSU | 100% | | | 100 % | 4.695.000.000,00 | | | | | | 25% | 0,00 | |
| | - | 04 | 05 | 1.01 | | Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman | Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU | - | | | 0,4,0 Dokumen, Lokasi, Laporan | 4.695.000.000,00 | | | - | Pembangunan Wilayah | - | - | 0,00 | |
| | - | 04 | 05 | 1.01 | 0001 | Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman | | | | 4 Dokumen | 350.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | - | 04 | 05 | 1.01 | 0002 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman | | | | 4 Lokasi | 4.345.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| 248 | - | 04 | 06 | | | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Persentase layanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman tingkat kemampuan menengah yang ditingkatkan | 25% | | | 100 % | 50.000.000,00 | | | | | | 25% | 0,00 | |
| | - | 04 | 06 | 1.01 | | Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah | Jumlah Orang/Badan Hukum yang disertifikasi/diregistrasi yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah | - | | | 20 orang/badan hukum | 50.000.000,00 | | | - | Pembangunan Wilayah | - | - | 0,00 | |
| | - | 04 | 06 | 1.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah | | | | 1 Laporan | 50.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN |
| | | | | | | UPT PENGAWASAN DAN PERALATAN PUPR | | | | | | 600.000.000,00 | | | | | | | 648.500.000,00 | |
| | X | | | | | NON URUSAN | | | | | | 600.000.000,00 | | | | | | | 648.500.000,00 | |
| | X | XX | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX | | | | | | 600.000.000,00 | | | | | | | 648.500.000,00 | |
| 249 | X | XX | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai Sakip PD (Dinas PUPR PRKP)<br>Survey Kepuasan Pelayanan Internal (Dinas PUPR PRKP)<br>Survey Kepuasan Internal | 81Nilai<br>82Nilai | | | 79 Nilai<br>80 Nilai<br>80 Nilai | 600.000.000,00 | | | | | | 80Nilai<br>80Nilai | 648.500.000,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Survey Kepuasan Pelayanan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan<br>Survey Kepuasan Pelayanan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan | - | | | 80 Nilai | 245.000.000,00 | | | - | Pembangunan Wilayah | - | - | 270.000.000,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 10 Paket | 25.000.000,00 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 30.000.000,00 | UPT PENGAWASAN DAN PERALATAN PUPR |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 8 Paket | 50.000.000,00 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 50.000.000,00 | UPT PENGAWASAN DAN PERALATAN PUPR |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 24 Laporan | 80.000.000,00 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 90.000.000,00 | UPT PENGAWASAN DAN PERALATAN PUPR |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 36 Laporan | 90.000.000,00 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 100.000.000,00 | UPT PENGAWASAN DAN PERALATAN PUPR |
| | X | XX | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Survey Kepuasan Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | 80 Nilai | 143.000.000,00 | | | - | Pembangunan Wilayah | - | - | 153.500.000,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 36 Laporan | 3.000.000,00 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 3.500.000,00 | UPT PENGAWASAN DAN PERALATAN PUPR |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | X | XX | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 24 Laporan | 140.000.000,00 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 150.000.000,00 | UPT PENGAWASAN DAN PERALATAN PUPR |
| | X | XX | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Survey Kepuasan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | 80 Nilai | 212.000.000,00 | | | - | Pembangunan Wilayah | - | - | 225.000.000,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 5 Unit | 105.000.000,00 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 110.000.000,00 | UPT PENGAWASAN DAN PERALATAN PUPR |
| | X | XX | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 20 Unit | 35.000.000,00 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 40.000.000,00 | UPT PENGAWASAN DAN PERALATAN PUPR |
| | X | XX | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 72.000.000,00 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Wilayah | - | | 75.000.000,00 | UPT PENGAWASAN DAN PERALATAN PUPR |
| | | | | | | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | | | | | | 26.430.519.520,00 | | | | | | | 25.677.450.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 26.430.519.520,00 | | | | | | | 25.677.450.000,00 | |
| | 1 | 05 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | 26.430.519.520,00 | | | | | | | 25.677.450.000,00 | |
| 250 | 1 | 05 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 81Nilai<br>81NIlai | | | - | 15.104.569.520,00 | | | | | | 80Nilai<br>81NIlai | 14.751.550.000,00 | |
| | 1 | 05 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 380.000.000,00 | | | - | Pembangunan Demokrasi | - | - | 265.000.000,00 | |
| | 1 | 05 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 5 Dokumen | 170.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 180.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1 | 05 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 33 Dokumen | 90.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 30.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1 | 05 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 5 Laporan | 120.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 55.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1 | 05 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 11.731.500.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 11.915.750.000,00 | |
| | 1 | 05 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 78 Orang/ Bulan | 11.670.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 11.900.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1 | 05 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 60 Dokumen | 6.500.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 7.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1 | 05 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | 2 Dokumen | 5.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 5.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1 | 05 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 13 Laporan | 50.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 3.750.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1 | 05 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | - | | | - | 3.500.000,00 | | | - | Pembangunan Demokrasi | - | - | 4.000.000,00 | |
| | 1 | 05 | 01 | 1.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 2 Dokumen | 3.500.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 4.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1 | 05 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 207.500.000,00 | | | - | Pembangunan Demokrasi | - | - | 510.000.000,00 | |
| | 1 | 05 | 01 | 1.05 | 0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | 2 Unit | 10.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 10.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1 | 05 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | | | | 252 Paket | 97.500.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 450.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1 | 05 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 10 Orang | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 50.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1 | 05 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 443.300.000,00 | | | - | Pembangunan Demokrasi | - | - | 345.500.000,00 | |
| | 1 | 05 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 15.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 12.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1 | 05 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 3.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1 | 05 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 2 Paket | 19.500.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 19.500.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1 | 05 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 17.800.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 18.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1 | 05 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 18.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 18.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1 | 05 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 4 Paket | 81.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 82.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1 | 05 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 10 Laporan | 14.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 16.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1 | 05 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 36 Laporan | 275.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 180.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1 | 05 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 1.025.569.520,00 | | | - | Pembangunan Demokrasi | - | - | 560.000.000,00 | |
| | 1 | 05 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 18 Unit | 150.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 60.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1 | 05 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 2 Unit | 375.569.520,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1 | 05 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 5 Unit | 500.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 500.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1 | 05 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 646.200.000,00 | | | - | Pembangunan Demokrasi | - | - | 586.300.000,00 | |
| | 1 | 05 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 3.800.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 3.900.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1 | 05 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 36 Laporan | 180.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 130.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1 | 05 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 10.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1 | 05 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 452.400.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 452.400.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1 | 05 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 667.000.000,00 | | | - | Pembangunan Demokrasi | - | - | 565.000.000,00 | |
| | 1 | 05 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | | | | 18 Unit | 540.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 500.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1 | 05 | 01 | 1.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | | | | 1 Unit | 2.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1 | 05 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 40 Unit | 40.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 40.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1 | 05 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 5 Unit | 85.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 25.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 85.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 25.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 251 | 1 | 05 | 02 | | | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase anggota satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan<br>Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan<br>Persentase perda dan perkada yang ditegakkan<br>Persentase personil Satpol PP yang berkompeten | 50%<br>100%<br>86,5%<br>40,8% | | | 31,14 %<br>100 %<br>39,3 %<br>81,1 % | 9.756.500.000,00 | | | | | | 42,9%<br>100%<br>83,8%<br>35,94% | 9.632.200.000,00 | |
| | 1 | 05 | 02 | 1.01 | | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah anggota satlinmas yang ditingkatkan kapasitasnya<br>Jumlah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui patroli, pengamanan, penertiban dan pengawalan berjalan lancar<br>Jumlah penyelenggaraan pembinaan, deteksi dini dan cegah dini yang digunakan dalam pencegahan gangguan tibumtranmas<br>umlah SDM Satpol PP yang berkompeten | - | | | 200 orang<br>604 kali<br>12 kali<br>60 orang | 9.106.500.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | masyarakat, PNS | - | 9.332.200.000,00 | |
| | 1 | 05 | 02 | 1.01 | 0008 | Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan | | | | 2 Dokumen | 50.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | masyarakat, PNS | | 50.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1 | 05 | 02 | 1.01 | 0013 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang Tersedia | | | | 10 Unit | 730.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | masyarakat, PNS | | 442.200.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1 | 05 | 02 | 1.01 | 0014 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi | | | | 1 Dokumen | 170.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | masyarakat, PNS | | 65.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1 | 05 | 02 | 1.01 | 0015 | Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada | | | | 3 Laporan | 30.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | masyarakat, PNS | | 30.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1 | 05 | 02 | 1.01 | 0016 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | 1 Laporan | 250.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | masyarakat, PNS | | 120.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1 | 05 | 02 | 1.01 | 0017 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan | | | | 500 laporan | 7.581.500.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | masyarakat, PNS | | 8.370.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1 | 05 | 02 | 1.01 | 0018 | Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja | | | | 190 Orang | 225.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | masyarakat, PNS | | 180.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1 | 05 | 02 | 1.01 | 0019 | Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan | | | | 28 Laporan | 70.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | masyarakat, PNS | | 75.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1 | 05 | 02 | 1.02 | | Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur | - | - | | | - | 465.000.000,00 | | | - | Pembangunan Demokrasi | - | - | 300.000.000,00 | |
| | 1 | 05 | 02 | 1.02 | 0001 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | | | | 1 Laporan | 140.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 110.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1 | 05 | 02 | 1.02 | 0002 | Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | | | | 1 Laporan | 150.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 130.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1 | 05 | 02 | 1.02 | 0009 | Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda | | | | 1 Dokuman | 175.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 60.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1 | 05 | 02 | 1.03 | | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi | - | - | | | - | 185.000.000,00 | | | - | Pembangunan Demokrasi | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 05 | 02 | 1.03 | 0001 | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda | | | | 1 Laporan | 185.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 252 | 1 | 05 | 04 | | | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | - | 78,5% | | | - | 1.569.450.000,00 | | | | | | 70% | 1.293.700.000,00 | |
| | 1 | 05 | 04 | 1.01 | | Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran | - | - | | | - | 1.484.450.000,00 | | | - | Pembangunan Demokrasi | - | - | 1.243.700.000,00 | |
| | 1 | 05 | 04 | 1.01 | 0004 | Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan | | | | 7 Dokumen | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 70.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1 | 05 | 04 | 1.01 | 0006 | Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara Berkala, Sah dan Legal | | | | 1 Dokumen | 90.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1 | 05 | 04 | 1.01 | 0009 | Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota) | | | | 60 Orang | 200.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 160.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1 | 05 | 04 | 1.01 | 0023 | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota | | | | 12 Laporan | 960.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 960.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1 | 05 | 04 | 1.01 | 0027 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait | | | | 15 Unit | 134.450.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 53.700.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1 | 05 | 04 | 1.02 | | Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | - | - | | | - | 85.000.000,00 | | | - | Pembangunan Demokrasi | - | - | 50.000.000,00 | |
| | 1 | 05 | 04 | 1.02 | 0004 | Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | | | | 1 Laporan | 85.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 50.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | | | | | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | | | | | | 18.552.991.853,00 | | | | | | | 27.067.466.693,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 18.552.991.853,00 | | | | | | | 27.067.466.693,00 | |
| | 1 | 05 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | 18.552.991.853,00 | | | | | | | 27.067.466.693,00 | |
| 253 | 1 | 05 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (BPBD)<br>Nilai SAKIP Perangkat Daerah (BPBD) | 76%<br>82.90Nilai | | | 82.86 Nilai<br>75.50 % | 13.122.264.512,00 | | | | | | 75.75%<br>82.88Nilai | 20.016.813.443,00 | |
| | 1 | 05 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | 23 Dokumen | 260.628.900,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 333.506.250,00 | |
| | 1 | 05 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 2 Dokumen | 180.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 220.500.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 2 Dokumen | 2.483.400,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 2.756.250,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 2 Dokumen | 2.483.700,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 2.756.250,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 2 Dokumen | 2.478.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 2.756.250,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 2 Dokumen | 2.499.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 2.756.250,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 2 Laporan | 2.433.400,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 2.756.250,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 7 Laporan | 68.250.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 99.225.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Pelayanan Keuangan | - | | | 82.85 Nilai | 7.861.435.269,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 8.256.607.032,00 | |
| | 1 | 05 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 60 Orang/ Bulan | 7.779.435.269,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 8.168.407.032,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 210 Dokumen | 16.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 16.537.500,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 01 | 1.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | 12 Dokumen | 16.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 16.537.500,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 05 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 1 Laporan | 25.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 27.562.500,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 12 Laporan | 25.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 27.562.500,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | 82.85 Nilai | 13.500.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 05 | 01 | 1.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | 1 Dokumen | 13.500.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 0 Orang | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | 80.55 Nilai | 564.926.525,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 651.302.150,00 | |
| | 1 | 05 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 47.241.075,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 49.603.129,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 89.043.300,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 98.170.672,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 28.894.400,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 31.972.500,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 24.966.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 27.558.551,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 19.996.200,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 22.049.938,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 4 Dokumen | 7.539.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 7.915.950,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 1 Paket | 46.426.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 98.170.672,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 4 Laporan | 40.320.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 42.336.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 260.499.750,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 273.524.738,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan | - | | | 4 Unit | 1.143.527.273,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 6.004.337.500,00 | |
| | 1 | 05 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 169.050.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 85.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 01 | 1.07 | 0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 600.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 3.300.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 22.727.273,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 2.250.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 8 Unit | 351.750.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 369.337.500,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | 4 Jasa | 1.587.190.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 1.838.749.500,00 | |
| | 1 | 05 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 18.375.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 19.293.750,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 125.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 198.450.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Laporan | 197.925.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 207.821.250,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 1.245.890.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 1.413.184.500,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | - | | | 103 Unit | 1.691.056.545,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 2.932.311.011,00 | |
| | 1 | 05 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | | | | 3 Unit | 67.725.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 71.111.250,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 38 Unit | 941.551.275,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 988.628.839,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 01 | 1.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | | | | 5 Unit | 13.125.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 13.781.250,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 61 Unit | 393.414.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 688.084.700,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 01 | 1.09 | 0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | | | | 41 Unit | 113.130.195,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 1.000.488.343,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 162.111.075,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 170.216.629,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 254 | 1 | 05 | 03 | | | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Persentase Penanganan Pasca Bencana<br>Persentase Penanganan Pra Bencana<br>Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana | 100%<br>85,7%<br>100% | | | 71,5 %<br>100 %<br>100 % | 5.430.727.341,00 | | | | | | 100%<br>85,7%<br>100% | 7.050.653.250,00 | |
| | 1 | 05 | 03 | 1.01 | | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi | Jumlah daerah rawan bencana yang mendapatkan pelayanan informasi Rawan Bencana per jenis bencana | - | | | 7 Daerah | 225.000.000,00 | | | - | Pembangunan Wilayah | - | - | 441.000.000,00 | |
| | 1 | 05 | 03 | 1.01 | 0002 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota | | | | 100 Orang | 225.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Wilayah | - | | 441.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 03 | 1.02 | | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah dokumen kebencanaan yang tersedia<br>Jumlah jenis peralatan yang disediakan<br>Jumlah kegiatan pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana provinsi dan kabupaten/kota<br>Jumlah kegiatan pengendalian operasi | - | | | 1 Dokumen<br>6 Jenis<br>2 Kegiatan<br>4 Kegiatan | 4.174.442.941,00 | | | - | Pembangunan Wilayah | - | - | 4.889.340.750,00 | |
| | 1 | 05 | 03 | 1.02 | 0014 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana | | | | 17 Dokumen | 3.320.266.200,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Wilayah | - | | 3.598.890.750,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 03 | 1.02 | 0015 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana | | | | 70 Orang | 125.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Wilayah | - | | 275.625.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 03 | 1.02 | 0016 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana | | | | 60 Orang | 270.926.741,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Wilayah | - | | 529.200.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 03 | 1.02 | 0019 | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana | | | | 1 Orang | 188.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Wilayah | - | | 275.625.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 03 | 1.02 | 0021 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana | | | | 3 Unit | 270.250.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Wilayah | - | | 210.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 03 | 1.03 | | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Jumlah Jenis logistik yang disediakan<br>Jumlah Kegiatan Penanganan Korban Bencana Alam | - | | | 2 Jenis<br>6 Kegiatan | 627.287.000,00 | | | - | Pembangunan Wilayah | - | - | 975.487.500,00 | |
| | 1 | 05 | 03 | 1.03 | 0003 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana | | | | 15 Laporan | 304.288.200,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Wilayah | - | | 435.487.500,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 03 | 1.03 | 0004 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | | | 220 Orang | 322.998.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Wilayah | - | | 540.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 03 | 1.04 | | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Jumlah kab/kota yang menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah<br>Jumlah kajian penanganan pasca bencana yang disusun | - | | | 7 Kab/Kota<br>2 Kajian | 403.997.400,00 | | | - | Pembangunan Wilayah | - | - | 744.825.000,00 | |
| | 1 | 05 | 03 | 1.04 | 0007 | Penanganan Pasca Bencana Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun | | | | 2 Dokumen | 167.999.700,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Wilayah | - | | 302.500.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 03 | 1.04 | 0017 | Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) | | | | 7 Dokumen | 137.999.700,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Wilayah | - | | 242.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 03 | 1.04 | 0019 | Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana) | | | | 1 Dokumen | 13.998.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Wilayah | - | | 55.125.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 03 | 1.04 | 0020 | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota | | | | 5 kabupaten/kota | 84.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Wilayah | - | | 145.200.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | | | | | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | | | | | | 44.598.895.981,00 | | | | | | | 54.982.531.164,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 11.593.087.319,00 | | | | | | | 14.174.110.976,00 | |
| | 1 | 06 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | | | 11.593.087.319,00 | | | | | | | 14.174.110.976,00 | |
| 255 | 1 | 06 | 02 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Persentase PMKS/PSKS yg terberdayakan | 100% | | | 100 % | 2.656.348.600,00 | | | | | | 100% | 2.190.645.755,00 | |
| | 1 | 06 | 02 | 1.01 | | Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Penyelenggara Dunia Usaha / lembaga / masyarakat yang diterbitkan Izin dan berpartispasi menyelenggarakan Pengumpulan Uang/Barang dan Undian Gratis berhadiah sesuai dengan aturan yang berlaku. | - | | | 1 dokumen | 100.000.000,00 | | | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | - | 225.491.975,00 | |
| | 1 | 06 | 02 | 1.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | | | | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 225.491.975,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 1 | 06 | 02 | 1.02 | | Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi | Jumlah PSKS yang diberdayakan | - | | | 453 orang | 2.556.348.600,00 | | | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | - | 1.965.153.780,00 | |
| | 1 | 06 | 02 | 1.02 | 0001 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi | | | | 408 Orang | 1.468.677.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 867.220.603,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 1 | 06 | 02 | 1.02 | 0002 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya | | | | 47 Orang | 308.197.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 463.987.003,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 1 | 06 | 02 | 1.02 | 0003 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi | | | | 70 Keluarga | 307.500.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 216.456.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 1 | 06 | 02 | 1.02 | 0004 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi | | | | 150 Lembaga | 471.973.600,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 417.490.174,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| 256 | 1 | 06 | 03 | | | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang di ditangani | 100% | | | 23,81 % | 50.000.000,00 | | | | | | 28,57% | 115.145.000,00 | |
| | 1 | 06 | 03 | 1.01 | | Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal | Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi yang dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal | - | | | 15 orang | 50.000.000,00 | | | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | - | 115.145.000,00 | |
| | 1 | 06 | 03 | 1.01 | 0001 | Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota | | | | 15 Orang | 50.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 115.145.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| 257 | 1 | 06 | 04 | | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase PMKS yang di Rehabilitasi sosial di Dalam Panti | 100%<br>100%<br>100% | | | 22,58 % | 2.699.182.017,00 | | | | | | 28,57%<br>27,00%<br>30,00% | 2.479.898.109,00 | |
| | 1 | 06 | 04 | 1.01 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti | Jumlah penyandang disabilitas yang direhab sosial di Dalam Panti | - | | | 24 orang | 478.000.400,00 | | | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | - | 385.589.642,00 | |
| | 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0001 | Penyediaan Permakanan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | | | | 24 Orang | 27.020.400,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 45.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0002 | Penyediaan Sandang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | | | | 15 Orang | 18.438.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 32.681.250,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0003 | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | | | | 6 Orang | 7.562.200,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 35.356.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0004 | Penyediaan Alat Bantu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi | | | | 16 Orang | 20.041.500,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 14.017.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0005 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi | | | | 20 Orang | 14.178.300,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 9.274.880,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0006 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | | | | 165 Orang | 228.376.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 101.973.512,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0007 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi | | | | 24 Orang | 52.928.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 13.360.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0008 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi | | | | 6 Orang | 7.781.400,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 20.489.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0009 | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | | | | 5 Orang | 22.486.500,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 21.733.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0010 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi | | | | 5 Orang | 20.820.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 21.733.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0011 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | | | | 5 Orang | 11.031.500,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 21.733.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0012 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar | | | | 1 Dokumen | 47.336.600,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 48.239.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 1 | 06 | 04 | 1.02 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti | Jumlah anak terlantar yang direhab sosial di Dalam Panti | - | | | 200 orang | 808.024.500,00 | | | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | - | 466.038.395,00 | |
| | 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0001 | Pengasuhan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi | | | | 30 Orang | 132.419.800,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 93.026.400,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Makanan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | | | | 80 Orang | 136.005.200,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 52.836.760,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0003 | Penyediaan Sandang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | | | | 200 Orang | 89.380.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 57.129.035,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0004 | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | | | | 50 Orang | 139.105.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 72.015.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0005 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi | | | | 20 Orang | 31.543.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 41.249.200,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0006 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | | | | 150 Orang | 130.534.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 17.610.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0007 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi | | | | 100 Orang | 22.800.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 11.695.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0008 | Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi | | | | 10 Orang | 10.375.200,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 19.337.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0009 | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | | | | 10 Orang | 14.750.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 11.940.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0010 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi | | | | 3 Orang | 15.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 19.091.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0011 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | | | | 75 Orang | 35.530.100,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 19.091.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0012 | Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi | | | | 3 Orang | 11.875.200,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 19.091.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0013 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | | | | 7 Dokumen | 38.707.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 31.927.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 1 | 06 | 04 | 1.03 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | Jumlah lanjut usia terlantar yang direhab sosial di Dalam Panti | - | | | 25 orang | 399.722.400,00 | | | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | - | 371.554.543,00 | |
| | 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0001 | Penyediaan Permakanan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | | | | 50 Orang | 21.213.200,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 63.210.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0002 | Penyediaan Sandang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | | | | 10 Orang | 20.019.700,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 29.997.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0003 | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | | | | 5 Orang | 9.592.600,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 44.195.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0004 | Penyediaan Alat Bantu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi | | | | 20 Orang | 12.491.100,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 22.793.650,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0005 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi | | | | 10 Orang | 12.468.900,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 3.049.541,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0006 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | | | | 165 Orang | 184.852.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 110.722.012,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0007 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi | | | | 25 Orang | 57.124.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 14.500.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0008 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi | | | | 3 Orang | 7.859.700,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 20.489.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0009 | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | | | | 3 Orang | 7.859.700,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 20.489.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0010 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi | | | | 5 Orang | 6.256.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 12.894.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0011 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | | | | 5 Orang | 6.268.900,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 12.894.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0012 | Pemulasaraan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi | | | | 4 Orang | 15.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 6.690.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0013 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi | | | | 1 Dokumen | 38.716.600,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 9.631.340,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 1 | 06 | 04 | 1.04 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti | Jumlah Gelandangan dan pengemis yang direhab sosial | - | | | 15 orang | 346.154.246,00 | | | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | - | 499.493.313,00 | |
| | 1 | 06 | 04 | 1.04 | 0001 | Penyediaan Permakanan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | | | | 15 Orang | 28.365.617,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 204.400.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 1 | 06 | 04 | 1.04 | 0002 | Penyediaan Sandang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | | | | 15 Orang | 8.950.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 2.800.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 1 | 06 | 04 | 1.04 | 0003 | Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi | | | | 15 Orang | 11.500.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 84.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 1 | 06 | 04 | 1.04 | 0004 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi | | | | 20 Orang | 3.105.360,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 4.200.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 1 | 06 | 04 | 1.04 | 0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | | | | 30 Orang | 35.100.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 3.920.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 1 | 06 | 04 | 1.04 | 0006 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi | | | | 30 Orang | 23.225.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 6.440.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 1 | 06 | 04 | 1.04 | 0007 | Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi | | | | 20 Orang | 59.845.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 19.600.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 1 | 06 | 04 | 1.04 | 0008 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Gelandangan bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi | | | | 2 Orang | 8.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 17.850.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 1 | 06 | 04 | 1.04 | 0009 | Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | | | | 2 Orang | 22.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 3.760.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 1 | 06 | 04 | 1.04 | 0010 | Pemulangan ke Daerah Asal | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi | | | | 10 Orang | 20.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 127.170.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 1 | 06 | 04 | 1.04 | 0011 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti | | | | 1 Dokumen | 126.063.269,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 25.353.313,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 1 | 06 | 04 | 1.05 | | Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang di rehab sosial | - | | | 20 orang | 667.280.471,00 | | | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | - | 757.222.216,00 | |
| | 1 | 06 | 04 | 1.05 | 0001 | Penyediaan Permakanan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | | | | 30 Orang | 19.999.205,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 125.250.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 1 | 06 | 04 | 1.05 | 0002 | Penyediaan Sandang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | | | | 25 Orang | 13.200.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 6.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 1 | 06 | 04 | 1.05 | 0003 | Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi | | | | 20 Orang | 11.081.500,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 108.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 1 | 06 | 04 | 1.05 | 0004 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi | | | | 20 Orang | 1.743.366,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 6.600.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 1 | 06 | 04 | 1.05 | 0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | | | | 65 Orang | 233.338.700,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 30.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 1 | 06 | 04 | 1.05 | 0006 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi | | | | 20 Orang | 32.100.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 13.800.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 1 | 06 | 04 | 1.05 | 0007 | Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi | | | | 20 Orang | 68.087.500,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 42.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 1 | 06 | 04 | 1.05 | 0008 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi | | | | 10 Orang | 11.979.600,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 19.125.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 1 | 06 | 04 | 1.05 | 0009 | Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | | | | 5 Orang | 43.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 3.900.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 1 | 06 | 04 | 1.05 | 0010 | Pemulangan ke Daerah Asal | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal | | | | 50 Orang | 50.135.900,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 234.351.762,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 1 | 06 | 04 | 1.05 | 0011 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA | | | | 1 Dokumen | 182.614.700,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 168.195.454,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| 258 | 1 | 06 | 05 | | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial | 100% | | | 25,28 % | 3.877.433.400,00 | | | | | | 23,70% | 6.334.874.008,00 | |
| | 1 | 06 | 05 | 1.01 | | Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal | Jumlah anak yang mendapatkan perlindungan sosial | - | | | 10 orang | 350.000.000,00 | | | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | - | 177.347.040,00 | |
| | 1 | 06 | 05 | 1.01 | 0001 | Pengangkatan Anak antar WNI | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi | | | | 8 Orang | 268.949.700,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 112.719.040,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 1 | 06 | 05 | 1.01 | 0002 | Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi | | | | 2 Orang | 81.050.300,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 64.628.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 1 | 06 | 05 | 1.02 | | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi | Jumlah data Fakir Miskin yang dikelola dengan baik | - | | | 379.304 keluarga | 3.527.433.400,00 | | | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | - | 6.157.526.968,00 | |
| | 1 | 06 | 05 | 1.02 | 0001 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi | | | | 15550 Keluarga | 1.746.588.700,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 4.970.931.400,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 1 | 06 | 05 | 1.02 | 0002 | Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota | | | | 379.304 Keluarga | 1.103.151.200,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 277.789.096,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 1 | 06 | 05 | 1.02 | 0003 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi | | | | 50 Orang | 677.693.500,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 908.806.472,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| 259 | 1 | 06 | 06 | | | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Persentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial | 100% | | | 25,15 % | 1.608.132.356,00 | | | | | | 25,15% | 2.236.036.783,00 | |
| | 1 | 06 | 06 | 1.01 | | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi | Jumlah korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial | - | | | 215 orang | 1.608.132.356,00 | | | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | - | 2.236.036.783,00 | |
| | 1 | 06 | 06 | 1.01 | 0001 | Penyediaan Permakanan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi | | | | 43 Orang | 728.713.356,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 675.780.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 1 | 06 | 06 | 1.01 | 0002 | Penyediaan Sandang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi | | | | 130 Orang | 57.693.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 700.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 1 | 06 | 06 | 1.01 | 0003 | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi | | | | 10 Unit | 130.486.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 72.602.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 1 | 06 | 06 | 1.01 | 0004 | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi | | | | 15 Orang | 62.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 78.300.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 1 | 06 | 06 | 1.01 | 0005 | Pelayanan Dukungan Psikososial | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi | | | | 25 Orang | 629.240.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 709.354.783,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| 260 | 1 | 06 | 07 | | | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Persentase TMP yang dikelola | 100% | | | 100 % | 701.990.946,00 | | | | | | 100% | 817.511.321,00 | |
| | 1 | 06 | 07 | 1.01 | | Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi | Jumlah TMP yang dikelola | - | | | 1 TMP | 701.990.946,00 | | | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | - | 817.511.321,00 | |
| | 1 | 06 | 07 | 1.01 | 0001 | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi | | | | 1 Dokumen | 75.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Dul | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 150.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 1 | 06 | 07 | 1.01 | 0002 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi | | | | 85 Makam | 626.990.946,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Dul | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 667.511.321,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 5.150.547.616,00 | | | | | | | 6.584.593.753,00 | |
| | 2 | 13 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | | | 5.150.547.616,00 | | | | | | | 6.584.593.753,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 261 | 2 | 13 | 02 | | | PROGRAM PENATAAN DESA | Persentase Penataan Desa yang dibina | 100% | | | 25 % | 250.000.000,00 | | | | | | 25% | 331.334.000,00 | |
| | 2 | 13 | 02 | 1.01 | | Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat | Jumlah dokumen hasil penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa dan desa adat yang di tata usahakan | - | | | 1 dokumen | 250.000.000,00 | | | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | - | 331.334.000,00 | |
| | 2 | 13 | 02 | 1.01 | 0001 | Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan | | | | 0 Dokumen | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 100.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 2 | 13 | 02 | 1.01 | 0002 | Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat | | | | 1 Dokumen | 250.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 100.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 2 | 13 | 02 | 1.01 | 0003 | Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa | | | | 0 Dokumen | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 131.334.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| 262 | 2 | 13 | 03 | | | PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA | Persentase kerjasama desa yang dilaksanakan | 100% | | | 22,50 % | 158.096.500,00 | | | | | | 27,50% | 346.337.042,00 | |
| | 2 | 13 | 03 | 1.01 | | Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi | Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerjasama antar desa kewenangan provinsi | - | | | 4 dokumen | 158.096.500,00 | | | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | - | 346.337.042,00 | |
| | 2 | 13 | 03 | 1.01 | 0001 | Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota | | | | 2 Dokumen | 60.715.500,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 132.783.315,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 2 | 13 | 03 | 1.01 | 0002 | Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan | | | | 2 Dokumen | 58.630.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 122.283.315,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 2 | 13 | 03 | 1.01 | 0003 | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | | | | 1 Dokumen | 38.751.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 91.270.412,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| 263 | 2 | 13 | 04 | | | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Persentase Administrasi Pemerintahan Desa yang Dibina | 100% | | | 25 % | 2.779.666.797,00 | | | | | | 25% | 3.359.034.326,00 | |
| | 2 | 13 | 04 | 1.01 | | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Jumlah dokumen hasil pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa | - | | | 19 dokumen | 2.779.666.797,00 | | | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | - | 3.359.034.326,00 | |
| | 2 | 13 | 04 | 1.01 | 0001 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa | | | | 1 Dokumen | 0,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 150.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 2 | 13 | 04 | 1.01 | 0002 | Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa | | | | 1 Dokumen | 168.537.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 100.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 2 | 13 | 04 | 1.01 | 0003 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Produk Hukum desa yang Ditetapkan | | | | 1 Dokumen | 178.400.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 155.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 2 | 13 | 04 | 1.01 | 0004 | Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | jumlah Dokumen hasi Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa | | | | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 111.873.283,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 2 | 13 | 04 | 1.01 | 0005 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | | | | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 113.453.480,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 2 | 13 | 04 | 1.01 | 0006 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | | | | 1 Dokumen | 175.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 162.767.022,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 2 | 13 | 04 | 1.01 | 0007 | Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | | | | 0 Orang | 0,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 43.305.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 2 | 13 | 04 | 1.01 | 0008 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | | | | 2 Dokumen | 329.777.300,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 386.310.783,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 2 | 13 | 04 | 1.01 | 0009 | Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan | | | | 2 Dokumen | 65.844.400,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 83.775.700,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 2 | 13 | 04 | 1.01 | 0010 | Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina | | | | 15 Orang | 150.188.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 157.429.064,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 2 | 13 | 04 | 1.01 | 0011 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | | | | 309 Orang | 265.000.352,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 160.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 2 | 13 | 04 | 1.01 | 0012 | Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis | | | | 1 Dokumen | 0,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 100.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 2 | 13 | 04 | 1.01 | 0013 | Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa | | | | 1 Dokumen | 44.000.472,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 100.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 2 | 13 | 04 | 1.01 | 0014 | Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa | | | | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 135.743.607,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 2 | 13 | 04 | 1.01 | 0015 | Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | | | | 1 Dokumen | 70.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 150.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 2 | 13 | 04 | 1.01 | 0016 | Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa | | | | 1 Dokumen | 150.000.100,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 200.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 2 | 13 | 04 | 1.01 | 0017 | Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa | | | | 2 Dokumen | 314.000.873,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 311.249.087,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 2 | 13 | 04 | 1.01 | 0018 | Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 74.417.800,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 126.850.300,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 2 | 13 | 04 | 1.01 | 0019 | Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | | | | 1 Dokumen | 250.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 100.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 2 | 13 | 04 | 1.01 | 0020 | Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Desa yang melakukan Pengembangan Inovasi | | | | 0 Desa | 0,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 157.385.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 2 | 13 | 04 | 1.01 | 0021 | Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pekan Inovasi Perkembangan Desa | | | | 1 Laporan | 40.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 255.435.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 2 | 13 | 04 | 1.01 | 0022 | Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 204.500.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 98.457.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| 264 | 2 | 13 | 05 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif | 100% | | | 25 % | 1.962.784.319,00 | | | | | | 25% | 2.547.888.385,00 | |
| | 2 | 13 | 05 | 1.01 | | Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah laporan hasil pembinaan lembaga kemasyarakatan, Usaha Ekonomi masyarakat dan pemerintah desa serta Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | - | | | 7 laporan | 1.962.784.319,00 | | | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | - | 2.547.888.385,00 | |
| | 2 | 13 | 05 | 1.01 | 0003 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya | | | | 50 Lembaga | 100.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 188.891.991,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 2 | 13 | 05 | 1.01 | 0005 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | | | | 2 Dokumen | 475.000.224,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 607.402.034,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 2 | 13 | 05 | 1.01 | 0006 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | | | | 7 Laporan | 195.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 332.974.613,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 2 | 13 | 05 | 1.01 | 0009 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | | | | 7 Laporan | 1.102.784.095,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 1.345.243.189,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | 2 | 13 | 05 | 1.01 | 0011 | Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah | | | | 180 Keluarga | 90.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 73.376.558,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | X | | | | | NON URUSAN | | | | | | 27.855.261.046,00 | | | | | | | 34.223.826.435,00 | |
| | X | XX | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX | | | | | | 27.855.261.046,00 | | | | | | | 34.223.826.435,00 | |
| 265 | X | XX | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (DinsosPMD) | 78,30%<br>90%<br>90%<br>78,30%<br>90% | | | 78,10 % | 27.855.261.046,00 | | | | | | 78,20%<br>90%<br>90%<br>78,20%<br>90% | 34.223.826.435,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (DinsosPMD) | - | | | 7 dokumen | 190.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 263.016.888,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 4 Dokumen | 170.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 218.752.888,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | X | XX | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 3 Laporan | 20.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 44.264.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | X | XX | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Pelayanan Keuangan | - | | | 134 orang | 21.410.668.335,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 27.950.900.971,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 134 Orang/ Bulan | 21.410.668.335,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 27.950.900.971,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | X | XX | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (DinsosPMD) | - | | | 2 Laporan | 100.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 0,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 2 Laporan | 100.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | X | XX | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Pelayanan kepegawaian | - | | | 364 orang | 598.688.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 379.200.000,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 111.600.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 79.200.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | X | XX | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | 0 Dokumen | 0,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | X | XX | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 100 Orang | 487.088.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 150.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | X | XX | 01 | 1.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 0 Orang | 0,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 150.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | X | XX | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (DinsosPMD) | - | | | 60 paket | 1.033.080.915,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 960.542.990,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 13 Paket | 33.866.450,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 41.771.230,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 6 Paket | 41.100.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 23.030.283,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 8 Paket | 45.242.365,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 22.103.730,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 33 Paket | 293.192.100,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 264.232.747,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 1 Laporan | 50.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 30.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 4 Laporan | 500.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 468.099.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 2 Dokumen | 69.680.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 111.306.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | X | XX | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan (DinsosPMD) | - | | | 22 unit | 834.183.700,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 1.121.977.000,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 1 Unit | 472.230.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 750.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | X | XX | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 3 Paket | 57.714.800,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 60.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | X | XX | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 6 Unit | 200.603.500,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 161.977.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | X | XX | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 7 Unit | 42.744.200,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 100.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | X | XX | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 19 Unit | 60.891.200,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 50.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | X | XX | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan (DinsosPMD) | - | | | 10 laporan | 2.909.652.496,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 2.768.826.916,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2 Laporan | 22.920.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 15.872.500,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | X | XX | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 2 Laporan | 326.520.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 220.798.872,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | X | XX | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 6 Laporan | 2.560.212.496,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 2.532.155.544,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | X | XX | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara (DinsosPMD) | - | | | 212 unit | 778.987.600,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 779.361.670,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | | | | 2 Unit | 129.200.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 106.500.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | X | XX | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 7 Unit | 347.559.600,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 324.229.600,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | X | XX | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 3 Unit | 38.700.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 101.750.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | X | XX | 01 | 1.09 | 0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | | | | 2 Unit | 30.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 10.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | X | XX | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 195.628.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 150.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | X | XX | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 65 Unit | 37.900.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 86.882.070,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | | | | | | Kepala UPTD Panti Sosial Bina Laras Hijrah | | | | | | 4.000.000.000,00 | | | | | | | 3.602.245.216,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 499.999.940,00 | | | | | | | 1.091.604.789,00 | |
| | 1 | 06 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | | | 499.999.940,00 | | | | | | | 1.091.604.789,00 | |
| 266 | 1 | 06 | 04 | | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase PMKS yang di rehabilitasi sosial di dalam Panti Sosial Bina Laras Hijrah | 100%<br>100%<br>100% | | | 30,00 % | 499.999.940,00 | | | | | | 28,57%<br>27,00%<br>30,00% | 1.091.604.789,00 | |
| | 1 | 06 | 04 | 1.01 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti | Jumlah penyandang disabilitas yang direhab sosial dalam Panti Sosial Bina Laras | - | | | 20 orang | 499.999.940,00 | | | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | - | 1.091.604.789,00 | |
| | 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0001 | Penyediaan Permakanan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | | | | 20 Orang | 313.880.400,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 265.886.237,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA LARAS HIJRAH |
| | 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0002 | Penyediaan Sandang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | | | | 20 Orang | 47.979.450,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 80.635.716,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA LARAS HIJRAH |
| | 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0004 | Penyediaan Alat Bantu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi | | | | 20 Orang | 142.200,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 20.000.000,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA LARAS HIJRAH |
| | 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0005 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi | | | | 20 Orang | 31.411.290,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 46.358.497,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA LARAS HIJRAH |
| | 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0006 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | | | | 20 Orang | 50.890.400,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 142.101.903,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA LARAS HIJRAH |
| | 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0007 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi | | | | 20 Orang | 15.696.200,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 8.575.436,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA LARAS HIJRAH |
| | 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0008 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi | | | | 20 Orang | 4.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 3.200.000,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA LARAS HIJRAH |
| | 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0009 | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | | | | 9 Orang | 4.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 388.520.000,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA LARAS HIJRAH |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0010 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi | | | | 20 Orang | 14.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 11.400.000,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA LARAS HIJRAH |
| | 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0011 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | | | | 8 Orang | 14.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 83.847.000,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA LARAS HIJRAH |
| | 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0012 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar | | | | 10 Dokumen | 4.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 41.080.000,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA LARAS HIJRAH |
| | 1 | 06 | 04 | 1.02 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti | - | - | | | - | 0,00 | | | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0001 | Pengasuhan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi | | | | 0 Orang | 0,00 | - | - | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 0,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA LARAS HIJRAH |
| | 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Makanan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | | | | 0 Orang | 0,00 | - | - | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 0,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA LARAS HIJRAH |
| | 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0003 | Penyediaan Sandang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | | | | 0 Orang | 0,00 | - | - | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 0,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA LARAS HIJRAH |
| | 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0004 | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | | | | 0 Orang | 0,00 | - | - | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 0,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA LARAS HIJRAH |
| | 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0005 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi | | | | 0 Orang | 0,00 | - | - | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 0,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA LARAS HIJRAH |
| | 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0006 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | | | | 0 Orang | 0,00 | - | - | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 0,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA LARAS HIJRAH |
| | 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0007 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi | | | | 0 Orang | 0,00 | - | - | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 0,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA LARAS HIJRAH |
| | 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0008 | Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi | | | | 0 Orang | 0,00 | - | - | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 0,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA LARAS HIJRAH |
| | 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0009 | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | | | | 0 Orang | 0,00 | - | - | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 0,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA LARAS HIJRAH |
| | 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0010 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi | | | | 0 Orang | 0,00 | - | - | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 0,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA LARAS HIJRAH |
| | 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0011 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | | | | 0 Orang | 0,00 | - | - | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 0,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA LARAS HIJRAH |
| | 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0013 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | | | | 0 Dokumen | 0,00 | - | - | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 0,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA LARAS HIJRAH |
| | 1 | 06 | 04 | 1.03 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | - | - | | | - | 0,00 | | | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0001 | Penyediaan Permakanan | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | | | | 0 Orang | 0,00 | - | - | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 0,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA LARAS HIJRAH |
| | 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0002 | Penyediaan Sandang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | | | | 0 Orang | 0,00 | - | - | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 0,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA LARAS HIJRAH |
| | 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0004 | Penyediaan Alat Bantu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi | | | | 0 Orang | 0,00 | - | - | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 0,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA LARAS HIJRAH |
| | 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0005 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi | | | | 0 Orang | 0,00 | - | - | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 0,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA LARAS HIJRAH |
| | 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0006 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | | | | 0 Orang | 0,00 | - | - | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 0,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA LARAS HIJRAH |
| | 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0007 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi | | | | 0 Orang | 0,00 | - | - | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 0,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA LARAS HIJRAH |
| | 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0008 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi | | | | 0 Orang | 0,00 | - | - | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 0,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA LARAS HIJRAH |
| | 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0009 | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | | | | 0 Orang | 0,00 | - | - | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 0,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA LARAS HIJRAH |
| | 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0010 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi | | | | 0 Orang | 0,00 | - | - | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 0,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA LARAS HIJRAH |
| | 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0011 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | | | | 0 Orang | 0,00 | - | - | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 0,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA LARAS HIJRAH |
| | 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0012 | Pemulasaraan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi | | | | 0 Orang | 0,00 | - | - | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 0,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA LARAS HIJRAH |
| | 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0013 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi | | | | 0 Dokumen | 0,00 | - | - | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 0,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA LARAS HIJRAH |
| | 1 | 06 | 04 | 1.04 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti | - | - | | | - | 0,00 | | | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 06 | 04 | 1.04 | 0001 | Penyediaan Permakanan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | | | | 0 Orang | 0,00 | - | - | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 0,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA LARAS HIJRAH |
| | 1 | 06 | 04 | 1.04 | 0002 | Penyediaan Sandang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | | | | 0 Orang | 0,00 | - | - | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 0,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA LARAS HIJRAH |
| | 1 | 06 | 04 | 1.04 | 0003 | Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi | | | | 0 Orang | 0,00 | - | - | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 0,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA LARAS HIJRAH |
| | 1 | 06 | 04 | 1.04 | 0004 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi | | | | 0 Orang | 0,00 | - | - | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 0,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA LARAS HIJRAH |
| | 1 | 06 | 04 | 1.04 | 0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | | | | 0 Orang | 0,00 | - | - | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 0,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA LARAS HIJRAH |
| | 1 | 06 | 04 | 1.04 | 0006 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi | | | | 0 Orang | 0,00 | - | - | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 0,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA LARAS HIJRAH |
| | 1 | 06 | 04 | 1.04 | 0007 | Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi | | | | 0 Orang | 0,00 | - | - | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 0,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA LARAS HIJRAH |
| | 1 | 06 | 04 | 1.04 | 0008 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Gelandangan bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi | | | | 0 Orang | 0,00 | - | - | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 0,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA LARAS HIJRAH |
| | 1 | 06 | 04 | 1.04 | 0009 | Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | | | | 0 Orang | 0,00 | - | - | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 0,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA LARAS HIJRAH |
| | 1 | 06 | 04 | 1.04 | 0010 | Pemulangan ke Daerah Asal | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi | | | | 0 Orang | 0,00 | - | - | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 0,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA LARAS HIJRAH |
| | 1 | 06 | 04 | 1.04 | 0011 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti | | | | 0 Dokumen | 0,00 | - | - | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 0,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA LARAS HIJRAH |
| | X | | | | | NON URUSAN | | | | | | 3.500.000.060,00 | | | | | | | 2.510.640.427,00 | |
| | X | XX | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX | | | | | | 3.500.000.060,00 | | | | | | | 2.510.640.427,00 | |
| 267 | X | XX | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (PSBLH) | 78,30%<br>90%<br>90%<br>78,30%<br>90% | | | 78,10 % | 3.500.000.060,00 | | | | | | 78,20%<br>90%<br>90%<br>78,20%<br>90% | 2.510.640.427,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (PSBLH) | - | | | 6 dokumen | 10.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 20.360.000,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 3 Dokumen | 6.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 10.180.000,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA LARAS HIJRAH |
| | X | XX | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 3 Dokumen | 4.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 10.180.000,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA LARAS HIJRAH |
| | X | XX | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (PSBLH) | - | | | 97 paket | 156.222.660,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 219.974.531,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 2 Paket | 13.030.900,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 10.435.886,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA LARAS HIJRAH |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 5 Paket | 10.795.760,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 12.676.622,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA LARAS HIJRAH |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 7 Paket | 58.756.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 58.786.441,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA LARAS HIJRAH |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 1 Laporan | 12.240.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA LARAS HIJRAH |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 2 Laporan | 61.400.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 138.075.582,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA LARAS HIJRAH |
| | X | XX | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan (PSBLH) | - | | | 62 unit | 2.410.529.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 1.100.000.000,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 1 Unit | 250.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA LARAS HIJRAH |
| | X | XX | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 2.160.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 1.000.000.000,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA LARAS HIJRAH |
| | X | XX | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 60 Unit | 529.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 100.000.000,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA LARAS HIJRAH |
| | X | XX | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan (PSBLH) | - | | | 4 laporan | 800.352.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 969.805.000,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 4.152.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 6.625.000,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA LARAS HIJRAH |
| | X | XX | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 42.200.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 58.380.000,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA LARAS HIJRAH |
| | X | XX | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 0 Laporan | 0,00 | - | - | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA LARAS HIJRAH |
| | X | XX | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 754.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 904.800.000,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA LARAS HIJRAH |
| | X | XX | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara (PSBLH) | - | | | 13 unit | 122.896.400,00 | | | - | - | - | - | 200.500.896,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 3 Unit | 48.606.400,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 57.800.000,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA LARAS HIJRAH |
| | X | XX | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 3 Unit | 34.290.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 37.700.896,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA LARAS HIJRAH |
| | X | XX | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 4 Unit | 40.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Gantung, Selingsing | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 105.000.000,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA LARAS HIJRAH |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 0 Unit | 0,00 | - | - | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA LARAS HIJRAH |
| | | | | | | Kepala UPTD Panti Sosial Bina Serumpun | | | | | | 4.000.000.000,00 | | | | | | | 4.443.147.464,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 800.110.094,00 | | | | | | | 2.925.810.650,00 | |
| | 1 | 06 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | | | 800.110.094,00 | | | | | | | 2.925.810.650,00 | |
| 268 | 1 | 06 | 04 | | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase PMKS yang di Rehabilitasi Sosial di Dalam Panti Sosial Bina Serumpun | 100%<br>100%<br>100% | | | 21,43 % | 800.110.094,00 | | | | | | 28,57%<br>27,00%<br>30,00% | 2.925.810.650,00 | |
| | 1 | 06 | 04 | 1.01 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti | Jumlah disabilitas terlantar yang direhab sosial didalam Panti Sosial Bina Serumpun | - | | | 15 orang | 111.850.271,00 | | | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | - | 824.703.000,00 | |
| | 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0001 | Penyediaan Permakanan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | | | | 20 Orang | 49.615.316,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 520.800.000,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA SERUMPUN |
| | 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0002 | Penyediaan Sandang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | | | | 20 Orang | 13.567.655,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 43.100.000,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA SERUMPUN |
| | 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0005 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi | | | | 15 Orang | 18.688.500,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 119.603.000,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA SERUMPUN |
| | 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0006 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | | | | 15 Orang | 9.975.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 43.500.000,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA SERUMPUN |
| | 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0007 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi | | | | 15 Orang | 10.003.800,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 43.500.000,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA SERUMPUN |
| | 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0012 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar | | | | 15 Dokumen | 10.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 54.200.000,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA SERUMPUN |
| | 1 | 06 | 04 | 1.02 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti | Jumlah anak terlantar yang direhab sosial didalam Panti Sosial Bina Serumpun | - | | | 15 orang | 284.747.300,00 | | | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | - | 624.095.750,00 | |
| | 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0001 | Pengasuhan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi | | | | 0 Orang | 69.600.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 139.200.000,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA SERUMPUN |
| | 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Makanan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | | | | 15 Orang | 168.631.500,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 334.800.000,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA SERUMPUN |
| | 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0003 | Penyediaan Sandang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | | | | 15 Orang | 10.582.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 27.345.750,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA SERUMPUN |
| | 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0005 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi | | | | 15 Orang | 6.133.800,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 6.750.000,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA SERUMPUN |
| | 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0006 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | | | | 15 Orang | 9.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 18.600.000,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA SERUMPUN |
| | 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0007 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi | | | | 15 Orang | 10.800.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 43.200.000,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA SERUMPUN |
| | 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0013 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | | | | 15 Dokumen | 10.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 54.200.000,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA SERUMPUN |
| | 1 | 06 | 04 | 1.03 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | Jumlah lanjut usia terlantar yang direhab sosial didalam Panti Sosial Bina Serumpun | - | | | 15 orang | 274.120.123,00 | | | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | - | 673.881.150,00 | |
| | 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0001 | Penyediaan Permakanan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | | | | 15 Orang | 155.649.228,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 334.800.000,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA SERUMPUN |
| | 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0002 | Penyediaan Sandang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | | | | 15 Orang | 30.369.695,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 32.400.750,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA SERUMPUN |
| | 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0004 | Penyediaan Alat Bantu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi | | | | 15 Orang | 16.901.200,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 27.005.000,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA SERUMPUN |
| | 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0005 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi | | | | 15 Orang | 30.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 108.730.000,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA SERUMPUN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0006 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | | | | 15 Orang | 10.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 43.500.000,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA SERUMPUN |
| | 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0007 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi | | | | 15 Orang | 10.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 43.200.000,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA SERUMPUN |
| | 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0012 | Pemulasaraan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi | | | | 15 Orang | 11.200.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 30.045.400,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA SERUMPUN |
| | 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0013 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi | | | | 15 Dokumen | 10.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 54.200.000,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA SERUMPUN |
| | 1 | 06 | 04 | 1.04 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti | Jumlah Gelandangan dan Pengemis direhab sosial didalam Panti Sosial Bina Serumpun | - | | | 15 orang | 129.392.400,00 | | | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | - | 803.130.750,00 | |
| | 1 | 06 | 04 | 1.04 | 0001 | Penyediaan Permakanan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | | | | 15 Orang | 82.876.600,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 520.800.000,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA SERUMPUN |
| | 1 | 06 | 04 | 1.04 | 0002 | Penyediaan Sandang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | | | | 15 Orang | 10.582.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 32.400.750,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA SERUMPUN |
| | 1 | 06 | 04 | 1.04 | 0004 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi | | | | 15 Orang | 6.133.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 108.730.000,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA SERUMPUN |
| | 1 | 06 | 04 | 1.04 | 0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | | | | 15 Orang | 9.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 43.500.000,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA SERUMPUN |
| | 1 | 06 | 04 | 1.04 | 0006 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi | | | | 15 Orang | 10.800.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 43.500.000,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA SERUMPUN |
| | 1 | 06 | 04 | 1.04 | 0011 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti | | | | 15 Dokumen | 10.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 54.200.000,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA SERUMPUN |
| | X | | | | | NON URUSAN | | | | | | 3.199.889.906,00 | | | | | | | 1.517.336.814,00 | |
| | X | XX | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX | | | | | | 3.199.889.906,00 | | | | | | | 1.517.336.814,00 | |
| 269 | X | XX | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (PSBS) | 78,30%<br>90%<br>90%<br>78,30%<br>90% | | | 90 % | 3.199.889.906,00 | | | | | | 78,20%<br>90%<br>90%<br>78,20%<br>90% | 1.517.336.814,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (PSBS) | - | | | 12 paket | 136.952.560,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 361.035.814,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 3.772.900,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 7.409.450,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA SERUMPUN |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 2 Paket | 14.658.300,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 15.941.098,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA SERUMPUN |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 2 Paket | 31.853.800,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 23.357.759,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA SERUMPUN |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 3 Paket | 30.860.300,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 231.720.984,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA SERUMPUN |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1.052.360,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 1.245.568,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA SERUMPUN |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 3 Paket | 19.754.900,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 22.428.955,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA SERUMPUN |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 5 Laporan | 5.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 5.000.000,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA SERUMPUN |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 10 Laporan | 30.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 53.932.000,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA SERUMPUN |
| | X | XX | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan (PSBS) | - | | | 62 unit | 2.366.438.027,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 250.000.000,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 2.160.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA SERUMPUN |
| | X | XX | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 206.438.027,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 250.000.000,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA SERUMPUN |
| | X | XX | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan (PSBS) | - | | | 17 laporan | 580.167.280,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 604.003.000,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2 Laporan | 2.198.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 1.698.000,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA SERUMPUN |
| | X | XX | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 3 Laporan | 50.169.280,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 74.505.000,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA SERUMPUN |
| | X | XX | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 527.800.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 527.800.000,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA SERUMPUN |
| | X | XX | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara (PSBS) | - | | | 20 unit | 116.332.039,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 302.298.000,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 3 Unit | 45.600.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 32.818.000,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA SERUMPUN |
| | X | XX | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 9 Unit | 7.790.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 10.630.000,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA SERUMPUN |
| | X | XX | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 50.132.039,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 250.000.000,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA SERUMPUN |
| | X | XX | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 7 Unit | 12.810.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 8.850.000,00 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA SERUMPUN |
| | | | | | | DINAS TENAGA KERJA | | | | | | 23.486.653.096,00 | | | | | | | 31.324.247.828,00 | |
| | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 23.346.653.096,00 | | | | | | | 31.044.247.828,00 | |
| | 2 | 07 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | | | | 23.346.653.096,00 | | | | | | | 31.044.247.828,00 | |
| 270 | 2 | 07 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 99%<br>88Nilai<br>99% | | | - | 21.141.653.096,00 | | | | | | 99%<br>87Nilai<br>99% | 27.824.247.828,00 | |
| | 2 | 07 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 350.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 450.000.000,00 | |
| | 2 | 07 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 5 Dokumen | 200.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 250.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 0 Dokumen | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 0 Dokumen | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 0 Dokumen | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 0 Dokumen | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 0 Laporan | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 4 Laporan | 150.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 200.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 14.975.712.406,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 17.996.947.828,00 | |
| | 2 | 07 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 98 Orang/ Bulan | 14.975.712.406,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 17.296.947.828,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 0 Dokumen | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 100.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 0 Dokumen | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 100.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 1.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | 0 Dokumen | 0,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 100.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 0 Laporan | 0,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 100.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | 0 Dokumen | 0,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 100.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 0 Laporan | 0,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 100.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 1.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | 0 Dokumen | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 100.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | - | | | - | 0,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 700.000.000,00 | |
| | 2 | 07 | 01 | 1.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 0 Dokumen | 0,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 100.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 1.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 0 Dokumen | 0,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 100.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 1.03 | 0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | | | 0 Laporan | 0,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 100.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 07 | 01 | 1.03 | 0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 0 Laporan | 0,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 100.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 1.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 0 Laporan | 0,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 100.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 0 Laporan | 0,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 100.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 1.03 | 0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 0 Dokumen | 0,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 100.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 70.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 1.080.000.000,00 | |
| | 2 | 07 | 01 | 1.05 | 0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | 0 Unit | 0,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 100.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 70.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 80.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 0 Dokumen | 0,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 100.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 1.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 100.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 100.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 1.05 | 0006 | Pemulangan Pegawai yang Pensiun | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan | | | | 1 Orang | 0,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 100.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 1.05 | 0007 | Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas | | | | 1 Laporan | 0,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 100.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 1.05 | 0008 | Pemindahan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan | | | | 10 Orang | 0,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 100.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 5 Orang | 0,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 100.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 1.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 2 Orang | 0,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 100.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 1.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 1 Orang | 0,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 100.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 1.033.940.690,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 1.410.000.000,00 | |
| | 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 150.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 200.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 300.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 350.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 0 Paket | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 100.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 60.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 80.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 60.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 80.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 20.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 0 Paket | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 1 Laporan | 100.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 30.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 343.940.690,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 550.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 0 Dokumen | 0,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 0 Dokumen | 0,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 450.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 600.000.000,00 | |
| | 2 | 07 | 01 | 1.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | | | | 0 Unit | 450.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 500.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 0 Unit | 0,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 1.07 | 0003 | Pengadaan Alat Besar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan | | | | 0 Unit | 0,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 1.07 | 0004 | Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan | | | | 0 Unit | 0,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 1 Paket | 0,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 0 Unit | 0,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 1.07 | 0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | | | | 5 Unit | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 100.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 1.07 | 0008 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | | | | 0 Unit | 0,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 0 Unit | 0,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 0 Unit | 0,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 0 Unit | 0,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 07 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 3.504.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 4.127.800.000,00 | |
| | 2 | 07 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 7.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 15.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 985.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 1.000.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 250.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 700.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 2.262.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 2.412.800.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 758.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 1.459.500.000,00 | |
| | 2 | 07 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | | | | 8 Unit | 8.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 9.500.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 5 Unit | 350.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 350.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 1.09 | 0003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya | | | | 0 Unit | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 1.09 | 0004 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya | | | | 1 Unit | 0,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 1.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | | | | 0 Unit | 0,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 1 Unit | 0,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 1.09 | 0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | | | | 0 Unit | 0,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 1.09 | 0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | | | | 1 Unit | 0,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 2 Unit | 200.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 450.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 0,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 250.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 2 Unit | 200.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 300.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 1.09 | 0012 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi | | | | 1 Ha | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 100.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| 271 | 2 | 07 | 02 | | | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | - | 100% | | | - | 100.000.000,00 | | | | | | 100% | 275.000.000,00 | |
| | 2 | 07 | 02 | 1.01 | | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) | - | - | | | - | 100.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 275.000.000,00 | |
| | 2 | 07 | 02 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 100.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 02 | 1.01 | 0004 | Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro | | | | 30 Orang | 100.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 175.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| 272 | 2 | 07 | 03 | | | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | - | 5.75% | | | - | 250.000.000,00 | | | | | | 5.50% | 600.000.000,00 | |
| | 2 | 07 | 03 | 1.02 | | Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja | - | - | | | - | 100.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 300.000.000,00 | |
| | 2 | 07 | 03 | 1.02 | 0001 | Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi | | | | 8 LPK | 100.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 300.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 03 | 1.03 | | Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah | - | - | | | - | 0,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 0,00 | |
| | 2 | 07 | 03 | 1.03 | 0001 | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas | | | | 0 Perusahaan | 0,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 03 | 1.04 | | Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi | - | - | | | - | 150.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 300.000.000,00 | |
| | 2 | 07 | 03 | 1.04 | 0001 | Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah | | | | 1 Dokumen | 150.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 300.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| 273 | 2 | 07 | 04 | | | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | - | 5% | | | - | 630.000.000,00 | | | | | | 5% | 845.000.000,00 | |
| | 2 | 07 | 04 | 1.01 | | Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 320.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 515.000.000,00 | |
| | 2 | 07 | 04 | 1.01 | 0001 | Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya | | | | 25 Orang | 100.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 80.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 04 | 1.01 | 0002 | Pelayanan Antar Kerja | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD | | | | 175 Orang | 100.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 225.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 04 | 1.01 | 0004 | Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL | | | | 100 Orang | 50.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 100.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 04 | 1.01 | 0005 | Perluasan Kesempatan Kerja | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja | | | | 20 Orang | 70.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 110.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 04 | 1.02 | | Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 0,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 0,00 | |
| | 2 | 07 | 04 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah perizinan LPTKS yang Terintegrasi | | | | 0 Lembaga | 0,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 04 | 1.02 | 0002 | Pengawasan dan Pengendalian LPTKS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku | | | | 0 Lembaga | 0,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 04 | 1.03 | | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | - | - | | | - | 210.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 235.000.000,00 | |
| | 2 | 07 | 04 | 1.03 | 0001 | Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online | | | | 0 Dokumen | 0,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 04 | 1.03 | 0002 | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub) | | | | 10000 Orang | 50.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 60.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 04 | 1.03 | 0003 | Job Fair/Bursa Kerja | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja | | | | 5000 Orang | 160.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 175.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 07 | 04 | 1.04 | | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi | - | - | | | - | 25.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 15.000.000,00 | |
| | 2 | 07 | 04 | 1.04 | 0001 | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya | | | | 20 Orang | 25.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 15.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 04 | 1.04 | 0002 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Diverifikasi dan Diberi Izin secara online | | | | 0 Perusahaan | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 04 | 1.04 | 0003 | Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA | | | | 0 Orang | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 04 | 1.04 | 0004 | Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan | | | | 0 Orang | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 04 | 1.05 | | Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | - | - | | | - | 75.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 80.000.000,00 | |
| | 2 | 07 | 04 | 1.05 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA | | | | 75 Orang | 75.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 80.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| 274 | 2 | 07 | 05 | | | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | - | 3.20% | | | - | 765.000.000,00 | | | | | | 3.00% | 850.000.000,00 | |
| | 2 | 07 | 05 | 1.01 | | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 310.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 325.000.000,00 | |
| | 2 | 07 | 05 | 1.01 | 0001 | Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online | | | | 8 Perusahaan | 80.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 50.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 05 | 1.01 | 0002 | Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online | | | | 8 Perusahaan | 80.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 50.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 05 | 1.01 | 0003 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek | | | | 30 Laporan | 150.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 225.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 05 | 1.02 | | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi | - | - | | | - | 305.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 325.000.000,00 | |
| | 2 | 07 | 05 | 1.02 | 0001 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Perselisihan yang Dicegah | | | | 8 Perkara | 55.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 65.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 05 | 1.02 | 0002 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan | | | | 0 Perkara | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 05 | 1.02 | 0003 | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi | | | | 0 Asosiasi dan Serikat Pekerja | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 05 | 1.02 | 0004 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah LKS Tripartit yang Dibina | | | | 7 Lembaga | 150.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 130.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 05 | 1.02 | 0005 | Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi | | | | 30 Perusahaan | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 130.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 07 | 05 | 1.03 | | Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) | - | - | | | - | 150.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 200.000.000,00 | |
| | 2 | 07 | 05 | 1.03 | 0001 | Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Penetapan UMP | | | | 1 Surat Keputusan | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 150.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 05 | 1.03 | 0003 | Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah penetapan UMK | | | | 0 Surat Keputusan | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 05 | 1.03 | 0005 | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan | | | | 12 Orang | 50.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 50.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| 275 | 2 | 07 | 06 | | | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN | - | 22.5% | | | - | 460.000.000,00 | | | | | | 20% | 650.000.000,00 | |
| | 2 | 07 | 06 | 1.01 | | Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan | - | - | | | - | 460.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 650.000.000,00 | |
| | 2 | 07 | 06 | 1.01 | 0001 | Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA) | | | | 425 Perusahaan | 250.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 250.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 06 | 1.01 | 0002 | Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan | | | | 1 Kasus | 150.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 300.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 06 | 1.01 | 0003 | Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3 | | | | 40 Perusahaan | 60.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 100.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | 140.000.000,00 | | | | | | | 280.000.000,00 | |
| | 3 | 32 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI | | | | | | 140.000.000,00 | | | | | | | 280.000.000,00 | |
| 276 | 3 | 32 | 04 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI | - | 1Desa | | | - | 140.000.000,00 | | | | | | 1Desa | 280.000.000,00 | |
| | 3 | 32 | 04 | 1.01 | | Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan | - | - | | | - | 140.000.000,00 | | | - | Pembangunan Wilayah | - | - | 280.000.000,00 | |
| | 3 | 32 | 04 | 1.01 | 0001 | Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina | | | | 25 Kepala Keluarga | 70.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Wilayah | - | | 180.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 3 | 32 | 04 | 1.01 | 0002 | Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan | | | | 1 Satuan Permukiman | 70.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Wilayah | - | | 100.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | | | | | | UPTD BLK DINAS TENAGA KERJA | | | | | | 1.200.000.000,00 | | | | | | | 3.500.000.000,00 | |
| | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 1.200.000.000,00 | | | | | | | 3.500.000.000,00 | |
| | 2 | 07 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | | | | 1.200.000.000,00 | | | | | | | 3.500.000.000,00 | |
| 277 | 2 | 07 | 03 | | | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | - | 5.75% | | | - | 1.200.000.000,00 | | | | | | 5.50% | 3.500.000.000,00 | |
| | 2 | 07 | 03 | 1.01 | | Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | - | - | | | - | 1.200.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 3.500.000.000,00 | |
| | 2 | 07 | 03 | 1.01 | 0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n | | | | 240 Orang | 850.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 1.000.000.000,00 | UPTD BLK DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 03 | 1.01 | 0002 | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n | | | | 6 Lembaga | 150.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 500.000.000,00 | UPTD BLK DINAS TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 03 | 1.01 | 0003 | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja | | | | 20 Unit | 200.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 2.000.000.000,00 | UPTD BLK DINAS TENAGA KERJA |
| | | | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA | | | | | 17.350.917.419,95 | | | | | | | | 20.365.578.820,90 | |
| | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | 17.350.917.419,95 | | | | | | | | 20.365.578.820,90 | |
| | 2 | 08 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | 13.728.217.419,95 | | | | | | | | 16.313.578.820,90 | |
| 278 | 2 | 08 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (DP3ACSKB) | 75.5nilai<br>80nilai<br>75.5nilai<br>75.5nilai<br>80Nilai | | | 74.5 nilai | 10.640.217.419,95 | | | | | | 75nilai<br>78nilai<br>75nilai<br>75nilai<br>78Nilai | 13.064.278.820,90 | |
| | 2 | 08 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah | - | | | 9 Dokumen | 136.000.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Dinas P3ACSKB | - | 152.000.000,00 | |
| | 2 | 08 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 2 Dokumen | 35.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Dinas P3ACSKB | | 40.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 08 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 6.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | Dinas P3ACSKB | | 7.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 08 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 6.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | Dinas P3ACSKB | | 7.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 08 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 6.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | Dinas P3ACSKB | | 7.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 08 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 6.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | Dinas P3ACSKB | | 7.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 08 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 7 Laporan | 77.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | Dinas P3ACSKB | | 84.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 08 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Pelayanan Keuangan | - | | | 76 Nilai | 8.108.795.419,95 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | Dinas P3ACSKB | - | 8.495.642.820,90 | |
| | 2 | 08 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 42 Orang/ Bulan | 8.102.795.419,95 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Pemerintahan | Dinas P3ACSKB | | 8.488.642.820,90 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 08 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 6 Laporan | 6.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | Dinas P3ACSKB | | 7.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 08 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian | - | | | 76 Nilai | 98.722.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Dinas P3ACSKB | - | 51.556.000,00 | |
| | 2 | 08 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 44.722.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Dinas P3ACSKB | | 46.156.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 08 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 6 Orang | 54.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | Dinas P3ACSKB | | 5.400.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 08 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan | - | | | 76 Nilai | 553.600.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | Dinas P3ACSKB | - | 601.330.000,00 | |
| | 2 | 08 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 15.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | Dinas P3ACSKB | | 15.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 08 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 2 Paket | 45.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | Dinas P3ACSKB | | 47.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 08 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 12 Dokumen | 12.600.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | Dinas P3ACSKB | | 13.230.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 08 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 2 Paket | 154.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | Dinas P3ACSKB | | 169.400.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 08 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 6 Laporan | 30.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | Dinas P3ACSKB | | 30.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 08 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 6 Laporan | 297.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | Dinas P3ACSKB | | 326.700.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 08 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah BMD Penunjang Urusan pemerintah yang diadakan | - | | | 3 Laporan | 684.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | Dinas P3ACSKB | - | 2.736.000.000,00 | |
| | 2 | 08 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 2 Paket | 40.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | Dinas P3ACSKB | | 15.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 08 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 500.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | Dinas P3ACSKB | | 2.500.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 08 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 17 Unit | 144.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | Dinas P3ACSKB | | 221.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 08 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | - | | | 36 Laporan | 720.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 778.400.000,00 | |
| | 2 | 08 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 2.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 2.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 08 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 168.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 176.400.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 08 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 550.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 600.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 08 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah BMD Penunjang Urusan pemerintah yang dipelihara | - | | | 12 Laporan | 339.100.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 249.350.000,00 | |
| | 2 | 08 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | | | | 2 Unit | 42.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 44.100.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 08 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 8 Unit | 105.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 110.250.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 08 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 82 Unit | 42.100.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 45.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 08 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 2 Unit | 150.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 50.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| 279 | 2 | 08 | 02 | | | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Persentase ARG pada Belanja Operasi dan belanja modal APBD | 2.8persen<br>2.8persen | | | 2.6 persen | 495.000.000,00 | | | | | | 2.7persen<br>2.7persen | 544.500.000,00 | |
| | 2 | 08 | 02 | 1.01 | | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Pelembagaan PUG | - | | | 1 Dokumen | 495.000.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Sumber Daya Manusia | Lembaga Pemerintah | - | 544.500.000,00 | |
| | 2 | 08 | 02 | 1.01 | 0005 | Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi | | | | 1 Kebijakan | 82.500.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Sumber Daya Manusia | Lembaga Pemerintah | | 90.750.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 08 | 02 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi | | | | 1 Laporan | 82.500.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Sumber Daya Manusia | Lembaga Pemerintah | | 90.750.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 08 | 02 | 1.01 | 0007 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG | | | | 1 Dokumen | 165.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Sumber Daya Manusia | Lembaga Pemerintah | | 181.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 08 | 02 | 1.01 | 0008 | Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi | | | | 55 Orang | 165.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Sumber Daya Manusia | Lembaga Pemerintah | | 181.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| 280 | 2 | 08 | 03 | | | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Persentase kebijakan perlindungan perempuan | 100persen<br>100persen | | | 100 persen | 220.000.000,00 | | | | | | 100persen<br>100persen | 242.000.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 08 | 03 | 1.01 | | Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan | - | | | 1 Dokumen | 220.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | OPD Provinsi/Kab/Kota, Masyarakat | - | 242.000.000,00 | |
| | 2 | 08 | 03 | 1.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi | | | | 1 Dokumen | 82.500.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | OPD Provinsi/Kab/Kota, Masyarakat | | 90.750.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 08 | 03 | 1.01 | 0002 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi | | | | 55 Perangkat Daerah | 137.500.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | OPD Provinsi/Kab/Kota, Masyarakat | | 151.250.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| 281 | 2 | 08 | 04 | | | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan | 45.86persen | | | 44.98 persen | 748.000.000,00 | | | | | | 45.42persen | 822.800.000,00 | |
| | 2 | 08 | 04 | 1.01 | | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Peningkatan Kualitas Keluarga | - | | | 1 Dokumen | 495.000.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Sumber Daya Manusia | OPD dan Masyarakat | - | 544.500.000,00 | |
| | 2 | 08 | 04 | 1.01 | 0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota | | | | 55 Perangkat Daerah | 165.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Sumber Daya Manusia | OPD dan Masyarakat | | 181.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 08 | 04 | 1.01 | 0003 | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi | | | | 1 Dokumen | 330.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Sumber Daya Manusia | OPD dan Masyarakat | | 363.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 08 | 04 | 1.02 | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga | - | | | 1 Dokumen | 253.000.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Sumber Daya Manusia | Lembaga Pemerintah/Nonpemerintah | - | 278.300.000,00 | |
| | 2 | 08 | 04 | 1.02 | 0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan | | | | 2 Lembaga | 121.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Sumber Daya Manusia | Lembaga Pemerintah/Nonpemerintah | | 133.100.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 08 | 04 | 1.02 | 0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas | | | | 50 Orang | 132.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Sumber Daya Manusia | Lembaga Pemerintah/Nonpemerintah | | 145.200.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| 282 | 2 | 08 | 05 | | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | Persentase capaian OPD yang menyediakan data pilah gender dan anak | 96.29persen | | | 92.59 persen | 80.000.000,00 | | | | | | 96.29persen | 85.000.000,00 | |
| | 2 | 08 | 05 | 1.01 | | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Data Pilah Gender dan Anak | - | | | 1 Dokumen | 80.000.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Sumber Daya Manusia | OPD Provinsi/Kab/Kota | - | 85.000.000,00 | |
| | 2 | 08 | 05 | 1.01 | 0001 | Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia | | | | 1 Dokumen | 80.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Sumber Daya Manusia | OPD Provinsi/Kab/Kota | | 85.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| 283 | 2 | 08 | 06 | | | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Persentase peningkatan SDM dalam Pemenuhan Partisipasi ANAK | 20.90persen | | | 19.90 persen | 1.400.000.000,00 | | | | | | 20.40persen | 1.400.000.000,00 | |
| | 2 | 08 | 06 | 1.01 | | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Pelembagaan PHA | - | | | 1 Dokumen | 250.000.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Sumber Daya Manusia | Pemerintah, Nonpemerintah dan Dunia Usaha | - | 250.000.000,00 | |
| | 2 | 08 | 06 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi | | | | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Sumber Daya Manusia | Pemerintah, Nonpemerintah dan Dunia Usaha | | 100.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 08 | 06 | 1.01 | 0003 | Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi | | | | 50 perangkat daerah | 150.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Sumber Daya Manusia | Pemerintah, Nonpemerintah dan Dunia Usaha | | 150.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 08 | 06 | 1.02 | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan | - | | | 1 Dokumen | 1.150.000.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Sumber Daya Manusia | Lembaga Pemerintah/Nonpemerintah | - | 1.150.000.000,00 | |
| | 2 | 08 | 06 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi | | | | 70 Orang | 150.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Sumber Daya Manusia | Lembaga Pemerintah/Nonpemerintah | | 150.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 08 | 06 | 1.02 | 0005 | Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemernuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota | | | | 1 Kegiatan | 400.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Sumber Daya Manusia | Lembaga Pemerintah/Nonpemerintah | | 400.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 08 | 06 | 1.02 | 0006 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak | | | | 1 Kegiatan | 600.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Sumber Daya Manusia | Lembaga Pemerintah/Nonpemerintah | | 600.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| 284 | 2 | 08 | 07 | | | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Persentase Peningkatan SDM Perlindungan Anak | 37persen 100persen | | | 0,33 persen | 145.000.000,00 | | | | | | 35persen 100persen | 155.000.000,00 | |
| | 2 | 08 | 07 | 1.01 | | Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Pencegahan Kekerasan terhadap Anak | - | | | 1 Dokumen | 90.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | OPD Kab/Kota, Masyarakat | - | 95.000.000,00 | |
| | 2 | 08 | 07 | 1.01 | 0003 | Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Keweangan Provinsi | | | | 70 Orang | 90.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | OPD Kab/Kota, Masyarakat | | 95.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 08 | 07 | 1.03 | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penyediaan Layanan Bagi Anak | - | | | 1 Dokumen | 55.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | OPD Kab/Kota, Masyarakat | - | 60.000.000,00 | |
| | 2 | 08 | 07 | 1.03 | 0004 | Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK Kewenangan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK Kewenangan Provinsi | | | | 1 Kegiatan | 55.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | OPD Kab/Kota, Masyarakat | | 60.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 12 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | | 2.092.700.000,00 | | | | | | | 2.322.000.000,00 | |
| 285 | 2 | 12 | 02 | | | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Persentase masyarakat yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk (KK, KTP, KIA) | 93.27persen | | | 89.8 persen | 739.200.000,00 | | | | | | 91.53persen | 835.000.000,00 | |
| | 2 | 12 | 02 | 1.01 | | Pelayanan Pendaftaran Kependudukan | Persentase kab/kota yang mendapatkan supervisi | - | | | 100 Persen | 209.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | OPD Kab/Kota | - | 229.000.000,00 | |
| | 2 | 12 | 02 | 1.01 | 0001 | Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan | | | | 1 Dokumen | 33.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | OPD Kab/Kota | | 36.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 12 | 02 | 1.01 | 0002 | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi | | | | 2 Dokumen | 55.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | OPD Kab/Kota | | 60.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 12 | 02 | 1.01 | 0003 | Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi | | | | 1 Dokumen | 33.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | OPD Kab/Kota | | 36.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 12 | 02 | 1.01 | 0004 | Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan | | | | 7 Dokumen | 55.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | OPD Kab/Kota | | 61.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 12 | 02 | 1.01 | 0005 | Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun | | | | 2 Dokumen | 33.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | OPD Kab/Kota | | 36.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 12 | 02 | 1.02 | | Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan | 1) Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga (KK); 2) Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3) Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) | - | | | 99,4; 100; 70 Persen | 387.200.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 449.000.000,00 | |
| | 2 | 12 | 02 | 1.02 | 0001 | Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk | | | | 48 Laporan | 231.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 255.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 12 | 02 | 1.02 | 0002 | Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk | | | | 2 Laporan | 33.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 36.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 12 | 02 | 1.02 | 0003 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terkait Pendaftaran Penduduk | | | | 2 Dokumen | 2.200.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 24.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 12 | 02 | 1.02 | 0004 | Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pendaftaran Penduduk | | | | 2 Laporan | 66.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 73.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 12 | 02 | 1.02 | 0005 | Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | | | | 12 Laporan | 55.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 61.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 12 | 02 | 1.03 | | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan | Persentase kab/kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan | - | | | 100 Persen | 143.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | OPD Kab/Kota | - | 157.000.000,00 | |
| | 2 | 12 | 02 | 1.03 | 0001 | Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk | | | | 4 Laporan | 55.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | OPD Kab/Kota | | 60.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 12 | 02 | 1.03 | 0002 | Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk | | | | 2 Laporan | 88.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | OPD Kab/Kota | | 97.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| 286 | 2 | 12 | 03 | | | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | Persentase masyarakat yang memiliki akta pencatatan sipil (Akta Lahir, Akta Mati, Akta Perkawinan) | 96.50persen | | | 89.5 persen | 703.000.000,00 | | | | | | 93persen | 772.000.000,00 | |
| | 2 | 12 | 03 | 1.01 | | Pelayanan Pencatatan Sipil | Persentase kab/kota yang mendapatkan supervisi | - | | | 100 Persen | 209.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | OPD Kab/Kota | - | 229.000.000,00 | |
| | 2 | 12 | 03 | 1.01 | 0001 | Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil yang Ditetapkan | | | | 1 Dokumen | 33.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | OPD Kab/Kota | | 36.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 12 | 03 | 1.01 | 0002 | Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi | | | | 1 Dokumen | 33.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | OPD Kab/Kota | | 36.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 12 | 03 | 1.01 | 0003 | Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting | | | | 1 Dokumen | 55.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | OPD Kab/Kota | | 61.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 12 | 03 | 1.01 | 0004 | Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota | | | | 2 Laporan | 55.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | OPD Kab/Kota | | 60.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 12 | 03 | 1.01 | 0005 | Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang Disusun | | | | 2 Dokumen | 33.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | OPD Kab/Kota | | 36.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 12 | 03 | 1.02 | | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi | 1) Persentase Cakupan Akta Kelahiran; 2) Persentase Cakupan Akta Kematian; 3) Persentase Cakupan Akta Perkawinan | - | | | 98,5; 100; 100 Persen | 351.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | OPD Kab/Kota dan Masyarakat | - | 386.000.000,00 | |
| | 2 | 12 | 03 | 1.02 | 0001 | Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil | | | | 48 Laporan | 175.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | OPD Kab/Kota dan Masyarakat | | 192.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 12 | 03 | 1.02 | 0002 | Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil | | | | 2 Laporan | 33.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | OPD Kab/Kota dan Masyarakat | | 36.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 12 | 03 | 1.02 | 0003 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil | | | | 2 Dokumen | 22.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | OPD Kab/Kota dan Masyarakat | | 24.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 12 | 03 | 1.02 | 0004 | Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil | | | | 2 Dokumen | 66.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | OPD Kab/Kota dan Masyarakat | | 73.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 12 | 03 | 1.02 | 0005 | Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | | | | 12 Laporan | 55.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | OPD Kab/Kota dan Masyarakat | | 61.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 12 | 03 | 1.03 | | Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | - | - | | | - | 143.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | OPD Kab/Kota | - | 157.000.000,00 | |
| | 2 | 12 | 03 | 1.03 | 0001 | Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil | | | | 4 Laporan | 55.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | OPD Kab/Kota | | 60.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 12 | 03 | 1.03 | 0002 | Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil | | | | 2 Laporan | 88.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | OPD Kab/Kota | | 97.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| 287 | 2 | 12 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Persentase perangkat daerah dan sektor lain yang mengadakan pejanjian kerjasama | 48.57Persen | | | 37.14 Persen | 583.000.000,00 | | | | | | 42.86Persen | 640.000.000,00 | |
| | 2 | 12 | 04 | 1.01 | | Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Persentase kab/kota yang mendapatkan supervisi | - | | | 100 Persen | 66.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | OPD Kab/Kota | - | 72.000.000,00 | |
| | 2 | 12 | 04 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | | 2 Dokumen | 33.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | OPD Kab/Kota | | 36.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 12 | 04 | 1.01 | 0002 | Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 33.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | OPD Kab/Kota | | 36.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 12 | 04 | 1.02 | | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi | - | - | | | - | 374.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 411.000.000,00 | |
| | 2 | 12 | 04 | 1.02 | 0001 | Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan | | | | 2 Laporan | 55.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 60.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 12 | 04 | 1.02 | 0002 | Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan | | | | 2 Laporan | 33.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 36.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 12 | 04 | 1.02 | 0003 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | | | | 2 Dokumen | 22.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 24.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 12 | 04 | 1.02 | 0004 | Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi | | | | 2 Dokumen | 66.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 73.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 12 | 04 | 1.02 | 0005 | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan | | | | 13 Dokumen | 110.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 121.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 12 | 04 | 1.02 | 0006 | Kerja Sama dengan Organisasi KeMasyarakatan dan Perguruan Tinggi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil kerja sama Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi | | | | 2 Dokumen | 33.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 36.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 12 | 04 | 1.02 | 0007 | Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Infomasi Administrasi Kependudukan | | | | 12 Laporan | 55.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 61.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 12 | 04 | 1.03 | | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi | - | - | | | - | 143.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 157.000.000,00 | |
| | 2 | 12 | 04 | 1.03 | 0001 | Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | | 4 Laporan | 55.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 60.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 12 | 04 | 1.03 | 0002 | Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan | | | | 28 Orang | 88.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 97.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| 288 | 2 | 12 | 05 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | Persentase penyediaan penyajian data kependudukan tingkat provinsi | 100persen | | | 100 persen | 67.500.000,00 | | | | | | 100persen | 75.000.000,00 | |
| | 2 | 12 | 05 | 1.01 | | Penyediaan Profil Kependudukan | Jumlah Dokumen Penyediaan Profil dan Data Kependudukan Skala Provinsi | - | | | 3 Dokumen | 67.500.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | OPD Provinsi/Kab/Kota | - | 75.000.000,00 | |
| | 2 | 12 | 05 | 1.01 | 0001 | Penyediaan Data Kependudukan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia | | | | 2 Dokumen | 33.500.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | OPD Provinsi/Kab/Kota | | 37.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 12 | 05 | 1.01 | 0002 | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun | | | | 1 Dokumen | 34.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | OPD Provinsi/Kab/Kota | | 38.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 14 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | | 1.530.000.000,00 | | | | | | | 1.730.000.000,00 | |
| 289 | 2 | 14 | 02 | | | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Persentase pembinaan Penyediaan dan pemanfaatan data kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga di kabupaten/kota | 100persen | | | 71.42 persen | 255.000.000,00 | | | | | | 85.71persen | 310.000.000,00 | |
| | 2 | 14 | 02 | 1.01 | | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | Jumlah dokumen pengendalian penduduk | - | | | 1 Dokumen | 170.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | OPD Provinsi/Kab/Kota | - | 205.000.000,00 | |
| | 2 | 14 | 02 | 1.01 | 0004 | Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal | | | | 1 Dokumen | 85.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | OPD Provinsi/Kab/Kota | | 100.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 14 | 02 | 1.01 | 0012 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan | | | | 7 Laporan | 85.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | OPD Provinsi/Kab/Kota | | 105.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 14 | 02 | 1.02 | | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi | Jumlah dokumen pengendalian penduduk dan KB | - | | | 1 Dokumen | 85.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | OPD Provinsi/Kab/Kota | - | 105.000.000,00 | |
| | 2 | 14 | 02 | 1.02 | 0010 | Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Profil program Bangga Kencana tingkat provinsi, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga | | | | 2 Dokumen | 85.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | OPD Provinsi/Kab/Kota | | 105.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| 290 | 2 | 14 | 03 | | | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | persentase pembinaan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di kabupaten/kota | 100persen | | | 100 persen | 505.000.000,00 | | | | | | 100persen | 555.000.000,00 | |
| | 2 | 14 | 03 | 1.01 | | Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Jumlah dokumen KIE KKBPK | - | | | 1 Dokumen | 385.000.000,00 | | | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pembangunan Sumber Daya Manusia | OPD Kab/Kota, Masyarakat | - | 415.000.000,00 | |
| | 2 | 14 | 03 | 1.01 | 0006 | Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal | | | | 2 Dokumen | 115.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pembangunan Sumber Daya Manusia | OPD Kab/Kota, Masyarakat | | 125.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 14 | 03 | 1.01 | 0010 | Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) | | | | 7 Daerah | 185.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pembangunan Sumber Daya Manusia | OPD Kab/Kota, Masyarakat | | 190.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 14 | 03 | 1.01 | 0012 | Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja | | | | 2 Daerah | 85.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pembangunan Sumber Daya Manusia | OPD Kab/Kota, Masyarakat | | 100.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 14 | 03 | 1.02 | | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Jumlah dokumen pemberdayaan dan peningkatan peran serta oranisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kersertaan ber-KB | - | | | 1 Dokumen | 120.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | OPD Kab/Kota, Organisasi, Masyarakat | - | 140.000.000,00 | |
| | 2 | 14 | 03 | 1.02 | 0004 | Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) | | | | 32 Organisasi | 120.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | OPD Kab/Kota, Organisasi, Masyarakat | | 140.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| 291 | 2 | 14 | 04 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | persentase pembinaan kampung KB | 84persen | | | 63 persen | 770.000.000,00 | | | | | | 72persen | 865.000.000,00 | |
| | 2 | 14 | 04 | 1.01 | | Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah dokumen pelaksanaan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga | - | | | 1 Dokumen | 410.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | OPD Kab/Kota, Masyarakat | - | 470.000.000,00 | |
| | 2 | 14 | 04 | 1.01 | 0008 | Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB | | | | 150 Organisasi | 150.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | OPD Kab/Kota, Masyarakat | | 175.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 14 | 04 | 1.01 | 0017 | Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK | | | | 1 Dokumen | 125.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | OPD Kab/Kota, Masyarakat | | 150.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 14 | 04 | 1.01 | 0021 | Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah kelompok PIK-R yang mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) | | | | 50 Kelompok | 135.000.000,00 | Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | OPD Kab/Kota, Masyarakat | | 145.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 14 | 04 | 1.02 | | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah dokumen Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyrakatan tingkat daerah provinsi dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga | - | | | 1 Dokumen | 360.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | OPD Kab/Kota, Masyaraka | - | 395.000.000,00 | |
| | 2 | 14 | 04 | 1.02 | 0006 | Fasilitasi pemerintah daedrah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas | | | | 7 Kabupaten/Kota | 275.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | OPD Kab/Kota, Masyaraka | | 300.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 14 | 04 | 1.02 | 0008 | Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga | | | | 50 Organisasi | 85.000.000,00 | Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | OPD Kab/Kota, Masyaraka | | 95.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| | | | | | | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) PROV.KEP. BANGKA BELITUNG | | | | | 329.250.000,00 | | | | | | | | 362.015.000,00 | |
| | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | 329.250.000,00 | | | | | | | | 362.015.000,00 | |
| | 2 | 08 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | 329.250.000,00 | | | | | | | | 362.015.000,00 | |
| 292 | 2 | 08 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (UPTD PPA) | 75.5nilai<br>80nilai<br>75.5nilai<br>75.5nilai<br>80Nilai | | | 76 Nilai | 131.000.000,00 | | | | | | 75nilai<br>78nilai<br>75nilai<br>75nilai<br>78Nilai | 144.000.000,00 | |
| | 2 | 08 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum UPTD PPA | - | | | 76 Nilai | 130.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 143.000.000,00 | |
| | 2 | 08 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 2 Paket | 20.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 22.000.000,00 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) PROV.KEP. BANGKA BELITUNG |
| | 2 | 08 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 25 Laporan | 110.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 121.000.000,00 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) PROV.KEP. BANGKA BELITUNG |
| | 2 | 08 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah penyediaan jasa surat menyurat UPTD PPA | - | | | 12 Laporan | 1.000.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | UPTD PPA | - | 1.000.000,00 | |
| | 2 | 08 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 1.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | UPTD PPA | | 1.000.000,00 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) PROV.KEP. BANGKA BELITUNG |
| 293 | 2 | 08 | 03 | | | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif | 100persen<br>100persen | | | 100 persen | 78.650.000,00 | | | | | | 100persen<br>100persen | 86.515.000,00 | |
| | 2 | 08 | 03 | 1.02 | | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Layanan Perempuan Korban Kekerasan yang ditangani | - | | | 1 Dokumen | 78.650.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | OPD Provinsi/Kab/Kota, Masyarakat | - | 86.515.000,00 | |
| | 2 | 08 | 03 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat | | | | 6 Orang | 78.650.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | OPD Provinsi/Kab/Kota, Masyarakat | | 86.515.000,00 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) PROV.KEP. BANGKA BELITUNG |
| 294 | 2 | 08 | 07 | | | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif | 37persen<br>100persen | | | 100 persen | 119.600.000,00 | | | | | | 35persen<br>100persen | 131.500.000,00 | |
| | 2 | 08 | 07 | 1.02 | | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Layanan Bagi Anak | - | | | 1 Dokumen | 119.600.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | Masyarakat | - | 131.500.000,00 | |
| | 2 | 08 | 07 | 1.02 | 0005 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi | | | | 8 Orang | 119.600.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | Masyarakat | | 131.500.000,00 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) PROV.KEP. BANGKA BELITUNG |
| | | | | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | | | | | | 62.537.636.286,00 | | | | | | | 66.932.123.186,00 | |
| | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 39.737.636.286,00 | | | | | | | 40.607.123.186,00 | |
| | 2 | 09 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | | | | | 39.737.636.286,00 | | | | | | | 40.607.123.186,00 | |
| 295 | 2 | 09 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 82,1nilai<br>80Nilai<br>80Nilai<br>80Nilai<br>80nilai<br>80nilai | | | - | 37.737.636.286,00 | | | | | | 81,69nilai<br>80Nilai<br>80Nilai<br>80Nilai<br>80nilai<br>80nilai | 38.607.123.186,00 | |
| | 2 | 09 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 396.798.100,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 450.000.000,00 | |
| | 2 | 09 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 158.953.100,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 200.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2 | 09 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 237.845.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 250.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2 | 09 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 29.501.400.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 30.236.685.000,00 | |
| | 2 | 09 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 197 Orang/ Bulan | 29.411.400.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 30.146.685.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2 | 09 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 1 Dokumen | 59.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 59.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2 | 09 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 1 Laporan | 31.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 31.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2 | 09 | 01 | 1.04 | | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 98.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 98.000.000,00 | |
| | 2 | 09 | 01 | 1.04 | 0001 | Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah | | | | 1 Dokumen | 98.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 98.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2 | 09 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 264.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 265.000.000,00 | |
| | 2 | 09 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 30 Orang | 250.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 250.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2 | 09 | 01 | 1.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 197 Orang | 14.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 15.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2 | 09 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 705.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 785.000.000,00 | |
| | 2 | 09 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 80.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 85.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2 | 09 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 70.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 75.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2 | 09 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 30.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 35.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2 | 09 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 20.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2 | 09 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 1 Paket | 60.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 65.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2 | 09 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 1 Laporan | 50.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 55.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2 | 09 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 400.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 450.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2 | 09 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 350.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 350.000.000,00 | |
| | 2 | 09 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 200.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 200.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2 | 09 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 5 Unit | 150.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 150.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2 | 09 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 5.548.599.810,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 5.548.599.810,00 | |
| | 2 | 09 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 10.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 10.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2 | 09 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 219.999.810,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 219.999.810,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2 | 09 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 5.318.600.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 5.318.600.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2 | 09 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 873.838.376,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 873.838.376,00 | |
| | 2 | 09 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 39 Unit | 523.500.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 523.500.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2 | 09 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 50 Unit | 100.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 100.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2 | 09 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 250.338.376,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 250.338.376,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| 296 | 2 | 09 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN | - | 2,95persen | | | - | 200.000.000,00 | | | | | | 2,92persen | 200.000.000,00 | |
| | 2 | 09 | 02 | 1.01 | | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi | - | - | | | - | 200.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 200.000.000,00 | |
| | 2 | 09 | 02 | 1.01 | 0003 | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia | | | | 1 Unit | 170.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 170.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2 | 09 | 02 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik | | | | 1 Laporan | 30.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 30.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| 297 | 2 | 09 | 03 | | | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | - | 86,1 | | | - | 1.350.000.000,00 | | | | | | 85,1 | 1.350.000.000,00 | |
| | 2 | 09 | 03 | 1.01 | | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | - | - | | | - | 270.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 270.000.000,00 | |
| | 2 | 09 | 03 | 1.01 | 0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | | | | 1 Laporan | 105.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 105.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2 | 09 | 03 | 1.01 | 0008 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis | | | | 1 Laporan | 135.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 135.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2 | 09 | 03 | 1.01 | 0012 | Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi | | | | 1 Laporan | 30.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 30.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2 | 09 | 03 | 1.02 | | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi | - | - | | | - | 430.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 430.000.000,00 | |
| | 2 | 09 | 03 | 1.02 | 0007 | Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi | | | | 20 Ton | 400.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 400.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2 | 09 | 03 | 1.02 | 0008 | Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi | | | | 1 Laporan | 30.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 30.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2 | 09 | 03 | 1.04 | | Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi | - | - | | | - | 650.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 650.000.000,00 | |
| | 2 | 09 | 03 | 1.04 | 0001 | Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | | | | 1 Dokumen | 600.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 600.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2 | 09 | 03 | 1.04 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun | | | | 1 Laporan | 50.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 50.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| 298 | 2 | 09 | 04 | | | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | - | 1Dokumen | | | - | 450.000.000,00 | | | | | | 1Dokumen | 450.000.000,00 | |
| | 2 | 09 | 04 | 1.01 | | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi | - | - | | | - | 450.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 450.000.000,00 | |
| | 2 | 09 | 04 | 1.01 | 0001 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan | | | | 1 Dokumen | 450.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 450.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | 22.800.000.000,00 | | | | | | | 26.325.000.000,00 | |
| | 3 | 27 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | | | 22.800.000.000,00 | | | | | | | 26.325.000.000,00 | |
| 299 | 3 | 27 | 02 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | - | 5persen<br>6persen<br>10persen<br>100persen<br>10persen<br>5persen | | | - | 11.925.000.000,00 | | | | | | 5persen<br>1,5persen<br>2,5persen<br>100persen<br>2,5persen<br>5persen | 13.650.000.000,00 | |
| | 3 | 27 | 02 | 1.01 | | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian | - | - | | | - | 700.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 450.000.000,00 | |
| | 3 | 27 | 02 | 1.01 | 0001 | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian | | | | 1 Laporan | 700.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 450.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3 | 27 | 02 | 1.02 | | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman | - | - | | | - | 8.925.000.000,00 | | | - | - | - | - | 10.700.000.000,00 | |
| | 3 | 27 | 02 | 1.02 | 0007 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | 1000 0 | 1.000.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 1.500.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3 | 27 | 02 | 1.02 | 0012 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang | | | | 1 Batang | 6.225.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 6.500.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3 | 27 | 02 | 1.02 | 0013 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak | | | | 2 Ton | 1.200.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 1.200.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3 | 27 | 02 | 1.02 | 0014 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak | | | | 2 Ton | 500.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 1.500.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3 | 27 | 02 | 1.07 | | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain | - | - | | | - | 2.300.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 2.500.000.000,00 | |
| | 3 | 27 | 02 | 1.07 | 0004 | Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain | | | | 100 Ekor | 2.300.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 2.500.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| 300 | 3 | 27 | 03 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | - | 8%<br>14%<br>8% | | | - | 6.850.000.000,00 | | | | | | 2%<br>3,5%<br>2% | 8.150.000.000,00 | |
| | 3 | 27 | 03 | 1.01 | | Penataan Prasarana Pertanian | - | - | | | - | 6.850.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 8.150.000.000,00 | |
| | 3 | 27 | 03 | 1.01 | 0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani | | | | 1 Dokumen | 2.000.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 2.500.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3 | 27 | 03 | 1.01 | 0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani | | | | 1 Dokumen | 500.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 1.000.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3 | 27 | 03 | 1.01 | 0009 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | | | | 1 Laporan | 3.400.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 3.500.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3 | 27 | 03 | 1.01 | 0013 | Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan | | | | 1000 Ha | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 150.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3 | 27 | 03 | 1.01 | 0015 | Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di tingkat provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan | | | | 1 Dokumen | 450.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 550.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3 | 27 | 03 | 1.01 | 0018 | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola di tingkat Provinsi | | | | 1 Dokumen | 400.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 450.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| 301 | 3 | 27 | 04 | | | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | - | 2persen | | | - | 1.600.000.000,00 | | | | | | 2persen | 2.050.000.000,00 | |
| | 3 | 27 | 04 | 1.01 | | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | - | - | | | - | 500.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 550.000.000,00 | |
| | 3 | 27 | 04 | 1.01 | 0005 | Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan | | | | 1 Laporan | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 100.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3 | 27 | 04 | 1.01 | 0007 | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | 1 Laporan | 300.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 350.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3 | 27 | 04 | 1.01 | 0008 | Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan | | | | 3 Kasus | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 100.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3 | 27 | 04 | 1.02 | | Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi | - | - | | | - | 400.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 600.000.000,00 | |
| | 3 | 27 | 04 | 1.02 | 0004 | Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM | | | | 1 Laporan | 150.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 350.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3 | 27 | 04 | 1.02 | 0005 | Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya | | | | 1 Laporan | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 100.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3 | 27 | 04 | 1.02 | 0007 | Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM | | | | 1 Laporan | 150.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 150.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3 | 27 | 04 | 1.03 | | Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan | - | - | | | - | 700.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 900.000.000,00 | |
| | 3 | 27 | 04 | 1.03 | 0002 | Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner | | | | 1 Laporan | 350.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 350.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3 | 27 | 04 | 1.03 | 0003 | Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | | | | 1 Dokumen | 350.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 550.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| 302 | 3 | 27 | 05 | | | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | - | 3persen<br>2Dok | | | - | 350.000.000,00 | | | | | | 3persen<br>2Dok | 350.000.000,00 | |
| | 3 | 27 | 05 | 1.01 | | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi | - | - | | | - | 350.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 350.000.000,00 | |
| | 3 | 27 | 05 | 1.01 | 0002 | Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani | | | | 5000 Ha | 350.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 350.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| 303 | 3 | 27 | 06 | | | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | - | 1Dok | | | - | 75.000.000,00 | | | | | | 1Dok | 75.000.000,00 | |
| | 3 | 27 | 06 | 1.01 | | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 75.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 75.000.000,00 | |
| | 3 | 27 | 06 | 1.01 | 0005 | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi | | | | 1 Laporan | 75.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 75.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| 304 | 3 | 27 | 07 | | | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | - | 100persen | | | - | 2.000.000.000,00 | | | | | | 100persen | 2.050.000.000,00 | |
| | 3 | 27 | 07 | 1.01 | | Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian | - | - | | | - | 400.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 400.000.000,00 | |
| | 3 | 27 | 07 | 1.01 | 0004 | Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya | | | | 30 Orang | 400.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 400.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3 | 27 | 07 | 1.02 | | Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian | - | - | | | - | 1.600.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 1.650.000.000,00 | |
| | 3 | 27 | 07 | 1.02 | 0001 | Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian | | | | 1 Dokumen | 500.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 550.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3 | 27 | 07 | 1.02 | 0002 | Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan | | | | 145 Kelompok | 1.100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 1.100.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | | | | | | UPTD BALAI PROTEKSI TANAMAN | | | | | | 5.433.151.084,00 | | | | | | | 5.530.151.084,00 | |
| | 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | 5.133.151.084,00 | | | | | | | 5.183.151.084,00 | |
| | 3 | 27 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | | | 5.133.151.084,00 | | | | | | | 5.183.151.084,00 | |
| 305 | 3 | 27 | 03 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | - | 8%<br>14%<br>8% | | | - | 4.783.151.084,00 | | | | | | 2%<br>3,5%<br>2% | 4.783.151.084,00 | |
| | 3 | 27 | 03 | 1.01 | | Penataan Prasarana Pertanian | - | - | | | - | 4.783.151.084,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 4.783.151.084,00 | |
| | 3 | 27 | 03 | 1.01 | 0010 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 4.783.151.084,00 | Kab. Bangka, Mendo Barat, Kace | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 4.783.151.084,00 | UPTD BALAI PROTEKSI TANAMAN |
| 306 | 3 | 27 | 05 | | | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | - | 3persen<br>2Dok | | | - | 350.000.000,00 | | | | | | 3persen<br>2Dok | 400.000.000,00 | |
| | 3 | 27 | 05 | 1.01 | | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi | - | - | | | - | 350.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 400.000.000,00 | |
| | 3 | 27 | 05 | 1.01 | 0001 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan | | | | 650 Ha | 350.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 400.000.000,00 | UPTD BALAI PROTEKSI TANAMAN |
| | X | | | | | NON URUSAN | | | | | | 300.000.000,00 | | | | | | | 347.000.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | X | XX | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX | | | | | | 300.000.000,00 | | | | | | | 347.000.000,00 | |
| 307 | X | XX | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 82,1nilai<br>80Nilai<br>80Nilai<br>80Nilai<br>80nilai<br>80nilai | | | - | 300.000.000,00 | | | | | | 81,69nilai<br>80Nilai<br>80Nilai<br>80Nilai<br>80nilai<br>80nilai | 347.000.000,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 189.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 225.000.000,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 20.000.000,00 | Kab. Bangka, Mendo Barat, Kace | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 25.000.000,00 | UPTD BALAI PROTEKSI TANAMAN |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 30.000.000,00 | Kab. Bangka, Mendo Barat, Kace | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 35.000.000,00 | UPTD BALAI PROTEKSI TANAMAN |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 24.000.000,00 | Kab. Bangka, Mendo Barat, Kace | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 25.000.000,00 | UPTD BALAI PROTEKSI TANAMAN |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 15.000.000,00 | Kab. Bangka, Mendo Barat, Kace | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 20.000.000,00 | UPTD BALAI PROTEKSI TANAMAN |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 1 Paket | 35.000.000,00 | Kab. Bangka, Mendo Barat, Kace | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 40.000.000,00 | UPTD BALAI PROTEKSI TANAMAN |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 1 Laporan | 5.000.000,00 | Kab. Bangka, Mendo Barat, Kace | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 10.000.000,00 | UPTD BALAI PROTEKSI TANAMAN |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 60.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 70.000.000,00 | UPTD BALAI PROTEKSI TANAMAN |
| | X | XX | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 91.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 97.000.000,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1.000.000,00 | Kab. Bangka, Mendo Barat, Kace | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 2.000.000,00 | UPTD BALAI PROTEKSI TANAMAN |
| | X | XX | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 90.000.000,00 | Kab. Bangka, Mendo Barat, Kace | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 95.000.000,00 | UPTD BALAI PROTEKSI TANAMAN |
| | X | XX | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 20.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 25.000.000,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 25 Unit | 20.000.000,00 | Kab. Bangka, Mendo Barat, Kace | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 25.000.000,00 | UPTD BALAI PROTEKSI TANAMAN |
| | | | | | | UPTD BALAI BENIH PERTANIAN | | | | | | 2.100.000.000,00 | | | | | | | 2.325.000.000,00 | |
| | 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | 1.150.000.000,00 | | | | | | | 1.300.000.000,00 | |
| | 3 | 27 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | | | 1.150.000.000,00 | | | | | | | 1.300.000.000,00 | |
| 308 | 3 | 27 | 02 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | - | 5persen<br>6persen<br>10persen<br>100persen<br>10persen<br>5persen | | | - | 1.150.000.000,00 | | | | | | 5persen<br>1,5persen<br>2,5persen<br>100persen<br>2,5persen<br>5persen | 1.300.000.000,00 | |
| | 3 | 27 | 02 | 1.02 | | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman | - | - | | | - | 550.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 650.000.000,00 | |
| | 3 | 27 | 02 | 1.02 | 0007 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak | | | | 10000 Batang | 300.000.000,00 | Kab. Bangka, Mendo Barat, Air Buluh | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 350.000.000,00 | UPTD BALAI BENIH PERTANIAN |
| | 3 | 27 | 02 | 1.02 | 0012 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang | | | | 10000 Batang | 250.000.000,00 | Kab. Bangka, Mendo Barat, Air Buluh | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 300.000.000,00 | UPTD BALAI BENIH PERTANIAN |
| | 3 | 27 | 02 | 1.04 | | Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | - | - | | | - | 600.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 650.000.000,00 | |
| | 3 | 27 | 02 | 1.04 | 0004 | Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | | | | 1 laporan | 600.000.000,00 | Kab. Bangka, Mendo Barat, Air Buluh | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 650.000.000,00 | UPTD BALAI BENIH PERTANIAN |
| | X | | | | | NON URUSAN | | | | | | 950.000.000,00 | | | | | | | 1.025.000.000,00 | |
| | X | XX | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX | | | | | | 950.000.000,00 | | | | | | | 1.025.000.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 309 | X | XX | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 82,1nilai<br>80Nilai<br>80Nilai<br>80Nilai<br>80nilai<br>80nilai | | | - | 950.000.000,00 | | | | | | 81,69nilai<br>80Nilai<br>80Nilai<br>80Nilai<br>80nilai<br>80nilai | 1.025.000.000,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 290.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 325.000.000,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 50.000.000,00 | Kab. Bangka, Mendo Barat, Air Buluh | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 55.000.000,00 | UPTD BALAI BENIH PERTANIAN |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 20.000.000,00 | Kab. Bangka, Mendo Barat, Air Buluh | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 25.000.000,00 | UPTD BALAI BENIH PERTANIAN |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 20.000.000,00 | Kab. Bangka, Mendo Barat, Air Buluh | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 25.000.000,00 | UPTD BALAI BENIH PERTANIAN |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 10.000.000,00 | Kab. Bangka, Mendo Barat, Air Buluh | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 15.000.000,00 | UPTD BALAI BENIH PERTANIAN |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 1 Paket | 20.000.000,00 | Kab. Bangka, Mendo Barat, Air Buluh | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 25.000.000,00 | UPTD BALAI BENIH PERTANIAN |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 1 Laporan | 20.000.000,00 | Kab. Bangka, Mendo Barat, Air Buluh | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 25.000.000,00 | UPTD BALAI BENIH PERTANIAN |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 150.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 155.000.000,00 | UPTD BALAI BENIH PERTANIAN |
| | X | XX | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 300.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 315.000.000,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 2 Unit | 200.000.000,00 | Kab. Bangka, Mendo Barat, Air Buluh | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 205.000.000,00 | UPTD BALAI BENIH PERTANIAN |
| | X | XX | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 1 Paket | 50.000.000,00 | Kab. Bangka, Mendo Barat, Air Buluh | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 55.000.000,00 | UPTD BALAI BENIH PERTANIAN |
| | X | XX | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 50.000.000,00 | Kab. Bangka, Mendo Barat, Air Buluh | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 55.000.000,00 | UPTD BALAI BENIH PERTANIAN |
| | X | XX | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 60.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 70.000.000,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 10.000.000,00 | Kab. Bangka, Mendo Barat, Air Buluh | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 15.000.000,00 | UPTD BALAI BENIH PERTANIAN |
| | X | XX | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 50.000.000,00 | Kab. Bangka, Mendo Barat, Air Buluh | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 55.000.000,00 | UPTD BALAI BENIH PERTANIAN |
| | X | XX | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 300.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 315.000.000,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 4 Unit | 150.000.000,00 | Kab. Bangka, Mendo Barat, Air Buluh | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 155.000.000,00 | UPTD BALAI BENIH PERTANIAN |
| | X | XX | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 25 Unit | 50.000.000,00 | Kab. Bangka, Mendo Barat, Air Buluh | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 55.000.000,00 | UPTD BALAI BENIH PERTANIAN |
| | X | XX | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 100.000.000,00 | Kab. Bangka, Mendo Barat, Air Buluh | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 105.000.000,00 | UPTD BALAI BENIH PERTANIAN |
| | | | | | | PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH | | | | | | 800.000.000,00 | | | | | | | 923.000.000,00 | |
| | 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | 420.000.000,00 | | | | | | | 500.000.000,00 | |
| | 3 | 27 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | | | 420.000.000,00 | | | | | | | 500.000.000,00 | |
| 310 | 3 | 27 | 02 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | - | 5persen<br>6persen<br>10persen<br>100persen<br>10persen<br>5persen | | | - | 420.000.000,00 | | | | | | 5persen<br>1,5persen<br>2,5persen<br>100persen<br>2,5persen<br>5persen | 500.000.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3 | 27 | 02 | 1.02 | | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman | - | - | | | - | 290.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 350.000.000,00 | |
| | 3 | 27 | 02 | 1.02 | 0001 | Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sertifikat Benih | | | | 75 Sertifikat | 45.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 50.000.000,00 | PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH |
| | 3 | 27 | 02 | 1.02 | 0005 | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura | | | | 3 Laporan | 245.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 300.000.000,00 | PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH |
| | 3 | 27 | 02 | 1.03 | | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi | - | - | | | - | 130.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 150.000.000,00 | |
| | 3 | 27 | 02 | 1.03 | 0002 | Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai | | | | 2 Varietas Unggul Baru (VUB) | 130.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 150.000.000,00 | PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH |
| | X | | | | | NON URUSAN | | | | | | 380.000.000,00 | | | | | | | 423.000.000,00 | |
| | X | XX | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX | | | | | | 380.000.000,00 | | | | | | | 423.000.000,00 | |
| 311 | X | XX | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 82,1nilai<br>80Nilai<br>80Nilai<br>80Nilai<br>80nilai<br>80nilai | | | - | 380.000.000,00 | | | | | | 81,69nilai<br>80Nilai<br>80Nilai<br>80Nilai<br>80nilai<br>80nilai | 423.000.000,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 203.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 230.000.000,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 15.000.000,00 | Kab. Bangka, Mendo Barat, Kace | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 20.000.000,00 | PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 75.000.000,00 | Kab. Bangka, Mendo Barat, Kace | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 80.000.000,00 | PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 25.000.000,00 | Kab. Bangka, Mendo Barat, Kace | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 30.000.000,00 | PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 8.000.000,00 | Kab. Bangka, Mendo Barat, Kace | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 10.000.000,00 | PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 1 Paket | 27.000.000,00 | Kab. Bangka, Mendo Barat, Kace | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 30.000.000,00 | PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 1 Laporan | 8.000.000,00 | Kab. Bangka, Mendo Barat, Kace | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 10.000.000,00 | PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 45.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 50.000.000,00 | PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH |
| | X | XX | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 77.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 83.000.000,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 2.000.000,00 | Kab. Bangka, Mendo Barat, Kace | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 3.000.000,00 | PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH |
| | X | XX | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 75.000.000,00 | Kab. Bangka, Mendo Barat, Kace Timur | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 80.000.000,00 | PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH |
| | X | XX | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 100.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 110.000.000,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 25 Unit | 50.000.000,00 | Kab. Bangka, Mendo Barat, Kace | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 55.000.000,00 | PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH |
| | X | XX | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 50.000.000,00 | Kab. Bangka, Mendo Barat, Kace | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 55.000.000,00 | PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH |
| | | | | | | PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN | | | | | | 450.000.000,00 | | | | | | | 530.000.000,00 | |
| | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 285.000.000,00 | | | | | | | 340.000.000,00 | |
| | 2 | 09 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | | | | | 285.000.000,00 | | | | | | | 340.000.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 312 | 2 | 09 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 82,1nilai<br>80Nilai<br>80Nilai<br>80Nilai<br>80nilai<br>80nilai | | | - | 5.000.000,00 | | | | | | 81,69nilai<br>80Nilai<br>80Nilai<br>80Nilai<br>80nilai<br>80nilai | 10.000.000,00 | |
| | 2 | 09 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 5.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 10.000.000,00 | |
| | 2 | 09 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 5.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 10.000.000,00 | PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN |
| 313 | 2 | 09 | 05 | | | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | - | 86persen | | | - | 280.000.000,00 | | | | | | 86persen | 330.000.000,00 | |
| | 2 | 09 | 05 | 1.01 | | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 280.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 330.000.000,00 | |
| | 2 | 09 | 05 | 1.01 | 0006 | Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | | | | 25 Sertifikat | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 150.000.000,00 | PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN |
| | 2 | 09 | 05 | 1.01 | 0008 | Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan | | | | 1 Dokumen | 130.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 150.000.000,00 | PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN |
| | 2 | 09 | 05 | 1.01 | 0009 | Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 30.000.000,00 | PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN |
| | X | | | | | NON URUSAN | | | | | | 165.000.000,00 | | | | | | | 190.000.000,00 | |
| | X | XX | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX | | | | | | 165.000.000,00 | | | | | | | 190.000.000,00 | |
| 314 | X | XX | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 82,1nilai<br>80Nilai<br>80Nilai<br>80Nilai<br>80nilai<br>80nilai | | | - | 165.000.000,00 | | | | | | 81,69nilai<br>80Nilai<br>80Nilai<br>80Nilai<br>80nilai<br>80nilai | 190.000.000,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 140.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 160.000.000,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 9.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 10.000.000,00 | PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 15.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 20.000.000,00 | PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 5.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 10.000.000,00 | PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 1 Paket | 10.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 15.000.000,00 | PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 1 Laporan | 3.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 5.000.000,00 | PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 98.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 100.000.000,00 | PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN |
| | X | XX | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 25.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 30.000.000,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 25 Unit | 25.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 30.000.000,00 | PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN |
| | | | | | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | | | | | | 50.588.508.707,00 | | | | | | | 16.425.000.000,00 | |
| | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 45.938.758.707,00 | | | | | | | 11.420.000.000,00 | |
| | 2 | 11 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | 45.682.758.707,00 | | | | | | | 11.125.000.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 315 | 2 | 11 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (DLHK)<br>Nilai SAKIP Perangkat Daerah (DLHK) | 90nilai<br>90nilai<br>85nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai | | | 90 nilai<br>81 nilai | 40.957.758.707,00 | | | | | | 90nilai<br>90nilai<br>83nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai | 5.500.000.000,00 | |
| | 2 | 11 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | 16 dokumen | 196.000.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Masyarakat dan aparatur | - | 205.000.000,00 | |
| | 2 | 11 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 130.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Masyarakat dan aparatur | | 140.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2 | 11 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Masyarakat dan aparatur | | 20.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2 | 11 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 7.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Masyarakat dan aparatur | | 10.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2 | 11 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Masyarakat dan aparatur | | 15.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2 | 11 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Masyarakat dan aparatur | | 10.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2 | 11 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 9.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Masyarakat dan aparatur | | 10.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2 | 11 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 7 Laporan | 25.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Masyarakat dan aparatur | | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2 | 11 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 34.971.758.707,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 30.000.000,00 | |
| | 2 | 11 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 225 Orang/ Bulan | 34.946.758.707,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2 | 11 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 1 Dokumen | 7.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 10.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2 | 11 | 01 | 1.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 10.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2 | 11 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 1 Laporan | 8.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 10.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2 | 11 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 30.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 40.000.000,00 | |
| | 2 | 11 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 20.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2 | 11 | 01 | 1.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 20.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2 | 11 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah | - | | | 90 Nilai | 740.000.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Masyarakat dan aparatur | - | 825.000.000,00 | |
| | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 50.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Masyarakat dan aparatur | | 50.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Masyarakat dan aparatur | | 100.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 10 Paket | 50.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Masyarakat dan aparatur | | 50.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 2 Paket | 50.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Masyarakat dan aparatur | | 50.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 1 Paket | 80.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Masyarakat dan aparatur | | 100.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 1 Laporan | 60.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Masyarakat dan aparatur | | 75.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 350.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Masyarakat dan aparatur | | 400.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2 | 11 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 1.950.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 1.300.000.000,00 | |
| | 2 | 11 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 4 Unit | 1.500.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 1.000.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2 | 11 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 4 Paket | 150.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 100.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2 | 11 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 5 Unit | 300.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 200.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2 | 11 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 2.400.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 2.400.000.000,00 | |
| | 2 | 11 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 400.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 400.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2 | 11 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 2.000.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 2.000.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2 | 11 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 670.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 700.000.000,00 | |
| | 2 | 11 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 50.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 50.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2 | 11 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 10 Unit | 300.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 300.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 11 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 5 Unit | 200.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 200.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2 | 11 | 01 | 1.09 | 0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | | | | 1 Unit | 20.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 50.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2 | 11 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 4 Unit | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 100.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| 316 | 2 | 11 | 02 | | | PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP | Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun | 100% | | | 100 % | 1.150.000.000,00 | | | | | | 100% | 900.000.000,00 | |
| | 2 | 11 | 02 | 1.01 | | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi | Terlaksananya penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingakungan hidup (RPPLH) Provinsi | - | | | 6 dokumen | 400.000.000,00 | | | - | - | - | - | 200.000.000,00 | |
| | 2 | 11 | 02 | 1.01 | 0002 | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi | | | | 2 Dokumen | 200.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 200.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2 | 11 | 02 | 1.01 | 0006 | Peninjauan Kembali terhadap RPPLH Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Dokumen RPPLH Provinsi yang dilakukan peninjauan kembali | | | | 1 Dokuman | 200.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2 | 11 | 02 | 1.02 | | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi | Terlaksananya penyelenggaraan kajian lingkunga hidup strategis (KLHS) Provinsi | - | | | 1 dokumen | 750.000.000,00 | | | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Pembangunan Lingkungan | Masyarakat dan aparatur | - | 700.000.000,00 | |
| | 2 | 11 | 02 | 1.02 | 0002 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun | | | | 1 Dokumen | 575.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Pembangunan Lingkungan | Masyarakat dan aparatur | | 500.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2 | 11 | 02 | 1.02 | 0007 | Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun | | | | 1 Dokumen | 175.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | Masyarakat dan aparatur | | 200.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| 317 | 2 | 11 | 03 | | | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | - | 90%<br>100%<br>70% | | | - | 375.000.000,00 | | | | | | 90%<br>100%<br>67% | 450.000.000,00 | |
| | 2 | 11 | 03 | 1.01 | | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup | - | - | | | - | 375.000.000,00 | | | - | Pembangunan Lingkungan | - | - | 450.000.000,00 | |
| | 2 | 11 | 03 | 1.01 | 0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | | | | 1 Dokumen | 200.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 250.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2 | 11 | 03 | 1.01 | 0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan | | | | 1 Dokumen | 175.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 200.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| 318 | 2 | 11 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | - | 100% | | | - | 275.000.000,00 | | | | | | 100% | 350.000.000,00 | |
| | 2 | 11 | 04 | 1.01 | | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi | - | - | | | - | 275.000.000,00 | | | - | Pembangunan Lingkungan | - | - | 350.000.000,00 | |
| | 2 | 11 | 04 | 1.01 | 0001 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun | | | | 1 Dokumen | 200.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 250.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2 | 11 | 04 | 1.01 | 0006 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | | | | 50 Orang | 75.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 100.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| 319 | 2 | 11 | 05 | | | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | - | 100% | | | - | 300.000.000,00 | | | | | | 100% | 500.000.000,00 | |
| | 2 | 11 | 05 | 1.01 | | Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | - | - | | | - | 300.000.000,00 | | | - | Pembangunan Lingkungan | - | - | 500.000.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 11 | 05 | 1.01 | 0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | | | 1 Dokumen | 150.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 250.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2 | 11 | 05 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya | | | | 1 Dokumen | 150.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 250.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| 320 | 2 | 11 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | - | 75% | | | - | 450.000.000,00 | | | | | | 70% | 550.000.000,00 | |
| | 2 | 11 | 06 | 1.01 | | Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | - | - | | | - | 450.000.000,00 | | | - | Pembangunan Lingkungan | - | - | 550.000.000,00 | |
| | 2 | 11 | 06 | 1.01 | 0001 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan | | | | 43 Dokumen | 250.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 300.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2 | 11 | 06 | 1.01 | 0006 | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi | | | | 120 Badan Usaha | 200.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 250.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| 321 | 2 | 11 | 07 | | | PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH | - | 100% | | | - | 125.000.000,00 | | | | | | 100% | 175.000.000,00 | |
| | 2 | 11 | 07 | 1.01 | | Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH | - | - | | | - | 75.000.000,00 | | | - | Pembangunan Lingkungan | - | - | 100.000.000,00 | |
| | 2 | 11 | 07 | 1.01 | 0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH | | | | 1 Dokumen | 75.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 100.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2 | 11 | 07 | 1.02 | | Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH | - | - | | | - | 50.000.000,00 | | | - | Pembangunan Lingkungan | - | - | 75.000.000,00 | |
| | 2 | 11 | 07 | 1.02 | 0001 | Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 75.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| 322 | 2 | 11 | 08 | | | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | - | 90% | | | - | 700.000.000,00 | | | | | | 80% | 900.000.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 11 | 08 | 1.01 | | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi | - | - | | | - | 700.000.000,00 | | | - | Pembangunan Lingkungan | - | - | 900.000.000,00 | |
| | 2 | 11 | 08 | 1.01 | 0002 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | | | | 1 Dokumen | 300.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 350.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2 | 11 | 08 | 1.01 | 0003 | Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat | | | | 150 Orang | 150.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 200.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2 | 11 | 08 | 1.01 | 0004 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat | | | | 210 Keluarga | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 150.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2 | 11 | 08 | 1.01 | 0005 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH | | | | 35 Lembaga | 150.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 200.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| 323 | 2 | 11 | 09 | | | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | - | 90% | | | - | 200.000.000,00 | | | | | | 85% | 250.000.000,00 | |
| | 2 | 11 | 09 | 1.01 | | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi | - | - | | | - | 200.000.000,00 | | | - | Pembangunan Lingkungan | - | - | 250.000.000,00 | |
| | 2 | 11 | 09 | 1.01 | 0001 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH | | | | 30 Entitas | 200.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 250.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| 324 | 2 | 11 | 10 | | | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | - | 100% | | | - | 200.000.000,00 | | | | | | 100% | 300.000.000,00 | |
| | 2 | 11 | 10 | 1.01 | | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi | - | - | | | - | 200.000.000,00 | | | - | Pembangunan Lingkungan | - | - | 300.000.000,00 | |
| | 2 | 11 | 10 | 1.01 | 0003 | Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi | | | | 1 Perkara | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 150.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2 | 11 | 10 | 1.01 | 0007 | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani | | | | 100 Pengaduan | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 150.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| 325 | 2 | 11 | 11 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | - | 15% | | | - | 950.000.000,00 | | | | | | 10% | 1.250.000.000,00 | |
| | 2 | 11 | 11 | 1.01 | | Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional | - | - | | | - | 950.000.000,00 | | | - | Pembangunan Lingkungan | - | - | 1.250.000.000,00 | |
| | 2 | 11 | 11 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan | | | | 1 Dokumen | 200.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 250.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2 | 11 | 11 | 1.01 | 0006 | Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan | | | | 81000 Ton | 250.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 300.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2 | 11 | 11 | 1.01 | 0009 | Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan | | | | 1 Dokumen | 500.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 700.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | 4.649.750.000,00 | | | | | | | 5.005.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | | | | | | 4.649.750.000,00 | | | | | | | 5.005.000.000,00 | |
| 326 | 3 | 28 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | - | 35.41%<br>13.17%<br>13.17%<br>13.17%<br>35.41%<br>13.17%<br>35.41%<br>13.17%<br>13.17%<br>13.17%<br>13.17%<br>20%<br>35.41%<br>35.41%<br>20%<br>20%<br>20%<br>20%<br>20%<br>20%<br>20%<br>35.41%<br>35.41%<br>35.41%<br>13.17%<br>35.41%<br>20% | | | - | 3.425.500.000,00 | | | | | | 35.61%<br>13.17%<br>13.17%<br>13.17%<br>35.61%<br>13.17%<br>35.61%<br>13.17%<br>13.17%<br>13.17%<br>13.17%<br>20%<br>35.61%<br>35.61%<br>20%<br>20%<br>20%<br>20%<br>20%<br>20%<br>20%<br>35.61%<br>35.61%<br>35.61%<br>13.17%<br>35.61%<br>20% | 3.690.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 03 | 1.03 | | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung | - | - | | | - | 984.000.000,00 | | | - | Pembangunan Lingkungan | - | - | 875.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 03 | 1.03 | 0001 | Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala | | | | 5 Dokumen | 68.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 75.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 3 | 28 | 03 | 1.03 | 0002 | Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala | | | | 5 Dokumen | 128.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 50.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 3 | 28 | 03 | 1.03 | 0003 | Pelayanan Perizinan Usaha/Kerja Sama Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) | | | | 2 Dokumen | 200.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 250.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 3 | 28 | 03 | 1.03 | 0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi | | | | 8 Dokumen | 216.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 250.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 3 | 28 | 03 | 1.03 | 0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung | | | | 8 Dokumen | 200.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 3 | 28 | 03 | 1.03 | 0006 | Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan | | | | 8 Dokumen | 72.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 100.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 3 | 28 | 03 | 1.03 | 0007 | Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan | | | | 8 Dokumen | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 150.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 3 | 28 | 03 | 1.04 | | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | - | - | | | - | 132.000.000,00 | | | - | Pembangunan Lingkungan | - | - | 135.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0001 | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) | | | | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 100.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0008 | Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan | | | | 1 Laporan | 32.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 35.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | - | - | | | - | 1.850.000.000,00 | | | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Pembangunan Lingkungan | Masyarakat dan aparatur | - | 2.100.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0001 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan | | | | 100000 Ha | 1.400.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Pembangunan Lingkungan | Masyarakat dan aparatur | | 1.500.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0002 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan | | | | 55000 Ha | 200.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Pembangunan Lingkungan | Masyarakat dan aparatur | | 250.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0003 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan | | | | 2 Operasi | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Pembangunan Lingkungan | Masyarakat dan aparatur | | 100.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Pembangunan Lingkungan | Masyarakat dan aparatur | | 100.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun | | | | 1 Laporan | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Pembangunan Lingkungan | Masyarakat dan aparatur | | 150.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 3 | 28 | 03 | 1.06 | | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) | - | - | | | - | 166.000.000,00 | | | - | Pembangunan Lingkungan | - | - | 235.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 03 | 1.06 | 0002 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Permohonan PBPHH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani | | | | 5 Unit Managemen | 33.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 50.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 3 | 28 | 03 | 1.06 | 0003 | Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi | | | | 0 Unit Managemen | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 150.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 3 | 28 | 03 | 1.06 | 0004 | Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Managemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH | | | | 5 Unit Managemen | 33.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 35.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 3 | 28 | 03 | 1.07 | | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 m3/tahun | - | | | 15 dokumen | 200.000.000,00 | | | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Pembangunan Lingkungan | Masyarakat dan aparatur | - | 225.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 03 | 1.07 | 0002 | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi | | | | 5 Dokumen | 50.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Pembangunan Lingkungan | Masyarakat dan aparatur | | 75.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 3 | 28 | 03 | 1.07 | 0003 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani | | | | 10 Unit Managemen | 150.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Pembangunan Lingkungan | Masyarakat dan aparatur | | 150.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 3 | 28 | 03 | 1.09 | | Perbenihan Tanaman Hutan | Terlaksananya pembangunan sumber benih | - | | | 5 dokumen | 93.500.000,00 | | | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Pembangunan Lingkungan | Masyarakat dan aparatur | - | 120.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 03 | 1.09 | 0001 | Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi | | | | 1 Unit Usaha | 25.500.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Pembangunan Lingkungan | Masyarakat dan aparatur | | 50.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 3 | 28 | 03 | 1.09 | 0002 | Sertifikasi Sumber Benih | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan | | | | 1 Sertifikat | 34.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Pembangunan Lingkungan | Masyarakat dan aparatur | | 35.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 3 | 28 | 03 | 1.09 | 0005 | Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar | | | | 5 Laporan | 34.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Pembangunan Lingkungan | Masyarakat dan aparatur | | 35.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| 327 | 3 | 28 | 04 | | | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA | - | 100% | | | - | 405.500.000,00 | | | | | | 100% | 450.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 04 | 1.02 | | Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi | - | - | | | - | 126.500.000,00 | | | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Pembangunan Lingkungan | Masyarrakat dan aparatur | - | 150.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 04 | 1.02 | 0001 | Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES | | | | 1 Laporan | 126.500.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Pembangunan Lingkungan | Masyarrakat dan aparatur | | 150.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 3 | 28 | 04 | 1.03 | | Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam | - | - | | | - | 279.000.000,00 | | | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Pembangunan Lingkungan | Masyarakat dan aparatur | - | 300.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 04 | 1.03 | 0005 | Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan | | | | 50 Orang | 130.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Pembangunan Lingkungan | Masyarakat dan aparatur | | 150.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 3 | 28 | 04 | 1.03 | 0006 | Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola | | | | 100 Ha | 149.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Pembangunan Lingkungan | Masyarakat dan aparatur | | 150.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| 328 | 3 | 28 | 05 | | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | - | 50%<br>50%<br>50%<br>50%<br>50%<br>50%<br>50%<br>50%<br>50% | | | - | 324.000.000,00 | | | | | | 45%<br>45%<br>45%<br>45%<br>45%<br>45%<br>45%<br>45%<br>45% | 425.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 05 | 1.01 | | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | - | - | | | - | 324.000.000,00 | | | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Pembangunan Lingkungan | Masyarakat dan aparatur | - | 425.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0001 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas | | | | 32 Orang | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Pembangunan Lingkungan | Masyarakat dan aparatur | | 150.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan | | | | 20 Kelompok | 60.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Pembangunan Lingkungan | Masyarakat dan aparatur | | 75.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0003 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial | | | | 116767 Ha | 164.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | Pembangunan Lingkungan | Masyarakat dan aparatur | | 200.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| 329 | 3 | 28 | 06 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) | - | 9.13% | | | - | 494.750.000,00 | | | | | | 9.13% | 440.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 06 | 1.01 | | Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | - | - | | | - | 494.750.000,00 | | | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Pembangunan Lingkungan | Masyarakat dan aparatur | - | 440.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 06 | 1.01 | 0001 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan | | | | 1 Dokumen | 60.500.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Pembangunan Lingkungan | Masyarakat dan aparatur | | 65.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 3 | 28 | 06 | 1.01 | 0002 | Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS | | | | 1 Dokumen | 145.250.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Pembangunan Lingkungan | Masyarakat dan aparatur | | 75.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 3 | 28 | 06 | 1.01 | 0004 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS | | | | 100 Orang | 155.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Pembangunan Lingkungan | Masyarakat dan aparatur | | 200.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 3 | 28 | 06 | 1.01 | 0005 | Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS | | | | 1 Lembaga | 134.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Pembangunan Lingkungan | Masyarakat dan aparatur | | 100.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 45.938.758.707,00 | | | | | | | 11.420.000.000,00 | |
| | 2 | - | | | | - | | | | | | 256.000.000,00 | | | | | | | 295.000.000,00 | |
| 330 | 2 | - | - | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90nilai<br>90nilai<br>85nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai | | | - | 256.000.000,00 | | | | | | 90nilai<br>90nilai<br>83nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai | 295.000.000,00 | |
| | 2 | - | - | - | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 6.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 10.000.000,00 | |
| | 2 | - | - | - | - | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 1 Laporan | 6.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 10.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2 | - | - | - | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 150.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 150.000.000,00 | |
| | 2 | - | - | - | - | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 5 Unit | 150.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 150.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2 | - | - | - | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 30.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 35.000.000,00 | |
| | 2 | - | - | - | - | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 30.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 35.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2 | - | - | - | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | - | | | - | 70.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 100.000.000,00 | |
| | 2 | - | - | - | - | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 1 Laporan | 35.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 50.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2 | - | - | - | - | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 1 Dokumen | 35.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 50.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | | | | | | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sigambir Kota Waringin | | | | | | 586.100.000,00 | | | | | | | 502.500.000,00 | |
| | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 293.000.000,00 | | | | | | | 292.500.000,00 | |
| | 2 | 11 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | 293.000.000,00 | | | | | | | 292.500.000,00 | |
| 331 | 2 | 11 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90nilai<br>90nilai<br>85nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai | | | - | 293.000.000,00 | | | | | | 90nilai<br>90nilai<br>83nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai | 292.500.000,00 | |
| | 2 | 11 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | - | | | - | 2.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 2.000.000,00 | |
| | 2 | 11 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 2 Laporan | 2.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 2.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SIGAMBIR KOTA WARINGIN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 11 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 104.500.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 97.000.000,00 | |
| | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 10.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 10.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SIGAMBIR KOTA WARINGIN |
| | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 25.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 25.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SIGAMBIR KOTA WARINGIN |
| | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 10.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 10.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SIGAMBIR KOTA WARINGIN |
| | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 3.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 4.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SIGAMBIR KOTA WARINGIN |
| | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 1 Paket | 20.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SIGAMBIR KOTA WARINGIN |
| | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 1 Laporan | 2.500.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 3.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SIGAMBIR KOTA WARINGIN |
| | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 170 Laporan | 34.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 45.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SIGAMBIR KOTA WARINGIN |
| | 2 | 11 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 25.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 30.000.000,00 | |
| | 2 | 11 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 2 Unit | 25.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 30.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SIGAMBIR KOTA WARINGIN |
| | 2 | 11 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 52.500.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 53.500.000,00 | |
| | 2 | 11 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 10 Laporan | 1.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 1.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SIGAMBIR KOTA WARINGIN |
| | 2 | 11 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 24.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 25.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SIGAMBIR KOTA WARINGIN |
| | 2 | 11 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 25.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 25.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SIGAMBIR KOTA WARINGIN |
| | 2 | 11 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 2 Laporan | 2.500.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 2.500.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SIGAMBIR KOTA WARINGIN |
| | 2 | 11 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 109.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 110.000.000,00 | |
| | 2 | 11 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 6 Unit | 50.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 50.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SIGAMBIR KOTA WARINGIN |
| | 2 | 11 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 50.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 50.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SIGAMBIR KOTA WARINGIN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 11 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 9 Unit | 9.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 10.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SIGAMBIR KOTA WARINGIN |
| | 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | 293.100.000,00 | | | | | | | 210.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | | | | | | 293.100.000,00 | | | | | | | 210.000.000,00 | |
| 332 | 3 | 28 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | - | 35.41%<br>13.17%<br>13.17%<br>13.17%<br>35.41%<br>13.17%<br>35.41%<br>13.17%<br>13.17%<br>13.17%<br>13.17%<br>20%<br>35.41%<br>35.41%<br>20%<br>20%<br>20%<br>20%<br>20%<br>20%<br>20%<br>35.41%<br>35.41%<br>35.41%<br>13.17%<br>35.41%<br>20% | | | - | 161.500.000,00 | | | | | | 35.61%<br>13.17%<br>13.17%<br>13.17%<br>35.61%<br>13.17%<br>35.61%<br>13.17%<br>13.17%<br>13.17%<br>13.17%<br>20%<br>35.61%<br>35.61%<br>20%<br>20%<br>20%<br>20%<br>20%<br>20%<br>20%<br>35.61%<br>35.61%<br>35.61%<br>13.17%<br>35.61%<br>20% | 170.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 03 | 1.02 | | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | - | - | | | - | 50.000.000,00 | | | - | Pembangunan Lingkungan | - | - | 50.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 03 | 1.02 | 0001 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 50.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SIGAMBIR KOTA WARINGIN |
| | 3 | 28 | 03 | 1.03 | | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung | - | - | | | - | 11.500.000,00 | | | - | Pembangunan Lingkungan | - | - | 10.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 03 | 1.03 | 0001 | Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala | | | | 1 Dokumen | 11.500.000,00 | Kab. Bangka Barat, Parittiga, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 10.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SIGAMBIR KOTA WARINGIN |
| | 3 | 28 | 03 | 1.04 | | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | - | - | | | - | 50.000.000,00 | | | - | Pembangunan Lingkungan | - | - | 50.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0004 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | 5 Ha | 50.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 50.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SIGAMBIR KOTA WARINGIN |
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | - | - | | | - | 50.000.000,00 | | | - | Pembangunan Lingkungan | - | - | 60.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0001 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan | | | | 2500 Ha | 50.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 60.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SIGAMBIR KOTA WARINGIN |
| 333 | 3 | 28 | 05 | | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | - | 50%<br>50%<br>50%<br>50%<br>50%<br>50%<br>50%<br>50%<br>50% | | | - | 131.600.000,00 | | | | | | 45%<br>45%<br>45%<br>45%<br>45%<br>45%<br>45%<br>45%<br>45% | 40.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 05 | 1.01 | | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | - | - | | | - | 131.600.000,00 | | | - | Pembangunan Lingkungan | - | - | 40.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan | | | | 5 Kelompok | 21.600.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 25.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SIGAMBIR KOTA WARINGIN |
| | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0003 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial | | | | 100 Ha | 110.000.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 15.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SIGAMBIR KOTA WARINGIN |
| | | | | | | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Belantu Mendanau | | | | | | 2.498.310.000,00 | | | | | | | 668.500.000,00 | |
| | 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | 2.498.310.000,00 | | | | | | | 668.500.000,00 | |
| | 3 | 28 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | | | | | | 2.498.310.000,00 | | | | | | | 668.500.000,00 | |
| 334 | 3 | 28 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90nilai<br>90nilai<br>85nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai | | | - | 1.809.400.000,00 | | | | | | 90nilai<br>90nilai<br>83nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai | 308.500.000,00 | |
| | 3 | 28 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | - | | | - | 10.400.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 10.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 1 Laporan | 10.400.000,00 | Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 10.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BELANTU MENDANAU |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 141.500.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 95.500.000,00 | |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 25.000.000,00 | Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 25.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BELANTU MENDANAU |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 50.000.000,00 | Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BELANTU MENDANAU |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 10.000.000,00 | Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 10.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BELANTU MENDANAU |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 2.500.000,00 | Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 2.500.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BELANTU MENDANAU |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 1 Paket | 10.000.000,00 | Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 10.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BELANTU MENDANAU |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 1 Laporan | 3.000.000,00 | Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 3.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BELANTU MENDANAU |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 41.000.000,00 | Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 45.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BELANTU MENDANAU |
| | 3 | 28 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 1.525.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 50.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 25.000.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 50.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BELANTU MENDANAU |
| | 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1.500.000.000,00 | Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 0,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BELANTU MENDANAU |
| | 3 | 28 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 37.500.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 43.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 2.500.000,00 | Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 3.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BELANTU MENDANAU |
| | 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 25.000.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 30.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BELANTU MENDANAU |
| | 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 10.000.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 10.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BELANTU MENDANAU |
| | 3 | 28 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 95.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 110.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 3 Unit | 60.000.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 65.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BELANTU MENDANAU |
| | 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 25.000.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 30.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BELANTU MENDANAU |
| | 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 10.000.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 15.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BELANTU MENDANAU |
| 335 | 3 | 28 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | - | 35.41%<br>13.17%<br>13.17%<br>13.17%<br>35.41%<br>13.17%<br>35.41%<br>13.17%<br>13.17%<br>13.17%<br>13.17%<br>20%<br>35.41%<br>35.41%<br>20%<br>20%<br>20%<br>20%<br>20%<br>20%<br>20%<br>35.41%<br>35.41%<br>35.41%<br>13.17%<br>35.41%<br>20% | | | - | 198.460.000,00 | | | | | | 35.61%<br>13.17%<br>13.17%<br>13.17%<br>35.61%<br>13.17%<br>35.61%<br>13.17%<br>13.17%<br>13.17%<br>13.17%<br>20%<br>35.61%<br>35.61%<br>20%<br>20%<br>20%<br>20%<br>20%<br>20%<br>20%<br>35.61%<br>35.61%<br>35.61%<br>13.17%<br>35.61%<br>20% | 210.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 03 | 1.02 | | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | - | - | | | - | 22.060.000,00 | | | - | Pembangunan Lingkungan | - | - | 25.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 03 | 1.02 | 0001 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun | | | | 1 Dokumen | 22.060.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 25.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BELANTU MENDANAU |
| | 3 | 28 | 03 | 1.03 | | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung | - | - | | | - | 82.000.000,00 | | | - | Pembangunan Lingkungan | - | - | 85.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 03 | 1.03 | 0002 | Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 50.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BELANTU MENDANAU |
| | 3 | 28 | 03 | 1.03 | 0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung | | | | 1 Dokumen | 32.000.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 35.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BELANTU MENDANAU |
| | 3 | 28 | 03 | 1.04 | | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | - | - | | | - | 50.000.000,00 | | | - | Pembangunan Lingkungan | - | - | 50.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0004 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | 5 Ha | 50.000.000,00 | Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 50.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BELANTU MENDANAU |
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | - | - | | | - | 44.400.000,00 | | | - | Pembangunan Lingkungan | - | - | 50.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0001 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan | | | | 22500 Ha | 24.400.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 25.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BELANTU MENDANAU |
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun | | | | 1 Laporan | 20.000.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 25.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BELANTU MENDANAU |
| 336 | 3 | 28 | 04 | | | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA | - | 100% | | | - | 81.300.000,00 | | | | | | 100% | 85.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 04 | 1.03 | | Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam | - | - | | | - | 81.300.000,00 | | | - | Pembangunan Lingkungan | - | - | 85.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 04 | 1.03 | 0004 | Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani | | | | 5 Ha | 81.300.000,00 | Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 85.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BELANTU MENDANAU |
| 337 | 3 | 28 | 05 | | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | - | 50%<br>50%<br>50%<br>50%<br>50%<br>50%<br>50%<br>50%<br>50% | | | - | 409.150.000,00 | | | | | | 45%<br>45%<br>45%<br>45%<br>45%<br>45%<br>45%<br>45%<br>45% | 65.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 05 | 1.01 | | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | - | - | | | - | 409.150.000,00 | | | - | Pembangunan Lingkungan | - | - | 65.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan | | | | 20 Kelompok | 39.150.000,00 | Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 40.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BELANTU MENDANAU |
| | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0003 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial | | | | 10 Ha | 370.000.000,00 | Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 25.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BELANTU MENDANAU |
| | | | | | | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Gunung Duren | | | | | | 923.200.000,00 | | | | | | | 829.000.000,00 | |
| | 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | 923.200.000,00 | | | | | | | 829.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | | | | | | 923.200.000,00 | | | | | | | 829.000.000,00 | |
| 338 | 3 | 28 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90nilai<br>90nilai<br>85nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai | | | - | 327.000.000,00 | | | | | | 90nilai<br>90nilai<br>83nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai | 389.000.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | - | | | - | 5.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 7.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 1 Laporan | 5.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 7.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI GUNUNG DUREN |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 166.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 195.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 25.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 30.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI GUNUNG DUREN |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 45.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 50.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI GUNUNG DUREN |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 11.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 15.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI GUNUNG DUREN |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 5.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 7.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI GUNUNG DUREN |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 1 Paket | 15.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 20.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI GUNUNG DUREN |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 1 Laporan | 5.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 8.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI GUNUNG DUREN |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 86 Laporan | 60.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 65.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI GUNUNG DUREN |
| | 3 | 28 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 25.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 30.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 5 Unit | 25.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 30.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI GUNUNG DUREN |
| | 3 | 28 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 18.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 27.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 2.500.000,00 | Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 5.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI GUNUNG DUREN |
| | 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 15.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI GUNUNG DUREN |
| | 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 3.500.000,00 | Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 7.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI GUNUNG DUREN |
| | 3 | 28 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 113.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 130.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 14 Unit | 75.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 80.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI GUNUNG DUREN |
| | 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 20.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 25.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI GUNUNG DUREN |
| | 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 17 Unit | 18.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 25.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI GUNUNG DUREN |
| 339 | 3 | 28 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | - | 35.41%<br>13.17%<br>13.17%<br>13.17%<br>35.41%<br>13.17%<br>35.41%<br>13.17%<br>13.17%<br>13.17%<br>13.17%<br>20%<br>35.41%<br>35.41%<br>20%<br>20%<br>20%<br>20%<br>20%<br>20%<br>20%<br>35.41%<br>35.41%<br>35.41%<br>13.17%<br>35.41%<br>20% | | | - | 232.000.000,00 | | | | | 35.61%<br>13.17%<br>13.17%<br>13.17%<br>35.61%<br>13.17%<br>35.61%<br>13.17%<br>13.17%<br>13.17%<br>13.17%<br>20%<br>35.61%<br>35.61%<br>20%<br>20%<br>20%<br>20%<br>20%<br>20%<br>20%<br>35.61%<br>35.61%<br>35.61%<br>13.17%<br>35.61%<br>20% | 260.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 03 | 1.02 | | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | - | - | | | - | 30.000.000,00 | | | - | Pembangunan Lingkungan | - | - | 35.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 03 | 1.02 | 0001 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun | | | | 1 Dokumen | 30.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 35.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI GUNUNG DUREN |
| | 3 | 28 | 03 | 1.03 | | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung | - | - | | | - | 100.000.000,00 | | | - | Pembangunan Lingkungan | - | - | 110.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 03 | 1.03 | 0001 | Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 55.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI GUNUNG DUREN |
| | 3 | 28 | 03 | 1.03 | 0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi | | | | 0 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 55.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI GUNUNG DUREN |
| | 3 | 28 | 03 | 1.04 | | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | - | - | | | - | 50.000.000,00 | | | - | Pembangunan Lingkungan | - | - | 55.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0004 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | 2 Ha | 50.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 55.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI GUNUNG DUREN |
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | - | - | | | - | 52.000.000,00 | | | - | Pembangunan Lingkungan | - | - | 60.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0001 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan | | | | 22500 Ha | 32.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 35.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI GUNUNG DUREN |
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun | | | | 1 Laporan | 20.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 25.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI GUNUNG DUREN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 340 | 3 | 28 | 04 | | | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA | - | 100% | | | - | 50.000.000,00 | | | | | | 100% | 55.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 04 | 1.03 | | Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam | - | - | | | - | 50.000.000,00 | | | - | Pembangunan Lingkungan | - | - | 55.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 04 | 1.03 | 0004 | Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani | | | | 5 Ha | 50.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 55.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI GUNUNG DUREN |
| 341 | 3 | 28 | 05 | | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | - | 50%<br>50%<br>50%<br>50%<br>50%<br>50%<br>50%<br>50%<br>50% | | | - | 314.200.000,00 | | | | | | 45%<br>45%<br>45%<br>45%<br>45%<br>45%<br>45%<br>45%<br>45% | 125.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 05 | 1.01 | | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | - | - | | | - | 314.200.000,00 | | | - | Pembangunan Lingkungan | - | - | 125.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan | | | | 20 Kelompok | 84.200.000,00 | Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 90.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI GUNUNG DUREN |
| | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0003 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial | | | | 1800 Ha | 230.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 35.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI GUNUNG DUREN |
| | | | | | | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Rambat Menduyung | | | | | | 653.252.400,00 | | | | | | | 538.700.000,00 | |
| | 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | 406.752.400,00 | | | | | | | 260.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | | | | | | 406.752.400,00 | | | | | | | 260.000.000,00 | |
| 342 | 3 | 28 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | - | 35.41%<br>13.17%<br>13.17%<br>13.17%<br>35.41%<br>13.17%<br>35.41%<br>13.17%<br>13.17%<br>13.17%<br>13.17%<br>20%<br>35.41%<br>35.41%<br>20%<br>20%<br>20%<br>20%<br>20%<br>20%<br>20%<br>35.41%<br>35.41%<br>35.41%<br>13.17%<br>35.41%<br>20% | | | - | 216.982.400,00 | | | | | | 35.61%<br>13.17%<br>13.17%<br>13.17%<br>35.61%<br>13.17%<br>35.61%<br>13.17%<br>13.17%<br>13.17%<br>13.17%<br>20%<br>35.61%<br>35.61%<br>20%<br>20%<br>20%<br>20%<br>20%<br>20%<br>20%<br>35.61%<br>35.61%<br>35.61%<br>13.17%<br>35.61%<br>20% | 175.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 03 | 1.02 | | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | - | - | | | - | 12.542.400,00 | | | - | Pembangunan Lingkungan | - | - | 15.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 03 | 1.02 | 0001 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun | | | | 1 Dokumen | 12.542.400,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 15.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI RAMBAT MENDUYUNG |
| | 3 | 28 | 03 | 1.03 | | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung | Terlaksananya penyediaan data izin pemanfaatan HP dan HL | - | | | 16 dokumen | 60.000.000,00 | | | - | Pembangunan Lingkungan | MAsyarrakat dan aparatur | - | 25.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 03 | 1.03 | 0001 | Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala | | | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | MAsyarrakat dan aparatur | | 25.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI RAMBAT MENDUYUNG |
| | 3 | 28 | 03 | 1.03 | 0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi | | | | 0 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | MAsyarrakat dan aparatur | | 0,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI RAMBAT MENDUYUNG |
| | 3 | 28 | 03 | 1.04 | | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | - | - | | | - | 88.540.000,00 | | | - | Pembangunan Lingkungan | - | - | 75.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0004 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | 20 Ha | 88.540.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 75.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI RAMBAT MENDUYUNG |
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | - | - | | | - | 55.900.000,00 | | | - | Pembangunan Lingkungan | - | - | 60.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0001 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan | | | | 28000 Ha | 48.400.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 50.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI RAMBAT MENDUYUNG |
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun | | | | 1 Laporan | 7.500.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 10.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI RAMBAT MENDUYUNG |
| 343 | 3 | 28 | 05 | | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | - | 50%<br>50%<br>50%<br>50%<br>50%<br>50%<br>50%<br>50%<br>50% | | | - | 189.770.000,00 | | | | | | 45%<br>45%<br>45%<br>45%<br>45%<br>45%<br>45%<br>45%<br>45% | 85.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 05 | 1.01 | | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | - | - | | | - | 189.770.000,00 | | | - | Pembangunan Lingkungan | - | - | 85.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan | | | | 9 Kelompok | 54.510.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 50.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI RAMBAT MENDUYUNG |
| | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0003 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial | | | | 1300 Ha | 135.260.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 35.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI RAMBAT MENDUYUNG |
| | X | | | | | NON URUSAN | | | | | | 246.500.000,00 | | | | | | | 278.700.000,00 | |
| | X | XX | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX | | | | | | 246.500.000,00 | | | | | | | 278.700.000,00 | |
| 344 | X | XX | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90nilai<br>90nilai<br>85nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai | | | - | 246.500.000,00 | | | | | | 90nilai<br>90nilai<br>83nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai | 278.700.000,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | - | | | - | 2.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 5.000.000,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 1 Laporan | 2.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Mentok, Air Belo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 5.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI RAMBAT MENDUYUNG |
| | X | XX | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 70.500.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 110.000.000,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 8.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Mentok, Air Belo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 10.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI RAMBAT MENDUYUNG |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 5.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Mentok, Air Belo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 10.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI RAMBAT MENDUYUNG |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 5.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Mentok, Air Belo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 10.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI RAMBAT MENDUYUNG |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 2 Paket | 5.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Mentok, Air Belo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 10.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI RAMBAT MENDUYUNG |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 2 Paket | 10.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Mentok, Air Belo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 15.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI RAMBAT MENDUYUNG |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 1 Laporan | 2.500.000,00 | Kab. Bangka Barat, Mentok, Air Belo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 5.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI RAMBAT MENDUYUNG |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 35.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 50.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI RAMBAT MENDUYUNG |
| | X | XX | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 25.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 50.000.000,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 25.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Mentok, Air Belo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 50.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI RAMBAT MENDUYUNG |
| | X | XX | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 44.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 18.700.000,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2 Laporan | 1.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Mentok, Air Belo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 5.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI RAMBAT MENDUYUNG |
| | X | XX | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 37.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Mentok, Air Belo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 3.700.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI RAMBAT MENDUYUNG |
| | X | XX | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 6.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Mentok, Air Belo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 10.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI RAMBAT MENDUYUNG |
| | X | XX | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 105.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 95.000.000,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 5 Unit | 80.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Mentok, Air Belo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 80.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI RAMBAT MENDUYUNG |
| | X | XX | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 15.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI RAMBAT MENDUYUNG |
| | X | XX | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 2 Unit | 10.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Mentok, Air Belo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 15.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI RAMBAT MENDUYUNG |
| | | | | | | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Jebu Bembang Antan | | | | | | 686.500.000,00 | | | | | | | 763.500.000,00 | |
| | 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | 686.500.000,00 | | | | | | | 763.500.000,00 | |
| | 3 | 28 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | | | | | | 686.500.000,00 | | | | | | | 763.500.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 345 | 3 | 28 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90nilai<br>90nilai<br>85nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai | | | - | 231.500.000,00 | | | | | | 90nilai<br>90nilai<br>83nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai | 273.500.000,00 | |
| | 3 | 28 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | - | | | - | 1.000.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Masyarrakat dan aparatur | - | 1.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 1 Laporan | 1.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Parittiga, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Masyarrakat dan aparatur | | 1.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI JEBU BEMBANG ANTAN |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 81.500.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Masyarrakat dan aparatur | - | 91.500.000,00 | |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 2.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Parittiga, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Masyarrakat dan aparatur | | 2.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI JEBU BEMBANG ANTAN |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 3 Paket | 22.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Parittiga, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Masyarrakat dan aparatur | | 22.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI JEBU BEMBANG ANTAN |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 2.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Parittiga, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Masyarrakat dan aparatur | | 2.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI JEBU BEMBANG ANTAN |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 2 Paket | 2.500.000,00 | Kab. Bangka Barat, Parittiga, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Masyarrakat dan aparatur | | 2.500.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI JEBU BEMBANG ANTAN |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 2 Paket | 1.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Parittiga, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Masyarrakat dan aparatur | | 1.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI JEBU BEMBANG ANTAN |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 1 Laporan | 2.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Parittiga, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Masyarrakat dan aparatur | | 2.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI JEBU BEMBANG ANTAN |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 50.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Parittiga, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Masyarrakat dan aparatur | | 60.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI JEBU BEMBANG ANTAN |
| | 3 | 28 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 25.000.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Masyarrakat dan aparatur | - | 50.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 25.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Parittiga, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Masyarrakat dan aparatur | | 50.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI JEBU BEMBANG ANTAN |
| | 3 | 28 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 44.000.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Masyarrakat dan aparatur | - | 46.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Parittiga, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Masyarrakat dan aparatur | | 2.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI JEBU BEMBANG ANTAN |
| | 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 37.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Parittiga, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Masyarrakat dan aparatur | | 37.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI JEBU BEMBANG ANTAN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 6.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Parittiga, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Masyarrakat dan aparatur | | 7.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI JEBU BEMBANG ANTAN |
| | 3 | 28 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 80.000.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Masyarrakat dan aparatur | - | 85.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 7 Unit | 70.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Parittiga, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Masyarrakat dan aparatur | | 70.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI JEBU BEMBANG ANTAN |
| | 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 10 Unit | 10.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Parittiga, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Masyarrakat dan aparatur | | 15.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI JEBU BEMBANG ANTAN |
| 346 | 3 | 28 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi) (UPTD KPH Jebu Bembang Antan) | 35.41%<br>13.17%<br>13.17%<br>13.17%<br>35.41%<br>13.17%<br>35.41%<br>13.17%<br>13.17%<br>13.17%<br>13.17%<br>20%<br>35.41%<br>35.41%<br>20%<br>20%<br>20%<br>20%<br>20%<br>20%<br>20%<br>35.41%<br>35.41%<br>35.41%<br>13.17%<br>35.41%<br>20% | | | 20 % | 235.500.000,00 | | | | | | 35.61%<br>13.17%<br>13.17%<br>13.17%<br>35.61%<br>13.17%<br>35.61%<br>13.17%<br>13.17%<br>13.17%<br>13.17%<br>20%<br>35.61%<br>35.61%<br>20%<br>20%<br>20%<br>20%<br>20%<br>20%<br>20%<br>35.61%<br>35.61%<br>35.61%<br>13.17%<br>35.61%<br>20% | 335.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 03 | 1.02 | | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | Tersusunnya Rencana pengelolaan Kesatuan pengelolaan hutan pada UPT Kehutanan | - | | | 8 dokumen | 11.500.000,00 | | | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Pembangunan Lingkungan | MAsyarrakat dan aparatur | - | 25.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 03 | 1.02 | 0001 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun | | | | 1 Dokumen | 11.500.000,00 | Kab. Bangka Barat, Parittiga, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Pembangunan Lingkungan | MAsyarrakat dan aparatur | | 25.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI JEBU BEMBANG ANTAN |
| | 3 | 28 | 03 | 1.03 | | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung | - | - | | | - | 59.000.000,00 | | | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Pembangunan Lingkungan | MAsyarrakat dan aparatur | - | 85.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 03 | 1.03 | 0001 | Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala | | | | 1 Dokumen | 9.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Parittiga, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Pembangunan Lingkungan | MAsyarrakat dan aparatur | | 25.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI JEBU BEMBANG ANTAN |
| | 3 | 28 | 03 | 1.03 | 0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi | | | | 0 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Parittiga, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | - | MAsyarrakat dan aparatur | | 60.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI JEBU BEMBANG ANTAN |
| | 3 | 28 | 03 | 1.04 | | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | - | - | | | - | 95.000.000,00 | | | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Pembangunan Lingkungan | Masyarrakat dan aparatur | - | 100.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0004 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | 20 Ha | 95.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Parittiga, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Pembangunan Lingkungan | Masyarrakat dan aparatur | | 100.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI JEBU BEMBANG ANTAN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | - | - | | | - | 70.000.000,00 | | | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Pembangunan Lingkungan | Masyarrakat dan aparatur | - | 125.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0001 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan | | | | 28000 Ha | 60.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Parittiga, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Pembangunan Lingkungan | Masyarrakat dan aparatur | | 100.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI JEBU BEMBANG ANTAN |
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun | | | | 1 Laporan | 10.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Parittiga, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Pembangunan Lingkungan | Masyarrakat dan aparatur | | 25.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI JEBU BEMBANG ANTAN |
| 347 | 3 | 28 | 04 | | | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA | - | 100% | | | - | 95.000.000,00 | | | | | | 100% | 125.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 04 | 1.03 | | Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam | - | - | | | - | 95.000.000,00 | | | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Pembangunan Lingkungan | Masyarrakat dan aparatur | - | 125.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 04 | 1.03 | 0004 | Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani | | | | 5 Ha | 95.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Parittiga, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Pembangunan Lingkungan | Masyarrakat dan aparatur | | 125.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI JEBU BEMBANG ANTAN |
| 348 | 3 | 28 | 05 | | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (UPT KPH Jebu Bembang Antan) | 50%<br>50%<br>50%<br>50%<br>50%<br>50%<br>50%<br>50%<br>50% | | | 40 % | 124.500.000,00 | | | | | | 45%<br>45%<br>45%<br>45%<br>45%<br>45%<br>45%<br>45%<br>45% | 30.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 05 | 1.01 | | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | Jumlah Dokumen penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang Kehutanan | - | | | 1 dokumen | 124.500.000,00 | | | - | Pembangunan Lingkungan | Masyarrakat dan aparatur | - | 30.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan | | | | 3 Kelompok | 12.500.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | Masyarrakat dan aparatur | | 15.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI JEBU BEMBANG ANTAN |
| | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0003 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial | | | | 300 Ha | 112.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Parittiga, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Pembangunan Lingkungan | Masyarrakat dan aparatur | | 15.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI JEBU BEMBANG ANTAN |
| | | | | | | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bubus Panca | | | | | | 595.417.000,00 | | | | | | | 517.500.000,00 | |
| | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 216.172.000,00 | | | | | | | 246.500.000,00 | |
| | 2 | 11 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | 216.172.000,00 | | | | | | | 246.500.000,00 | |
| 349 | 2 | 11 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90nilai<br>90nilai<br>85nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai | | | - | 216.172.000,00 | | | | | | 90nilai<br>90nilai<br>83nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai | 246.500.000,00 | |
| | 2 | 11 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | - | | | - | 2.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 2.500.000,00 | |
| | 2 | 11 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 1 Laporan | 2.000.000,00 | Kab. Bangka, Riau Silip, Cit | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 2.500.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BUBUS PANCA |
| | 2 | 11 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 59.672.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 70.500.000,00 | |
| | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 2 Paket | 2.000.000,00 | Kab. Bangka, Riau Silip, Cit | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 2.500.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BUBUS PANCA |
| | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 3 Paket | 8.000.000,00 | Kab. Bangka, Riau Silip, Cit | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 9.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BUBUS PANCA |
| | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1.600.000,00 | Kab. Bangka, Riau Silip, Cit | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 2.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BUBUS PANCA |
| | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 2 Paket | 2.500.000,00 | Kab. Bangka, Riau Silip, Cit | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 3.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BUBUS PANCA |
| | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 2 Paket | 5.000.000,00 | Kab. Bangka, Riau Silip, Cit | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 7.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BUBUS PANCA |
| | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 1 Laporan | 1.200.000,00 | Kab. Bangka, Riau Silip, Cit | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 2.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BUBUS PANCA |
| | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 76 Laporan | 39.372.000,00 | Kab. Bangka, Riau Silip, Cit | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 45.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BUBUS PANCA |
| | 2 | 11 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 25.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 30.000.000,00 | |
| | 2 | 11 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 3 Unit | 25.000.000,00 | Kab. Bangka, Riau Silip, Cit | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 30.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BUBUS PANCA |
| | 2 | 11 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 44.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 48.500.000,00 | |
| | 2 | 11 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1.000.000,00 | Kab. Bangka, Riau Silip, Cit | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 1.500.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BUBUS PANCA |
| | 2 | 11 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 37.000.000,00 | Kab. Bangka, Riau Silip, Cit | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 40.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BUBUS PANCA |
| | 2 | 11 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 6.000.000,00 | Kab. Bangka, Riau Silip, Cit | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 7.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BUBUS PANCA |
| | 2 | 11 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 85.500.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 95.000.000,00 | |
| | 2 | 11 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 3 Unit | 60.500.000,00 | Kab. Bangka, Riau Silip, Cit | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 65.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BUBUS PANCA |
| | 2 | 11 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 25.000.000,00 | Kab. Bangka, Riau Silip, Cit | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 30.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BUBUS PANCA |
| | 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | 369.245.000,00 | | | | | | | 256.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | | | | | | 369.245.000,00 | | | | | | | 256.000.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 350 | 3 | 28 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | - | 35.41%<br>13.17%<br>13.17%<br>13.17%<br>35.41%<br>13.17%<br>35.41%<br>13.17%<br>13.17%<br>13.17%<br>13.17%<br>20%<br>35.41%<br>35.41%<br>20%<br>20%<br>20%<br>20%<br>20%<br>20%<br>20%<br>35.41%<br>35.41%<br>35.41%<br>13.17%<br>35.41%<br>20% | | | - | 185.147.500,00 | | | | | | 35.61%<br>13.17%<br>13.17%<br>13.17%<br>35.61%<br>13.17%<br>35.61%<br>13.17%<br>13.17%<br>13.17%<br>13.17%<br>20%<br>35.61%<br>35.61%<br>20%<br>20%<br>20%<br>20%<br>20%<br>20%<br>20%<br>35.61%<br>35.61%<br>35.61%<br>13.17%<br>35.61%<br>20% | 213.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 03 | 1.03 | | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung | - | - | | | - | 66.000.000,00 | | | - | Pembangunan Lingkungan | - | - | 75.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 03 | 1.03 | 0001 | Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala | | | | 0 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Bangka, Riau Silip, Cit | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 55.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BUBUS PANCA |
| | 3 | 28 | 03 | 1.03 | 0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi | | | | 1 Dokumen | 16.000.000,00 | Kab. Bangka, Riau Silip, Cit | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 20.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BUBUS PANCA |
| | 3 | 28 | 03 | 1.04 | | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | - | - | | | - | 75.000.000,00 | | | - | Pembangunan Lingkungan | - | - | 80.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0004 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | 20 Ha | 75.000.000,00 | Kab. Bangka, Riau Silip, Cit | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 80.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BUBUS PANCA |
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | - | - | | | - | 34.097.500,00 | | | - | Pembangunan Lingkungan | - | - | 43.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0001 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan | | | | 15500 Ha | 24.097.500,00 | Kab. Bangka, Riau Silip, Cit | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 28.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BUBUS PANCA |
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun | | | | 1 Laporan | 10.000.000,00 | Kab. Bangka, Riau Silip, Cit | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 15.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BUBUS PANCA |
| | 3 | 28 | 03 | 1.06 | | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) | - | - | | | - | 10.050.000,00 | | | - | Pembangunan Lingkungan | - | - | 15.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 03 | 1.06 | 0004 | Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Managemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH | | | | 0 Unit Managemen | 10.050.000,00 | Kab. Bangka, Riau Silip, Cit | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 15.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BUBUS PANCA |
| 351 | 3 | 28 | 05 | | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | - | 50%<br>50%<br>50%<br>50%<br>50%<br>50%<br>50%<br>50%<br>50% | | | - | 184.097.500,00 | | | | | | 45%<br>45%<br>45%<br>45%<br>45%<br>45%<br>45%<br>45%<br>45% | 43.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 05 | 1.01 | | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | - | - | | | - | 184.097.500,00 | | | - | Pembangunan Lingkungan | - | - | 43.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan | | | | 6 Kelompok | 24.097.500,00 | Kab. Bangka, Riau Silip, Cit | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 28.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BUBUS PANCA |
| | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0003 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial | | | | 300 Ha | 160.000.000,00 | Kab. Bangka, Riau Silip, Cit | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 15.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BUBUS PANCA |
| | X | | | | | NON URUSAN | | | | | 10.000.000,00 | | | | | | | | 15.000.000,00 | |
| | X | XX | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX | | | | | 10.000.000,00 | | | | | | | | 15.000.000,00 | |
| 352 | X | XX | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90nilai<br>90nilai<br>85nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai | | | - | 10.000.000,00 | | | | | | 90nilai<br>90nilai<br>83nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai | 15.000.000,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 10.000.000,00 | | | - | - | - | - | 15.000.000,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 5 Unit | 10.000.000,00 | Kab. Bangka, Riau Silip, Cit | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 15.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BUBUS PANCA |
| | | | | | | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sungai Sembulan | | | | | 717.488.000,00 | | | | | | | | 581.000.000,00 | |
| | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | 157.000.000,00 | | | | | | | | 175.000.000,00 | |
| | 2 | 11 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | | | 157.000.000,00 | | | | | | | | 175.000.000,00 | |
| 353 | 2 | 11 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90nilai<br>90nilai<br>85nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai | | | - | 157.000.000,00 | | | | | | 90nilai<br>90nilai<br>83nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai | 175.000.000,00 | |
| | 2 | 11 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 105.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 110.000.000,00 | |
| | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 10.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Pedindang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 10.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUNGAI SEMBULAN |
| | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 2 Paket | 75.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Pedindang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 75.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUNGAI SEMBULAN |
| | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 10.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 10.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUNGAI SEMBULAN |
| | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 1 Paket | 10.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Pedindang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 15.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUNGAI SEMBULAN |
| | 2 | 11 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 27.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 30.000.000,00 | |
| | 2 | 11 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 24.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Pedindang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 25.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUNGAI SEMBULAN |
| | 2 | 11 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 3.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Pedindang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 5.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUNGAI SEMBULAN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 11 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 25.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 35.000.000,00 | |
| | 2 | 11 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 15.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 20.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUNGAI SEMBULAN |
| | 2 | 11 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 2 Unit | 10.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 15.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUNGAI SEMBULAN |
| | 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | 560.488.000,00 | | | | | | | 406.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | | | | | | 560.488.000,00 | | | | | | | 406.000.000,00 | |
| 354 | 3 | 28 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90nilai<br>90nilai<br>85nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai | | | - | 155.988.000,00 | | | | | | 90nilai<br>90nilai<br>83nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai | 161.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | - | | | - | 5.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 10.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 1 Laporan | 5.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Pedindang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 10.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUNGAI SEMBULAN |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 63.988.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 71.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 2 Paket | 10.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Pedindang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 15.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUNGAI SEMBULAN |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 1 Laporan | 3.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Pedindang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 5.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUNGAI SEMBULAN |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 50.988.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 51.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUNGAI SEMBULAN |
| | 3 | 28 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 25.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 30.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 25.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Pedindang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 30.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUNGAI SEMBULAN |
| | 3 | 28 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 2.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 0,00 | |
| | 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 2.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Pedindang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUNGAI SEMBULAN |
| | 3 | 28 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 60.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 50.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 3 Unit | 60.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Pedindang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 50.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUNGAI SEMBULAN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 355 | 3 | 28 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | - | 35.41%<br>13.17%<br>13.17%<br>13.17%<br>35.41%<br>13.17%<br>35.41%<br>13.17%<br>13.17%<br>13.17%<br>13.17%<br>20%<br>35.41%<br>35.41%<br>20%<br>20%<br>20%<br>20%<br>20%<br>20%<br>20%<br>35.41%<br>35.41%<br>35.41%<br>13.17%<br>35.41%<br>20% | | | - | 231.500.000,00 | | | | | | 35.61%<br>13.17%<br>13.17%<br>13.17%<br>35.61%<br>13.17%<br>35.61%<br>13.17%<br>13.17%<br>13.17%<br>13.17%<br>20%<br>35.61%<br>35.61%<br>20%<br>20%<br>20%<br>20%<br>20%<br>20%<br>20%<br>35.61%<br>35.61%<br>35.61%<br>13.17%<br>35.61%<br>20% | 215.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 03 | 1.02 | | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | - | - | | | - | 41.500.000,00 | | | - | Pembangunan Lingkungan | - | - | 25.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 03 | 1.02 | 0001 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun | | | | 1 Dokumen | 41.500.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 25.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUNGAI SEMBULAN |
| | 3 | 28 | 03 | 1.03 | | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung | - | - | | | - | 92.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 75.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 03 | 1.03 | 0001 | Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala | | | | 0 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 50.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUNGAI SEMBULAN |
| | 3 | 28 | 03 | 1.03 | 0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi | | | | 1 Dokumen | 42.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 25.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUNGAI SEMBULAN |
| | 3 | 28 | 03 | 1.04 | | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | - | - | | | - | 40.000.000,00 | | | - | Pembangunan Lingkungan | - | - | 50.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0004 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | 2 Ha | 40.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 50.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUNGAI SEMBULAN |
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | - | - | | | - | 58.000.000,00 | | | - | Pembangunan Lingkungan | - | - | 65.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0001 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan | | | | 22500 Ha | 38.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 40.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUNGAI SEMBULAN |
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun | | | | 1 Laporan | 20.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 25.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUNGAI SEMBULAN |
| 356 | 3 | 28 | 05 | | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | - | 50%<br>50%<br>50%<br>50%<br>50%<br>50%<br>50%<br>50%<br>50% | | | - | 173.000.000,00 | | | | | | 45%<br>45%<br>45%<br>45%<br>45%<br>45%<br>45%<br>45%<br>45% | 30.000.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3 | 28 | 05 | 1.01 | | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | - | - | | | - | 173.000.000,00 | | | - | Pembangunan Lingkungan | - | - | 30.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan | | | | 2 Kelompok | 17.750.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 20.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUNGAI SEMBULAN |
| | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0003 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial | | | | 5000 Ha | 155.250.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 10.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUNGAI SEMBULAN |
| | | | | | | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Muntai Palas | | | | | | 679.000.000,00 | | | | | | | 680.000.000,00 | |
| | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |
| | 2 | 11 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |
| 357 | 2 | 11 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90nilai<br>90nilai<br>85nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai | | | - | 5.000.000,00 | | | | | | 90nilai<br>90nilai<br>83nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai | 10.000.000,00 | |
| | 2 | 11 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 5.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 10.000.000,00 | |
| | 2 | 11 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 5.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Toboali, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 10.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MUNTAI PALAS |
| | 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | 674.000.000,00 | | | | | | | 670.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | | | | | | 674.000.000,00 | | | | | | | 670.000.000,00 | |
| 358 | 3 | 28 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 90nilai<br>90nilai<br>85nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai | | | - | 281.500.000,00 | | | | | | 90nilai<br>90nilai<br>83nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai | 335.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | - | | | - | 5.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 7.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 1 Laporan | 5.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Toboali, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 7.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MUNTAI PALAS |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 90.000.000,00 | | | - | Pembangunan Lingkungan | - | - | 120.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 2.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Toboali, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 5.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MUNTAI PALAS |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 15.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Toboali, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 20.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MUNTAI PALAS |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 10.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Toboali, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 15.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MUNTAI PALAS |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 5.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Toboali, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 8.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MUNTAI PALAS |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 1 Paket | 10.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Toboali, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 15.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MUNTAI PALAS |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 1 Laporan | 3.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Toboali, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 7.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MUNTAI PALAS |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 86 Laporan | 45.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Toboali, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 50.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MUNTAI PALAS |
| | 3 | 28 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 25.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 30.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 25.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Toboali, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 30.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MUNTAI PALAS |
| | 3 | 28 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 36.500.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 48.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 2.500.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Toboali, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 3.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MUNTAI PALAS |
| | 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 24.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Toboali, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 30.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MUNTAI PALAS |
| | 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 10.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Toboali, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 15.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MUNTAI PALAS |
| | 3 | 28 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 125.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 130.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 3 Unit | 75.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Toboali, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 75.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MUNTAI PALAS |
| | 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 50.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Toboali, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 55.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MUNTAI PALAS |
| 359 | 3 | 28 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | - | 35.41%<br>13.17%<br>13.17%<br>13.17%<br>35.41%<br>13.17%<br>35.41%<br>13.17%<br>13.17%<br>13.17%<br>13.17%<br>20%<br>35.41%<br>35.41%<br>20%<br>20%<br>20%<br>20%<br>20%<br>20%<br>20%<br>35.41%<br>35.41%<br>35.41%<br>13.17%<br>35.41%<br>20% | | | - | 177.500.000,00 | | | | | | 35.61%<br>13.17%<br>13.17%<br>13.17%<br>35.61%<br>13.17%<br>35.61%<br>13.17%<br>13.17%<br>13.17%<br>13.17%<br>20%<br>35.61%<br>35.61%<br>20%<br>20%<br>20%<br>20%<br>20%<br>20%<br>20%<br>35.61%<br>35.61%<br>35.61%<br>13.17%<br>35.61%<br>20% | 210.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 03 | 1.02 | | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | - | - | | | - | 30.000.000,00 | | | - | Pembangunan Lingkungan | - | - | 35.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 03 | 1.02 | 0001 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun | | | | 1 Dokumen | 30.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Toboali, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 35.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MUNTAI PALAS |
| | 3 | 28 | 03 | 1.03 | | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung | - | - | | | - | 50.000.000,00 | | | - | Pembangunan Lingkungan | - | - | 55.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 03 | 1.03 | 0001 | Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala | | | | 0 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 55.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MUNTAI PALAS |
| | 3 | 28 | 03 | 1.04 | | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | - | - | | | - | 37.500.000,00 | | | - | Pembangunan Lingkungan | - | - | 45.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0004 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | 2 Ha | 37.500.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Toboali, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 45.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MUNTAI PALAS |
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | - | - | | | - | 60.000.000,00 | | | - | Pembangunan Lingkungan | - | - | 75.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0001 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan | | | | 22500 Ha | 40.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Simpang Rimba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 50.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MUNTAI PALAS |
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun | | | | 1 Laporan | 20.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Toboali, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 25.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MUNTAI PALAS |
| 360 | 3 | 28 | 05 | | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | - | 50%<br>50%<br>50%<br>50%<br>50%<br>50%<br>50%<br>50%<br>50% | | | - | 215.000.000,00 | | | | | | 45%<br>45%<br>45%<br>45%<br>45%<br>45%<br>45%<br>45%<br>45% | 125.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 05 | 1.01 | | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | - | - | | | - | 215.000.000,00 | | | - | Pembangunan Lingkungan | - | - | 125.000.000,00 | |
| | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan | | | | 2 Kelompok | 65.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Toboali, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 70.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MUNTAI PALAS |
| | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0003 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial | | | | 107667 Ha | 150.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Toboali, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 55.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MUNTAI PALAS |
| | | | | | | UPTD Labolatorium Lingkungan | | | | | | 5.910.750.000,00 | | | | | | | 5.917.900.000,00 | |
| | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 5.910.750.000,00 | | | | | | | 5.917.900.000,00 | |
| | 2 | 11 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | 5.910.750.000,00 | | | | | | | 5.917.900.000,00 | |
| 361 | 2 | 11 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (Laboratorium Lingkungan Hidup)) | 90nilai<br>90nilai<br>85nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai | | | 90 nilai | 1.910.750.000,00 | | | | | | 90nilai<br>90nilai<br>83nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai<br>90nilai | 1.917.900.000,00 | |
| | 2 | 11 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah | - | | | 90 Nilai | 702.850.000,00 | | | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Pembangunan Pemerintahan | Masyarakat dan aparatur | - | 710.000.000,00 | |
| | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 22000 Paket | 26.250.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Pembangunan Pemerintahan | Masyarakat dan aparatur | | 30.000.000,00 | UPTD LABOLATORIUM LINGKUNGAN |
| | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 60 Paket | 635.600.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Pembangunan Pemerintahan | Masyarakat dan aparatur | | 635.000.000,00 | UPTD LABOLATORIUM LINGKUNGAN |
| | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 1 Laporan | 9.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Pembangunan Pemerintahan | Masyarakat dan aparatur | | 10.000.000,00 | UPTD LABOLATORIUM LINGKUNGAN |
| | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 32.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Pembangunan Pemerintahan | Masyarakat dan aparatur | | 35.000.000,00 | UPTD LABOLATORIUM LINGKUNGAN |
| | 2 | 11 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 1.062.900.000,00 | | | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Pembangunan Pemerintahan | Masyarakat dan aparatur | - | 1.062.900.000,00 | |
| | 2 | 11 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 45.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Pembangunan Pemerintahan | Masyarakat dan aparatur | | 45.000.000,00 | UPTD LABOLATORIUM LINGKUNGAN |
| | 2 | 11 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 28 Laporan | 1.017.900.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Pembangunan Pemerintahan | Masyarakat dan aparatur | | 1.017.900.000,00 | UPTD LABOLATORIUM LINGKUNGAN |
| | 2 | 11 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 145.000.000,00 | | | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Pembangunan Pemerintahan | Masyarakat dan aparatur | - | 145.000.000,00 | |
| | 2 | 11 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 38 Unit | 145.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Pembangunan Pemerintahan | Masyarakat dan aparatur | | 145.000.000,00 | UPTD LABOLATORIUM LINGKUNGAN |
| 362 | 2 | 11 | 03 | | | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase Pengujian Sampel Parameter Kualitas Lingkungan yang terlayani (Laboratorium Lingkungan) | 90%<br>100%<br>70% | | | 90 % | 4.000.000.000,00 | | | | | | 90%<br>100%<br>67% | 4.000.000.000,00 | |
| | 2 | 11 | 03 | 1.01 | | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup | Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan | - | | | 2004 dokumen | 4.000.000.000,00 | | | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Pembangunan Lingkungan | Masyarakat dan aparatur | - | 4.000.000.000,00 | |
| | 2 | 11 | 03 | 1.01 | 0015 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan | | | | 2000 Dokumen | 4.000.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Pembangunan Lingkungan | Masyarakat dan aparatur | | 4.000.000.000,00 | UPTD LABOLATORIUM LINGKUNGAN |
| | | | | | | DINAS PERHUBUNGAN | | | | | | 29.243.463.514,00 | | | | | | | 36.860.000.000,00 | |
| | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 29.243.463.514,00 | | | | | | | 36.860.000.000,00 | |
| | 2 | 15 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | | | | 29.243.463.514,00 | | | | | | | 36.860.000.000,00 | |
| 363 | 2 | 15 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Perhubungan)<br>Survei Kepuasan Internal Daerah (Dinas Perhubungan) | 85%<br>60%<br>60%<br>85% | | | 51 %<br>85 % | 16.066.628.841,00 | | | | | | 85%<br>60%<br>60%<br>85% | 20.785.000.000,00 | |
| | 2 | 15 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | 10 Dokumen | 337.000.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Wilayah | Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (Dinas Perhubungan) | - | 400.000.000,00 | |
| | 2 | 15 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 7 Dokumen | 217.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Wilayah | Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (Dinas Perhubungan) | | 250.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 3 Laporan | 120.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Wilayah | Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (Dinas Perhubungan) | | 150.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Survey Kepuasan Pelayanan Keuangan | - | | | 101 Orang | 10.938.628.841,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Wilayah | Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (Dinas Perhubungan) | - | 15.000.000.000,00 | |
| | 2 | 15 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 101 Orang/ Bulan | 10.938.628.841,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Wilayah | Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (Dinas Perhubungan) | | 15.000.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Survey Kepuasan Pelayanan Kepegawaian | - | | | 3 Kegiatan | 569.000.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Wilayah | Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (Dinas Perhubungan) | - | 650.000.000,00 | |
| | 2 | 15 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | | | | 113 Paket | 219.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Wilayah | Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (Dinas Perhubungan) | | 250.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 19 Orang | 175.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Wilayah | Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (Dinas Perhubungan) | | 200.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 01 | 1.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 19 Orang | 175.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Wilayah | Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (Dinas Perhubungan) | | 200.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Survey Kepuasan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | 7 Paket | 1.334.000.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Wilayah | Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (Dinas Perhubungan) | - | 1.510.000.000,00 | |
| | 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 45.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Wilayah | Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (Dinas Perhubungan) | | 70.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 216.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Wilayah | Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (Dinas Perhubungan) | | 250.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 247.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Wilayah | Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (Dinas Perhubungan) | | 270.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 35.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Wilayah | Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (Dinas Perhubungan) | | 50.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 1 Paket | 98.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Wilayah | Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (Dinas Perhubungan) | | 120.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 1 Laporan | 35.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Wilayah | Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (Dinas Perhubungan) | | 50.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 658.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Wilayah | Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (Dinas Perhubungan) | | 700.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | 4 Jenis | 1.644.000.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Wilayah | Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (Dinas Perhubungan) | - | 1.745.000.000,00 | |
| | 2 | 15 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 9.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Wilayah | Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (Dinas Perhubungan) | | 10.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 921.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Wilayah | Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (Dinas Perhubungan) | | 1.000.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 28.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Wilayah | Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (Dinas Perhubungan) | | 35.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 686.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Wilayah | Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (Dinas Perhubungan) | | 700.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah Yang Dipelihara | - | | | 8 Jenis | 1.244.000.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Wilayah | Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (Dinas Perhubungan) | - | 1.480.000.000,00 | |
| | 2 | 15 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 17 Unit | 454.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Wilayah | Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (Dinas Perhubungan) | | 460.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 57 Unit | 250.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Wilayah | Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (Dinas Perhubungan) | | 300.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 2 Unit | 300.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Wilayah | Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (Dinas Perhubungan) | | 420.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 240.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Wilayah | Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (Dinas Perhubungan) | | 300.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 364 | 2 | 15 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | 40.00% | | | 23.21 % | 8.010.326.282,00 | | | | | | 30.98% | 8.610.000.000,00 | |
| | 2 | 15 | 02 | 1.02 | | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi | Jumlah Jenis Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan | - | | | 5 Jenis Perlengkapan Jalan | 6.623.858.000,00 | | | - | Pembangunan Wilayah | Peningkatan, Pemeliharaan dan Pemabangunan Sarana Prasarana Perhubungan | - | 7.000.000.000,00 | |
| | 2 | 15 | 02 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia | | | | 402 Unit | 4.828.358.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Wilayah | Peningkatan, Pemeliharaan dan Pemabangunan Sarana Prasarana Perhubungan | | 5.000.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 02 | 1.02 | 0004 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara | | | | 9914 Unit | 1.795.500.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Wilayah | Peningkatan, Pemeliharaan dan Pemabangunan Sarana Prasarana Perhubungan | | 2.000.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 02 | 1.03 | | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B | Jumlah Terminal Penumpang Tipe B | - | | | 1 Kegiatan | 150.000.000,00 | | | - | Pembangunan Wilayah | Peningkatan, Pemeliharaan dan Pemabangunan Sarana Prasarana Perhubungan | - | 250.000.000,00 | |
| | 2 | 15 | 02 | 1.03 | 0001 | Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B | | | | 1 Dokumen | 150.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Wilayah | Peningkatan, Pemeliharaan dan Pemabangunan Sarana Prasarana Perhubungan | | 250.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 02 | 1.05 | | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi | Jumlah Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi | - | | | 2 Kegiatan | 616.926.350,00 | | | - | Pembangunan Wilayah | Peningkatan, Pemeliharaan dan Pemabangunan Sarana Prasarana Perhubungan | - | 700.000.000,00 | |
| | 2 | 15 | 02 | 1.05 | 0001 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi | | | | 1 Laporan | 434.459.450,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Wilayah | Peningkatan, Pemeliharaan dan Pemabangunan Sarana Prasarana Perhubungan | | 500.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 02 | 1.05 | 0005 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi | | | | 1 Laporan | 182.466.900,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Wilayah | Peningkatan, Pemeliharaan dan Pemabangunan Sarana Prasarana Perhubungan | | 200.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 02 | 1.06 | | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi | Jumlah Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) untuk Jalan Provinsi | - | | | 1 Kegiatan | 77.813.800,00 | | | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pembangunan Wilayah | Peningkatan, Pemeliharaan dan Pemabangunan Sarana Prasarana Perhubungan | - | 80.000.000,00 | |
| | 2 | 15 | 02 | 1.06 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | | | | 6 Laporan | 77.813.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pembangunan Wilayah | Peningkatan, Pemeliharaan dan Pemabangunan Sarana Prasarana Perhubungan | | 80.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 02 | 1.07 | | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | Jumlah Angkutan Umum Yang Dilaksanakan Audit dan Inspeksi | - | | | 1 Kegiatan | 188.639.132,00 | | | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pembangunan Wilayah | Peningkatan, Pemeliharaan dan Pemabangunan Sarana Prasarana Perhubungan | - | 200.000.000,00 | |
| | 2 | 15 | 02 | 1.07 | 0005 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | | | | 7 Laporan | 188.639.132,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pembangunan Wilayah | Peningkatan, Pemeliharaan dan Pemabangunan Sarana Prasarana Perhubungan | | 200.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 02 | 1.08 | | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | - | | | 190 Unit Kendaraan | 176.370.000,00 | | | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pembangunan Wilayah | Peningkatan, Pemeliharaan dan Pemabangunan Sarana Prasarana Perhubungan | - | 190.000.000,00 | |
| | 2 | 15 | 02 | 1.08 | 0002 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi | | | | 1 Laporan | 176.370.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pembangunan Wilayah | Peningkatan, Pemeliharaan dan Pemabangunan Sarana Prasarana Perhubungan | | 190.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 02 | 1.15 | | Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | - | | | 1 Kegiatan | 176.719.000,00 | | | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pembangunan Wilayah | Peningkatan, Pemeliharaan dan Pemabangunan Sarana Prasarana Perhubungan | - | 190.000.000,00 | |
| | 2 | 15 | 02 | 1.15 | 0003 | Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | | | 1 Laporan | 176.719.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pembangunan Wilayah | Peningkatan, Pemeliharaan dan Pemabangunan Sarana Prasarana Perhubungan | | 190.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 365 | 2 | 15 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pelabuhan<br>Persentase Rute Pelayaran yang terfasilitasi | 25.00%<br>35.00% | | | 13.30 %<br>12.98 % | 5.166.508.391,00 | | | | | | 19.09%<br>18.56% | 7.465.000.000,00 | |
| | 2 | 15 | 03 | 1.01 | | Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi | Jumlah Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi | - | | | 1 Kegiatan | 101.710.000,00 | | | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pembangunan Wilayah | Peningkatan, Pemeliharaan dan Pemabangunan Sarana Prasarana Perhubungan | - | 120.000.000,00 | |
| | 2 | 15 | 03 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi | | | | 60 Laporan | 101.710.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pembangunan Wilayah | Peningkatan, Pemeliharaan dan Pemabangunan Sarana Prasarana Perhubungan | | 120.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 03 | 1.02 | | Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional | Jumlah Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional | - | | | 1 Laporan | 56.538.036,00 | | | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pembangunan Wilayah | Peningkatan, Pemeliharaan dan Pemabangunan Sarana Prasarana Perhubungan | - | 60.000.000,00 | |
| | 2 | 15 | 03 | 1.02 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi | | | | 1 Laporan | 56.538.036,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pembangunan Wilayah | Peningkatan, Pemeliharaan dan Pemabangunan Sarana Prasarana Perhubungan | | 60.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 03 | 1.05 | | Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Lintas dan Persetujuan Pengoperasian Kapal | - | | | 2 Kegiatan | 693.998.986,00 | | | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pembangunan Wilayah | Peningkatan, Pemeliharaan dan Pemabangunan Sarana Prasarana Perhubungan | - | 780.000.000,00 | |
| | 2 | 15 | 03 | 1.05 | 0003 | Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi | | | | 1 Dokumen | 173.998.986,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pembangunan Wilayah | Peningkatan, Pemeliharaan dan Pemabangunan Sarana Prasarana Perhubungan | | 180.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 03 | 1.05 | 0004 | Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi | | | | 2 Laporan | 520.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pembangunan Wilayah | Peningkatan, Pemeliharaan dan Pemabangunan Sarana Prasarana Perhubungan | | 600.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 03 | 1.06 | | Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas | Jumlah Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas | - | | | 2 Kegiatan | 179.247.000,00 | | | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pembangunan Wilayah | Peningkatan, Pemeliharaan dan Pemabangunan Sarana Prasarana Perhubungan | - | 200.000.000,00 | |
| | 2 | 15 | 03 | 1.06 | 0001 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | | | 1 Dokumen | 79.247.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pembangunan Wilayah | Peningkatan, Pemeliharaan dan Pemabangunan Sarana Prasarana Perhubungan | | 80.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 03 | 1.06 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas | | | | 2 Laporan | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pembangunan Wilayah | Peningkatan, Pemeliharaan dan Pemabangunan Sarana Prasarana Perhubungan | | 120.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 03 | 1.07 | | Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi | Jumlah Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar daerah Kabupaten / Kota dalam Daerah Provinsi | - | | | 3 Kegiatan | 365.140.760,00 | | | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pembangunan Wilayah | Peningkatan, Pemeliharaan dan Pemabangunan Sarana Prasarana Perhubungan | - | 395.000.000,00 | |
| | 2 | 15 | 03 | 1.07 | 0001 | Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 72.918.760,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pembangunan Wilayah | Peningkatan, Pemeliharaan dan Pemabangunan Sarana Prasarana Perhubungan | | 80.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 03 | 1.07 | 0002 | Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota | | | | 2 Dokumen | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pembangunan Wilayah | Peningkatan, Pemeliharaan dan Pemabangunan Sarana Prasarana Perhubungan | | 120.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 03 | 1.07 | 0003 | Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota | | | | 4 Laporan | 192.222.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pembangunan Wilayah | Peningkatan, Pemeliharaan dan Pemabangunan Sarana Prasarana Perhubungan | | 195.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 03 | 1.08 | | Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional | Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja ( DLKr ) / Daerah Lingkungan Kepentingan ( DLKp ) Pelabuhan Pengumpan Regional | - | | | 3 Kegiatan | 380.000.000,00 | | | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pembangunan Wilayah | Peningkatan, Pemeliharaan dan Pemabangunan Sarana Prasarana Perhubungan | - | 1.095.000.000,00 | |
| | 2 | 15 | 03 | 1.08 | 0001 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional | | | | 1 Dokumen | 300.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pembangunan Wilayah | Peningkatan, Pemeliharaan dan Pemabangunan Sarana Prasarana Perhubungan | | 1.000.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 03 | 1.08 | 0002 | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional | | | | 2 Dokumen | 50.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pembangunan Wilayah | Peningkatan, Pemeliharaan dan Pemabangunan Sarana Prasarana Perhubungan | | 60.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 03 | 1.08 | 0003 | Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional | | | | 2 Laporan | 30.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pembangunan Wilayah | Peningkatan, Pemeliharaan dan Pemabangunan Sarana Prasarana Perhubungan | | 35.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 03 | 1.09 | | Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional | Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional | - | | | 17 Unit | 730.002.609,00 | | | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pembangunan Wilayah | Peningkatan, Pemeliharaan dan Pemabangunan Sarana Prasarana Perhubungan | - | 750.000.000,00 | |
| | 2 | 15 | 03 | 1.09 | 0003 | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara | | | | 17 Unit | 590.002.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pembangunan Wilayah | Peningkatan, Pemeliharaan dan Pemabangunan Sarana Prasarana Perhubungan | | 600.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 03 | 1.09 | 0004 | Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional | | | | 9 Laporan | 140.000.609,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pembangunan Wilayah | Peningkatan, Pemeliharaan dan Pemabangunan Sarana Prasarana Perhubungan | | 150.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 03 | 1.10 | | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Pembangunan & Perizinan | - | | | 1 Kegiatan | 1.599.871.000,00 | | | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pembangunan Wilayah | Peningkatan, Pemeliharaan dan Pemabangunan Sarana Prasarana Perhubungan | - | 2.000.000.000,00 | |
| | 2 | 15 | 03 | 1.10 | 0001 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan perizinan | | | | 10 Laporan | 1.599.871.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pembangunan Wilayah | Peningkatan, Pemeliharaan dan Pemabangunan Sarana Prasarana Perhubungan | | 2.000.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 03 | 1.12 | | Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional | Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional | - | | | 2 Kegiatan | 1.060.000.000,00 | | | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pembangunan Wilayah | Peningkatan, Pemeliharaan dan Pemabangunan Sarana Prasarana Perhubungan | - | 2.065.000.000,00 | |
| | 2 | 15 | 03 | 1.12 | 0001 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | | | 1 Dokumen | 1.000.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pembangunan Wilayah | Peningkatan, Pemeliharaan dan Pemabangunan Sarana Prasarana Perhubungan | | 2.000.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 03 | 1.12 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional | | | | 2 Laporan | 60.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pembangunan Wilayah | Peningkatan, Pemeliharaan dan Pemabangunan Sarana Prasarana Perhubungan | | 65.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | | | | | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | 23.119.209.165,00 | | | | | | | 24.464.209.165,00 | |
| | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 23.119.209.165,00 | | | | | | | 24.464.209.165,00 | |
| | 2 | 16 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | 22.524.093.887,00 | | | | | | | 23.869.093.887,00 | |
| 366 | 2 | 16 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 85nilai 90nilai | | | - | 11.327.729.787,00 | | | | | | 84nilai 90nilai | 11.372.729.787,00 | |
| | 2 | 16 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 216.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 216.000.000,00 | |
| | 2 | 16 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 6 Dokumen | 180.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 180.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2 | 16 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 7 Laporan | 36.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 36.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2 | 16 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 7.838.679.663,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 7.938.679.663,00 | |
| | 2 | 16 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 60 Orang/ Bulan | 7.838.679.663,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 7.938.679.663,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2 | 16 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | - | | | - | 60.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 65.000.000,00 | |
| | 2 | 16 | 01 | 1.03 | 0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | | | 19 Laporan | 60.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 65.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2 | 16 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 135.000.000,00 | | | - | - | - | - | 125.000.000,00 | |
| | 2 | 16 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 55.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 45.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2 | 16 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 16 Orang | 80.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 80.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2 | 16 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 425.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 375.000.000,00 | |
| | 2 | 16 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 15.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 15.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2 | 16 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 50.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 50.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2 | 16 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 2 Paket | 25.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 25.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2 | 16 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 12 Laporan | 35.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 35.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2 | 16 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 300.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 250.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2 | 16 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 380.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 380.000.000,00 | |
| | 2 | 16 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 1 Paket | 180.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 180.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2 | 16 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 2 Unit | 100.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 100.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2 | 16 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 2 Unit | 100.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 100.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2 | 16 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 1.790.650.124,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 1.790.650.124,00 | |
| | 2 | 16 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 8.098.900,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 8.098.900,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2 | 16 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 300.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 300.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2 | 16 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 49.951.224,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 49.951.224,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2 | 16 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 1.432.600.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 1.432.600.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2 | 16 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 482.400.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 482.400.000,00 | |
| | 2 | 16 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 52.400.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 52.400.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2 | 16 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 5 Unit | 90.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 90.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2 | 16 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 20 Unit | 70.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 70.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2 | 16 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 2 Unit | 150.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 150.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2 | 16 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 3 Unit | 120.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 120.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 367 | 2 | 16 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | - | 100% | | | - | 4.970.848.600,00 | | | | | | 100% | 6.270.848.600,00 | |
| | 2 | 16 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi | - | - | | | - | 4.970.848.600,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 6.270.848.600,00 | |
| | 2 | 16 | 02 | 1.01 | 0002 | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | | | | 12 Dokumen | 34.900.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 34.900.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2 | 16 | 02 | 1.01 | 0004 | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | | | | 3 Dokumen | 1.194.218.200,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 1.694.218.200,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2 | 16 | 02 | 1.01 | 0005 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik | | | | 4 Dokumen | 674.965.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 674.965.600,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2 | 16 | 02 | 1.01 | 0006 | Pelayanan Informasi Publik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik | | | | 3 Dokumen | 882.008.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 882.008.800,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2 | 16 | 02 | 1.01 | 0010 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya | | | | 100 Orang | 161.854.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 161.854.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 16 | 02 | 1.01 | 0011 | Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah | | | | 1 Dokumen | 788.902.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 788.902.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2 | 16 | 02 | 1.01 | 0012 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan | | | | 3 Dokumen | 1.234.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 2.034.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 368 | 2 | 16 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | - | 100% | | | - | 6.225.515.500,00 | | | | | | 90% | 6.225.515.500,00 | |
| | 2 | 16 | 03 | 1.01 | | Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi | - | - | | | - | 405.997.700,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 405.997.700,00 | |
| | 2 | 16 | 03 | 1.01 | 0001 | Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi | | | | 10 Domain | 79.997.700,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 79.997.700,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2 | 16 | 03 | 1.01 | 0003 | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | | | | 34 Unit | 326.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 326.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2 | 16 | 03 | 1.02 | | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi | - | - | | | - | 5.819.517.800,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 5.819.517.800,00 | |
| | 2 | 16 | 03 | 1.02 | 0002 | Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik | | | | 1 Dokumen | 135.900.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 135.900.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2 | 16 | 03 | 1.02 | 0003 | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola | | | | 1 Unit | 5.096.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 5.096.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2 | 16 | 03 | 1.02 | 0004 | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | | | | 1 Dokumen | 204.133.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 204.133.600,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2 | 16 | 03 | 1.02 | 0007 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan | | | | 1 Unit | 150.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 150.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2 | 16 | 03 | 1.02 | 0008 | Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Peghubung Layanan Pemerintah Daerah | | | | 10 Layanan | 148.484.200,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 148.484.200,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2 | 16 | 03 | 1.02 | 0010 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | | | | 1 Dokumen | 85.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 85.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2 | 20 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | | | | | | 235.390.500,00 | | | | | | | 235.390.500,00 | |
| 369 | 2 | 20 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | - | 100% | | | - | 235.390.500,00 | | | | | | 85% | 235.390.500,00 | |
| | 2 | 20 | 02 | 1.01 | | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi | - | - | | | - | 235.390.500,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 235.390.500,00 | |
| | 2 | 20 | 02 | 1.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | | | | 1 Dokumen | 96.400.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 96.400.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2 | 20 | 02 | 1.01 | 0003 | Membangun Metadata Statistik Sektoral | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun | | | | 10 Dokumen | 51.995.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 51.995.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2 | 20 | 02 | 1.01 | 0004 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS | | | | 60 Orang | 86.995.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 86.995.500,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2 | 21 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | | | | | | 299.724.778,00 | | | | | | | 299.724.778,00 | |
| 370 | 2 | 21 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | - | 100% | | | - | 299.724.778,00 | | | | | | 85% | 299.724.778,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 21 | 02 | 1.01 | | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | - | - | | | - | 269.724.778,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 269.724.778,00 | |
| | 2 | 21 | 02 | 1.01 | 0003 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | | | | 12 Laporan | 79.930.540,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 79.930.540,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2 | 21 | 02 | 1.01 | 0004 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi | | | | 1 Perangkat Daerah | 189.794.238,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 189.794.238,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2 | 21 | 02 | 1.02 | | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi | - | - | | | - | 30.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 30.000.000,00 | |
| | 2 | 21 | 02 | 1.02 | 0001 | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi | | | | 27 Perangkat Daerah | 30.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 30.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2 | - | | | | - | | | | | | 60.000.000,00 | | | | | | | 60.000.000,00 | |
| 371 | 2 | - | - | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 85nilai<br>90nilai | | | - | 60.000.000,00 | | | | | | 84nilai<br>90nilai | 60.000.000,00 | |
| | 2 | - | - | - | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 60.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 60.000.000,00 | |
| | 2 | - | - | - | - | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 60.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 60.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | | | | | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | | | | | | 23.966.051.862,00 | | | | | | | 70.000.000,00 | |
| | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 23.966.051.862,00 | | | | | | | 70.000.000,00 | |
| | 2 | 17 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | | | | 23.966.051.862,00 | | | | | | | 70.000.000,00 | |
| 372 | 2 | 17 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 0persen<br>0nilai<br>81persen<br>0persen<br>80.7nilai<br>80nilai | | | - | 13.966.250.262,00 | | | | | | 81persen<br>80nilai<br>80.8persen<br>81persen<br>80.5nilai<br>80nilai | 0,00 | |
| | 2 | 17 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 95.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 0,00 | |
| | 2 | 17 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 6 Dokumen | 70.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2 | 17 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 6 Laporan | 25.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2 | 17 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 8.531.839.409,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 0,00 | |
| | 2 | 17 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 53 Orang/ Bulan | 8.531.839.409,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2 | 17 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 187.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 0,00 | |
| | 2 | 17 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | | | | 95 Paket | 57.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2 | 17 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 10 Orang | 130.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2 | 17 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 1.050.683.200,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 0,00 | |
| | 2 | 17 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 55.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2 | 17 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 135.164.300,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2 | 17 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 34.999.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2 | 17 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 137.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2 | 17 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 13.620.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2 | 17 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 1 Paket | 99.999.400,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2 | 17 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 1 Laporan | 71.500.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2 | 17 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 453.400.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2 | 17 | 01 | 1.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2 | 17 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 1.543.000.000,00 | | | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | - | 0,00 | |
| | 2 | 17 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 3 Paket | 55.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2 | 17 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 11 Unit | 273.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2 | 17 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 6 Unit | 1.215.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2 | 17 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 1.830.516.125,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 0,00 | |
| | 2 | 17 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 23.285.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2 | 17 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 329.931.125,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2 | 17 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 7.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2 | 17 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1.470.300.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2 | 17 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 728.211.528,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 0,00 | |
| | 2 | 17 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 65.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2 | 17 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 5 Unit | 107.780.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2 | 17 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 3 Unit | 409.431.528,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2 | 17 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 3 Unit | 130.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2 | 17 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 16.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 373 | 2 | 17 | 02 | | | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | - | 0%<br>5% | | | - | 60.000.000,00 | | | | | | 27,3%<br>3% | 70.000.000,00 | |
| | 2 | 17 | 02 | 1.01 | | Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | - | - | | | - | 60.000.000,00 | | | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | - | 70.000.000,00 | |
| | 2 | 17 | 02 | 1.01 | 0002 | Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam | | | | 2 Unit Usaha | 60.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 70.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 374 | 2 | 17 | 03 | | | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | - | 27% | | | - | 85.000.000,00 | | | | | | 20% | 0,00 | |
| | 2 | 17 | 03 | 1.01 | | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | - | - | | | - | 60.000.000,00 | | | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | - | 0,00 | |
| | 2 | 17 | 03 | 1.01 | 0003 | Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi | | | | 20 Unit Usaha | 60.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2 | 17 | 03 | 1.02 | | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | - | - | | | - | 25.000.000,00 | | | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | - | 0,00 | |
| | 2 | 17 | 03 | 1.02 | 0002 | Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan | | | | 13 Unit Usaha | 25.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 375 | 2 | 17 | 04 | | | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | - | 67% | | | - | 90.000.000,00 | | | | | | 67% | 0,00 | |
| | 2 | 17 | 04 | 1.01 | | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | - | - | | | - | 90.000.000,00 | | | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | - | 0,00 | |
| | 2 | 17 | 04 | 1.01 | 0003 | Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan | | | | 13 Unit Usaha | 90.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 376 | 2 | 17 | 05 | | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | - | 0,298% | | | - | 3.824.212.800,00 | | | | | | 0,288% | 0,00 | |
| | 2 | 17 | 05 | 1.01 | | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | - | - | | | - | 3.824.212.800,00 | | | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | - | 0,00 | |
| | 2 | 17 | 05 | 1.01 | 0001 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian | | | | 930 Orang | 3.824.212.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-PK2UKM, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 377 | 2 | 17 | 06 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | - | 11% | | | - | 462.239.600,00 | | | | | | 9% | 0,00 | |
| | 2 | 17 | 06 | 1.01 | | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | - | - | | | - | 462.239.600,00 | | | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | - | 0,00 | |
| | 2 | 17 | 06 | 1.01 | 0004 | Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan | | | | 5 Kelompok Masyarakat | 70.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 17 | 06 | 1.01 | 0006 | Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya | | | | 5 Unit Usaha | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2 | 17 | 06 | 1.01 | 0008 | Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya | | | | 5 Unit Usaha | 150.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2 | 17 | 06 | 1.01 | 0009 | Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan | | | | 5 Unit Usaha | 142.239.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 378 | 2 | 17 | 07 | | | PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | - | 0,62% | | | - | 2.379.622.100,00 | | | | | | 0,56% | 0,00 | |
| | 2 | 17 | 07 | 1.01 | | Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan | - | - | | | - | 2.379.622.100,00 | | | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | - | 0,00 | |
| | 2 | 17 | 07 | 1.01 | 0001 | Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan | | | | 48 Unit Usaha | 700.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2 | 17 | 07 | 1.01 | 0002 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan | | | | 140 Orang | 361.920.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2 | 17 | 07 | 1.01 | 0003 | Pemulihan Usaha-Usaha Kecil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi | | | | 24 Unit Usaha | 200.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2 | 17 | 07 | 1.01 | 0004 | Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi | | | | 100 Unit Usaha | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2 | 17 | 07 | 1.01 | 0005 | Penyusunan Basis Data Usaha Kecil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata | | | | 500 Unit Usaha | 354.635.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2 | 17 | 07 | 1.01 | 0006 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan | | | | 70 Orang | 189.496.700,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2 | 17 | 07 | 1.01 | 0007 | Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi | | | | 120 Unit Usaha | 143.762.400,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2 | 17 | 07 | 1.01 | 0008 | Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Kecil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi | | | | 35 Unit Usaha | 40.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2 | 17 | 07 | 1.01 | 0009 | Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi | | | | 20 Unit Usaha | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2 | 17 | 07 | 1.01 | 0010 | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi | | | | 50 Unit Usaha | 25.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2 | 17 | 07 | 1.01 | 0011 | Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi | | | | 15 Unit Usaha | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2 | 17 | 07 | 1.01 | 0012 | Perizinan Barusaha bagi Usaha Kecil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi | | | | 300 Unit Usaha | 64.808.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 379 | 2 | 17 | 08 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | - | 0,13% | | | - | 3.098.727.100,00 | | | | | | 0,12% | 0,00 | |
| | 2 | 17 | 08 | 1.01 | | Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah | - | - | | | - | 3.098.727.100,00 | | | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | - | 0,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 17 | 08 | 1.01 | 0001 | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi | | | | 60 Unit Usaha | 1.748.727.100,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2 | 17 | 08 | 1.01 | 0002 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum | | | | 350 Orang | 150.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2 | 17 | 08 | 1.01 | 0003 | Pengembangan Usaha Kecil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi | | | | 5 Unit Usaha | 350.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2 | 17 | 08 | 1.01 | 0004 | Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi | | | | 3 Lembaga | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2 | 17 | 08 | 1.01 | 0005 | Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wirausaha yang Difasilitasi | | | | 200 Orang | 350.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2 | 17 | 08 | 1.01 | 0006 | Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi | | | | 3 Unit Usaha | 400.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | | | | | | UPTD BALAI LATIHAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 2 | - | | | | - | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| 380 | 2 | - | - | | | - | - | - | | | - | 0,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | 2 | - | - | - | | - | - | - | | | - | 0,00 | | | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | - | 0,00 | |
| | 2 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | - | | | | - | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | - | | 0,00 | UPTD BALAI LATIHAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | | | | | | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | | | | | | 14.885.002.464,00 | | | | | | | 16.985.996.365,00 | |
| | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 14.885.002.464,00 | | | | | | | 16.985.996.365,00 | |
| | 2 | 18 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | | | | 14.885.002.464,00 | | | | | | | 16.985.996.365,00 | |
| 381 | 2 | 18 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai Sakip PD (DPMPTSP) | 71Nilai<br>75Nilai<br>81Nilai | | | 79 Nilai | 11.753.002.464,00 | | | | | | 70Nilai<br>72Nilai<br>80Nilai | 11.750.996.365,00 | |
| | 2 | 18 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | 18 Dokumen | 286.755.145,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 414.750.000,00 | |
| | 2 | 18 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 11 Dokumen | 261.755.145,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 393.750.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2 | 18 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 7 Laporan | 25.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 21.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2 | 18 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Pelayanan Keuangan | - | | | 75 | 8.321.288.119,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 8.524.246.365,00 | |
| | 2 | 18 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 60 Orang/ Bulan | 8.321.288.119,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 8.524.246.365,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2 | 18 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian | - | | | 68 | 250.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 260.000.000,00 | |
| | 2 | 18 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 48 Orang | 250.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 260.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2 | 18 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Pelayanan administrasi umum PD (DPMPTSP) | - | | | 68 | 795.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 600.000.000,00 | |
| | 2 | 18 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 2 Paket | 50.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 40.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2 | 18 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 30.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 25.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2 | 18 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 12 Paket | 15.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 15.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2 | 18 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 Paket | 25.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 20.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2 | 18 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 Paket | 60.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 60.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2 | 18 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 12 Dokumen | 30.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 30.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2 | 18 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 4 Paket | 80.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 80.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2 | 18 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 12 Laporan | 75.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 50.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2 | 18 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 400.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 250.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2 | 18 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 1 Dokumen | 30.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 30.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2 | 18 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah yang diadakan (DPMPTSP) | - | | | 67 | 849.959.200,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 500.000.000,00 | |
| | 2 | 18 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 4 Paket | 154.674.700,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2 | 18 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 50 Unit | 695.284.500,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 500.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2 | 18 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (DPMPTSP) | - | | | 3 | 890.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 917.000.000,00 | |
| | 2 | 18 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 15.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 17.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2 | 18 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 175.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 150.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2 | 18 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 700.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 750.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2 | 18 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara (DPMPTSP) | - | | | 183 | 360.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 535.000.000,00 | |
| | 2 | 18 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 65.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 35.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2 | 18 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 3 Unit | 70.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 150.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2 | 18 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 91 Unit | 75.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 100.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2 | 18 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 100.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 150.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2 | 18 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 50.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 100.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 382 | 2 | 18 | 02 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | Banyaknya investor yang menanamkan modal | 105Investor<br>105Investor | | | 25 Investor | 700.000.000,00 | | | | | | 27 Investor<br>27 Investor | 1.400.000.000,00 | |
| | 2 | 18 | 02 | 1.01 | | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh fasilitasi/insentif investasi provinsi | - | | | 2 Pelaku Usaha | 350.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 800.000.000,00 | |
| | 2 | 18 | 02 | 1.01 | 0001 | Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | | | | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 400.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2 | 18 | 02 | 1.01 | 0003 | Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah | | | | 2 Dokumen | 250.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 400.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2 | 18 | 02 | 1.02 | | Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi | Jumlah Peta peluang investasi provinsi | - | | | 2 Dokumen | 350.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 600.000.000,00 | |
| | 2 | 18 | 02 | 1.02 | 0005 | Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi | | | | 2 Dokumen | 350.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 600.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 383 | 2 | 18 | 03 | | | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Peluang penanaman modal yang dipromosikan | 8Peluang<br>2Peluang | | | 2 Peluang | 600.000.000,00 | | | | | | 2Peluang<br>2Peluang | 675.000.000,00 | |
| | 2 | 18 | 03 | 1.01 | | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal | - | | | 3 promosi | 600.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 675.000.000,00 | |
| | 2 | 18 | 03 | 1.01 | 0002 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi | | | | 1 Dokumen | 450.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 525.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2 | 18 | 03 | 1.01 | 0003 | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi | | | | 2 Dokumen | 150.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 150.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 384 | 2 | 18 | 04 | | | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Pelaku Usaha yang terlayani | 4125Pelaku Usaha | | | 950 Pelaku Usaha | 572.000.000,00 | | | | | | 1050Pelaku Usaha | 1.950.000.000,00 | |
| | 2 | 18 | 04 | 1.01 | | Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah perizinan dan non perizinan lintas daerah kabupaten/kota yang diterbitkan sesuai SOP | - | | | 50 izin dan non izin | 100.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 650.000.000,00 | |
| | 2 | 18 | 04 | 1.01 | 0006 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | | | | 50 Pelaku Usaha | 50.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 400.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2 | 18 | 04 | 1.01 | 0007 | Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah | | | | 50 Kegiatan usaha | 50.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 250.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2 | 18 | 04 | 1.02 | | Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | - | - | | | - | 472.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 1.300.000.000,00 | |
| | 2 | 18 | 04 | 1.02 | 0006 | Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | | | | 900 Pelaku Usaha | 72.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 250.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2 | 18 | 04 | 1.02 | 0007 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | | | | 925 Pelaku Usaha | 250.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 600.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2 | 18 | 04 | 1.02 | 0008 | Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha | | | | 925 Kegiatan Usaha | 150.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 450.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 385 | 2 | 18 | 05 | | | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Persentase Peningkatan Perusahaan Yang Patuh Terhadap Perundang-Undangan | 1.3% | | | 1.1 % | 1.060.000.000,00 | | | | | | 1.2% | 1.010.000.000,00 | |
| | 2 | 18 | 05 | 1.01 | | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | Jumlah Pelaku Usaha/Kegiatan Usaha yang telah dilakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan | - | | | 130 PU dan KU | 1.060.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 1.010.000.000,00 | |
| | 2 | 18 | 05 | 1.01 | 0004 | Pengawasan Penanaman Modal | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha | | | | 30 Kegiatan usaha | 660.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 500.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2 | 18 | 05 | 1.01 | 0005 | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | | | | 8 Kegiatan usaha | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 150.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2 | 18 | 05 | 1.01 | 0006 | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | | | | 240 Pelaku Usaha | 300.000.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 360.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 386 | 2 | 18 | 06 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | Sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang dikelola | 1Dokumen | | | 1 Dokumen | 200.000.000,00 | | | | | | 1Dokumen | 200.000.000,00 | |
| | 2 | 18 | 06 | 1.01 | | Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi | Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi | - | | | 1 Dokumen | 200.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 200.000.000,00 | |
| | 2 | 18 | 06 | 1.01 | 0002 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan | | | | 12 Dokumen | 200.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 200.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | | | | | | UPTD Pelayanan Perizinan Terpadu Wilayah Belitung | | | | | | 769.750.500,00 | | | | | | | 610.000.000,00 | |
| | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 769.750.500,00 | | | | | | | 610.000.000,00 | |
| | 2 | 18 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | | | | 769.750.500,00 | | | | | | | 610.000.000,00 | |
| 387 | 2 | 18 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (UPT PPT WILAYAH BELITUNG) | 71Nilai<br>75Nilai<br>81Nilai | | | 69 Nilai | 769.750.500,00 | | | | | | 70Nilai<br>72Nilai<br>80Nilai | 610.000.000,00 | |
| | 2 | 18 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Pelayanan administrasi umum PD (UPT PPT Wilayah Belitung) | - | | | 68 | 182.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 180.000.000,00 | |
| | 2 | 18 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 13.000.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 13.000.000,00 | UPTD PELAYANAN PERIZINAN TERPADU WILAYAH BELITUNG |
| | 2 | 18 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 15.000.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 15.000.000,00 | UPTD PELAYANAN PERIZINAN TERPADU WILAYAH BELITUNG |
| | 2 | 18 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 6 Paket | 15.000.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 15.000.000,00 | UPTD PELAYANAN PERIZINAN TERPADU WILAYAH BELITUNG |
| | 2 | 18 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 Paket | 4.000.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 4.000.000,00 | UPTD PELAYANAN PERIZINAN TERPADU WILAYAH BELITUNG |
| | 2 | 18 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 Paket | 20.000.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 20.000.000,00 | UPTD PELAYANAN PERIZINAN TERPADU WILAYAH BELITUNG |
| | 2 | 18 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 12 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 5.000.000,00 | UPTD PELAYANAN PERIZINAN TERPADU WILAYAH BELITUNG |
| | 2 | 18 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 4 Paket | 15.000.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 15.000.000,00 | UPTD PELAYANAN PERIZINAN TERPADU WILAYAH BELITUNG |
| | 2 | 18 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 12 Laporan | 20.000.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 10.000.000,00 | UPTD PELAYANAN PERIZINAN TERPADU WILAYAH BELITUNG |
| | 2 | 18 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 75.000.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 83.000.000,00 | UPTD PELAYANAN PERIZINAN TERPADU WILAYAH BELITUNG |
| | 2 | 18 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah yang diadakan (UPT PPT Wilayah Belitung) | - | | | 21 | 166.250.500,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 0,00 | |
| | 2 | 18 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 3 Paket | 35.500.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | UPTD PELAYANAN PERIZINAN TERPADU WILAYAH BELITUNG |
| | 2 | 18 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 18 Unit | 130.750.500,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | UPTD PELAYANAN PERIZINAN TERPADU WILAYAH BELITUNG |
| | 2 | 18 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPT Wilayah Belitung) | - | | | 3 | 299.900.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 306.400.000,00 | |
| | 2 | 18 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 10.000.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 10.000.000,00 | UPTD PELAYANAN PERIZINAN TERPADU WILAYAH BELITUNG |
| | 2 | 18 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 26.000.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 32.500.000,00 | UPTD PELAYANAN PERIZINAN TERPADU WILAYAH BELITUNG |
| | 2 | 18 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 263.900.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 263.900.000,00 | UPTD PELAYANAN PERIZINAN TERPADU WILAYAH BELITUNG |
| | 2 | 18 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara (UPT PPT Wilayah Belitung) | - | | | 50 | 121.600.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 123.600.000,00 | |
| | 2 | 18 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 13.000.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 14.000.000,00 | UPTD PELAYANAN PERIZINAN TERPADU WILAYAH BELITUNG |
| | 2 | 18 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 2 Unit | 68.600.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 69.600.000,00 | UPTD PELAYANAN PERIZINAN TERPADU WILAYAH BELITUNG |
| | 2 | 18 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 5 Unit | 10.000.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 10.000.000,00 | UPTD PELAYANAN PERIZINAN TERPADU WILAYAH BELITUNG |
| | 2 | 18 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 10.000.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 10.000.000,00 | UPTD PELAYANAN PERIZINAN TERPADU WILAYAH BELITUNG |
| | 2 | 18 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 20.000.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 20.000.000,00 | UPTD PELAYANAN PERIZINAN TERPADU WILAYAH BELITUNG |
| | | | | | | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA | | | | | | 52.557.653.031,00 | | | | | | | 103.846.698.495,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 47.396.041.167,00 | | | | | | | 95.896.698.495,00 | |
| | 2 | 19 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | | | 45.384.951.247,00 | | | | | | | 93.306.698.495,00 | |
| 388 | 2 | 19 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indeks kepuasan pelayanan internal (PARBUDKEPORA)<br>Nilai SAKIP PD (DISPARBUDPORA) | 80Nilai<br>80Nilai<br>70Nilai<br>70Nilai<br>70Nilai<br>70Nilai<br>80Nilai<br>80nilai<br>70Nilai<br>70Nilai | | | 68 Nilai<br>78 nilai | 18.352.630.547,00 | | | | | | 79Nilai<br>79Nilai<br>69Nilai<br>69Nilai<br>69Nilai<br>69Nilai<br>79Nilai<br>79nilai<br>69Nilai<br>69Nilai | 33.289.023.495,00 | |
| | 2 | 19 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | 17 dokumen | 299.188.900,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Sumber Daya Manusia | Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | - | 604.368.000,00 | |
| | 2 | 19 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 10 Dokumen | 131.448.900,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Sumber Daya Manusia | Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | | 343.080.000,00 | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA |
| | 2 | 19 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 7 Laporan | 167.740.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Sumber Daya Manusia | Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | | 261.288.000,00 | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA |
| | 2 | 19 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah laporan administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | 1 dokumen | 13.115.310.262,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga dan UPTD BPP Wilayah Belitung | - | 24.958.383.495,00 | |
| | 2 | 19 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 96 Orang/ Bulan | 13.085.310.262,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Pemerintahan | Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga dan UPTD BPP Wilayah Belitung | | 24.938.383.495,00 | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA |
| | 2 | 19 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 2 Laporan | 30.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga dan UPTD BPP Wilayah Belitung | | 20.000.000,00 | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA |
| | 2 | 19 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah laporan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | 1 dokumen | 35.000.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | - | 129.000.000,00 | |
| | 2 | 19 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 5 Orang | 35.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | | 129.000.000,00 | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA |
| | 2 | 19 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah laporan administrasi umum yang dikelola | - | | | 1 dokumen | 818.660.700,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Sumber Daya Manusia | Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | - | 1.328.520.000,00 | |
| | 2 | 19 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 12 Paket | 30.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Sumber Daya Manusia | Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | | 25.920.000,00 | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA |
| | 2 | 19 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 12 Paket | 199.271.600,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | - | Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | | 36.000.000,00 | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA |
| | 2 | 19 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 12 Paket | 9.997.300,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Sumber Daya Manusia | Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | | 36.000.000,00 | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA |
| | 2 | 19 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 Paket | 19.324.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | - | Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | | 273.000.000,00 | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA |
| | 2 | 19 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 Paket | 60.540.600,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | - | Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | | 144.000.000,00 | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA |
| | 2 | 19 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 12 Dokumen | 19.540.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Sumber Daya Manusia | Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | | 21.600.000,00 | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA |
| | 2 | 19 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 12 Paket | 99.999.700,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Sumber Daya Manusia | Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | | 0,00 | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA |
| | 2 | 19 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 12 Laporan | 49.987.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Sumber Daya Manusia | Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | | 216.000.000,00 | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA |
| | 2 | 19 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 330.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | - | Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | | 576.000.000,00 | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA |
| | 2 | 19 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | 8 Unit | 371.550.840,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | - | Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | - | 144.000.000,00 | |
| | 2 | 19 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 1 Paket | 40.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | - | Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | | 36.000.000,00 | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA |
| | 2 | 19 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 12 Unit | 181.550.840,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Sumber Daya Manusia | Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | | 36.000.000,00 | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA |
| | 2 | 19 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 5 Unit | 150.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | - | Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | | 72.000.000,00 | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA |
| | 2 | 19 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | 1 Dokumen | 3.132.867.845,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | - | Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | - | 4.886.352.000,00 | |
| | 2 | 19 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 18.470.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | - | Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | | 21.600.000,00 | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA |
| | 2 | 19 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 399.997.845,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Sumber Daya Manusia | Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | | 576.000.000,00 | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA |
| | 2 | 19 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 2.714.400.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Sumber Daya Manusia | Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | | 4.288.752.000,00 | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA |
| | 2 | 19 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | 5 unit | 580.052.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Sumber Daya Manusia | Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | - | 1.238.400.000,00 | |
| | 2 | 19 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 56.700.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Sumber Daya Manusia | Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | | 93.600.000,00 | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA |
| | 2 | 19 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 4 Unit | 263.458.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | | 374.400.000,00 | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA |
| | 2 | 19 | 01 | 1.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | | | | 5 Unit | 10.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Sumber Daya Manusia | Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | | 50.400.000,00 | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA |
| | 2 | 19 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 71 Unit | 50.110.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Sumber Daya Manusia | Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | | 72.000.000,00 | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA |
| | 2 | 19 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 2 Unit | 99.960.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Sumber Daya Manusia | Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | | 360.000.000,00 | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA |
| | 2 | 19 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 2 Unit | 49.912.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Sumber Daya Manusia | Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | | 144.000.000,00 | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA |
| | 2 | 19 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 2 Unit | 49.912.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Sumber Daya Manusia | Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | | 144.000.000,00 | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA |
| 389 | 2 | 19 | 02 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Persentase organisasi kepemudaan yang dibina<br>Persentase Pemuda Yang dibina | 61.19persen<br>1.26persen | | | 55.22 persen<br>1.06 persen | 1.820.210.500,00 | | | | | | 58.21persen<br>1.16persen | 3.840.425.000,00 | |
| | 2 | 19 | 02 | 1.01 | | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi | Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda | - | | | 360 pemuda | 990.210.500,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Sumber Daya Manusia | Pemuda di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | - | 2.451.800.000,00 | |
| | 2 | 19 | 02 | 1.01 | 0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya | | | | 126 Orang | 490.901.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Sumber Daya Manusia | Pemuda di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | 1.035.000.000,00 | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA |
| | 2 | 19 | 02 | 1.01 | 0010 | Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah yang menerima penghargaan pemuda | | | | 1 Orang | 98.500.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Sumber Daya Manusia | Pemuda di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | 529.000.000,00 | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA |
| | 2 | 19 | 02 | 1.01 | 0011 | Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi | | | | 1 Dokumen | 129.563.300,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Sumber Daya Manusia | Pemuda di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | 172.500.000,00 | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA |
| | 2 | 19 | 02 | 1.01 | 0012 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda | | | | 14 Persentase | 99.725.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Sumber Daya Manusia | Pemuda di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | 345.000.000,00 | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA |
| | 2 | 19 | 02 | 1.01 | 0013 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda | | | | 14 Orang | 80.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Sumber Daya Manusia | Pemuda di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | 171.925.000,00 | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA |
| | 2 | 19 | 02 | 1.01 | 0015 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda | | | | 14 Orang | 91.520.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Sumber Daya Manusia | Pemuda di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | 198.375.000,00 | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA |
| | 2 | 19 | 02 | 1.02 | | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina | - | | | 37 organisasi | 830.000.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Sumber Daya Manusia | Organisasi Kepemudaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | - | 1.388.625.000,00 | |
| | 2 | 19 | 02 | 1.02 | 0003 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda | | | | 42 Persentase | 445.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Sumber Daya Manusia | Organisasi Kepemudaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | 661.250.000,00 | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA |
| | 2 | 19 | 02 | 1.02 | 0004 | Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi | | | | 1 Organisasi | 385.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Sumber Daya Manusia | Organisasi Kepemudaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | 727.375.000,00 | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA |
| 390 | 2 | 19 | 03 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Persentase Cabang Olahraga yang dibina | 69.44persen | | | 61.11 persen | 24.370.678.000,00 | | | | | | 63.89persen | 53.400.000.000,00 | |
| | 2 | 19 | 03 | 1.01 | | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | Jumlah Cabang Olahraga yang dibina | - | | | 5 cabang olahraga | 11.600.000.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Sumber Daya Manusia | Sentra Olahraga | - | 8.000.000.000,00 | |
| | 2 | 19 | 03 | 1.01 | 0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan | | | | 2 Unit | 200.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Sumber Daya Manusia | Sentra Olahraga | | 1.000.000.000,00 | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA |
| | 2 | 19 | 03 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia | | | | 8 Unit | 11.400.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | - | Sentra Olahraga | | 7.000.000.000,00 | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA |
| | 2 | 19 | 03 | 1.02 | | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga | Jumlah cabang olahraga yang didaftarkan dalam event | - | | | 5 cabang olahraga | 4.355.678.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Sumber Daya Manusia | Cabang Olahraga se-Provinsi Bangka Belitung | - | 10.000.000.000,00 | |
| | 2 | 19 | 03 | 1.02 | 0004 | Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga | | | | 1200 Orang | 1.560.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Sumber Daya Manusia | Cabang Olahraga se-Provinsi Bangka Belitung | | 2.000.000.000,00 | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA |
| | 2 | 19 | 03 | 1.02 | 0006 | Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara | | | | 2 Kegiatan | 2.795.678.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Sumber Daya Manusia | Cabang Olahraga se-Provinsi Bangka Belitung | | 8.000.000.000,00 | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA |
| | 2 | 19 | 03 | 1.03 | | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional | Jumlah atlet yang dibina | - | | | 100 atlet | 1.415.000.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Sumber Daya Manusia | Atlet yang di bina se-Provinisi Kepulauan Bangka Belitung | - | 5.000.000.000,00 | |
| | 2 | 19 | 03 | 1.03 | 0007 | Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) | | | | 2 Pelatda | 490.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Sumber Daya Manusia | Atlet yang di bina se-Provinisi Kepulauan Bangka Belitung | | 4.000.000.000,00 | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA |
| | 2 | 19 | 03 | 1.03 | 0009 | Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan | | | | 155 Orang | 925.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Sumber Daya Manusia | Atlet yang di bina se-Provinisi Kepulauan Bangka Belitung | | 1.000.000.000,00 | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA |
| | 2 | 19 | 03 | 1.04 | | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | Jumlah pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga | - | | | 1 organisasi | 7.000.000.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Sumber Daya Manusia | Organisasi Olahraga se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | - | 30.400.000.000,00 | |
| | 2 | 19 | 03 | 1.04 | 0003 | Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait | | | | 1 Dokumen | 7.000.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Sumber Daya Manusia | Organisasi Olahraga se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | 30.400.000.000,00 | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA |
| 391 | 2 | 19 | 04 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | Persentase tingkat keaktifan Organisasi Pramuka | 19.51persen | | | 19.51 persen | 841.432.200,00 | | | | | | 19.51persen | 2.777.250.000,00 | |
| | 2 | 19 | 04 | 1.01 | | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | - | | | 9 Kegiatan | 841.432.200,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Sumber Daya Manusia | Organisasi Kepramukaan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | - | 2.777.250.000,00 | |
| | 2 | 19 | 04 | 1.01 | 0002 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya | | | | 1 Organisasi | 490.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Sumber Daya Manusia | Organisasi Kepramukaan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | 1.983.750.000,00 | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA |
| | 2 | 19 | 04 | 1.01 | 0004 | Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah SDM Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya | | | | 28 Orang | 251.432.200,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Sumber Daya Manusia | Organisasi Kepramukaan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | 661.250.000,00 | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA |
| | 2 | 19 | 04 | 1.01 | 0005 | Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi | | | | 1 Laporan | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Sumber Daya Manusia | Organisasi Kepramukaan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | 132.250.000,00 | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA |
| | 2 | 22 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | | | | 2.011.089.920,00 | | | | | | | 2.590.000.000,00 | |
| 392 | 2 | 22 | 02 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Persentase kebudayaan lokal yang dikembangkan | 49,33persen | | | 49,33 persen | 981.838.588,00 | | | | | | 21,62persen | 1.130.000.000,00 | |
| | 2 | 22 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Kebudayaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan | - | | | 7 Kebudayaan | 255.842.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Kebudayaan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitunng | - | 130.000.000,00 | |
| | 2 | 22 | 02 | 1.01 | 0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan | | | | 7 Objek | 255.842.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Kebudayaan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitunng | | 130.000.000,00 | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA |
| | 2 | 22 | 02 | 1.02 | | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi | Jumlah kesenian tradisional dan Tradisi Budaya yang dilestarikan | - | | | 8 kesenian | 459.999.688,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Kesenian Tradisional se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitunng | - | 500.000.000,00 | |
| | 2 | 22 | 02 | 1.02 | 0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional | | | | 72 Laporan | 459.999.688,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Kesenian Tradisional se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitunng | | 500.000.000,00 | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA |
| | 2 | 22 | 02 | 1.03 | | Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Lembaga Adat yang Dibina | - | | | 7 lembaga | 265.996.900,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Lembaga Adat se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitunng | - | 500.000.000,00 | |
| | 2 | 22 | 02 | 1.03 | 0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina | | | | 60 Orang | 265.996.900,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Lembaga Adat se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitunng | | 500.000.000,00 | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA |
| 393 | 2 | 22 | 03 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan | 100persen | | | 100 persen | 551.257.832,00 | | | | | | 100persen | 900.000.000,00 | |
| | 2 | 22 | 03 | 1.01 | | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kesenian Tradisional Yang Dibina | - | | | 1 kesenian | 551.257.832,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Kesenian Tradisional se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | - | 900.000.000,00 | |
| | 2 | 22 | 03 | 1.01 | 0001 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) | | | | 240 Orang | 368.857.916,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Kesenian Tradisional se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | 600.000.000,00 | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA |
| | 2 | 22 | 03 | 1.01 | 0003 | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | | | 1 Lembaga | 182.399.916,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Kesenian Tradisional se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | 300.000.000,00 | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA |
| 394 | 2 | 22 | 04 | | | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | Persentase Sejarah Lokal yang Dibina | 100persen | | | 71 persen | 257.995.800,00 | | | | | | 86persen | 280.000.000,00 | |
| | 2 | 22 | 04 | 1.01 | | Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi | Jumlah Sejarah Lokal yang dibina | - | | | 1 sejarah | 257.995.800,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Sejarah Lokal se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | - | 280.000.000,00 | |
| | 2 | 22 | 04 | 1.01 | 0001 | Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan | | | | 52 Orang | 131.997.900,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Sejarah Lokal se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | 150.000.000,00 | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA |
| | 2 | 22 | 04 | 1.01 | 0004 | Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Penulisan Sejarah Lokal Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal | | | | 1 Dokumen | 125.997.900,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Sejarah Lokal se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | 130.000.000,00 | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA |
| 395 | 2 | 22 | 05 | | | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikelola | 100persen | | | 62 persen | 79.998.100,00 | | | | | | 84persen | 130.000.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 22 | 05 | 1.01 | | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi | Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi | - | | | 5 cagar budaya | 79.998.100,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Cagar Budaya se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | - | 130.000.000,00 | |
| | 2 | 22 | 05 | 1.01 | 0001 | Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan | | | | 5 Objek | 79.998.100,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Cagar Budaya se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | 130.000.000,00 | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA |
| 396 | 2 | 22 | 06 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | Persentase museum yang dikelola | 100persen | | | 100 persen | 139.999.600,00 | | | | | | 100persen | 150.000.000,00 | |
| | 2 | 22 | 06 | 1.01 | | Pengelolaan Museum Provinsi | Jumlah Museum Provinsi Yang Dikelola | - | | | 1 museum | 139.999.600,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Museum se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | - | 150.000.000,00 | |
| | 2 | 22 | 06 | 1.01 | 0003 | Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum | | | | 1 Unit | 139.999.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Museum se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | 150.000.000,00 | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA |
| | 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | 5.161.611.864,00 | | | | | | | 7.950.000.000,00 | |
| | 3 | 26 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | | | | | | 5.161.611.864,00 | | | | | | | 7.950.000.000,00 | |
| 397 | 3 | 26 | 02 | | | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Persentase Destinasi Pariwisata yang Ditingkatkan Kualitasnya | 100%<br>100%<br>25%<br>100% | | | 83 % | 1.390.000.000,00 | | | | | | 25%<br>100%<br>25%<br>100% | 1.400.000.000,00 | |
| | 3 | 26 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi | Jumlah Daya Tarik Wisata Provinsi yang dikelola | - | | | 5 daya tarik | 870.000.000,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Ekonomi | Daya Tarik Wisata se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | - | 1.000.000.000,00 | |
| | 3 | 26 | 02 | 1.01 | 0005 | Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi | | | | 2 Lokasi | 410.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Ekonomi | Daya Tarik Wisata se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | 500.000.000,00 | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA |
| | 3 | 26 | 02 | 1.01 | 0006 | Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi yang sah dan legal ditetapkan Kepala Daerah | | | | 1 Dokumen | 460.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Ekonomi | Daya Tarik Wisata se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | 500.000.000,00 | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA |
| | 3 | 26 | 02 | 1.03 | | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi | Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kompetensi | - | | | 100 orang | 520.000.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif se-Provinsi Kepualauan Bangka Belitung | - | 400.000.000,00 | |
| | 3 | 26 | 02 | 1.03 | 0010 | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan | | | | 100 Orang | 520.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif se-Provinsi Kepualauan Bangka Belitung | | 400.000.000,00 | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA |
| 398 | 3 | 26 | 03 | | | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | Jumlah Kunjungan Wisatawan | 1196331kunjungan<br>338780Kunjungan<br>338780kunjungan<br>199785Kunjungan | | | 285144 Kunjungan | 1.520.000.000,00 | | | | | | 310807kunjungan<br>310807Kunjungan<br>310807kunjungan<br>195867Kunjungan | 2.100.000.000,00 | |
| | 3 | 26 | 03 | 1.01 | | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | Jumlah Produk Wisata yang dipasarkan | - | | | 4 Produk | 1.520.000.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Produk Wisata se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | - | 2.100.000.000,00 | |
| | 3 | 26 | 03 | 1.01 | 0001 | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | | | | 8 Dokumen | 1.200.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Produk Wisata se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | 600.000.000,00 | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA |
| | 3 | 26 | 03 | 1.01 | 0005 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata | | | | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Produk Wisata se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | 1.000.000.000,00 | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3 | 26 | 03 | 1.01 | 0006 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri | | | | 3 Kegiatan | 300.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | Produk Wisata se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | 500.000.000,00 | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA |
| 399 | 3 | 26 | 04 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | Persentase Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan | 80% | | | 15,38 % | 1.271.611.864,00 | | | | | | 44.44% | 2.350.000.000,00 | |
| | 3 | 26 | 04 | 1.01 | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif | Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang Disediakan | - | | | 1 sarana dan prasarana | 791.611.864,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | Kota kreatif se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | - | 1.150.000.000,00 | |
| | 3 | 26 | 04 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif | | | | 1 Laporan | 250.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | Kota kreatif se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | 350.000.000,00 | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA |
| | | | | | | | 0 | | | | 0 0 | 250.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | Kota kreatif se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | 350.000.000,00 | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA |
| | 3 | 26 | 04 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar | | | | 8 Laporan | 111.611.864,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Kota kreatif se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | 300.000.000,00 | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA |
| | 3 | 26 | 04 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronissi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula | | | | 1 Laporan | 180.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Kota kreatif se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | 200.000.000,00 | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA |
| | 3 | 26 | 04 | 1.01 | 0006 | Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik | | | | 1 Dokumen | 250.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Kota kreatif se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | 300.000.000,00 | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA |
| | 3 | 26 | 04 | 1.02 | | Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | Jumlah ekosistem ekonomi kreatif yang terbangun | - | | | 2 ekosistem ekonomi | 480.000.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Ekosistem Ekonomi Kreatif se-Provinsi Kepualauan Bangka Belitung | - | 1.200.000.000,00 | |
| | 3 | 26 | 04 | 1.02 | 0005 | Pengembangan Sistem Pemasaran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif | | | | 1 Dokumen | 200.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Ekosistem Ekonomi Kreatif se-Provinsi Kepualauan Bangka Belitung | | 400.000.000,00 | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA |
| | 3 | 26 | 04 | 1.02 | 0010 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | | | | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Ekosistem Ekonomi Kreatif se-Provinsi Kepualauan Bangka Belitung | | 300.000.000,00 | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA |
| | 3 | 26 | 04 | 1.02 | 0017 | Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah | | | | 1 Dokumen | 180.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Ekosistem Ekonomi Kreatif se-Provinsi Kepualauan Bangka Belitung | | 500.000.000,00 | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA |
| 400 | 3 | 26 | 05 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Persentase SDM Pariwisata dan Ekraf yang Memiliki Kompetensi | 9.7% | | | 10 % | 980.000.000,00 | | | | | | 9.6% | 2.100.000.000,00 | |
| | 3 | 26 | 05 | 1.01 | | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan | Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kompetensi | - | | | 275 orang | 980.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | - | 2.100.000.000,00 | |
| | 3 | 26 | 05 | 1.01 | 0014 | Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata | | | | 28 Orang | 400.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | 800.000.000,00 | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA |
| | 3 | 26 | 05 | 1.01 | 0016 | Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI | | | | 26 Orang | 250.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | 400.000.000,00 | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA |
| | 3 | 26 | 05 | 1.01 | 0017 | Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | | | | 26 Orang | 250.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | 600.000.000,00 | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA |
| | 3 | 26 | 05 | 1.01 | 0018 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | | | | 6 Laporan | 80.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | 300.000.000,00 | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA |
| | | | | | | UPTD Balai Pengembangan Pariwisata Wilayah Belitung DISBUDPAR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | | | 2.500.000.000,00 | | | | | | | | 2.926.100.000,00 | |
| | 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | 2.479.200.000,00 | | | | | | | | 2.903.220.000,00 | |
| | 3 | 26 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | | | | | | 2.479.200.000,00 | | | | | | | | 2.903.220.000,00 | |
| 401 | 3 | 26 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indeks kepuasan pelayanan internal UPTD Belitung (PARBUDKEPORA) | 80Nilai<br>80Nilai<br>70Nilai<br>70Nilai<br>70Nilai<br>70Nilai<br>80Nilai<br>80nilai<br>70Nilai<br>70Nilai | | | 68 Nilai | 679.200.000,00 | | | | | | 79Nilai<br>79Nilai<br>69Nilai<br>69Nilai<br>69Nilai<br>69Nilai<br>79Nilai<br>79nilai<br>69Nilai<br>69Nilai | 747.220.000,00 | |
| | 3 | 26 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Administrasi Umum yang Dikelola (UPTD) | - | | | 1 Dokumen | 404.000.000,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Pemerintahan | Administrasi Umum UPTD | - | 444.500.000,00 | |
| | 3 | 26 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 12 Paket | 9.000.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Pemerintahan | Administrasi Umum UPTD | | 10.000.000,00 | UPTD BALAI PENGEMBANGAN PARIWISATA WILAYAH BELITUNG DISBUDPAR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG |
| | 3 | 26 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 12 Paket | 15.000.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Pemerintahan | Administrasi Umum UPTD | | 16.500.000,00 | UPTD BALAI PENGEMBANGAN PARIWISATA WILAYAH BELITUNG DISBUDPAR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG |
| | 3 | 26 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 12 Paket | 9.000.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Pemerintahan | Administrasi Umum UPTD | | 9.900.000,00 | UPTD BALAI PENGEMBANGAN PARIWISATA WILAYAH BELITUNG DISBUDPAR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG |
| | 3 | 26 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 Paket | 20.000.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Pemerintahan | Administrasi Umum UPTD | | 22.000.000,00 | UPTD BALAI PENGEMBANGAN PARIWISATA WILAYAH BELITUNG DISBUDPAR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG |
| | 3 | 26 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 Paket | 15.000.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Pemerintahan | Administrasi Umum UPTD | | 16.500.000,00 | UPTD BALAI PENGEMBANGAN PARIWISATA WILAYAH BELITUNG DISBUDPAR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG |
| | 3 | 26 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 12 Dokumen | 6.000.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Pemerintahan | Administrasi Umum UPTD | | 6.600.000,00 | UPTD BALAI PENGEMBANGAN PARIWISATA WILAYAH BELITUNG DISBUDPAR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG |
| | 3 | 26 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 12 Paket | 70.000.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Pemerintahan | Administrasi Umum UPTD | | 77.000.000,00 | UPTD BALAI PENGEMBANGAN PARIWISATA WILAYAH BELITUNG DISBUDPAR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG |
| | 3 | 26 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 12 Laporan | 60.000.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Pemerintahan | Administrasi Umum UPTD | | 66.000.000,00 | UPTD BALAI PENGEMBANGAN PARIWISATA WILAYAH BELITUNG DISBUDPAR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG |
| | 3 | 26 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 200.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Pemerintahan | Administrasi Umum UPTD | | 220.000.000,00 | UPTD BALAI PENGEMBANGAN PARIWISATA WILAYAH BELITUNG DISBUDPAR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG |
| | 3 | 26 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD) | - | | | 2 Unit | 92.900.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD) | - | 102.190.000,00 | |
| | 3 | 26 | 01 | 1.07 | 0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | | | | 9 Unit | 92.900.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD) | | 102.190.000,00 | UPTD BALAI PENGEMBANGAN PARIWISATA WILAYAH BELITUNG DISBUDPAR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG |
| | 3 | 26 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD) | - | | | 1 Dokumen | 16.000.000,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Pemerintahan | Penyedia Jasa Penunjang di Kab. Belitung | - | 17.600.000,00 | |
| | 3 | 26 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 8.000.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Pemerintahan | Penyedia Jasa Penunjang di Kab. Belitung | | 8.800.000,00 | UPTD BALAI PENGEMBANGAN PARIWISATA WILAYAH BELITUNG DISBUDPAR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG |
| | 3 | 26 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 8.000.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Pemerintahan | Penyedia Jasa Penunjang di Kab. Belitung | | 8.800.000,00 | UPTD BALAI PENGEMBANGAN PARIWISATA WILAYAH BELITUNG DISBUDPAR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG |
| | 3 | 26 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD) | - | | | 12 Unit | 166.300.000,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Pemerintahan | Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD) | - | 182.930.000,00 | |
| | 3 | 26 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 3 Unit | 156.300.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Pemerintahan | Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD) | | 171.930.000,00 | UPTD BALAI PENGEMBANGAN PARIWISATA WILAYAH BELITUNG DISBUDPAR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG |
| | 3 | 26 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 12 Unit | 10.000.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Pemerintahan | Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD) | | 11.000.000,00 | UPTD BALAI PENGEMBANGAN PARIWISATA WILAYAH BELITUNG DISBUDPAR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG |
| 402 | 3 | 26 | 02 | | | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Persentase Destinasi Pariwisata Provinsi yang Ditingkatkan Kualitasnya di Pulau Belitung, Geopark Belitong dan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang | 100%<br>100%<br>25%<br>100% | | | 25 % | 680.000.000,00 | | | | | | 25%<br>100%<br>25%<br>100% | 816.000.000,00 | |
| | 3 | 26 | 02 | 1.02 | | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) Pulau Belitung & sekitarnya yang dikelola | - | | | 1 kawasan | 180.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | Kawasan Strategis Pariwisata di Pulau Belitung | - | 216.000.000,00 | |
| | 3 | 26 | 02 | 1.02 | 0004 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | | | | 12 Unit | 180.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH | - | Pembangunan Ekonomi | Kawasan Strategis Pariwisata di Pulau Belitung | | 216.000.000,00 | UPTD BALAI PENGEMBANGAN PARIWISATA WILAYAH BELITUNG DISBUDPAR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | | | | 0 Unit | 180.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH | - | Pembangunan Ekonomi | Kawasan Strategis Pariwisata di Pulau Belitung | | 216.000.000,00 | UPTD BALAI PENGEMBANGAN PARIWISATA WILAYAH BELITUNG DISBUDPAR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG |
| | 3 | 26 | 02 | 1.03 | | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi | Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi di Pulau Belitung yang dikelola | - | | | 2 destinasi | 500.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | Destinasi Pariwisata Provinsi di Pulau Belitung | - | 600.000.000,00 | |
| | 3 | 26 | 02 | 1.03 | 0010 | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan | | | | 80 Orang | 500.000.000,00 | Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | Destinasi Pariwisata Provinsi di Pulau Belitung | | 600.000.000,00 | UPTD BALAI PENGEMBANGAN PARIWISATA WILAYAH BELITUNG DISBUDPAR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG |
| 403 | 3 | 26 | 03 | | | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | Jumlah Kunjungan Wisatawan di Pulau Belitung | 1196331kunjungan 338780Kunjungan 338780kunjungan 199785Kunjungan | | | 192027 Kunjungan | 1.120.000.000,00 | | | | | | 310807kunjungan 310807Kunjungan 310807kunjungan 195867Kunjungan | 1.340.000.000,00 | |
| | 3 | 26 | 03 | 1.01 | | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | Jumlah Produk Wisata yang dipasarkan di Pulau Belitung | - | | | 4 produk | 1.120.000.000,00 | | | - | - | Pariwisata di Pulau Belitung | - | 1.340.000.000,00 | |
| | 3 | 26 | 03 | 1.01 | 0001 | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | | | | 2 Dokumen | 450.000.000,00 | Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | Pariwisata di Pulau Belitung | | 540.000.000,00 | UPTD BALAI PENGEMBANGAN PARIWISATA WILAYAH BELITUNG DISBUDPAR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG |
| | 3 | 26 | 03 | 1.01 | 0005 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata | | | | 1 Dokumen | 140.000.000,00 | Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | Pariwisata di Pulau Belitung | | 170.000.000,00 | UPTD BALAI PENGEMBANGAN PARIWISATA WILAYAH BELITUNG DISBUDPAR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG |
| | 3 | 26 | 03 | 1.01 | 0006 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri | | | | 3 Kegiatan | 530.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | Pariwisata di Pulau Belitung | | 630.000.000,00 | UPTD BALAI PENGEMBANGAN PARIWISATA WILAYAH BELITUNG DISBUDPAR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG |
| | X | | | | | NON URUSAN | | | | | | 20.800.000,00 | | | | | | | 22.880.000,00 | |
| | X | XX | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX | | | | | | 20.800.000,00 | | | | | | | 22.880.000,00 | |
| 404 | X | XX | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indeks kepuasan pelayanan internal UPTD Belitung (PARBUDKEPORA) | 80Nilai 80Nilai 70Nilai 70Nilai 70Nilai 70Nilai 80Nilai 80nilai 70Nilai 70Nilai | | | 68 Nilai | 20.800.000,00 | | | | | | 79Nilai 79Nilai 69Nilai 69Nilai 69Nilai 69Nilai 79Nilai 79nilai 69Nilai 69Nilai | 22.880.000,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD) | - | | | 1 Dokumen | 20.800.000,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Pemerintahan | UPTD BPP Wilayah Belitung | - | 22.880.000,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | | | | 2 Paket | 20.800.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Pemerintahan | UPTD BPP Wilayah Belitung | | 22.880.000,00 | UPTD BALAI PENGEMBANGAN PARIWISATA WILAYAH BELITUNG DISBUDPAR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG |
| | | | | | | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | | | | | | 16.685.779.654,00 | | | | | | | 16.106.016.514,00 | |
| | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 16.685.779.654,00 | | | | | | | 16.106.016.514,00 | |
| | 2 | 23 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | | | | | | 15.865.779.654,00 | | | | | | | 15.579.087.114,00 | |
| 405 | 2 | 23 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal PD (DKPUS) Nilai SAKIP Perangkat Daerah (DKPUS) | 100Nilai 80Nilai | | | 100 Nilai 79 Nilai | 14.440.779.654,00 | | | | | | 100Nilai 79Nilai | 14.086.109.756,00 | |
| | 2 | 23 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - | | | 12 Dokumen | 186.500.000,00 | | | - | Pembangunan Demokrasi | - | - | 159.998.900,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 23 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 7 Dokumen | 98.500.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 117.999.300,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2 | 23 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 2 Laporan | 88.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 41.999.600,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2 | 23 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan PD tepat waktu | - | | | 2 Dokumen | 11.022.944.808,00 | | | - | Pembangunan Demokrasi | - | - | 10.754.092.496,00 | |
| | 2 | 23 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 67 Orang/ Bulan | 11.022.944.808,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 10.754.092.496,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2 | 23 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah kegiatan administrasi kepegawaian PD | - | | | 30 paket | 105.000.000,00 | | | - | Pembangunan Demokrasi | - | - | 105.112.180,00 | |
| | 2 | 23 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | | | | 163 Paket | 105.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 105.112.180,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2 | 23 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah kegiatan administrasi umum PD | - | | | 8 Jenis | 730.234.846,00 | | | - | Pembangunan Demokrasi | - | - | 677.152.900,00 | |
| | 2 | 23 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 12 Paket | 58.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 58.197.500,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2 | 23 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 12 Paket | 60.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 60.561.300,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2 | 23 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 Paket | 27.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 27.488.000,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2 | 23 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 50 Paket | 168.234.846,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 168.631.100,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2 | 23 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 0 Dokumen | 11.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 11.175.000,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2 | 23 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 1 Paket | 143.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 143.300.000,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2 | 23 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 20 Laporan | 63.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 63.800.000,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2 | 23 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 30 Laporan | 200.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 144.000.000,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2 | 23 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah jenis Barang Milik Daerah yang diadakan | - | | | 3 Unit | 590.000.000,00 | | | - | Pembangunan Demokrasi | - | - | 589.997.400,00 | |
| | 2 | 23 | 01 | 1.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | | | | 1 Unit | 500.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 500.000.000,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2 | 23 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 3 Unit | 90.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 89.997.400,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2 | 23 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | 3 Jenis | 1.519.100.000,00 | | | - | Pembangunan Demokrasi | - | - | 1.520.456.480,00 | |
| | 2 | 23 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 50 Laporan | 15.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 17.505.000,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2 | 23 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 25 Laporan | 260.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 258.851.480,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2 | 23 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 1.244.100.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 1.244.100.000,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2 | 23 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah jenis BMD yang dipelihara | - | | | 4 Jenis | 287.000.000,00 | | | - | Pembangunan Demokrasi | - | - | 279.299.400,00 | |
| | 2 | 23 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | | | | 8 Unit | 85.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 85.739.400,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2 | 23 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 35 Unit | 96.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 96.320.000,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2 | 23 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 2 Unit | 106.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 97.240.000,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| 406 | 2 | 23 | 02 | | | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Persentasi Perpustakaan Yang di Bina | 44% | | | 37 % | 1.010.000.000,00 | | | | | | 38% | 1.202.978.658,00 | |
| | 2 | 23 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi | Persentase Peningkatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat daerah Provinsi | - | | | 45 Persentase | 525.000.000,00 | | | - | Pembangunan Demokrasi | - | - | 762.979.448,00 | |
| | 2 | 23 | 02 | 1.01 | 0004 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan | | | | 33 Perpustakaan | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 88.999.538,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2 | 23 | 02 | 1.01 | 0006 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi | | | | 15 Orang | 44.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 37.999.560,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2 | 23 | 02 | 1.01 | 0009 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan | | | | 1200 Eksemplar | 75.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 74.999.838,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2 | 23 | 02 | 1.01 | 0015 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK | | | | 1 Perpustakaan | 231.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 485.980.674,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2 | 23 | 02 | 1.01 | 0016 | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Data dan informasi Perpustakaan | | | | 20 Dokumen | 75.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 74.999.838,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2 | 23 | 02 | 1.02 | | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi | Persentase Jumlah Pengunjung Perpustakaan | - | | | 40 Persentase | 485.000.000,00 | | | - | Pembangunan Demokrasi | - | - | 439.999.210,00 | |
| | 2 | 23 | 02 | 1.02 | 0001 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus | | | | 100 Lokus | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 97.999.922,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2 | 23 | 02 | 1.02 | 0002 | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | | | | 30 Perpustakaan | 85.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 82.999.938,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2 | 23 | 02 | 1.02 | 0003 | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | | | | 7 Orang | 250.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 213.999.714,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2 | 23 | 02 | 1.02 | 0004 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan | | | | 54 Perpustakaan | 50.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 44.999.636,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| 407 | 2 | 23 | 03 | | | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | Jumlah Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno | 5Dokumen | | | 5 Dokumen | 415.000.000,00 | | | | | | 5Dokumen | 289.998.700,00 | |
| | 2 | 23 | 03 | 1.01 | | Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi | Jumlah Koleksi KCKR Yang Di Lestarikan | - | | | 275 Buah | 120.000.000,00 | | | - | Pembangunan Demokrasi | - | - | 53.999.900,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 23 | 03 | 1.01 | 0001 | Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR | | | | 115 Eksemplar | 120.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 53.999.900,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2 | 23 | 03 | 1.02 | | Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah | Jumlah Katalog Induk Daerah Dan Bibliografi Induk Daerah<br>Jumlah Katalog Induk Daerah Yang Terkatalog | - | | | 1 Buah<br>1 Buah | 100.000.000,00 | | | - | Pembangunan Demokrasi | - | - | 64.999.200,00 | |
| | 2 | 23 | 03 | 1.02 | 0001 | Penerbitan Katalog Induk Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan | | | | 1 Entry | 35.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 34.999.800,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2 | 23 | 03 | 1.02 | 0002 | Penerbitan Bibliografi Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan | | | | 2 Naskah | 65.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 29.999.400,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2 | 23 | 03 | 1.03 | | Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi | Jumlah Naskah Kuno | - | | | 1 Buah | 195.000.000,00 | | | - | Pembangunan Demokrasi | - | - | 170.999.600,00 | |
| | 2 | 23 | 03 | 1.03 | 0001 | Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Masyarakat yang Berperan dalam Pelestarian Naskah Kuno dan Pendaftaran Naskah Kuno | | | | 3 Orang | 90.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 68.999.700,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2 | 23 | 03 | 1.03 | 0002 | Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Naskah Kunah yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan | | | | 2 Eksemplar | 105.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 101.999.900,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2 | 24 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | | | | | | 820.000.000,00 | | | | | | | 526.929.400,00 | |
| 408 | 2 | 24 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Kearsipan Sesuai Dengan Standart Baku Kearsipan | 20% | | | 20 % | 405.000.000,00 | | | | | | 20% | 335.885.100,00 | |
| | 2 | 24 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi | Persentase Unit Kearsipan Dan Unit Pengolah Yang Mengelola Arsip Dinamis Yang Sesuai Standar Baku Kearsipan<br>Presentase jumlah arsip yang dipelihara dan dipindahkan dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan sesuai standar baku kearsipan<br>Presentase Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diawasi | - | | | 24.17 Persentase<br>22.73 Persen<br>100 Persen | 145.000.000,00 | | | - | Pembangunan Demokrasi | - | - | 99.962.900,00 | |
| | 2 | 24 | 02 | 1.01 | 0003 | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi | | | | 12 Laporan | 90.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 71.990.400,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2 | 24 | 02 | 1.01 | 0004 | Penyusutan Arsip Dinamis | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan | | | | 500 Arsip | 40.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 15.995.300,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2 | 24 | 02 | 1.01 | 0006 | Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Daftar Arsip Dinamis | | | | 1450 Arsip | 15.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 11.977.200,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2 | 24 | 02 | 1.02 | | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi | Jumlah Daftar Arsip Statis yang di Akusisi dan dikelola<br>Jumlah Daftar Arsip Statis yang dilakukan Preservasi dan dikelola<br>Jumlah pengguna yang dapat mengakses arsip statis<br>Persentase Arsip Statis Yang Otentik Dan Di Percaya Sebagai Memori Kolektif Dan Jati Diri Bangsa | - | | | 2 daftar arsip<br>3 daftar arsip<br>100 pengguna arsip<br>25 Persentase | 150.000.000,00 | | | - | Pembangunan Demokrasi | - | - | 136.000.000,00 | |
| | 2 | 24 | 02 | 1.02 | 0001 | Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI | | | | 10 Arsip | 20.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 15.000.000,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2 | 24 | 02 | 1.02 | 0005 | Akuisisi Arsip Statis | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi | | | | 8 Arsip | 130.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 121.000.000,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 24 | 02 | 1.03 | | Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi | Jumlah arsip yang dikelola menggunakan simpul jaringan dalam SIKN Daerah Provinsi<br>Jumlah Perangkat Daerah / UPTD, LKD, SMA/SMK/MA, SLB BUMD, Ormas dan Parpol yang dibina terkait Pengelolaan Arsip Dinamis | - | | | 250 Arsip<br>18 Unit | 110.000.000,00 | | | - | Pembangunan Demokrasi | - | - | 99.922.200,00 | |
| | 2 | 24 | 02 | 1.03 | 0001 | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN | | | | 20 Pengguna | 30.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 23.997.800,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2 | 24 | 02 | 1.03 | 0002 | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi | | | | 18 Laporan | 80.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 75.924.400,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| 409 | 2 | 24 | 03 | | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | Persentase Berkas Arsip Yang Di Lindungi Dan Di Selamatkan Sesuai Dengan Ketentuan | 25% | | | 25 % | 415.000.000,00 | | | | | | 25% | 191.044.300,00 | |
| | 2 | 24 | 03 | 1.01 | | Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun | Persentase Peningkatan Unit KearsipanPD Yang Mendapatkan Sosialisasi, Konsultasi Dan Pendampingan Terkait Pemusnahan Berkas Arsip Yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun | - | | | 25 Persentase | 66.000.000,00 | | | - | Pembangunan Demokrasi | - | - | 46.000.000,00 | |
| | 2 | 24 | 03 | 1.01 | 0001 | Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | | | | 4500 Arsip | 66.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 46.000.000,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2 | 24 | 03 | 1.03 | | Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Berkas Arsip PD Provinsi Yang Di Gabung/Di Bubarkan | - | | | 25 Persentase | 146.000.000,00 | | | - | Pembangunan Demokrasi | - | - | 42.000.000,00 | |
| | 2 | 24 | 03 | 1.03 | 0001 | Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi | | | | 1 Daftar | 66.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 42.000.000,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2 | 24 | 03 | 1.03 | 0003 | Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota | | | | 1 Arsip | 80.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 0,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2 | 24 | 03 | 1.04 | | Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi | Persentase Daftar Arsip Statis Hasil Autentifikasi Arsip Dan Arsip Hasil Alih Media Yang Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | - | | | 25 Persentase | 115.000.000,00 | | | - | Pembangunan Demokrasi | - | - | 73.048.600,00 | |
| | 2 | 24 | 03 | 1.04 | 0001 | Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | | | | 1 Arsip | 55.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 25.999.900,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2 | 24 | 03 | 1.04 | 0002 | Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | | | | 1 Arsip | 60.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 47.048.700,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2 | 24 | 03 | 1.05 | | Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang | Persentase Peningkatan jumlah Daftar Pencarian Arsip Statis Provinsi Yang Di Temukan | - | | | 25 Persentase | 88.000.000,00 | | | - | Pembangunan Demokrasi | - | - | 29.995.700,00 | |
| | 2 | 24 | 03 | 1.05 | 0001 | Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Daftar Autentisitas Statis Arsip yang Dinyatakan Hilang Berdasarkan Penilaian dan penetapan | | | | 1 Arsip | 88.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 29.995.700,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | | | | | | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | 40.453.361.789,00 | | | | | | | 45.408.390.000,00 | |
| | 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | 40.453.361.789,00 | | | | | | | 45.408.390.000,00 | |
| | 3 | 25 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | 40.453.361.789,00 | | | | | | | 45.408.390.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 410 | 3 | 25 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (UPTD_PPP Muara Sungai Baturusa))<br>Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (DKP)<br>Nilai SAKIP Perangat Daerah (DKP) | 86%<br>86%<br>86%<br>86%<br>80,5Nilai | | | 84 %<br>84 %<br>79,5 Nilai | 19.996.820.484,00 | | | | | | 85%<br>85%<br>85%<br>85%<br>80Nilai | 19.668.840.000,00 | |
| | 3 | 25 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah (DKP) | - | | | 10 Dokumen | 415.906.927,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan dan Masyarakat Kelautan dan Perikanan | - | 490.000.000,00 | |
| | 3 | 25 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 6 Dokumen | 300.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan dan Masyarakat Kelautan dan Perikanan | | 370.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 4 Laporan | 115.906.927,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan dan Masyarakat Kelautan dan Perikanan | | 120.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Indeks kepuasan pelayanan keuangan (DKP) | - | | | 84 Nilai | 14.895.009.977,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan | - | 14.970.000.000,00 | |
| | 3 | 25 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 100 Orang/ Bulan | 14.825.009.977,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan | | 14.700.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 600 Dokumen | 30.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan | | 50.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 10 Laporan | 40.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan | | 55.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | 5 Dokumen | 0,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan | | 10.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 2 Laporan | 0,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan | | 55.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 01 | 1.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | 4 Dokumen | 0,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan | | 100.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah BMD yang teradministrasi sesuai dengan peraturan | - | | | 2 Paket | 93.000.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan | - | 246.000.000,00 | |
| | 3 | 25 | 01 | 1.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 2 Dokumen | 5.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan | | 5.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 01 | 1.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 10 Dokumen | 25.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan | | 75.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 01 | 1.03 | 0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | | | 2 Laporan | 20.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan | | 75.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 01 | 1.03 | 0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 10 Laporan | 20.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan | | 50.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 01 | 1.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 2 Laporan | 3.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan | | 3.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 2 Laporan | 20.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan | | 35.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 01 | 1.03 | 0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 10 Dokumen | 0,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan | | 3.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Indeks kepuasan pelayanan kepegawaian (DKP) | - | | | 84 Nilai | 240.100.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan | - | 140.530.000,00 | |
| | 3 | 25 | 01 | 1.05 | 0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | 3 Unit | 20.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan | | 25.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | | | | 0 Paket | 190.100.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan | | 0,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 3 Dokumen | 0,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan | | 6.050.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 01 | 1.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | 3 Dokumen | 0,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | - | Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan | | 25.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 24 Orang | 30.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan | | 84.480.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3 | 25 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD BPI)<br>Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD LPPMHP)<br>Indeks Kepuasan Pelayanan Administras Umum Perangkat Daerah (DKP)<br>Indeks Kepuasan Pelayanan Administras Umum Perangkat Daerah (UPTD-PPP Muara Sungai Baturusa) | - | | | 84 Nilai<br>84 Nilai<br>84 Nilai<br>84 Nilai | 627.500.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan | - | 645.610.000,00 | |
| | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 2 Paket | 14.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan | | 13.310.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 2 Paket | 157.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan | | 150.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 2 Paket | 25.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan | | 25.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 40.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan | | 26.620.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 4 Paket | 9.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan | | 13.310.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 3 Dokumen | 5.500.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan | | 7.260.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 2 Paket | 63.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan | | 72.600.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 7 Laporan | 24.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan | | 7.260.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 4 Laporan | 270.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan | | 300.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 7 Dokumen | 20.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan | | 30.250.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah yang diadakan (UPTD-PPP Muara Sungai Baturusa)<br>Jumlah Barang Milik Daerah urusan Pemerintah yang diadakan (DKP) | - | | | 5 Jenis<br>24 Unit | 1.234.173.580,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan | - | 1.150.000.000,00 | |
| | 3 | 25 | 01 | 1.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | | | | 1 Unit | 30.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan | | 30.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 1 Unit | 300.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan | | 400.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 01 | 1.07 | 0003 | Pengadaan Alat Besar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan | | | | 2 Unit | 0,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan | | 75.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 01 | 1.07 | 0004 | Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan | | | | 2 Unit | 0,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan | | 50.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 0 Paket | 120.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan | | 0,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 8 Unit | 160.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan | | 100.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 01 | 1.07 | 0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | | | | 7 Unit | 50.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan | | 45.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 0 Unit | 0,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan | | 0,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 2 Unit | 174.173.580,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan | | 250.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 4 Unit | 400.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan | | 200.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (DKP)<br>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD-PPP Muara Sungai Baturusa) | - | | | 4 Laporan<br>10 Jenis | 1.511.700.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan | - | 1.001.700.000,00 | |
| | 3 | 25 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 12.500.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan | | 10.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 250.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan | | 150.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 57.500.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan | | 50.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 1.191.700.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan | | 791.700.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjnag Urusan Pemerintah Daerah Yang di pelihara (DKP)<br>Jumlah Barang Milik Daerah Urusan Penerintah Daerah Yang di pelihara (UPTD-PPP Muara Sungai Baturusa) | - | | | 123 Unit<br>6 Unit | 979.430.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan | - | 1.025.000.000,00 | |
| | 3 | 25 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | | | | 45 Unit | 58.600.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan | | 120.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 45 Unit | 187.100.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan | | 250.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 30 Unit | 58.730.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan | | 55.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 225.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan | | 200.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 225.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan | | 200.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 225.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan | | 200.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 411 | 3 | 25 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | lokasi Jasa Kelautan yang dimanfaatkan untuk peningkatan investasi di perairan Bangka Belitung | 102lokasi | | | 25 lokasi | 1.896.395.380,00 | | | | | | 26lokasi | 3.700.000.000,00 | |
| | 3 | 25 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | luasan ruang laut yang dikelola | - | | | 523.513 Hektar | 1.012.380.380,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Masyarakat Kelautan dan Perikanan | - | 1.650.000.000,00 | |
| | 3 | 25 | 02 | 1.01 | 0001 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K | | | | 1 Dokumen | 350.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Masyarakat Kelautan dan Perikanan | | 500.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 02 | 1.01 | 0002 | Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola | | | | 523513,43 Ha | 484.168.380,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Masyarakat Kelautan dan Perikanan | | 800.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 02 | 1.01 | 0004 | Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil | | | | 150 Orang | 178.212.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Masyarakat Kelautan dan Perikanan | | 350.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 02 | 1.02 | | Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | diterbitnya rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang menjadi kewenangan provinsi | - | | | 25 Rekomendasi | 331.330.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Masyarakat Kelautan dan Perikanan | - | 800.000.000,00 | |
| | 3 | 25 | 02 | 1.02 | 0002 | Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan | | | | 25 Rekomendasi | 178.679.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Masyarakat Kelautan dan Perikanan | | 400.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 02 | 1.02 | 0005 | Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut | | | | 25 Dokumen | 152.651.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Masyarakat Kelautan dan Perikanan | | 400.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 02 | 1.03 | | Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | kelompok masyarakat yang diberdayakan | - | | | 4 Kelompok | 552.685.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Masyarakat Kelautan dan Perikanan | - | 1.250.000.000,00 | |
| | 3 | 25 | 02 | 1.03 | 0001 | Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya | | | | 4 Orang | 52.685.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Masyarakat Kelautan dan Perikanan | | 500.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 02 | 1.03 | 0004 | Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | | | | 4 Kelompok | 500.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Masyarakat Kelautan dan Perikanan | | 750.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 412 | 3 | 25 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Volume produksi perikanan tangkap | 80Persen 245323Ton | | | 238713 Ton | 15.049.663.325,00 | | | | | | 70Persen 241936Ton | 15.689.250.000,00 | |
| | 3 | 25 | 03 | 1.01 | | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil | Jumlah sarana dan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | - | | | 865 Unit | 8.812.568.250,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | Rumah Tangga Perikanan/Kelompok Nelayan | - | 7.650.000.000,00 | |
| | 3 | 25 | 03 | 1.01 | 0001 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | | | | 1 Dokumen | 97.999.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | Rumah Tangga Perikanan/Kelompok Nelayan | | 150.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 03 | 1.01 | 0002 | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | | | | 2 Unit | 5.950.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut<br>Kab. Belitung Timur, Manggar, Buku Limau<br>Kab. Belitung Timur, Damar, Burong Mandi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Rumah Tangga Perikanan/Kelompok Nelayan | | 5.000.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 03 | 1.01 | 0003 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | | | | 850 Unit | 2.764.568.650,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Rumah Tangga Perikanan/Kelompok Nelayan | | 2.500.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 03 | 1.03 | | Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT | Meningkatnya Jumlah Rekomendasi Izin Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT | - | | | 150 Rekomendasi | 0,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 0,00 | |
| | 3 | 25 | 03 | 1.03 | 0002 | Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan | | | | 0 Rekomendasi | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 0,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 03 | 1.04 | | Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil | Meningkatnya Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap Berukuran sampai 10 GT yang bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil | - | | | 250 Rekomendasi | 170.000.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pelaku Usaha Perikanan Tangkap/Masyrakat Nelayan | - | 75.000.000,00 | |
| | 3 | 25 | 03 | 1.04 | 0002 | Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan | | | | 300 Rekomendasi | 170.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pelaku Usaha Perikanan Tangkap/Masyrakat Nelayan | | 75.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 03 | 1.06 | | Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi | Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Muara Sungai Baturusa | - | | | 7 Pelabuhan Perikanan 1 Pelabuhan Perikanan | 5.767.095.075,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai Pelabuhan Perikanan dan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan | - | 7.744.250.000,00 | |
| | 3 | 25 | 03 | 1.06 | 0001 | Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan | | | | 1 Pelabuhan Perikanan | 200.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai Pelabuhan Perikanan dan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan | | 200.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 03 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia | | | | 7 Unit | 3.832.990.300,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai Pelabuhan Perikanan dan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan | | 5.544.250.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 03 | 1.06 | 0003 | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana | | | | 6 Layanan | 1.734.104.775,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai Pelabuhan Perikanan dan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan | | 2.000.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 03 | 1.09 | | Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT | Meningkatnya Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT | - | | | 300 Rekomendasi | 200.000.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pelaku Usaha Perikanan Tangkap/Masyarakat Nelayan | - | 120.000.000,00 | |
| | 3 | 25 | 03 | 1.09 | 0002 | Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan | | | | 300 Rekomendasi | 200.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pelaku Usaha Perikanan Tangkap/Masyarakat Nelayan | | 120.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 03 | 1.10 | | Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Meningkatnya Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang berukuran sampai dengan 10 GT yang beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | - | | | 125 Rekomendasi | 100.000.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pelaku Usaha Perikanan Tangkap/Masyarakat Nelayan | - | 100.000.000,00 | |
| | 3 | 25 | 03 | 1.10 | 0002 | Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan | | | | 300 Rekomendasi | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pelaku Usaha Perikanan Tangkap/Masyarakat Nelayan | | 100.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 413 | 3 | 25 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Volume produksi perikanan budidaya | 16873Ton 12Juta Ekor | | | 15525 Ton | 1.627.593.800,00 | | | | | | 16146Ton 11,5Juta Ekor | 2.800.000.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3 | 25 | 04 | 1.01 | | Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah rekomendasi izin usaha perikanan budidaya lintas Kab/Kota dalam 1 daerah Provinsi yang diterbitkan | - | | | 40 Rekomendasi | 85.470.500,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | Pelaku usaha perikaan budidaya dan masyarakat kelautan dan perikanan | - | 150.000.000,00 | |
| | 3 | 25 | 04 | 1.01 | 0002 | Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan | | | | 20 Rekomendasi | 40.760.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | Pelaku usaha perikaan budidaya dan masyarakat kelautan dan perikanan | | 100.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 04 | 1.01 | 0003 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko | | | | 1 Dokumen | 44.710.500,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | Pelaku usaha perikaan budidaya dan masyarakat kelautan dan perikanan | | 50.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 04 | 1.05 | | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut | Jumlah produksi hasil budidaya laut dan payau dalam 1 daerah Provinsi (Ton/Tahun)<br>Jumlah Sarana Prasarana Balai Benih Air Laut yang di Adakan (UPTD-BPI)<br>Jumlah Sarana Prasarana Balai Benih Air Payau dan Air Tawar yang di Adakan (UPTD-BPI) | - | | | 11288 Ton/Tahun<br>1 Paket<br>1 Paket | 1.214.391.680,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pelaku usaha perikaan budidaya dan masyarakat kelautan dan perikanan | - | 2.310.000.000,00 | |
| | 3 | 25 | 04 | 1.05 | 0001 | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | 2 Dokumen | 195.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pelaku usaha perikaan budidaya dan masyarakat kelautan dan perikanan | | 200.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 04 | 1.05 | 0002 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut | | | | 1 Unit | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pelaku usaha perikaan budidaya dan masyarakat kelautan dan perikanan | | 170.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 04 | 1.05 | 0004 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut | | | | 3 Unit | 855.950.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pelaku usaha perikaan budidaya dan masyarakat kelautan dan perikanan | | 1.400.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 04 | 1.05 | 0006 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat | | | | 1 Dokumen | 88.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pelaku usaha perikaan budidaya dan masyarakat kelautan dan perikanan | | 170.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 04 | 1.05 | 0007 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pembudidaya | | | | 30 Orang | 75.441.680,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pelaku usaha perikaan budidaya dan masyarakat kelautan dan perikanan | | 250.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 04 | 1.05 | 0009 | Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pembudidaya Ikan yang mengikuti Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | | | 20 Orang | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pelaku usaha perikaan budidaya dan masyarakat kelautan dan perikanan | | 120.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 04 | 1.06 | | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat | Jumlah produksi hasil budidaya tawar dalam 1 daerah Provinsi (Ton/Tahun) | - | | | 1365 Ton/Tahun | 327.731.620,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pelaku usaha perikaan budidaya dan masyarakat kelautan dan perikanan | - | 340.000.000,00 | |
| | 3 | 25 | 04 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | 1 Unit | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pelaku usaha perikaan budidaya dan masyarakat kelautan dan perikanan | | 170.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 04 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | 2 Unit | 327.731.620,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pelaku usaha perikaan budidaya dan masyarakat kelautan dan perikanan | | 170.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 414 | 3 | 25 | 05 | | | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Persentase Pelaku Usaha yang Taat Aturan (%) | 80%<br>80%<br>80%<br>80% | | | 73 % | 1.313.852.000,00 | | | | | | 76%<br>76%<br>76%<br>76% | 2.900.000.000,00 | |
| | 3 | 25 | 05 | 1.01 | | Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil | Jumlah Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil yang Diawasi (Pelaku Usaha)<br>Jumlah Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil yang Diawasi (Pelaku Usaha)<br>Jumlah Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil yang Diawasi (Pelaku Usaha) | - | | | 4 Pelaku Usaha<br>55 Pelaku Usaha<br>71 % | 1.220.854.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pelaku Usaha dan Masyarakat Kelautan dan Perikanan | - | 2.375.000.000,00 | |
| | 3 | 25 | 05 | 1.01 | 0001 | Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil | | | | 1 Dokumen | 24.900.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pelaku Usaha dan Masyarakat Kelautan dan Perikanan | | 150.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 05 | 1.01 | 0002 | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil | | | | 1 Dokumen | 1.017.978.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pelaku Usaha dan Masyarakat Kelautan dan Perikanan | | 1.925.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 05 | 1.01 | 0003 | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil | | | | 1 Dokumen | 14.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pelaku Usaha dan Masyarakat Kelautan dan Perikanan | | 100.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 05 | 1.01 | 0004 | Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif | | | | 32 Kelompok | 163.975.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pelaku Usaha dan Masyarakat Kelautan dan Perikanan | | 200.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 05 | 1.02 | | Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Pelaku Usaha Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Diawasi<br>Jumlah Pelaku Usaha Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Diawasi | - | | | 12 Pelaku Usaha<br>28 Pelaku USaha | 92.998.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pelaku Usaha dan Masyarakat Kelautan dan Perikanan | - | 525.000.000,00 | |
| | 3 | 25 | 05 | 1.02 | 0001 | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya | | | | 1 Dokumen | 65.998.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pelaku Usaha dan Masyarakat Kelautan dan Perikanan | | 275.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 05 | 1.02 | 0002 | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya | | | | 1 Dokumen | 27.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pelaku Usaha dan Masyarakat Kelautan dan Perikanan | | 250.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 415 | 3 | 25 | 06 | | | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan | 90%<br>23910ton | | | 22810 ton | 569.036.800,00 | | | | | | 88%<br>23310ton | 650.300.000,00 | |
| | 3 | 25 | 06 | 1.01 | | Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (rekomendasi) | - | | | 6 Rekomendasisi | 103.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | Pelaku usaha Pengolahan dan pemasaran | - | 350.000.000,00 | |
| | 3 | 25 | 06 | 1.01 | 0002 | Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | | | 1 Rekomendasi | 53.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | Pelaku usaha Pengolahan dan pemasaran | | 150.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 06 | 1.01 | 0003 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pelaku usaha Pengolahan dan pemasaran | | 200.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 06 | 1.02 | | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar | Jumlah unit usaha skala menengah besar yang dibina terkait mutu dan keamanan hasil perikanannya<br>Persentase usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan hasil perikanan (UPT-LPPMHP) | - | | | 20 unit<br>82 % | 79.262.950,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pelaku usaha Pengolahan dan pemasaran | - | 110.000.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3 | 25 | 06 | 1.02 | 0001 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko | | | | 10 Unit Usaha | 30.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pelaku usaha Pengolahan dan pemasaran | | 50.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 06 | 1.02 | 0002 | Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing | | | | 10 Unit Usaha | 49.262.950,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pelaku usaha Pengolahan dan pemasaran | | 60.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 06 | 1.03 | | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah dokumen pemetaan dan pemantauan yang tersusun | - | | | 2 Dokumen | 386.773.850,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Unit usaha pengolahan ikan skala menengah besar di Provinsi Kep. Bangka Belitung yang dibina terkait mutu dan keamanan hasil perikanannya | - | 190.300.000,00 | |
| | 3 | 25 | 06 | 1.03 | 0001 | Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | | | 1 Dokumen | 70.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Unit usaha pengolahan ikan skala menengah besar di Provinsi Kep. Bangka Belitung yang dibina terkait mutu dan keamanan hasil perikanannya | | 80.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 06 | 1.03 | 0002 | Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi | | | | 1 Unit Usaha | 222.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Unit usaha pengolahan ikan skala menengah besar di Provinsi Kep. Bangka Belitung yang dibina terkait mutu dan keamanan hasil perikanannya | | 300.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3 | 25 | 06 | 1.03 | 0003 | Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir | | | | 1 Dokumen | 94.773.850,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Unit usaha pengolahan ikan skala menengah besar di Provinsi Kep. Bangka Belitung yang dibina terkait mutu dan keamanan hasil perikanannya | | 110.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | | | | | | UPTD Balai pemuliaan ikan (BPI) | | | | | | 6.428.697.500,00 | | | | | | | 7.560.940.000,00 | |
| | 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | 6.428.697.500,00 | | | | | | | 7.560.940.000,00 | |
| | 3 | 25 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | 6.428.697.500,00 | | | | | | | 7.560.940.000,00 | |
| 416 | 3 | 25 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indeks kepuasan Pelayanan Internal (UPTD-BPI) | 86%<br>86%<br>86%<br>86%<br>80,5Nilai | | | 84 % | 3.503.697.500,00 | | | | | | 85%<br>85%<br>85%<br>85%<br>80Nilai | 4.060.940.000,00 | |
| | 3 | 25 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD BPI) | - | | | 84 Nilai | 221.710.700,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai UPTD Balai Pemuliaan Ikan | - | 252.000.000,00 | |
| | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 10.000.000,00 | Kab. Belitung, Membalong, Tanjungrusa Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Pasir Putih | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai UPTD Balai Pemuliaan Ikan | | 12.000.000,00 | UPTD BALAI PEMULIAAN IKAN (BPI) |
| | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 10.000.000,00 | Kab. Belitung, Membalong, Tanjungrusa Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Pasir Putih | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai UPTD Balai Pemuliaan Ikan | | 15.000.000,00 | UPTD BALAI PEMULIAAN IKAN (BPI) |
| | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 10.000.000,00 | Kab. Belitung, Membalong, Tanjungrusa Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Pasir Putih | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai UPTD Balai Pemuliaan Ikan | | 12.500.000,00 | UPTD BALAI PEMULIAAN IKAN (BPI) |
| | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 33.710.700,00 | Kab. Belitung, Membalong, Tanjungrusa Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Pasir Putih | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai UPTD Balai Pemuliaan Ikan | | 36.000.000,00 | UPTD BALAI PEMULIAAN IKAN (BPI) |
| | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1.000.000,00 | Kab. Belitung, Membalong, Tanjungrusa Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Pasir Putih | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai UPTD Balai Pemuliaan Ikan | | 1.500.000,00 | UPTD BALAI PEMULIAAN IKAN (BPI) |
| | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 1 Paket | 10.000.000,00 | Kab. Belitung, Membalong, Tanjungrusa Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Pasir Putih | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai UPTD Balai Pemuliaan Ikan | | 15.000.000,00 | UPTD BALAI PEMULIAAN IKAN (BPI) |
| | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 25 Laporan | 7.500.000,00 | Kab. Belitung, Membalong, Tanjungrusa Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Pasir Putih | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai UPTD Balai Pemuliaan Ikan | | 10.000.000,00 | UPTD BALAI PEMULIAAN IKAN (BPI) |
| | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 75 Laporan | 139.500.000,00 | Kab. Belitung, Membalong, Tanjungrusa Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Pasir Putih | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai UPTD Balai Pemuliaan Ikan | | 150.000.000,00 | UPTD BALAI PEMULIAAN IKAN (BPI) |
| | 3 | 25 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah yang diadakan (UPTD BPI) | - | | | 5 Jenis | 2.276.706.800,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai UPTD Balai Pemuliaan Ikan | - | 2.641.440.000,00 | |
| | 3 | 25 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 6 Unit | 241.760.000,00 | Kab. Belitung, Membalong, Tanjungrusa Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Pasir Putih | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai UPTD Balai Pemuliaan Ikan | | 141.440.000,00 | UPTD BALAI PEMULIAAN IKAN (BPI) |
| | 3 | 25 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 30 Unit | 1.009.946.800,00 | Kab. Belitung, Membalong, Tanjungrusa Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Pasir Putih | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai UPTD Balai Pemuliaan Ikan | | 1.000.000.000,00 | UPTD BALAI PEMULIAAN IKAN (BPI) |
| | 3 | 25 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 4 Unit | 800.000.000,00 | Kab. Belitung, Membalong, Tanjungrusa Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Pasir Putih | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai UPTD Balai Pemuliaan Ikan | | 1.000.000.000,00 | UPTD BALAI PEMULIAAN IKAN (BPI) |
| | 3 | 25 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 4 Unit | 225.000.000,00 | Kab. Belitung, Membalong, Tanjungrusa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai UPTD Balai Pemuliaan Ikan | | 500.000.000,00 | UPTD BALAI PEMULIAAN IKAN (BPI) |
| | 3 | 25 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD BPI) | - | | | 10 Jenis | 671.400.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai UPTD Balai Pemuliaan Ikan | - | 559.500.000,00 | |
| | 3 | 25 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 6.000.000,00 | Kab. Belitung, Membalong, Tanjungrusa Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Tukak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai UPTD Balai Pemuliaan Ikan | | 7.500.000,00 | UPTD BALAI PEMULIAAN IKAN (BPI) |
| | 3 | 25 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 11 Laporan | 240.000.000,00 | Kab. Belitung, Membalong, Tanjungrusa Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Pasir Putih | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai UPTD Balai Pemuliaan Ikan | | 252.000.000,00 | UPTD BALAI PEMULIAAN IKAN (BPI) |
| | 3 | 25 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 4 Laporan | 425.400.000,00 | Kab. Belitung, Membalong, Tanjungrusa Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Pasir Putih | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai UPTD Balai Pemuliaan Ikan | | 300.000.000,00 | UPTD BALAI PEMULIAAN IKAN (BPI) |
| | 3 | 25 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Urusan Penerintah Daerah Yang di pelihara (UPTD BPI) | - | | | 6 Unit | 333.880.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai UPTD Balai Pemuliaan Ikan | - | 608.000.000,00 | |
| | 3 | 25 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | | | | 6 Unit | 122.000.000,00 | Kab. Belitung, Membalong, Tanjungrusa Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Pasir Putih | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai UPTD Balai Pemuliaan Ikan | | 133.000.000,00 | UPTD BALAI PEMULIAAN IKAN (BPI) |
| | 3 | 25 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 10 Unit | 61.880.000,00 | Kab. Belitung, Membalong, Tanjungrusa Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Pasir Putih | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai UPTD Balai Pemuliaan Ikan | | 75.000.000,00 | UPTD BALAI PEMULIAAN IKAN (BPI) |
| | 3 | 25 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 50.000.000,00 | Kab. Belitung, Membalong, Tanjungrusa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai UPTD Balai Pemuliaan Ikan | | 200.000.000,00 | UPTD BALAI PEMULIAAN IKAN (BPI) |
| | 3 | 25 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 2 Unit | 100.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Pasir Putih | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai UPTD Balai Pemuliaan Ikan | | 200.000.000,00 | UPTD BALAI PEMULIAAN IKAN (BPI) |
| 417 | 3 | 25 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Jumlah Produksi Benih Ikan yang unggul (Juta Ekor) | 16873Ton 12Juta Ekor | | | 11 Juta Ekor | 2.925.000.000,00 | | | | | | 16146Ton 11,5Juta Ekor | 3.500.000.000,00 | |
| | 3 | 25 | 04 | 1.05 | | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut | Jumlah Sarana Prasarana Balai Benih Air Laut yang di Adakan (UPTD-BPI) | - | | | 1 Paket | 875.000.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pembudidaya Ikan Air Laut | - | 1.200.000.000,00 | |
| | 3 | 25 | 04 | 1.05 | 0004 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut | | | | 1 Unit | 875.000.000,00 | Kab. Belitung, Membalong, Tanjungrusa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pembudidaya Ikan Air Laut | | 1.200.000.000,00 | UPTD BALAI PEMULIAAN IKAN (BPI) |
| | 3 | 25 | 04 | 1.06 | | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat | Jumlah produksi hasil budidaya tawar dalam 1 daerah Provinsi (Ton/Tahun) | - | | | 1365 Ton/Tahun | 2.050.000.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pembudidaya Ikan Air Payau | - | 2.300.000.000,00 | |
| | 3 | 25 | 04 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 1 Unit | 800.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pembudidaya Ikan Air Payau | | 1.000.000.000,00 | UPTD BALAI PEMULIAAN IKAN (BPI) |
| | 3 | 25 | 04 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 1 Unit | 1.250.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Pasir Putih | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pembudidaya Ikan Air Payau | | 1.300.000.000,00 | UPTD BALAI PEMULIAAN IKAN (BPI) |
| | | | | | | UPTD Laboratorium Pengujian Dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) | | | | | | 692.989.815,00 | | | | | | | 870.000.000,00 | |
| | 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 110.000.000,00 | |
| | 3 | 25 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 110.000.000,00 | |
| 418 | 3 | 25 | 06 | | | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Persentase UPI yang dibina memenuhi standar mutu dan keamanan pangan (persentase) | 90%<br>23910ton | | | 87 % | 100.000.000,00 | | | | | | 88%<br>23310ton | 110.000.000,00 | |
| | 3 | 25 | 06 | 1.02 | | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar | Persentase usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan hasil perikanan (UPT-LPPMHP) | - | | | 82 % | 100.000.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Unit Pengolahan Ikan dan Masyarakat Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan | - | 110.000.000,00 | |
| | 3 | 25 | 06 | 1.02 | 0002 | Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing | | | | | 10 Unit Usaha | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Unit Pengolahan Ikan dan Masyarakat Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan | | 110.000.000,00 | UPTD LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (LPPMHP) |
| | X | | | | | NON URUSAN | | | | | | 592.989.815,00 | | | | | | | 760.000.000,00 | |
| | X | XX | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX | | | | | | 592.989.815,00 | | | | | | | 760.000.000,00 | |
| 419 | X | XX | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indeks kepuasan Pelayanan Internal (UPTD-LPPMHP) | 86%<br>86%<br>86%<br>86%<br>80,5Nilai | | | 84 % | 592.989.815,00 | | | | | | 85%<br>85%<br>85%<br>85%<br>80Nilai | 760.000.000,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD LPPMHP) | - | | | 84 Nilai | 162.989.815,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai UPTD LPPMHP | - | 179.000.000,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 2.500.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai UPTD LPPMHP | | 3.500.000,00 | UPTD LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (LPPMHP) |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 27.989.815,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai UPTD LPPMHP | | 28.500.000,00 | UPTD LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (LPPMHP) |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 5.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai UPTD LPPMHP | | 5.500.000,00 | UPTD LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (LPPMHP) |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 10.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai UPTD LPPMHP | | 11.000.000,00 | UPTD LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (LPPMHP) |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 5.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai UPTD LPPMHP | | 6.000.000,00 | UPTD LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (LPPMHP) |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 1 Paket | 10.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai UPTD LPPMHP | | 11.000.000,00 | UPTD LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (LPPMHP) |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 1 Laporan | 2.500.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai UPTD LPPMHP | | 3.500.000,00 | UPTD LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (LPPMHP) |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai UPTD LPPMHP | | 110.000.000,00 | UPTD LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (LPPMHP) |
| | X | XX | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD LPPMHP) | - | | | 1 Jenis | 375.000.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai UPTD LPPMHP | - | 471.000.000,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 5.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai UPTD LPPMHP | | 6.000.000,00 | UPTD LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (LPPMHP) |
| | X | XX | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 90.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Sinar Bulan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai UPTD LPPMHP | | 100.000.000,00 | UPTD LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (LPPMHP) |
| | X | XX | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 30.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai UPTD LPPMHP | | 65.000.000,00 | UPTD LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (LPPMHP) |
| | X | XX | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 5 Laporan | 250.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai UPTD LPPMHP | | 300.000.000,00 | UPTD LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (LPPMHP) |
| | X | XX | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusahan Pemerintah Yang di pelihara (UPTD LPPMHP) | - | | | 1 Unit | 55.000.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai UPTD LPPMHP | - | 110.000.000,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 25.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Sinar Bulan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai UPTD LPPMHP | | 60.000.000,00 | UPTD LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (LPPMHP) |
| | X | XX | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 10 Unit | 30.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Temberan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai UPTD LPPMHP | | 50.000.000,00 | UPTD LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (LPPMHP) |
| | | | | | | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | | | | | | 23.535.806.568,00 | | | | | | | 22.375.941.676,00 | |
| | 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | 23.535.806.568,00 | | | | | | | 22.375.941.676,00 | |
| | 3 | 29 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | | | | | | 23.535.806.568,00 | | | | | | | 22.375.941.676,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 420 | 3 | 29 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (Cabdin ESDM Wilayah Bangka)<br>Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (Cabdin ESDM Wilayah Bangka Barat)<br>Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (Cabdin ESDM Wilayah Bangka Tengah dan Selatan)<br>Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (Cabdin ESDM Wilayah Belitung)<br>Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (Cabdin ESDM Wilayah Belitung Timur)<br>Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (DESDM)<br>Nilai SAKIP PD (DESDM) | 91nilai<br>92nilai<br>92nilai<br>92nilai<br>92nilai<br>92nilai<br>92nilai | | | 92 nilai<br>92 nilai<br>92 nilai<br>92 nilai<br>92 nilai<br>92 nilai<br>87 nilai | 21.810.982.130,00 | | | | | | 89nilai<br>92nilai<br>92nilai<br>92nilai<br>92nilai<br>92nilai<br>92nilai | 20.183.559.000,00 | |
| | 3 | 29 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | 11 Dokumen | 100.000.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | ASN | - | 107.599.300,00 | |
| | 3 | 29 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 11 Dokumen | 40.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | ASN | | 32.599.300,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3 | 29 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 7 Laporan | 60.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | ASN | | 75.000.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3 | 29 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 17.580.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 18.095.000.000,00 | |
| | 3 | 29 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 124 Orang/ Bulan | 17.500.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 18.000.000.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3 | 29 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 1 Dokumen | 25.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 25.000.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3 | 29 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 1 Laporan | 20.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 25.000.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3 | 29 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 1 Laporan | 20.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 25.000.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3 | 29 | 01 | 1.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 20.000.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3 | 29 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | - | | | - | 32.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 32.000.000,00 | |
| | 3 | 29 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 2 Laporan | 32.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 32.000.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3 | 29 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 77.200.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 77.200.000,00 | |
| | 3 | 29 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | | | | 150 Paket | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3 | 29 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 20 Orang | 77.200.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 77.200.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3 | 29 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 936.767.500,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 466.767.500,00 | |
| | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 8 Paket | 19.990.100,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 19.990.100,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 3 Paket | 110.323.600,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 110.323.600,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 5 Paket | 27.499.300,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 27.499.300,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 2 Paket | 29.975.500,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 29.975.500,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 2 Dokumen | 20.880.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 20.880.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 5 Paket | 149.999.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 149.999.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 12 Laporan | 78.100.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 78.100.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 500.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 30.000.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3 | 29 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 1.835.022.430,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 100.000.000,00 | |
| | 3 | 29 | 01 | 1.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | | | | 4 Unit | 1.535.022.430,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3 | 29 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 15 Unit | 300.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 100.000.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3 | 29 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 1.058.179.200,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 1.058.179.200,00 | |
| | 3 | 29 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 25.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 25.000.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3 | 29 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 250.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 250.000.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3 | 29 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 30.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 30.000.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3 | 29 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 753.179.200,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 753.179.200,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3 | 29 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Survey Kepuasan Pelayanan Umum Perangkat Daerah | - | | | 95 % | 191.813.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 246.813.000,00 | |
| | 3 | 29 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 44.750.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 44.750.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3 | 29 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 4 Unit | 60.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 65.000.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3 | 29 | 01 | 1.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | | | | 2 Unit | 4.500.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 4.500.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3 | 29 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 20 Unit | 32.563.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 32.563.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3 | 29 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 50.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 100.000.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| 421 | 3 | 29 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN | Persentase Kepatuhan penataan izin air tanah (Cabdin ESDM Wilayah Bangka)<br>Persentase Kepatuhan penataan izin air tanah (DESDM) | 90%<br>90% | | | 85 %<br>85 % | 450.000.000,00 | | | | | | 85%<br>85% | 548.599.300,00 | |
| | 3 | 29 | 02 | 1.01 | | Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | Data dan Informasi Zona Konservasi air tanah | - | | | 1 Dokumen | 150.000.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan perizinan air tanah | - | 300.000.000,00 | |
| | 3 | 29 | 02 | 1.01 | 0001 | Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | | | | 1 Dokumen | 150.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan perizinan air tanah | | 300.000.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3 | 29 | 02 | 1.03 | | Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | Jumlah titik pemanfaatan air tanah<br>Jumlah Titik Pemanfaatan air tanah | - | | | 1 Dokumen<br>1 Dokumen | 300.000.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Aparatur Perangkat Daerah, Masyarakat dan Badan Usaha yang memanfaatkan air tanah | - | 248.599.300,00 | |
| | 3 | 29 | 02 | 1.03 | 0001 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Aparatur Perangkat Daerah, Masyarakat dan Badan Usaha yang memanfaatkan air tanah | | 48.599.300,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3 | 29 | 02 | 1.03 | 0003 | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | | | | 1 Laporan | 300.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Aparatur Perangkat Daerah, Masyarakat dan Badan Usaha yang memanfaatkan air tanah | | 200.000.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| 422 | 3 | 29 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA | - | 85%<br>85%<br>85%<br>85%<br>85%<br>85% | | | - | 574.824.438,00 | | | | | | 85%<br>85%<br>85%<br>85%<br>85%<br>85% | 643.783.376,00 | |
| | 3 | 29 | 03 | 1.01 | | Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | - | - | | | - | 60.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 65.000.000,00 | |
| | 3 | 29 | 03 | 1.01 | 0001 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah | | | | 1 Dokumen | 40.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 40.000.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3 | 29 | 03 | 1.01 | 0003 | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | | | | 1 Laporan | 20.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 25.000.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3 | 29 | 03 | 1.04 | | Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat | Jumlah dokumen kajian teknis mineral logam yang disetujui | - | | | 1 Dokumen | 162.835.238,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 126.794.176,00 | |
| | 3 | 29 | 03 | 1.04 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat | | | | 1 Laporan | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 63.958.938,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3 | 29 | 03 | 1.04 | 0003 | Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat | | | | 1 Dokumen | 20.965.700,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 20.965.700,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3 | 29 | 03 | 1.04 | 0004 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat | | | | 1 Laporan | 20.965.100,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 20.965.100,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3 | 29 | 03 | 1.04 | 0005 | Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang bersama Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Reklamasi dan Pascatambang Bersama Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) | | | | 1 Laporan | 20.904.438,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 20.904.438,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3 | 29 | 03 | 1.15 | | Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu | Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu | - | | | 1 Dokumen | 51.989.200,00 | | | - | - | - | - | 51.989.200,00 | |
| | 3 | 29 | 03 | 1.15 | 0001 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu yang Terkumpul dan Terolah | | | | 1 Dokumen | 51.989.200,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 51.989.200,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3 | 29 | 03 | 1.24 | | Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan | - | | | 1 Dokumen | 300.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 400.000.000,00 | |
| | 3 | 29 | 03 | 1.24 | 0001 | Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan | | | | 1 Laporan | 150.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 200.000.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3 | 29 | 03 | 1.24 | 0002 | Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Izin Usaha Pertambangan Hasil Pengawasan | | | | 1 Dokumen | 150.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 200.000.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| 423 | 3 | 29 | 05 | | | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN | - | - | | | - | 500.000.000,00 | | | | | | - | 700.000.000,00 | |
| | 3 | 29 | 05 | 1.08 | | Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi | - | - | | | - | 500.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 700.000.000,00 | |
| | 3 | 29 | 05 | 1.08 | 0002 | Sosialisasi konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi | | | | 1 Laporan | 150.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 200.000.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3 | 29 | 05 | 1.08 | 0004 | Bimbingan teknis konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah laporan pelaksanaan bimbingan teknis konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi | | | | 1 Laporan | 150.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 200.000.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3 | 29 | 05 | 1.08 | 0005 | Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi | | | | 1 Laporan | 200.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 300.000.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| 424 | 3 | 29 | 06 | | | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | - | 99.99%<br>99.99%<br>99.99%<br>99.99%<br>99.99%<br>99.99% | | | - | 200.000.000,00 | | | | | | 99.99%<br>99.99%<br>99.99%<br>99.99%<br>99.99%<br>99.99% | 300.000.000,00 | |
| | 3 | 29 | 06 | 1.02 | | Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | - | - | | | - | 200.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 300.000.000,00 | |
| | 3 | 29 | 06 | 1.02 | 0003 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | | | | 1 Laporan | 200.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 300.000.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | | | | | | Cabang Dinas ESDM Wilayah Bangka | | | | | | 379.700.000,00 | | | | | | | 421.500.000,00 | |
| | 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | 374.700.000,00 | | | | | | | 412.000.000,00 | |
| | 3 | 29 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | | | | | | 374.700.000,00 | | | | | | | 412.000.000,00 | |
| 425 | 3 | 29 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 91nilai<br>92nilai<br>92nilai<br>92nilai<br>92nilai<br>92nilai<br>92nilai | | | - | 314.700.000,00 | | | | | | 89nilai<br>92nilai<br>92nilai<br>92nilai<br>92nilai<br>92nilai<br>92nilai | 342.000.000,00 | |
| | 3 | 29 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 25.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 25.000.000,00 | |
| | 3 | 29 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 1 Dokumen | 25.000.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 25.000.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BANGKA |
| | 3 | 29 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 0,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 0,00 | |
| | 3 | 29 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | | | | 0 Paket | 0,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BANGKA |
| | 3 | 29 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 69.500.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 81.600.000,00 | |
| | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 8 Paket | 3.000.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 3.500.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BANGKA |
| | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 6 Paket | 2.500.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 2.500.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BANGKA |
| | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 0 Paket | 6.600.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 6.600.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BANGKA |
| | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 2 Dokumen | 2.400.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 3.000.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BANGKA |
| | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 5 Paket | 10.000.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 15.000.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BANGKA |
| | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 12 Laporan | 7.000.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 11.000.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BANGKA |
| | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 38.000.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 40.000.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BANGKA |
| | 3 | 29 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 21.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 20.000.000,00 | |
| | 3 | 29 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 1 Paket | 0,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BANGKA |
| | 3 | 29 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 3 Unit | 21.000.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 20.000.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BANGKA |
| | 3 | 29 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 155.200.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 170.400.000,00 | |
| | 3 | 29 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1.200.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 1.500.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BANGKA |
| | 3 | 29 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 36.000.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 50.000.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BANGKA |
| | 3 | 29 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 118.000.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 118.900.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BANGKA |
| | 3 | 29 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 44.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 45.000.000,00 | |
| | 3 | 29 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 3 Unit | 44.000.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 45.000.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BANGKA |
| 426 | 3 | 29 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA | - | 85%<br>85%<br>85%<br>85%<br>85%<br>85% | | | - | 30.000.000,00 | | | | | | 85%<br>85%<br>85%<br>85%<br>85%<br>85% | 35.000.000,00 | |
| | 3 | 29 | 03 | 1.01 | | Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | - | - | | | - | 30.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 35.000.000,00 | |
| | 3 | 29 | 03 | 1.01 | 0002 | Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Ditentukan dan Ditetapkan | | | | 1 Dokumen | 30.000.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 35.000.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BANGKA |
| 427 | 3 | 29 | 06 | | | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | - | 99.99%<br>99.99%<br>99.99%<br>99.99%<br>99.99%<br>99.99% | | | - | 30.000.000,00 | | | | | | 99.99%<br>99.99%<br>99.99%<br>99.99%<br>99.99%<br>99.99% | 35.000.000,00 | |
| | 3 | 29 | 06 | 1.02 | | Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | - | - | | | - | 30.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 35.000.000,00 | |
| | 3 | 29 | 06 | 1.02 | 0003 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | | | | 12 Laporan | 30.000.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 35.000.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BANGKA |
| | X | | | | | NON URUSAN | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | | 9.500.000,00 | |
| | X | XX | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | | 9.500.000,00 | |
| 428 | X | XX | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 91nilai<br>92nilai<br>92nilai<br>92nilai<br>92nilai<br>92nilai<br>92nilai | | | - | 5.000.000,00 | | | | | | 89nilai<br>92nilai<br>92nilai<br>92nilai<br>92nilai<br>92nilai<br>92nilai | 9.500.000,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 5.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 9.500.000,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 20 Unit | 5.000.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 9.500.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BANGKA |
| | | | | | | Cabang Dinas ESDM Wilayah Bangka Barat | | | | | | 641.200.000,00 | | | | | | | 654.300.000,00 | |
| | 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | 641.200.000,00 | | | | | | | 654.300.000,00 | |
| | 3 | 29 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | | | | | | 641.200.000,00 | | | | | | | 654.300.000,00 | |
| 429 | 3 | 29 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 91nilai<br>92nilai<br>92nilai<br>92nilai<br>92nilai<br>92nilai<br>92nilai | | | - | 581.200.000,00 | | | | | | 89nilai<br>92nilai<br>92nilai<br>92nilai<br>92nilai<br>92nilai<br>92nilai | 589.300.000,00 | |
| | 3 | 29 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 20.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 20.000.000,00 | |
| | 3 | 29 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 20.000.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BANGKA BARAT |
| | 3 | 29 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 18.800.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 0,00 | |
| | 3 | 29 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | | | | 0 Paket | 18.800.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BANGKA BARAT |
| | 3 | 29 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 130.800.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 140.800.000,00 | |
| | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 8 Paket | 3.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 3.000.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BANGKA BARAT |
| | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 6 Paket | 1.500.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 1.500.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BANGKA BARAT |
| | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 5 Paket | 9.700.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 9.700.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BANGKA BARAT |
| | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 2 Paket | 8.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 8.000.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BANGKA BARAT |
| | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 2 Dokumen | 6.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 6.000.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BANGKA BARAT |
| | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 5 Paket | 30.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 30.000.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BANGKA BARAT |
| | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 12 Laporan | 12.600.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 12.600.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BANGKA BARAT |
| | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 60.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 70.000.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BANGKA BARAT |
| | 3 | 29 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 0,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 0,00 | |
| | 3 | 29 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 0,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BANGKA BARAT |
| | 3 | 29 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 263.500.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 258.500.000,00 | |
| | 3 | 29 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 55.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 50.000.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BANGKA BARAT |
| | 3 | 29 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 20.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 20.000.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BANGKA BARAT |
| | 3 | 29 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 188.500.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 188.500.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BANGKA BARAT |
| | 3 | 29 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 148.100.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 170.000.000,00 | |
| | 3 | 29 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 3 Unit | 58.100.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 60.000.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BANGKA BARAT |
| | 3 | 29 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 20 Unit | 10.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 10.000.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BANGKA BARAT |
| | 3 | 29 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 80.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 100.000.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BANGKA BARAT |
| 430 | 3 | 29 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA | - | 85%<br>85%<br>85%<br>85%<br>85%<br>85% | | | - | 35.000.000,00 | | | | | | 85%<br>85%<br>85%<br>85%<br>85%<br>85% | 40.000.000,00 | |
| | 3 | 29 | 03 | 1.01 | | Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | - | - | | | - | 35.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 40.000.000,00 | |
| | 3 | 29 | 03 | 1.01 | 0003 | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | | | | | 1 Laporan | 35.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 40.000.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BANGKA BARAT |
| 431 | 3 | 29 | 06 | | | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | - | 99.99%<br>99.99%<br>99.99%<br>99.99%<br>99.99%<br>99.99% | | | - | 25.000.000,00 | | | | | | 99.99%<br>99.99%<br>99.99%<br>99.99%<br>99.99%<br>99.99% | 25.000.000,00 | |
| | 3 | 29 | 06 | 1.02 | | Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | - | - | | | - | 25.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 25.000.000,00 | |
| | 3 | 29 | 06 | 1.02 | 0003 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | | | | 12 Laporan | 25.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 25.000.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BANGKA BARAT |
| | | | | | | Cabang Dinas ESDM Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan | | | | | | 429.100.000,00 | | | | | | | 434.100.000,00 | |
| | 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | 429.100.000,00 | | | | | | | 434.100.000,00 | |
| | 3 | 29 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | | | | | | 429.100.000,00 | | | | | | | 434.100.000,00 | |
| 432 | 3 | 29 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 91nilai<br>92nilai<br>92nilai<br>92nilai<br>92nilai<br>92nilai<br>92nilai | | | - | 379.100.000,00 | | | | | | 89nilai<br>92nilai<br>92nilai<br>92nilai<br>92nilai<br>92nilai<br>92nilai | 379.100.000,00 | |
| | 3 | 29 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 22.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 22.000.000,00 | |
| | 3 | 29 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 1 Dokumen | 22.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 22.000.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BANGKA TENGAH DAN BANGKA SELATAN |
| | 3 | 29 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 0,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 0,00 | |
| | 3 | 29 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | | | | 0 Paket | 0,00 | Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BANGKA TENGAH DAN BANGKA SELATAN |
| | 3 | 29 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 68.500.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 68.500.000,00 | |
| | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 8 Paket | 3.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 3.000.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BANGKA TENGAH DAN BANGKA SELATAN |
| | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 5 Paket | 2.500.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 2.500.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BANGKA TENGAH DAN BANGKA SELATAN |
| | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 10 Paket | 3.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 3.000.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BANGKA TENGAH DAN BANGKA SELATAN |
| | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 5 Paket | 18.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 18.000.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BANGKA TENGAH DAN BANGKA SELATAN |
| | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 12 Laporan | 10.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 10.000.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BANGKA TENGAH DAN BANGKA SELATAN |
| | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 32.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 32.000.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BANGKA TENGAH DAN BANGKA SELATAN |
| | 3 | 29 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 178.600.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 178.600.000,00 | |
| | 3 | 29 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 600.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 600.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BANGKA TENGAH DAN BANGKA SELATAN |
| | 3 | 29 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 18.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 18.000.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BANGKA TENGAH DAN BANGKA SELATAN |
| | 3 | 29 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 160.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 160.000.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BANGKA TENGAH DAN BANGKA SELATAN |
| | 3 | 29 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 110.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 110.000.000,00 | |
| | 3 | 29 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 3 Unit | 50.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 50.000.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BANGKA TENGAH DAN BANGKA SELATAN |
| | 3 | 29 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 20 Unit | 10.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 10.000.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BANGKA TENGAH DAN BANGKA SELATAN |
| | 3 | 29 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 50.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 50.000.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BANGKA TENGAH DAN BANGKA SELATAN |
| 433 | 3 | 29 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA | - | 85%<br>85%<br>85%<br>85%<br>85%<br>85% | | | - | 30.000.000,00 | | | | | | 85%<br>85%<br>85%<br>85%<br>85%<br>85% | 30.000.000,00 | |
| | 3 | 29 | 03 | 1.01 | | Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | - | - | | | - | 30.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 30.000.000,00 | |
| | 3 | 29 | 03 | 1.01 | 0003 | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | | | | 1 Laporan | 30.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 30.000.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BANGKA TENGAH DAN BANGKA SELATAN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 434 | 3 | 29 | 06 | | | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | - | 99.99%<br>99.99%<br>99.99%<br>99.99%<br>99.99%<br>99.99% | | | - | 20.000.000,00 | | | | | | 99.99%<br>99.99%<br>99.99%<br>99.99%<br>99.99%<br>99.99% | 25.000.000,00 | |
| | 3 | 29 | 06 | 1.02 | | Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | - | - | | | - | 20.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 25.000.000,00 | |
| | 3 | 29 | 06 | 1.02 | 0003 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | | | | 12 Laporan | 20.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 25.000.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BANGKA TENGAH DAN BANGKA SELATAN |
| | | | | | | Cabang Dinas ESDM Wilayah Belitung | | | | | | 396.100.000,00 | | | | | | | 361.100.000,00 | |
| | 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | 396.100.000,00 | | | | | | | 361.100.000,00 | |
| | 3 | 29 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | | | | | | 396.100.000,00 | | | | | | | 361.100.000,00 | |
| 435 | 3 | 29 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 91nilai<br>92nilai<br>92nilai<br>92nilai<br>92nilai<br>92nilai<br>92nilai | | | - | 351.100.000,00 | | | | | | 89nilai<br>92nilai<br>92nilai<br>92nilai<br>92nilai<br>92nilai<br>92nilai | 318.100.000,00 | |
| | 3 | 29 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 28.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 28.000.000,00 | |
| | 3 | 29 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 0 Dokumen | 28.000.000,00 | Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 28.000.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BELITUNG |
| | 3 | 29 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 0,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 0,00 | |
| | 3 | 29 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | | | | 0 Paket | 0,00 | Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BELITUNG |
| | 3 | 29 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 118.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 85.000.000,00 | |
| | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 8 Paket | 3.000.000,00 | Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 3.000.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BELITUNG |
| | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 5 Paket | 3.000.000,00 | Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 3.000.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BELITUNG |
| | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 2 Paket | 8.000.000,00 | Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 8.000.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BELITUNG |
| | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 2 Dokumen | 6.000.000,00 | Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 6.000.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BELITUNG |
| | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 5 Paket | 15.000.000,00 | Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 15.000.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BELITUNG |
| | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 12 Laporan | 13.000.000,00 | Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 13.000.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BELITUNG |
| | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 70.000.000,00 | Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 37.000.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BELITUNG |
| | 3 | 29 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 145.100.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 145.100.000,00 | |
| | 3 | 29 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 600.000,00 | Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 600.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BELITUNG |
| | 3 | 29 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 14.500.000,00 | Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 14.500.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BELITUNG |
| | 3 | 29 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 9.000.000,00 | Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 9.000.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BELITUNG |
| | 3 | 29 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 121.000.000,00 | Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 121.000.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BELITUNG |
| | 3 | 29 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 60.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 60.000.000,00 | |
| | 3 | 29 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 3 Unit | 50.000.000,00 | Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 50.000.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BELITUNG |
| | 3 | 29 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 20 Unit | 10.000.000,00 | Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 10.000.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BELITUNG |
| 436 | 3 | 29 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA | Persentase pertambangan yang "good mining practices" (Cabdin ESDM Wilayah Bangka)<br>Persentase pertambangan yang "good mining practices" (Cabdin ESDM Wilayah Bangka Barat)<br>Persentase pertambangan yang "good mining practices" (Cabdin ESDM Wilayah Bangka Tengah dan Selatan)<br>Persentase pertambangan yang "good mining practices" (Cabdin ESDM Wilayah Belitung)<br>Persentase pertambangan yang "good mining practices" (DESDM)<br>Persentase pertambangan yang "good mining practices" (Cabdin ESDM Wilayah Belitung Timur) | 85%<br>85%<br>85%<br>85%<br>85%<br>85% | | | 85 %<br>85 %<br>85 %<br>85 %<br>85 %<br>85 % | 20.000.000,00 | | | | | | 85%<br>85%<br>85%<br>85%<br>85%<br>85% | 25.000.000,00 | |
| | 3 | 29 | 03 | 1.01 | | Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | Jumlah dokumen kajian teknis mineral bukan logam dan batuan yang disetujui | - | | | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | - | - | 25.000.000,00 | |
| | 3 | 29 | 03 | 1.01 | 0001 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | 1 0 | 20.000.000,00 | Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | - | | 25.000.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BELITUNG |
| 437 | 3 | 29 | 06 | | | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | - | 99.99%<br>99.99%<br>99.99%<br>99.99%<br>99.99%<br>99.99% | | | - | 25.000.000,00 | | | | | | 99.99%<br>99.99%<br>99.99%<br>99.99%<br>99.99%<br>99.99% | 18.000.000,00 | |
| | 3 | 29 | 06 | 1.02 | | Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | - | - | | | - | 25.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 18.000.000,00 | |
| | 3 | 29 | 06 | 1.02 | 0001 | Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan | | | | 0 Dokumen | 25.000.000,00 | Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 18.000.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BELITUNG |
| | | | | | | | Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan | | | | 1 Dokumen | 25.000.000,00 | Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 18.000.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BELITUNG |
| | | | | | | Cabang Dinas ESDM Wilayah Belitung Tmur | | | | | | 395.100.000,00 | | | | | | | 407.100.000,00 | |
| | 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | 395.100.000,00 | | | | | | | 407.100.000,00 | |
| | 3 | 29 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | | | | | | 395.100.000,00 | | | | | | | 407.100.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 438 | 3 | 29 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 91nilai<br>92nilai<br>92nilai<br>92nilai<br>92nilai<br>92nilai<br>92nilai | | | - | 352.100.000,00 | | | | | | 89nilai<br>92nilai<br>92nilai<br>92nilai<br>92nilai<br>92nilai<br>92nilai | 354.100.000,00 | |
| | 3 | 29 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 37.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 37.000.000,00 | |
| | 3 | 29 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 1 Dokumen | 37.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 37.000.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BELITUNG TMUR |
| | 3 | 29 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 0,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 0,00 | |
| | 3 | 29 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 0,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BELITUNG TMUR |
| | 3 | 29 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 135.500.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 137.500.000,00 | |
| | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 8 Paket | 3.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 3.000.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BELITUNG TMUR |
| | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 5 Paket | 5.500.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 7.500.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BELITUNG TMUR |
| | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 2 Paket | 8.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 8.000.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BELITUNG TMUR |
| | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 2 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 5.000.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BELITUNG TMUR |
| | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 5 Paket | 25.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 25.000.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BELITUNG TMUR |
| | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 12 Laporan | 9.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 9.000.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BELITUNG TMUR |
| | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 80.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 80.000.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BELITUNG TMUR |
| | 3 | 29 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 74.600.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 74.600.000,00 | |
| | 3 | 29 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 600.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 600.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BELITUNG TMUR |
| | 3 | 29 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 30.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 30.000.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BELITUNG TMUR |
| | 3 | 29 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 6.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 6.000.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BELITUNG TMUR |
| | 3 | 29 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 38.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 38.000.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BELITUNG TMUR |
| | 3 | 29 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 105.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 105.000.000,00 | |
| | 3 | 29 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 3 Unit | 50.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 50.000.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BELITUNG TMUR |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3 | 29 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 10 Unit | 10.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 10.000.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BELITUNG TMUR |
| | 3 | 29 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 45.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 45.000.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BELITUNG TMUR |
| 439 | 3 | 29 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA | - | 85%<br>85%<br>85%<br>85%<br>85%<br>85% | | | - | 33.000.000,00 | | | | | | 85%<br>85%<br>85%<br>85%<br>85%<br>85% | 38.000.000,00 | |
| | 3 | 29 | 03 | 1.01 | | Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | - | - | | | - | 33.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 38.000.000,00 | |
| | 3 | 29 | 03 | 1.01 | 0001 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah | | | | 1 Dokumen | 8.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 8.000.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BELITUNG TMUR |
| | 3 | 29 | 03 | 1.01 | 0002 | Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Ditentukan dan Ditetapkan | | | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 10.000.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BELITUNG TMUR |
| | 3 | 29 | 03 | 1.01 | 0003 | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | | | | 1 Laporan | 15.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 20.000.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BELITUNG TMUR |
| 440 | 3 | 29 | 06 | | | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | - | 99.99%<br>99.99%<br>99.99%<br>99.99%<br>99.99%<br>99.99% | | | - | 10.000.000,00 | | | | | | 99.99%<br>99.99%<br>99.99%<br>99.99%<br>99.99%<br>99.99% | 15.000.000,00 | |
| | 3 | 29 | 06 | 1.02 | | Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | - | - | | | - | 10.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 15.000.000,00 | |
| | 3 | 29 | 06 | 1.02 | 0003 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | | | | 1 Laporan | 10.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 15.000.000,00 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH BELITUNG TMUR |
| | | | | | | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | | | | | | 25.076.836.313,00 | | | | | | | 29.436.215.000,00 | |
| | 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | 25.076.836.313,00 | | | | | | | 29.436.215.000,00 | |
| | 3 | 30 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | | | | 23.506.836.313,00 | | | | | | | 23.731.215.000,00 | |
| 441 | 3 | 30 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Survey Kepuasan Pelayanan Teknis Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (UPTD BPSMB)<br>Survey Kepuasan Pelayanan Teknis Rumah Promosi dan Kemasan (UPTD RPK)<br>Nilai Sakip Perangkat Daerah (DISPERINDAG)<br>Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (DISPERINDAG) | 78Nilai<br>60Nilai<br>77Nilai<br>77Nilai | | | 77 Nilai<br>77 Nilai<br>76 Nilai<br>60 Nilai | 20.221.836.313,00 | | | | | | 77Nilai<br>60Nilai<br>77Nilai<br>77Nilai | 20.941.215.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3 | 30 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran<br>Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah | - | | | 10 Dokumen<br>11 Laporan | 285.000.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai, Perangkat Daerah | - | 320.000.000,00 | |
| | 3 | 30 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 10 Dokumen | 210.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai, Perangkat Daerah | | 240.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3 | 30 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 11 Laporan | 75.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai, Perangkat Daerah | | 80.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3 | 30 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Keuangan PD<br>Jumlah Laporan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan<br>Jumlah Laporan Keuangan PD<br>Jumlah Laporan Keuangan UPTD BPSMB<br>Jumlah Laporan Keuangan UPTD RPK | - | | | 78 Dokumen<br>2 Laporan<br>38 Laporan<br>12 Laporan<br>12 Laporan | 15.032.836.313,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | Pegawai, Perangkat Daerah | - | 15.633.215.000,00 | |
| | 3 | 30 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 1568 Orang/ Bulan | 14.997.836.313,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | Pegawai, Perangkat Daerah | | 15.598.215.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3 | 30 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | 2 Dokumen | 5.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | Pegawai, Perangkat Daerah | | 5.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3 | 30 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 12 Laporan | 30.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | Pegawai, Perangkat Daerah | | 30.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3 | 30 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah laporan Barang Milik Daerah yang terinventarisasi<br>Jumlah laporan Barang Milik Daerah yang terinventarisasi UPTD BPSMB<br>Jumlah laporan Barang milik daerah yang terinventarisasi UPTD RPK | - | | | 12 Laporan<br>12 Laporan<br>12 Laporan | 150.000.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai, Perangkat Daerah | - | 150.000.000,00 | |
| | 3 | 30 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 2 Laporan | 150.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai, Perangkat Daerah | | 150.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3 | 30 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Laporan administrasi kepegawaian PD<br>Jumlah Laporan administrasi kepegawaian UPTD BPSMB<br>Jumlah Laporan administrasi kepegawaian UPTD RPK | - | | | 12 Laporan<br>12 Laporan<br>12 Laporan | 200.000.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai, Perangkat Daerah | - | 200.000.000,00 | |
| | 3 | 30 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 80.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai, Perangkat Daerah | | 80.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3 | 30 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 10 Orang | 120.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai, Perangkat Daerah | | 120.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3 | 30 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan administrasi Umum PD<br>Jumlah Laporan Administrasi Umum UPTD BPSMB<br>Jumlah Laporan Administrasi Umum UPTD RPK<br>Jumlah Laporan Layanan Informasi dan Kehumasan PD | - | | | 12 Laporan<br>12 Laporan<br>12 Laporan<br>12 Laporan | 823.500.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai, Perangkat Daerah | - | 906.000.000,00 | |
| | 3 | 30 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 15.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai, Perangkat Daerah | | 16.500.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3 | 30 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 75.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai, Perangkat Daerah | | 82.500.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3 | 30 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 20.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai, Perangkat Daerah | | 22.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3 | 30 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 13.500.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai, Perangkat Daerah | | 15.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3 | 30 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 50.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai, Perangkat Daerah | | 55.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 50.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai, Perangkat Daerah | | 55.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3 | 30 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 600.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai, Perangkat Daerah | | 660.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3 | 30 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah enunjang Urusan Pemerintah Daerah UPTD RPK<br>Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Disperindag<br>Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPTD BPSMB | - | | | 12 Laporan<br>12 Laporan<br>12 Laporan | 625.000.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai, Perangkat Daerah | - | 125.500.000,00 | |
| | 3 | 30 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 1 Paket | 25.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai, Perangkat Daerah | | 25.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3 | 30 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 100 Unit | 500.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | Pegawai, Perangkat Daerah | | 500.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3 | 30 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 100.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai, Perangkat Daerah | | 100.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3 | 30 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br>Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD BPSMB<br>Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD RPK | - | | | 12 Laporan<br>12 Laporan<br>12 Laporan | 2.238.500.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai, Perangkat Daerah | - | 2.239.500.000,00 | |
| | 3 | 30 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 10.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai, Perangkat Daerah | | 11.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3 | 30 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 150.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai, Perangkat Daerah | | 150.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3 | 30 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 5.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai, Perangkat Daerah | | 5.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3 | 30 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 2.073.500.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai, Perangkat Daerah | | 2.073.500.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3 | 30 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br>Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD BPSMB<br>Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD RPK | - | | | 12 Laporan<br>12 Laporan<br>12 Laporan | 867.000.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai, Perangkat Daerah | - | 1.367.000.000,00 | |
| | 3 | 30 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 60.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai, Perangkat Daerah | | 60.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3 | 30 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 7 Unit | 182.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai, Perangkat Daerah | | 182.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3 | 30 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 40 Unit | 25.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai, Perangkat Daerah | | 25.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3 | 30 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 400.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai, Perangkat Daerah | | 400.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3 | 30 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 0 Unit | 0,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | - | Pegawai, Perangkat Daerah | | 500.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3 | 30 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 200.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pegawai, Perangkat Daerah | | 200.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 442 | 3 | 30 | 02 | | | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | Persentase Tertib Usaha | 100% | | | 100 % | 200.000.000,00 | | | | | | 100% | 200.000.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3 | 30 | 02 | 1.01 | | Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor | Jumlah Pelaku Usaha yang memiliki periizinan | - | | | 4 Pelaku Usaha | 25.000.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pelaku Usaha | - | 25.000.000,00 | |
| | 3 | 30 | 02 | 1.01 | 0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | | | 1 Dokumen | 25.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Dul | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pelaku Usaha | | 25.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3 | 30 | 02 | 1.02 | | Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Pelaku Usaha perdagangan B2 yang memiliki perizinan Perdagangan B2 | - | | | 2 Pelaku Usaha | 25.000.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pelaku Usaha | - | 25.000.000,00 | |
| | 3 | 30 | 02 | 1.02 | 0001 | Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | | | 1 Dokumen | 25.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pelaku Usaha | | 25.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3 | 30 | 02 | 1.03 | | Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar | Jumlah Pelaku Usaha yang memenuhi komitmen/rekomendasi | - | | | 4 Pelaku Usaha | 50.000.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pelaku Usaha | - | 50.000.000,00 | |
| | 3 | 30 | 02 | 1.03 | 0002 | Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission | | | | 2 Dokumen | 25.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pelaku Usaha | | 25.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3 | 30 | 02 | 1.03 | 0003 | Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya | | | | 2 Laporan | 25.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pelaku Usaha | | 25.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3 | 30 | 02 | 1.04 | | Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) | Persentase SKA dan Pelaku Ekspor yang terpantau | - | | | 100 % | 100.000.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pelaku Ekspor | - | 100.000.000,00 | |
| | 3 | 30 | 02 | 1.04 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal | | | | 10 Dokumen | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pelaku Ekspor | | 100.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 443 | 3 | 30 | 03 | | | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Persentase sarana distribusi yang terkelola dengan baik | 88% | | | 84 % | 470.000.000,00 | | | | | | 86% | 470.000.000,00 | |
| | 3 | 30 | 03 | 1.01 | | Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas | Persentase sarana distribusi yang terkelola | - | | | 50 % | 470.000.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Sarana Distribusi | - | 470.000.000,00 | |
| | 3 | 30 | 03 | 1.01 | 0001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi | | | | 1 Unit | 200.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Sarana Distribusi | | 200.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3 | 30 | 03 | 1.01 | 0002 | Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi | | | | 26 Laporan | 200.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Sarana Distribusi | | 200.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3 | 30 | 03 | 1.01 | 0003 | Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi | | | | 8 Orang | 70.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Sarana Distribusi | | 70.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 444 | 3 | 30 | 04 | | | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING | Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok | 8,00% | | | 8,30 % | 830.000.000,00 | | | | | | 8,20% | 830.000.000,00 | |
| | 3 | 30 | 04 | 1.01 | | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi | Persentase jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok dan Penting | - | | | 75 % | 140.000.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Masyarakat, Distributor | - | 140.000.000,00 | |
| | 3 | 30 | 04 | 1.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor | | | | 12 Laporan | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Masyarakat, Distributor | | 100.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3 | 30 | 04 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor | | | | 12 laporan | 40.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Masyarakat, Distributor | | 40.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3 | 30 | 04 | 1.02 | | Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok | - | | | 75 % | 550.000.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Masyarakat, Distributor | - | 550.000.000,00 | |
| | 3 | 30 | 04 | 1.02 | 0001 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota | | | | 12 Laporan | 50.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Masyarakat, Distributor | | 50.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3 | 30 | 04 | 1.02 | 0002 | Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | | | 12 Laporan | 500.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Masyarakat, Distributor | | 500.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3 | 30 | 04 | 1.03 | | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya | Persentase kinerja realisasi pupuk | - | | | 90 % | 140.000.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Distributor, Pengecer | - | 140.000.000,00 | |
| | 3 | 30 | 04 | 1.03 | 0002 | Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi | | | | 4 Laporan | 60.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Distributor, Pengecer | | 60.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3 | 30 | 04 | 1.03 | 0003 | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% | | | | 4 Laporan | 80.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Distributor, Pengecer | | 80.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 445 | 3 | 30 | 05 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor | 6% | | | 4,5 % | 540.000.000,00 | | | | | | 5% | 420.000.000,00 | |
| | 3 | 30 | 05 | 1.01 | | Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi | Jumlah Komoditi/Produk Yang dipromosikan<br>Jumlah Laporan Nilai Ekspor | - | | | 3 Produk<br>12 Laporan | 540.000.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pelaku Usaha, UMKM | - | 420.000.000,00 | |
| | 3 | 30 | 05 | 1.01 | 0001 | Pameran Dagang Internasional/Nasional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang | | | | 5 Pelaku Usaha | 200.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pelaku Usaha, UMKM | | 200.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3 | 30 | 05 | 1.01 | 0002 | Pameran Dagang Lokal | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal | | | | 0 Pelaku Usaha | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pelaku Usaha, UMKM | | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3 | 30 | 05 | 1.01 | 0003 | Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan | | | | 3 Pelaku Usaha | 240.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pelaku Usaha, UMKM | | 120.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3 | 30 | 05 | 1.01 | 0004 | Peningkatan Citra Produk Ekspor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi | | | | 4 Produk | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pelaku Usaha, UMKM | | 100.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 446 | 3 | 30 | 06 | | | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Nilai Indeks Keberdayaan Konsumen<br>Persentase Komoditi Potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku (UPTD BPSMB) | 44Nilai<br>100% | | | 43 Nilai<br>100 % | 875.000.000,00 | | | | | | 43Nilai<br>100% | 500.000.000,00 | |
| | 3 | 30 | 06 | 1.01 | | Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penanganan pengaduan konsumen | - | | | 100 % | 515.000.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Konsumen | - | 290.000.000,00 | |
| | 3 | 30 | 06 | 1.01 | 0001 | Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif | | | | 1 BPSK | 425.000.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Konsumen | | 200.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3 | 30 | 06 | 1.01 | 0002 | Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif | | | | 2 LPKSM | 30.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Konsumen | | 30.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3 | 30 | 06 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani | | | | 42 Pengaduan | 60.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Konsumen | | 60.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3 | 30 | 06 | 1.03 | | Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | - | | | 88 % | 360.000.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pelaku Usaha | - | 210.000.000,00 | |
| | 3 | 30 | 06 | 1.03 | 0003 | Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi | | | | 12 Laporan | 330.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pelaku Usaha | | 180.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3 | 30 | 06 | 1.03 | 0004 | Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kasus yang Ditangani | | | | 12 Kasus | 30.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pelaku Usaha | | 30.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 447 | 3 | 30 | 07 | | | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | Persentase Fasilitasi Produk UMKM yang dipasarkan<br>Persentase Produk Lokal yang digunakan, dipromosikan dan dipasarkan melalui Akses Pasar | 75%<br>50% | | | 40 %<br>65 % | 370.000.000,00 | | | | | | 70%<br>50% | 370.000.000,00 | |
| | 3 | 30 | 07 | 1.01 | | Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri | Jumlah produk lokal yang dipromosikan | - | | | 12 Produk | 160.000.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pelaku Usaha, UMKM | - | 160.000.000,00 | |
| | 3 | 30 | 07 | 1.01 | 0002 | Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri | | | | 12 UMKM | 160.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pelaku Usaha, UMKM | | 160.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3 | 30 | 07 | 1.02 | | Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri | Jumlah produk lokal yang dipasarkan<br>Jumlah UMKM yang terfasilitasi pemasaran | - | | | 12 Produk<br>28 UMKM | 60.000.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | UMKM, Masyarakat | - | 60.000.000,00 | |
| | 3 | 30 | 07 | 1.02 | 0002 | Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi | | | | 12 UMKM | 60.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | UMKM, Masyarakat | | 60.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3 | 30 | 07 | 1.03 | | Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan akses pasar online<br>Jumlah Pemahaman Generasi Muda dalam Penggunaan Produk Dalam Negeri<br>Jumlah produk Lokal yang digunakan | - | | | 12 Pelaku Usaha<br>30 Orang<br>24 Produk | 150.000.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pelaku Usaha, Masyarakat | - | 150.000.000,00 | |
| | 3 | 30 | 07 | 1.03 | 0002 | Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | | | | 1 Laporan | 60.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pelaku Usaha, Masyarakat | | 60.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3 | 30 | 07 | 1.03 | 0004 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan | | | | 1 Dokumen | 30.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pelaku Usaha, Masyarakat | | 30.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3 | 30 | 07 | 1.03 | 0005 | Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah laporan kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh masyarakat yang melibatkan stakeholder, tokoh masyarakat atau influencer | | | | 12 Laporan | 60.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Pelaku Usaha, Masyarakat | | 60.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3 | 31 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | | | | 1.390.000.000,00 | | | | | | | 5.525.000.000,00 | |
| 448 | 3 | 31 | 02 | | | PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Persentase Fasilitasi Layanan Desain dan Kemasan Produk UMKM (UPTD RPK)<br>Persentase Pertumbuhan Unit Usaha Industri | 2,75%<br>70% | | | 60 %<br>2,50 % | 1.390.000.000,00 | | | | | | 2,75%<br>70% | 5.025.000.000,00 | |
| | 3 | 31 | 02 | 1.01 | | Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi | Jumlah dokumen perencanaan dan laporan penerapan dan evaluasi RPIP<br>Jumlah Laporan Fasilitas Design dan Produksi label/kemasan dan pengelolaan bahan baku, gudang, mesin dan peralatan (UPTD RPK)<br>Jumlah Sarana Prasarana Kawasan Industri<br>Jumlah Sebaran Wilayah Industri<br>Jumlah Tenaga Kerja Industri Pengolahan<br>Nilai Investasi Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun) | - | | | 2 Dokumen<br>24 Laporan<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>51500 Orang<br>5,400 Triliyun Rp | 1.390.000.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Perusahaan Industri, Tenaga Kerja Industri | - | 5.025.000.000,00 | |
| | 3 | 31 | 02 | 1.01 | 0002 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | | | | 15 Dokumen | 130.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Perusahaan Industri, Tenaga Kerja Industri | | 500.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3 | 31 | 02 | 1.01 | 0003 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | | | | 8 Dokumen | 200.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Perusahaan Industri, Tenaga Kerja Industri | | 1.500.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3 | 31 | 02 | 1.01 | 0004 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | | | | 8 Dokumen | 60.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | - | Perusahaan Industri, Tenaga Kerja Industri | | 500.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3 | 31 | 02 | 1.01 | 0005 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | | | | 6 Dokumen | 1.000.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Perusahaan Industri, Tenaga Kerja Industri | | 2.500.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3 | 31 | 02 | 1.01 | 0006 | Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | | | | 12 Dokumen | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Perusahaan Industri, Tenaga Kerja Industri | | 25.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 449 | 3 | 31 | 03 | | | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | Persentase pemenuhan komitmen Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Kawasan Usaha Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Perusahaan Industri dan Kawasan Industri<br>Persentase Pengawasan dan Pengendalian Perusahaan Industri dan Kawasan Industri | 75%<br>65% | | | 65 %<br>55 % | 0,00 | | | | | | 70%<br>60% | 500.000.000,00 | |
| | 3 | 31 | 03 | 1.01 | | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi | Jumlah Laporan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi yang diterbitkan<br>Jumlah Laporan Perusahaan Industri yang diawasi | - | | | 1 Laporan<br>1 Laporan | 0,00 | | | | - | Pembangunan Ekonomi | Perusahaan Industri | - | 500.000.000,00 | |
| | 3 | 31 | 03 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | 5 Dokumen | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | Perusahaan Industri | | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3 | 31 | 03 | 1.01 | 0004 | Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | 1 0 | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | Perusahaan Industri | | 500.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3 | - | | | | - | | | | | | 180.000.000,00 | | | | | | | 180.000.000,00 | |
| 450 | 3 | - | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | Persentase Kepatuhan Perusahaan Industri dan Kawasan Industri pada Akun SIINas | 95% | | | 85 % | 180.000.000,00 | | | | | | 90% | 180.000.000,00 | |
| | 3 | - | 04 | 1.01 | | Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Jumlah Laporan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)<br>Jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang dipantau dan dievaluasi<br>Jumlah Peserta Diseminasi | - | | | 1 Laporan<br>55 Perusahaan<br>60 Orang | 180.000.000,00 | | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Perusahaan Industri | - | 180.000.000,00 | |
| | 3 | - | 04 | 1.01 | 0001 | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | | | | 1 Dokumen | 60.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Perusahaan Industri | | 60.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3 | - | 04 | 1.01 | 0002 | Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas | | | | 1 Dokumen | 60.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Perusahaan Industri | | 60.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3 | - | 04 | 1.01 | 0003 | Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas | | | | 1 Dokumen | 60.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | Perusahaan Industri | | 60.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | | | | | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG | | | | | | 1.275.000.000,00 | | | | | | | 1.515.350.000,00 | |
| | 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | 730.000.000,00 | | | | | | | 1.047.500.000,00 | |
| | 3 | 30 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | | | | 730.000.000,00 | | | | | | | 1.047.500.000,00 | |
| 451 | 3 | 30 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 78Nilai<br>60Nilai<br>77Nilai<br>77Nilai | | | - | 50.000.000,00 | | | | | | 77Nilai<br>60Nilai<br>77Nilai<br>77Nilai | 40.000.000,00 | |
| | 3 | 30 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 50.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 40.000.000,00 | |
| | 3 | 30 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 7 Orang | 50.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 40.000.000,00 | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |
| 452 | 3 | 30 | 06 | | | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | - | 44Nilai<br>100% | | | - | 680.000.000,00 | | | | | | 43Nilai<br>100% | 1.007.500.000,00 | |
| | 3 | 30 | 06 | 1.02 | | Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 680.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 1.007.500.000,00 | |
| | 3 | 30 | 06 | 1.02 | 0004 | Pengembangan Layanan Kalibrasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan | | | | 5 Sertifikat | 30.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 100.000.000,00 | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |
| | 3 | 30 | 06 | 1.02 | 0005 | Pengembangan Layanan Pengujian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan | | | | 250 laporan | 350.000.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpendam<br>Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat<br>Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali<br>Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba<br>Kab. Bangka Barat, Mentok, Tanjung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 302.500.000,00 | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |
| | 3 | 30 | 06 | 1.02 | 0006 | Pemantauan Mutu Produk | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah produk potensial yang dipantau | | | | 1 Produk | 250.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 302.500.000,00 | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |
| | 3 | 30 | 06 | 1.02 | 0007 | Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan | | | | 1 Sertifikat | 50.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 302.500.000,00 | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |
| | X | | | | | NON URUSAN | | | | | | 545.000.000,00 | | | | | | | 467.850.000,00 | |
| | X | XX | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX | | | | | | 545.000.000,00 | | | | | | | 467.850.000,00 | |
| 453 | X | XX | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 78Nilai<br>60Nilai<br>77Nilai<br>77Nilai | | | - | 545.000.000,00 | | | | | | 77Nilai<br>60Nilai<br>77Nilai<br>77Nilai | 467.850.000,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 230.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 200.850.000,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 5.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 6.050.000,00 | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 10.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 12.000.000,00 | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 5.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 2.800.000,00 | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 35.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 35.000.000,00 | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 15.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 17.000.000,00 | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 1 Laporan | 10.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 18.000.000,00 | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 150.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 110.000.000,00 | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |
| | X | XX | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 35.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 35.000.000,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 5 Unit | 35.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 35.000.000,00 | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |
| | X | XX | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 130.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 133.000.000,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 20.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 23.000.000,00 | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |
| | X | XX | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 110.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 110.000.000,00 | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |
| | X | XX | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 150.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 99.000.000,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 2 Unit | 40.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 50.000.000,00 | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |
| | X | XX | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 10 Unit | 10.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 9.000.000,00 | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |
| | X | XX | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 100.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 40.000.000,00 | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |
| | | | | | | UPTD RUMAH PROMOSI DAN KEMASAN | | | | | | 2.205.000.000,00 | | | | | | | 3.127.214.000,00 | |
| | 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | 2.205.000.000,00 | | | | | | | 3.127.214.000,00 | |
| | 3 | 30 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | | | | 450.000.000,00 | | | | | | | 424.000.000,00 | |
| 454 | 3 | 30 | 07 | | | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | - | 75%<br>50% | | | - | 450.000.000,00 | | | | | | 70%<br>50% | 424.000.000,00 | |
| | 3 | 30 | 07 | 1.01 | | Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri | - | - | | | - | 150.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 265.000.000,00 | |
| | 3 | 30 | 07 | 1.01 | 0002 | Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri | | | | 30 UMKM | 150.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 265.000.000,00 | UPTD RUMAH PROMOSI DAN KEMASAN |
| | 3 | 30 | 07 | 1.02 | | Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri | - | - | | | - | 50.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 59.000.000,00 | |
| | 3 | 30 | 07 | 1.02 | 0002 | Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi | | | | 28 UMKM | 50.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 59.000.000,00 | UPTD RUMAH PROMOSI DAN KEMASAN |
| | 3 | 30 | 07 | 1.03 | | Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | - | - | | | - | 250.000.000,00 | | | - | - | - | - | 100.000.000,00 | |
| | 3 | 30 | 07 | 1.03 | 0005 | Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah laporan kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh masyarakat yang melibatkan stakeholder, tokoh masyarakat atau influencer | | | | 1 Laporan | 250.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 100.000.000,00 | UPTD RUMAH PROMOSI DAN KEMASAN |
| | 3 | 31 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | | | | 1.755.000.000,00 | | | | | | | 2.703.214.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 455 | 3 | 31 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 78Nilai<br>60Nilai<br>77Nilai<br>77Nilai | | | - | 805.000.000,00 | | | | | | 77Nilai<br>60Nilai<br>77Nilai<br>77Nilai | 1.203.214.000,00 | |
| | 3 | 31 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 10.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 68.970.000,00 | |
| | 3 | 31 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 12 Laporan | 10.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 68.970.000,00 | UPTD RUMAH PROMOSI DAN KEMASAN |
| | 3 | 31 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 56.500.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 66.500.000,00 | |
| | 3 | 31 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 16.500.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 16.500.000,00 | UPTD RUMAH PROMOSI DAN KEMASAN |
| | 3 | 31 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 6 Orang | 40.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 50.000.000,00 | UPTD RUMAH PROMOSI DAN KEMASAN |
| | 3 | 31 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 273.500.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 458.904.000,00 | |
| | 3 | 31 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 40.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 4.719.000,00 | UPTD RUMAH PROMOSI DAN KEMASAN |
| | 3 | 31 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 15.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 12.584.000,00 | UPTD RUMAH PROMOSI DAN KEMASAN |
| | 3 | 31 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 4 Paket | 10.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 12.584.000,00 | UPTD RUMAH PROMOSI DAN KEMASAN |
| | 3 | 31 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 10.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 10.400.000,00 | UPTD RUMAH PROMOSI DAN KEMASAN |
| | 3 | 31 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 4 Paket | 20.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 20.449.000,00 | UPTD RUMAH PROMOSI DAN KEMASAN |
| | 3 | 31 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 2 Laporan | 10.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 10.000.000,00 | UPTD RUMAH PROMOSI DAN KEMASAN |
| | 3 | 31 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 2 Laporan | 168.500.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 388.168.000,00 | UPTD RUMAH PROMOSI DAN KEMASAN |
| | 3 | 31 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 80.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 165.000.000,00 | |
| | 3 | 31 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 2 Paket | 40.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 40.000.000,00 | UPTD RUMAH PROMOSI DAN KEMASAN |
| | 3 | 31 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 5 Unit | 40.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 125.000.000,00 | UPTD RUMAH PROMOSI DAN KEMASAN |
| | 3 | 31 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 275.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 333.840.000,00 | |
| | 3 | 31 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2 Laporan | 2.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 4.840.000,00 | UPTD RUMAH PROMOSI DAN KEMASAN |
| | 3 | 31 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 88.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 144.000.000,00 | UPTD RUMAH PROMOSI DAN KEMASAN |
| | 3 | 31 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 2 Laporan | 185.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 185.000.000,00 | UPTD RUMAH PROMOSI DAN KEMASAN |
| | 3 | 31 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 110.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 110.000.000,00 | |
| | 3 | 31 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 10 Unit | 10.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 10.000.000,00 | UPTD RUMAH PROMOSI DAN KEMASAN |
| | 3 | 31 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 100.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 100.000.000,00 | UPTD RUMAH PROMOSI DAN KEMASAN |
| 456 | 3 | 31 | 02 | | | PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | - | 2,75%<br>70% | | | - | 950.000.000,00 | | | | | | 2,75%<br>70% | 1.500.000.000,00 | |
| | 3 | 31 | 02 | 1.01 | | Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi | - | - | | | - | 950.000.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 1.500.000.000,00 | |
| | 3 | 31 | 02 | 1.01 | 0005 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | | | | 12 Dokumen | 950.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 1.500.000.000,00 | UPTD RUMAH PROMOSI DAN KEMASAN |
| | | | | | | Biro Pemerintahan | | | | | | 3.647.014.568,00 | | | | | | | 11.740.625.309,00 | |
| | 4 | | | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 3.647.014.568,00 | | | | | | | 11.740.625.309,00 | |
| | 4 | 01 | | | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | 3.647.014.568,00 | | | | | | | 11.740.625.309,00 | |
| 457 | 4 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang tersusun | 75% | | | 75 % | 3.647.014.568,00 | | | | | | 75% | 11.740.625.309,00 | |
| | 4 | 01 | 03 | 1.01 | | Pelaksanaan Tugas Pemerintahan | Persentase Rumusan Kebijakan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan yang dikeluarkan<br>Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan | - | | | 75 %<br>12 Bulan | 1.002.749.754,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | Instansi Pemerintah, Pemangku Kepentingan dan Instansi Vertikal | - | 1.486.273.148,00 | |
| | 4 | 01 | 03 | 1.01 | 0001 | Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan | | | | 25 Dokumen | 175.511.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | Instansi Pemerintah, Pemangku Kepentingan dan Instansi Vertikal | | 365.000.000,00 | BIRO PEMERINTAHAN |
| | 4 | 01 | 03 | 1.01 | 0002 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum | | | | 2 Dokumen | 241.530.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | Instansi Pemerintah, Pemangku Kepentingan dan Instansi Vertikal | | 350.000.000,00 | BIRO PEMERINTAHAN |
| | 4 | 01 | 03 | 1.01 | 0003 | Fasilitasi Penataan Wilayah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah | | | | 3 Dokumen | 585.707.954,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | Instansi Pemerintah, Pemangku Kepentingan dan Instansi Vertikal | | 771.273.148,00 | BIRO PEMERINTAHAN |
| | 4 | 01 | 03 | 1.02 | | Pelaksanaan Otonomi Daerah | Persentase Rumusan Kebijakan Otonomi Daerah yang dikeluarkan | - | | | 75 % | 2.165.230.314,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | Pemerintah Daearah Provinsi Kab/Kota, Instansi lainnya dan masyarakat | - | 2.854.352.161,00 | |
| | 4 | 01 | 03 | 1.02 | 0001 | Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD | | | | 4 Dokumen | 692.216.915,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | Pemerintah Daearah Provinsi Kab/Kota, Instansi lainnya dan masyarakat | | 945.768.981,00 | BIRO PEMERINTAHAN |
| | 4 | 01 | 03 | 1.02 | 0002 | Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan | | | | 3 Dokumen | 1.006.375.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | Pemerintah Daearah Provinsi Kab/Kota, Instansi lainnya dan masyarakat | | 1.300.000.000,00 | BIRO PEMERINTAHAN |
| | 4 | 01 | 03 | 1.02 | 0003 | Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan | | | | 4 Laporan | 466.638.399,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | Pemerintah Daearah Provinsi Kab/Kota, Instansi lainnya dan masyarakat | | 608.583.180,00 | BIRO PEMERINTAHAN |
| | 4 | 01 | 03 | 1.03 | | Fasilitasi Kerja Sama Daerah | Persentase Rumusan Kebijakan Fasilitasi Kerjasama Daerah yang dikeluarkan | - | | | 75 % | 479.034.500,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | Instansi Pemerintah BUMN dan Instansi Lainnya | - | 7.400.000.000,00 | |
| | 4 | 01 | 03 | 1.03 | 0001 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi | | | | 2 Dokumen | 36.229.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | Instansi Pemerintah BUMN dan Instansi Lainnya | | 6.500.000.000,00 | BIRO PEMERINTAHAN |
| | 4 | 01 | 03 | 1.03 | 0002 | Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi | | | | 17 Dokumen | 120.765.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | Instansi Pemerintah BUMN dan Instansi Lainnya | | 300.000.000,00 | BIRO PEMERINTAHAN |
| | 4 | 01 | 03 | 1.03 | 0003 | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi | | | | 6 Laporan | 322.040.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | Instansi Pemerintah BUMN dan Instansi Lainnya | | 600.000.000,00 | BIRO PEMERINTAHAN |
| | | | | | | Biro Kesejahteran Rakyat | | | | | | 62.036.617.400,00 | | | | | | | 84.651.236.400,00 | |
| | 4 | | | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 62.036.617.400,00 | | | | | | | 84.651.236.400,00 | |
| | 4 | 01 | | | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | 62.036.617.400,00 | | | | | | | 84.651.236.400,00 | |
| 458 | 4 | 01 | 04 | | | PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT | - | 80%<br>80% | | | - | 62.036.617.400,00 | | | | | | 80%<br>80% | 84.651.236.400,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4 | 01 | 04 | 1.01 | | Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual | - | - | | | - | 10.207.320.116,00 | | | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Pembangunan Pemerintahan | Kebijakan Pembinaan Mental Spiritual | - | 13.946.158.398,00 | |
| | 4 | 01 | 04 | 1.01 | 0001 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola | | | | 100 Unit | 8.753.141.451,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Pembangunan Pemerintahan | Kebijakan Pembinaan Mental Spiritual | | 11.959.328.775,00 | BIRO KESEJAHTERAN RAKYAT |
| | 4 | 01 | 04 | 1.01 | 0002 | Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | | | | 60 Lembaga | 1.454.178.665,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Pembangunan Pemerintahan | Kebijakan Pembinaan Mental Spiritual | | 1.986.829.623,00 | BIRO KESEJAHTERAN RAKYAT |
| | 4 | 01 | 04 | 1.02 | | Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | - | - | | | - | 51.670.376.051,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Pemerintahan | Kebijakan Pelayanan Dasar | - | 70.487.945.525,00 | |
| | 4 | 01 | 04 | 1.02 | 0001 | Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | | | | 70 Dokumen | 9.526.352.370,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Pemerintahan | Kebijakan Pelayanan Dasar | | 11.889.857.811,00 | BIRO KESEJAHTERAN RAKYAT |
| | 4 | 01 | 04 | 1.02 | 0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan | | | | 60 Dokumen | 79.982.101,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Pemerintahan | Kebijakan Pelayanan Dasar | | 109.278.737,00 | BIRO KESEJAHTERAN RAKYAT |
| | 4 | 01 | 04 | 1.02 | 0003 | Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial | | | | 170 Dokumen | 42.064.041.580,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Pemerintahan | Kebijakan Pelayanan Dasar | | 58.488.808.977,00 | BIRO KESEJAHTERAN RAKYAT |
| | 4 | 01 | 04 | 1.03 | | Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar | - | - | | | - | 158.921.233,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Pemerintahan | Kebijakan Non Pelayanan Dasar | - | 217.132.477,00 | |
| | 4 | 01 | 04 | 1.03 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata | | | | 12 Dokumen | 67.914.962,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Pemerintahan | Kebijakan Non Pelayanan Dasar | | 92.791.527,00 | BIRO KESEJAHTERAN RAKYAT |
| | 4 | 01 | 04 | 1.03 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja | | | | 12 Dokumen | 46.725.771,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Pemerintahan | Kebijakan Non Pelayanan Dasar | | 63.840.950,00 | BIRO KESEJAHTERAN RAKYAT |
| | 4 | 01 | 04 | 1.03 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan | | | | 12 Dokumen | 44.280.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Pemerintahan | Kebijakan Non Pelayanan Dasar | | 60.500.000,00 | BIRO KESEJAHTERAN RAKYAT |
| | | | | | | Biro Hukum | | | | | | 1.069.953.363,00 | | | | | | | 1.461.866.476,00 | |
| | 4 | | | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 1.069.953.363,00 | | | | | | | 1.461.866.476,00 | |
| | 4 | 01 | | | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | 1.069.953.363,00 | | | | | | | 1.461.866.476,00 | |
| 459 | 4 | 01 | 05 | | | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM | - | 95% | | | - | 1.069.953.363,00 | | | | | | 95% | 1.461.866.476,00 | |
| | 4 | 01 | 05 | 1.01 | | Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan | - | - | | | - | 931.843.691,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 1.267.976.485,00 | |
| | 4 | 01 | 05 | 1.01 | 0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun | | | | 100 Dokumen | 720.379.737,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 984.917.711,00 | BIRO HUKUM |
| | 4 | 01 | 05 | 1.01 | 0002 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun | | | | 250 Dokumen | 53.332.442,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 58.665.686,00 | BIRO HUKUM |
| | 4 | 01 | 05 | 1.01 | 0003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya | | | | 125 Dokumen | 113.131.512,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 164.044.663,00 | BIRO HUKUM |
| | 4 | 01 | 05 | 1.01 | 0004 | Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi | | | | 35 Dokumen | 45.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 60.348.425,00 | BIRO HUKUM |
| | 4 | 01 | 05 | 1.02 | | Fasilitasi Bantuan Hukum | - | - | | | - | 138.109.672,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 193.889.991,00 | |
| | 4 | 01 | 05 | 1.02 | 0001 | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan | | | | 2 Kasus | 99.821.181,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 139.672.651,00 | BIRO HUKUM |
| | 4 | 01 | 05 | 1.02 | 0002 | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan | | | | 2 Kasus | 38.288.491,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 54.217.340,00 | BIRO HUKUM |
| | | | | | | Biro Perekonomian dan Administrasi | Pembangunan | | | | | 1.635.480.140,00 | | | | | | | 2.254.500.000,00 | |
| | 4 | | | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 1.635.480.140,00 | | | | | | | 2.254.500.000,00 | |
| | 4 | 01 | | | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | 1.635.480.140,00 | | | | | | | 2.254.500.000,00 | |
| 460 | 4 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai Sakip PD Setda<br>Survey Kepuasan Pelayanan Internal PD Setda | 85%<br>79Nilai | | | 78 Nilai<br>83 % | 398.524.500,00 | | | | | | 84%<br>78,5Nilai | 537.500.000,00 | |
| | 4 | 01 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi PD Setda yang disusun tepat waktu | - | | | 95 Persen | 398.524.500,00 | | | - | - | - | - | 537.500.000,00 | |
| | 4 | 01 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 2 Dokumen | 229.453.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 295.000.000,00 | BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | 4 | 01 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 9.661.200,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 13.500.000,00 | BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | 4 | 01 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 9.661.200,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 13.500.000,00 | BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | 4 | 01 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 9.661.200,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 13.500.000,00 | BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | 4 | 01 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 9.661.200,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 13.500.000,00 | BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | 4 | 01 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 2 Laporan | 9.661.200,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 13.500.000,00 | BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | 4 | 01 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 5 Laporan | 120.765.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 175.000.000,00 | BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| 461 | 4 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Perekonomian dan Pembangunan yang tersusun | 75% | | | 75 % | 857.431.500,00 | | | | | | 75% | 1.170.000.000,00 | |
| | 4 | 01 | 06 | 1.01 | | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian | Persentase Rumusan Kebijakan Pengelolaan dan Koordinasi Perekonomian yang dikeluarkan | - | | | 65 % | 382.422.500,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi | - | - | 510.000.000,00 | |
| | 4 | 01 | 06 | 1.01 | 0002 | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro | | | | 12 Dokumen | 209.326.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 275.000.000,00 | BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro | | | | 12 Dokumen | 173.096.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | - | | 235.000.000,00 | BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4 | 01 | 06 | 1.02 | | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam | Persentase Rumusan Kebijakan Pengelolaan dan Koordinasi Sumber Daya Alam yang dikeluarkan | - | | | 65 % | 257.632.000,00 | | | - | Pembangunan Lingkungan | - | - | 360.000.000,00 | |
| | 4 | 01 | 06 | 1.02 | 0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | | | | 12 Dokumen | 80.510.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 110.000.000,00 | BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | 4 | 01 | 06 | 1.02 | 0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | | | | 10 Dokumen | 88.561.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 125.000.000,00 | BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | 4 | 01 | 06 | 1.02 | 0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | | | | 10 Dokumen | 88.561.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Lingkungan | - | | 125.000.000,00 | BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | 4 | 01 | 06 | 1.03 | | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD | - | - | | | - | 217.377.000,00 | | | - | - | - | - | 300.000.000,00 | |
| | 4 | 01 | 06 | 1.03 | 0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha | | | | 5 Dokumen | 72.459.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 110.000.000,00 | BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | 4 | 01 | 06 | 1.03 | 0002 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi | | | | 1 Dokumen | 32.204.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 40.000.000,00 | BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | 4 | 01 | 06 | 1.03 | 0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD | | | | 1 Dokumen | 60.382.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 75.000.000,00 | BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | 4 | 01 | 06 | 1.03 | 0004 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah | | | | 5 Dokumen | 52.331.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 75.000.000,00 | BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| 462 | 4 | 01 | 08 | | | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Administrasi Pembangunan yang tersusun | 75% | | | 75 % | 379.524.140,00 | | | | | | 75% | 547.000.000,00 | |
| | 4 | 01 | 08 | 1.01 | | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Persentase Rumusan Kebijakan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dikeluarkan | - | | | 65 % | 209.326.000,00 | | | - | - | - | - | 295.000.000,00 | |
| | 4 | 01 | 08 | 1.01 | 0001 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD | | | | 1 Laporan | 44.280.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 60.000.000,00 | BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | 4 | 01 | 08 | 1.01 | 0002 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN | | | | 1 Laporan | 44.280.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 60.000.000,00 | BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | 4 | 01 | 08 | 1.01 | 0003 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah | | | | 1 Laporan | 120.765.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Wilayah | - | | 175.000.000,00 | BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | 4 | 01 | 08 | 1.02 | | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | - | - | | | - | 170.198.140,00 | | | - | - | - | - | 252.000.000,00 | |
| | 4 | 01 | 08 | 1.02 | 0001 | Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 60.382.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 100.000.000,00 | BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | 4 | 01 | 08 | 1.02 | 0002 | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | | 1 Laporan | 65.535.140,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 92.000.000,00 | BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | 4 | 01 | 08 | 1.02 | 0003 | Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah | | | | 1 Dokumen | 44.280.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Wilayah | - | | 60.000.000,00 | BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | | | | | | Biro Pengadaan Barang/Jasa | | | | | | 2.422.467.651,52 | | | | | | | 3.069.080.865,00 | |
| | 4 | | | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 2.422.467.651,52 | | | | | | | 3.069.080.865,00 | |
| | 4 | 01 | | | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | 2.422.467.651,52 | | | | | | | 3.069.080.865,00 | |
| 463 | 4 | 01 | 07 | | | PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | - | 80% | | | - | 2.422.467.651,52 | | | | | | 80% | 3.069.080.865,00 | |
| | 4 | 01 | 07 | 1.01 | | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | - | - | | | - | 894.904.879,50 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 1.133.775.900,00 | |
| | 4 | 01 | 07 | 1.01 | 0001 | Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | 12 Laporan | 116.200.083,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 147.216.600,00 | BIRO PENGADAAN BARANG/JASA |
| | 4 | 01 | 07 | 1.01 | 0002 | Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | | 12 Laporan | 678.723.453,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 859.890.600,00 | BIRO PENGADAAN BARANG/JASA |
| | 4 | 01 | 07 | 1.01 | 0003 | Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | 12 Laporan | 99.981.343,50 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 126.668.700,00 | BIRO PENGADAAN BARANG/JASA |
| | 4 | 01 | 07 | 1.02 | | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | - | - | | | - | 1.328.063.103,67 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 1.682.554.174,00 | |
| | 4 | 01 | 07 | 1.02 | 0001 | Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik | | | | 12 Laporan | 1.172.034.723,67 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 1.484.878.174,00 | BIRO PENGADAAN BARANG/JASA |
| | 4 | 01 | 07 | 1.02 | 0002 | Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | 12 Laporan | 86.226.210,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 109.242.000,00 | BIRO PENGADAAN BARANG/JASA |
| | 4 | 01 | 07 | 1.02 | 0003 | Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | 12 Laporan | 69.802.170,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 88.434.000,00 | BIRO PENGADAAN BARANG/JASA |
| | 4 | 01 | 07 | 1.03 | | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | - | - | | | - | 199.499.668,35 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 252.750.791,00 | |
| | 4 | 01 | 07 | 1.03 | 0001 | Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah O+A2922:I2929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa | | | | 12 Orang | 72.265.776,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 91.555.200,00 | BIRO PENGADAAN BARANG/JASA |
| | 4 | 01 | 07 | 1.03 | 0002 | Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | | 12 Dokumen | 65.643.742,35 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 83.165.591,00 | BIRO PENGADAAN BARANG/JASA |
| | 4 | 01 | 07 | 1.03 | 0003 | Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa | | | | 12 Dokumen | 61.590.150,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 78.030.000,00 | BIRO PENGADAAN BARANG/JASA |
| | | | | | | Biro Organisasi | | | | | | 1.718.767.553,00 | | | | | | | 2.348.334.749,00 | |
| | 4 | | | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 1.718.767.553,00 | | | | | | | 2.348.334.749,00 | |
| | 4 | 01 | | | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | 1.718.767.553,00 | | | | | | | 2.348.334.749,00 | |
| 464 | 4 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI | Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Penataan Organisasi | 80% | | | 80 % | 1.718.767.553,00 | | | | | | 80% | 2.348.334.749,00 | |
| | 4 | 01 | 02 | 1.01 | | Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Persentase Rumusan Kebijakan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan yang dikeluarkan | - | | | 80 % | 572.922.518,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | instansi pemerintah | - | 751.702.541,00 | |
| | 4 | 01 | 02 | 1.01 | 0001 | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota | | | | 12 Dokumen | 143.133.327,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | instansi pemerintah | | 169.433.546,00 | BIRO ORGANISASI |
| | 4 | 01 | 02 | 1.01 | 0002 | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota | | | | 12 Dokumen | 176.552.659,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | instansi pemerintah | | 250.010.202,00 | BIRO ORGANISASI |
| | 4 | 01 | 02 | 1.01 | 0003 | Penataan Analisis Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan | | | | 12 Dokumen | 253.236.532,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | instansi pemerintah | | 332.258.793,00 | BIRO ORGANISASI |
| | 4 | 01 | 02 | 1.02 | | Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | Persentase Rumusan Kebijakan Akuntabilitas Kinerja, Budaya Kerja dan Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan<br>Persentase Rumusan Kebijakan Tatalaksana Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dikeluarkan | - | | | 80 %<br>80 % | 1.145.845.035,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | instansi pemerintah | - | 1.596.632.208,00 | |
| | 4 | 01 | 02 | 1.02 | 0001 | Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | | 12 Dokumen | 205.230.518,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | instansi pemerintah | | 638.143.110,00 | BIRO ORGANISASI |
| | 4 | 01 | 02 | 1.02 | 0002 | Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | | | | 12 Dokumen | 159.892.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | instansi pemerintah | | 328.206.208,00 | BIRO ORGANISASI |
| | 4 | 01 | 02 | 1.02 | 0003 | Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja | | | | 27 Laporan | 207.800.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Sumber Daya Manusia | instansi pemerintah | | 228.590.780,00 | BIRO ORGANISASI |
| | 4 | 01 | 02 | 1.02 | 0004 | Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan | | | | 33 Dokumen | 213.961.717,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | instansi pemerintah | | 85.012.090,00 | BIRO ORGANISASI |
| | 4 | 01 | 02 | 1.02 | 0005 | Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik | | | | 12 Dokumen | 358.960.800,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | instansi pemerintah | | 316.680.020,00 | BIRO ORGANISASI |
| | | | | | | Biro Umum | | | | | | 99.646.703.000,00 | | | | | | | 121.545.183.000,00 | |
| | 4 | | | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 99.646.703.000,00 | | | | | | | 121.542.183.000,00 | |
| | 4 | 01 | | | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | 99.646.703.000,00 | | | | | | | 121.542.183.000,00 | |
| 465 | 4 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai Sakip PD Setda<br>Survey Kepuasan Pelayanan Internal PD Setda | 85%<br>79Nilai | | | 78 Nilai<br>83 % | 99.646.703.000,00 | | | | | | 84%<br>78,5Nilai | 121.542.183.000,00 | |
| | 4 | 01 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Pelayanan Keuangan Setda | - | | | 83 % | 48.616.000.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Meningkatkan Pelayanan keuangan Setda | - | 51.555.431.894,00 | |
| | 4 | 01 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 285 Orang/ Bulan | 48.525.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Meningkatkan Pelayanan keuangan Setda | | 51.398.615.894,00 | BIRO UMUM |
| | 4 | 01 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 0 Dokumen | 0,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | Meningkatkan Pelayanan keuangan Setda | | 0,00 | BIRO UMUM |
| | 4 | 01 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 1 Laporan | 91.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Meningkatkan Pelayanan keuangan Setda | | 121.000.000,00 | BIRO UMUM |
| | 4 | 01 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 18 Laporan | 0,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Meningkatkan Pelayanan keuangan Setda | | 35.816.000,00 | BIRO UMUM |
| | 4 | 01 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Pelayanan Rumah Tangga dan Protokol | - | | | 83 % | 260.000.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Meningkatkan pelayanan Perlengkapan Setda | - | 215.622.000,00 | |
| | 4 | 01 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 12 Laporan | 260.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Meningkatkan pelayanan Perlengkapan Setda | | 215.622.000,00 | BIRO UMUM |
| | 4 | 01 | 01 | 1.04 | | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 0,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 7.000.000,00 | |
| | 4 | 01 | 01 | 1.04 | 0004 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 3.500.000,00 | BIRO UMUM |
| | 4 | 01 | 01 | 1.04 | 0005 | Pengolahan Data Retribusi Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah | | | | 1 Laporan | 0,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 3.500.000,00 | BIRO UMUM |
| | 4 | 01 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Pelayanan Rumah Tangga dan Protokol | - | | | 83 % | 871.000.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Meningkatkan Pelayanan Internal Setda | - | 1.222.100.000,00 | |
| | 4 | 01 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 540.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Meningkatkan Pelayanan Internal Setda | | 605.000.000,00 | BIRO UMUM |
| | 4 | 01 | 01 | 1.05 | 0006 | Pemulangan Pegawai yang Pensiun | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan | | | | 0 Orang | 0,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | Meningkatkan Pelayanan Internal Setda | | 0,00 | BIRO UMUM |
| | 4 | 01 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 20 Orang | 120.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Meningkatkan Pelayanan Internal Setda | | 181.500.000,00 | BIRO UMUM |
| | 4 | 01 | 01 | 1.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 20 Orang | 90.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Meningkatkan Pelayanan Internal Setda | | 181.500.000,00 | BIRO UMUM |
| | 4 | 01 | 01 | 1.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 10 Orang | 121.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Meningkatkan Pelayanan Internal Setda | | 254.100.000,00 | BIRO UMUM |
| | 4 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Pelayanan Keuangan Setda<br>Indeks Kepuasan Pelayanan Rumah Tangga dan Protokol | - | | | 83 %<br>83 % | 16.116.400.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Meningkatkan Pelayanan Rumah Tangga Setda | - | 20.254.138.273,00 | |
| | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 12 Paket | 641.050.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Meningkatkan Pelayanan Rumah Tangga Setda | | 786.500.000,00 | BIRO UMUM |
| | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 12 Paket | 165.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Meningkatkan Pelayanan Rumah Tangga Setda | | 242.000.000,00 | BIRO UMUM |
| | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 189.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Meningkatkan Pelayanan Rumah Tangga Setda | | 229.900.000,00 | BIRO UMUM |
| | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 Paket | 64.350.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Meningkatkan Pelayanan Rumah Tangga Setda | | 108.900.000,00 | BIRO UMUM |
| | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 Paket | 357.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Meningkatkan Pelayanan Rumah Tangga Setda | | 544.500.000,00 | BIRO UMUM |
| | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 12 Dokumen | 125.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Meningkatkan Pelayanan Rumah Tangga Setda | | 217.800.000,00 | BIRO UMUM |
| | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 12 Paket | 875.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Meningkatkan Pelayanan Rumah Tangga Setda | | 1.028.500.000,00 | BIRO UMUM |
| | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 12 Laporan | 7.700.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Meningkatkan Pelayanan Rumah Tangga Setda | | 9.836.038.273,00 | BIRO UMUM |
| | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 6.000.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Meningkatkan Pelayanan Rumah Tangga Setda | | 7.260.000.000,00 | BIRO UMUM |
| | 4 | 01 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Survey Kepuasan Pelayanan Perlengkapan | - | | | 83 % | 5.058.172.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Meningkatkan pelayanan Perlengkapan Setda | - | 8.975.477.500,00 | |
| | 4 | 01 | 01 | 1.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | | | | 3 Unit | 702.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Meningkatkan pelayanan Perlengkapan Setda | | 1.089.000.000,00 | BIRO UMUM |
| | 4 | 01 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 4 Unit | 964.572.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Meningkatkan pelayanan Perlengkapan Setda | | 3.968.800.000,00 | BIRO UMUM |
| | 4 | 01 | 01 | 1.07 | 0004 | Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan | | | | 4 Unit | 33.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Meningkatkan pelayanan Perlengkapan Setda | | 36.300.000,00 | BIRO UMUM |
| | 4 | 01 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 3 Paket | 352.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Meningkatkan pelayanan Perlengkapan Setda | | 389.620.000,00 | BIRO UMUM |
| | 4 | 01 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 50 Unit | 1.400.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Meningkatkan pelayanan Perlengkapan Setda | | 1.628.357.500,00 | BIRO UMUM |
| | 4 | 01 | 01 | 1.07 | 0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | | | | 5 Unit | 28.600.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Meningkatkan pelayanan Perlengkapan Setda | | 48.400.000,00 | BIRO UMUM |
| | 4 | 01 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 475.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Meningkatkan pelayanan Perlengkapan Setda | | 544.500.000,00 | BIRO UMUM |
| | 4 | 01 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 3 Unit | 793.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Meningkatkan pelayanan Perlengkapan Setda | | 891.770.000,00 | BIRO UMUM |
| | 4 | 01 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 3 Unit | 310.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Meningkatkan pelayanan Perlengkapan Setda | | 378.730.000,00 | BIRO UMUM |
| | 4 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indeks Kepuasan Pelayanan Rumah Tangga dan Protokol | - | | | 83 % | 13.336.500.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Meningkatkan Pelayanan Internal Setda | - | 17.352.005.000,00 | |
| | 4 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 33.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Meningkatkan Pelayanan Internal Setda | | 49.005.000,00 | BIRO UMUM |
| | 4 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 3.700.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Meningkatkan Pelayanan Internal Setda | | 5.445.000.000,00 | BIRO UMUM |
| | 4 | 01 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 1.875.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Meningkatkan Pelayanan Internal Setda | | 2.420.000.000,00 | BIRO UMUM |
| | 4 | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 7.728.500.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Meningkatkan Pelayanan Internal Setda | | 9.438.000.000,00 | BIRO UMUM |
| | 4 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indeks Kepuasan Pelayanan Perlengkapan | - | | | 83 % | 8.945.380.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Meningkatkan pelayanan Perlengkapan Setda | - | 11.573.952.500,00 | |
| | 4 | 01 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | | | | 16 Unit | 898.680.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Meningkatkan pelayanan Perlengkapan Setda | | 1.086.223.655,00 | BIRO UMUM |
| | 4 | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 83 Unit | 2.400.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Meningkatkan pelayanan Perlengkapan Setda | | 3.186.981.672,00 | BIRO UMUM |
| | 4 | 01 | 01 | 1.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | | | | 120 Unit | 128.700.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Meningkatkan pelayanan Perlengkapan Setda | | 217.800.000,00 | BIRO UMUM |
| | 4 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 55 Unit | 758.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Meningkatkan pelayanan Perlengkapan Setda | | 1.084.070.151,00 | BIRO UMUM |
| | 4 | 01 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 6 Unit | 3.452.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Meningkatkan pelayanan Perlengkapan Setda | | 4.372.600.722,00 | BIRO UMUM |
| | 4 | 01 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 6 Unit | 1.058.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Meningkatkan pelayanan Perlengkapan Setda | | 1.323.776.300,00 | BIRO UMUM |
| | 4 | 01 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 4 Unit | 250.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Meningkatkan pelayanan Perlengkapan Setda | | 302.500.000,00 | BIRO UMUM |
| | 4 | 01 | 01 | 1.09 | 0012 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi | | | | 0 Ha | 0,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | Meningkatkan pelayanan Perlengkapan Setda | | 0,00 | BIRO UMUM |
| | 4 | 01 | 01 | 1.11 | | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Indeks Kepuasan Pelayanan Keuangan Setda | - | | | 83 % | 1.605.000.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Meningkatkan Pelayanan keuangan Setda | - | 1.881.078.458,00 | |
| | 4 | 01 | 01 | 1.11 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | 14 Orang/Bulan | 224.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Meningkatkan Pelayanan keuangan Setda | | 168.928.458,00 | BIRO UMUM |
| | 4 | 01 | 01 | 1.11 | 0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | | | | 2 Paket | 93.500.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Meningkatkan Pelayanan keuangan Setda | | 102.850.000,00 | BIRO UMUM |
| | 4 | 01 | 01 | 1.11 | 0003 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | 6 Orang | 37.500.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Meningkatkan Pelayanan keuangan Setda | | 96.800.000,00 | BIRO UMUM |
| | 4 | 01 | 01 | 1.11 | 0004 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | 12 Orang/ Bulan | 1.250.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Meningkatkan Pelayanan keuangan Setda | | 1.512.500.000,00 | BIRO UMUM |
| | 4 | 01 | 01 | 1.12 | | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Indeks Kepuasan Pelayanan Rumah Tangga dan Protokol | - | | | 83 % | 2.338.251.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Meningkatkan Pelayanan Rumah Tangga Setda | - | 2.305.337.375,00 | |
| | 4 | 01 | 01 | 1.12 | 0001 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | | | | 12 Paket | 966.900.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Meningkatkan Pelayanan Rumah Tangga Setda | | 1.063.590.000,00 | BIRO UMUM |
| | 4 | 01 | 01 | 1.12 | 0002 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | | | | 12 Paket | 233.351.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Meningkatkan Pelayanan Rumah Tangga Setda | | 256.686.375,00 | BIRO UMUM |
| | 4 | 01 | 01 | 1.12 | 0003 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan | | | | 12 Paket | 1.138.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Meningkatkan Pelayanan Rumah Tangga Setda | | 985.061.000,00 | BIRO UMUM |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.13 | | Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan | Indeks Kepuasan Pelayanan Rumah Tangga dan Protokol | - | | | 83 % | 1.200.000.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Meningkatkan Pelayanan Protokol Setda | - | 2.286.900.000,00 | |
| | 4 | 01 | 01 | 1.13 | 0001 | Penyiapan Materi Pimpinan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan | | | | 12 Dokumen | 0,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Meningkatkan Pelayanan Protokol Setda | | 157.300.000,00 | BIRO UMUM |
| | 4 | 01 | 01 | 1.13 | 0002 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | | | | 12 Laporan | 1.200.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Meningkatkan Pelayanan Protokol Setda | | 1.403.600.000,00 | BIRO UMUM |
| | 4 | 01 | 01 | 1.13 | 0003 | Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan | | | | 12 Laporan | 0,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Meningkatkan Pelayanan Protokol Setda | | 726.000.000,00 | BIRO UMUM |
| | 4 | 01 | 01 | 1.14 | | Fasilitasi Keprotokolan | Indeks Kepuasan Pelayanan Rumah Tangga dan Protokol | - | | | 83 % | 1.300.000.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Meningkatkan Pelayanan Protokol Setda | - | 3.913.140.000,00 | |
| | 4 | 01 | 01 | 1.14 | 0001 | Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara | | | | 12 Laporan | 100.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Meningkatkan Pelayanan Protokol Setda | | 1.210.000.000,00 | BIRO UMUM |
| | 4 | 01 | 01 | 1.14 | 0002 | Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | 12 Laporan | 0,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Meningkatkan Pelayanan Protokol Setda | | 968.000.000,00 | BIRO UMUM |
| | 4 | 01 | 01 | 1.14 | 0003 | Pengelolaan Hubungan Keprotokolan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan | | | | 12 Laporan | 1.200.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Pemerintahan | Meningkatkan Pelayanan Protokol Setda | | 1.735.140.000,00 | BIRO UMUM |
| | X | | | | | NON URUSAN | | | | | | 0,00 | | | | | | | 3.000.000,00 | |
| | X | XX | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX | | | | | | 0,00 | | | | | | | 3.000.000,00 | |
| 466 | X | XX | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai Sakip PD Setda<br>Survey Kepuasan Pelayanan Internal PD Setda | 85%<br>79Nilai | | | 78 Nilai<br>83 % | 0,00 | | | | | | 84%<br>78,5Nilai | 3.000.000,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Pelayanan Keuangan Setda | - | | | 83 % | 0,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 0,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 0 Dokumen | 0,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | BIRO UMUM |
| | X | XX | 01 | 1.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | 0 Dokumen | 0,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | BIRO UMUM |
| | X | XX | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | 0 Dokumen | 0,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | BIRO UMUM |
| | X | XX | 01 | 1.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | 0 Dokumen | 0,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | BIRO UMUM |
| | X | XX | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Pelayanan Rumah Tangga dan Protokol | - | | | 83 % | 0,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 0,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 0 Dokumen | 0,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | BIRO UMUM |
| | X | XX | 01 | 1.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 0 Dokumen | 0,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | BIRO UMUM |
| | X | XX | 01 | 1.03 | 0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | | | 0 Laporan | 0,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | BIRO UMUM |
| | X | XX | 01 | 1.03 | 0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 0 Laporan | 0,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | BIRO UMUM |
| | X | XX | 01 | 1.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 0 Laporan | 0,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | BIRO UMUM |
| | X | XX | 01 | 1.03 | 0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 0 Dokumen | 0,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | BIRO UMUM |
| | X | XX | 01 | 1.04 | | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 0,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 3.000.000,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.04 | 0001 | Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah | | | | 0 Dokumen | 0,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | BIRO UMUM |
| | X | XX | 01 | 1.04 | 0002 | Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah | | | | 0 Dokumen | 0,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | BIRO UMUM |
| | X | XX | 01 | 1.04 | 0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah | | | | 0 Laporan | 0,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | BIRO UMUM |
| | X | XX | 01 | 1.04 | 0006 | Penetapan Wajib Retribusi Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah | | | | 0 Dokumen | 0,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | BIRO UMUM |
| | X | XX | 01 | 1.04 | 0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | | 1 Laporan | 0,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 3.000.000,00 | BIRO UMUM |
| | X | XX | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Pelayanan Rumah Tangga dan Protokol | - | | | 83 % | 0,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 0,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.05 | 0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | 0 Unit | 0,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | BIRO UMUM |
| | X | XX | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 0 Dokumen | 0,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | BIRO UMUM |
| | X | XX | 01 | 1.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | 0 Dokumen | 0,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | BIRO UMUM |
| | X | XX | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | 0 Dokumen | 0,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | BIRO UMUM |
| | X | XX | 01 | 1.05 | 0007 | Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas | | | | 0 Laporan | 0,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | BIRO UMUM |
| | X | XX | 01 | 1.05 | 0008 | Pemindahan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan | | | | 0 Orang | 0,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | BIRO UMUM |
| | X | XX | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Pelayanan Keuangan Setda<br>Indeks Kepuasan Pelayanan Rumah Tangga dan Protokol | - | | | 83 %<br>83 % | 0,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 0,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 0 Dokumen | 0,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | BIRO UMUM |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 0 Dokumen | 0,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | BIRO UMUM |
| | X | XX | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Survey Kepuasan Pelayanan Perlengkapan | - | | | 83 % | 0,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 0,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.07 | 0003 | Pengadaan Alat Besar | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan | | | | 0 Unit | 0,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | BIRO UMUM |
| | X | XX | 01 | 1.07 | 0008 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | | | | 0 Unit | 0,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | BIRO UMUM |
| | X | XX | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indeks Kepuasan Pelayanan Perlengkapan | - | | | 83 % | 0,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 0,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.09 | 0003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya | | | | 0 Unit | 0,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | BIRO UMUM |
| | X | XX | 01 | 1.09 | 0004 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya | | | | 0 Unit | 0,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | BIRO UMUM |
| | X | XX | 01 | 1.09 | 0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | | | | 0 Unit | 0,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | BIRO UMUM |
| | X | XX | 01 | 1.09 | 0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | | | | 0 Unit | 0,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | BIRO UMUM |
| | | | | | | SEKRETARIAT DPRD | | | | | | 128.078.442.065,00 | | | | | | | 173.717.952.914,00 | |
| | 4 | | | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 128.078.442.065,00 | | | | | | | 173.717.952.914,00 | |
| | 4 | 02 | | | | SEKRETARIAT DPRD | | | | | | 128.078.442.065,00 | | | | | | | 173.717.952.914,00 | |
| 467 | 4 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai Sakip PD | - | | | 79 Nilai | 71.337.558.389,00 | | | | | | - | 80.218.972.188,00 | |
| | 4 | 02 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi | - | | | 25 Dokumen | 735.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 771.750.000,00 | |
| | 4 | 02 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 2 Dokumen | 105.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 110.250.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4 | 02 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 105.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 110.250.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4 | 02 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 105.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 110.250.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4 | 02 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 105.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 110.250.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4 | 02 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 105.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 110.250.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4 | 02 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 12 Laporan | 105.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 110.250.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4 | 02 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 7 Laporan | 105.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 110.250.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4 | 02 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal | - | | | 92 Nilai | 10.545.055.732,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 11.188.166.978,00 | |
| | 4 | 02 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 80 Orang/ Bulan | 10.545.055.732,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 11.188.166.978,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4 | 02 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal | - | | | 92 Nilai | 646.177.600,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 723.625.975,00 | |
| | 4 | 02 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | | | | 76 Paket | 261.177.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 295.690.500,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4 | 02 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 20 Orang | 205.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 226.453.500,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4 | 02 | 01 | 1.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 20 Orang | 180.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 201.481.975,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4 | 02 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Pelayanan Umum | - | | | 92 % | 3.051.701.800,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 3.570.576.368,00 | |
| | 4 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 170.367.200,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 187.885.974,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 191.549.100,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 211.431.938,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4 | 02 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 2 Paket | 66.969.200,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 73.855.284,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 3 Paket | 411.215.700,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 453.581.157,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 44148 Dokumen | 420.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 463.050.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4 | 02 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 2 Paket | 555.606.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 648.274.965,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4 | 02 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 100 Laporan | 785.994.100,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 866.565.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 24 Laporan | 450.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 665.932.050,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4 | 02 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Barang Milik daerah yang diadakan | - | | | 9 Unit | 6.556.948.138,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 3.958.245.612,00 | |
| | 4 | 02 | 01 | 1.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | | | | 4 Unit | 2.900.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 1.000.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4 | 02 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 4 Unit | 3.150.228.138,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 2.395.970.612,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4 | 02 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 506.720.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 562.275.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4 | 02 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indeks Kepuasan Pelayanan Umum | - | | | 92 Nilai | 9.501.190.000,00 | | | - | - | - | - | 10.695.307.257,00 | |
| | 4 | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2 Laporan | 43.340.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 110.608.313,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 669.525.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 890.379.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4 | 02 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 2 Laporan | 224.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 252.139.504,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 9 Laporan | 8.564.325.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 9.442.180.440,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4 | 02 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah yang Dipelihara | - | | | 3 Jenis | 3.101.075.500,00 | | | - | - | - | - | 4.239.652.725,00 | |
| | 4 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 17 Unit | 602.085.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 665.898.975,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4 | 02 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 3 Unit | 921.290.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 1.017.056.250,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1.577.700.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 2.556.697.500,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4 | 02 | 01 | 1.15 | | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | Indeks Kepuasan Pelayanan Keuangan | - | | | 92 Nilai | 37.200.409.619,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 45.071.647.273,00 | |
| | 4 | 02 | 01 | 1.15 | 0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD | | | | 45 Orang/ Bulan | 36.477.709.619,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 44.223.659.398,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4 | 02 | 01 | 1.15 | 0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan | | | | 270 Paket | 497.700.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 599.925.375,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4 | 02 | 01 | 1.15 | 0003 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD | | | | 45 Orang | 225.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 248.062.500,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| 468 | 4 | 02 | 02 | | | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Persentase Peningkatan Fungsi Lembaga DPRD | 82%<br>82%<br>92Nilai<br>79nilai | | | 82 % | 56.740.883.676,00 | | | | | | 82%<br>82%<br>92Nilai<br>79nilai | 93.498.980.726,00 | |
| | 4 | 02 | 02 | 1.01 | | Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD | Jumlah Produk Hukum Daerah dan Pendukung Produk Hukum yang ditetapkan | - | | | 21 Dokumen | 7.166.420.796,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 19.075.826.544,00 | |
| | 4 | 02 | 02 | 1.01 | 0001 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | | | | 6 Dokumen | 514.715.056,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 2.245.185.023,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4 | 02 | 02 | 1.01 | 0002 | Pembahasan Rancangan Perda | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda | | | | 8 Dokumen | 5.823.373.740,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 15.459.337.688,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4 | 02 | 02 | 1.01 | 0003 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan | | | | 3 Dokumen | 278.122.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 328.473.338,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4 | 02 | 02 | 1.01 | 0004 | Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi | | | | 3 Dokumen | 550.210.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 1.042.830.495,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4 | 02 | 02 | 1.02 | | Pembahasan Kebijakan Anggaran | Jumlah Kebijakan Anggaran yang Dibahas | - | | | 6 Dokumen | 843.285.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 2.573.965.945,00 | |
| | 4 | 02 | 02 | 1.02 | 0001 | Pembahasan KUA dan PPAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS | | | | 1 Dokumen | 136.990.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 438.821.248,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4 | 02 | 02 | 1.02 | 0002 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | | 1 Dokumen | 103.318.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 438.821.248,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4 | 02 | 02 | 1.02 | 0003 | Pembahasan APBD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD | | | | 1 Dokumen | 190.173.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 438.821.248,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4 | 02 | 02 | 1.02 | 0004 | Pembahasan Perubahan APBD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD | | | | 1 Dokumen | 146.579.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 438.821.248,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4 | 02 | 02 | 1.02 | 0005 | Pembahasan Laporan Semester | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester | | | | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 379.859.705,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4 | 02 | 02 | 1.02 | 0006 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | | | | 1 Dokumen | 166.225.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 438.821.248,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4 | 02 | 02 | 1.03 | | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | - | | | 121 Laporan | 33.636.950.200,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 39.700.139.064,00 | |
| | 4 | 02 | 02 | 1.03 | 0001 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | | | | 24 Laporan | 19.470.653.200,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 20.455.207.763,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4 | 02 | 02 | 1.03 | 0002 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | | | | 24 Laporan | 2.758.350.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 4.246.619.423,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4 | 02 | 02 | 1.03 | 0003 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | | | | 24 Laporan | 4.507.998.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 5.989.392.990,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4 | 02 | 02 | 1.03 | 0004 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | | | | 24 Laporan | 4.802.168.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 6.284.433.015,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4 | 02 | 02 | 1.03 | 0005 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | | | | 12 Laporan | 1.698.395.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 1.745.844.030,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4 | 02 | 02 | 1.03 | 0006 | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | | | | 1 Dokumen | 171.583.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 293.182.313,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4 | 02 | 02 | 1.03 | 0007 | Pengawasan Penggunaan Anggaran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran | | | | 12 Dokumen | 227.803.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 685.459.530,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4 | 02 | 02 | 1.04 | | Peningkatan Kapasitas DPRD | Jumlah pimpinan dan anggota DPRD yang terfasilitasi | - | | | 112 Orang | 4.981.157.280,00 | | | - | - | - | - | 5.228.448.677,00 | |
| | 4 | 02 | 02 | 1.04 | 0002 | Pendalaman Tugas DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD | | | | 90 Dokumen | 1.300.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4 | 02 | 02 | 1.04 | 0004 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli | | | | 7 Orang | 442.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 551.801.250,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4 | 02 | 02 | 1.04 | 0005 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi | | | | 7 Orang | 416.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 480.138.750,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4 | 02 | 02 | 1.04 | 0008 | Publikasi dan Dokumentasi DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD | | | | 8 Dokumen | 2.823.157.280,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 4.196.508.677,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4 | 02 | 02 | 1.05 | | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Jumlah Laporan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang Tersusun | - | | | 3 Laporan | 4.620.080.100,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 10.089.714.788,00 | |
| | 4 | 02 | 02 | 1.05 | 0002 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun | | | | 450 Dokumen | 150.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 165.375.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4 | 02 | 02 | 1.05 | 0003 | Pelaksanaan Reses | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses | | | | 3 Dokumen | 4.470.080.100,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 9.924.339.788,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4 | 02 | 02 | 1.06 | | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | Jumlah laporan kinerja Badan Kehormatan | - | | | 9 Dokumen | 271.590.300,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 487.602.108,00 | |
| | 4 | 02 | 02 | 1.06 | 0001 | Penyusunan Kode Etik DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD | | | | 2 Dokumen | 164.661.400,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 355.302.108,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4 | 02 | 02 | 1.06 | 0002 | Pengawasan Kode Etik DPRD | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD | | | | 6 Laporan | 106.928.900,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 132.300.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4 | 02 | 02 | 1.08 | | Fasilitasi Tugas DPRD | Jumlah kegiatan DPRD yang terfasilitasi | - | | | 72 Kegiatan | 5.221.400.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 16.343.283.600,00 | |
| | 4 | 02 | 02 | 1.08 | 0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | | | | 6 Dokumen | 650.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 1.140.373.080,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4 | 02 | 02 | 1.08 | 0004 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | | | | 240 Dokumen | 4.571.400.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 15.202.910.520,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | | | | | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH | | | | | | 26.470.548.455,00 | | | | | | | 23.123.799.700,00 | |
| | 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 26.470.548.455,00 | | | | | | | 23.123.799.700,00 | |
| | 5 | 01 | | | | PERENCANAAN | | | | | | 24.880.548.455,00 | | | | | | | 21.115.799.700,00 | |
| 469 | 5 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Survey Kepuasan Pelayanan Internal (BAPPEDA)<br>Nilai Sakip PD (Bappeda) | 82Nilai<br>83.35Nilai | | | 80 Nilai<br>83.33 Nilai | 20.147.948.863,00 | | | | | | 80Nilai<br>83.35Nilai | 17.567.200.000,00 | |
| | 5 | 01 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | 31 Dokumen | 161.991.000,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Pemerintahan | Pegawai Bappeda | - | 205.000.000,00 | |
| | 5 | 01 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 2 Dokumen | 70.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Pemerintahan | Pegawai Bappeda | | 80.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 4.989.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Pemerintahan | Pegawai Bappeda | | 5.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 4.989.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Pemerintahan | Pegawai Bappeda | | 5.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 4.989.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Pemerintahan | Pegawai Bappeda | | 5.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 4.989.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Pemerintahan | Pegawai Bappeda | | 5.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 12 Laporan Laporan | 2.035.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Pemerintahan | Pegawai Bappeda | | 5.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 9 Laporan | 70.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Pemerintahan | Pegawai Bappeda | | 100.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Pelayanan Keuangan | - | | | 80 Nilai | 12.795.118.608,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Pemerintahan | Pegawai Bappeda | - | 13.020.000.000,00 | |
| | 5 | 01 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 75 Orang/ Bulan | 12.780.121.908,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Pemerintahan | Pegawai Bappeda | | 13.000.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 1 Laporan | 4.999.700,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Pemerintahan | Pegawai Bappeda | | 5.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 13 Laporan | 5.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Pemerintahan | Pegawai Bappeda | | 10.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 01 | 1.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | 1 Dokumen | 4.997.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Pemerintahan | Pegawai Bappeda | | 5.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah BMD yang Teradminitrasi Sesuai dengan Peraturan | - | | | 403 Unit | 2.000.000,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Pemerintahan | Pegawai Bappeda | - | 5.000.000,00 | |
| | 5 | 01 | 01 | 1.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 2 Dokumen | 2.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Pemerintahan | Pegawai Bappeda | | 5.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Indeks kepuasan pelayanan kepegawaian | - | | | 80 Nilai | 212.809.300,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Pemerintahan | Pegawai Bappeda | - | 200.000.000,00 | |
| | 5 | 01 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 25 Orang | 212.809.300,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Pemerintahan | Pegawai Bappeda | | 200.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Pelayanan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan | - | | | 80 Nilai | 1.866.834.875,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Pemerintahan | Pegawai Bappeda | - | 1.800.000.000,00 | |
| | 5 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 50.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Pemerintahan | Pegawai Bappeda | | 50.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 198.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Pemerintahan | Pegawai Bappeda | | 250.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 2 Paket | 70.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Pemerintahan | Pegawai Bappeda | | 70.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 5 Paket | 450.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Pemerintahan | Pegawai Bappeda | | 450.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 4 Paket | 198.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Pemerintahan | Pegawai Bappeda | | 190.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Pemerintahan | Pegawai Bappeda | | 50.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 1 Paket | 52.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Pemerintahan | Pegawai Bappeda | | 40.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 250 Laporan | 798.834.875,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Pemerintahan | Pegawai Bappeda | | 700.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan | - | | | 17 Unit | 703.983.080,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Pemerintahan | Pegawai Bappeda | - | 300.000.000,00 | |
| | 5 | 01 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 93 Unit | 703.983.080,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Pemerintahan | Pegawai Bappeda | | 300.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | 3 Laporan | 1.253.200.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | Pegawai Bappeda | - | 1.257.200.000,00 | |
| | 5 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 40.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | Pegawai Bappeda | | 40.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 221.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | Pegawai Bappeda | | 225.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 992.200.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Pemerintahan | Pegawai Bappeda | | 992.200.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintan Daerah Yang dipelihara | - | | | 231 Unit | 3.152.012.000,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Pemerintahan | Pegawai Bappeda | - | 780.000.000,00 | |
| | 5 | 01 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | | | | 5 Unit | 178.012.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Pemerintahan | Pegawai Bappeda | | 180.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 210 Unit | 349.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Pemerintahan | Pegawai Bappeda | | 250.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 2.625.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Pemerintahan | Pegawai Bappeda | | 350.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| 470 | 5 | 01 | 02 | | | PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase Konsistensi Program Pembangunan di RKPD dengan RPJMD dan Renstra dengan RPJMD<br>Persentase Rumusan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti | 100%<br>80% | | | 100 %<br>75 % | 3.572.599.700,00 | | | | | | 100%<br>80% | 2.322.599.700,00 | |
| | 5 | 01 | 02 | 1.01 | | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun | - | | | 6 Dokumen | 2.856.974.100,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Pemerintahan | Stakeholder dan Pegawai | - | 1.606.974.100,00 | |
| | 5 | 01 | 02 | 1.01 | 0001 | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik) | | | | 1 Dokumen | 72.359.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Pemerintahan | Stakeholder dan Pegawai | | 72.359.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 02 | 1.01 | 0002 | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | 1 Dokumen | 286.501.100,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Pemerintahan | Stakeholder dan Pegawai | | 286.501.100,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 02 | 1.01 | 0003 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik | | | | 1 Berita Acara | 88.106.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Pemerintahan | Stakeholder dan Pegawai | | 88.106.800,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 02 | 1.01 | 0004 | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | | | | 1 Berita Acara | 170.800.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Pemerintahan | Stakeholder dan Pegawai | | 170.800.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 02 | 1.01 | 0005 | Pelaksanaan Musrenbang Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi | | | | 1 Berita Acara | 303.107.200,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Pemerintahan | Stakeholder dan Pegawai | | 303.107.200,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 02 | 1.01 | 0006 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) | | | | 4 Dokumen | 1.936.100.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Pemerintahan | Stakeholder dan Pegawai | | 686.100.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 02 | 1.02 | | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah<br>Jumlah Laporan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | - | | | 1 Laporan<br>1 Laporan | 130.809.800,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Pemerintahan | Stakeholder dan Pegawai | - | 130.809.800,00 | |
| | 5 | 01 | 02 | 1.02 | 0001 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | | | | 1 Dokumen | 32.909.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Pemerintahan | Stakeholder dan Pegawai | | 32.909.800,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 02 | 1.02 | 0002 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi | | | | 80 Orang | 57.700.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Pemerintahan | Stakeholder dan Pegawai | | 57.700.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 02 | 1.02 | 0003 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | 40 Orang | 40.200.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Pemerintahan | Stakeholder dan Pegawai | | 40.200.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 02 | 1.03 | | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah laporan pengendaian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah | - | | | 22 Laporan | 291.789.600,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Pemerintahan | Stakeholder dan Pegawai | - | 291.789.600,00 | |
| | 5 | 01 | 02 | 1.03 | 0001 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan | | | | 4 Laporan | 130.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Pemerintahan | Stakeholder dan Pegawai | | 130.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 02 | 1.03 | 0003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah | | | | 4 Laporan | 98.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Pemerintahan | Stakeholder dan Pegawai | | 98.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 02 | 1.03 | 0004 | Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi | | | | 14 Dokumen | 63.789.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Pemerintahan | Stakeholder dan Pegawai | | 63.789.600,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 02 | 1.04 | | Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Sistem Informasi di Bidang Pembangunan Daerah yang implementasikan | - | | | 3 Laporan | 293.026.200,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Pemerintahan | Stakeholder dan Pegawai | - | 293.026.200,00 | |
| | 5 | 01 | 02 | 1.04 | 0001 | Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola | | | | 1 Dokumen | 118.531.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Pemerintahan | Stakeholder dan Pegawai | | 118.531.800,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 02 | 1.04 | 0002 | Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | | | | 1 Dokumen | 122.449.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Pemerintahan | Stakeholder dan Pegawai | | 122.449.800,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 02 | 1.04 | 0003 | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi | | | | 1 Dokumen | 52.044.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Pemerintahan | Stakeholder dan Pegawai | | 52.044.600,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 471 | 5 | 01 | 03 | | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam<br>Persentase Rumusan Hasil Pengendalian dan Evaluasi pada Dokumen Perencanaan PD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan<br>Persentase Rumusan Hasil Pengendalian dan Evaluasi pada Dokumen Perencanaan PD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam<br>Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan<br>Persentase Rumusan Hasil Pengendalian dan Evaluasi pada Dokumen Perencanaan PD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia<br>Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 90%<br>100%<br>100%<br>100%<br>90%<br>90% | | | 100 %<br>90 %<br>90 %<br>100 %<br>90 %<br>100 % | 1.159.999.892,00 | | | | | | 90%<br>100%<br>100%<br>100%<br>90%<br>90% | 1.226.000.000,00 | |
| | 5 | 01 | 03 | 1.01 | | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Mitra Sub Bidang Pembangunan Manusia<br>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Mitra Sub Bidang Pemerintahan<br>Jumlah Laporan Hasil Monev Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Mitra Sub Bidang Pembangunan Manusia<br>Jumlah Laporan Hasil Monev Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Mitra Sub Bidang Pemerintahan | - | | | 26 Laporan<br>21 Laporan<br>10 Laporan<br>10 Laporan | 359.999.892,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | Stakeholder dan Pegawai | - | 386.000.000,00 | |
| | 5 | 01 | 03 | 1.01 | 0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | 20 Dokumen | 41.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | Stakeholder dan Pegawai | | 50.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 03 | 1.01 | 0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | 20 Dokumen | 72.277.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | Stakeholder dan Pegawai | | 80.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 03 | 1.01 | 0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | 40 Laporan | 40.574.044,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | Stakeholder dan Pegawai | | 45.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 03 | 1.01 | 0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia | | | | 6 Laporan | 206.148.848,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | Stakeholder dan Pegawai | | 211.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5 | 01 | 03 | 1.02 | | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Mitra Sub Bidang Perekonomian<br>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Mitra Sub Bidang Sumber Daya Alam (SDA)<br>Jumlah Laporan Hasil Monev Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Mitra Sub Bidang Perekonomian<br>Jumlah Laporan Hasil Monev Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Mitra Sub Bidang Sumber Daya Alam (SDA) | - | | | 17 Laporan<br>13 Laporan<br>8 Laporan<br>6 Laporan | 400.000.000,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Ekonomi | Stakeholder dan Pegawai | - | 400.000.000,00 | |
| | 5 | 01 | 03 | 1.02 | 0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | 16 Dokumen | 80.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Ekonomi | Stakeholder dan Pegawai | | 80.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 03 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | | | | 4 Laporan | 60.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Ekonomi | Stakeholder dan Pegawai | | 60.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 03 | 1.02 | 0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian | | | | 2 Laporan | 60.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Ekonomi | Stakeholder dan Pegawai | | 60.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 03 | 1.02 | 0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | 16 Dokumen | 60.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | Stakeholder dan Pegawai | | 60.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 03 | 1.02 | 0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | | | | 4 Laporan | 80.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Ekonomi | Stakeholder dan Pegawai | | 80.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 03 | 1.02 | 0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA | | | | 2 Laporan | 60.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Ekonomi | Stakeholder dan Pegawai | | 60.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 03 | 1.03 | | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Mitra Sub Bidang Infrastruktur<br>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Mitra Sub Bidang Kewilayahan<br>Jumlah Laporan Hasil Monev Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Mitra Sub Bidang Infrastruktur<br>Jumlah Laporan Hasil Monev Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Mitra Sub Bidang Kewilayahan yang dilaksankan pada tahun tersebut | - | | | 7 Laporan<br>11 Laporan<br>3 Laporan<br>5 Laporan | 400.000.000,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Wilayah | Stakeholder dan Pegawai | - | 440.000.000,00 | |
| | 5 | 01 | 03 | 1.03 | 0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | 6 Dokumen | 99.600.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Wilayah | Stakeholder dan Pegawai | | 109.560.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 03 | 1.03 | 0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | | | | 12 Laporan | 134.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Wilayah | Stakeholder dan Pegawai | | 147.400.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 03 | 1.03 | 0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | 10 Dokumen | 72.800.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Wilayah | Stakeholder dan Pegawai | | 80.080.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 03 | 1.03 | 0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | | | | 20 Laporan | 93.600.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Wilayah | Stakeholder dan Pegawai | | 102.960.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5 | 05 | | | | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | | 1.494.000.000,00 | | | | | | | 1.895.000.000,00 | |
| 472 | 5 | 05 | 02 | | | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang digunakan Sebagai Bahan Perumusan Kebijakan<br>Persentase Jumlah Inovasi Daerah yang dikembangkan | 85%<br>80% | | | 80 %<br>80 % | 1.494.000.000,00 | | | | | | 80%<br>80% | 1.895.000.000,00 | |
| | 5 | 05 | 02 | 1.01 | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | Jumlah laporan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan | - | | | 4 Laporan | 210.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | Stakeholder dan Pegawai | - | 250.000.000,00 | |
| | 5 | 05 | 02 | 1.01 | 0012 | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola | | | | 1 Dokumen | 135.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | Stakeholder dan Pegawai | | 150.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5 | 05 | 02 | 1.01 | 0014 | Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan | | | | 1 Laporan | 75.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Pemerintahan | Stakeholder dan Pegawai | | 100.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5 | 05 | 02 | 1.02 | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | Jumlah laporan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan | - | | | 6 Laporan | 420.000.000,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Sumber Daya Manusia | Stakeholder dan Pegawai | - | 525.000.000,00 | |
| | 5 | 05 | 02 | 1.02 | 0001 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial | | | | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Sumber Daya Manusia | Stakeholder dan Pegawai | | 125.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5 | 05 | 02 | 1.02 | 0003 | Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan | | | | 1 Dokumen | 75.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Sumber Daya Manusia | Stakeholder dan Pegawai | | 100.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5 | 05 | 02 | 1.02 | 0005 | Penelitian dan Pengembangan Pariwisata | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata | | | | 1 Dokumen | 150.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Ekonomi | Stakeholder dan Pegawai | | 200.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5 | 05 | 02 | 1.02 | 0006 | Penelitian dan Pengembangan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan | | | | 1 Dokumen | 95.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Sumber Daya Manusia | Stakeholder dan Pegawai | | 100.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5 | 05 | 02 | 1.03 | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Jumlah laporan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan | - | | | 7 Laporan | 594.000.000,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Ekonomi | Stakeholder dan Pegawai | - | 770.000.000,00 | |
| | 5 | 05 | 02 | 1.03 | 0001 | Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | | | | 1 Dokumen | 76.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Ekonomi | Stakeholder dan Pegawai | | 100.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5 | 05 | 02 | 1.03 | 0002 | Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan | | | | 1 Dokumen | 125.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Ekonomi | Stakeholder dan Pegawai | | 150.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5 | 05 | 02 | 1.03 | 0004 | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | | | | 0 Dokumen | 150.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Ekonomi | Stakeholder dan Pegawai | | 200.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5 | 05 | 02 | 1.03 | 0005 | Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan | | | | 1 Dokumen | 81.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Ekonomi | Stakeholder dan Pegawai | | 100.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5 | 05 | 02 | 1.03 | 0006 | Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral | | | | 1 Dokumen | 81.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Ekonomi | Stakeholder dan Pegawai | | 100.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5 | 05 | 02 | 1.03 | 0007 | Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup | | | | 1 Dokumen | 81.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Lingkungan | Stakeholder dan Pegawai | | 120.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5 | 05 | 02 | 1.04 | | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Jumlah laporan pengembagan inovasi dan teknologi | - | | | 6 Laporan | 270.000.000,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Pemerintahan | Stakeholder dan Pegawai | - | 350.000.000,00 | |
| | 5 | 05 | 02 | 1.04 | 0003 | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | | | | 1 Laporan | 130.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Pemerintahan | Stakeholder dan Pegawai | | 150.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5 | 05 | 02 | 1.04 | 0004 | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | | | | 1 Laporan | 90.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Pemerintahan | Stakeholder dan Pegawai | | 125.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5 | 05 | 02 | 1.04 | 0005 | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | | | | 1 Laporan | 50.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Ekonomi | Stakeholder dan Pegawai | | 75.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5 | - | | | | - | | | | | | 96.000.000,00 | | | | | | | 113.000.000,00 | |
| 473 | 5 | - | 03 | | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam<br>Persentase Rumusan Hasil Pengendalian dan Evaluasi pada Dokumen Perencanaan PD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan<br>Persentase Rumusan Hasil Pengendalian dan Evaluasi pada Dokumen Perencanaan PD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam<br>Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan<br>Persentase Rumusan Hasil Pengendalian dan Evaluasi pada Dokumen Perencanaan PD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia<br>Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 90%<br>100%<br>100%<br>100%<br>90%<br>90% | | | 100 %<br>90 %<br>90 %<br>100 %<br>90 %<br>100 % | 96.000.000,00 | | | | | | 90%<br>100%<br>100%<br>100%<br>90%<br>90% | 113.000.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5 | - | 03 | 1.01 | | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Mitra Sub Bidang Pembangunan Manusia<br>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Mitra Sub Bidang Pemerintahan<br>Jumlah Laporan Hasil Monev Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Mitra Sub Bidang Pembangunan Manusia<br>Jumlah Laporan Hasil Monev Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Mitra Sub Bidang Pemerintahan | - | | | 26 Laporan<br>21 Laporan<br>10 Laporan<br>10 Laporan | 96.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 113.000.000,00 | |
| | 5 | - | 03 | 1.01 | 0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | | | | 40 Laporan | 41.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 55.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5 | - | 03 | 1.01 | 0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan | | | | 1 Laporan | 55.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 58.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | | | | | | BADAN KEUANGAN DAERAH | | | | | | 790.811.071.365,00 | | | | | | | 579.457.661.238,00 | |
| | 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 790.811.071.365,00 | | | | | | | 579.457.661.238,00 | |
| | 5 | 02 | | | | KEUANGAN | | | | | | 625.450.055.148,00 | | | | | | | 431.199.427.000,00 | |
| 474 | 5 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai survey kepuasan internal Perangkat Daerah | 81Nilai<br>82Nilai<br>81Nilai<br>81Nilai<br>82.5Nilai<br>82Nilai<br>83Nilai<br>83Nilai<br>84Nilai | | | 79 nilai | 250.000.000,00 | | | | | | 80.5Nilai<br>815Nilai<br>80.75Nilai<br>80Nilai<br>82Nilai<br>81Nilai<br>82Nilai<br>82Nilai<br>83Nilai | 175.000.000,00 | |
| | 5 | 02 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks kepuasan pelayanan umum (BAKUDA) | - | | | 77.5 nilai | 250.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 175.000.000,00 | |
| | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 50 Laporan | 250.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 175.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| 475 | 5 | 02 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | persentase pemenuhan ketaatan pada peraturan terhadap penyaluran Dana Transfer dan BTT | 2Nilai<br>100%<br>94%<br>2Nilai<br>7Kab/Kota | | | 100 % | 625.200.055.148,00 | | | | | | 2Nilai<br>100%<br>93.5%<br>2Nilai<br>7Kab/Kota | 431.024.427.000,00 | |
| | 5 | 02 | 02 | 1.05 | | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | persentase realisasi belanja tidak terduga dan dana transfer ke Kabupaten/Kota | - | | | 84 % | 625.200.055.148,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 431.024.427.000,00 | |
| | 5 | 02 | 02 | 1.05 | 0009 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | | | | 4 Laporan | 75.000.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 35.660.185.000,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 02 | 1.05 | 0010 | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi | | | | 12 Laporan | 550.200.055.148,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 395.364.242.000,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | - | | | | - | | | | | | 165.361.016.217,00 | | | | | | | 148.258.234.238,00 | |
| 476 | 5 | - | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Nilai ketepatan waktu penetapan APBD dan Perubahan APBD | 2Nilai<br>100%<br>94%<br>2Nilai<br>7Kab/Kota | | | 2 Nilai | 64.137.140.300,00 | | | | | | 2Nilai<br>100%<br>93.5%<br>2Nilai<br>7Kab/Kota | 65.589.078.050,00 | |
| | 5 | - | 02 | 1.01 | | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Persentase pemenuhan ketaatan pada peraturan dalam penyusunan APBD/Perubahan APBD | - | | | 100 % | 1.510.000.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 1.488.223.000,00 | |
| | 5 | - | 02 | 1.01 | 0001 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun | | | | 2 Dokumen | 95.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 99.558.000,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | - | 02 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun | | | | 2 Dokumen | 95.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 99.558.000,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | - | 02 | 1.01 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | | | | 2 Dokumen | 450.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | - | - | | 415.010.000,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | - | 02 | 1.01 | 0008 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | | | | 2 Dokumen | 500.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 495.645.000,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | - | 02 | 1.01 | 0009 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | | | | 2 Dokumen | 120.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | - | - | | 103.452.000,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | - | 02 | 1.01 | 0013 | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi | | | | 200 Orang | 250.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 275.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | - | 02 | 1.02 | | Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil analisa statistik keuangan Pemerintah Daerah<br>Jumlah sosialisasi regulasi bidang keuangan Kabupaten/kota<br>Laporan Hasil Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD dan Pemerintah Kabupaten/Kota<br>Nilai Ketepatan Waktu Evaluasi APBD, Perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota<br>"Nilai Ketepatan Waktu Evaluasi Raperda Pajak dan Retribusi Kab/Kota "<br>Persentase kesesuaian Perda APBD kab/kota dan Perkada penjabaran APBD Kabupaten/kota dengan peraturan diatasnya | - | | | 7 dokumen<br>5 kali<br>1 laporan<br>2 nilai<br>2 nilai<br>100 % | 2.421.126.300,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 1.984.946.750,00 | |
| | 5 | - | 02 | 1.02 | 0001 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota | | | | 7 Laporan | 486.738.300,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 132.300.000,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | - | 02 | 1.02 | 0002 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota | | | | 7 Laporan | 170.610.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 187.671.000,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | - | 02 | 1.02 | 0003 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota | | | | 7 Laporan | 170.610.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 187.671.000,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | - | 02 | 1.02 | 0004 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | | | | 7 Laporan | 170.610.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 187.671.000,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | - | 02 | 1.02 | 0005 | Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi | | | | 10 Dokumen | 141.750.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 148.837.500,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | - | 02 | 1.02 | 0006 | Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan | | | | 5 Laporan | 155.925.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 232.925.000,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | - | 02 | 1.02 | 0007 | Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah BLUD yang Diasistensi | | | | 10 Lembaga | 155.925.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 163.721.250,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | - | 02 | 1.02 | 0008 | Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota | | | | | 7 Dokumen | 198.877.900,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 163.350.000,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | - | 02 | 1.02 | 0009 | Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota | | | | | 7 Dokumen | 198.877.900,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 163.350.000,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | - | 02 | 1.02 | 0010 | Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | | | | | 7 Dokumen | 198.877.900,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 163.350.000,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | - | 02 | 1.02 | 0011 | Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 70 Orang | 284.674.300,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 133.100.000,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | - | 02 | 1.02 | 0012 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah | | | | | 7 Dokumen | 87.650.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 121.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | - | 02 | 1.03 | | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Jumlah dokumen pengelolaan kas daerah<br>Jumlah dokumen telaahan persyaratan pencairan Dana Transfer<br>Persentase kesesuaian waktu pelayanan terhadap pencairan dana keuangan | - | | | 4100 dokumen<br>12 dokumen<br>100 % | 1.137.188.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 547.170.000,00 | |
| | 5 | - | 02 | 1.03 | 0001 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | | | | 12 Dokumen | 150.800.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 115.762.500,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | - | 02 | 1.03 | 0003 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | | | | 12 Dokumen | 123.450.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 150.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | - | 02 | 1.03 | 0004 | Penatausahaan Pembiayaan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah | | | | 1 Dokumen | 122.600.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 38.857.500,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | - | 02 | 1.03 | 0005 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | | | | 1 Dokumen | 524.238.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 110.250.000,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | - | 02 | 1.03 | 0006 | Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | | | | 1 Dokumen | 84.450.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 44.100.000,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | - | 02 | 1.03 | 0009 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | | | | 12 Dokumen | 131.650.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | - | - | | 88.200.000,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | - | 02 | 1.04 | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Persentase kepatuhan penyusunan Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAP<br>persentase laporan keuangan PD yang sesuai dengan SAP<br>Persentase penyelesaian kerugian daerah | - | | | 100 %<br>100 %<br>100 % | 1.140.000.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 743.471.300,00 | |
| | 5 | - | 02 | 1.04 | 0003 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | | | | 6 Laporan | 72.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 58.212.000,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | - | 02 | 1.04 | 0004 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi | | | | 1 Laporan | 110.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 100.051.800,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | - | 02 | 1.04 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi | | | | 1 Dokumen | 184.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 181.912.500,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | - | 02 | 1.04 | 0007 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | | | | 1 Dokumen | 142.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 121.275.000,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | - | 02 | 1.04 | 0009 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | | | | 1 Dokumen | 66.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 48.510.000,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | - | 02 | 1.04 | 0010 | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | 1 Dokumen | 66.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 48.510.000,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | - | 02 | 1.04 | 0011 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi | | | | 77 Orang | 500.000.000,00 | Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpendam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 185.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | - | 02 | 1.05 | | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | persentase realisasi belanja tidak terduga dan dana transfer ke Kabupaten/Kota | - | | | 84 % | 57.928.826.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 60.825.267.000,00 | |
| | 5 | - | 02 | 1.05 | 0008 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | | | | 12 Laporan | 57.928.826.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 60.825.267.000,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| 477 | 5 | - | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Nilai Kepatuhan Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan | 2Nilai | | | 2 Nilai | 794.062.500,00 | | | | | | 2Nilai | 833.765.625,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5 | - | 03 | 1.01 | | Pengelolaan Barang Milik Daerah | persentase laporan BMD yang sesuai dengan peraturan<br>persentase pengamanan dan pemindahtangan BMD yang sesuai dengan peraturan<br>persentase perencanaan, penggunaan dan pemanfaatan BMD yang sesuai dengan peraturan | - | | | 100 %<br>100 %<br>100 % | 794.062.500,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 833.765.625,00 | |
| | 5 | - | 03 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Standar Harga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Standar Harga yang Disusun | | | | 2 Dokumen | 115.500.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 121.275.000,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | - | 03 | 1.01 | 0003 | Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | | | | 2 Dokumen | 86.625.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | - | - | | 90.956.250,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | - | 03 | 1.01 | 0005 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | | | | 1 Laporan | 155.925.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 163.721.250,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | - | 03 | 1.01 | 0006 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah | | | | 1 Laporan | 86.625.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 90.956.250,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | - | 03 | 1.01 | 0007 | Pengamanan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah | | | | 1 Laporan | 75.075.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 78.828.750,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | - | 03 | 1.01 | 0008 | Penilaian Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah | | | | 1 Laporan | 98.175.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 103.083.750,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | - | 03 | 1.01 | 0009 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | 1 Laporan | 49.087.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 51.541.875,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | - | 03 | 1.01 | 0010 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | | | | 2 Dokumen | 49.087.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 51.541.875,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | - | 03 | 1.01 | 0011 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | | | | 3 Laporan | 43.312.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | - | - | | 45.478.125,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | - | 03 | 1.01 | 0012 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun | | | | 2 Laporan | 34.650.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 36.382.500,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| 478 | 5 | - | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | pertumbuhan PAD | 12,92%<br>13%<br>12,73%<br>14.99%<br>14.99%<br>14.99%<br>14.99%<br>6,24% | | | 10 % | 3.537.467.972,00 | | | | | | 11,75%<br>11.5%<br>11,58%<br>13.63%<br>13.63%<br>13.63%<br>13.63%<br>5,95% | 1.757.000.000,00 | |
| | 5 | - | 04 | 1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Jumlah dokumen kebijakan teknis, pembinaan dan pengawasan Pendapatan Asli Daerah (PAD)<br>Jumlah dokumen pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)<br>Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) | - | | | 10 dokumen<br>3 dokumen<br>1 dokumen | 3.537.467.972,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 1.757.000.000,00 | |
| | 5 | - | 04 | 1.01 | 0002 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah | | | | 3 Laporan | 1.641.315.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 99.225.000,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | - | 04 | 1.01 | 0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | | | 2 Laporan | 365.512.972,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 121.275.000,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | - | 04 | 1.01 | 0006 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | | | | 12 Laporan | 414.750.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 435.487.500,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | - | 04 | 1.01 | 0010 | Penagihan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. | | | | 48 Dokumen SSPD | 262.140.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 143.325.000,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | - | 04 | 1.01 | 0012 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah | | | | 12 Laporan | 78.750.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 82.687.500,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | - | 04 | 1.01 | 0013 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | | 10 Laporan | 275.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 325.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | - | 04 | 1.01 | 0014 | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | | | | 1 Laporan | 500.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 550.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| 479 | 5 | - | - | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (Bakuda) | 81Nilai<br>82Nilai<br>81Nilai<br>81Nilai<br>82.5Nilai<br>82Nilai<br>83Nilai<br>83Nilai<br>84Nilai | | | 79 Nilai | 96.892.345.445,00 | | | | | | 80.5Nilai<br>815Nilai<br>80.75Nilai<br>80Nilai<br>82Nilai<br>81Nilai<br>82Nilai<br>82Nilai<br>83Nilai | 80.078.390.563,00 | |
| | 5 | - | - | - | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Indeks kepuasan pelayanan keuangan | - | | | 79 nilai | 74.708.820.445,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 63.974.092.813,00 | |
| | 5 | - | - | - | - | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 3850 Orang/ Bulan | 74.467.965.325,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 63.798.239.813,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | - | - | - | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks kepuasan pelayanan umum (BAKUDA) | - | | | 77.5 nilai | 5.530.335.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 4.894.181.000,00 | |
| | 5 | - | - | - | - | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 50 Laporan | 750.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 825.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | - | - | - | - | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 2 Dokumen | 150.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 36.382.500,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | - | - | - | - | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 15 Dokumen | 36.960.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 38.808.000,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | - | - | - | - | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 Paket | 2.683.250.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 2.607.412.500,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | - | - | - | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan (Bakuda) | - | | | 34 unit | 6.546.500.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 2.233.825.000,00 | |
| | 5 | - | - | - | - | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 30 Unit | 1.000.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 630.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | - | - | - | - | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 2 Paket | 40.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 240.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5 - - - - | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dok perencanaan dan evaluasi | - | | | 24 dokumen | 325.000.000,00 | | | - | - | - | - | 179.156.250,00 | |
| | 5 - - - - | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 10 Laporan | 125.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 88.200.000,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 - - - - | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | - | | | 36 dokumen | 7.516.690.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 7.630.303.000,00 | |
| | 5 - - - - | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 75.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 48.510.000,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 - - - - | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dok perencanaan dan evaluasi | - | | | 24 dokumen | 325.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 179.156.250,00 | |
| | 5 - - - - | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 15 Dokumen | 200.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 90.956.250,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 - - - - | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks kepuasan pelayanan umum (BAKUDA) | - | | | 77.5 nilai | 5.530.335.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 4.894.181.000,00 | |
| | 5 - - - - | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 90.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 24.255.000,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 - - - - | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 850.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 404.250.000,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 - - - - | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 75.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 18.191.750,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 - - - | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Indeks kepuasan pelayanan kepegawaian | - | | | 78 nilai | 975.000.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 296.021.250,00 | |
| | 5 - - - - | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 200 Orang | 325.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 103.083.750,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 - - - - | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 15 Orang | 200.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 132.300.000,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 - - - | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | - | | | 36 dokumen | 7.516.690.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 7.630.303.000,00 | |
| | 5 - - - - | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 275.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 266.085.000,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 - - - | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Indeks kepuasan pelayanan kepegawaian | - | | | 78 nilai | 975.000.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 296.021.250,00 | |
| | 5 - - - - | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | 12 Dokumen | 450.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 60.637.500,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 - - - | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan (Bakuda) | - | | | 34 unit | 6.546.500.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 2.233.825.000,00 | |
| | 5 - - - - | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 346.500.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 363.825.000,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 - - - | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | - | | | 36 dokumen | 7.516.690.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 7.630.303.000,00 | |
| | 5 - - - - | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 7.166.690.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 7.315.708.000,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5 | - | - | - | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Indeks kepuasan pelayanan keuangan | - | | | 79 nilai | 74.708.820.445,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | - | - | - | 63.974.092.813,00 | |
| | 5 | - | - | - | - | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | 3 Dokumen | 90.855.120,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | - | - | | 115.215.500,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | - | - | - | - | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 12 Dokumen | 150.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 60.637.500,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | - | - | - | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks kepuasan pelayanan umum (BAKUDA) | - | | | 77.5 nilai | 5.530.335.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 4.894.181.000,00 | |
| | 5 | - | - | - | - | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 12 Dokumen | 895.125.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 939.881.250,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | - | - | - | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara (Bakuda) | - | | | 71 unit | 1.290.000.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | - | - | - | 870.811.250,00 | |
| | 5 | - | - | - | - | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 14 Unit | 475.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | - | - | | 525.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | - | - | - | - | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | | | | 5 Unit | 15.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 15.225.000,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | - | - | - | - | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 60 Unit | 225.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 115.211.250,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | - | - | - | - | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 2 Unit | 500.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 165.375.000,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | - | - | - | - | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 75.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 50.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | - | - | - | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan (Bakuda) | - | | | 34 unit | 6.546.500.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 2.233.825.000,00 | |
| | 5 | - | - | - | - | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 12 Unit | 5.160.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 1.000.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | | | | | | UPTB Wilayah Kabupaten Bangka Barat | | | | | | 1.793.060.157,00 | | | | | | | 1.064.457.905,00 | |
| | 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 1.793.060.157,00 | | | | | | | 1.064.457.905,00 | |
| | 5 | - | | | | - | | | | | | 1.793.060.157,00 | | | | | | | 1.064.457.905,00 | |
| 480 | 5 | - | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | pertumbuhan Pajak Daerah pada UPTB (UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA BARAT) | 12,92%<br>13%<br>12,73%<br>14.99%<br>14.99%<br>14.99%<br>14.99%<br>6,24% | | | 10,68 % | 212.880.000,00 | | | | | | 11,75%<br>11.5%<br>11,58%<br>13.63%<br>13.63%<br>13.63%<br>13.63%<br>5,95% | 150.601.500,00 | |
| | 5 | - | 04 | 1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Jumlah Dokumen Data Pajak Daerah yang menjadi kewenangan UPTB Kab Bangka Barat (Data wajib pajak terealisasi, tertunggak, data baru)<br>Persentase realisasi target pendapatan pajak daerah pada UPTB Wilayah Kabupaten Bangka Barat | - | | | 3 dokumen<br>100 % | 212.880.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 150.601.500,00 | |
| | 5 | - | 04 | 1.01 | 0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | | | 1 Laporan | 21.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 22.050.000,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA BARAT |
| | 5 | - | 04 | 1.01 | 0005 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | 0 0 | 81.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 12.127.500,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA BARAT |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | | | | 50 Laporan | 81.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 12.127.500,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA BARAT |
| | 5 | - | 04 | 1.01 | 0007 | Penetapan Wajib Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah | | | | 40000 Dokumen Ketetapan | 110.880.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 116.424.000,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA BARAT |
| 481 | 5 | - | - | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (Bakuda : UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA BARAT) | 81Nilai<br>82Nilai<br>81Nilai<br>81Nilai<br>82.5Nilai<br>82Nilai<br>83Nilai<br>83Nilai<br>84Nilai | | | 80.50 Nilai | 1.580.180.157,00 | | | | | | 80.5Nilai<br>815Nilai<br>80.75Nilai<br>80Nilai<br>82Nilai<br>81Nilai<br>82Nilai<br>82Nilai<br>83Nilai | 913.856.405,00 | |
| | 5 | - | - | - | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (UPTB Kab bangka Barat) | - | | | 36 dokumen | 175.236.804,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 186.088.539,00 | |
| | 5 | - | - | - | - | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 5.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 7.339.894,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA BARAT |
| | 5 | - | - | - | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks kepuasan pelayanan umum (UPTB Kab. Bangka Barat) | - | | | 81.50 nilai | 354.877.633,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 199.288.562,00 | |
| | 5 | - | - | - | - | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 12 Paket | 7.200.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 3.307.500,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA BARAT |
| | 5 | - | - | - | - | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 12 Paket | 133.783.750,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 102.236.589,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA BARAT |
| | 5 | - | - | - | - | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 Paket | 15.994.261,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 15.435.000,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA BARAT |
| | 5 | - | - | - | - | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 Paket | 17.998.250,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 12.093.323,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA BARAT |
| | 5 | - | - | - | - | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 12 Dokumen | 4.800.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 5.292.000,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA BARAT |
| | 5 | - | - | - | - | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 12 Paket | 18.341.372,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 16.537.500,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA BARAT |
| | 5 | - | - | - | - | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 12 Laporan | 27.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 5.512.500,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA BARAT |
| | 5 | - | - | - | - | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 129.760.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 38.874.150,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA BARAT |
| | 5 | - | - | - | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (UPTB Kab bangka Barat) | - | | | 36 dokumen | 175.236.804,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 186.088.539,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5 | - | - | - | - | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 170.236.804,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 178.748.645,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA BARAT |
| | 5 | - | - | - | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan (UPTB Kab Bangka Barat) | - | | | 7 unit | 347.151.720,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 219.765.102,00 | |
| | 5 | - | - | - | - | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 1 Paket | 67.151.720,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 49.509.306,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA BARAT |
| | 5 | - | - | - | - | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 6 Unit | 280.000.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 170.255.796,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA BARAT |
| | 5 | - | - | - | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara (UPTB Kab Bangka Barat) | - | | | 40 unit | 702.914.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 308.714.202,00 | |
| | 5 | - | - | - | - | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 7 Unit | 177.524.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 97.124.738,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA BARAT |
| | 5 | - | - | - | - | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 40 Unit | 40.790.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 33.698.464,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA BARAT |
| | 5 | - | - | - | - | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 2 Unit | 484.600.000,00 | Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 177.891.000,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA BARAT |
| | | | | | | UPTB Wilayah Kota Pangkalpinang | | | | | | 2.571.050.000,00 | | | | | | | 2.320.646.250,00 | |
| | 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 476.100.000,00 | | | | | | | 499.905.000,00 | |
| | 5 | - | | | | - | | | | | | 476.100.000,00 | | | | | | | 499.905.000,00 | |
| 482 | 5 | - | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | pertumbuhan Pajak Daerah pada UPTB (UPTB WILAYAH KOTA PANGKALPINANG) | 12,92%<br>13%<br>12,73%<br>14.99%<br>14.99%<br>14.99%<br>14.99%<br>6,24% | | | 5,66 % | 476.100.000,00 | | | | | | 11,75%<br>11.5%<br>11,58%<br>13.63%<br>13.63%<br>13.63%<br>13.63%<br>5,95% | 499.905.000,00 | |
| | 5 | - | 04 | 1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Jumlah Dokumen Data Pajak Daerah yang menjadi kewenangan UPTB Kota Pangkalp[inang (Data wajib pajak terealisasi, tertunggak, data baru)<br>Persentase realisasi target pendapatan pajak daerah pada UPTB Wilayah Kota pangkalpinang | - | | | 3 dokumen<br>100 % | 476.100.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 499.905.000,00 | |
| | 5 | - | 04 | 1.01 | 0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | | | 14 Laporan | 30.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 31.500.000,00 | UPTB WILAYAH KOTA PANGKALPINANG |
| | 5 | - | 04 | 1.01 | 0005 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | | | | 14 Laporan | 40.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 42.000.000,00 | UPTB WILAYAH KOTA PANGKALPINANG |
| | | | | | | | 0 | | | | 0 0 | 40.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 42.000.000,00 | UPTB WILAYAH KOTA PANGKALPINANG |
| | 5 | - | 04 | 1.01 | 0007 | Penetapan Wajib Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah | | | | 95841 Dokumen Ketetapan | 406.100.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 426.405.000,00 | UPTB WILAYAH KOTA PANGKALPINANG |
| | X | | | | | NON URUSAN | | | | | | 2.094.950.000,00 | | | | | | | 1.820.741.250,00 | |
| | X | - | | | | - | | | | | | 2.094.950.000,00 | | | | | | | 1.820.741.250,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 483 | X | - | - | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indeks kepuasan Pelayanan internal (Bakuda : UPTB WILAYAH KOTA PANGKALPINANG) | 81Nilai<br>82Nilai<br>81Nilai<br>81Nilai<br>82.5Nilai<br>82Nilai<br>83Nilai<br>83Nilai<br>84Nilai | | | 82 Nilai | 2.094.950.000,00 | | | | | | 80.5Nilai<br>815Nilai<br>80.75Nilai<br>80Nilai<br>82Nilai<br>81Nilai<br>82Nilai<br>82Nilai<br>83Nilai | 1.820.741.250,00 | |
| | X | - | - | - | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan (UPTB Kota Pangkalpinang) | - | | | 9 unit | 450.000.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 435.750.000,00 | |
| | X | - | - | - | - | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 12 Unit | 200.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 210.000.000,00 | UPTB WILAYAH KOTA PANGKALPINANG |
| | X | - | - | - | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara (UPTB Kota Pangkalpinang) | - | | | 60 unit | 695.500.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 589.406.250,00 | |
| | X | - | - | - | - | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 5 Unit | 265.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 183.750.000,00 | UPTB WILAYAH KOTA PANGKALPINANG |
| | X | - | - | - | - | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 55 Unit | 125.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 90.956.250,00 | UPTB WILAYAH KOTA PANGKALPINANG |
| | X | - | - | - | - | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 300.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 308.700.000,00 | UPTB WILAYAH KOTA PANGKALPINANG |
| | X | - | - | - | - | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | | | | 2 Unit | 5.500.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 6.000.000,00 | UPTB WILAYAH KOTA PANGKALPINANG |
| | X | - | - | - | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks kepuasan pelayanan umum (UPTB Kota Pangkalpinang) | - | | | 77.5 nilai | 545.775.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 371.726.250,00 | |
| | X | - | - | - | - | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 30 Laporan | 180.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 73.500.000,00 | UPTB WILAYAH KOTA PANGKALPINANG |
| | X | - | - | - | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (UPTB Kota Pangkalpinang) | - | | | 24 dokumen | 403.675.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 423.858.750,00 | |
| | X | - | - | - | - | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 3.675.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 3.858.750,00 | UPTB WILAYAH KOTA PANGKALPINANG |
| | X | - | - | - | - | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 400.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 420.000.000,00 | UPTB WILAYAH KOTA PANGKALPINANG |
| | X | - | - | - | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan (UPTB Kota Pangkalpinang) | - | | | 9 unit | 450.000.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 435.750.000,00 | |
| | X | - | - | - | - | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 1 Paket | 250.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 225.750.000,00 | UPTB WILAYAH KOTA PANGKALPINANG |
| | X | - | - | - | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks kepuasan pelayanan umum (UPTB Kota Pangkalpinang) | - | | | 77.5 nilai | 545.775.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 371.726.250,00 | |
| | X | - | - | - | - | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 4 Paket | 45.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 24.806.250,00 | UPTB WILAYAH KOTA PANGKALPINANG |
| | X | - | - | - | - | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 15 Dokumen | 5.775.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 6.063.750,00 | UPTB WILAYAH KOTA PANGKALPINANG |
| | X | - | - | - | - | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 12 Laporan | 20.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 8.268.750,00 | UPTB WILAYAH KOTA PANGKALPINANG |
| | X | - | - | - | - | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 20.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Gabek, Selindung Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 13.781.250,00 | UPTB WILAYAH KOTA PANGKALPINANG |
| | X | - | - | - | - | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 200.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 192.937.500,00 | UPTB WILAYAH KOTA PANGKALPINANG |
| | X | - | - | - | - | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 75.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 52.368.750,00 | UPTB WILAYAH KOTA PANGKALPINANG |
| | | | | | | UPTB Wilayah Kabupaten Belitung Timur | | | | | | 1.661.390.337,00 | | | | | | | 1.496.304.853,00 | |
| | 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 362.250.000,00 | | | | | | | 380.362.500,00 | |
| | 5 | - | | | | - | | | | | | 362.250.000,00 | | | | | | | 380.362.500,00 | |
| 484 | 5 | - | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | pertumbuhan Pajak Daerah pada UPTB ( UPTB WILAYAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR) | 12,92%<br>13%<br>12,73%<br>14.99%<br>14.99%<br>14.99%<br>14.99%<br>6,24% | | | 12.39 % | 362.250.000,00 | | | | | | 11,75%<br>11.5%<br>11,58%<br>13.63%<br>13.63%<br>13.63%<br>13.63%<br>5,95% | 380.362.500,00 | |
| | 5 | - | 04 | 1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Jumlah Dokumen Data Pajak Daerah yang menjadi kewenangan UPTB Kab Belitung Timur (Data wajib pajak terealisasi, tertunggak, data baru)<br>Persentase realisasi target pendapatan pajak daerah pada UPTB Wilayah Kabupaten Belitung Timur | - | | | 3 dokumen<br>100 % | 362.250.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 380.362.500,00 | |
| | 5 | - | 04 | 1.01 | 0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | | | 1 Laporan | 31.500.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 33.075.000,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR |
| | 5 | - | 04 | 1.01 | 0005 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | | | | 1 Laporan | 57.750.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 60.637.500,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR |
| | 5 | - | 04 | 1.01 | 0007 | Penetapan Wajib Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah | | | | 51608 Dokumen Ketetapan | 273.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 286.650.000,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR |
| | X | | | | | NON URUSAN | | | | | | 1.299.140.337,00 | | | | | | | 1.115.942.353,00 | |
| | X | - | | | | - | | | | | | 1.299.140.337,00 | | | | | | | 1.115.942.353,00 | |
| 485 | X | - | - | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | indeks kepuasan pelayanan internal ( Bakuda: UPTB WILAYAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR) | 81Nilai<br>82Nilai<br>81Nilai<br>81Nilai<br>82.5Nilai<br>82Nilai<br>83Nilai<br>83Nilai<br>84Nilai | | | 80 Nilai | 1.299.140.337,00 | | | | | | 80.5Nilai<br>815Nilai<br>80.75Nilai<br>80Nilai<br>82Nilai<br>81Nilai<br>82Nilai<br>82Nilai<br>83Nilai | 1.115.942.353,00 | |
| | X | - | - | - | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks kepuasan pelayanan umum (UPTB Kab. Belitung Timur) | - | | | 77.5 nilai | 531.350.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 424.462.500,00 | |
| | X | - | - | - | - | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 215.250.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 226.012.500,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR |
| | X | - | - | - | - | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 15.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 3.307.500,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR |
| | X | - | - | - | - | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 73.500.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 77.175.000,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR |
| | X | - | - | - | - | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 4 Paket | 15.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 14.883.750,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR |
| | X | - | - | - | - | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 15 Dokumen | 12.600.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 13.230.000,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR |
| | X | - | - | - | - | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 12 Laporan | 20.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 12.678.750,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR |
| | X | - | - | - | - | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 30 Laporan | 180.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 77.175.000,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR |
| | X | - | - | - | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (UPTB Kab Belitung Timur) | - | | | 24 dokumen | 196.486.805,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 206.311.145,00 | |
| | X | - | - | - | - | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 26.250.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 27.562.500,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR |
| | X | - | - | - | - | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 170.236.805,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 178.748.645,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR |
| | X | - | - | - | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan (UPTB Kab Belitung Timur) | - | | | 9 unit | 163.303.532,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 171.468.708,00 | |
| | X | - | - | - | - | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 1 Paket | 52.500.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 55.125.000,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR |
| | X | - | - | - | - | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 8 Unit | 110.803.532,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 116.343.708,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR |
| | X | - | - | - | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara UPTB Kabupaten Belitung Timur) | - | | | 62 unit | 408.000.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 313.700.000,00 | |
| | X | - | - | - | - | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 4 Unit | 235.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 132.300.000,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR |
| | X | - | - | - | - | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | | | | 2 Unit | 5.000.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 5.000.000,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR |
| | X | - | - | - | - | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 55 Unit | 36.750.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 38.587.500,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR |
| | X | - | - | - | - | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 131.250.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 137.812.500,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR |
| | | | | | | UPTB Wilayah Kabupaten Bangka | | | | | | 1.960.450.000,00 | | | | | | | 1.977.116.250,00 | |
| | 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 485.000.000,00 | | | | | | | 562.275.000,00 | |
| | 5 | - | | | | - | | | | | | 485.000.000,00 | | | | | | | 562.275.000,00 | |
| 486 | 5 | - | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | pertumbuhan Pajak Daerah pada UPTB ( UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA ) | 12,92%<br>13%<br>12,73%<br>14.99%<br>14.99%<br>14.99%<br>14.99%<br>6,24% | | | 10,52 % | 485.000.000,00 | | | | | | 11,75%<br>11.5%<br>11,58%<br>13.63%<br>13.63%<br>13.63%<br>13.63%<br>5,95% | 562.275.000,00 | |
| | 5 | - | 04 | 1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Jumlah Dokumen Data Pajak Daerah yang menjadi kewenangan UPTB Kab Bangka(Data wajib pajak terealisasi, tertunggak, data baru) Persentase realisasi target pendapatan pajak daerah pada UPTB Wilayah Kabupaten Bangka | - | | | 3 dokumen<br>100 % | 485.000.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 562.275.000,00 | |
| | 5 | - | 04 | 1.01 | 0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | | | 1 Laporan | 50.000.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 27.562.500,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA |
| | 5 | - | 04 | 1.01 | 0005 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | | | | 1 Laporan | 80.000.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 66.150.000,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA |
| | 5 | - | 04 | 1.01 | 0007 | Penetapan Wajib Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah | | | | 91767 Dokumen Ketetapan | 355.000.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 468.562.500,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA |
| | X | | | | | NON URUSAN | | | | | | 1.475.450.000,00 | | | | | | | 1.414.841.250,00 | |
| | X | - | | | | - | | | | | | 1.475.450.000,00 | | | | | | | 1.414.841.250,00 | |
| 487 | X | - | - | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indek Kepuasan Pelayanan (Bakuda : UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA ) | 81Nilai<br>82Nilai<br>81Nilai<br>81Nilai<br>82.5Nilai<br>82Nilai<br>83Nilai<br>83Nilai<br>84Nilai | | | 81 Nilai | 1.475.450.000,00 | | | | | | 80.5Nilai<br>815Nilai<br>80.75Nilai<br>80Nilai<br>82Nilai<br>81Nilai<br>82Nilai<br>82Nilai<br>83Nilai | 1.414.841.250,00 | |
| | X | - | - | - | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (UPTB Kab Bangka) | - | | | 36 dokumen | 301.975.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 276.573.750,00 | |
| | X | - | - | - | - | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 4.725.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 4.961.250,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA |
| | X | - | - | - | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks kepuasan pelayanan umum (UPTB kabupaten Bangka) | - | | | 77.5 nilai | 653.725.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 492.817.500,00 | |
| | X | - | - | - | - | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 30 Laporan | 167.000.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 38.587.500,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA |
| | X | - | - | - | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan (UPTB Kab Bangka) | - | | | 7 unit | 218.750.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 330.750.000,00 | |
| | X | - | - | - | - | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 1 Paket | 78.750.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 82.687.500,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA |
| | X | - | - | - | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks kepuasan pelayanan umum (UPTB kabupaten Bangka) | - | | | 77.5 nilai | 653.725.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 492.817.500,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | X | - | - | - | - | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 12 Laporan | 73.000.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 30.318.750,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA |
| | X | - | - | - | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan (UPTB Kab Bangka) | - | | | 7 unit | 218.750.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 330.750.000,00 | |
| | X | - | - | - | - | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 6 Unit | 140.000.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 248.062.500,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA |
| | X | - | - | - | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (UPTB Kab Bangka) | - | | | 36 dokumen | 301.975.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 276.573.750,00 | |
| | X | - | - | - | - | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 257.250.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 270.112.500,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA |
| | X | - | - | - | - | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 40.000.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 1.500.000,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA |
| | X | - | - | - | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks kepuasan pelayanan umum (UPTB kabupaten Bangka) | - | | | 77.5 nilai | 653.725.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 492.817.500,00 | |
| | X | - | - | - | - | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 230.500.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 231.525.000,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA |
| | X | - | - | - | - | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 15 Dokumen | 5.775.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 6.063.750,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA |
| | X | - | - | - | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara (UPTB Wilayah Kabupaten Bangka) | - | | | 60 unit | 301.000.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 314.700.000,00 | |
| | X | - | - | - | - | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 4 Unit | 47.250.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 49.612.500,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA |
| | X | - | - | - | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks kepuasan pelayanan umum (UPTB kabupaten Bangka) | - | | | 77.5 nilai | 653.725.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 492.817.500,00 | |
| | X | - | - | - | - | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 4 Paket | 63.000.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 66.150.000,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA |
| | X | - | - | - | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara (UPTB Wilayah Kabupaten Bangka) | - | | | 60 unit | 301.000.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 314.700.000,00 | |
| | X | - | - | - | - | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | | | | 1 Unit | 7.000.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 6.000.000,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA |
| | X | - | - | - | - | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 55 Unit | 115.500.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 121.275.000,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA |
| | X | - | - | - | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks kepuasan pelayanan umum (UPTB kabupaten Bangka) | - | | | 77.5 nilai | 653.725.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 492.817.500,00 | |
| | X | - | - | - | - | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 99.750.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 104.737.500,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA |
| | X | - | - | - | - | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 14.700.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 15.435.000,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA |
| | X | - | - | - | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara (UPTB Wilayah Kabupaten Bangka) | - | | | 60 unit | 301.000.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 314.700.000,00 | |
| | X | - | - | - | - | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 131.250.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 137.812.500,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA |
| | | | | | | UPTB Wilayah Kabupaten Bangka Tengah | | | | | | 2.680.230.000,00 | | | | | | | 3.135.392.500,00 | |
| | 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 372.000.000,00 | | | | | | | 402.000.000,00 | |
| | 5 | - | | | | - | | | | | | 372.000.000,00 | | | | | | | 402.000.000,00 | |
| 488 | 5 | - | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | pertumbuhan Pajak Daerah pada UPTB ( UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA TENGAH ) | 12,92%<br>13%<br>12,73%<br>14.99%<br>14.99%<br>14.99%<br>14.99%<br>6,24% | | | 12.39 % | 372.000.000,00 | | | | | | 11,75%<br>11.5%<br>11,58%<br>13.63%<br>13.63%<br>13.63%<br>13.63%<br>5,95% | 402.000.000,00 | |
| | 5 | - | 04 | 1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Jumlah Dokumen Data Pajak Daerah yang menjadi kewenangan UPTB Kab Bangka Tengah (Data wajib pajak terealisasi, tertunggak, data baru)<br>Persentase realisasi target pendapatan pajak daerah pada UPTB Wilayah Kabupaten Bangka Tengah | - | | | 3 dokumen<br>100 % | 372.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 402.000.000,00 | |
| | 5 | - | 04 | 1.01 | 0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | | | 1 Laporan | 121.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 121.000.000,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA TENGAH |
| | 5 | - | 04 | 1.01 | 0005 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | | | | 1 Laporan | 36.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 36.000.000,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA TENGAH |
| | 5 | - | 04 | 1.01 | 0007 | Penetapan Wajib Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah | | | | 50000 Dokumen Ketetapan | 215.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 245.000.000,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA TENGAH |
| | X | | | | | NON URUSAN | | | | | | 2.308.230.000,00 | | | | | | | 2.733.392.500,00 | |
| | X | - | | | | - | | | | | | 2.308.230.000,00 | | | | | | | 2.733.392.500,00 | |
| 489 | X | - | - | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indeks kepuasan pelayanan internal ( UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA TENGAH ) | 81Nilai<br>82Nilai<br>81Nilai<br>81Nilai<br>82.5Nilai<br>82Nilai<br>83Nilai<br>83Nilai<br>84Nilai | | | 80 Nilai | 2.308.230.000,00 | | | | | | 80.5Nilai<br>815Nilai<br>80.75Nilai<br>80Nilai<br>82Nilai<br>81Nilai<br>82Nilai<br>82Nilai<br>83Nilai | 2.733.392.500,00 | |
| | X | - | - | - | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks kepuasan pelayanan umum (UPTB Kab Bangka Tengah | - | | | 77.5 nilai | 475.130.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 382.735.000,00 | |
| | X | - | - | - | - | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 16.655.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 17.500.000,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA TENGAH |
| | X | - | - | - | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan (UPTB Kab Bangka Tengah) | - | | | 9 unit | 935.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | ASN dan Masyarakat | - | 1.541.550.000,00 | |
| | X | - | - | - | - | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 1 Paket | 115.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | ASN dan Masyarakat | | 66.550.000,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA TENGAH |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | X | - | - | - | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks kepuasan pelayanan umum (UPTB Kab Bangka Tengah | - | | | 77.5 nilai | 475.130.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 382.735.000,00 | |
| | X | - | - | - | - | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 89.375.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 95.000.000,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA TENGAH |
| | X | - | - | - | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (UPTB Kab Bangka Tengah) | - | | | 24 dokumen | 154.250.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | ASN dan Masyarakat | - | 166.375.000,00 | |
| | X | - | - | - | - | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 9.050.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | ASN dan Masyarakat | | 6.655.000,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA TENGAH |
| | X | - | - | - | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks kepuasan pelayanan umum (UPTB Kab Bangka Tengah | - | | | 77.5 nilai | 475.130.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 382.735.000,00 | |
| | X | - | - | - | - | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 15 Dokumen | 9.050.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 6.655.000,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA TENGAH |
| | X | - | - | - | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (UPTB Kab Bangka Tengah) | - | | | 24 dokumen | 154.250.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | ASN dan Masyarakat | - | 166.375.000,00 | |
| | X | - | - | - | - | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 145.200.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | ASN dan Masyarakat | | 159.720.000,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA TENGAH |
| | X | - | - | - | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks kepuasan pelayanan umum (UPTB Kab Bangka Tengah | - | | | 77.5 nilai | 475.130.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 382.735.000,00 | |
| | X | - | - | - | - | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 4 Paket | 25.125.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 16.637.500,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA TENGAH |
| | X | - | - | - | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara (UPTB Kabupaten Bangka Tengah) | - | | | 62 unit | 743.850.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | ASN dan Masyarakat | - | 642.732.500,00 | |
| | X | - | - | - | - | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 243.850.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | ASN dan Masyarakat | | 246.235.000,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA TENGAH |
| | X | - | - | - | - | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | | | | 2 Unit | 25.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | ASN dan Masyarakat | | 6.655.000,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA TENGAH |
| | X | - | - | - | - | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 8 Unit | 350.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | ASN dan Masyarakat | | 300.000.000,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA TENGAH |
| | X | - | - | - | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks kepuasan pelayanan umum (UPTB Kab Bangka Tengah | - | | | 77.5 nilai | 475.130.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 382.735.000,00 | |
| | X | - | - | - | - | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 135.925.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 123.117.500,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA TENGAH |
| | X | - | - | - | - | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 12 Laporan | 24.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 24.000.000,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA TENGAH |
| | X | - | - | - | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan (UPTB Kab Bangka Tengah) | - | | | 9 unit | 935.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | ASN dan Masyarakat | - | 1.541.550.000,00 | |
| | X | - | - | - | - | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 2 Unit | 395.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | ASN dan Masyarakat | | 1.200.000.000,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA TENGAH |
| | X | - | - | - | - | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 6 Unit | 425.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | ASN dan Masyarakat | | 275.000.000,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA TENGAH |
| | X | - | - | - | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks kepuasan pelayanan umum (UPTB Kab Bangka Tengah | - | | | 77.5 nilai | 475.130.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 382.735.000,00 | |
| | X | - | - | - | - | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 30 Laporan | 175.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 99.825.000,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA TENGAH |
| | X | - | - | - | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara (UPTB Kabupaten Bangka Tengah) | - | | | 62 unit | 743.850.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | ASN dan Masyarakat | - | 642.732.500,00 | |
| | X | - | - | - | - | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 55 Unit | 125.000.000,00 | Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | ASN dan Masyarakat | | 89.842.500,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA TENGAH |
| | | | | | | UPTB Wilayah Kabupaten Belitung | | | | | | 5.492.000.000,00 | | | | | | | 2.014.898.750,00 | |
| | 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 265.000.000,00 | | | | | | | 274.575.000,00 | |
| | 5 | - | | | | - | | | | | | 265.000.000,00 | | | | | | | 274.575.000,00 | |
| 490 | 5 | - | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | pertumbuhan Pajak Daerah pada UPTB ( UPTB WILAYAH KABUPATEN BELITUNG ) | 12,92%<br>13%<br>12,73%<br>14.99%<br>14.99%<br>14.99%<br>14.99%<br>6,24% | | | 12.39 % | 265.000.000,00 | | | | | | 11,75%<br>11.5%<br>11,58%<br>13.63%<br>13.63%<br>13.63%<br>13.63%<br>5,95% | 274.575.000,00 | |
| | 5 | - | 04 | 1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Jumlah Dokumen Data Pajak Daerah yang menjadi kewenangan UPTB Kab Belitung (Data wajib pajak terealisasi, tertunggak, data baru)<br>Persentase realisasi target pendapatan pajak daerah pada UPTB Wilayah Kabupaten Belitung | - | | | 3 dokumen<br>100 % | 265.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 274.575.000,00 | |
| | 5 | - | 04 | 1.01 | 0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | | | 1 Laporan | 25.000.000,00 | Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 21.000.000,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BELITUNG |
| | 5 | - | 04 | 1.01 | 0005 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | | | | 1 Laporan | 15.000.000,00 | Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 38.587.500,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BELITUNG |
| | 5 | - | 04 | 1.01 | 0008 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. | | | | 78275 Laporan | 225.000.000,00 | Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 214.987.500,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BELITUNG |
| | X | | | | | NON URUSAN | | | | | | 5.227.000.000,00 | | | | | | | 1.740.323.750,00 | |
| | X | - | | | | - | | | | | | 5.227.000.000,00 | | | | | | | 1.740.323.750,00 | |
| 491 | X | - | - | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal ( UPTB WILAYAH KABUPATEN BELITUNG ) | 81Nilai<br>82Nilai<br>81Nilai<br>81Nilai<br>82.5Nilai<br>82Nilai<br>83Nilai<br>83Nilai<br>84Nilai | | | 81 Nilai | 5.227.000.000,00 | | | | | | 80.5Nilai<br>815Nilai<br>80.75Nilai<br>80Nilai<br>82Nilai<br>81Nilai<br>82Nilai<br>82Nilai<br>83Nilai | 1.740.323.750,00 | |
| | X | - | - | - | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan (UPTB Kab Belitung) | - | | | 7 unit | 498.000.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 473.000.000,00 | |
| | X | - | - | - | - | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 1 Paket | 48.000.000,00 | Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 52.500.000,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BELITUNG |
| | X | - | - | - | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (UPTB Kab Belitung) | - | | | 36 dokumen | 230.000.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 242.550.000,00 | |
| | X | - | - | - | - | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 25.000.000,00 | Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 24.255.000,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BELITUNG |
| | X | - | - | - | - | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 185.000.000,00 | Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 198.450.000,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BELITUNG |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | X | - | - | - | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks kepuasan pelayanan umum (UPTB Kabupaten Belitung) | - | | | 77.5 nilai | 594.000.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 548.493.750,00 | |
| | X | - | - | - | - | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 15 Dokumen | 7.500.000,00 | Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 13.781.250,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BELITUNG |
| | X | - | - | - | - | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 4 Paket | 36.000.000,00 | Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 30.318.750,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BELITUNG |
| | X | - | - | - | - | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 63.000.000,00 | Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 66.150.000,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BELITUNG |
| | X | - | - | - | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan (UPTB Kab Belitung) | - | | | 7 unit | 498.000.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 473.000.000,00 | |
| | X | - | - | - | - | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 6 Unit | 200.000.000,00 | Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 220.500.000,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BELITUNG |
| | X | - | - | - | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (UPTB Kab Belitung) | - | | | 36 dokumen | 230.000.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 242.550.000,00 | |
| | X | - | - | - | - | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 20.000.000,00 | Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 19.845.000,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BELITUNG |
| | X | - | - | - | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks kepuasan pelayanan umum (UPTB Kabupaten Belitung) | - | | | 77.5 nilai | 594.000.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 548.493.750,00 | |
| | X | - | - | - | - | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 15.750.000,00 | Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 16.537.500,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BELITUNG |
| | X | - | - | - | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan (UPTB Kab Belitung) | - | | | 7 unit | 498.000.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 473.000.000,00 | |
| | X | - | - | - | - | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 250.000.000,00 | Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 200.000.000,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BELITUNG |
| | X | - | - | - | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara (UPTB Kabupaten Belitung) | - | | | 61 unit | 3.905.000.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 476.280.000,00 | |
| | X | - | - | - | - | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 55 Unit | 65.000.000,00 | Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 66.150.000,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BELITUNG |
| | X | - | - | - | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks kepuasan pelayanan umum (UPTB Kabupaten Belitung) | - | | | 77.5 nilai | 594.000.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 548.493.750,00 | |
| | X | - | - | - | - | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 30 Laporan | 245.000.000,00 | Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 198.450.000,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BELITUNG |
| | X | - | - | - | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara (UPTB Kabupaten Belitung) | - | | | 61 unit | 3.905.000.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 476.280.000,00 | |
| | X | - | - | - | - | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 3.500.000.000,00 | Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 303.187.500,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BELITUNG |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | X | - | - | - | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks kepuasan pelayanan umum (UPTB Kabupaten Belitung) | - | | | 77.5 nilai | 594.000.000,00 | | | - | - | - | - | 548.493.750,00 | |
| | X | - | - | - | - | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 194.250.000,00 | Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 203.962.500,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BELITUNG |
| | X | - | - | - | - | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 12 Laporan | 32.500.000,00 | Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 19.293.750,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BELITUNG |
| | X | - | - | - | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara (UPTB Kabupaten Belitung) | - | | | 61 unit | 3.905.000.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 476.280.000,00 | |
| | X | - | - | - | - | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 5 Unit | 340.000.000,00 | Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 106.942.500,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BELITUNG |
| | | | | | | UPTB Wilayah Kabupaten Bangka Selatan | | | | | | 1.911.117.905,00 | | | | | | | 1.643.886.300,00 | |
| | 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 704.025.000,00 | | | | | | | 608.476.250,00 | |
| | 5 | - | | | | - | | | | | | 704.025.000,00 | | | | | | | 608.476.250,00 | |
| 492 | 5 | - | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | pertumbuhan Pajak Daerah pada UPTB ( UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA SELATAN ) | 12,92%<br>13%<br>12,73%<br>14.99%<br>14.99%<br>14.99%<br>14.99%<br>6,24% | | | 12.36 % | 389.025.000,00 | | | | | | 11,75%<br>11.5%<br>11,58%<br>13.63%<br>13.63%<br>13.63%<br>13.63%<br>5,95% | 408.476.250,00 | |
| | 5 | - | 04 | 1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Jumlah Dokumen Data Pajak Daerah yang menjadi kewenangan UPTB Kab Bangka Selatan (Data wajib pajak terealisasi, tertunggak, data baru)<br>Persentase realisasi target pendapatan pajak daerah pada UPTB Wilayah Kabupaten Bangka Selatan | - | | | 3 dokumen<br>100 % | 389.025.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 408.476.250,00 | |
| | 5 | - | 04 | 1.01 | 0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | | | 12 Laporan | 28.875.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 47.407.500,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA SELATAN |
| | 5 | - | 04 | 1.01 | 0005 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | | | | 12 Laporan | 45.150.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 30.318.750,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA SELATAN |
| | 5 | - | 04 | 1.01 | 0007 | Penetapan Wajib Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah | | | | 42462 Dokumen Ketetapan | 315.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 330.750.000,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA SELATAN |
| 493 | 5 | - | - | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal ( UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA SELATAN ) | 81Nilai<br>82Nilai<br>81Nilai<br>81Nilai<br>82.5Nilai<br>82Nilai<br>83Nilai<br>83Nilai<br>84Nilai | | | 81 Nilai | 315.000.000,00 | | | | | | 80.5Nilai<br>815Nilai<br>80.75Nilai<br>80Nilai<br>82Nilai<br>81Nilai<br>82Nilai<br>82Nilai<br>83Nilai | 200.000.000,00 | |
| | 5 | - | - | - | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan (UPTB Kab Bangka Selatan) | - | | | 7 unit | 315.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 200.000.000,00 | |
| | 5 | - | - | - | - | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 315.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 200.000.000,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA SELATAN |
| | X | | | | | NON URUSAN | | | | | | 987.092.905,00 | | | | | | | 870.035.050,00 | |
| | X | - | | | | - | | | | | | 987.092.905,00 | | | | | | | 870.035.050,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 494 | X | - | - | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal ( UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA SELATAN ) | 81Nilai<br>82Nilai<br>81Nilai<br>81Nilai<br>82.5Nilai<br>82Nilai<br>83Nilai<br>83Nilai<br>84Nilai | | | 81 Nilai | 987.092.905,00 | | | | | | 80.5Nilai<br>815Nilai<br>80.75Nilai<br>80Nilai<br>82Nilai<br>81Nilai<br>82Nilai<br>82Nilai<br>83Nilai | 870.035.050,00 | |
| | X | - | - | - | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan (UPTB Kab Bangka Selatan) | - | | | 7 unit | 242.500.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 203.962.500,00 | |
| | X | - | - | - | - | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 6 Unit | 190.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 148.837.500,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA SELATAN |
| | X | - | - | - | - | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 1 Paket | 52.500.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 55.125.000,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA SELATAN |
| | X | - | - | - | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks kepuasan pelayanan umum (UPTB Kab Bangka Selatan) | - | | | 77.5 nilai | 334.306.100,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 282.771.405,00 | |
| | X | - | - | - | - | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 34.125.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 35.831.250,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA SELATAN |
| | X | - | - | - | - | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 115.500.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 121.275.000,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA SELATAN |
| | X | - | - | - | - | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 16.300.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 6.615.000,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA SELATAN |
| | X | - | - | - | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara (UPTB Kab Bangka Selatan) | - | | | 62 unit | 223.750.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 197.937.500,00 | |
| | X | - | - | - | - | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 4 Unit | 146.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 132.300.000,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA SELATAN |
| | X | - | - | - | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks kepuasan pelayanan umum (UPTB Kab Bangka Selatan) | - | | | 77.5 nilai | 334.306.100,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 282.771.405,00 | |
| | X | - | - | - | - | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 4 Paket | 8.066.100,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 8.469.405,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA SELATAN |
| | X | - | - | - | - | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 15 Dokumen | 5.040.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 5.292.000,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA SELATAN |
| | X | - | - | - | - | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 12 Laporan | 53.875.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 30.318.750,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA SELATAN |
| | X | - | - | - | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (UPTB Kab Bangka Selatan) | - | | | 2 dokumen | 186.536.805,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 185.363.645,00 | |
| | X | - | - | - | - | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 6.300.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 6.615.000,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA SELATAN |
| | X | - | - | - | - | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 180.236.805,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 178.748.645,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA SELATAN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | X | - | - | - | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara (UPTB Kab Bangka Selatan) | - | | | 62 unit | 223.750.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 197.937.500,00 | |
| | X | - | - | - | - | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 55 Unit | 72.750.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 60.637.500,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA SELATAN |
| | X | - | - | - | - | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | | | | 2 Unit | 5.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 5.000.000,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA SELATAN |
| | X | - | - | - | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks kepuasan pelayanan umum (UPTB Kab Bangka Selatan) | - | | | 77.5 nilai | 334.306.100,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 282.771.405,00 | |
| | X | - | - | - | - | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 30 Laporan | 101.400.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Pemerintahan | - | | 74.970.000,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA SELATAN |
| | - | | | | | - | | | | | | 220.000.000,00 | | | | | | | 165.375.000,00 | |
| | - | - | | | | - | | | | | | 220.000.000,00 | | | | | | | 165.375.000,00 | |
| 495 | - | - | - | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal ( UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA SELATAN ) | 81Nilai<br>82Nilai<br>81Nilai<br>81Nilai<br>82.5Nilai<br>82Nilai<br>83Nilai<br>83Nilai<br>84Nilai | | | 81 Nilai | 220.000.000,00 | | | | | | 80.5Nilai<br>815Nilai<br>80.75Nilai<br>80Nilai<br>82Nilai<br>81Nilai<br>82Nilai<br>82Nilai<br>83Nilai | 165.375.000,00 | |
| | - | - | - | - | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara (UPTB Kab Bangka Selatan) | - | | | 62 unit | 220.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 165.375.000,00 | |
| | - | - | - | - | - | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 2 Unit | 220.000.000,00 | Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 165.375.000,00 | UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA SELATAN |
| | | | | | | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | | | | | | 39.042.041.873,00 | | | | | | | 33.687.100.000,00 | |
| | 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 39.042.041.873,00 | | | | | | | 33.687.100.000,00 | |
| | 5 | 03 | | | | KEPEGAWAIAN | | | | | | 32.389.087.496,00 | | | | | | | 29.812.100.000,00 | |
| 496 | 5 | 03 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai Sakip PD (BKPSDMD)<br>Nilai Sakip PD (BKPSDM) | 82,75Nilai<br>82,75Nilai<br>73Nilai<br>73Nilai<br>73Nilai | | | 82,25 Nilai<br>82,25 Nilai | 29.100.166.868,00 | | | | | | 82,5Nilai<br>82,5Nilai<br>72Nilai<br>72Nilai<br>72Nilai | 25.562.100.000,00 | |
| | 5 | 03 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | 7 Dokumen | 500.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 700.000.000,00 | |
| | 5 | 03 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 2 Dokumen | 350.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 450.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5 | 03 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 100.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5 | 03 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 4 Laporan | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 150.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5 | 03 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Survey Kepuasan Pelayanan Keuangan | - | | | 71 Nilai | 17.500.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 18.000.000.000,00 | |
| | 5 | 03 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 97 Orang/ Bulan | 17.500.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 18.000.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5 | 03 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Survey Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Disediakan | - | | | 71 Nilai | 680.300.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 940.000.000,00 | |
| | 5 | 03 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 30 Paket | 120.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 150.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5 | 03 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 7 Paket | 30.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 50.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5 | 03 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 20 Paket | 64.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 100.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5 | 03 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 3 Dokumen | 12.300.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 20.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5 | 03 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 5 Paket | 190.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 250.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5 | 03 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 12 Laporan | 14.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 20.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5 | 03 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 250.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 350.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5 | 03 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan | - | | | 4 jenis | 3.450.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 0,00 | |
| | 5 | 03 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 216 Unit | 3.450.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 0,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5 | 03 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | 3 Jenis | 3.267.100.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 3.372.100.000,00 | |
| | 5 | 03 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 15.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 20.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5 | 03 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 500.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 600.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5 | 03 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 2.752.100.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 2.752.100.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5 | 03 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Dipelihara | - | | | 10 Jenis | 3.702.766.868,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 2.550.000.000,00 | |
| | 5 | 03 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 7 Unit | 200.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 250.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5 | 03 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 3 Unit | 1.752.766.868,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 2.000.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5 | 03 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 200 Unit | 1.750.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 300.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| 497 | 5 | 03 | 02 | | | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui pengadaan | 31,04%<br>97%<br>88%<br>99.91% | | | 86 % | 3.288.920.628,00 | | | | | | 28,80%<br>96%<br>87%<br>99.89% | 4.250.000.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5 | 03 | 02 | 1.01 | | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Jumlah data dan informasi kepegawaian yang akurat<br>Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi<br>Jumlah Pegawai Yang Terpenuhi Sesuai Formasi Melalui Pengadaan | - | | | 5360 Orang<br>1 Lembaga<br>86 Orang | 1.298.528.422,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 1.800.000.000,00 | |
| | 5 | 03 | 02 | 1.01 | 0002 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 100.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5 | 03 | 02 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | | | | 1 Dokumen | 200.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 300.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5 | 03 | 02 | 1.01 | 0005 | Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN | | | | 1 Dokumen | 30.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 50.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5 | 03 | 02 | 1.01 | 0006 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 100.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5 | 03 | 02 | 1.01 | 0008 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi | | | | 1 Lembaga | 793.528.422,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 1.000.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5 | 03 | 02 | 1.01 | 0010 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 150.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5 | 03 | 02 | 1.01 | 0011 | Pengelolaan Data Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian | | | | 1 Dokumen | 75.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 100.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5 | 03 | 02 | 1.02 | | Mutasi dan Promosi ASN | Jumlah ASN yang dikelola kenaikan pangkat<br>Jumlah ASN yang di Mutasi dan Promosi | - | | | 1185 Orang<br>335 Orang | 755.651.892,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 900.000.000,00 | |
| | 5 | 03 | 02 | 1.02 | 0001 | Pengelolaan Mutasi ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah | | | | 1 Dokumen | 250.500.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 300.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5 | 03 | 02 | 1.02 | 0002 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | | | | 1 Laporan | 152.990.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 200.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5 | 03 | 02 | 1.02 | 0003 | Pengelolaan Promosi ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN | | | | 1 Dokumen | 352.160.492,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 400.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5 | 03 | 02 | 1.03 | | Pengembangan Kompetensi ASN | Jumlah ASN yang Ditingkatkan Kapasitasnya | - | | | 1427 Orang | 786.417.568,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 950.000.000,00 | |
| | 5 | 03 | 02 | 1.03 | 0002 | Pengelolaan Assessment Center | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center | | | | 1 Dokumen | 250.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 300.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5 | 03 | 02 | 1.03 | 0003 | Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN | | | | 1 Dokumen | 210.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 250.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5 | 03 | 02 | 1.03 | 0004 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola | | | | 1 Dokumen | 263.017.568,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 300.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5 | 03 | 02 | 1.03 | 0013 | Pembinaan Jabatan Fungsional ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Fungsional ASN yang Dibina | | | | 250 Orang | 63.400.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 100.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5 | 03 | 02 | 1.04 | | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah ASN yang Terbina | - | | | 5360 Orang | 448.322.746,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 600.000.000,00 | |
| | 5 | 03 | 02 | 1.04 | 0002 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | 1 Dokumen | 65.737.346,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 100.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5 | 03 | 02 | 1.04 | 0004 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan | | | | 5 Orang | 247.805.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 300.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5 | 03 | 02 | 1.04 | 0005 | Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa | | | | 620 Orang | 33.832.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 50.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5 | 03 | 02 | 1.04 | 0007 | Pembinaan Disiplin ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan | | | | 2500 Orang | 70.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 100.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5 | 03 | 02 | 1.04 | 0008 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | | | | 7 Laporan | 30.947.200,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 50.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5 | 04 | | | | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | | | | 6.652.954.377,00 | | | | | | | 3.875.000.000,00 | |
| 498 | 5 | 04 | 02 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Persentase ASN yang meningkat pengembangan kompetensi manajerial, fungsional dan teknis | 85% | | | 75 % | 6.652.954.377,00 | | | | | | 80% | 3.875.000.000,00 | |
| | 5 | 04 | 02 | 1.01 | | Pengembangan Kompetensi Teknis | Jumlah ASN Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi Teknis | - | | | 3410 Orang | 1.934.000.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 1.035.000.000,00 | |
| | 5 | 04 | 02 | 1.01 | 0002 | Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun | | | | 10 Dokumen | 16.569.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 20.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5 | 04 | 02 | 1.01 | 0003 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi | | | | 3000 Orang | 1.906.157.200,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 1.000.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5 | 04 | 02 | 1.01 | 0004 | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi | | | | 10 Dokumen | 11.273.200,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 15.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5 | 04 | 02 | 1.02 | | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | Jumlah ASN Yang Mendapatkan Sertifikat Pelatihan Manajerial, dan Fungsional<br>Jumlah sertifikasi kelembagaan yang terselesaikan | - | | | 610 Orang<br>7 lembaga | 4.718.954.377,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 2.840.000.000,00 | |
| | 5 | 04 | 02 | 1.02 | 0002 | Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi | | | | 7 Dokumen | 16.393.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 20.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5 | 04 | 02 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi | | | | 90 Orang | 85.295.129,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 100.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5 | 04 | 02 | 1.02 | 0004 | Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar | | | | 3 Laporan | 152.838.718,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 200.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5 | 04 | 02 | 1.02 | 0005 | Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga | | | | 1 Dokumen | 16.917.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 20.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5 | 04 | 02 | 1.02 | 0007 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | | | | 280 Orang | 4.249.101.330,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 2.300.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5 | 04 | 02 | 1.02 | 0008 | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan | | | | 5 Dokumen | 198.409.200,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 200.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | | | | | | BADAN PENGHUBUNG | | | | | | 14.666.518.595,00 | | | | | | | 22.481.031.330,00 | |
| | 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 14.666.518.595,00 | | | | | | | 22.481.031.330,00 | |
| | 5 | 07 | | | | PENGELOLAAN PENGHUBUNG | | | | | | 14.666.518.595,00 | | | | | | | 22.481.031.330,00 | |
| 499 | 5 | 07 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan<br>Internal Perangkat Derah (Badan Penghubung)<br>Nilai Sakip PD (Badan Penghubung)<br>Nilai SAKIP Perangat Daerah (Badan Penghubung) | 75Nilai<br>75Nilai<br>90%<br>90% | | | 80 %<br>72 Nilai<br>72 Nilai | 12.444.932.591,00 | | | | | | 74Nilai<br>74Nilai<br>85%<br>85% | 20.037.286.726,00 | |
| | 5 | 07 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah (Badan Penghubung) | - | | | 8 Dokumen | 31.757.190,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 34.933.007,00 | |
| | 5 | 07 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 4 Dokumen | 28.399.299,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 31.239.228,00 | BADAN PENGHUBUNG |
| | 5 | 07 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 4 Laporan | 3.357.891,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 3.693.779,00 | BADAN PENGHUBUNG |
| | 5 | 07 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Survey Kepuasan Pelayanan Keuangan (Badan Penghubung) | - | | | 80 % | 5.196.401.828,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 5.716.042.011,00 | |
| | 5 | 07 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 30 Orang/ Bulan | 5.195.978.361,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 5.715.576.197,00 | BADAN PENGHUBUNG |
| | 5 | 07 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 2 Laporan | 423.467,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 465.814,00 | BADAN PENGHUBUNG |
| | 5 | 07 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | survey kepuasan pelayanan kepegawaian (Badan Penghubung) | - | | | 80 % | 48.783.394,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 53.661.734,00 | |
| | 5 | 07 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 30 Orang | 48.783.394,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 53.661.734,00 | BADAN PENGHUBUNG |
| | 5 | 07 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Pelayanan Administras Umum Perangkat Daerah (Badan Penghubung) | - | | | 80 % | 1.043.249.156,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 1.147.574.073,00 | |
| | 5 | 07 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 7 Paket | 9.264.171,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 10.190.589,00 | BADAN PENGHUBUNG |
| | 5 | 07 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 4 Paket | 2.977.962,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 3.275.758,00 | BADAN PENGHUBUNG |
| | 5 | 07 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 10 Paket | 69.269.570,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 76.196.527,00 | BADAN PENGHUBUNG |
| | 5 | 07 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 6 Paket | 15.671.330,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 17.238.463,00 | BADAN PENGHUBUNG |
| | 5 | 07 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 2 Dokumen | 1.097.626,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 1.207.389,00 | BADAN PENGHUBUNG |
| | 5 | 07 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 60 Paket | 181.718.144,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 199.889.958,00 | BADAN PENGHUBUNG |
| | 5 | 07 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 8 Laporan | 198.950.878,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 218.845.966,00 | BADAN PENGHUBUNG |
| | 5 | 07 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 45 Laporan | 564.299.475,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 620.729.423,00 | BADAN PENGHUBUNG |
| | 5 | 07 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah urusan Pemerintah yang diadakan (Badan Penghubung)<br>Jumlah Barang Milik Daerah urusan Pemerintah yang diadakan (Badan Penghubung) | - | | | 5 BMD<br>0 unit | 931.627.323,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 7.372.650.929,00 | |
| | 5 | 07 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 2 Unit | 338.773.572,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 372.650.929,00 | BADAN PENGHUBUNG |
| | 5 | 07 | 01 | 1.07 | 0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 592.853.751,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 7.000.000.000,00 | BADAN PENGHUBUNG |
| | 5 | 07 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Badan Penghubung)<br>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Badan Penghubung) | - | | | 4 jasa penunjang<br>4 penyediaan | 3.562.407.374,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 3.918.648.111,00 | |
| | 5 | 07 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 161.290.098,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 177.419.107,00 | BADAN PENGHUBUNG |
| | 5 | 07 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 546.374.017,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 601.011.419,00 | BADAN PENGHUBUNG |
| | 5 | 07 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 33.538.584,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 36.892.442,00 | BADAN PENGHUBUNG |
| | 5 | 07 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 2.821.204.675,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 3.103.325.143,00 | BADAN PENGHUBUNG |
| | 5 | 07 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara<br>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang di pelihara (Badan Penghubung) | - | | | 5 BMD<br>30 BMD | 1.630.706.326,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 1.793.776.861,00 | |
| | 5 | 07 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | | | | 4 Unit | 387.462.110,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 426.208.321,00 | BADAN PENGHUBUNG |
| | 5 | 07 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 14 Unit | 876.320.505,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 963.952.555,00 | BADAN PENGHUBUNG |
| | 5 | 07 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 48 Unit | 28.672.440,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 31.539.684,00 | BADAN PENGHUBUNG |
| | 5 | 07 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 5 Unit | 338.251.271,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 372.076.301,00 | BADAN PENGHUBUNG |
| 500 | 5 | 07 | 02 | | | PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG | Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Derah<br>Survey kepuasan pelayanan Badan Penghubung<br>Survey kepuasan pelayanan Badan Penghubung | 95%<br>92% | | | 85 %<br>82 %<br>82 % | 2.221.586.004,00 | | | | | | 90%<br>87% | 2.443.744.604,00 | |
| | 5 | 07 | 02 | 1.01 | | Pelaksanaan Pelayanan Penghubung | 1. Survey kepuasan Pelaksanaan Pelayanan Badan Penghubung (% pelayanan sesuai standar)<br>2. Survey kepuasan Pelaksanaan Pelayanan Badan Penghubung (% peningkatan pelayanan promosi dan seni budaya daerah)<br>3. Survey kepuasan Pelaksanaan Pelayanan Badan Penghubung (% inovasi teknologi informasi) | - | | | 85 %<br>85 %<br>75 % | 2.221.586.004,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan | - | - | 2.443.744.604,00 | |
| | 5 | 07 | 02 | 1.01 | 0002 | Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat | | | | 20 Laporan | 1.049.710.142,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 1.154.681.156,00 | BADAN PENGHUBUNG |
| | 5 | 07 | 02 | 1.01 | 0004 | Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya | | | | 20 Laporan | 838.464.591,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 922.311.050,00 | BADAN PENGHUBUNG |
| | 5 | 07 | 02 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung | | | | 70 Laporan | 333.411.271,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Pemerintahan | - | | 366.752.398,00 | BADAN PENGHUBUNG |
| | | | | | | INSPEKTORAT DAERAH | | | | | | 30.547.868.839,00 | | | | | | | 27.171.099.916,00 | |
| | 6 | | | | | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 15.040.131.312,00 | | | | | | | 10.885.136.296,00 | |
| | 6 | 01 | | | | INSPEKTORAT DAERAH | | | | | | 15.040.131.312,00 | | | | | | | 10.885.136.296,00 | |
| 501 | 6 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 81Nilai<br>90Nilai | | | - | 9.494.796.712,00 | | | | | | 81Nilai<br>90Nilai | 4.199.221.056,00 | |
| | 6 | 01 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 15.564.560,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 17.121.016,00 | |
| | 6 | 01 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 12 Laporan | 15.564.560,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 17.121.016,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6 | 01 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 642.743.900,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 885.669.300,00 | |
| | 6 | 01 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 60 Orang | 547.760.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 790.685.400,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6 | 01 | 01 | 1.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 86 Orang | 94.983.900,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 94.983.900,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 680.282.140,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 482.282.140,00 | |
| | 6 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 15.950.400,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 15.950.400,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 79.570.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 79.570.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6 | 01 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1.781.400,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 1.781.400,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 24.997.300,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 24.997.300,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 33.249.340,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 33.249.340,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 12 Dokumen | 15.900.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 15.900.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 12 Paket | 119.913.900,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 119.913.900,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6 | 01 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 12 Laporan | 113.920.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 113.920.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 220.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 22.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6 | 01 | 01 | 1.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 12 Dokumen | 54.999.800,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 54.999.800,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6 | 01 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 3.698.642.552,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 1.256.867.300,00 | |
| | 6 | 01 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 5 Unit | 1.654.710.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 500.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6 | 01 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 3 Paket | 1.650.644.140,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 390.834.400,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6 | 01 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 6 Unit | 393.288.412,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 366.032.900,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 989.941.500,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 989.941.500,00 | |
| | 6 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 23.331.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 23.331.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 173.994.500,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 173.994.500,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6 | 01 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 76.316.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 76.316.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6 | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 716.300.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 716.300.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 3.467.622.060,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 567.339.800,00 | |
| | 6 | 01 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | | | | 5 Unit | 173.969.060,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 303.686.800,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 6 Unit | 63.750.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 63.750.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 6 | 01 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 2 Unit | 3.229.903.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 199.903.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| 502 | 6 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | - | >5% | | | - | 3.979.834.600,00 | | | | | | >5% | 4.657.818.060,00 | |
| | 6 | 01 | 02 | 1.01 | | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | - | - | | | - | 3.754.834.600,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 4.347.818.060,00 | |
| | 6 | 01 | 02 | 1.01 | 0001 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | | | | 36 Laporan | 839.934.600,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 923.928.060,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6 | 01 | 02 | 1.01 | 0002 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | 60 Laporan | 1.290.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 1.419.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6 | 01 | 02 | 1.01 | 0003 | Reviu Laporan Kinerja | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | | | | 48 Laporan | 350.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 385.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6 | 01 | 02 | 1.01 | 0004 | Reviu Laporan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | | | | 38 Laporan | 300.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 375.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6 | 01 | 02 | 1.01 | 0005 | Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota | | | | 7 Laporan | 225.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 302.500.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6 | 01 | 02 | 1.01 | 0006 | Kerjasama Pengawasan Internal | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk | | | | 4 Kesepakatan | 100.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 192.500.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6 | 01 | 02 | 1.01 | 0007 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | | | | 24 Dokumen | 649.900.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 749.890.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6 | 01 | 02 | 1.02 | | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | - | - | | | - | 225.000.000,00 | | | - | Pembangunan Demokrasi | - | - | 310.000.000,00 | |
| | 6 | 01 | 02 | 1.02 | 0001 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | | | | 4 Laporan | 75.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 105.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6 | 01 | 02 | 1.02 | 0002 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | | | | 6 Laporan | 150.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 205.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| 503 | 6 | 01 | 03 | | | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | - | 3Level | | | - | 1.565.500.000,00 | | | | | | 3Level | 2.028.097.180,00 | |
| | 6 | 01 | 03 | 1.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | - | - | | | - | 340.000.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 386.347.180,00 | |
| | 6 | 01 | 03 | 1.01 | 0001 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun | | | | 2 Rekomendasi | 165.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 172.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6 | 01 | 03 | 1.01 | 0002 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun | | | | 4 Rekomendasi | 175.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 214.347.180,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6 | 01 | 03 | 1.02 | | Pendampingan dan Asistensi | - | - | | | - | 1.225.500.000,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 1.641.750.000,00 | |
| | 6 | 01 | 03 | 1.02 | 0001 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 10 Perangkat Daerah | 225.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 385.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6 | 01 | 03 | 1.02 | 0002 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | | | | 8 Perangkat Daerah | 100.500.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 201.750.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6 | 01 | 03 | 1.02 | 0003 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | | | | 24 Kegiatan | 550.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 654.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6 | 01 | 03 | 1.02 | 0004 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | | | | 6 Perangkat Daerah | 350.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 401.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | X | | | | | NON URUSAN | | | | | | 15.507.737.527,00 | | | | | | | 16.285.963.620,00 | |
| | X | XX | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX | | | | | | 15.507.737.527,00 | | | | | | | 16.285.963.620,00 | |
| 504 | X | XX | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 81Nilai<br>90Nilai | | | - | 15.507.737.527,00 | | | | | | 81Nilai<br>90Nilai | 16.285.963.620,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 17.745.100,00 | | | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | - | 21.471.571,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 12 Dokumen | 7.294.200,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 8.825.982,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | X | XX | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 4 Laporan | 10.450.900,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Sumber Daya Manusia | - | | 12.645.589,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | X | XX | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 15.489.992.427,00 | | | - | - | - | - | 16.264.492.049,00 | |
| | X | XX | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 90 Orang/ Bulan | 15.489.992.427,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 16.264.492.049,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | | | | | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | | | 74.437.196.883,00 | | | | | | | 22.384.716.696,00 | |
| | 8 | | | | | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | | | | | | 74.437.196.883,00 | | | | | | | 22.384.716.696,00 | |
| | 8 | 01 | | | | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | | | 74.437.196.883,00 | | | | | | | 22.384.716.696,00 | |
| 505 | 8 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 80Nilai<br>80Nilai<br>82Nilai<br>2dg<br>82Nilai<br>80Nilai<br>80Nilai | | | 7 Dokumen | 9.529.128.744,00 | | | | | | 78,8Nilai<br>78,8Nilai<br>81Nilai<br>2dg<br>81Nilai<br>78,8Nilai<br>78,8Nilai | 10.382.138.709,00 | |
| | 8 | 01 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | 7 Dokumen | 276.167.400,00 | | | - | Pembangunan Demokrasi | - | - | 303.784.140,00 | |
| | 8 | 01 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 2 Dokumen | 182.557.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 200.813.360,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 12 Laporan | 18.305.100,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 20.135.610,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 2 Laporan | 75.304.700,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 82.835.170,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Pelayanan Keuangan | - | | | 80 Nilai | 6.189.618.124,00 | | | - | Pembangunan Demokrasi | - | - | 7.122.553.225,00 | |
| | 8 | 01 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 36 Orang/ Bulan | 6.105.618.124,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 7.024.153.225,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 12 Dokumen | 12.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 14.400.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 2000 Dokumen | 12.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 12.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 01 | 1.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | 12 Dokumen | 12.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 14.400.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 13 Laporan | 12.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 14.400.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | 10 Dokumen | 12.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 14.400.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 8 | 01 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 13 Laporan | 12.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 14.400.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 01 | 1.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | 2 Dokumen | 12.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 14.400.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Indeks pelayanan adminitrasi barang milik daerah | - | | | 77,70 % | 114.000.000,00 | | | - | Pembangunan Demokrasi | - | - | 136.800.000,00 | |
| | 8 | 01 | 01 | 1.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 1 Dokumen | 12.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 14.400.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 01 | 1.03 | 0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | | | 2 Laporan | 12.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 14.400.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 01 | 1.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 2 Laporan | 12.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 14.400.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 2 Laporan | 78.000.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 93.600.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks Pelayanan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | 83 % | 756.183.278,00 | | | - | Pembangunan Demokrasi | - | - | 908.209.042,00 | |
| | 8 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 12.008.729,00 | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 14.410.475,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 2 Paket | 24.339.974,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 29.207.969,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 69.643.981,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 83.572.777,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 43.884.000,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 52.660.800,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 6 Paket | 142.297.510,00 | Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 170.757.021,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 1 Laporan | 48.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Air Itam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 57.600.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 2 Laporan | 416.009.084,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 500.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan | - | | | 100 undefined | 930.000.000,00 | | | - | Pembangunan Demokrasi | - | - | 385.000.000,00 | |
| | 8 | 01 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 0 Unit | 930.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 385.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indeks Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | 85 undefined | 824.159.942,00 | | | - | Pembangunan Demokrasi | - | - | 988.992.302,00 | |
| | 8 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1.261.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 1.514.160,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 144.298.142,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 173.158.142,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 18 Laporan | 678.600.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 814.320.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 8 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indeks Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah | - | | | 80 undefined | 439.000.000,00 | | | - | Pembangunan Demokrasi | - | - | 536.800.000,00 | |
| | 8 | 01 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | | | | 5 Unit | 175.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 200.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 196 Unit | 114.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 136.800.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 0 Unit | 150.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 200.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 506 | 8 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | Persentase Jumlah konflik yang berlatarbelakang Ideologi | 25%<br>25% | | | 50 % | 3.833.999.768,00 | | | | | | 25%<br>25% | 4.800.000.000,00 | |
| | 8 | 01 | 02 | 1.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Persentase Jumlah Konflik yg berlatarbelakang Ideologi | - | | | 50 % | 3.833.999.768,00 | | | - | Pembangunan Demokrasi | - | - | 4.800.000.000,00 | |
| | 8 | 01 | 02 | 1.01 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | 1000 Orang | 3.651.761.768,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 4.500.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 02 | 1.01 | 0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | 150 Orang | 52.238.100,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 100.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 02 | 1.01 | 0006 | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | | | | 1 Dokumen | 129.999.900,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 200.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 507 | 8 | 01 | 03 | | | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | Persentase pembinaan politik di daerah | 100% | | | 30 % | 57.857.814.259,00 | | | | | | 20% | 4.708.895.400,00 | |
| | 8 | 01 | 03 | 1.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | persentase pembinaan politik di daerah | - | | | 30 % | 57.857.814.259,00 | | | - | Pembangunan Demokrasi | - | - | 4.708.895.400,00 | |
| | 8 | 01 | 03 | 1.01 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | 280 Orang | 57.576.999.959,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 4.400.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 03 | 1.01 | 0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | 280 Orang | 180.814.300,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 198.895.400,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 03 | 1.01 | 0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | 1 Laporan | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 110.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 508 | 8 | 01 | 04 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | Indeks Kinerja Ormas | 65Nilai<br>65Nilai | | | 55 Nilai | 225.000.000,00 | | | | | | 60Nilai<br>60Nilai | 265.000.000,00 | |
| | 8 | 01 | 04 | 1.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Indeks Kinerja Ormas | - | | | 55 Nilai | 225.000.000,00 | | | - | Pembangunan Demokrasi | - | - | 265.000.000,00 | |
| | 8 | 01 | 04 | 1.01 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | 250 Orang | 150.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 170.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 04 | 1.01 | 0004 | Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | 250 Orang | 50.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 55.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 04 | 1.01 | 0005 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | 1 Laporan | 25.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 40.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 509 | 8 | 01 | 05 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | Persentase pembinaan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Daerah | 100% | | | 30 % | 887.906.306,00 | | | | | | 20% | 1.015.000.000,00 | |
| | 8 | 01 | 05 | 1.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Persentase pembinaan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Daerah | - | | | 30 % | 887.906.306,00 | | | - | Pembangunan Demokrasi | - | - | 1.015.000.000,00 | |
| | 8 | 01 | 05 | 1.01 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | 1000 Orang | 757.906.306,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 850.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 05 | 1.01 | 0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | 250 Orang | 75.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 90.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 05 | 1.01 | 0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | 3 Laporan | 55.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 75.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 510 | 8 | 01 | 06 | | | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | Persentase Daerah terlibat Konflik Sosial | 25% | | | 50 % | 2.103.347.806,00 | | | | | | 25% | 1.213.682.587,00 | |
| | 8 | 01 | 06 | 1.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Persentase Daerah terlibat Konflik Sosial | - | | | 50 % | 2.103.347.806,00 | | | - | Pembangunan Demokrasi | - | - | 1.213.682.587,00 | |
| | 8 | 01 | 06 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun | | | | 1 Dokumen | 25.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 27.500.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 06 | 1.01 | 0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun | | | | 1 Dokumen | 25.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 27.500.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 06 | 1.01 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | 350 Orang | 200.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 220.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 06 | 1.01 | 0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | 76 Orang | 300.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 330.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 06 | 1.01 | 0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | 7 Laporan | 153.347.806,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 168.682.587,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 06 | 1.01 | 0006 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi | | | | 1 Dokumen | 1.400.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Demokrasi | - | | 440.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | | | | | | | | | | **J U M L A H** | **3.338.340.083.583,00** | | | | | | | **3.107.340.660.800,90** | |

# BAB VII
# KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan Indikator Kinerja Daerah bertujuan memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan, sebagai berikut:

## 7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator Sasaran Strategik RPD Tahun 2023-2026 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini,

**Tabel VII.1**
Indikator Kinerja Utama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2023-2026

| NO | INDIKATOR KINERJA SASARAN | KONDISI AWAL | TARGET | | | | KONDISI AKHIR RPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| *1* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *10* |
| 1 | Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian | -0,73 | 4,03 | 4,23 | 4,43 | 4,60 | 4,60 |
| 2 | Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan | 5,04 | 5,18 | 5,25 | 5,33 | 5,41 | 5,41 |
| 3 | Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian | 6,78 | 5,70 | 4,98 | 3,80 | 2,91 | 2,91 |
| 4 | Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan | 5,44 | 5,52 | 5,68 | 5,75 | 5,86 | 5,86 |
| 5 | Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan | 5,78 | 5,91 | 6,02 | 6,19 | 6,26 | 6,26 |
| 6 | Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan asing dan domestik | 43,00 | 2,70 | 2,63 | 2,56 | 2,50 | 2,50 |
| 7 | Laju Pertumbuhan Ekspor | 106,95 | 8,13 | 7,51 | 6,99 | 6,53 | 6,53 |
| 8 | Pertumbuhan Investasi | -39,68 | 25,00 | 30,00 | 30,77 | 34,12 | 34,12 |
| 9 | Indeks Pembangunan Manusia | 71,69 | 71,91 | 72,13 | 72,35 | 72,57 | 72,58 |
| 11 | Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi | 77,79 | 77,90 | 78,40 | 79,41 | 80,42 | 80,42 |
| 12 | Indeks Reformasi Birokrasi | 66,08 | 68,25 | 69,00 | 69,75 | 70,50 | 70,51 |
| 13 | Persentase Ketersediaan Infrastruktur | | | | | | |
| 14 | Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,75 | 0,8 | 0,8 |
| 15 | Indeks Kapasitas Daerah | 0,34 | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,39 | 0,39 |

| NO | INDIKATOR KINERJA SASARAN | KONDISI AWAL | TARGET | | | | KONDISI AKHIR RPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| *1* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *10* |
| 16 | Indeks desa membangun | 0,704 | 0,721 | 0,730 | 0,739 | 0,748 | 0,748 |
| 17 | Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) | 1,93 | 1,79 | 1,74 | 1,70 | 1,68 | 1,68 |
| 18 | Persentase Angka Kemiskinan | 4,67 | 4,30 | 4,20 | 4,10 | 4,01 | 4,01 |
| 19 | Tingkat Pengangguran Terbuka | 5,03 | 4,47 | 4,39 | 4,26 | 4,19 | 4,19 |
| 20 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | 72,05 | 75,43 | 75,84 | 76,7 | 77,5 | 77,5 |

*Sumber : RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026*

## 7.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKK)

Penetapan Indikator Kinerja Daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelengaraan pemerintah daerah. Khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat dicapai.

lndikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2023-2026 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan transaksi dan akuntabilitas penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu *aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah*. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Indikator Kinerja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara rinci disajikan pada tabel dibawah ini :

**Tabel VII.2**

Pelaporan IKK 2022

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| No. IKK | Kategori Urusan | Urusan | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | PEMDA | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian | Keterangan | |
| 1.a.1 | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pendidikan | Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah | Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah | Jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah atas = 61525. Jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada provinsi yang bersangkutan = 64751 | 95,01784 | | sesuai |
| 1.a.2 | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pendidikan | Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus | Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus | Jumlah anak usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun penyandang disabilitas yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan khusus = 1265. Jumlah anak usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun penyandang disabilitas pada provinsi yang bersangkutan = 2460 | 51,42276 | | sesuai |
| 1.b.1 | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Kesehatan | Rasio daya tampung rumah sakit rujukan | Rasio daya tampung rumah sakit rujukan | Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan di seluruh provinsi = 698. Jumlah Penduduk provinsi = 1472427 | 0,474047 | | |
| 1.b.2 | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Kesehatan | Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi | Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi | Jumlah RS Rujukan provinsi yang terakreditasi = 5. Jumlah RS provinsi = 5 | 100 | | |

| No. IKK | Kategori Urusan | Urusan | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | PEMDA | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian | Keterangan | |
| 1.b.3 | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Kesehatan | Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana | Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana | Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun = 236. Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana = 236 | 100 | | sesuai |
| 1.b.4 | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Kesehatan | Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi | Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi | Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar = 1621. Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB = 1621 | 100 | 1. Suatu KLB dinyatakan sebagai KLB Provinsi jika memenuhi salah satu kriteria kondisi<br><br>KLB sebagai berikut :<br><br>- KLB yang terjadi pada suatu wilayah Kabupaten/Kota di satu provinsi yang meluas ke Kabupaten/Kota lainnya dan memiliki hubungan epidemi | sesuai |
| 1.c.1.1 | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir | Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir | Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan provinsi (ha) = 151.23. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan provinsi (ha) = 4447.07 | 3,400666 | | sesuai |

| No. IKK | Kategori Urusan | Urusan | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | PEMDA | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian | Keterangan | |
| 1.c.1.2 | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi | Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi | Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi (m) = 30.1. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan provinsi (m) = 196.76 | 15,29782 | Tidak ada kegiatan pengaman pantai untuk tahun 2022 | sesuai |
| 1.c.2 | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi | Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi | Luas irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun eksisting = 2492. luas daerah irigasi kewenangan provinsi = 6925 | 35,98556 | | sesuai |
| 1.c.3 | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota | Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota | Jumlah kumulatif kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota = 0.<br>Jumlah kumulatif kebutuhan pemenuhan ka pasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/ kota di provinsi bersangkutan. = 1 | 0 | pada tahun 2022 dalam tahap penyusunan spam regional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan pada tahun 2023 dilanjutkan tahap penyusunan dokumen studi kelayakan spam regional. | Walaupun belum ada jumlah kumulatif kapasitas terlayani, pelaksanaan pemenuhan kapasitas penyaluran air minum curah lintas kabupaten kota pada tahun 2022 sudah dilakukan perencanaan SPAM dan 2023 dilanjutkan dengan studi kelayakan |
| 1.c.4 | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL | Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL | Total volume limbah yang masuk dalam SPAL Domestik Regional = 0. Total kapasitas pengolahan limbah SPAL Domestik Regional = 1 | 0 | belum adanya SPAL Regional yang terbangun | Belum ada SPAL regional yang terbangun |

| No. IKK | Kategori Urusan | Urusan | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | PEMDA | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian | Keterangan | |
| | Pelayanan Dasar | | Regional | Regional | | | | |
| 1.c.5 | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rasio kemantapan jalan | Rasio kemantapan jalan | Panjang jalan kewenangan provinsi yang mantap = 780.11. Panjang jalan keseluruhan di wilayah provinsi = 850.99 | 91,67088 | berdasarkan kegiatan survey kondisi jalan ta.2022 | sesuai |
| 1.c.6 | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli | Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli | Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli = 1551. jumlah kebutuhan tenaga ahli di wilayah provinsi = 2408 | 64,4103 | Data diolah berdasarkan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi Bidang Jasa Konstruksi Tahun 2022 | sesuai |
| 1.d.1 | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 1.Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya; 2.Jumlah rumah yang terkena bencana alam; 3.Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam; 4.Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi; 5.Jumlah unit rumah korban bencana yang | Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni | Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n = 1. Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n = 1 | 100 | | tim reviu dalam memverifikasi data dukung harus cermat, bukan ok |

| No. IKK | Kategori Urusan | Urusan | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | PEMDA | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian | Keterangan | |
| | | | dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi; Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi 7.Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana 8.Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi; 9.Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan; | | | | | |
| 1.d.2 | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 1. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM  2.Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan | Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni | Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni = 1. Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan = 1 | 100 | tidak ada rumah tangga yang terkena relokasi program pemerintah daerah | tim reviu dalam memverifikasi data dukung harus cermat, bukan ok |

| No. IKK | Kategori Urusan | Urusan | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | PEMDA | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian | Keterangan | |
| | | | yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM;<br>3. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM;<br>4. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM; | | | | |

| No. IKK | Kategori Urusan | Urusan | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | PEMDA | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian | Keterangan | |
| 1.d.3 | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 1.Jumlah luasan (ha) kawasan pemukiman kumuh 10-15 Ha 2.Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH 3.Jumlah luasan (ha) penanganan infrastrukur kawasan kumuh | Persentasi Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani | Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani = 1.662. Luas kawasan kumuh 10-15 Ha = 154.6 | 1,075032 | berdasarkan kegiatan ta. 2022 | sesuai |
| 1.d.4 | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 1.Jumlah pemukiman yang terfasilitasi PSU 2.Jumlah pengembang yang tersertifikasi 3.Jumlah pengembang yang teregistrasi 4.Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan | Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU | Jumlah satuan perumahan yang sedang dibangun terfasilitasi PSU = 3. Jumlah satuan perumahan = 391 | 0,767263 | | sesuai |
| 1.e.1 | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan | Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan | Jumlah pengaduan yang diselesaikan = 54. Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk = 54 | 100 | 100% | Sesuai |
| 1.e.2 | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | Persentase Perda dan Perkada  yang ditegakkan | Persentase Perda dan Perkada  yang ditegakkan | Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan = 6. Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi = 6 | 100 | | sesuai |

| No. IKK | Kategori Urusan | Urusan | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | PEMDA | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian | Keterangan | |
| 1.e.3 | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal | Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal | Kemajuan pekerjaan dokumen kebencanaan yang disusun = 2. Jumlah dokumen kebencanaan yang akan disusun = 3 | 66,66667 | | sesuai |
| 1.e.4 | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | Persentase penanganan pra bencana | Persentase penanganan pra bencana | Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan pra bencana = 7. Jumlah kabupaten/kota di wilayah provinsi = 7 | 100 | | sesuai |
| 1.e.5 | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | Persentase penanganan tanggap darurat bencana | Persentase penanganan tanggap darurat bencana | Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan tanggap darurat bencana = 7. Jumlah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang mengalami bencana = 7 | 100 | | sesuai |
| 1.f.1 | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Sosial | Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya = 37. Populasi penyandang disabilitas telantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti = 37 | 100 | | sesuai |
| 1.f.2 | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Sosial | Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | Jumlah Anak Terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya = 366. Jumlah Anak Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti = 366 | 100 | | sesuai |

| No. IKK | Kategori Urusan | Urusan | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | PEMDA | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian | Keterangan | |
| 1.f.3 | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Sosial | Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | Jumlah Lanjut Usia Terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya = 24. Populasi Lanjut Usia Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti = 24 | 100 | | sesuai |
| 1.f.4 | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Sosial | Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | Jumlah Gelandangan dan Pengemis di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya = 53. Populasi Gelandangan dan Pengemis Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti = 53 | 100 | | sesuai |
| 1.f.5 | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Sosial | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi | Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya = 72. Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah provinsi yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah provinsi = 72 | 100 | | sesuai |
| 2.a.1.1 | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Tenaga Kerja | Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja. | Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja. | Jumlah kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja = 2. Jumlah kabupaten/kota = 7 | 28,57143 | kab/kota yang menyusun RTK adalah Kab. Bangka dan Kota Pangkalpinang | sesuai |
| 2.a.1.2 | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Tenaga Kerja | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi | Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi = 339. Jumlah tenaga kerja keseluruhan = 730972 | 0,046377 | Jumlah seluruh Tenaga Kerja Prov. Kep. Bangka Belitung per Desember 2022 BPS belum meriliskan data terbaru | Sesuai |

| No. IKK | Kategori Urusan | Urusan | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | PEMDA | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian | Keterangan | |
| 2.a.2 | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Tenaga Kerja | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja | PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) = 23740319720. Jumlah tenaga kerja = 730972 | 3247774 | | sesuai |
| 2.a.3 | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Tenaga Kerja | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). | Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak = 2429. Jumlah Perusahaan = 3535 | 68,71287 | | sesuai |
| 2.a.4 | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Tenaga Kerja | Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. | Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. | Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan = 1491. Jumlah pencaker yang terdaftar = 2618 | 56,95187 | persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi | sesuai |
| 2.a.5 | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Tenaga Kerja | Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan | Mengukur persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan | ∑ Total perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan ketenagakerjaan pada tahun n = 270. ∑ Total perusahaan yang terdaftar melalui mekanisme wajib lapor ketenagakerjaan pada tahun n = 3535 | 7,637907 | Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan | sesuai |

| No. IKK | Kategori Urusan | Urusan | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | PEMDA | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian | Keterangan | |
| | | | | | | | adalah 7,69% | |
| 2.b.1 | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Persentase ARG pada belanja langsung APBD | Persentase ARG pada belanja langsung APBD | Jumlah ARG pada belanja operasi dan modal APBD = 71466100195. Jumlah seluruh belanja operasi dan modal APBD = 1206203091510 | 5,924881 | | Sesuai |
| 2.b.2 | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak | Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak | Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat provinsi yang didampingi = 10. Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) = 459029 | 0,217851 | | Sesuai |
| 2.b.3 | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) | Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan = 10. Jumlah penduduk perempuan = 727241 | 1,37506 | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) yaitu sebesar 1,53 | Sesuai |
| 2.c.1 | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pangan | Persentase cadangan pangan | Persentase cadangan pangan | Jumlah cadangan pangan pemerintah provinsi = 49.016. Jumlah target cadangan pangan pemerintah provinsi yang ditetapkan = 112.89 | 43,41926 | | sesuai |

| No. IKK | Kategori Urusan | Urusan | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | PEMDA | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian | Keterangan | |
| 2.d.1 | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pertanahan | Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dibandingkan dengan luas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan | Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan | Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) = 1. Seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) = 1 | 100 | | TDI Khusus |
| 2.d.2 | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pertanahan | Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu | Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu | Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum selesai tepat waktu = 1. Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum = 1 | 100 | | TDI Khusus |
| 2.d.3 | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pertanahan | Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota. | Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota. | Luas pemanfaatan adalah luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukkannya diatas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) lintas kab/ kota = 1. Luas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan = 1 | 100 | | TDI Khusus |
| 2.e.1 | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi | | 71,67 | Data capaian IKLH pada tahun 2022 | sesuai |

| No. IKK | Kategori Urusan | Urusan | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | PEMDA | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian | Keterangan | |
| 2.e.2 | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Lingkungan Hidup | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan  terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan  terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Provinsi = 23. usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan = 100 | 23 | Data ketaatan izin usaha lingkungan pada tahun 2022 | sesuai |
| 2.f.1.1 | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun | Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun | Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 tahun = 2. 2 kali = 2 | 100 | | Sesuai |
| 2.f.1.2 | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Pemanfaatan data kependudukan | Pemanfaatan data kependudukan | PD Provinsi yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama = 25. Kabupaten/Kota = 27 | 92,59259 | | Sesuai |
| 2.g.1 | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pemberdayaan masyarakat dan desa | Persentase pengentasan desa tertinggal | Persentase pengentasan desa tertinggal | Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun = 1. Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n) = 1 | 100 | | sesuai |
| 2.g.2 | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pemberdayaan masyarakat dan desa | Persentase peningkatan status desa mandiri | Persentase peningkatan status desa mandiri | Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun = 42. Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n) = 112 | 37,5 | | sesuai |
| 2.h.1 | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan | Pengendalian penduduk dan keluarga berencana | TFR (Angka Kelahiran Total) | TFR (Angka Kelahiran Total) | | 2,49 | | Sesuai |

| No. IKK | Kategori Urusan | Urusan | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | PEMDA | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian | Keterangan | |
| | Pelayanan Dasar | | | | | | | |
| 2.h.2 | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pengendalian penduduk dan keluarga berencana | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | Jumlah peserta KB Aktif Modern = 166619. Jumlas Pasangan Usia Subur = 223993 | 74,38581 | | Sesuai |
| 2.h.3 | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pengendalian penduduk dan keluarga berencana | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) | Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani = 27902. Jumlas Pasangan Usia Subur = 233357 | 11,95679 | | Sesuai |
| 2.i.1 | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Perhubungan | Rasio konektivitas Provinsi | Rasio konektivitas Provinsi | | 0,688 | Wilayah tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan Trayek Lalu Lintas frekuensi tinggi Trayek Penyeberangan frekuensi sedang dan frekuensi tinggi | sesuai |
| 2.i.2 | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Perhubungan | V/C Ratio di Jalan Provinsi | V/C Ratio di Jalan Provinsi | | 0,174 | VC Ratio Rata-Rata Jalan Provinsi | sesuai, sama dengan tahun kemarin |

| No. IKK | Kategori Urusan | Urusan | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | PEMDA | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian | Keterangan | |
| 2.j.1 | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Komunikasi dan Informatika | Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo | Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo | Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo = 26. Jumlah PD = 27 | 96,2963 | | sesuai |
| 2.j.2 | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Komunikasi dan Informatika | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi = 4. Jumlah Layanan Publik = 7 | 57,14286 | | sesuai |
| 2.j.3 | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Komunikasi dan Informatika | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi | Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi = 1145373. Jumlah penduduk = 1472427 | 77,7881 | | sesuai |
| 2.k.1 | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Koperasi, usaha kecil dan menengah | Meningkatnya Koperasi yang berkualitas | Meningkatnya Koperasi yang berkualitas | Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volumeusaha dan aset = 6. Jumlah seluruh koperasi aktif = 102 | 5,882353 | | sesuai |
| 2.k.2 | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Koperasi, usaha kecil dan menengah | Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha | Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha | Jumlah usaha kecil yang menjadi wirausaha = 1010. Jumlah usaha kecil keseluruhan = 3730 | 27,07775 | | sesuai |

| No. IKK | Kategori Urusan | Urusan | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | PEMDA | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian | Keterangan | |
| 2.l | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Penanaman Modal | Persentase peningkatan investasi di provinsi | Persentase peningkatan investasi di provinsi | (Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di provinsi = 3839832166000. Jumlah investasi tahun n-1 di provinsi = 4330297580000 | 88,67363 | | sesuai |
| 2.m.1 | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Kepemudaan dan Olahraga | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri | Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di provinsi = 3795. Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di provinsi = 338465 | 1,121239 | | sesuai |
| 2.m.2 | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Kepemudaan dan Olahraga | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan | Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di provinsi = 918. jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di provinsi = 338465 | 0,271225 | | sesuai |
| 2.m.3 | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Kepemudaan dan Olahraga | Peningkatan prestasi olahraga | Peningkatan prestasi olahraga | | 14 | 4 emas ; 4 perak ; 6 perunggu | |
| 2.n.1 | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Statistik | Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah = 27. jumlah PD = 27 | 100 | | sesuai |

| No. IKK | Kategori Urusan | Urusan | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | PEMDA | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian | Keterangan | |
| 2.n.2 | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Statistik | Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah | Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah | Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah = 27. jumlah PD = 27 | 100 | | sesuai |
| 2.o | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Persandian | Tingkat keamanan informasi pemerintah | Tingkat keamanan informasi pemerintah | Jumlah nilai per area keamanan informasi = 230. Jumlah area penilaian = 645 | 35,65891 | | sesuai |
| 2.p | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Kebudayaan | Terlestarikannya Cagar Budaya | Terlestarikannya Cagar Budaya | Jumlah cagar budaya yang dilestarikan = 8. Jumlah cagar budaya yang ditetapkan = 9 | 88,88889 | | sesuai |
| 2.q.1 | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Perpustakaan | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat | | 49,26 | | sesuai |
| 2.q.2 | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Perpustakaan | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | | 16,05 | | sesuai |

| No. IKK | Kategori Urusan | Urusan | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | PEMDA | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian | Keterangan | |
| 2.r.1 | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Kearsipan | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | | 75,25 | T= (100+100+100+1)/4 | sesuai |
| 2.r.2 | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Kearsipan | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat | | 128,67 | T=(643+0+22+107+0+0)/6 | |
| 3.a.1 | Urusan Pilihan | Kelautan dan Perikanan | Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP) | Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP) | Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) provinsi = 230588. Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan = 240920 | 95,71144 | Data sudah terlampir | |

| No. IKK | Kategori Urusan | Urusan | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | PEMDA | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian | Keterangan | |
| 3.a.2 | Urusan Pilihan | Kelautan dan Perikanan | Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku | Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku | | 72,83 | Data sudah terlampir | |
| 3.b.1 | Urusan Pilihan | Pariwisata | Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan | Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan | (Jumlah wisatawan tahun n– Jumlah wisatawan tahun n-1) = 426. Jumlah wisatawan tahun n-1 = 2476 | 17,20517 | | |
| 3.b.2 | Urusan Pilihan | Pariwisata | Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi | Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi | (Jumlah wisatawan tahun n– Jumlah wisatawan tahun n-1) = 228066. Jumlah wisatawan tahun n-1 = 221475 | 102,976 | | |
| 3.b.3 | Urusan Pilihan | Pariwisata | Tingkat hunian akomodasi | Tingkat hunian akomodasi | Jumlah kamar yang terjual = 796. Jumlah kamar yang tersedia = 2361 | 33,71453 | | |
| 3.b.4 | Urusan Pilihan | Pariwisata | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku | Total nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB = 9.46. Total PDRB Berlaku = 6.11 | 154,8282 | | BELUM DIRILIS BPS |
| 3.c.1 | Urusan Pilihan | Pertanian | Produktivitas pertanian per hektar per tahun | Produktivitas pertanian per hektar per tahun | Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun = 614.25. luas panen = 15108 | 4,065727 | | sesuai |
| 3.c.2 | Urusan Pilihan | Pertanian | Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular | Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular | jumlah Jumlah kejadian penyakit/kasustahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) = -594. Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) = 755 | -78,6755 | | |

| No. IKK | Kategori Urusan | Urusan | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | PEMDA | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian | Keterangan | |
| 3.d.1 | Urusan Pilihan | Kehutanan | Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial | Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial | Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yg diberikan akses legal = 15. jumlah total usulan KTH yang terintegrasi = 21 | 71,42857 | Data KTH yang memiliki akses legalpada tahun 2022 | sesuai |
| 3.d.2 | Urusan Pilihan | Kehutanan | Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi) | Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi) | Jumlah hutan yang rusak = 3506. Jumlah hutan keseluruhan = 652641 | 0,537202 | Data kerusakan hutan pada tahun 2022 | sesuai |
| 3.d.3 | Urusan Pilihan | Kehutanan | Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi | Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi | Luas lahan kritis di provinsi yang direhabilitasi (ha) = 91.18. Luas Lahan Kritis di provinsi (ha) = 167.104 | 54,56482 | Data lahan kritis yang direhabilitasi pada tahun 2022 menggunakan dana APBD | sesuai |
| 3.e.1 | Urusan Pilihan | Energi dan Sumber Daya Mineral | Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda | Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda | Jumlah usaha tambang yang sesuai kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda = 261. jumlah usaha tambang sesuai kewenangan Provinsi = 261 | 100 | | SESUAI |
| 3.e.2 | Urusan Pilihan | Energi dan Sumber Daya Mineral | Persentase Desa Yang Teraliri Listrik | Persentase Desa Yang Teraliri Listrik | Jumlah desa yang teraliri listrik = 391. Jumlah desa = 391 | 100 | | SESUAI |
| 3.f.1 | Urusan Pilihan | Perdagangan | Pertumbuhan nilai ekspor non migas | Pertumbuhan nilai ekspor non migas | Nilai ekspor non migas tahun berjalan – nilai ekspor non migas tahun sebelumnya = -31937495. Nilai ekspor non migas tahun sebelumnya = 2672050698 | -1,195243 | | |

| No. IKK | Kategori Urusan | Urusan | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | PEMDA | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian | Keterangan | |
| 3.f.2 | Urusan Pilihan | Perdagangan | Persentase penanganan pengaduan konsumen | Persentase penanganan pengaduan konsumen | Jumlah pengaduan konsumen yang ditangani dan diselesaikan Dinas Provinsi dan BPSKsesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tahun berjalan = 43. Jumlah pengaduan konsumen yang diterimadalam tahun berjalan = 43 | 100 | pengaduan diterima dan diselesaikan oleh Disperindag karena BPSK sudah habis masa kenaggotaannya dan belum diseleksi kembali keanggotaannya | sesuai |
| 3.f.3 | Urusan Pilihan | Perdagangan | Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku | Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku | Jumlah sampel yang sesuai ketentuan = 195. Jumlah sampel yang diuji dalam satu tahun = 202 | 96,53465 | Lada Putih (SNI 0004 2013) | sesuai |
| 3.f.4 | Urusan Pilihan | Perdagangan | Tertib Usaha | Tertib Usaha | Jumlah pelaku usaha yang memiliki SIUP MB TBB = 2. Jumlah pelaku usaha MB TBB = 2 | 100 | | sesuai |
| 3.f.5 | Urusan Pilihan | Perdagangan | Persentase kinerja realisasi pupuk | Persentase kinerja realisasi pupuk | Realisasi = 28603.43. RDKK = 28898 | 98,98066 | | SESUAI |
| 3.f.6 | Urusan Pilihan | Perdagangan | Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | Persentasebarang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | Jumlah barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan = 42. Jumlah barang beredar yang diawasi = 51 | 82,35294 | | sesuai |
| 3.f.7 | Urusan Pilihan | Perdagangan | Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok | Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok | | 6,62 | | sesuai |

| No. IKK | Kategori Urusan | Urusan | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | PEMDA | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian | Keterangan | |
| 3.g.1 | Urusan Pilihan | Perindustrian | Pertambahan jumlah industri besar di provinsi | Pertambahan jumlah industri besar di provinsi | (Jumlah Industri besar tahun n - Jumlah industri besar tahun n-1) = 39. Jumlah industri besar tahun n-1 = 37 | 105,4054 | | SESUAI |
| 3.g.2 | Urusan Pilihan | Perindustrian | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP | | 94,04 | | sesuai |
| 3.g.3 | Urusan Pilihan | Perindustrian | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait | Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 35. Jumlah izin yang dikeluarkan = 76 | 46,05263 | | SESUAI |
| 3.g.4 | Urusan Pilihan | Perindustrian | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besaryang dikeluarkan oleh instansi terkait | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besaryang dikeluarkan oleh instansi terkait | Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 0. Jumlah izin yang dikeluarkan = 0 | 0 | | TDI khusus, tidak ada pengajuan izin perluasan industri |

| No. IKK | Kategori Urusan | Urusan | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | PEMDA | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian | Keterangan | |
| 3.g.5 | Urusan Pilihan | Perindustrian | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait | Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 0. Jumlah izin yang dikeluarkan = 0 | 0 | | sesuai |
| 3.g.6 | Urusan Pilihan | Perindustrian | Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini | Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini | | 95 | | sesuai |
| 3.h | Urusan Pilihan | Transmigrasi | | | | 0 | | |
| 4.a.1 | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | Perencanaan dan Keuangan | Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan | Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan | Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan = 434777536716. Jumlah APBD = 2402190953686 | 18,09921 | Data LRA sementara per 31 Desember 2022 | SESUAI |
| 4.a.2 | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | Perencanaan dan Keuangan | Rasio PAD | Rasio PAD | Jumlah PAD = 1068919358907.4. Jumlah Pendapatan pada APBD = 2840247323447 | 37,63473 | Data LRA sementara per 31 Desember 2022 | sesuai |
| 4.a.3 | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | Perencanaan dan Keuangan | Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures ) | Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures ) | Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures = 1479768992709. jumlah belanja APBD = 2402190953686 | 61,60081 | Data LRA sementara per 31 Desember 2022 | Sesuai |

| No. IKK | Kategori Urusan | Urusan | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | PEMDA | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian | Keterangan | |
| 4.a.4 | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | Perencanaan dan Keuangan | Opini Laporan Keuangan | Opini Laporan Keuangan | | 3 | 3=WTP, 2= WDP, 1= DISCLAIMER | sesuai |
| 4.a.5 | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | Perencanaan dan Keuangan | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | | 3 | | sesuai |
| 4.a.6 | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | Perencanaan dan Keuangan | Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | | 3 | | sesuai |
| 4.i.1 | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | Pengadaan | Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya.  yang ditandatangani pada kuartal pertama | Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya.  yang ditandatangani pada kuartal pertama | jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n = 1. jumlah kontrak keseluruhan tahun n = 1 | 100 | | sesuai |
| 4.i.2 | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | Pengadaan | Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif | Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif | jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif = 2250. jumlah seluruh pengadaan = 8186 | 27,48595 | | sesuai |
| 4.i.3 | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | Pengadaan | Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan | Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan | Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan = 1195125780506. total belanja operasi dan modal = 2229383563023 | 53,6079 | | SESUAI |

| No. IKK | Kategori Urusan | Urusan | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | PEMDA | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian | Keterangan | |
| 4.i.4 | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | Pengadaan | - | Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah | Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) = 222371477103. Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) = 383228522897 | 58,02582 | | SESUAI |
| 4.j.1 | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | Kepegawaian | Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas = 3033. Seluruh jumlah seluruh pegawai = 3466 | 87,50721 | | sesuai |
| 4.j.2 | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | Kepegawaian | Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) = 1158. seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) = 3466 | 33,41027 | | SESUAI |
| 4.j.3 | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | Kepegawaian | Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi = 599. seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) = 1158 | 51,72712 | | SESUAI |

| No. IKK | Kategori Urusan | Urusan | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | PEMDA | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian | Keterangan | |
| 4.k.1 | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | Manajemen Keuangan | Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD | Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD | Realisasi Belanja = 2402190953686. Total Belanja APBD = 2956135100866 | 18,7388 | Data LRA sementara per 31 Desember 2022 | sesuai |
| 4.k.2 | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | Manajemen Keuangan | Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD | Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD | Total PAD dalam realisasi = 1068919358907. Total PAD dalam APBD = 938568347761 | 13,88828 | Data LRA sementara per 31 Desember 2022 | sesuai |
| 4.k.3 | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | Manajemen Keuangan | Assets management | Assets management | | 4 | Nilai Asset tercantum dalam laporan anggaran (dalam proses) | laporan tahun 2021 |
| 4.k.4 | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | Manajemen Keuangan | Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya | Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya | Nilai realisasi SiLPA = 945091680893. total belanja anggaran tahun sebelumnya = 2465813370118 | 38,32779 | Data LRA sementara per 31 Desember 2022 | sesuai |
| 4.l.1 | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | Transparansi dan Partisipasi Publik | Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan *(Information on resources available to frontline service delivery units)* | Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan *(Information on resources available to frontline service delivery units*) | Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda = 2333063532520. Anggaran belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda = 2953145566082 | 79,00266 | | SESUAI |
| 4.l.2 | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | Transparansi dan Partisipasi Publik | Akses publik terhadap informasi keuangan daerah *(Public access to fiscal information)* | Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (*Public access to fiscal information)* | Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda = 12. total jumlah dokumen yang telah dirinci = 12 | 100 | Akses dokumen di : https://bakuda.babelprov.go.id/content/ | SESUAI |

**Tabel VII.3**
Indikator Kinerja Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Realisasi | | | Proyeksi Capaian Kinerja | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| **I.** | **ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT** | | | | | | |
| **A.** | **Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi** | | | | | | |
| 1 | Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian | | | | | | |
| 1 | Pertumbuhan PDRB | | | | | | |
| 1.1 | Laju Pertumbuhan Ekonomi (ADHK) | 5.05 | | 4.28 | 4.39 | 4.46 | 4.78 |
| 1.2 | Laju inflasi | | | | | | |
| 1.2.1 | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 3.75 | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 1.3 | PDRB per kapita (ADHB) | 55,565,863 | | 61,773,013 | 65,242,943 | 68,975,076 | 73,165,267 |
| 1.4. | Indeks Gini | 0.247 | | 0.237 | 0.232 | 0.222 | 0.216 |
| 1.5. | Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) | 0.19 | | 0.184 | 0.181 | 0.178 | 0.176 |
| 1.6. | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 71.69 | | 71.91 | 72.13 | 72.35 | 72.57 |
| 1.7. | Kemiskinan | | | | | | |
| 1.7.1 | Persentase Penduduk Miskin (%) | 4.67 | | 4.60 | 4.52 | 4.41 | 4.33 |
| 1.7.2 | Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang) | 69.70 | | 66.70 | 65.51 | 64.95 | 63.62 |
| 1.7.3 | Garis Kemiskinan (Rp) | 727.114 | | 860.062 | 905.646 | 951.647 | 997.000 |
| 1.7 | Pengangguran | | | | | | |
| 1.7.1 | Tingkat pengangguran Terbuka | 5.03 | | 3.85 | 3.19 | 2.49 | 1.64 |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Realisasi | | | Proyeksi Capaian Kinerja | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| | (%) | | | | | | |
| 1.7.2 | Jumlah Pengangguran (jiwa) | 37,18 | | 29,269 | 24,623 | 19,534 | 13,024 |
| 1.7.3 | Jumlah penduduk yang bekerja | 701,44 | | 731,675 | 747,736 | 764,41 | 782,68 |
| **B.** | **Fokus Kesejahteraan Masyarakat** | | | | | | |
| **1** | **Pendidikan** | | | | | | |
| 1.1. | Angka melek huruf | 98.1 | | 98.12 | 98.14 | 98.16 | 98.18 |
| | Angka rata-rata lama sekolah > 25 Tahun | 8.08 | | 8.33 | 8.43 | 8.53 | 8.63 |
| 1.2. | Angka rata-rata lama sekolah > 15 Tahun | 8.54 | | 8.78 | 8.89 | 9.00 | 9.11 |
| 1.3 | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMK/MA | 86.49 | | 92.43 | 94.27 | 96.11 | 97.95 |
| 1.4. | Harapan Lama Sekolah | 12.17 | | 12.30 | 12.39 | 12.47 | 12.55 |
| 1.5. | Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C | 58.79 | | 59.76 | 60.12 | 60.48 | 60.84 |
| 1.6. | Angka Partisipasi sekolah (APS) SMA/SMK | 68.15 | | 68.98 | 69.34 | 69.7 | 70.06 |
| **2** | **Kesehatan** | | | | | | |
| 2.1. | Angka kelangsungan hidup bayi | 992.6 | | 992.97 | 993.32 | 993.66 | 993.97 |
| 2.1.1 | Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup) | 7.4 | | 7 | 7 | 6 | 6 |
| 2.1.2 | Angka Kematian Balita (per 1000 kelahiran hidup) | 8.01 | | 7.61 | 7.22 | 6.87 | 6.52 |
| 2.1.3 | Angka Kematian Neonatus (per 1000 kelahiran hidup) | 5.8 | | 5.51 | 5.23 | 4.97 | 4.72 |
| 2.2. | Angka usia harapan hidup | 70.73 | | | | | |
| 2.3 | Prevalensi Kurang Gizi anak balita | 3.82 | | 3.5 | 3.2 | 3 | 2.8 |
| 2.4 | Kematian ibu (per 100.000 orang) | 62/24469KH | | 59/KH | 56/KH | 53/KH | 51/KH |
| 2.5 | Angka Stunting | 4.16 | | 4 | 3.8 | 3.6 | 3.4 |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Realisasi | | | Proyeksi Capaian Kinerja | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| 2.6 | Persentase Anak wasting | 1.24 | | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| **3** | **Ketenagakerjaan** | | | | | | |
| 3.1 | Jumlah Penduduk Bekerja (jiwa) | 701440 | | 7.316.753.958 | 7.477.356.708 | 7.644.101.762 | 7.826.795.794 |
| **C.** | **Fokus Seni Budaya dan Olahraga** | | | | | | |
| **1** | **Kebudayaan** | | | | | | |
| 1.1. | Jumlah grup kesenian | 11 | | 13 | 13 | 14 | 14 |
| 1.2. | Jumlah gedung | 0,0066 | | 0.0069 | 0.0071 | 0.0073 | 0.0074 |
| **2** | **Pemuda dan Olahraga** | | | | | | |
| 2.2. | Jumlah gedung olahraga | 14 | | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **II.** | **ASPEK PELAYANAN UMUM** | | | | | | |
| A. | Fokus Layanan Urusan Wajib | | | | | | |
| **1** | **Pendidikan** | | | | | | |
| 1.1. | Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah | | | | | | |
| | SMA/MA/SMK | | | | | | |
| 1.1.1. | Jumlah gedung sekolah | 127 | | 142 | 145 | 148 | 151 |
| 1.1.2. | Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun | 70,306 | | 74,35 | 74,64 | 74,905 | 75,125 |
| 1.1.3. | Rasio | 18.06 | | 19.10 | 19.43 | 19.76 | 20.10 |
| 1.2. | Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar | | | | | | |
| | SMA/MA/SMK | | | | | | |
| 1.2.1. | Jumlah guru | 3,349 | | 3,649 | 3,667 | 3,686 | 3,705 |
| 1.2.2. | Jumlah murid | 56,143 | | 62,182 | 63,802 | 65,422 | 67,042 |
| 1.2.3. | Rasio | 16.76 | | 17.04 | 17.40 | 17.75 | 18.10 |
| **2** | **Kesehatan** | | | | | | |
| 2.1. | Jumlah Rumah Sakit Pemerintah | 14 | | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 2.2. | Jumlah Rumah Sakit Umum | 12 | | 12 | 12 | 12 | 12 |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Realisasi | | | Proyeksi Capaian Kinerja | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| | (Pemerintah) | | | | | | |
| 2.3. | Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.4. | Perkembangan Persentase Keluarga Yang Memiliki Akses Terhadap air bersih | 86.49% | | 87.50% | 88% | 88.50% | 89.00% |
| 2.5. | Perkembangan Angka Kesakitan Malaria per 1000 penduduk Tahun | 0.09 | | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 2.6. | Perkembangan Prevelensi HIV | 31% | | 45% | 50% | 55% | 60% |
| 2.8. | Perkembangan Jumlah Puskesmas Tahun | 64 | | 64 | 64 | 64 | 64 |
| **3** | **Pekerjaan Umum** | | | | | | |
| 3.1. | Persentase Kesesuaian Rencana Tata Ruang dengan Pemanfaatan Ruang | 0.75 | | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 |
| 3.2. | Rasio Jaringan Irigasi | 0.28 | | 0.30 | 0.39 | 0.51 | 0.56 |
| 3.3. | Persentase Luas kawasan yang tertata | 7% | | 7% | 44% | 100% | 100% |
| 3.4. | Rasio ketersediaan penyelenggaraan jasa konstruksi | 0.294 | | 0.274 | 0.392 | 0.538 | 0.706 |
| 3.5. | Panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap | 90.13 | | 90.13 | 91.07 | 91.89 | 92.83 |
| **4** | **Perumahan** | | | | | | |
| 4.1. | Persentasi Pengembangan perumahan korban Bencana atau relokasi program provinsi | 25% | | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 4.2. | Persentase luasan kawasan kumuh yang tertangani | 6% | | 6% | 6% | 6% | 6% |
| 4.3. | Persentase Pemukiman yang terfasilitasi oleh PSU | 25% | | 25% | 25% | 25% | 24% |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Realisasi | | | Proyeksi Capaian Kinerja | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| 4.4. | Persentase jumlah bangunan gedung yang terselenggara | 24% | | 24% | 65% | 100% | 100% |
| **5** | **Ketentraman, Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat** | | | | | | |
| 5.1. | Jumlah Polisi Pamong Praja | 227 | | 237 | 247 | 247 | 257 |
| 5.2. | Jumlah Pos Siskamling | 1,132 | | 1,132 | 1,132 | 1,132 | 1,132 |
| 5.3. | Jumlah Desa | 393 | | 393 | 393 | 393 | 393 |
| 5.4. | Rasio Jumlah Pos Siskamling | 2.88 | | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 |
| 5.5. | persentase kasus konflik sara yg dapat diantisipasi | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.6. | persentase partisipasi pemilih | 82% | | 85% | 86% | 87% | 88% |
| 5.7. | Persentase jumlah konflik yang berlatar belakang ideologi | 75% | | 75% | 50% | 25% | 25% |
| 5.8. | Persentase pembinaan politik di daerah | 30% | | 30% | 30% | 20% | 20% |
| 5.9. | Indeks kinerja ormas | 50 | | 50 | 55 | 60 | 65 |
| 5.10. | Persentase pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya di daerah | 30% | | 30% | 30% | 20% | 20% |
| 5.11. | Persentase daerah terlibat konflik sosial | 75% | | 75% | 50% | 25% | 25% |
| **7** | **Sosial** | | | | | | |
| 7.1 | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | 375,125 | | 385,125 | 383,525 | 314,525 | 300 |
| 7.2. | Potensi dan SumberKesejahteraanSosial (PSKS) | 960 | | 950 | 935 | 920 | 910 |
| **8** | **Ketenagakerjaan** | | | | | | |
| 8.1. | Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | 65.88 | | 66.1 | 66.28 | 66.38 | 66.58 |
| 8.2. | Jumlah Angkatan Kerja (jiwa) | 738,62 | | 760,945 | 772,359 | 783,944 | 795,704 |
| **9** | **Pemberdayaan Perempuan** | | | | | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Realisasi | | | Proyeksi Capaian Kinerja | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| | **dan Perlindungan Anak** | | | | | | |
| 9.1. | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | 53.03 | | 53.37 | 54 | 54.33 | 54.67 |
| 9.2. | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | 88.92 | | 89.00 | 89.11 | 89.23 | 89.34 |
| 9.3 | Indeks Perlindungan Anak (IPA) | 65.82 | | 66.90 | 67.22 | 67.52 | 67.82 |
| 9.3. | Jumlah KDRT | 45 | | 40 | 39 | 38 | 37 |
| 9.4. | Jumlah Rumah Tangga | 413,526 | | 432,906 | 444,502 | 451,52 | 456,375 |
| 9.5. | Persentase Capaian Provinsi Layak Anak | 2 MADYA DAN 5 PRATAMA | | 2 MADYA DAN 5 PRATAMA | 3 MADYA DAN 4 PRATAMA | 3 MADYA DAN 4 PRATAMA | 4 MADYA DAN 3 PRATAMA |
| **10** | **Ketahanan Pangan** | | | | | | |
| 10.2. | Skor PPH konsumsi | 83.44 | | 83.65 | 83.75 | 83.89 | 83.95 |
| 10.3. | Prevalence of Undernourishment (PoU) | 6.90 | | 6.73 | 6.67 | 6.61 | 5.55 |
| 10.4. | Skor PPH Ketersediaan | 87.92 | | 88.15 | 88,38 | 88.56 | 88.72 |
| **11** | **Pertanahan** | | | | | | |
| 11.1. | Jumlah kasus tanah terselesaikan | 8 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11.2. | Penyelesaian kasus tanah Negara | 78.25 | | 78.84 | 79.3 | 79.75 | 80.24 |
| **12** | **Lingkungan Hidup** | | | | | | |
| 12.1. | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | 72.05 | | 75.43 | 75.84 | 76.7 | 77.5 |
| **13** | **Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil** | | | | | | |
| 13.1 | Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13.2 | Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) | 96.71 | | 99.2 | 99.4 | 99.6 | 99.8 |
| 13.3 | Persentase Kepemilikan akta | 97.01 | | 98 | 98.5 | 99 | 99.5 |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Realisasi | | | Proyeksi Capaian Kinerja | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| | kelahiran | | | | | | |
| 13.4 | Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) | 63.21 | | 60.5 | 70 | 70.5 | 80 |
| 13.5 | Persentase Cakupan Akta Kematian | 96.3 | | 80 | 80.5 | 90 | 95 |
| 13.6 | Persentase Cakupan Akta Perkawinan | 58.25 | | 80 | 85 | 90 | 95 |
| **14** | **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** | | | | | | |
| 14.1 | Kelompok LPM | 3286 | | 3286 | 3310 | 3345 | 3370 |
| 14.2 | Kelompok PKK | 7921 | | 7921 | 7945 | 7968 | 7995 |
| 14.5. | Jumlah Posyandu Aktif | 694 | | 694 | 698 | 75 | 7012 |
| **15.** | **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | | | | | | |
| 15.1 | Laju Pertumbuhan Penduduk | 1.84 | | 1.79 | 1.74 | 1.70 | 1.68 |
| 15.2. | persentase pembinaan kampung KB | 50% | | 50% | 63% | 72% | 84% |
| 15.2. | Indeks Pembangunan Keluarga | 56.03 | | 56.14 | 56.23 | 56.38 | 56.45 |
| 15.2. | Total Fertility Rate (TFR) | 2.49 | | 2.43 | 2.37 | 2.32 | 2.30 |
| 15.2. | Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (ASFR/15-19) | 29.00 | | 28.80 | 28.65 | 28.32 | 28.10 |
| 15.2. | Angka Prevalensi Kontrasepsi modern (M-CPR) | 66.90 | | 67.00 | 67.40 | 67.80 | 68.20 |
| 15.2. | Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet-Need) | 12.00 | | 11.12 | 10.45 | 9.54 | 8.90 |
| 15.2. | Persentase PA MKJP | 14.23% | | 14.58% | 14.83% | 15.37% | 15.68% |
| 15.2. | persentase pelayanan KB pasca persalinan | 72.74% | | 73.50% | 74.20% | 75.70% | 76.90% |
| **16** | **Perhubungan** | | | | | | |
| 16.1. | Jumlah kendaraan bermotor | 1,048,188 | | 1,087,500 | 1,098,540 | 1,115,450 | 1,135,250 |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Realisasi | | | Proyeksi Capaian Kinerja | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| 16.2. | Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | 38.24 | | 87.4 | 87.42 | 87.43 | 87.45 |
| 16.3. | Persentase Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan | 67 | | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 |
| **17** | **Komunikasi dan Informatika** | | | | | | |
| 17.1. | Persentase Jumlah Layanan Infrastruktur Teknologi dan Kapasitas Layanan Publik Pemerintah Berbasis e-Government | 90 | | 92 | 93 | 94 | 95 |
| **18** | **Koperasi Usaha Kecil dan Menengah** | | | | | | |
| 18.1 | Jumlah Koperasi Aktif | 708 | | 855 | 940 | 1034 | 1137 |
| 18.2. | Jumlah Koperasi | 1116 | | 1171 | 1200 | 1230 | 1260 |
| 18.3 | Persentase Koperasi Aktif | 63.44 | | 73.01 | 78.33 | 84.06 | 90.23 |
| **19** | **Penanaman Modal** | | | | | | |
| 19.1. | Jumlah Investor | 620 | | 630 | 645 | 655 | 668 |
| 19.2. | NilaiInvestasi (Trillin Rp) | 4,562.50 | | 4,710.25 | 4,875.30 | 4,910.25 | 4,987.50 |
| **20** | **Kepemudaan dan Olahraga** | | | | | | |
| 20.1. | Jumlah Organisasi Pemuda | 35 | | 10 | 14 | 21 | 28 |
| 20.2. | Pertumbuhan kewirausahaan pemuda | | | -0.032 | 0.021 | 0.032 | 0.024 |
| **21.** | **Statistik** | | | | | | |
| 21.1. | Buku daerah dalam angka | 8 | | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 21.2. | Buku PDRB prov/kabupaten/kota | 8 | | 8 | 8 | 8 | 8 |
| **22.** | **Kebudayaan** | | | | | | |
| 22.2. | Jumlah Kesenian Tradisional Yang Dibina | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 22.3. | Jumlah Museum Provinsi Yang Dikelola | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Realisasi | | | Proyeksi Capaian Kinerja | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| 22.4. | Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang Dikelola | 7 | | 7 | 5 | 5 | 5 |
| **23** | **Perpustakaan** | | | | | | |
| 23.1. | Jumlah Pengunjung | 4,85 | | 4,95 | 5 | 5,05 | 5,1 |
| 23.2. | Perpustakaan Milik Pemda | 1,415 | | 1,415 | 1,415 | 1,415 | 1,415 |
| 23.3. | Jumlah Koleksi Buku di Perpustakaan | 145 | | 147 | 148 | 149 | 150 |
| 23.4. | Persentase perpustakaan yang dibina | 42.5 | | 46.3 | 48.2 | 50.1 | 52 |
| **24** | **Kearsipan** | | | | | | |
| 24.1. | Laporan audit kearsipan Eksternal (LAKE) | 91% | | 92% | 93% | 94% | 95% |
| 24.2. | Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Kearsipan Sesuai Dengan Standard Baku Kearsipan | 20% | | 22% | 23% | 24% | 25% |
| | Fokus Layanan Urusan Pilihan | | | | | | |
| **25** | **Kelautan dan Perikanan** | | | | | | |
| 25.1. | Potensi perikanaan Tangkap | 282,1 | | 282,1 | 282,1 | 282,1 | 282,1 |
| 25.2. | Potensi perikanaan budidaya | Tawar;1692 Ha; Laut: 120.000 Ha; Payau: 250 Ha | | Tawar;1692 Ha; Laut: 120.000 Ha; Payau: 250 Ha | Tawar;1692 Ha; Laut: 120.000 Ha; Payau: 250 Ha | Tawar;1692 Ha; Laut: 120.000 Ha; Payau: 250 Ha | Tawar;1692 Ha; Laut: 120.000 Ha; Payau: 250 Ha |
| 25.3. | Produksi perikanaan tangkap | 225.282 Ton | | 226.300 ton | 229.300 ton | 232.400 ton | 235.650 ton |
| 25.4. | Produksi perikanaan budidaya | 9,512 | | 13,5 | 13,98 | 14,54 | 15,17 |
| 25.5. | Nilai Tukar Nelayan (NTN) | 111.24 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.6. | Angka Konsumsi Ikan (Kg/Org/Tahun) | 61.54 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.7. | Produksi olahan ikan (Ton) | 34,365 | | 22,41 | 22,81 | 23,31 | 23,91 |
| 25.8. | Jumlah Produksi Benih Ikan air Laut (Juta Ekor) | | | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| 25.9 | Luas kawasan konservasi yang dicadangkan (Ha) | 516,140.93 | | 516,140.93 | 523,513.43 | 534,871.13 | 627,612.90 |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Realisasi | | | Proyeksi Capaian Kinerja | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| **26** | **Pariwisata** | | | | | | |
| 26.1. | Jumlah Wisatawan Luar Negeri | 5,357 | | 5,357 | 5,497 | 5,638 | 5,779 |
| 26.2. | Jumlah Wisatawan DalamNegeri | 321,088 | | 321,088 | 329,52 | 337,953 | 346,385 |
| 26.3. | Jumlah Wisatawan | 326,445 | | 326,445 | 335,018 | 343,591 | 352,164 |
| 26.4. | Persentase pelaku ekonomi kreatif yang aktif | 23.53 | | 23.53 | 30.77 | 44.44 | 80.00 |
| 26.5. | Persentase SDM Pariwisata dan Ekraf yang Memiliki Kompetensi | 9.50% | | 9.50% | 10.00% | 9.60% | 9.70% |
| **27** | **Pertanian** | | | | | | |
| 27.1. | Produksi Padi | 70,50 | | 70,87 | 71,15 | 71,45 | 72,25 |
| 27.2. | Produksi Karet | 49.317 | | 49.451 | 49.465 | 49.635 | 49.678 |
| 27.3. | Produksi Lada | 27.166 | | 27.378 | 27.575 | 27.915 | 28.245 |
| 27.4. | Produksi sawit | 147330 | | 148500 | 149150 | 149850 | 150275 |
| 27.5. | Jumlah populasi sapi (ribu ekor) | 18.071 | | 18.369 | 19.845 | 20.155 | 21.875 |
| 27.6. | Jumlah populasi ayam (juta ekor) | 15,742 | | 15950 | 16075 | 16385 | 16850 |
| **28** | **Kehutanan** | | | | | | |
| 28.1. | Luas Hutan Produksi (Ha) | 432.882 | | 452,5 | 455,6 | 458,75 | 459,5 |
| 28.2. | Luas Hutan Lindung (Ha) | 189.965 | | 188,5 | 189,75 | 191,5 | 192,5 |
| 28.3. | Luas Hutan Konservasi (Ha) | 35.473 | | 35,85 | 35,975 | 36,245 | 36,415 |
| 28.4. | Luas Hutan Produksi Konversi (Ha) | 692,58 | | 715.50 | 735.45 | 756.25 | 775.64 |
| **29** | **Energi dan Sumber Daya Mineral** | | | | | | |
| 29.1. | Rasio Elektrifikasi | | | 99 | 99 | 100 | 100 |
| **30.** | **Perdagangan** | | | | | | |
| 30.1. | Ekspor ( us Dollar) | 2,672.05 | | 3,144.67 | 3,380.98 | 3,617.28 | 3,853.59 |
| 30.2. | Timah | 2,320.76 | | 2,530.45 | 2,720.60 | 2,910.75 | 3,100.91 |
| 30.3. | Non Timah | 351.29 | | 614.22 | 660.37 | 706.53 | 752.68 |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Realisasi | | | Proyeksi Capaian Kinerja | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| 30.4. | Impor ( us Dollar) | 34.22 | | 52.40 | 61.49 | 70.58 | 79.67 |
| 30.5. | Migas | 2.77 | | 23.80 | 27.92 | 32.05 | 36.18 |
| 30.6. | Non Migas | 31.45 | | 28.60 | 33.57 | 38.53 | 43.49 |
| **31** | **Perindustrian** | | | | | | |
| 31.1 | Jumlah Industri Kecil | 21609 | | 22043 | 22264 | 22486 | 22711 |
| 31.2 | Laju pertumbuhan | 6.64 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 31.3 | Industri Menengah | 127 | | 129 | 130 | 131 | 132 |
| 31.4 | Laju pertumbuhan | -9.29 | | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| **32** | **Transmigrasi** | | | | | | |
| 32.1 | Jumlah Kawasan transmigrasi | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 32.2 | jumlah KTM | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **III** | **ASPEK DAYA SAING DAERAH** | | | | | | |
| 1 | Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah | | | | | | |
| 1.1. | Total Pengeluaran RT | | | 785,326 | 808,576 | 831,826 | 855,076 |
| 1.4. | Indeks Yang Diterima Petani (lt) | 117.43 | | 117.5 | 118.25 | 119.45 | 120.35 |
| 1.5. | Indeks Yang Dibayar Petani (lb) | 112.23 | | 114.45 | 114.1 | 116.45 | 117.3 |
| 1.6. | Rasio | 1,05 | | 1,07 | 1,08 | 1,09 | 1,1 |
| 1.7. | Total Pengeluaran Konsumsi RT Non-Pangan | 730,723 | | 750,125 | 757,125 | 759,25 | 764,5 |
| 1.8. | Total pengeluaran | 1,501,844 | | 1515250 | 1535250 | 1545250 | 1555250 |
| 1.9. | Rasio | 0.490 | | 0.495 | 0.493 | 0.491 | 0.492 |
| 1.10. | Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN | 4.604 | | 5850 | 5945 | 6125 | 6325 |
| 1.11. | Jumlah seluruh PMA/PMDN | 2658 | | 850 | 875 | 912 | 944 |
| 1.12. | Rasio daya serap tenaga kerja | 1,73 | | 6.88 | 6.79 | 6.72 | 6.70 |
| **IV** | **Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur** | | | | | | |
| 1 | Panjang Jalan | 3. 967 | | 3,967 | 4,125 | 4,352 | 35,123 |
| 2 | Jumlah Kendaraan | 1.048.188 | | 1,058,188 | 1,065,000 | 1,074,250 | 1,081,245 |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Realisasi | | | Proyeksi Capaian Kinerja | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| 3 | Rasio | 0,0039 | | 0.0037 | 0.0039 | 0.0041 | 0.0325 |
| 4 | Jumlah Pelabuhan Udara | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Jumlah Pelabuhan Laut | 17 | | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 6 | Jumlah Terminal | 13 | | 13 | 13 | 13 | 13 |
| **V** | **Fokus Iklim Berinvestasi** | | | | | | |
| 1 | Angka Kriminalitas | 9.91 | | 9.41 | 9.34 | 9.26 | 9.19 |
| 2 | Jumlah Demo | 33 | | 31.2 | 32.9 | 33.6 | 40.10 |
| **VI.** | **Fokus Sumber Daya manusia** | | | | | | |
| 1 | Jumlah lulusan S1/S2/S3 | 74,394 | | 81,965 | 82,351 | 83,902 | 84,188 |
| 2 | Jumlah penduduk | 1,517,590 | | 1,584,444 | 1,603,410 | 1,622,342 | 1,647,319 |
| 3 | Rasio lulusan S1/S2/S3 (1/2) | 0.049 | | 0.052 | 0.051 | 0.052 | 0.051 |
| 4 | Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun | 363,044 | | 366,84 | 361,583 | 356,327 | 351,071 |
| 5 | Jumlah Penduduk Usia > 64 tahun | 72,643 | | 83,246 | 88,233 | 93,22 | 98,207 |
| 6 | Jumlah Penduduk Usia tidak Produktif (1)&(2) | 435,687 | | 450,085 | 449,816 | 449,547 | 449,278 |
| 7 | Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun | 1,019,991 | | 1,069,798 | 1,087,323 | 1,104,848 | 1,122,373 |
| 8 | Rasio Ketergantungan (3)/(4) | 49.7 | | 51.32 | 52.67 | 54.02 | 55.38.00 |

*Sumber : RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026*

**Tabel VII.4**
Sasaran Pokok Provinsi dan Kabupaten/Kota
Tahun 2023-2026

| SASARAN POKOK | INDIKATOR | KONDISI AWAL 2021 | TARGET | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| Kesejahteraan Rakyat | 1. Kemiskinan (%) | | | | | | |
| | Kepulauan Bangka Belitung | 4,67 | 4,40 | 4,60 | 4,52 | 4,41 | 4,33 |
| | Pangkalpinang | 4,76 | 4,66 | 4,56 | 4,46 | 4,36 | 4,26 |
| | Bangka | 4,81 | 4,71 | 4,61 | 4,51 | 4,41 | 4,31 |
| | Bangka Tengah | 5,13 | 5,03 | 4,93 | 4,83 | 4,73 | 4,63 |
| | Bangka Barat | 2,75 | 2,65 | 2,55 | 2,45 | 2,35 | 2,25 |
| | Bangka Selatan | 3,69 | 3,59 | 3,49 | 3,39 | 3,29 | 3,19 |
| | Belitung | 7,15 | 7,05 | 6,95 | 6,85 | 6,75 | 6,65 |
| | Belitung Timur | 7,20 | 7,10 | 7,00 | 6,90 | 6,80 | 6,70 |
| | | | | | | | |
| | 2. Pengangguran (%) | | | | | | |
| | Kepulauan Bangka Belitung | 5,03 | 4,45 | 3,85 | 3,19 | 2,49 | 1,64 |
| | Pangkalpinang | 6,81 | 6,71 | 6,61 | 6,51 | 6,41 | 6,31 |
| | Bangka | 5,97 | 5,87 | 5,77 | 5,67 | 5,57 | 5,47 |
| | Bangka Tengah | 4,95 | 4,85 | 4,75 | 4,65 | 4,55 | 4,45 |
| | Bangka Barat | 3,83 | 3,73 | 3,63 | 3,53 | 3,43 | 3,33 |
| | Bangka Selatan | 5,29 | 5,19 | 5,09 | 4,99 | 4,89 | 4,79 |
| | Belitung | 3,51 | 3,41 | 3,31 | 3,21 | 3,11 | 3,01 |
| | Belitung Timur | 3,78 | 3,68 | 3,58 | 3,48 | 3,38 | 3,28 |
| | | | | | | | |
| Meningkatnya ekonomi daerah | 3. Pertumbuhan PDRB (%) | | | | | | |
| | Kepulauan Bangka Belitung | 5,05 | 4,25 | 4,28 | 4,39 | 4,46 | 4,78 |
| | Pangkalpinang | 7,15 | 7,30 | 7,45 | 7,60 | 7,75 | 7,90 |
| | Bangka | 6,02 | 6,17 | 6,32 | 6,47 | 6,62 | 6,77 |
| | Bangka Tengah | 2,87 | 3,02 | 3,17 | 3,32 | 3,47 | 3,62 |
| | Bangka Barat | -1,08 | 1,00 | 1,15 | 1,30 | 1,45 | 1,60 |

| SASARAN POKOK | INDIKATOR | KONDISI AWAL 2021 | TARGET | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| | Bangka Selatan | 2,45 | 2,60 | 2,75 | 2,90 | 3,05 | 3,20 |
| | Belitung | 4,29 | 4,40 | 4,59 | 4,74 | 4,89 | 5,04 |
| | Belitung Timur | 3,01 | 3,16 | 3,31 | 3,46 | 3,61 | 3,76 |
| | 4. Inflasi (%) | | | | | | |
| | Kepulauan Bangka Belitung | 3,75 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | Pangkalpinang | 3,60 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | Tanjung Pandan | 4,01 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM | 5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | DITAMBAH 0,25 | | | | | |
| | Kepulauan Bangka Belitung | 71,69 | | 71,91 | 72,13 | 72,35 | 72,57 |
| | Pangkalpinang | 78,57 | 78,82 | 79,07 | 79,32 | 79,57 | 79,82 |
| | Bangka | 72,46 | 72,71 | 72,96 | 73,21 | 73,46 | 73,71 |
| | Bangka Tengah | 70,89 | 71,14 | 71,39 | 71,64 | 71,89 | 72,14 |
| | Bangka Barat | 69,6 | 69,85 | 70,10 | 70,35 | 7,60 | 70,85 |
| | Bangka Selatan | 67,06 | 67,31 | 67,56 | 67,81 | 68,06 | 68,31 |
| | Belitung | 72,57 | 72,85 | 73,07 | 73,32 | 73,57 | 73,82 |
| | Belitung Timur | 71,42 | 71,67 | 71,92 | 72,17 | 72,42 | 72,67 |

Sasaran pokok yang akan dicapai Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam rincian tabel diatas adalah penjabaran atas tujuan dan sasaran yang tercantum RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 20232-2026. Dikarenakan sasaran pokok dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah lebih merujuk pada dokumen RPJPD.

# BAB VIII
# PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 merupakan Dokumen Perencanaan tahunan dengan prioritas pembangunan terarah dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 Tahap III dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 Tahap I. Disamping itu prioritas pembangunan daerah secara prinsip tetap mengacu pada sasaran-sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034, memperhatikan Program Pembangunan Nasional 9 Agenda Nawa Cita, serta percepatan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan kesepakatan-kesepakatan pembangunan SDG's Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat arah kebijakan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan. Oleh karena itu, untuk implementasinya diperlukan koordinasi antar instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan partisipasi masyarakat serta seluruh pelaku pembangunan (*stakeholder*) melalui Forum Gabungan Perangkat Daerah serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi dan penyelarasan rencana program dan kegiatan yang telah ditentukan.

Dokumen RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 ini dimaksudkan sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dan juga sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan, sekaligus mendorong masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya, serta dijadikan pedoman dalam rangka melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dimaksud. Keberhasilan dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional, diantaranya sangat tergantung dengan sinergitas kebijakan antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pemerintah pusat. Sinkronisasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing yang diorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan dengan prinsip *money follow program.* Dengan demikian usulan kegiatan yang diajukan telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga selain kerangka pendanaannya diusulkan ke APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun ke Pemerintah Pusat melalui APBN baik dalam bentuk usulan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Dalam kerangka pendanaan program dan kegiatan melalui APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maka Dokumen RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun 2024 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Keberhasilan pembangunan di Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung selain dilaksanakan jajaran Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota juga ditentukan oleh dukungan masyarakat untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan yang ada. Adapun Kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024, tidak hanya memuat kegiatan–kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
2. Perangkat Daerah dan seluruh *stakeholders* pembangunan termasuk masyarakat luas, dunia usaha, berkewajiban dan berperan serta untuk melaksanakan program–program RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya.
3. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maupun dari APBN, maka setiap Perangkat Daerah perlu membuat Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024 sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dengan mempedomani RKPD ini.
4. Pelaksanaan Forum SKPD serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat serta merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan.
5. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Penelitian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan menganalisa terhadap penjabaran dan sinergisitas RKPD tahun 2024 ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja–PD) dan Kebijakan Umum APBD 2024 serta Prioritas dan Pagu Indikatif PD Tahun 2024.

Pangkalpinang, 26 Juni 2023

**Pj. GUBERNUR**
**KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

**SUGANDA PANDAPOTAN PASARIBU**

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
Kompleks Pusat Perkantoran dan Perumahan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jl. Pulau Belitung No. 2,Kel. Air Itam, Telp. (0717) 439333-439336 Fax: (0717) 439335
PANGKALPINANG 33149

